brksyariah
berkah untuk semua

bpd
bersama membangun Indonesia

DARI BRK SYARIAH UNTUK INDONESIA YANG BERKAH:

Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah

FROM BRK SYARIAH FOR A BLESSED INDONESIA:

Change of Business Activities to become a Sharia Commercial Bank

LAPORAN TAHUNAN 2022
ANNUAL REPORT
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

DARI BRK SYARIAH UNTUK INDONESIA YANG BERKAH:

Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah

FROM BRK SYARIAH FOR A BLESSED INDONESIA: Change of Business Activities to become a Sharia Commercial Bank

Kehadiran kami adalah amanat dari seluruh pemegang saham juga segenap masyarakat Provinsi Riau dan Kepulauan Riau guna menyokong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau serta memberikan solusi layanan keuangan berbasis syariah. Dengan prinsip syariah berbagi hasil, BRK Syariah meyakini dapat memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat maupun Bank, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan persaudaraan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Adalah keunggulan kami setelah menjadi Bank Umum Syariah.

Our presence is a mandate from all shareholders and the entire community in Riau and the Riau Islands province to support the regional economic growth in the Riau province region and provide sharia-based financial services solutions. With the sharia principle of profit-sharing, BRK Syariah believes that it can provide an alternative banking system that benefits both society and the bank, by promoting values of justice, togetherness, and brotherhood in transactions, ethical investments, and avoiding speculative activities in financial transactions. This has become our advantage after becoming a Sharia Commercial Bank.

Resmi melakukan konversi menjadi BRK Syariah, kami terus melakukan pengembangan usaha dan menjajaki berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah. Komitmen pemegang saham dan segenap masyarakat Provinsi Riau dan Kepulauan Riau terhadap BRK Syariah menjadi modal utama kami dalam melangkah ke depan. Didukung jaringan kantor Bank sebanyak 175 kantor di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Jakarta, kami akan terus meningkatkan digitalisasi layanan Bank agar sejajar dengan Bank syariah nasional lain. Termasuk juga pengembangan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Insani yang unggul guna menciptakan inovasi produk dan layanan baru yang mampu memenuhi harapan Nasabah. Literasi keuangan syariah pun akan terus diperluas. PULIH DAN TANGGUH BERSAMA EKONOMI SYARIAH kiranya menjadi keunggulan kami bahwa ekonomi syariah dapat menopang dan berkontribusi bagi perekonomian bangsa.

Having officially converted to BRK Syariah, we continue to develop our business and explore various potential programs to expand our share in the sharia market. The commitment of our shareholders and the entire community of Riau Kepri Province to BRK Syariah is our main capital as we move forward. Supported by a network of 175 Bank offices in Riau Kepri and Jakarta, we will continue to improve the digitalization of Bank services to be on par with other national syariah banks. This includes the development of the competency and capability of our human resources to create innovative new products and services that can meet the expectations of our customers. We will also continue to expand sharia financial literacy. OUR STRENGTH LIES IN THE FACT THAT THE SHARIA ECONOMY can support and contribute to the nation's economy, as we recover and become resilient together.

Indonesia *Banking Summit* 2022 dan Bank Syariah Terbaik Kategori BPD merupakan pengakuan dan bukti kepercayaan pihak eksternal atas kinerja kami. Dengan memberi akses yang semakin luas bagi pelaku bisnis, utamanya industri keuangan syariah dan ekosistem industri halal, BRK Syariah optimis dapat menciptakan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Dari BRK Syariah memberikan maslahat untuk Indonesia yang berkah.

The Indonesia Banking Summit 2022 and the Best Sharia Bank in the Regional Development Bank category are acknowledgments and evidence of external trust in our performance. By providing increasingly broad access for businesses, particularly in the sharia financial industry and the halal industry ecosystem, BRK Syariah is confident that we can create sustainable performance growth. From BRK Syariah, we aim to provide blessings for Indonesia.

2022

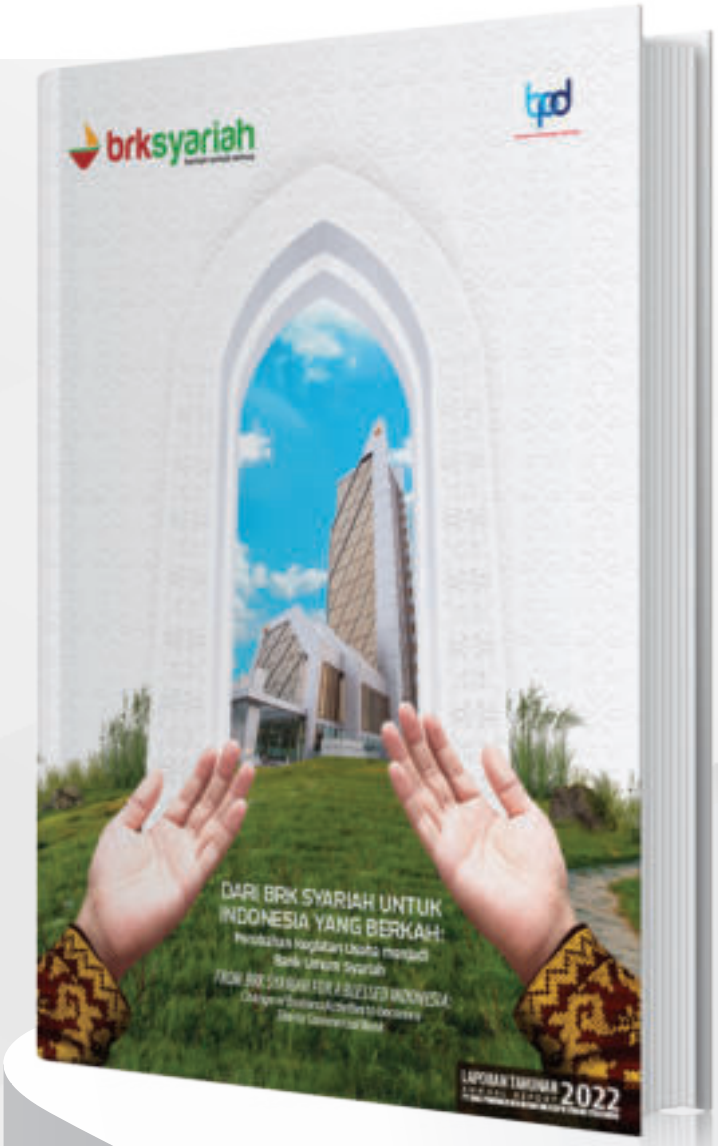

DARI BRK SYARIAH UNTUK INDONESIA YANG BERKAH:
Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah

FROM BRK SYARIAH FOR A BLESSED INDONESIA:
Change of Business Activities to become A Sharia Commercial Bank

Resmi melakukan konversi menjadi BRK Syariah, kami terus melakukan pengembangan usaha. Dengan akses yang kian luas, pesatnya perkembangan industri keuangan syariah dan ekosistem industri halal, BRK Syariah optimis dapat menciptakan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Dari BRK Syariah memberikan maslahat untuk Indonesia yang berkah.

Having officially converted to BRK Syariah, we continue to develop our business. With increasingly broad access and the rapid growth of the sharia financial industry and the halal industry ecosystem, BRK Syariah is optimistic that we can create sustainable performance growth. From BRK Syariah, we aim to provide blessings for Indonesia.

2021

IMPLEMENTASI KONVERSI SYARIAH MENUJU KEBERKAHAN UNTUK INDONESIA

Implementation of Sharia Conversion Towards a Blessed Indonesia

Sebagai institusi perbankan, Bank Riau Kepri mengarahkan layar mengikuti angin, menuju keberkahan sistem syariah yang terus berkembang dan berjalan.

As a banking institution, Bank Riau Kepri is directing its sails to follow the wind towards the blessings of the continually growing and evolving sharia system.

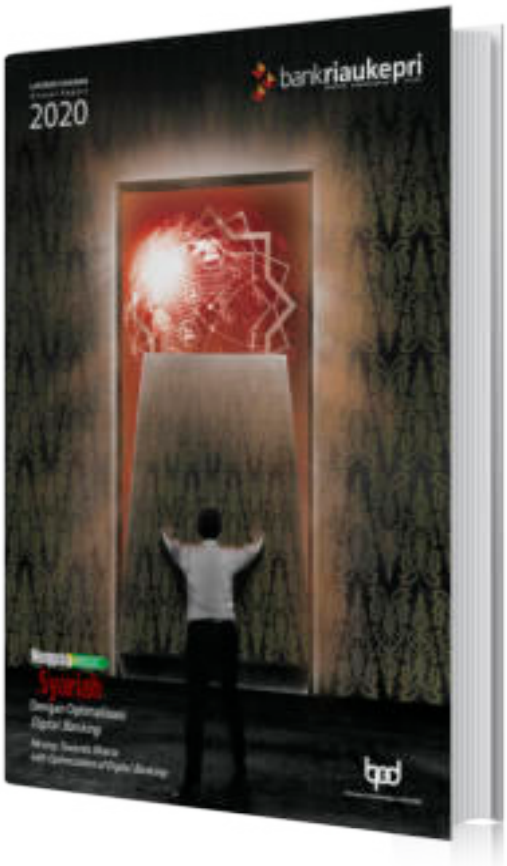

2020

MENGGESA MENUJU SYARIAH DENGAN OPTIMALISASI DIGITAL BANKING

Moving Towards Sharia with Optimization of Digital Banking

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 22 April 2019 memutuskan Bank Riau Kepri akan dikonversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Oleh karena itu, Bank telah membentuk Tim *Project Management Office* Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Konversi ini telah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah setempat. Untuk mendukung kesiapan konversi menjadi bank syariah, pada tahun 2020 Bank telah menetapkan strategi "Optimalisasi layanan melalui digitalisasi transaksi, persiapan Konversi Bank Umum Syariah, dan implementasi keuangan yang berkelanjutan".

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on April 22, 2019, decided that Bank Riau Kepri would be converted from a Conventional Commercial Bank (CCB) to a Sharia Commercial Bank (SCB). Therefore, the Bank has formed a Project Management Team for the Conversion of Bank Riau Kepri into BRK Syariah. This conversion has received full support from the local government. To support the readiness for the conversion into a sharia bank, in 2020, the Bank has set a strategy of "Optimizing services through transaction digitalization, preparing for the conversion into a Sharia Commercial Bank, and implementing sustainable finance."

DAFTAR ISI
Table of Content

Pendahuluan *Introduction*	**1**
DARI BRK SYARIAH UNTUK INDONESIA YANG BERKAH: Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah *FROM BRK SYARIAH FOR A BLESSED INDONESIA: Change of Business Activities to Become A Sharia Commercial Bank*	1
Kesinambungan Tema *Theme Continuity*	2
Daftar Isi *Table Of Contents*	4
Kinerja Utama Tahun 2022 *Main Performance in 2022*	8
Pencapaian Kinerja Penting 2022 *Key Performance Achievements 2022*	10
Ikhtisar Data Keuangan Penting *Key Financial Data Overview*	12
• Laporan Posisi Keuangan • *Statement Of Financial Position*	12
• Laporan Laba/ Rugi dan Penghasilan Komprehensif • *Profit/ Loss and Income Statements Comprehensive*	13
• Laporan Arus Kas, dan Keuangan Rasio • *Statement Of Cash Flow, And Financial Ratio*	15
• Informasi Harga Saham • *Share Price Information*	16
• Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) • *Action of Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Shares*	16
• Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi • *Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds*	16
• Informasi Sumber Pendanaan Lainnya • *Information on Other Sources of Funding*	16
Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2022 *2022 Awards and Certifications*	17
Peristiwa Penting Tahun 2022 *Significant Events of 2022*	22
Laporan Manajemen *Management Report*	**36**
Laporan Dewan Komisaris *Board of Commissioner Report*	38
Laporan Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board Report*	52
Laporan Direksi *Board of Director Report*	60
Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) *Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2022 Annual Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*	75
Proses Konversi *Conversion Process*	**76**
Proses & Tahapan Konversi Menuju Bank Umum Syariah Tahun 2019-2022 *Process & Stages of Conversion to Sharia Commercial Bank 2019-2022*	79
Dokumentasi Aktivitas Tim *Project Management Office* (PMO) *Documentation Of Project Management Office Team Activities (PMO)*	136
Profil Perusahaan *Company Profile*	**162**
Identitas Perusahaan *Corporate identity*	165
Riwayat Singkat Perusahaan *A Brief History of the Company*	166
Transformasi *Brand* Perusahaan *Corporate Brand Transformation*	169
Bidang Usaha *Business fields*	171
Produk dan Jasa *Products and Services*	172
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan *Vision, Mission and Corporate Culture*	194
• Visi • *Vision*	194
• Misi • *Mission*	194

• *Review* Visi dan Misi oleh Direksi dan Dewan Komisaris • *Vision and Mission Review by The Board of Directors and Board of Commissioners*	195
• Nilai dan Budaya Perusahaan • *Corporate Values and Culture*	196
Struktur Organisasi *Organizational structure*	198
Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris *Identity and Brief History of the Board of Commissioners*	201
Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Pengawas Syariah *Identity and Brief History of the Sharia Supervisory Board*	204
Identitas dan Riwayat Singkat Direksi *Identity and Brief History of the Board of Directors*	206
Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi *Profile of Officers One Level Below the Board of Directors*	213
Statistik dan Pengembangan Kompetensi Pegawai *Employee Statistics and Competency Development*	223
• Statistik Pegawai • *Employee Statistics*	223
• Pengembangan Kompetensi Pegawai • *Employee Competency Development*	224
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham *Structure and Composition of Shareholders*	228
• Komposisi Pemegang Saham Per Posisi 31 Desember 2022 • *Composition of Shareholders as of December 31, 2022 Position*	229
• Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih • *Shareholder Composition of 5% or More*	229
• Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% • *Community Shareholder Group Composition Less than 5%*	229
• Kepemilikan Saham BRK Syariah oleh Dewan Komisaris dan Direksi • *Sharia BRK Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors*	229
• Kepemilikan Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Institusi Lokal, Institusi Asing, Individu Lokal, dan Individu Asing • *Shareholder Ownership Based on Classification of Local Institutions, Foreign Institutions, Local Individuals, and Foreign Individuals*	229
Struktur Grup Perusahaan *Company Group Structure*	230
Entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi, *Joint Ventura Company* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV) *Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture Company and Special Purpose Vehicle (SPV)*	230
Kronologis Pencatatan Saham *Share Listing Chronology*	230
Kronologi Penerbitan Obligasi dan/atau Pencatatan Obligasi serta Efek Lainnya *Chronology of Issuance of Bonds and/or Listing of Bonds and Other Securities*	231
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan *Name and Address of Company Supporting Institutions and/or Professionals*	232
Nama dan Alamat Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan *Name and Address of Branch Office or Representative Office*	233
Peta Wilayah Operasional *Operational Area Map*	239
Informasi *Website* Perusahaan *Company Website Information*	240
Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri yang Berkaitan Dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan *List of Industrial Association Memberships Related to the Implementation of Sustainable Finance*	241
Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan *Management Discussion and Analysis of Company Performance*	**242**
Tinjauan Perekonomian dan Industri *Economic and Industrial Review*	244
Strategi Pengembangan Bisnis *Business Development Strategy*	254
Aspek Pemasaran *Marketing Aspect*	262
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha *Operational Review per Business Segment*	265
Tinjauan Kinerja Keuangan *Financial Performance Review*	267
• Laporan Posisi Keuangan • *Statement of Financial Position*	267
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain • *Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income*	284
• Laporan Arus Kas • *Cash flow statement*	288
Akselerasi Pertumbuhan *Fee Based Income* *Fee Based Income Growth Acceleration*	291
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang *Ability to Pay Debt and Collectability of Receivables*	293
Tingkat Kesehatan Perusahaan *Company Soundness Level*	295
Pencapaian Target 2022 dan Target ke Depan *Achievement of 2022 Targets and Future Targets*	296
Kebijakan, Pengumuman, dan Pembayaran Dividen *Dividend Policy, Announcement and Payment*	302
Aspek Perpajakan *Tax Aspect*	303
Struktur Permodalan *Capital Structure*	304
Manajemen Risiko *Risk Management*	306

Komitmen dan Kontinjensi *Commitments and Contingencies*	350
Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal *Material Commitments Related to Capital Goods Investment*	351
Investasi Barang Modal *Capital Goods Investment*	351
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal *Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring*	352
Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) *Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)*	353
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum *Realization of Use of Proceeds from Public Offering*	353
Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Perusahaan *Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company*	353
Larangan, Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha *Prohibitions, Limitations, and/or Significant Barriers to Provision of Funds Between Banks and Other Entities In A Business Group*	354
Informasi Kelangsungan Usaha *Business Continuity Information*	354
Prospek Usaha dan Strategi ke Depan *Business Prospects and Strategies for The Future*	356
Laporan Distribusi Bagi Hasil *Profit Sharing Distribution Report*	360
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf *Report on the Sources and Distribution of Zakat and Wakaf Funds*	361
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan *Report on the Source and Use of Benevolent Funds*	362
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi *Information on Material Transactions That Contain Conflict of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties*	363
Perjanjian dan Perikatan *Significan Agreements*	366
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan *Event After The End of Reporting Period*	367
Perubahan Kebijakan Perundang Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank *Changes in Legislation and its Impact on Bank Performance*	367
Tinjauan Pendukung Bisnis *Business Support Overview*	**368**
Sumber Daya Insani *Human Resources*	370
Teknologi Informasi *Information Technology*	384
Tata Kelola Perusahaan *Business Support Overview*	**388**
Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan *Commitment to Implementation of Sustainable Governance*	391
• Dasar Penerapan Tata Kelola • *Basic Implementation of Governance*	391
• Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola • *Objectives and Principles of Governance Implementation*	391
• Pencapaian Penting Tata Kelola 2022 • *Key Governance Achievements for 2022*	393
Roadmap Tata Kelola Bank *Bank Governance Roadmap*	393
Implementasi Tata Kelola Bank 2022 *Implementation of Bank Governance 2022*	394
Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* Bank *Assessment of Good Corporate Governance Bank Implementation*	395
Struktur Tata Kelola Bank *Bank Governance Structure*	406
• Struktur Organ Perusahaan • *Company Organ Structure*	406
• *Governance Soft Structure* • *Governance Soft Structure*	407
• Mekanisme Tata Kelola Perusahaan • *Corporate Governance Mechanism*	408
Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*	422
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	428
Direksi *Directors*	474
Sekretaris Perusahaan *Company Secretary*	501
Komite di Bawah Direksi *Committee Under the Board of Directors*	506
• Komite SHALMA (*Sharia Asset and Liability Management*) • *SHALMA Committee (Sharia Asset and Liability Management*	507
• Komite Manajemen Risiko • *Risk Management Committee*	508
• Komite Kebijakan Pembiayaan • *Financing Policy Committee*	510
• Komite Sumber Daya Insani • *Human Resources Committee*	512
• Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI) • *Information Technology (IT) Steering Committee*	513
• Komite Pembiayaan • *Financing Committee*	515
Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham *Affiliation Relations between Members of the Board of Commissioners, Directors and Shareholders*	517
Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi *Frequency and Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings*	519
Tata Kelola Remunerasi Bank *Bank Remuneration Governance*	522
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi *Diversity Policy for the Board of Commissioners and Directors*	526
Tata Kelola Unit Usaha Syariah *Sharia Business Unit Governance*	528

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa *Implementation Of Sharia Principles In Fund Raising Activities And Distribution Of Funds And Services*	529
Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya *Non-Halal Income and Its Use*	529
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial *Funding For Social Activities*	530
Fungsi Audit Internal *Funding For Social Activities*	531
Sistem Pengendalian Internal *Internal Control System*	545
Fungsi Kepatuhan *Compliance Function*	551
Manajemen Risiko *Risk management*	561
Auditor Eksternal *External Auditors*	587
Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) *Company Code of Ethics (Code of Conduct)*	590
Perkara Penting *Important Matters*	598
Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) *Whistleblowing System*	599
Pengendalian Gratifikasi *Gratification Control*	603
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) *Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN)*	604
Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) *Anti Money Laundering (APU) and Preventing The Financing of Terrorism (PPT) Programs*	606
Kebijakan Anti Korupsi *Anti-Corruption Policy*	614
Rencana Strategis Bank *Bank Strategic Plan*	615
Akses Informasi dan Data Perusahaan *Access to Company Information and Data*	616
Investor Relation *Investor Relations*	618
Informasi Penting Lainnya *Other Important Information*	618
Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi *Stock Buyback and Bond Buyback*	618
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar *Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds*	619
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian *Number of Internal Fraud and Settlement Efforts*	619
Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) *Prevention of Insider Trading (Insider Trading)*	620
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan *Transactions Containing Conflicts of Interest*	621
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan *Transparency of Financial and Non-Financial Conditions*	623
Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik *Provision of Funds for Social and/or Political Activities*	624
Sanksi Administrasi Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya *Administrative Sanctions of the Capital Market Authority and Other Authorities*	624
Pernyataan Tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance* *Statement of Not Doing Bad Corporate Governance Practices*	625
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan *Business Support Overview*	626
Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *Commitment and Policy on Social and Environmental Responsibility*	629
Dasar Penerapan CSR *Basis of CSR Implementation*	630
Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR *Policy Basis for Implementing CSR*	631
Metoda dan Lingkup *Due Diligent* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan *Due Diligent Methods and Scope on Social, Economic and Environmental Impacts of Corporate Activities*	632
Struktur Pengelola CSR *CSR Management Structure*	635
Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi Anggaran CSR *Sources of Funding, Budget, and Realization of CSR Budget*	636
Pelaksanaan Program *Program Implementation*	637
Laporan Keuangan Tahunan *Audited* 2022 *Audited Annual Financial Report 2022*	**644**
Laporan Keuangan *Audited* BRK Syariah (22 Agustus 2022 - 31 Desember 2022) *Audited Financial Statements of BRK Syariah (August 22, 2022 - December 31, 2022)*	646
Laporan Keuangan *Audited* PT. BPD Riau Kepri (1 Januari 2022 - 21 Agustus 2022) *Audited Financial Statements of PT. BPD Riau Kepri (January 1, 2022 - August 21, 2022)*	804
Referensi OJK *OJK Reference*	**1008**

KINERJA UTAMA TAHUN 2022
Key Performance in 2022

KEUNGGULAN DAN KINERJA KAMI
Our Excellence and Performance

1

Kualitas dan Komitmen SDM yang Tangguh Hadapi Pandemi *Covid-19*

Quality and Commitment of HR that are Resilient in Facing the Covid-19 Pandemic

2

Menjadi Bank Daerah Terbaik di Indonesia

Becoming the Best Regional Bank in Indonesia

3

Digitalisasi Bank

Bank Digitization

4

Menjadi Bank Syariah sebagai Amanah Pemegang Saham

Becoming a Sharia Bank as a Shareholder's Trust

5

Dukungan Masyarakat menjadi Bank Syariah

Community Support for becoming a Sharia Bank

6

***Awareness* terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) cukup tinggi.**

Awareness towards Sharia Business Unit (UUS) is quite high.

7

Bank menjadi *Top of Mind* nasabah untuk kategori Bank Syariah dan Bank utama yang digunakan Nasabah.

The Bank becomes the customer's Top of Mind for the sharia Bank category and the main Bank Customers.

8

Bank mempunyai banyak jenis produk perbankan untuk bisa dijual kepada Nasabah maupun non Nasabah.

The bank has many types of banking products that can be sold to Customers and non-Customers.

9

Aspek permodalan Bank menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang stabil setiap tahun.

The Bank's capital aspect shows a positive trend with a steady increase every year.

10

Pelayanan

- ***E-Learning Test* bagi *Frontliner***
- **Live dan *Online Role Play***
- ***Coaching Clinic* bagi *Frontliner* dan *Leader***
- **Video Standar Layanan Syariah**
- **Duta Layanan BRK Syariah**
- ***Service* dan *Culture Fair* Setiap Tahun**

Service

- *E-Learning Test for Frontliners*
- *Live and Online Role Play*
- *Coaching Clinic for Frontliners and Leaders*
- *Video of Sharia Service Standards*
- *BRK Syariah Service Ambassador*
- *Service and Culture Fair Every Year*

PENCAPAIAN KINERJA PENTING 2022
Key Performance Achievements 2022

Jumlah Aset (Rp Triliun)
Total Assets (IDR Trillion)

2022
Rp31,38 triliun

2021
Rp30,78 triliun

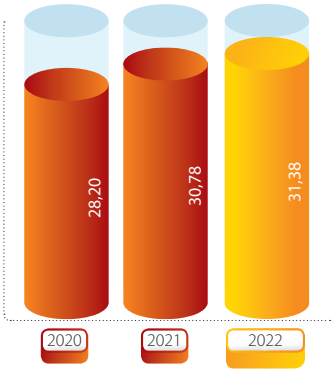

Naik
Increase
1,96%

Ekuitas (Rp Triliun)
Equity (IDR Trillion)

2022
Rp3,35 triliun

2021
Rp3,19 triliun

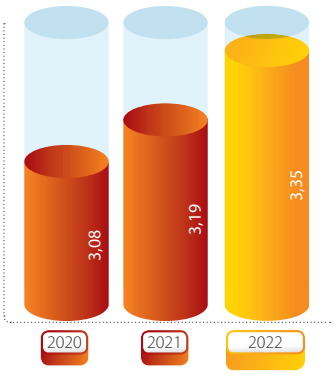

Naik
Increase
5,17%

Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)
Third Party Funds (IDR Trillion)

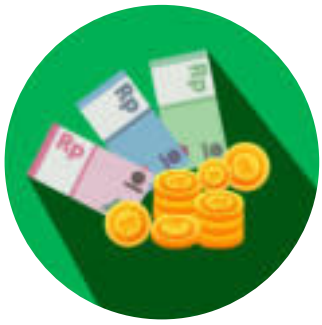

2022
Rp26,97 triliun

2021
Rp25,62 triliun

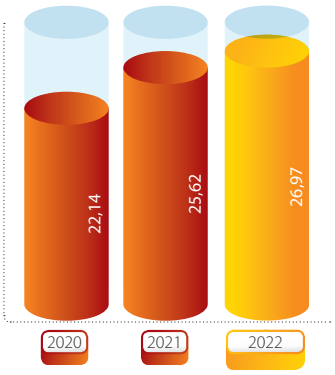

Naik
Increase
5,29%

Pembiayaan (Rp Triliun)
Financing (Rp Trillion)

Naik
Increase
3,79%

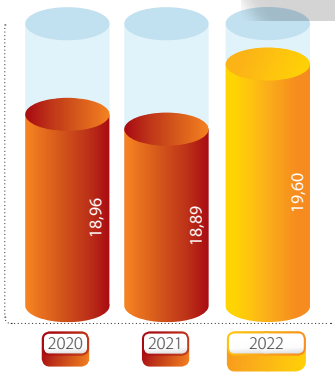

2022
Rp19,60 triliun

2021
Rp18,89 triliun

Laba sebelum Pajak (Rp Miliar)
Profit Before Tax (Rp Billion)

Turun
Decrease
2,24%

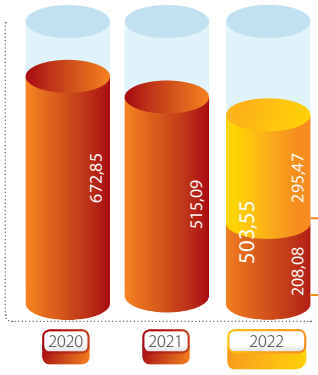

2022
Rp503,55 miliar

2021
Rp515,09 miliar

- BUS dalam periode 22 Agustus s.d 31 Desember 2022
- BUK dalam periode 1 Januari s.d 21 Agustus 2022

NPF (*Gross*) dalam %
NPF (Gross) in %

Turun
(Membaik)
Decrease
(Better)
8,86%

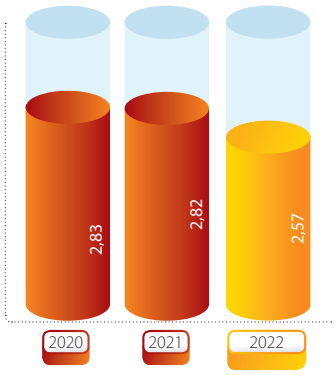

2022
2,57 %

2021
2,82 %

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

LAPORAN POSISI KEUANGAN *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*

dalam jutaan (Rupiah) | *in millions (Rupiah)*

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018	*Explanation*
LAPORAN POSISI KEUANGAN | *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*						
ASET| *ASSET*						
Kas	1.461.888	719.394	914.232	769.963	663.131	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	3.480.743	2.042.746	1.496.657	1.692.218	1.328.102	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	206.400	88.760	121.446	73.993	63.944	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.195.000	3.334.381	616.985	1.058.797	2.673.920	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat Berharga	5.029.940	5.237.487	5.683.982	3.777.522	5.745.951	*Securities*
Piutang	16.588.848	-	-	-	-	*Accounts receivable*
Piutang *Murabahah*	16.588.735	-	-	-	-	*Murabaha Receivables*
Piutang *Ijarah*	113	-	-	-	-	*Ijarah Receivables*
Pinjaman *Qardh*	54.598	-	-	-	-	*Qardh loan*
Pembiayaan bagi hasil	2.545.670	-	-	-	-	*Profit sharing financing*
Mudharabah	23.720	-	-	-	-	*Mudharabah*
Musyarakah	2.521.950	-	-	-	-	*Musyarakah*
Pembiayaan sewa (Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*)	411.782	-	-	-	-	*Lease financing (Acquired Assets for Ijarah)*
Jumlah Pembiayaan / Kredit yang diberikan	19.600.897	18.884.914	18.960.949	17.884.069	16.632.633	*Amount of Financing / Credit provided*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(453.235)	(496.610)	(527.308)	(488.448)	(464.181)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pembiayaan / Kredit yang diberikan - Bersih	19.147.661	18.388.304	18.433.641	17.395.620	16.168.453	*Total Financing / Credit provided - Net*
Penyertaan saham	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	*Share investment*
Aset tetap	394.095	396.932	425.165	435.268	442.798	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	75.453	32.099	33.215	27.964	62.947	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	389.620	538.027	473.088	219.212	263.471	*Other assets*
Jumlah Aset	**31.382.356**	**30.779.686**	**28.199.966**	**25.452.114**	**27.414.272**	***Total assets***
LIABILITAS | *LIABILITIES*						
Dana simpanan *wadiah*	1.248.831	-	-	-	-	*Wadiah savings fund*
Giro	107.343	-	-	-	-	*Giro*
Tabungan	1.141.488	-	-	-	-	*Savings*
Liabilitas segera	607.981	667.015	769.525	504.651	388.901	*Immediate liability*
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	17.361	-	-	-	-	*Undistributed Profit Sharing*
Simpanan dari nasabah*)	-	25.615.733	22.142.644	19.937.052	16.964.255	*Deposits from customers*)*
Giro	-	5.607.380	3.453.032	3.704.032	2.883.255	*Giro*
Tabungan	-	7.449.293	6.352.385	6.052.374	5.518.607	*Savings*
Deposito berjangka	-	12.559.060	12.337.227	10.180.645	8.562.393	*Time deposit*
Simpanan dari bank lain	93.275	1.040.800	1.958.768	1.849.820	5.296.816	*Deposits from other banks*
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	1.640.867	*Securities sold under agreement to repurchase*
Pinjaman yang diterima	201.131	151.442	113.909	81.078	70.085	*Loans received*
Utang pajak	47.853	32.036	41.547	21.677	37.918	*Tax debt*
Imbalan kerja	32.437	26.051	30.008	31.220	24.925	*Employee benefits*

dalam jutaan (Rupiah) | *in millions (Rupiah)*

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018	*Explanation*
Liabilitas lain-lain	56.681	59.449	63.957	41.323	47.699	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**2.305.550**	**27.592.527**	**25.120.358**	**22.466.821**	**24.471.465**	***Total Liabilities***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**25.724.874**	-	-	-	-	***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Giro *Mudharabah*	3.483.049	-	-	-	-	*Mudharabah Current Account*
Tabungan *Mudharabah*	6.544.823	-	-	-	-	*Mudharabah Savings*
Deposito *Mudharabah*	15.697.002	-	-	-	-	*Mudharabah deposits*
EKUITAS | *EQUITY*						
Modal saham						*Capital stock*
Modal Saham - Nilai Nominal Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham						*Share Capital - Nominal Value Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Nominal value of IDR 100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.092.407 saham pada 31 Desember 2022 dan 12.051.607 saham pada 21 Agustus 2022	1.209.241	1.103.161	1.100.461	1.082.761	1.067.587	*Issued and fully paid capital of 12,092,407 shares on December 31, 2022 and 12,051,607 shares on August 21, 2022*
Tambahan modal disetor	2.085	4.085	4.785	19.785	11.935	*Additional paid-in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga tersedia untuk dijual	(66.099)	2.233	(687)	(2.480)	(7.788)	*Unrealized net gain (loss) from changes in fair value of available-for-sale securities*
Saldo laba	2.206.705	2.077.680	1.975.049	1.885.227	1.871.073	*Retain earning*
Telah ditentukan penggunaannya	-	1.622.421	1.436.833	1.501.957	1.411.904	*Its use has been determined*
Belum ditentukan penggunaannya	2.206.705	455.259	538.217	383.270	459.170	*Its use has not yet been determined*
Jumlah Ekuitas	**3.351.932**	**3.187.159**	**3.079.608**	**2.985.293**	**2.942.807**	***Total Equity***
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	**31.382.356**	**30.779.686**	**28.199.966**	**25.452.114**	**27.414.272**	***Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity***

*) Bank operasional dengan sistem konvensional | **) Bank operates with a conventional system*

LAPORAN LABA/ RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

PROFIT/ LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS

dalam jutaan (Rupiah) | *in millions (Rupiah)*

Uraian	2022			2021	2020	2019	2018	*Explanation*
	31 Des Gabungan *31 Dec Combined*	22 Agus s.d. 31 Des *22 Aug s.d. 31 Dec*	1 Jan s.d. 21 Agus *Jan 1 to 21 Aug*					
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*								*FUND MANAGEMENT INCOME BY BANK AS MUDHARIB*
Pendapatan Bunga	835.355	-	835.355	-	-	-	-	*Interest income*
Pendapatan dari Jual Beli	969.260	714.774	254.486	-	-	-	-	*Revenue from Buying and Selling*
Pendapatan dari Bagi Hasil	90.079	87.841	2.238	-	-	-	-	*Income from Profit Sharing*
Pendapatan dari Ijarah - neto	28.749	10.354	18.395	-	-	-	-	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	186.525	116.018	70.507	-	-	-	-	*Other Main Business Income*

dalam jutaan (Rupiah) | *in millions (Rupiah)*

Uraian	2022			2021	2020	2019	2018	*Explanation*
	31 Des Gabungan *31 Dec Combined*	22 Agus s.d. 31 Des *22 Aug s.d. 31 Dec*	1 Jan s.d. 21 Agus *Jan 1 to 21 Aug*					
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai *Mudharib*	2.109.968	928.986	1.180.982	-	-	-	-	*Total Income from Fund Management by the Bank as Mudharib*
Pendapatan Bunga dan Syariah *)	-	-	-	2.213.852	2.316.795	2.439.679	2.392.493	*Interest and sharia income*
Pendapatan bunga	-	-	-	1.781.784	2.047.932	2.239.945	2.213.894	*Interest income*
Pendapatan syariah	-	-	-	432.068	268.863	199.733	178.599	*Sharia income*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(632.496)	(189.235)	(443.261)	-	-	-	-	*THIRD PARTY RIGHTS TO PROFIT SHARING*
Beban Bunga dan Syariah *)	-	-	-	(922.450)	(1.011.153)	(1.195.317)	(1.123.783)	*Interest and sharia expenses*
Beban bunga	-	-	-	(768.749)	(879.843)	(1.076.306)	(1.019.435)	*Interest expense*
Beban syariah				(153.456)	(130.148)	(117.530)	(102.800)	*sharia burden*
Provisi dan komisi	-	-	-	(244)	(1.162)	(1.481)	(1.548)	*Fees and commissions*
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah, Neto *)	-	-	-	1.291.403	1.305.642	1.244.362	1.268.710	*Interest income and sharia income, net*
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	1.477.472	739.751	737.721	-	-	-	-	*RESULTS SHARING RIGHTS OWNED BY THE BANK*
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	171.255	50.283	120.973	207.345	318.581	128.611	133.235	*OTHER BUSINESS INCOME*
BEBAN USAHA								*OPERATING EXPENSES*
Beban Usaha selain dari Penyaluran Dana	(1.093.599)	(531.077)	(562.523)	(912.395)	(882.312)	(859.252)	(848.602)	*Operating Expenses other than Distribution of Funds*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(9.093)	40.552	(49.646)	(35.019)	(44.673)	(41.522)	(35.697)	*Allowance for impairment losses on earning assets*
LABA USAHA	546.034	299.509	246.525	551.335	697.238*	472.199	517.646	*OPERATING PROFIT*
PENDAPATAN/ (BEBAN) NON-USAHA - NETO	(42.477)	(4.035)	(38.442)	(36.237)	(24.384)	(15.874)	(22.323)	*NON-TRANS INCOME/ (EXPENSES) - NET*
LABA SEBELUM PAJAK	503.557	295.474	208.084	515.098	672.855	456.325	495.323	*PROFIT BEFORE TAX*
BEBAN PAJAK - NETO	(152.658)	(64.508)	(88.150)	(134.085)	(208.885)	(147.302)	(153.001)	*TAX EXPENSES - NET*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	350.899	230.966	119.933	381.013	463.970	309.023	342.322	*NET PROFIT FOR THE YEAR*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(68.332)	(1.524)	(66.808)	2.920	1.792	5.308	(6.432)	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**282.567**	**229.442**	**53.125**	**383.934**	**465.762**	**314.332**	**335.890**	***TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT***
Laba bersih per saham (dalam Rupiah penuh)	**29.052**	**19.100**	**9.952**	**34.581**	**42.561**	**28.743**	**32.165**	***Earnings per share (in full Rupiah)***

* Untuk kinerja tahun 2020 terdapat pendapatan atas pemulihan CKPN PSAK 71 sebesar Rp189,06 miliar, sehingga laba usaha diluar pemulihan CKPN PSAK 71 sebesar Rp508,18 miliar.
** For the 2020 performance, there was income from the recovery of PSAK 71 CKPN amounting to Rp189.06 billion, so that the operating profit outside of PSAK 71 CKPN recovery was Rp508.18 billion.*

LAPORAN ARUS KAS, DAN RASIO KEUANGAN

STATEMENT OF CASH FLOW, AND FINANCIAL RATIO

dalam jutaan (Rupiah) | *in millions (Rupiah)*

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018	*Explanation*
LAPORAN ARUS KAS | *CASH FLOW STATEMENT*						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | *CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*						
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.593.530	3.319.665	(64.188)	(815.870)	(101.076)	*Net cash is obtained from (used in) operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | *CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*						
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(8.941)	(23.857)	(21.839)	(36.403)	(48.493)	*Net cash is obtained from (used in) investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | *CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES*						
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	17.208	(259.849)	(359.616)	(281.853)	(285.874)	*Net cash is provided by (used in) financing activities*
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.601.797	3.035.959	(445.642)	(1.134.126)	(435.444)	*Net increase (decrease) in cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas awal tahun	5.192.234	3.149.329	3.594.971	4.729.098	5.164.541	*Cash and cash equivalents at the beginning of the year*
Kas dan setara kas akhir tahun	6.794.031	6.185.288	3.149.329	3.594.971	4.729.098	*End of year cash and cash equivalents*

Dalam % | in %

RASIO KEUANGAN | *FINANCIAL RATIOS*						
PERMODALAN | *CAPITALIZATION*						
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	22,00	21,07	20,77	21,01	20,35	*Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM)*
ASET PRODUKTIF | *PRODUCTIVE ASSETS*						
Aset Produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,71	1,77	1,96	2,41	2,22	*Non-performing Earning Assets to total earning assets*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,54	1,68	1,98	2,25	2,08	*Allowance for Impairment Losses (CKPN) of financial assets against productive assets*
NPF/NPL (Gross)	2,57	2,82	2,83	2,92	2,97	*NPF/NPL (Gross)*
NPF/NPL (Netto)	0,33	0,88	1,01	0,27	0,19	*NPF/NPL (Netto)*
RENTABILITAS | *PROFITABILITY*						
Laba terhadap aset (ROA)	2,31	1,93	2,54	1,74	1,97	*Return on assets (ROA)*
Laba terhadap modal (ROE)	18,09	12,49	15,94	10,72	13,08	*Return on equity (ROE)*
Net Imbalan (NI) / *Net Interest Margin (NIM)*	5,98	4,64	5,32	5,42	5,81	*Net Interest Margin (NIM)*
Biaya Opersional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	70,63	77,23	73,54	81,61	79,58	*Operational Cost to Operating Income (BOPO)*
Cost to Income Ratio (CIR)	65,63	63,87	61,48	63,34	-	*Cost to Income Ratio (CIR)*
LIKUIDITAS | *LIQUIDITY*						
FDR/LDR	72,67	73,72	85,63	89,70	98,05	*FDR/LDR*
CASA	41,81	50,97	44,28	48,94	49,53	*CASA*

dalam jutaan (Rupiah) | *in millions (Rupiah)*

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018	*Explanation*
KEPATUHAN | *OBEDIENCE*						
a. Persentase pelanggaran BMPK						*a. Percentage of BMPK violations*
i. Pihak terkait	-	-	-	-	-	*i. Related parties*
ii. Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	*ii. Unrelated parties*
b. Persentase pelampauan BMPK						*b. Percentage of exceedances of BMPK*
i. Pihak terkait	-	-	-	-	-	*i. Related parties*
ii. Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	*ii. Unrelated parties*
Giro Wajib Mandiri (GWM)						*Independent Statutory Reserves (GWM)*
a. GWM utama rupiah	13,06	8,93	6,50	7,89	7,08	*a. The main GWM is rupiah*
b. GWM valuta asing	29,62	5,96	30,34	26,00	14,55	*b. GWM foreign currency*
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,29	0,98	2,29	0,55	0,57	*Overall Net Open Position (NOP).*

Informasi Harga Saham

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham.

Share Price Information

As of December 31, 2022, BRK Syariah has not yet become a publicly listed company on the stock exchange. Therefore, there is no information regarding the stock price, market capitalization, and stock trading volume.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah belum mencatatkan sahamnya di bursa efek dengan demikian Bank tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting

As of December 31, 2022, BRK Syariah has not listed its shares on the stock exchange, and the bank has never been subject to temporary suspension of stock trading (suspension) and/or delisting sanctions..

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/sukuk/obligasi konversi.

Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds

As of December 31, 2022, BRK Syariah has not issued any bonds, sukuk, or convertible bonds, therefore there is no information available regarding these financial instruments.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

Information on Other Funding Sources

As of December 31, 2022, BRK Syariah does not have any sources of funding from other financial instruments, hence there is no information available regarding other sources of funding.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2022
Awards and Certifications in 2022

PENGHARGAAN TAHUN 2022
AWARDS IN 2022

30 MARET 2022
MARCH 30, *2022*

TOP BUSINESS

Dalam ajang bergengsi *Top CSR Awards* 2022 Bank meraih penghargaan:

- **TOP CSR AWARDS 2022 # STAR 4**

In the prestigious Top CSR Awards 2022, Bank won award:

- *Top CSR Awards 2022 # Star 4*

07 APRIL 2022
APRIL 07, *2022*

INFOBANK

Bank menerima penghargaan sebagai **3rd Rank Unit Usaha Syariah – Bank Umum Konvensional** dengan **Kategori *Asset Class* IDR 5 Trillion to < IDR 10 Trillion**.

*Bank received an award as **3rd Rank Sharia Business Unit - Conventional Commercial Bank** with **Asset Class Category IDR 5 Trillion to < IDR 10 Trillion**.*

07 APRIL 2022
APRIL 07, *2022*

HUMAN INITIATIVE

Bank meraih penghargaan dengan Kategori Mitra Kolaborasi Perusahaan Daerah (Lingkungan) dalam ajang ***Human Initiative Award* 2022**.

*Bank won an award in the Regional Company Collaboration Partner Category (Environment) in the 2022 **Human Initiative Award event**.*

12 APRIL 2022
APRIL 12, *2022*

ECONOMIC REVIEW

Bank meraih penghargaan *Gold Award* sebagai *The Best Annual Report For Bank Company* – 2022 dengan Kategori Regional *Development* Banks pada ajang **Indonesia *Corporate Secretary Communication Award* VII 2022**.

*Bank won the Gold Award as The Best Annual Report For Bank Company – 2022 in the Regional Development Banks Category at the **Indonesia Corporate Secretary Communication Award VII 2022**.*

20 APRIL 2022
APRIL 20, *2022*

TOP BUSINESS

Dalam ajang Top BUMD *Awards* 2022 Bank berhasil meraih penghargaan:

- **Top BUMD Awards 2022 – Bintang 4.**

In the Top BUMD Awards 2022 event, Bank won award:

- ***Top BUMD Awards 2022 – 4 stars***.

21 APRIL 2022
APRIL 21, *2022*

WARTA EKONOMI

Bank meraih penghargaan Indonesia *Best Sharia Finance 2022 with Outstanding Company Strategy for Innovative and Transformative Business* dengan Kategori *Sharia Business Unit of Conventional Bank* dalam ajang ***Sharia Finance Awards* 2022**.

Bank won the Indonesia Best Sharia Finance 2022 award with Outstanding Company Strategy for Innovative and Transformative Business in the Sharia Business Unit of Conventional Bank Category at the ***2022 Sharia Finance Awards event***.

18 MEI 2022
MAY 18, *2022*

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Bank meraih penghargaan sebagai Pendukung Pelayanan Pencapaian Pajak Daerah Kategori Mitra dalam ajang **Pekanbaru Tax Award 2022**.

Bank won an award as a Service Support for Partner Category Regional Tax Achievement at the ***Pekanbaru Tax Award 2022*** *event.*

06 JUNI 2022
JUNE 06, *2022*

ECONOMIC REVIEW

Dalam ajang Indonesia Turkiye 2nd *Global Leaders Award*, Bank berhasil meraih:

- **The Best Global Company 2022.**

In the Indonesia Turkiye 2nd Global Leaders Award, Bank won:

- ***The Best Global Company 2022.***

30 JUNI 2022
JUNE 30, *2022*

INFOBANK

Bank meraih penghargaan 1st *Call Center Regional Development* Bank pada ajang bergengsi ***Bank Service Excelence Awards 2022***.

Bank won the 1st Call Center Regional Development Bank award at the prestigious ***Bank Service Excellence Awards 2022***.

23 AGUSTUS 2022
AUGUST 23, *2022*

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Bank meraih penghargaan bergengsi sebagai Bank Implementasi KEJAR Terbaik Kategori Bank Pembangunan Daerah pada ajang **Kejar Award 2022.**

Bank won a prestigious award as the Best KEJAR Implementation Bank in the Regional Development Bank Category at the ***2022 Kejar Award*** *event.*

26 AGUSTUS 2022
AUGUST 26, *2022*

5 PILAR MEDIA

Bank meraih penghargaan *Most Trusted and Admired Bank In Excellent Quality Service of The Year 2022* pada ajang ***Indonesia Best Innovation Excelent Award***.

Bank won the Most Trusted and Admired Bank award in Excellent Quality Service of the Year 2022 at the ***Indonesia Best Innovation Excellent Award***.

9 SEPTEMBER 2022
SEPTEMBER 9, *2022*

THE ICONOMICS

Bank meraih penghargaan 3rd Indonesia *Top Bank Awards* 2022 *in KBMI* 1 *Category* pada ajang 3rd **Indonesia Top Bank Awards**.

Bank won the 3rd Indonesia Top Bank Awards 2022 in KBMI 1 Category at the 3rd ***Indonesia Top Bank Awards event***.

15 SEPTEMBER 2022
SEPTEMBER 15, *2022*

BERITA SATU

Bank meraih penghargaan sebagai **Bank Syariah Terbaik 2022** dengan Kategori Unit Usaha Syariah Aset di Atas Rp5 Triliun.

*Bank won an award as **the Best Sharia Bank 2022** in the Category of Sharia Business Unit with Assets Above IDR 5 Trillion.*

22 SEPTEMBER 2022
SEPTEMBER 22, *2022*

INFOBANK

Bank meraih *Golden Award* atas konsistensi kinerja yang telah tercapai sepanjang tahun 2017 - 2021 pada ajang **Infobank *Sharia Award* 2022**.

*Bank won the Golden Award for consistent performance that has been achieved throughout 2017 - 2021 at the **2022 Infobank Sharia Award event**.*

21 OKTOBER 2022
OCTOBER 21, *2022*

ECONOMIC REVIEW

Bank meraih penghargaan sebagai 3rd *The Best Finance Sharia Bank Public Company.*

Bank won an award as the 3rd Best Finance Sharia Bank Public Company.

27 OKTOBER 2022
OCTOBER 21, *2022*

WARTA EKONOMI

Bank meraih penghargaan sebagai *Best BPD 2022 With Top Financial Performance and Improving the Regional Economy Through Community Empowerment* Kategori BPD Syariah pada ajang **Indonesia Best BPD Awards 2022**.

*Bank won an award as the Best BPD 2022 With Top Financial Performance and Improving the Regional Economy Through Community Empowerment in the Sharia BPD Category at the **Indonesia Best BPD Awards 2022 event**.*

1 NOVEMBER 2022
NOVEMBER 1, *2022*

KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI

Bank meraih penghargaan atas Peran Serta dan Kerja Sama dalam Implementasi Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL).

Bank won an award for Participation and Cooperation in the Implementation of Electronic Data Exchange (PEDAL) Applications.

29 NOVEMBER 2022
NOVEMBER 29, *2022*

REPUBLIKA

Bank meraih penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik Kategori Bank Pembangunan Daerah pada ajang bergengsi **Anugerah Syariah Republika 2022**.

Bank won an award as the Best Sharia Bank in the Regional Development Bank Category at the prestigious ***Anugerah Syariah Republika 2022 event****.*

16 DESEMBER 2022
DECEMBER 16, *2022*

IT WORKS

Dalam ajang **Top Digital *Awards* 2022**, Bank meraih:
- Top Digital 2022 #Stars 4

In the ***Top Digital Awards 2022*** *event, Bank won:*
- *Top Digital 2022 #Stars 4*

16 DESEMBER 2022
DECEMBER 16, *2022*

WARTA EKONOMI

Bank meraih penghargaan 1st – **The Best Indonesia GCG Award-VII-2022** dengan kategori *Asset* Rp.15 T – Rp.30 T (*Sharia Regional Development Bank Company*) dan Indonesia *Enterprises Risk Management* - V - 2022 dengan kategori Asset Rp.15 T - Rp.30 T (*Sharia Regional Development Company*) pada ajang Indonesia *Good Corporate Governance Award*-VII-2022.

Bank won the 1st – The Best Indonesia GCG Award-VII-2022 award in the Asset category Rp.15 T – Rp.30 T (Sharia Regional Development Bank Company) and Indonesia Enterprises Risk Management - V - 2022 with an Asset category of Rp.15 T - Rp.30 T (Sharia Regional Development Company) at the Indonesia Good Corporate Governance Award-VII-2022.

19 DESEMBER 2022
DECEMBER 19, *2022*

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Dalam ajang BPKH Banking Award 2022, Bank meraih:
- Terbaik 1 (BPS BPIH Penempatan Terbaik 2022) kategori Aset > 20 T.
- Terbaik 3 (BPS BPIH Terbaik 2022) kategori Bank Pembangunan Daerah.

In the 2022 BPKH Banking Award event, Bank won:
- *Best 1 (BPS BPIH Best Placement 2022) in the category of Assets > 20 T.*
- *Best 3 (Best BPS BPIH 2022) in the Regional Development Bank category.*

PERISTIWA PENTING 2022
Important Event in 2022

January 17, 2022 **17 Januari 2022**

Bank kembali memperluas jaringan kantor baru menjelang konversi menjadi Bank Umum Syariah. Kantor jaringan ke-172, Kedai Syariah Kubu ini diresmikan dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Rohil dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Riau, Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK Riau, Kepala Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan BI Riau, Anggota DPRD Provinsi Riau, dan Direktur Kredit & Syariah Bank Riau Kepri.

The bank has once again expanded its network of new branches in anticipation of its conversion into a Sharia Commercial Bank. The 172nd branch, Kedai Syariah Kubu, was officially inaugurated with a plaque signing ceremony by the Regent of Rohil, witnessed by the Vice Governor of Riau, the Head of Bank Supervision of OJK Riau, the Head of Policy Implementation and Supervision Team of BI Riau, a member of the Riau Provincial DPRD, and the Director of Credit & Sharia of Bank Riau Kepri.

January 19, 2022 **19 Januari 2022**

Bank kembali memperluas jaringan kantor baru menjelang konversi menjadi Bank Umum Syariah. Kantor jaringan ke 173, Kedai Syariah Bantan ini diresmikan dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Bupati Bengkalis dan disaksikan oleh Kepala OJK Riau, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Kepala Kejari Bengkalis, Direktur Utama dan Direktur Kredit & Syariah Bank Riau Kepri.

Furthermore, the bank has inaugurated its 173rd branch, Kedai Syariah Bantan, with a plaque signing ceremony by the Deputy Regent of Bengkalis, witnessed by the Head of OJK Riau, a member of the Bengkalis District DPRD, the Head of the Bengkalis Prosecutor's Office, the President Director and the Director of Credit & Sharia of Bank Riau Kepri.

January 27, 2022 **27 Januari 2022**

Bank melakukan penanaman 10.000 bibit pohon mangrove yang dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan Direktur Utama Bank Riau Kepri. Kegiatan ini bekerjasama dengan *Human Initiative* dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

The bank planted 10,000 mangrove seedlings in a ceremony attended by the First Assistant for Governance and People's Welfare of the Riau Provincial Government and the President Director of Bank Riau Kepri. This activity was conducted in collaboration with Human Initiative and supported by the Indragiri Hilir Regency Government.

February 08, 2022 **08 Februari 2022**

Jajaran Direksi Bank Riau Kepri memberikan apresiasi kepada 7 lulusan terbaik dari 23 Peserta yang dinyatakan sangat kompeten dalam membangun *startup* dari hasil program Inkubasi Keuangan *Sharia Digital Center* Bank Riau Kepri Tahap Pertama.

The Board of Directors of Bank Riau Kepri has given appreciation to seven top graduates out of 23 participants who were deemed highly competent in building startups from the first phase of the Digital Shariah Incubation Program at the Bank Riau Kepri.

February 24, 2022 **24 Februari 2022**

Bertepatan dengan acara penanaman perdana sawit kemitraan strategis di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Bank Riau Kepri memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia kepada petani sawit secara simbolis di Kandis Kabupaten Siak, Riau. Acara ini dihadiri Gubernur Riau, Direktur Utama, Direktur Kredit & Syariah Bank Riau Kepri.

Coinciding with the inaugural oil palm partnership planting event in Kandis District, Siak Regency, Bank Riau Kepri provided People's Business Credit (KUR) that was symbolically handed over by the Indonesian Coordinating Minister for Economic Affairs to oil palm farmers in Kandis, Siak Regency, Riau. The event was attended by the Governor of Riau, the CEO and the Director of Credit and Sharia of Bank Riau Kepri.

March 10, 2022 **10 Maret 2022**

Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Kabupaten Karimun me-*launching* transaksi pembayaran *Boarding Pass* Pelabuhan Tanjung Balai Karimun secara digital melalui *QRIS* Bank Riau Kepri yang dihadiri oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri.

The Governor of the Riau Islands and the Regent of Karimun launched a digital boarding pass payment transaction via Bank Riau Kepri's QRIS, which was attended by the Chief Operating Officer of Bank Riau Kepri.

March 23, 2022 **23 Maret 2022**

Bank mendukung program UMKM Perkebunan Sawit dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau di Hotel Grand Central, Pekanbaru. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Samade, Ketua Samade DPW Riau, Direktur Utama, Direktur Kredit & Syariah Bank Riau Kepri.

The bank supported the Oil Palm Small and Medium Enterprises program by signing a Memorandum of Understanding (MoU) with the Samade (My Oil Palm, My Future) Riau Association at the Grand Central Hotel in Pekanbaru. The event was attended by the Chairman of Samade, the Chairman of Samade DPW Riau, the CEO, and the Director of Credit and Sharia of Bank Riau Kepri.

March 30, 2022 **30 Maret 2022**

Bank meraih penghargaan *TOP CSR AWARDS* 2022 # *STAR* 4 dalam ajang *Top CSR Awards* 2022, diterima oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Riau Kepri yang diselenggarakan oleh *TopBusiness*.

The bank won the TOP CSR AWARDS 2022 # STAR 4 award at the Top CSR Awards 2022 event, received by the Main Commissioner and Main Director of Bank Riau Kepri which was organized by TopBusiness.

April 01, 2022

01 April 2022

Hari jadi Bank Riau Kepri ke-56 diperingati dengan upacara dan pemotongan tumpeng di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri oleh Wakil Gubernur Riau yang didampingi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri.

The 56th anniversary of Bank Riau Kepri was commemorated with a ceremony and cutting of tumpeng at the Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri by the Deputy Governor of Riau who was accompanied by the Board of Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri.

April 09 , 2022

09 April 2022

Bank bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meresmikan Pulau Penyengat sebagai Pulau Digital pertama di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur Dana & Jasa Bank Riau Kepri.

The Bank, in conjunction with the Government of the Riau Islands Province, inaugurated Penyengat Island as the first Digital Island in Indonesia. The event was attended by the Governor of Riau Islands, the Chairman of the Board of Commissioners, the President Director, and the Funds & Services Director of Bank Riau Kepri.

April 14 , 2022

14 April 2022

Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Riau Kepri, mendampingi Gubernur Riau dalam penerimaan 3 (tiga) Anugerah Adinata di bidang Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, Keuangan Syariah, dan Industri Halal. Gubernur Riau sangat berkomitmen dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau.

President Commissioner and President Director of Bank Riau Kepri, accompanied the Governor of Riau in receiving 3 (three) Adinata Awards in the field of Green and Sustainable Economy, Sharia Finance, and Halal Industry. The Governor of Riau is very committed to developing the Islamic economy in Riau Province.

April 20, 2022

20 April 2022

Bank meraih penghargaan *TOP BUMD AWARDS* 2022 # BPD - Bintang 4 dalam ajang *Top BUMD Awards* 2022, diterima oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri yang diselenggarakan oleh *TopBusiness*.

The bank won the TOP BUMD AWARDS 2022 #BPD - 4 Star award at the Top BUMD Awards 2022 event, received by the Operational Director of Bank Riau Kepri which was organized by TopBusiness.

April 23 , 2022

23 April 2022

Bank mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris serta Direksi Bank Riau Kepri.

The Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) and Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2021 Fiscal Year at the Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri which was attended by all Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Riau Kepri.

April 25 , 2022

25 April 2022

Walikota Pekanbaru bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri meresmikan kantor Cabang Pembantu Sukaramai *Trade Center* di Pekanbaru.

The Mayor of Pekanbaru, together with the President Director of Bank Riau Kepri, inaugurated the Sukaramai Trade Center Sub-Branch Office in Pekanbaru..

May 07, 2022

07 Mei 2022

Bank membuka Kantor Kas di Pulau Terluar Kepulauan Riau Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan sebagai wujud dari komitmen Bank Riau Kepri dalam meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh nasabah. Kantor Kas ini diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Bintan yang didampingi Forkompinda Kepulauan Riau serta Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Riau Kepri.

The Bank opened a Cash Office on the Outer Islands of the Riau Archipelago, Tambelan District, Bintan Regency as a form of Bank Riau Kepri's commitment to improving excellent service to all customers. This Cash Office was inaugurated by the Governor of the Riau Archipelago, the Regent of Bintan who was accompanied by the Riau Islands Forkompinda and the Head of the Corporate Secretariat Division of Bank Riau Kepri.

May 18, 2022

18 Mei 2022

Bank meraih penghargaan sebagai Pendukung Pelayanan Pencapaian Pajak Daerah Kategori Mitra yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru kepada Direktur Dana & Jasa Bank Riau Kepri dalam ajang Pekanbaru *Tax Award* 2022.

The bank won an award as Supporting Service for Partner Category Regional Tax Achievement given by the Mayor of Pekanbaru to the Director of Funds & Services of Bank Riau Kepri in the Pekanbaru Tax Award 2022 event.

May 19, 2022 **19 Mei 2022**

Perubahan Perda Anggaran Dasar Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.

The amendment to the Regional Regulation on the Articles of Association of Bank Riau Kepri to become Bank Riau Kepri Syariah was ratified at the Plenary Meeting of the DPRD Riau Province.

May 30, 2022 **30 Mei 2022**

Bank Riau Kepri sebagai Bank pertama di Sumatera untuk kategori BPD dalam rangka menjadi peserta *BI FAST* dan peresmiannya dihadiri oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional Bank Riau Kepri dengan Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera.

Bank Riau Kepri, as the first bank in Sumatra under the category of Regional Development Banks (BPD), became a participant in BI FAST, and its inauguration was attended by the President Director and the Operational Director of Bank Riau Kepri Syariah with the Marketing Director of PT Rintis Sejahtera.

June 08 , 2022 **08 Juni 2022**

Dalam mendukung program pembangunan daerah, Bank Riau Kepri bersama Pemerintah Kota Dumai melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah di Kantor Walikota Dumai. Penandatanganan dilakukan oleh Walikota Dumai dan Pemimpin Cabang Dumai serta disaksikan oleh Direktur Utama dan Direktur Kredit & Syariah Bank Riau Kepri.

In support of regional development programs, Bank Riau Kepri and the Dumai City Government signed a Regional Loan Agreement at the Dumai City Hall. The agreement was signed by the Mayor of Dumai and the Branch Manager of Dumai, witnessed by the President Director and the Director of Credit & Sharia of Bank Riau Kepri.

June 09, 2022 **09 Juni 2022**

Dalam rangka mendukung kinerja Bank untuk upaya penyelamatan keuangan Negara, Bank melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (*MoU*) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Provinsi Riau yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri.

In order to support the Bank's efforts in financial recovery of the country, the Bank has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Riau High Prosecutor's Office (Kejati) and a Cooperation Agreement (PKS) with all the Chief District Prosecutors (Kejari) throughout the province of Riau, attended by the Head of the Riau High Prosecutor's Office, the Board of Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri.

June 14, 2022 **14 Juni 2022**

Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) Pondok Pesantren Darul Hadist Yayasan Wakaf Sultan Yahya Siak di Kabupaten Siak Sri Indrapura dari Program Kemitraan Bank Riau Kepri sudah bisa digunakan sesuai fungsinya setelah diresmikan oleh Bupati Siak didampingi Wakil Bupati Siak dan Direktur Operasional Bank Riau Kepri.

The construction of 3 (three) New Classrooms (RKB) for the Darul Hadith Islamic Boarding School of the Sultan Yahya Siak Wakaf Foundation in Siak Sri Indrapura Regency from the Bank Riau Kepri Partnership Program can already be used according to their functions after being inaugurated by the Siak Regent accompanied by the Siak Deputy Regent and the Operational Director of Bank Riau Kepri.

June 30, 2022 **30 Juni 2022**

Sinergitas kembangkan ekonomi syariah, Bank melakukan MoU dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau. Penandatanganan yang dilakukan oleh Direktur Dana & Jasa disaksikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau, Komisaris Independen, Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Direktur Utama Bank Riau Kepri.

In order to develop the Sharia economy through synergy, the bank signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Communication Forum of Islamic Boarding Schools in Riau Province. The signing was carried out by the Director of Funds and Services, witnessed by the Chairman of the Communication Forum of Islamic Boarding Schools in Riau Province, an Independent Commissioner, the Chairman of the Sharia Supervisory Board, and the President Director of Bank Riau Kepri.

July 02, 2022 **02 Juli 2022**

Optimalisasi Layanan Jasa Perbankan, Pemerintah Kabupaten Lingga melakukan *MoU* dengan Bank Riau Kepri, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Lingga dan Direktur Utama Bank Riau Kepri.

To optimize banking services, the Lingga Regency Government signed an MoU with Bank Riau Kepri, which was attended by the Regent of Lingga Regency and the Director of Bank Riau Kepri.

July 11, 2022 **11 Juli 2022**

Setelah mendapatkan izin konversi tertanggal 4 Juli 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank langsung menggelar Rapat Koordinasi seluruh Pimpinan Unit Kantor yang dihadiri oleh Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Kepala OJK Riau, Tokoh Ulama serta seluruh Komisaris, Direksi, Pemimpin Cabang, Capem, dan Kedai Bank Riau Kepri.

After obtaining the conversion permit dated 4 July 2022 from the Financial Services Authority (OJK), the Bank immediately held a Coordination Meeting for all Office Unit Leaders which was attended by the Governor of Riau, Governor of Riau Islands, Head of BI Representative for Riau Province, Head of OJK Riau, Ulama figures and all Commissioners, Directors, Branch Managers, Sub-Branch Offices, and Kedai Bank Riau Kepri.

July 26, 2022

26 Juli 2022

Bank melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Riau yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri dengan Ketua PSMTI serta disaksikan oleh Jajaran pengurus PSMTI Riau dan Direktur Dana & Jasa Bank Riau Kepri.

The Bank signed a Cooperation Agreement with the Indonesian Chinese Marga Social Association (PSMTI) of Riau Province which was carried out by the President Director of Bank Riau Kepri with the Chair of PSMTI and witnessed by the management of PSMTI Riau and the Director of Funds & Services of Bank Riau Kepri.

Juli 27, 2022

27 Juli 2022

Melalui program Tabungan SimPel, Bank Riau Kepri mendukung program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ditandai penyerahan secara simbolis Tabungan SimPel kepada Pelajar di Kota Dumai oleh Direktur Utama disaksikan oleh Walikota Dumai dan Deputi Kepala OJK Riau.

Through the Simpel Savings program, Bank Riau Kepri supports the Otoritas Jasa Keuangan's (OJK) KEJAR program (One Account One Student) by symbolically handing over Simpel Savings accounts to students in the city of Dumai, witnessed by the CEO and Deputy Head of OJK Riau.

August 01, 2022

01 Agustus 2022

Bank dan PT Jalin Pembayaran Nusantara berkolaborasi dalam pengembangan layanan integrasi *issuer* untuk pembayaran lewat Jalin *Payment* Integrator dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Direktur Dana & Jasa dan Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Bank Riau Kepri and PT Jalin Pembayaran Nusantara collaborated in developing issuer integration services for payments through Jalin Payment Integrator, with the signing of an MoU by the Director of Funds & Services and the CEO of PT Jalin Pembayaran Nusantara.

August 01, 2022

01 Agustus 2022

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Kepala OJK Riau, Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Riau Kepri mendampingi Gubernur Riau melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI dalam rangka mengundang kehadiran Wakil Presiden RI pada Peresmian Operasional BRK Syariah.

The Head of the Bank Indonesia (BI) Representative Office in Riau Province, the Head of the Financial Services Authority (OJK) in Riau, the President Commissioner and the President Director of Bank Riau Kepri accompanied the Governor of Riau in an audience with the Vice President of Indonesia to invite him to the Inauguration of the Operation of BRK Syariah.

August 05, 2022 **05 Agustus 2022**

Bank melakukan penandatanganan MoU bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau tentang pembiayaan perumahan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Kredit & Syariah serta disaksikan Gubernur Riau dan Walikota Dumai.

The Bank signed an MoU with the Teacher Association of Republic of Indonesia (PGRI) Riau Province regarding housing finance. The signing was carried out by the Director of Credit & Sharia and witnessed by the Governor of Riau and the Mayor of Dumai.

August 17, 2022 **17 Agustus 2022**

Memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan seluruh Pegawai Kantor Pusat Bank Riau Kepri mengikuti upacara dipimpin oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri di halaman Kantor Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Commemorating the 77th Anniversary of Indonesian Independence, the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Directors and all Bank Riau Kepri Head Office employees attended the ceremony led by the President Director of Bank Riau Kepri in the courtyard of the Dang Merdu Tower Office of Bank Riau Kepri.

August 26, 2022 **26 Agustus 2022**

Bank meraih penghargaan *Most Trusted and Admired Bank In Excellent Quality Service of The Year* 2022 pada ajang Indonesia *Best Innovation Excelent Award* yang diterima oleh Direktur Utama BRK Syariah.

The Bank won the Most Trusted and Admired Bank in Excellent Quality Service of the Year 2022 award at the Indonesia Best Innovation Excellent Award which was received by the Main Director of BRK Syariah.

August 13, 2022 **13 Agustus 2022**

Direktur Operasional Bank Riau Kepri menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau (UNRI) pada kegiatan kuliah perdana mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Riau Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di *Ballroom* Grand Suka Hotel Pekanbaru.

The Operational Director of Bank Riau Kepri symbolically handed over the Student Identity Card (KTM) to the Director of the Postgraduate Program at the University of Riau (UNRI) at the inaugural lecture for new students at the University of Riau Postgraduate Program Odd Semester Academic Year 2022/2023 at the Grand Suka Hotel Ballroom Pekanbaru.

August 23, 2022 **23 Agustus 2022**

Bank meraih penghargaan sebagai Bank Implementasi KEJAR Terbaik Kategori Bank Pembangunan Daerah, diterima Direktur Dana & Jasa BRK Syariah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The bank won an award as the Best KEJAR Implementation Bank in the Regional Development Bank category, received by the Director of Sharia BRK Funds & Services organized by the Financial Services Authority (OJK).

25 Agustus 2022
August 25, 2022

Peresmian Operasional PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin disaksikan oleh Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dan Direktur Utama BRK Syariah.

The operational inauguration of PT Bank Riau Kepri to become PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) was marked by pressing a button and signing the inscription by the Indonesian Vice President Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin was witnessed by the Governor of Riau, Governor of the Riau Archipelago, Deputy Chairman of the OJK Board of Commissioners and President Director of BRK Syariah.

September 02, 2022

02 September 2022

Optimalisasi penyaluran KUR Syariah, Direktur Pembiayaan BRK Syariah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan skema subsidi KUR dan penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Mikro.

To optimize the distribution of Islamic People's Business Financing (KUR Syariah), the Financing Director of BRK Syariah signed a cooperation agreement for subsidized KUR financing scheme and the use of the Credit Information System Program (SIKP) with the Ministry of Cooperatives and SMEs and the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance represented by the Deputy of Micro-Business Sector.

September. 09, 2022

09 September 2022

Bank meraih penghargaan 3rd Indonesia *Top Bank Awards* 2022 in KBMI 1 *Category*, pada ajang 3rd Indonesia *Top Bank Awards* yang diterima Direktur Utama BRK Syariah.

The bank won the 3rd Indonesia Top Bank Awards 2022 in KBMI 1 Category, at the 3rd Indonesia Top Bank Awards which was received by the Main Director of BRK Syariah.

October 06, 2022

06 Oktober 2022

Direktur Dana & Jasa BRK Syariah menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA) dengan Direktur *Treasury & International Banking* Bank Syariah Indonesia.

The Director of Sharia BRK Funds & Services signed a Cooperation Agreement related to the Sharia Principles Based Fund Management Certificate (SIPA) transaction with the Treasury and International Banking Director of Bank Syariah Indonesia.

October 07, 2022

07 Oktober 2022

Direktur Pembiayaan BRK Syariah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait Sinergi Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Jakarta. Dari BPJS Kesehatan penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan.

The Financing Director of BRK Syariah also signed a Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement with BPJS Health related to the Synergy Utilization of Banking Products and Services for First Level Health Facilities (FKTP) in Jakarta. The signing on behalf of BPJS Health was done by the President Director of BPJS Health.

October 08, 2022 **08 Oktober 2022**

Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Expo 2022 yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat bersama industri jasa keuangan Riau di Mall SKA Pekanbaru dibuka secara resmi oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, Kepala OJK Riau, serta Ketua FKIJK Provinsi Riau/Direktur Utama BRK Syariah.

The Financial Services Authority (OJK) in collaboration with the financial services industry in Riau officially launched the 2022 Financial Inclusion Month (BIK) Expo at SKA Mall Pekanbaru. The opening ceremony was attended by a Member of the Board of Commissioners, the Head of Internal Audit and Risk Management at OJK Riau, as well as the Chairman of FKIJK Riau Province and the CEO of BRK Syariah.

October 27, 2022 **27 Oktober 2022**

Direktur Utama didampingi Direktur Dana & Jasa serta Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRK Syariah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Riau yang didampingi jajaran pengurus.

The President Director accompanied by the Director of Funds & Services and the Director of Compliance & Risk Management of BRK Syariah signed a memorandum of understanding with the General Head of the Indonesian Mosque Council (DMI) of Riau Province who was accompanied by management.

November 07, 2022 **07 November 2022**

Untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan pemberian fasilitas Pembiayaan Daerah. Penandatanganan Akad antara Bupati Kepulauan Meranti dan Pemimpin Cabang Selat Panjang disaksikan oleh Notaris, Direktur Utama, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Sekda, Kepala BPKAD serta Anggota DPRD Kepulauan Meranti.

The Bank strongly supports the Meranti Islands Regency Government in improving Infrastructure Development through the provision of Regional Financing facilities. The signing of the Akad between the Meranti Islands Regent and the Meranti Islands Branch Manager was witnessed by the Notary, President Director, Director of Financing, Director of Compliance and Risk Management, Regional Secretary, Head of BPKAD and Members of the Meranti Islands DPRD.

November 21, 2022 **21 November 2022**

Direktur Dana & Jasa didampingi Pemimpin Cabang Bengkalis mengikuti *High Level Meeting Launching* Uang Elektronik di Ballroom Hotel Jatra Pekanbaru. Dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Staf Ahli Bupati Bengkalis bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan. Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dan Plt Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

The Funds & Services Director, accompanied by the Head of the Bengkalis Branch, took part in the Electronic Money Launching High Level Meeting at the Jatra Hotel Pekanbaru Ballroom. From the Bengkalis Regency Government, there was an Expert Staff from the Bengkalis Regent in the field of Development Economics and Finance. Also present were Deputy Head of Bank Indonesia Representative Office for Riau Province and Acting Director of Regional Financial Development for the Ministry of Home Affairs.

November 22, 2022

22 November 2022

Dalam rangka mendorong percepatan realisasi investasi dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau, Direktur Pembiayaan melakukan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha di Hotel Prime Park Pekanbaru. Acara dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia, BPOM Provinsi Riau, Kepala Bapenda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Disperindag dan Kepala DPMPTSP Provinsi Riau.

In order to accelerate investment realization and SME growth in Riau Province, the Director of Financing signed a joint commitment between the government and business community at BHotel Prime Park Pekanbaru. The event was attended by representatives from Bank Indonesia, BPOM Riau Province, the Head of Bapenda Riau Province, the Head of the Marine and Fisheries Agency, the Head of Disperindag, and the Head of DPMPTSP Riau Province.

November 23, 2022

23 November 2022

Dukung program pemerintah dalam hal Implementasi KKPD, BRK Syariah bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai Bank jasa penerbit KKPD yang diperkuat dengan penandatanganan oleh Direktur Pembiayaan BRK Syariah dan Direktur *Treasury & International Banking* Bank Mandiri di Batam. Acara tersebut disaksikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Riau dan Direktur Utama BRK Syariah.

To support the government's program in implementing KKPD, BRK Syariah collaborated with Bank Mandiri as the issuing bank for KKPD services, which was strengthened by the signing of an agreement between the Director of Financing of BRK Syariah and the Director of Treasury & International Banking of Mandiri in Batam. The event was witnessed by the Head of BPKAD Riau Province and the Director of BRK Syariah.

25 November 2022

25 November 2022

Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan kepada BRK Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Riau kepada Direktur Utama BRK Syariah dan disaksikan oleh Asisten I Pemprov Riau dan Ketua Badan Wakaf Indonesia Riau.

The Riau Provincial Government has awarded BRK Syariah as the Sharia Financial Institution that receives cash endowments. The award was presented by the Governor of Riau to the CEO of BRK Syariah and witnessed by the Assistant I of the Riau Provincial Government and the Chairman of the Indonesian Endowment Board Riau.

November 29, 2022

29 November 2022

Bank meraih penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik Kategori Bank Pembangunan Daerah pada ajang Anugerah Syariah Republika 2022 yang diterima oleh Direktur Utama BRK Syariah.

The bank won an award as the Best Sharia Bank in the Regional Development Bank Category at the 2022 Republika Syariah Anugerah event which was received by the Main Director of BRK Syariah.

December 01, 2022 **01 Desember 2022**

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menerima penghargaan atas peran serta dan kerjasama dalam Implementasi Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) yang ditandatangani oleh Ketua KPK RI di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK.

The Director of Compliance and Risk Management received an award for the participation and cooperation in the Implementation of the Electronic Data Exchange Application (PEDAL), which was signed by the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) at the KPK Anti-Corruption Education Center building.

December 16, 2022 **16 Desember 2022**

Bank meraih penghargaan sebagai *Top Digital Implementation* 2022 # Stars 4 pada ajang *TOP DIGITAL AWARDS* yang diselenggarakan oleh *it'works,* diterima Direktur Dana & Jasa BRK Syariah.

The bank won an award as Top Digital Implementation 2022 # Stars 4 at the TOP DIGITAL AWARDS event organized by it'works, received by the Director of Funds & Services BRK Syariah.

December 19, 2022 **19 Desember 2022**

Dalam ajang BPKH *Banking Award* 2022, Bank meraih 2 penghargaan yaitu Terbaik 1 (BPS BPIH Penempatan Terbaik 2022) kategori Aset > 20 T dan Terbaik 3 (BPS BPIH Terbaik 2022) kategori Bank Pembangunan Daerah yang diterima oleh Direktur Dana & Jasa BRK Syariah.

In the BPKH Banking Award 2022 event, the Bank won 2 awards, namely Best 1 (BPS BPIH Best Placement 2022) in the category of Assets > 20 T and Best 3 (BPS BPIH Best 2022) in the category of Regional Development Bank which was received by the Director of Sharia BRK Funds & Services.

December 02, 2022 **02 Desember 2022**

Bank bersama BSI melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama fasilitas *committed line* dan MoU *transfer knowledge* di Gedung The Tower BSI Lantai 6 Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Dana & Jasa BRK Syariah dan Direktur *Treasury* & *Internasional Banking* BSI.

The Bank and BSI signed a cooperation agreement on committed line facilities and a knowledge transfer MoU at The Tower BSI Building, 6th Floor, Jakarta. The signing was carried out by the Director of Sharia BRK Funds & Services and the Director of Treasury & International Banking BSI.

December 14, 2022

14 Desember 2022

Pencabutan Undian Program Tabungan Bedelau II dengan hadiah *Grand Prize* 1 Unit Mobil Pajero Sport, dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi BRK Syariah.

Revocation of the Bedelau II Savings Program Lottery with a Grand Prize prize of 1 Pajero Sport Car Unit, attended by the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors of BRK Syariah.

December 16, 2022

16 Desember 2022

Bank melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang ditandatangani oleh Direktur Operasional BRK Syariah dan Pimpinan IAI di Menara Dang Merdu BRK Syariah.

The Bank signed a memorandum of Understanding with the Indonesian Institute of Accountants (IAI) which was signed by the Operational Director of BRK Syariah and the IAI Leaders at the Dang Merdu Tower BRK Syariah.

December 28, 2022

28 Desember 2022

Targetkan 1.000 Unit KPR tahun 2023, BRK Syariah melakukan Kerjasama dengan BP Tapera. Penandatanganannya dilakukan secara virtual oleh Direktur Pembiayaan BRK Syariah di Menara Dang Merdu BRK Syariah.

BRK Syariah collaborated with BP Tapera to target 1,000 KPR units in 2023. The signing was done virtually by the Director of Financing at Menara Dang Merdu.

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Report

SYAHRIAL ABDI

Komisaris Utama
President Commissioners

Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja BRK Syariah yang tetap mampu memberikan hasil kinerja yang solid dan tetap terjaga, walaupun terjadi penurunan perolehan laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif. Langkah, strategi bisnis dan kebijakan yang dilakukan Bank perlu terus dipertajam agar tetap berada pada jalur yang tepat. Perbaikan di segala aspek operasional BRK Syariah perlu terus ditingkatkan, kewaspadaan terhadap perubahan lingkungan eksternal serta puas terhadap hasil yang telah dicapai haruslah dihindari. Dengan landasan sikap tersebut, Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi dan jajaran manajemen BRK Syariah dapat memenuhi target sasaran usaha Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appreciates the performance achievement of BRK Syariah, which has been able to deliver solid and maintained performance results, despite the decrease in current year profit and comprehensive income. The Bank's steps, business strategies, and policies need to be continuously sharpened to stay on the right track. Improvements in all operational aspects of BRK Syariah need to be continually enhanced, vigilance towards external environmental changes, and satisfaction with achieved results should be avoided. With this attitude, the Board of Commissioners is optimistic that the Board of Directors and management team of BRK Syariah can achieve the business targets set out in the Bank's Business Plan (RBB) approved by the Board of Commissioners.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga BRK Syariah dapat menghadapi berbagai tantangan antara lain adanya aktivitas perekonomian global yang cenderung melambat akibat guncangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak akhir Februari 2022, resesi dan tingkat inflasi yang tinggi. Tentu hal tersebut berdampak terhadap perkembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Sejalan dengan kebijakan strategis Bank untuk melakukan transformasi dan konversi Bank menjadi BRK Syariah, Dewan Komisaris telah menjalankan peran pengawasan dan penasehatan untuk memastikan bahwa keseluruhan proses dan tahapan tersebut telah dijalankan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Atas nama Dewan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Our respected shareholders and other stakeholders,

Praise and gratitude to Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, who has bestowed His blessings and grace upon all of us, enabling BRK Syariah to face various challenges such as the global economic activity slowdown caused by the Russia-Ukraine geopolitical conflict that began in late February 2022, recession, and high inflation. Of course, these have affected the development of the national economy in general.

In line with the Bank's strategic policy to transform and convert into BRK Syariah, the Board of Commissioners has carried out its supervisory and advisory roles to ensure that the entire process and stages have been properly and correctly carried out in accordance with applicable provisions by prioritizing the principle of prudence. On behalf of the Board of Commissioners, allow us to present the Supervision and

Komisaris, perkenankan Kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Penasehatan dalam menjalankan kegiatan usaha BRK Syariah sepanjang tahun 2022 ini. Kami akan memaparkan berbagai upaya inisiatif yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan selama tahun 2022, penilaian atas kinerja Direksi, penilaian atas kinerja Komite Dewan Komisaris, termasuk pandangan Dewan Komisaris atas prospek usaha Bank ke depan serta pandangan terhadap penerapan tata kelola di Bank.

Advisory Task Report in carrying out the business activities of BRK Syariah throughout 2022. We will explain various initiatives taken by the Board of Commissioners in conducting supervision during 2022, evaluating the performance of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Commissioners' Committees, including the Board of Commissioners' views on the Bank's business prospects and the application of governance in the Bank.

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Kami uraikan sebagai berikut:

Described as follows are several important matters related to the implementation of supervision tasks and advice to the Board of Directors:

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Assessment by the Board of Commissioners on the Performance of the Board of Directors.

Di tengah tantangan pelemahan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik cenderung memperlihatkan optimisme pemulihan. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31% (yoy), membaik dibanding tahun 2021 sebesar 3,70% (yoy). Berakhirnya pembatasan mobilitas menyebabkan peningkatan aktivitas bisnis, mendorong permintaan konsumsi dan menggerakkan perekonomian. Stabilitas ekonomi ini berdampak positif terhadap kinerja industri perbankan, yang mampu mencatat pertumbuhan kredit per posisi Desember 2022 sebesar 11,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,24%.

Amid the challenges of global economic slowdown, the domestic economy showed optimism for recovery. The national economic growth in 2022 grew by 5.31% (yoy), an improvement from 3.70% (yoy) in 2021. The lifting of mobility restrictions resulted in increased business activity, driving consumer demand and boosting the economy. This economic stability had a positive impact on the banking industry's performance, which was able to record credit growth as of December 2022 by 11.35% (yoy), higher than the previous year's growth of 5.24%.

Di tengah dinamika bisnis perbankan yang semakin menantang sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja BRK Syariah yang tetap mampu memberikan hasil kinerja yang optimal yang dibuktikan dengan pencapaian realisasi bisnis yang melampaui target. Walau bagaimanapun kami berpendapat bahwa serangkaian langkah-langkah strategi perlu terus diupayakan dan ditingkatkan dengan mengacu pada perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Perbaikan di segala aspek operasional Bank perlu terus ditingkatkan termasuk kajian atas potensi 10 (sepuluh) risiko yang melekat pada bisnis perbankan syariah. Dengan landasan sikap tersebut, Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi dan jajaran manajemen BRK Syariah dapat memenuhi target sasaran usaha Bank yang tercermin dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris termasuk pihak Otoritas Jasa Keuangan.

In the midst of the increasingly challenging banking business dynamics throughout 2022, the Board of Commissioners appreciates the achievement of BRK Syariah's performance, which was still able to provide optimal performance results that exceeded targets. However, we believe that a series of strategic measures need to be continuously improved and enhanced, focusing on sustainable improvement. Improvements in all aspects of the bank's operations need to be continually enhanced, including an assessment of the potential 10 (ten) risks inherent in the Islamic banking business. With this attitude as a foundation, the Board of Commissioners is optimistic that the Board of Directors and management of BRK Syariah can meet the Bank's business target goals reflected in the Bank's Business Plan (RBB) approved by the Board of Commissioners and the Financial Services Authority.

Disadari sepenuhnya oleh Dewan Komisaris bahwa Direksi dan jajaran manajemen BRK Syariah tentu telah memberikan banyak perhatian dan konsentrasi dalam menyelesaikan proses konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) secara resmi pada tanggal 22 Agustus 2022. Dewan Komisaris berharap BRK Syariah dapat

The Board of Commissioners fully realizes that the Board of Directors and management of BRK Syariah have devoted much attention and concentration in completing the official conversion process into a Shariah Commercial Bank (BUS) on August 22, 2022. The Board of Commissioners hopes that BRK Syariah can grow as a catalyst for the Shariah economy

berkembang sebagai katalis bagi ekonomi syariah sesuai dengan RP2I (*Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia) OJK.

Berdasarkan pengamatan Dewan Komisaris, pasca konversi manajemen telah melakukan evaluasi penyempurnaan sistem teknologi informasi (TI) melalui *post implementation review* atas seluruh proses konversi menjadi Bank Syariah sesuai ketentuan OJK.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat dan telah mendisrupsi perekonomian, BRK Syariah perlu didorong untuk melakukan akselerasi transformasi digital sehingga dapat mengikuti perubahan ekosistem perekonomian yang terjadi. Transformasi digital tersebut dilakukan dengan cara memperkuat GRC dalam hal SDM, proses, teknologi, dan informasi yang membantu perusahaan mencapai kondisi kinerja berprinsip (*principles performance*) dan manajemen risiko teknologi informasi.

Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai aspek dengan mempertimbangkan capaian kinerja dalam penilaian kinerja Direksi, meliputi kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Bank. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) pada tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Untuk posisi keuangan sampai dengan akhir tahun 2022, BRK Syariah mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 1,96% atau meningkat Rp602.670 juta menjadi sebesar Rp31.382.356 juta dengan tingkat penyaluran dana atau pembiayaan netto tumbuh 4,14% menjadi sebesar Rp19.147.661 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.388.304 juta. Dewan Komisaris menyadari bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi pada BRK Syariah namun juga dialami seluruh bidang usaha. Di tengah tantangan seperti saat ini, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi cukup berhasil menerapkan strategi dalam mempertahankan pertumbuhan pembiayaan secara berhati-hati. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,29%, atau meningkat menjadi Rp26.973.705 juta, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp25.615.733 juta. Sementara total ekuitas BRK Syariah di akhir tahun 2022 meningkat 5,17% menjadi sebesar Rp3.351.932 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.187.159 juta. Adapun laba tahun berjalan BRK Syariah mengalami penurunan sebesar 7,90% menjadi sebesar Rp350.899 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp381.013 juta.

in accordance with the OJK's (Indonesia Financial Services Authority) Roadmap for the Development of the Indonesian Banking Industry.

Based on the observation of the Board of Commissioners, the management has conducted an evaluation of the enhancement of the information technology (IT) system through a post-implementation review of the entire conversion process into a Shariah Bank according to OJK regulations.

Along with the rapid development of technology that has disrupted the economy, BRK Syariah needs to be encouraged to accelerate digital transformation so that it can keep up with the changes in the economic ecosystem. This digital transformation is carried out by strengthening GRC in terms of human resources, processes, technology, and information that help the company achieve principles performance and manage IT risks.

The Board of Commissioners considers various aspects in assessing the performance of the Board of Directors, including operational performance, financial performance, and the health of the bank. The Financial Statements have been audited by the public accounting firm Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo and received an unqualified opinion in all material respects regarding the financial position PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) as of December 31, 2022, as well as its financial performance and cash flow for the year ended on that date, comply with the Financial Accounting Standards in Indonesia. As of the end of 2022, BRK Syariah recorded asset growth of 1.96% or increased by Rp602.670 billion to Rp31.382.356 billion with a net fund or financing disbursement growth of 4.14% to Rp19.147.661 billion compared to the previous year of Rp18.388.304 billion. The Board of Commissioners acknowledges that this is not only happening at BRK Syariah but also experienced in all fields of business. In the midst of challenges like now, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has successfully applied a strategy to maintain cautious financing growth. On the other hand, third-party funds grew by 5.29%, or increased to Rp26.973.705 billion, compared to 2021 of Rp25.615.733 billion. Meanwhile, BRK Syariah's total equity at the end of 2022 increased by 5.17% to Rp3.351.932 billion compared to 2021 of Rp3.187.159 billion. The current year's profit of BRK Syariah decreased by 7.90% to Rp350.899 million compared to 2021 of Rp381.013 million, .

Secara keseluruhan Dewan Komisaris berpendapat, Bank Riau Kepri Syariah sepanjang Tahun 2022 telah memperlihatkan kinerja yang baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan komitmen antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pengawasan dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Bank

Pada tahun 2022 Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan arahan, evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan strategis Bank yang disusun oleh Direksi sebagai bentuk tugas pengawasan yang mencakup rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* Bank.
2. Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2018.
3. Rekomendasi atas Laporan Implementasi Aplikasi ORSA, Edukasi Budaya Risiko dan BCM Serta Pelaksanaan *Threat Assesment*.
4. Rekomendasi atas Laporan Penyelesaian Komitmen dan Aktivitas Bank Riau Kepri Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah
5. Rekomendasi atas Laporan Perubahan Modal Disetor Bank.
6. Rekomendasi atas Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
7. Rekomendasi atas Pemenuhan Komitmen Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) Untuk Terminal *Automated Teller Machine* (ATM) dan *Electronic Data Capture* (EDC) Bank.
8. Rekomendasi atas Pengkinian Data *Track Record* Terhadap Pegawai Bank.
9. Rekomendasi atas Penerapan Program APU PPT & Sanksi Kewajiban Membayar Atas Pemeriksaan Umum Tahun 2021.
10. Rekomendasi atas Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organization (NPO).
11. Rekomendasi atas Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK.
12. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI.
13. Rekomendasi atas Penerapan Prinsip GCG Dalam Seleksi Rekanan Kerja Bank.
14. Rekomendasi atas Usulan Penunjukan Pengendali Mutu Independen Pihak Ekstern Pada Divisi Internal Audit Tahun 2019 s/d 2021.
15. Rekomendasi atas Penerapan APU PPT Berbasis Risiko Terkait Penyalahgunaan Virtual Asset.
16. Rekomendasi atas Kinerja Bank.
17. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank.
18. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Permasalahan *Skimming*.

Overall, the Board of Commissioners believes that Bank Riau Kepri Syariah has shown good performance throughout 2022, in line with the set targets and commitments between Shareholders, the Board of Commissioners, and the Directors.

Supervision in the Formulation and Implementation of Bank Strategy

In 2022, the Board of Commissioners was assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee in providing guidance, evaluation, and recommendations on the Bank's strategic policies prepared by the Directors as part of the supervisory tasks, which include the following recommendations:

1. *Recommendations on the Bank's Risk Appetite Statement Monitoring Report.*
2. *Recommendations on the 2018 Tax Examination Results Report.*
3. *Recommendations on the Implementation Report of ORSA Application, Risk Culture Education, and BCM as well as Threat Assessment Implementation.*
4. *Recommendations on the Completion Report of Bank Riau Kepri's Commitments and Activities in the Context of Changing Bank Riau Kepri's Business Activities into a Sharia Commercial Bank.*
5. *Recommendations on the Report on Changes in Bank's Paid-in Capital.*
6. *Recommendations on the Integrity Commercial Bank Report (LBUT).*
7. *Recommendations on Fulfillment of Commitments in Implementing the National Chip Technology Standard (SNTC) for Bank Automated Teller Machine (ATM) and Electronic Data Capture (EDC).*
8. *Recommendations on Updating Track Record Data for Bank Employees.*
9. *Recommendations on the Implementation of APU PPT Program & Sanctions for Paying Obligations for the 2021 General Examination.*
10. *Recommendations on the Implementation of APU PPT Program Based on Risk Related to Non-Profit Organization (NPO) Abuse.*
11. *Recommendations on the Follow-up Commitment to OJK Examination Results.*
12. *Recommendations on Follow-up to RI BPK Examination.*
13. *Recommendations on the Implementation of GCG Principles in Selecting Bank Work Partners.*
14. *Recommendations on the Appointment of Independent Quality Controllers from External Parties in the Internal Audit Division from 2019 to 2021.*
15. *Recommendations on the Implementation of APU PPT Based on Risk Related to Virtual Asset Abuse.*
16. *Recommendations on Bank Performance.*
17. *Recommendations on Follow-up to Bank Health Improvement.*
18. *Recommendations on Follow-up to Skimming Issues.*

19. Rekomendasi atas Peningkatan Kepedulian dan *Awareness* sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan *Fraud*.
20. Rekomendasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pembayaran Penyedia Jasa Pembayaran.
21. Rekomendasi atas Mitigasi Risiko dan Pencegahan Fraud di jaringan kantor Bank.
22. Rekomendasi atas Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah.
23. Rekomendasi atas Penyelenggaraan Layanan QRIS BRK Syariah.
24. Rekomendasi atas Penatausahaan Target Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial (RPIM) Tahun 2022 BRK Syariah.
25. Rekomendasi atas Audit Seluruh Aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan tanggapan dan saran kepada Direksi dengan keluarnya persetujuan atau keputusan pengawasan selama tahun 2022 meliputi aspek berikut:

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri.
2. Persetujuan atas Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.
3. Persetujuan Kendaraan Operasional dan Usulan Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank.
4. Persetujuan atas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bank.
5. Persetujuan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Pengurus Bank.
6. Persetujuan atas Perubahan Nomenklatur SOT Bank.
7. Persetujuan atas Aksi Korporasi Pelepasan/ Penjualan Surat Berharga Konvensional SUN FR0065 pada PT Bank Riau Kepri dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah.
8. Persetujuan atas Kebijakan Remunerasi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai.
9. Persetujuan atas Pembiayaan Pengurus Bank.
10. Persetujuan Pedoman Kerja Direksi dan Kode Etik Kepatuhan Bank.
11. Persetujuan atas Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).
12. Persetujuan atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan.
13. Persetujuan atas *Draft* Piagam Audit Intern Dalam Rangka Konversi Bank Umum Syariah.
14. Persetujuan atas Perubahan Nomenklatur Kebijakan.
15. Persetujuan Pembiayaan Kepada PT Sarana Pembangunan Riau.
16. Persetujuan Fasilitas *Committed Line* di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

19. Recommendation for Improving Awareness and Preventing Violations and Fraud.

20. Recommendation for the Obligation to Submit Annual Reports for Payment System Providers.

21. Recommendation for Risk Mitigation and Fraud Prevention in Bank Office Networks.
22. Recommendation for Adding 2 (two) Risks in BRK Syariah.

23. Recommendation for the Implementation of QRIS Services in BRK Syariah.
24. Recommendation for the Management of the Inclusive Macroprudential Financing Ratio (RPIM) Target in 2022 for BRK Syariah.
25. Recommendation for an Audit of all Information Technology Aspects related to the POJK regarding the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology.

Additionally, the Board of Commissioners has also provided responses and suggestions to the Board of Directors through approvals or monitoring decisions during 2022, including the following aspects:

1. Approval for the Extension of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee Members' Work Period in Bank Riau Kepri.
2. Approval for Changes in Bank's Organizational Structure and Work Procedures (SOT).
3. Approval for Operational Vehicles and Proposals for Rights and Facilities for the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank.
4. Approval for the Adjustment of Bank's Annual Work Plan and Budget (RKAT).
5. Approval for the Technical Guidelines for Bank Management Travel.
6. Approval for Changes in Bank's SOT Nomenclature.
7. Approval for Corporate Actions of Release/Sale of Conventional Securities SUN FR0065 at PT Bank Riau Kepri in the Conversion to a Sharia Commercial Bank.
8. Approval for the Remuneration Policy of Management, Sharia Supervisory Board, and Employees.
9. Approval for Financing of Bank Management.
10. Approval for the Board of Directors' Work Guidelines and Compliance Code of Ethics for the Bank.
11. Approval for the Bank Financing Policy (KPB).
12. Approval for the Company Guidelines (BPP) for Financing Recovery and Resolution.
13. Approval for the Draft of the Internal Audit Charter in the Context of the Conversion to a Sharia Commercial Bank..
14. Approval for Changes in Policy Nomenclature.
15. Approval for Financing to PT Sarana Pembangunan Riau.

16. Approval for Committed Line Facilities at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

17. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Riau Kepri Periode 1 Januari 2022 s/d 22 Agustus 2022 dan BRK Syariah Periode 23 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022.
18. Persetujuan Penyesuaian *Corporate Plan*, RKAT, dan RAKB BRK Syariah Tahun 2023.
19. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* BRK Syariah.
20. Persetujuan *Risk Appetitte Statement* BRK Syariah.
21. Persetujuan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengembangkan mekanisme *check and balance* untuk memastikan bahwa strategi pengembangan usaha yang telah disepakati bersama berjalan dengan baik. Dewan Komisaris juga melaporkan kegiatan dan hasil pengawasan tersebut kepada OJK dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris memenuhi setiap undangan OJK dalam membahas isu-isu strategis Bank, misalnya terkait implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin OJK terhadap Bank.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasehat Kepada Direksi

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan memberikan nasehat dan arahan dengan fokus pada aspek pengawasan stratejik pengembangan bisnis, perbaikan pengelolaan portofolio asset, perbaikan NPF, pengelolaan Sumber Daya Insani, serta mitigasi terhadap 10 (sepuluh) risiko yang ada di bank syariah, penggunaan modal dan pelaksanaan tata kelola Bank serta dukungan teknologi informasi terhadap operasional bank dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. Fungsi pemberian nasehat secara berkala disampaikan Dewan Komisaris pada saat rapat gabungan dengan Direksi. Selama tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi, Komite dan Divisi sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 diprediksi akan menurun dari tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan adanya resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa, berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta dampak pengetatan kebijakan moneter agresif di sejumlah negara. Ditengah situasi ketidak pastian perekonomian global, perbaikan ekonomi nasional terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan III 2022 dengan tumbuh 5,72% (yoy), lebih tinggi dari prakiraan dan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy), ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan

17. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) for Annual Financial Report Examination of PT Bank Riau Kepri Period from January 1, 2022 to August 22, 2022, and BRK Syariah Period from August 23, 2022, to December 31, 2022.
18. Approval for Adjustment of Corporate Plans, RKAT, and RAKB BRK Syariah in 2023.
19. Approval for the Bank's Business Plan (RBB) and Corporate Plan of BRK Syariah.
20. Approval for the Risk Appetite Statement of BRK Syariah.
21. Approval for the Remuneration of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have developed a check and balance mechanism to ensure that the jointly agreed business development strategy runs smoothly. The Board of Commissioners also reports these monitoring activities and their results to the OJK and the Controlling Shareholders. The Board of Commissioners attends every invitation from OJK to discuss strategic issues related to the Bank, such as the implementation of the Bank's Business Plan (RBB) or follow-up actions on the results of routine OJK inspections of the Bank.

Frequency and Method of Advice Provision to the Board of Directors

The Board of Commissioners performs oversight functions on the performance of the duties and responsibilities of the Board of Directors periodically and at any time by providing advice and guidance with a focus on strategic business development oversight aspects, improving asset portfolio management, improving NPF, managing human resources, as well as mitigating the 10 (ten) risks in Sharia banks, the use of capital, and the implementation of Bank governance and information technology support for bank operations and improving the quality of service to customers. The function of giving regular advice is conveyed by the Board of Commissioners at joint meetings with the Board of Directors. During 2022, the Board of Commissioners held joint meetings with the Board of Directors, Committees, and Divisions 53 (fifty-three) times.

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Global economic growth in 2023 is predicted to decline from 2022. This is mainly due to high recession in several countries, including the United States (US) and Europe, the continued geopolitical tensions between Russia-Ukraine, as well as the impact of aggressive monetary policy tightening in several countries. In the midst of global economic uncertainty, national economic improvement continues. Indonesia's economic performance continued to strengthen in the third quarter of 2022, growing by 5.72% (yoy), higher than the forecast and the previous quarter's achievement of 5.45% (yoy), supported by continued domestic demand improvement and high export performance. National

domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU).

Indikator stabilitas industri perbankan cukup terjaga dan menurut Bank Indonesia cukup kuat untuk menahan efek perubahan indikator makro ekonomi global. Namun demikan, Indonesia akan terus waspada terhadap terjadinya potensi resesi global yang berpotensi mempengaruhi Indonesia. Sedangkan peluang yang masih dapat dioptimalkan pencapaiannya antara lain terkait dengan besarnya potensi pertumbuhan *market share industry* keuangan syariah dan *tren industry* halal global, dukungan kebijakan pemerintah dalam mendorong perbankan syariah maupun profitabilitas industri perbankan, khususnya di Provinsi Riau dan Kepri.

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi yang disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 dan *Corporate Plan* BRK Syariah Tahun 2022-2026 sudah baik. Namun mengacu pada pencapaian bisnis pada tahun 2022 belum optimal untuk itu perlu dilakukan penyelarasan agar sejalan dengan Misi BRK Syariah. Berkenaan dengan Prospek usaha bank ke depan agar lebih memperhatikan asumsi makro ekonomi global, nasional dan regional. Diharapkan kinerja tahun ini dapat menjadi landasan pertumbuhan bisnis BRK Syariah yang lebih tinggi ke depan seiring membaiknya kondisi ekonomi.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Menurut Dewan Komisaris, penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah kebutuhan dan keniscayaan. Untuk itu implementasi tata kelola harus dijaga konsistensinya dari waktu ke waktu. Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi dan jajaran Manajemen BRK Syariah. Dewan Komisaris senantiasa pro aktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi terkait dengan pengurusan dan pengelolaan Bank. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain tercermin melalui totalitas pelaksanaan program kerja pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris untuk mengetahui proses kerja yang telah dijalankan, kesesuaian prosedur yang digunakan dalam menjaga integritas, keterbukaan serta profesionalisme, rapat internal rutin Dewan Komisaris, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi, rapat Komite-Komite dan rapat-rapat lainnya.

Setiap semester BRK Syariah melakukan *self-assessment* GCG Bank sesuai dengan pada SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, POJK No.16/POJK.03/2022

economic improvement is also reflected in the increasing growth of the majority of business fields (LU).

The indicator of stability in the banking industry is well-maintained and, according to Bank Indonesia, strong enough to withstand the effects of changes in global macroeconomic indicators. However, Indonesia will continue to be vigilant against the potential for a global recession that could potentially affect Indonesia. Meanwhile, opportunities that can still be optimized include the potential for growth in the market share of the Sharia financial industry and the global halal industry trend, government policy support in promoting Sharia banking and the profitability of the banking industry, especially in the provinces of Riau and Kepri.

The Board of Commissioners considers that the business prospects prepared by the Board of Directors presented in the Bank Business Plan for 2022-2024 and Corporate Plan for BRK Syariah for 2022-2026 are good. However, referring to the business achievements in 2022, they have not been optimal, so alignment is needed to be in line with the BRK Syariah Mission. Regarding the future business prospects of the bank, more attention needs to be paid to the assumptions of the global, national and regional macroeconomic conditions. It is hoped that this year's performance will become the foundation for higher business growth of BRK Syariah in the future, as the economic conditions improve.

Views on the Implementation of Corporate Governance

According to the Board of Commissioners, the implementation of good corporate governance is a necessity. Therefore, the implementation of governance must be consistently maintained over time. The Board of Commissioners has performed its supervisory and guidance functions on the implementation of strategies and policies carried out by the Board of Directors and the management team of BRK Syariah. The Board of Commissioners always proactively provides guidance and input to the Board of Directors regarding the management of the Bank. The supervisory function of the Board of Commissioners is reflected, among others, through the totality of the implementation of the monitoring and advisory work program of the Board of Commissioners to understand the work processes that have been carried out, the appropriateness of the procedures used in maintaining integrity, transparency, and professionalism, internal routine meetings of the Board of Commissioners, implementation of Board of Commissioners meetings and joint meetings with the Board of Directors, Committee meetings, and other meetings.

Every semester, BRK Syariah conducts a self-assessment of the Bank's GCG in accordance with SEBI No. 12/13/DPbs on the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks & Sharia Business Units and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, POJK No. 16/POJK.03/2022

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang terdiri dari 11 (sebelas) kriteria penilaian. Hasil self-assessment GCG Bank untuk di semester 2 tahun 2022 memperoleh peringkat komposit 2 dengan predikat "Baik." Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya perlu terus meningkatkan aspek pengelolaan risiko Bank dan sistem pengendalian internal yang efektif agar tercipta lingkungan pengendalian yang terintegrasi guna meningkatkan kinerja BRK Syariah secara menyeluruh.

on the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, consisting of 11 assessment criteria. The result of the Bank's GCG self-assessment for the second semester of 2022 obtained a composite ranking of 2 with the predicate "Good." This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors and all levels of management under it need to continue to improve aspects of Bank risk management and effective internal control systems to create an integrated control environment to improve the overall performance of BRK Syariah.

Implementasi Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi & Nominasi. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya mencakup (1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, apabila terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; (2) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dijalankan Direksi minimal secara triwulanan dan (3) mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko di BRK Syariah telah berjalan dengan cukup baik mengacu pada POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. BRK Syariah secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan kepedulian risiko (*risk awareness*) yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Pada tahun 2022 BRK Syariah telah melaksanakan penilaian terhadap profil risiko Bank, yaitu dengan menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional. Sejak berstatus dengan Bank Umum Syariah, pengelolaan risiko Bank mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). *Trend* hasil *self-assessment* Laporan Profil Risiko BRK Syariah selama tahun 2022 relatif stabil dengan

Risk Management Implementation

The Board of Commissioners in carrying out its risk oversight function is supported by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration & Nomination Committee. The authority and responsibilities of the Board of Commissioners include, at a minimum, (1) approving and evaluating risk management policies, in the event that there are changes to factors that significantly affect the Bank's activities; (2) evaluating the implementation of risk management policies carried out by the Board of Directors at least on a quarterly basis, and (3) evaluating and deciding on requests from the Board of Directors regarding transactions or business activities that exceed the Board of Directors' authority.

The Board of Commissioners believes that the implementation of risk management in BRK Syariah has been running quite well, referring to POJK No.16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks. BRK Syariah routinely socializes risk management implementation to all work units to create risk awareness, which is expected to create a risk culture in daily activities.

In 2022, BRK Syariah conducted an assessment of the Bank's risk profile, namely by using a risk management approach through capital and operational activities. Since being classified as a Sharia Commercial Bank, the Bank's risk management refers to POJK No. 65/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. There are 10 (ten) types of risks, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Rate of Return Risk, and Equity Investment Risk. The trend of BRK Syariah's Risk Profile self-assessment results during 2022 is relatively stable, with an Inherent Risk rating of "Low to Moderate" and a Risk Management Implementation Quality rating of

peringkat Risiko Inheren "*Low to Moderate*" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "*Satisfactory*", sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah "Peringkat 2 *Low to Moderate*". Selain itu manajemen juga telah melaksanakan Stress Testing sesuai ketentuan OJK.

"Satisfactory," resulting in an overall composite risk rating of "Rank 2 Low to Moderate." In addition, the management has also carried out Stress Testing in accordance with OJK provisions.

Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris memandang bahwa peningkatan implementasi sistem pengendalian internal BRK Syariah perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara unit kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja yang melaksanakan pengendalian, sedapat mungkin dirancang kebijakan dan prosedur agar siapapun yang memiliki jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Peningkatan implementasi *Three Lines of Defence* sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan pelaksanaan peran dan fungsi dari *risk owner*, *risk control* serta *risk assurance* sehingga pondasi sistem pengendalian internal Bank menjadi kuat.

Sistem pengendalian internal dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa BRK Syariah dikelola untuk semata-mata kepentingan perusahaan dengan menjaga dan mengamankan aset kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengurangi dampak kerugian keuangan, menghindari penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) serta meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Internal Control System

The Board of Commissioners recognizes the need to continuously improve and perfect the implementation of the internal control system of Sharia Bank BRK. The application of the four eyes principle, which separates the operational business unit from the unit responsible for controlling, should be designed through policies and procedures that minimize the opportunity for anyone holding a position to commit and/or conceal errors or deviations in performing their duties. The enhancement of the Three Lines of Defense as a layered defense mechanism, involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the implementation of the roles and functions of risk owners, risk control, and risk assurance, strengthens the foundation of the Bank's internal control system.

The internal control system is designed to provide adequate assurance that Sharia Bank BRK is managed solely for the company's interests by safeguarding and securing the Bank's assets, ensuring the availability of accurate reports, increasing compliance with applicable laws and regulations, reducing the financial losses, avoiding deviations including fraud, and enhancing organizational effectiveness and cost efficiency.

Penilaian atas Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai pedoman kerjanya. Ketiga komite tersebut telah membantu dan mendukung fungsi pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris secara positif. Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self-Assessment* GCG. Masing-masing komite telah memberikan masukan dan rekomendasi yang independen, profesional dan berkualitas, disertai dengan latar belakang permasalahan dan argumentasi yang relevan untuk setiap permasalahan yang dibahas.

Assessment of the Performance of Committees of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has established committees, including the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee, with their respective roles and responsibilities according to their work guidelines. These three committees have positively supported and assisted the Board of Commissioners' supervisory and advisory functions. The evaluation of the performance of the Board of Commissioners' committees is based on their duties and obligations stated in the Committee Charter, Committee Work Program, and GCG Self-Assessment results. Each committee has provided independent, professional, and high-quality inputs and recommendations, accompanied by relevant background issues and arguments for each issue discussed.

Komite Audit

Komite Audit bertugas memantau dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan serta tindak lanjut dalam

Audit Committee

The Audit Committee is responsible for monitoring and evaluating planning, implementation, and follow-up to

memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melakukan kajian terhadap efektifitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara berkala dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku. Selain itu, Komite Audit juga telah melakukan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit Bank Indonesia/OJK, BPK maupun Kantor Akuntan Publik. Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat minimal sebulan sekali atau sebanyak 22 kali rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris maupun dengan Divisi Internal Audit dimana tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah 100%. Selain itu, Komite Audit juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

ensure the sufficiency of internal controls, including the sufficiency of financial reporting processes. The Audit Committee has conducted a review of the effectiveness and appropriateness of the public accounting firm's audit implementation and regularly reviewed financial statements and other financial information to ensure compliance with applicable standards and rules. Additionally, the Audit Committee has evaluated and monitored follow-up actions on the results of audits conducted by Bank Indonesia/OJK, BPK, and public accounting firms. During 2022, the Audit Committee held at least one meeting per month, or a total of 22 meetings, including joint meetings with the Board of Commissioners and the Internal Audit Division, with each member of the Audit Committee having a 100% attendance rate. Furthermore, the Audit Committee has regularly reported to the Board of Commissioners.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko BRK Syariah serta menyampaikan rekomendasi terkait dengan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat minimal sebulan sekali atau sebanyak 29 kali, termasuk rapat internal maupun dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Internal Audit dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko mencapai 100%. Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is responsible for monitoring and evaluating the planning and implementation of Sharia-compliant risk management by BRK Syariah, and providing recommendations on the suitability of risk management policies and their implementation. Throughout 2022, the Risk Monitoring Committee held meetings at least once a month or a total of 29 times, including internal meetings and meetings with the Risk Management Division and Internal Audit Division , with each member of the Risk Monitoring Committee achieving a 100% attendance rate. In addition, the Risk Monitoring Committee also provided regular reports to the Board of Commissioners.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pejabat eksekutif dan pegawai mengacu pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain itu, komite juga bertugas menyusun sistem serta prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan rekomendasi calon anggota Direksi/Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan BRK Syariah. Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat minimal sebulan sekali atau sebanyak 5 kali, termasuk rapat internal maupun dengan divisi terkait dimana tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mencapai 100%. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is responsible for providing recommendations on the remuneration policies of the Board of Commissioners and Directors, including executive officers and employees, in accordance with the Remuneration and Nomination Committee Charter. Additionally, the committee is responsible for developing systems and procedures for selecting members of the Board of Commissioners and Directors, and providing recommendations for Director/Board of Commissioners candidates as needed by BRK Syariah. Throughout 2022, the Remuneration and Nomination Committee held meetings at least once a month or a total of 5 times, including internal meetings and meetings with related divisions, with each member of the Remuneration and Nomination Committee achieving a 100% attendance rate. In addition, the Remuneration and Nomination Committee also provided regular reports to the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris menilai bahwa ketiga Komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

The Board of Commissioners considers that the three Committees of the Board of Commissioners have carried out their functions and duties properly.

Pandangan atas Kebijakan *Whistleblowing System*

Implementasi WBS merupakan bagian dari tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik dugaan pelanggaran atau fraud. Di tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan pemutakhiran terhadap Kebijakan *whistleblowing* yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Keberadaan Kebijakan WBS diharapkan dapat mendorong kesadaran segenap pegawai dan pemangku kepentingan BRK Syariah untuk melaporkan *fraud* yang terjadi.

Dewan Komisaris berperan dalam pengelolaan *Whistleblowing System* diantaranya memastikan setiap pengaduan atau laporan yang diterima BRK Syariah ditindaklanjuti dengan baik oleh Pengelola WBS. Pengelola WBS akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Direksi untuk selanjutnya diadakan Rapat Direksi/Sirkulasi untuk memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau tidak. Apabila diputukan untuk dilanjuti maka akan dilakukan investigasi oleh Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* untuk pemeriksaan lebih mendalam. Hasil pemeriksaan dari Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* akan diberikan kepada petugas WBS untuk selanjutnya disampaikan kepada pelapor (*whitsleblower*). Selama tahun 2022 terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran melalui WBS dan telah selesai ditindaklanjuti.

Meskipun demikian, menurut pandangan Dewan Komisaris, tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme *system* WBS sehingga dapat lebih efektif pada masa mendatang.

Whistleblowing System Policy Overview

The implementation of the WBS is part of corporate governance and internal control systems in preventing alleged violations or fraud. In 2022, BRK Syariah updated the whistleblowing policy established in Director's Decree No.171/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022, regarding the Guidelines for Reporting Alleged Violations (Whistleblowing System).

The existence of the WBS policy is expected to encourage awareness among all employees and stakeholders of BRK Syariah to report fraud.

The Board of Commissioners plays a role in managing the Whistleblowing System, ensuring that all complaints or reports received by BRK Syariah are properly handled by the WBS Manager. The WBS Manager will follow up on the report to the Board of Directors for a Board of Directors/Circulation Meeting to decide whether or not to proceed with the report. If decided to proceed, Internal Audit Division or Fraud Investigation Team will conduct further investigations for more in-depth examination. The investigation results from Internal Audit Division or Fraud Investigation Team will be given to the WBS officer for further communication to the whistleblower. In 2022, there was 1 (one) alleged violation report through the WBS, which has been successfully handled.

However, according to the Board of Commissioners, an evaluation of the WBS mechanism is still necessary to increase its effectiveness in the future.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris atau jumlah dan komposisinya sampai dengan Laporan ini disusun adalah sama dengan tahun sebelumnya, yakni dengan susunan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Syahrial Abdi
- Komisaris Independen : Roy Prakoso
- Komisaris Independen : Rita Anugerah

Dengan demikian maka jumlah Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang saat ini berjumlah 5 (lima) orang. Seluruh Dewan Komisaris BRK Syariah berkomitmen terus meningkatkan peran aktifnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan guna mendorong pertumbuhan kinerja BRK Syariah secara berkelanjutan di masa depan.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2022, there were no changes in the composition or number of the Board of Commissioners as reported in this document, which was the same as the previous year, with the following arrangement:

- *President Commissioner : Syahrial Abdi*
- *Independent Commissioner : Roy Prakoso*
- *Independent Commissioner : Rita Anugerah*

Thus, the number of members of the Board of Commissioners is 3 (three) people, not exceeding the number of Directors, which currently amounts to 5 (five) people. All BRK Syariah Board of Commissioners are committed to continuing to improve their active role in carrying out their oversight and advisory functions to promote sustainable growth of BRK Syariah in the future.

Apresiasi Kami

Sebagai penutup, kami menyampaikan penghargaan kepada Direksi atas berbagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan, kepada seluruh pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. Keberhasilan transformasi dan konversi menjadi BRK Syariah pada tanggal 19 Agustus 2022 tentunya adalah hasil kerja keras seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, termasuk bimbingan dan arahan Dewan Pengawas Syariah maupun otoritas pengawas yang berwenang.

Insya Allah, dengan terus meningkatkan sinergi dan kerjasama yang solid ini, BRK Syariah tumbuh semakin solid sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan cita-cita kita bersama. DARI BRK SYARIAH UNTUK INDONESIA YANG BERKAH: Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Our Appreciation

In closing, we express our appreciation to the Board of Directors for their various strategies and policies, to all shareholders and stakeholders for their trust and support thus far. The success of the transformation and conversion into Sharia-compliant BRK on August 19, 2022 is certainly the result of the hard work of all parties involved, including the guidance and direction of the Sharia Supervisory Board and relevant supervisory authorities.

God Willing, by continuing to enhance this solid synergy and cooperation, BRK Syariah will continue to grow stronger and make a significant contribution to the growth of the Indonesian economy and the progress of Sharia banking in Indonesia. May Allah SWT provide ease and blessings for all of us in achieving our goals together. FROM BRK Syariah TO A BLESSED INDONESIA: The Change of Business Activities into a Sharia Commercial Bank. Amen.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Maret 2023
Atas Nama Dewan Komisaris
Pekanbaru, March 31 , 2023
On behalf of the Board of Commissioners

SYAHRIAL ABDI
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Sharia Supervisory Board Report

ZULHENDRI RAIS

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Selesainya proses konversi menjadi Bank Umum Syariah dengan *go live* operasional BRK Syariah efektif sejak tanggal 22 Agustus 2022 secara serentak (*big bang*) di seluruh jaringan BRK Syariah menjadi kekuatan sekaligus kesempatan bagi Bank untuk memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Dewan Pengawas Syariah akan terus berkomitmen dalam memastikan ketaatan Bank pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan termasuk dalam mengejar target kinerja. Kami juga mengharapkan masukan yang membangun dari segenap pemangku kepentingan agar BRK Syariah dapat hadir menjadi kebanggaan dengan membawa keberkahan berkelanjutan bagi semua.

The completion of the conversion process into a Sharia Commercial Bank with the go live of BRK Syariah operations effective from August 22, 2022 simultaneously (big bang) throughout the BRK Syariah network is a strength as well as an opportunity for the Bank to make a greater positive contribution in realizing Indonesia's goal of becoming the world's center of Islamic finance.

The Sharia Supervisory Board will continue to be committed in ensuring the Bank's adherence to sharia principles and compliance with laws and regulations including in pursuing performance targets. We also look forward to constructive input from all stakeholders so that BRK Syariah can be present to be a pride by bringing sustainable blessings to all.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, Kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan *taufiq* dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah bagi kita semua.

Perkenankan, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan apresiasi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh jajaran Bank dalam upayanya membawa BRK Syariah menuntaskan proses konversi menjadi Bank Umum Syariah seutuhnya. BRK Syariah telah melakukan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-93/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 dan Izin Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia. *Cut off* Sistem Konvensional dan *big bang* berhasil dilakukan

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

First of all, let us express our gratitude to Allah SWT for His grace and mercy, we can carry out our duties and responsibilities well. Shalawat and salam may always be poured out to the Prophet Muhammad SAW along with his family and friends. Hopefully the taufiq and guidance of Allah SWT will always be poured out for all of us.

On behalf of the Sharia Supervisory Board, I would like to express my appreciation to the Board of Directors, Board of Commissioners and all levels of the Bank in their efforts to bring BRK Syariah to complete the conversion process to a fully Sharia Commercial Bank. BRK Syariah has changed its conventional business activities to business activities based on Sharia Principles in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-93/D.03/2022 dated July 04, 2022 and the Payment System License from Bank Indonesia. Cut off of Conventional Systems and big bang

pada tanggal 19 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan Migrasi Data dan Sistem TI. Adapun *Go Live* operasional BRK Syariah efektif terlaksana sejak tanggal 22 Agustus 2022 secara serentak (*Big Bang*) di seluruh jaringan BRK Syariah. Izinkan kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah terhadap Kegiatan BRK Syariah selama tahun 2022.

was successfully carried out on August 19, 2022 followed by Data Migration and IT Systems. The BRK Syariah operational Go Live was effectively carried out since August 22, 2022 simultaneously (Big Bang) throughout the BRK Syariah network. Allow us to submit the Sharia Supervisory Board Task Implementation Report on BRK Syariah activities during 2022.

Fokus Tahun 2022

Tuntasnya proses konversi menjadi Bank Umum Syariah menjadi kekuatan sekaligus kesempatan bagi BRK Syariah untuk memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Oleh karena itu, momentum transformasi dan konversi ini sangat baik dan menjadi awal dari kontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Pada tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah memiliki sejumlah fokus dalam pemenuhan aspek syariah sebagai rekomendasi kami kepada manajemen BRK Syariah, baik terkait dengan operasional maupun bisnis Bank. Dari sisi layanan, Dewan Pengawas Syariah menilai Manajemen perlu mengakselerasi penataan ulang infrastruktur layanan, seperti jaringan maupun sistem yang merupakan kelanjutan proses dari konversi menjadi bank syariah, sehingga masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik, migrasi menjadi *Core Banking System Bank Vision Sharia*, dan peningkatan fitur-fitur layanan *digital bank*.

Dari sisi sumber daya manusia, Dewan Pengawas Syariah meminta kepada Manajemen Bank untuk meningkatkan kompetensi Insan BRK Syariah, terutama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat agar penyampaian prinsip-prinsip syariah mengepankan akhlak yang baik sehingga mampu menciptakan reputasi positif bahwa Islam merupakan rahmat bagi semesta alam.

Focus on 2022

The completion of the conversion process into a Sharia Commercial Bank is both a strength and an opportunity for BRK Syariah to make a greater positive contribution in realizing Indonesia's goal of becoming the world's center of Islamic finance. Therefore, the momentum of this transformation and conversion is very good and is the beginning of a contribution in realizing these ideals.

In 2022, the Sharia Supervisory Board has a number of focuses in fulfilling sharia aspects as our recommendations to BRK Syariah management, both related to the Bank's operations and business. In terms of services, the Sharia Supervisory Board considers that Management needs to accelerate the rearrangement of service infrastructure, such as networks and systems that are a continuation of the process of converting to an Islamic bank, so that the public can still be well served, migration to Bank Vision Sharia's Core Banking System, and increasing the bank's digital service features.

In terms of human resources, the Sharia Supervisory Board asked the Bank Management to improve the competence of BRK Syariah personnel, especially those who interact directly with the public so that the delivery of sharia principles prioritizes good morals so as to create a positive reputation that Islam is a blessing for the universe.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa No.17 tanggal 14 Juni 2022 yang dilakukan secara sirkuler menyetujui penetapan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan Surat Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal Keputusan Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan komposisi sebagai berikut:

Composition of Sharia Supervisory Board

Based on the Deed of Extraordinary GMS No.17 dated June 14, 2022 which was circularly approved the establishment of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and the Letter of the Director of Sharia Banking Regulation and Licensing of OJK No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022 regarding the Decision to Grant Permission to Change the Business Activities of Conventional Commercial Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to Sharia Commercial Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Periode Jabatan *Position Period*
Zulhendri Rais	Ketua *Chairman*	08 April 2020 – 07 April 2024 *April 08, 2020 - April 07, 2024*
Saifuddin Juliar	Anggota *Member*	07 Juni 2021 -06 Juni 2025 *June 07, 2021 -06 June 2025*

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan regulator, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board Meetings

The Sharia Supervisory Board of BRK Syariah has held and attended several meetings related to the discussion of product development, issuance of sharia opinions, Bank services, Bank operations and others related to sharia aspects. Under regulatory requirements, meetings are held at least 1 (one) time a month.

Tabel Jumlah dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
Table of Number and Attendance of Sharia Supervisory Board Meetings in 2022

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Tingkat Kehadiran *Attendance Rate*
Zulhendri Rais	Ketua *Chairman*	11	11	100%
Saifuddin Yuliar	Anggota *Member*	11	10	91%

Tabel Tanggal dan Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
Table of Dates and Agenda of Sharia Supervisory Board Meetings in 2022

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat	*Meeting Agenda*
1.	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	1. Pemaparan pembahasan kredit sindikasi MNC *Land* menjadi pembiayaan sindikasi; 2. Pembahasan kredit dengan *outstanding* nol dengan tunggakan bunga; 3. Pembahasan ketentuan pedoman pembiayaan rekening koran syariah; 4. Pembiayaan usaha mikro dengan subsidi margin Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan 5. Penyusunan jadwal pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah periode Juli-Desember 2021	*1. Presentation of the discussion of MNC Land syndicated financing into syndicated financing;* *2. Discussion of financing with zero outstanding with interest arrears;* *3. Discussion of the provisions of sharia current account financing guidelines;* *4. Micro business financing with margin subsidies from the Riau Islands Provincial Government;* *5. and Preparation of Sharia Supervisory Board examination schedule for the July-December 2021 period.*
2.	04 Maret 2022 *March 04, 2022*	Pembahasan perlakuan konversi kredit baki debet Rp0,- yang masih terdapat tunggakan bunga.	*Discussion on the treatment of conversion of outstanding financing of Rp0,- for which there are interest arrears.*
3.	18 Mei 2022 *May 18, 2022*	Pembahasan kerjasama *e-Money* Bank Mandiri dalam rangka konversi BRK Syariah.	*Discussion of Bank Mandiri e-Money cooperation in the context of BRK Syariah conversion.*
4.	30 Mei 2022 *May 30, 2022*	Pembahasan akad pada *trade finance* syariah, ekspor impor syariah, *supplier* dan *buyer financing*.	*Discussion of contracts in Islamic trade finance, Islamic import and export, supplier and buyer financing.*
5.	01 Juli 2022 *July 01, 2022*	Pembahasan *grand design sharia mindset* oleh Dewan Pengawas Syariah.	*Discussion of grand design sharia mindset by Sharia Supervisory Board.*
6.	13 September 2022 *September 13, 2022*	Pembahasan skema pengakuan pendapatan *murabahah* anuitas.	*Discussion of the annuity murabahah revenue recognition scheme.*
7.	21 Oktober 2022 *October 21, 2022*	Pembahasan akad MMQ dalam pembiayaan segmen konsumer.	*Discussion of MMQ contracts in consumer segment financing.*
8.	24 November 2022 *November 24, 2022*	Pemaparan *draft* Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah.	*Presentation of the draft Company Manual of the Sharia Supervisory Board for Sharia Supervisory Board approval.*
9.	24 November 2022 *November 24, 2022*	Pemaparan materi terkait SIPA untuk mendapat opini syariah	*Presentation of material related to SIPA to obtain sharia opinion*
10.	20 Desember 2022 *December 20, 2022*	Penyusunan jadwal rutin pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah periode Juli-Desember 2022.	*Preparation of routine Sharia Supervisory Board examination schedule for July-December 2022.*
11.	20 Desember 2022 *December 20, 2022*	Pembahasan dalam hal pemberian Dana TBDSP.	*Discussion on the provision of TBDSP funds.*

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BRK Syariah yaitu dengan memberikan pendapat syariah atau opini atas produk Bank yang akan dikeluarkan. Pada tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan opini syariah sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Task Implementation Report 2022

Direction and Recommendation of Sharia Supervisory Board in 2022

One of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board is to supervise the process of developing new BRK Syariah products by providing sharia opinions or opinions on the Bank's products that will be issued. In 2022, the Sharia Supervisory Board has provided sharia opinions as follows:

No	Tanggal *Date*	Judul Opini Dewan Pengawas Syariah	Nomor Register *Register Number*	*Title of Sharia Supervisory Board Opinion*
1.	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Opini Syariah Terhadap Peralihan Kredit Sindikasi menjadi Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah.	No. 001/O-DPS/I/2022	*Sharia Opinion on the Transfer of Syndicated Financing to Sharia Syndicated Financing in the Context of Changing Business Activities (Conversion) of Bank Riau Kepri to BRK Syariah.*
2.	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Opini Syariah tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah.	No. 002/O-DPS/I/2022	*Sharia Opinion on Sharia Current Account Financing.*
3.	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Opini Syariah tentang Pedoman Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro dengan Subsidi Margin.	No. 003/O-DPS/I/2022	*Sharia Opinion on Guidelines for Micro Business Financing with Margin Subsidization.*
4.	21 Maret 2022 *March 21, 2022*	Opini Syariah terhadap Perlakuan Konversi Kredit Baki Debet Rp.0 yang Masih Terdapat Tunggakan Bunga.	No. 004/O-DPS/III/2022	*Sharia Opinion on the Treatment of Conversion of Rp.0 Outstanding financing with Interest Arrears.*
5.	23 Mei 2022 *May 23, 2022*	Opini Syariah terhadap Pembiayaan Sindikasi PT PPSD.	No. 005/O-DPS/V/2022	*Sharia Opinion on PT PPSD Syndicated Financing.*
6.	23 Mei 2022 *May 23, 2022*	Opini Syariah terkait Kerjasama *Co-Branding* Uang Elektronik (*E-Money*) dengan Bank Mandiri.	No. 006/O-DPS/V/2022	*Opini Syariah terkait Kerjasama Co-Branding Uang Elektronik (E-Money) dengan Bank Mandiri.*
7.	30 Mei 2022 *May 30, 2022*	Opini Syariah perihal Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Bank Riau Kepri.	No. 007/O-DPS/V/2022	*Sharia Opinion regarding the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Service of Bank Riau Kepri.*
8.	30 Juni 2022 *June 30, 2022*	Opini Syariah tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Treasury.*	No. 008/O-DPS/VI/2022	*Sharia Opinion on Treasury's Corporate Manual.*
9.	30 Juni 2022 *June 30, 2022*	Opini Syariah BPP dan SOP *Trade Finance* Syariah.	No. 009/O-DPS/VI/2022	*Opini Syariah Corporate Manual dan Standard operating procedure Trade Finance Syariah.*
10.	26 Agustus 2022 *August 26, 2022*	Opini Syariah tentang QRIS.	No. 010/O-DPS/VI/2022	*Sharia Opinion on QRIS.*
11.	13 September 2022 *September 13, 2022*	Opini Syariah tentang Transaksi Impor Syariah.	No. 011/O-DPS/IX/2022	*Shariah Opinion on Shariah Import Transactions.*
12.	13 September 2022 *September 13, 2022*	Opini Syariah tentang Transaksi Ekspor Syariah.	No. 012/O-DPS/IX/2022	*Sharia Opinion on Sharia Export Transactions.*
13.	16 September 2022 *September 16, 2022*	Opini Syariah tentang Kartu Debit.	No. 013/O-DPS/IX/2022	*Sharia Opinion on Debit Cards.*
14.	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Opini Syariah tentang *Buyer Finance.*	No. 014/O-DPS/X/2022	*Sharia Opinion on Buyer Finance.*
15.	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Opini Syariah tentang *Supplier Financing.*	No. 015/O-DPS/X/2022	*Shariah Opinion on Supplier Financing.*
16.	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Opini Syariah tentang Negosiasi Wesel Ekspor.	No. 016/O-DPS/X/2022	*Shariah Opinion on Negotiating Export Notes.*
17.	21 Oktober 2022 *October 21, 2022*	Opini Syariah tentang BRKS *Mobile.*	No. 017/O-DPS/X/2022	*Sharia Opinion about BRKS Mobile.*
18.	24 Oktober 2022 *October 24, 2022*	Opini Syariah tentang Pembiayaan Aneka Guna Akad MMQ.	No. 018/O-DPS/X/2022	*Sharia Opinion on MMQ Financing.*
19.	01 November 2022 *November 01, 2022*	Opini Syariah tentang Skema Pengakuan Keuntungan *Murabahah* Anuitas.	No. 019/O-DPS/XI/2022	*Shariah Opinion on Murabahah Annuity Profit Recognition Scheme.*
20.	29 November 2022 *November 29, 2022*	Opini Syariah tentang SIPA.	No. 020/O-DPS/XI/2022	*Sharia Opinion on SIPA.*

Aktifitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan jasa. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Divisi Kepatuhan Cq. Bagian Kepatuhan Syariah yang berfungsi sebagai *liaison officer* Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dilakukan dengan proses *review*/uji petik kepatuhan atas Prinsip Syariah yang dilakukan oleh unit kerja *Sharia Compliance* untuk mengevaluasi dan menilai serta melakukan *review* terhadap pelaksanaan kegiatan dan penetapan kebijakan serta prosedur yang ada pada Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Di tahun 2022, telah dilakukan sebanyak 52 (lima puluh dua) kali *review*/ uji petik kepatuhan atas Prinsip Syariah.

Dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebagaimana tersebut diatas, maka Bank Riau Kepri Syariah berkomitmen untuk menjadi Bank yang menghadirkan kemaslahatan bagi segenap pemangku kepentingan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan manajemen BRK Syariah dan semua pihak terkait sehingga Dewan Pengawas Syariah dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas Syariah, penerbitan Opini Dewan Pengawas Syariah dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui *Self Assesment GCG* yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment GCG* ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK, serta Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada OJK dengan tembusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

The supervisory activities of the Sharia Supervisory Board include supervision of the implementation of sharia principles in the activities of raising funds and channeling funds and services. In carrying out its supervisory duties, the Sharia Supervisory Board is assisted by the Compliance Division Cq. Sharia Compliance Section which functions as the liaison officer of the Sharia Supervisory Board in carrying out its duties and responsibilities.

One form of supervision of the implementation of sharia principles is carried out by the process of reviewing / checking compliance with Sharia Principles carried out by the Sharia Compliance work unit to evaluate and assess and review the implementation of activities and the establishment of policies and procedures in the Bank so that they are in accordance with sharia principles. In 2022, 52 (fifty-two) reviews/checks of compliance with Sharia Principles were conducted.

With the supervision of the implementation of sharia principles as mentioned above, Bank Riau Kepri Syariah is committed to becoming a bank that brings benefits to all stakeholders.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment

The performance of the Sharia Supervisory Board during 2022 is inseparable from the support of BRK Syariah management and all related parties so that the Sharia Supervisory Board can carry out its various duties and responsibilities properly. This is indicated by the achievement of organizing Sharia Supervisory Board meetings, issuing Sharia Supervisory Board Opinions and Sharia Supervisory Board Supervisory Reports. The performance assessment of the Sharia Supervisory Board is carried out through GCG Self-Assessment submitted to the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 concerning Health Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The GCG Self Assessment is carried out periodically every semester and reported to OJK, as well as the Sharia Supervisory Board Supervisory Report which is submitted semi-annually to OJK with a copy of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

Penutup

Dewan Pengawas Syariah mengapresiasi segenap upaya keras Manajemen BRK Syariah dalam mewujudkan Bank yang sehat dan senantiasa patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal itu diharapkan mampu menjadi pondasi bagi BRK Syariah untuk melayani dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa. Semoga Manajemen BRK Syariah selalu memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya.

Kedepannya, Dewan Pengawas Syariah akan tetap komitmen dalam memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan termasuk dalam mengejar target kinerja. Kami juga mengharapkan masukan yang membangun dari segenap pemangku kepentingan agar BRK Syariah dapat hadir menjadi kebanggaan dengan membawa keberkahan berkelanjutan bagi semua.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Closing

The Sharia Supervisory Board appreciates all the hard efforts of BRK Syariah Management in realizing a healthy Bank and always adhering to sharia principles. This is expected to be the foundation for BRK Syariah to serve and provide maximum benefits to the nation. Hopefully, BRK Syariah Management will always uphold sharia principles in carrying out every business activity.

Going forward, the Syariah Supervisory Board will remain committed to ensuring adherence to sharia principles and compliance with laws and regulations including in pursuing performance targets. We also expect constructive input from all stakeholders so that BRK Syariah can be present to be a pride by bringing sustainable blessings to all.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 31 Maret 2023
Atas Nama Dewan Komisaris
Pekanbaru, March 31, 2023
On behalf of the Sharia Supervisory Board,

ZULHENDRI RAIS
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

LAPORAN DIREKSI
Directors Report

ANDI BUCHARI

Direktur Utama
President Director

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Tuhan semesta alam, atas Rahmat dan karunia-Nya BRK Syariah telah sukses menjalankan proses konversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan melewati tahun 2022 yang penuh tantangan dengan kinerja yang baik. Kami percaya bahwa optimisme dan kerja keras dari seluruh elemen Bank akan membawa Bank dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat mewujudkan visinya "Mewujudkan bank syariah yang *inklusif*, *resilient*, dan modern pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan".

Direksi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Bank atas kinerja yang baik selama tahun 2022. Dalam kesempatan ini Direksi akan menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Bank selama tahun 2022 terkait proses konversi dari BUK menjadi BUS, analisis kinerja Bank, analisis prospek Bank, dan penerapan tata kelola perusahaan.

Konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Sebuah Perubahan Penting

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 April 2019 memutuskan Bank Riau Kepri akan dikonversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Oleh karena itu, Bank telah membentuk Tim *Project Management Office* Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat, nasabah, pemegang saham serta semua pihak, PT Bank Riau Kepri telah melakukan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-93/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 dan Izin Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia, Alhamdulillah *Cut Off* Sistem Konvensional dan *Big Bang* telah berhasil dilakukan pada Jumat, 19 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan Migrasi Data dan *System* IT. Dengan demikian, *Go Live* Operasional dan Kegiatan Bisnis sebagai BRK Syariah dapat efektif terlaksana terhitung mulai Senin, 22 Agustus 2022 secara serentak (*Big Bang*) di seluruh jaringan BRK Syariah. Secara langsung bertempat di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Konversi BRK Syariah diresmikan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

To our respected Shareholders and Stakeholders,

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, God of the Universe, for with His mercy and grace, BRK Syariah has successfully completed the conversion process from a Conventional Commercial Bank (CCB) to a Sharia Commercial Bank (SCB) and has passed through the challenging year of 2022 with good performance. We believe that the optimism and hard work of all elements of the Bank will continue to drive its growth and development, enabling it to realize its vision of "Creating an inclusive, resilient, and modern Sharia bank that is the people's first choice, contributing significantly to sustainable regional development".

The Board of Directors expresses appreciation and gratitude to all Bank personnel for their good performance during 2022. On this occasion, the Board of Directors will present a report on the Bank's management during 2022, including the process of converting from a CCB to an SCB, an analysis of the Bank's performance, an analysis of the Bank's prospects, and the implementation of corporate governance.

Conversion to a Sharia Commercial Bank (SCB), An Important Change

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on April 22, 2019, it was decided that Bank Riau Kepri would be converted from a Conventional Commercial Bank (CCB) to a Sharia Commercial Bank (SCB). Therefore, the Bank has formed the Project Management Office Conversion Team for Bank Riau Kepri to become BRK Syariah. Alhamdulillah, thanks to the prayers and support given by the community, customers, shareholders, and all parties, PT Bank Riau Kepri has changed its conventional business activities to activities based on Sharia principles, in accordance with the Decree of the Member of the Financial Services Authority Commissioner Board Number KEP-93/D.03/2022 dated July 4, 2022, and the Payment System License from Bank Indonesia. Alhamdulillah, the Cut Off of Conventional System and Big Bang was successfully carried out on Friday, August 19, 2022, followed by Data and IT System Migration. Thus, the Operational Go-Live and Business Activities as BRK Syariah can effectively take place starting from Monday, August 22, 2022, simultaneously (Big Bang) across the entire BRK Syariah network. Directly located at the Dang Merdu Tower of BRK Syariah, the Conversion of BRK Syariah was inaugurated by

oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 25 Agustus 2022.

Sejalan dengan perubahan kegiatan usaha tersebut maka nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan (*call sign*) BRK Syariah serta dilakukan transformasi logo dan *brand* baru dengan nuansa baru merah, kuning dan hijau sesuai ciri khas Melayu, dengan filosofi Tanjak dan Perahu Lancang Kuning.

Konversi BRK Syariah, didasarkan pada beberapa alasan penting antara lain Alasan Sosiologis, Ekonomis, Yuridis dan Teologis;

1. Alasan Sosiologis
   Adat bersendi *Syara'* adalah bagian dari keseharian Sosial Masyarakat di Bumi Melayu, Riau & Kepulauan Riau. Hal ini sebagai inspirasi sekaligus aspirasi bagi Konversi BRK Syariah.
2. Alasan Ekonomis
   Ekonomi Keuangan Syariah dan Industri Halal juga telah menjadi *trend* Global, bahkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Spirit inilah, yang terus digelorakan sejak tahun 90-an sebagai cikal bakal kelahiran Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Alasan Yuridis
   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengamanatkan Bank Umum Konvensional dapat dikonversikan menjadi Bank Umum Syariah serta Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan pemisahan paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
4. Alasan Teologis
   Adalah Kaidah *Ushul Fiqih*, *Dar'ul Mafaasid*, sebagai *Maqoshidus Syar'iyah*. Mencegah kemudharatan untuk tujuan kemaslahatan Perbankan Syariah; berharap Keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah merupakan hasil dari serangkaian proses panjang dan detil, setahap demi setahap mulai dari hal-hal bersifat strategis dan teknis. Bank Riau Kepri berupaya untuk menggesa proses pra-konversi menjadi Bank Umum Syariah dengan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan regulator:

1. Kajian bisnis dan operasional;
2. Pengembangan SDI kompeten;
3. Persiapan infrastruktur IT serta *product mapping*;

the Vice President of the Republic of Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, on August 25, 2022.

In line with the change in business activities, the name PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri has been changed to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sharia (Perseroda), abbreviated as PT Bank Riau Kepri Sharia (Perseroda) with the call sign BRK Syariah. The bank also underwent a transformation of its logo and brand, with a new color scheme of red, yellow, and green that reflects the Malay characteristics, along with the philosophy of the Tanjak and Perahu Lancang Kuning.

The conversion of BRK Syariah was based on several important reasons, including sociological, economic, juridical, and theological reasons:

1. *Sociological Reasons*
   Customs that are entrenched in Syara' is a part of the daily social life of the Malay community in Riau and Riau Island. This served as both inspiration and aspiration for the conversion of BRK Syariah.
2. *Economic Reasons*
   Sharia finance and halal industry have become a global trend and a new source of economic growth. This spirit has been promoted since the 1990s as the birth of Sharia banking in Indonesia.
3. *Juridical Reasons*
   Law No. 21/2008 on Sharia Banking mandates that Conventional Commercial Banks can be converted into Sharia Commercial Banks and Conventional Commercial Banks that have Sharia Business Units (UUS) must separate no later than 15 years from the enactment of this Law.
4. *Theological Reasons*
   Becoming a center point is a principle of Ushul Fiqh, Dar'Ul Mafaasid, as Maqoshidus Syar'iyah. Preventing harm for the benefit of Sharia banking and hoping for blessings from Allah, the Almighty.

The conversion of conventional business activities into business activities based on Sharia principles is the result of a long and detailed process, step by step, starting from strategic and technical matters. Bank Riau Kepri strives to accelerate the pre-conversion process to become a Sharia commercial bank by fulfilling the requirements according to the regulator's provisions.

1. *Business and operational studies;*
2. *Competent HR development;*
3. *Preparation of IT infrastructure and product mapping;*

4. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah serta masyarakat;
5. Melaksanakan asistensi dan audiensi dengan regulator dalam rangka pemenuhan dokumen dalam rangka perizinan dan persetujuan regulator.

Pelaksanaan kegiatan pasca-konversi yang telah dilakukan BRK Syariah antara lain:

1. Penyelesaian peralihan hak & kewajiban nasabah selama 1 tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin.
2. Evaluasi Penyempurnaan IT melalui *Post Implementation Review* atas seluruh proses konversi menjadi Bank Syariah.

Walaupun cukup banyak perhatian dan konsentrasi dicurahkan untuk proses konversi, namun Alhamdulillah, Kinerja Keuangan BRK senantiasa dapat tetap terjaga. Dengan Spirit 3K (Konversi-Kinerja-Kultur) dan Transformasi 5.0, insyaAllah BRK Syariah akan terus melakukan pengembangan usaha dan jaringan, membuka kesempatan kerja, sekaligus akses keuangan bagi masyarakat bahkan hingga pulau-pulau terdepan; sebagai pemicu sekaligus pemacu Ekosistem Syariah di Kawasan Riau dan Kepulauan Riau terutama dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Dengan konversi ini, BRK Syariah tercatat sebagai Bank Umum Syariah terbesar nomor 3 di Indonesia. Per Desember 2022, aset BRK Syariah sebesar Rp31,382 triliun turut berkontribusi sebesar 3,91% dari seluruh aset perbankan syariah di Indonesia yang mencapai sebesar Rp802,257 triliun (Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan). Konversi BRK Syariah menjadi mesin baru yang diharapkan mampu mengangkat porsi aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional di Indonesia. Kami bertekad BRK Syariah akan terus berkontribusi positif dalam perkembangan dan kemajuan perbankan nasional secara umum dan perbankan syariah khususnya.

Seluruh proses konversi yang dilakukan sebagaimana telah kami laporkan di atas adalah dalam rangka memenuhi amanah dari pemegang saham yang disampaikan dalam beberapa Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh proses konversi ini telah memenuhi seluruh prosedur, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

4. Providing socialization and education to customers and the public;
5. Conducting assistance and audiences with regulators in order to fulfill document requirements for licensing and regulatory approvals.

The post-conversion activities carried out by BRK Syariah include:

1. Completion of the transfer of customer rights and obligations for 1 year since the Financial Services Authority granted permission.
2. Evaluation and improvement of IT through Post Implementation Review of the entire conversion process to become a Sharia bank.

Although a considerable amount of attention and concentration was devoted to the conversion process, Alhamdulillah, BRK's financial performance has always been maintained. With the Spirit of 3K (Conversion-Performance-Culture) and Transformation 5.0, InshaAllah, BRK Syariah will continue to develop its business and network, create job opportunities, as well as financial access for communities, even to the outermost islands, as a catalyst and driving force for the Sharia Ecosystem in the Riau and Riau Islands region, especially in supporting regional economic development.

With this conversion, BRK Syariah is recorded as the third-largest Sharia Commercial Bank in Indonesia. As of December 2022, BRK Syariah's assets amounted to Rp31.382 trillion, contributing 3.91% of the total Sharia banking assets in Indonesia, which reached Rp802.257 trillion (Source: Sharia Banking Statistics of the Financial Services Authority). The conversion of BRK Syariah is expected to become a new engine that can increase the share of Sharia banking assets towards national banking in Indonesia. We are determined that BRK Syariah will continue to contribute positively to the development and progress of the national banking industry in general and Sharia banking in particular.

All conversion processes carried out as reported above are in accordance with the mandate of the shareholders conveyed in several General Meetings of Shareholders.

Therefore, it can be concluded that all conversion processes have fulfilled all procedures, provisions, and applicable regulations in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Aktivitas Utama

Aktivitas utama BRK Syariah meliputi penghimpunan dana dari nasabah dan penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah serta penyelenggaraan jasa lainnya berdasarkan akad syariah. Penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun penyaluran dana kepada nasabah menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemberian jasa layanan perbankan yang diselenggarakan oleh BRK Syariah berdasarkan akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn* dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.

Main Activities

The main activities of BRK Syariah include collecting funds from customers and channeling funds or financing to customers as well as providing other services based on sharia contracts. The collection of funds from customers in the form of current accounts, savings, and deposits, or other forms using wadi'ah and mudharabah contracts or other contracts that are not contrary to sharia principles. The distribution of funds to customers uses mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', qardh, ijarah muntahiya bittamlik, hawalah or other contracts that do not conflict with sharia principles. Provision of banking services organized by BRK Syariah based on wakalah, hawalah, kafalah, rahn, and other contracts in accordance with sharia principles. Fulfillment of Sharia Principles is carried out by fulfilling the provisions of Islamic law, including the principles of justice and balance ('adl wa tawazun), benefit (maslahah), and universalism (alamiyah) and does not contain gharar, maysir, usury, dzalim, riswah, and haram objects.

Kebijakan Strategis dan Peran Direksi

Dengan status sebagai Bank Umum Syariah, penyusunan rencana strategis BRK Syariah berdasarkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) BRK Syariah disusun dalam rencana jangka panjang yang menjadi perencanaan bisnis dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, sedangkan Rencana Bisnis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jangka waktu 3 tahun. Pelaksanaan Rencana Korporasi dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas implementasi rencana strategis dan pencapaiannya. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab terhadap proses struktur pengendalian internal Perusahaan, penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan audit internal serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian Rencana Bisnis yang telah disusun, Direksi melakukan antara lain:

1. Melakukan *monitoring progress* dan pencapaian target inisiatif strategis.
2. Melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja terkait pencapaian kinerja.
3. Evaluasi kinerja Bank secara bulanan maupun triwulanan pada seluruh unit kerja.
4. Penyusunan Laporan Realisasi RBB.

Strategic Policy and Role of the Board of Directors

With its status as a Sharia Commercial Bank, the preparation of BRK Syariah strategic plan is based on SEOJK Number 14/SEOJK.03/2021 dated April 30, 2021 concerning Business Plans for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. BRK Syariah Corporate Plan is prepared in a long-term plan which becomes a business plan with a period of up to 5 years, while the Business Plan is prepared in the form of a Bank Business Plan (RBB) with a period of 3 years. Implementation of the Corporate Plan and RBB on an annual basis is carried out through the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

The Board of Directors is responsible for the management of the Company as stipulated in the Company's Articles of Association. The Board of Directors is responsible for the implementation of the strategic plan and its achievements. In addition, the Board of Directors is also responsible for the process of the Company's internal control structure, the implementation of risk management and the Company's accounting and bookkeeping practices in accordance with applicable regulations, overseeing the implementation of internal audits and conducting necessary follow-up in accordance with the direction of the Board of Commissioners.

To determine the progress of achieving the Business Plan that has been prepared, the Board of Directors conducts, among others:

1. *Monitor progress and achievement of strategic initiative targets.*
2. *Conduct coaching to all work units related to performance achievement.*
3. *Evaluation of the Bank's performance on a monthly and quarterly basis in all work units.*
4. *Preparation of RBB Realization Report.*

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Tidak terdapat perubahan komposisi anggota direksi di sepanjang tahun 2022. Berikut adalah susunan Direksi BRK Syariah per 31 Desember 2022.

Direktur Utama	:	Andi Buchari
Direktur Pembiayaan	:	Tengkoe Irawan
Direktur Dana dan Jasa	:	M. A. Suharto
Direktur Operasional	:	Said Syamsuri
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Fajar Restu Febriansyah

Changes in the Composition of the Board of Directors

There were no changes in the composition of the Board of Directors throughout 2022. The following is the composition of the Board of Directors of BRK Syariah as of December 31, 2022.

President Director	:	*Andi Buchari*
Financing Director	:	*Tengkoe Irawan*
Funds and Services Director	:	*M. A. Suharto*
Operation Director	:	*Said Syamsuri*
Compliance and Risk Management Director	:	*Fajar Restu Febriansyah*

Kinerja Keuangan Kami

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian. Tinjauan keuangan ini meliputi analisis terhadap laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas.

Kesuksesan BRK Syariah melakukan konversi dari BUK menjadi BUS diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan. Kinerja BRK Syariah periode 01 Januari - 21 Agustus 2022 (sebelum konversi) menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp208,08 miliar, sedangkan setelah menjadi Bank Umum Syariah (konversi) periode 22 Agustus - 31 Desember 2022 Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp295,47 miliar. Terdapat peningkatan kinerja yang tercermin dari laba setelah konversi (rentang waktu ± 4 bulan) lebih tinggi dari laba sebelum konversi (rentang waktu ± 8 bulan) sehingga kinerja sebagai Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan sebagai Bank Umum Konvensional.

Total laba sebelum pajak pada tahun 2022 sebesar Rp503,55 miliar mengalami penurunan 2,24% dari tahun 2021 sebesar Rp515,09 milar, dimana faktor pengurang laba adalah karena adanya perubahan pada peraturan tentang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dan ditetapkan kembali pada Perpu No 2 tahun 2022). Dampak dari perubahan peraturan tersebut, Bank harus membentuk kekurangan beban imbalan pasca kerja tahun 2022 sebesar Rp8,27 miliar.

Laporan posisi keuangan menunjukkan peningkatan baik aset, liabilitas, Dana Pihak Ketiga, maupun ekuitas. Jumlah aset meningkat sebesar Rp602,43 miliar atau 1,96%, dari Rp30.779 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp31.382 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pembiayaan sebesar 3,79 %, kas sebesar 103,21%, dan giro pada Bank Indonesia sebesar 70,40%.

Jumlah Liabilitas dan Dana Pihak Ketiga turut mengalami kenaikan sebesar 1,62% atau Rp444,62 miliar dari

Our Financial Performance

The following financial review refers to the financial statements as of and for the year ended December 31, 2022, which were audited by Kreston Indonesia Public Accountant Office (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) with an Unmodified Opinion. The financial review includes an analysis of the balance sheet, comprehensive income statement, and cash flow statement.

The success of BRK Syariah Bank's conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank was followed by an increase in financial performance. BRK Syariah's performance for the period of January 1 - August 21, 2022 (pre-conversion) resulted in a profit before tax of Rp208.08 billion, while after becoming a Sharia Bank (post-conversion) for the period of August 22 - December 31, 2022, the bank recorded a profit before tax of Rp295.47 billion. There was an increase in performance reflected in the post-conversion profit (± 4 months) being higher than the pre-conversion profit (± 8 months) so that the performance as a Sharia Commercial Bank is better than as a Bank.

Total profit before tax in 2022 amounted to Rp503.55 billion, a decrease of 2.24% from 2021 of Rp515.09 billion, where the factor reducing profit was due to changes in the regulations regarding Job Creation (UU No. 11 of 2020 which was later revoked and restipulated in Perpu No. 2 of 2022). As a result of the change in regulation, the Bank must form a shortfall in post-employment benefit expenses in 2022 of Rp8.27 billion.

The statement of financial position shows an increase in both assets, liabilities, Third Party Funds and equity. Total assets increased by Rp602.43 billion, or 1.96%, from Rp30,779 billion in 2021 to Rp31,382 billion in 2022. This increase was due to an increase in financing by 3.79%, cash by 103.21%, and current accounts with Bank Indonesia of 70.40%.

Total Liabilities and Third Party Funds also increased by 1.62% or Rp444.62 billion from Rp27,592 billion in 2021 to

Rp27.592 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp28.030 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama ditopang oleh kenaikan dana pihak ketiga sebesar 5,29%.

Rp28,030 billion in 2022. This increase was mainly supported by an increase in third party funds of 5.29%.

Jumlah Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp164,77 miliar, atau 5,17%. Dari Rp3.187 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.352 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 9,62% dan laba ditahan sebesar 6,21%

Total Equity increased by Rp164.77 billion, or 5.17%. From Rp3,187 billion in 2021 to Rp3,352 billion in 2022. This increase was mainly due to an increase in issued and fully paid capital of 9.62% and retained earnings of 6.21%.

Selama tahun 2022 Bank mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.594 miliar, menurun 52,00% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.319 miliar. Sedangkan dari aktivitas investasi, kas bersih yang digunakan adalah sebesar Rp8,94 miliar, menurun 62,52% dari tahun lalu yang berjumlah Rp23,86 miliar. Adapun kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp17,21 miliar. Kas pada awal tahun 2022 sebesar Rp5.192 miliar, naik 64,87% dari awal tahun 2021 yang berjumlah Rp3.149 miliar. Adapun jumlah kas pada akhir tahun 2022 sebesar Rp6.794 miliar, meningkat 9,84% dari akhir tahun sebelumnya yang berjumlah Rp6.185 miliar.

During 2022 the Bank received net cash from operating activities of Rp1,594 billion, a decrease of 52.00% from the previous year which reached Rp3,319 billion. Meanwhile, from investing activities, net cash used amounted to Rp8.94 billion, a decrease of 62.52% from last year which amounted to Rp23.86 billion. The cash obtained from financing activities amounted to Rp17.21 billion. Cash at the beginning of 2022 amounted to Rp5,192 billion, an increase of 64.87% from the beginning of 2021 which amounted to Rp3,149 billion. The amount of cash at the end of 2022 was Rp6,794 billion, an increase of 9.84% from the end of the previous year which amounted to Rp6,185 billion.

Pencapaian Target 2022

BRK Syariah berhasil membukukan kinerja yang baik di sepanjang 2022. Hal ini terlihat dari tercapainya kinerja kunci keuangan. Nilai aset Bank di akhir 2022 mencapai Rp31,38 triliun atau 102,89% dari nilai yang ditargetkan. Bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp26,97 triliun atau 101,73% dari yang ditargetkan. Dana tersebut berhasil disalurkan sebagai pembiayaan sebesar Rp19,60 triliun atau 100,28% dari yang ditargetkan. Dari proses penyaluran Pembiayaan tersebut, Bank berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp2,11 triliun atau 100,73% dari yang ditargetkan. Setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada pemilik dana, Bank berhasil memperoleh margin sebesar Rp1,48 triliun atau 97,87% dari yang ditargetkan. Di akhir tahun 2022, Bank berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp350,90 miliar atau 98,87% dari yang ditargetkan.

Target Achievement for 2022

BRK Syariah has achieved good performance throughout 2022, as seen from the achievement of key financial performance. The Bank's asset value at the end of 2022 reached Rp31.38 trillion or 102.89% of the targeted value. The Bank successfully collected third-party funds of Rp26.97 trillion or 101.73% of the targeted amount, which was channeled as financing of Rp19.60 trillion or 100.28% of the target. From the financing disbursement process, the Bank earned a revenue of Rp2.11 trillion or 100.73% of the target. After deducting the profit sharing to fund owners, the Bank obtained a margin of Rp1.48 trillion or 97.87% of the target. At the end of 2022, the Bank recorded a net profit of Rp350.90 billion, or 98.87% of the target.

Penyaluran Pembiayaan kepada Nasabah UMKM

Pembiayaan kepada nasabah UMKM telah menjadi salah satu prioritas BRK Syariah. Hal ini telah ditetapkan sebagai misi ketiga Bank yaitu "Memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat." Oleh karena itu, Bank telah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang meliputi Pembiayaan Pengusaha Mikro, Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Menengah, Pembiayaan Agribisnis Kelapa Sawit, dan KUR iB.

Financing Distribution to MSME Customers

Financing for MSME customers has become one of BRK Syariah's priorities. This has been established as the Bank's third mission which is "Strengthening the development of micro, small, and medium enterprises to achieve the welfare of the people." Therefore, the Bank has provided various financing products which include Micro Entrepreneur Financing, Small and Medium Entrepreneur Financing, Oil Palm Agribusiness Financing, and KUR iB.

Pembiayaan Pengusaha Mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro secara perseorangan dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja

Micro Entrepreneur Financing is financing provided to individual micro-entrepreneurs for productive businesses, both for working capital and investment. Meanwhile,

maupun investasi. Sedangkan Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Menengah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil & menengah perseorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi. Pembiayaan Agribisnis Kelapa Sawit diberikan kepada calon nasabah dalam rangka penanaman kembali kebun kelapa sawit yang digunakan untuk peremajaan kebun. KUR iB merupakan fasilitas Pembiayaan KUR dengan prinsip syariah untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi bagi perseorangan dan/atau kelompok usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Small and Medium Entrepreneur Financing is financing provided to individual small & medium entrepreneurs, companies, and cooperatives with the aim of productive businesses, both for working capital and investment. Oil Palm Agribusiness Financing is given to prospective customers in order to replant oil palm plantations used for plantation rejuvenation. KUR iB is a KUR Financing facility with sharia principles for working capital and/or investment purposes for individuals and/or productive business groups that are feasible but do not have additional collateral or additional collateral is not sufficient.

Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap beberapa faktor yang meliputi profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (*GCG*), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Bank telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2022 dengan *self assessment*, hasil penilaian menunjukkan bank berada pada Peringkat Komposit 2 (PK2). Hal ini mencerminkan kondisi Kesehatan Bank secara umum adalah "Sehat" sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signiikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian.

Bank Health Level

The Bank Health Level assessment covers an evaluation of several factors, including risk profile, Good Corporate Governance, earnings, and capital. The Bank has conducted a Bank Health Level assessment for the December 2022 period through self-assessment, and the results show that the Bank is at Composite Rating 2 (PK2). This reflects that the Bank's overall health condition is "Healthy," and it is deemed capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors, as reflected in the rating of evaluation factors.

Perkembangan Perekonomian dan Hambatan/Tantangan BUS

Pandemi yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun dapat ditangani dengan cukup baik. Kasus *Covid-19* domestik yang semakin terkendali mendorong penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Sejalan dengan itu pemulihan ekonomi di hampir seluruh daerah pada tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%[1]. Pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang masing-masing tumbuh sebesar 4,55% dan 5,09% pada tahun 2022[2].

Economic Development and BUS Obstacles / Challenges

The pandemic that has been running for more than 2 (two) years can be handled quite well. Domestic Covid-19 cases that are increasingly under control have led to the removal of the Restriction of Community Activities (PPKM) on December 30, 2022. In line with that, economic recovery in almost all regions in 2022 has shown better results than the previous period. Indonesia's economy in 2022 grew by 5.31%, higher than the achievement in 2021 which experienced growth of 3.70%[1]. Economic growth was also experienced by Riau Province and Riau Islands Province, which grew by 4.55% and 5.09% respectively in 2022[2].

Pada 2023, pemulihan ekonomi diperkirakan melanjutkan perbaikan, tetap tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan 2022. Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih harus dihadapkan pada guncangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari 2022. Dampak negatif ini menambah masalah seperti gangguan rantai pasok global dan kenaikan berbagai harga komoditas. Dengan perkembangan

In 2023, the economic recovery is expected to continue to improve, continuing to grow positively although lower than in 2022. Global economic conditions that have not fully recovered must be faced with the shock of the Russia-Ukraine geopolitical conflict that has emerged since the end of February 2022. This negative impact adds to problems such as global supply chain disruptions and rising commodity prices. With these developments, the global economy is

Catatan:
1. Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022, Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023.
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2022, Berita Resmi Statistik No. 11/02/14/Th. XXIV, 6 Februari 2023.
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2022, Berita Resmi Statistik No.13/02/21/Th. XVIII, 6 Februari 2023.

Notes:
1. Central Bureau of Statistics, Indonesia's Economic Growth in the Fourth Quarter of 2022, Official Statistics News No. 15/02/Th. XXVI, February 6, 2023.
2. Central Bureau of Statistics of Riau Province, Riau Economic Growth in the fourth quarter of 2022, Official Statistics No. 11/02/14/Th. XXIV, February 6, 2023.
2. Statistics Indonesia of Riau Islands Province, Economic Growth of Riau Islands in the fourth quarter of 2022, Official Statistics Report No.13/02/21/Th. XVIII, February 6, 2023.

tersebut, perekonomian global diperkirakan lebih lambat dari proyeksi sebelumnya, disertai risiko resesi di sejumlah negara[3]. Kondisi ini menjadi hambatan atau tantangan bagi industri perbankan tahun 2023.

BRK Syariah akan terus berupaya untuk dapat berkontribusi optimal dalam pemulihan ekonomi daerah maupun nasional. Bank akan terus menyalurkan pembiayaan, terutama kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar lebih berkembang dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Selain itu Bank juga akan memperioritaskan pembenahan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem TI dengan peningkatan sistem *mobile banking* dan peningkatan ketersediaan *link* dengan *e-commerce*, teknologi finansial, dan sistem pembayaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi.

Prospek Usaha ke Depan

Bank menatap optimis prospek usaha ke depan. Analisis prospek usaha disadasarkan pada kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional, keputusan kenaikan suku bunga dan penguatan respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu analisis ini juga mempertimbangkan berbagai peluang seperti stabilitas industri perbankan Indonesia, *market share* industri keuangan syariah dan tren industri halal global, kebijakan pemerintah yang mendorong perbankan syariah, profitabilitas industri perbankan, pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan pasar industri dengan industri unggulan daerah dengan NPF wajar, dan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Berdasar asumsi dan peluang tersebut, BRK Syariah optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Dengan kata lain Bank memiliki prospek usaha yang sangat baik.

Optimisme akan peningkatan kinerja jangka panjang tersebut berdasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank yang meliputi aset yang dimiliki, dukungan pemerintah daerah selaku pemegang saham, dan jaringan layanan. Aset BRK Syariah pada juni 2022 sebesar 31.4 triliun. Aset termasuk besar jika dibandingkan dengan Bank BPD lain. Aset sebesar itu dapat menjadi modal bagi pertumbuhan bisnis Bank selanjutnya. Di provinsi Riau dan Kepulauan Riau pangsa pasar aset BRK Syariah sebesar 11,7% (setelah dikurangi kinerja cabang Jakarta). Dukungan pemegang saham dan pengurus merupakan modal utama dalam pengembangan BRK Syariah. Pemegang saham berkomitmen untuk memastikan BRK Syariah tetap sebagai bank bagi semua penduduk Riau dan Kepulauan Riau, dari latar belakang Agama atau etnis apapun. Aspek pemodalan BRK Syariah menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan permodalan secara kumulatif pada tahun 2018 s/d 2022 sebesar 3,07% per tahun. Pertumbuhan

Catatan:
3 *International Monetary Fund, World Economic Outlook International Monetary Fund Update, Inflation Peaking amid Low Growth, January 2023.*

expected to be slower than previously projected, with the risk of recession in a number of countries[3]. This condition is an obstacle or challenge for the banking industry in 2023.

BRK Syariah will continue to strive to optimally contribute to regional and national economic recovery. The Bank will continue to channel financing, especially to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to be more developed while still paying attention to the bank's prudential principles. In addition, the Bank will also prioritize revamping, increasing the capacity and capability of the IT system by improving the mobile banking system and increasing the availability of links with e-commerce, financial technology, and payment systems to meet the needs of the community in transactions.

Future Business Prospects

The Bank looks optimistically at the business prospects in the future. The analysis of business prospects is based on global economic conditions, national economic conditions, decisions on interest rate increases, and the strengthening of policy response to maintain stability and the momentum of economic recovery implemented by Bank Indonesia. In addition, this analysis also considers various opportunities such as the stability of the Indonesian banking industry, market share of the Sharia financial industry, global halal industry trends, government policies that encourage Sharia banking, banking industry profitability, regional economic growth, market expansion of leading regional industries with reasonable NPF, and the quality of governance of regional governments. Based on these assumptions and opportunities, BRK Syariah is optimistic that it can continue to improve its performance in the long term. In other words, the Bank has excellent business prospects.

Optimism about the long-term performance improvement is based on the strength of the Bank, which includes its assets, support from the local government as a shareholder, and its service network. As of June 2022, BRK Syariah assets were worth Rp31.4 trillion, which is significant compared to other regional banks. These assets can serve as a capital base for the Bank's future business growth. In Riau and the Riau Islands province, BRK Syariah market share of assets is 11.7% (after deducting the Jakarta branch's performance). The support from shareholders and management is crucial for the development of BRK Syariah. Shareholders are committed to ensuring that BRK Syariah remains a bank for all residents of Riau and the Riau Islands, regardless of their religion or ethnicity. The capitalization aspect of BRK Syariah shows a positive trend, with a cumulative increase in capitalization from 2018 to 2022 of 3.07% per year. This growth in capitalization demonstrates the owners' seriousness in the future growth of BRK Syariah.

Notes:
3 International Monetary Fund, World Economic Outlook International Monetary Fund Update, Inflation Peaking amid Low Growth, January 2023.

permodalan menunjukkan keseriusan para pemilik terhadap pertumbuhan BRK Syariah ke depan.

Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Pengembangan Teknologi Informasi

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan laporan hasil *survey* yang menunjukkan bahwa 77% dari populasi Indonesia telah terhubung dan menggunakan internet pada tahun 2022. Tingkat penetrasi internet bagi generasi muda mencapai 99,16% untuk usia 13-18 tahun dan 98,64% untuk usia 19-34 tahun[4]. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet akan mendominasi interaksi masyarakat di masa yang akan datang, termasuk pada transaksi keuangan.

Fenomena ini telah dimanfaatkan oleh industri perbankan dan keuangan. Hal ini terlihat dari kehadiran bank digital dan *fintech*. Bank digital dan *fintech* telah mengubah perilaku nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, dari semula lebih banyak *offline* seperti datang ke cabang atau ATM, menjadi *online* melalui sistem *digital banking*.

BRK Syariah akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan menghadirkan layanan berbasis teknologi. BRK Syariah terus meningkatkan layanan, termasuk penyempurnaan implementasi digitalisasi perbankan. Oleh karena itu Bank memprioritaskan pembenahan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem TI. Bank telah mengembangkan sistem *mobile banking* dan ketersediaan *link* dengan *e-commerce*, teknologi finansial, dan sistem pembayaran.

BRK Syariah terus menjajaki dan mengembangkan berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah. Program-program berpotensi besar dan perlu mendapat perhatian serius antara lain layanan penerimaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, layanan sistem manajemen kas bagi institusi pendidikan di daerah, mencakup sekolah umum, sekolah Islam, dan pesantren, serta layanan sistem pembayaran gaji bagi pegawai instansi pemda dan institusi/lembaga lainnya.

Oleh karena hal di atas, BRK Syariah telah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi 2023-2027. Rencana Strategis ini memuat antara lain perencanaan strategis dan manajemen kinerja teknologi informasi, desain arsitektur teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, transformasi digital, dan *roadmap* teknologi informasi.

Jaringan Kantor BUS, Jaringan Kerja, dan Mitra Usaha

BRK Syariah meningkatkan kualitas layanan baik dengan memperluas jaringan kantor dan kerjasama dengan berbagai mitra usaha. BRK Syariah memiliki

Catatan:
4 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Profil Internet Indonesia 2022, Juni 2022.

Important Things to Expect in the Future and Information Technology Development

The Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) issued a survey report showing that 77% of Indonesia's population will be connected and using the internet by 2022. The internet penetration rate for the younger generation reached 99.16% for 13-18 year olds and 98.64% for 19-34 year olds[4]. This shows that internet usage will dominate community interaction in the future, including financial transactions.

This phenomenon has been utilized by the banking and finance industry. This can be seen from the presence of digital banks and fintech. Digital banks and fintech have changed customer behavior in conducting banking transactions, from being more offline such as coming to branches or ATMs, to online through digital banking systems.

BRK Syariah will continue to follow technological developments and present technology-based services. BRK Syariah continues to improve services, including refining the implementation of banking digitalization. Therefore the Bank prioritizes revamping, increasing the capacity and capability of IT systems. The Bank has developed a mobile banking system and the availability of links with e-commerce, financial technology, and payment systems.

BRK Syariah continues to explore and develop various potential programs to expand its sharia market share. Programs with great potential and needing serious attention include Hajj pilgrimage fee deposit acceptance services, cash management system services for educational institutions in the region, including public schools, Islamic schools, and Islamic boarding schools, as well as salary payment system services for employees of local government agencies and other institutions.

Due to the above, BRK Syariah has developed an Information Technology Strategic Plan 2023-2027. This Strategic Plan includes strategic planning and information technology performance management, information technology architecture design, information technology governance, digital transformation, and information technology roadmap.

BUS Office Network, Network, and Business Partners

BRK Syariah improves service quality both by expanding office networks and cooperation with various business partners. BRK Syariah has an office network spread across

Notes:
4 Indonesian Internet Service Providers Association (APJII), Indonesia Internet Profile 2022, June 2022.

jaringan kantor yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Provinsi DKI Jakarta. Per Desember 2022, jaringan kantor BRK Syariah terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 21 Kantor Cabang, 42 Kantor Cabang Pembantu, 40 Kantor Kedai, 55 Kantor Kas, 2 Kantor Butik, dan 14 Kantor *Payment Point*. Sementara jaringan layanan lainnya terdiri dari 373 ATM, 2 CDM, 16 *Otobanking*, dan 600 mesin EDC.

Riau Province and Riau Islands Province and DKI Jakarta Province. As of December 2022, BRK Syariah's office network consists of 1 (one) Head Office, 21 Branch Offices, 42 Sub-Branch Offices, 40 Store Offices, 55 Cash Offices, 2 Boutique Offices, and 14 Payment Point Offices. While other service networks consist of 373 ATMs, 2 CDMs, 16 Otobanking, and 600 EDC machines.

Selain membangun jaringan kantor, BRK Syariah juga memperluas jaringan layanan melalui kerja sama dengan berbagai mitra usaha. Bank melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis sejak tahun 2003, dalam perjanjian tersebut Bank mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama pada lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia. Selain itu Bank juga menjalin kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam pemanfaatan fasilitas *customisation* kartu kredit.

In addition to building an office network, BRK Syariah also expanded its service network through cooperation with various business partners. The Bank entered into a cooperation agreement for the implementation of ATM Bersama with PT Artajasa Pembayaran Elektronis since 2003, under the agreement the Bank benefited from the ATM Bersama network in more than 31,000 ATMs throughout Indonesia. In addition, the Bank also cooperates with PT Bank Syariah Indonesia Tbk in utilizing credit card customization facilities.

BRK Syariah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai asosiasi nasional, yang bertujuan untuk memperluas jaringan kemitraan strategis terkait bisnis perbankan syariah sejalan dengan perkembangan lingkungan bisnis, yakni Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi *Fintech* Syariah (AFSI), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

BRK Syariah has established strategic partnerships with various national associations, which aim to expand the network of strategic partnerships related to the Islamic banking business in line with the development of the business environment, namely the Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Fintech Syariah (AFSI), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), and Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BRK Syariah meyakini bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan berupa tata kelola yang baik. Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Implementation of Good Corporate Governance

BRK Syariah believes that strong foundations in the form of good corporate governance are essential for sustainable growth. Therefore, the application of good corporate governance as the main framework for the company's growth must be consistently and continuously implemented based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professionalism, and Fairness.

Wujud komitmen BRK Syariah dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah disusunnya *Roadmap* Tata Kelola BRK Syariah. *Roadmap* Tata Kelola BRK Syariah adalah *grand strategy* dan jejak langkah implementasi GCG menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan BRK Syariah terdiri dari 3 tahap; Tahap I (*good compliance corporation*), Tahap II (*good governed corporation*), dan Tahap III (*good sustainability governed*).

BRK Syariah's commitment to implementing good corporate governance is reflected in the development of the BRK Syariah Corporate Governance Roadmap. The BRK Syariah Corporate Governance Roadmap is a grand strategy and implementation roadmap of GCG towards sustainable corporate governance by integrating compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility aspects. The stages of the BRK Syariah Corporate Governance Roadmap consist of three stages: Stage I (good compliance corporation), Stage II (good governed corporation), and Stage III (good sustainability governed).

BRK Syariah telah melakukan *Self-Assessment Good Corporate Governance Bank*. Pelaksanaan *self-assessment Good Corporate Governance Bank* yang dilakukan setiap

BRK Syariah has conducted a self-assessment of its Good Corporate Governance practices. The implementation of the self-assessment of Good Corporate Governance practices is

semester mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, saat ini mengacu pada SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk periode Juli s.d. Desember 2022, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank* Riau Kepri Syariah yang secara umum dinilai Baik (peringkat 2), hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat di dalam *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) *Good Corporate Governance* di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Komitmen dan kerja keras BRK Syariah dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan telah membuahkan hasil yang tidak saja berupa penciptaan nilai perusahaan namun juga mendapatkan perhatian dan penghargaan dari pihak luar, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (*IICG*) dan Majalah SWA. Pada Tahun 2022 BRK Syariah meraih penghargaan **1st – The Best Indonesia GCG Award VII 2022 dengan Kategori Asset Rp15 T – Rp30 T (*Sharia Regional Development Bank Company*) pada ajang *Indonesia Good Corporate Governance Award* VII 2022**.

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*. Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri Syariah.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance*

carried out every semester in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 and SEOJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. After converting to a Sharia Commercial Bank, the bank now refers to SEBI No. 12/13/DPbs concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

For the period of July to December 2022, the bank has conducted a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance practices of Bank Riau Kepri Sharia, which is generally assessed as Good (rank 2). This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome. The determination of the ranking of the self-assessment results of Good Corporate Governance practices above is based on considerations including the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.

*The commitment and hard work of BRK Syariah in implementing Corporate Governance practices have yielded results not only in creating company value but also in gaining attention and recognition from external parties, such as The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine. In 2022, BRK Syariah received the **1st - The Best Indonesia GCG Award VII 2022 with a category of Asset Rp15 T - Rp30 T (Sharia Regional Development Bank Company) at the Indonesia Good Corporate Governance Award VII 2022 event.***

Board of Directors Performance Assessment

The evaluation of the Board of Directors' performance is conducted using parameters of bank governance implementation, specifically the implementation of tasks and responsibilities by the Board of Directors, with 3 (three) assessment aspects of governance, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome. The assessment of the Board of Directors' performance is carried out through a self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance that is submitted to OJK regularly, in accordance with OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 regarding the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is conducted using a Worksheet in accordance with SEOJK on the Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The parameters for the assessment of the Board of Directors' performance include the principles of Good Corporate Governance implementation related to the overall functions in managing Bank Riau Kepri Sharia.

Throughout 2022, BRK Syariah has conducted self-assessment of the implementation of tasks and responsibilities by the Board of Directors based on governance structure, governance process, and governance outcome with the

outcome dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik. Peringkat 2 berarti bahwa Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh 6 komite dan telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi Direksi, adapun komite-komite yang berada dibawah direksi adalah;

1. Komite *Sharia Asset and Liability Management* (SHALMA)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Sumber Daya Insani
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Pembiayaan

Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komitekomite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Kepemilikan Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Kelompok Usaha BUS

Direksi dan Dewan Komisaris BRK Syariah tidak memiliki hubungan kepemilikan saham terhadap Bank. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dengan demikian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank adalah independen.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2022 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani sebagai syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di OJK.

Pengelolaan Sumber Daya Insani

BRK Syariah memiliki 2.836 pegawai yang terdiri dari 1.933 pria dan 903 wanita. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian pegawai telah menyelesaikan pendidikan tertinggi S3, S2, S1, SMA dan SMP dengan masing-masing sebanyak 2 pegawai, 99 pegawai, 1.718 pegawai, 270 pegawai, 734 pegawai, dan 13 pegawai.

BRK Syariah telah mengembangkan strategi dan kebijakan Manajemen SDI jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis Bank, dinamika sektor bank pembangunan daerah dan maupun tuntutan pasar. Sistem pengembangan Manajemen SDI BRK Syariah

assessment result at composite rank 2 (two) or Good. A rank of 2 means that the Board of Directors, in the execution of its tasks and responsibilities, has generally implemented Good Corporate Governance that is good. This is reflected in adequate compliance with Good Corporate Governance principles. In the event of weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, such weaknesses are generally not significant and can be resolved by normal actions by the Board of Directors.

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

In carrying out its tasks and responsibilities, the Board of Directors is assisted by 6 committees that have provided valuable input to the Board of Directors. The committees under the Board of Directors are as follows:

1. *Sharia Asset and Liability Management Committee (SHALMA)*
2. *Risk Management Committee*
3. *Financing Policy Committee*
4. *Human Resources Committee*
5. *Information Technology Steering Committee*
6. *Financing Committee*

Throughout 2022, the Board of Directors assessed that the committees under the Board of Directors had carried out their tasks and responsibilities well.

Ownership of Directors and Board of Commissioners in BUS Business Group

The Board of Directors and Board of Commissioners of BRK Syariah have no share ownership relationship with the Bank. All members of the Board of Directors also have no family relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders of the Bank. Thus all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank are independent.

All members of the Board of Directors who served in 2022 have declared their independence in a statement letter of no conflict of interest signed as a requirement for administrative documents in the Capability and Compliance Assessment process at OJK.

Human Resource Management

BRK Syariah has 2,836 employees consisting of 1,933 men and 903 women. Based on the level of education, some employees have completed the highest education S3, S2, S1, SMA and SMP with 2 employees, 99 employees, 1,718 employees, 270 employees, 734 employees, and 13 employees respectively.

BRK Syariah has developed long-term SDI Management strategies and policies to support the Bank's business development plans, the dynamics of the regional development bank sector and market demands. BRK Syariah's SDI Management development system is developed

dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis Bank guna mencapai Visi untuk: "Mewujudkan Bank Syariah yang Inklusif, Resilient, dan Modern sebagai Pilihan Utama Masyarakat yang Berkontribusi Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan". Manajemen SDI telah diatur dengan Keputusan Direksi No.10/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian.

in accordance and alignment with the Bank's business strategy to achieve the Vision to: "Realizing an Inclusive, Resilient and Modern Sharia Bank as the People's First Choice that Contributes Significantly to Sustainable Regional Development". SDI management has been regulated by Board of Directors Decree No.10/KEPDIR/2019 dated February 27, 2019 concerning the Corporate Personnel Manual (BPP).

Bank telah melakukan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya saat ini maupun mengantisipasi pengembangan tugas ke depan. Selama tahun 2022, pegawai BRK Syariah telah menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 239 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 5.691 orang.

The Bank has conducted various trainings in order to improve skills in carrying out their current duties and anticipate the development of future tasks. During 2022, BRK Syariah employees have conducted 239 types of Education and Training programs with a total of 5,691 participants.

Apresiasi kepada Pemangku Kepentingan

Sebagai kata penutup laporan ini, kami seluruh anggota Direksi mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Komisaris beserta Komite dibawah Dewan Komisaris atas segala dukungan, arahan dan saran yang diberikan kepada Direksi dalam pengelolaan Bank di sepanjang tahun 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas Syariah, kesuksesan konversi dari BUK menuju BUS merupakan bukti nyata peran dan bimbingan Dewan Pengawas Syariah yang didukung dengan kerja keras seluruh elemen perusahaan. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh Pemegang Saham, Regulator, Nasabah, mitra usaha serta Pemangku Kepentingan lainnya atas dukungan, dan kepercayaan.

Appreciation to Stakeholders

As a closing statement in this report, we, all members of the Board of Directors, express our gratitude and appreciation to the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners for all the support, guidance, and advice given to the Board of Directors in managing the Bank throughout 2022. We also extend our thanks to the Sharia Supervisory Board. The successful conversion from Conventional Bank to Sharia Bank is concrete proof of the role and guidance provided by the Sharia Supervisory Board, supported by the hard work of all company elements. We also extend the same appreciation to all Shareholders, Regulators, Customers, business partners, and other stakeholders for their support and trust.

Jazakallah khairan katsiran Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jazakallah khairan katsiran Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Maret 2023
Pekanbaru, March 31, 2023

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

ANDI BUCHARI
Direktur Utama
President director

- **Andi Buchari**
  Direktur Utama
  President Director
- **Tengkoe Irawan**
  Direktur Pembiayaan
  Financing Director
- **Said Syamsuri**
  Direktur Operasional
  Operational Director
- **M. A. Suharto**
  Direktur Dana dan Jasa
  Funds and Services Director
- **Fajar Restu Febriansyah**
  Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
  Compliance and Risk Management Director

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS
Board of Directors and Commissioners Approval Sheet

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2022 PT Bank Riau Kepri Syariah

Statement of The Board of Commissioner and Directos Regarding of PT Bank Riau Kepri Syariah Responsibility Annual Report 2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah tahun 2022 telah dibuat secara lengkap dan benar, serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in PT Bank Riau Kepri Sharia's 2022 Annual Report has been fully and accurately prepared, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the company's Annual Report. We make this statement in good faith.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Roy Prakoso
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Syahrial Abdi
Komisaris Utama
President Commissioner

Rita Anugerah
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Andi Buchari
Direktur Utama
President Director

M. A. Suharto
Direktur Dana dan Jasa
Funds and Services Director

Said Syamsuri
Direktur Operasional
Operational Director

Tengkoe Irawan
Direktur Pembiayaan
Financing Director

Fajar Restu Febriansyah
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Compliance and Risk Management Director

PROSES KONVERSI

CONVERSION PROCESS

PROSES & TAHAPAN KONVERSI MENUJU BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2019-2022

Process & Stages of Conversion to Sharia Commercial Bank 2019-2022

A. LATAR BELAKANG KONVERSI

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 April 2019 memutuskan Bank Riau Kepri akan dikonversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Oleh karena itu, Bank telah membentuk Tim *Project Management Office* Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Berkat do'a dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat, nasabah, pemegang saham serta semua pihak Bank Riau Kepri telah melakukan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-93/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 dan Izin Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia, Alhamdulillah *Cut Off* Sistem Konvensional dan *Big Bang* telah berhasil dilakukan pada Jumat, 19 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan Migrasi Data dan *System* IT. Dengan demikian, *Go Live* Operasional dan Kegiatan Bisnis sebagai BRK Syariah dapat efektif terlaksana terhitung mulai Senin, 22 Agustus 2022 secara serentak (*Big Bang*) di seluruh jaringan BRK Syariah. Secara langsung bertempat di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Konversi BRK Syariah diresmikan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 25 Agustus 2022.

Sejalan dengan perubahan kegiatan usaha tersebut maka nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat BRK Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan (*call sign*) BRK Syariah serta dilakukan transformasi logo dan *brand* baru dengan nuansa baru merah, kuning dan hijau sesuai ciri khas Melayu, dengan filosofi Tanjak dan Perahu Lancang Kuning.

Konversi BRK Syariah, didasarkan pada beberapa alasan penting antara lain Alasan Sosiologis, Ekonomis, Yuridis dan Teologis;

1. Alasan Sosiologis
   Adat Bersandi Syara' adalah bagian dari keseharian sosial masyarakat di Bumi Melayu, Riau dan Kepulauan Riau. Hal ini sebagai inspirasi sekaligus aspirasi bagi Konversi BRK Syariah.
2. Alasan Ekonomis
   Ekonomi Keuangan Syariah dan Industri Halal juga telah menjadi *trend* global, bahkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Spirit inilah, yang terus digelorakan sejak tahun 90-an sebagai cikal bakal kelahiran Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Alasan Yuridis
   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengamanatkan Bank Umum Konvensional dapat dikonversikan menjadi Bank

A. CONVERSION BACKGROUND

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 22 April 2019 decided that Bank Riau Kepri would be converted from a Conventional Commercial Bank (BUK) to a Sharia Commercial Bank (BUS). Therefore, the Bank has formed a Project Management Office Team for Converting Bank Riau Kepri to BRK Syariah. Thank to the prayers and support that has been given by the community, customers, shareholders and all parties, Bank Riau Kepri has changed conventional business activities into business activities based on Sharia Principles in accordance with the Decree of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-93 /D.03/2022 dated 04 July 2022 and a Payment System Permit from Bank Indonesia, Alhamdulillah, the Cut Off of the Conventional and Big Bang Systems was successfully carried out on Friday, 19 August 2022 followed by Migration of Data and IT Systems. Thus, Go Live Operations and Business Activities as a Sharia BRK can be effectively implemented starting Monday, August 22, 2022 simultaneously (Big Bang) throughout the Sharia BRK network. Directly taking place at the BRK Syariah Dang Merdu Tower, the BRK Syariah Conversion was inaugurated by the Vice President of the Republic of Indonesia K.H. Ma'ruf Amin on August 25, 2022.

In line with the change in business activity, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri changed to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) abbreviated as BRK Syariah (Perseroda) with the nickname (call sign) BRK Syariah and a new logo and brand transformation was carried out with nuances new red, yellow and green according to Malay characteristics, with the philosophy of Tanjak and Perahu Lancang Kuning.

Conversion of BRK Syariah, based on several important reasons including Sociological, Economical, Juridical and Theological Reasons;

1. *Sociological Reasons*
   Adat Bersandi Syara' is part of the daily social life of the people in Bumi Melayu, Riau and the Riau Archipelago. This is an inspiration as well as an aspiration for BRK Syariah Conversion.
2. *Economic Reasons*
   The Islamic Financial Economy and the Halal Industry have also become a global trend, even a new source of economic growth. It is this spirit that has been inflamed since the 90s as the forerunner to the birth of Islamic Banking in Indonesia.
3. *Juridical reasons*
   Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, mandates that Conventional Commercial Banks can be converted into Islamic Commercial Banks and

Umum Syariah serta Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan pemisahan paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.

4. Alasan Teologis
   Adalah Kaidah *Ushul Fiqih*, *Dar'ul Mafaasid*, sebagai *Maqoshidus Syar'iyah*. Mencegah, kemudharatan untuk tujuan kemaslahatan Perbankan Syariah; berharap Keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Conventional Commercial Banks that have Islamic Business Units (UUS) are required to separate no later than 15 years from the enactment of this Law.

4. *Theological Reasons*
   Is the Rule of Usul Fiqh, Dar'ul Mafaasid, as Maqoshidus Syar'iyah. Prevent, harm for the benefit of Sharia Banking; hoping for the Blessing of Allah the Almighty God.

MANFAAT KONVERSI
CONVERSION BENEFITS

FOKUS
FOCUS

Transformasi menjadi Bank Umum Syariah memungkinkan Bank Riau Kepri untuk fokus di satu industri.

The transformation into an Islamic Commercial Bank allows Bank Riau Kepri to focus on one industry.

PILIHAN TEPAT
RIGHT CHOICE

Dengan kondisi sosial masyarakat melayu yang islami dan sosial ekonomi yang kondusif, perubahan usaha menjadi syariah merupakan pilihan yang tepat.

With the social conditions of the Malay community that are Islamic and socio-economically conducive, changing business to sharia is the right choice.

MAKSIMALKAN POTENSI
MAXIMIZE POTENTIAL

Kinerja keuangan Unit Usaha Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, Konversi diharapkan dapat meneruskan *trend* pertumbuhan positif tersebut dengan memaksimalkan potensi yang ada.

The financial performance of the Sharia Business Unit shows positive growth, Conversion is expected to be continue this positive growth trend by maximizing the existing potential.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Konversi menjadi Bank Umum Syariah, dilakukan persiapan operasional yang tertuang dalam Studi Kelayakan Potensi Ekonomi dan Peluang Pasar.

Rencana Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah yaitu:

1. **Potensi Bisnis Bank Riau Kepri**
   1.1. Perkembangan Pangsa Pasar Aset Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
   - Aset Perbankan Syariah secara nasional pada tahun 2018-2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini terlihat dari pangsa pasar aset Perbankan Syariah yang terus meningkat. Secara nasional, pangsa aset Perbankan Syariah meningkat dari 5,9% pada tahun 2018 ke 6,1% pada tahun 2019 dan naik menjadi 6,5% pada tahun 2020 terhadap pangsa aset perbankan konvensional.

As a follow-up to the implementation of the Conversion to become an Islamic Commercial Bank, operational preparations are made as contained in the Feasibility Study on Economic Potential and Market Opportunities.

The Planned Conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah, namely:

1. ***Business Potential of Bank Riau Kepri***
   1.1. Development of Islamic Banking Asset Market Share in Riau and Riau Islands Provinces
   - *Nationally, Sharia Banking assets in 2018-2020 showed significant development, this can be seen from the increasing market share of Sharia Banking assets. Nationally, the share of Sharia Banking assets increased from 5.9% in 2018 to 6.1% in 2019 and rose to 6.5% in 2020 of the share of conventional banking assets.*

- Pertumbuhan *market share* Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional yang menunjukkan bahwa Perbankan Syariah memiliki prospek yang baik ke depan. Pangsa pasar aset Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau meningkat dari 7,4% pada tahun 2018 ke 8,2% pada tahun 2019 dan terus naik ke 9,3% pada tahun 2020.

- *The growth of Sharia Banking market share in Riau and Riau Islands Provinces is higher than national growth which shows that Sharia Banking has good prospects going forward. The market share of Sharia Banking assets in Riau and Riau Islands Provinces increased from 7.4% in 2018 to 8.2% in 2019 and continues to rise to 9.3% in 2020.*

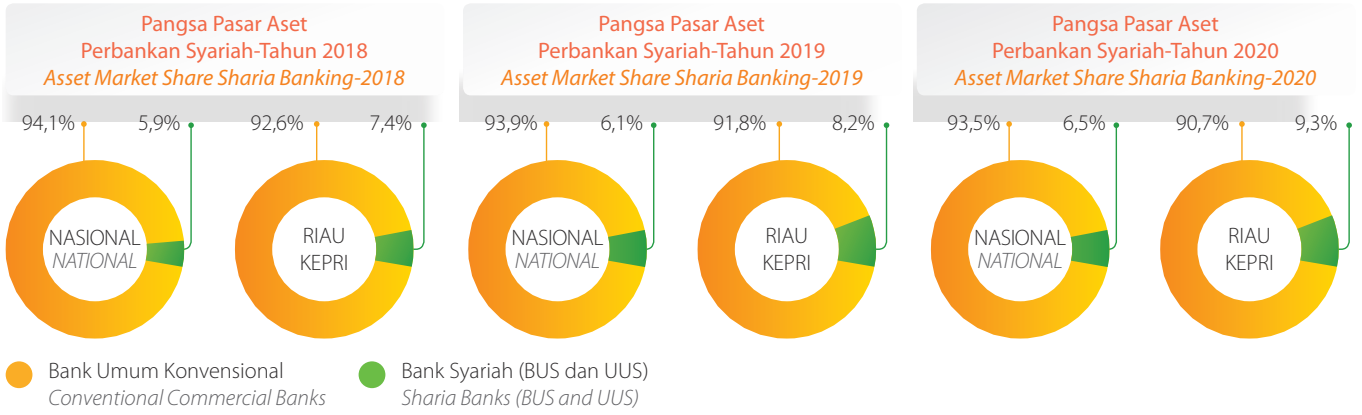

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia-Desember 2019, OJK, diolah
Source: Sharia Banking Statistics and Indonesia-December 2019 Banking Statistics, OJK, processed

1.2. Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

- Penyaluran dana dalam bentuk kredit/ pembiayaan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau pada tahun 2019-2020 cukup stabil. Penyaluran dana tahun 2020 tumbuh 5,86% dari sebesar Rp10,880 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp11,518 triliun pada tahun 2020.
- Pertumbuhan penyaluran dana secara langung meningkatkan pangsa pasar pembiayaan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari 10,1% pada tahun 2019 menjadi 10,5% di tahun 2020.

1.2. Market Share of Third Party Fund and Sharia Banking Financing in Riau and Riau Islands Provinces

- *Distribution of funds in the form of credit/ financing in Riau and Riau Islands Provinces in 2019-2020 was quite stable. Distribution of funds in 2020 grew 5.86% from IDR 10.880 trillion in 2019 to IDR 11.518 trillion in 2020.*
- *The growth in channeling of funds has directly increased the market share of Sharia financing in Riau and Riau Islands Provinces from 10.1% in 2019 to 10.5% in 2020.*

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Pangsa Pasar Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS)
Riau Province Kepri Market Share of Sharia Banking Financing (BUS and UUS)

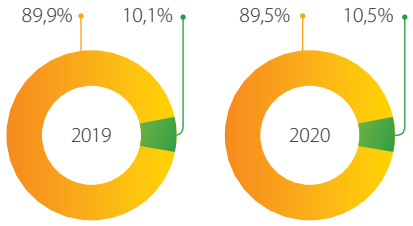

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Pangsa Pasar Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (BUS dan UUS)
Riau Province Kepri Market Share of Sharia Banking Third Party Funds (BUS and UUS)

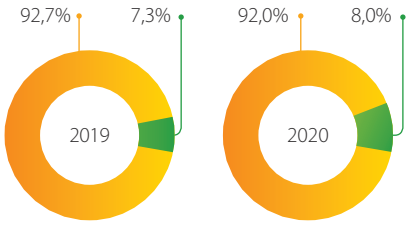

Bank Umum Konvensional
Conventional Commercial Banks

Bank Syariah (BUS dan UUS)
Sharia Banks (BUS and UUS)

1.3. Potensi Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga BRK Syariah Berdasarkan Lokasi 2021-2023

1.3. Potential of BRK Syariah Financing and Third Party Fund Based on Location 2021-2023

Pos	Portfolio	2021 Tahun Konversi *2021 Year of Conversion*	2022	2023	CAGR 3 th	Komposisi terhadap Segmen Kredit/CASA/Depo *Composition to Segment Credit/CASA/Depo*
Perkotaan (Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang) *City (Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang)*	Pembiayaan Konsumer *Consumer Financing*	5.291	5.645	6.024	4,9%	34%
	Pembiayaan UMKM *MSME Financing*	436	469	506	7,3%	16%
	CASA (giro & tabungan) *CASA (giro & savings)*	4.004	4.251	4.637	4,5%	35%
	Deposito	4.887	4.984	5.224	7,0%	43%
Non-Perkotaan Wilayah Riau *Non-City Region of Riau*	Pembiayaan Konsumer *Consumer Financing*	8.288	8.842	9.434	4,9%	53%
	Pembiayaan UMKM *MSME Financing*	2.043	2.196	2.370	7,4%	74%
	CASA (giro & tabungan) *CASA (giro & savings)*	5.764	6.120	6.676	12,2%	51%
	Deposito	1.362	1.390	1.457	-2,2%	12%
Non-Perkotaan Wilayah Kepri *Non-City Region of Kepri*	Pembiayaan Konsumer *Consumer Financing*	2.022	2.157	2.302	4,7%	13%
	Pembiayaan UMKM *MSME Financing*	274	294	317	6,6%	9,9%
	CASA (giro & tabungan) *CASA (giro & savings)*	1.572	1.669	1.821	13,3%	14%
	Deposito	418	426	446	-1,7%	3,7%
Lainnya *Other*	Pembiayaan UMKM *MSME Financing*	1.513	1.656	1.794	22,4%	7,9%
	CASA (giro & tabungan) *CASA (giro & savings)*	7,5	7,9	8,7	34,6%	0,1%
	Deposito	4.681	4.774	5.004	-6,6%	41%

1.4. Potensi Ekonomi Daerah

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2019 tumbuh sebesar 2,84% (yoy) dan Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 4,89% (yoy). Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi yaitu mengalami pertumbuhan

1.4. Regional Economic Potential

- *Riau Province's economic growth in 2019 grew by 2.84% (yoy) and the Riau Islands Province grew by 4.89% (yoy). However, in 2020 the GRDP growth rate for Riau Province and Riau Islands Province experienced a contraction, namely experiencing growth of -1.12% and -3.80%, respectively. Overall, the economic*

masing-masing -1,12% dan -3,80%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera yaitu -1,19% (yoy). Namun dari sisi kontribusi, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa. Kontribusi PDRB Provinsi Riau terhadap total seluruh provinsi di Indonesia sebesar 4,62% pada tahun 2020.

- Sektor Unggulan Provinsi Riau
  a. Sektor Industri (Kawasan Industri)
  b. Sektor Pertambangan (Batu Bara & Emas)
  c. Sektor Perkebunan (Kelapa Sawit & Karet)
  d. Sektor Perikanan (Perairan Laut/Payau)
  e. Sektor Pertanian (Pangan & Holtikultura)
  f. Sektor Pariwisata (Wisata Halal & Religi)
- Sektor Unggulan Provinsi Kepulauan Riau
  a. Sektor pariwisata, sektor kemaritiman seperti perkapalan, perikanan, pelayaran, dan wisata bahari, dan sektor pertanian kehutanan.
  b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan, akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari *refinery* maupun dari proses *smelter*.
  c. Kawasan Industri Halal (KIH) Bintan atau Bintan Inti Halal Hub adalah salah satu dari tiga kawasan industri halal perintis di Indonesia. Dua KIH lainnya yakni Halal Modern Valley di Serang, Banten dan Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur. KIH Bintan juga berdaya dengan adanya pelabuhan, gedung pabrik dan pergudangan khusus halal.

1.5. Perkembangan Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

- Volume aset Perbankan Syariah di Provinsi Riau - Kepulauan Riau terus tumbuh dan pada tahun 2020 mencapai Rp17,014 triliun, naik sebesar 22,5% dibandingkan tahun 2019 dengan total asset sebesar Rp13,889 triliun. Pada tahun 2017, aset Perbankan Syariah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, namun di tahun 2018 kembali meningkat hingga tahun 2020.
- Dari sisi pembiayaan, volume pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah di Riau dan Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar Rp11,518 triliun, masih dapat tumbuh 5,86% dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp10,880 triliun.

growth of the Riau and Riau Islands provinces is below the average economic growth for the Sumatra region, which is -1.19% (yoy). However, in terms of contribution, Riau Province is the province with the 6th largest GRDP in Indonesia or the 2nd largest outside Java Island. Riau Province's GRDP contribution to the total of all provinces in Indonesia is 4.62% in 2020.

- *Main Sector of Riau Province*
  a. Industrial Sector (Industrial Area)
  b. Mining Sector (Coal & Gold)
  c. Plantation Sector (Palm Oil & Rubber)
  d. Fishery Sector (Sea Water/Brackish)
  e. Agriculture Sector (Food & Horticulture)
  f. Tourism Sector (Halal & Religious Tourism)
- *Leading Sector of Riau Archipelago Province*
  a. The tourism sector, the maritime sector such as shipping, fisheries, shipping and marine tourism, and the forestry-agriculture sector.
  b. The Galang Batang Special Economic Zone (KEK) is located on Bintan Island. It will be developed as a center for the processing of mineral products (bauxite) and its derivative products, both from refineries and from smelter processes.
  c. The Bintan Halal Industrial Area (KIH) or Bintan Inti Halal Hub is one of the three pioneering halal industrial areas in Indonesia. The other two KIHs are Halal Modern Valley in Serang, Banten and Halal Industrial Park in Sidoarjo, East Java. KIH Bintan is also empowered by the existence of a port, factory building and special halal warehouses.

1.5. Development of Islamic Banking in Riau and Riau Islands Provinces

- *The volume of Sharia Banking assets in Riau - Kepri Province continues to grow and in 2020 it reaches IDR 17.014 trillion, an increase of 22.5% compared to 2019 with total assets of IDR 13.889 trillion. In 2017, Sharia Banking assets decreased compared to 2016, but in 2018 they increased again until 2020.*
- *In terms of financing, the volume of financing channeled by Sharia Banking in Riau and Riau Islands in 2020 amounted to IDR 11.518 trillion, still able to grow 5.86% compared to 2019, which was IDR 10.880 trillion.*

- Perkembangan dana yang berhasil dihimpun Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau secara konsisten terus tumbuh sejak tahun 2016. Pada periode tahun 2020 dana yang berhasil dihimpun Perbankan Syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mencapai Rp12,245 triliun yang berarti tumbuh sebesar 23,3% (yoy) dibandingkan tahun 2019.

- *The development of funds that have been successfully collected by Islamic Banking in the Riau and Riau Island Province has consistently continued to grow since 2016. In the 2020 period, the funds that have been successfully collected by Sharia Banking in the Riau and Riau Island Province reached IDR 12.245 trillion, which means it grew by 23.3% (yoy) compared to 2019.*

PENYALURAN DANA

Pembiayaan Perbankan Syariah walaupun masa pandemi, secara tahunan masih **tumbuh sebesar 6,48%** (yoy) atau meningkat sebesar Rp0,638 triliun dibandingkan pembiayaan tahun 2019. Pembiayaan ke depan diarahkan kepada sektor- sektor potensial di daerah.

DISTRIBUTION OF FUNDS

*Sharia Banking **financing**, despite the pandemic, on an annual basis **still grew by 6.48%** (yoy) or an increase of Rp. 0.638 trillion compared to financing in 2019. Future financing is directed at potential sectors in the regions.*

PENGHIMPUNAN DANA

Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp12.245 triliun atau tumbuh sebesar **23,29%** dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga tahun 2019. Dalam 3 tahun terakhir, penghimpunan dana secara konstan terus meningkat

FUNDRAISING

*Sharia Banking **Third-party funds** until 2020 reached IDR 12,245 trillion or grew by **23.29%** compared to 2019 Third Party Fund. In the last 3 years, fundraising has constantly increased*

FUNGSI INTERMEDIASI

FDR Perbankan Syariah di Riau dan Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar **94,07%** jauh lebih baik dibandingkan FDR tahun 2019. **Turunnya FDR** dikarenakan pada tahun 2020 **pertumbuhan dana sebesar 23,29%**, jauh di atas pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan yaitu **5,86%.**

INTERMEDIATION FUNCTION

***The FDR** of Sharia Banking in Riau and the Riau Islands in 2020 was **94.07%**, much better than the FDR in 2019. The **decrease in FDR** was due to the fact that in 2020 the **growth of funds was 23.29%**, far above the growth in disbursed financing, which was **5.86%**.*

RISIKO PEMBIAYAAN

Pertumbuhan pembiayaan Perbankan Syariah diikuti dengan **meningkatnya risiko pembiayaan**, yang ditunjukkan dengan nilai **NPF** (2,10%) yang **meningkat** dibandingkan dengan NPF tahun 2018 (2,08%). Ketentuan OJK mengenai relaksasi restrukturisasi sangat membantu rasio NPF yang rendah

FINANCING RISK

*The growth in Sharia Banking financing was followed by an **increase in financing risk**, as indicated by the NPF value (2.10%) which **increased** compared to the **NPF** in 2018 (2.08%). OJK provisions regarding relaxation of restructuring greatly help the low NPF ratio*

2. Aspirasi Masyarakat terhadap Rencana Konversi

- Sebagian besar responden (Nasabah dan non Nasabah) memandang Bank Syariah sebagai Bank dengan sistem operasional sesuai kaidah Islam dengan akad yang lebih jelas dan Bank dengan sistem bagi hasil.
- Keberadaan UUS Bank Riau Kepri diketahui oleh 73% responden dan persepsi responden mengenai UUS Bank Riau Kepri lebih baik dari Bank Riau Kepri Konvensional (9%).
- Mayoritas Nasabah menyatakan akan tetap menjadi nasabah jika Bank Riau Kepri melakukan konversi menjadi Bank Syariah, asalkan BRK Syariah tetap memberikan pelayanan, kenyamanan dan keuntungan yang minimal sama bagi nasabah.

2. Community Aspirations for the Conversion Plan

- *Most of the respondents (Customers and non-Customers) view Islamic banks as banks with an operational system in accordance with Islamic principles with clearer contracts and banks with a profit-sharing system.*
- *The existence of Bank Riau Kepri UUS was known by 73% of respondents and the respondent's perception of UUS Bank Riau Kepri was better than Bank Riau Kepri Conventional (9%).*
- *The majority of Customers state that they will remain customers if Bank Riau Kepri converts to become a Sharia Bank, as long as BRK Syariah continues to provide services, comfort and benefits that are at least the same for customers.*

- Sebagian besar Pegawai Bank Riau Kepri (92%) memandang Bank Syariah sebagai perbankan untuk semua kalangan dengan produk yang lebih beragam serta dilakukan oleh pegawai Bank Muslim dan Non Muslim.

- *Most Bank Riau Kepri Employees (92%) view Islamic Banks as banking for all people with a more diverse product range and are carried out by employees of Muslim and Non-Muslim Banks.*

3. Kajian *Brand Equity* Bank Riau Kepri

- *Brand equity* atau ekuitas merk memperlihatkan nilai lebih perusahaan dibandingkan dengan *brand* kompetitor. Nilai ekuitas *brand* ditentukan oleh persepsi dan pengalaman pelanggan pada *brand* tersebut. Setiap perusahaan berusaha memiliki ekuitas *brand* yang positif karena perusahaan yang memiliki *brand equity* yang tinggi akan mudah diingat, mudah dikenai dan unggul dari segi kualitas.
- Dengan menggunakan pendekatan *customer path*, *awareness* terhadap Bank Riau Kepri sudah cukup tinggi (87,9%), namun *awareness* tersebut seharusnya bisa mendekati 100% sehingga *awareness* Bank Riau Kepri bisa terkonversi secara maksimal ke tahap-tahap selanjutnya dari proses konversi menjadi BRK Syariah.
- Tingkat *awareness* masyarakat terhadap Bank Riau Kepri mencapai 87,9% dan mayoritas responden mempersepsikan Bank Riau Kepri sebagai Bank milik Pemerintah Daerah. Tingkat *awareness* harus semakin meningkat setelah konversi menjadi BRK Syariah.

3. Bank Riau Kepri Brand Equity Study

- *Brand equity or brand equity shows the company's added value compared to competing brands. The value of brand equity is determined by the customer's perception and experience of the brand. Every company tries to have positive brand equity because companies with high brand equity will be easy to remember, easy to apply and superior in terms of quality.*

- *By using the customer path approach, awareness of Bank Riau Kepri is already quite high (87.9%), but this awareness should be close to 100% so that Bank Riau Kepri awareness can be maximally converted to the next stages of the conversion process to become a BRK Syariah.*

- *The level of public awareness of Bank Riau Kepri reached 87.9% and the majority of respondents perceived Bank Riau Kepri as a Regional Government-owned Bank. The level of awareness must increase after the conversion to BRK Syariah.*

B. DASAR HUKUM KONVERSI

B. LEGAL BASIS OF CONVERSION

Ketentuan *Provision*	Tanggal *Date*	Tentang *About*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008*	16 Juli 2008 *July 16, 2008*	Tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah paling lambat 15 (lima belas tahun) sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling lambat tahun 2023. *Regarding Islamic Banking, which requires the separation of Islamic Business Units (UUS) in Conventional Commercial Banks to become Islamic Commercial Banks no later than 15 (fifteen years) since the enactment of this Law or no later than 2023.*
Peraturan OJK NO. 64/POJK.03/2016 *OJK Regulation NO. 64/POJK.03/2016*	22 Desember 2016 *December 22, 2016*	Tentang Perubahan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Concerning Conventional Bank Business Changes to Become Sharia Banks.*
Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.03/2017 *OJK Circular Letter No 2/SEOJK.03/2017*	03 Januari 2017 *January 03, 2017*	Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. *Concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Become Sharia Commercial Banks.*
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Riau Kepri Nomor 13 dibuat dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH, Notaris di Pekanbaru *Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Riau Kepri Number 13 made before Notary Pupung Mulyantini, SH.MH, Notary in Pekanbaru*	22 April 2019 *April 22, 2019*	RUPS menyetujui konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah. *The GMS approved the conversion of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank.*

Ketentuan *Provision*	Tanggal *Date*	Tentang *About*
Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 23/ KEPDIR/2019 *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 23/ KEPDIR/2019*	17 Mei 2019 *May 17, 2019*	Tentang Tim Project Management Konversi Bank Riau Kepri Menjadi BRK Syariah, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, dengan perubahan terakhir Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 082/KEPDIR/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Revitalisasi *Project Management Office* Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah. *About the Conversion Management Project Team Bank Riau Kepri Becomes BRK Syariah, which has been amended several times, with the last amendment being the Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 082/ KEPDIR/2021 dated 12 November 2021 concerning the Revitalization of the Project Management Office Conversion of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank.*
Peraturan Daerah Provinsi Riau No.3 Tahun 2022 *Riau Province Regional Regulation No. 3 of 2022*	24 Mei 2022 *May 24, 2022*	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroran Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau. *Regarding Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2002 concerning Changes in the Form of Legal Entity for the Riau Regional Development Bank from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) for the Riau Regional Development Bank.*
Akta Anggaran Dasar BRK Syariah No.17 *Deed of Articles of Association of BRK Syariah No.17*	14 Juni 2022 *June 14, 2022*	Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Disingkat Bank Riau Kepri Secara Sirkuler. *Statement of Shareholders Meeting Resolutions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Abbreviated Bank Riau Kepri Circularly.*
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0040576.AH.01.02.Tahun 2022 *Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0040576. AH.01.02.Year 2022*	15 Juni 2022 *June 15, 2022*	Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Perseroda. *Concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of a Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Perseroda.*
Keputusan Anggota Komisioner OJK No. KEP-93/D.03/2022 *OJK Commissioner Member Decision No. KEP-93/D.03/2022*	04 Juli 2022 *July 04, 2022*	Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). *Concerning the Granting of Permits for Changing Business Activities of Conventional Commercial Banks from PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to become Sharia Commercial Banks PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

C. STRUKTUR ORGANISASI TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) KONVERSI

Dalam rangka melaksanakan aktivitas yang mendukung percepatan proses perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah menetapkan susunan Tim *Project Manajement Office* Konversi yang telah mengalami beberapa perubahan dan sebagaimana perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 082/KEPDIR/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Revitalisasi *Project Management Office* Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah sebagai berikut:

C. *ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CONVERSION PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) TEAM*

In order to carry out activities that support the acceleration of the process of changing the business activities of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank, the Bank has established the composition of the Conversion Office Management Project Team which has undergone several changes and as the last amendment is in accordance with the Decree of the Directors Number 082/KEPDIR/2021 dated 12 November 2021 regarding the Revitalization of the Project Management Office Conversion of Bank Riau Kepri to Become an Islamic Commercial Bank as follows:

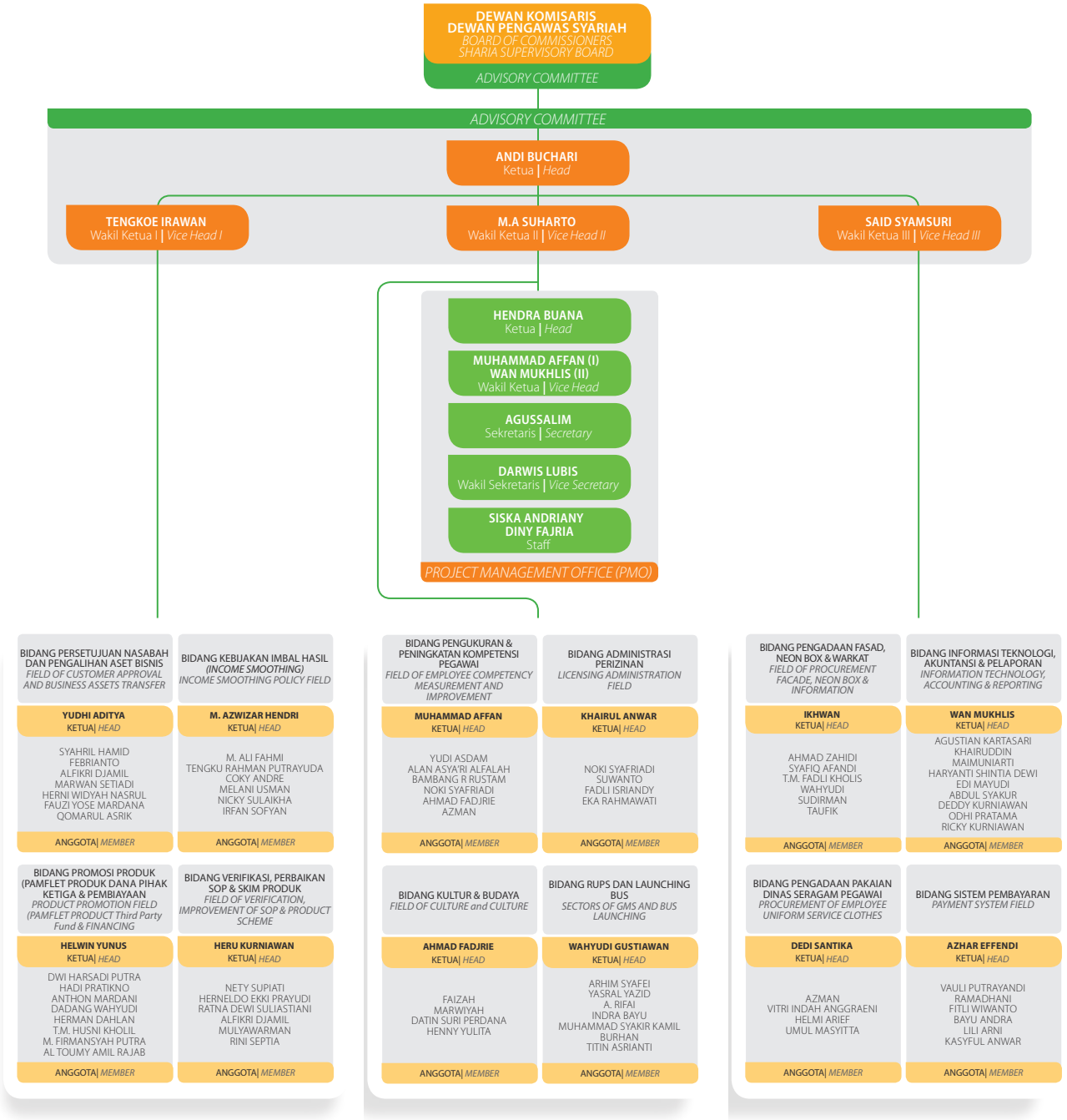

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Revitalisasi *Project Management Office* sebagai berikut:

1. ***Supervisory Committee***
   - Ketua; mengkoordinir, mengarahkan, menggerakkan, mengawasi, mengevaluasi dan memastikan seluruh tahapan konversi dilaksanakan secara *governance* dan potensi risiko telah dimitigasi secara komprehensif sehingga seluruh pelaksanaan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah dapat berjalan dengan baik.
   - Wakil Ketua I melakukan supervisi:
     1). Bidang Persetujuan Nasabah dan Pengalihan Aset Bisnis
     2). Bidang Media Promosi Produk
     3). Bidang Kebijakan Imbal Hasil (*Income Smoothing*)
     4). Bidang Verifikasi, Perbaikan SOP & Skim Produk.

     Tugas dan tanggungjawab mengkoordinir, mengarahkan, menggerakkan, mengawasi, mengevaluasi dan memastikan seluruh tahapan konversi dilaksanakan secara *governance* dan potensi risiko telah dimitigasi secara komprehensif sehingga seluruh pelaksanaan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah dapat berjalan dengan baik.
   - Wakil Ketua II melakukan supervisi:
     1). Bidang Pengkuran & Peningkatan Kompetensi Pegawai
     2). Bidang Administrasi Perizinan
     3). Bidang Kultur & Budaya
     4). Bidang RUPS dan *Launching* BUS

     Tugas dan tanggung jawab mengkoordinir, mengarahkan, menggerakkan, mengawasi, mengevaluasi dan memastikan seluruh tahapan konversi telah dilaksanakan secara *governance* dan potensi risiko telah dimitigasi secara komprehensif sehingga seluruh pelaksanaan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah dapat berjalan dengan baik.
   - Wakil Ketua III melakukan supervisi:
     1). Bidang Pengadaan Fasad, *Neon Box* & Warkat
     2). Bidang Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai
     3). Bidang Informasi Teknologi, Akuntansi & Pelaporan
     4). Bidang Sistem Pembayaran

     Tugas dan tanggung jawab mengkoordinir, mengarahkan, menggerakkan, mengawasi, mengevaluasi dan memastikan seluruh tahapan konversi dilaksanakan secara *governance* dan potensi risiko telah dimitigasi secara komprehensif sehingga seluruh pelaksanaan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah dapat berjalan dengan baik.

The Duties and Responsibilities of the Project Management Office Revitalization Team are as follows:

1. ***Supervisory Committee***
   - *Chairman; coordinate, direct, mobilize, supervise, evaluate and ensure that all conversion stages are carried out in a governance manner and potential risks have been comprehensively mitigated so that the entire implementation of Bank Riau Kepri Conversion to BRK Syariah can run well.*
   - *Vice Chairman I supervises:*
     1). Customer Approval and Transfer of Business Assets Sector
     2). Product Promotion Media Sector
     3). Yield Policy (Income Smoothing) Sector
     4). Verification, Improvement of SOP & Product Scheme Sector.

     The duties and responsibilities of coordinating, directing, mobilizing, supervising, evaluating and ensuring that all stages of conversion are carried out in a governance manner and potential risks have been comprehensively mitigated so that the entire implementation of the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah can run well.
   - *Vice Chairman II supervises:*
     1). Employee Competency Measurement & Improvement Sector
     2). Licensing Administration Sector
     3). Culture & Culture Sector
     4). GMS and BUS Launching Sector

     The duties and responsibilities of coordinating, directing, mobilizing, supervising, evaluating and ensuring that all stages of the conversion have been carried out in a governance manner and potential risks have been comprehensively mitigated so that the entire implementation of the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah can run well.
   - *Vice Chairman III supervises:*
     1). Procurement of Facades, Neon Boxes & Documents Sector
     2). Procurement of Official Uniforms for Employees Sector
     3). Information Technology, Accounting & Reporting Sector
     4). Payment System Sector

     The duties and responsibilities of coordinating, directing, mobilizing, supervising, evaluating and ensuring that all stages of conversion are carried out in a governance manner and potential risks have been comprehensively mitigated so that the entire implementation of the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah can run well.

2. ***Project Management Office*** **(PMO)**
   - Fasilitator bagi bidang-bidang tim terkait pelaksanaan semua target dan pencapaian persiapan konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah.
   - Memonitoring pelaksanaan persiapan konversi dan melaporkan pencapaian target proses konversi ke *Supervisory Commitee*.
   - Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Mengkoordinir fungsi kesekretariatan PMO.

2. ***Project Management Office (PMO)***
   - *Facilitator for team areas related to the implementation of all targets and achievement of preparation for the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah.*
   - *Monitoring the implementation of conversion preparations & reporting the achievement of conversion process targets to the Supervisory Committee.*
   - *Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday. Coordinating PMO secretarial functions.*

3. **Bidang-Bidang:**

3. ***Sector***

No	Bidang	Tugas & Tanggung Jawab	*The assignment of responsibilities*
1	Bidang Pengadaan Fasad, Neon Box & Warkat *Field of Procurement of Facades, Neon Boxes & Documents*	1. Pengadaan Fasad Kantor: • Cabang Pekanbaru (31 Maret 2022) • Cabang Dumai (30 September 2021) • Cabang Pangkalan Kerinci (31 Maret 2021) 2. Pengadaan & Pemasangan Neon Box jaringan kantor: • Kantor Pusat • Cabang Jakarta • Cabang Utama dan Jaringannya • Cabang Pekanbaru dan Jaringannya • Cabang Pekanbaru (eks UUS) • Cabang Dumai (kecuali yang melekat di gedung) • Cabang Batam dan Jaringannya • Cabang Tanjung Pinang • Cabang Tanjung Pinang (eks UUS) Target selesai 31 Desember 2021 3. Pengadaan & Pembuatan Warkat-warkat dan formulir Target selesai 31 Desember 2021 4. Pekerjaan diatas dengan melakukan koordinasi kepada Divisi Umum dan Divisi/Desk terkait lainnya. 5. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Office Facade Procurement:* • *Pekanbaru Branch (31 March 2022)* • *Dumai Branch (30 September 2021)* • *Pangkalan Kerinci Branch (31 March 2021)* *2. Supply & installation of office network Neon Box:* • *Headquarters* • *Jakarta branch* • *Main Branches and Networks* • *Pekanbaru Branch and Network* • *Pekanbaru Branch (former UUS)* • *Dumai Branch (except those attached to the building)* • *Batam Branch and Network* • *Tanjung Pinang branch* • *Tanjung Pinang Branch (former UUS)* *Target completion December 31, 2021* *3. Procurement & Manufacture of Papers and Forms Target to be completed December 31, 2021* *4. The work above is carried out by coordinating with the General Division and other related Divisions/Desk.* *5. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
2	Bidang Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai *Field of Procurement of Official Uniforms for Employees*	1. Melakukan pengadaan pakaian Dinas pegawai, target selesai 31 Desember 2021 2. Melakukan koordinasi ke Divisi/Desk terkait lainnya. 3. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Procurement of official clothing for employees, target for completion December 31, 2021* *2. Coordinate with other related Divisions/Desk.* *3. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
3	Bidang Pengukuran & Peningkatan Kompetensi Pegawai *Field of Employee Competency Measurement and Improvement*	1. Melakukan pengukuran kompetensi pegawai bidang Perbankan Syariah, target selesai 30 November 2021. 2. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai, melalui: • Bacaan buku saku yang telah disiapkan sebanyak 5 buku • Instruksi pelaksanaan *morning briefing* jaringan kantor setiap hari. • *Monitoring* pemantau melalui *virtual* kepada pimpinan unit dan seksi tidak terbatas kepada pegawai 2 kali dalam sepekan. • *Test* soal kepada seluruh pegawai jaringan kantor 1 kali dalam sepekan. • Target kefahaman pegawai 100% pada 31 Desember 2021. 3. Pekerjaan dilakukan dengan koordinasi kepada Divisi MSDM dan Divisi/Desk terkait lainnya. 4. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Measuring the competence of employees in the field of Sharia Banking, the target for completion is 30 November 2021.* *2. Improving employee competence and understanding, through:* • *Pocket book reading that has been prepared as many as 5 books* • *Instructions for implementing the office network morning briefing every day.* • *Monitoring through virtual monitoring to unit and section heads is not limited to employees 2 times a week.* • *Test questions for all office network employees once a week.* • *Target employee understanding of 100% on December 31, 2021.* *3. Work is carried out in coordination with the HRM Division and other related Divisions/Desk.* *4. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*

No	Bidang	Tugas & Tanggung Jawab	*The assignment of responsibilities*
4	Bidang Persetujuan Nasabah dan Pengalihan Aset Bisnis *Field of Customer Approval and Transfer of Business Assets*	1. Melanjutkan Pengumpulan surat persetujuan pengalihan fasilitas konvensional menjadi syariah, baik Dana Pihak Ketiga maupun Kredit. 2. Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Divisi Dana & Jasa, Divisi Treasuri & Internasional, Divisi MKM, Divisi Komersial dan Divisi Konsumer dan Divisi/ Desk terkait lainnya. 3. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Continuing the collection of approval letters for the transfer of conventional facilities to sharia, both Third Party Fund and credit.* *2. Work is carried out in coordination with the Funds & Services Division, Treasury & International Division, MHM Division, Commercial Division and Consumer Division and other related Divisions/Desk.* *3. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
5	Bidang Informasi Teknologi, Akuntansi & Pelaporan *Information Technology, Accounting & Reporting*	1. Kesiapan Teknologi yang telah dirancang untuk operasional Bank sebagai BUS. 2. Respon terkait perbaikan 83 dokumen IT yang telah di submit kepada Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pembiasaan/familiarisasi pegawai pemegang user Bank Vision untuk uji coba transaksi (Bank Mini) sebagai Bank Umum Syariah. 4. *Upgrade* penggunaan aplikasi informasi monitoring pengalihan fasilitas nasabah yang belum mendapatkan persetujuan baik Dana Pihak Ketiga maupun Kredit kepada fasilitas Syariah. 5. Penyiapan aplikasi yang terintegrasi dengan *Core Banking* untuk pengalihan akad dari fasilitas Dana Pihak Ketiga dan Kredit (Konvensional) kepada fasilitas Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan BUS. 6. Bersama dengan vendor corebanking melakukan Post Implementasi *Review Sistem Corebanking* BUS maksimal 3 bulan setelah konversi oleh Intern/ *independent*. 7. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Technology readiness that has been designed for Bank operations as BUS.* *2. Responses related to the improvement of 83 IT documents that have been submitted to the Financial Services Authority.* *3. Habituation/familiarization of employees holding Bank Vision users for trial transactions (Bank Mini) as Islamic Commercial Banks.* *4. Upgrading the use of monitoring information applications for the transfer of customer facilities that have not yet received approval from both Third Party Fund and Credit to Sharia facilities.* *5. Preparation of applications that are integrated with Core Banking for transferring contracts from Third Party Fund and Credit (Conventional) facilities to Third Party Fund and BUS Financing facilities.* *6. Together with the corebanking vendor, carry out a Post Implementation Review of the BUS Corebanking System a maximum of 3 months after conversion by Intern/ independent.* *7. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
6	Bidang Administrasi Perizinan *Licensing Administration Division*	1. Tindak lanjut respon perbaikan/penyesuaian dokumen OJK dalam proses perizinan Konversi sesuai dengan POJK Nomor 64/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Target selesai 20 November 2021 2. Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Divisi/*Desk* terkait lainnya. 3. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Follow-up response to correction/adjustment of OJK documents in the Conversion licensing process in accordance with POJK Number 64/POJK.03/2016 and SEOJK Number 2/SEOJK.03/2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. Target completion November 20, 2021* *2. Work is carried out in coordination with other related Divisions/Desk.* *3. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
7	Bidang Sistem Pembayaran *Payment System Field*	1. Penyiapan pengajuan proses perizinan/addendum sistem pembayaran Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Lembaga/ Instansi lainnya terkait pembayaran. Target selesai 30 November 2021. 2. Penyiapan administrasi perizinan sistem pembayaran atas perubahan Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah. Target selesai 31 Desember 2021. 3. Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Hukum dan Kepatuhan serta Divisi/Desk terkait lainnya. 4. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Preparation of submissions for licensing/addendum processes for Bank Indonesia payment systems, the Ministry of Finance, the Directorate General of Taxes (DJP), the Hajj Financial Management Agency (BPKH) and other institutions/agencies related to payments. Target completion November 30, 2021.* *2. Preparation of payment system licensing administration for the change of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank. Target completion December 31, 2021.* *3. Work is carried out in coordination with Legal and Compliance and other related Divisions/Desk.* *4. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
8	Bidang Kebijakan Imbal Hasil (*Income Smoothing*) *Field of Yield Policy (Income Smoothing)*	1. Penentuan kebijakan nisbah bulan pertama dan berikutnya setelah *launching*. 2. Membuat mekanisme *income smoothing* dan proses persetujuan. 3. *Overview, review* dan pembuatan kebijakan *income smoothing* transaksi bisnis Bank Dana Pihak Ketiga. Target selesai 07 Desember 2021. 4. Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Divisi Dana & Jasa, Divisi Treasuri & Internasional, Divisi *Financial & Review* dan Divisi/Desk terkait lainnya. 5. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Determination of the ratio policy for the first and following months after launching.* *2. Create income smoothing mechanism and approval process.* *3. Overview, review and policy making of income smoothing business transactions of Bank Third Party Fund. Target completion December 7, 2021.* *4. Work is carried out in coordination with the Funds & Services Division, Treasury & International Division, Financial & Review Division and other related Divisions/Desk.* *5. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*

No	Bidang	Tugas & Tanggung Jawab	*The assignment of responsibilities*
9	Bidang Kultur & Budaya *Field of Culture and Culture*	1. Sosialisasi nilai-nilai budaya BRK Syariah (BUS). Target selesai 30 November 2021 2. Penerapan dan pengukuran pemahaman nilai-nilai budaya Bank Umum Syariah. 3. Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Divisi/*Desk* terkait lainnya. 4. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Dissemination of cultural values of BRK Syariah (BUS). Target completion November 30, 2021* *2. Application and measurement of understanding of cultural values of Islamic Commercial Banks.* *3. Work is carried out in coordination with other related Divisions/Desk.* *4. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
10	Bidang Media Promosi Produk (Pamflet Produk Dana Pihak Ketiga & Pembiayaan) *Field of Product Promotion Media (Third Party Fund and Financing Product Pamphlets)*	1. Membuat rancangan brosur dan pamflet produk Bank Umum Syariah, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan. Target selesai 30 November 2021 2. Penerapan brosur dan pamflet produk Bank Riau Kepri sebagai Bank Umum Syariah. Target selesai 31 Desember 2021 3. Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi kepada Divisi/Desk terkait lainnya. 4. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Designing brochures and pamphlets for Islamic Commercial Bank products, Third Party Fund and Financing. Target completion November 30, 2021* *2. Application of product brochures and pamphlets of Bank Riau Kepri as a Sharia Commercial Bank. Target completion December 31, 2021* *3. Work is carried out in coordination with other related Divisions/Desk.* *4. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
11	Bidang RUPS dan *Launching* BUS *General Meeting of Shareholders and BUS Launching*	1. Persiapan dan Agenda RUPS Bank Umum Syariah. Target selesai 30 November 2021 2. Persiapan dan Agenda *Lauching* Bank Riau Kepri sebagai Bank Umum Syariah. Target selesai 17 Desember 2021. 3. Pekarjaan dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Divisi/Desk terkait lainnya. 4. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Preparation and Agenda for the GMS of Islamic Commercial Banks. Target completion November 30, 2021* *2. Preparation and Lauching Agenda of Bank Riau Kepri as a Sharia Commercial Bank. Target completion December 17, 2021.* *3. Work is carried out in coordination with other relevant Divisions/Desk.* *4. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*
12	Bidang Verifikasi, Perbaikan SOP & Skim Produk *Field of Verification, Improvement of SOP & Product Scheme*	1. Melakukan verifikasi atas kebijakan/SOP yang telah dan belum disusun. 2. Menyusun SOP PRK Syariah, target selesai 17 November 2021. 3. Pekerjaan dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Divisi/Desk terkait lainnya. 4. Laporan target dan pencapaian 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis.	*1. Verify the policies/SOPs that have been and have not been prepared.* *2. Compile Sharia PRK SOP, target for completion November 17, 2021.* *3. Work is carried out in coordination with other related Divisions/Desk.* *4. Target and achievement reports 2 times a week, namely every Monday and Thursday.*

D. KETERLIBATAN PIHAK EKSTERNAL

Dalam rangka konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah, Bank melalui *Tim Project Management Office* melakukan asistensi dengan Pihak Eksternal bagi Konversi dalam pemenuhan dokumen persyaratan perizinan antara lain sebagai berikut:

1. PT Tazkia Finansial Sejahtera (Tazkia Consulting)
   Dalam rangka penyusunan Kajian Kelayakan Konversi Bank Riau Kepri, yang dilakukan bersama Tazkia Consulting sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 002A/SPK/PL.03/DUM/2019 Tanggal 01 Februari 2019 yang dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 02 Februari 2019 s.d. 03 April 2019 dengan ruang lingkup pekerjaan melakukan rangkaian proses kajian dengan tahapan:
   a. *Kick-off Meeting*
   b. *Mapping, Interview & Survey*
   c. Penyusunan *Draft* Awal Kajian Konversi
   d. *Review* Kajian Konversi
   e. Finalisasi
   f. Presentasi Hasil Final

D. EXTERNAL PARTY ENGAGEMENT

In the context of converting PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank, the Bank through the Project Management Office Team provides assistance with External Parties for Conversion in fulfilling the document licensing requirements, including the following:

1. *PT Tazkia Financial Sejahtera (Tazkia Consulting)*
   In the context of preparing the Bank Riau Kepri Conversion Feasibility Study, which was carried out with Tazkia Consulting in accordance with Work Order Letter Number 002A/SPK/PL.03/DUM/2019 dated 01 February 2019 which was carried out for 60 (sixty) calendar days starting from 02 February 2019 s.d. April 3, 2019 with the scope of work conducting a series of review processes with the following stages:
   a. Meeting kick-off
   b. Mapping, Interview & Survey
   c. Preparation of Initial Draft of Conversion Study
   d. Conversion Review Review
   e. Finalization
   f. Presentation of Final Results

2. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
   Kerjasama dengan LPPI dalam rangka Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka konversi tertuang dalam:
   1. Surat Perintah Kerja Nomor 077/PGL/PL.03/DUM 2019 tanggal 11 April 2019 untuk periode 11 s.d. 21 April 2019 dengan cakupan pekerjaan meliputi:
      a. *Review* Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Riau Kepri dalam Rangka Rencana Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah
      b. Penyiapan Materi Presentasi *Review* Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Riau Kepri dalam Rangka Rencana Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah
   2. Surat Perintah Kerja Nomor 114/SPK/PL.03/DUM/2019 tanggal 15 Oktober 2019 untuk periode 16 Oktober2019 s.d. 30 Oktober 2020 dengan cakupan pekerjaan meliputi:
      a. Penyusunan Kajian Bisnis Konversi;
      b. Studi Kelayakan Peluang Pasar dan Potensi Ekonomi Konversi;
      c. Penyusunan *Corporate Plan* tahun 2019 - 2023;
      d. Penyusunan RBB Bank Umum Syariah Tahun 2020-2022.

3. Tenaga Ahli Perbankan Syariah/*Tim Counterpart Management* (TCM)
   Kerjasama Bank Riau Kepri dengan TCM dalam rangka pelaksanaan proses konversi sesuai dengan Perjanjian Kerja dengan Bank Riau Kepri:
   1. Nomor 29/DIR/2019 tanggal 10 Juni 2019 dan Perjanjian Kerja Nomor 30/DIR/2019 tanggal 10 Juni 2019 untuk periode 10 Juni 2019 s.d. 09 Juni 2020;
   2. Perjanjian Kerja Nomor 520/DIR/2019 tanggal 10 Juni 2020 dan Perjanjian Kerja Nomor 521/DIR/2020 tanggal 10 Juni 2020 untuk periode 10 Juni 2020 s.d. 09 Juni 2021.

   Ruang lingkup pekerjaan antara lain:
   a. Pengurusan dokumen perizinan konversi;
   b. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
   c. Rencana Bisnis Bank Syariah;
   d. Laporan keuangan awal sebagai BUS;
   e. Rencana korporasi (*Corporate Plan*) dan SOT BUS;
   f. Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *Risk Control System*, Rencana Sistem Pengendalian Intern, Rencana Sistem Teknologi Informasi yang digunakan dan Pedoman mengenai Pelaksanaan Tata Kelola;
   g. Kebijakan/BPP Konversi & Skenario/rencana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah;

2. Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
   Collaboration with the LPPI in the framework of Human Resources (HR) Readiness for conversion is stated in:
   1. Work Order Letter Number 077/PGL/PL.03/DUM 2019 dated 11 April 2019 for the period 11 to 11 April 21, 2019 with the scope of work including:
      a. Readiness Review of Bank Riau Kepri Human Resources (HR) Readiness in the Context of Planned Conversion of Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah
      b. Preparation of Presentation Material for Bank Riau Kepri Readiness Review of Human Resources (HR) in the Context of Planned Conversion of Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah
   2. Work Order Letter Number 114/SPK/PL.03/DUM/2019 dated 15 October 2019 for the period 16 October 2019 s.d. October 30, 2020 with the scope of work including:
      a. Preparation of Conversion Business Studies;
      b. Feasibility Study of Market Opportunities and Economic Potential of Conversion;
      c. Compilation of the 2019 - 2023 Corporate Plan;
      d. Preparation of Sharia Commercial Bank RBB for 2020-2022.

3. Sharia Banking Experts/Counterpart Management (TCM) Team
   Cooperation between Bank Riau Kepri and TCM in the framework of implementing the conversion process in accordance with the Work Agreement with Bank Riau Kepri:
   1. Number 29/DIR/2019 dated 10 June 2019 and Work Agreement Number 30/DIR/2019 dated 10 June 2019 for the period 10 June 2019 s.d. 09 June 2020;
   2. Work Agreement Number 520/DIR/2019 dated 10 June 2020 and Work Agreement Number 521/DIR/2020 dated 10 June 2020 for the period 10 June 2020 s.d. June 09, 2021.

   The scope of work includes:
      a. Management of conversion permit documents;
      b. Feasibility study regarding market opportunity and economic potential;
      c. Sharia Bank Business Plan;
      d. Initial financial reports as BUS;
      e. Corporate Plan (Corporate Plan) and SOT BUS;
      f. Risk management guidelines including Risk Control System guidelines, Internal Control System Plans, Information Technology System Plans used and Guidelines regarding Governance Implementation;
      g. Policy/BPP Conversion & Scenario/plan for Settlement of Customer Rights and Obligations;

h. Persyaratan perizinan kesiapan Operasional (Bidang Sumber Daya Insani), menyelaraskan materi pelatihan dengan BPP dan ketentuan terkait, Pendampingan penyusunan modul Teknologi Informasi sesuai dengan siklus operasional prinsip-prinsip syariah dan BRD, Bidang Informasi Teknologi (proses persiapan Migrasi & Konversi, pelatihan/*Training for Trainer* (TFT), *System Integration Test* (SIT) dan *User Accepatnce Test* (UAT) dan yang lainnya yang berkaitan dengan proses konversi termasuk sosialisasi kepada *Stakeholder*.

4. Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wangsa Kuntoro Izzudin & Rekan
   Bank melakukan asistensi dengan Konsultan Hukum sesuai Surat Perintah Kerja Nomor SPK No 021/SPK/PL.03/DUM/2020 Tanggal 16 Maret 2020, untuk periode 16 Maret 2020 s.d. 15 Maret 2021. Cakupan pekerjaan meliputi:
   a. Membuat pendapat hukum (*Legal Opinion*) untuk Akad Konversi Syariah (Akad Perubahan);
   b. Membuat *Legal Opinion* untuk Dokumen Pemberitahuan (Pengumuman) kepada Debitur/Nasabah tentang Persetujuan peralihan fasilitas Kredit maupun Simpanan dari Bank Riau Kepri ke fasilitas Pembiayaan maupun Simpanan Bank Riau Kepri Syariah di media massa Lokal dan Nasional;
   c. Membuat *Legal Opinion* terhadap BPP Konversi terkait Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah Pasca Konversi.

5. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
   Dalam rangka pendampingan proses izin konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah juga dilakukan kerjasama dengan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) sebagaimana perjanjian kerjasama dengan Bank Riau Kepri:
   1. SPK Nomor 072/SPK/PL.03/DUM 2021 Tanggal 08 Juli 2021 untuk periode 08 Juli 2021 s.d. 07 November 2021
   2. SPK Nomor 072/ADD-SPK/PL.03/DUM 2021 Tanggal 14 Desember 2021 untuk periode s.d. 16 Maret 2022
   3. SPK Nomor 071/ADD.2-SPK/PL.03/DUM/2022 tanggal 24 Mei 2022 s.d. Proses Izin Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah selesai.

   Cakupan pekerjaan meliputi:
   a. Penyusunan *roadmap* Bank Riau Kepri Syariah dan bahan tayang;
   b. Mempersiapkan materi presentasi Pengurus Bank Riau Kepri ke OJK dalam rangka konversi Syariah;
   c. Memberikan masukan proses izin konversi syariah yang sedang berjalan;

h. Operational readiness licensing requirements (Human Resources Sector), aligning training materials with BPP and related provisions, Assistance in preparing Information Technology modules in accordance with the operational cycle of sharia principles and BRD, Information Technology Sector (Migration & Conversion preparation process, training/ Training for Trainer (TFT), System Integration Test (SIT) and User Acceleration Test (UAT) and others related to the conversion process including outreach to Stakeholders.

4. Legal Consultant from Wangsa Kuntoro Law Firm Izzudin & Partners
   The Bank provides assistance with Legal Consultants in accordance with Work Order Letter Number SPK No 021/SPK/PL.03/DUM/2020 March 16 2020, for the period March 16 2020 s.d. March 15, 2021. Scope of work includes:
   a. Make a legal opinion (Legal Opinion) for the Sharia Conversion Agreement (Change Agreement);
   b. Prepare Legal Opinion for Notification Documents (Announcements) to Debtors/Customers regarding Approval for the transfer of Credit and Savings facilities from Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah Financing and Savings facilities in local and national mass media;
   c. Make a Legal Opinion against the Convertible BPP regarding Settlement of Post-Conversion Customer Rights and Obligations.

5. Risk Management Certification Body (BSMR)
   In the context of assisting the conversion process of Bank Riau Kepri to BRK Syariah, cooperation is also carried out with the Risk Management Certification Agency (BSMR) according to the cooperation agreement with Bank Riau Kepri:
   1. SPK Number 072/SPK/PL.03/DUM 2021 Dated 08 July 2021 for the period 08 July 2021 to.d. November 07, 2021
   2. SPK Number 072/ADD-SPK/PL.03/DUM 2021 December 14, 2021 for the period up to. March 16, 2022
   3. SPK Number 071/ADD.2-SPK/PL.03/DUM/2022 dated 24 May 2022 s.d. The conversion process for the Bank Riau Kepri Permit to become a Sharia Commercial Bank is complete.

   Scope of work includes:
   a. Preparation of Bank Riau Kepri Syariah roadmap and published material;
   b. Prepare presentation material for the Management of Bank Riau Kepri to the OJK in the context of Sharia conversion;
   c. Provide input on the ongoing sharia conversion permit process;

d. Menyusun tanggapan serta tindak lanjut atas diskusi yang dilakukan oleh OJK terkait izin konversi yang telah diajukan (materi tanggapan dan tindak lanjut);
e. Pendampingan proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah sampai dengan *soft launching* dan *grand launching* serta membantu dengan berbagai upaya untuk percepatan perolehan izin dimaksud;
f. *Implementasi Enterprise Risk Management* Bank Riau Kepri yang sejalan dengan proses konversi.

6. Karim Consulting Indonesia
Pendampingan Asistensi Konversi terkait Kesiapan Pengajuan Perizinan oleh Karim Consulting Indonesia sebagaimana Surat Nomor 091//KCI/IV/2021 Tanggal 31 April 2021 perihal Verifikasi Kesiapan Pengajuan Perizinan untuk Pendampingan Asistensi Konversi dan Catatan No. 035/TPMK-PMO/CTT/2021 Tanggal 14 April 2021 Perihal Usulan Pelaksanaan Verifikasi Kesiapan Perizinan Konversi Syariah. Kegiatan Asistensi Konversi terkait Kesiapan Pengajuan Perizinan oleh Karim Consulting Indonesia dilakukan pada tanggal 16 April 2021, dengan ruang lingkup pekerjaan:
a. Pendampingan Asistensi Konversi
b. *Checklist* Perizinan Konversi

E. KEGIATAN UTAMA *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* KONVERSI

1. Percepatan persiapan pelaksanaan konversi; pelaksanaan *Launching* Konversi; serta pelaksanaan hal-hal yang diperlukan pasca *Launching* Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah;
2. Menyusun *Timeline* konversi di segala aspek;
3. Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional BRK Syariah;
4. Mengkoordinir unit kerja Kantor Pusat dan Jaringan Kantor demi terlaksana dan suksesnya Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah;
5. Program kerja lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah;
6. Membuat, mengusulkan dan mengambil kebijakan terlaksananya program kerja tim sesuai Bidang masing-masing berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

d. Prepare responses and follow-ups on discussions held by the OJK regarding the proposed conversion permit (response and follow-up material);

e. Assistance in the process of converting Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank up to the soft launching and grand launching as well as assisting with various efforts to accelerate the acquisition of the intended license;
f. Implementation of Bank Riau Kepri's Enterprise Risk Management which is in line with the conversion process.

6. Karim Consulting Indonesia
Conversion Assistance Assistance regarding Readiness to Submit Licensing by Karim Consulting Indonesia as stated in Letter Number 091//KCI/IV/2021 dated 31 April 2021 concerning Verification of Readiness to Submit Licensing for Assistance for Conversion Assistance and Note No. 035/TPMK-PMO/CTT/2021 April 14, 2021 Regarding the Proposal to Implement Sharia Conversion Licensing Readiness Verification. Conversion Assistance Activities related to Readiness to Submit Licensing by Karim Consulting Indonesia were carried out on April 16, 2021, with the scope of work:

a. Conversion Assistance Assistance
b. Conversion Licensing Checklist

E. MAIN ACTIVITIES OF CONVERSION OFFICE MANAGEMENT

1. Acceleration of the preparation for the implementation of the conversion; implementation of the Conversion Launching; as well as the implementation of the necessary matters after the Launching of the Conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank;
2. Arrange conversion timelines in all aspects;
3. Preparing the needs for facilities and infrastructure for the operations of BRK Syariah;
4. Coordinating the Head Office and Office Network work units for the implementation and successful conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank;
5. Other work programs directly or indirectly related to the conversion of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank;
6. Create, propose and adopt policies for the implementation of team work programs according to their respective fields in coordination with related work units.

F. KETENTUAN OPERASIONAL

1. ***Submit* Dokumen Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha**

   Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, berikut disampaikan dokumen permohonan izin yang disampaikan melalui Surat Nomor 338/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah:

   1. Rancangan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
   2. Risalah RUPS;
   3. Daftar calon Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
   4. Daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUK yang telah ada atau yang baru dicalonkan, disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BUS;
   5. Daftar calon anggota DPS;
   6. Surat pernyataan dari pemegang saham;
   7. Rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif;
   8. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
   9. Rencana bisnis (*business plan*);
   10. Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol Rupiah) atau nihil;
   11. Rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan BUS;
   12. Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*);
   13. Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS;
   14. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BUS;
   15. Bukti kesiapan operasional;
   16. Jaringan kantor bank beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BUS.

F. OPERATIONAL PROVISIONS

1. ***Submit Documents Request for Permit for Change of Business Activities***

   Referring to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 2/SEOJK.03/2017 dated 3 January 2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the following is the permit application document submitted by Letter Number 338/OR.03.03/DIR/2021 dated April 30, 2021 regarding the application for a permit to change business activities from Bank Riau Kepri to BRK Syariah:

   1. *Draft Deed of Amendment to the Articles of Association;*
   2. *Minutes of GMS;*
   3. *List of prospective Shareholders including details of the size of each shareholding;*
   4. *List of nominees for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners originating from existing or newly nominated members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of BUK, accompanied by documents as stipulated in the provisions regarding the fit and proper test/assessment applicable to BUS;*
   5. *List of prospective DPS members;*
   6. *A statement letter from the shareholder;*
   7. *Organizational structure plan and names of Executive Officers;*
   8. *Feasibility study regarding market opportunity and economic potential;*
   9. *business plan (business plan);*
   10. *The initial financial statements as a BUS showing current year's profit and loss and last year's profit and loss have a balance of IDR 0.00 (zero Rupiah) or nil;*
   11. *Corporate plans in the form of long-term strategic plans in order to achieve BUS goals;*
   12. *Risk management guidelines including guidelines for risk control systems, plans for internal control systems, plans for information technology systems to be used, and guidelines regarding the implementation of good corporate governance;*
   13. *Complete and comprehensive work systems and procedures used in BUS operational activities;*
   14. *Plan to settle all rights and obligations of the bank towards customers who are not willing to become BUS customers;*
   15. *Evidence of operational readiness;*
   16. *Network of bank offices along with locations that will be used as BUS offices.*

2. Pemeriksaan Khusus OJK

Sebagai tindak lanjut dari permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah, tim DPPS OJK dan OJK Riau melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan kebenaran dokumen, kesiapan SDM dan kesiapan Teknologi Informasi sebagaimana berdasarkan surat OJK berikut:

1. Surat Kepala OJK Provinsi Riau Nomor SR-71/KO.053/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Pemeriksaan Khusus PT BPD Riau Kepri.
2. Surat Kepala OJK Provinsi Riau Nomor SR-5/KO.053/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Pemeriksaan Khusus PT BPD Riau Kepri.
3. Tanggapan & Tindak Lanjut Surat OJK lainnya.

3. Tanggapan & Tindak Lanjut Surat OJK

Setelah dilakukan *submit* dokumen perizinan perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah sesuai Surat nomor 338/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah, tim DPPS OJK memberikan balasan dan tanggapan terhadap dokumen yang telah disampaikan. Berikut daftar surat tanggapan dari DPPS OJK dan surat tindak lanjut dari Bank:

2. OJK Special Examination

As a follow-up to the request for a permit to change business activities from Bank Riau Kepri to BRK Syariah, the DPPS OJK and OJK Riau teams conducted a special inspection related to the correctness of documents, HR readiness and Information Technology readiness as based on the following OJK letter:

1. *Letter from the Head of OJK Riau Province Number SR-71/KO.053/2021 dated 29 November 2021 regarding the Special Examination of PT BPD Riau Kepri.*
2. *Letter of the Head of OJK Riau Province Number SR-5/KO.053/2022 dated 25 February 2022 regarding the Special Examination of PT BPD Riau Kepri.*
3. *Response & Follow-up to OJK Letter.*

3. Response & Follow-up to OJK Letter

After submitting the permit documents for changing the business activities of Bank Riau Kepri to BRK Syariah in accordance with Letter number 338/OR.03.03/DIR/2021 dated 30 April 2021 concerning Application for Permit for Changing Business Activities of Bank Riau Kepri to BRK Syariah , the OJK DPPS team provides replies and responses to the documents that have been submitted. The following is a list of response letters from DPPS OJK and follow-up letters from the Bank:

No	Surat Tanggapan OJK	*OJK Response Letter*	No	Surat Tindak Lanjut Bank	*BRK Follow-Up Letter*
1	S-112/PB.101/2021 tanggal 18 Mei 2021	*S-112/PB.101/2021 dated May 18, 2021*	1	712/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 3 September 2021	*712/OR.03.03/DIR/2021 September 3, 2021*
2	S-150/PB.101/2021 tanggal 6 Juli 2021	*S-150/PB.101/2021 July 6, 2021*	2	872/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 05 November 2021	*872/OR.03.03/DIR/2021 dated November 05, 2021*
3	S-165/PB.101/2021 tanggal 28 Juli 2021	*S-165/PB.101/2021 July 28, 2021*			
4	S-199/PB.101/2021 tanggal 1 September 2021	*S-199/PB.101/2021 September 1, 2021*	3	729/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 10 September 2021	*729/OR.03.03/DIR/2021 September 10, 2021*
			4	744/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 20 September 2021	*744/OR.03.03/DIR/2021 September 20, 2021*
			5	823/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 22 Oktober 2021	*823/OR.03.03/DIR/2021 dated October 22, 2021*
5	S-256/PB.101/2021 tanggal 3 November 2021	*S-256/PB.101/2021 November 3, 2021*	6	906/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 18 November 2021	*906/OR.03.03/DIR/2021 November 18, 2021*
6	S-261/PB.101/2021 tanggal 11 November 2021	*S-261/PB.101/2021 November 11, 2021*	7	907/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 18 November 2021	*907/OR.03.03/DIR/2021 November 18, 2021*
			8	959/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 06 Desember 2021	*959/OR.03.03/DIR/2021 dated December 06, 2021*
			9	1004/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 17 Desember 2021	*1004/OR.03.03/DIR/2021 December 17, 2021*
7	S-299/PB.101/2021 tanggal 23 Desember 2021	*S-299/PB.101/2021 December 23, 2021*	10	1031/OR.03.03/DIR/2021 tanggal 29 Desember 2021	*1031/OR.03.03/DIR/2021 December 29, 2021*
			11	003/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 03 Januari 2022	*003/OR.03.03/DIR/2022 dated January 03, 2022*
			12	031/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 10 Januari 2022	*031/OR.03.03/DIR/2022 January 10, 2022*
			13	078/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 25 Januari 2022	*078/OR.03.03/DIR/2022 dated January 25, 2022*
			14	099/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 28 Januari 2022	*099/OR.03.03/DIR/2022 dated January 28, 2022*
			15	107/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 31 Januari 2022	*107/OR.03.03/DIR/2022 dated January 31, 2022*
			16	117/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 04 Februari 2022	*117/OR.03.03/DIR/2022 dated February 4, 2022*

No	Surat Tanggapan OJK	*OJK Response Letter*	No	Surat Tindak Lanjut Bank	*BRK Follow-Up Letter*
8	S-5/PB.101/2022 tanggal 13 Januari 2022	*S-5/PB.101/2022 January 13, 2022*	17	050/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 17 Januari 2022	*050/OR.03.03/DIR/2022 dated January 17, 2022*
			18	126/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Ucapan Terima Kasih dan Konfirmasi Proses Perizinan BRK menjadi BRK Syariah	*126/OR.03.03/DIR/2022 dated February 8, 2022 regarding Acknowledgments and Confirmation of the BRK Licensing Process to become a Sharia BRK*
9	S-57/PB.101/2022 tanggal 17 Maret 2022	*S-57/PB.101/2022 March 17, 2022*	19	242/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 18 Maret 2022	*242/OR.03.03/DIR/2022 dated March 18, 2022*
			20	246/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 21 Maret 2022	*246/OR.03.03/DIR/2022 March 21, 2022*
			21	252/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 22 Maret 2022	*252/OR.03.03/DIR/2022 March 22, 2022*
			22	342/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 12 April 2022	*342/OR.03.03/DIR/2022 April 12, 2022*
10	S-65/PB.101/2022 tanggal 29 Maret 2022	*S-65/PB.101/2022 March 29, 2022*	23	272/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 29 Maret 2022	*272/OR.03.03/DIR/2022 March 29, 2022*
			24	322/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 08 April 2022	*322/OR.03.03/DIR/2022 dated April 08, 2022*
			25	358/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 18 April 2022	*358/OR.03.03/DIR/2022 April 18, 2022*
			26	415/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 27 April 2022	*415/OR.03.03/DIR/2022 April 27, 2022*
			27	506/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 20 Mei 2022	*506/OR.03.03/DIR/2022 dated May 20, 2022*
			28	517/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 24 Mei 2022	*517/OR.03.03/DIR/2022 dated May 24, 2022*
			29	580/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 16 Juni 2022	*580/OR.03.03/DIR/2022 dated June 16, 2022*
			30	607/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 20 Juni 2022	*607/OR.03.03/DIR/2022 June 20, 2022*
			31	630/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 27 Juni 2022	*630/OR.03.03/DIR/2022 dated June 27th 2022*
11	Surat OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 Tentang Pemberian Izin Perubahan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)	*OJK Letter No. KEP-93/D.03/2022 dated July 4, 2022 Concerning the Granting of Business Change Permits for Conventional Commercial Banks from PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to become Sharia Commercial Banks PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)*	32	680/MR.01.03/KPT/DIR/2022 tanggal 06 Juli 2022	*680/MR.01.03/KPT/DIR/2022 dated July 06, 2022*
			33	759/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 18 Juli 2022	*759/OR.03.03/DIR/2022 dated July 18, 2022*
			34	002/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 22 Juli 2022	*002/OR.03.03/DIR/2022 July 22, 2022*
			35	003/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 22 Juli 2022	*003/OR.03.03/DIR/2022 July 22, 2022*

4. Kronologis Penetapan Pengurus BRK Syariah:

1. Berdasarkan Akta RUPS LB No. 16 tanggal 26 Februari 2021, RUPS LB tanggal 26 Februari 2021 menyetujui menetapkan Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri yang masa jabatannya belum berakhir pada saat pengajuan izin konversi (Perubahan Kegiatan Usaha) kepada OJK, untuk dimasukkan nama-namanya dalam Daftar Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2. Pada tanggal 20 s.d. 24 Desember 2021 dilaksanakan klarifikasi calon Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BRK Syariah

4. Chronology of Determination of BRK Syariah Management:

1. *Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 16 dated February 26, 2021, the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 26, 2021 agreed to appoint the Company's Management and the Sharia Supervisory Board of the Bank Riau Kepri Sharia Business Unit whose term of office had not yet ended at the time of submitting a conversion permit (Change of Business Activities) to OJK, to include their names in List of the Company's Management and the Company's Sharia Supervisory Board.*
2. *On the December 20 to 24, 2021 a clarification of the candidates for Controlling Shareholders, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and BRK Syariah Directors was carried out,*

yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor OJK Provinsi Riau.

3. Berdasarkan Akta RUPS LB No. 26 tanggal 23 April 2022, RUPS LB tanggal 23 April 2022 menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan izin operasional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan dan meyetujui secara bulat untuk penetapan lebih lanjut Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah tersebut akan dilaksanakan dengan RUPS LB secara Sirkuler.
4. Berdasarkan Akta RUPS LB No. 17 tanggal 14 Juni 2022, RUPS LB yang dilakukan secara sirkuler menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Syahrial Abdi
Komisaris Independen	: Rita Anugerah
Komisaris Independen	: Roy Prakoso

Direksi

Direktur Utama	: Andi Buchari
Direktur Operasional	: Said Syamsuri
Direktur Pembiayaan	: Tengkoe Irawan
Direktur Dana & Jasa	: M.A.Suharto
Direktu Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Fajar Restu Febriansyah

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Zulhendri Rais
Anggota	: Saifuddin Yuliar

Dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin Operasional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Proses Penetapan Perda Konversi

Adapun yang menjadi dasar legitimasi Panitia Khusus dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

which was carried out at the OJK Office in Riau Province.

3. *Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.26 April 23, 2022, Extraordinary General Meeting of Shareholders April 23, 2022 approved the appointment of the Management and Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah with a term of office in accordance with their respective previous appointments, this determination is effective from the date of issuance of the Financial Services Authority approval letter and the Bank's operational permit General Sharia from the Financial Services Authority and agreed unanimously for further determination of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah to be carried out by Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
4. *Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 17 dated 14 June 2022, the EGMS which was held circularly approved the appointment of the Management and Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) as follows:*

Board of Commissioners

Main Commissioner	*: Syahrial Abdi*
Independent Commissioner	*: Rita Anugerah*
Independent Commissioner	*: Roy Prakoso*

Directors

President Director	*: Andi Buchari*
Operational Director	*: Said Syamsuri*
Finance Director	*: Tengkoe Irawan*
Funds & Services Director	*: M.A.Suharto*
Compliance & Risk Management Director	*: Fajar Restu Febriansyah*

Sharia Supervisory Board

Chairman	*: Zulhendri Rais*
Member	*: Saifuddin Yuliar*

With a term of office in accordance with their respective previous appointments, the stipulation takes effect from the date of issuance of the approval letter from the Financial Services Authority and the Sharia Commercial Bank Operational Permit from the Financial Services Authority.

5. The Process of Determining Conversion Regulations

As for the basis for the legitimacy of the Special Committee in the Discussion of the Draft Regional Regulation (Ranperda) concerning Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2002 concerning Changes in the Form of Legal Entity for the Riau Regional Development Bank from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) for the Riau Regional Development Bank is Decree of the Regional People's Representative Council of Riau Province Number 04/

Nomor 04/KPTS/DPRD/TAHUN 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau.

Rangkaian kegiatan Panitia Khusus Ranperda Konversi Bank Riau Kepri hingga ditetapkan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

a. Pada tanggal 13 Januari 2021, dilaksanakan Pembahasan Materi Ranperda.
b. Pada tanggal 14 Januari 2021 dilaksanakan Rapat Kerja dengan Direksi Bank Riau Kepri terkait dengan Persiapan Konversi.
c. Pada tanggal 27 Januari 2021 dilaksanakan Pembahasan Materi Ranperda.
d. Pada tanggal 27 Januari 2021 dilaksanakan Uji Publik Materi Ranperda.
e. Pada tanggal 03 Februari, dilaksanakan Rapat dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri.
f. Pada tanggal 11 Febuari 2021, dilaksanakan Rapat Kerja dengan OJK Perwakilan Riau.
g. Pada tanggal 11 Febuari 2021, dilaksanakan Pembahasan Materi Ranperda.
h. Pada tanggal 22 Febuari 2021, dilaksanakan Rapat Finalisasi Ranperda.
i. Pada tanggal 19 Mei 2022 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka pengesahan Ranperda menjadi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau.

6. Persetujuan Izin Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Persetujuan Izin Sistem Pembayaran Bank Indonesia menunjuk kepada Surat Bank Indonesia 24/73/DPPT-GKPP-LNP/Srt/B tanggal 12 Juli 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Data Nasabah. Bank Indonesia melalui Surat tersebut memberikan informasi bahwa perubahan Data Nasabah berupa Kegiatan Usaha semula Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah disetujui dan efektif dapat digunakan setelah tanggal operasional kegiatan usaha Bank.

KPTS/DPRD/TAHUN 2021 dated January 11, 2021 concerning the Formation of a Special Committee for Discussion of the Draft Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2002 concerning Changes in the Form of Legal Entity for the Riau Regional Development Bank from a Regional Company (PD) Becoming a Limited Liability Company (PT) of the Riau Regional Development Bank.

The series of activities of the Special Committee for the Riau Kepri Conversion Regional Regulation Draft until it was determined at the plenary meeting of the DPRD Riau Province are as follows:

a. On January 13, 2021, a Discussion of the Raperda Material was held.
b. On January 14, 2021 a working meeting was held with the Directors of Bank Riau Kepri regarding Conversion Preparation.
c. On January 27, 2021 a Discussion of the Raperda Material was held.
d. On January 27, 2021, a Public Test of the Raperda Material was carried out.
e. On February 3, a meeting was held with the Shareholders, Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri.
f. On February 11 2021, a Working Meeting was held with the OJK Representative of Riau.
g. On February 11 2021, a Discussion of the Raperda Material was held.
h. On February 22 2021, a Regional Regulation Finalization Meeting was held.
i. On May 19, 2022 a Plenary Meeting of the DPRD Riau Province was held in the context of ratifying the Draft Regional Regulation to become a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2002 concerning Changes in the Form of Legal Entity for the Riau Regional Development Bank from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) for the Riau Regional Development Bank.

6. Bank Indonesia Payment System Permit Approval

Approval of Bank Indonesia Payment System Permit refers to Bank Indonesia Letter 24/73/DPPT-GKPP-LNP/Srt/B dated July 12, 2022 Concerning Approval of Changes in Customer Data.. Bank Indonesia through the letter provides information that changes in Customer Data in the form of Business Activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks have been approved and can be effectively used after the operational date of the Bank's business activities.

7. **Pemberian Izin Konversi OJK**

Pada tanggal 05 Juli 2022 bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau, Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Riau Kepri menerima secara langsung dari Kepala OJK Provinsi Riau berupa:

1. Surat Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah (Pimpinan Satker) OJK Nomor SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 hal Keputusan Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), yang berisi sebagai berikut:
   a. OJK menyetujui perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan PSP, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai berikut:

*7. **OJK Conversion Permit Granting***

On July 5, 2022 at the Riau Province OJK Office, the President Director and Main Commissioner of Bank Riau Kepri received directly from the Head of Riau Province OJK in the form of:

1. Letter of the Director of Sharia Banking Regulation and Licensing (Head of Work Unit) OJK Number SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022 regarding the Decree on the Granting of Permits for Changing Conventional Commercial Bank Business Activities PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), which contains the following:
   a. OJK approved the change in the business activities of the Conventional Commercial Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the composition of PSP, Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board (DPS) as follows:

No.	Jabatan	Nama Calon | *Candidate Name*	*Position*
Pemegang Saham Pengendali (PSP) *Controlling Shareholders (PSP)*			
1	PSP	Pemerintah Provinsi Riau	*PSP*
Dewan Komisaris *board of Commissioners*			
1	Komisaris Utama	Syahrial Abdi	*The President commissioner*
2	Komisaris Independen	Rita Anugerah	*Independent Commissioner*
3	Komisaris Independen	Roy Prakoso	*Independent Commissioner*
Direksi *Directors*			
1	Direktur Utama	Andi Buchari	*President director*
2	Direktur Kepatuhan	Fajar Restu Febriansyah	*Compliance Director*
3	Direktur Operasional	Said Syamsuri	*director of Operations*
4	Direktur Dana dan Jasa	M.A. Suharto	*Director of Funds and Services*
5	Direktur Pembiayaan	Tengkoe Irawan	*Director of Financing*
Dewan Pengawas Syariah (DPS) *Sharia Supervisory Board (DPS)*			
1	Ketua DPS	Zulhendri Rais	*Head of DPS*
2	Anggota DPS	Saifuddin Yuliar	*DPS member*

   b. Sejak diberikannya izin perubahan kegiatan usaha, seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri konvensional dilarang untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional
   c. Terdapat 6 (enam) hal yang wajib dipedomani:
      1). Mencantumkan secara jelas kata "Syariah" pada penulisan nama dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank.

   b. Since the issuance of permits for changes in business activities, the entire conventional Riau Kepri Bank office network is prohibited from conducting conventional business activities, except in the framework of settling the rights and obligations of conventional business activities.
   c. There are 6 (six) things that must be guided by:
      1). Clearly state the word "Sharia" in the writing of the iB name and logo on Bank forms, scripts, products, offices and network offices.

2). Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
3). Mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
4). Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan disertai dengan bukti pengumuman pelaksanaan perubahan kegiatan usaha dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional.
5). Melaporkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
6). Menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

2. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-93/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

8. Masa Transisi

1. Masa transisi adalah waktu terhitung sejak diterimanya izin konversi dari OJK hingga pelaksanaan konversi (*big bang/go-live*) BRK Syariah, yaitu dari tanggal 06 Juli 2022 s.d 19 Agustus 2022.
2. Pada masa transisi diterbitkan surat/kebijakan terkait pedoman pelaksanaan operasional Bank sebagai berikut:
   a. Surat Direksi No. 395/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 05 Juli 2022 perihal Kebijakan Transisi Konversi
   b. Keputusan Direksi No. 054/KEPDIR/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Syariah Pada Masa Transisi
   c. Pendapat DPS No. 007/S-DPS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 hal Pendapat DPS Terkait Produk dan Aktivitas Bank pada Masa Transisi

2). Carry out business activities based on Sharia Principles no later than 60 (sixty) days from the date the license for changing business activities is granted.

3). Announce to the public no later than 10 (ten) days before the date of implementation of business activities based on Sharia Principles.
4). Report on the implementation of business activities based on Sharia Principles no later than 10 (ten) days after the implementation date accompanied by proof of announcement of the implementation of changes to business activities in a newspaper with national circulation.
5). Report the appointment of members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and members of the Sharia Supervisory Board no later than 10 (ten) days after the effective date of appointment accompanied by supporting documents.
6). Complete rights and obligations from conventional business activities no later than 1 (one) year from the date the permit for changing business activities is granted.

2. Copy of Decree of Members of the OJK Board of Commissioners Number KEP-93/D.03/2022 dated 04 July 2022 concerning the Granting of Permits for Changing Conventional Commercial Bank Business Activities PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank PT Regional Development BRK Syariah (Perseroda).

8. Transition period

1. The transition period is the time from the receipt of the conversion permit from the OJK until the implementation of the BRK Syariah conversion (big bang/go-live), namely from 06 July 2022 to 19 August 2022.
2. During the transitional period a letter/policy was issued regarding the guidelines for the implementation of Bank operations as follows:
   a. Board of Directors Letter No. 395/OR.03.03/DIR/2022 dated 05 July 2022 regarding the Conversion Transition Policy
   b. Directors Decree No. 054/KEPDIR/2022 dated 6 July 2022 concerning Guidelines for Sharia Services During the Transitional Period
   c. DPS Opinion No. 007/S-DPS/VII/2022 dated 29 July 2022 regarding DPS Opinion Regarding Bank Products and Activities during the Transition Period

3. Pada masa transisi, dilakukan aktivitas tindak lanjut setelah izin konversi diberikan:
   a. Tanggal 02 s.d 08 Juli 2022 Bidang Teknologi Informasi, Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan Simulasi Konversi dan Pembiasaan Penggunaan Core Banking System BUS bagi seluruh pemegang user di seluruh unit kantor dan kantor pusat.
   b. Tanggal 08 s.d 09 Juli 2022 Bidang Sistem Pembayaran melakukan pengajuan dan pemenuhan dokumen perizinan kepada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, BPKH dan Kementerian Agama.
   c. Tanggal 09 Agustus 2022 Bank Riau Kepri mengumumkan kepada masyarakat, relasi, dan nasabah perihal perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan perubahan nama serta logo pada tanggal 22 Agustus 2022 yang menunjuk pada pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah:

3. During the transition period, follow-up activities are carried out after the conversion permit is granted:
   a. From 02 to 08 July 2022 the Information Technology, Accounting and Reporting Field carried out a Conversion Simulation and Habituation of the Use of the BUS Core Banking System for all user holders in all office units and the head office.
   b. July 8 to 9 2022 The Payment System field submitted and fulfilled licensing documents to Bank Indonesia, the Ministry of Finance, the Directorate General of Taxes, BPKH and the Ministry of Religion.
   c. On 09 August 2022 Bank Riau Kepri announced to the public, relations and customers regarding the change in conventional business activities to business activities based on Sharia Principles and changes in the name and logo on 22 August 2022 which refers to article 17 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 64/POJK.03/2016 dated 22 December 2016 concerning Changes in Business Activities of Conventional Banks to become Sharia Banks:

Pengumuman kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai ketentuan regulator.
Announcement to the public regarding the implementation of business activities based on Sharia Principles in accordance with regulatory provisions.

bankriaukepri

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-43/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dengan ini kami umumkan kepada seluruh nasabah, relasi, mitra kerja, warga masyarakat serta internal tentak sebagai berikut:

1. Bahwa terhitung **mulai hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri akan melakukan perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan** Prinsip Syariah secara resmi dan menyeluruh.
2. Sejalan dengan perubahan kegiatan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, maka:
   a. Nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan (call sign) BRK Syariah.
   b. Logo PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berubah sebagai berikut:

Logo Lama	Logo Baru
bankriaukepri	brksyariah

3. Sejak membolehkan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tidak lagi melakukan kegiatan usaha konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional yang akan diarahkan menjadi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Perubahan kegiatan usaha tersebut mencakup pelaihan seluruh catatan aktiva dan pasiva bank, termasuk seluruh catatan keuangan nasabah serta pihak ketiga lainnya yang selama ini tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Konvensional dan Unit Usaha Syariah), selanjutnya akan menjadi catatan keuangan BRK Syariah.
5. Dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban maka PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang berubah menjadi BRK Syariah akan memprioritaskan penyelesaian konvensi produk layanan dan jasa, Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Kredit yang selama ini dikelola secara konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Seluruh catatan dan data nasabah untuk semua produk layanan dan jasa tidak mengalami perubahan, **seperti nama nasabah, nomor rekening, dan data individual lainnya tetap berlaku dan tetap menggunakan data yang sama.**
7. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan perubahan, termasuk produk layanan dan jasa kegiatan usaha konvensional menjadi berbasis produk layanan dan jasa berdasarkan Prinsip Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawab BRK Syariah.
8. Seluruh perjanjian atau akad yang dibuat oleh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (konvensional) termasuk perjanjian accession yang masih tetap berlaku dan mengikat para pihak dengan BRK Syariah.
9. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Helpdesk Konvensi Syariah selama hari kerja dan jam kerja melalui nomor:
   a. 0811763 1500
   b. 0811760 0475
   c. (076 1) 47570 Ext. 9621

   atau melalui seluruh jaringan kantor BRK Syariah terdekat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Agustus 2022
11 Muharram 1444 H

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

Syahrial Abdi
Komisaris Utama

Andi Buchari
Direktur Utama

9. Proses *Cut Off* dan *Big Bang* Konversi

Peralihan data pencatatan *asset* dan *liabilities* dilakukan bersamaan dengan proses konversi dan migrasi data keuangan dengan strategi *Big Bang*, menggunakan *Core Banking System*, dari *Core Banking System* menjadi *Core Banking Sharia System* (*Bank Vision Sharia*). Terdapat 2 (dua) momentum kejadian yang bersamaan, yakni konversi *Core Banking System* lama (konvensional) berubah menjadi Sistem Baru (Syariah), sekaligus migrasi *asset* dan *liabilities* dari Bank Riau Kepri dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri ke BRK Syariah.

Sebagaimana Surat No. 759/OR.03.03/DIR/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Penyampaian Rencana Peresmian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang telah disampaikan ke DPPS OJK, bahwa:

1. Tanggal 19 Agustus 2022 pukul 20.58 WIB dimulai proses *cut off*/tutup buku sistem konvensional Bank Riau Kepri
2. Tanggal 20 s.d 21 Agustus 2022 dilakukan proses *big bang*, yaitu proses konversi dan migrasi data keuangan dari *Core Banking System* Konvensional & UUS menjadi *Core Banking System Sharia* BUS.

***10. Go-Live* Operasional BRK Syariah**

Sesuai yang tercantum pada Pengumuman yang dipublikasikan di media massa dan unit kantor bahwa tanggal 22 Agustus 2022 merupakan:

1. Hari pertama dimulainya operasional/*go-live* BRK Syariah (Perseroda) sebagai Bank Umum Syariah (BUS).
2. Mulai diberlakukan penggunaan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat BRK Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan (*call sign*) BRK Syariah.
3. Mulai diberlakukan penggunaan logo baru BRK Syariah.

9. Process Cut Off and Big Bang Conversion

The transfer of asset and liability recording data is carried out simultaneously with the process of converting and migrating financial data using the Big Bang strategy, using the Core Banking System, from the Core Banking System to the Core Banking Sharia System (Bank Vision Sharia). There were 2 (two) simultaneous incidents, namely the conversion of the old (conventional) Core Banking System to the New System (Syariah), as well as the migration of assets and liabilities from Bank Riau Kepri and Sharia Business Unit (UUS) of Bank Riau Kepri to BRK Syariah.

As Letter No. 759/OR.03.03/DIR/2022 dated 18 July 2022 regarding Submission of Plans for the Inauguration of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) as a Sharia Commercial Bank (BUS) which has been submitted to DPPS OJK, that:

1. *On August 19, 2022, at 20.58 WIB, the conventional system cut off/book closing process began for Bank Riau Kepri*
2. *From 20 to 21 August 2022 a big bang process was carried out, namely the process of converting and migrating financial data from the Conventional & UUS Core Banking System to the Sharia BUS Core Banking System.*

10. Sharia BRK Operational Go-Live

As stated in the Announcement published in the mass media and office units that August 22, 2022 is:

1. *The first day of commencement of operations/ go-live of BRK Syariah (Perseroda) as a Sharia Commercial Bank (BUS).*
2. *The use of the name PT Regional Development BRK Syariah (Perseroda), abbreviated as BRK Syariah (Perseroda) with the nickname (call sign) BRK Syariah, has come into effect.*
3. *The use of the new BRK Syariah logo has begun.*

4. Mulai dilakukan proses penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan yaitu sejak tanggal 04 Juli 2022, yang dikoordinir oleh Tim Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah (TPHKN) dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengalihan Akad Konversi (SPAK) untuk membantu proses percepatan pengalihan aset di masing-masing unit kantor.

4. *The process of settling rights and obligations from conventional business activities begins no later than 1 (one) year from the date the permit for changing business activities is granted, namely from 04 July 2022, which is coordinated by the Team for Settlement of Customer Rights and Obligations (TPHKN) using the Transfer System application Conversion Contract (SPAK) to assist the process of accelerating the transfer of assets in each office unit.*

G. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI (SDI)

Salah satu *key success factor* yang harus dipersiapkan untuk memastikan keberhasilan konversi adalah SDI, tehnologi, penerapan konsep syariah dan produk syariah. Mempersiapkan SDI yang memahami aspek syariah dan produk syariah yang menarik dan beragam. BRK Syariah diharapkan juga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Hal tersebut juga selaras dengan misi BRK Syariah; mengembangkan SDI berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai-nilai syariah universal.

Peningkatan SDI yang mumpuni dalam memaksimalkan BRK Syariah dengan peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan melaksanakan *workshop*, sosialisasi dan pelatihan terkait Perbankan Syariah yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Sebagai bank yang akan melakukan konversi Bank Riau Kepri telah mempersiapkan kompetensi pegawai dengan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) untuk segenap insan Bank Riau Kepri sebanyak 100% dari total jumlah pegawai. Pengembangan SDI dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah mencakup:

1. Penyempurnaan kebijakan sumber daya insani yang dituangkan dalam *Human Capital Strategic Plan* 2021-2023 yang disusun sebagai *roadmap* dalam pengelolaan SDI Bank beserta tahapan implementasinya.
2. Penyempurnaan BPP Kepegawaian terkait dengan perubahan SOT Konversi, penyesuaian ketentuan eksternal, penyusunan kebijakan remunerasi pegawai, *job grade* dan CPM.
3. Penyusunan *Man Power Planning* sesuai kebutuhan organisasi BRK Syariah, dengan mekanisme pemenuhan pegawai melalui jalur internal (rotasi dan mutasi) maupun eksternal (*fresh graduate* dan *professional hire*) secara berkelanjutan. Struktur Organisasi dibuat dengan memperhatikan rencana bisnis dan strategi BRK Syariah yang disampaikan ke OJK. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dilakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk mengisi struktur organisasi atau *Man Power Planning* (MPP). Selanjutnya berdasarkan MPP, akan dilakukan penempatan dengan memperhatikan posisi pegawai sebelum dilakukan konversi, sehingga meminimalkan *gap* kompetensi yang dapat terjadi. Apabila ditemukan *gap* kompetensi maka akan dilakukan pengembangan pegawai dalam bentuk pelatihan maupun penugasan-penugasan terkait. Apabila terdapat kekurangan jumlah pegawai dari MPP yang telah disetujui, maka akan dilakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan *Man Power Planning* tersebut.

G. DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES (HR)

One of the key success factors that must be prepared to ensure conversion success is human resources, technology, application of sharia concepts and sharia products. Prepare human resources who understand Islamic aspects and attractive and diverse Islamic products. BRK Syariah is also expected to be able to accommodate the needs of the people of Riau and the Riau Archipelago. This is also in line with the mission of BRK Syariah; developing quality human resources who are ready to face the transformation in universal sharia values.

Increasing qualified HR in maximizing Sharia BRK by increasing employee competence is carried out by conducting workshops, outreach and training related to Sharia Banking which have been carried out since 2019 until now.

As a bank that will carry out the conversion, Bank Riau Kepri has prepared employee competencies with Basic Islamic Banking Training (PDPS) for all Bank Riau Kepri personnel as much as 100% of the total number of employees. Development of HR in the framework of Changing Business Activities to become a Sharia Commercial Bank includes:

1. *Refinement of human resource policies as outlined in the Human Capital Strategic Plan 2021-2023 which is prepared as a roadmap for the management of the Bank's HR and its implementation stages.*
2. *Improvements to the BPP for Personnel related to changes in SOT Conversion, adjustments to external regulations, preparation of employee remuneration policies, job grades and CPM.*
3. *Preparation of Man Power Planning according to the organizational needs of BRK Syariah, with a mechanism for fulfilling employees through internal (rotation and mutation) and external (fresh graduate and professional hire) channels on an ongoing basis. The Organizational Structure is made by taking into account the business plan and strategy of BRK Syariah submitted to the OJK. Based on the organizational structure, planning is carried out to meet the needs of employees to fill in the organizational structure or Man Power Planning (MPP). Furthermore, based on the MPP, placement will be carried out by taking into account the position of the employee before the conversion is carried out, so as to minimize competency gaps that can occur. If a competency gap is found, employee development will be carried out in the form of training or related assignments. If there is a shortage of employees from the approved MPP, recruitment will be carried out to meet the needs of the Man Power Planning.*

4. Peningkatan kompetensi SDI, khususnya kompetensi Perbankan Syariah secara berkelanjutan dalam rangka persiapan konversi. Sumber Daya Insani memegang peranan yang besar untuk pelaksanaan kegiatan usaha baik sebelum maupun setelah konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah, sehingga peningkatan kualitas SDI dilakukan dengan *roadmap* sebagai berikut:

4. Improving HR competencies, especially Islamic Banking competencies in a sustainable manner in preparation for conversion. Human Resources play a big role in carrying out business activities both before and after the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah, so that the quality improvement of HR is carried out with the following roadmap:

***ROADMAP* SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH**

ROADMAP SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH

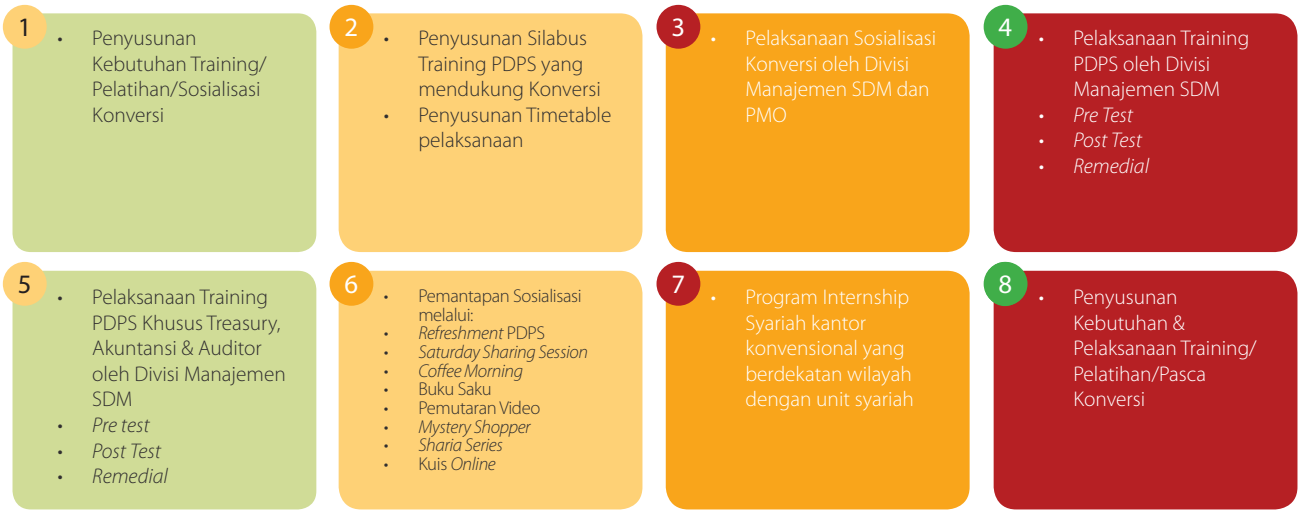

5. Penyusunan *Training Need Analysis* (TNA) yang lebih sesuai dengan kebutuhan pegawai dan pengembangan organisasi, serta penyusunan kurikulum *training* berjenjang yang lebih komprehensif. Penyusunan kebutuhan training dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan konversi dan pelaksanaan kegiatan usaha Perbankan Syariah dengan tujuan:
   a. Mengetahui secara umum kesiapan pegawai Bank Riau Kepri dalam menghadapi rencana Konversi Bank Riau Kepri;
   b. Menyiapkan strategi pengembangan SDI terbaik dalam rangka persiapan proses Konversi Bank Riau Kepri;
   c. Menyiapkan pemahaman Pegawai Bank Riau Kepri tentang konsep dasar Perbankan Syariah yang meliputi:
      - Pemahaman Umum konsep ekonomi Islam dan Riba
      - Pemahaman karakter kegiatan usaha, perbedaan dan konsep Perbankan Syariah
      - Pemahaman karakter dan konsep penghimpunan dana Perbankan Syariah
      - Pemahaman karakter dan praktek pembiayaan Perbankan Syariah
      - Pemahaman konsep jasa layanan yang dapat diberikan oleh Perbankan Syariah
      - Pemahaman karakter dan konsep perhitungan pembagian hasil usaha yang diperoleh Perbankan Syariah untuk investornya

5. Preparation of Training Need Analysis (TNA) that is more in line with employee needs and organizational development, as well as preparation of a more comprehensive tiered training curriculum. Preparation of training and training needs that support the implementation of conversion and implementation of Sharia Banking business activities with the objectives:
   a. Knowing in general the readiness of Bank Riau Kepri employees in facing the conversion plan of Bank Riau Kepri;
   b. Prepare the best HR development strategy in preparation conversion process of Bank Riau Kepri;
   c. Prepare an understanding of Bank Riau Kepri Employees regarding the basic concepts of Islamic Banking which include:
      - General understanding of Islamic economic concepts and Riba
      - Understanding the character of business activities, differences and concepts of Islamic Banking
      - Understanding the character and concept of raising funds in Islamic banking
      - Understanding the character and practice of Islamic banking financing
      - Understanding the concept of services that can be provided by Islamic Banking
      - Understanding the character and concept of calculating the distribution of business results obtained by Islamic Banking for investors

6. Pengembangan *talent management* dan *career development*.
7. Pengembangan aplikasi HRIS dan SKI *online* lanjutan.
8. Penguatan implementasi manajemen kinerja sampai dengan level individu, yang terhubung dengan pemberian *reward & punishment*.
9. Penguatan *corporate culture* dan *engagement* pegawai melalui serangkaian program internalisasi budaya perusahaan yang dibuat secara sistematis dan berkelanjutan.

Pelatihan/Sosialisasi/*Workshop* yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi SDI dalam rangka Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Umum Syariah dari tahun 2019 s.d 2022 sebagi berikut:

6. Development of talent management and career development.
7. Advanced online HRIS and SKI application development.
8. Strengthening the implementation of performance management up to the individual level, which is connected with the provision of rewards & punishments.
9. Strengthening corporate culture and employee engagement through a series of corporate culture internalization programs that are made in a systematic and sustainable manner.

The Training/Socialization/Workshop that has been carried out to increase HR competence in the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank from 2019 to 2022 is as follows:

No	Judul Training	Tgl Awal *Initial Date*	Tgl Akhir *End Date*	Kota *City*	*Training title*
Tahun 2019 | *2019 year*					
1	*Workshop* Sosialisasi Perbankan Syariah Bank Riau Kepri	22-Apr-2019	22-Apr-2019	Pekanbaru	*Bank Riau Kepri Sharia Banking Outreach Workshop*
2	Pelatihan Konsep & Aplikatif Produk Perbankan Syariah	29-Jun-2019	29-Jun-2019	Kota Pekanbaru	*Concept & Applicative Training of Sharia Banking Products*
3	Pembekalan Produk & Jasa Syariah Kepada *Funding Officer*	28-Jun-2019	28-Jun-2019	Pekanbaru	*Provision of Sharia Products & Services to Funding Officers*
5	Syariah *Saturday Sharing Session* Persiapan Konversi Gelombang 1	6-Jul-2019	6-Jul-2019	Pekanbaru	*Sharia Saturday Sharing Session Batch 1 Conversion Preparation*
6	Syariah *Saturday Sharing Session* Persiapan Konversi Gelombang 2	13-Jul-2019	13-Jul-2019	Pekanbaru	*Sharia Saturday Sharing Session Batch 2 Conversion Preparation*
7	Syariah *Saturday Sharing Session* Persiapan Konversi Gelombang 3	20-Jul-2019	20-Jul-2019	Pekanbaru	*Sharia Saturday Sharing Session Batch 3 Conversion Preparation*
8	Sosialisasi Konversi Syariah Bank Riau Kepri Dan Dasar Perbankan Syariah di Cabang Ranai Dan Sekitarnya	15-Aug-2019	16-Aug-2019	Kepulauan Riau	*Socialization of Bank Riau Kepri Sharia Conversion and Basic Sharia Banking in the Ranai Branch and its Surroundings*
9	iB Untuk Pemimpin Kedai dan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	9-Sep-2019	15-Sep-2019	Pekanbaru	*iB For Shop Leaders and Islamic Banking Basic Education*
10	iB Dasar dan Akuntansi Untuk Pelaksana	23-Nov-2019	24-Nov-2019	Pekanbaru	*Basic iB and Accounting for Executors*
11	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri Menjadi BRK Syariah untuk Pegawai Dasar (Satpam, Supir dan Teknisi) Kantor Pusat dan Cabang Utama Bank Riau Kepri	23-Nov-2019	23-Nov-2019	Pekanbaru	*Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah for Basic Employees (Security Guards, Drivers and Technicians) Head Office and Main Branches of Bank Riau Kepri*
13	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah di Pangkalan Kerinci dan Bengkalis	1-Nov-2019	2-Nov-2019	Pangkalan Kerinci dan Bengkalis	*Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank in Pangkalan Kerinci and Bengkalis*
14	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah di wilayah Selat Panjang	21-Nov-2019	23-Nov-2019	Selat Panjang	*Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank in the Long Strait region*
15	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah di Wilayah Air Molek & Taluk Kuantan	30-Nov-2019	1-Dec-2019	Taluk Kuantan	*Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank in the Air Molek & Taluk Kuantan Region*
16	Sosialisasi Kebijakan Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah Wilayah Siak, Tanjung Pinang, Batam	7-Nov-2019	24-Nov-2019	Siak, Tanjung Pinang, dan Batam	*Socialization of Bank Riau Kepri Policy to Become a Sharia Commercial Bank in the Siak Region, Tanjung Pinang, Batam*
17	Sosialisasi Kebijakan Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah Untuk Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Bagian, Staf KPS dan Pelaksana KPS	27-Aug-2019	14-Sep-2019	Pekanbaru	*Socialization of the Conversion Policy of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank for Division Heads, Branch Leaders, Section Leaders, KPS Staff and KPS Executors*

No	Judul Training	Tgl Awal *Initial Date*	Tgl Akhir *End Date*	Kota *City*	*Training title*
18	Training IB *Treasury* dan Salma Bank Riau Kepri	9-Oct-2019	17-Oct-2019	Pekanbaru	*Treasury and Salma IB Training Bank Riau Kepri*
19	Training IB Pembiayaan Untuk Kredit Analis, *Relation Officer*, Admin Kredit , PBK dan Operasional Bank Riau Kepri	12-Oct-2019	27-Oct-2019	Pekanbaru	*IB Financing Training for Credit Analyst, Relation Officer, Credit Admin, PBK and Bank Riau Kepri Operations*
20	Sosialisasi Kebijakan Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah Wilayah Bangkinang	7-Nov-2019	10-Nov-2019	Bangkinang	*Socialization of Bank Riau Kepri Policy to Become a Sharia Commercial Bank in the Bangkinang Region*
21	Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah di Tembilahan	14-Nov-2019	16-Nov-2019	Tembilahan	*Training and Socialization of the Conversion Policy of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank in Tembilahan*
22	Training IB Untuk *Frontliner* dan *Funding Officer* Bank Riau Kepri	12-Oct-2019	27-Oct-2019	Pekanbaru	*IB Training for Frontliners and Funding Officers of Bank Riau Kepri*

No	Judul Training	Tgl Awal *Initial Date*	Tgl Akhir *End Date*	Kota *City*	*Training title*
Tahun 2020 | *2020 year*					
1	Remedial Ujian Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Wilayah PKU, BKN, SSI, TPI dan BTM	25-Jan-2020	2-Feb-2020	Pekanbaru, Siak Sri Indrapura, Tanjung Pinang dan Batam	*Remedial Islamic Banking Basic Education Exams in PKU, BKN, SSI, TPI and BTM Areas*
2	*Training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PLUS) Wilayah Tembilahan dan Sekitarnya	15-Feb-2020	16-Feb-2020	Tembilahan	*Islamic Banking Basic Education Training (PLUS) in Tembilahan and Surrounding Areas*
3	*Training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PLUS) Wilayah Bengkalis, Pangkalan Kerinci dan Sekitarnya	1-Feb-2020	2-Feb-2020	Pangkalan Kerinci dan Bengkalis	*Islamic Banking Basic Education Training (PLUS) for the Bengkalis, Pangkalan Kerinci and Surrounding Areas*
4	*Training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PLUS) Wilayah Tanjung Balai Karimun, Bagan Siapi-api dan Sekitarnya	22-Feb-2020	23-Feb-2020	Tanjung Balai Karimun dan Bagan Siapi-api	*Islamic Banking Basic Education Training (PLUS) for Tanjung Balai Karimun, Bagan Api-api and Surrounding Areas*
5	*Training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PLUS) Wilayah Dumai, Air Molek dan Sekitarnya	1-Feb-2020	2-Feb-2020	Dumai dan Air Molek	*Islamic Banking Basic Education Training (PLUS) for the Dumai, Air Molek and Surrounding Areas*
5	Sosialisasi Kebijakan Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah dan Training Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) Plus Wialyah Selat Panjang, Daik Lingga dan Dabo Singkep	5-Mar-2020	8-Mar-2020	Selat Panjang, Daik Lingga dan Dabo Singkep	*Socialization of the Conversion Policy of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank and Islamic Banking Basic Education Training (PDPS) Plus Selat Panjang, Daik Lingga and Dabo Singkep Areas*
6	*Training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PLUS) Wilayah Ranai dan Pasir Pangaraian dan Sekitarnya	14-Mar-2020	15-Mar-2020	Ranai dan Pasir Pangaraian	*Islamic Banking Basic Education Training (PLUS) for the Ranai and Pasir Pangaraian Areas and Surrounding Areas*
7	*Training Of Trainer Core Banking Syariah* Bank Riau Kepri secara *Online*	13-Apr-2020	17-Apr-2020	Pekanbaru	*Bank Riau Kepri Sharia Banking Core Trainer Training of Trainers online*
8	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Wilayah Jakarta	27-Jun-2020	28-Jun-2020	Jakarta	*Islamic Banking Basic Education Training for the Jakarta Region*
9	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Wilayah Teluk Teluk Kuantan (*Online Training*)	27-Jun-2020	28-Jun-2020	Taluk Kuantan	*Islamic Banking Basic Education Training in Teluk Kuantan Region (Online Training)*
10	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Tarempa Serasan Midai (*Online Training*)	4-Jul-2020	5-Jul-2020	Tarempa Midai dan Serasan	*Tarempa Serasan Midai Sharia Banking Basic Education Training (Online Training)*
11	Sosialisasi Pelaksanaan Aktivitas Layanan Syariah *Batch* 1 (*online class*) I-106	29-Aug-2020	29-Aug-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Socialization of Implementation of Sharia Service Activities Batch 1 (online class) I-106*
12	Sosialisasi Pelaksanaan Aktivitas Layanan Syariah *Batch* 2 (*online class*) I-107	30-Aug-2020	30-Aug-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Socialization of Implementation of Sharia Service Activities Batch 2 (online class) I-107*
13	Sosialisasi Pelaksanaan Aktivitas Layanan Syariah *Batch* 3 (I-108)	1-Sep-2020	1-Sep-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Socialization of Implementation of Batch 3 Sharia Service Activities (I-108)*
14	Sosialisasi Pelaksanaan Aktivitas Layanan Syariah *Batch* 4 (I-109)	2-Sep-2020	2-Sep-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Socialization of Implementation of Batch 4 Sharia Service Activities (I-109)*
15	Sosialisasi Pelaksanaan Aktivitas Layanan Syariah *Batch* 5 (I-110)	3-Sep-2020	3-Sep-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Socialization of Implementation of Batch 5 Sharia Service Activities (I-110)*
16	PDPS Bagi Pegawai Dasar Bank Riau Kepri *Batch* 5 (I-127)	27-Sep-2020	27-Sep-2020	Unit kantor Masing-Masing	*PDPS for Basic Employees of Bank Riau Kepri Batch 5 (I-127)*
17	PDPS Bagi Pegawai Dasar Bank Riau Kepri *Batch* 4 (I-125)	11-Sep-2020	11-Sep-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*PDPS for Basic Employees of Bank Riau Kepri Batch 4 (I-125)*

No	Judul Training	Tgl Awal *Initial Date*	Tgl Akhir *End Date*	Kota *City*	*Training title*
18	PDPS Bagi Pegawai Dasar Bank Riau Kepri *Batch* 3 (I-124)	10-Sep-2020	10-Sep-2020	Pekanbaru	*PDPS for Basic Employees of Bank Riau Kepri Batch 3 (I-124)*
19	PDPS Bagi Pegawai Dasar Bank Riau Kepri *Batch* 1 (I-118)	6-Sep-2020	6-Sep-2020	Pekanbaru	*PDPS for Basic Employees of Bank Riau Kepri Batch 1 (I-118)*
20	PDPS Bagi Pegawai Dasar Bank Riau Kepri *Batch* 2 (I-123)	9-Sep-2020	9-Sep-2020	Unit kantor Masing-Masing	*PDPS for Basic Employees of Bank Riau Kepri Batch 2 (I-123)*
21	*Training* IB Dasar SSU *Batch* 1 (I-137)	17-Oct-2020	18-Oct-2020	Pekanbaru	*SSU Basic IB Training Batch 1 (I-137)*
22	IB Manajemen Risiko & IB Kepatuhan *Batch* 1 (I-135)	16-Oct-2020	18-Oct-2020	Pekanbaru	*IB Risk Management & IB Compliance Batch 1 (I-135)*
23	*Training* IB Dasar Untuk SSU *Batch* 2 (I-143)	21-Oct-2020	22-Oct-2020	Pekanbaru	*Basic IB Training for SSU Batch 2 (I-143)*
24	IB Manajemen Risiko & IB Kepatuhan *Batch* 2 (I-136)	23-Oct-2020	25-Oct-2020	Pekanbaru	*IB Risk Management & IB Compliance Batch 2 (I-136)*
25	IB Untuk Pemimpin Seksi Operasional Cabang (I-148)	19-Oct-2020	22-Oct-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*IB For Head of Branch Operations Section (I-148)*
26	IB Untuk pemimpin Seksi Operasional & Pelayanan Cabang Pembantu (I-141)	20-Oct-2020	23-Oct-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*IB For Head of Operations & Sub-Branch Service Section (I-141)*
27	IB Untuk Pemimpin Seksi Pelayanan Cabang Bank Riau Kepri (I-149)	24-Oct-2020	27-Oct-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*IB For Bank Riau Kepri Branch Service Section Leader (I-149)*
28	IB Untuk Pemimpin Seksi Pembiayaan (I-142)	23-Oct-2020	26-Oct-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*IB For Financing Section Head (I-142)*
29	*Training of Trainer* (ToT) CBS Syariah *Batch* 1 (I-151)	24-Oct-2020	25-Oct-2020	Pekanbaru	*Training of Trainer (ToT) CBS Syariah Batch 1 (I-151)*
30	IB *Overview* Pemimpin Divisi Bank Riau Kepri	2-Nov-2020	3-Nov-2020	Pekanbaru	*IB Overview Division Head of Bank Riau Kepri*
31	PDPS IB *Overview* Bagi Pengurus Bank (Direksi) (I-150)	26-Oct-2020	27-Oct-2020	Pekanbaru	*PDPS IB Overview for Bank Management (Directors) (I-150)*
32	IB *Overview* Untuk Pengurus Bank (Komisaris) (I-155)	2-Nov-2020	3-Nov-2020	Pekanbaru	*IB Overview for Bank Management (Commissioners) (I-155)*
33	IB *Overview* Untuk Pemimpin Cabang Bank Riau Kepri (I-159)	2-Nov-2020	5-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*IB Overview For Branch Leaders Bank Riau Kepri (I-159)*
34	Training IB Dasar Untuk SBU Bank Riau Kepri (I-161)	23-Oct-2020	27-Oct-2020	Pekanbaru	*Basic IB Training for SBU Bank Riau Kepri (I-161)*
35	IB *Overview* Untuk Pemimpin Cabang Pembantu Bank Riau Kepri (i-160)	2-Nov-2020	5-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*IB Overview for Supporting Branch Managers of Bank Riau Kepri (i-160)*
36	*Training* iB Dasar & Pembiayaan SBU *Batch* 2 (I-161)	2-Nov-2020	6-Nov-2020	Pekanbaru	*Basic iB Training & SBU Funding Batch 2 (I-161)*
37	*Training of Trainer* (ToT) CBS Syariah *Batch* 2 (I-153)	4-Nov-2020	5-Nov-2020	Batam	*Training of Trainer (ToT) CBS Syariah Batch 2 (I-153)*
38	*Roll Out Core Banking System* BUS *Batch* 1 (I-165)	7-Nov-2020	8-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Batch 1 (I-165)*
39	*Roll Out Core Banking System* BUS *Batch* 2 (I-167)	14-Nov-2020	15-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Batch 2 (I-167)*
40	*Roll Out Core Banking System* BUS *Batch* 3 (I-172)	21-Nov-2020	22-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Batch 3 (I-172)*
41	*Roll Out Core Banking System* BUS *Batch* 4 (I-176)	28-Nov-2020	29-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Batch 4 (I-176)*
42	*Roll Out Core Banking System* BUS Kedai *Batch* 1 (I-179)	28-Nov-2020	29-Nov-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Kedai Batch 1 (I-179)*
43	PDPS Pegawai Dasar Kantor Pusat (I-185)	12-Dec-2020	12-Dec-2020	Pekanbaru	*PDPS Head Office Basic Employee (I-185)*
44	Sosialisasi BPP Produk Pembiayaan Unit Kantor Wilayah Pekanbaru (I-187)	12-Dec-2020	12-Dec-2020	Pekanbaru	*Socialization of BPP Financing Products for Pekanbaru Regional Office Units (I-187)*
45	Sosialisasi BPP produk Pendanaan & Jasa Wilayah Pekanbaru (I-192)	12-Dec-2020	12-Jan-2021	Pekanbaru	*Socialization of BPP Funding & Services Products in Pekanbaru Area (I-192)*
46	Sosialisasi BPP Produk Pembiayaan Unit Kantor Wilayah Batam (i-195) dan Motivasi Sprituall	19-Dec-2020	19-Dec-2020	Batam	*Socialization of BPP Financing Products for Batam Regional Office Units (i-195) and Spiritual Motivation*
47	*Roll Out Core Banking System* BUS *Batch* 5 (I-181)	5-Dec-2020	6-Dec-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Batch 5 (I-181)*
48	*Roll Out Core Banking System* BUS Kedai *Batch* 2 (I-180)	5-Dec-2020	6-Dec-2020	Unit Kantor Masing-Masing	*Roll Out Core Banking System BUS Kedai Batch 2 (I-180)*
49	Sosialisasi BPP Produk Pembiayaan Unit Kantor Wilayah Tanjung Pinang dan Motivasi Spritual (I-196)	12/20/2020	12/20/2020	Tanjung Pinang	*Socialization of BPP Tanjung Pinang Regional Office Unit Financing Products and Spiritual Motivation (I-196)*

No	Judul Training	Tgl Awal *Initial Date*	Tgl Akhir *End Date*	Kota *City*	*Training title*
Tahun 2021 | *2021 year*					
1	*Training* Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	26-Jan-2021	27-Jan-2021	Unit Kantor Masing- Masing	*Sharia Banking Basic Education Training*
2	Sosialisasi BPP Produk Pendanaan dan Jasa Wilayah Dumai	30-Jan-2021	30-Jan-2021	Dumai	*Socialization of BPP Funding Products and Services for the Dumai Region*
3	*Training of Trainer* (ToT) *Islamic Banking For Executive* (I-034)	8-Apr-2021	8-Apr-2021	Pekanbaru	*Islamic Banking Training of Trainer (ToT) For Executive (I-034)*
4	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Bagi Pegawai PTT Baru Bank Riau Kepri *Batch* 1 (*Online Class*) I-186	24-Nov-2021	25-Nov-2021	Pekanbaru	*Islamic Banking Basic Education Training for New PTT Employees of Bank Riau Kepri Batch 1 (Online Class) I-186*
5	Pelatihan Praktek Bank Mini *Batch* 2 (I-176)	12-Nov-2021	14-Nov-2021	Pekanbaru	*Batch 2 Mini Bank Practical Training (I-176)*
6	Pelatihan Praktek Bank Mini *Batch* 1 (I-175)	2-Nov-2021	4-Nov-2021	Pekanbaru	*Batch 1 Mini Bank Practical Training (I-175)*
7	Pelatihan Praktek Bank Mini *Batch* 3 (I-177)	19-Nov-2021	21-Nov-2021	Pekanbaru	*Batch 3 (I-177) Mini Bank Practical Training*
8	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Bagi Pegawai PTT Baru Bank Riau Kepri *Batch* 2 (*Online Class*) I-197	1-Dec-2021	2-Dec-2021	Pekanbaru	*Islamic Banking Basic Education for New PTT Employees of Bank Riau Kepri Batch 2 (Online Class) I-197*
9	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Bagi Pegawai PTT Baru Bank Riau Kepri *Batch* 3 (*Online & Offline Class*) I-198	7-Dec-2021	8-Dec-2021	Pekanbaru	*Islamic Banking Basic Education for New PTT Employees of Bank Riau Kepri Batch 3 (Online & Offline Class) I-198*
10	*Crash* Program Pemerataan Pemahaman Perbankan syariah I-208	25-Dec-2021	25-Dec-2021	Pekanbaru	*Sharia Banking Understanding Equality Equity Program Crash I-208*

No	Judul Training	Tgl Awal *Initial Date*	Tgl Akhir *End Date*	Kota *City*	*Training title*
Tahun 2022 | *2022 year*					
1	Pelatihan PDPS Bagi Pegawai Baru Bank Riau Kepri (I-012)	12-Feb-2022	12-Feb-2022	Pekanbaru	*PDPS Training for New Employees of Bank Riau Kepri (I-012)*
2	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank (I-014)	17-Feb-2022	19-Feb-2022	Batam	*Sharia Banking Training for Bank Management (I-014)*
3	Pelaksanaan Praktek Bank Mini Simulasi Transaksi Syariah (Aktivitas Operasional BUS) I-023	12-Mar-2022	13-Mar-2022	Pekanbaru	*Implementation of Bank MIni Practices Simulation of Sharia Transactions (BUS Operational Activities) I-023*
4	Sosialisasi & Edukasi Pemenuhan Aspek Syariah (I-043)	14-Apr-2022	18-Apr-2022	Pekanbaru	*Socialization & Education on Fulfillment of Sharia Aspects (I-043)*
5	Sosialisasi BPP Konversi (I-042)	14-Apr-2022	18-Apr-2022	Pekanbaru	*Socialization of BPP Conversion (I-042)*
6	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EFOS Pembiayaan Konsumer dan Sosialisasi Sistem Pengalihan Akad Konversi (SPAK) I-071	27-Jun-2022	27-Jun-2022	Pekanbaru	*Socialization of the Use of the EFOS Consumer Financing Application and Dissemination of the Transfer Contract System (SPAK) I-071*
7	Training Pegawai Tidak Tetap Core Baru dan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (I-074)	4-Jul-2022	5-Jul-2022	Pekanbaru	*New Core Non-Permanent Employee Training and Sharia Banking Basic Training (I-074)*
8	Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengalihan Akad Konversi (SPAK) Tahap 2 Untuk Wilayah Pekanbaru (I-079)	21-Jul-2022	21-Jul-2022	Pekanbaru	*Socialization of Phase 2 Conversion Contract Transfer System (SPAK) Application for the Pekanbaru Region (I-079)*
9	Sosialisasi Simulasi Aplikasi EFOS Pembiayaan (I-083)	27-Jul-2022	29-Jul-2022	Pekanbaru	*Socialization of Financing EFOS Application Simulation (I-083)*

H. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Kesiapan Teknologi Informasi (TI) BRK Syariah menjadi hal utama dalam menunjang keberhasilan proses konversi Bank Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri yang akan melakukan peralihan atau migrasi data Bank Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri ke BRK Syariah secara sistem dan menyeluruh, serta disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Aplikasi terkait TI yang akan dijalankan di BRK Syariah harus dapat mendukung proses konversi Bank

H. INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SYSTEM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

BRK Syariah Information Technology readiness is the main thing in supporting the success of the conversion process for Bank Riau Kepri and UUS Bank Riau Kepri which will transfer or migrate data from Bank Riau Kepri and UUS Bank Riau Kepri to BRK Syariah in a systemic and comprehensive manner, and adapted to the existing conditions.

IT-related applications that will be run at BRK Syariah must be able to support the conversion process of Bank

Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah (BUS), serta mendukung pengembangan bisnis syariah yang dilakukan oleh BRK Syariah. Oleh karena itu Aplikasi Teknologi Informasi, harus dapat mengakomodir kebutuhan bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang *(business requirement)* antara lain mencakup:

a. Proses yang sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Regulator dan Dewan Syariah Nasional – MUI, misalnya:
   a). Dalam hal penghimpunan dana memiliki modul *wadi'ah* dan *mudharabah*
   b). Dalam hal penyaluran dana memiliki modul jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna'*); modul sewa/upah (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT);* modul bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah)*.
b. Modul pembagian hasil usaha (*profit distribution*);
c. Modul yang mendukung kegiatan usaha dan jasa layanan lainnya;
d. Sistem akuntansi syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Sistem secara otomasi dan *online;*
f. Pengawasan internal berupa *Audit Trail.*

Pengembangan Infrastruktur Sistem TI Konversi menjadi Bank Umum Syariah meliputi:

1. Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola TI BRK Syariah dilaksanakan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Tujuan Tata Kelola TI adalah untuk mengoptimalkan produktivitas dari persiapan dokumentasi atas tata kelola TI. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan atas *regulatory* oleh BRK Syariah. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

a. Pembuatan Rencana Teknologi Informasi;
b. Penyiapan kerangka, kebijakan, prosedur, petunjuk teknis dan standar teknologi informasi;
c. Pembuatan Arsitektur TI dan *Application Dependency Diagram;*
d. Laporan-laporan *regulatory* Bank lainnya.

Dalam aktivitas Tata Kelola TI juga dilakukan penetapan kebutuhan (*requirement*) dan ruang lingkup pekerjaan untuk masing-masing pengembangan dan proyek yang hendak dilaksanakan yang dilakukan secara bersama. Hasil dari penetapan *requirement* ini adalah *project plan* makro yang dimonitor secara rutin dan berkala.

Riau Kepri and UUS of Bank Riau Kepri into BRK Syariah (BUS), as well as support sharia business development carried out by BRK Syariah. Therefore Information Technology Applications must be able to accommodate business needs that are constantly changing and developing (business requirements), including:

a. Processes that are in accordance with Sharia principles as regulated under the provisions of the National Sharia Regulator and Council - MUI, for example:
   a). In terms of raising funds, it has wadi'ah and mudharabah modules
   b). In the event that the distribution of funds has a buying and selling module (murabaha, salam and istishna'); rental/wages module (Ijarah and Ijarah Muntakiya Bit Tamlik/IMBT); profit sharing module (mudharabah and musyarakah).
b. Business results sharing module (profit distribution);
c. Modules that support business activities and other services;
d. Sharia accounting system in accordance with applicable regulations;
e. Automatic and online system;
f. Internal supervision is in the form of an Audit Trail.

Development of IT System Infrastructure for Conversion to Sharia Commercial Banks includes:

1. Information Technology Governance

BRK Syariah's IT governance is carried out in reference to OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016 of 2016 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, and OJK Circular Letter Number 21/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

The goal of IT Governance is to optimize the productivity of the preparation of IT governance documentation. This is intended to ensure completeness and regulatory compliance by BRK Syariah. Activities carried out include:

a. Preparation of Information Technology Plans;
b. Preparation of frameworks, policies, procedures, technical instructions and information technology standards;
c. Creating IT Architecture and Application Dependency Diagrams;
d. Other regulatory bank reports.

In IT Governance activities, the requirements and scope of work for each development and project to be carried out are determined jointly. The result of determining these requirements is a macro project plan that is monitored routinely and periodically.

2. Persiapan Infrastruktur Teknologi Informasi

Sistem Informasi untuk mendukung aktivitas di BRK Syariah (BUS) dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem *core banking bank vision* yang digunakan pada Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri bekerjasama dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI), yaitu PT Multipolar Technology Tbk**.** Untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pendukung lainnya dilakukan oleh internal Bank Riau Kepri.

Aplikasi TI yang dipergunakan Bank Riau Kepri dalam melakukan konversi Bank Riau Kepri (konvensional) dan migrasi UUS Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah sebagai Bank Umum Syariah adalah *"Core Banking System Bank Vision Sharia".*

Core Banking System Bank Vision Sharia merupakan *upgrade* (penyempurnaan) dari *Core Banking* Bank *Vision* yang telah dipergunakan UUS Bank Riau Kepri. Untuk menunjang pemenuhan bisnis pada BRK Syariah dilakukan *mapping* dan *gap analysis* pada *Core Banking System* Bank Riau Kepri, antara lain dalam hal:

a. Produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa layanan perbankan lainnya;
b. Akun-akun yang terkait dengan produk dan pembukuan lainnya (laporan internal dan eksternal (LHBU, LBBUS, LSMK, LKPBU, SID dan lainnya).

Konversi dan migrasi data dari aplikasi Bank Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri ke aplikasi BRK Syariah dilakukan apabila:

a. Konversi Bank Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah telah disetujui oleh OJK;
b. Simulasi dan Implementasi *Bank Vision* Syariah telah dilakukan pada BRK Syariah.

Core Banking Vision Sharia ini memiliki modul sebagai berikut:

1. *Integrated System* dengan modul yang lengkap, antara lain:
   1). Module Core Banking System* BUS*:
   A. *Customer Information System*
      a). CIS (Modul Informasi Nasabah)
      b). WIC (*Walk In Customer*)
   B. Sub dari *Customer Information System*
      a). DHN (Daftar Hitam Nasional)
      b). RBA (*Risk Based Analysis*)
      c). LTKT/LTKM
      d). ASP (Administrasi Surat Peringatan)

2. Information Technology Infrastructure Preparation

The Information System to support activities at BRK Syariah (BUS) is developing and perfecting the bank vision core banking system used at the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri in collaboration with Information Technology Service Providers (PJTI), namely PT Multipolar Technology Tbk. For the development and improvement of other supporting applications carried out internally by Bank Riau Kepri.

The IT application used by Bank Riau Kepri in converting Bank Riau Kepri (conventional) and migrating UUS of Bank Riau Kepri to BRK Syariah as an Islamic Commercial Bank is the "Core Banking System of Bank Vision Sharia".

The Core Banking System of Bank Vision Syariah is an upgrade (improvement) of the Core Banking Bank Vision which has been used by UUS Bank Riau Kepri. To support business fulfillment at BRK Syariah, mapping and gap analysis was carried out on the Core banking System of Bank Riau Kepri, including in terms of:

a. Fund collection products, fund distribution and other banking services;
b. Accounts related to products and other bookkeeping (internal and external reports (LHBU, LBBUS, LSMK, LKPBU, SID and others).

Conversion and migration of data from the Bank Riau Kepri and UUS Bank Riau Kepri applications to the BRK Syariah application is carried out if:

a. The conversion of Bank Riau Kepri and UUS of Bank Riau Kepri to BRK Syariah has been approved by OJK;
b. The simulation and implementation of Bank Vision Sharia has been carried out at BRK Syariah.

Core Banking Vision Sharia has the following modules:

1. Integrated System with complete modules, including:
   1). BUS Core Banking System Modules:
   A. Customer Information System
      a). CIS (Customer Information Module)
      b). WIC (Walk In Customer)
   B. Sub of the Customer Information System
      a). DHN (National Black List)
      b). RBA (Risk Based Analysis)
      c). LTKT/LTKM
      d). ASP (Reminder Letter Administration)

C. *Demand Deposit System*
   a). Pendanaan *Mudharabah*
   b). Pendanaan *Wadiah*
   c). Tabungan Berjangka
   d). PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)
D. *Time Deposit System*
   a). *Mudharabah Muqayyadah*
   b). Deposito *Mudharabah*
E. *Fund* Transfer
   a). SKN
   b). RTGS
F. *Share System:* HI-1000
G. *General Ledger System*
   a). Neraca
   b). Laporan Laba/Rugi
   c). Transaksi-transaksi GL
H. *Cross Application System*
   a). Manajemen Cabang
   b). Manajemen Kalender
   c). *Security* Aplikasi
   d). Kontrol Program
   e). Manajemen *User* dan Wewenang
I. *Financing & Collateral System*
   a). Ijarah Multijasa
   b). *Ijarah*
   c). MMQ Aset
   d). MMQ Non Aset
   e). *Mudharabah*
   f). Manajemen *Account Officer*
   g). Subrogasi
   h). *Khafalah*
   i). *Qardh (Rahn)*
   j). *Qardh* (Talangan Haji)
   k). *Murabahah*
   l). *Istishna*
   m). *Musyarakah*

2). *E-Channel*
A. ATM
B. *SMS Banking*
C. BSA
D. *Mobile Banking* MLPT
E. EDC

3). *Interfacing* dan *H2H*
A. *Payment Gateway Vision Link :*
   a). BPIH
   b). PLN
   c). MPN
   d). Samsat
   e). *Virtual Account*
B. *Payment Gateway* (IK Gaji)

4). Pelaporan (*Vision* CBR)
A. LSMK
B. ANTASENA
C. SLIK

C. *Demand Deposit System*
   a). Mudharabah Funding
   b). Wadiah Funding
   c). Term Savings
   d). PRKS (Sharia Current Account Financing)
D. *Time Deposit System*
   a). Mudharabah Muqayyadah
   b). Mudharabah deposits
E. *Fund Transfers*
   a). SKN
   b). RTGS
F. *Share System: HI-1000*
G. *General Ledger System*
   a). balance sheet
   b). Income statement
   c). GL transactions
H. *Cross-Application System*
   a). Branch Management
   b). Calendar Management
   c). Application Security
   d). Program Control
   e). User and Authority Management
I. *Financing & Collateral System*
   a). Multiservice Ijarah
   b). Ijarah
   c). MMQ Assets
   d). MMQ Non Asset
   e). Mudharabah
   f). Account Officer Management
   g). Subrogation
   h). Khafalah
   i). Qardh (Rahn)
   j). Qardh (Hajj Bailout)
   k). Murabahah
   l). Istishna
   m). Musyarakah

2). E-Channels
A. ATM
B. Banking SMS
C. BSA
D. MLPT Mobile Banking
E. EDC

3). Interfacing and H2H
A. Payment Gateway Vision Link :
   a). BPIH
   b). PLN
   c). MPN
   d). Samsat
   e). Virtual Accounts
B. Payment Gateway (IG Salary)

4). Reporting (Vision CBR)
A. LSMK
B. ANTASENA
C. SLIK

5). Card Management System

6). Vision Sign

A. *Fingerprint*

B. Tanda tangan

C. *Pinpad*

7). E-Statement

2. Aktivitas yang dilakukan untuk pengembangan aplikasi *Bank Vision Syariah* meliputi:

A. Persiapan

1). *Kick Off Project*

2). *Gap Analysis & Review & Approval FSD*

3). *Training To Trainer*

B. Penyesuaian

1). *Development* FSD

2). *System Integration Testing* FSD

3). *Data Convertion*

4). *Parameter Setup + Training Setting Product*

C. Interaksi Pengguna

1). *User Acceptance Testing VisionShari'a*

2). Data *Convertion UAT*

3). ToT Wilayah Pekanbaru

4). ToT Wilayan Kepulauan Riau (Batam)

5). *Pentest* dan Audit Kesiapan CBS

6). *User Training*

D. *Go Live*

1). *Operation Readiness Test*

2). *Migration & Live*

3). *Post Implementation Review (PIR)*

3. Aplikasi Internal Bank Riau Kepri terdiri dari:

a. SKPD *Online*

b. SPAN

c. *Cash Management System* (CMS)

d. SP2D *Online*

e. *Payroll Online*

f. Tabungan Terencana Syariah

g. Web CS

h. *Payment System*

i. *Human Resources Information System* (HRIS)

Bank telah melakukan Simulasi konversi (*rehearsal*)/ *Operational Readiness Test* (ORT) yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) kali dalam rangka familiarisasi CBS (*Core Banking Sharia*) kepada pegawai yaitu:

a). *Rehearsal* Pertama dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Desember 2020 dengan data *production* tanggal 10 Desember 2020.

b). *Rehearsal* Kedua dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 Desember 2020 dengan data *production* tanggal 17 Desember 2020.

5). Card Management System

6). Vision Sign

A. Fingerprints

B. Signature

C. Pinpad

7). E-Statement

2. Activities carried out for the development of Bank Vision Syariah applications include:

A. Preparation

1). Kick Off Project

2). Gap Analysis & Review & Approval FSD

3). Training To Trainer

B. Adjustment

1). Development FSD

2). System Integration Testing FSD

3). Data Conversion

4). Parameter Setup + Training Setting Product

C. User Interaction

1). User Acceptance Testing VisionShari'a

2). Data Conversion UAT

3). Pekanbaru Region ToT

4). Riau Archipelago ToT (Batam)

5). CBS Readiness Pentest and Audit

6). User Training

D. GoLive

1). Operation Readiness Test

2). Migration & Live

3). Post Implementation Review (PIR)

3. Bank Riau Kepri Internal Application consists of:

a. SKPD Online

b. SPAN

c. Cash Management System (CMS)

d. SP2D Online

e. Payrolls Online

f. Sharia Planned Savings

g. CS Web

h. Payment System

i. Human Resources Information System (HRIS)

The Bank has carried out a conversion simulation (rehearsal)/Operational Readiness Test (ORT) which was carried out 8 (eight) times in the context of CBS (Core Banking Sharia) familiarization to employees, namely:

a). The first rehearsal was held on Saturday and Sunday December 12 and 13, 2020 with production data on 10 December 2020.

b). The second rehearsal was held on Saturday and Sunday December 19 and 20 2020 with production data on December 17, 2020.

c). *Rehearsal* Ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Desember 2020 dengan data *production* tanggal 22 Desember 2020.

d). *Rehearsal* Keempat dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 Februari 2021.

e). *Rehearsal* Kelima dilaksanakan menjadi 2 tahapan, yakni tahapan pertama dilakukan *proofing* data Penihilan dan Konversi secara Konsolidasi oleh Tim Kantor Pusat dan tahapan kedua dilakukan *proofing* data Penihilan dan Konversi Unit Kantor oleh masing-masing PIC Unit Kantor. Tahap 1 pada hari Jumat dan Senin, tanggal 2 Juli 2021 dan 5 Juli 2021. Tahap 2 pada hari Sabtu, Senin dan Selasa, tanggal 10, 12 dan 13 Juli 2021. Data *Production* yang digunakan adalah data tanggal 28 Juni 2021.

f). *Rehearsal* keenam dilaksanakan menjadi 2 tahapan, yakni tahapan pertama dilakukan *proofing* data Penihilan dan secara Konsolidasi oleh Tim Kantor Pusat dan tahapan kedua dilakukan *proofing* data Penihilan dan Konversi Unit Kantor oleh masing-masing PIC Unit Kantor. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dengan Data *Production* tanggal 22 November 2021.

g). *Rehearsal* ketujuh dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 dengan Data *Production* tanggal 10 Februari 2022.

h). *Rehearsal* kedelapan dilaksanakan pada hari Selasa sd. Kamis, tanggal 26 sd. 28 April 2022 dengan Data *Production* tanggal 31 Maret 2022.

3. Aktivitas Implementasi Sistem Teknologi Informasi Konversi

Bank telah melaksanakan implementasi Sistem TI Konversi sesuai dengan Ketentuan Migrasi dan Konversi Data Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

a. Proses konversi dan migrasi data keuangan dari Bank Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah menggunakan aplikasi *Core banking System Bank Vision Sharia* baru, sekaligus menggantikan sistem lama Bank *Vision* Lama;

b. Konversi dan migrasi, dilakukan menggunakan strategi *Big Bang* (menyeluruh), yakni dengan menerapkan *Bank Vision Sharia* di semua kantor. Sistem lama dihentikan pada saat sistem baru dimulai, dimana kesiapan aplikasi, user, infrastruktur dan jaringan harus tersedia dan siap pada saat sistem dimulai;

c. Pemilihan strategi *Big Bang* dilakukan sesuai kajian yang telah dibuat. Analisis dan kajian

c). The third rehearsal will be held on Saturday and Sunday December 26 and 27 2020 with production data on December 22 2020.

d). The Fourth Rehearsal will be held on Saturday and Sunday February 26 2021.

e). The Fifth Rehearsal was carried out in 2 stages, namely the first stage was proofing data on Consolidated Elimination and Conversion by the Head Office Team and the second stage was proofing data on Elimination and Conversion of Office Units by each Office Unit PIC. Phase 1 on Friday and Monday, July 2 2021 and July 5 2021. Phase 2 is on Saturday, Monday and Tuesday, July 10, 12 and 13 2021. Production data used is June 28 2021 data.

f). The sixth rehearsal was carried out in 2 stages, namely the first stage was carried out by proofing data on Consolidation and Exclusion by the Head Office Team and the second stage was carried out by proofing data on Exile and Conversion of Office Units by each PIC of Office Units. The activity was carried out on Saturday 18 December 2021 with Data Production on 22 November 2021.

g). The seventh rehearsal will be held on Monday 14 February 2022 with Data Production on 10 February 2022.

h). The eighth rehearsal will be held on Tuesday SD. thursday, the 26th sd. 28 April 2022 with Data Production on 31 March 2022.

3. Conversion Information Technology System Implementation Activities

The Bank has carried out the implementation of the Conversion IT System in accordance with the Provisions for Migration and Conversion of Financial Report Data, namely as follows:

a. the process of converting and migrating financial data from Bank Riau Kepri and UUS Bank Riau Kepri to BRK Syariah using the new Bank Vision Sharia Core Banking System application, as well as replacing the old Bank Vision Old system;

b. Conversion and migration are carried out using the Big Bang strategy (overall), namely by implementing Bank Vision Syariah in all offices. The old system is stopped when the new system is started, where application, user, infrastructure and network readiness must be available and ready when the system is started;

c. The selection of the Big Bang strategy is carried out according to the studies that have been

aspek Syariah dilakukan dengan memenuhi aspek *qawaa'id* (kaidah) dan *mabaadi'* (prinsip) transaksi *muamalah maliyah* dengan menetapkan *khashaish* (karakteristik) dan *dhawabith* (kriteria);

d. Bank telah melakukan *product mapping* atas seluruh produk dan layanan Bank Konvensional yang akan dikonversi. *Product mapping* sudah dilakukan sesuai dengan Opini Dewan Pengawas Syariah No.01/O.DPS/IV/2021 terkait *Mapping* Produk Pengalihan *Asset & Liability* Konvensional Menjadi Portofolio Syariah;

e. Konversi dan Migrasi dijadwalkan pada hari libur yaitu Sabtu s.d Minggu pada tanggal 20 s.d 21 Agustus 2022, sehingga jika ada terjadi permasalahan masih mungkin dilakukan perbaikan dan pelayanan terhadap nasabah tidak terganggu;

f. Tahapan proses pelaksanaan konversi dan migrasi data keuangan dari Bank Riau Kepri dan UUS Bank Riau Kepri ke BRK Syariah, dapat digambarkan sebagai berikut:

made. Analysis and study of the Sharia aspects is carried out by fulfilling the qawaa'id (rule) and mabaadi' (principles) aspects of muamalah maliyah transactions by establishing Khashaish (characteristics) and dhawabith (criteria);

d. The Bank has conducted product mapping of all Conventional Bank products and services that will be converted. Product mapping has been carried out in accordance with the Opinion of the Sharia Supervisory Board No.01/O.DPS/IV/2021 regarding the Mapping of Conventional Asset & Liability Transfer Products into Sharia Portfolios;

e. Conversion and Migration are scheduled for holidays, namely Saturday to Sunday from 20 to 21 August 2022, so that if there is a problem it is still possible to make repairs and service to customers is not disrupted;

f. The stages of the process of implementing the conversion and migration of financial data from Bank Riau Kepri and UUS Bank Riau Kepri to BRK Syariah, can be described as follows:

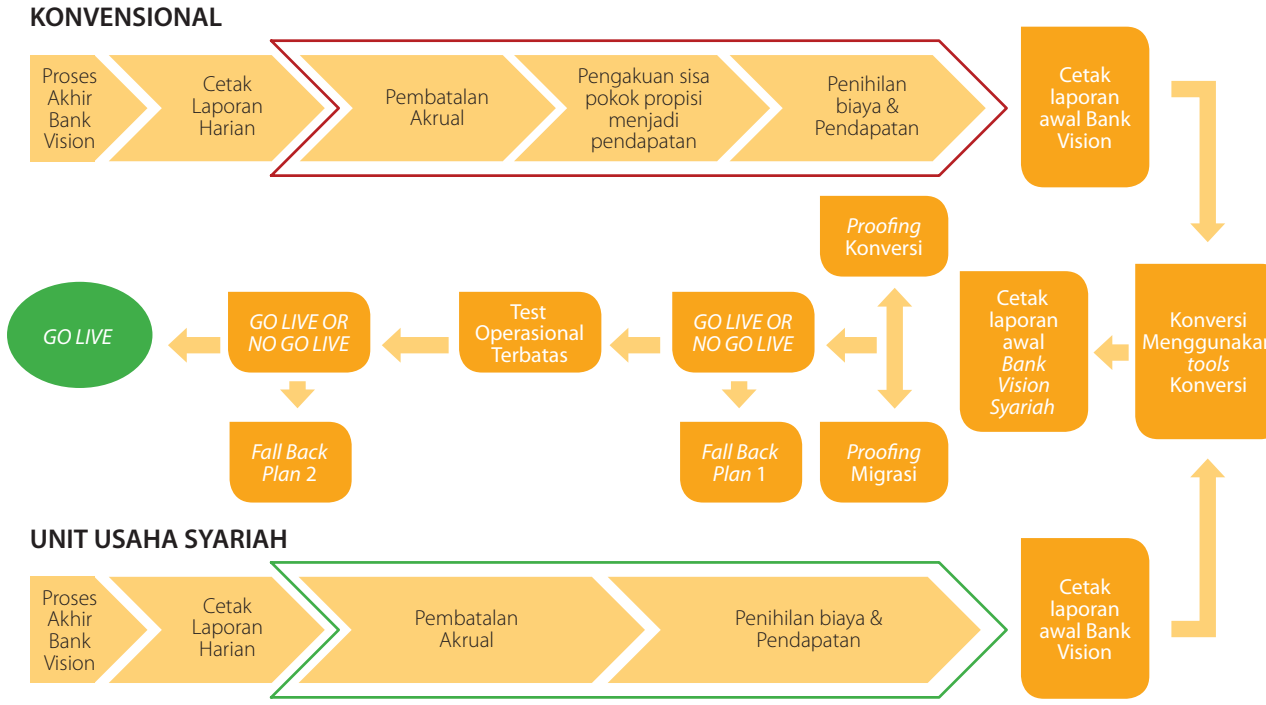

4. **Jaringan, *Infrastruktur, Data Center* dan *Disaster Recovery Center***

   Dalam rangka menunjang operasional BRK Syariah dilakukan penyediaan perangkat lunak maupun perangkat keras TI, meliputi:

   a. Penyiapan infrastruktur jalur komunikasi untuk BRK Syariah termasuk jaringan komunikasi ke seluruh Kantor Cabang.
   b. Menyediakan mesin untuk *production* maupun *development* yang mendukung Aplikasi BRK Syariah dan sistem transaksi syariah;
   c. Tersedianya *Data Center* untuk kebutuhan mesin *production* dan *development*;
   d. Kesiapan *Disaster Recovery Center* yang akan berada di lokasi Gedung Lintas Arta di Jl. TB Simatupang Jakarta;
   e. Tersedianya *workstation* untuk Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang, meliputi PC *stand alone*, terminal maupun *server*, printer dan perangkat *support* lainnya;
   f. Penyediaan jaringan komunikasi seperti *email*, *domain* dan PABX, antar Kantor Pusat dan Kantor Cabang, serta inter Kantor Cabang yang satu dengan Kantor Cabang lainnya.

4. ***Network, Infrastructure, Data Center and Disaster Recovery Center***

   In order to support the operations of BRK Syariah, IT software and hardware are provided, including:

   a. Preparation of communication line infrastructure for BRK Syariah including communication networks to all branch offices.
   b. Providing machines for production and development that support the Bank Riau Kepri Sharia Application and sharia transaction systems;
   c. Availability of Data Center for the needs of production and development machines;
   d. Readiness for the Disaster Recovery Center which will be located at the Lintas Arta Building on Jl. TB Simatupang Jakarta;
   e. Availability of workstations for the Head Office and all Branch Offices, including stand alone PCs, terminals and servers, printers and support devices other;
   f. Provision of communication networks such as email, domain and PABX, between Head Office and Branch Offices, as well as between one Branch Office and another Branch Office.

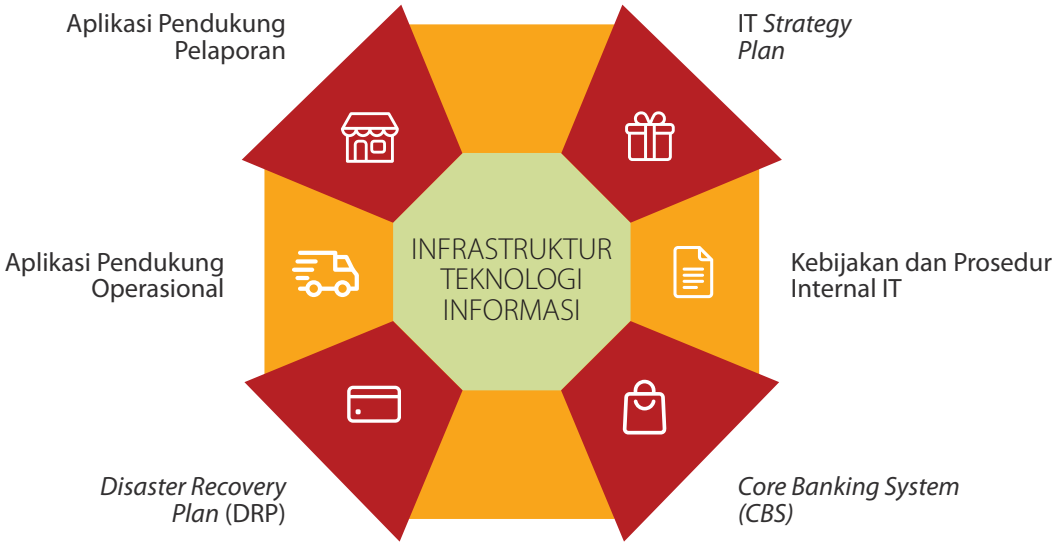

I. FASE PROSES KONVERSI

I. PHASES OF THE CONVERSION PROCESS

Fase 1
22 April 2019
Phase 1
April 22, 2019

Direksi dan Tim PMO persiapan awal dokumen izin OJK sebagaimana yang dipersyaratkan POJK/SEOJK.
"InsyaAllah Menuju Syariah"

Board of Directors and PMO Team initial preparation of OJK permit documents as required by POJK/SEOJK.
"God willing Towards Sharia"

Fase II
15 September 2020
Phase II
September 15, 2020

Direksi dan Tim PMO melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut dokumen perizinan sehingga dilakukan submit dokumen pada 30 April 2021.
"Menggesa Menuju Syariah"

The Board of Directors and PMO Teams accelerated the completion of the follow-up on licensing documents so that documents were submitted on April 30, 2021.
"Hurry Towards Sharia"

Fase III
30 April 2021 s.d. 25 Agustus 2022
Phase III
30 April 2021 s.d. August 25, 2022

Direksi dan Tim PMO melakukan respon percepatan; melakukan komunikasi dengan Otoritas dan Pihak Berkepentingan lainnya, Izin Sistem Pembayaran BI tanggal 12 Juli 2022, Izin OJK diterima 4 Juli 2022, *Go Live* BRK Syariah 22 Agustus 2022 dan Peresmian oleh Wapres RI pada tanggal 25 Agustus 2022.

The Board of Directors and the PMO Team carry out an accelerated response; communicating with the Authorities and other Stakeholders, BI Payment System Permit on 12 July 2022, OJK license received July 4, 2022, Go Live BRK Syariah 22 August 2022 and Inauguration by the Vice President of the Republic of Indonesia on 25 August 2022.

40 bulan
40 months

J. ANGGARAN

Dalam pelaksanaan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah, Bank melakukan kegiatan-kegiatan percepatan "Menggesa Menuju Syariah" yang dikoordinir oleh *Project Management Office*, selain itu setiap unit kerja pada Kantor Pusat (Divisi/*Desk*) diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi dan aktivitas pembelajaran sebagai Bank Umum Syariah, termasuk program kerja yang sedang dan akan dirancang yang dapat menggunakan anggaran biaya Konversi dan/atau anggaran biaya Divisi/Desk atas semua *project* yang *inline* dengan aktivitas konversi menjadi Bank Umum Syariah.

J. BUDGET

In implementing the change of business activities to become a Sharia Commercial Bank, the Bank carries out activities to accelerate "Towards Sharia" coordinated by the Project Management Office, besides that each work unit at the Head Office (Division/Desk) is given the authority to carry out functions and learning activities as Islamic Commercial Banks, including work programs that are being and will be designed and can use the Conversion budget and/or Division/Desk budget for all projects that are inline with conversion activities to become Islamic Commercial Banks.

K. TANTANGAN DAN HAMBATAN

1. Pembatasan sosial menyebabkan berkurangnya interaksi langsung, kegiatan internal dan eksternal (edukasi pegawai & komunikasi pemenuhan dokumen perizinan OJK) dilakukan secara virtual butuh waktu kurang lebih 40 bulan terhitung sejak pelaksanaan RUPSLB Inisiasi Konversi pada 22 April 2019 sampai dengan diterbitkannya Surat Izin Perubahan Usaha dari pihak Otoritas pada tanggal 04 Juli 2022;

K. CHALLENGES AND OBSTACLES

1. *Social restrictions cause a reduction in direct interaction, internal and external activities (employee education & communication to fulfill OJK licensing documents) are carried out virtually, it takes approximately 40 months from the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Initiation of Conversion on April 22 2019 until the issuance of a Business Change Permit from the Authority on July 04, 2022;*

Pandemi Covid -19
Covid-19 Pandemic

2. Edukasi terkait Perbankan Syariah dilakukan tidak hanya kepada *stakeholder* tapi juga diselenggarakan bagi anggota legislatif DPRD Provinsi Riau dalam rangka menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong percepatan proses penerbitan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kegiatan Usaha menjadi BRK Syariah;

2. *Education related to Sharia Banking is carried out not only for stakeholders but also for members of the DPRD Riau Province in order to create risk awareness which in the end is expected to accelerate the process of issuing Regional Regulations Concerning Changes in Business Activities to become Sharia BRK;*

Edukasi Syariah
Sharia Education

3. Pihak Otoritas menyatakan bahwa Bank belum siap berkonversi dalam hal Teknologi & Informasi namun Tim tetap optimis bahwa dengan semangat dan kerja keras dari seluruh elemen Bank untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan secara cepat dan tepat agar proses konversi dapat berjalan lancar;

3. *The Authority stated that the Bank was not ready to convert in terms of Technology & Information but the Team remained optimistic that with enthusiasm and hard work from all elements of the Bank to be able to make improvements quickly and precisely so that the conversion process could run smoothly;*

Kesiapan IT & SDM
Readiness IT & HR

4. Adanya opini dari pemangku kepentingan jika Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah, apakah akan tetap mendapatkan hak yang sama dengan hak pada saat konvensional serta mentransformasi *awareness* yang kuat bahwa BRK Syariah bukan hanya sebagai Bank Milik Pemerintah namun menjadikan BRK Syariah menjadi Bank milik seluruh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau;

4. There are opinions from stakeholders if Bank Riau Kepri becomes Sharia Bank, will it still get the same rights as conventional rights and transform a strong awareness that BRK Syariah it is not only a government-owned bank but makes BRK Syariah a bank owned by all the people of Riau and the Riau Islands;

Hak Nasabah
Right Customer

5. Proses pemenuhan persyaratan dokumen perizinan oleh OJK terkait pedoman manajemen risiko (pedoman *risk control system*, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi & pedoman GCG) dilakukan mandiri oleh Tim Konversi (tidak mengunakan konsultan) sehingga dapat memotivasi peningkatan pengetahuan terkait Syariah sekaligus melakukan hal-hal yang harus disempurnakan sebelum pelaksanaan konversi dengan asistensi oleh Tenaga Ahli Perbankan.

5. The process of fulfilling licensing document requirements by OJK regarding risk management guidelines (risk control system guidelines, internal control system plans, information technology system plans & GCG guidelines) is carried out independently by the Conversion Team (not using consultants) so as to motivate increased knowledge related to Sharia as well do things that must be perfected before carrying out the conversion with the assistance of Banking Experts.

Ketentuan Internal
Internal Provisions

L. IKHTIAR DAN KEMUDAHAN

1. Dengan adanya pandemi *COVID*-19 pelaksanaan kegiatan pelatihan menjadi terbatas dan yang semula metode pelatihan Perbankan Syariah dilaksanakan secara klasikal (tatap muka) beralih menjadi *online class* sehingga dapat mengikutsertakan lebih banyak peserta tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

L. EFFORT AND EASE

1. Due to the COVID-19 pandemic, the implementation of training activities has become limited and initially the Sharia Banking training method was carried out classically (face to face) to switch to an online class so that more participants can be involved without having to incur large costs.

Efisiensi biaya dengan *online class*
Cost efficiency with online classes

2. Pemenuhan dokumen persyaratan perizinan oleh OJK sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, DPPS OJK menyampaikan bahwa sehubungan dengan pandemi *COVID*-19 maka dokumen persyaratan perizinan disampaikan dalam bentuk *softfile* dan tidak perlu menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*), namun *hardcopy* dokumen tetap dikirimkan ke Kantor OJK Provinsi Riau.

2. Fulfillment of licensing requirements documents by OJK as stipulated by OJK Regulation No.64/POJK.03/2016 concerning Changes in Conventional Bank Business Activities to Become Sharia Banks, and OJK Circular Letter No.2/SEOJK.03/2017 concerning Changes in Conventional Commercial Bank Business Activities to become a Sharia Commercial Bank, OJK DPPS said that in connection with the COVID-19 pandemic, documents for licensing requirements were submitted in softfile form and there was no need to submit physical documents (hardcopy), but hardcopy documents were still sent to the Riau Province OJK Office.

3. Bank dapat melakukan *benchmark* ke Bank yang telah konversi sebelumnya (Bank Aceh dan Bank NTB Syariah) sehinga menjadi suatu rujukan pengukuran standar yang telah melalui proses kinerja yang sempurna (*best practice*) sebagai perbandingan untuk dilakukan penyempurnaan.

3. Banks can benchmark against previously converted banks (Bank Aceh and Bank NTB Syariah) so that they become a standard measurement reference that has gone through a perfect performance process (best practice) as a comparison for improvement.

M. *MILESTONE* KONVERSI

M. CONVERSION MILESTONE

22 April 2019
April 22, 2019
RUPSLB Konversi.
EGMS Conversion.

17 Mei 2019
May 17, 2019
Pembentukan PMO.
Formation of PMO.

04 Juli 2019
July 04, 2019
Pemindahan Gaji & *Single Salary* ASN.
ASN Salary Transfer & Single Salary.

17 Juli 2019
July 17, 2019
Asistensi 1 OJK.
Assistant 1 OJK.

29 Nov - 01 Des 2021
Nov 29 - Dec 01, 2021
Klarifikasi I DPPS-OJK (*on site*)
Kelengkapan Dokumen Konversi.
Clarification I DPPS-OJK (on site)
Completeness of Conversion Documents.

15 November 2021
November 15, 2021
RUPS LB Pengurus BRKS.
EGMS of BRKS Management.

30 April 2021
April 30, 2021
Pengajuan/Submit
Dokumen konversi ke OJK.
Submission/Submit
Document conversion to OJK.

21 April 2021
April 21, 2021
Audiensi Wapres RI.
RI Vice President's Hearing.

20-24 Desember 2021
December 20-24, 2021
Klarifikasi II PSP,
Pengurus & DPS
(Wawancara).
Clarification II PSP,
Management & DPS
(Interview).

01-03 Maret 2022
March 01-03, 2022
Pemeriksaan (On Site) OJK, Kesiapan IT
OJK On Site Examination, IT Readiness

21 Maret 2022
March 21, 2022
Asistensi ke DPPS-OJK, Komut/Dirut/
Direksi & PMO, Pengesahan AD.
Assistance to DPPS-OJK, Komut/Director/
Directors & PMO, AD approval.

07 - 08 April 2022
April 07 - 08, 2022
Proses PERDA pada
Kemendagri.
PERDA process at the
Ministry of Home Affairs.

25 Agustus 2022
August 25, 2022
Peresmian BRK Syariah oleh Wapres RI.
Inauguration BRK Syariah by the Vice
President of the Republic of Indonesia.

22 Agustus 2022
August 22, 2022
Go Live BRK Syariah.
Go Live BRK Syariah.

19 Agustus 2022
August 19, 2022
1. Preliminary Pemeriksaan Khusus DPPS-OJK
2.Cut Off BRK Konvensional/Konversi (Big Bang).
1. Preliminary DPPS-OJK Special Examination
2.Cut Off Conventional/Conversion (Big Bang) BRK.

12 Juli 2022
July 12, 2022
Asistensi Virtual BI
Sistem Pembayaran.
Payment System BI
Virtual Assistance.

brksyariah
berkah untuk semua

Asistensi 2 OJK & BI.
Assistance 2 OJK & BI.

20-21 & 25 Februari 2020
February 20-21 & 25 2020

Piloting Layanan Syariah Pembiayaan.
Piloting Sharia Financing Services.

01 Juli 2020
July 01, 2020

Asistensi 3 OJK.
Assistant 3 OJK.

26 Agustus 2020
August 26, 2020

RUPS LB Pengurus.
EGMS of Management.

15 September 2020
September 15, 2020

RUPS LB Penetapan Calon Pengurus Perseroan dan DPS.
Extraordinary General Meeting of Shareholders Determination of Candidates for Company Management and DPS.

26 Februari 2021
February 26, 2021

Audiensi KNEKS & DSN.
KNEKS Audience & DSN.

29 Januari 2021
January 29, 2021

Pra Submit Asistensi 4 DPPS-OJK.
Pre Submit Assistance 4 DPPS-OJK.

15 Januari 2021
January 15, 2021

RUPS LB Penetapan Pengurus dan DPS BRK Syariah.
Extraordinary General Meeting of Shareholders Determination of BRK Syariah Management and DPS.

23 April 2022
April 23, 2022

Pengesahan Ranperda melalui Paripurna DPRD Riau.
Ratification of the Draft Regional Regulation through the Riau DPRD Plenary.

19 Mei 2022
May 19, 2022

RUPS LB AD BUS (*Circulate*) dan Penetapan Pengurus & DPS BRK Syariah.
AD BUS Extraordinary GM (Circulate) and Manager Appointments & BRK Syariah DPS.

14 Juni 2022
June 14, 2022

Pengesahan AD Bank Umum Syariah ke Kemenkumham.
Ratification of AD of Sharia Commercial Banks to the Ministry of Law and Human Rights.

15 Juni 2022
June 15, 2022

Surat Data Pendukung Bank Final ke DPPS-OJK Data Pendukung Izin No 630/OR.03.03/DIR/2022.
Final Bank Supporting Data Letter to DPPS-OJK Permit Supporting Data No 630/OR.03.03/DIR/2022.

27 Juni 2022
June 15, 2022

Izin OJK Perubahan Kegiatan Usaha.
Permit for Change of Business Activities by OJK.

04 Juli 2022
July 04, 2022

Audiensi Virtual OJK Prov Riau, DPPS-OJK, PMO; Pasca Izin.
Riau Province OJK Virtual Audience, DPPS-OJK, PMO; Post Permit.

11 Juli 2022
July 11, 2022

N. LAPORAN AKTIVITAS KONVERSI

N. CONVERSION ACTIVITY REPORT

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
1	22 April 2019 *April 22, 2019*	Pelaksanaan RUPSLB sebagaimana Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No 13 Tahun 2019 Tanggal 22 April 2019 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. RUPS menyetujui konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah *Implementation of the EGMS as stated in the Deed of the EGMS Minutes of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 13 of 2019 dated April 22, 2019 by Notary Pupung Mulyantini, SH. The GMS approved the conversion of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank*
2	26 April 2019 *April 26, 2019*	Talk Show "Membangun Konsep Halal yang Berkah, Menuju Riau Sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia" bertempat di Masjid Raya An Nur Pekanbaru Pembicara: 1. Direktur LPOM MUI 2. Kadis Pariwisata Provinsi Riau 3. Bank Riau Kepri (Ust. Noki Syafriadi, Lc,. ME) 4. Dekan Fak. Syariah UIN SUSKA *Talk Show "Building a Blessing Halal Concept, Towards Riau as a World Halal Tourism Destination" taking place at the Great Mosque of An Nur Pekanbaru* *Speaker:* *1.Director of LPOM MUI* *2. Head of Tourism Office of Riau Province* *3. Bank Riau Kepri (Ust. Noki Syafriadi, Lc,. ME)* *4. Dean of the Faculty. Sharia UIN SUSKA*
3	01 Mei 2019 *May 1, 2019*	Silaturrahim dengan Para Asatidz/Ulama Riau Dalam Rangka Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah *Gathering with Riau Asatidz/Ulama in the Context of Converting Bank Riau Kepri to a Sharia Commercial Bank*
4	05 Mei 2019 *May 5, 2019*	Sosialisasi Konversi Ke Masyarakat Oleh Gubernur Riau Dan Wakil Gubernur Riau Dalam Kegiatan Safari Ramadhan 1441 H *Socialization of Conversion to the Community by the Governor of Riau and Deputy Governor of Riau in Safari Ramadhan 1441 H*
5	08 Mei 2019 *May 8, 2019*	Ekspose Persiapan Pembentukan Tim Konversi Serta Tahapan-tahapan Konversi dihadiri Komisaris, Direksi, Tim Kajian Konversi *Expose Preparation for Formation of Conversion Team and Conversion Stages attended by Commissioners, Directors, Conversion Study Team*
6	12 Mei 2019 *May 12, 2019*	Benchmark Konversi ke Bank NTB Syariah dipimpin Direktur Kredit & Syariah *Benchmark Conversion to Bank NTB Syariah led by the Director of Credit & Sharia*
7	17 Mei 2019 *May 17, 2019*	Pembentukan Tim *Project Management Office* (PMO) oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana Keputusan Direksi No. 23/KEPDIR/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Tentang Tim *Project Management Office* Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah *Establishment of the Project Management Office (PMO) Team by the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri as stated in the Decree of the Directors No. 23/KEPDIR/2019 May 17 2019 Concerning the Project Management Office Team of Bank Riau Kepri to become BRK Syariah*
8	22 Mei 2019 *May 22, 2019*	Rapat Bersama Direksi dan PMO dalam Rangka Pembahasan Road Map Konversi Bank Riau Kepri Hasil *Benchmarking* Ke NTB *Joint Meeting of the Board of Directors and PMO in the Context of Discussing the Road Map Conversion of Bank Riau Kepri Benchmarking Results to NTB*
9	27 Mei 2019 *May 27, 2019*	*Kick of Meeting* Komisaris, Direksi dan seluruh Team PMO. Menjelaskan Susunan Organisasi Team dan Aktifitas *Team Project Management* Konversi Aksi Gubernur Riau Beserta Istri Memindahkan Seluruh Tabungan dari Bank Konvensional Ke BRK Syariah dan Mengajak Masyarakat Menabung di BRK Syariah dalam acara Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan Kepada Anak Yatim di Bank Riau Kepri *Kick of Meeting of Commissioners, Directors and the entire PMO Team. Explaining the Organizational Structure of the Team and the Project Management Conversion Team Activities* *The Action of the Governor of Riau and His Wife Transferring All Savings from Conventional Banks to BRK Syariah and Inviting the Community to Save at BRK Syariah in the Breaking the Fast Together and Providing Compensation to Orphans at Bank Riau Kepri*
10	10 Juni 2019 *June 10, 2019*	Rapat Rencana Kerja dan Penentuan Langkah-Langkah Konversi Dihadiri Direksi dan PMO Penandatanganan Kontrak Kerja *Team Counterpart Management* (TCM) Bapak Rukmana (Mantan Direktur Operasional BJB Syariah) & Bapak Wiroso (Mantan Pegawai Citibank, Bank Muamalat, Anggota IAI Penyusun PAPSI, Pakar dan Praktisi Akuntansi) yang telah ikut melakukan proses Konversi Bank Aceh dan NTB serta Proses *Spin Off* Bank BJB *Work Plan Meeting and Determination of Conversion Steps Attended by Board of Directors and PMO Counterpart Management (TCM) Team Work Contract Signing Mr. Rukmana (Former Operational Director of BJB Syariah) & Mr. Wiroso (Former Citibank Employee, Bank Muamalat, Member of IAI Compiler of PAPSI, Accounting Expert and Practitioner) who have participated in the conversion process of Bank Aceh and NTB and Bank BJB Spin Off Process*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
11	11 Juni 2019 *June 11, 2019*	*Kick of Meeting* TCM dan Rapat Road Map dan Rencana Kerja Konversi dihadiri Komisaris, Direksi, PMO dan TCM. *The TCM Kick of Meeting and Road Map Meeting and Conversion Work Plan were attended by Commissioners, Directors, PMO and TCM.*
12	20 Juni 2019 *June 20, 2019*	Implementasi *Pilot Project* Pembukaan rekening syariah di unit kantor konvensional yang dilaksanakan oleh Divisi Bisnis Syariah, Divisi Keuangan & OP, Divisi OP dan Perencanaan Syariah, Divisi MSDM, Divisi TSI, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum & SKAI *Implementation of Pilot Project Opening sharia accounts in conventional office units carried out by the Sharia Business Division, Finance & OP Division, Sharia OP and Planning Division, HRM Division, TSI Division, Compliance Division, Risk Management Division, Legal & SKAI Division*
13	21 Juni 2019 *June 21, 2019*	Rapat Penyampaian Hasil Progres Pekerjaan Konversi (Penyelesaian *Time Table* Konversi) dihadiri oleh Direksi dan PMO *The Conversion Work Progress Results Submission Meeting (Completion of the Conversion Time Table) was attended by the Board of Directors and PMO* Penyampaian Hasil Progres Pekerjaan Konversi Ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Direksi no. 414/DIR/2019 *Submission of the Results of the Conversion Work Progress to the Financial Services Authority through the Board of Directors letter no. 414/DIR/2019*
14	25 Juni 2019 *June 25, 2019*	Penyusunan *Business Requirement Document* (BRD) *Corebanking* Teknologi Informasi untuk Konversi menjadi Bank Umum Syariah oleh penyusun BRD; (Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan & Jasa) *Preparation of Corebanking Information Technology Business Requirement Document (BRD) for Conversion to become an Islamic Commercial Bank by BRD drafters; (Third Party Funds, Financing & Services)*
15	26 Juni 2019 *June 26, 2019*	Rapat Pembahasan terkait PERDA Konversi Bank Riau Kepri dihadiri Biro Hukum Pemprov Riau, Kantor Hukum Wangsa Kuntoro & Izzudin, PMO, TCM dan Rapid Team 3 Bidang *Legal Corporate*, Legal Konversi & *Legal Product* *The discussion meeting regarding the Riau Kepri Bank Conversion PERDA was attended by the Riau Provincial Government Legal Bureau, Wangsa Kuntoro & Izzudin Law Offices, PMO, TCM and Rapid Team 3 in the Legal Corporate, Legal Conversion & Legal Product fields*
16	29 Juni 2019 *June 29, 2019*	Sosialisasi Gubernur Riau Mengajak Masyarakat Memindahkan Tabungan Dari Bank Konvensional Ke BRK Syariah Dalam Acara "Riau Berwakaf Mewujudkan Keberkahan Bumi Lancang Kuning" di Gelanggang Remaja Pekanbaru *Socialization Governor of Riau Invites the Community to Transfer Savings from Conventional Banks to BRK Syariah in the Event "Riau Endowment Realizes Blessings of Lancang Kuning Earth" at the Pekanbaru Youth Center*
17	2 Juli 2019 *July 2, 2019*	Pembahasan *Progress Report* Pekerjaan Masing-Masing *Rapid* Team sesuai *Time Table* Pekerjaan Konversi oleh suruh Bidang-Bidang Team PMO Rapat Konsultasi Ke Biro Hukum KEMENDAGRI Di Jakarta Terkait Perda Konversi Bank Riau Kepri dihadiri Biro Hukum KEMENDAGRI, Biro Hukum Pemprov Riau, Kantor Hukum Wangsa Kuntoro & Izzudin, Anggota *Rapid* Team 3 Bidang *Legal Corporate*, Legal Konversi & *Legal Product* *Discussion of the Work Progress Report of Each Rapid Team according to the Time Table of Conversion Work by having the PMO Team Fields* *Consultation meeting with the Legal Bureau of the Ministry of Home Affairs in Jakarta regarding the Riau Kepri Bank Conversion Regulations attended by the Ministry of Home Affairs Legal Bureau, Riau Provincial Government Legal Office, Wangsa Kuntoro & Izzudin Law Offices, Members of Rapid Team 3 for Legal Corporate, Legal Conversion & Legal Products*
18	3 Juli 2019 *July 3, 2019*	Rapat Pembahasan Progress Report Pekerjaan Konversi Bank Riau Kepri di OJK Riau dihadiri dihadiri Kepala OJK Riau, Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri, *Team Project Management Office* TPMK Konversi Bank Riau Kepri *The Discussion Meeting on the Progress Report of the Riau Kepri Bank Conversion Work at the Riau OJK was attended by the Head of the Riau OJK, the Commissioners and Directors of the Riau Kepri Bank, the TPMK Conversion Office Team Project Management of the Riau Kepri Bank*
19	4 Juli 2019 *July 4, 2019*	Pemindahan Gaji & *Single Salary* ASN sebagaimana Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Riau No. 113/SE/2019 Tanggal 04 Juli 2019 *Transfer of ASN Salary & Single Salary as Circular Letter from Riau Provincial Government No. 113/SE/2019 Dated 04 July 2019*
20	5 Juli 2019 *July 5, 2019*	Rapat Progress Tindak Lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. 113/SE/2019 Tentang Gaji dan *Single Salary* disalurkan melalui BRK Syariah dihadiri *Project Management Office* (*PMO*), Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Cabang Pekanbaru, Pemimpin Cabang Syariah Pekanbaru *Follow-up Progress Meeting on the Circular of the Regional Secretary of Riau Province No. 113/SE/2019 Concerning Salary and Single Salary channeled through BRK Syariah attended by Project Management Office (PMO), Head of Main Branch, Head of Pekanbaru Branch, Head of Pekanbaru Sharia Branch*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
21	8 Juli 2019 *July 8, 2019*	Rapat Pembahasan *Gap Analisis Functional Spesification Document (FSD)* untuk *Core Banking* Konversi Bank Riau Kepri dihadiri *Vendor Core Banking* PT Multipolar, PMO dan Bidang-Bidang terkait *Gap Analysis Functional Specification Document (FSD) Discussion Meeting for Conversion Core Banking of Bank Riau Kepri attended by Core Banking Vendors of PT Multipolar, PMO and related fields*
22	17 Juli 2019 *July 17, 2019*	Kunjungan Asistensi I Ke Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Pusat dilakukan oleh Komisaris *Independent*, Direktur Kepatuhan & MR, Ketua PMO, Wakil Ketua II PMO, Sekretaris PMO dan Anggota Bidang Legal Konversi. OJK merespon positif dan bersedia memberikan support dan asistensi terhadap konversi Bank Riau Kepri. Berhasil tidaknya konversi Bank Riau Kepri akan memberi dampak terhadap reputasi industri perbankan syariah secara keseluruhan. *Assistance Visit I to the Directorate of Regulation and Licensing of Sharia Banking at the Central OJK is carried out by the Independent Commissioner, Director of Compliance & MR, Head of PMO, Deputy Chairperson II of PMO, Secretary of PMO and Member of the Legal Conversion Division. OJK responds positively and is willing to provide support and assistance for Bank Riau Kepri conversions. Whether the Bank Riau Kepri conversion is successful or not will have an impact on the reputation of the Islamic banking industry as a whole.*
23	Juli 2019 *July 2019*	Konsultasi Ke Dirjen AHU Kemenkum HAM RI Pusat terkait perlu tidaknya Perda dalam rangka Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS. Staf Dirjen AHU menyampaikan untuk perubahan kegiatan usaha dari Konvensional menjadi Syariah hanya diperlukan surat izin/persetujuan dari OJK tanpa perlu adanya Perda. *Consultation with the Director General of AHU, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding whether or not a regional regulation is needed in the context of converting Bank Riau Kepri to BUS. The staff of the Director General of AHU said that to change business activities from Conventional to Sharia, only a permit/approval from the OJK was needed without the need for a Regional Regulation.*
24	23 Juli 2019 *July 23, 2019*	Rapat Pembahasan Progres *Time Table* Konversi dengan pembahasan persiapan *draft* Perda, usulan *time table* konversi kepada Direksi, persiapan jadwal kunjungan ke BI, Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan, dan lembaga terkait, serat usulan Konsultan Kajian Bisnis. *Discussion Meeting on the Progress of the Conversion Time Table with discussions on the preparation of the draft regional regulations, proposals for the conversion time table to the Board of Directors, preparation of visit schedules to BI, the Ministry of Finance, the Director General of Treasury, and related institutions, as well as proposals from Business Studies Consultants.*
25	25 Juli 2019 *July 25, 2019*	*Brainstorming* PMO Bersama Mahasiswa Pascasarjana Program Beasiswa Pegawai Bank Riau Kepri terkait kontribusi dan sumbangsih pegawai penerima program beasiswa Pascasarjana Bank Riau Kepri terhadap implementasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS. *PMO Brainstorming with Postgraduate Students of the Bank Riau Kepri Employee Scholarship Program regarding the contributions and contributions of employees receiving the Bank Riau Kepri Postgraduate scholarship program towards the implementation of the Bank Riau Kepri Conversion to BUS.*
26	31 Juli 2019 *July 31, 2019*	Direktur Operasional memonitor dan berdiskusi dengan TCM dan PMO terkait perkembangan pekerjaan Konversi dalam rangka *monitoring* *The Director of Operations monitors and discusses with TCM and PMO regarding the progress of the Conversion work in the context of monitoring*
27	3 Agustus 2019 *August 3, 2019*	Presentasi Calon Konsultan Kajian Bisnis, Studi Kelayakan dan *Corporate Plan*. Presentasi portofolio Calon Konsultan konversi (*beauty contest*) disampaikan oleh *Markplus* Inc dan GML. *Presentation of Prospective Consultants for Business Studies, Feasibility Studies and Corporate Plans. The portfolio presentation of the prospective conversion consultant (beauty contest) was delivered by Markplus Inc and GML.*
28	4 Agustus 2019 *August 4, 2019*	Rapat antara Dirut BRK didampingi Direktur Dana dan Jasa serta Pemimpin Divisi Hukum dengan Direktur PHD Ditjen Otda Kemendagri (Bp. Makmur Marbun) beserta Tim. Dalam Rapat ini dibahas Tindak Lanjut Ranperda Konversi. *Meeting between the BRK Director General accompanied by the Director of Funds and Services and the Head of the Legal Division with the PHD Director of the Directorate General of Otda of the Ministry of Home Affairs (Mr. Makmur Marbun) and the Team. In this meeting, the follow-up to the Raperda Conversion was discussed.*
29	13 Agustus 2019 *August 13, 2019*	Hearing dan Kunjungan Observasi Komisi III DPRD Prov. Riau (Batam, Kepri) yang dihadiri oleh Anggota Komisi III DPRD Prov. Riau dan Ketua PMO TPM Konversi, Pemimpin KC Batam, Pemimpin KCPS Batam. *Hearing and Observation Visit of Commission III DPRD Prov. Riau (Batam, Riau Islands) which was attended by Members of Commission III DPRD Prov. Riau and Head of PMO TPM Conversion, Head of KC Batam, Head of KCPS Batam.*
30	27-29 Agustus 2019 *August 27-29, 2019*	*Brainstorming & Sharing* Konversi Bersama Pegawai Pelaksana, Staf & Pemimpin Bagian Kantor Pusat, penyampaian kebijakan dan progres pekerjaan persiapan dan implementasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah dipresentasikan oleh Tim PMO. *Brainstorming & Conversion Sharing with Implementing Employees, Staff & Head Office Section Leaders, submission of policies and progress of preparatory work and implementation of the Conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah presented by the PMO Team.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
31	9 September 2019 *September 9, 2019*	Pembekalan materi Konversi dan Perbankan Syariah yang disampaikan oleh TCM Bapak Rukmana & Wiroso dihadiri oleh Anggota *Rapid Team* 1.B (Bidang Perizinan, Organisasi dan Edukasi) dan 3.B (Bidang Pengamanan Pengalihan *Asset & Liabilities*). *The debriefing on Sharia Conversion and Banking material delivered by TCM Mr. Rukmana & Wiroso was attended by Members of Rapid Team 1.B (Licensing, Organization and Education) and 3.B (Security of Asset & Liabilities Transfer).*
32	10-11 September 2019 *September 10-11, 2019*	Pembahasan draft legal akad produk Syariah bersama TCM, PMO dan Rapid Team 3.A (Bidang Legal *Corporate*, Legal Konversi & Legal Akad). *Discussion on legal drafts of Sharia product contracts with TCM, PMO and Rapid Team 3.A (Corporate Legal, Conversion Legal & Contract Legal).*
33	12-13 September 2019 *September 12-13, 2019*	Pembahasan *Mapping* Produk Bank Riau Kepri bersama TCM, *PMO* dan RT 3.B (Bidang Pengamanan Pengalihan *Asset* & *Liabilities*) dan RT 1.C (Bidang Pengembangan Produk, Jasa dan Operasional Syariah). *Discussion of Bank Riau Kepri Product Mapping with TCM, PMO and RT 3.B (Safety for Transfer of Assets & Liabilities) and RT 1.C (Product Development, Services and Sharia Operations).*
34	13 September 2019 *September 13, 2019*	Sosialisasi dan *Focus Grup Discussion* (FGD) Perbankan Syariah dan Konversi Bank Riau Kepri bersama para asatidz & pegiat dakwah, Direktur Operasional dan PMO. *Socialization and Focus Group Discussion (FGD) of Islamic Banking and Conversion of Bank Riau Kepri with asatidz & da'wah activists, Director of Operations and PMO.*
34	14 September 2019 *September 14, 2019*	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri Menjadi BRK Syariah dan Dasar-dasar Perbankan Syariah oleh Narasumber DR. A. Wangsawidjaja Z., SH., MH (Kantor Hukum WKI & *Associates*) dan TCM (Rukmana & Wiroso) dihadiri oleh Direksi, seluruh Pindiv, Pincab dan Setingkat, Anggota Rapid Team III TPM Konversi materi mengenai aspek legal konversi dan akad perbankan syariah serta pengantar perbankan syariah. *Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah and the Fundamentals of Islamic Banking by Resource Person DR. A. Wangsawidjaja Z., SH., MH (WKI & Associates Law Office) and TCM (Rukmana & Wiroso) attended by Directors, all Pindiv, Pincab and equivalent, Members of Rapid Team III TPM Conversion material regarding legal aspects of conversion and sharia banking contracts as well as an introduction to sharia banking.*
35	23 September 2019 *September 23, 2019*	Penyampaian *Progress Report* Pekerjaan Konversi Bank Riau Kepri di Kantor Gubernur Riau dihadiri Asisten II SetdaProv, Karo Perekonomian, Kabag Biro Hukum, Direksi Bank Riau Kepri, Tim PMO untuk menyampaikan *progress* perkembangan pekerjaan Konversi Bank Riau Kepri sampai dengan bulan September 2019. *Submission of the Progress Report of the Riau Kepri Bank Conversion Work at the Riau Governor's Office was attended by Assistant II SetdaProv, Karo for the Economy, Head of the Legal Bureau, Directors of the Riau Kepri Bank, PMO Team to convey the progress of the development of the Riau Kepri Bank Conversion work until September 2019.*
36	17 Oktober 2019 *17 October 2019*	Kunjungan Kerja Pemprov Riau, Komisaris dan Direksi ke Pemprov NTB dan Bank NTB Kegiatan diikuti oleh Sekda Prov, Asisten II Setda Prov, Kabiro Adm Ekonomi & SDA, Kabag BUMD, Kasubag BUMD, Direktur Pembiayaan, Komisaris Independen, Ketua dan Sekretaris II *PMO*, Pinbag. Div Umum, Ketua Bidang Pengamanan Pengalihan *Asset* & *Liabilities*. *Working Visit of the Riau Provincial Government, Commissioners and Directors to the NTB Provincial Government and Bank NTB Activities attended by the Provincial Secretary, Assistant II to the Regional Secretariat of the Province, Head of Adm. Economy & Natural Resources, Head of BUMD, Head of BUMD, Financing Director, Independent Commissioner, Chairman and Secretary II of PMO , Pinbag. General Div, Head of Asset & Liabilities Transfer Security Division.*
37	18-20 Oktober 2019 *October, 18-20 2019*	Partisipasi dalam Kegiatan *Hijrah Fest Road To* Pekanbaru Partisipasi *sponsorship* acara dengan kontraprestasi pencantuman logo dalam seluruh sarana promosi dan *slot talkshow* para asatidz dengan tema "Konversi dan Hijrah dari Riba" serta *stand booth* pameran BRK Syariah. *Kick Off Meeting* Kajian Komprehensif (Bisnis, Corplan, FS, RBB) Bank Riau Kepri dalam rangka Konversi Menjadi BUS dihadiri oleh Direksi, TCM, Tim PMO dan RT I.A (Bidang Perencanaan Strategis, *Business Plan* dan *Corporate Plan*) beserta Vendor Konsultan Kajian yang ditunjuk: LPPI. *Participation in Hijrah Fest Road To Pekanbaru Activities Participation in sponsorship of the event with a counter-achievement of the inclusion of the logo in all promotional facilities and asatidz talk show slots with the theme "Conversion and Hijrah from Riba" as well as BRK Syariah exhibition booths.* *Comprehensive Study Kick Off Meeting (Business, Corplan, FS, RBB) of Bank Riau Kepri in the context of Converting to BUS was attended by Directors, TCM, PMO Team and RT I.A (Strategic Planning, Business Plan and Corporate Plan) along with the appointed Study Consultant Vendor : LPPI.*
38	5 November 2019 *November 5, 2019*	Rapat Pembahasan Penawaran Harga *Core Banking System* PT Multipolar Technology, Tbk dalam rangka Implementasi Konversi. *Core Banking System Price Offer Discussion Meeting* *PT Multipolar Technology, Tbk in the framework of Conversion Implementation.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
39	11 November 2019 *November 11, 2019*	Rapat Pembahasan Time Table Kajian Komprehensif Konversi (LPPI) dan Buku Tanya Jawab Seputar Konversi dan Bank Syariah. Tim meminta kpd LPPI kuesioner dan daftar pertanyaan utk *indepth interview* kpd shareholders, BoC/BoD, Tomas. *Time Table Discussion Meeting on Conversion Comprehensive Study (LPPI) and Question and Answer Book Regarding Conversion and Islamic Banks. The team asked the LPPI for a questionnaire and a list of questions for in-depth interviews with shareholders, BoC/BoD, Tomas.*
40	4 Desember 2019 *December 4, 2019*	Rapat Pembahasan Opini Syariah DPS Atas Akad Konversi dihadiri oleh Direktur Kredit & Syariah, DPS (Ketua dan Anggota), PMO dan Tim RT III.A. *The DPS Sharia Opinion Discussion Meeting on the Conversion Agreement was attended by the Director of Credit & Sharia, DPS (Chairman and Member), PMO and RT III.A Team.*
41	31 Desember 2019 *December 31, 2019*	Penandatanganan Kontrak Addendum VII (*Core Banking System* IT Konversi BUS) ditandatangani oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri dan Direktur PT Multipolar Technology, Tbk. *The signing of the Contract Addendum VII (Core Banking System IT Conversion BUS) was signed by the Operational Director of Bank Riau Kepri and the Director of PT Multipolar Technology, Tbk.*
42	14-17 Januari 2020 *January 14-17, 2020*	Rapat Pembahasan Final FSD *Design & Approval* dihadiri oleh Tim Multipolar, RT Bidang 1C dan TCM (Wiroso) serta Tim CBS IT System Konversi. *The FSD Design & Approval Final Discussion Meeting was attended by the Multipolar Team, RT Field 1C and TCM (Wiroso) and the CBS IT System Conversion Team.*
43	24 Januari 2020 *January 24, 2020*	Sosialisasi Progress Persiapan Konversi BRK Menjadi BUS kepada PemKab. Natuna dihadiri oleh Pejabat Pemkab Natuna (Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Jajarannya), Ketua PMO, Pindiv. Ope & Keu, Pindiv. Sekper dan Tim lainnya. *Dissemination of the Progress of the Preparation for the Conversion of BRK into BUS to Pemkab. Natuna was attended by Officials of the Natuna Regency Government (Assistant II for Development Economics and Staff), Chair of PMO, Pindiv. Ope & Keu, Pindiv. Secretary and the rest of the Team.*
44	20-21 Februari 2020 *February 20-21, 2020*	Pertemuan Asistensi & Audiensi ke Bank Indonesia Pusat (Pertama) rapat diadakan di Departemen Sureveilans Sistem Keuangan (DSSK) dgn melibatkan seluruh satker terkait di BI yang menangani aksi korporasi dan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) menyangkut detail teknis terkait administrasi perizinan operasional BI (RTGS, SKN, GWM, BI-ETP, BI-SSSS, Pelaporan, Sandi Bank, dll) dalam rangka Konversi. *Assistance & Audience Meeting to Central Bank Indonesia (First) the meeting was held at the Financial System Surveillance Department (DSSK) involving all relevant work units at BI that handle corporate actions and the Payment System Operations Department (DPSP) regarding technical details related to the administration of BI operational permits (RTGS) , SKN, Statutory Reserves, BI-ETP, BI-SSSS, Reporting, Bank Codes, etc.) for Conversion.*
45	25 Februari 2020 *February 25,2020*	Pertemuan Asistensi Ke OJK Pusat (Kedua) dihadiri oleh Dir Operasional, Dir Kredit & Syariah, Ketua & Sekretaris PMO, Ketua RT I & III, Ketua RT Bidang 2A & 2C, Waka RT Bidang 2B. *The Assistance Meeting to OJK Center (Second) was attended by Director of Operations, Director of Credit & Sharia, PMO Chair & Secretary, Head of RT I & III, Head of RT Field 2A & 2C, Deputy Head of RT Field 2B.*
46	09 Maret 2020 *March 9, 2020*	FGD Dekom dan Direksi bersama Tim LPPI penyusunan Visi-Misi BRKS, FS, Corplan dan RBB Dari LPPI dihadiri oleh Staf Ahli Direksi LPPI (Zainal Fanani), Senior Faculty LPPI (Merza Gamal) dan Tim dan dan Bank dihadiri oleh Komisaris Independen (Taufiqurrahman dan Rita Anugerah), Direktur Kredit & Syariah, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko *Steering Committee Meeting – Core Banking System* Syariah Konversi BRK bersama PT Multipolar Technology, Tbk. *The FGD of the Board of Directors and the Board of Directors together with the LPPI Team for the preparation of the Vision and Mission of the BRKS, FS, Corplan and RBB from the LPPI were attended by the Expert Staff of the LPPI Board of Directors (Zainal Fanani), the LPPI Senior Faculty (Merza Gamal) and the Team and and Banks attended by the Independent Commissioners (Taufiqurrahman and Rita Anugerah), Director of Credit & Sharia, Director of Operations and Director of Compliance & Risk Management* *Steering Committee Meeting – Sharia Core Banking System Conversion BRK with PT Multipolar Technology, Tbk.*
47	16 Maret 2020 *March 16, 2020*	Presentasi Progress Konversi ke Pemegang Saham Utama (Pemprov Riau) Dihadiri oleh Komisaris Independen (Taufiqurrahman dan Rita Anugerah), Direktur Operasional, Direktur Kredit & Syariah, Direktur Kepatuhan & Manajmen Risiko, Sekda, Asisten II, dan Biro Perekonomian. *Presentation of Conversion Progress to Major Shareholders (Riau Provincial Government) Attended by Independent Commissioners (Taufiqurrahman and Rita Anugerah), Director of Operations, Director of Credit & Sharia, Director of Compliance & Risk Management, Regional Secretary, Assistant II, and Bureau of the Economy.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
48	1 Juli 2020 *July 1, 2020*	*Piloting* Layanan Syariah. Bank Riau Kepri melakukan familiarisasi layanan Syariah dengan pelaksanaan Layanan Syariah Pembiayaan sebagaimana Keputusan Direksi No. 036/KEPDIR/2020 Tanggal 29 April 2020. Layanan Syariah Pendanaan sebagaimana Keputusan Direksi No 038/KEPDIR/2020 Tanggal 29 April 2020. *Sharia Service Piloting. Bank Riau Kepri carries out the familiarization of Sharia services with the implementation of Financing Sharia Services as per Directors Decree No. 036/KEPDIR/2020 April 29 2020. Sharia Funding Services as Decree of Directors No 038/KEPDIR/2020 April 29 2020.*
49	6-23 Juli 2020 *July 6-23, 2020*	*Onsite Project* Konversi oleh Tim Multipolar (UAT System IT BUS) dihadiri oleh Tim Multipolar (sebanyak 12 orang analis dan tim teknis), terdiri dari Tim Pembiayaan dan Non Pembiayaan. *The Onsite Conversion Project by the Multipolar Team (UAT System IT BUS) was attended by the Multipolar Team (12 analysts and a technical team), consisting of the Financing and Non-Financing Teams.*
50	13 Juli 2020 *July 13, 2020*	Penerbitan SK Tim Konversi (Penyesuaian) Berdasarkan SK Direksi No. 054/KEPDIR/2020 Tgl. 13 Juli 2020. *Issuance of Conversion Team Decree (Adjustment) Based on Directors Decree No. 054/KEPDIR/2020 Date. July 13, 2020.*
51	23 Juli 2020 *July 23, 2020*	Asistensi & Diskusi Virtual ke-3 dengan DPPS-OJK dihadiri oleh Direktur Kredit & Syariah, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, Komisaris Independen (Taufiqurrahman & Rita Anugerah) dari OJK dihadiri oleh Kepala Bidang Perizinan DPPS OJK (Ibu Rizqun). *The 3rd Virtual Assistance & Discussion with DPPS-OJK was attended by the Director of Credit & Sharia, Director of Operations, Director of Compliance & Risk Management, Independent Commissioner (Taufiqurrahman & Rita Anugerah) from OJK attended by Head of Licensing Division of DPPS OJK (Ms. Rizqun).*
52	12 Agustus 2020 *August12, 2020*	Rapat Ekspose Konversi Bersama Wakil Ketua dan Komisi III DPRD Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Ketua Hardianto, SE dan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau dari BRK dihadiri oleh 3Direksi dan Ketua *PMO*. *The Joint Conversion Expose Meeting of the Deputy Chairman and Commission III of the DPRD Riau Province was attended by Deputy Chairperson Hardianto, SE and the Chair, Secretary and Members of Commission III DPRD Riau Province from BRK attended by 3 Directors and the Chair of the PMO.*
53	13-14 Agustus 2020 *August 13-14 ,2020*	Kunjungan Studi Banding Komisi III DPRD Provinsi Riau terkait Konversi ke DPRD Provinsi NTB Diikuti Komisi III DPRD dan Bank Riau Kepri. Pembahasan rapat seputar *sharing* informasi pengalaman Konversi Bank NTB menjadi BUS dan peran DPRD terkait penyusunan Ranperda Konversi. *Comparative Study Visit of Commission III DPRD Riau Province regarding Conversion to DPRD Province of NTB Followed by Commission III DPRD and Bank Riau Kepri. Discussion of the meeting regarding sharing information on the experience of converting Bank NTB into BUS and the role of the DPRD regarding the drafting of the Conversion Regional Regulation.*
54	26 Agustus 2020 *August 26, 2020*	Asistensi & Diskusi Virtual dengan DPPS OJK ke-4 (khusus IT Konversi) dihadiri oleh Tim OJK yang membidangi pengawasan IT dari BRK dihadiri oleh Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko serta Tim *PMO* Konversi Rapat Koordinasi *PMO*, Biro Hukum dan Biro Ekonomi Pemprov Riau dihadiri oleh Biro Hukum, Biro Ekonomi dan Tim *PMO* Konversi, pembahasan seputar Ranperda Konversi yang akan diajukan Pemprov Riau kepada DPRD Provinsi Riau (Tindaklanjut stuban DPRD Riau ke DPRD NTB). *Virtual Assistance & Discussion with the 4th OJK DPPS (specifically Conversion IT) attended by the OJK Team in charge of IT supervision from BRK attended by the Director of Operations, Director of Compliance & Risk Management and the Conversion PMO Team* *The Coordination Meeting of the PMO, the Legal Bureau and the Economic Bureau of the Riau Provincial Government was attended by the Legal Bureau, the Economic Bureau and the PMO Conversion Team, discussing the Ranperda Conversion that the Riau Provincial Government would submit to the Riau Provincial DPRD (follow-up to the stuban DPRD Riau to the DPRD NTB).*
55	2 September 2020 *September 2, 2020*	Kunjungan Kerja DPD RI ke Bank Riau Kepri dihadiri oleh Ketua DPD RI, Anggota DPD RI dari Provinsi se-Sumatera dan Anggota DPR RI Senator asal Riau beserta Manajemen Bank Riau Kepri. Pembahasan penyampaian profil kinerja keuangan Bank Riau Kepri sebagai BUMD dan Progres persiapan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS. *The RI DPD Working Visit to Bank Riau Kepri was attended by the Chairperson of the RI DPD, Members of the RI DPD from Provinces throughout Sumatra and Members of the Republic of Indonesia DPR Senators from Riau along with Bank Riau Kepri Management. Discussion of submission of Bank Riau Kepri's financial performance profile as BUMD and progress of preparation for conversion of Bank Riau Kepri to BUS.*
56	7 September 2020 *September 7, 2020*	Rapat PMO bersama Dewan Komisaris mengenai penetapan KAP konversi Syariah dan penyusunan rancangan laporan keuangan awal bersaldo "nol" sbg dokumen perizinan konversi ke OJK. *PMO meeting with the Board of Commissioners regarding the establishment of a Sharia conversion KAP and drafting of initial financial reports with a "zero" balance as conversion permit documents to OJK.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
57	15 September 2020 *September 15, 2020*	RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar Penetapan Pengurus Perseroan (dalam rangka persiapan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah) *Extraordinary General Meeting of Shareholders Amendment to the Articles of Association of the Board of Directors of the Company (in preparation for the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah)*
58	21 September 2020 *September 21, 2020*	*Meeting* Perdana PMO dan Direksi Pasca RUPSLB (Penetapan Pengurus) dihadiri oleh lengkap 5 Direksi dengan agenda pembahasan progress pekerjaan konversi. *The first meeting of the PMO and the Directors after the EGMS (Determination of Management) was attended by a total of 5 Directors with an agenda to discuss the progress of the conversion work.*
59	23 September 2020 *September 23, 2020*	RUPS Penetapan Pengurus Perseroan (dalam rangka persiapan Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah). *GMS Determination of the Company's Management (in preparation for the conversion of Bank Riau Kepri to Sharia BRK).*
60	23 November 2020 *November 23, 2020*	Presentasi progress konversi syariah khusus 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Insani & Training, Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Publikasi Konversi, dan Bidang TI, Akuntansi & Pelaporan. *Presentation on progress of sharia conversion specifically for 3 (three) fields, namely Human Resources & Training, Education, Socialization and Conversion Publication, and IT, Accounting & Reporting.*
61	3 Desember 2020 *December 3, 2020*	RUPS Sirkuler (NIB) *Circular GMS (NIB)*
62	12 Januari 20221 *January 12, 20221*	Penyampaian Laporan Perkembangan Konversi ke KOJK Riau (Pra Submit) melalui surat yang ditujukan ke KOJK Riau dan ditembuskan kepada DPPS – OJK. *Submission of Conversion Development Reports to KOJK Riau (Pre Submit) via letter addressed to KOJK Riau and copied to DPPS - OJK.*
63	15 Januari 2021 *January 15, 2021*	Asistensi IV Otoritas Jasa Keuangan Kunker Tim Pansus DPRD Riau Kunjungan ke KCPS Duri dalam rangka site visit observasi lapangan untuk penyusunan Ranperda Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS. *Assistant IV of the Financial Services Authority Working Visit of the Riau DPRD Special Committee Team Visit to KCPS Duri in the framework of a field observation site visit for the preparation of the Draft Regional Regulation on the Conversion of Bank Riau Kepri to BUS.*
64	20 Januari 2021 *January 20, 2021*	Rapat Kerja Bank Riau Kepri dan Pansus Ranperda Konversi DPRD Riau dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi Bank Riau Kepri dan Anggota Pansus Ranperda Konversi DPRD Riau yang ketuai oleh Ibu Karmila Sari, di Ballroom Menara Bank Riau Kepri. Agenda penyampaian kinerja keuangan UUS Bank Riau Kepri dan progres Konversi. *The Bank Riau Kepri Working Meeting and the Riau DPRD Conversion Regional Regulation Special Committee were attended by all members of the Bank Riau Kepri Board of Directors and Members of the Riau DPRD Conversion Regional Regulation Special Committee chaired by Ms. Karmila Sari, in the Ballroom of Bank Riau Kepri Tower. Agenda for submitting UUS BRK financial performance and Conversion progress.*
65	22 Januari 2021 *January 22, 2021*	Kunker Tim Pansus DPRD Riau Kunjungan ke KCPS Batam dalam rangka *site visit* observasi lapangan dan kinerja keuangan KCPS Batam untuk penyusunan ranperda Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS. *Special Committee Team of DPRD Riau Visit to KCPS Batam in the framework of a site visit to observe the field and financial performance of KCPS Batam for the preparation of regional regulations for the conversion of BRK to BUS.*
66	27 Januari 2021 *January 27, 2021*	Uji publik *Draft* Ranperda Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah dilakukan di Ruangan Medium Gedung DPRD Prov. Riau dengan mengundang segenap stakeholders di daerah (MES Riau, IAEI Riau, ISEI, FKPMR, Ikatan Keluarga Batak Riau, APINDO, IWAPI, Ikatan Pedagang Pasar, Paguyuban Tionghoa, dll). *The public test of the Draft Regional Regulation on the Conversion of Bank Riau Kepri into an Islamic Bank was carried out in the Medium Room of the Prov. DPRD Building. Riau by inviting all stakeholders in the region (Mes Riau, IAEI Riau, ISEI, FKPMR, Riau Batak Family Association, APINDO, IWAPI, Association of Market Traders, Chinese Association, etc.).*
67	29 Januari 2021 *January 29, 2021*	Audiensi Audiensi *Virtual* Pansus DPRD Riau Bersama KNEKS, DSN MUI, dan Bank NTB Syariah Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi (Bp. Hardianto, SE), Ketua Pansus DPRD dan sejumlah anggota Pansus. Pengayaan dan menggali informasi yang komprehensif dari berbagai pihak dan *stakeholders* dalam rangka penyusunan Perda Konversi BRK menjadi BUS. *Audience Riau DPRD Special Committee Virtual Audience with KNEKS, DSN MUI, and Bank NTB Syariah. Attended by Deputy Chairperson of the Provincial DPRD (Mr. Hardianto, SE), Chairperson of the DPRD Special Committee and a number of members of the Special Committee. Enrichment and dig up comprehensive information from various parties and stakeholders in the context of drafting the Regional Regulation on the Conversion of BRK to BUS.*
68	09 Februari 2021 *February 9, 2021*	Audiensi Virtual Direksi dan *PMO* bersama OJK Riau dan DPPS merespon laporan perkembangan konversi (*pra submit*) yang disampaikan kepada OJK pada 12 Januari 2021 ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembahasan teknis *per stream* (bidang TPMK) untuk pendalaman yang jadwalnya akan diatur kemudian. *The Board of Directors and PMO Virtual Audience with OJK Riau and DPPS responded to the conversion progress report (pre-submitted) submitted to OJK on January 12, 2021 followed up with technical meetings and discussions per stream (TPMK field) for in-depth study, the schedule of which will be arranged later.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
69	24 Februari 2021 *February 24, 2021*	Pembahasan Tim *PMO* dan Direksi mengenai Kebijakan Sistem Bagi Hasil Hi-1000 BRKS (Bank Umum Syariah). *Discussion of the PMO Team and the Board of Directors regarding the Hi-1000 BRKS (Sharia Commercial Bank) Revenue Sharing System Policy.*
70	25 Februari 2021 *February 25, 2021*	Audiensi Virtual Direksi dan *PMO* bersama OJK Riau dan DPPS (*Stream* IT Konversi) dihadiri oleh seluruh TPMK dari BRK dan OJK Riau, DPPS, DPIP OJK Pusat membahas kesiapan infrastruktur IT Konversi dalam rangka Konversi. *Virtual Audience of the Board of Directors and PMO with OJK Riau and DPPS (Stream IT Conversion) was attended by all TPMK from BRK and OJK Riau, DPPS, DPIP OJK Center to discuss the readiness of Conversion IT infrastructure in the framework of Conversion.*
71	24 Maret 2021 *March 24, 2021*	Audiensi *Virtual* Direksi dan *PMO* bersama OJK Riau dan DPPS (*Stream* Produk) dihadiri oleh seluruh TPMK dari BRK dan OJK Riau, dan DPPS OJK membahas kesiapan produk dalam rangka Konversi *The Board of Directors and PMO Virtual Audience with OJK Riau and DPPS (Product Stream) was attended by all TPMK from BRK and OJK Riau, and DPPS OJK discussed product readiness for Conversion*
72	21 April 2021 *April 21, 2021*	Audiensi Virtual Bersama Bapak Wakil Presiden RI (KH. Ma'ruf Amin) dihadiri oleh lengkap Direksi Bank Riau Kepri dengan *video conference* di kediaman resmi Wapres menyampaikan kebijakan strategis BRK konversi menuju Syariah dan *progress* terakhir perkembangan persiapan konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS. *The Virtual Audience with the Vice President of the Republic of Indonesia (KH. Ma'ruf Amin) was attended by the complete Board of Directors of Bank Riau Kepri with a video conference at the Vice President's official residence conveying the strategic policy of BRK converting to Sharia and the latest progress in preparing for the conversion of Bank Riau Kepri to BUS.*
73	30 April 2021 *April 30, 2021*	Secara resmi menyampaikan seluruh Dokumen Perizinan Konversi (submit) ke OJK – DPPS dan tembusan ke Kantor OJK Provinsi Riau sebanyak 16 item dokumen beserta lampiran pendukungnya. *Officially submit all Conversion Licensing Documents (submit) to OJK - DPPS and copies to the Riau Province OJK Office as many as 16 document items along with their supporting attachments.*
74	3 Mei 2021 *May 3, 2021*	Pembahasan Tim *PMO* bersama OJK Riau melalui pertemuan langsung, mengenai kelengkapan dokumen perizinan konversi di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. *Discussion of the PMO Team with OJK Riau through direct meetings, regarding the completeness of the conversion permit documents at Bank Riau Kepri Menara Dang Merdu Building.*
75	25 Mei 2021 *May 25, 2021*	Audiensi *Virtual* TPMK bersama BI terkait system pembayaran dalam rangka Konversi Dihadiri oleh TPMK, *PMO* dan Bidang X (Perizinan Sistem Pembayaran dan Kelembagaan) dan dari Bank Indonesia dengan Satker terkait (11 Satker). *TPMK Virtual Audience with BI regarding the payment system in the framework of Conversion Attended by TPMK, PMO and Field X (Payment System and Institutional Licensing) and from Bank Indonesia with related Working Units (11 Working Units).*
76	27 Mei 2021 *May 27, 2021*	Audiensi Virtual bersama KNEKS "Penguatan Konversi BPD Syariah" Diinisiasi oleh KNEKS dan dihadiri oleh Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS. Materi *Lesson Learning* Dari Pengalaman Konversi BPD Syariah yang dihadiri juga oleh Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Riau Kepri dan Bank Nagari. *Virtual Audience with KNEKS "Strengthening Sharia BPD Conversion" Initiated by KNEKS and attended by the Director of Sharia Financial Services KNEKS. Lesson Learning Material From the Experience of Sharia BPD Conversion which was also attended by Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Riau Kepri and Bank Nagari.*
77	25 Juni 2021 *June 25, 2021*	Rapat Pembahasan Ranperda dalam rangka percepatan konversi. Rapat Dipimpin Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Ditjen Otda Kemendagri Bpk. Makmur Marbun. Turut hadir Dirut Bank Riau Kepri, Wakil Ketua DPRD Riau Bp. Hardianto, Ketua Pansus Ibu Karmilasari, Plh Sekda Prov. Riau Bp. Masrul Kasymi (virtual), Ketua *PMO*, Ka Bid. Legal serta Tim PMO (virtual). *Raperda Discussion Meeting in order to accelerate conversion.* *The meeting was chaired by the Director of Regional Legal Products (PHD) of the Directorate General of Otda, Ministry of Home Affairs, Mr. Prosper Marbun.* *Also present were the Managing Director of Bank Riau Kepri, Deputy Chairman of the DPRD Riau Bp. Hardianto, Chair of the Special Committee Ms. Karmilasari, Acting Regional Secretary of Prov. Riau Mr. Masrul Kasymi (virtual), Head of PMO, Ka Bid. Legal and PMO Team (virtual).*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
78	1 Juli 2021 *July 1, 2021*	Audiensi secara virtual bersama Pengurus MUI Pusat untuk meminta doa restu dan dukungan serta dorongan terkait izin konversi Bank Riau Kepri. Audiensi dihadiri Sekjen MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bid.Kaderisasi KH. Abdullah Jaidi, Wasekjen MUI Dr. Ikhsan Abdullah, Bendum MUI H. Misbahul Ulum, Ketua MUI Bid. Hubungan LN dan Kerjasama Internasional Dr. Sudarnoto. Dari Bank dihadiri oleh Direksi Lengkap, Ketua PMO beserta Anggota Tim. *Virtual audience with the Central MUI Management to ask for blessings and support and encouragement regarding the Bank Riau Kepri conversion permit.* *The audience was attended by the Secretary General of the MUI, Dr. H. Amirsyah Tambunan, Chairman of the MUI Bid. Cadreization KH. Abdullah Jaidi, Deputy General Secretary of MUI Dr. Ikhsan Abdullah, Bendum MUI H. Misbahul Ulum, Chairman of MUI Bid. Foreign Relations and International Cooperation Dr. Sudarnoto. From the Bank attended by the Full Board of Directors, PMO Chairman and Team Members.*
79	2 Juli 2021 *July 2, 2021*	Bertempat di ruang rapat Direksi, dilakukan Audiensi bersama DPPS-OJK Pusat. Pada Kesempatan ini, Direksi melaporkan Progres konversi Bank Riau Kepri kepada Direktur DPPS ibu Nyimas Rohmah, dihadiri juga Ka OJK Riau, Bp. Muhammad Lutfi Dari Bank dihadiri Direksi Lengkap bersama Tim PMO. *Taking place in the Board of Directors meeting room, an audience was held with the Central DPPS-OJK. On this occasion, the Directors reported the progress of the Bank Riau Kepri conversion to the Director of DPPS Mrs. Nyimas Rohmah, also attended by the Head of OJK Riau, Bp. Muhammad Lutfi From the Bank attended by the Full Board of Directors together with the PMO Team.*
80	22 Juli 2021 *July 22, 2021*	Audiensi secara virtual bersama Ditjen Otda Kemendagri DPPS-OJK Pusat dan Bank Riau Kepri. Dalam Rapat ini Dibahas Tindak Lanjut Ranperda Konversi. *Rapat Dihadiri Ditjen Otda Bp. Makmur Marbun beserta Tim, Direktur DPPS OJK Ibu Nyimas Rohmah beserta Tim, Direksi Bank Riau Kepri beserta Tim PMO.*
81	14 Agustus 2021 *August 14, 2021*	Direksi Bersama Tim Inti *PMO* melakukan pembahasan surat OJK terkait Pembahasan Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Perizinan. *The Board of Directors together with the PMO Core Team discussed the OJK letter regarding the Discussion of Follow-Up Complete Licensing Documents.*
82	24 September 2021 *September 24, 2021*	Dilakukan kunjungan dan rapat di Kantor Kemendagri Jakarta oleh Sekda Prov Riau dan turut hadir Dirut Bank Riau Kepri serta DPRD Riau. Dalam Rapat ini Dibahas Tindak Lanjut Ranperda Konversi. *The Sekda Prov Riau conducted a visit and meeting at the Office of the Ministry of Home Affairs in Jakarta and the Bank Riau Kepri PresidentDirector and DPRD Riau were also present. In this meeting, the follow-up to the Raperda Conversion was discussed.*
83	25 Oktober 2021 *October 25, 2021*	Tim *PMO* dan Direksi melakukan rapat Progress Proses Izin Konversi Syariah dan Tindak Lanjut TPMK terhadap Verifikasi Dokumen OJK konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. *The PMO team and the Board of Directors held a meeting on the Progress of the Sharia Conversion Permit Process and TPMK Follow-up on Verification of OJK Documents for the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah.*
84	1 November 2021 *November 1, 2021*	Direksi dan Tim PMO Konversi melakukan rapat dengan agenda Revitalisasi Tim *PMO*. *The Board of Directors and the PMO Conversion Team held a meeting with the PMO Team Revitalization agenda.*
85	5 November 2021 *November 5, 2021*	Audiensi *Virtual* Izin Konversi BRK-DPPS OJK Pusat. OJK menyampaikan respon secara langsung terhadap seluruh dokumen izin Bank Riau Kepri yang disampaikan kepada OJK; Dokumen Kelembagaan, Dokumen IT termasuk MSDM. (Ibu Riskun Afiyah menyampaikan jika telah selesai proses pemilihan Pengurus Bank Riau Kepri agar disampaikan segera kepada DPPS). DPPS-OJK menanyakan "kapan rencana Bank Riau Kepri akan Live menjadi BUS" Direksi melalui ketua *PMO* Bapak Hendra Buana menyampaikan "RBB Bank Riau Kepri 2021, jika OJK sudah memberikan izin akhir tahun 2021, maka *BRK Live* Januari 2022 Pekan Kedua. Direksi melaporkan Progres konversi BRK menjadi BUS dan ucapan terima kasih kepada Direktur DPPS atas kesempatan Audiensi dan Diskusi. *Central OJK BRK-DPPS Conversion Permit Virtual Audience. OJK submits a direct response to all BRK permit documents submitted to OJK; Institutional Documents, IT Documents including HRM. (Ms. Riskun Afiyah said that if the Bank Riau Kepri Management selection process had been completed, it should be submitted immediately to the DPPS).* *The DPPS-OJK asked "when is the plan for Bank Riau Kepri to go Live to become a BUS" The Directors through the chairman of the PMO Mr. Hendra Buana conveyed "RBB Bank Riau Kepri 2021, if OJK has given permission at the end of 2021, then BRK Live January 2022 Week Two. The Board of Directors reported the progress of the conversion of Bank Riau Kepri to BUS and thanked the Director of DPPS for the opportunity for Hearings and Discussions.*
86	8 Agustus 2021 *August 8, 2021*	Rapat Penetapan Tim Revitalisasi *PMO* dan Tindak Lanjut Rapat Tim PMO bersama OJK terkait Permohonan Izin Konversi BRK Syariah. *Meeting on the Appointment of the PMO Revitalization Team and Follow-up of the PMO Team Meeting with the OJK regarding the Application for a BRK Syariah Conversion Permit.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
87	12 November 2021 *November 12, 2021*	Penetapan Susunan Tim Konversi Syariah sesuai Keputusan Direksi No.082/KEPDIR/2021 tentang Revitalisasi *Project Management Office* Konversi. *Determination of the Sharia Conversion Team Composition in accordance with Directors Decree No.082/ KEPDIR/2021 concerning Revitalization of the Conversion Project Management Office.*
88	15 November 2021 *November 15, 2021*	RUPS Pengurus BRK Syariah (Dalam Proses Perubahan Kegiatan Usaha) *BRK Syariah Management GMS (In the Process of Changing Business Activities)*
89	16 November 2021 *November 15, 2021*	Rapat Perdana setelah RUPS Pengurus BRK Syariah (Dalam Proses Perubahan Kegiatan Usaha) yang dihadiri lengkap oleh seluruh Direksi & Dewan Komisaris. *The first meeting after the BRK Syariah Management GMS (In the Process of Changing Business Activities) which was attended in full by all Directors & Board of Commissioners.*
90	29 November 2021 *November 29, 2021*	Pemeriksaan Khusus PT BPD Riau Kepri pad tangga; 29 November s.d 3 Desember 2021. Dari hasil pemeriksaan Bank dan Tim *PMO* melakukan inventalisir hal-hal yang menjadi concern Tim OJK dalam wawancara/pemeriksaan. Pegawai Kantor Cabang telah diwawancarai oleh Tim Pemeriksa DPPS OJK (Pegawai Kantor Pusat, Cabang Utama dan Cabang Pekanbaru dan Cabang Tanjung Pinang dan unit kerja terkait). *Special Examination of PT BPD Riau Kepri on the ladder; November 29 to December 3, 2021. From the results of the inspection the Bank and the PMO Team made an inventory of matters that were of concern to the OJK Team in interviews/examinations. Branch Office employees have been interviewed by the OJK DPPS Examination Team (Employee of Head Office, Main Branch and Pekanbaru Branch and Tanjung Pinang Branch and related work units).*
91	6 Desember 2021 *December 6, 2021*	Direksi dan Tim *PMO* melakukan rapat dengan agenda Rencana *Launching* BRK Syariah. *The Board of Directors and the PMO Team held a meeting with the agenda for the Launching Plan for BRK Syariah.*
92	18 Desember 2021 *December 18, 2021*	Perbaikan/Penyesuaian Dokumen Terkait Teknologi Informasi Dalam Rangka Permohonan Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri menjadi BUS sebagaimana surat OJK No S-256/PB.101/2021 tanggal 3 November 2021. *Improvement/Adjustment of Documents Related to Information Technology in the Context of Application for Change of Business Activities of Bank Riau Kepri to BUS as stated in OJK letter No S-256/PB.101/2021 November 3, 2021.*
93	20 Desember 2021 *December 20, 2021*	Rapat Bersama OJK Riau – DPPS Presentasi, Klarifikasi dan Wawancara ; PSP (Gubernur Riau) Komisaris dan Direksi serta Tim *PMO*. *OJK Riau Joint Meeting – Presentation, Clarification and Interview DPPS; PSP (Governor of Riau) Commissioners and Directors and the PMO Team.*
94	20-23 Desember 2021 *December 20-23, 2021*	Bank melaksanakan, Klarifikasi, dan Wawancara terhadap Tim Konversi, PSP, dan Calon Pihak Utama BRK Syariah sesuai surat OJK Surat OJK No. S-290/PB.101/2021 Tanggal 18 Desember 2021. Pelaksanaan Presentasi, Klarifikasi, dan Wawancara terhadap Tim Konversi, Calon Pihak Utama, dan Calon Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah (Dalam Proses Perubahan Kegiatan Usaha). *The Bank carries out, Clarifications, and Interviews with the Conversion Team, PSP, and Main Party Candidates for BRK Syariah in accordance with OJK letter OJK Letter No. S-290/PB.101/2021 December 18, 2021. Implementation of Presentations, Clarifications, and Interviews with the Conversion Team, Main Party Candidates, and Sharia Supervisory Board Candidates BRK Syariah (In the Process of Changing Business Activities).*
95	23 s.d 24 Desember 2021 *23 to 24 December 2021*	Melakukan diskusi terkait hasil pemeriksaan bersama OJK pada tanggal 20 s.d 23 Desember 2021. *Conduct discussions regarding the results of joint examinations with the OJK on 20 to 23 December 2021.*
96	5 Januari 2022 *January 5, 2022*	Sosialisasi pemberitahuan Konversi kepada masyarakat melalui pemberitahuan di media cetak nasional (Bisnis Indonesia) dan lokal (Riau Pos & Batam Pos). *Dissemination of Conversion notifications to the public through notices in national (Bisnis Indonesia) and local (Riau Pos & Batam Pos) print media.*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
97	17 Januari 2022 *January 17, 2022*	Dokumen tambahan berupa surat pernyataan Calon Pihak Utama dan Calon Dewan Pengawas Syariah telah dilengkapi dan disampaikan kepada DPPS sebagaimana surat OJK No. S-5/PB.101/2022 Tanggal 13 Januari 2022. Permintaan Dokumen Tambahan Calon Pihak Utama dan Calon Dewan Pengawas Syariah dalam Rangka Permohonan Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri menjadi BUS. *Additional documents in the form of statement letters for Main Party Candidates and Sharia Supervisory Board Candidates have been completed and submitted to the DPPS in accordance with OJK letter No. S-5/PB.101/2022 January 13, 2022.* *Requests for Additional Documents for Candidates for Main Parties and Candidates for the Sharia Supervisory Board in the Context of Requests for Changes in Business Activities of Bank Riau Kepri to BUS.*
98	17 Januari 2022 *January 17, 2022*	Peningkatan Pengetahuan Syariah melalui Pelatihan Perbankan Syariah Bagi Pengurus Bank. *Increasing Sharia Knowledge through Sharia Banking Training for Bank Management.*
99	1-2 Maret 2022 *March 1-2, 2022*	Kunjungan Tim DPPS OJK ke Bank Riau Kepri terkait pemeriksaan IT. Pegawai Kantor Cabang/Capem (Pegawai Capem Jalan Riau dan Cabang Utama) telah melakukan simulasi *Core Banking System Sharia* dalam rangka pemeriksaan IT dan wawancara oleh Tim Pemeriksa DPPS OJK. *The visit of the OJK DPPS Team to Bank Riau Kepri related to IT inspection. Branch Office/Sub-Branch Office employees (Employee of Head Office of Jalan Riau and Main Branch) have carried out a Sharia Core Banking System simulation in the context of IT inspection and interviews by the OJK DPPS Examination Team.*
100	8 Maret 2022 *March 8, 2022*	Audiensi dan Diskusi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan Gubri dan Dirut Bank Riau Kepri terkait Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah. *Audience and Executive Management Discussion of the National Sharia Economic and Financial Committee (KNEKS) with the Governor and President Director of Bank Riau Kepri regarding Regional Islamic Economic and Financial Development.*
101	9 Maret 2022 *March 9, 2022*	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri & Syiar Ekonomi Islam Kepada Mubaligh/Asatidh bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Acara tersebut dihadiri oleh 110 Mubaligh dan 190 mubaligh secara *online* yang menjadi narasumber Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Adiwarman Karim. *Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri & Symbol of Islamic Economics to Mubaligh/Asatidh taking place at Bank Riau Kepri Dang Merdu Tower. The event was attended by 110 Islamic preachers and 190 online preachers who were resource persons from the Secretary General of MUI Amirsyah Tambunan and Adiwarman Karim.*
102	21 Maret 2022 *March 21, 2022*	Tindak Lanjut pertemuan Silaturahim Pengurus Bank Riau Kepri dengan OJK bertempat di Kantor Pusat OJK dalam rangka konfirmasi tindak lanjut. *Follow-up meeting between the Management of Bank Riau Kepri and OJK at the OJK Head Office for follow-up confirmation.*
103	7-8 April 2022 *April 7-8, 2022*	Komisaris Utama dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mendampingi Pemprov Riau dan DPRD Prov Riau Fasilitasi Perubahan Perda di kantor Kemendagri. *President Commissioner and Compliance & Risk Management Director assist the Riau Provincial Government and the Riau Provincial DPRD Facilitate Changes to Regional Regulations at the Ministry of Home Affairs office.*
104	8 April 2022 *April 8, 2022*	Pemprov Riau menerima surat dari Kemendagri Hasil Fasilitasi Perda Konversi Surat Kemendagri No. 188.03/2566/OTDA. *The Riau Provincial Government received a letter from the Ministry of Home Affairs on the Facilitation Results of the Convertible Regional Regulations Ministry of Home Affairs Letter No. 188.03/2566/OTDA.*
105	19 Mei 2022 *May 19, 2022*	Pengesahan Ranperda melalui Paripurna DPRD Riau. *Ratification of the Draft Regional Regulation through the Riau DPRD Plenary.*
106	24 Mei 2022 *May 24, 2022*	Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Persesoran Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau. *Regional Regulation of Riau Province Number 3 of 2022 Dated May 24 2022 Concerning Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2002 concerning Changes in the Form of Legal Entity for the Riau Regional Development Bank from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) for the Riau Regional Development Bank.*
107	25 Mei-12 Juni 2022 *25 May-12 June 2022*	RUPSLB Anggaran Dasar BRK Syariah (BUS) secara sirkuler. *EGMS of Sharia BRK Articles of Association (BUS) circularly.*
108	15 Juni 2022 *June 15, 2022*	Pengesahan Anggaran Dasar BRK Syariah (BUS) oleh Kemenkumham RI *Ratification of the Sharia BRK Articles of Association (BUS) by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights*

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN *IMPLEMENTATION DATE*	AKTIVITAS *ACTIVITY*
109	23 Juni 2022 *June 23, 2022*	Arahan Direksi terkait Internalisasi BRK Syariah dengan seluruh Pemimpin Unit Kantor secara *online* dan Pemimpin Divisi/*Desk* secara *offline*/tatap muka. *Directives of the Board of Directors regarding Sharia BRK Internalization with all Office Unit Leaders online and Division/Desk Leaders offline/face to face.*
110	4 Juli 2022 *July 4, 2022*	Surat OJK No. KEP-93/D.03/2022 Tanggal 04 Juli 2022 Tentang Pemberian Izin Perubahan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). *OJK Letter No. KEP-93/D.03/2022 Dated 04 July 2022* *Concerning the Granting of Business Change Permits for Conventional Commercial Banks* *PT Regional Development Bank Riau Kepri became a Sharia Commercial Bank PT Regional Development BRK Syariah (Perseroda).*
111	8 Juli 2022 *July 8, 2022*	Asistensi OJK dalam rangka persiapan *Go Live* BRK Syariah. *OJK assistance in preparation for BRK Syariah Go Live.*
112	11 Juli 2022 *July 11, 2022*	Tindak Lanjut audiensi virtual OJK dalam rangka asistensi S-291/KO.053/2022 Tanggal 08 Juli 2022. *Follow up on the OJK virtual audience in the context of assistance to S-291/KO.053/2022 July 8, 2022.*
113	12 Juli 2022 *July 12, 2022*	Audiensi virtual BI dalam rangka asistensi BI Sistem Pembayaran *BI virtual audience in the context of BI Payment System assistance*
114	18 Juli 2022 *July 18, 2022*	Presentasi *Checklist* dan Timeline Harian serta PIC terkait Dokumen yang disubmit ke BI Mekanisme *Verifikasi/Quality Control* sebelum dokumen disubmit ke ***e-licensing*** *Daily Checklist and Timeline Presentation as well as PIC related to Documents submitted to BI* *Mechanism of Verification/Quality Control before documents are submitted to e-licensing*
115	8 Agustus 2022 *August 8, 2022*	Kebijakan Pengumuman BRK Syariah dengan Seluruh Unit Kantor secara *online* dan Petugas Heldesk Konversi secara *offline*. *Sharia BRK Announcement Policy with all Office Units online and offline Conversion Heldesk Officers.*
116	18 Agustus 2022 *August 18, 2022*	- Pengarahan Direksi - Pengarahan Pemimpin Divisi TSI terkait pelaksanaan tutup buku konvensiona (*Big Bang* Sistem Konversi) - Do'a bersama diikuti oleh seluruh Insan BRK Syariah secara *online & offline* *- Briefing of the Board of Directors* *- Briefing of the Head of the TSI Division regarding the implementation of conventional book closing (Big Bang Conversion System)* *- The joint prayer is attended by all BRK Syariah personnel online & offline*
117	19 Agustus 2022 *August 19, 2022*	*Cut Off* BRK Konvensional (*Big Bang* Sistem Konversi). *Conventional BRK Cut Off (Big Bang Conversion System).*
118	20 Agustus 2022 *August 20, 2022*	Arahan Direksi terkait Persiapan *Go-Live* Operasional BRK Syariah dengan seluruh unit kantor secara *online*. *Directives from the Board of Directors regarding the preparation of BRK Syariah Go-Live Operations with all office units online.*
119	22 Agustus 2022 *August 22, 2022*	Hari pertama beroperasinya (*Go Live*) BRK Syariah sebagai Bank Umum Syariah. *The first day of operation (Go Live) of BRK Syariah as a Sharia Commercial Bank.*
120	25 Agustus 2022 *August 25, 2022*	Acara Peresmian BRK Syariah oleh Wakil Presiden R Bapak KH. Ma'ruf Amin. *Sharia BRK Inauguration Ceremony by Vice President R Mr. KH. Ma'ruf Amin.*

DOKUMENTASI AKTIVITAS TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)

Documentation of Project Management Office Team Activities (PMO)

April 22, 2019 **22 April 2019**

Pelaksanaan RUPSLB sebagaimana Akta Berita Acara RUPSLB No 13 Tahun 2019, RUPS menyetujui konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah.

Implementation of the EGMS as stated in the Deed of Minutes of EGMS No 13 of 2019, the GMS approved the conversion of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank.

May 27, 2019 **27 Mei 2019**

Kick off Meeting yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka penyampaian Aktivitas dan Susunan Organisasi Tim PMO

Kick off Meeting attended by the Board of Commissioners and Directors in the context of submitting the Activities and Organizational Structure of the PMO Team.

May 27, 2019 **27 Mei 2019**

Gubernur Riau beserta Istri mengajak Masyarakat untuk menabung di Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah pada kegiatan Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan Kepada Anak Yatim bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

The Governor of Riau and his Wife invited the Community to Save at Bank Riau Kepri Sharia Business Unit during the Iftar activity and Giving Compensation to Orphans at Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

June 10, 2019 **10 Juni 2019**

Penandatanganan Kontrak Bank Riau Kepri dengan Tenaga Ahli Perbankan; *Tim Counterpart Management (TCM)* dalam rangka asistensi pelaksanaan kegiatan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah.

Contract signing of Bank Riau Kepri with Banking Experts (Counterpart Management Team) in order to assist the implementation of activities for changing business activities to become a Sharia Commercial Bank (BUS).

June 10, 2019 **10 Juni 2019**

Rapat rencana kerja dan penyusunan *time table* dan anggaran bidang yang dihadiri oleh TCM dan Tim PMO.

Work plan meetings and preparation of time tables and sectoral budgets attended by TCM and the PMO Team.

June 26, 2019 **26 Juni 2019**

Rapat Pembahasan terkait Peraturan Daerah tentang Konversi Bank Riau Kepri dihadiri Biro Hukum Pemprov Riau, Kantor Hukum Wangsa Kuntoro & Izzudin, TCM dan Tim PMO.

The Discussion Meeting regarding Regional Regulations concerning the Conversion of Bank Riau Kepri was attended by the Legal Bureau of the Riau Provincial Government, the Law Offices of Wangsa Kuntoro & Izzudin, TCM and the PMO Team.

June 26, 2019 **26 Juni 2019**

Koordinasi Tim PMO dalam rangka penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Kajian Bisnis, *Business Plan & Corporate Plan*, dan Konsultan Hukum dan IT yang dihadiri oleh TCM dan Tim PMO.

Coordination of the PMO Team in the context of preparing the Terms of Reference (KAK) for Business Review Consultants, Business Plans & Corporate Plans, and Legal and IT Consultants attended by TCM and the PMO Team.

June 26, 2019 **26 Juni 2019**

Penyusunan *Business Requirement Document* (BRD) Kesiapan *Core Banking System* dalam mendukung konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah dihadiri TCM dan Tim PMO.

Preparation of Business Requirement Document (BRD) The readiness of the Core Banking System to support the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank was attended by TCM and the PMO Team.

June 28, 2019 **28 Juni 2019**

Pelaksanaan *Coffee Morning* dalam program pengenalan seputar transaksi Perbankan Syariah bagi Pegawai Kantor Pusat yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas rutin pekerjaan.

Implementation of Coffee Morning in the introductory program regarding Sharia Banking transactions for Head Office employees which is carried out before carrying out routine work activities.

July 2, 2019 **2 Juli 2019**

Kunjungan Kerja ke Biro Hukum Kemendagri di Jakarta dalam rangka Konsultasi terkait Perda Konversi Bank Riau Kepri dihadiri Biro Hukum Kemendagri, Biro Hukum Pemprov Riau, Kantor Hukum Wangsa Kuntoro & Izzudin dan Tim PMO.

A working visit to the Legal Bureau of the Ministry of Home Affairs in Jakarta in the context of Consultation regarding the Riau Kepri Bank Conversion Perda was attended by the Legal Bureau of the Ministry of Home Affairs, the Legal Bureau of the Riau Provincial Government, the Law Offices of Wangsa Kuntoro & Izzudin, and the PMO Team.

July 3, 2019 **3 Juli 2019**

Pembahasan progres pekerjaan konversi Bank Riau Kepri bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau dihadiri Kepala OJK Provinsi Riau, Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri dan Tim PMO.

Discussion of the Progress Report on the Conversion Work of Bank Riau Kepri at the Riau Province OJK Office attended by the Head of the Riau Province OJK, Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri and the PMO Team.

July 6, 2019 **6 Juli 2019**

Kegiatan *Saturday Sharing Session* yang merupakan program pengenalan proses konversi dan Produk Syariah bagi pegawai di luar kota Pekanbaru.

Saturday Sharing Session activity which is an introduction to the conversion process and sharia products for employees outside the city of Pekanbaru.

July 8, 2019 **8 Juli 2019**

Rapat Pembahasan *Gap Analisis Functional Spesification Document (FSD)* untuk *Core Banking System* Konversi Bank Riau Kepri dihadiri oleh Tim dari PT Multipolar Technology dan Tim PMO yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

The Functional Specification Document (FSD) Gap Analysis Gap Discussion Meeting for Conversion Core Banking of Bank Riau Kepri was attended by the Core Banking Team of PT Multipolar Technology and the PMO Team which was held for 3 (three) days.

July17, 2019 **17 Juli 2019**

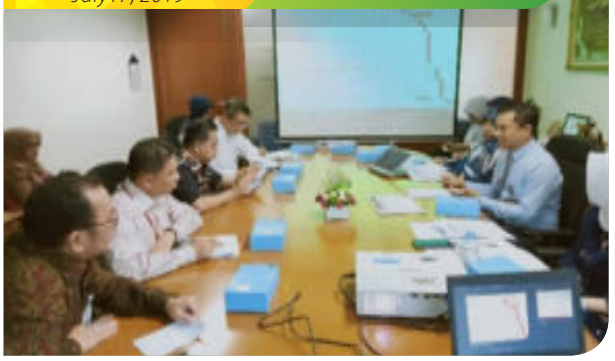

Kunjungan Kerja dalam rangka Asistensi I oleh Komisaris dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko beserta Tim PMO ke Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah (DPPS) OJK Pusat.

Work Visit in the framework of Assistance I by the Commissioner and Director of Compliance and Risk Management along with the PMO Team to the Directorate of Sharia Banking Regulation and Licensing (DPPS) of the Central OJK.

July 19, 2019 **19 Juli 2019**

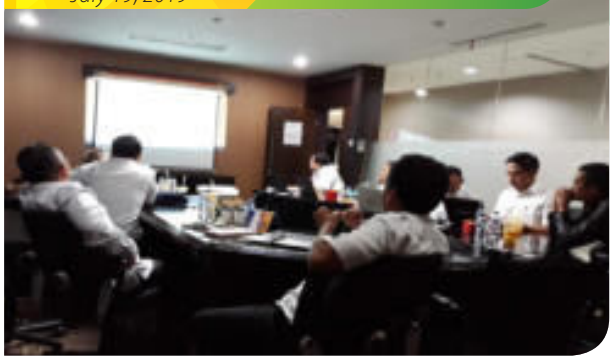

Finalisasi *Functional Spesification Documen (FSD) Core Banking System Vision Sharia* persiapan sebagai Bank Umum Syariah, yang dihadiri dari pihak PT Multipolar Technology selaku Penyedia Jasa Teknologi Infirmasi (PJTI), TCM dan Tim PMO.

Finalization of the Functional Specification Document (FSD) Sharia Vision System preparation for Sharia Commercial Banks attended by PT Multipolar Technology, Tbk as the Technology Service Provider (PJTI), TCM and the PMO Team.

August 13, 2019 **13 Agustus 2019**

Hearing dan Kunjungan Observasi Komisi III DPRD Provinsi Riau ke Batam Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau didampingi oleh Ketua PMO Konversi, Pemimpin KC Batam dan Pemimpin KCPS Batam.

Hearing and Observation Visit of Commission III DPRD Prov. Riau in Batam, Riau Archipelago which was attended by Members of Commission III DPRD Prov. Riau and Head of PMO Conversion, Head of KC Batam, Head of KCPS Batam.

August 15, 2019 **15 Agustus 2019**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) didampingi oleh Tim PMO melakukan Sosialisasi Konversi Syariah dan Dasar Perbankan Syariah bagi Pegawai Cabang Jakarta bertempat di Kantor Cabang Jakarta.

The Sharia Supervisory Board (DPS) accompanied by the PMO Team conducts Socialization of Sharia Conversion and Basic Sharia Banking for Jakarta Branch Employees at the Jakarta Branch Office.

August 15, 2019 **15 Agustus 2019**

Tim PMO melakukan Sosialisasi Konversi Syariah dan Dasar Perbankan Syariah bagi Pegawai Cabang Ranai bertempat di Kantor Cabang Ranai.

The PMO Team conducts Socialization of Sharia Conversion and Basic Sharia Banking for Ranai Branch Employees at the Ranai Branch Office.

August 16, 2019 **16 Agustus 2019**

Tim PMO melakukan Sosialisasi Konversi Syariah dan Dasar Perbankan Syariah bagi Pegawai Kantor Kedai Sedanau bertempat di Kantor Kedai Sedanau.

The PMO Team carried out Socialization of Sharia Conversion and Basic Sharia Banking for Kedai Sedanau Office Employees at the Kedai Sedanau Office.

August 27, 2019 **27 Agustus 2019**

Brainstorming & Sharing Konversi oleh Tim *PMO* dalam rangka Sosialisasi Ketentuan Internal dan Progress Konversi menjadi BRK Syariah yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di masing-masing level jabatan Pegawai Kantor Pusat.

Brainstorming & Conversion Sharing by the PMO Team in the context of Socialization of Internal Regulations and Conversion Progress to BRK Syariah which was carried out for 3 (three) days at each position level of Head Office Employees.

September 9, 2019 **9 September 2019**

Pembekalan materi terkait Konversi dan Perbankan Syariah oleh TCM dihadiri oleh Tim PMO bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

The material debriefing related to Islamic Conversion and Banking by TCM was attended by the PMO Team at the Dang Merdu Tower of Bank Riua Kepri.

September 12, 2019 **12 September 2019**

Pembahasan *Mapping* Produk & Jasa Konvensional menjadi Produk & Jasa Syariah bersama TCM dan Tim PMO yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

Discussion on Mapping Conventional Products and Services into Sharia Products & Services with TCM and the PMO Team which was held for 2 (two) days.

September 9, 2019 **9 September 2019**

Pembekalan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah bagi Pemimpin Kedai Bank Riau Kepri oleh Konsultan dari LPPI yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari.

Provision of Islamic Banking Basic Education for Managers of Bank Riau Kepri Stores by Consultants from the LPPI which is held for 6 (six) days.

September 11, 2019 **11 September 2019**

Pembahasan *Draft* Akad Produk Bank Umum Syariah bersama TCM dan Tim PMO .

The debriefing of Sharia Banking and Conversion materials by TCM was attended by the PMO Team.

September 13, 2019 **13 September 2019**

Direktur Operasional dan Tim PMO melaksanakan *Focus Grup Discussion* (FGD) Sosialisasi Perbankan Syariah dan Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah bersama para *Asatidz* & Pegiat Dakwah

The Director of Operations and the PMO Team carried out a Focus Group Discussion (FGD) Socialization of Islamic Banking and the Conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank with Asatidz & Da'wah Activists

September 14, 2019 **14 September 2019**

Sosialisasi mengenai Aspek Legal Konversi dan Akad pada Bank Syariah oleh Konsultan Hukum Wangsa Kuntoro & Izzudin dan TCM dihadiri oleh Direksi, seluruh Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang dan Tim PMO.

Dissemination of Legal Aspects of Conversion and Contracts in Islamic Banks by Law Consultants Wangsa Kuntoro & Izzudin and TCM attended by the Directors, all Division Heads, Branch Leaders and the PMO Team.

September 16, 2019 **16 September 2019**

Pembahasan *Mapping Chart of Account (COA)* Konversi bersama TCM dan Tim PMO yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Discussion of the Mapping Chart of Account (COA) Conversion with TCM and the PMO Team which was carried out for 3 (three) days.

September 23, 2019 **23 September 2019**

Bertempat di Kantor Gubernur Riau dihadiri Asisten II Setda Provinsi Riau Karo Perekonomian, Kabag Biro Hukum, Direksi Bank Riau Kepri dan Tim PMO menyampaikan Progres Perkembangan Pekerjaan Konversi Bank Riau Kepri sampai dengan bulan September 2019.

Located at the Riau Governor's Office attended by Assistant II Regional Secretariat of Riau Province Karo for the Economy, Head of the Legal Bureau, Directors of Bank Riau Kepri and the PMO Team conveyed the Progress of the Development of Bank Riau Kepri Conversion Work until September 2019.

Oktober 17, 2019 **17 Oktober 2019**

Direktur Kredit & Syariah dan Komisaris Independen mendampingi Sekda Provinsi Riau, Asisten II Setda Provinsi Riau, Kepala Biro Administrasi Ekonomi & SDA, Kabag BUMD, Kasubag BUMD, dalam rangka Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi NTB.

Credit & Sharia Director and Independent Commissioner accompany the Regional Secretary of Riau Province, Assistant II Regional Secretariat of Riau Province, Head of Economic & Natural Resources Administration Bureau, Head of BUMD, Head of BUMD, in the context of a Work Visit to the NTB Provincial Government.

Oktober 18, 2019 **18 Oktober 2019**

Partisipasi dalam Kegiatan Hijrah *Fest Road to* Pekanbaru sebagai *sponsorship* acara dengan kontraprestasi pencantuman logo dalam seluruh sarana promosi dan *slot talkshow* para *Asatidz* dengan tema "Konversi dan Hijrah dari *Riba*" diselenggarakan selama 3 (tiga) hari.

Participation in the Hijrah Fest Road to Pekanbaru event as sponsorship of the event with a counter-achievement of the inclusion of the logo in all promotional tools and talkshow slots for Asatidz with the theme "Conversion and Hijrah from Riba" held for 3 (three) days.

Oktober 18, 2019 **18 Oktober 2019**

Kick Off Meeting Kajian Komprehensif *Business Plan*, *Corporate Plan, Fisibility Study* oleh Konsultan dari LPPI dalam rangka Konversi menjadi BUS dihadiri oleh Direksi, TCM dan Tim PMO.

The Kick Off Meeting for Comprehensive Study of Business Plan, Corporate Plan, and Fisibility Study by a Consultant from the LPPI for Conversion to BUS was attended by Directors, TCM and PMO Team.

November 01, 2019 **01 November 2019**

Tim PMO melakukan Sosialisasi Konversi Syariah dan Dasar Perbankan Syariah bagi Pegawai Cabang Bengkalis bertempat di Kantor Cabang Bengkalis.

Provision of Islamic Banking Basic Education for Bank Riau Kepri Shop Leaders by Training Consultants from the LPPI held for 6 (six) days.

November 27, 2019 **27 November 2019**

Tim PMO dan Tim dari LPPI melakukan *In-Depth Interview* dalam rangka Penyusunan Kajian Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah kepada Walikota Batam sebagai Pemegang Saham, turut didampingi Sekda Kota Batam.

The PMO Team and the Team from the LPPI conducted an In-Depth Interview in the context of preparing the Conversion Study of the Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank to the Mayor of Batam as a Shareholder, accompanied by the Batam City Secretary.

November 28, 2019 **28 November 2019**

Bertempat di kediaman Bupati Karimun, Tim PMO dan Tim dari LPPI melakukan *In-Depth Interview* dalam rangka Penyusunan Kajian Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah kepada Bupati Karimun sebagai Pemegang Saham.

Taking place at the residence of the Regent of Karimun, the PMO Team and the Team from the LPPI conducted an In-Depth Interview in the context of preparing a Study on the Conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank to the Regent of Karimun as a Shareholder.

December 4, 2019 **4 Desember 2019**

Dengar Pendapat/Opini Syariah DPS terkait Akad Peralihan Konversi Bank Riau Kepi menjadi Bank Umum Syariah yang dihadiri oleh Direktur Kredit & Syariah dan Tim PMO.

DPS Sharia Opinion/Hearning regarding the Conversion Contract of Bank Riau Kepi to become a Sharia Commercial Bank attended by the Director of Credit & Sharia and the PMO Team.

December 4, 2019 **4 Desember 2019**

Kunjungan Tim PMO ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta yang disambut oleh Wakil Pimpinan BPKH dalam rangka meminta dukungan dan komitmen terhadap konversi Bank Riau Kepri.

Visit of the PMO Team to the Office of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) in Jakarta which was welcomed by the Deputy Head of BPKH in order to request support and commitment to the conversion of Bank Riau Kepri.

December 16, 2019 **16 Desember 2019**

Direksi melakukan *brainstorming* bersama Direktur LPPI dalam rangka Penyusunan Kajian Bisnis Komprehensif dan Studi Kelayakan Konversi Bank Riau Kepri bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

The Directors conducted a brainstorming session with the LPPI Director in the context of preparing a Comprehensive Business Study and Feasibility Study for the Conversion of Bank Riau Kepri located at the Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri

December 31, 2019 **31 Desember 2019**

Penandatanganan Kontrak Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI) *Core Banking System Sharia* oleh Direktur Operasional dan Direktur PT Multipolar Technology, Tbk yang disaksikan oleh Direktur Kredit & Syariah dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri.

The signing of the Core Banking System Sharia Information Technology Service Provider (PJTI) Contract by the Operational Director and Director of PT Multipolar Technology, Tbk witnessed by the Director of Credit & Sharia and Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri.

January 03, 2020 **03 Januari 2020**

Kick Off Meeting Persiapan Teknologi Informasi; *Core Banking System* Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah dihadiri oleh Direktur PT Multipolar Technology, Direktur Operasional, Pemimpin Divisi dan Tim PMO.

Information Technology Preparation Kick Off Meeting; The Core Banking System of Bank Riau Kepri became a Sharia Commercial Bank attended by the Director of PT Multipolar Technology, Operational Director, Division Heads and the PMO Team.

January 24, 2020 **24 Januari 2020**

Penyampaian progres persiapan konversi kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan jajaran, Tim PMO dan Pemimpin Divisi Bank Riau Kepri.

Submission of the progress of the conversion preparation to the Government of Natuna Regency was attended by Assistant II for Development Economics and staff, PMO Team and Division Head of Bank Riau Kepri.

February 6, 2020 **06 Februari 2020**

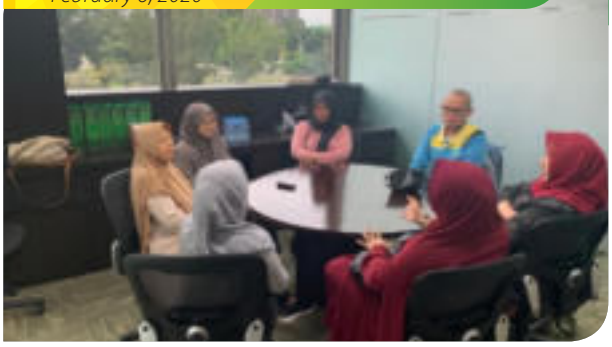

Focus Group Discussion (FGD) Nasabah dan Non Nasabah Bank Riau Kepri dalam rangka Kajian Konversi yang dipimpin langsung oleh Tim LPPI.

Focus Group Discussion (FGD) Customers and Non-Customers of Bank Riau Kepri in the context of a Conversion Study led directly by the LPPI Team.

February 11, 2020 **11 Februari 2020**

Sosialisasi penggunaan aplikasi *Conversion Aplication System (CAS)* oleh Tim PMO sebagai aplikasi persetujuan nasabah terhadap konversi Bank Riau Kepri yang dihadiri perwakilan pegawai dari seluruh unit kantor untuk Wilayah Riau .

Dissemination of the use of the Conversion Application System (CAS) application by the PMO Team as a customer approval application for the conversion of Bank Riau Kepri which was attended by employee representatives from all office units for the Riau Region.

February 12, 2020 **12 Februari 2020**

Kunjungan Tim PMO ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka kepastian retensi nasabah korporasi dan retail pasca perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah.

Visit of the PMO Team to the Employment BPJS Office in order to ensure the retention of corporate and retail customers after changing business activities to become a Sharia Commercial Bank.

February 20, 2020 **20 Februari 2020**

Asistensi & audiensi ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia (BI) dengan melibatkan seluruh satker terkait di BI yang menangani aksi korporasi dan Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) menyangkut detail teknis terkait administrasi perizinan operasional BI (RTGS, SKN, GWM, BI-ETP, BI-SSSS, Pelaporan, Sandi Bank) dalam rangka konversi.

Assistance & hearings to the Department of Financial System Surveillance (DSSK) of Bank Indonesia (BI) by involving all relevant work units at BI that handle corporate actions and the Payment System Operations Department (DPSP) regarding technical details related to the administration of BI operational permits (RTGS, SKN, GWM, BI-ETP, BI-SSSS, Reporting, Bank Code) for conversion.

February 25, 2020 **25 Februari 2020**

Asistensi ke-2 DPPS OJK dalam rangka persiapan dokumen perizinan dihadiri oleh Direktur Operasional, Direktur Kredit & Syariah dan Tim PMO.

The 2nd assistance of DPPS OJK in the preparation of licensing documents was attended by the Operational Director, Credit & Sharia Director and the PMO Team.

March 5, 2020 **5 Maret 2020**

Sosialisasi penggunaan aplikasi *Conversion Aplication System (CAS)* oleh Tim PMO sebagai aplikasi persetujuan nasabah terhadap konversi Bank Riau Kepri yang dihadiri perwakilan pegawai dari seluruh unit kantor untuk Wilayah Kepulauan Riau.

Dissemination of the use of the Conversion Application System (CAS) application by the PMO Team as a customer approval application for the conversion of Bank Riau Kepri which was attended by employee representatives from all office units for the Riau Archipelago Region.

March 9, 2020 **9 Maret 2020**

Focus Group Discussion Dewan Komisaris Independen dan Jajaran Direksi bersama Tim LPPI dalam rangka penyusunan Visi, Misi, FS, *Corporate Plan* dan RBB dihadiri oleh Staf Ahli Direksi LPPI, *Senior Faculty* LPPI beserta Tim.

Focus Group Discussion of the Independent Board of Commissioners and the Board of Directors with the LPPI Team in the framework of preparing the Vision, Mission, FS, Corporate Plan and RBB attended by Expert Staff of the LPPI Directors, LPPI Senior Faculty and the Team.

March 16, 2020 **16 Maret 2020**

Presentasi progres konversi ke Pemegang Saham Pengendali dihadiri oleh Jajaran Direksi, Sekda, Asisten II, dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Riau.

The presentation on the progress of the conversion to the Controlling Shareholders was attended by the Board of Directors, Regional Secretary, Assistant II, and the Riau Provincial Government's Economic Bureau.

May 26, 2020 **26 Mei 2020**

Kegiatan *User Acceptance Test* (UAT) *Core Banking System Sharia*; Tim Pembiayaan dan Non Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Tim *Core Banking System* Konversi Bank Riau Kepri selama 3 (tiga) hari.

Core Banking System Sharia User Acceptance Test (UAT) Activities; The Financing and Non-Financing Team carried out by the Conversion Core Banking System Team of Bank Riau Kepri for 3 (three) days.

June 13, 2020 **13 Juni 2020**

Sosialisasi Optimalisasi Bisnis melalui Layanan Syariah dalam rangka familiarisasi Layanan Syariah oleh Ketua PMO. Unit Kantor yang menjadi *Pilot Project* adalah KC Utama dan KC Pekanbaru.

Socialization of Business Optimization through Sharia Services in the context of familiarization of Sharia Services by the Head of PMO. The Office Units that are the Pilot Projects are the Main Branch Office and the Pekanbaru Branch Office.

July 06, 2020 **06 Juli 2020**

Onsite Project Konversi oleh Tim PT Multipolar Technlogy sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari tim analis dan teknis dalam rangka pelaksanaan *User Acceptance Testing (UAT) Core Banking System Sharia*; Tim Pembiayaan dan Non Pembiayaan.

Conversion Onsite Project by the PT Multipolar Technology Team of 12 (twelve) people consisting of analyst and technical teams in the context of implementing the Sharia Core Banking System User Acceptance Testing (UAT); Financing and Non-Financing Team.

July 23, 2020 **23 Juli 2020**

Asistensi virtual dengan Kepala Bidang Perizinan DPPS OJK dihadiri oleh Komisaris Independen, Direktur Kredit & Syariah, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Virtual assistance with the Head of DPPS OJK Licensing was attended by Independent Commissioners, Credit & Sharia Director, Operational Director and Compliance and Risk Management Director.

August 13, 2020 **13 Agustus 2020**

Komisaris Independen, Direktur Kredit & Syariah, dan Tim PMO mendampingi Komisi III DPRD Provinsi Riau pada kegiatan Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi NTB untuk *sharing* informasi dan pengalaman konversi Bank NTB menjadi BUS dan peran DPRD terkait penyusunan Ranperda Konversi.

Independent Commissioners, Credit & Sharia Director, and the PMO Team accompany Commission III DPRD Riau Province on a Working Visit to the NTB Provincial DPRD to share information and experiences on the conversion of Bank NTB to BUS and the role of the DPRD regarding the preparation of the Ranperda Conversion.

August 26, 2020 **26 Agustus 2020**

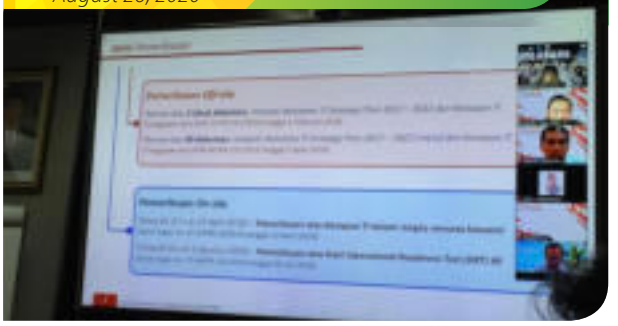

Asistensi virtual ke-3 dengan DPPS OJK terkait kesiapan IT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah dihadiri oleh Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Tim PMO.

The 3rd virtual assistance with DPPS OJK regarding Bank Riau Kepri's IT readiness to become a Sharia Commercial Bank was attended by the Operational Director, Compliance and Risk Management Director and the PMO Team.

August 26, 2020 **26 Agustus 2020**

Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Riau dengan Tim PMO dalam rangka pembahasan terkait Ranperda Konversi yang akan diajukan ke DPRD Provinsi Riau.

Coordination Meeting of the Legal Bureau and Economic Bureau of the Provincial Government of Riau with the PMO Team in the context of discussing the Ranperda Conversion which will be submitted to the DPRD of Riau Province.

September 2, 2020 **2 September 2020**

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menerima kunjungan kerja DPD RI ke Bank Riau Kepri dihadiri oleh Ketua DPD RI, Anggota DPD RI dari Provinsi se-Sumatera dan Anggota DPR RI Senator asal Riau dalam rangka pembahasan kinerja keuangan Bank Riau Kepri sebagai BUMD dan progres persiapan konversi menjadi BUS.

The Board of Commissioners and the Board of Directors received a working visit from DPD RI to Bank Riau Kepri attended by the Chairperson of the DPD RI, Members of the DPD RI from Provinces throughout Sumatera and Members of the DPR RI Senators from Riau in order to discuss the financial performance of Bank Riau Kepri as a BUMD and the progress of preparing for conversion to BUS.

November 27, 2020 **27 November 2020**

Bank Riau Kepri mengadakan Rapat Paripurna terkait pemilihan sayembara logo BRK Syariah.

Bank Riau Kepri held a Plenary Meeting regarding the selection of the BRK Syariah logo contest.

January 22, 2020 **22 Januari 2021**

Kunjungan Kerja Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau ke KCP Syariah Batam dalam rangka *site visit* observasi lapangan dan menilai kinerja keuangan untuk penyusunan Ranperda Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS.

Work Visit of the Special Committee on Ranperda for Converting DPRD Riau Province to KCP Syariah Batam in the framework of a site visit for field observations and assessing financial performance for the preparation of Raperda on Converting Bank Riau Kepri to BUS.

October 01 , 2020 **01 Oktober 2020**

Bank Riau Kepri mengadakan *Excecutive Overview of Islamic Bank for Legislative.*

Bank Riau Kepri held an Executive Overview of Islamic Bank for Legislative.

January 15, 2021 **15 Januari 2021**

Kunjungan Kerja Tim Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau ke KCP Syariah Duri dalam rangka *site visit* observasi lapangan untuk penyusunan Ranperda Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS.

Working visit of the Special Committee on Draft Regional Regulations for Converting DPRD Riau Province to KCP Syariah Duri in the framework of a field observation site visit for the preparation of Draft Regional Regulations for Conversion of Bank Riau Kepri into BUS..

January 27, 2021 **27 Januari 2021**

Uji Publik Ranperda Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah bertempat di Ruang Medium Gedung DPRD Provinsi Riau dengan mengundang segenap *stakeholders* di daerah (MES Riau, IAEI Riau, ISEI, FKPMR, Ikatan Keluarga Batak Riau, APINDO, IWAPI, Ikatan Pedagang Pasar, Paguyuban Tionghoa, dll).

The Public Test of the Bill on the Conversion of Bank Riau Kepri into an Islamic Bank took place in the Medium Room of the Riau Province DPRD Building by inviting all stakeholders in the regions (Mes Riau, IAEI Riau, ISEI, FKPMR, Riau Batak Family Association, APINDO, IWAPI, Association of Market Traders, Chinese Association, etc).

January 29, 2021 **29 Januari 2021**

Audiensi virtual Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau bersama KNEKS, DSN MUI, dan Bank NTB Syariah dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ketua Pansus DPRD dan sejumlah anggota Pansus diskusi mengenai informasi yang komprehensif dari berbagai pihak dan *stakeholders* dalam rangka penyusunan Perda Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS.

The virtual audience of the Special Committee on the DPRD Riau Province Convertible Ranperda together with KNEKS, DSN MUI, and Bank NTB Syariah was attended by the Deputy Chairperson of the Riau Provincial DPRD, the Chairperson of the Regional DPRD Special Committee and a number of members of the Special Committee discussing comprehensive information from various parties and stakeholders in the context of drafting the Riau Kepri Bank Conversion Regulation to be BUS.

February 3, 2021 **03 Februari 2021**

Rapat Koordinasi Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau bersama Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dalam rangka merespon laporan perkembangan konversi (pra submit) yang direncanakan disampaikan kepada DPPS OJK pada tanggal 12 Januari 2021.

Coordination Meeting of the Special Committee for Ranperda DPRD Riau Province with Shareholders, Directors, Board of Commissioners and DPS in order to respond to the conversion development report (pre-submit) which is planned to be submitted to the OJK DPPS on January 12, 2021.

February 9, 2021 **09 Februari 2021**

Audiensi virtual Direksi dengan DPPS OJK dan OJK Provinsi Riau serta Tim PMO dalam rangka respon laporan perkembangan konversi (pra *submit*) yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 12 Januari 2021 ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembahasan teknis masing-masing *stream*.

The Board of Directors' virtual audience with DPPS OJK and OJK Riau Province and the PMO Team in response to the conversion progress report (pre-submitted) submitted to OJK on January 12, 2021 was followed up with meetings and technical discussions for each stream.

22 February 2021 **22 Februari 2021**

BRK Syariah bersama Panitia Khusus melakukan rapat finalisasi pengesahan Ranperda BRK Syariah.

BRK Syariah together with the Special Committee held a meeting finalizing the ratification of the BRK Syariah Draft Regional Regulations.

February 25, 2021 **25 Februari 2021**

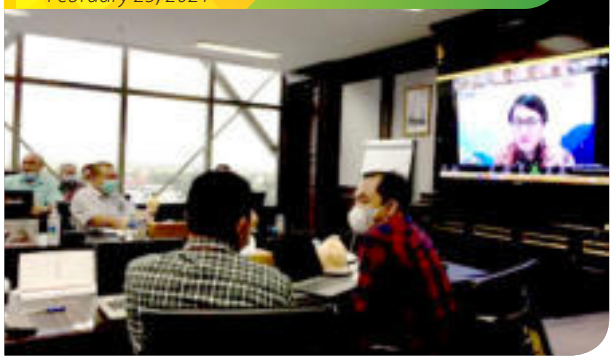

Audiensi virtual Direksi dengan DPPS OJK, DPIP OJK dan OJK Provinsi Riau serta Tim PMO dalam rangka membahas kesiapan infrastruktur IT Konversi (*Stream* IT Konversi) Bank Riau Kepri menjadi BUS.

Board of Directors virtual audience with DPPS OJK, DPIP OJK and OJK Riau Province as well as the PMO Team in order to discuss the readiness of the conversion IT infrastructure (Stream IT Conversion) of Bank Riau Kepri to become BUS.

February 26, 2021 **26 Februari 2021**

RUPS LB tanggal 26 Februari 2021 menyetujui menetapkan Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri yang masa jabatannya belum berakhir pada saat pengajuan izin konversi (Perubahan Kegiatan Usaha) kepada OJK, untuk dimasukkan nama-namanya dalam Daftar Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

The President Commissioner and the Compliance and Risk Management Director assist the Provincial Government of Riau and the Chairperson of the Regional Regulation Draft Special Committee for the Conversion of the Riau Provincial DPRD to the Ministry of Home Affairs Office on the Facilitation of Perda Changes agenda.

March 18, 2021 **18 Maret 2021**

Bank Riau Kepri lakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi terkait Konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Riau Kepri conducts outreach and education to Bank Riau Kepri customers in Bagansiapiapi Branch Office regarding Conversion to a Sharia Commercial.

March 24, 2021 **24 Maret 2021**

Bank Riau Kepri lakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang terkait Konversi menjadi Bank Umum Syariah

Bank Riau Kepri conducts socialization and education to customers of Bank Riau Kepri Tanjung Pinang Branch regarding Conversion to a Sharia Commercial Bank.

March 24, 2021 **24 Maret 2021**

Audiensi virtual Direksi dengan OJK Provinsi Riau dan DPPS OJK membahas kesiapan Produk Syariah dalam rangka Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS yang turut dihadiri oleh Tim PMO.

The Board of Directors virtual audience with OJK Riau Province and DPPS OJK discussed the readiness of Sharia Products for the conversion of Bank Riau Kepri into BUS which was also attended by the PMO Team.

March 26, 2023 **26 Maret 2021**

Bank Riau Kepri lakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah Bank Riau Kepri di Kota Batam terkait Konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Riau Kepri conducts outreach and education to Bank Riau Kepri customers in Batam City regarding Conversion to a Sharia Commercial Bank.

March 28, 2021 **28 Maret 2021**

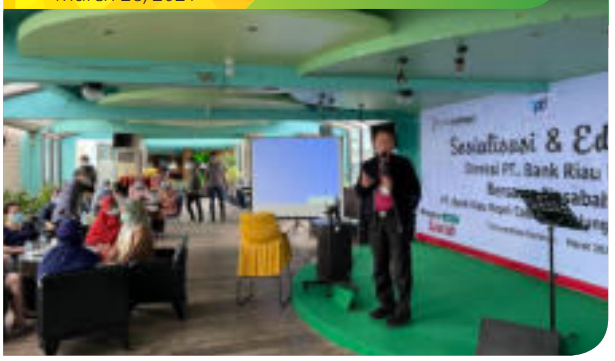

Bank Riau Kepri lakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah Bank Riau Kepri di Kabupaten Karimun terkait Konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Bank Riau Kepri conducts outreach and education to Bank Riau Kepri customers in Karimun Regency regarding Conversion to a Sharia Commercial Bank.

April 16, 2021 **16 April 2021**

Asistensi oleh Karim Consulting Indonesia dalam rangka verifikasi dokumen perizinan persiapan *submit* dokumen konversi ke OJK dihadiri oleh Direksi dan Tim PMO bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Assistance by Karim Consulting Indonesia in the context of verifying licensing documents in preparation for submitting conversion documents to the OJK was attended by the Directors and the PMO Team at the Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri..

April 21, 2021 **21 April 2021**

Audiensi virtual bersama Wakil Presiden RI dihadiri oleh Direktur Utama dan Direktur Dana & Jasa Bank Riau Kepri melalui video *conference* di Kantor Cabang Jakarta menyampaikan Kebijakan Strategis Bank Riau Kepri menuju Bank Umum Syariah dan progres terakhir perkembangan kesiapan konversi.

The virtual audience with the Vice President of the Republic of Indonesia was attended by the President Director and Funds & Services Director of Bank Riau Kepri via video conference at the Jakarta Branch Office conveying the Strategic Policy of Bank Riau Kepri towards a Sharia Commercial Bank and the latest progress on the development of conversion readiness.

April 21, 2021 **21 April 2021**

Asistensi lanjutan oleh Karim Consulting Indonesia (KCI) dalam rangka verifikasi dokumen perizinan persiapan *submit* dokumen perizinan OJK dihadiri oleh Direksi dan Tim PMO bertempat di kantor KCI Jakarta.

Further assistance by Karim Consulting Indonesia (KCI) in the context of verifying licensing documents in preparation for submitting OJK licensing documents was attended by the Directors and the PMO Team at the KCI Jakarta office.

April 30, 2021 **30 April 2021**

Verifikasi dokumen perizinan konversi beserta lampiran pendukung oleh Tim PMO dan Tim Verifikasi yang disaksikan oleh Direksi sebelum pelaksanaaan penyerahan dokumen (*submit*) ke kantor OJK Provinsi Riau.

Verification of conversion permit documents along with supporting attachments by the PMO Team and the Verification Team witnessed by the Board of Directors prior to submitting documents to the Riau Province OJK office.

April 30, 2021 **30 April 2021**

Rapat konsolidasi pengajuan izin konversi bersama seluruh Pemimpin Unit Kantor dan Pegawai Bank Riau Kepri secara *virtual* dipimpin oleh Direktur Utama yang ditutup dengan do'a bersama untuk kelancaran proses konversi.

The consolidation meeting for submitting conversion permits with all Heads of Office Units and Bank Riau Kepri Employees was virtually led by the Main Director which was closed with a joint prayer for the smooth conversion process.

April 30, 2021 **30 April 2021**

Bank secara resmi menyampaikan seluruh dokumen perizinan konversi ke DPPS OJK (*softfile*) dan dokumen fisik disampaikan ke Kantor OJK Provinsi Riau.

The Bank officially submits all conversion licensing documents to the OJK DPPS (softfile) and physical documents are submitted to the Riau Province OJK Office.

May 03, 2021 **03 Mei 2021**

Pembahasan mengenai kelengkapan dokumen perizinan konversi bersama OJK Riau dan Tim PMO bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Discussion regarding the completeness of conversion licensing documents with OJK Riau and the PMO Team took place at the Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

May 06, 2021 **06 Mei 2021**

Verifikasi kelengkapan dokumen perizinan konversi yang telah disampaikan ke OJK Provinsi Riau oleh Tim Pemeriksa dari OJK dan Tim PMO bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau.

Verification of the completeness of the conversion permit documents that have been submitted to OJK Riau Province by the Examining Team from OJK and the PMO Team at the OJK Riau Province Office.

June 25, 2021 **25 Juni 2021**

Rapat Pembahasan Ranperda dalam rangka percepatan konversi yang dipimpin oleh Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Ditjen Otda Kemendagri, dihadiri oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri, Wakil Ketua DPRD Riau, Ketua Pansus, Plh Sekda Prov. Riau (secara virtual), Ketua dan Tim PMO (secara virtual).

The Regional Regulation Discussion Meeting in the context of accelerating conversion led by the Director of Regional Legal Products (PHD) of the Directorate General of Regional Autonomy of the Ministry of Home Affairs, attended by the President Director of Bank Riau Kepri, Deputy Chairperson of the DPRD Riau, Chair of the Special Committee, Plh Regional Secretary of Prov. Riau (virtually), Head and PMO Team (virtually).

July 1, 2021 **01 Juli 2021**

Audiensi virtual Jajaran Direksi dan Tim PMO bersama Pengurus MUI Pusat untuk meminta do'a restu dan dukungan terkait izin konversi yang dihadiri Sekjen MUI, Ketua MUI Bid.Kaderisasi, Wasekjen MUI, Bendum MUI, Ketua MUI Bid. Hubungan LN dan Kerjasama Internasional.

Virtual audience of the Board of Directors and the PMO Team together with the Central MUI Management to ask for blessings and support regarding the conversion permit which was attended by the Secretary General of the MUI, Chair of the MUI Bid. Foreign Relations and International Cooperation.

July 2, 2021 **02 Juli 2021**

Audiensi virtual Jajaran Direksi dan Tim PMO bersama DPPS OJK dalam rangka melaporkan progres konversi kepada Direktur DPPS OJK yang turut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Riau.

A virtual audience for the Board of Directors and the PMO Team with the OJK DPPS in order to report the progress of the conversion to the Director of the OJK DPPS which was also attended by the Head of the Riau Province OJK.

July 7, 2021 **07 Juli 2021**

Rapat Pembahasan kelengkapan dokumen perizinan dalam rangka tindak lanjut dari respon dari surat DPPS OJK yang dipimpin oleh Ketua PMO dan dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Bidang Tim PMO.

A discussion meeting on the completeness of licensing documents in the framework of following up on the response from the OJK DPPS letter led by the PMO Chair and attended by all Chairmen and Members of the PMO Team.

July 7, 2021 **07 Juli 2021**

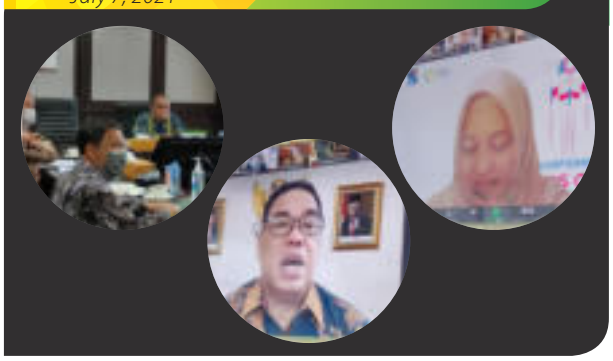

Audiensi virtual bersama Ditjen Otda Kemendagri DPPS OJK dalam rangka tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah Konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS yang dihadiri Ditjen Otda Bp. Makmur Marbun beserta Tim, Direktur DPPS OJK Ibu Nyimas Rohmah, yang dipimpin oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri dan dihadiri oleh Tim PMO.

Virtual audience with the Directorate General of Otda Kemendagri DPPS OJK in the framework of following up on the Draft Regional Regulation for the Conversion of Bank Riau Kepri into BUS which was attended by the Directorate General of Otda Bp. Makmur Marbun and Team, OJK DPPS Director Mrs. Nyimas Rohmah, led by the Main Director of Bank Riau Kepri and attended by the PMO Team.

August 4, 2021 **04 Agustus 2021**

Bertempat di Kantor Kemendagri Jakarta, Direktur Utama Bank Riau Kepri mendampingi Ketua Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau melaksanakan rapat yang dihadiri Direktur PHD Ditjen Otda Kemendagri dalam rangka tindak lanjut Ranperda Konversi.

Taking place at the Office of the Ministry of Home Affairs in Jakarta, the President Director of Bank Riau Kepri accompanied the Chairperson of the Special Committee for the Ranperda Conversion DPRD Riau Province held a meeting which was attended by the Director of PHD Directorate General of Otda of the Ministry of Home Affairs in the context of following up on the Ranperda Conversion.

August 14, 2021 **14 Agustus 2021**

Direksi bersama Tim Inti PMO melakukan pembahasan lebih lanjut atas surat tanggapan dari DPPS OJK terkait kelengkapan dokumen perizinan yang telah disampaikan.

The Board of Directors together with the PMO Core Team conducted further discussions on the response letter from the OJK DPPS regarding the completeness of the licensing documents that had been submitted.

September 6, 2021 **6 September 2021**

Direktur Utama dan Direktur Operasional melakukan diskusi terkait progres Perda Konversi bersama Direktur Hukum Kemendagri RI, turut hadir Ketua Pansus Ranperda Konversi dan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau.

The President Director and Operational Director held a discussion regarding the progress of the Convertible Perda with the Legal the Indonesian Ministry of Home Affairs Director, also present the Chairperson of the Special Committee on Converting Regional Regulations and the Chairperson of Bapemperda DPRD Riau Province.

September 24, 2021 **24 September 2021**

Direktur Utama mendampingi Ketua Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau dan Sekda Provinsi Riau dalam rangka kunjungan ke Kantor Kemendagri Jakarta agenda tindak lanjut Ranperda Konversi.

The President Director accompanied the Chairperson of the Special Committee for the Draft Regional Regulation on Conversion DPRD Riau Province and the Regional Secretary of the Province of Riau on a visit to the Office of the Ministry of Home Affairs Jakarta for the follow-up agenda for the Draft Regional Regulation on Conversion.

October 26, 2021 **26 Oktober 2021**

Direktur Utama dan Tim PMO melakukan diskusi dalam rangka penyusunan *Roadmap* BRK Syariah bersama Konsultan BSMR di Kantor BSMR Jakarta.

The President Director and PMO Team held a discussion in the context of preparing the BRK Syariah Roadmap with the BSMR Consultant at the BSMR Jakarta Office.

November 5, 2021 **5 November 2021**

Audiensi virtual Direksi dengan DPPS OJK menyampaikan respon terhadap seluruh dokumen perizinan yang disampaikan dan rencana pelaksanaan konversi, turut dihadiri oleh Tim PMO.

The Board of Directors' virtual audience with the OJK DPPS conveyed their responses to all submitted licensing documents and the conversion implementation plan, which was also attended by the PMO Team.

November 12, 2021 **12 November 2021**

Rapat perdana Direksi dengan Tim Konversi; Revitalisasi PMO dalam rangka tindak lanjut terkait dokumen perizinan konversi Bank Riau Kepri menjadi BUS.

PMO revitalization in the context of following up on the permit documents for converting Bank Riau Kepri into BUS.

November 13, 2021 **13 November 2021**

Direksi bersama Tim PMO melakukan diskusi untuk menindaklanjuti surat tanggapan dari DPPS OJK perihal kelengkapan dokumen perizinan.

The Board of Directors and the PMO Team held discussions to follow up on the response letter from the OJK DPPS regarding the completeness of the licensing documents.

November 20, 2021 **20 November 2021**

Direksi menyaksikan pelaksanaan simulasi Bank Mini sebagai Bank Umum Syariah dalam rangka familiarisasi penggunaan *Core Banking System Sharia* yang diikuti oleh Seluruh Pegawai di Unit Kantor masing-masing.

The Board of Directors witnessed the implementation of a Mini Bank simulation as a Sharia Commercial Bank in order to familiarize the use of the Sharia Core Banking System which was attended by all Employees in their respective Office Units.

November 29, 2021 **29 November 2021**

Pemeriksaan khusus DPPS OJK dalam rangka *interview* pegawai dalam hal kompetensi pengetahuan Perbankan Syariah, IT dan hal teknis lainnya pada KC Utama Pekanbaru.

Special examination of DPPS OJK in the context of interviewing employees in terms of competence in knowledge of Islamic Banking, IT and other technical matters at the Pekanbaru Main Branch Office.

December 8, 2021 **8 Desember 2021**

Rapat Koordinasi bersama OJK Provinsi Riau dengan Komisaris dan Direksi serta Tim PMO bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau.

Coordination Meeting with OJK Riau Province with Commissioners and Directors as well as the PMO Team at the OJK Riau Province Office.

December 9, 2021 **9 Desember 2021**

Direksi dan Tim PMO memenuhi undangan Sekda Provinsi Riau terkait pembahasan persiapan konversi yang bertempat di Kantor Gubernur Riau.

The Board of Directors and the PMO Team complied with the Riau Provincial Secretary's invitation regarding the discussion of conversion preparations which took place at the Riau Governor's Office.

December 13, 2021 **13 Desember 2021**

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengikuti *Training & Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh *Iqtishad Consulting* di Jakarta.

The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Compliance and Risk Management Director attended the Sharia Banking Executive Training & Workshop organized by Iqtishad Consulting in Jakarta.

Desember 18, 2021 **18 Desember 2021**

Bertempat di kediaman Gubernur Riau; Penyiapan Materi dan Pemaparan Direksi kepada DPPS OJK dan OJK Provinsi Riau Pra Klarifikasi Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali yang dihadiri oleh Komisaris Utama dan Jajaran Direksi Bank Riau Kepri.

Located at the residence of the Governor of Riau; Preparation of Materials and Presentation of Directors to DPPS OJK and OJK Riau Province Pre-Clarification of the Governor as the Controlling Shareholder which was attended by the Main Commissioner and the Board of Directors of Bank Riau Kepri.

Desember 20, 2021 **20 Desember 2021**

Pelaksanaan Presentasi dan Klarifikasi Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri menjadi BUS oleh Gubernur Riau sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, DPS, dan Jajaran Direksi yang bertempat di Kantor OJK Provinsi Riau.

Implementation of Presentation and Clarification of Changes in Business Activities of Bank Riau Kepri to BUS by the Governor of Riau as the Controlling Shareholder (PSP), the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors which are located at the OJK Office in Riau Province.

Desember 27, 2021 **27 Desember 2021**

Direksi melakukan pemaparan progres konversi dan tindak lanjut surat OJK tentang kelengkapan dokumen konversi kepada Dewan Komisaris turut dihadiri oleh Ketua PMO dan seluruh Ketua Bidang Revitalisasi PMO.

The Board of Directors presented the progress of the conversion and followed up on the OJK letter regarding the completeness of the conversion documents to the Board of Commissioners which was also attended by the Head of PMO and all Heads of the PMO Revitalization Division.

December 28, 2021 **28 Desember 2021**

Penandatanganan Komitmen Syariah kepada Pejabat Bank Riau Kepri setingkat Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

The signing of the Sharia Commitment to Bank Riau Kepri Officers at the level of Division Heads and Branch Leaders took place at the Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri.

January 17, 2022 **17 Januari 2022**

Dewan Komisaris, DPS dan Direksi mengikuti Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Syariah Bagi Pengurus Bank yang diselenggarakan oleh oleh Tazkia Consulting bertempat di Batam, Provinsi Kepulauan Riau .

The Board of Commissioners, DPS and Directors take part in Sharia Knowledge Improvement Training for Bank Management organized by Tazkia Consulting located in Batam, Riau Islands Provinces.

March 01, 2022 **01 Maret 2022**

Kunjungan Tim DPPS OJK ke Bank Riau Kepri terkait kesiapan *Core Banking System Sharia* dalam rangka konversi dan wawancara kesiapan pegawai dalam penggunaan *system* baru.

The visit of the OJK DPPS Team to Bank Riau Kepri regarding the readiness of the Sharia Core Banking System in the context of conversion and employee readiness interviews in using the new system.

March 08, 2022 **08 Maret 2022**

Audiensi dan Diskusi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan Gubernur Riau dan Direktur Utama Bank Riau Kepri terkait Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah.

Audiensi dan Diskusi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan Gubernur Riau dan Direktur Utama Bank Riau Kepri terkait Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah.

March 09, 2022 **09 Maret 2022**

Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri & Syiar Ekonomi Islam kepada *Mubaligh/Asatidz* bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Acara tersebut dihadiri oleh 110 *mubaligh* dan secara *online* sebanyak 190 *mubaligh* sebagai narasumber yaitu Sekjen MUI dan Pakar Ekonomi Islam.

Socialization of the Conversion of Bank Riau Kepri & Symbol of Islamic Economics to Mubaligh/Asatidz taking place at the Dang Merdu Bank Riau Kepri Tower. The event was attended by 110 preachers and online as many as 190 preachers as resource persons, namely the Secretary General of the MUI and Islamic Economic Experts.

April 07, 2022 **07 April 2022**

Komisaris Utama dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mendampingi Pemprov Riau dan Ketua Pansus Ranperda Konversi DPRD Provinsi Riau ke Kantor Kemendagri agenda Fasilitasi Perubahan Perda.

The President Commissioner and the Compliance and Risk Management Director assist the Provincial Government of Riau and the Chairperson of the Regional Regulation Draft Special Committee for the Conversion of the Riau Provincial DPRD to the Ministry of Home Affairs Office on the Facilitation of Perda Changes agenda.

23 April 2022

23 April 2022

RUPS LB tanggal 23 April 2022 menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan izin operasional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan dan meyetujui secara bulat untuk penetapan lebih lanjut Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah tersebut akan dilaksanakan dengan RUPS LB secara Sirkuler.

The President Commissioner and the Compliance and Risk Management Director assist the Provincial Government of Riau and the Chairperson of the Regional Regulation Draft Special Committee for the Conversion of the Riau Provincial DPRD to the Ministry of Home Affairs Office on the Facilitation of Perda Changes agenda.

May 19, 2022

19 Mei 2022

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dalam rangka Perubahan Anggaran Dasar Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah.

Plenary Meeting of DPRD Riau Province regarding Ratification of Draft Regional Regulations to become Regional Regulations in the context of Amending Bank Riau Kepri's Articles of Association to become BRK Syariah.

June 11, 2022

11 Juni 2022

RUPS LB yang dilakukan secara sirkuler menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin Operaional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

The President Commissioner and the Compliance and Risk Management Director assist the Provincial Government of Riau and the Chairperson of the Regional Regulation Draft Special Committee for the Conversion of the Riau Provincial DPRD to the Ministry of Home Affairs Office on the Facilitation of Perda Changes agenda.

June 17, 2022

17 Juni 2022

Penyampaian Anggaran Dasar BRK Syariah yang telah mendapat pengesahan Kemenkumham RI sebagai salah satu dokumen perizinan konversi ke kantor DPPS OJK di Jakarta.

Submission of the Sharia BRK Articles of Association which have been approved by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights as one of the conversion licensing documents to the OJK DPPS office in Jakarta.

July 05, 2022 **05 Juli 2022**

Rapat Koordinasi Perdana setelah diterimanya Izin Konversi dari OJK bersama Dewan Komisaris, DPS, Direksi, Seluruh Tim PMO, dan Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

First Coordination Meeting after receiving Conversion Permit from OJK with the Board of Commissioners, DPS, Directors, All PMO Teams, and All Division/Desk/Team Leaders at Dang Merdu Tower Bank Riau Kepri.

July 05, 2022 **05 Juli 2022**

Direktur Utama bersama Komisaris Utama menerima Surat Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah di Kantor OJK Provinsi Riau, yang diserahkan oleh Kepala OJK Provinsi Riau didampingi Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau beserta Tim.

The President Director together with the President Commissioner received a Permit for Changing Conventional Commercial Bank Business Activities to become a Sharia Commercial Bank at the Riau Provincial OJK Office, which was submitted by the Head of the Riau Provincial OJK accompanied by the Deputy Director of Supervision of Financial Services Institutions of the Riau OJK and the Team.

July 06, 2022 **06 Juli 2022**

Asistensi oleh Tim Inti PMO dengan seluruh unit kantor secara virtual terkait Pedoman Layanan Syariah pada Masa Transisi setelah diterimanya surat izin OJK .

Assistance by the PMO Core Team with all office units virtually related to Sharia Service Guidelines during the Transition Period after receiving an OJK license.

July 11, 2022 **11 Juli 2022**

Audiensi virtual dalam rangka asistensi tindak lanjut pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah dengan DPPS OJK dan OJK Provinsi Riau yang dihadiri oleh Direksi, Ketua PMO, dan Perwakilan masing-masing Bidang Tim PMO.

Virtual audience in the context of follow-up assistance on the implementation of changes in the business activities of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank with DPPS OJK and OJK Riau Province which was attended by the Directors, Chair of PMO, and Representatives of each PMO Team Sector.

July 12, 2022 **12 Juli 2022**

Audiensi virtual Bank Riau Kepri dengan Bank Indonesia dalam rangka Asistensi Sistem Pembayaran dihadiri oleh Direksi dan Tim Revitalisasi PMO.

Bank Riau Kepri's virtual audience with Bank Indonesia in the context of Payment System Assistance was attended by the Directors and the PMO Revitalization Team.

July 28, 2022 **28 Juli 2022**

Bank Riau Kepri melakukan pertemuan dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau terkait Pelepasan Surat Utang Negara Konvensional Seri FR0065 dalam rangka Aksi Korporasi Bank Riau Kepri konversi menjadi Bank Umum Syariah di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

Bank Riau Kepri held a meeting with the State Attorney General's Office (JPN) at the Riau Province High Court regarding the Release of Series FR0065 Conventional State Debt in the framework of the Bank Riau Kepri Corporate Action to convert into a Sharia Commercial Bank at the Riau Province High Prosecutor's office.

July 21, 2022 **21 Juli 2022**

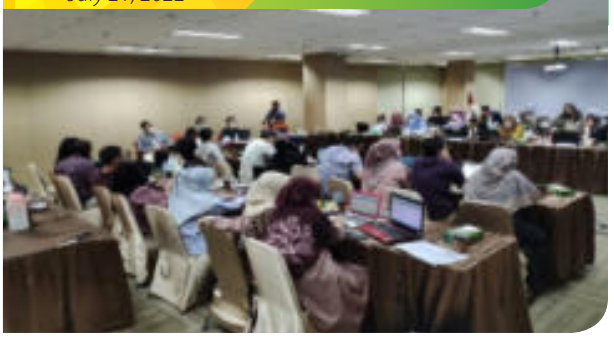

Sosialisasi dan Pembekalan terkait Penggunaan Aplikasi Sistem Pengalihan Akad Konversi (SPAK) oleh Bidang Persetujuan Nasabah & Pengalihan Aset Bisnis yang diikuti oleh Pegawai Unit Kantor Wilayah Pekanbaru secara *offline* dan Unit Kantor di Luar Wilayah Pekanbaru secara *online*.

Socialization and training related to the use of the Conversion Contract Transfer System Application (SPAK) by the Customer Approval & Business Asset Transfer Division which is attended by Employees of the Pekanbaru Regional Office Unit offline and Office Units outside the Pekanbaru Area online.

August 08, 2022 **08 Agustus 2022**

Pengarahan Direksi terkait Pengumuman Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah diikuti oleh Tim Inti PMO, *Desk Service Quality*, Petugas *Helpdesk* Konversi dan Seluruh Unit Kantor (secara virtual)

The Directors briefing regarding the Announcement of the Conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah was attended by the PMO Core Team, Service Quality Desk, Conversion Helpdesk Officers and All Office Units (virtually)

August 19, 2022 **19 Agustus 2022**

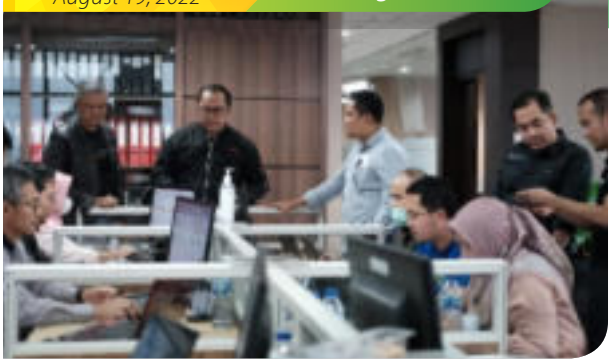

Pelaksanaan Tutup Buku Sistem Konvensional (*Cut off*) dan Proses *Big Bang* dipimpin oleh Pemimpin Divisi TSI beserta Tim didampingi oleh Tim dari PT Multipolar Technology disaksikan oleh Komisaris Independen dan Jajaran Direksi. Proses *Cut off* dan *Big Bang* berlangsung sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.

The implementation of the Conventional System Book Closing (Cut off) and the Big Bang Process was led by the TSI Division Head and the Team accompanied by a Team from PT Multipolar Technology witnessed by Independent Commissioners and the Directors. The Cut off and Big Bang processes will last until August 21, 2022.

August 19, 2022 **19 Agustus 2022**

Bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Bank melakukan Sosialisasi Bank Penyalur Gaji, Bank Persepsi, Penyaluran Rekening Satker, Treasury National Pooling dalam Rangka Konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah

Taking place at the Regional Office of the Directorate General of Treasury of Riau Province, the Bank conducts Socialization of Salary Distribution Banks, Perception Banks, Distribution of Work Unit Accounts, Treasury National Pooling in the Context of Converting Bank Riau Kepri to BRK Syariah.

August 20, 2022 **20 Agustus 2022**

Arahan Direksi terkait Persiapan *Go-Live* Operasional BRK Syariah dengan Seluruh Pemimpin Divisi dan seluruh Pemimpin Unit Kantor secara virtual

Directives of the Directors regarding the Preparation of Sharia BRK Go-Live Operations with all Division Leaders and all Office Unit Leaders virtually

August 25, 2022 **25 Agustus 2022**

Peresmian Operasional Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin disaksikan oleh Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dan Direktur Utama BRK Syariah.

The operational inauguration of Bank Riau Kepri to become BRK Syariah was marked by pressing a button and signing the inscription by the Vice President of the Republic of Indonesia, Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin was witnessed by the Governor of Riau, Governor of the Riau Archipelago, Deputy Chairman of the OJK Vice Commissioners and President Director of BRK Syariah.

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

brksyariah

"25 Agustus 2022 menjadi tonggak sejarah penting BRK Syariah menyelesaikan proses konversi sebagai Bank Umum Syariah dan semakin mantap melangkah dengan semangat baru untuk membawa keberkahan bagi semua, dari Riau Kepri untuk Indonesia. Peningkatan akses dan jangkauan kegiatan operasional kian luas, tercermin dari penambahan 1 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu dan 79 jaringan lainnya meliputi Kantor Kedai, Kantor Kas, Butik, Payment Point, ATM, CDM, dan OTO Banking."

"25 August 2022 is an important milestone for BRK Syariah in completing the conversion process as a Sharia Commercial Bank and increasingly moving forward with new enthusiasm to bring blessings to all, from Riau Kepri to Indonesia. Increased access and wider range of operational activities, reflected in the addition of 1 Branch Office, 1 Sub-Branch Office and 79 other networks including Shop Offices, Cash Offices, Boutiques, Payment Points, ATMs, CDM, and OTO Banking."

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity

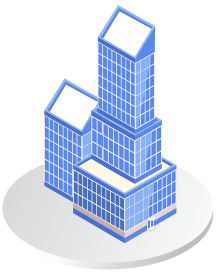

Nama Perusahaan *Company Name*	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Nama Panggilan *Nick name*	Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah)
Status Perusahaan *Company Status*	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) *Regional Owned Enterprises*
Bidang Usaha *Business Field*	Bank Pembangunan Daerah *Regional Development Banks*

Modal Dasar *Authorized capital*	Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) *Rp.4,000,000,000,000.- (four trillion Rupiah)*
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh *Issued capital & Fully Paid*	Rp1.209.240.700.000,- (satu triliun dua ratus sembilan milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah). *IDR 1,209,240,700,000.- (one trillion two hundred nine billion two hundred forty million seven hundred thousand Rupiah).*

Jaringan Kantor *Office Network Data*	**175 Jaringan Kantor** - 1 Kantor Pusat - 21 Kantor Cabang - 42 Kantor Cabang Pembantu - 40 Kedai - 55 Kantor Kas - 2 Butik - 14 Payment Point	***175 Office Networks*** *- 1 Head Office* *- 21 Branch Offices* *- 42 Sub-Branch Offices* *- 40 Kedai* *- 55 Cash Office* *- 2 Boutique* *- 14 Payment Points*

Alamat Kantor Pusat *Head Office Address*	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Jl. Jenderal Sudirman No. 462 Pekanbaru 28116 PO Box 1102
Website	www.brksyariah.co.id
Call Center	Call Center 1500470 *whatsapp:* LAILA 08117575470, *callcenter@brksyariah.co.id,* Web aduan: bit.ly/PengaduanBRKSyariah
Email	corsec@brksyariah.co.id

Tanggal Pendirian *Company Establishment*	*1 April 1966* *April 1,1966*
Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah *Law no. 13 of 1962 regarding Regional Development Bank*
Kepemilikan *Ownership*	1. Pemerintah Provinsi Riau 42,93% (Seri A) 2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 0,99% (Seri A) 3. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Riau dan Kepri 55,50% (Seri A) 4. Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri 0,58% (Seri B) *1. Riau Prov.Gov. 42,93% (series A)* *2. Kepri Prov.Gov. 0,99% (series A)* *3. Municipal/Regency Gov. of Riau & Kepri 55,50% (series A)* *4. Riau Kepri Amanah Cooperatives Consumer 0,58% (series B)*

Jumlah Pegawai *Number of Employees*	2.836 orang *2,836 people*
Sekretaris Perusahaan *Company secretary*	**Edi Wardana** Email: corsec@brksyariah.co.id

Contact Address	Telp: (0761) 47070 Fax: (0761) 42389
Media Sosial: *Social media:*	08117575470 BRK Syariah brksyariahid brksyariah_ BRK Syariah

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of The Company

01 April 1966
April 01, 1966

Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau began with its status as a Government Owned Bank of Riau in accordance with Act no. 13 of 1962 regarding Regional Development Bank.

1975

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975.

The establishment status of the Riau Regional Development Bank is adjusted to the Riau Provincial Regulation Level I No. 10 of 1975.

1986

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 Tahun 1986.

The establishment status of the Riau Regional Development Bank is adjusted to the Riau Provincial Regulation Level I No. 18 of 1986.

1992

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

The establishment status of the Riau Regional Development Bank is adjusted to the Regional Regulation Number 14 of 1992 concerning the Riau Regional Development Bank pursuant to Act No. 7 of 1992 regarding Banking.

26 Juni 2002
June 26, 2002

Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS.

The Riau Regional Development Bank was approved to change its status from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) according to the resolution of the GMS.

5 Mei 2003
May 5, 2003

Pengesahan perubahan status dari PD menjadi PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor: C-09851. HT.01.01. TH.2003

Ratification of the change in status from PD to PT by the Minister of Justice and Human Rights by Decree Number: C-09851. HT.01.01. TH.2003

13 Juni 2003
June 13, 2003

22 Juli 2003
July 22, 2003

26 April 2010
April 26, 2010

Dilakukan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat PT Bank Riau Kepri.

The name PT Bank Pembangunan Daerah Riau was changed to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, abbreviated as PT Bank Riau Kepri.

22 Juli 2010
July 22, 2010

23 Sept. 2010
Sept. 23 ,2010

Persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/59/ KEP. GBI/2010 tetang perubahan nama dari BPD Riau menjadi BPD Riau Kepri.

Approval of Bank Indonesia in the Bank Indonesia Governor Decree No.12/59/KEP.GBI/2010 regarding the name change from BPD Riau to BPD Riau Kepri.

28 Januari 2016
January 28, 2016

Peresmian kantor pusat dan Cabang Utama Bank Riau Kepri di Menara Dang Merdu, sebagai ikon pembangunan ekonomi Riau dan Kepri.

Inauguration of the head office and Main Branch of Bank Riau Kepri in Dang Merdu Tower, as an icon of Riau and Riau Islands' economic development.

2018

Bank Riau Kepri meluncurkan berbagai produk inovasi berbasiskan teknologi digital seperti uang elektronik (*e-money*), samsat online, pelayanan pajak daerah secara online dan dengan sistem *host to host*. Ini adalah upaya menyelaraskan teknologi digital banking untuk menjadikan Bank Riau Kepri sebagai bank yang unggul.

Bank Riau Kepri launched a variety of innovative products based on digital technologies such as e-money, samsat online, online local tax services and a host-to-host system. This is an effort to harmonize digital banking technology to make Bank Riau Kepri a superior bank.

Perubahan badan hukum dari PD menjadi PT telah disahkan dalam RUPS.

Change in the legal entity from Regional Company (PD) into Limited Liability Company (PT) has been approved in the GMS.

Mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/30/KEP. DGS/2003.

Received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Number 5/30/ KEP.DGS/2003.

Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No. AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tentang perubahan nama.

Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-36484.AH.01.02 of 2010 regarding the name change.

Persiapan Konversi Menuju Bank Umum Syariah

Menjadi amanat RUPSLB tanggal 22 April tahun 2019, bahwa Bank Riau Kepri akan berubah menjadi Bank Umum Syariah, yang diyakini akan lebih diterima masyarakat Riau Kepri dengan budaya melayu dan mayoritas beragama Islam.

Dengan dicanangkannya spirit 3K (Konversi-Kinerja-Kultur) menjadi arah sekaligus energi baru dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat, di era baru melalui proses konversi menjadi bank syariah, dan mendorong terciptanya kultur syariah yang produktif melalui pertumbuhan positif kinerja Bank.

Preparation Toward Conversion Sharia Commercial Banks

It became the mandate of the EGMS on 22 April 2019, that Bank Riau Kepri will change to become a Sharia Commercial Bank, which is believed to be more acceptable to the people of Riau Kepri with a Malay culture and the majority are Muslim.

With the promulgation of the 3K spirit (Conversion-Performance-Culture) it becomes a new direction as well as energy in facing increasingly fierce challenges and competition, in the new era through the process of converting into an Islamic bank, and encouraging the creation of a productive Islamic culture through positive growth in the Bank's performance.

Tuntasnya Konversi Syariah BRK

- **24 Mei 2022 :**
  Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroran Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau
- **15 Juni 2022:**
  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO.AHU-0040576.AH.01.02 Tanggal 15 Juni 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
- **4 Juli 2022:**
  Surat OJK No. KEP-93/D.03/2022 Tanggal 04 Juli 2022 Tentang Pemberian Izin Perubahan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
- **19 Agustus 2022:**
  Cut Off BRK Konvensional (*Big Bang System Konversi*)
- **22 Agustus 2022**
  Hari Pertama beroperasinya (*Go Live*) BRK Syariah.

Perubahan Bank Riau Kepri Menjadi Bank Riau Kepri Syariah dengan *call sign* BRK Syariah berkat dukungan Masyarakat Riau dan Kepulauan Riau serta spirit "Berkah Untuk Semua" Insya Allah BRK Syariah dapat berperan menjadi motor penggerak, yakni pemicu sekaligus pemacu ekosistem Syariah di Kawasan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

Completed BRK Sharia Conversion

- ***May 24, 2022 :***
  Regional Regulation of Riau Province Number 3 of 2022 Dated May 24 2022 Concerning Amendments to Regional Regulation Number 10 of 2002 Concerning Changes in the Form of Legal Entity for Riau Regional Development Banks From Regional Companies (PD) to Limited Liability Companies (PT) Riau Regional Development Banks
- ***June 15, 2022:***
  Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia NO.AHU-0040576.AH.01.02 dated 15 June 2022 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
- ***July 4, 2022:***
  OJK Letter No. KEP-93/D.03/2022 Dated 04 July 2022 Concerning the Granting of Business Permits for Changing Conventional Commercial Banks from PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to Sharia Commercial Banks PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
- ***August 19, 2022:***
  Conventional BRK Cut Off (Big Bang System Conversion)
- ***August 22, 2022***
  The First Day of Operation (Go Live) BRK Syariah.

Change of Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah with the call sign BRK Syariah thanks to the support of the Riau and Riau Islands Communities and the spirit of "Blessings for All" God willing, BRK Syariah can play a role as a driving force, namely triggering and accelerating the Sharia ecosystem in the Riau Province Region and the Province of Riau. Riau Islands especially in supporting the development of regional economic potential.

2022

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

DESCRIPTION OF NAME CHANGE

Sebelum menjadi BRK Syariah, Bank telah mengalami tiga kali perubahan nama sejak berdiri pada tahun 1966.

Didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992. Pada tanggal 26 Juni 2002 mengalami perubahan status menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor: C-09851. HT.01.01. TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 dan keputusan RUPS tanggal 13 Juni 2003.

Pada tanggal 26 April 2010, PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) terjadi perubahan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri). Perubahan nama bank tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 Tanggal 22 Juli 2010 dan Persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/59/ KEP. GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Dengan dinamika yang terjadi dan juga amanat pemegang saham, BPD Riau Kepri selanjutnya disebut BRK menuntaskan proses konversi menjadi BRK Syariah pada tanggal 25 Agustus 2022.

Before became BRK Syariah, the Bank has undergone three name changes since its establishment in 1966.

Established under the name Riau Regional Development Bank Company based on Regional Regulation Number 14 of 1992. On June 26, 2002 it underwent a change in status to a Limited Liability Company (PT) Riau Regional Development Bank which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with Decree Number: C-09851 . HT.01.01. TH.2003 dated 5 May 2003 and GMS decision dated 13 June 2003.

On April 26 2010, PT Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BPD Riau Kepri). The change in the name of the bank was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No.AHU-36484.AH.01.02 of 2010 dated 22 July 2010 and Bank Indonesia's approval through Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12/59/KEP.GBI/2010 dated 23 September 2010.

With the dynamics that occurred and also the mandate of the shareholders, BPD Riau Kepri, hereinafter referred to as BRK, completed the conversion process to BRK Syariah on August 25, 2022.

TRANSFORMASI *BRAND* PERUSAHAAN
Company Brand Transformation

Setelah sukses menyelesaikan proses konversi menjadi bank syariah, BRK Syariah melakukan transformasi logo dan brand baru, yaitu perubahan ikon 3 (tiga) perahu dan layar terkembang menjadi hanya tinggal 1 (satu). Brand baru tersebut sesuai dengan ciri khas Melayu dengan filosofi Tanjak/Tengkolok dan Perahu Lancang Kuning.

Setelah sukses menyelesaikan proses konversi menjadi bank syariah, BRK Syariah melakukan transformasi logo dan brand baru, yaitu perubahan ikon 3 (tiga) perahu dan layar terkembang menjadi hanya tinggal 1 (satu). Brand baru tersebut sesuai dengan ciri khas Melayu dengan filosofi Tanjak/Tengkolok dan Perahu Lancang Kuning.

Simbol Tanjak

Merupakan bentuk Ikat kepala Tanjak sebagai kebanggan masyarakat melayu sebagai simbol Semangat, kepemimpinan, dan ketulusan.

Tanjak Symbol

It is a form of Tanjak headband as the pride of the Malay community as a symbol of enthusiasm, leadership and sincerity.

Simbol Layar Kapal Jong Terkembang

Mengartikan Bank Riau Kepri Syariah terus mengarungi dan berkembang dengan teguh dan mengarah ke suatu tujuan yang lebih baik.

The symbol of the Expanded Sailing Ship

This means that Bank Riau Kepri Syariah continues to navigate and develop steadily and lead to a better goal.

Huruf

Font **Harabara Mais Bold** memberikan kesan Luwes, Humble dan modern.

Typography

The Harabara Mais Bold font gives a supple, humble and modern impression.

Garis Hijau

Simbol aliran ombak bahwa Bank Riau Kepri Syariah bertekad menerjang arus era globalisasi modern.

Green Line

The symbol of the flow of waves is that Bank Riau Kepri Syariah is determined to hit the currents of the modern globalization era.

Garis Landasan

Bank Riau Kepri Syariah yang sepenuhnya berlandaskan syariah dan menjadi simbol kesetaraan umat.

Baseline

Bank Riau Kepri Syariah which is fully based on sharia and is a symbol of equality of people.

brksyariah
berkah untuk semua

Merah
Gigih dan Semangat
Red
Persistence and Passion

Kuning
Kejayaan dan Kesuksesan
Yellow
Glory and Success

Hijau
Religius, Sejuk dan Mengayomi.
Green
Religious, Cool and Nurturing

Hitam
Kepemimpinan, Ketegasan dan Kunci ekonomi Riau dan Kepri.
Black
Leadership, Assertiveness and Key to the economy of Riau and the Riau Islands.

Perahu

Mengartikan perahu mampu menampung dan mengantarkan Masyarakat Riau dan Kepri ke perekonomian yang lebih baik.

Boat

This means that boats are able to accommodate and deliver the people of Riau and the Riau Islands to a better economy.

Akronim BRK

Dalam brading penyingkatan kata diperlukan untuk memberikan kemudahan penyebutan dan efek pengingat.

BRK acronym

In brading, word abbreviations are needed to provide ease of mentioning and reminder effects.

Slogan

"berkah untuk semua" merupakan nilai universal value dimana perekonomian Riau dan Kepri tumbuh secara berkeadilan.

Slogan

"Blessings for all" is a universal value in which the economy of Riau and the Riau Islands grows in an equitable manner.

BIDANG USAHA
Business Fields

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Mengacu pada Anggaran Dasar BRK Syariah Pasal 3 ayat 2, kegiatan usaha BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Business Activities According to the Articles of Association and Executed

Referring to the BRK Syariah Articles of Association Article 3 paragraph 2, the business activities of BRK Syariah are as follows:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan *Has/Not Executed*	*Business Activities Based on the Articles of Association*
Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Collecting funds in the form of deposits in the form of Current Accounts, Savings, or other equivalent forms based on a Wadi'ah contract or other agreements that do not conflict with Sharia Principles.*
Menghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Raising funds in the form of investments in the form of deposits, savings, or other equivalent forms based on Mudharabah contracts or other contracts that do not conflict with Sharia Principles.*
Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Distributing profit sharing financing based on Mudharabah contracts, Musyarakah contracts, or other contracts that do not conflict with Sharia Principles.*
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad Salam, akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Disbursing financing based on a Murabahah contract, Salam contract, Istishna contract, or other contracts that are not against Sharia Principles.*
Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Disbursing financing based on Qardh contracts or other contracts that are not against Sharia Principles.*
Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah *Muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Distribute movable or immovable property leasing financing to customers based on Ijarah contracts and/or lease purchases in the form of Ijarah Muntakiya bittamlik or other contracts that are not against Sharia Principles.*
Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	√	*Take over debt based on the Hawalah contract or other contracts that do not conflict with Sharia Principles.*
Melakukan usaha Kartu Debit dan/atau Kartu Pembiayaan* berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Doing Debit Card and/or Financing Card* business based on Sharia Principles.*
Melakukan pemberian jasa pelayanan Perbankan berdasarkan akad antara lain: *Wakalah;* *Hawalah;* *Kafalah;* *Rahn.*	√	*Providing banking services based on contracts, including:* *Wakalah;* *Hawalah;* *Kafalah;* *Rahn.*
Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri Surat Berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan Prinsip Syariah antara lain menggunakan akad *Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah*, atau *Hawalah*.	√	*Buy, sell, or guarantee at own risk third party Securities issued on the basis of an underlying transaction based on Sharia Principles, including using Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, or Hawalah contracts.*
Membeli Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.	√	*Purchasing Securities based on Sharia Principles issued by the Government and/or Bank Indonesia.*
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Receiving payments from bills on securities and performing calculations with third parties or between third parties based on Sharia Principles.*
Melakukan penitipan untuk kepentingan Pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Carry out safekeeping for the benefit of other Parties based on an agreement based on Sharia Principles.*
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Providing a place to store goods and Securities based on Sharia Principles.*
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Transferring money both for own account and for the benefit of the Customer based on Sharia Principles.*
Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.	√	*Placing funds at, borrowing funds from or lending funds to other banks, either using letters, telecommunication facilities or money orders, checks or other means.*

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/Belum Dijalankan *Has/Not Executed*	*Business Activities Based on the Articles of Association*
Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *Wakalah*.	-	*Performing the function as Trustee based on the Wakalah contract.*
Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Providing letter of financing or Bank Guarantee facilities based on Sharia Principles.*
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang Perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√	*Carrying out other activities that are commonly carried out in the banking sector and in the social sector as long as they do not conflict with Sharia Principles and are in accordance with the provisions of laws and regulations.*
Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Conducting foreign exchange activities based on Sharia Principles.*
Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Carrying out equity participation activities in Islamic Commercial Banks or Financial Institutions that carry out business activities based on Sharia Principles.*
Bertindak sebagai Pendiri dan Pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.	-	*Acts as Founder and Management of Pension Funds based on Sharia Principles.*
Melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	√	*Carrying out activities in the Capital Market as long as it does not conflict with Sharia Principles and provisions of Laws and Regulations in the Capital Market sector.*
Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik.	√	*Organizing Bank activities or products based on Sharia Principles by using electronic means.*
Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan Surat Berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal.	√	*Issue, offer and trade short-term Securities based on Sharia Principles, either directly or indirectly through the Capital Market.*
Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan Surat Berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal.	-	*Issue, offer and trade long-term Securities based on Sharia Principles, either directly or indirectly through the Capital Market.*
Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.	√	*Providing products or conducting other Sharia Commercial Bank business activities based on Sharia Principles.*
Membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Riau dan Kepulauan Riau dalam membina Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Riau dan Kepuluan Riau.	√	*Assist Provincial, Regency/City Governments throughout Riau and the Riau Archipelago in fostering Sharia People's Financing Banks (BPRS) owned by Provincial, Regency/City Governments throughout Riau and Riau Islands.*
Melaksanakan fungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah, membantu dengan tugas antara lain sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.	√	*Carrying out functions as a supporting institution for regional autonomy, assisting with tasks including activating and driving the pace of development in the region, as a regional treasury holder and/or carrying out regional money storage, and as a source of regional income.*

**co-branding* dengan Bank Syariah Indonesia | **co-branding with Bank Syariah Indonesia*

PRODUK DAN JASA
Products and Services

PRODUK DAN JASA PERBANKAN
BANKING PRODUCTS AND SERVICES

BRK Syariah menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Sumatera yang terhubung dengan layanan Bank Indonesia (BI) - *Fast* melalui kerja sama dengan PT Rintis Sejahtera dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). BRK Syariah menjadi bank Peserta Tidak Langsung (PTL) pertama yang terkoneksi dengan layanan *multi-tenancy* infrastruktur sharing yang disediakan oleh PT Rintis Sejahtera, sehingga Bank Indonesia mengundang Direktur Utama bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menjadi narasumber sebagai BPD implementator *BI-Fast* pertama di Sumatera pada tanggal 23 September 2022 di Medan.

BRK Syariah is the first Regional Development Bank (BPD) in Sumatera connected to Bank Indonesia (BI) - Fast services through cooperation with PT Rintis Sejahtera and PT Bank Syariah Indonesia (BSI). BRK Syariah became the first Indirect Participating bank (PTL) connected to the multi-tenancy infrastructure sharing service provided by PT Rintis Sejahtera, so that Bank Indonesia invited the President Director together with the Deputy Governor of Bank Indonesia to become resource persons as the BPD implementing the first BI-Fast in Sumatra on 23 September 2022 in Medan.

Sebelum resmi mendapat status sebagai bank syariah pada 25 Agustus 2022, BRK Syariah memiliki beragam produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah baik yang bersifat konvensional maupun dengan prinsip syariah sebagai berikut:

Prior to officially obtaining status as a sharia bank on August 25 2022, BRK Syariah had a variety of products and services that met the needs of both conventional and sharia-compliant customers as follows:

PRODUK SIMPANAN
SAVINGS PRODUCT

Produk Dana dan *Digital Banking* sebelum Konversi
Fund Products and Digital Banking before Conversion

TABUNGAN SIMPEDA

Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan produk tabungan bersama yang diterbitkan secara bersama oleh BPD seluruh Indonesia yang dirancang secara khusus sebagai alat pemersatu BPD seluruh Indonesia.

SIMPEDA SAVINGS

Regional Development Savings Savings (BPD) which is a joint savings product issued jointly by BPDs throughout Indonesia that are specifically designed as a unifying tool for BPDs throughout Indonesia.

TABUNGAN SINAR PRIORITAS

Merupakan tabungan dengan layanan special yang diberikan secara eksklusif untuk anda dengan keistimewaan tertentu, mendapatkan fasilitas *Safe Deposit Box* (SDB), Kartu Prioritas yang dapat digunakan sebagai Kartu Akses Tanpa Antri dan dapat digunakan saat berada di beberapa *lounge* bandara dan benefit lainnya.

SINAR PRIORITAS SAVINGS

This is a savings with special services that are given exclusively to you with certain privileges, get Safe Deposit Box (SDB) facilities, Priority Cards that can be used as Access Cards without Queuing and can be used while in several airport lounges and other benefits.

TABUNGAN SINAR

Merupakan simpanan mata uang rupiah dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*, memiliki setoran awal yang ringan serta telah dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM, BRK *Mobile*, SMS *Banking* dan diikutsertakan dalam setiap program undian.

SINAR SAVINGS

This is a rupiah currency deposit with mudharabah and wadiah agreements, has an easy initial deposit and is equipped with ATM card, BRK Mobile, SMS Banking facilities and is included in every raffle program.

TABUNGAN SINAR BELIA

Tabungan Sinar Belia Tabungan khusus bagi Pelajar dan Mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun dengan persyaratan ringan.

SINAR BELIASAVINGS

Sinar Belia Savings A special savings account for students and students who are still active or are still at school age, a maximum of 28 years old with light requirements.

TABUNGAN SINAR DELIMA

Tabungan Sinar Delima Tabungan Premium untuk segmen menengah keatas yang memiliki fitur lebih unggul.

SINAR DELIMA SAVINGS

Sinar Delima Savings Premium savings for the middle and upper segment that have superior features.

TABUNGAN SINAR KPE

Merupakan tabungan perorangan dengan mata uang Rupiah yang diperuntukkan khusus bagi CPNS dan PNS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

SINAR KPE SAVINGS

This is an individual savings account in Rupiah which is specifically for Civil Servants and Civil Servants of Riau and Riau Islands Provinces.

TABUNGAN SINAR *COMMUNITY*

Tabungan Sinar *Community* Tabungan khusus untuk komunitas yang bisa digunakan sebagai Kartu Anggota yang memberikan keuntungan kepada rekening Induk Komunitas.

SINAR COMMUNITY SAVINGS

Sinar Community Savings A special savings account for the community that can be used as a Member Card that provides benefits to the Main Community account.

TABUNGAN SINAR PEGAWAI

Tabungan Sinar Pegawai Tabungan khusus untuk pegawai PT Bank Riau Kepri.

SINAR PEGAWAI SAVINGS

Sinar Employee Savings Special savings for employees of PT Bank Riau Kepri.

TABUNGAN SINAR DBOS

Tabungan yang dikhususkan untuk sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (DBOS) dimana fitur utamanya yakni pembukaan rekening tanpa minimal setoran awal dan tanpa saldo minimum.

SINAR DBOS SAVINGS

A Savings specifically for schools that receive the School Operational Assistance Fund (DBOS) where the main feature is opening an account without a minimum initial deposit and without a minimum balance.

TABUNGAN SINAR PENDIDIKAN

Tabungan Sinar Pendidikan Tabungan Investasi untuk pendidikan yang memiliki manfaat asuransi dengan suku bunga yang lebih tinggi

SINAR EDUCATION SAVINGS

Sinar Education Savings Investment savings for education that have insurance benefits with higher interest rates

TABUNGAN SimPel

Tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA Sederajat yang diterbitkan secara Nasional oleh Bank-Bank di Indonesia dengan persyaratan mudah.

SimPel SAVINGS

Savings for early childhood, kindergarten, elementary school, junior high school, high school Equivalent students issued nationally by banks in Indonesia with easy requirements.

Program KEJAR Bank Riau Kepri Tahun 2022

1. Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Hari Indonesia Menabung (HIM) Bank Riau Kepri melaksanakan Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) Tahun 2022 yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bank Riau Kepri mengikuti kegiatan yang bertajuk KREASIMUDA (Kejar Prestasi Generasi Muda Indonesia) dengan melaksanakan dua kegiatan pada bulan Maret Tahun 2022 yaitu:
   a. **BANK DENGAN IMPLEMENTASI KEJAR TERBAIK**, yaitu dengan melakukan pembukaan rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) selama bulan program Kreasimuda yaitu Juli s.d Agustus 2022 sebanyak 22.000 rekening SimPel baru di Provinsi Riau.
   b. **BANK TERINOVATIF DALAM IMPLEMENTASI KEJAR**, Bank Riau Kepri yang bekerjasama dengan sekolah terpilih yang ada di Provinsi Riau melaksanakan layanan Bank Mini dengan menggandeng pihak sekolah/guru untuk menjadi Agen Laku Pandai Bank Riau Kepri dalam sistem pengoperasian Bank Mini, yang diberi nama "**Bank Riau Kepri *CHAMPION***" (**CARA ASIK MENABUNG PELAJAR INDONESIA**). Dengan penjelasan sebagai berikut:
      - Bank Riau Kepri *CHAMPION* merupakan layanan perbankan (BANK MINI) yang ada di sekolah yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri.

Bank Riau Kepri KEJAR Program in 2022

1. *In the context of implementing Presidential Decree Number 26 of 2019 concerning Indonesia Saving Day (HIM), Bank Riau Kepri is implementing the 2022 KEJAR (One Account One Student) Program coordinated by the Financial Services Authority (OJK).*
2. *Bank Riau Kepri participated in an activity entitled KREASIMUDA (Pursue Achievement of Indonesia's Young Generation) by carrying out two activities in March 2022, namely:*
   a. ***THE BANK WITH THE BEST IMPLEMENTATION OF KEJAR**, by opening Student Savings Accounts (SimPel) during the Kreasimuda program month, July to August 2022, for 22,000 new SimPele accounts in Riau Province.*
   b. ***AN INNOVATIVE BANK IN THE IMPLEMENTATION OF KEJAR**, Bank Riau Kepri in collaboration with selected schools in Riau Province implements Mini Bank services by cooperating with schools/teachers to become Bank Riau Kepri Laku Pandai Agents in the Mini Bank operating system, which is named "**Bank Riau Kepri CHAMPION" (CARA INDONESIAN STUDENTS FUN TO SAVING)**. With the following explanation:*
      - *Bank Riau Kepri CHAMPION is a banking service (BANK MINI) in schools that cooperates with Bank Riau Kepri.*

- Bank Riau Kepri *CHAMPION* memiliki makna sang juara/pemenang, artinya seluruh pelajar Indonesia adalah seorang calon juara/pemenang.
- *CHAMPION* memiliki kepanjangan "**CARA ASIK MENABUNG PELAJAR INDONESIA**".
- Bank Riau Kepri *CHAMPION* menggandeng pihak sekolah/guru yang ada di sekolah untuk menjadi Agen Laku Pandai Bank Riau Kepri dalam sistem pengoperasian Bank Mini-nya.
- Diharapkan Bank Riau Kepri *CHAMPION* dapat menjadi perpanjangan tangan Bank Riau Kepri dalam layanan jasa perbankan untuk pelajar di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau.

Atas kegiatan tersebut di atas, Bank Riau Kepri terpilih sebagai **BANK TERBAIK 1 (SATU) DALAM MELAKSANAKAN/IMPLEMENTASI PROGRAM KEJAR TAHUN 2022 SECARA NASIONAL** untuk kategori Bank BPD.

- *Bank Riau Kepri CHAMPION means the champion/winner, meaning that all Indonesian students are potential champions/winners.*
- *CHAMPION stands for "**THE FUN WAY TO SAVING FOR INDONESIAN STUDENTS**".*
- *Bank Riau Kepri CHAMPION cooperates with schools/teachers in schools to become agents of Laku Pandai Bank Riau Kepri in its Mini Bank operating system.*
- *It is hoped that Bank Riau Kepri CHAMPION can become an extension of Bank Riau Kepri in banking services for students in schools in Riau Province.*

*For the above activities, Bank Riau Kepri was selected as the **BEST BANK 1 (ONE) IN IMPLEMENTING/ IMPLEMENTING THE 2022 KEJAR PROGRAM NATIONALLY** for the BPD Bank category.*

TABUNGANKU

Produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MY SAVINGS

Savings product for individuals with easy and light requirements issued jointly by Banks in Indonesia in order to foster a culture of saving and improve people's welfare.

TABUNGAN SINARLAKU

Tabungan dalam rangka program inklusi keuangan melalui layanan Tanpa Kantor yang buka di Agen Laku Pandai.

SINARLAKU SAVINGS

Savings in the context of a financial inclusion program through an Officeless service that is open at Laku Pandai Agents.

GIRO BANK RIAU KEPRI

Simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

GIRO BANK RIAU KEPRI

Deposits of third party funds where withdrawals can be made at any time by using a check/bilyet giro or other means of payment orders.

DEPOSITO BANK RIAU KEPRI

Simpanan Berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan Bank.

DEPOSIT BANK RIAU KEPRI

Time Deposits where withdrawals can only be made at a certain time according to the agreement between the customer and the Bank.

LAYANAN BANK
BANKING SERVICES

KARTU ATM BANK RIAU KEPRI

Kartu ATM adalah kartu Bank berteknologi *chip* yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh mesin ATM Bank Riau Kepri, ATM berlogo Prima dan ATM bersama, EDC Bank Riau Kepri serta *e-channel* Bank Riau Kepri lainnya dalam hal melakukan transaksi penarikan tunai, setor tunai, transfer, pembayaran, dan / atau pembelian. Pilihan jenis kartu ATM Bank Riau Kepri terdiri dari Silver, Gold, Platinum, dan Prioritas.

BANK RIAU KEPRI ATM CARD

ATM cards are bank cards with chip technology that can be used to access all Bank Riau Kepri ATM machines, ATMs bearing the Prima logo and ATM Bersama, Bank Riau Kepri EDC and other Bank Riau Kepri e-channels in terms of making cash withdrawal transactions, cash deposits, transfers, payment, and/or purchase. The choice of Bank Riau Kepri ATM card types consists of Silver, Gold, Platinum and Prioritas.

EDC BANK RIAU KEPRI

Peralatan elektronik yang digunakan untuk layanan perbankan yang bekerja secara otomatis untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang memiliki kartu ATM secara non tunai.

EDC BANK RIAU KEPRI

Electronic equipment used for banking services that works automatically to provide services to customers who have non-cash ATM cards.

BRK *MOBILE*

Layanan *mobile banking* yang diperuntukkan kepada Nasabah Bank yang memiliki kartu ATM Bank Riau Kepri.

BRK MOBILE

A mobile banking service intended for bank customers who have a Bank Riau Kepri ATM card.

SMS *BANKING*

Merupakan produk layanan Bank yang diperuntukkan bagi nasabah guna mempermudahkan dalam menerima informasi terkait transaksi keuangan.

SMS BANKING

Is a Bank service product intended for customers to make it easier to receive information related to financial transactions.

BRK *QRIS*

Layanan penerimaan transaksi pembayaran *QRIS* bagi *merchant* BRK *QRIS* dan fitur layanan transaksi pembayaran *QRIS* bagi nasabah melalui Aplikasi BRK *mobile*.

BRK QRIS

QRIS payment transaction acceptance service for BRK QRIS merchants and QRIS payment transaction service features for customers through the BRK mobile application.

CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Fitur transaksi *real time* yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. CMS memberikan keleluasaan kepada nasabah/ *Corporate* untuk melakukan transaksi secara *online* antar rekening sesama Bank Riau Kepri dan/atau dari rekening Bank Riau Kepri ke rekening Bank lain.

CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Real time transaction features that can be done anytime and anywhere. CMS gives flexibility to customers/Corporates to make online transactions between accounts of fellow Bank Riau Kepri and/or from Bank Riau Kepri accounts to accounts of other Banks.

E-MONEY

Suatu alat pembayaran elektronik prabayar yang diterbitkan oleh Bank Mandiri (Persero) yang bekerjasama dengan PT Bank Riau Kepri dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk pembayaran transaksi pada *Merchant* tertentu yang bersifat *Offline*.

E-MONEY

A prepaid electronic payment instrument issued by Bank Mandiri (Persero) in collaboration with PT Bank Riau Kepri in which a certain monetary value is attached to it which can be topped up and can be used to pay transactions at certain Merchants who are Offline.

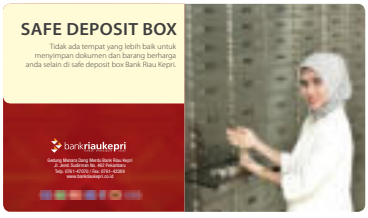

SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Merupakan fasilitas layanan penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen berharga dengan sistem keamanan yang dirancang secara khusus dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian dan risiko kehilangan.

SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

It is a storage service facility for customers to store valuable goods and documents with a specially designed security system to provide maximum protection for valuables and documents from the dangers of fire, theft and risk of loss.

Produk Dana dan *Digital Banking* setelah Konversi
Fund Products and Digital Banking after Conversion

31 Maret 2023:
March 31, 2023:

Program Undian Tabungan BRK Syariah Bedelau Periode II, dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 dengan jangka waktu program selama 12 bulan (Oktober 2022 s.d September 2023). Periode kali ini hadiah yang diberikan juga lebih fantastis yaitu memiliki 3 kategori hadiah, yaitu :

(1). Kategori hadiah *Non Grand Prize*, adalah yang diperebutkan oleh seluruh unit kantor yaitu Emas Logam Mulia Antam dengan total sebanyak 630 keping masing-masing seberat 1 gram.

(2). Kategori hadiah *Grand Prize*, adalah hadiah kedua yang diperebutkan oleh seluruh jaringan kantor cabang konsolidasi, yaitu 20 unit mobil Honda Brio RS M/T.

(3). Kategori hadiah *Super Grand Prize*, adalah hadiah utama yang diperebutkan oleh unit kantor yaitu 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4.

Selama program undian Bedelau ini dilaksanakan, outstanding tabungan Bank tumbuh sebesar Rp608 miliar dengan rata-rata pertumbuhan (*growth*) tabungan perbulan adalah sebesar Rp50,7 miliar.

Produk Tabungan yang diikutkan adalah Tabungan iB Sinar, Tabungan iB Sinar Delima, Tabungan iB Sinar Belia, Tabungan iB Sinar Pendidikan, Tabungan iB Sinar KPE, Tabungan iB Sinar *Community*, Tabungan iB Sinar *Mudharabah*, Tabungan iB Sinar Prioritas *Mudharabah*.

BRK Syariah Bedelau Savings Lottery Program Period II, held in October 2022 with a program period of 12 months (October 2022 to September 2023). This time the prizes given were also more fantastic, namely having 3 prize categories, namely:

(1). The Non-Grand Prize prize category is contested by all office units, namely Antam's Gold Precious Metals with a total of 630 pieces weighing 1 gram each.

(2). The Grand Prize category is the second prize contested by the entire network of consolidated branch offices, namely 20 units of Honda Brio RS M/T.

(3). The Super Grand Prize prize category is the main prize contested by office units, namely 1 unit of Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4.

During the Bedelau lottery program, the Bank's outstanding savings grew by Rp. 608 billion, with an average monthly savings growth of Rp. 50.7 billion.

The savings products included are iB Sinar Savings, iB Sinar Delima Savings, iB Sinar Belia Savings, iB Sinar Education Savings, iB Sinar KPE Savings, iB Sinar Community Savings, iB Sinar Mudharabah Savings, iB Sinar Prioritas Mudharabah Savings.

TABUNGAN SIMPEDA *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Mudharabah* yang merupakan produk tabungan bersama yang diterbitkan secara bersama oleh BPD seluruh Indonesia yang dirancang secara khusus sebagai alat pemersatu BPD seluruh Indonesia.

SIMPEDA MUDHARABAH SAVINGS

This is a savings account using a Mudharabah contract, which is a joint savings product issued jointly by BPDs throughout Indonesia that are specifically designed as a unifying tool for BPDs throughout Indonesia.

TABUNGAN SINAR PRIORITAS *WADIAH* DAN *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* yang merupakan Tabungan dengan layanan spesial yang diberikan secara eksklusif untuk Anda dengan keistimewaan tertentu.

WADIAH AND MUDHARABAH PRIORITY SINAR SAVINGS

These are deposits using Wadiah and Mudharabah contracts which are savings with special services that are given exclusively to you with certain privileges.

TABUNGAN SINAR *WADIAH* DAN *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan mata uang rupiah dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*, memiliki setoran awal yang ringan serta telah dilengkapi dengan fasilitas kartu ATM, BRKS Mobile, SMS Banking dan diikutsertakan dalam setiap program undian.

SINAR WADIAH SAVINGS AND MUDHARABAH

This is a rupiah currency deposit with mudharabah and wadiah agreements, has an easy initial deposit and is equipped with ATM card facilities, BRKS Mobile, SMS Banking and is included in every lottery program.

TABUNGAN SINAR BELIA *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan dengan akad *Mudharabah* khusus bagi Pelajar dan Mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun dengan persyaratan ringan.

SINAR BELA MUDHARABAH SAVINGS

Represents savings with a special Mudharabah contract for Students and Students who are still active or are still at school age a maximum of 28 years with light requirements.

TABUNGAN SINAR DELIMA *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan yang menggunakan akad *Mudharabah* dan keunggulan dari BRK Syariah yang keunggulan yang tidak dimiliki tabungan yang lain.

SINAR DEGIMA MUDHARABAH SAVINGS

These are savings that use the Mudharabah contract and the advantages of BRK Syariah, which are advantages that other savings do not have.

TABUNGAN SINAR KPE *MUDHARABAH*

Merupakan tabungan menggunakan akad *Mudharabah* perorangan dengan mata uang Rupiah yang diperuntukkan khusus bagi CPNS dan PNS Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

SINAR KPE MUDHARABAH SAVINGS

Represents savings using an individual Mudharabah contract with the Rupiah currency specifically designated for Civil Servants and Civil Servants of Riau and Riau Islands Provinces.

TABUNGAN SINAR *COMMUNITY MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Mudharabah* untuk komunitas yang bisa digunakan sebagai Kartu Anggota yang memberikan keuntungan kepada rekening Induk Komunitas.

SINAR COMMUNITY MUDHARABAH SAVINGS

It is a savings account using a Mudharabah contract for the community that can be used as a Member Card that provides benefits to the Main Community account.

TABUNGAN SINAR PEGAWAI *WADIAH*

Merupakan simpanan khusus yang menggunakan akad *wadiah* untuk pegawai PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

WADIAH EMPLOYEE SINAR SAVINGS

This is a special deposit that uses a wadiah contract for employees of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

TABUNGAN SINAR DBOS *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan khusus yang menggunakan akad *Mudharabah* untuk sekolah baik negeri maupun swasta yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS.

SINAR DBOS MUDHARABAH SAVINGS

A special savings account using a Mudharabah contract for both public and private schools that are designated as recipients of BOS funds.

TABUNGAN SINAR PENDIDIKAN *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan berjangka menggunakan akad *Mudharabah* untuk masa depan pendidikan buah hati, dengan sistem autodebit memberikan kemudahan dalam melakukan penyetoran tanpa harus ke Kantor Bank, menggunakan akad *Mudharabah* yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan, setoran bulanan yang ringan dan jangka waktu fleksibel.

SINAR EDUCATION MUDHARABAH SAVINGS

Is a time deposit using a Mudharabah contract for the future education of children, with an autodebit system that makes it easy to make deposits without having to go to a bank office, using a Mudharabah contract that can only be withdrawn after an agreed period of time, easy monthly deposits and flexible terms .

TABUNGAN SimPel *WADIAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *wadiah* untuk siswa PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA Sederajat yang diterbitkan secara Nasional oleh Bank-Bank di Indonesia dengan persyaratan mudah.

WADIAH SimPel SAVINGS

Is a savings account using a wadiah contract for PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA Equivalent students issued nationally by banks in Indonesia with easy requirements.

TABUNGANKU *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Mudharabah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MY SAVINGS ARE MUDHARABAH

Is a savings account using a Mudharabah contract for individuals with easy and light requirements that is issued jointly by Banks in Indonesia in order to foster a culture of saving and improve people's welfare.

TABUNGAN SINARLAKU *MUDHARABAH*

Merupakan simpanan menggunakan akad *Mudharabah* bagi WNI yang belum memiliki rekening di Bank dan transaksi dapat dilakukan di agen Laku Pandai maupun di Kantor Cabang Bank dengan biaya terjangkau.

TABUNGAN SINARLAKU MUDHARABAH

This is a savings account using a Mudharabah contract for Indonesian citizens who do not have an account at the Bank and transactions can be made at Laku Pandai agents or at Bank Branch Offices at affordable fees.

GIRO *WADIAH* DAN *MUDHARABAH*

Giro hadir dengan akad *mudharabah* dan *wadiah* yang diperuntukkan bagi perorangan atau non-perorangan. Penarikan dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, Sarana Perintah Bayar Lainnya atau melalui Pemindahbukuan. Dengan setoran awal yang ringan memberikan kemudahan dalam mengatur keuangan.

GIRO *WADIAH* DAN *MUDHARABAH*

The Giro comes with mudharabah and wadiah contracts intended for individuals or non-individuals. Withdrawals can be made at any time using checks, demand deposits, other payment order facilities or through overbooking. With a light initial deposit, it makes it easy to manage finances.

DEPOSITO *MUDHARABAH*

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah*, memberikan bagi hasil yang kompetitif dan jangka waktu yang fleksibel.

MUDHARABAH DEPOSIT

A time deposit in rupiah with a mudharabah contract, providing competitive profit sharing and a flexible tenor.

LAYANAN BANK
BANKING SERVICES

KARTU ATM BRK SYARIAH

Kartu ATM adalah kartu Bank berteknologi *chip* yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh mesin ATM BRK syariah, ATM berlogo Prima dan ATM bersama, EDC BRK Syariah serta *e-channel* BRK Syariah lainnya dalam hal melakukan transaksi penarikan tunai, setor tunai, transfer, pembayaran, dan /atau pembelian. Pilihan jenis kartu ATM BRK Syariah terdiri dari Silver, Gold, Platinum, dan Prioritas

SHARIA BRK ATM CARD

ATM cards are bank cards with chip technology that can be used to access all BRK sharia ATM machines, ATMs bearing the Prima logo and ATM Bersama, BRK Syariah EDC and other BRK Syariah e-channels in terms of making cash withdrawals, cash deposits, transfers, payments and transactions. and/or purchases. The choice of BRK Syariah ATM card types consists of Silver, Gold, Platinum and Priority.

EDC BRK SYARIAH

Adalah Layanan *Elektronic Data Capture* (EDC) bagi merchant yang dapat berfungsi sebagai mini ATM dengan berbagai fitur seperti transfer, pembayaran, pembelian, informasi saldo rekening tabungan, dan fitur pembelanjaan khusus Kartu ATM BRK Syariah.

EDC BRK SHARIA

Is an Electronic Data Capture (EDC) service for merchants that can function as a mini ATM with various features such as transfers, payments, purchases, information on savings account balances, and special shopping features for BRK Syariah ATM Cards.

BRKS MOBILE

yaitu layanan *mobile banking* bagi nasabah perorangan dengan berbagai fitur yang dapat memberikan kemudahan bertransaksi kapanpun dan dimanasaja seperti fitur pembayaran *QRIS*, transfer, pembayaran dan pembelian serta fitur informasi lainnya.

BRKS MOBILE

namely a mobile banking service for individual customers with various features that can provide convenience for transactions anytime and anywhere such as QRIS payment features, transfers, payments and purchases as well as other information features.

Dalam perkembangannya, BRK Syariah melakukan:

- Kerjasama dengan Basnaz Kota Batam dan Yayasan Khairul Ummah dalam hal penerimaan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah melalui Aplikasi BRKS *mobile*.
- Penambahan Fitur Aplikasi BRKS *mobile* antara lain Fitur Transfer *BI-FAST*, Fitur Pembayaran *QRIS*, dan Fitur Informasi Rekening.

In its development, BRK Syariah conducts:

- *Collaboration with Basnaz of Batam City and the Khairul Ummah Foundation in terms of receiving Zakat, Infaq and Alms payments through the BRKS mobile application.*
- *Additional Features of the BRKS mobile Application include the BI-FAST Transfer Feature, the QRIS Payment Feature, and the Account Information Feature.*

SMS *BANKING* BRK SYARIAH

Merupakan produk layanan Bank yang diperuntukkan bagi nasabah guna mempermudahkan dalam menerima informasi terkait transaksi keuangan.

BRK SYARIAH SMS BANKING

Is a Bank service product intended for customers to make it easier to receive information related to financial transactions.

BRKS QRIS

Layanan penerimaan transaksi pembayaran *QRIS* bagi *merchant* BRKS *QRIS* dan fitur layanan transaksi pembayaran *QRIS* bagi nasabah melalui Aplikasi BRKS *mobile*.

BRKS QRIS

QRIS payment transaction acceptance service for BRKS QRIS merchants and QRIS payment transaction service features for customers through the BRKS mobile application.

BRK Syariah telah mendapatkan izin *QRIS* secara permanen berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor 24/474/DKSP/Srt/B tanggal 12 Desember 2022 Perihal: Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesia Standard*) – *Merchant Presented Mode* (*QRIS* MPM) dan Kerjasama dengan PT Rintis Sejahtera.

- **Layanan QRIS MPM bagi *Merchant***
  Yaitu layanan menjadi *merchant QRIS* bagi *merchant* (penyedia barang dan/atau jasa perorangan maupun non perorangan) sehingga dapat menerima transaksi pembayaran *QRIS* dari pelanggannya. *Merchant* yang telah terdaftar sebagai merchant *QRIS* BRK Syariah dapat menerima transaksi pembayaran *QRIS* dari seluruh aplikasi pembayaran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang telah memiliki fitur *QRIS* MPM.
- **Layanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Via *QRIS* MPM**
  BRK Syariah sangat mendukung program pemerintah khususnya dalam hal Elektorifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satunya adalah Layanan Penerimaan Pajak Daerah menggunakan *QRIS*, yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah Lainnya, *E*-KIR, retribusi rumah potong hewan, Pajak Air Permukaan, dan retribusi lainnya melalui *QRIS*. Saat ini BRK Syariah telah bekerjasama secara *host to host* dengan seluruh pemerintah Daerah Kab/Kota Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam hal penerimaan pajak daerah dan retribusi dengan memanfaatkan *QRIS* MPM Dinamis, dimana nominal pajak atau retribusi yang akan dibayar oleh wajib pajak telah sesuai dengan data yang ada di sistem Pemda serta otomatis akan ter-*flaging* dan

BRK Syariah has obtained a permanent QRIS license based on Bank Indonesia letter Number 24/474/DKSP/Srt/B dated 12 December 2022 Subject: Approval for the Implementation of Payment Transaction Processing Activities Using the National Standard QR Code Payment (Quick Response Code Indonesia Standard) – Merchant Presented Mode (QRIS MPM) and Collaboration with PT Rintis Sejahtera.

- ***QRIS MPM service for Merchants***
  Namely the service of becoming a QRIS merchant for merchants (individual and non-individual goods and/or service providers) so that they can accept QRIS payment transactions from their customers. Merchants who have been registered as QRIS BRK Syariah merchants can receive QRIS payment transactions from all Payment Service Provider (PJP) payment applications that already have the QRIS MPM feature.
- ***Local Tax and Retribution Services Via QRIS MPM***
  BRK Syariah is very supportive of government programs, especially in terms of Electorification of Local Government Transactions (ETPD). One of them is the Regional Tax Revenue Service using QRIS, which allows the public to be able to carry out their obligations to pay local taxes and fees such as Land and Building Tax (PBB), Other Regional Taxes, E-KIR, slaughterhouse fees, Surface Water Tax, and user fees. others through QRIS. At present BRK Syariah has collaborated on a host to host basis with all Regional Governments of the Regency/City of the Riau and Riau Islands Region in terms of local tax revenue and levies by utilizing the Dynamic QRIS MPM, where the nominal tax or levies to be paid by the taxpayer is in accordance with the data provided. is in the Regional Government system and will automatically be flagged and recorded.

tercatat.

- Kerjasama *Host to Host* Penerimaan E-KIR Dumai, E-KIR-Siak, Retribusi Tempat Khusus Parkir Dumai melalui QRIS
  - Kerjasama *Host to Host* Penerimaan PBB Kab. Kuansing dan Kab. Lingga
  - Kerjasama *Host to Host* Penerimaan Pajak Daerah Lainnya Kab. Kampar, Meranti, Natuna, Lingga, dan Anambas

- *Host to Host Cooperation Reception of Dumai E-KIR, E-KIR-Siak, Dumai Special Parking Area Retribution via QRIS*
  - *Host to Host Cooperation UN Acceptance Kab. Kuansing and Kab. Phallus*
  - *Host to Host Cooperation Other Local Tax Revenue Kab. Kampar, Meranti, Natuna, Lingga, and Anambas*

CASH MANAGEMENT SYSTEM

Fitur transaksi *real time* yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. CMS memberikan keleluasaan kepada nasabah/ *Corporate* untuk melakukan transaksi secara *online* antar rekening sesama BRK Syariah dan/atau dari rekening BRK Syariah ke rekening Bank lain.

CASH MANAGEMENT SYSTEM

Real time transaction features that can be done anytime and anywhere. CMS gives flexibility to customers/Corporates to conduct online transactions between fellow Sharia BRK accounts and/or from Sharia BRK accounts to other Bank accounts.

Dalam perkembangannya, BRK Syariah melakukan:
- Penambahan Fitur Transfer *BI-Fast* di layanan *CMS* BRK Syariah.
- Implementasi Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri dengan Bank Riau Kepri Syariah Versi 1.4.1 dengan *Piloting* Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
- Penjajakan dan Pendampingan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri untuk integrasi FMIS SIMDA V.5 BPKP dengan sistem *SP2D Online/ CMS* BRK Syariah.
- NDA kerjasama P2P *lending* dengan PT Alami Fintek Syaria, PT Ethis Fintek Indonesia, dan PT Dana syariah Indonesia.

In its development, BRK Syariah conducts:
- *Addition of the BI-Fast Transfer Feature to the BRK Syariah CMS service.*
- *Implementation of Integration of the Regional Government Information System (SIPD) belonging to the Ministry of Home Affairs with Bank Riau Kepri Syariah Version 1.4.1 with the Piloting of the Regional Government of Riau Province and the Regional Government of Lingga Regency.*
- *Exploration and Assistance of the Riau Islands Provincial Government for the integration of FMIS SIMDA V.5 BPKP with the SP2D Online system / BRK Syariah CMS.*
- *NDA P2P lending collaboration with PT Alami Fintek Syaria, PT Ethis Fintek Indonesia, and PT Dana Syariah Indonesia.*

E-MONEY

Suatu alat pembayaran elektronik prabayar yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang bekerjasama dengan BRK Syariah dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk pembayaran transaksi pada *Merchant* tertentu yang bersifat *Offline*.

E-MONEY

A prepaid electronic payment instrument issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in collaboration with BRK Syariah where a certain monetary value is attached to it which can be topped up and can be used to pay transactions at certain Merchants who are Offline.

SAFE DEPOSIT BOX

Merupakan fasilitas layanan penyimpanan bagi nasabah untuk menyimpan barang maupun dokumen berharga dengan sistem keamanan yang dirancang secara khusus dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap barang berharga dan dokumen dari bahaya kebakaran, pencurian dan risiko kehilangan.

SAFE DEPOSITE BOX

It is a storage service facility for customers to store valuable goods and documents with a specially designed security system to provide maximum protection for valuables and documents from the dangers of fire, theft and risk of loss.

PRODUK KOMERSIAL
COMMERCIAL PRODUCTS

Produk sebelum Konversi
Product before Conversion

KREDIT ATAS DASAR KONTRAK

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang berbadan usaha yang bergerak di bidang pembangunan fisik, *engineering* dan penyediaan barang dan jasa dengan sistem transaksional dan *standby plafond* dengan underlying kontrak dari Pemilik Pekerjaan.

FINANCING ON A CONTRACT BASIS

Financing given to customers who are business entities engaged in physical development, engineering and supply of goods and services with a transactional system and a standby ceiling with an underlying contract from the Employer.

KREDIT MODAL KERJA

Kredit yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar.

WORKING CAPITAL FINANCING

Financing given to individuals or business entities to meet the needs of current assets.

KREDIT INVESTASI

Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap, baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitasi dan relokasi.

INVESTMENT FINANCING

Financing granted to Business Entities with the aim of financing the procurement of fixed assets, both for new businesses, expansion, rehabilitation and relocation.

KREDIT SINDIKASI

Kredit yang diberikan oleh dua bank/ lembaga keuangan atau lebih atas dasar syarat dan ketentuan kredit (*terms and conditions*) yang sama, dituangkan dalam perjanjian kredit dan diadministrasikan/ dimonitor oleh *agent bank* (agen).

SYNDICATION FINANCING

Financing provided by two or more banks/ financial institutions on the basis of the same financing terms and conditions, set forth in a financing agreement and administered/monitored by a bank agent (agent).

BANK GARANSI

Surat berharga (surat jaminan) yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, kewajiban mana bersifat kontigensi yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dan prestasi dimasa yang akan datang.

BANK GUARANTEE

Securities (guarantee letters) issued by Commercial Banks/other Financial Institutions to parties receiving guarantees that the Bank will pay a certain amount of money to them at a certain time if the guaranteed party cannot fulfill its obligations, which obligations are contingent in nature which arise depending on the occurrence or non-occurrence of one or more future events and achievements.

PRODUK KOMERSIAL UNIT USAHA SYARIAH

SHARIA BUSINESS UNIT COMMERCIAL PRODUCTS

PEMBIAYAAN KOMERSIAL iB

Pembiayaan Komersial iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang bergerak pada sektor perdagangan, jasa, industri *manufacturing*/pabrikasi, agro industri, peternakan, konstruksi, pengembangan kawasan industri/ perumahan, dan sektor ekonomi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja baik atas dasar kontrak maupun non kontrak.

iB COMMERCIAL FINANCING

iB Commercial Financing is financing provided to individuals or business entities engaged in the trade, service, manufacturing/fabrication industry, agro-industry, livestock, construction, industrial/housing area development, and other economic sectors in order to meet investment and/or financing needs. or working capital either on a contract or non-contract basis.

PEMBIAYAAN SINDIKASI

Pembiayaan Sindikasi adalah akad atau perjanjian antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah, maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.

SINDICATION FINANCING

Syndicated Financing is a contract or agreement between several financial institutions, either among fellow Islamic Financial Institutions, or between Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions, in order to jointly finance certain projects.

Produk setelah Konversi
Product after Conversion

PEMBIAYAAN ATAS DASAR KONTRAK

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang berbadan usaha yang bergerak dibidang pembangunan fisik, *engineering* dan penyediaan barang dan jasa dengan sistem Transaksional dan *Standby Plafond* dengan underlying kontrak dari Pemilik Pekerjaan.

FINANCING ON A CONTRACT BASIS

Financing facilities provided to customers who are business entities engaged in physical development, engineering and the supply of goods and services with a Transactional system and Standby Ceiling with an underlying contract from the Employer.

PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar.

WORKING CAPITAL FINANCING

Financing facilities provided to individuals or business entities to meet the needs of current assets.

PEMBIAYAAN INVESTASI

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Badan Usaha dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitasi dan relokasi.

INVESTMENT FINANCING

Financing facilities provided to Business Entities with the aim of financing the procurement of fixed assets for new businesses, expansion, rehabilitation and relocation.

PEMBIAYAAN SINDIKASI

Pembiayaan Sindikasi adalah akad atau perjanjian antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah, maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama

SINDICATION FINANCING

Syndicated Financing is a contract or agreement between several financial institutions, both among fellow Islamic Financial Institutions, as well as between Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions, in order to jointly finance certain projects.

BANK GARANSI

Surat berharga (surat jaminan) yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, kewajiban mana bersifat kontigensi yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dan prestasi dimasa yang akan datang.

BANK GUARANTEE

Securities (guarantee letters) issued by Commercial Banks/other Financial Institutions to parties receiving guarantees that the Bank will pay a certain amount of money to them at a certain time if the guaranteed party cannot fulfill their obligations, which obligations are contingent in nature which arise depending on the occurrence or non-occurrence of one or more future events and achievements.

SKBDN

Janji tertulis dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang diterbitkan oleh Bank pembuka (*Issuing Bank*) atas instruksi dari pemohon (*Applicant*) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima (*Beneficiary*) sepanjang syarat dan kondisi yang tercantum di dalam SKBDN terpenuhi.

SKBDN

A written and irrevocable promise issued by the issuing bank (Issuing Bank) on instructions from the applicant (Applicant) to pay a sum of money to the beneficiary (Beneficiary) as long as the terms and conditions stated in the SKBDN are met.

LETTER OF CREDIT

Perjanjian yang diterbitkan oleh bank (*Issuing Bank*) yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen export impor yang dikirimkan oleh penerima L/C.

LETTER OF CREDIT

An agreement issued by a bank (Issuing Bank) that acts at the request of its customers to make payments on export-import documents sent by L/C recipients.

SUPPLY CHAIN FINANCING

Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Badan Usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum serta Badan Layanan Umum yang memiliki tagihan (*invoice*) kepada Principal sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak/ Perjanjian.

SUPPLY CHAIN FINANCING

Financing facilities provided to Business Entities, both legal entities and non-legal entities as well as Public Service Agencies that have invoices to the Principal as stated in the Contract/Agreement.

PRODUK MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
MICRO, SMALL, AND MEDIUM PRODUCTS

Produk sebelum Konversi
Product before Conversion

KREDIT PENGUSAHA MIKRO

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro secara perseorangan dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.

MICRO ENTREPRENEUR FINANCING

Financing given to individual micro-entrepreneurs with the aim of productive business, both for working capital and investment.

KREDIT PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil & menengah perseorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.

SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS LOANS

Financing given to individual small & medium entrepreneurs, companies and cooperatives with the aim of productive businesses, both for working capital and investment.

KREDIT AGRIBISNIS KELAPA SAWIT

Kredit Agribisnis Replanting Kelapa Sawit adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dalam rangka penanaman kembali kebun kelapa sawit yang digunakan untuk peremajaan kebun.

PALM OIL AGRIBUSINESS FINANCING

Oil Palm Replanting Agribusiness financing is a loan given to prospective borrowers in the context of replanting oil palm plantations that are used for plantation rejuvenation.

KREDIT USAHA RAKYAT

Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit program pemerintah untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi bagi perseorangan dan/atau kelompok usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

PEOPLE'S BUSINESS FINANCING

People's Business financing is a government program loan for working capital and/or investment needs for individuals and/or productive business groups who are eligible but do not yet have additional collateral or insufficient additional collateral.

PRODUK KOMERSIAL UNIT USAHA SYARIAH

PEMBIAYAAN UMKM iB

Pembiayaan UMKM iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal Kerja dan/atau investasi.

SHARIA BUSINESS UNIT COMMERCIAL PRODUCTS

iB MSME FINANCING

iB UMKM Financing is financing provided to micro, small and medium entrepreneurs engaged in the economic sector that does not conflict with sharia principles and laws and regulations in order to meet working capital and/or investment needs.

Produk setelah Konversi
Product after Conversion

PEMBIAYAAN PENGUSAHA MIKRO

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro secara perseorangan dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FINANCING MICRO ENTREPRENEURS

Financing provided to individual micro-entrepreneurs with the aim of productive business, both for working capital and investment that does not conflict with sharia principles and applicable laws and regulations.

PEMBIAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil & menengah perseorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FINANCING SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURS

Financing provided to individual small & medium entrepreneurs, companies and cooperatives with the aim of productive business, both for working capital and investment that does not conflict with sharia principles and applicable laws and regulations.

PEMBIAYAAN AGRIBISNIS KELAPA SAWIT

Pembiayaan Agribisnis Replanting Kelapa Sawit adalah Pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dalam rangka penanaman kembali kebun kelapa sawit yang digunakan untuk peremajaan kebun.

FINANCING PALM OIL AGRIBUSINESS

Oil Palm Agribusiness Replanting Financing is financing provided to prospective customers in the context of replanting oil palm plantations that are used for plantation rejuvenation.

KUR iB

Merupakan fasilitas Pembiayaan KUR dengan prinsip syariah untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi bagi perseorangan dan/atau kelompok usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

KUR iB

Is a KUR financing facility with sharia principles for working capital and/or investment needs for individuals and/or productive business groups who are eligible but do not yet have additional collateral or insufficient additional collateral.

PRODUK KONSUMER
CONSUMER PRODUCTS

Produk sebelum Konversi
Product before Conversion

KREDIT ANEKA GUNA

Kredit Aneka Guna BRK adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berpenghasilan tetap (ASN, CPNS, Pegawai BUMN/ BUMD, Pegawai tetap perusahaan swasta, dll) dan pekerja profesi (dokter, notaris, dll) untuk berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain pendidikan, pernikahan, kesehatan dan lain-lain.

MULTIPURPOSE FINANCING

BRK Aneka Guna Financing is a financing facility provided to fixed-income customers (ASN, CPNS, BUMN/BUMD employees, permanent employees of private companies, etc.) and professional workers (doctors, notaries, etc.) for various consumptive needs, including education, marriage, health and others.

KREDIT ANEKA GUNA PRA PENSIUN DAN PENSIUN

Kredit Aneka Guna Pra Pensiun dan pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan tujuan konsumtif, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau maksimal dalam waktu 5 tahun ke depan akan memasuki usia pensiun normal dan pensiunan.

MULTIPURPOSE AND PREPENSION LOANS

Multipurpose Pre-Retirement and Pension financing are financing facilities provided with consumptive purposes, given to State Civil Apparatuses (ASN) who have entered the retirement preparation period (MPP) or a maximum of the next 5 years will enter normal retirement age and retire.

KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

Merupakan kreditkepemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA)

PROSPER HOUSE OWNERSHIP FINANCING FLPP

This is a housing financing with the support of housing finance liquidity facilities for Low-Income Communities (MBR) whose management is carried out by the Public Housing Savings Management Agency (BP TAPERA)

KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH

Kepemilikan Rumah diberikan kepada perorangan untuk membeli tanah dan atau bangunan/ renovasi Rumah, Ruko, Rusun, Apartemen baik melalui *developer*, *non developer* atau membangun sendiri (swadaya) dan juga take *over* (pengambilalihan dari bank lain).

HOME OWNERSHIP FINANCING

Home ownership is given to individuals to buy land and/or buildings/renovate houses, shophouses, flats, apartments either through developers, non-developers or build their own (self-help) and also take over (takeover from other banks).

KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat, baik kendaraan baru atau kendaraan lama (bekas)

MOTOR VEHICLE FINANCING

Financing given to individual customers to finance the ownership of two-wheeled and four-wheeled vehicles, either new or old (used) vehicles

KARTU KREDIT BRKS

Kartu Kredit *Cobranding* dengan Bank Mega yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelanjaan pada tempat-tempat yang berlogo Mastercard. Dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai melalui ATM yang berlogo Mastercard

BRKS CREDIT CARD

Co-branding Financing Card with Bank Mega which functions to make shopping transactions at places bearing the Mastercard logo. Can be used to make cash withdrawal transactions through ATMs bearing the Mastercard logo

PRODUK KONSUMER UNIT USAHA SYARIAH

SHARIA BUSINESS UNIT CONSUMER PRODUCTS

PEMBIAYAAN ANEKA GUNA

Pembiayaan Aneka Guna BRK Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berpenghasilan tetap (ASN, CPNS, Pegawai BUMN/ BUMD, Pegawai tetap perusahaan swasta, dll) dan pekerja profesi (dokter, notaris, dll) untuk berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain pendidikan, pernikahan, kesehatan dan lain-lain.

MULTIPURPOSE FINANCING

BRK Syariah Aneka Guna Financing is a financing facility provided to fixed-income customers (ASN, CPNS, BUMN/BUMD employees, permanent employees of private companies, etc.) and professional workers (doctors, notaries, etc.) for various consumptive needs, including education , marriage, health and others.

PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

PROSPEROUS HOUSE OWNERSHIP FINANCING FLPP

This is home ownership financing with the support of housing finance liquidity facilities for Low-Income Communities (MBR), whose management is carried out by the Public Housing Savings Management Agency (BP TAPERA).

PEMBIAYAAN *RAHN* EMAS

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta (emas) nasabah yang mengikuti prinsip gadai.

RAHN EMAS FINANCING

Financing facilities provided to customers with collateral in the form of customer goods/assets (gold) following the principle of pawning.

PEMBIAYAAN UMRAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan kolektif untuk perjalanan ibadah umrah.

UMRAH FINANCING

Financing facilities provided to individual and collective customers for the Umrah pilgrimage.

Produk setelah Konversi
Product after Conversion

PEMBIAYAAN ANEKA GUNA

Pembiayaan Aneka Guna BRK Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berpenghasilan tetap (ASN, CPNS, Pegawai BUMN/ BUMD, Pegawai tetap perusahaan swasta, dll) dan pekerja profesi (dokter, notaris, dll) untuk berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain pendidikan, pernikahan, kesehatan dan lain-lain.

MULTIPURPOSE FINANCING

BRK Syariah Aneka Guna Financing is a financing facility provided to fixed-income customers (ASN, CPNS, BUMN/BUMD employees, permanent employees of private companies, etc.) and professional workers (doctors, notaries, etc.) for various consumptive needs, including education , marriage, health and others.

PEMBIAYAAN ANEKA GUNA PRA PENSIUN DAN PENSIUN

Pembiayaan Aneka Guna Pra Pensiun dan pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan tujuan konsumtif, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau maksimal dalam waktu 5 tahun ke depan akan memasuki usia pensiun normal dan pensiunan.

MULTIPLE USE FINANCING PRE-PENSION AND PENSION

Multipurpose Pre-Retirement and Pension Funding is a financing facility provided for consumptive purposes, given to State Civil Apparatuses (ASN) who have entered the retirement preparation period (MPP) or a maximum of the next 5 years will enter the normal retirement age and retiree.

PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA FLPP

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

PROSPEROUS HOUSE OWNERSHIP FINANCING FLPP

This is home ownership financing with the support of housing finance liquidity facilities for Low-Income Communities (MBR), whose management is carried out by the Public Housing Savings Management Agency (BP TAPERA).

PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH

Kepemilikan Rumah diberikan kepada perorangan untuk membeli tanah dan atau bangunan/ renovasi Rumah, Ruko, Rusun, Apartemen baik melalui developer, non developer atau membangun sendiri (swadaya) dan juga *take over* (pengambilalihan dari bank lain).

HOME OWNERSHIP FINANCE

Home ownership is given to individuals to buy land and/or buildings/renovate houses, shophouses, flats, apartments either through developers, non-developers or build their own (self-help) and also take over (takeover from other banks).

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat, baik kendaraan baru atau kendaraan lama (bekas).

MOTORIZED VEHICLE FINANCING

A financing facility provided to individual customers to finance the ownership of two-wheeled and four-wheeled vehicles, both new and old (used) vehicles.

PEMBIAYAAN *RAHN* EMAS

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa barang/harta (emas) nasabah yang mengikuti prinsip gadai.

GOLD RAHN FINANCING

Financing facilities provided to customers with collateral in the form of customer goods/assets (gold) following the principle of pawning.

PEMBIAYAAN UMRAH

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan kolektif untuk perjalanan ibadah umrah.

UMRAH FINANCING

Financing facilities provided to individual and collective customers for the Umrah pilgrimage.

BSI HASANAH *CARD* BRK SYARIAH

Merupakan kartu pembiayaan BRKS *Cobranding* dengan BSI dengan prinsip syariah yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelanjaan pada tempat-tempat yang berlogo Mastercard. Dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai melalui ATM yang berlogo Mastercard

BSI HASANAH CARD BRK SYARIAH

It is a BRKS Cobranding financing card with BSI with sharia principles that functions to make shopping transactions at places bearing the Mastercard logo. Can be used to make cash withdrawal transactions through ATMs bearing the Mastercard logo

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
Vision, Mission, and Corporate Culture

"BRK Syariah merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi yang baru sejak mengemban amanah sebagai bank umum syariah."

"BRK Syariah formulates and establishes a new Vision and Mission since carrying out the mandate as a sharia commercial bank."

VISI *Vision*

"Mewujudkan Bank Syariah yang Inklusif, *Resilient*, dan Modern Pilihan Utama Masyarakat yang Berkontribusi Signifikan terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan".

"Creating an Inclusive, Resilient and Modern Sharia Bank, the Community's Top Choice that Contributes Significantly to Sustainable Regional Development".

MISI *Mission*

- Mendorong pertumbuhan perekenomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional;
- *Encouraging sustainable regional economic growth towards national economic development;*
- Memberikan solusi layanan keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi;
- *Providing sharia-based financial service solutions with technology support;*
- Memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat;
- *Strengthening the development of micro, small and medium enterprises to achieve people's welfare;*
- Mengelola dana daerah dan dunia usaha nasional secara optimal dan professional;
- *Manage regional funds and the national business world optimally and professionally;*
- Mengembangkan SDI Berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai-nilai syariah universal.
- *Developing Qualified Human Resources who are ready to face the transformation in universal sharia values.*

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

VISION AND MISSION REVIEW BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2022 Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik telah melakukan kajian terhadap Visi dan Misi Bank yang tertuang dalam *Corporate Plan* Bank Riau Kepri tahun 2022-2026 dan telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan kembali Visi dan Misi Bank sejalan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah. *Corporate Plan* Bank Riau Kepri tahun 2022-2026 telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

In 2022 the Board of Directors and Board of Commissioners have periodically reviewed the Bank's Vision and Mission contained in the Corporate Plan of Bank Riau Kepri for 2022-2026 and has been included in the Bank's Business Plan (RBB) for 2022-2024. The Board of Commissioners and Directors reformulated the Bank's Vision and Mission in line with the change in business activities to become a Sharia Commercial Bank. The Corporate Plan of Bank Riau Kepri for 2022-2026 has been approved by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.

NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE VALUES AND CULTURE

NILAI-NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, BRK Syariah merumuskan nilai-nilai perusahaan, yang merupakan Filosofi atau Pernyataan Korporat berupa pernyataan perilaku utama sebagai berikut:

In order to support the achievement of the Company's Vision and Mission, BRK Syariah formulates corporate values, which are Philosophy or Corporate Statements in the form of main behavioral statements as follows:

Perubahan Nilai Budaya dari ISCPE menjadi ISHARE :
Changes in Cultural Values from ISCPE to ISHARE:

Teguh *Firm* ← Integritas *Integrity* → 1. Jujur dan Berkomitmen *Honest and Committed*

Utuh *Whole* ← Sinergi *Synergy* → 2. Bekerjasama, Saling Menghargai, dan Mendukung. *Collaborate, Respect and Support.*; 3. Berpikir Positif. *Think positively.*

Fokus pada Pelanggan *Customer Focus* → 4. Peduli, Proaktif, dan Cepat Tanggap *Caring, Proactive, and Responsive*; 5. Tulus Ikhlas *Sincere*; 6. Berorientasi pada Solusi Terbaik *Oriented to the Best Solution*

Tumbuh *Grow* ← Profesionalisme *Professionalism* → 7. Kompeten dan Bertanggung Jawab *Competent and Responsible*; 8. Bekerja Cerdas, Efektif, & Efisien. *Work Smart, Effective, & Efficient.*

Unggul *Excellence* → 9. Kreatif, Inovatif, dan Bernilai Tambah *Creative, Innovative and Value Added*; 8. Memberikan Hasil Terbaik *Provides the Best Results*

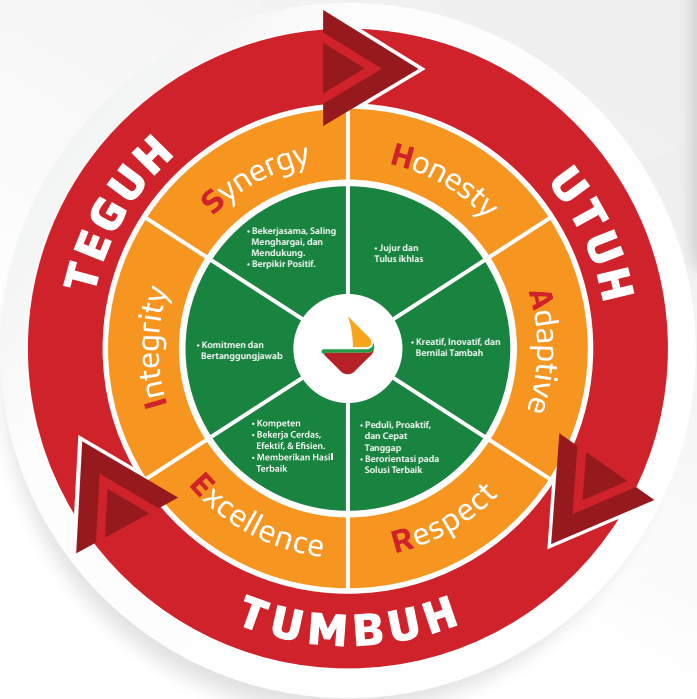

BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE

Sejak tahun 2021 BRK Syariah telah melakukan penajaman budaya perusahaan sejak tahap persiapan konversi menjadi bank syariah guna menyatukan pola pikir dan gerak langkah khususnya pegawai sebagai ujung tombak institusi bank.

Penjabaran pernyataan budaya perusahaan (*corporate culture statement*) BRK Syariah tetap bersumber dari filosofi Bank yang sudah ditumbuhkembangkan di setiap BRK Syariah, yaitu: "Teguh, Utuh, Tumbuh". Dari pernyataan budaya perusahaan tersebut, dijabarkan ke dalam "nilai-nilai budaya Bank Riau Kepri Syariah" yang menjadi landasan dan pedoman setiap insan dalam berpikir, bertindak dan berperilaku melaksanakan aktivitas keseharian.

Since 2021 BRK Syariah has been sharpening its corporate culture since the preparatory stage for conversion to become an Islamic bank in order to unify the mindset and steps, especially employees as the spearhead of the banking institution.

The elaboration of the BRK Syariah corporate culture statement still originates from the Bank's philosophy which has been developed in each Sharia BRK, namely: "Tough, Whole, Growing". From the corporate culture statement, it is translated into "Bank Riau Kepri Syariah cultural values" which become the foundation and guideline for every human being in thinking, acting and behaving in carrying out daily activities.

Budaya BRK Syariah dikenal dengan akronim "I SHARE" yaitu:
BRK Syariah culture is known by the acronym "I SHARE" namely:

INTEGRITY

1. Komitmen & bertanggungjawab
   Honest and Committed

SYNERGY

1. Bekerjasama, saling menghargai dan mendukung
   Cooperate, respect and support each other
2. Berpikir positif
   Think positive

HONESTY

4. Jujur dan tulus ikhlas
   Honest and sincere

ADAPTIVE

5. Kreatif, Inovatif dan bernilai tambah
   Creative, Innovative and added value

RESPECT

1. Peduli, proaktif dan cepat tanggap
   Caring, proactive and responsive
2. Berorientasi pada solusi yang terbaik
   Oriented to the best solution

EXCELLENCE

1. Kompeten
   Competent
2. Bekerja cerdas, efektif dan efisien
   Work smart, effective and efficient
3. Memberikan hasil yang terbaik
   Give the best results

Nilai-nilai budaya tersebut di atas, dijabarkan ke dalam perilaku utama secara nyata yang dapat menjadi landasan dan pedoman bagi insan BRK Syariah dalam berperilaku dan bertindak untuk mengambil keputusan. Proses penajaman nilai-nilai budaya dan Perilaku Utama Insan Bank Riau Kepri Syariah dilakukan melalui kebijakan strategis, kompetisi internal, wawancara dan observasi, *focus grup discussion*, dan survey, menjadi 10 (sepuluh) perilaku utama.

The cultural values mentioned above are translated into real main behaviors that can become the basis and guideline for BRK Syariah personnel in behaving and acting to make decisions. The process of honing cultural values and Main Behaviors of Bank Riau Kepri Syariah Personnel is carried out through strategic policies, internal competitions, interviews and observations, focus group discussions, and surveys, into 10 (ten) main behaviors.

STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure

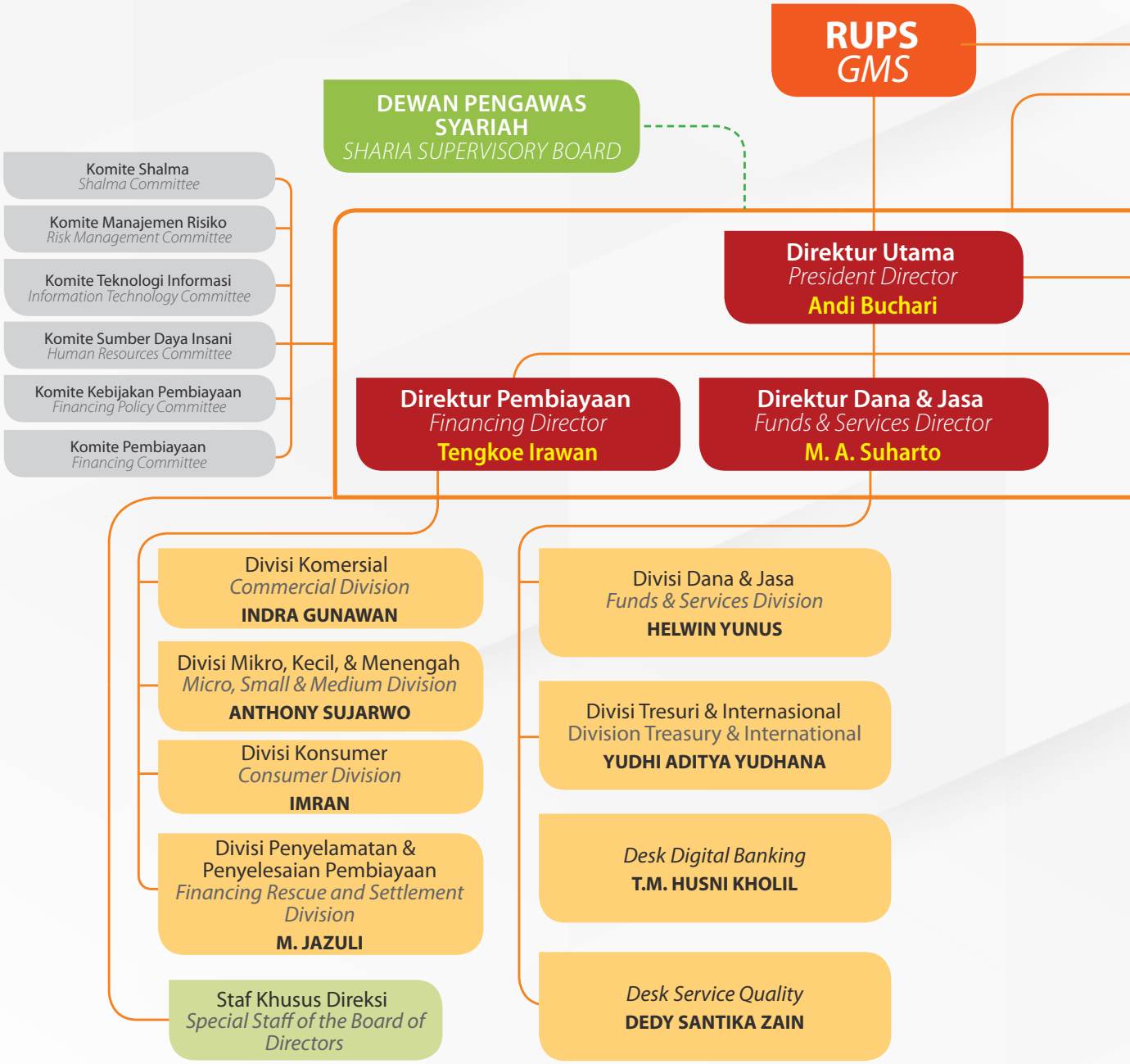

Keterangan| *Explanation* :

Garis Instruksi| *Instruction Line* =

Garis Koordinasi| *Coordination Line* =

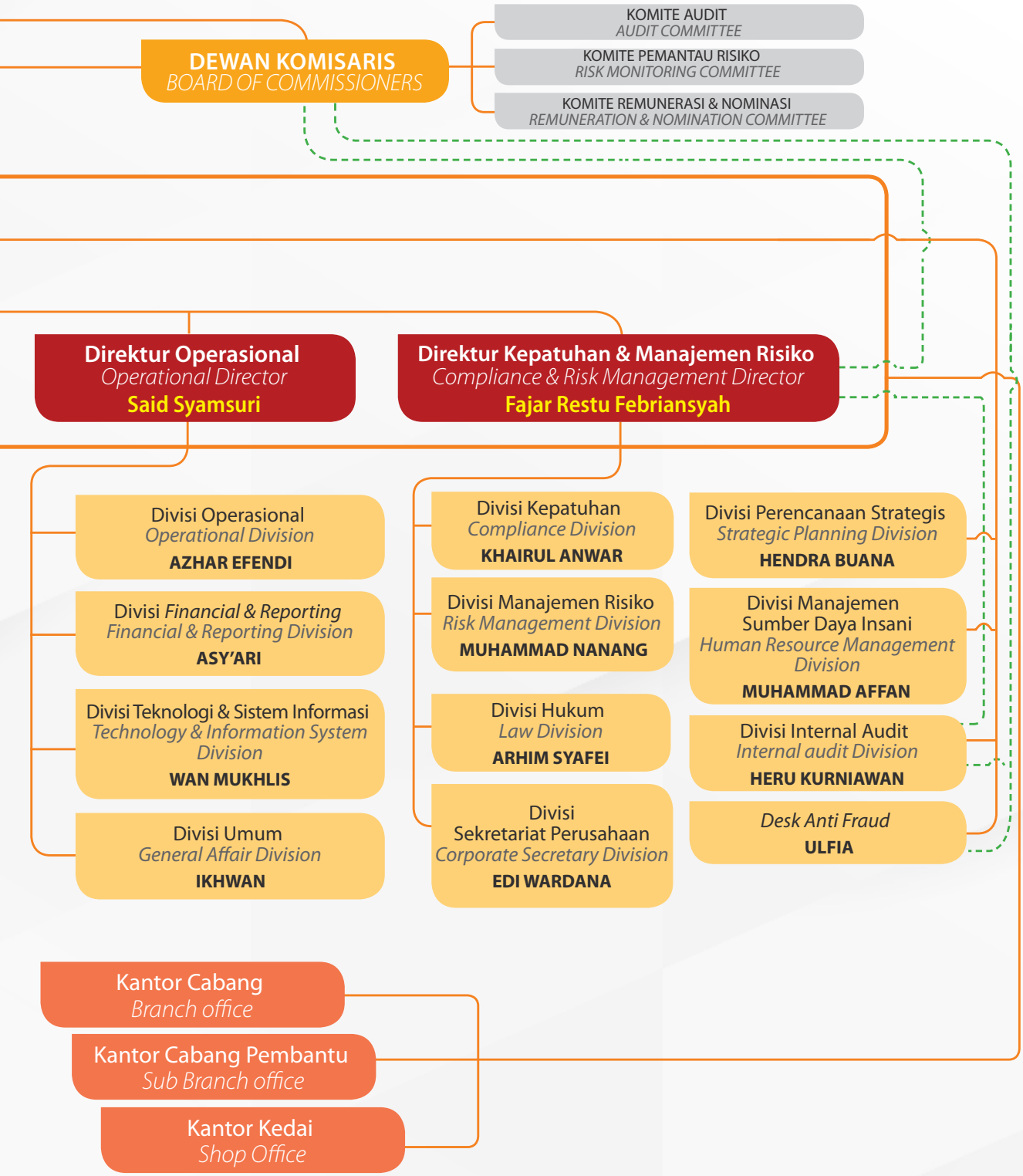
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE
KOMITE REMUNERASI & NOMINASI
REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE
Direktur Operasional
Operational Director
Said Syamsuri
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director
Fajar Restu Febriansyah
Divisi Operasional
Operational Division
AZHAR EFENDI
Divisi Financial & Reporting
Financial & Reporting Division
ASY'ARI
Divisi Teknologi & Sistem Informasi
Technology & Information System Division
WAN MUKHLIS
Divisi Umum
General Affair Division
IKHWAN
Divisi Kepatuhan
Compliance Division
KHAIRUL ANWAR
Divisi Manajemen Risiko
Risk Management Division
MUHAMMAD NANANG
Divisi Hukum
Law Division
ARHIM SYAFEI
Divisi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Division
EDI WARDANA
Divisi Perencanaan Strategis
Strategic Planning Division
HENDRA BUANA
Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
Human Resource Management Division
MUHAMMAD AFFAN
Divisi Internal Audit
Internal audit Division
HERU KURNIAWAN
Desk Anti Fraud
ULFIA
Kantor Cabang
Branch office
Kantor Cabang Pembantu
Sub Branch office
Kantor Kedai
Shop Office

Daftar Nama Pejabat dalam Struktur Organisasi BRK Syariah 2022 *List of Official Names in the 2022 Sharia BRK Organizational Structure*		
Direktur Utama	Andi Buchari	*President director*
Direktur Pembiayaan	Tengkoe Irawan	*Director of Financing*
Direktur Dana & Jasa	M. A. Suharto	*Director of Funds & Services*
Direktur Operasional	Said Syamsuri	*director of Operations*
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Fajar Restu Febriansyah	*Director of Compliance & Risk Management*
Divisi Komersial	Indra Gunawan	*Commercial Division*
Divisi Konsumer	Imran	*Consumer Division*
Divisi Mikro, Kecil & Menengah	Anthony Sujarwo	*Micro, Small & Medium Division*
Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	M. Jazuli	*Financing Recovery & Settlement Division*
Divisi Tresuri & Internasional	Yudhi Aditya Yudhana	*Treasury & International Division*
Divisi Dana & Jasa	Helwin Yunus	*Funds & Services Division*
Divisi Perencanaan Strategis	Hendra Buana	*Strategic Planning Division*
Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	Muhammad Affan	*Human Resource Management Division*
Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Wan Mukhlis	*Information Technology & Systems Division*
Divisi Operasional	Azhar Efendi	*Operational Division*
Divisi *Financial & Reporting*	Asy'ari	*Financial & Reporting Division*
Divisi Umum	Ikhwan	*General Division*
Divisi Kepatuhan	Khairul Anwar	*Compliance Division*
Divisi Manajemen Risiko	Muhamad Nanang	*Risk Management Division*
Divisi Hukum	Arhim Syafei	*Legal Division*
Divisi Sekretariat Perusahaan	Edi Wardana	*Corporate Secretariat Division*
Divisi Internal Audit	Heru Kurniawan	*Internal Audit Division*
Desk Anti *Fraud*	Ulfia	*Anti-Fraud Desk*
Desk *Service Quality*	Dedy Santika Zain	*Desk Service Quality*
Desk *Digital Banking Services*	T.M. Husni Kholil	*Digital Banking Services Desk*

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DEWAN KOMISARIS
Identity and Brief History of The Board of Commissioners

SYAHRIAL ABDI
Komisaris Utama
President Commissioners

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Pekanbaru, 01 Oktober 1975.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Pekanbaru, 01 October 1975.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 1 oleh BSMR (2021).
Riwayat Pendidikan :
- Sarjana jurusan Pemerintahan di STPDN Jatinangor (1994)
- Magister Prodi Manajemen Pemerintah Daerah Universitas Riau, 2004
- Doktor (CAN) bidang Ilmu Pemerintahan di IPDN Jakarta

Pengalaman Kerja :
- Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Riau (2013)
- Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Riau (2013 s/d 2015)
- Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Riau (2015)
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Riau (2015 s/d 2016)
- Pejabat Bupati Kampar (2016 s/d 2017)
- Kepala BPKAD Provinsi Riau (2017 s/d 2020)
- Plt. Kepala Dinas Energi dan SDA Prov. Riau (2017 s/d 2018)
- Plh. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Riau (2018)
- Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Riau (2020)
- Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Riau (2020 - 2021)
- Pejabat Bupati Bengkalis (24 Sep 20 s/d 26 Feb 21)
- Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau (1 Desember 2021 s/d sekarang)
- Komisaris Utama BRK Syariah (15 November 2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022

Periode Menjabat : 15 November 2021 - 14 November 2025 (periode 1).
Jabatan Rangkap : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau.
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.
Kepemilikan Saham di BRK Syariah : -

***Certification**: Level 1 Certification by BSMR (2021).*
***Educational background** :*
- *Bachelor majoring in Government at STPDN Jatinangor (1994)*
- *Master of Regional Government Management Study Program, University of Riau, 2004*
- *Doctor (CAN) in Government Science at IPDN Jakarta*

***Work experience** :*
- *Head of Administration Bureau for People's Welfare, Riau Regional Secretariat (2013)*
- *Head of the Riau Regional Secretariat Economic Administration Bureau (2013 to 2015)*
- *Act. Head of the Riau Regional Secretariat of the Economic and Natural Resources Administration Bureau (2015)*
- *Head of the Department of Energy and Mineral Resources Prov. Riau (2015 to 2016)*
- *Kampar Regent Official (2016 to 2017)*
- *Head of BPKAD Riau Province (2017 to 2020)*
- *Act. Head of the Department of Energy and Natural Resources Prov. Riau (2017 to 2018)*
- *Pls. Head of the Riau Regional Secretariat People's Welfare Administration Bureau (2018)*
- *Act. Assistant for General Administration of the Riau Regional Secretariat (2020)*
- *Assistant for General Administration of the Riau Regional Secretariat (2020)*
- *Bengkalis Regent's official (24 Sep 20 to 26 Feb 21)*
- *Head of the Provincial Revenue Agency Office. Riau (1 December 2021 to present)*
- *President Commissioner of BRK Syariah (15 November 2021 to present).*

***Legal Basis of Appointment**:*
- *Appointed for the first time as President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the shareholder decision statement Deed No.35 dated November 15, 2021 and OJK Letter S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the shareholder decision statement Deed No.17 dated June 14, 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022.*

***Serving Period**: November 15, 2021 - November 14, 2025 (1st period).*
***Multiple Positions**: Head of the Provincial Revenue Agency Riau.*
***Affiliation Relationship**: Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*
***Share Ownership in BRK Syariah**: -*

ROY PRAKOSO

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Jakarta, 5 Januari 1964.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Jakarta, January 5, 1964.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 2 oleh BSMR (2021).

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana bidang Akuntansi dari STIE Malangkucecwara, Malang (1988).
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999).
- Doktor (CAN) bidang Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta.

Pengalaman Kerja :

- *System programmer* di PT Ekspor impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1990 - 1994)
- Analis Kredit komersial kantor pusat di PT Ekspor Impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1994 - 1995)
- Kepala bagian kredit Bank Eksport Impor Indonesia cabang Solo (Bank Mandiri Tbk) (1995-1997)
- *Cash Outlet Manager* di PT Ekspor impor Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1997 - 1999)
- *Section Head of IT Support Credit & Operation Control Division (*PT Bank Mandri Tbk) (1999 – 2001)
- *Project Manager Core Banking System (eMAS)* PT Bank Mandri Tbk (2001 – 2004)
- Tim *Overseas Branch Core Banking System Application Implementation Singapure & Hongkong Branch* PT Bank Mandiri Tbk (2004 – 2010)
- *Business Development* PT Mitra Bisnis (2010 – 2012)
- Direktur PT Mahesa Prima Solusindo (2012 – 2021)
- Komisaris PT Smartec Teknologi Indonesia (2020 – 2021)
- Komisaris Independen BRK Syariah (15November 2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :

- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam Akta No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Periode Menjabat : 15 Nov 2021 - 14 Nov 2025 (Periode 1)*

*Efektif menjabat sejak tanggal 25 Januari berdasarkan surat OJK Nomor S-23/K.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

Jabatan Rangkap : Tidak ada.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah : -

***Certification**: Level 2 Certification by BSMR (2021).*

***Educational background** :*

- *Bachelor's degree in Accounting from STIE Malangkucecwara, Malang (1988).*
- *Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999).*
- *Doctor (CAN) in Management from Pancasila University, Jakarta.*

***Work experience** :*

- *System programmer at PT Export Import Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1990 - 1994)*
- *Head office commercial financing analyst at PT Export Import Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1994 - 1995)*
- *Head of the financing section of the Indonesian Export Import Bank Solo branch (Bank Mandiri Tbk) (1995-1997)*
- *Cash Outlet Manager at PT Export Import Indonesia (Bank Mandiri Tbk) (1997 - 1999)*
- *Section Head of IT Support Financing & Operation Control Division (PT Bank Mandri Tbk) (1999 – 2001)*
- *Project Manager Core Banking System (eMAS) PT Bank Mandiri Tbk (2001 – 2004)*
- *Overseas Branch Core Banking System Application Implementation Team Singapore & Hongkong Branch PT Bank Mandiri Tbk (2004 – 2010)*
- *Business Development PT Business Partners (2010 – 2012)*
- *Director of PT Mahesa Prima Solusindo (2012 – 2021)*
- *Commissioner of PT Smartec Teknologi Indonesia (2020 – 2021)*
- *Independent Commissioner of BRK Syariah (15 November 2021 to present)*

Legal Basis of Appointment:

- *Appointed for the first time as PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Independent Commissioner based on Shareholders' Decision Statement in Deed No.35 dated November 15, 2021 and OJK Letter S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as an Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the shareholder decision statement Deed No.17 dated 14 June 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022.*

***Serving Period**: 15 Nov 2021 - 14 Nov 2025 (Period 1)**

**Effectively served since January 25 based on OJK letter Number S-23/K.053/2022 dated January 25 2022*

***Dual Position** : None.*

***Affiliation Relationship**: Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*

***Share Ownership in BRK Syariah**: -*

RITA ANUGERAH

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Rengat, 27 Maret 1961.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Rengat, 27 March 1961.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 2 oleh BSMR (2018).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Riau (1988).
- *Master of Accountancy and Financial Information System* (MAFIS) dari *Cleveland* State University, Ohio, USA (1994).
- *Doctor Business Administration* (DBA) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (2005).
- Profesor dari Universitas Riau (2019).

Pengalaman Kerja :
- Dosen di fakultas Ekonomi Universitas Riau (1989 - sekarang)
- Sekretaris Program D3 Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995 – 1997)
- Dosen di Program D3 Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995-1996)
- Dosen Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995 - 2012)
- Dosen Program Magister Manajamen Universitas Riau (1994 - Sekarang)
- Dosen Program Profesi Akuntansi Universitas Riau (2004 - sekarang)
- Dosen Program Magister Akuntansi di Universitas Riau (2007 - sekarang)
- Komisaris Independen di BRK Syariah (19 Agustus 2019 - Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Periode Menjabat: 19 Agustus 2019 – 18 Agustus 2023 (Periode 1).

Jabatan Rangkap : Dosen di Universitas Riau

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah : -

***Certification:** Level 2 Certification by BSMR (2018).*

Educational background :
- *Bachelor of Accounting from Riau University (1988).*
- *Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) from Cleveland State University, Ohio, USA (1994).*
- *Doctor of Business Administration (DBA) from Universiti Kebangsaan Malaysia (2005).*
- *A professor from Riau University (2019).*

Work experience :
- *Lecturer at the Faculty of Economics, University of Riau (1989 - present).*
- *Secretary of the D3 Accounting and Taxation Program, Faculty of Economics, University of Riau (1995 - 1997).*
- *Lecturer in the D3 Accounting and Taxation Program, Faculty of Economics, University of Riau (1995-1996).*
- *Lecturer at the Extension Program, Faculty of Economics, University of Riau (1995 - 2012).*
- *Lecturer at the Riau University Management Masters Program (1994-Present).*
- *Lecturer in the Accounting Professional Program at the University of Riau (2004 - present).*
- *Lecturer in the Master of Accounting Program at the University of Riau (2007 - present).*
- *Independent Commissioner at BRK Syariah (Agustus 19, 2019 to present)*

Legal Basis of Appointment:
- *Appointed for the first time as PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Independent Commissioner based on Shareholders' Decision Statement in Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019.*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as an Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the shareholder decision statement Deed No.17 dated 14 June 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022.*

***Serving Period:** 19 August 2019 – 18 August 2023 (Period 1).*

***Dual Position** : Lecturer at he University of Riau.*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*

***Share Ownership in BRK Syariah:** -*

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Identity and Brief History of The Sharia Supervisory Council

ZULHENDRI RAIS

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Padang, 19 Juli 1990.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Padang, July 19, 1990.*

Sertifikasi:

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2019).
- Sertifikasi Pengawas Syariah Lembaga Keuangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI (2019).

Riwayat Pendidikan:

- Sarjana bidang Sunnah dan Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2013).
- Master bidang Sunnah dan Ilmu Hadist, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Omdurman Republik Arab Sudan (2016).
- Doktor dibidang *Islamic Studies* (*Hadeeth and its Sciences*) dari University of Gezira Republik Sudan (2021).

Pengalaman Kerja:

- Tenaga Pengajar/Dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 – sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri (2020 - 2021).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah (2021 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan: Menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 06 tanggal 17 Januari 2020 dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat OJK Nomor S-234/KO.053/2021 tanggal 19 Juni 2021.

Periode Menjabat: 08 April 2020 - 07 April 2024 (Periode 1).

Jabatan Rangkap: Tenaga Pengajar/Dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 – sekarang).

Hubungan Afiliasi: Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah: -

Certification:

- *Sharia Supervisory Board Certification from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) (2019).*
- *Sharia Supervisory Certification for Financial Institutions From the Professional Certification Institute (LSP) DSN-MUI (2019).*

Educational background:

- *Bachelor of Sunnah and Hadith Science, Faculty of Ushuluddin, Al-Azhar University Cairo, Egypt (2013).*
- *Master of Sunnah and Hadith Sciences, Faculty of Ushuluddin, Omdurman Islamic University, the Arab Republic of Sudan (2016).*
- *Doctorate in Islamic Studies (Hadeeth and its Sciences) from the University of Gezira, Republic of Sudan (2021).*

Work experience:

- *Lecturers / Lecturers at the Tarbiyah Faculty of UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 - present).*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri (2020 - 2021).*
- *Chairman of the BRK Syariah Sharia Supervisory Board (2021 - present).*

***Legal Basis for Appointment:** Serving as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Decree of Shareholders Deed No. 06 dated January 17, 2020. and appointed as Chairman of the Sharia Supervisory Board based on OJK Letter Number S-234/KO.053/2021 dated June 19, 2021.*

***Serving Period:** April 08, 2020 - April 07, 2024 (Period 1).*

***Double function :** Lecturers / Lecturers at the Tarbiyah Faculty of UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 - present).*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*

***Share Ownership in BRK Syariah :** -*

SAIFUDDIN YULIAR

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Member

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Kampar, 10 Desember 1972.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Kampar, December 10, 1972.*

Sertifikasi :

- *Accounting* Syariah oleh Muamalah Institute (2005)
- Muamalah Maaliyah Dasar oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2020)
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2021).

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1997)
- Magister Jurusan PMDI dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2000)

Pengalaman Kerja :

- Anggota DPRD Kabupaten Kampar (2009)
- Pemimpin Cabang Asuransi Mubarokah, Pekanbaru (2010)
- Dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah (2021 - sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan : Menjabat anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.16 tanggal 26 Februari 2021 dan Surat OJK No.S-220/KO.053/2021 tanggal 7 Juni 2021.

Periode Menjabat : 07 Juni 2021 – 06 Juni 2025 (Periode 1)

Jabatan Rangkap : Dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015).

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah : -

Certification:

- *Sharia Accounting by Muamalah Institute (2005)*
- *Basic Muamalah Maaliyah by MUI National Sharia Council (2020)*
- *Basic Islamic Banking Education by MUI National Sharia Council (2021)*

Educational background :

- *Bachelor's Degree from Faculty of Sharia and Law Al-Azhar University Cairo Egypt (1997)*
- *Masters in PMDI from UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2000)*

Work experience :

- *Member of DPRD Kampar Regency (2009)*
- *Head of Mubarokah Insurance Branch, Pekanbaru (2010)*
- *Lecturer at UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015)*
- *Member of BRK Syariah Sharia Supervisory Board (2021 - present).*

***Legal Basis for Appointment:** Served as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.16 dated February 26, 2021 and OJK Letter No.S-220/KO.053/2021 dated June 7, 2021.*

***Serving Period:** June 07, 2021 - June 06, 2025 (Period 1)*

***Double function :** Lecturer at UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015).*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*

***Share Ownership in BRK Syariah:** -*

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT DIREKSI
Identity and Brief History of Directors

ANDI BUCHARI
Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia.
Domisili: Pekanbaru, Riau.
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1966.

Citizenship: *Indonesian Citizen.*
Domicile: *Pekanbaru, Riau.*
Place and Date of Birth: *Born in Jakarta, 31 August 1966.*

Sertifikasi:
- *Banking Risk Management Level 5* oleh BSMR *(2004)*
- *Certified Personal Finance (CPF)* oleh FFAI *(2020)*
- *Certified Risk Professional (CRP)* oleh LSPPM-BNSP *(2020)*
- *Certified Professional Human Capital Management (CPHCM) (2021)*
- *Certified Professional Agile Coaching (ICP-ACC) (2022)*
- *Certified Anti Fraud Manager (CAFM) (2022)*

Riwayat Pendidikan:
- Sarjana bidang *Marine Product Technology* dari IPB University (1988)
- Magister Manajemen bidang *Finance* dari Universitas Atmajaya Jakarta (1996).
- Doktor bidang *Strategic Finance* dari Sekolah Bisnis IPB University (2016).

Pengalaman Kerja:
- Kepala Divisi Marketing III, Bank Muamalat (1999).
- Kepala Divisi *Treasury & Investment Banking*, Bank Muamalat (1999 - 2000).
- Kepala Divisi Internal Audit , Bank Muamalat (2000 - 2001).
- *Corporate Secretary*, Bank Muamalat (2001 - 2002).
- Kepala Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut, Riau, Sumbar, Aceh) , Bank Muamalat (2002 - 2004).
- Direktur *Compliance dan Corporate Support*, Bank Muamalat (2004 - 2007).
- Direktur Keuangan dan Administrasi, Bank Muamalat (2007 - 2009).
- *Project Director* Pengembangan Bisnis Internasional, Bank Muamalat (2008 - 2009).
- *Executive Director, First Islamic Investment Bank* (2009).
- Direktur *Risk Management and Compliance*, Bank Muamalat (2009 - 2014).
- Direktur Supervisi Team Anti *Fraud*, Bank Muamalat (2009 - 2014).
- Direktur Supervisi *Baitulmaal*, Bank Muamalat (2009 - 2014).

Certification:
- *Banking Risk Management Level 5 by BSMR (2004)*
- *Certified Personal Finance (CPF) by FFAI (2020)*
- *Certified Risk Professional (CRP) by LSPPM-BNSP (2020)*
- *Certified Professional Human Capital Management (CPHCM) (2021)*
- *Certified Professional Agile Coaching (ICP-ACC) (2022)*
- *Certified Anti Fraud Manager (CAFM) (2022)*

Educational background:
- *Bachelor of Marine Product Technology from IPB University (1988)*
- *Master of Management in Finance from Atmajaya University Jakarta (1996).*
- *Doctorate in Strategic Finance from IPB University Business School (2016)*

Work experience:
- *Marketing Division III Head, Bank Muamalat (1999).*
- *Treasury & Investment Banking Division Head, Bank Muamalat (1999 - 2000).*
- *Divisi Internal Audit Head, Bank Muamalat (2000 - 2001).*
- *Corporate Secretary, Bank Muamalat (2001 - 2002).*
- *Head of Northern Sumatra Region (North Sumatra, Riau, West Sumatra, Aceh), Bank Muamalat (2002 - 2004).*
- *Compliance and Corporate Support Director, Bank Muamalat (2004 - 2007).*
- *Finance and Administration Director, Bank Muamalat (2007 - 2009).*
- *Project Director for International Business Development, Bank Muamalat (2008 - 2009)*
- *Executive Director, First Islamic Investment Bank (2009).*
- *Risk Management and Compliance Director, Bank Muamalat (2009 - 2014).*
- *Supervision of the Anti-Fraud Team Director, Bank Muamalat (2009 - 2014).*
- *Supervision of Baitulmaal Director, Bank Muamalat (2009 - 2014).*

- Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2014 - 2016).
- Direktur PT Bahana Sekuritas (2016 - 2017).
- Komisaris Utama PT Sarana Surakarta Ventura (2015 - 2017).
- Komisaris PT Sarana NTB Ventura (2015 - 2017).
- Komisaris PT Sarana Bali Ventura (2015 - 2017).
- Direktur Utama PT Amanah Mikro Muamalat Indonesia (2017 - 2018).
- Kandidat terpilih Direktur Utama PT Lembaga Keuangan Wakaf Indonesia (2017 - 2018).
- *Senior Advisor Paytrend Group* (2018).
- Komisaris Utama PT Esa Sembilan Group (2018 - 2020).
- Direktur Utama PT Halal Ventures Indonesia (2018 - 2020).
- Direktur Utama BRK Syariah (2020 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan:

- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.14 tanggal 15 September 2020 dan Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 Sept 2020.
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Periode Menjabat: 15 September 2020 - 14 September 2025 (Periode 1)

Jabatan Rangkap: Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afilias: Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah: -

- *President Director of PT Bahana Artha Ventura (2014 - 2016).*
- *Director of PT Bahana Sekuritas (2016 - 2017).*
- *President Commissioner of PT Sarana Surakarta Ventura (2015 - 2017).*
- *Commissioner of PT Sarana NTB Ventura (2015 - 2017).*
- *Commissioner of PT Sarana Bali Ventura (2015 - 2017).*
- *President Director of PT Amanah Mikro Muamalat Indonesia (2017 - 2018).*
- *The candidate was elected President Director of PT Indonesian Wakaf Financial Institutions (2017 - 2018).*
- *Senior Advisor of Paytrend Group (2018).*
- *President Commissioner of PT Esa Sembilan Group (2018 - 2020).*
- *President Director of PT Halal Ventures Indonesia (2018 - 2020).*
- *President Director of BRK Syariah (2020 - present).*

Legal Basis of Appointment:

- *Appointed for the first time as President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Deed of Minutes of Extraordinary GMS No.14 dated 15 September 2020 and OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 dated Sept 30, 2020.*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the shareholder's decision statement Deed No.17 dated June 14, 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022.*

Serving Period: *September 15, 2020 - September 14, 2025 (Term 1)*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*

Share Ownership in BRK Syariah: *-*

TENGKOE IRAWAN

Direktur Pembiayaan

Financing Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Pekanbaru, 9 Oktober 1976.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Pekanbaru, October 9, 1976.*

Sertifikasi: Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2017).

Riwayat Pendidikan:
- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Riau (1999).
- Magister bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Riau (2007).

Pengalaman Kerja: Memulai karir di BRK Syariah sejak November 2000, beberapa posisi yang pernah dijabat di BRK Syariah yaitu:
- Pemimpin Bagian Divisi Treasury & Internasional (2009)
- Pemimpin Bagian Konsumer Divisi Konsumer (2009 - 2010)
- Pemimpin Bagian Divisi Komersial (2010 - 2012)
- Pgs. Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api (2012 - 2013)
- Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api (2013 – 2014)
- Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan (2014)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan (2014)
- Pgs. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2014 - 2015)
- Rangkap jabatan sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen SDM (2016)
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2014 – 2019)
- Direktur Kredit & Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2019 – Agustus 2022)
- Direktur Pembiayaan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) (Agustus 2022 – sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan:
- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Kredit dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 13 tanggal 22 April 2019 dan Surat OJK No. SR-585/KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019.
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Direktur Pembiayaan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022

Periode Menjabat: 22 April 2019 - 21 April 2024 (Periode 1)

Jabatan Rangkap: Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi: Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah: -

***Certification:** Level 5 Certification by BSMR (2017).*

Educational background:
- *Bachelor of Economics in Accounting from the University of Riau (1999).*
- *Masters in Financial Management from the University of Riau (2007).*

***Work experience:** Starting his career at BRK Syariah since November 2000, several positions have been held at BRK Syariah, namely:*
- *Department of Treasury & International Division Head (2009)*
- *Department of Consumer Division Consumer Division Head (2009 - 2010)*
- *Department of Commercial Division Head (2010 - 2012)*
- *Act. of Bagan Siapi-api Branch Manager (2012 - 2013)*
- *Branch Manager of Bagan Api-api (2013 – 2014)*
- *Act. of Compliance Division Head (2014)*
- *Compliance Division Head (2014)*
- *Act. of Head of Strategic Planning Division (2014 - 2015)*
- *Concurrent positions as Acting. Head of HR Management Division (2016)*
- *Strategic Planning Division Head (2014 – 2019)*
- *Financing & Sharia Director PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2019 – August 2022)*
- *Financing Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) (August 2022 – now)*

Legal Basis of Appointment:
- *Appointed for the first time as Finance Director and Sharia of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Statement of Shareholders' Decree No. 13 April 22, 2019 and OJK Letter No. SR-585/KO.053/2019 dated May 16, 2019.*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed Director of Financing at PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the statement of shareholder decision Deed No.17 dated June 14, 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022*

***Serving Period:** April 22, 2019 - April 21, 2024 (Period 1)*

***Multiple Positions:** Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling shareholder.*

***Share Ownership in BRK Syariah:** -*

M. A. SUHARTO

Direktur Dana dan Jasa

Funds and Services Director

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Domisili: Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Metro, 20 Desember 1965.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth: *Born in Metro, December 20, 1965.*

Sertifikasi:
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (2019).
- Sertifikasi *Treasury Dealer*, *Level Advance* oleh LSPP (2021)

Riwayat Pendidikan:
- Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Lampung (1988).

Pengalaman Kerja:
- Memulai karir di Bank Duta sejak 1991 terakhir menjabat *Representative office Head* Lampung.
- Selanjutnya berkarir di Bank Syariah Mandiri jabatan yang pernah dijabat diantaranya:
  - Manager Operasional dan Risiko Pembiayaan Cabang Pamekasan (2000-2001)
  - Kepala Cabang Pamekasan (2001 - 2003).
  - Kepala Cabang Yogyakarta (2003 - 2006).
  - Kepala Cabang Lampung (2006 - 2008).
  - Kepala Cabang Utama Medan (2008 - 2010).
  - *Regional Head Office* Wilayah IV (2010 - 2013).
  - Pemegang Wewenang Memutus Pembiayaan (PWMP) Kantor Pusat (2013- 2014)
- Selanjutnya berkarir di Bank Mega Syariah jabatan yang pernah dipegang diantaranya:
  - Staf Khusus Direksi Bidang *Network & Distibution Head* (2014 - 2015).
  - *Micro and Small Business Group Head* (2015).
  - *Micro and Small & Network Group Head* (2015-2016).
  - *Financing Business & Network Group Head* (2016-2017).
  - *Financing Business Group Head Bank* (2017 - 2018).
  - *Funding Business and Network Group Head* (2017-2018).
  - *Network and Financing Support Group Head*(2018-2019).
  - *Financing Support Group Head* (2019 - 2020).
- Saat ini menjabat Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah (15 September 2020 - sekarang)

Certification:
- *Level 5 Risk Management Certification by LSPP (2019).*
- *Treasury Dealer Certification, Level Advance by LSPP (2021)*

Educational background:
- *Bachelor of Economics from the University of Lampung (1988).*

Work experience:
- *Started his career at Bank Duta since 1991 and last served as Representative office Head Lampung.*
- *Furthermore, he has a career at Bank Syariah Mandiri, positions he has held include:*
  - *Manager of Operations and Risk Financing of Pamekasan Branch (2000-2001)*
  - *Head of Pamekasan Branch (2001 - 2003).*
  - *Head of Yogyakarta Branch (2003 - 2006).*
  - *Head of Lampung Branch (2006 - 2008).*
  - *Head of Medan Main Branch (2008 - 2010).*
  - *Regional Head Office Region IV (2010- 2013).*
  - *Holder of Authority to Decide Financing (PWMP) Head Office (2013 - 2014)*
- *Furthermore, he has a career at Bank Mega Syariah, positions he has held include:*
  - *Special Staff for the Directors in Network & Distribution Head (2014 - 2015).*
  - *Micro and Small Business Group Head (2015).*
  - *Micro and Small & Network Group Head (2015-2016).*
  - *Financing Business & Network Group Head (2016-2017).*
  - *Financing Business Group Head Bank (2017 - 2018).*
  - *Funding Business and Network Group Head (2017-2018).*
  - *Network and Financing Support Group Head(2018-2019).*
  - *Financing Support Group Head (2019 - 2020).*
- *Currently serving as Director of Funds and Services of BRK Syariah (15 September 2020 - present).*

Dasar Hukum Pengangkatan:

- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.14 tanggal 15 September 2020 dan Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020.
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Direktur Dana & Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Periode Menjabat: 15 September 2020 - 14 September 2025 (Periode 1).

Jabatan Rangkap: Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi: Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah: -

Legal Basis of Appointment:

- *Appointed for the first time as Director of Funds & Services at PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Deed of Minutes of Extraordinary GMS No.14 dated September 15, 2020 and OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 dated September 30, 2020.*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as Director of Funds & Services at PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the statement of shareholder decision Deed No.17 dated June 14, 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/ 2022 July 4, 2022.*

Serving Period: *September 15, 2020 - September 14, 2025 (Period 1).*

Multiple Positions: *Does not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in BRK Syariah: *-*

SAID SYAMSURI

Direktur Operasional

Operational Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: lahir di Rengat, 7 Desember 1965.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth:** Born in Rengat, December 7, 1965.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2011).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Riau (1993).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Riau (2012).

Pengalaman Kerja : Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai:
- Pemimpin Divisi Mikro dan Kecil (2008 - 2010)
- Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro (2010 - Juli 2013)
- Staf Direksi (2013 - 2016)
- Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah (2016 - 2019)
- Pemimpin Divisi Syariah (2019 - 2020)
- Direktur Operasional (2020 - Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan:
- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah dan Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Periode Menjabat : 15 September 2020 - 14 September 2025 (Periode 1)

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah: -

***Certification:** Level 5 Certification by BSMR (2011).*

Educational background :
- *Bachelor of Accounting from Riau University (1993).*
- *Master of Management from the University of Riau (2012).*

***Work experience :** Joined BRK Syariah starting in 1994. Several positions he has held include:*

- *Head of Micro and Small Division (2008 - 2010)*
- *Head of Consumer & Micro Division (2010 - July 2013)*
- *Directors Staff (2013 - 2016)*
- *Head of Troubled Financing Handling Division (2016 - 2019)*
- *Head of Sharia Division (2019 - 2020)*
- *Director of Operations (2020 - Present).*

Legal Basis of Appointment:
- *Appointed for the first time as Operational Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Deed of Minutes of Extraordinary GMS No.14 dated September 15, 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders and OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 dated September 30, 2020*

- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as the Operational Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the statement of shareholder decision Deed No.17 dated June 14, 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022.*

***Serving Period**: September 15, 2020 - September 14, 2025 (Term 1)*

***Multiple Positions:** Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

***Share Ownership in BRK Syariah:** -*

FAJAR RESTU FEBRIANSYAH

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Compliance & Risk Management Director

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Domisili: Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir: Lahir di Pekanbaru, 1 Februari 1969.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth: *Born in Pekanbaru, February 1, 1969.*

Sertifikasi: Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2021).

Riwayat Pendidikan: Sarjana bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Universitas Riau (1990).

Pengalaman Kerja: Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai :

- Pemimpin Cabang Ranai (2007 - 2009)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2009 - 2017)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2017 - 2018)
- Pemimpin Divisi Hukum (2018 - 2021)
- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (2021 - sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan:

- Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No. S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021.
- Dalam rangka perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.17 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat OJK SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Periode Menjabat: 15 November 2021 - 14 November 2026.

Jabatan Rangkap: Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi: Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali.

Kepemilikan Saham di BRK Syariah: -

Certification: *Level 5 Certification by BSMR (2021).*

Educational Background: *Bachelor in Economics and Development from the University of Riau (1990).*

Work experience: *Joined BRK Syariah starting in 1996. Some of the positions he has held include :*

- *Ranai Branch Manager (2007 - 2009)*
- *Bangkinang Branch Manager (2009 - 2017)*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2017 - 2018)*
- *Head of Legal Division (2018 - 2021)*
- *Director of Compliance & Risk Management (2021 -present)*

Legal Basis of Appointment:

- *Appointed for the first time as Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah based on Deed of Minutes of Extraordinary GMS No.35 dated 15 November 2021 and OJK Letter No. S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021.*
- *In the context of changing business activities to become a Sharia Commercial Bank, he was appointed as Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the shareholder decision statement Deed No.17 dated 14 June 2022 and OJK Letter SR-40/PB.101 /2022 July 4, 2022.*

Serving Period: *November 15, 2021 - November 14, 2026.*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in BRK Syariah: *-*

PROFIL PEJABAT SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI
Profile of Officials One Level Below The Board of Directors

INDRA GUNAWAN
Pemimpin Divisi Komersial
Commercial Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Dumai, 7 Juni 1974. Usia 48 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komersial sejak tahun 2022 berdasarkan SK No.34/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 8 Februari 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Dumai, June 7, 1974. Age 48 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of Commercial Division since 2022 based on Decree No.34/KEPDIR/MSDM/2022 dated February 8, 2022.

Riwayat Pendidikan:
Meraih gelar Sarjana Muda bidang Keuangan dan Perbankan dari Akademi Keuangan dan Perbankan Padang pada tahun 1992

Pengalaman Kerja:
Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 1997. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai:
- Pemimpin Bagian Komersial Divisi Komersial (2014 - 2017)
- Pemimpin Cabang Selat Panjang (2017 - 2019)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (2019 - 2021)
- Pemimpin Cabang Utama (2021 - 2022)
- Pemimpin Divsi Komersial (2022 – sekarang)

Educational background :
Earned a Bachelor's degree in Finance and Banking from the Padang Academy of Finance and Banking in 1992

Work experience :
Joined BRK Syariah starting in 1997. Several positions he has held include:
- *Head of Commercial Division Commercial Division (2014 - 2017)*
- *Selat Panjang Branch Manager (2017 - 2019)*
- *Head of Siak Sri Indrapura Branch (2019 - 2021)*
- *Head of Main Branch (2021 - 2022)*
- *Commercial Division Head (2022 – present).*

IMRAN
Pemimpin Divisi Konsumer
Consumer Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Kelanga, 28 Januari 1977. Usia 45 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Konsumer sejak 2021 berdasarkan SK No.01/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Kelanga, January 28, 1977. Age 45 as of December 31, 2022. Served as Consumer Division Head since 2021 based on Decree No.01/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 4, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Lancang Kuning pada tahun 2007.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain :
- Pemimpin Cabang Ranai (2014 s/d 2016)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2016 s/d 2019)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2019 s/d 2020)
- Pgs. Pemimpin Divisi Konsumer (2020)
- Pgs. Pemimpin Divisi Konsumer merangkap Pemimpin Divisi Syariah (2020)
- Pemimpin Divisi Konsumer (2021 s/d Jan 2023).

Educational background :
Completed his studies in Management and earned a Bachelor's degree from Lancang Kuning University in 2007.

Work experience :
Joined BRK Syariah starting in 2000. Several positions he has held include :
- *Ranai Branch Manager (2014 to 2016)*
- *Bengkalis Branch Manager (2016 to 2019)*
- *Bangkinang Branch Manager (2019 to 2020)*
- *Act. Consumer Division Leader (2020)*
- *Act. Head of Consumer Division concurrently Head of Sharia Division (2020)*
- *Head of Consumer Division (2021 s/d Jan 2023).*

ANTHONY SUJARWO

Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah

Micro Small & Medium Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Jakarta, 03 Maret 1975. Usia 47 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah sejak 2021 berdasarkan SK No.04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Jakarta, March 3, 1975. Age 47 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Micro, Small & Medium Division since 2021 based on Decree No.04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana Muda bidang Perbankan dari STIE AKBAR tahun 1997.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 1997. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain :

- Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun (2013-2014)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2014-2015)
- Pemimpin Cabang Batam (2015-2017)
- Pemimpin Bagian Proyek dan Sindikasi Divisi Komersial (2017-2020)
- Pemimpin Bagian Komersial I Divisi Komersial (2020)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2020-2021)
- Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah (2021-Jan 2023)

Educational background :
Obtained Bachelor Degree in Banking from STIE AKBAR in 1997

Work experience :
Joined BRK Syariah starting in 1997. Several positions he has held include :

- *Tanjung Balai Karimun Branch Manager (2013 - 2014)*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2014 - 2015)*
- *Batam Branch Manager (2015-2017)*
- *Head of Commercial Project Division and Syndication Division (2017-2020)*
- *Head of Commercial Division I in Commercial Division (2020)*
- *Bangkinang Branch Manager (2020- 2021)*
- *Micro Small & Medium Division Head (2021-Jan 2023)*

M. JAZULI

Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan

Rescue and Financing Settlement Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 28 Februari 1980. Usia 42 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan sejak 2022 berdasarkan SK No. 01/KEPDIR/MSDI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, February 28, 1980. Age 42 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Rescue & Financing Settlement Division since 2022 based on Decree No. 01/KEPDIR/MSDI/2022 dated August 22, 2022.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Riau pada tahun 2003 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen Strategis pada tahun 2010.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 2003. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Jakarta (2016 - 2017)
- Pgs. Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (2017 - 2018)
- Pemimpin Cabang Utama (2018 - 2019)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2019 - 2021)
- Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit (2021 - Agus 2022)
- Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan (Agus 2022 - Jan 2023)

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Accounting from the University of Riau in 2003 and a Postgraduate degree from the University of Riau in the field of Strategic Management in 2010.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah in 2003. Several positions he has held include:

- *Head of Jakarta Branch (2016 - 2017)*
- *Act of Head of Siak Sri Indrapura Branch (2017 - 2018)*
- *Head of Main Branch (2018 - 2019)*
- *Corporate Secretariat Division Head (2019 - 2021)*
- *Financing Recovery & Settlement Division Head (2021 -August 2022)*
- *Rescue & Financing Division Head (August 2022 - Jan 2023)*

YUDHI ADITYA YUDHANA

Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional

Treasury & International Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Jakarta, 11 November 1975. Usia 47 per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional sejak 2016 berdasarkan SK No.74/KEPDIR/MSDM/2016 tanggal 4 Oktober 2016.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Jakarta, November 11, 1975. Age 47 as of December 31, 2022. Serves as Head of Treasury & International Division since 2016 based on Decree No.74/KEPDIR/MSDM/2016 dated October 4, 2016.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana bidang Manajemen dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain:

- Pemimpin Bagian Divisi Tresuri & International (2010 - 2016)
- Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional (2016 - Jan 2023)

Educational background :
Earned a Bachelor's degree in Management from the University of Riau (UNRI) in 1999

Work experience :
Joined BRK Syariah starting in 2000. Several positions held include:

- *Dept of Treasury & International Division Head (2010 - 2016)*
- *Treasury & International Division Head (2016 - Present)*

HELWIN YUNUS

Pemimpin Divisi Dana & Jasa

Funds & Services Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 02 Juli 1973. Usia 49 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Dana & Jasa sejak 2021 berdasarkan SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, July 02, 1973. Age 49 as of December 31, 2022. Serves as Head of Funds & Services Division since 2021 based on Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 09, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Manajemen pada STIE Riau pada tahun 2016.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 1997. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Syariah Tanjung Pinang (2012 - 2015)
- Pemimpin Cabang Syariah Pekanbaru (2018 - 2021)
- Pgs. Pemimpin Cabang Bangkinang (2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Dana & Jasa (2021 - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Dana & Jasa (Nov 2022 - Jan 2023)

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Management at STIE Riau in 2016.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah in 1997. Several positions he has held include:

- *Tanjung Pinang Sharia Branch Manager (2012 - 2015)*
- *Pekanbaru Sharia Branch Manager (2018 - 2021)*
- *Act of Bangkinang Branch Manager (2021)*
- *Act of Funds & Services Division Head (2021 - Nov 2022)*
- *Funds & Services Division Head (Nov 2022 - Jan 2023)*

MUHAMMAD AFFAN

Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani

Human Resource Management Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Cengar, 11 Juni 1970. Usia 52 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani sejak 2022 berdasarkan SK No. 001/KEPDIR/MSDI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Cengar, June 11, 1970. Age 52 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Human Resources Management Division since 2022 based on Decree No. 001/KEPDIR/MSDI/2022 dated August 22, 2022.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di BRK Syariah mulai tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai:

- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2014 - 2017)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2017 - 2019)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2019 - 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2021 - 2022)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (2022 - sekarang)

Educational background :
Earned a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1994.

Work experience :
Joined BRK Syariah starting in 1996. Some of the positions he has held include:

- *Teluk Kuantan Branch Manager (2014 - 2017)*
- *Bangkinang Branch Manager (2017 - 2019)*
- *Micro, Small & Medium Division Head (2019 - 2021)*
- *Human Resource Management Division Head (2021 - 2022)*
- *Human Resource Management Division Head (2022 - present)*

HENDRA BUANA

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Strategic Planning Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 11 Juli 1970. Usia 52 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis sejak 2019 berdasarkan SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, July 11, 1970. Age 52 as of December 31, 2022. Serves as Head of the Strategic Planning Division since 2019 based on Decree No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 dated July 04, 2019.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana Ekonomi pada STIE Purna Graha Pekanbaru pada tahun 1994, meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen pada tahun 2012.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah sejak tahun 1994. Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya:

- Pemimpin Bagian Perencanaan Divisi Perencanaan (2004 - 2008)
- Pemimpin Bagian Pengendali Risiko Divisi Manajemen Risiko (2008 - 2009)
- Pemimpin Bagian Divisi Human Capital (2009 - 2012)
- Pgs. Pemimpin Divisi Human Capital (2012 - 2014)
- Staff Direksi (2014)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2014 - 2015)
- Pemimpin SKAI (2015 - 2017)
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017 - Sekarang)

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Economics at STIE Purna Graha Pekanbaru in 1994, earned a Postgraduate degree from Riau University in Management in 2012.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah since 1994. Several positions he has held include:

- *Dept of Planning Division Head of Planning Division (2004 - 2008)*
- *Dept of Risk Control Section Head of Risk Management Division (2008 - 2009)*
- *Human Capital Division Head (2009 - 2012)*
- *Act of Human Capital Division Head (2012 - 2014)*
- *Board of Directors Staff (2014)*
- *Risk Management Division Head (2014 - 2015)*
- *SKAI Head (2015 - 2017)*
- *Strategic Planning Division Head (2017 - Present)*

WAN MUKHLIS

Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi

Head of Technology & Information Systems Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Siak Sri Indrapura, 13 Mei 1972. Usia 50 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi sejak 2015 berdasarkan SK No.34/KEPDIR/HC/2015 tanggal 16 Maret 2015.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Siak Sri Indrapura, May 13, 1972. Age 50 as of December 31, 2022. Served as Head of Technology & Information Systems Division since 2015 based on Decree No.34/KEPDIR/HC/2015 dated March 16, 2015.

Riwayat Pendidikan :
Meraih Sarjana bidang Teknik Informatika di STMIK Riau tahun 2005.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah sejak 1 Januari 1998. Berbagai jabatan pernah diduduki diantaranya:

- Pemimpin Bagian Operasional dan Pengembangan Prosedur Divisi Operasional (2009 - 2014)
- Pemimpin Divisi Operasional (2014)
- Pemimpin Divisi TSI (2015 - sekarang)

Educational background :
Earned Bachelor Degree in Informatics Engineering at STMIK Riau in 2005.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah since 1 January 1998. He has held various positions including:

- *Dept of Operations and Development Head of Operations Division Procedures (2009 - 2014)*
- *Operational Division Head (2014)*
- *TSI Division Head (2015 - present)*

AZHAR EFENDI

Pemimpin Divisi Operasional

Head of Operational Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Selat Panjang, 10 Oktober 1970. Usia 52 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operasional sejak 2021 berdasarkan SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Selat Panjang, October 10, 1970. Age 52 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Operations Division since 2021 based on Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 09, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi DIII Ekonomi jurusan Akuntansi di AAI Padang.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah sejak 1 Agustus 1994. Berbagai posisi jabatan pernah diduduki diantaranya :

- Pemimpin Cabang Ranai (2009 - 2010)
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2010 - 2014)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2014)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2014 - 2016)
- Pemimpin Cabang Utama (2016 - 2018)
- Pemimpin Divisi Konsumer (2018 - 2019)
- Pemimpin Divisi Komersial (2019 - 2020)
- Pemimpin Divisi Umum (2020 - 2021)
- Pemimpin Divisi Operasional (2021 - Jan 2023)

Educational background :
Completed DIII Economics majoring in Accounting at AAI Padang.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah since August 1, 1994. He has held various positions including:

- *Ranai Branch Manager (2009 - 2010)*
- *Teluk Kuantan Branch Manager (2010 - 2014)*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2014)*
- *Bengkalis Branch Manager (2014 - 2016)*
- *Main Branch Manager (2016 - 2018)*
- *Consumer Division Head (2018 - 2019)*
- *Commercial Division Head (2019 - 2020)*
- *General Division Head (2020 - 2021)*
- *Operations Division Head (2021 - Jan 2023)*

ASY'ARI

Pemimpin Divisi *Financial & Reporting*

Financial & Reporting Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Tanjung Uban, 13 Mei 1972. Usia 50 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi *Financial* & *Reporting* sejak 2022 berdasarkan SK No. 58/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Tanjung Uban, May 13, 1972. Age 50 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Financial & Reporting Division since 2022 based on Decree No. 58/KEPDIR/MSDM/2022 date Maret 30, 2022.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Informatika pada STMIK Riau pada tahun 2005.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 1996. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengembangan & Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko (2008 - 2016)
- Pemimpin Bagian IT Security Divisi TSI (2016 - 2017)
- Pemimpin Bagian Pengawasan SKAI (2017 - 2019)
- Pgs. Pemimpin Cabang Batam (2018)
- Pgs. Pemimpin SKAI (2019)
- Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi SKAI (2019 - 2020)
- PM Tim *Project Core Banking System* Konversi Syariah (2020)
- Pemimpin Bagian Operasional *E-Channel* Divisi Keuangan & Operasional (2020 s/d 2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Keuangan (2021)
- Pjs. Pemimpin Divisi *Financial & Review* (2021 - 2022)
- Pemimpin Divisi *Financial & Review* (2022)
- Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* (2022)

Educational background :
Earned a Bachelor's degree in Informatics Engineering at STMIK Riau in 2005.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah in 1996. Several positions he has held include:

- *Policy Development & Implementation Dept. Head of Risk Management Division (2008 - 2016)*
- *IT Security Dept. Head of TSI Division (2016 - 2017)*
- *Oversight Dept. Head of SKAI (2017 - 2019)*
- *Act. of Batam Branch Manager (2018)*
- *Act. of Head of SKAI (2019)*
- *Information Technology Audit Dept. Head of SKAI (2019 - 2020)*
- *PM Project Team Core Banking System Sharia Conversion (2020)*
- *E-Channel Operations Dept. Head of Finance & Operations Division (2020 to 2021)*
- *Act. of Finance Division Head (2021)*
- *Act. of Financial & Review Division Head (2021 - 2022)*
- *Financial & Review Division Head (2022)*
- *Financial & Reporting Division Head (2022)*

IKHWAN

Pemimpin Divisi Umum

Head of the General Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Bangkinang, 14 November 1967. Usia 55 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum sejak 2021 berdasarkan SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Bangkinang, November 14, 1967. Age 55 as of December 31, 2022. Has been serving as General Division Head since 2021 based on Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 09, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana (S1) bidang Manajemen Universitas Riau Tahun 1992.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di BRK Syariah sejak tanggal 10 Januari 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya :

- Pemimpin Bagian Pengembangan Bisnis dan Produk Divisi Riset dan Perencanaan (2006 - 2008)
- Pemimpin Cabang Kerinci (2008 - 2014)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2014)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan (2014 - 2019)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2019 - 2021)
- Pemimpin Divisi *Financial & Review* (2021)
- Pemimpin Divisi Umum (2021 - 2022)

Educational background :
Obtained Bachelor degree (S1) in Management from Riau University in 1992.

Work experience :
Joined BRK Syariah since January 10, 1994. Several important positions held include:

- *Business and Product Development Dept. Head of Research and Planning Division (2006 - 2008)*
- *Kerinci Branch Manager (2008 - 2014)*
- *Bengkalis Branch Manager (2014)*
- *Compliance Division Head (2014 - 2019)*
- *Risk Management Division Head (2019 - 2021)*
- *Financial & Review Division Head (2021)*
- *General Division Head (2021 - 2022)*

KHAIRUL ANWAR

Pemimpin Divisi Kepatuhan

Compliance Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 17 Mei 1969. Usia 53 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sejak 2021 berdasarkan SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, May 17, 1969. Age 53 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Compliance Division since 2021 based on Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 09, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Riau.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah sejak 1 Agustus 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat:

- Pemimpin Cabang Selat Panjang (2008 - 2010)
- Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api (2010 - 2012)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indapura (2012 - 2014)
- Pemimpin Divisi Syariah (2014 - 2016)
- Pemimpin Divisi Konsumer (2016 - 2017)
- Pemimpin Divisi Komersial (2017 - 2019)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2019 - 2021)
- Pemimpin Divisi Komersial (2021)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan (2021 - Sekarang)

Educational background :
He holds a Bachelor of Economics degree at the University of Riau.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah since August 1, 1994. Several positions held:

- *Selat Panjang Branch Manager (2008 - 2010)*
- *Bagan Siapi-api Branch Manager (2010 - 2012)*
- *Siak Sri Indapura Branch Manager (2012 - 2014)*
- *Sharia Division Head (2014 - 2016)*
- *Consumer Division (Head 2016 - 2017)*
- *Commercial Division Head (2017 - 2019)*
- *Human Resource Management Division Head (2019 - 2021)*
- *Commercial Division Leader (2021)*
- *Compliance Division Head (2021 - Present)*

MUHAMMAD NANANG

Pemimpin Divisi Manajamen Risiko

Risk Management Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Bengkalis, 2 Januari 1972. Usia 50 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko sejak 2022 berdasarkan SK No. 34/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 08 Februari 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Bengkalis, January 2, 1972. Age 50 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Risk Management Division since 2022 based on Decree No. 34/KEPDIR/MSDM/2022 dated February 08, 2022.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1993.

Pengalaman Kerja :
Berkarir di BRK Syariah sejak tahun 2000. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (2014 - 2018)
- Pgs. Pemimpin Cabang Jakarta (2018)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (2018 - 2019)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2019 – 2021)
- Pemimpin Cabang Pekanbaru (2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2021 - 2022)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2022 – Sekarang)

Educational background :
Earned a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1993.

Work experience :
Career at BRK Syariah since 2000. Some of the important positions he has held include:

- *UKPN Dept. Head of Compliance Division (2014 - 2018)*
- *Act. of Jakarta Branch Manager (2018)*
- *Siak Sri Indrapura Branch Manager (2018 - 2019)*
- *Bengkalis Branch Manager (2019 – 2021)*
- *Pekanbaru Branch Manager (2021)*
- *Act. of Risk Management Division Head (2021 - 2022)*
- *Risk Management Division Head (2022 – Present)*

ARHIM SYAFEI

Pemimpin Divisi Hukum

Legal Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1972. Usia 50 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Hukum sejak 2022 berdasarkan SK 001/KEPDIR/MSDI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, December 27, 1972. Age 50 as of December 31, 2022. Has been serving as Head of the Legal Division since 2022 based on SK 001/KEPDIR/MSDI/2022 dated August 22, 2022.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar Sarjana bidang Hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 1993.

Pengalaman Kerja :
Berkarir di BRK Syariah sejak tahun 2000. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Kepatuhan Kebijakan dan GCG Divisi Kepatuhan (2018 - 2013)
- Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko (2013 - 2014)
- Pemimpin Bagian Hukum Divisi Hukum & *Corporate Secretary* (2014 - 2016)
- Pemimpin Bagian Hukum Litigasi Divisi Hukum (2016 – 2021)
- Ketua Tim *Task Force* Penyelesaian Kredit (2021 - 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Hukum (2021 - 2022)
- Pemimpin Divisi Hukum (2022 – Sekarang)

Educational background :
Received a Bachelor's degree in Law from Gajah Mada University in 1993.

Work experience :
Career at BRK Syariah since 2000. Some of the important positions he has held include:

- *Policy Compliance and GCG Dept. Head of Compliance Division (2018 - 2013)*
- *Act. of Compliance & Risk Management Division Head (2013 - 2014)*
- *Legal Dept. Head of Legal & Corporate Secretary Division (2014 - 2016)*
- *Legal Division Litigation Dept. Head of Legal Division (2016 – 2021)*
- *Head of Financing Settlement Task Force Team (2021 - 2022)*
- *Act. of Legal Division Head (2021 - 2022)*
- *Legal Division Head (2022 – Present)*

HERU KURNIAWAN

Pemimpin Divisi Internal Audit

Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Selat Panjang, 2 Juli 1967. Usia 55. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Internal Audit sejak 2021 berdasarkan SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Maret 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Selat Panjang, July 2, 1967. Age 55. Serves as Head of Internal Audit Division since 2021 based on Decree No.19/KEPDIR/MSDM/2021 dated March 09, 2021.

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana Muda Perbankan di AKBP tahun 1989
- Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi di Universitas Islam Riau tahun 2000
- Pasca Sarjana prodi Manajemen di Universitas Riau tahun 2014.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah sejak tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat diantaranya :

- Pgs. Pemimpin Cabang Air Molek (2012)
- Pgs. Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2012)
- Pgs. Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2012)
- Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis (2013 - 2014)
- Pemimpin Bagian Operasional (2014 - 2015)
- Pemimpin Bagian Divisi Manajemen Risiko (2015 - 2017)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2017 - 2019)
- Pemimpin SKAI (2019 - 2021)
- Pemimpin Divisi Internal Audit (2021 - 2022)

Educational background :

- *Bachelor of Banking at AKBP in 1989*
- *Earned a bachelor's degree in Accounting at the Islamic University of Riau in 2000*
- *Postgraduate Management major at the Riau University in 2014.*

Work experience :
Started his career at BRK Syariah since 1994. Several positions he has held include:

- *Act. of Air Molek Branch Manager (2012)*
- *Act. of Teluk Kuantan Branch Manager (2012)*
- *Act. of Head of Tanjung Pinang Branch (2012)*
- *Strategic Planning Division Dept. Head (2013 - 2014)*
- *Operations Dept. Head (2014 - 2015)*
- *Risk Management Division Dept. Head (2015 - 2017)*
- *Risk Management Division Head (2017 - 2019)*
- *SKAI Head (2019 - 2021)*
- *Internal Audit Division Head (2021 - 2022)*

EDI WARDANA

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan

Corporate Secretariat Division Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Simpang Gaung, 21 oktober 1978. Usia 44 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan sejak 2022 berdasarkan SK No.34/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 8 Februari 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Simpang Gaung, October 21, 1978. Age 44 as of December 31, 2022. Served as Head of the Corporate Secretariat Division since 2022 based on Decree No.34/KEPDIR/MSDM/2022 dated February 8, 2022.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Manajemen pada Universitas Riau pada tahun 2006 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen pada tahun 2016.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengadaan Divisi Umum (2014 - 2016)
- Pemimpin Bagian ATM *Center* Divisi Operasional (2016 - 2017)
- Pemimpin Bagian Pengembangan Produk Divisi Produk Dana & Jasa (2017 - 2021)
- Pemimpin *Desk Digital Banking Services* (2021 - 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2022)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2022 – sekarang)

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Management from Riau University in 2006 and a Postgraduate degree from Riau University in Management in 2016.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah in 2001. He has held several positions including:

- *Procurement Dept. Head of General Division (2014 - 2016)*
- *ATM Center Dept. Head of Operational Division (2016 - 2017)*
- *Product Development Dept. Head of Fund Products & Services Division (2017 - 2021)*
- *Digital Banking Services Desk Dept. Head (2021 - 2022)*
- *Act. of Corporate Secretariat Division Head (2022)*
- *Corporate Secretariat Division Head (2022 – present)*

ULFIA

Pemimpin Desk Anti *Fraud*

Anti-Fraud Desk Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 23 April 1973. Saat ini Usia 49 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin *Desk* Anti *Fraud* sejak 2021 berdasarkan SK No.84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, April 23, 1973. Currently 49 years old as of December 31, 2022. Has been serving as Anti-Fraud Desk Leader since 2021 based on Decree No.84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 9, 2021.

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Hukum pada Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pjs. Pemimpin Bagian Administrasi SDM Divisi SDM (2007 - 2008)
- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (2008 - 2017)
- Pgs. Pemimpin Cabang Utama (2014)
- Pemimpin Unit Investigasi *Fraud* (2017 - 2020)
- Pemimpin Bagian Anti *Fraud* Divisi Manajemen Risiko (2020)
- Pemimpin Bagian Penyelesaian Kredit Divisi P2K (2020 - 2021)
- Pemimpin Tim Anti *Fraud* (2021)
- Pemimpin Desk Anti *Fraud* (2021 - 2022)

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Law at the University of Indonesia in 1995.

Work experience :
Started his career at BRK Syariah in 2000. He has held several positions including:

- *Act, of HR Administration Division Head at HR Division (2007 - 2008)*
- *UKPN Compliance Division Dept. Head (2008 - 2017)*
- *Act, of Main Branch Manager (2014)*
- *Fraud Investigation Unit Head (2017 - 2020)*
- *Anti-Fraud Risk Management Division Dept. Head (2020)*
- *Financing Settlement P2K Division Dept. Head (2020 - 2021)*
- *Anti Fraud Team Head (2021)*
- *Anti Fraud Desk Head (2021 - 2022)*

DEDY SANTIKA ZAIN

Pemimpin *Desk Service Quality*

Desk Service Quality Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 20 Februari 1973. Usia 49 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin *Desk Service Quality* sejak 2021 berdasarkan SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, February 20, 1973. Age 49 as of December 31, 2022. Serves as Head of Desk Service Quality since 2021 based on Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 09, 2021.

Riwayat Pendidikan :

Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Islam Bandung pada tahun 1997.

Pengalaman Kerja :

Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api (2017 - 2018)
- Pemimpin Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2018 - 2019)
- Pemimpin Cabang Utama (2019 - 2021)
- Pemimpin *Desk Service Quality* (2021 - 2022)

Educational background :

Earned a bachelor's degree in Accounting at Bandung Islamic University in 1997.

Work experience :

Started his career at BRK Syariah in 2001. Several positions he has held include:

- *Bagan Siapi-api Branch Manager (2017 - 2018)*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2018 - 2019)*
- *Head of Main Branch (2019 - 2021)*
- *Desk Service Quality Head (2021 - 2022)*

T.M. HUSNI KHOLIL

Pemimpin *Desk Digital Bank*

Digital Bank Desk Head

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Pekanbaru, 1 April 1977. Usia 45 tahun per 31 Desember 2022. Menjabat sebagai Pemimpin *Desk Digital Service* sejak 2022 berdasarkan SK No. 34/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 8 Februari 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Pekanbaru, April 1, 1977. Age 45 as of December 31, 2022. Has been serving as Desk Digital Service Leader since 2022 based on Decree No. 34/KEPDIR/MSDM/2022 dated February 8, 2022.

Riwayat Pendidikan :

- Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Riau pada tahun 2001,
- Meraih gelar Pasca Sarjana di bidang Ekonomi Keuangan Islam pada Universitas Trisakti pada tahun 2014.

Pengalaman Kerja :

Memulai karir di BRK Syariah pada tahun 2004. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Ketua Tim *Product & Development Desk Digital Banking Service* (2021)
- Pgs. Pemimpin *Desk Digital Banking Service* (2022)
- Pemimpin *Desk Digital Service* (2022)

Educational background :

- *Earned a Bachelor's degree in Accounting at the University of Riau in 2001,*
- *Obtained a Postgraduate degree in Islamic Financial Economics at Trisakti University in 2014.*

Work experience :

Started his career at BRK Syariah in 2004. Several positions he has held include:

- *Product & Development Desk Digital Banking Service Team Head (2021)*
- *Act. of Digital Banking Service Desk Head (2022)*
- *Desk Digital Service Head (2022)*

STATISTIK DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
Statistics and Employee Competency Development

Statistik Pegawai / *Employee Statistics*

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin / *Number of Employees Based on Gender*

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam Satuan Orang)
Table of Number of Employees Based on Gender (in Persons)

Jenis Kelamin	2022	2021	2020	*Gender*
Pria	1.933	1.809	1.757	*Man*
Wanita	903	848	810	*Woman*
Jumlah	**2.836**	**2.657**	**2.567**	***Amount***

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status / *Number of Employees Based on Status*

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Table of Number of Employees by Age

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Unit)*

Status Kepegawaian	2022			2021			2020			*Employment status*
	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	
Pegawai Tetap	1.259	707	1.966	983	719	1.702	911	634	1.545	*Permanent employee*
PTT	109	145	254	348	92	440	416	155	571	*PTT*
Outsourcing	565	51	616	478	37	515	430	21	451	*Outsourcing*
Jumlah	**1.933**	**903**	**2.836**	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Total***

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan / *Number of Employees Based on Position Level*

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan
Table of Number of Employees Based on Position Level

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Unit)*

Level Jabatan	2022			2021			2020			*Position Level*
	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	
Pemimpin Divisi	18	0	18	17	0	17	16	-	16	*Division Head*
Pemimpin Cabang Utama/ Setingkat	2	2	4	3	1	4	5	-	5	*Main Branch Manager/Equivalent*
Pemimpin Bagian Kantor Pusat	45	11	56	46	8	54	49	8	57	*Dept. Head of head office*
Pemimpin Cabang Konvensional*	0	0	0	18	0	18	14	-	14	*Conventional Branch Manager**
Pemimpin Cabang Syariah	20	0	20	1	1	2	2	-	2	*Sharia Branch Manager**
Staf Direksi	7	0	7	3	0	3	-	-	-	*Board of Directors Staff*
Pemimpin Cabang Pembantu	40	2	42	40	1	41	39	2	41	*Sub-Branch Manager*
Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	9	0	9	3	0	3	3	-	3	*Dept. Head of Main Manager/ Equivalent*
Pemimpin Setingkat Pincapem	14	6	20	16	4	20	16	1	17	*Sub-Branch Manager Level Leader*
Pemimpin Seksi Setingkat	308	137	445	287	123	410	267	110	377	*Equal Section Head Level*
Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	2	0	2	4	1	5	5	1	6	*MPP Employees (Retirement Preparation Period)*
Pelaksana	165	147	312	173	136	309	215	164	379	*Officer*
Pegawai *Core* (*Teller*/CS/FO/RO)	323	400	723	404	535	939	376	502	878	*Core Staff (Teller/CS/FO/RO)*
Lain-Lain	980	198	1178	794	38	832	750	22	772	*Etc*
Jumlah	**1.933**	**903**	**2.836**	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Total***

*

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees Based on Education Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table of Number of Employees Based on Education Level

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Unit)*

Tingkat Pendidikan	2022			2021			2020			*Level of education*
	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	
S3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	*Undergraduate 3*
S2	67	32	99	60	29	89	58	27	85	*Bachelor 2*
S1	1.015	703	1.718	933	659	1.592	906	626	1.532	*Bachelor degree*
D3	123	147	270	119	140	259	121	138	259	*3-year diploma*
SMA	714	20	734	677	19	696	654	18	672	*Senior High School*
SMP	13	0	13	17	0	17	15	0	15	*Junior High School*
SD	0	0	0	2	0	2	2	0	2	*elementary school*
Jumlah	**1.933**	**90**	**2836**	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Total***

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Number of Employees Based on Age

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Table of Number of Employees by Age

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Unit)*

Usia	2022			2021			2020			*Age*
	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Man*	Wanita *Woman*	Total	
> 55	7	0	7	6	0	6	9	0	9	> 55
50 – 55	71	3	74	57	5	62	50	6	56	50 – 55
40 – 49	448	151	599	375	115	490	341	99	440	40 – 49
30 – 39	880	352	1.232	845	330	1.175	794	305	1.099	30 – 39
23 – 29	493	375	868	491	386	877	528	395	923	23 – 29
< 23	34	22	56	35	12	47	35	5	40	< 23
Jumlah	**1.933**	**903**	**2.836**	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Amount***

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kebijakan

Kebijakan di BRK Syariah menetapkan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengembangan karir sesuai dengan kinerja, kompetensi, dan kriteria lainnya yang ditetapkan serta kesempatan dalam mendapatkan pembelajaran dan pelatihan. Pengembangan kompetensi pegawai BRK Syariah mengacu pada ketentuan berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 131/KEPDIR/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Pendidikan dan Pelatihan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
2. BPP Kepegawaian BAB XI tentang Pendidikan Pegawai sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 060/KEPDIR/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Perubahan Ke Enam atas Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2019 Tentang Buku Pedoman (BPP)

Employee Competency Development

Policy

The policy at BRK Syariah stipulates that every employee has equal opportunities in the career development process according to performance, competence and other established criteria as well as opportunities to receive learning and training. BRK Syariah employee competency development refers to the following provisions:

1. *Board of Directors Decree Number 131/KEPDIR/2013 dated December 17, 2013 concerning Enforcement of Standard Operational Procedures for Education and Training of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
2. *BPP Personnel CHAPTER XI concerning Employee Education in accordance with Directors Decree Number 060/KEPDIR/2022 dated August 9, 2022 concerning the Sixth Amendment to Directors Decree Number 010/*

Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

3. Surat Keputusan Direksi Nomor 18/KEPDIR/HC/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Ketentuan Pelaksanaan, Tata Tertib dan Sanksi Pelanggaran Diklat *Inhouse Training*.

KEPDIR/2019 concerning the Personnel Manual (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

3. *Board of Directors Decree Number 18/KEPDIR/HC/2015 dated February 11, 2015 concerning Implementation Provisions, Rules of Procedure and Sanctions for Violating Inhouse Training and Education and Training.*

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Competency Development Based on Position Level

No.	Level Jabatan *Position Level*	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Objectives*	Jumlah Pegawai *Number of Employees*	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan *Number of employees who have attended training*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan *Percentage of those who have attended training for each position level*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan *Percentage that has attended training for each type of training*
1	Pemimpin Divisi *Division Leader*			18			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		16	100%	88,89%
		Soft Skill *Soft Skills*			5		27,78%
		Sertifikasi *Certification*			12		66,67%
2	Pemimpin Cabang Utama/Setingkat *Head of Main Branch/Equivalent*			4			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		3	100%	75,00%
		Soft Skill *Soft Skills*			2		50,00%
		Sertifikasi *Certification*			2		50,00%
3	Pemimpin Cabang *Head of Branch*			20			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		20	100%	100,00%
		Soft Skill *Soft Skills*			1		5,00%
		Sertifikasi *Certification*			13		65,00%
5	Pemimpin Bagian *Section Leader*			56			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		44	91,07%	78,57%
		Soft Skill *Soft Skills*			23		41,07%
		Sertifikasi *Certification*			20		35,71%
6	Staf Direksi *Board of Directors staff*			7			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		6	100%	85,71%
		Soft Skill *Soft Skills*			1		14,29%
		Sertifikasi *Certification*			3		42,86%

No.	Level Jabatan *Position Level*	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Objectives*	Jumlah Pegawai *Number of Employees*	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan *Number of employees who have attended training*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan *Percentage of those who have attended training for each position level*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan *Percentage that has attended training for each type of training*
6	Pemimpin Cabang Pembantu *Sub-Branch Leader*			42			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		42	100%	100,00%
		Soft Skill *Soft Skills*			2		4,76%
		Sertifikasi *Certification*			5		11,90%
7	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat *Head of the Main Branch / Equivalent Branch*			9			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		7	77,78%	77,78%
		Soft Skill *Soft Skills*			0		0,00%
		Sertifikasi *Certification*			1		11,11%
8	Pemimpin Setingkat Pincapem *Sub-branch Level Leader*			20			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		17	90%	85,00%
		Soft Skill *Soft Skills*			4		20,00%
		Sertifikasi *Certification*			6		30,00%
9	Pemimpin Seksi Setingkat *Senior Section Leader*			445			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		401	93,03%	90,11%
		Soft Skill *Soft Skills*			72		16,18%
		Sertifikasi *Certification*			120		26,97%
10	MPP			2			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		1	50%	50,00%
		Soft Skill *Soft Skills*			0		0,00%
		Sertifikasi *Certification*			0		0,00%
11	Pelaksana *executor*			312			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		280	92,31%	89,74%
		Soft Skill *Soft Skills*			13		4,17%
		Sertifikasi *Certification*			9		2,88%
12	Pegawai Core (Teller/CS/FO/RO) *Core Employees (Teller/CS/FO/RO)*			723			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		687	95,30%	95,02%
		Soft Skill *Soft Skills*			17		2,35%
		Sertifikasi *Certification*			22		3,04%

No.	Level Jabatan *Position Level*	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Objectives*	Jumlah Pegawai *Number of Employees*	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan *Number of employees who have attended training*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan *Percentage of those who have attended training for each position level*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan *Percentage that has attended training for each type of training*
13	Lain-Lain *Etc*			1.178			
		Teknikal Skill *Technical Skills*	Peningkatan Wawasan *Improved Insights*		296	25,13%	25,13%
		Soft Skill *Soft Skills*			4		0,34%
		Sertifikasi *Certification*			14		1,19%
JUMLAH TOTAL | *TOTAL NUMBER*					**2.836**		

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2022 pengembangan kompetensi pegawai BRK Syariah fokus pada bidang perbankan syariah setelah menuntaskan proses konversi dan sepenuhnya beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Pelatihan syariah lain yang dilakukan antara lain terkait dengan keuangan syariah, bisnis syariah, *core banking system* Bank Umum Syariah, *executive* perbankan syariah dan lain sebagainya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan terhadap kompetensi Perbankan Syariah 2.316 pegawai telah mengikuti dan lulus Pendidikan Dasar sampai dengan Desember Tahun 2022.

Evaluation of Competency Development Implementation

During 2022 the competency development for BRK Syariah employees will focus on the field of Islamic banking after completing the conversion process and fully operating as a Sharia Commercial Bank. Other sharia trainings conducted include those related to sharia finance, sharia business, core banking system of sharia commercial banks, sharia banking executives and so on. In addition, to meet the demand for Islamic banking competencies, 2,316 employees have attended and graduated from Basic Education until December 2022.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Competency Development Costs

Tabel Biaya Pelatihan Pegawai Tahun 2020- 2022
Table of Employee Training Costs for 2020-2022

(dalam juta RP) | *(in million IDR)*

No	Jenis Diklat	2022	2021	2020	*Type of Training*
1	*Inhouse Training*	6.569,41	4.894,64	12.098,68	*In-house Training*
2	Pelatihan Eksternal	2.770,54	854,33	1.138,93	*External Training*
Total		**9.339,95**	**5.748,97**	**13.237,61**	***Total***

Realisasi Biaya pelatihan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 62,46% dibandingkan realisasi biaya pelatihan tahun 2021 disebabkan oleh kondisi pasca pandemi *Covid-19* yang mulai berangsur normal sehingga pelaksanaan pelatihan semakin meningkat serta efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan yang mulai biasa menggunakan media *online* (*zoom meeting*).

The realization of training costs in 2022 has increased by 62.46% compared to the realization of training costs in 2021 due to the post-Covid-19 pandemic conditions which are starting to return to normal so that the implementation of training is increasing and the effectiveness of the implementation of training activities is starting to normally use online media (zoom meetings) .

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholders Structure and Composition

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2022

Pemegang saham BRK Syariah adalah Pemerintah Provinsi Riau sebesar 42,93%, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,99%, Pemerintah Kota/Kabupaten se-Riau dan Kepulauan Riau sebesar 55,50% serta Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri sebesar 0,58% (Seri B).

Composition of Shareholders as of December 31, 2022

Shareholders of BRK Syariah are the Riau Provincial Government with 42.93%, Riau Islands Provincial Government with 0.99%, City/Regency Governments throughout Riau and Riau Islands with 55.50% and the Riau Kepri Amanah Cooperative Consumer with 0.58% (Series B).

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah per 31 Desember 2022
Table of Composition of Shareholders of BRK Syariah as of 31 December 2022

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham *Share Ownership Structure*			*Shareholders*
	Jumlah Lembar Saham *Number of Shares*	Nilai (Rp) *Value (IDR)*	Kepemilikan *Ownership*	
SAHAM SERI A				*SERIES A SHARE*
Provinsi Riau	5.191.682	519.168.200.000	42,93%	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	150.000	15.000.000.000	1,24%	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	1.051.812	105.181.200.000	8,70%	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	10,88%	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	64.007	6.400.700.000	0,53%	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	5,61%	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	327.110	32.711.000.000	2,71%	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	52.030	5.203.000.000	0,43%	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	319.668	31.966.800.000	2,64%	*Palalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	82.807	8.280.700.000	0,68%	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	371.351	37.135.100.000	3,07%	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	152.086	15.208.600.000	1,26%	*Kuantan Singingi Regency*
Kabupaten Bintan	380.789	38.078.900.000	3,15%	*Bintan Regency*
Kota Batam	500.000	50.000.000.000	4,13%	*Batam city*
Kabupaten Karimun	71.900	7.190.000.000	0,59%	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	360.181	36.018.100.000	2,98%	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	83.913	8.391.300.000	0,69%	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kepulauan Meranti	600.000	60.000.000.000	4,96%	*Kepulauan Meranti Regency*
Kabupaten Lingga	70.000	7.000.000.000	0,58%	*Lingga Regency*
Provinsi Kepulauan Riau	120.000	12.000.000.000	0,99%	*Riau Islands Province*
Kabupaten Kepulauan Anambas	78.237	7.823.700.000	0,65%	*Anambas Islands Regency*
TOTAL SAHAM SERI A	**12.022.407**	**1.202.240.700.000**	**99,42%**	*TOTAL SERIES A SHARES*
SAHAM SERI B				*SERIES B SHARE*
Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri	70.000	7.000.000.000	0,58%	*Riau Kepri Amanah Cooperative Consumer*
TOTAL SAHAM SERI B	**70.000**	**7.000.000.000**	**0,58%**	*TOTAL SERIES B SHARES*
TOTAL SAHAM	**12.092.407**	**1.209.240.700.000**	**100,00%**	*TOTAL SHARE*

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Composition of Shareholders 5% or More

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah 5% Atau Lebih Per Desember 2022
Table of Composition of Sharia BRK Shareholders of 5% or More as of December 2022

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham *Number of Shares*	Nilai (Rp) *Value (IDR)*	Kepemilikan *Ownership*	*Shareholders*
1	Provinsi Riau	5.191.682	519.168.200.000	42,93%	*Riau Province*
2	Kabupaten Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	10,88%	*Bengkalis Regency*
3	Kabupaten Kampar	1.051.812	105.181.200.000	8,70%	*Kampar Regency*
4	Kabupaten Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	5,61%	*Indragiri Hilir Regency*

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih.

Community Shareholder Group Composition Less than 5%

As of December 31, 2022, BRK Syariah has not yet become a company that has listed its shares on the stock exchange. Thus, there is no information regarding the composition of public shareholders of less than 5% or more.

Kepemilikan Saham BRK Syariah oleh Dewan Komisaris Dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat kepemilikan saham BRK Syariah oleh Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BRK SyariahShare Ownership by the Board of Commissioners & Directors

As of December 31, 2022, there was no direct or indirect ownership of BRK Syariah shares by the Board of Commissioners and Directors.

Kepemilikan Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Institusi Lokal, Institusi Asing, Individu Lokal, dan Individu Asing

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah hanya dimiliki oleh institusi lokal yaitu Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota/ Kabupaten se-Riau dan Kepulauan Riau serta Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri sebagaimana tercantum dalam Tabel Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah per 31 Desember 2022 di atas.

Shareholder Ownership Based on Classification of Local Institutions, Foreign Institutions, Local Individuals, and Foreign Individuals

As of 31 December 2022, BRK Syariah was only owned by local institutions, namely the Provincial Government of Riau, Provincial Government of the Riau Archipelago, City/ Regency Governments throughout Riau and Riau Islands and the Riau Kepri Amanah Cooperative Consumer as listed in the Table of Composition of BRK Syariah Shareholders as of 31 December 2022 on.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
Company Group Structure

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah tidak memiliki Entitas Induk, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture*, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of December 31, 2022, BRK Syariah does not have a Parent Entity, Subsidiary Entity, Associated Entity, Joint Venture, and Special Purpose Vehicle (SPV).

DAFTAR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN, ENTITAS ASOSIASI, *JOINT VENTURE COMPANY*, DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV)
List of Subsidiaries, Associated Entities, Joint Venture Company, and Special Purpose Vehicle (SPV)

Per 31 Desember 2022, BRK Syariah tidak memiliki Entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi maupun *Joint Venture Company* & *Special Purpose Vehicle* (SPV) sehingga tidak tersedia informasi mengenai Nama entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi maupun *Joint Venture Company* & *Special Purpose Vehicle* (SPV); persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status beroperasi entitas Anak Perusahaan, Entitas Asosiasi maupun *Joint Venture Company & Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of December 31, 2022, BRK Syariah did not have Subsidiaries, Associated Entities or Joint Venture Companies and Special Purpose Vehicles (SPV), so there was no information available regarding Names of Subsidiaries, Associated Entities or Joint Venture Companies and Special Purpose Vehicles (SPV); percentage of share ownership; information about the line of business of subsidiaries and/or associated entities; and information on the operating status of Subsidiaries, Associated Entities and Joint Venture Companies and Special Purpose Vehicles (SPV).

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM
Share Issuance Chronology

BRK Syariah sampai dengan 31 Desember 2022 belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2022, BRK Syariah has not yet listed its shares on the Stock Exchange. Thus, there is no information regarding corporate actions, the share offering price for each corporate action, the number of shares listed after each corporate action and the name of the stock exchange where the company's shares are listed.

Kronologis Penerbitan Saham BRK Syariah Tahun 2008-2022
Chronology of Issuance of Sharia BRK Shares for 2008-2022

Tanggal Penerbitan *Publication date*	Jumlah Saham / Lembar *Number of Shares / Shares*	Nominal/ Lembar (Rp) *Amount/ Sheet (Rp)*	Total (Rp) *Total (IDR)*	Akta Notaris *Notarial Deed*
26 Desember 2008 *December 26, 2008*	5.791.968	100.000	579.196.800.000	Akta No. 277 tanggal 26 Desember 2008 oleh Notaris Yondri Darto, SH *Deed No. 277 dated 26 December 2008 by Notary Yondri Darto, SH*
-	6.683.031	100.000	668.303.100.000	-
31 Desember 2010 *December 31, 2010*	7.479.441	2100.000	747.944.100.000	Akta No. 53 tanggal 31 Desember 2010 oleh Notaris Fery Bakti, SH *Deed No. 53 dated December 31, 2010 by Notary Fery Bakti, SH*
30 Mei 2011 *May 30, 2011*	8.268.739	100.000	826.873.900.000	Akta No. 45 tanggal 30 Mei 2011 oleh Notaris Fery Bakti, SH *Deed No. 45 dated 30 May 2011 by Notary Fery Bakti, SH*
31 Mei 2011 *May 31, 2011*	8.400.739	100.000	840.073.900.000	Akta No. 47 tanggal 31 Mei 2011 oleh Notaris Fery Bakti, SH *Deed No. 47 dated 31 May 2011 by Notary Fery Bakti, SH*

Tanggal Penerbitan *Publication date*	Jumlah Saham / Lembar *Number of Shares / Shares*	Nominal/ Lembar (Rp) *Amount/ Sheet (Rp)*	Total (Rp) *Total (IDR)*	Akta Notaris *Notarial Deed*
15 Juni 2012 *June 15, 2012*	8.948.748	100.000	894.874.800.000	Akta No. 45 tanggal 15 Juni 2012 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum *Deed No. 45 dated 15 June 2012 by Notary Refizal, SH, M.Hum*
26 Juni 2012 *June 26, 2012*	9.023.748	100.000	902.374.800.000	Akta No. 60 tanggal 26 Juni 2012 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum *Deed No. 60 dated 26 June 2012 by Notary Refizal, SH, M.Hum*
26 Juni 2013 *June 26, 2013*	9.571.461	100.000	957.146.100.000	Akta No. 68 tanggal 26 Juni 2013 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum *Deed No. 68 dated 26 June 2013 by Notary Refizal, SH, M.Hum*
1 Juni 2014 *June 1, 2014*	9.767.879	100.000	976.787.900.000	Akta No. 2 tanggal 1 Juni 2014 oleh Notaris Fery Bakti, SH *Deed No. 2 dated June 1, 2014 by Notary Fery Bakti, SH*
8 November 2014 *November 8, 2014*	10.297.283	100.000	1.029.728.300.000	Akta No. 7 tanggal 8 November 2014 oleh Notaris Fery Bakti, SH *Deed No. 7 dated 8 November 2014 by Notary Fery Bakti, SH*
20 Mei 2015 *May 20, 2015*	10.492.033	100.000	1.049.203.300.000	Akta No. 767 tanggal 20 Mei 2015 oleh Notaris Devi Ananji, SH., MKn *Deed No. 767 dated 20 May 2015 by Notary Devi Ananji, SH., MKn*
3 April 2017 *April 3, 2017*	10.569.033	100.000	1.056.903.300.000	Akta No. 1 tanggal 3 April 2017 oleh Notaris Feri Mondro, SH., M.Kn *Deed No. 1 dated 3 April 2017 by Notary Ferry Mondro, SH., M.Kn*
11 September 2019 *September 11, 2019*	10.827.608	100.000	1.082.760.800.000	Akta No. 18 tanggal 11 September 2019 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH *Deed No. 18 September 11 2019 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*
8 Juli 2020 *July 8, 2020*	11.004.607	100.000	1.100.460.700.000	Akta No. 18 tanggal 8 Juli 2020 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH *Deed No. 18 dated 8 July 2020 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*
18 Juni 2021 *June 18, 2021*	11.031.607	100.000	1.103.160.700.000	Akta No. 22 tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH *Deed No. 22 June 18, 2021 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*
07 Januari 2022 *January 07, 2022*	11.051.607	100.000	1.105.160.700.000	Akta No. 5 tanggal 07 Januari 2022 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH *Deed No. 5 dated January 7 2022 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*
23 April 2022 *April 23, 2022*	12.051.607	100.000	1.205.160.700.000	Akta No. 26 tanggal 23 April 2022 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH *Deed No. 26 April 23 2022 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Chronology of Issuance of Bond and/or Other Securities Listing

Sampai dengan 31 Desember 2022, BRK Syariah tidak menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

As of December 31, 2022, BRK Syariah did not issue bonds, so there is no information on the chronology of the issuance and/or recording of bonds.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

Name and Address of Company Supporting Institutions and/or Professionals

Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo
Intiland Tower, 18 Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav.32 Jakarta
Tlp: 021-5712000, Fax: 021-5035689
Website: www.kreston.co.id

- Jasa yang diberikan: Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan
- Periode Penugasan: Tahun Buku 2022
- Fee: Rp750.700.000,-

Notaris

Pupung Mulyantini, SH, M.H
Jl. Prof. M. Yamin No. 110/14 Kota Pekanbaru Riau
Telp: 0761-38867

- Jasa yang diberikan: Pembuatan Akta Notaris
- Periode Penugasan: Tahun 2022
- Fee: Rp51.282.051,-

Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower 24th *Floor Suite* 2403,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940

- Jasa yang diberikan: Jasa Pemeringkatan Perusahaan
- Periode Penugasan: 18 Mei 2022 – 17 Mei 2023
- Fee: Rp150.000.000,-

Kantor Konsultan Hukum

Anang Iskandar Syndicate (AIS) Law Firm
Menara MTH 15th *Floor Suite*
Jl. Letjen M.T Haryono Kav.23
Jakarta Selatan

- Jasa yang diberikan:
  1. Konsultasi Hukum
  2. *Legal Opinion*
  3. Serta hal lainya yang dipandang perlu
- Periode Penugasan: 02 November 2021 – 01 November 2022
- Fee: Rp1.450.000.000,-

Public Accountant

Public Accounting Firm Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo
Intiland Tower, 18 Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav.32 Jakarta
Tel: 021-5712000, Fax: 021-5035689
Website: www.kreston.co.id

- *Services provided: Examination of Annual Financial Statements*
- *Assignment Period: 2022 Fiscal Year*
- *Fee: Rp750.700.000,-*

Notary Public

Pupung Mulyantini, SH, M.H
Jl. Prof. M. Yamin No. 110/14 City of Pekanbaru, Riau
Tel: 0761-38867

- *Services provided: Preparation of Notary Deeds*
- *Assignment Period: 2022*
- *Fee: Rp51.282.051,-*

Securities Rating

PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940

- *Services provided: Company Rating Services*
- *Assignment Period: May 18, 2022 – May 17, 2023*
- *Fee: Rp150,000,000*

Legal Consultant Office

Anang Iskandar Syndicate (AIS) Law Firm
MTH Tower 15th Floor Suite
Jl. Letjen M.T Haryono Kav.23
South Jakarta

- *Services provided:*
  1. *Legal Consultation*
  2. *Legal Opinions*
  3. *As well as other things deemed necessary*
- *Assignment Period: November 02, 2021 – November 01, 2022*
- *Fee: Rp1,450,000,000,-*

NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN
Name and Address of Branch Office or Representative Office

Kantor Pusat | *Headquarters*

Menara Dang Merdu BRK Syariah
Jl. Jenderal Sudirman No. 462 Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 47070
Fax. (0761) 42389

Kantor Cabang *Branch office*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Phone and Fax*
BRKS Pekanbaru Cabang Utama	Menara Dang Merdu BRK Syariah Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru	Tel. (0761) 47170 Fax. (0761) 43451
BRKS Tembilahan	Jl. Baharudin Yusuf Tembilahan	Tel. 0768-22525/21334 Fax. 0768-22324
BRKS Tanjungpinang	Jl. Teuku Umar No. 21 Tanjung Pinang	Tel. 0771-21276/24334/24329 Fax. 0771-311370
BRKS Dumai	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 111-112 Dumai	Tel. 0765-31079/32704 Fax. 0765-36837
BRKS Selatpanjang	Jl. Diponegoro No. 58 Selat Panjang	Tel. 0763-31249/31719/31250 Fax. 0763-31307
BRKS Batam	Jl. Laksamana Bintan-Sei Panas Komp. Tana Mas Blok C No. 14 Batam	Tel. 0778-460264/460269 Fax. 0778-460288
BRKS Pekanbaru Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru	Tel. 0761-848711/848712 Fax. 0761-32872
BRKS Bengkalis	Jl. Pahlawan No. 15 A Bengkalis	Tel. 0766-21569/22541/22549 Fax. 0766-21784
BRKS Bangkinang	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 29 Bangkinang	Tel. 0762-20432
BRKS Airmolek	Jl. Jend. Sudirman Air Molek	Tel. 0769-41435/41436/41438/41363 Fax. 0769-41437
BRKS Tanjung Balai Karimun	Jl. Pertambangan No. 23 A Tanjung Balai Karimun	Tel. 0777-31900 Fax. 0777-22012
BRKS Pangkalan Kerinci	Jl. Maharaja Indra No. 490 Pangkalan Kerinci	Tel. 0761-95731/95732 Fax. 0761-95735
BRKS Bagan Siapi-api	Jl. Pahlawan RT 005 RW 003 Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Bagansiapiapi	Tel. 0767-2701150
BRKS Teluk Kuantan	Jl. Imam Munandar, Desa Beringin, Teluk Kuantan	Tel. 0760-561651/561652 Fax. 0760-561653
BRKS Pasir Pangaraian	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian	Tel. 0762-91260 Fax. 0762-91151/91301
BRKS Siak Sri Indrapura	Jl. Sutomo Kel. Kampung Dalam Siak Sri Indrapura	Tel. 0764-20461/20462/ 320770 Fax. 0764-20463
BRKS Ranai	Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna	Tel. 0773-31532/31077 Fax. 0773-31533
BRKS Pekanbaru 2	Jl. Jend. Sudirman No. 628 Pekanbaru	Tel. 0761-32826 Fax. 0761-856356
BRKS Tanjungpinang Pamedan	Jl. Raja Ali Haji Komplek Pamedan No. 1-2, Tanjung Pinang	Tel. 0771-317970 Fax. 0771-317971
BRKS Jakarta	Jl. Panglima Polim Raya No. 97A Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Tel. 021-7247701/ 7255834/7256415 Fax. 021-29126511
BRKS Bintan	Jl. WR Supratman/Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16 No. 3, 4, 5 Kec. Toapaya Bintan	Tel. 0771-4446692/44467229 Fax. 0771-463451

Kantor Cabang Pembantu *Sub Branch office*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Phone and Fax*
BRKS Pekanbaru Tangkerang	Jl. Imam Munandar No. 49 Pekanbaru	Tel. 0761-857201/857203 Fax. 0761-857202
BRKS Pekanbaru Rumbai	Jl. Sekolah No. 78 Pekanbaru	Tel. 0761-554459/554876 Fax. 0761-554857
BRKS Pekanbaru Senapelan	Jl. Jend. Ahmad Yani (Simp. Jl. H. Juanda) Kec. Senapelan Pekanbaru	Tel. 0761-857413/857415 Fax. 0761-857202
BRKS Siak Perawang	Jl. Raya Perawang Km. 5,5 RT 01 RW 06, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak	Tel. 0761-693753/693755/92552 Fax. 0761-693754
BRKS Bengkalis Hang Tuah	Jl. Hang Tuah No. 21-22 Duri	Tel. 0765-597675/597677 Fax. 0765-596808
BRKS Karimun Tanjung Batu	Jl. Merdeka No. 14 Tanjung Batu	Tel. 0779-431555/431629 Fax. 0779-431630
BRKS Bengkalis Sungai Pakning	Jl. Jend. Sudirman No. 364, Sungai Pakning	Tel. 0766-91316 Fax. 0766-391654
BRKS Lingga Dabo Singkep	Jl. Perusahaan No. 1, Dabo Singkep, Kab. Lingga	Tel. 0776-322072/322279 Fax. 0776-322278
BRKS Rohul Ujung Batu	Jl. Jend. Sudirman No. 86 Ujung Batu	Tel. 0762-62109/62103 Fax. 0762-61444
BRKS Rohil Bagan Batu	Jl. Jend. Sudirman No. 808-809 Kec. Bagan Sinembah	Tel. 0765-51290 Fax. 0765-51441
BRKS Pelalawan Sorek	Jl. Raya Lintas Timur No. 105 Pangkalan Kuras, Sorek	Tel. 0761-492395/492396 Fax. 0761-492164
BRKS Batam Lubuk Baja	Jl. Pembangunan No. 1 Nagoya Lubuk Baja Batam	Tel. 0778-458343/458433/ 459015 Fax. 0778-455073
BRKS Inhu Belilas	Jl. Lintas Timur, Belilas, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu	Tel. 0769-324347/324349 Fax. 0769-324348
BRKS Pekanbaru Panam	Komplek MTC Giant Panam Blok A 11-12 Jl. HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru	Tel. 0761-587457 Fax. 0761-587454/587399
BRKS Siak Kandis	Jl. Raya Pekanbaru - Duri, Kandis	Tel. 0761-598314/598302 Fax. 0761-598312
BRKS Kampar Lipat Kain	Jl. Raya Lipat Kain-Teluk Kuantan, Kampar Kiri	Tel. 0761-676531/676532 Fax. 0761-676530
BRKS Pekanbaru Tuanku Tambusai	Jl. Tuanku Tambusai No. 135 A-B Pekanbaru	Tel. 0761-39915/39914 Fax. 0761-39913
BRKS Bintan Tanjung Uban	Jl. Permaisuri Blok A No. 8 B-C, Kec. Bintan Utara	Tel. 0771-483400 Fax. 0771-483403
BRKS Tembilahan Pasar Baru	JL. Jend Sudirman No. 583 Tembilahan	Tel. 0768-325715/325716 Fax. 0768-325717
BRKS Inhil Sungai Guntung	Jl. Yos Sudarso Kec. Kateman Indragiri Hilir	Tel. 0779-551644 Fax. 0779-551645
BRKS Pekanbaru Jalan Riau	Jl. Riau No. 129 A-B. Kec, Senapelan Pekanbaru	Tel. 0761-39448/39450 Fax. 0761-39451
BRKS Bengkalis Duri Sudirman	Jl. Sudirman No. 150A Kel. Air Jamban Kec. Mandau, Duri	Tel. 0765-94800/94801 Fax. 0765-94802
BRKS Rohul Dalu Dalu	Jl. Lintas Prov. Riau-Sumut Desa Talikumain, Tambusai Kab. Rokan Hulu	Tel. 0811-7530153 Fax. -
BRKS Kuansing Baserah	Jl. Jend. Sudirman Desa Simpang Tanah Lapang Kec. Kuantan Hilir Baserah	Tel. 0760-21077/21073 Fax. 0760-21076
BRKS Rohul Kota Tengah	Jl. Syech Abdul Wahab Rokan No. 16 Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu	Tel. 08117543999 Fax. -
BRKS Siak Lubuk Dalam	Jl. Pertamina, Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak Sri Indrapura	Tel. 085100816616/ 085100816617/085100816618 Fax. -
BRKS Batam Batu Aji	Ruko Tunas Regency Blok A4 No.1-2 Sagulung, Jl. Brigjen Katamso, Batu Aji Batam	Tel. 0778-3581262/ 3581263 Fax. 0778-3581265
BRKS Rohil Ujung Tanjung	Jl. Lintas Bagansiapiapi, Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir	Tel. 0852-72572019 Fax. -
BRKS Pekanbaru Sukaramai Trade Center	Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru	-
BRKS Batam Tiban	Komp. Ruko Tiban Impian Blok A.2 No. 1 Tiban-Sekupang Batam	Tel. 0778-326360 Fax. 0778-326359

BRKS Anambas Tarempa	Jl. Imam Bonjol Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas	Tel. 0772-31044 Fax. 0722-31083
BRKS Lingga Daik	Jl. Istana Robat No. 7 Kel. Daik, Kec. Lingga, Kab. Lingga	Tel. 0812-7061174 Fax. -
BRKS Inhil Kota Baru	Jl. Ahmad Yani, Kota Baru, Kec. Keritang	Tel. 0811753557 Fax. -
BRKS Kampar Flamboyan	Pasar Flamboyan Jl. Raya Petapahan-Kota Garo, Kec. Tapung Kab. Kampar	Tel. 0762-7320600 Fax. -
BRKS Teluk Kuantan Sudirman	Jl. Jend Sudirman No. 114 Teluk Kuantan	Tel. 0760-20753/20754/561873 Fax. 0760-20975
BRKS Pekanbaru Delima Panam	Jl. HR Soebrantas Komp. Metropolitan III Blok A No. 5 Panam - Pekanbaru	Tel. 0761-674179 Fax. 0761-679057
BRKS Tanjungpinang Bintan Center	Jl. D.I Panjaitan Km 9 No. 5-6 Komp. Bintan Center Kec. Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang	Tel. 0771-442799 Fax. 0771-441600
BRKS Batam Botania	Komplek Graha Nusa Permai Blok CI No. 1- 3, Cikitsu - Botania Kota Batam	Tel. 0778-7434008 Fax. 0778-7434003/7434005
BRKS Kampar Petapahan	Jl. Raya Petapahan, Kec. Tapung Kab. Kampar	Tel. 0762-3242328 Fax. -
BRKS Karimun Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani, Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun	Tel. 0777-327880 Fax. 0777-327881
BRKS Pasir Pengaraian Pasar Lama	Pasar Lama Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu	Tel. 0762-7398050 Fax. 0762-7398049

Kantor Kedai *Store Office*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Phone and Fax*
BRKS Pekanbaru Marpoyan	Jl. Kaharudin Nasution No. 56 B Pekanbaru	Tel. 0761-563847 Fax. 0761-563840
BRKS Pekanbaru Pasar Sail	Jl. Hangtuah RT. 005 RW. 001 Kel. Bambu Kuning Pekanbaru	Tel. 0761-858701/20554 Fax. 0761-857496
BRKS Siak Sei Apit	Jl. Gajah Mada RT 001 RW 006 Kec. Sungai Apit Kab. Siak	Tel. 0766-51112/51222 Fax. 0766-51157
BRKS Kampar Pasar Air Tiris	Jl Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Desa Air Tiris, Kab. Kampar	Tel. 0762-21633 Fax. 0761-21632
BRKS Kampar Pasar Kuok	Jl. Prof. M. Yamin SH RT 04 RW 03 Pasar Kuok Desa Kuok Kec. Kuok	Tel. 0762-323722 Fax. 0762-323722
BRKS Pekanbaru Durian	Jl. Durian No. 27 B Pekanbaru Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru	Tel. 0761-862050 Fax. 0761-864122
BRKS Siak Pasar Minas	Jl. Yos Sudarso Kel. Minas Jaya Minas	Tel. 0761-598900 Fax. 0761-598900
BRKS Pelalawan Pasar Ukui	Jl. Lintas Timur RT 02 RW 01 Pasar Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan	Tel. 0769-7445244 Fax. 0769-7445245
BRKS Dumai Pasar Bukit Kapur	Jl. Sukarno Hatta, Bukit Kapur Kota Dumai	Tel. 0811-750024 Fax.-
BRKS Pasar Pangkalan Kerinci	Jl. Maharaja Indra Pangkalan Kerinci Kota Kec Pangkalan Kerinci	Tel. 0761-493365 Fax. 0761-493366
BRKS Bengkalis Pasar Pinggir	Jl. Lintas Duri-Pekanbaru Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis	Tel. 0765-561500 Fax. 0765-561501
BRKS Inhu Pasar Peranap	Jl. Jend. Sudirman No. 22 Lintas Teluk Kuantan, RT 01 RW 03, Simpang Tugu Peranap, Kel. Peranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu	Tel. 0760-561030 Fax. 0760-561080
BRKS Kampar Pasar Sukaramai	Jl. Lintas Petapahan-Ujung Batu Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar	Tel. 0762-61731 Fax. 0762-61730
BRKS Pasar Tanjung Pinang	Jl. Pelontar II No. 22 Kel. Tanjung Pinang Kota	Tel. 0771-312690 Fax. 0771-312690
BRKS Siak Dayun	Jl. Perawang-Siak Kec. Dayun Kab. Siak	Tel. 0764-8001251 Fax. -
BRKS Rohul Kabun	Jl. Lintas Pekanbaru-Pasir Pangarayan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu	Tel. 08117074666 Fax. -

BRKS Pekanbaru Pasar Pagi Arengka	Jl. Soekarno Hatta No. E2, Kel. Dilema, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru	Tel. 0761-589176/589178 Fax. 0761-589179
BRKS Meranti Tanjung Samak	Jl. Ahmad Yani Tanjung Samak Kec. Tanjung Samak	Tel. 0812-7525600 Fax.-
BRKS Kuansing Pasar Lubuk Jambi	Jl. Jend. Sudirman Kec. Kuantan Mudik	Tel. 0811-7535951 Fax. -
BRKS Inhu Rengat	Jl. Yos Sudarso No 44 Kel. Pasar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu	Tel. 0769-21495 Fax. 0769-21496
BRKS Inhu Sei Lala	Jl. Jend. Sudirman Desa Perkebunan Sei Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu	Tel. 0769-7446019 Fax. -
BRKS Kuansing Pasar Muara Lembu	Jl. Jend Sudirman, Kel. Muara Lembu, Kec. Singingi, Kab. Kuansing	Tel. 0760-2523700 Fax. -
BRKS Inhu Kuala Kilan	Jl. Lintas Selatan No. 60, Desa Kuala Kilan Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu	Tel. 0811-708094 Fax. -
BRKS Rohul Tandun	Jl. Raya Tandun- Ujung Batu, Kec. Tandun, Kab, Rokan Hulu	Tel. 0813-16025267 Fax. -
BRKS Rohul Rantau Kasai	Jl. Sultan Zainal Abidinsyah Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara	Tel. 0821-69363330 Fax. -
BRKS Bengkalis Batupanjang Rupat	Jl. Pelajar RT 02 RW 02 Kec. Batupanjang Rupat Kab. Bengkalis	Tel. 0811-7077174 Fax. -
BRKS Karimun Meral	Jl. Jend. A. Yani No. 12 RT 03 RW 08 Kel. Meral Kota, Kec.Meral, Kab. Karimun	Tel. 0777-361911 Fax. 0777-361611
BRKS Natuna Midai	Jl. Merdeka Kel. Sabang Barat, Kec. Midai Kab. Natuna	Tel. 0823-85195511 Fax. -
BRKS Natuna Serasan	Jl. Datuk Bane No. 18 Kampung Pelimpak Kel. Serasan	Tel. 0821-70315022 Fax. -
BRKS Meranti Teluk Belitung	Pasar Suka Ramai Teluk Belitung, Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti	Tel. 0822-88279696 Fax. -
BRKS Pelalawan Bandar Sei Kijang	Jl. Lintas Timur KM 34 Bandar Seikijang	Tel. 0761-8403373 Fax. -
BRKS Rohil Pujud	Jl. Lintas Pujud-Mahato Kasang Bangsawan	Tel. 082170436400 Fax. -
BRKS Siak Sabak Auh	Jl. Lintas Siak-Sungai Pakning Sabak Auh, Bandar Pedada Kab. Siak	Tel. 085218394750 Fax. -
BRKS Dumai Sungai Sembilan	Jl. Cut Nyak Dien Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	Tel. 0853-74432290 Fax. -
BRKS Natuna Sedanau	Jl.Pelontar II Bunguran Barat, Pasar Sedanau	Tel. 0811-7047008 Fax. -
BRKS Pekanbaru Tenayan Raya	Jl. Lintas Timur Km 12 No. 88 D Kelurahan Kulim Tenayan Raya	Tel. - Fax. -
BRKS Rohil Kubu	Jl. Jend. Sudirman Desa Rantau Panjang Kiri Kubu Babussalam	Tel. - Fax. -
BRKS Bengkalis Bantan	Jl. Jend. Sudirman Desa Selat Baru Kec. Bantan-Bengkalis	Tel. - Fax. -
BRKS Batam Bengkong	Komp. Bengkong City Centre Blok A No. 04 Jl. Yos Sudarso Bengkong Laut	
BRKS Bintan Kijang	Jl. Kampung Kuala Lumpur, Kijang	Tel. 0771-4610633 Fax. -

Kantor Kas

Store Office

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*
BRKS Pekanbaru RSUD Arifin Ahmad	RSUD Arifin Ahmad Jl. Diponegoro No. 2 Pekanbaru
BRKS Pekanbaru Samsat Selatan Provinsi Riau	Kantor Samsat Provinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 6 Pekanbaru
BRKS Pekanbaru Mall Pelayanan Publik	Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman 464 - Pekanbaru
BRKS Dumai Kantor Walikota	Kantor Walikota Dumai Jl. Perwira, Bagan Besar Dumai
BRKS Karimun Kantor Bupati	Komplek Perkantoran Poros Jl. Jend Sudirman, Tanjung Balai Karimun
BRKS Inhu Pematang Reba	Jl. Lintas Pematang Reba-Belilas
BRKS Batam Kantor Walikota	Kantor Walikota Batam Lantai 1 Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center
BRKS Siak Kantor Bupati	Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail, Siak Sri Indrapura
BRKS Ranai Kantor Bupati	Kompleks Kantor Bupati Natuna Jl. Batu Sisir-Bukit Arai, Ranai
BRKS Tanjung Pinang Kantor Walikota	Kompleks Kantor Walikota Tj. Pinang Jl. Raya Sebauk-Senggarang
BRKS Bangkinang Kantor Bupati	Kantor Bupati Kampar Jl. H.R. Soebrantas, Bangkinang
BRKS Pekanbaru Unilak	Kampus Universitas Lancang Kuning Jl. Dl. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru
BRKS Pangkalan Kerinci Kantor Bupati	Kantor Bupati Pelalawan Lt. 1 Jl. Lintas Timur Pkl. Kerinci, Pelalawan
BRKS Bengkalis Kantor Bupati	Kantor Bupati Bengkalis Jl. Jend. A. Yani, Bengkalis
BRKS Teluk Kuantan Kantor Bupati	Komplek Perkantoran Bupati Kuantan Singingi Jl. Senambek Sungai Jering Taluk Kuantan
BRKS Pekanbaru Kantor Gubernur Riau	Kantor Gubernur Riau, Menara Lancang Kuning/Gedung 9 Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman 460 Pekanbaru
BRKS Bagansiapiapi Kantor Bupati	Jl. Merdeka No. 58, Bagan Siapi-api, Rohil
BRKS Pekanbaru Kantor Dispenda Kota	Jl. Teratai No. 81 Pekanbaru
BRKS Bintan Kantor Bupati	Kantor Bupati Bintan Bandar Seri Bentan KM 42 Bintan Bunyu Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan
BRKS Batam Belakang Padang	Jl. Hangtuah No. 01 (Depan Mesjid At Taqwa) Belakang Padang Kota Batam
BRKS Batam Mall Pelayanan Publik	Gedung Sumatera Promotion Centre Batam Lt. 2 Batam Centre
BRKS Pasir Pengaraian Kantor Bapenda	Kantor Bapenda Rokan Hulu Pasir Pengaraian
BRKS Batam Kantor Dispenda Kota	Gedung Bersama Dispenda Jl.Engku Putri Batam
BRKS Pekanbaru Samsat Kota	Gedung Samsat Pekanbaru Kota Jl. Gajah Mada Kota Pekanbaru
BRKS Tembilahan Kantor Bupati	Komplek Perkantoran Bupati Indragiri Hilir Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
BRKS Karimun Sawang	Jl. Sawang Besar Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun
BRKS Tanjung Pinang Kantor Gubernur Kepri	Gedung Aula Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi KEPRI Dompak Kota Tanjung Pinang
BRKS Bagan Siapi-api Kantor Dispenda	Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
BRKS Selat Panjang Kantor DPPKAD Meranti	Jl. Merdeka, Selat Panjang Kota Selat Panjang
BRKS Batam Kantor Dinas Pendidikan Kota	Komplek Perkantoran Kota Batam Jl. Pramuka Sekupang Kota Batam
BRKS Siak Kemenag	Kantor Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung Kab.Siak
BRKS Tanjung Pinang RSUD Kepri	Jl. WR Supratman KM 8 No. 100 Tanjung Pinang
BRKS Dumai RSUD	Jl. Tanjung Jati No 4 Buluh Kasap Dumai Timur Kota Dumai
BRKS Batam RSUD Embung Fatimah	RSUD Embung Fatimah Batam Jl. Letjen Soeprapto Blok D 1-9 Batam
BRKS Pekanbaru RSUD Petala Bumi	RSUD Petala Bumi Jl. Sutomo No. 65 Pekanbaru
BRKS Pekanbaru Universitas Abdurrab	Universitas Abdurrab Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru
BRKS RSUD Bengkalis	RSUD Bengkalis Jl. Kelapapati Tengah No. 90 Bengkalis
BRKS Bengkalis RSUD Mandau	RSUD Mandau Duri Jl. Stadion No. 10 Kel. Air Jamban Duri Kab. Bengkalis
BRKS Anambas Palmatak	Jl. Usman H Pang, Ladan, Palmatak Kab. Kepulauan Anambas
BRKS Lingga Senayang	Jl. Merdeka No. 172 Senayang Kab. Lingga
BRKS Tembilahan Kemenag Indragiri Hilir	Jl. Keritang No. 12 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
BRKS Pelalawan Kuala Kampar	Jl. Bono Sakti, Teluk Dalam, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
BRKS Teluk Kuantan Kantor Kemenag	Kantor Kemenag Kab. Kuantan Singingi Jl. Barangan No.15 Teluk Kuantan
BRKS Pelalawan Teluk Meranti	Jl. Lintas Bono/Jl. Rambutan No.10 Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Teluk Meranti Kab. Pelalawan
BRKS Anambas Letung	Jl. Merdeka Letung Kab. Kepulauan Anambas
BRKS Lingga Pancur	Depan Dermaga Pancur Kec. Lingga Utara Kab. Lingga
BRKS Bengkalis Rupat Utara	Jl. Riau, Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis
BRKS Bengkalis Kota Bangun	Jl. Pembangunan Koto Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar
BRKS Bengkalis Kemenag	Kantor Kemenag Kab. Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
BRKS Selat Panjang Kemenag Meranti	Jl. Dorak Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti
BRKS Pasir Pengaraian Kemenag	Jl. Tuanku Tambusai Komplek Pemda, Kantor Kemenag Rokan Hulu
BRKS Tanjung Pinang Kantor BPKAD Kota	Jl. Basuki Rahmat/Jl. Pramuka Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
BRKS Pekanbaru Kantor Walikota	Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru - Tenayan Raya Kota Pekanbaru
BRKS Bintan Tambelan	Jl. Desa Kampung Hilir Kec. Tambelan
BRKS Teluk Kuantan Sukadamai	Jl. Jend Sudirman,Desa Suka Damai

Butik / *Boutique*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*
BRKS Pekanbaru Mall SKA	Mal SKA Lt 2 - Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru
BRKS Batam Mega Mall	Mega Mall Batam Centre Lt. 1 /F. 255 Batam

Payment Point / *Payment Points*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*
BRKS Bengkalis Duri Kantor Dispenda	Jl. Harapan Raya No. 14 Air Jamban - Duri
BRKS Karimun Dispenda	Jl. Pertambangan, Sei Ayam Kab. Karimun
BRKS Bangkinang Kantor DPPKAD Kampar	Jl. Prof M. Yamin Bangkinang Kab. Kampar
BRKS Dumai Kantor Dispenda Kota	Gedung Dispenda Kota Dumai Jl. HR Soebrantas, Dumai
BRKS Siak Kantor Dispenda	Gedung Dispenda Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura
BRKS Bengkalis Kantor Dispenda	Gedung Dispenda Bengkalis Jl. Jend Sudirman Bengkalis
BRKS Bapenda Indragiri Hulu	Gedung Dispenda Indragiri Hulu Pematang Reba, Indragiri Hulu
BRKS Pangkalan Kerinci Kantor DPKAD	Kantor DPKAD Kab. Pelalawan
BRKS Tembilahan Bapenda Indragiri Hilir	Kantor Bapenda Kab. Indragiri Hilir
BRKS Teluk Kuantan Kantor Bapenda	Kantor Bapenda Kuantan Singingi Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau
BRKS Tanjung Pinang Kantor BPPRD Kota	Jl. Basuki Rahmat / Jl. Pramuka Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 29113
BRKS Pekanbaru DPRD Riau	Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau
BRKS Pekanbaru Universitas Islam Riau	Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai Pekanbaru
BRKS Pekanbaru RSUD Madani	Jl. Garuda Sakti, Simpang Baru, Kec. Tampan Pekanbaru

Otobanking/ Kas Keliling

1. *Otobanking* Pekanbaru 1
2. *Otobanking* Tanjung Pinang 2
3. *Otobanking* Dumai
4. *Mini Otobanking* Teluk Kuantan
5. *Mini Otobanking* Pekanbaru 2
6. *Mini Otobanking* Bangkinang
7. *Otobanking* Batam
8. *Otobanking* Bagan Siapiapi
9. *OtoBanking* Pasir Pengaraian
10. *Otobanking* Air Molek
11. *Otobanking* Tembilahan
12. *OtoBanking* Bangkinang
13. *Otobanking* Siak Sri Indrapura
14. *Otobanking* Bengkalis
15. *Otobanking* Pangkalan Kerinci
16. *Otobanking* Tanjung Pinang 2

PETA WILAYAH OPERASIONAL
Operational Areas Map

Per 31 Desember 2022, BRK Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 21 Kantor Cabang, 42 Kantor Cabang Pembantu, serta 502 jaringan lainnya seperti Kedai, Kantor Kas, Butik, *Payment Point*, ATM, CDM dan *OTO Banking*.

As of 31 December 2022, BRK Syariah had 1 Head Office, 21 Branch Offices, 42 Sub-Branch Offices, and 502 other networks such as Shops, Cash Offices, Boutiques, Payment Points, ATMs, CDM and OTO Banking.

Tabel Jaringan Kantor Bank Riau Kepri Tahun 2017-2022
Table of Bank Riau Kepri Office Network for 2017-2022

Keterangan	2022	2021	2020	2019	2018	2017	*Information*
Jaringan Kantor	175	174	168	167	153	151	*Office Network*
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1	*Headquarters*
Kantor Cabang	21	21	20	20	20	20	*Branch office*
Kantor Cabang Pembantu	42	41	41	42	42	42	*Branch office*
Kedai	40	38	35	35	35	35	*Store*
Kantor Kas	55	56	56	53	42	37	*Cash office*
Butik	2	3	4	4	4	4	*Boutique*
Payment Point	14	14	11	12	9	8	*Payment Points*
ATM	373	335	299	337	305	215	*ATM*
CDM	2	2	2	2	2	2	*CDM*
OTO Banking	16	16	16	16	6	6	*OTO Banking*
EDC	600	664	787	597	425	177	*EDC*
Unit Layanan Syariah	-	87	87	52	52	52	*Sharia Service Unit*

PETA JARINGAN KANTOR BRK SYARIAH 2017-2022
2017-2022 SHARIA BRANCH OFFICE NETWORK MAP

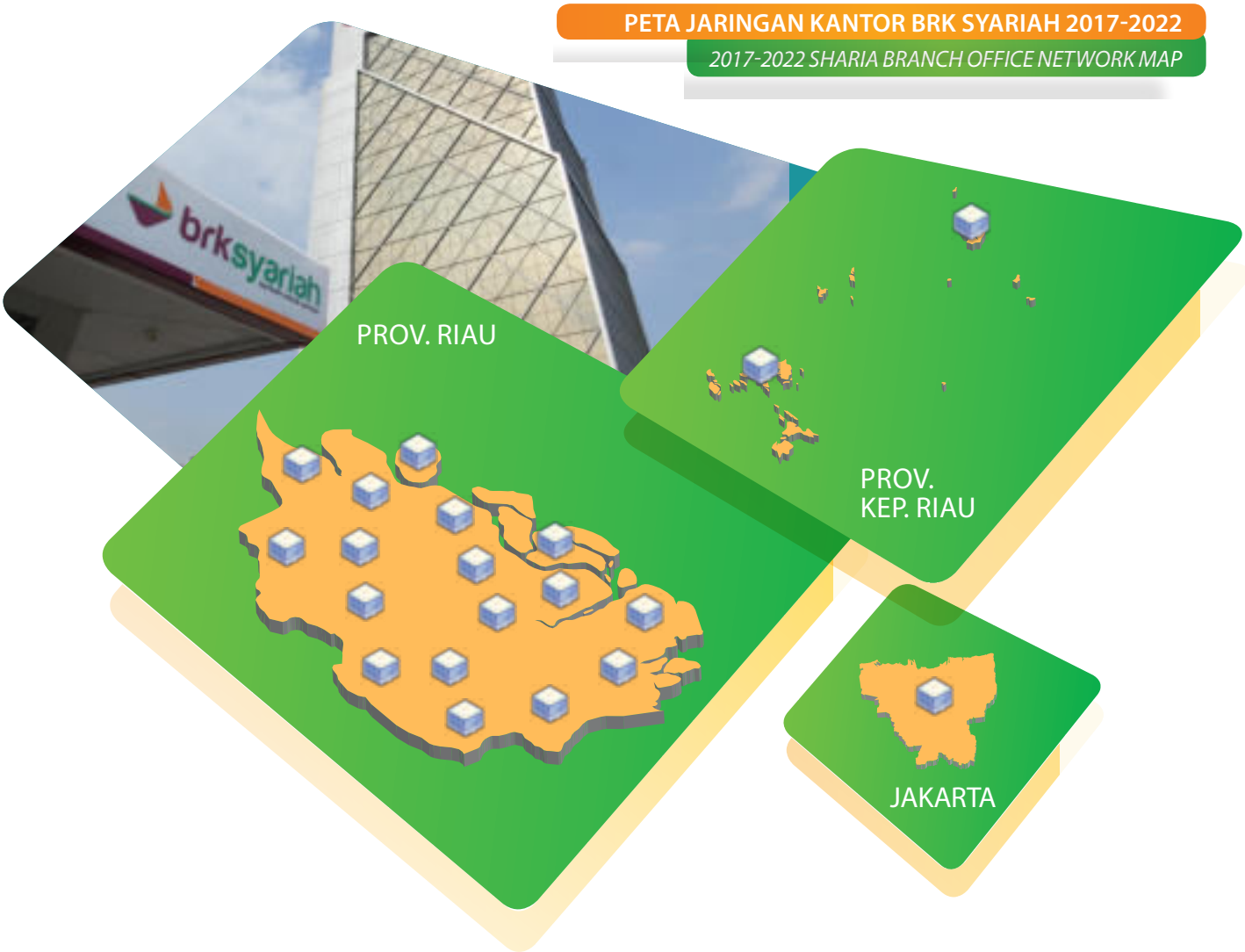

INFORMASI *WEBSITE* PERUSAHAAN
Company Website Information

BRK Syariah memiliki *website* resmi dengan alamat *www.brksyariah.co.id* yang merupakan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi bagi *stakeholders*, disamping sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selain informasi yang bersifat umum, *website* BRK Syariah juga memberikan informasi yang lebih spesifik, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

- Beranda: menampilkan informasi terkait dengan Promo, Produk & Layanan Bank, serta Informasi seperti Berita, Pengumuman, Kurs Valas, *Corporate Snapshoot*, Informasi *Rhan* dan Lelang.
- Simpanan: menampilkan informasi terkait dengan produk Giro, Tabungan, Tabungan Terencana dan Deposito Berjangka.
- Pembiayaan: menampilkan informasi terkait dengan produk Pembiayaan MKM, Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial.
- Layanan: menampilkan informasi terkait dengan layanan bank seperti produk *EDC Merchant*, BRK Syariah Mobile, BRK Syariah QRIS dan lainnya.
- Kartu: menampilkan informasi terkait dengan produk Kartu Debit dan Kartu Pembiayaan.
- Prioritas: menampilkan informasi terkait dengan produk tabungan dengan layanan eksklusif tertentu.
- Tentang Kami: menampilkan informasi terkait dengan hal-hal Profil Perusahaan, Tata Kelola, Informasi Keuangan, Info BRK Syariah dan Hubungi Kami.

BRK Syariah has an official website with the address www.brksyariah.co.id which is a means and infrastructure to support the delivery of information to stakeholders, as well as a form of public information disclosure. Apart from general information, the BRK Syariah website also provides more specific information, including the following matters:

- *Homepage: displays information related to Promos, Bank Products & Services, as well as Information such as News, Announcements, Forex Exchange Rates, Corporate Snapshoot, Rhan Information and Auctions.*
- *Savings: displays information related to Current Accounts, Savings, Planned Savings and Time Deposit products.*
- *Financing: displays information related to MHM Financing, Consumer Financing and Commercial Financing products.*
- *Services: displays information related to bank services such as EDC Merchant products, BRK Syariah Mobile, BRK Syariah QRIS and others.*
- *Card: displays information related to Debit Card and Financing Card products.*
- *Priority: displays information related to savings products with certain exclusive services.*
- *About Us: displays information related to Company Profile, Governance, Financial Information, Sharia BRK Info and Contact Us.*

Informasi tambahan terkait *website* BRK Syariah dapat dilihat di bagian Akses terhadap Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

Additional information regarding the BRK Syariah website can be seen in the Access to Company Information and Data section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI INDUSTRI YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

List of Industrial Association Memberships Related to the Implementation of Sustainable Finance

BRK Syariah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai asosiasi nasional, yang bertujuan untuk memperluas jaringan kemitraan strategis terkait bisnis perbankan syariah sejalan dengan perkembangan lingkungan bisnis, yakni:

1. Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas)
2. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda
3. Asosiasi *Fintech Syariah* (AFSI)
4. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
5. Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)

BRK Syariah establishes strategic partnerships with various national associations, which aim to expand the network of strategic partnerships related to the sharia banking business in line with developments in the business environment, namely:

1. *Association of National Banks (Perbanas)*
2. *Association of Regional Development Banks (Asbanda*
3. *Sharia Fintech Association (AFSI)*
4. *Indonesian Payment System Association (ASPI)*
5. *Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)*

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
Economic and Industrial Overview

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Pandemi yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun dapat ditangani dengan cukup baik. Namun, kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih harus dihadapkan pada guncangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari 2022. Dampak negatif ini menambah masalah seperti gangguan rantai pasok global dan kenaikan berbagai harga komoditas. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian global diperkirakan lebih lambat dari proyeksi sebelumnya, disertai risiko resesi di sejumlah negara. Di tengah gejolak global, ekonomi domestik masih bertahan seiring kinerja ekspor nonmigas dan permintaan domestik yang masih menjadi penopang perekonomian pada triwulan IV 2022.

Pemulihan ekonomi di hampir seluruh daerah pada tahun 2022 telah menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Dari sisi konsumsi, perkembangan beberapa indikator dini seperti penjualan eceran meningkat dan indeks penghasilan naik sebesar 3,9 poin menjadi 120,3 pada Desember 2022, didukung terjaganya daya beli masyarakat. Perbaikan lebih lanjut tertahan dampak rambatan kenaikan harga energi meski mereda memasuki akhir tahun. Pada 2023, pemulihan ekonomi diperkirakan melanjutkan perbaikan, tetap tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan 2022. Kasus *Covid-19* domestik yang semakin terkendali mendorong penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Dari sisi inflasi, hingga akhir 2022 tetap terkendali dan pada 2023 diperkirakan semakin menurun dan terjaga di kisaran 3,0±1%.

IMF memperkirakan pertumbuhan global sebesar 2,9% pada 2023 dan diproyeksi meningkat menjadi 3,1% pada tahun 2024. Kenaikan suku bunga dan perang Rusia-Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi. Sementara inflasi global diperkirakan akan turun sebesar 6,6% pada tahun 2023 dan menjadi 4,3% pada tahun 2024, masih di atas level sebelum pandemi. Kejutan inflasi naik paling banyak terjadi di antara negara-negara maju dengan variabilitas yang lebih besar pada emerging markets dan negara berkembang.

Dengan kondisi moneter yang lebih ketat dan pertumbuhan yang lebih rendah berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan dan utang. Hal itu perlu dilakukan dengan menyebarkan alat makro prudensial dan memperkuat kerangka kerja restrukturisasi utang. Dukungan fiskal harus lebih baik ditargetkan pada mereka yang paling terkena dampak kenaikan harga pangan dan energi. Kerja sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk memitigasi perubahan iklim.

ECONOMIC REVIEW

A pandemic that has been running for more than 2 (two) years can be handled fairly well. However, global economic conditions that have not yet fully recovered must be confronted with the shocks of the Russia-Ukraine geopolitical conflict that has emerged since the end of February 2022. This negative impact has added to problems such as disruption to global supply chains and increases in various commodity prices. With these developments, the global economy is expected to be slower than previously projected, accompanied by the risk of recession in a number of countries. In the midst of global turmoil, the domestic economy is still surviving along with non-oil and gas export performance and domestic demand which are still the pillars of the economy in the fourth quarter of 2022.

Economic recovery in almost all regions in 2022 has shown better results than the previous period. On the consumption side, the development of several early indicators such as increased retail sales and the income index which rose by 3.9 points to 120.3 in December 2022, was supported by maintained public purchasing power. Further improvement was halted by the impact of the propagating increase in energy prices, although it eased towards the end of the year. In 2023, the economic recovery is expected to continue improving, continuing to grow positively even though it is lower than in 2022. Domestic Covid-19 cases which are increasingly under control have prompted the abolition of the Implementation of Restricting Community Activities (PPKM) on December 30 2022. In terms of inflation, until the end of 2022 it will remain under control and in 2023 it is estimated that it will decrease and be maintained in the range of 3.0 ± 1%.

The IMF predicts global growth of 2.9% in 2023 and is projected to increase to 3.1% in 2024. Rising interest rates and the Russia-Ukraine war continue to weigh on economic activity. Meanwhile, global inflation is expected to fall by 6.6% in 2023 and become 4.3% in 2024, still above the pre-pandemic level. Most of the rising inflation shocks occurred among developed countries with greater variability in emerging markets and developing countries.

With tighter monetary conditions and lower growth potentially affecting financial and debt stability. It is necessary to do so by deploying macro prudential tools and strengthening the debt restructuring framework. Fiscal support should be better targeted at those most affected by rising food and energy prices. Stronger multilateral cooperation is critical to mitigating climate change.

Analisis Perekonomian Nasional

Kinerja ekonomi pada triwulan IV 2022 tetap kuat meski melambat, ditopang kinerja ekspor dan permintaan domestik yang terjaga. Kinerja ekonomi didukung oleh kinerja ekspor nonmigas berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tetap kuat hingga triwulan IV 2022 sejalan dengan masih kuatnya permintaan dari negara mitra dagang utama khususnya Tiongkok dan India bagi komoditas unggulan seperti CPO, batu bara, serta besi dan baja. Sementara itu, kinerja investasi pun diperkirakan tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja ekonomi tahun 2022 di berbagai wilayah telah menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Lebih lanjut, inflasi pada akhir 2022 lebih rendah dari perkiraan awal, meskipun berada di atas sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK pada akhir 2022 tercatat 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari perkiraan sesuai *consensus forecast* sebesar 6,5% (yoy) pasca penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022. Perkembangan tersebut didorong oleh dampak rambatan penyesuaian harga BBM yang lebih rendah terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan dan inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah.

Surplus neraca perdagangan barang meningkat seiring dengan kinerja ekspor yang terus membaik karena lonjakan harga komoditas akibat dampak perang Rusia-Ukraina serta permintaan negara mitra dagang terhadap produk manufaktur dan pertambangan Indonesia yang masih kuat. Surplus neraca transaksi berjalan hingga triwulan III 2022 mencapai 9 miliar dolar AS (0,9% dari PDB), jauh melampaui capaian surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2 miliar dolar AS (0,2% dari PDB).

Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022 tercatat sebesar 137,2 miliar dolar AS sehingga lebih dari cukup untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia. Pada 2023, NPI diperkirakan tetap kuat, ditopang oleh transaksi berjalan yang terjaga baik serta surplus neraca transaksi modal dan finansial sejalan dengan PMA yang lebih besar serta aliran investasi yang kembali masuk.

Prospek pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5%-5,3% sebelum meningkat menjadi 4,7%-5,5% pada 2024. Perbaikan permintaan domestik terus berlanjut sejalan dengan inflasi yang diperkirakan semakin terjaga dan mobilitas yang terus meningkat pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Stabilitas eksternal tetap terjaga didukung oleh Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat, sejalan dengan surplus transaksi berjalan di tengah tekanan pada transaksi modal dan finansial. Kinerja NPI yang tetap baik serta respon segera Bank

National Economic Analysis

Economic performance in the fourth quarter of 2022 remained strong despite slowing down, supported by maintained export performance and domestic demand. The economic performance was supported by the non-oil and gas export performance based on Natural Resources (SDA) which remained strong until the fourth quarter of 2022 in line with the strong demand from major trading partner countries, especially China and India, for superior commodities such as CPO, coal, and iron and steel. Meanwhile, investment performance is also expected to grow positively, although it will be lower than the previous quarter. Overall, the economic performance in 2022 in various regions has shown better results compared to the previous period.

Furthermore, inflation at the end of 2022 will be lower than the initial estimate, even though it is above the target of 3.0 ± 1%. CPI inflation at the end of 2022 was recorded at 5.51% (yoy), much lower than the consensus forecast of 6.5% (yoy) after the subsidized fuel price adjustment in September 2022. This development was driven by a more pronounced spillover effect of the fuel price adjustment. low to the increase in inflation in the food category and inflation in the price group which is regulated by the Government.

The surplus in the goods trade balance increased in line with export performance which continued to improve due to the surge in commodity prices due to the impact of the Russia-Ukraine war and demand from trading partner countries for Indonesia's manufacturing and mining products which remained strong. The surplus in the current account balance until the third quarter of 2022 reached USD 9 billion (0.9% of GDP), far exceeding the surplus achieved in the same period the previous year of USD 2 billion (0.2% of GDP).

The position of foreign exchange reserves at the end of December 2022 was recorded at US$137.2 billion, making it more than sufficient to support Indonesia's external resilience. In 2023, the balance of payments is expected to remain strong, supported by a well-maintained current account and a surplus in the capital and financial account balance in line with larger FDI and investment flows that are returning.

The prospect of economic growth in 2023 is predicted to remain strong although it will slow slightly to the midpoint of the 4.5%-5.3% range before increasing to 4.7%-5.5% in 2024. Domestic demand will continue to improve in line with inflation which is expected to increase maintained and mobility that continues to increase after the lifting of the Community Activity Restrictions (PPKM). External stability was maintained supported by Indonesia's balance of payments which remained healthy, in line with the current account surplus amid pressure on the capital and financial account. BOP performance that remains good and the Bank's immediate response Indonesia contributes to

Indonesia berkontribusi dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah pada akhir 2022 tercatat Rp15.568 per dolar AS, terdepresiasi 8,45% dibandingkan akhir 2021.

Kondisi likuiditas di perbankan dan perekonomian tetap longgar sehingga mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan APBN. Kondisi likuiditas longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Dengan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, dampak kenaikan suku bunga terhadap kenaikan suku bunga kredit relatif terbatas. Kebijakan kenaikan suku bunga tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akibat semakin kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

ANALISIS PEREKONOMIAN RIAU

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kinerja ekonomi Riau pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 4,10% (yoy), terdeselerasi dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh 4,58% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali sektor konstruksi yang terkontraksi sebesar 1,25%. Sementara pada komponen pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada sebagian besar komponen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Eskpor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 25,16%. Adanya kebijakan percepatan penyaluran ekspor komoditas CPO dan turunannya melalui program *flush out* dan pembebasan tarif pungutan CPO menjadi nol (USD 0) berdampak positif terhadap kenaikan kinerja ekspor CPO. Disamping itu pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh akselerasi konsumsi Pemerintah seiring percepatan realisasi belanja daerah. Secara spasial, Riau masih menjadi provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-harga berlaku) terbesar di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,18%.

Keuangan Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau pada tahun 2022 ditetapkan lebih rendah dibandingkan APBD tahun 2021. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran sebesar Rp8,96 triliun atau turun 4,10% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp9,34 triliun. Sementara dari sisi belanja, pagu anggaran juga mengalami penyusutan dari Rp9,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp8,99 triliun pada tahun 2022 atau turun sebesar 4,81%. Realisasi belanja hingga triwulan IV 2022 sebesar Rp8,82 triliun atau setara dengan 92,81% dari pagu anggaran, sedangkan realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp9,38 triliun atau mencapai 98,55% dari pagu anggaran,

maintaining the stability of the Rupiah exchange rate. The Rupiah exchange rate at the end of 2022 was recorded at IDR 15,568 per US dollar, depreciating 8.45% compared to the end of 2021.

Liquidity conditions in the banking system and the economy remained loose, thus supporting the disbursement of credit and financing of the state budget. Loose liquidity conditions were driven by accommodative monetary policies and the impact of synergies between Bank Indonesia and the Government in an effort to support national economic recovery from the Covid-19 pandemic. Given the loose liquidity conditions in the banking system, the impact of an increase in interest rates on an increase in lending rates was relatively limited. The interest rate hike policy was also carried out to strengthen the Rupiah exchange rate stabilization policy due to the strengthening US dollar and high uncertainty on global financial markets.

RIAU ECONOMIC ANALYSIS

Regional Macroeconomic Development

Riau's economic performance in the fourth quarter of 2022 grew by 4.10% (yoy), decelerated compared to the third quarter of 2022 which grew 4.58% (yoy). Growth occurred in almost all business fields except the construction sector which contracted by 1.25%. While in the expenditure component, growth occurred in most components. The highest growth occurred in the Foreign Export Component which grew by 25.16%. The policy of accelerating the distribution of exports of CPO commodities and its derivatives through the flush out program and the exemption of CPO levy rates to zero (USD 0) had a positive impact on the increase in CPO export performance. Besides that, economic growth was also driven by accelerated government consumption in line with the accelerated realization of regional spending. Spatially, Riau is still the province with the largest Gross Regional Domestic Product (GDP-current price) outside Java with a contribution to national GDP of 5.18%.

Government Finance

The Riau Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in 2022 is set to be lower than the 2021 APBD. From the revenue side, the Riau Provincial Government has set a budget ceiling of IDR 8.96 trillion, a decrease of 4.10% when compared to the 2021 budget of IDR 9. 34 trillion. Meanwhile, from the expenditure side, the budget ceiling has also decreased from IDR 9.44 trillion in 2021 to IDR 8.99 trillion in 2022 or a decrease of 4.81%. Expenditure realization until the fourth quarter of 2022 amounted to IDR 8.82 trillion or equivalent to 92.81% of the budget ceiling, while realized revenue was recorded at IDR 9.38 trillion or reached 98.55% of the budget ceiling, experiencing a decrease compared to the fourth quarter of 2021 which was recorded of IDR

mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp9,38 triliun. Realisasi APBD dari sisi penerimaan, komponen pendapatan asli daerah terpantau meningkat yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi. Peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah didorong oleh meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok. Lebih lanjut, peningkatan realisasi pendapatan dari retribusi daerah terjadi pada komponen retribusi jasa usaha yang sejalan dengan perbaikan aktivitas usaha seiring melandainya kasus *Covid-19*.

9.38 trillion. Realization of the APBD from the revenue side, the component of regional own-source revenue has been observed to increase which comes from regional taxes and levies as the economic recovery continues. The increase in the realization of regional tax revenues was driven by increased revenues from Motor Vehicle Tax (PKB), Transfer Fees for Motorized Vehicles (BBNKB), Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB), and Cigarette Tax. Furthermore, the increase in revenue realization from regional levies occurred in the component of business service fees which is in line with the improvement in business activities as the Covid-19 case slumps.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Riau pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,81% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,26% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Nasional yang mengalami penurunan dari 5,95% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 5,51% (yoy) pada triwulan IV 2022. Penurunan inflasi ini mengindikasikan inflasi pangan yang lebih terkendali. Selain itu, terbatasnya dampak penyesuaian harga BBM terhadap permintaan komoditas non pangan, serta kebijakan pengendalian inflasi melalui TPID dan GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga yang turut menahan akselerasi inflasi pada triwulan IV 2022.

Developments in Regional Inflation

Riau's inflation in the fourth quarter of 2022 was recorded at 6.81% (yoy), lower than the previous quarter of 7.26% (yoy). This condition is in line with developments in national inflation which decreased from 5.95% (yoy) in the third quarter of 2022 to 5.51% (yoy) in the fourth quarter of 2022. This decline in inflation indicates more controlled food inflation. In addition, the limited impact of fuel price adjustments on demand for non-food commodities, as well as policies to control inflation through TPID and GNPIP in encouraging supply availability, smooth distribution, and price stability which helped restrain inflation acceleration in the fourth quarter of 2022.

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Berlanjutnya pemulihan kinerja perekonomian domestik juga memberikan dampak perbaikan pada sektor perbankan. Lebih lanjut, pemulihan ekonomi turut mendorong fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari peningkatan kredit. Penyaluran kredit perbankan di Riau sebesar Rp143,03 triliun pada triwulan IV 2022 atau tumbuh sebesar 21,64% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 28,01% (yoy). Penuruan penyaluran kredit terjadi sebagai akibat konflik geopolitik serta prakiraan melambatnya ekonomi global. Namun, selaras dengan pemulihan ekonomi Riau yang terus berlanjut hingga triwulan IV 2022, alokasi pembiayaan pada sektor korporasi maupun rumah tangga terpantau tetap tumbuh positif yakni masing-masing tercatat sebesar Rp105,41 triliun atau tumbuh 27,44% (yoy) dan Rp37,62 triliun atau tumbuh 7,89% (yoy).

Regional Financing and Development of Access to Finance and MSMEs

The continued recovery in domestic economic performance also had an improving impact on the banking sector. Furthermore, the economic recovery has also boosted the banking intermediary function as reflected in the increase in credit. Banking lending in Riau amounted to IDR 143.03 trillion in the fourth quarter of 2022 or grew by 21.64% (yoy), lower than the previous quarter which grew by 28.01% (yoy). The decline in lending occurred as a result of geopolitical conflicts and forecasts of a slowdown in the global economy. However, in line with Riau's economic recovery which continued until the fourth quarter of 2022, the allocation of financing to the corporate and household sectors was observed to continue to grow positively, namely, each was recorded at IDR 105.41 trillion or grew 27.44% (yoy) and IDR 37.62 trillion or grew 7.89% (yoy).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sejalan dengan mobilitas masyarakat yang kembali normal, transaksi pembayaran tunai dan non tunai di Riau mengalami peningkatan. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia Provinsi Riau tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp7,29 triliun. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan PPKM serta peningkatan kebutuhan masyarakat akan pembayaran tunai menjelang natal dan tahun baru. Kendati demikian, transaksi non tunai baik melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), maupun transaksi pembayaran kartu debit dan kredit menunjukkan perlambatan pada triwulan IV 2022. Dalam rangka mendukung transformasi digital sistem pembayaran, dilakukan program elektronifikasi untuk meningkatkan implementasi transaksi non tunai dan inkluasi keuangan. Hingga akhir triwulan IV 2022, jumlah *merchant* yang memiliki QR *Code Indonesia Standard* (QRIS) di Riau mencapai 467.853 *merchant*. Untuk itu Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan pihak terkait terus berusaha untuk meningkatkan implementasi traksaksi non tunai dan inklusi keuangan. Beberapa program yang telah dilakukan, di antaranya: 1) memfasilitasi elektronifikasi transaksi Pemda, 2) memfasilitasi elektronifikasi pembayaran sektor transportasi, serta 3) mendukung pengembangan elektronifikasi transaksi retail di sektor lainnya.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Seiring perbaikan kinerja ekonomi Riau, kondisi ketenagakerjaan Riau pada semester II 2022 menunjukkan peningkatan, tercermin dari penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,42% pada Agustus 2021 menjadi 4,37% pada Agustus 2022. Angka TPT Riau juga terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Sumatera dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,33% dan 5,86%. Perkembangan tersebut mengindikasi bahwa terjadi peningkatan ketersediaan lapangan kerja sejalan dengan terkendalinya Covid-19 yang meningkatkan mobilitas dan kembalinya aktivitas sosial ekonomi. Sejalan dengan penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan Riau mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Riau pada September 2022 sebesar 6,84% dari sebelumnya 7% pada periode yang sama di tahun 2021. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan penduduk yang tercermin pada *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan rendah. Di sisi lain peningkatan NTP tanaman perkebunan yang sejalan dengan peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) meningkatkan kesejahteraan petani.

Implementation of the Payment System and Management of Rupiah Currency

In line with people's mobility returning to normal, cash and non-cash payment transactions in Riau have increased. The flow of currency through Bank Indonesia, Riau Province, recorded a net outflow of IDR 7.29 trillion. This is in line with the increase in community mobility after the abolition of the PPKM policy and the increase in the community's need for cash payments ahead of Christmas and the New Year. Nevertheless, non-cash transactions, both through Real Time Gross Settlement (RTGS), Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) transactions, as well as debit and credit card payment transactions, showed a slowdown in the fourth quarter of 2022. In order to support the digital transformation of the payment system, a program was implemented electronification to increase the implementation of non-cash transactions and financial inclusion. Until the end of the fourth quarter of 2022, the number of merchants who have the Indonesian Standard QR Code (QRIS) in Riau has reached 467,853 merchants. For this reason, Bank Indonesia, together with the Regional Government and related parties, continues to strive to improve the implementation of non-cash transactions and financial inclusion. Some of the programs that have been carried out include: 1) facilitating the electronification of local government transactions, 2) facilitating the electronification of payments in the transportation sector, and 3) supporting the development of the electronification of retail transactions in other sectors.

Employment and Welfare

As Riau's economic performance improves, Riau's employment conditions in semester II 2022 show an increase, reflected in a decrease in the percentage of the Open Unemployment Rate (TPT) from 4.42% in August 2021 to 4.37% in August 2022. Riau's TPT figure is also lower when compared with the average Sumatran and National TPT, which were respectively 5.33% and 5.86%. These developments indicate that there has been an increase in the availability of jobs in line with the controlled Covid-19 which has increased mobility and the return of socio-economic activities. In line with employment absorption, Riau's poverty rate has decreased. Riau's poverty rate in September 2022 was 6.84% from the previous 7% in the same period in 2021. Furthermore, the level of population inequality reflected in the Gini Ratio shows low inequality. On the other hand, an increase in the NTP of plantation crops in line with an increase in the price of Fresh Fruit Bunches (FFB) increases the welfare of farmers.

Prospek Perekonomian Daerah

Secara agregat untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko bagi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Perekonomian Riau diperkirakan mampu tumbuh positif seiring pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan dalam kisaran 3,7%-4,5% (yoy). Meskipun tekanan inflasi global berpotensi menekan laju pertumbuhan, kinerja ekspor yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih tinggi. Terjaganya permintaan domestik serta permintaan eksternal akan CPO, olahan kertas, serta batu bara seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang yang masih kuat dan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor CPO. Pada tahun 2023, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Provinsi Riau berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Oleh karena itu, meskipun terdapat risiko global, adanya peningkatan ekspor, dan disertai peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi akan mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Riau pada tahun 2023.

Regional Economic Prospects

In aggregate for 2023, economic growth is predicted to remain relatively strong. High geopolitical tensions in 2022 are expected to pose a risk to global economic growth in 2023. Riau's economy is expected to grow positively as the global economic recovery continues. Riau's economic growth is estimated in the range of 3.7% -4.5% (yoy). Even though global inflationary pressures have the potential to depress the growth rate, the strong export performance has encouraged higher domestic economic growth. Maintained domestic demand as well as external demand for CPO, processed paper and coal in line with the strong demand from several trading partners and government policies to encourage CPO exports. In 2023, regional financial policies will be focused on policies that pay attention to fiscal capacity, which mainly focuses on regional original revenues, transfer revenues, and other legal income. The Provincial Government of Riau seeks to increase revenue, especially the management of local revenue through intensification and extensification efforts. Therefore, even though there are global risks, an increase in exports, accompanied by an increase in household consumption and investment will support the continuation of Riau's economic recovery in 2023.

ANALISIS PEREKONOMIAN KEPULAUAN RIAU

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perbaikan ekonomi di Kepulauan Riau terus berjalan pada triwulan IV 2022 ditandai dengan pertumbuhan sebesar 5,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,40% (yoy). Tren pertumbuhan ekonomi yang positif didorong oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada triwulan IV 2022 tercatat Rp50.475.367,44 juta rupiah atau tumbuh sebesar 7,24% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, pada triwulan IV 2022 didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT) sebesar 41,81% diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 39,13% dari PDRB.

RIAU ISLANDS ECONOMIC ANALYSIS

Regional Macroeconomic Development

Economic improvement in the Riau Archipelago continued in the fourth quarter of 2022 marked by growth of 5.09% (yoy), lower than the previous quarter of 6.40% (yoy). The trend of positive economic growth is driven by increased mobility and community activity. Gross Regional Domestic Product (GRDP) at a constant price basis (ADHK) in the fourth quarter of 2022 was recorded at IDR 50,475,367.44 million rupiah or grew by 7.24% (yoy), strengthening compared to the previous quarter. From the expenditure side, in the fourth quarter of 2022 it was dominated by Gross Fixed Capital Formation (PMBT) of 41.81% followed by household consumption of 39.13% of GRDP.

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan IV 2022 Kepulaun Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 5,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,79% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok perawatan

Developments in Regional Inflation

In the fourth quarter of 2022 the Riau Islands recorded inflation of 5.83% (yoy), lower than the previous quarter of 6.79% (yoy). This was influenced by price increases in the expenditure group, namely the food, beverage and tobacco group, the transportation group, the personal care and other services group, as well as the supplies, equipment

pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin tumah tangga. Selain itu inflasi juga dipengaruhi oleh komoditi bensin dan transportasi khususnya tarif angkutan udara. Upaya pengendalian inflasi di Kepulauan Riau juga diperkuat melalui sinergi antar instansi dengan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

and household routine maintenance group. In addition inflation was also influenced by gasoline and transportation commodities, especially air fares. Efforts to control inflation in the Riau Archipelago were also strengthened through synergy between agencies and institutions within the Regional Inflation Control Team (TPID).

Keuangan Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi Kepulaun Riau pada triwulan IV 2022 didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan *net* ekspor. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 6,43% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Selain itu konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan menjadi 0,67% yang sebelumnya terkontraksi sebesar -1,29%. Sejalan dengan perkembangan sisi ekspor, Kepulauan Riau mencatatkan kontribusi *net* ekspor sebesar 5,88%.

Government Finance

The Riau Islands' economic growth in the fourth quarter of 2022 will be driven by components of household consumption, government consumption, and net exports. The household consumption component grew by 6.43%, an increase compared to the previous quarter, in line with increasing public demand. In addition government consumption also grew to 0.67%, which previously contracted by -1.29%. In line with developments on the export side, the Riau Archipelago recorded a net export contribution of 5.88%.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan mobilitas masyarakat dan menurunnya kasus Covid-19 serta telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama triwulan IV 2022 telah mendorong peningkatan aktivitas pada lapangan usaha terkait. Struktur perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 40,81%, diikuti lapangan usaha konstruksi 19,21%, serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian 12,58%.

Employment and Welfare

In terms of the business sector, increased community mobility and decreased cases of Covid-19 and the lifting of the Community Activity Restrictions (PPKM) for the fourth quarter of 2022 have encouraged increased activity in related business fields. The economic structure of the Riau Islands in 2022 will still be dominated by the processing industry with a contribution of 40.81%, followed by the construction business sector with 19.21%, and the mining and quarrying business sector with 12.58%.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau hingga triwulan IV 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu didorong oleh realisasi penerimaan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat. Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar Rp12,92 triliun atau 100,07% dari total anggaran sementara realisasi belanja mencapai Rp13,01 triliun atau 93,27% dari pagu anggaran. Peningkatan pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terutama berasal dari pos pajak daerah dan pendapatan transfer Pemerintah Pusat. Sementara realisasi belanja mengalami peningkatan dari 87,15% menjadi 93,27%, didominasi oleh belanja operasi (74,11%), belanja modal (16,10%), belanja transfer (9,15%), dan belanja tak terduga (0,05%).

Regional Revenue and Expenditure Realization

Realization of Regional Government revenue and spending in the Riau Archipelago until the fourth quarter of 2022 was recorded higher than the same period last year driven by the realization of receipts from Regional Original Income (PAD) and central government transfers. Revenue realization up to the fourth quarter of 2022 amounted to Rp12.92 trillion or 100.07% of the total budget, while actual spending reached Rp13.01 trillion or 93.27% of the budget ceiling. The increase in revenue mainly occurred in the Regional Original Income (PAD) post which mainly came from regional tax posts and Central Government transfer income. Meanwhile, expenditure realization increased from 87.15% to 93.27%, dominated by operational expenditure (74.11%), capital expenditure (16.10%), transfer expenditure (9.15%), and unforeseen expenditure (0.05%).

Stabilitas Sistem Keuangan

Secara umum, kinerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepulauan Riau pada triwulan IV 2022 masih terjaga sejalan dengan tren perbaikan kondisi perekonomian. Penyaluran kredit oleh Bank tumbuh sebesar 11,77% (yoy) pada triwulan IV 2022, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp72,87 triliun atau tumbuh 10,05% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,15% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK terjadi pada jenis giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 24,46% (yoy) dan 8,23% (yoy). Kinerja intermediasi perbankan di Kepulauan Riau tercermin dari rasio LDR yang mengalami pelonggaran sebesar 61,58% pada triwulan IV setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 65,08%. Di sisi lain, *Non Performing Financing (NPF)* masih terjaga di bawah 5% yakni sebesar 4,26%.

Financial System Stability

In general, the performance of the Financial System Stability (SSK) in the Riau Archipelago in the fourth quarter of 2022 was maintained in line with the trend of improving economic conditions. Bank lending grew by 11.77% (yoy) in the fourth quarter of 2022, relatively stable compared to the previous quarter. Furthermore, the total Third Party Funds (DPK) amounted to IDR 72.87 trillion or grew 10.05% (yoy), higher than the previous quarter which grew 3.15% (yoy). The increase in TPF growth occurred in the types of demand deposits and savings, which grew 24.46% (yoy) and 8.23% (yoy), respectively. The performance of banking intermediation in the Riau Archipelago was reflected in the LDR ratio which was easing by 61.58% in the fourth quarter after it was recorded at 65.08% in the previous quarter. On the other hand, Non Performing Financing (NPF) are still maintained below 5%, which is 4.26%.

Peningkatan Pembayaran Transaksi Non Tunai

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2022 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp2,36 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat Rp579,9 miliar. Sementara itu, nominal transaksi non tunai melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) triwulan IV 2022 tercatat mencapai Rp43,58 triliun atau terkontraksi sebesar 7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp43,87 triliun. Jumlah transaksi SKNBI triwulan IV 2022 mengalami penurunan dari 13,89% (yoy) atau Rp2,74 triliun menjadi sebesar7,32% (yoy) atau Rp2,79 triliun. Selain itu transaksi menggunakan APMK mengalami penurunan baik dari segi nominal maupun jumlah transaksi seiring preferensi masyarakat yang menggunakan transaksi tunai dan pembayaran non tunai melalui *QRIS*. Sampai dengan akhir triwulan IV 2022, jumlah *merchant QRIS* di Kepulauan Riau telah mencapai 437.749 merchant, meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebanyak 407.842 *merchant*. Peningkatan tersebut seiring dengan membaiknya adaptasi masyarakat terhadap transaksi non tunai.

Increased Payments for Non-Cash Transactions

Cash payment transaction activity in the fourth quarter of 2022 recorded a net outflow of IDR 2.36 trillion, higher than the third quarter of 2022 which was recorded at IDR 579.9 billion. Meanwhile, nominal non-cash transactions through the Real Time Gross Settlement (RTGS) in the fourth quarter of 2022 were recorded at IDR 43.58 trillion or a contraction of 7% (yoy), higher than the previous quarter of IDR 43.87 trillion. The number of SKNBI transactions in the fourth quarter of 2022 decreased from 13.89% (yoy) or IDR 2.74 trillion to 7.32% (yoy) or IDR 2.79 trillion. In addition, transactions using APMK have decreased both in terms of nominal and number of transactions in line with people's preference for using cash transactions and non-cash payments through QRIS. Until the end of the fourth quarter of 2022, the number of QRIS merchants in the Riau Archipelago had reached 437,749 merchants, an increase compared to the previous quarter of 407,842 merchants. This increase was in line with the community's better adaptation to non-cash transactions.

Kesejahteraan Masyarakat

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, tingkat kesejahteraan di Kepulauan Riau menunjukkan perbaikan yang diindikasikan dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepulauan Riau tercatat mengalami perbaikan pada Agustus 2022 sebesar 8,23%, menurun dibandingkan posisi Agustus 2021 sebesar 9,91%. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2022 dilihat dari rata-rata NTP bulan September-Desember 2022, mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. NTP pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar

Public welfare

Along with continued economic growth, the level of welfare in the Riau Archipelago is showing improvement as indicated by the increase in the Human Development Index (IPM) and Farmer Exchange Rates (NTP) as well as a decrease in the Open Unemployment Rate (TPT). The Open Unemployment Rate (TPT) in the Riau Islands recorded an improvement in August 2022 of 8.23%, a decrease compared to the position in August 2021 of 9.91%. In addition, the level of farmer welfare in the fourth quarter of 2022, seen from the average FTT for September-December 2022, has decreased compared to the previous quarter. The NTP in the fourth quarter of 2022 was recorded at 104.14, lower than 106.20 from the same quarter in 2021. The Riau Islands Gini Ratio in September 2022 was

104,14 lebih rendah dari 106,20 dari triwulan yang sama tahun 2021. *Gini Ratio* Kepulauan Riau pada September 2022 tercatat sebesar 0,325, menurun dibandingkan September 2021 sebesar 0,339. Perbaikan juga terjadi pada IPM, pada tahun 2022 tercatat sebesar 76,46 meningkat 0,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 75,79.

recorded at 0.325, a decrease compared to September 2021 of 0.339. Improvements also occurred in HDI, in 2022 it was recorded at 76.46, an increase of 0.67 points compared to the previous year, which was 75.79.

Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan *outlook* terbaru *International Monetary Fund* (IMF) Januari 2023 menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi tumbuh sebesar 2,9% (yoy) lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya sebesar 2,7% (yoy). Koreksi proyeksi ekonomi tersebut didorong oleh masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina, *lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok untuk mencegah penyebaran kasus *Covid-19*, kenaikan harga komoditas pangan, dan energi yang memicu inflasi serta meningkatnya risiko di pasar keuangan. Tren perbaikan ekonomi Indonesia diperkirakan masih terus berlanjut di tengah peningkatan risiko pelemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi yang meningkat. Sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi Kepulaun Riau diperkirakan tetap tinggi meskipun mengalami perlambatan. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Kepulauan Riau pada tahun 2023 tumbuh pada kisaran 4,2%-5,0% (yoy). Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada dalam sasaran inflasi nasional 3,0 ± 1% (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diprakirakan bersumber dari kenaikan harga (1) kelompok makanan, minuman, dan tembakau; (2) transportasi, serta (3) penyediaan makanan dan minuman.

Regional Economic Prospects

Based on the latest Outlook for the International Monetary Fund (IMF) for January 2023, the projected global economic growth in 2023 is predicted to grow by 2.9% (yoy), higher than the previous version of 2.7% (yoy). The correction in the economic projection is driven by the ongoing Russia-Ukraine war, the lockdown imposed by the Chinese government to prevent the spread of the Covid-19 case, rising food and energy commodity prices which trigger inflation and increased risks in the financial market. The trend of improvement in Indonesia's economy is expected to continue amidst increasing risks of a weakening world economy and rising inflationary pressures. In line with the improvement in the domestic economy, the Riau Archipelago's economic growth is expected to remain high despite experiencing a slowdown. Bank Indonesia estimates that the Riau Archipelago's economy in 2023 will grow in the range of 4.2% -5.0% (yoy). Furthermore, inflationary pressure in the Riau Archipelago Province in 2023 is expected to be lower than in 2022 and within the national inflation target of 3.0 ± 1% (yoy). Inflation in 2023 is predicted to originate from rising prices for (1) the food, beverage and tobacco group; (2) transportation, and (3) provision of food and drink.

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN

Secara umum ketahanan perbankan pada September 2022 masih terjaga, kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) secara nasional menunjukkan perbaikan dengan kredit yang tumbuh tinggi melebihi pertumbuhan DPK. Hal tersebut mendorong kenaikan LDR dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi likuiditas terpantau relatif memadai, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 121,74% dan 27,50%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Ketahanan BUK cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi, risiko kredit yang melandai, serta peningkatan rentabilitas dan tingkat efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

BANKING INDUSTRY ANALYSIS

In general, banking resilience in September 2022 was still maintained, the performance of Conventional Commercial Banks (BUK) nationally showed improvement with high credit growth exceeding TPF growth. This prompted an increase in LDR compared to the previous year. Liquidity conditions were monitored to be relatively adequate, reflected in the relatively high LA/NCD and LA/DPK ratios of 121.74% and 27.50% respectively, or far above the threshold of 50% and 10%. BUK's resilience is quite solid with a fairly high level of capital, sloping credit risk, as well as increased profitability and efficiency levels compared to the previous year.

Aset BUK menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,26% (yoy), sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset seiring dengan pertumbuhan DPK.

BUK's assets showed a growth of 7.26% (yoy), slightly increasing compared to the previous year which grew 7.25% (yoy). The increase in asset growth was in line with the growth in DPK. DBK BUK grew 6.13% (yoy) slowing compared to the

DBK BUK tumbuh 6,13% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,16% (yoy). Berdasarkan kelompok Bank, sebagian besar DPK berada pada kelompok Bank BUMN (44,32%), diikuti BUSN (43,05%), masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,38% (yoy) dan 7,10% (yoy).

Sebagian besar (59.53%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan Bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (17,23%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,33%). Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit didominasi oleh kredit produktif (73,59%) dan kredit konsumsi (26,41%).

Pada September 2022, rentabilitas BUK tercatat membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya ROA sebesar 2,53%, yang pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,91%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh 44,84% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 16,17% (yoy). Sementara rerata total aset juga tercatat tumbuh 9,18% (yoy).

Sejalan dengan ROA yang mengalami peningkatan, rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 83,68% menjadi 77,18%. Perbaikan disebabkan oleh turunnya beban operasional yang terkontraksi -4,27% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,17% (yoy). Dari sisi margin, terjadi peningkatan rasio NIM sebesar 4,86% dari tahun sebelumnya 4,62%. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan bunga bersih yang tumbuh 14,66% (yoy) lebih tinggi dibandingkan peningkatan pertumbuhan aset produktif tercatat sebesar 8,91% (yoy).

previous year of 7.16% (yoy). Based on bank group, most of the DPK were in the BUMN Bank group (44.32%), followed by BUSN (43.05%), each of which recorded growth of 5.38% (yoy) and 7.10% (yoy).

Most of the banking funds (59.53%) were channeled in the form of credit to non-bank third parties followed by placements in the form of securities (17.23%) and placements with Bank Indonesia (11.33%). Based on the type of use, credit is dominated by productive credit (73.59%) and consumption credit (26.41%).

In September 2022, BUK's profitability was recorded to have improved as indicated by an increase in ROA of 2.53%, which was 1.91% in the same period the previous year. The increase in ROA was due to profit before tax growth which grew 44.84% (yoy), after growing 16.17% (yoy) in the previous year. Meanwhile, the average total assets grew by 9.18% (yoy).

In line with the increase in ROA, the bank's BOPO ratio also improved compared to the previous year, which decreased from 83.68% to 77.18%. The improvement was caused by a decrease in operating expenses which contracted -4.27% (yoy) when compared to the previous year which grew 2.17% (yoy). In terms of margin, there was an increase in the NIM ratio of 4.86% from 4.62% the previous year. The increase in NIM was in line with net interest growth which grew 14.66% (yoy) higher than the increase in earning asset growth which was recorded at 8.91% (yoy).

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
Business Development Strategy

Program Transformasi BPD

Transformasi BPD yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bertujuan agar seluruh BPD mampu meningkatkan ketahanan usaha (*resilience*) dan memperkuat peran sebagai agen pembangunan daerah. Esensi dari program ini adalah meningkatkan sinergi antar BPD melalui transfer pengetahuan dan *benchmarking*.

Program ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2015 dengan menghadirkan visi "Menjadi Bank Regional yang Berdaya Saing Tinggi dan Kuat serta Berkontribusi Signifikan bagi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan".

Kerangka program transformasi BPD disusun dengan lebih *holistic* dan seimbang dengan menekankan pentingnya fondasi (termasuk GCG) dan aspek pendukung (infrastruktur dan SDI) untuk menopang 3 (tiga) pilar proses transformasi termasuk aspek bisnis guna mencapai *outcome* (*destination statement*) transformasi BPD.

BPD Transformation Program

The BPD transformation designed by the Financial Services Authority (OJK) together with the Ministry of Home Affairs and the Association of Regional Development Banks (Asbanda) aims to enable all BPDs to increase business resilience and strengthen their role as regional development agents. The essence of this program is to increase synergy between BPDs through knowledge transfer and benchmarking.

This program was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on 26 May 2015 by presenting the vision of "Becoming a Regional Bank that is Highly Competitive and Strong and Contributes Significantly to Sustainable Regional Economic Growth and Equality".

The BPD transformation program framework is prepared in a more holistic and balanced manner by emphasizing the importance of foundations (including GCG) and supporting aspects (infrastructure and HR) to support the 3 (three) pillars of the transformation process including business aspects in order to achieve the outcome (destination statement) of BPD transformation.

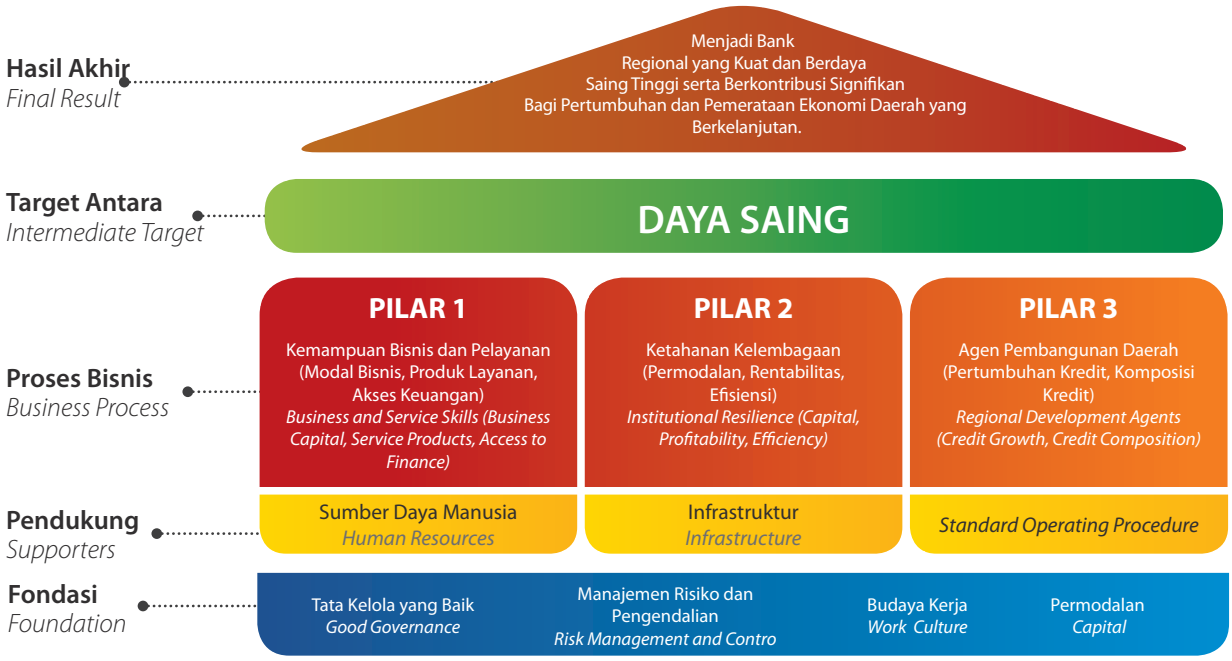

Program transformasi BPD dibagi atas 3 (tiga) fase *roadmap* yang digambarkan dalam bagan berikut:

The BPD transformation program is divided into 3 (three) roadmap phases as illustrated in the following chart:

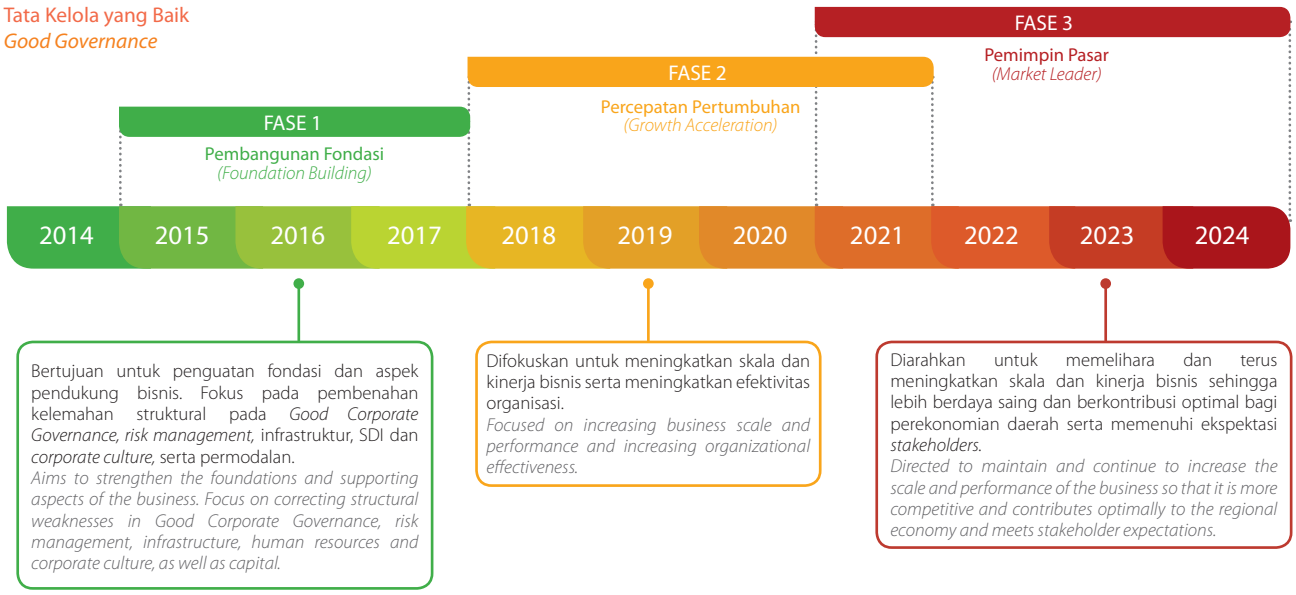

Outcome (*Destination Statement*) Transformasi BPD merupakan *milestone* terukur dalam mencapai visi baru yang dijabarkan sesuai 3 (tiga) Tema Transformasi BPD dan menjadi pedoman kerangka Transformasi BRK Syariah yang dituangkan dalam Rencana Korporasi (*Corporate Plan*).

The Outcome (Destination Statement) of BPD Transformation is a measurable milestone in achieving a new vision which is described in accordance with 3 (three) BPD Transformation Themes and becomes a guideline for the BRK Syariah Transformation framework as outlined in the Corporate Plan (Corporate Plan).

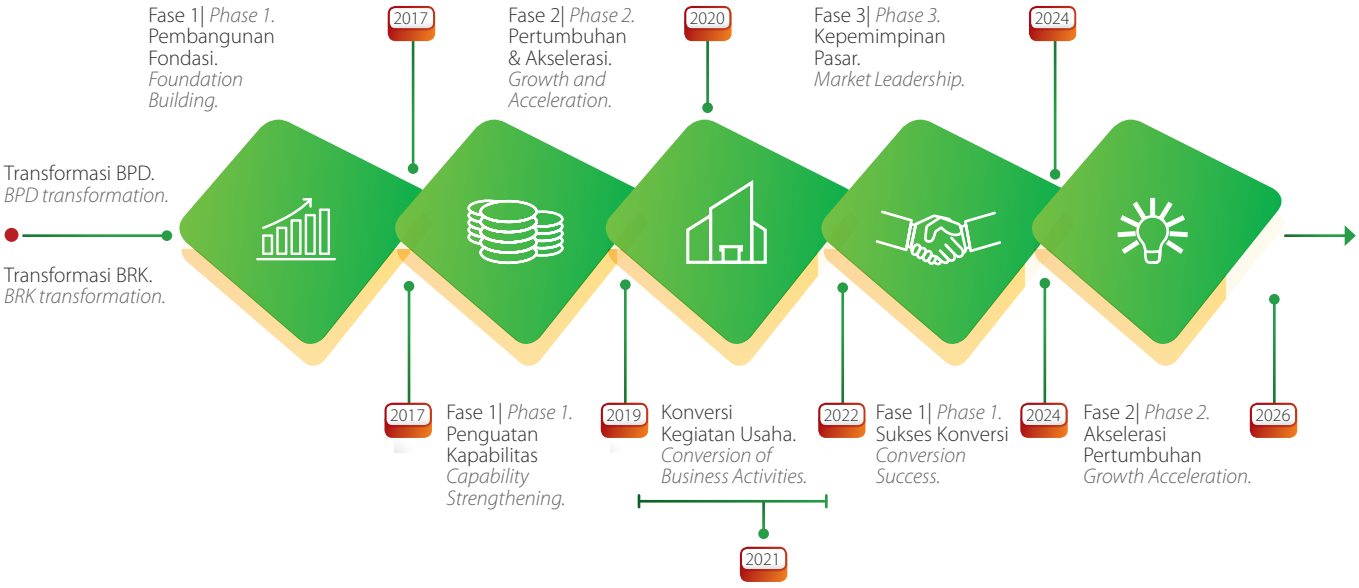

Tahun 2022 merupakan titik awal *Fase* III dalam *roadmap* program transformasi BPD. Dalam *fase* ini diharapkan Bank dapat memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga lebih berdaya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Oleh karena itu Bank mempersiapkan langkah-langkah strategis melalui Inisiatif Strategis tahun 2022, yaitu:

2022 is the starting point for Phase III in the BPD transformation program roadmap. In this phase, it is hoped that the Bank will be able to maintain and continue to improve the scale and performance of the business so that it is more competitive and contributes optimally to the regional economy and meets stakeholders' expectations. Therefore the Bank is preparing strategic steps through Strategic Initiatives in 2022, namely:

1). Siap untuk Konversi (pra dan pasca)
Konversi menjadi Bank Umum Syariah merupakan sasaran strategis paling utama dalam proses bisnis Bank Riau Kepri periode ini, karena merupakan amanah dari RUPS yang merupakan organ tertinggi organisasi. Pada 22 Agustus 2022 dengan izin Allah Bank secara resmi mengubah kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

2). Kuatnya GRC, Kualitas SDI, dan Budaya Perusahaan
Penguatan GRC mencakup pengawasan aktif Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan perangkat kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; serta sistem pengendalian yang menyeluruh.

Bank menyadari bahwa transformasi/akselerasi digital harus diikuti dengan adanya transformasi proses bisnis. Oleh karena itu Bank akan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap proses bisnis khususnya proses manajemen risiko agar pengelolaan risiko Bank tetap relevan dengan konteks eksternal yang ada.

Bank telah mencanangkan program pengembangan kualitas SDI secara konsisten melalui sistem pengelolaan SDI yang terpadu untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja secara berkelanjutan. SDI Bank ke depan diharapkan dapat menjadi sumber keunggulan bersaing perusahaan yang berkelanjutan dalam menjalankan roda organisasi dan pencapaian kinerja bisnis Bank. Manajemen Jalur Karir (*Career Path Management*, *CPM*) merupakan manajemen SDI yang mendukung upaya pembangunan dan pengembangan secara internal calon-calon pimpinan Bank yang kompeten di masa depan (*to grow the leaders from within*).

Dalam menghadapi kompetisi di era digital Bank mengupayakan pembangunan SDI yang memiliki pemahaman memadai terkait teknologi informasi sehingga penggunaan teknologi dapat berjalan efektif dan optimal karena didukung oleh SDI yang tepat. Pengembangan talenta digital (digital talent) dibutuhkan Bank karena merupakan bagian dari transformasi/akselerasi digital. Bank harus memiliki kepemimpinan digital (*digital leadership*) yang kuat. Kepemimpinan ini dibutuhkan karena merupakan hal yang strategis dalam upaya memanfaatkan aset digital yang dimiliki Bank untuk mencapai tujuan organisasi. Digital leadership merupakan kombinasi dari pengembangan kapasitas digital (*digital capabilities*) dan kapasitas kepemimpinan (*leadership capabilities*). *Digital capabilities* meliputi kemampuan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah proses bisnis Bank antara lain dalam hal interaksi Bank dengan Nasabah (*customer experience*), pengembangan talenta dan organisasi (*talent*

1). Ready for Conversion (pre and post)
Converting to an Islamic Commercial Bank is the most important strategic goal in the business processes of Bank Riau Kepri this period, because it is a mandate from the GMS which is the highest organ of the organization. On August 22, 2022, with Allah's permission, the Bank officially changed its business activities from a Conventional Commercial Bank to an Islamic Commercial Bank.

2). Strong GRC, HR Quality and Corporate Culture
GRC strengthening includes active oversight of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board; the adequacy of policies, procedures and limits; adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes; as well as a comprehensive control system.

The Bank realizes that digital transformation/acceleration must be followed by business process transformation. Therefore the Bank will make continuous improvements to business processes, especially risk management processes so that the Bank's risk management remains relevant to the existing external context.

The Bank has launched a consistent HR quality development program through an integrated HR management system to improve professionalism and performance in a sustainable manner. In the future, the Bank's HR is expected to become a source of sustainable corporate competitive advantage in running the organization and achieving the Bank's business performance. Career Path Management (CPM) is HR management that supports development and internal development of competent future Bank leadership candidates (to grow the leaders from within).

In facing competition in the digital era, the Bank strives to develop human resources who have adequate understanding of information technology so that the use of technology can run effectively and optimally because it is supported by the right human resources. The development of digital talent is needed by the Bank because it is part of digital transformation/ acceleration. Banks must have strong digital leadership. This leadership is needed because it is strategic in efforts to utilize digital assets owned by the Bank to achieve organizational goals. Digital leadership is a combination of digital capabilities and leadership capabilities. Digital capabilities include the ability to use technology to change the Bank's business processes, including in terms of Bank interactions with customers (customer experience), talent and organization development (talent and organization), internal process operations (operations), and business model formulation (business model innovation).). While leadership capabilities include the ability to drive and lead digital transformation

and organization), operasionalisasi proses internal (*operations*), dan perumusan model bisnis (*business model innovation*). Sementara *leadership capabilities* meliputi kemampuan untuk menggerakkan dan memimpin transformasi digital dalam hal teknologi dan bisnis, visi dan tujuan, pemberdayaan tenaga kerja, tata kelola, serta budaya dan keterlibatan.

in terms of technology and business, vision and goals, workforce empowerment, governance, and culture and engagement.

Secara umum Bank telah mengembangkan program Budaya Perusahaan ***I-SHARE***, yang merupakan akronim dari 6 (enam) tatanan nilai yang menjadi panduan bagi Insan BRK Syariah dalam berperilaku, yakni *Integrity, Synergy, Honesty, Adaptive, Respect*, dan *Excellence*. Spirit berbagi (*sharing*) merupakan modal utama dalam menampilkan kinerja terbaik yang bernilai kontributif dalam memajukan perusahaan. Selain itu "*sharing*" merupakan salah satu karakteristik dan nilai dari Bank yang merupakan implementasi dari dasar filosofi religiusitas dan erat kaitannya dengan keberkahan.

*In general, the Bank has developed the **I-SHARE** Corporate Culture program, which is an acronym for 6 (six) values that serve as a guideline for BRK Syariah personnel in behaving, namely Integrity, Synergy, Honesty, Adaptive, Respect and Excellence. The spirit of sharing (sharing) is the main capital in showing the best performance that is valuable in advancing the company. In addition, "sharing" is one of the characteristics and values of the Bank which is the implementation of the basic philosophy of religiosity and is closely related to blessings.*

3). Digitalisasi Proses Bisnis yang Didukung oleh Kemampuan Teknologi Informasi

Lompatan awal dari proses digitalisasi Bank dilakukan dengan peluncuran produk *Mobile Banking* dan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Dalam melakukan akselerasi pengembangan layanan digital, Bank tetap memperhatikan kesesuaian layanan dengan karakteristik bisnis usaha baik dari segi produk, proses dan model bisnis, serta kesiapan SDI. Kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi yang memiliki keahlian merupakan bagian dari strategi bisnis ke depan. Selain menerapkan inovasi digital pada berbagai produk layanan perbankan, Bank memanfaatkan digital marketing sebagai upaya menjangkau Nasabah. Dengan tingginya jumlah pemakai smartphone di Indonesia umumnya dan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya, arah pemasaran di era digital banyak mengandalkan berbagai media yang dapat diakses melalui *smartphone*.

3). Digitalization of Business Processes Supported by Information Technology Capabilities

The initial leap in the Bank's digitization process was made with the launch of Mobile Banking and QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) products. In accelerating the development of digital services, the Bank continues to pay attention to the suitability of services with business characteristics both in terms of products, processes and business models, as well as HR readiness. Cooperation and collaboration with technology service providers who have expertise is part of the business strategy going forward. In addition to implementing digital innovation in various banking service products, the Bank utilizes digital marketing as an effort to reach customers. With the high number of smartphone users in Indonesia in general and Riau Province and Riau Archipelago Province in particular, the direction of marketing in the digital era relies heavily on various media that can be accessed via smartphones.

4). Peningkatan Bisnis UMKM dengan Tetap Mengoptimalkan Bisnis Konsumtif dan Komersial

Bank mendukung penuh program-program prioritas di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan upaya peningkatan bisnis UMKM. Salah satu di antaranya adalah menerapkan rencana bisnis yang bersinergi dengan program RPJMD Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang fokus pada industri daerah, sektor UMKM, dan industri unggulan daerah, sehingga dengan proses sinergi tersebut akan memperkuat peran Bank sebagai agen pembangunan daerah.

4). Increasing the MSME Business while Optimizing the Consumptive and Commercial Business

The Bank fully supports priority programs in Riau Province and Riau Archipelago Province which are in line with efforts to increase MSME business. One of them is implementing a business plan that synergizes with the Riau Province and Riau Islands Province RPJMD programs that focus on regional industry, the MSME sector, and regional leading industries, so that this synergy process will strengthen the role of the Bank as a regional development agent.

Secara Umum arah tujuan Bank dalam bisnis UMKM adalah sebagai berikut:

In general, the direction of the Bank's objectives in the MSME business is as follows:

a. *Go Profit*, menuju segmen bisnis yang memberikan keuntungan bagi keberlangsungan usaha.
b. *Go Development*, berkolaborasi untuk mendukung program pembangunan daerah sekaligus menjadi agen pembangunan.
c. *Go Prosper*, memberikan bantuan teknis dan non teknis kepada masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah yang *unbankable* untuk menjadi *bankable* agar berdaya dalam peningkatan ekonomi.

5). Komunikasi Pemasaran, Aksesibilitas Produk, dan Layanan (*Tangible* dan *Intangible*) Optimal

Bank memperkuat kegiatan pemasaran pada sisi komunikasi pemasaran (*marketing communication*) dengan membangun kompetensi pada digital marketing. Diharapkan dengan strategi komunikasi pemasaran yang optimal produk dan layanan Bank dapat diterima dan tumbuh di masyarakat. Digital marketing membantu bisnis menjangkau lebih banyak prospek dengan lebih efisien, efektif, dan terukur. Dengan tuntutan dan ekspektasi konsumen yang tinggi, Bank harus dapat menjangkau konsumen dengan tepat waktu, tepat orang, tepat kebutuhan, dan relevan.

Peningkatan aksesibilitas Bank dilakukan secara digital maupun non digital. Menjadi bagian dari ekosistem digital, kolaborasi merupakan opsi yang harus dilakukan Bank agar dapat *exist* pada model bisnis baru yang serba digital. Kolaborasi dilakukan melalui *platform sharing*, *infrastructure sharing*, dan kerjasama dalam distribusi produk dan layanan.

Kolaborasi dengan bentuk *platform sharing* dimana Bank bertindak sebagai penyedia *platform* melalui suatu aplikasi *mobile*. Mitra Bank dapat memanfaatkan *platform* Bank untuk memberikan layanan kepada Nasabah Bank. Sementara kerja sama dengan institusi keuangan dan non keuangan dapat dilakukan dalam bentuk *sharing service* dan distribusi produk serta layanan. Disamping itu bentuk kerja sama lainnya adalah dalam hal distribusi dan penawaran produk dilakukan untuk memperluas akses konsumen terhadap produk Bank.

6). *Brand Image* Kuat

a. Mengintegrasikan media konvensional dan media digital dalam pemasaran dan komunikasi kepada Nasabah dan masyarakat.
b. Meningkatkan edukasi produk dan layanan baru yang dimiliki Bank ke lingkungan internal dan eksternal secara berkesinambungan.

a. Go Profit, towards business segments that provide benefits for business continuity.
b. Go Development, collaborating to support regional development programs as well as being a development agent.
c. Go Prosper, providing technical and non-technical assistance to low-income economic communities who are unbankable to become bankable so that they are empowered in improving the economy.

5). Optimal Marketing Communication, Product Accessibility and Services (Tangible and Intangible).

The Bank strengthens marketing activities on the marketing communication side by building competency in digital marketing. It is hoped that with an optimal marketing communication strategy, the Bank's products and services can be accepted and grow in society. Digital marketing helps businesses reach more prospects more efficiently, effectively and scalably. With high consumer demands and expectations, the Bank must be able to reach consumers in a timely manner, with the right people, right needs, and relevant.

Increasing Bank accessibility is carried out digitally and non-digitally. Being part of a digital ecosystem, collaboration is an option that must be carried out by the Bank so that it can exist in a new, all-digital business model. Collaboration is carried out through platform sharing, infrastructure sharing, and cooperation in the distribution of products and services.

Collaboration with platform sharing where the Bank acts as a platform provider through a mobile application. Bank Partners can take advantage of the Bank's platform to provide services to Bank Customers. Meanwhile, cooperation with financial and non-financial institutions can be carried out in the form of sharing services and distribution of products and services. Besides that, other forms of cooperation are in terms of distribution and product offerings to expand consumer access to Bank products.

6). Strong Brand Image

a. Integrating conventional media and digital media in marketing and communicating to customers and the public.
b. Improving education on new products and services owned by the Bank to the internal and external environment on an ongoing basis.

7). Kepuasan Nasabah Terpenuhi dengan Tingkat Kepuasaan Tinggi
   a. Secara regular mengukur dan menilai kualitas layanan (*service quality*) baik dilakukan sendiri oleh Bank maupun bekerjasama dengan pihak luar.
   b. *Monitoring* melekat terhadap *service leader* dan *front liner* untuk memperbaiki gap yang telah disepakati.
   c. Sertifikasi *Service Exellent* bagi *Fasilitator Service*.
   d. Mempermudah akses info terhadap produk dan layanan Bank dengan menyiapkan *Sales Kit* berbasis web serta *QR Code* produk dan layanan.
   e. Memperkuat/penyempurnaan *Call Center*, salah satunya dengan membuat aplikasi perantara *Call Center*.
   f. Internalisasi budaya layanan dan peningkatan kompetensi dengan menyiapkan *e-learning*.
   g. *Monitoring* dan peningkatan Terminal Perbankan Elektronik (TPE) secara sistematis, misalnya dengan pendekatan *Lean Six Sigma*.
   h. Menyusun *Service Blue Print* Bank Riau Kepri.

8). Permodalan Kuat
   Dalam rangka menguatkan permodalan Bank menjalankan beberapa pendekatan, yaitu:
   a. Melakukan pendekatan sistematis kepada Pemegang Saham untuk menambah permodalan dalam bentuk skema penambahan penyetoran modal.
   b. Konsisten dalam menahan sebagian laba untuk dijadikan porsi cadangan umum. Bank berkomunikasi dengan para Pemegang Saham agar dividen *pay out ratio* berada di sekitar 60% s.d. 75%.

9). Meningkatkan Perolehan Laba dan Pertumbuhan Aset
   Secara garis besar peningkatan laba Bank diperoleh melalui peningkatan pendapatan dari kegiatan penyaluran kredit/pembiayaan, pendapatan *fee based income*, serta menjaga efisiensi perusahaan. Perbaikan efisiensi operasional Bank terus dilakukan agar mampu meningkatkan daya saing serta menciptakan ruang untuk ekspansi bisnis. Agar lebih efisien dan kompetitif dalam beroperasi, Bank akan mengakselerasi proses bisnis menuju digitalisasi.

   Sementara peningkatan aset Bank akan banyak berasal dari peningkatan ukuran bisnis, pemupukan laba perusahaan, serta aksi korporasi Bank. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan adalah melalui akuisisi perusahaan daerah yang masih merupakan 1 (satu) rantai operasi (akuisisi vertikal) seperti perusahaan asuransi daerah, BPR daerah, dan lain sebagainya.

Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi pengembangan bisnis Bank tahun 2022 meliputi peningkatan penyaluran pembiayaan, penghimpunan

7). Customer Satisfaction Fulfilled with High Level of Satisfaction
   a. Regularly measure and assess the quality of service (service quality) both carried out by the Bank itself and in cooperation with external parties.
   b. Monitoring is attached to the service leader and front liner to fix the agreed gaps.
   c. Service Excellent Certification for Service Facilitators.
   d. Facilitate access to information on Bank products and services by preparing a web-based Sales Kit as well as product and service QR Codes.
   e. Strengthening/improving the Call Center, one of which is by creating a Call Center intermediary application.
   f. Internalization of service culture and competency improvement by preparing e-learning.
   g. Systematic monitoring and improvement of Electronic Banking Terminal (TPE), for example with the Lean Six Sigma approach.
   h. Compile Service Blue Print Bank Riau Kepri.

8). Strong Capital
   In order to strengthen capital the Bank carries out several approaches, namely:
   a. Carrying out a systematic approach to Shareholders to increase capital in the form of an additional capital deposit scheme.

   b. Consistent in retaining a portion of profits to be used as a portion of general reserves. The Bank communicates with Shareholders so that the dividend pay out ratio is around 60% to.d. 75%.

9). Increasing Profit Gain and Asset Growth
   Broadly speaking, the increase in the Bank's profits is obtained through increasing income from lending/financing activities, fee-based income, and maintaining company efficiency. Improvement of the Bank's operational efficiency continues to be carried out in order to increase competitiveness and create space for business expansion. In order to be more efficient and competitive in operations, the Bank will accelerate business processes towards digitization.

   Meanwhile, the increase in the Bank's assets will mostly come from an increase in business size, corporate profit growth, as well as the Bank's corporate actions. One of the corporate actions taken is through the acquisition of regional companies which are still 1 (one) chain of operations (vertical acquisitions) such as regional insurance companies, regional BPRs, and so on.

Business Development Strategy

The Bank's business development strategy for 2022 includes increasing financing distribution, raising third party

dana pihak ketiga dan peningkatan *fee based income*, serta pengelolaan *treasury*. Berikut strategi yang dilakukan untuk masing-masing aktivitas pengembangan:

a. Penyaluran Pembiayaan

Di bidang penyaluran pembiayaan, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1). Sinergi dengan industri halal, salah satunya melalui pendekatan dan aktualisasi kerjasama dengan Kementerian dalam penyaluran pembiayaan program Pemerintah bersubsidi seperti KUR iB dan PPR FLPP.
2). Sinergi dengan pihak Pemda dalam rangka penyaluran dan pembinaan UMKM.
3). Sinergi dengan pihak lainnya dalam wadah ekosistem ekonomi syariah.
4). Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan konsumer:
   - Peningkatan penyaluran Pembiayaan Aneka Guna (PAG) kepada ASN dan non ASN melalui peningkatan pelayanan dan strategi komunikasi.
   - Penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) non subsidi.
5). Melakukan penetrasi pada segmen pasar syariah yang menjadi andalan seperti Pembiayaan Aneka Guna konsumtif dan pembiayaan UMKM pada segmen petani sawit.
6). Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan komersial melalui pembiayaan sindikasi yang dikoordinir oleh Bank BUMN dan pembiayaan Konstruksi APBD dan non APBD.
7). Optimalisasi fungsi *account officer* (AO) dalam rangka pemasaran produk-produk pembiayaan dengan menggunakan metode *pipeline*.
8). Promosi secara *below the line* dan *above the line*, antara lain melalui *customer gathering*, *exhibition produk*, dan melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM.
9). Me-*review* kebijakan pembiayaan terkait margin dan lain-lain dalam rangka antisipasi persaingan.

b. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Peningkatan *Fee Based Income*

Pertumbuhan DPK dan *fee based income* dilakukan melalui strategi:

1). Melakukan edukasi baik sendiri maupun secara bersama-sama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah.
2). Melakukan sinergi dengan industri halal, lembaga keuangan Syariah, lembaga keuangan sosial islam (*ziswaf*), Kementerian dan Lembaga (pengelolaan dana haji BPKH dan *Wakaf*).
3). Digitalisasi produk dan layanan syariah sesuai kebutuhan segmen melalui implementasi digital solution bagi Pemda dan masyarakat

funds and increasing fee-based income, as well as treasury management. Following are the strategies implemented for each development activity:

a. Financing Disbursement

In the field of financing disbursement, the strategies undertaken are as follows:

1). Synergy with the halal industry, one of which is through the approach and actualization of collaboration with the Ministry in channeling subsidized government program financing such as KUR iB and PPR FLPP.
2). Synergy with the Regional Government in the context of channeling and fostering MSMEs.
3). Synergy with other parties in the sharia economic ecosystem.
4). Increasing consumer financing growth:
   - *Increasing the distribution of Multipurpose Financing (PAG) to ASNs and non-ASNs through improved services and communication strategies.*
   - *Distribution of non-subsidized Home Ownership Financing (PPR).*
5). Penetrating the sharia market segment which is a mainstay, such as consumptive Multipurpose Financing and MSME financing in the oil palm smallholder segment.
6). Increasing commercial financing growth through syndicated financing coordinated by state-owned banks and APBD and non-APBD Construction financing.
7). Optimizing the account officer (AO) function in the context of marketing financing products using the pipeline method.
8). Below the line and above the line promotions, including through customer gatherings, product exhibitions, and providing guidance to MSME groups.
9). Review financing policies related to margins and others in anticipation of competition.

b. Collection of Third Party Funds and Increasing Fee Based Income

The growth of DPK and fee-based income is carried out through the following strategies:

1). Conduct education both alone and jointly in the sharia economic and financial system.
2). Synergize with the halal industry, Islamic financial institutions, Islamic social financial institutions (ziswaf), Ministries and Institutions (BPKH and Waqf haj fund management).
3). Digitalization of sharia products and services according to segment needs through the implementation of digital solutions for local governments and the

(implementasi QRIS, CMS, dan penguatan fungsi *mobile banking* dan ATM).

4). Optimalisasi strategi pemasaran dan penjualan produk serta layanan melalui peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga baik melalui pola digital marketing maupun pola konvensional.

5). Peningkatan *engagement* dan *customer loyalty* melalui layanan *priority banking*.

6). Optimalisasi *fee based income* melalui penambahan *biller* pembayaran pada *electronic channel*.

7). Penambahan mata uang yang ditransaksikan Bank seperti mata uang SAR dan MYR.

8). *Re-branding* produk konvensional menjadi produk syariah.

9). Peningkatan edukasi Literasi Keuangan, pemanfaatan *Otobanking*, dan memperluas layanan melalui Layanan Keuangan tanpa Kantor dan Tabungan SINAR LAKU.

10). Penguatan program promosi melalui program hadiah dan undian, *merchant discount, events, customer gathering*, dan expo.

11). Peningkatan kompetensi *front liner* dan *funding officer* melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan *learning center*.

12). Optimalisasi pengelolaan dana daerah dan dana yang bersumber dari BUMN serta swasta nasional.

c. *Treasury*

Pengelolaan dana secara optimal sesuai aturan yang berlaku dan mewujudkan peningkatan pendapatan Bank melalui instrumen-instrumen pasar uang yang dilakukan. Keseluruhan aktivitas dilakukan dalam koridor GCG dan mitigasi risiko yang terkendali dengan mengoptimalkan instrumen-instrumen investasi pengelolaan dana dalam bentuk *money market, fixed income*, dan *forex*/transaksi valas.

Pengembangan bisnis didukung oleh strategi pengembangan operasional dan teknologi serta GRC sebagai berikut:

a. Operasional dan Teknologi

1). Sentralisasi bisnis

2). Penguatan infrastruktur teknologi informasi

3). Pengkayaan *digital banking*

4). Kooperasi Bank-*fintech-paytech*

5). *Integrated HC Management* dengan Implementasi Aplikasi SKI *online*

6). Pemenuhan SLA & standardisasi kerja

b. *Governance, Risk, Compliance* (GRC)

1). *Internal Control System*.

2). Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank.

3). Penguatan *three line of defense*.

4). Penyempurnaan kebijakan Anti *Fraud*

5). Penyempurnaan SOT.

community (implementation of QRIS, CMS, and strengthening of mobile banking and ATM functions).

4). Optimizing marketing and sales strategies for products and services through increasing collaboration with business actors and private companies/third parties, both through digital marketing and conventional patterns.

5). Increasing engagement and customer loyalty through priority banking services.

6). Optimizing fee-based income through adding payment billers to electronic channels.

7). The addition of currencies transacted by the Bank such as SAR and MYR currencies.

8). Re-branding of conventional products into sharia products.

9). Increasing Financial Literacy education, utilizing Otobanking, and expanding services through Officeless Financial Services and SINAR LAKU Savings.

10). Strengthening promotional programs through prize and sweepstakes programs, merchant discounts, events, customer gatherings, and expos.

11). Increasing the competence of front liners and funding officers through integrated education and training with learning centers.

12). Optimizing the management of regional funds and funds originating from BUMN and the national private sector.

c. Treasuries

Optimum management of funds in accordance with applicable regulations and realizing an increase in the Bank's income through implemented money market instruments. All activities are carried out within the GCG corridor and controlled risk mitigation by optimizing fund management investment instruments in the form of money market, fixed income, and forex/forex transactions.

Business development is supported by operational and technology development strategies as well as GRC as follows:

a. Operations and Technology

1). Business centralization

2). Information technology infrastructure strengthening

3). Digital banking enrichment

4). Bank-fintech-paytech cooperation

5). Integrated HC Management with online SKI Application Implementation

6). SLA compliance & work standardization

b. Governance, Risk, Compliance (GRC)

1). Internal Control System.

2). Improvement of Bank Soundness Level.

3). Strengthening the three lines of defense.

4). Improvement of Anti Fraud policy

5). SOT enhancements.

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspect

Strategi Pemasaran Tahun 2022

Strategi pemasaran tahun 2022 ditetapkan dalam rencana kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen RBB Tahun 2022-2024 yang secara garis besar meliputi 2 (dua) bidang rencana, yakni rencana pendanaan dan rencana penanaman dana.

a. Rencana Pendanaan

Pada tahun 2022, Bank terus meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang berbasiskan *low cost fund* dengan berorientasi pada peningkatan inovasi produk dan layanan, mendorong perluasan *delivery channel*, dan memperluas sumber *fee based income* yang dapat meningkatkan kapabilitas produk dan layanan dalam rangka peningkatan hubungan dengan Nasabah. Salah satu upaya dalam meningkatkan dana dan *fee based income* adalah menambah mata uang yang ditransaksikan Bank seperti mata uang SAR dan MYR. Hal ini didukung dengan komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien sebagai perwujudan dari citra bisnis yang positif serta memberikan edukasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan engagement Nasabah terhadap Bank melalui even terbuka. Rencana ini dapat dilakukan melalui pendekatan inisiatif strategis berikut:

1). Sinergi dengan industri halal, lembaga keuangan Syariah, lembaga keuangan sosial Islam (*ziswaf*), Kementerian dan Lembaga (pengelolaan dana haji BPKH dan *Wakaf*).
2). Implementasi QRIS, CMS, dan penguatan fungsi *mobile banking* serta ATM dalam mendorong digitalisasi produk dan layanan syariah sesuai kebutuhan segmen bagi Pemda dan masyarakat.
3). Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga baik melalui pola *digital marketing* maupun pola konvensional.
4). Peningkatan layanan *priority banking* dalam upaya peningkatan *engagement* dan *customer loyalty*.
5). Penambahan *biller* pembayaran pada *electronic channel* untuk mengoptimalkan penerimaan *fee based income*.
6). Penambahan mata uang yang ditransaksikan Bank seperti mata uang SAR dan MYR untuk meningkatkan pendapatan *fee based income*.
7). Peningkatan edukasi dalam sistem ekonomi dan keuangan Syariah melalui program Literasi Keuangan, pemanfaatan *Otobanking*, dan memperluas layanan melalui Layanan Keuangan tanpa Kantor dan Tabungan SINAR LAKU.
8). Penguatan program promosi melalui program hadiah dan undian, *merchant discount*, *events*, *customer gathering*, dan expo.
9). Optimalisasi pengelolaan dana daerah dan dana yang bersumber dari BUMN serta swasta nasional.

Marketing Strategy for 2022

The 2022 marketing strategy is stipulated in the work plan as stated in the 2022-2024 RBB document which in outline covers 2 (two) plan areas, namely the funding plan and the fund investment plan.

a. Funding Plan

In 2022, the Bank will continue to increase the collection of Third Party Funds based on low cost funds with an orientation towards increasing product and service innovation, encouraging the expansion of delivery channels, and expanding fee-based income sources that can increase product and service capabilities in order to improve relationships with customers. One of the efforts to increase funds and fee-based income is to add currencies that are transacted by the Bank, such as SAR and MYR currencies. This is supported by effective and efficient marketing communications as a manifestation of a positive business image as well as providing education to further increase customer knowledge and engagement with the Bank through open events. This plan can be carried out through the following strategic initiative approaches:

1). Synergy with the halal industry, Islamic financial institutions, Islamic social financial institutions (ziswaf), Ministries and Institutions (BPKH and Waqf haj fund management).
2). Implementation of QRIS, CMS, and strengthening of mobile banking and ATM functions in encouraging the digitization of sharia products and services according to segment needs for local governments and the community.
3). Increasing collaboration with business actors and private companies/third parties, both through digital marketing patterns and conventional patterns.
4). Improving priority banking services in an effort to increase engagement and customer loyalty.
5). Adding payment billers to electronic channels to optimize fee-based income.
6). Additional currency transacted by the Bank such as SAR and MYR currencies to increase fee based income.
7). Increasing education in the Islamic economic and financial system through the Financial Literacy program, utilizing Otobanking, and expanding services through Officeless Financial Services and SINAR LAKU Savings.
8). Strengthening promotional programs through prize and sweepstakes programs, merchant discounts, events, customer gatherings, and expos.
9). Optimizing the management of regional funds and funds originating from BUMN and the national private sector.

b. Rencana Penanaman Dana

Rencana penanaman dana Bank mencakup penyaluran pembiayaan serta pembelian surat berharga dan penanaman dana lainnya. Pada tahun 2022, Bank berupaya meningkatkan pertumbuhan pembiayaan berkualitas, baik segmen konsumtif (Pembiayaan Aneka Guna) yang menjadi unggulan Bank, maupun segmen produktif, melalui pricing dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Bank akan meningkatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Inisiatif strategi yang dilakukan Bank untuk merealisasikan rencana penanaman dana adalah sebagai berikut:

a. Sinergi dengan beberapa pihak di antaranya:
   1). Pelaku industri halal, salah satunya melalui pendekatan dan aktualisasi kerjasama dengan Kementerian dalam penyaluran pembiayaan program pemerintah bersubsidi seperti KUR iB dan PPR FLPP.
   2). Pihak Pemda dalam rangka penyaluran dan pembinaan UMKM.
   3). Pihak lainnya dalam wadah ekosistem ekonomi Syariah.
b. Penetrasi pada segmen pasar syariah yang menjadi andalan seperti pembiayaan konsumtif aneka guna dan pembiayaan UMKM pada segmen petani sawit.
c. Peningkatan portofolio pembiayaan komersial, di antaranya melalui:
   1). Prioritas pada pembiayaan sindikasi yang dikoordinir oleh Bank BUMN terkait program infrastruktur di Indonesia serta program pembangunan lainnya guna meningkatkan pertumbuhan pembiayaan komersial.
   2). Optimalisasi pembiayaan konstruksi APBD dan non APBD.
   3). Peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan asosiasi.
d. Pengembangan pasar baru pada sektor ekonomi yang tumbuh dengan NPF rendah.
e. Digitalisasi untuk meningkatkan akses masyarakat ke Bank.
f. Penerapan strategi komunikasi yang efektif dan intensif serta pelayanan yang optimal guna meningkatkan pertumbuhan pembiayaan konsumer kepada ASN dan non ASN.
g. Peningkatan penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) non subsidi.
h. Promosi secara *below the line* dan *above the line*, antara lain *customer gathering*, *exhibition* produk, dan melakukan pembinaan UMKM.
i. Optimalisasi instrumen-instrumen investasi pengelolaan dana dalam bentuk *money market*, *fixed income*, dan *forex*/transaksi valas.

b. Fund Investment Plan

The Bank's fund investment plan includes the distribution of financing and the purchase of securities and investment of other funds. In 2022, the Bank seeks to increase the growth of quality financing, both for the consumer segment (Multiple Use Financing), which is the Bank's flagship, and for the productive segment, through pricing and features tailored to market needs. The Bank will increase the growth in financing distribution which is quite significant compared to previous years.

The strategic initiatives carried out by the Bank to realize the fund investment plan are as follows:

a. Synergy with several parties including:
   1). Halal industry players, one of which is through the approach and actualization of collaboration with the Ministry in distributing subsidized government program financing such as KUR iB and PPR FLPP.
   2). Regional Government in the context of channeling and fostering MSMEs.
   3). Other parties in the container of the Sharia economic ecosystem.
b. Penetration in the sharia market segment which is a mainstay, such as multipurpose consumptive financing and MSME financing in the oil palm smallholder segment.
c. Increasing the commercial financing portfolio, including through:
   1). Priority on syndicated financing coordinated by state-owned banks related to infrastructure programs in Indonesia and other development programs to increase commercial financing growth.
   2). Optimization of APBD and non-APBD construction financing.
   3). Increasing cooperative relations with related agencies and associations.
d. Development of new markets in growing economic sectors with low NPF.
e. Digitalization to increase public access to the Bank.
f. Implementation of an effective and intensive communication strategy and optimal service to increase the growth of consumer financing for ASN and non-ASN.
g. Increasing the distribution of non-subsidized Housing Financing (PPR).
h. Below the line and above the line promotions, including customer gatherings, product exhibitions, and coaching MSMEs.
i. Optimization of fund management investment instruments in the form of money market, fixed income, and forex/forex transactions.

Menghadapi dampak penyebaran *Covid-19* terhadap kinerja perbankan dan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan kebijakan tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang tertuang dalam POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menerbitkan Kebijakan Direksi tentang Kebijakan Pembiayaan atau Pembiayaan terkait Dampak Penyebaran *Covid-19*.
b. Menerbitkan petunjuk teknis bagi Nasabah terdampak *Covid-19* untuk melakukan upaya penyelamatan.
c. Menginformasikan dan menghubungi Nasabah melalui media komunikasi dan informasi yang dimiliki Bank dan Nasabah.
d. Melakukan *assessment* terhadap Nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi serta menyediakan program restrukturisasi berupa:
   1). Penundaan/penjadwalan pembayaran pokok.
   2). Penundaan pembayaran bagi hasil/margin/*ujrah*.
   3). Penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bagi hasil/margin/*ujrah*.
   4). Penurunan tingkat bagi hasil/margin pembiayaan.
   5). Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin pembiayaan.
   6). Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
   7). Penambahan fasilitas pembiayaan.

Facing the impact of the spread of Covid-19 on banking performance and in maintaining financial system stability, the government through the Financial Services Authority has issued a policy on National Economic stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 as stated in POJK No.48/POJK.03/2020 regarding Amendments to OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020.

Based on the Financial Services Authority Regulation above, the Bank has taken the following steps:

a. Issuing the Board of Directors' Policy regarding Financing or Financing Policies related to the Impact of the Spread of Covid-19.
b. Issue technical instructions for customers affected by Covid-19 to make rescue efforts.
c. Informing and contacting the customer through the communication media and information owned by the Bank and the customer.
d. Conducting assessments of customers who submit requests for restructuring and provide restructuring programs in the form of:
   1). Delay/scheduling of principal payments.
   2). Postponement of profit sharing/margin/ujrah payments.
   3). Principal delay/scheduling and/or profit sharing/margin/ujrah.
   4). Reduction in the level of profit sharing/financing margin.
   5). Reduction of arrears for profit sharing/financing margin.
   6). Extension of the financing period.
   7). Additional financing facilities.

Pangsa Pasar

BRK Syariah secara khusus menghadapi persaingan dengan KBMI 1 dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, dan jumlah Pembiayaan yang Diberikan (PYD) oleh Bank.

Market share

BRK Syariah specifically faces competition from KBMI 1 and Regional Development Banks (BPD) in determining market share. This business competition can be seen, among others, based on the number of assets owned, the amount of Third Party Funds (DPK) that have been collected, and the amount of Financing by Banks.

Tabel Pangsa Pasar BRK Syariah terhadap KBMI 1 dan BPD
Table of BRK Sharia Market Share (MS) to KBMI 1 and BPD

dalam % | *in %*

Indikator	Pangsa Pasar terhadap KBMI 1 *Market Share to KBMI 1*		Pangsa Pasar terhadap BPD *Market Share to BPD*		*Indicator*
	2022	2021	2022	2021	
Aset	2.19%	2.28%	3.34%	3.57%	*Asset*
PYD	2.55%	2.72%	3.48%	3.66%	*Financing*
DPK	2.72%	2.64%	3.73%	3.76%	*Third Party Funds*

Sumber: Data Olah Berdasarkan Laporan Keuangan BRK Syariah Desember 2022 dan Statistik Perbankan Indonesia Desember 2022
Source: Processed Data Based on December 2022 BRK Syariah Financial Report and December 2022 Indonesian Banking Statistics

Berdasarkan jumlah aset dan PYD penguasaan pangsa pasar BRK Syariah terhadap KBMI 1 tahun 2022 mencapai 2,19%, dan 2,55% mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 2,28% dan 2,72%. Sedangkan penguasaan pasar berdasarkan jumlah DPK tahun 2022 mencapai 2,72% mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 2,64%. Sementara penguasaan pasar BRK Syariah terhadap BPD mencapai 3,34%, 3,48%, dan 3,73%, juga mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,57%, 3,66%, dan 3,76%.

Based on total assets and PYD, BRK Syariah's market share control over KBMI 1 in 2022 reached 2.19%, and 2.55%, experiencing a slight decrease compared to 2021 which reached 2.28% and 2.72%. Meanwhile, market share based on total DPK in 2022 reached 2.72%, an increase compared to 2021 which reached 2.64%. Meanwhile, BRK Syariah market control over BPD reached 3.34%, 3.48% and 3.73%, also experienced a slight decrease compared to 2021 which reached 3.57%, 3.66% and 3.76%.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operational Review By Business Segment

Segmen merupakan bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha/operasi) maupun dalam menyediakan produk pada lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Pendapatan, beban, laba, aset, liabilitas, dan ekuitas segmen tersebut mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank mempertimbangkan jenis usaha/operasi sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder. Ilustrasi ulasan segmen usaha utama maupun segmen sekunder disajikan pada gambar di bawah ini.

A segment is a distinguishable part of the Bank that is engaged either in providing certain products (business/operations segment) or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from other segments. Segment revenue, expenses, profits, assets, liabilities and equity include items directly attributable to a segment as well as items that can be allocated on an appropriate basis to the segment.

The Bank considers the type of business/operation as the main segment and geographic location as the secondary segment. An illustration of the review of the main business segment and the secondary segment is presented in the image below.

SEGMEN OPERASI

Menjadi Syariah Seutuhnya

Mulai 22 Agustus 2022 BRK Syariah melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seutuhnya. Oleh karena itu tidak lagi terdapat pengungkapan segmen operasi konvensional dan segmen operasi syariah seperti tahun sebelumnya.

Perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seutuhnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) insiasi konversi yang dilaksanakan pada 22 April 2019. Setelah tanggal tersebut, maka proses konversi dimulai. Proses konversi dikoordinir oleh *Tim Project Management Office* (PMO) dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya BRK Riau Kepri mendapatkan izin operasional konversi dari Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Anggota Komisioner OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Pisah batas (*cut off*) operasional sistem konvensional dilaksanakan pada 19 Agustus 2022 dan sepenuhnya beroperasi (*go live*) dengan sistem syariah pada tanggal 22

OPERATING SEGMENT

Become Completely Sharia

Starting August 22, 2022 BRK Syariah has changed its business activities from the conventional system to a complete sharia system. Therefore there is no disclosure of conventional operating segments and sharia operating segments as in the previous year.

The change in business activities from the conventional system to a fully sharia system was stipulated at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) of the conversion initiation which was held on April 22, 2019. After that date, the conversion process begins. The conversion process is coordinated by the Project Management Office (PMO) Team, supervised by the Financial Services Authority. After going through various stages and licensing processes required by the OJK, BRK Riau Kepri finally obtained a conversion operational permit from the OJK Commissioner as stated in the Decision of Members of the OJK Commissioners No. KEP-93/D.03/2022 dated 4 July 2022 concerning the Granting of Permits for Changing Business Activities of Conventional Commercial Banks from PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri to Sharia Commercial Banks PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

The conventional system operational cutoff was carried out on August 19, 2022 and fully operational (go live) with the sharia system on August 22, 2022. The inauguration of the Sharia

Agustus 2022. Peresmian BRK Syariah dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, pada tanggal 25 Agustus 2022 yang bertepatan dengan 27 Muharram 1444 H. Proses konversi menjadi Bank Syariah diharapkan akan meningkatkan fokus operasi, semakin menyatu dengan kondisi sosial masyarakat Melayu yang islami dan sosial ekonomi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank. Kesuksesan proses konversi ini telah tercermin di dalam kinerja keuangan Bank. Kinerja BRK Syariah periode 01 Januari - 21 Agustus 2022 (sebelum konversi) menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp208,08 miliar, sedangkan setelah menjadi Bank Umum Syariah (konversi) periode 22 Agustus - 31 Desember 2022 Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp295,47 miliar. Terdapat peningkatan kinerja yang tercermin dari laba setelah konversi (rentang waktu ± 4 bulan) lebih tinggi dibandingkan laba sebelum konversi (rentang waktu ± 8 bulan) sehingga kinerja sebagai Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan sebagai Bank Umum Konvensional.
Proses konversi ini juga diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi sehingga mendorong pertumbuhan perekenomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal itu BRK Syariah akan dapat menjadi Bank syariah yang inklusif, *resilient*, dan modern pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan

BRK was carried out by the Vice President of the Republic of Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, on 25 August 2022 which coincides with 27 Muharram 1444 H.
It is hoped that the conversion process to become a Sharia Bank will increase the focus of operations, become more integrated with the social conditions of Islamic Malay society and are conducive to socio-economic conditions so as to improve the Bank's performance. The success of this conversion process has been reflected in the Bank's financial performance. The performance of BRK Syariah for the period January 1 - August 21 2022 (before conversion) resulted in a profit before tax of IDR 208.08 billion, while after becoming a Sharia Commercial Bank (conversion) for the period August 22 - December 31 2022 the Bank managed to record a profit before tax of IDR 295.47 billion. There is an increase in performance as reflected in the profit after conversion (within ± 4 months) which is higher than the profit before conversion (within ± 8 months), so that the performance as an Islamic Commercial Bank is better than that as a Conventional Commercial Bank.
This conversion process is also expected to have a positive impact on all aspects of the community's economic and social life through the provision of sharia-based financial services with technological support so as to encourage sustainable regional economic growth towards national economic development. In line with this, BRK Syariah will be able to become an inclusive, resilient and modern sharia bank, the people's first choice, which will contribute significantly to sustainable regional development.

Segmen Geografis

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Riau, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Berdasarkan Geografis

Tinjauan keuangan atas segmen usaha berikut mengacu kepada Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian. Berikut disajikan data pendapatan dan profitabilitas untuk masing-masing segmen geografis.

Geographical Segment

Explanation of Geographic Segments

Geographical segments include the provision of services within a particular economic environment that are subject to risks and returns that are different from other operating segments in other economic environments. The geographical segments of the Bank are Riau, Riau Archipelago and DKI Jakarta.

Revenue and Profitability of Business Segments Based on Geographic

The financial review of the following business segments refers to the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) as a Sharia Commercial Bank (BUS) which has been audited by the Public Accountant Office Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) with Unmodified Fair Opinion. The following presents revenue and profitability data for each geographic segment.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Berdasarkan Geografis
Table of Revenue and Profitability of Business Segments by Geographic

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

URAIAN	Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Total	*DESCRIPTION*
Pendapatan dari Jual - Beli	542.698	171.695	381	714.773	*Income From Sales And Purchases*
Pendapatan dari Bagi Hasil	84.288	3.267	287	87.841	*Income From Profit Sharing*
Pendapatan dari Ijarah - *neto*	7.748	2.606	0	10.354	*Income From Ijarah - Net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	115.372	646	0	116.018	*Other Main Operating Income*
Pendapatan Bunga	954.469	225.922	591	1.180.982	*Interest Income*

URAIAN	Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Total	*DESCRIPTION*
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(382.688)	(84.169)	(165.640)	(632.497)	*Third parties share on return*
Pendapatan - Bersih	**1.321.886**	**319.969**	**(164.383)**	**1.477.472**	*Income - Net*
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	35.797	9.337	70	45.204	*Fee Based Income From Banking*
Pendapatan Lainnya	(88.241)	51.927	162.366	126.052	*Other Income*
Gaji dan Tunjangan	(546.436)	(75.885)	(3.906)	(626.227)	*Salaries and Benefits*
Umum dan Administrasi	(277.736)	(45.589)	(3.370)	(326.695)	*General And Administrative*
Bonus *Wadiah*	(47.135)	(6.396)	(21.476)	(75.007)	*Wadiah Bonus*
Lain-lain	(19.596)	(45.983)	(90)	(65.669)	*Others*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.424)	426	(96)	(9.094)	*Allowance for Impairment Losses for Financial*
Pendapatan/(Beban) Non Usaha - N*etto*	(173.254)	12.369	118.408	(42.477)	*Non operating Income/(expense) - net*
Laba Operasional	**195.859**	**220.174**	**87.524**	**503.557**	*Operating Income*
Laba Bersih	**43.201**	**220.174**	**87.524**	**350.899**	*Net Profit*
Jumlah Aset	**18.657.793**	**3.852.796**	**8.871.766**	**31.382.356**	***Total Assets***
Jumlah Liabilitas	**15.447.992**	**3.746.670**	**8.835.762**	**28.030.424**	***Total Liability***
Jumlah Ekuitas	**3.209.801**	**106.126**	**36.004**	**3.351.932**	***Total Equity***

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian. Tinjauan keuangan ini meliputi analisis terhadap laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas.

The financial review described below refers to the Financial Statements as of and for the year ended December 31, 2022 which have been audited by Kreston Indonesia Public Accounting Firm (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) with an Unmodified Opinion. This financial review includes an analysis of the statement of financial position, statement of comprehensive income, and statement of cash flows.

Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menunjukkan peningkatan baik aset, liabilitas, Dana Pihak Ketiga, maupun ekuitas. Jumlah aset meningkat sebesar Rp602,43 miliar atau 1,96%, dari Rp30.779 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp31.382 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pembiayaan sebesar 3,79%, kas sebesar 103,21%, dan giro pada Bank Indonesia sebesar 70,40%.

Jumlah Liabilitas dan Dana Pihak Ketiga turut mengalami kenaikan sebesar 1,62% atau Rp444,62 miliar dari Rp27.592 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp28.030 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama ditopang oleh kenaikan dana pihak ketiga sebesar 5,29%.

Jumlah Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp164,77 miliar, atau 5,17%. Dari Rp3.187 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.352 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 9,62% dan laba ditahan sebesar 6,21%

Statement of Financial Position

The statement of financial position shows an increase in assets, liabilities, Third Party Funds, and equity. Total assets increased by Rp602.43 billion or 1.96%, from Rp30,779 billion in 2021 to Rp31,382 billion in 2022. This increase was due to an increase in financing by 3.79%, cash by 103.21%, and current accounts with Bank Indonesia by 70.40%.

Total Liabilities and Third Party Funds also increased by 1.62% or Rp444.62 billion from Rp27,592 billion in 2021 to Rp28,030 billion in 2022. This increase was mainly supported by an increase in third-party funds of 5.29%.

Total Equity increased by Rp164.77 billion, or 5.17%. From Rp3,187 billion in 2021 to Rp3,352 billion in 2022. This increase was mainly due to an increase in issued and fully paid capital of 9.62% and retained earnings of 6.21%.

Tabel Posisi Keuangan
Table of Financial Position

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
ASET					***ASSET***
Kas	1.461.888	719.394	742.494	103,21	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	3.480.743	2.042.746	1.437.997	70,40	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	206.400	88.760	117.640	132,54	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.195.000	3.334.381	(2.139.381)	(64,16)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Jumlah Kredit yang Diberikan – Bersih *)	-	18.388.304	(18.388.304)	-	*Total Financing - Net *)*
Piutang	-	-	-	-	*Receivables*
Piutang *Murabahah*	16.588.735	-	16.588.735	-	*Murabaha Receivables*
Piutang *Ijarah*	113	-	113	-	*Ijarah Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(373.997)	-	(373.997)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Piutang - Bersih	16.214.851	-	16.214.851	-	*Total Receivables - Net*
Pinjaman *Qardh*	54.598	-	54.598	-	*Qardh Loan*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(23)	-	(23)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pinjaman *Qardh* - Bersih	54.575	-	54.575	-	*Total Qardh Loan - Net*
Pembiayaan	-	-	-	-	*Financing*
Mudharabah	23.720	-	23.720	-	*Mudharabah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6)	-	(6)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Mudharabah* - Bersih	23.713	-	23.713	-	*Total Mudharabah - Net*
Musyarakah	2.521.950	-	2.521.950	-	*Musyarakah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(79.209)	-	(79.209)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Musyarakah* - Bersih	2.442.741	-	2.442.741	-	*Total Musyarakah - Net*
Jumlah Pembiayaan	19.189.116	-	19.189.116	-	*Total Financing*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(453.235)	-	(453.235)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pembiayaan - Bersih	18.735.880	-	18.735.880	-	*Total Financing - Net*
Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*	411.782	-	411.782	-	*Assets Acquired for Ijarah*
Penyertaan Saham	1.556	1.556	0	0,00	*Investment in Shares*
Aset Tetap	394.095	396.932	(2.837)	(0,71)	*Fixed Assets*
Aset Pajak Tangguhan	75.453	32.099	43.354	135,06	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-Lain	389.620	538.027	(148.407)	(27,58)	*Other Assets*
Jumlah Aset	**31.382.356**	**30.779.686**	**602.670**	**1,96**	***Total assets***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Dana simpanan *wadiah*	1.248.831	-	1.248.831	100,00	*Wadiah savings fund*
Giro	107.343	-	107.343	-	*Current Account*
Tabungan	1.141.488	-	1.141.488	-	*Savings*
Liabilitas segera	607.981	667.015	(59.034)	(8,85)	*Immediate liability*
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	17.361	-	17.361	100,00	*Undistributed Profit Sharing*
Simpanan dari nasabah *)	-	25.615.733	(25.615.733)	(100,00)	*Deposits from customers *)*
Giro	-	5.607.380	(5.607.380)	-	*Current Account*
Tabungan	-	7.449.293	(7.449.293)	-	*Savings*
Deposito Berjangka	-	12.559.060	(12.559.060)	-	*Time Deposit*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Simpanan dari bank lain	93.275	1.040.800	(947.525)	(91)	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	201.131	151.442	49.689	33	*Loans received*
Utang pajak	47.853	32.036	15.817	49	*Tax debt*
Imbalan kerja	32.437	26.051	6.386	25	*Employee benefits*
Liabilitas lain-lain	56.681	59.449	(2.768)	(5)	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**2.305.550**	**27.592.527**	**(25.286.977)**	**(92)**	***Total Liabilities***
DANA *SYIRKAH* TEMPORER					***TEMPORARY SYIRKAH FUND***
Giro *Mudharabah*	3.483.049	-	3.483.049	-	*Mudharabah Current Account*
Tabungan *Mudharabah*	6.544.823	-	6.544.823	-	*Mudharabah Savings*
Deposito *Mudharabah*	15.697.002	-	15.697.002	-	*Mudharabah deposits*
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**25.724.874**		**25.724.874**	**0,00%**	***Total Temporary Syirkah Funds***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham					*Capital stock*
Modal Saham - Nilai Nominal Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham					*Share Capital - Nominal Value Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Nominal value Rp100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.092.407 saham pada 31 Desember 2022	1.209.241	1.103.161	106.080	9,62	*Issued and fully paid-up capital 12,092,407 shares as of December 31, 2022*
Tambahan modal disetor	2.085	4.085	(2.000)	(48,96)	*Additional paid-in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga tersedia untuk dijual	(66.099)	2.233	(68.332)	(3060,35)	*Unrealized net gain (loss) from changes in fair value of available-for-sale securities*
Saldo laba	2.206.705	2.077.680	129.025	6,21	*Retain earning*
Telah Ditentukan Penggunaannya	-	1.622.421	(1.622.421)	0,00	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	2.206.705	455.259	1.751.446	384,71	*Not yet appropriated*
Jumlah Ekuitas	**3.351.932**	**3.187.159**	**164.773**	**5,17**	***Total Equity***
Total Liabilitas dan Ekuitas	**31.382.356**	**30.779.686**	**602.670**	**1,96**	***Total of Liabilities and Equities***

*) Bank operasional dengan sistem konvensional | **) Bank operates with a conventional system*

Aset

Aset tahun 2022 sebesar Rp31,38 triliun, meningkat 1,96% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp30,78 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan aset lancar sebesar Rp710,56 miliar.

Asset

Assets in 2022 amounted to Rp31.38 trillion, an increase of 1.96% compared to 2021 which amounted to Rp30.78 trillion. The increase mainly came from the growth in current assets of Rp710.56 billion.

Tabel Aset
Asset Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Aset Lancar	30.523.189	29.812.628	710.561	2,38	*Current Assets*
Aset Tidak Lancar	859.168	967.058	(107.890)	(11,16)	*Non-current Assets*
Total Aset	**31.382.356**	**30.779.686**	**602.670**	**1,96**	***Total assets***

Aset Lancar

Aset lancar tahun 2022 sebesar Rp30,5 triliun, meningkat 2,38% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp29,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Giro pada bank lain sebesar Rp117,64 miliar yaitu meningkat 132,54% dan kas sebesar Rp742,49 miliar yaitu meningkat 103,21%.

Current Asset

Current assets in 2022 amounted to IDR 30.5 trillion, an increase of 2.38% compared to 2021 which amounted to IDR 29.81 trillion. The increase mainly came from the growth of current accounts with other banks of IDR117.64 billion, an increase of 132.54% and cash of IDR742.49 billion, an increase of 103.21%.

Tabel Aset Lancar
Current Assets Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
ASET					***ASSET***
Kas	1.461.888	719.394	742.494	103,21	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	3.480.743	2.042.746	1.437.997	70,40	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	206.400	88.760	117.640	132,54	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.195.000	3.334.381	(2.139.381)	(64,16)	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat Berharga	5.029.940	5.237.487	(207.547)	(3,96)	
Jumlah Kredit yang Diberikan – Bersih *)		18.388.304	(18.388.304)		*Total Financing - Net *)*
Piutang		-	-		*Receivables*
Piutang *Murabahah*	16.588.735	-	16.588.735		*Murabaha Receivables*
Piutang *Ijarah*	113	-	113		*Ijarah Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(373.997)		(373.997)		*Allowance for impairment losses*
Jumlah Piutang - Bersih	16.214.851		16.214.851		*Total Receivables - Net*
Pinjaman *Qardh*	54.598	-	54.598		*Qardh Loan*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(23)	-	(23)		*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pinjaman *Qardh* - Bersih	54.575		54.575		*Total Qardh Loan - Net*
Pembiayaan			-		*Financing*
Mudharabah	23.720	-	23.720		*Mudharabah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6)		(6)		*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Mudharabah* - Bersih	23.713		23.713		*Total Mudharabah - Net*
Musyarakah	2.521.950	-	2.521.950		*Musyarakah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(79.209)		(79.209)		*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Musyarakah* - Bersih	2.442.741		2.442.741		*Total Musyarakah - Net*
Jumlah Pembiayaan	19.189.116		19.189.116		*Total Financing*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(453.235)		(453.235)		*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pembiayaan - Bersih	18.735.880		18.735.880		*Total Financing - Net*
Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*	411.782	-	411.782		*Assets Acquired for Ijarah*
Penyertaan Saham	1.556	1.556	0	0,00	*Investment in Shares*
Total Aset Lancar	**30.523.189**	**29.812.628**	**710.561**	**2,38**	***Total Current Assets***

Kas

Kas tahun 2022 sebesar Rp1,46 triliun, mengalami peningkatan 103,21% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp719,39 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan kas Rupiah sebesar Rp742,03 miliar atau 122,55%. Kas dalam mata uang asing juga mengalami kenaikan khususnya pada mata uang Dolar Singapura sebesar Rp592 miliar, selain itu juga terdapat penambahan nilai mata uang asing yaitu Riyal Arab Saudi dan Ringgit Malaysia.

Cash

Cash in 2022 amounted to Rp1.46 trillion, an increase of 103.21% compared to 2021 which amounted to Rp719.39 billion. The increase mainly came from an increase in Rupiah cash of Rp742.03 billion or 122.55%. Cash in foreign currencies also increased, especially in Singapore Dollars amounting to Rp592 billion, in addition there were also additional foreign currency values, namely Saudi Arabian Riyals and Malaysian Ringgit.

Tabel Kas
Cash Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Rupiah					*Rupiah*
Kas	1.347.512	605.487	742.025	122,55	*Cash*
Kas ATM	98.727	99.517	(790)	(0,79)	*ATM Cash*
Jumlah	1.446.239	705.004	741.235	105,14	*Total*
Mata Uang Asing	-	-	-	-	*Foreign Currency*
Dolar Amerika Serikat	13.103	12.488	615	4,93	*United States Dollar*
Dolar Singapura	2.307	1.715	592	34,52	*Singapore Dollar*
Euro	164	186	(22)	(11,74)	*Euro*
Riyal Arab Saudi	41	0	41	-	*Saudi Arabia Riyal*
Ringgit Malaysia	33	0	33	-	*Malaysian Ringgit*
Jumlah	15.649	14.389	1.260	8,76	*Total*
Total	**1.461.888**	**719.393**	**742.495**	**103,21**	***Total***

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia berdasarkan mata uang tahun 2022 sebesar Rp3,48 triliun, meningkat 70,40% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp2,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya giro pada Bank Indonesia dari mata uang Rupiah sebesar Rp1,44 triliun.

Current accounts with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia by currency in 2022 amounted to Rp3.48 trillion, an increase of 70.40% compared to 2021 which amounted to Rp2.04 trillion. The increase mainly came from an increase in current accounts with Bank Indonesia from Rupiah currency amounting to Rp1.44 trillion.

Tabel Giro pada Bank Indonesia
Current accounts with Bank Indonesia Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Rupiah	3.473.660	2.037.686	1.435.974	70,47	*Rupiah*
Dolar Amerka Serikat	7.083	5.060	2.023	39,98	*United States Dollar*
Total	**1.461.888**	**719.393**	**742.495**	**103,21**	***Total***

Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain tahun 2022 sebesar Rp206,4 miliar, meningkat 132,54% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp88,76 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan giro bank lain dari mata uang asing sebesar Rp28,38 miliar.

Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks in 2022 amounted to Rp206.4 billion, an increase of 132.54% compared to 2021 which amounted to Rp88.76 billion. The increase mainly came from an increase in current accounts with other banks from foreign currencies of Rp28.38 billion.

Tabel Giro pada Bank Lain
Current Accounts With Other Bank Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Rupiah	89.250	63.417	25.833	40,73	*Rupiah*
Mata Uang Asing	117.150	88.767	28.383	31,97%	*Foreign Currency*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(6)	6	(100,00)	*Allowance for impairment losses*
Total	**206.400**	**88.760**	**117.640**	**132,54**	***Total***

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tahun 2022 sebesar Rp1,2 triliun, mengalami penurunan 64,16% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp3,33 triliun. Penurunan tersebut terjadi dalam penempatan pada bank bank lain berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and Other Banks in 2022 amounted to Rp1.2 trillion, a decrease of 64.16% compared to 2021 which amounted to Rp3.33 trillion. The decrease occurred in placements with other banks in the form of Sharia Bank Indonesia Deposit Facility (FASBIS).

Tabel Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
Placements with Bank Indonesia and Other Banks Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1.195.000	3.334.381	(2.139.381)	(64,16)	*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*

Surat Berharga

Total nilai surat berharga pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5,03 triliun, menurun 3,96% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp5,24 triliun. Selama tahun 2022 BRK Syariah mengalihkan penempatan surat berharga sebagai bagian dari implementasi konversi dari dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Berikut disajikan rincian surat berharga yang dimiliki pada tahun 2021 dan 2022.

Securities

The total value of securities in 2022 was Rp5.03 trillion, a decrease of 3.96% compared to 2021 which amounted to Rp5.24 trillion. In 2022 BRK Syariah transferred the placement of securities as part of the implementation of the conversion from Conventional Commercial Bank (BUK) to Sharia Commercial Bank (BUS). The following presents details of securities held in 2021 and 2022.

Tabel Surat Berharga Tahun 2022
Table of Securities in 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	Nominal	*Explanation*
Sukuk Negara yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	3.348.148	*Government Sukuk at Fair Value through Other Comprehensive Income*
Sukuk BI yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	1.000.000	*BI Sukuk at Fair Value through Other Comprehensive Income*
Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank ("SIMA") Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	450.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificates ("SIMA") Measured at Amortized Acquisition Cost*
Sukuk Negara yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	230.000	*Government Sukuk Measured at Amortized Cost*
Sukuk Korporasi yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi	5.041	*Corporate Sukuk Measured at Amortized Cost*
Premium Sukuk Negara yang Belum Diamortisasi	517	*Unamortized Premium on Government Sukuk*
Diskonto Sukuk Negara yang Belum Diamortisasi	(3.766)	*Unamortized Sukuk Discount*
Jumlah Investasi Surat Berharga	5.029.940	*Total Investment Securities*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah-Bersih	**5.029.940**	***Net-Count***

Tabel Surat Berharga Tahun 2021
Table of Securities in 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	Nominal	*Explanation*
SBPM Obligasi Tersedia untuk Dijual	2.832.346	*SBPM Bonds Available for Sale*
SBPU Tersedia untuk Dijual	-	*SBPU is Available for Sale*
SBPU Reksadana Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.167.610	*SBPU Mutual funds Held to Maturity*
Sukuk BI Diperdagangkan	1.207.402	*BI Sukuk Traded*
SBPM SBSN PD/SM Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	30.000	*SBPM SBSN PD/SM Held to Maturity*
Sbpm SBSN PD/SM HTM Premium	1.026	*Sbpm SBSN PD/SM HTM Premium*
Jumlah Efek-Efek	5.238.384	*Total Securities*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(897)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah-Bersih	**5.237.487**	***Net-Count***

Tabel Perbandingan Surat Berharga
Securities Comparison Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Surat Berharga	5.029.940	5.237.487	(207.547)	(3,96)	*Securities Comparison*

Pembiayaan yang Diberikan

Proses konversi Bank dari BUK menjadi BUS berdampak pada perubahan struktur dalam penyaluran dana kepada nasabah. Pada tahun 2021 Bank mengelompokkan penyaluran dana ke dalam bentuk kredit yang diberikan, piutang, dan pembiayaan syariah yang ditujukan sebagai modal kerja, investasi, dan konsumtif. Namun pada tahun 2022, setelah melakukan konversi menjadi BUS, BRK Syariah mengelompokkan penyaluran dana dalam bentuk piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.

Pembiayaan bersih yang berhasil disalurkan selama tahun 2022 sebesar Rp19,15 triliun, naik sebesar 4,13% atau Rp759,36 miliar dari Kredit Yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp18,39 triliun.

Financing Provided

The Bank's conversion process from BUK to BUS has an impact on structural changes in the distribution of funds to customers. In 2021 the Bank categorizes the distribution of funds into loans, receivables, and Islamic financing intended as working capital, investment, and consumptive. However, in 2022, after converting to a BUS, BRK Syariah categorizes the distribution of funds in the form of receivables, qardh loans, and financing.

Net financing successfully disbursed during 2022 amounted to Rp19.15 trillion, an increase of 4.13% or Rp759.36 billion from Loans, Receivables and Sharia Financing disbursed in 2021 of Rp18.39 trillion..

Tabel Pembiayaan yang Diberikan
Financing Provided Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	*Explanation*
Pembiayaan yang Disalurkan			*Financing Disbursed*
Piutang			*Receivables*
Piutang *Murabahah*	16.588.735	-	*Murabahah Receivables*
Piutang Ijarah	113	-	*Ijarah Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(373.997)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Piutang - Bersih	16.214.851	-	*Total Receivables - Net*
Pinjaman *Qardh*	54.598	-	*Qardh Loan*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(23)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Pinjaman *Qardh* - Bersih	54.575	-	*Total Qardh Loan - Net*
Pembiayaan		-	*Financing*
Mudharabah	23.720	-	*Mudharabah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Mudharabah* - Bersih	23.713	-	*Total Mudharabah - Net*
Musyarakah	2.521.950	-	*Musyarakah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(79.209)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah *Musyarakah* - Bersih	2.442.741	-	*Total Musyarakah - Net*
Pembiayaan sewa (Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*)	411.782	-	*Lease financing (Assets acquired for Ijarah)*
Jumlah Pembiayaan - Bersih	19.147.661	-	*Total Financing - Net*
Kredit yang Disalurkan	-	-	*Loans disbursed*
Modal Kerja	-	1.728.705	*Working Capital*
Investasi	-	2.400.324	*Investment*
Konsumtif	-	14.755.885	*Consumptive*
Jumlah	-	18.884.914	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(496.610)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	-	18.388.304	*Total - Net*
Kenaikan (Penurunan) Rp	**759.357**		***Increase (Decrease) Rp***
Kenaikan (Penurunan) %	**4,13%**		***Increase (Decrease) %***

Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Akun aset yang diperoleh untuk *ijarah* ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah*, *ijarah* multijasa, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT"). Aset ini belum ada sebelumnya dan baru muncul pada tahun 2022 sebagai bagian dari implementasi konversi Bank dari BUK menjadi BUS. Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* pada tahun 2022 adalah sebesar Rp411,78 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Assets Acquired for Ijarah

The assets acquired for ijarah account represents rental objects from ijarah, ijarah multijasa, and Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT") transactions. These assets did not exist before and only appeared in 2022 as part of the implementation of the Bank's conversion from BUK to BUS. Assets acquired for Ijarah in 2022 amounted to Rp411.78 billion with the following details:

Tabel Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*
Table Assets Acquired for Ijarah

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	NILAI	*Explanation*
Multijasa	45.334	*Multijasa*
Lainnya	437.633	*Other*
Jumlah	482.967	*Total*
Akumulasi Penyusutan, Amortisasi Pemeliharaan dan Penurunan Nilai	(71.185)	*Accumulated Depreciation, Amortization Maintenance, and Impairment*
Jumlah - bersih	**411.782**	***Net-Count***

Penyertaan Saham

Penyertaan saham, neto tahun 2022 sebesar Rp1,56 triliun dan tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 penyertaan saham yang ditempatkan pada 2 (dua) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 1 (satu) perusahaan daerah (Ventura). Penyertaan pada BPR dalam kondisi laba, sedangkan pada Perusahaan Ventura dalam kondisi rugi.

Investment in Shares

Investment in shares, net in 2022 amounted to Rp1.56 trillion and experienced no change in value compared to 2021. In 2022, the investment in shares placed in 2 (two) Rural Banks (BPR) and 1 (one) regional company (Venture). Participation in BPR is in profit condition, while in Venture Company is in loss condition.

Tabel Penyertaan Saham
Table of Share Investments

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
BPR Gemilang/Kateman	200	200	0	0,00	*BPR Gemilang/Kateman*
PD BPR Rokan Hilir	200	200	0	0,00	*PD BPR Rokan Hilir*
PT Sarana Ventura	1.155	1.155	0	0,00	*PT Sarana Ventura*
Total	**1.556**	**1.556**	**0**	**0,00**	***Total***

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tahun 2022 sebesar Rp859,17 miliar, menurun 11,16% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp967,06 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan aset lain-lain sebesar Rp148,41 miliar, meskipun terjadi peningkatan pada aset pajak tangguhan sebesar Rp49,7 miliar namun total keseluruhan aset tidak lancar pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Non-current assets

Non-current assets in 2022 amounted to Rp859.17 billion, a decrease of 11.16% compared to 2021 which amounted to Rp967.06 billion. The decrease mainly came from a decrease in other assets of Rp148.41 billion, although there was an increase in deferred tax assets of Rp49.7 billion, the total non-current assets in 2022 were still lower than in 2021.

Tabel Aset Tidak Lancar
Table of Non-current assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Aset Tetap					***Fixed Assets***
Harga Perolehan	767.912	721.050	46.862	6,50	*Acquisition Price*
Akumulasi Penyusutan	(373.817)	(324.118)	(49.699)	15,33	*Accumulated Depreciation*
Nilai Buku,Neto	394.095	396.932	(2.837)	(0,71)	*Book Value, Net*
Aset Pajak Tangguhan	75.453	32.099	43.354	135,06	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-Lain	389.620	538.027	(148.407)	(27,58)	*Other Assets*
Aset Tidak Lancar	**859.167**	**967.058**	**(107.891)**	**(11,16)**	***Non-current Assets***

Aset Tetap

Aset tetap tahun 2022 sebesar Rp394,1 miliar, menurun 0,71% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp396,93 miliar. Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Aset tetap tersebut diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3,96 triliun kepada PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda, PT Asuransi Askrida Syariah dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

.

Fixed assets

Fixed assets in 2022 amounted to Rp394.1 billion, a decrease of 0.71% compared to 2021 of Rp396.93 billion. Fixed assets in the form of buildings, vehicles, and certain other inventories are insured against possible risks of fire, accidents, and other risks. The fixed assets are insured with a sum insured of Rp3.96 trillion to PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda, PT Asuransi Askrida Syariah and PT Asuransi Jasa Indonesia. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from fire and earthquake.

Tabel Aset Tetap
Table of Fixed assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Harga Perolehan	767.912	721.050	46.862	6,50	*Deferred Tax Assets*
Akumulasi Penyusutan	(373.817)	(324.118)	(49.699)	15,33	*Other Assets*
Nilai Buku,Neto	**394.095**	**396.932**	**(2.837)**	**(0,71)**	***Non-current Assets***

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tahun 2022 sebesar Rp75,5 miliar, meningkat 135,06% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp32,1 miliar.

Deferred tax assets

Deferred tax assets in 2022 amounted to Rp75.5 billion, an increase of 135.06% compared to 2021 which amounted to Rp32.1 billion.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Table of Deferred tax assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Aset Pajak Tangguhan	75.453	32.099	43.354	135,06	*Deferred Tax Assets*

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain tahun 2022 sebesar Rp389,62 miliar, menurun 27,58% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp538,03 miliar. Rincian perhitungan pada aset lain-lain tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 sehingga tidak semua rincian dapat dibandingkan, namun secara total keseluruhan aset lain-lain pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Other assets

Other assets in 2022 amounted to Rp389.62 billion, a decrease of 27.58% compared to 2021 which amounted to Rp538.03 billion. The details of the calculation in other assets in 2022 are different from those in 2021 so not all details can be compared, but in total, other assets in 2022 have decreased compared to 2021.

Tabel Aset Lain - lain Tahun 2022
Table of Other Assets in 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

2022		
Uraian	Nominal	*Explanation*
Pihak Ketiga		***Third-Party***
Pendapatan Pembiayaan yang Akan Diterima	152.233	*Financing Income to be Received*
Asuransi Dibayar Dimuka	84.390	*Prepaid Insurance*
Piutang Pendapatan Surat Berharga	45.567	*Securities Income Receivable*
Sewa Dibayar Dimuka	35.250	*Prepaid Rent*
Tagihan ATM	25.878	*ATM Billings*
Persediaan Alat Tulis Kantor dan Materai	6.953	*Stationery and Stamp Inventory*
Setoran Jaminan	2.096	*Security Deposit*
Lain-lain	37.253	*Other*
Jumlah	**389.620**	***Total***

Tabel Aset Lain - lain Tahun 2021
Table of Other Assets in 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

2021		
Uraian	Nominal	*Explanation*
Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima	161.511	***Accrued Interest Income***
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	104.308	*Advances and prepaid expenses*
Tagihan *Principle Acquirer*	197.182	*Principle Acquirer Receivables*
Kerugian dan Kecurangan dalam Penyelesaian	1.570	*Losses and Fraud in Settlement*
Nota Debet dalam Penyelesaian	286	*Debit Notes in Settlement*
Selisih Kas ATM dalam Penyelesaian	850	*ATM Cash Difference in Settlement*
Pembayaran Lainnya dalam Penyelesaian *Yadib*	515	*Other Payments in Settlement Yadib*
Tagihan Pembayaran *Affinity* Kartu Kredit dalam Penyelesaian	10	*Credit Card Affinity Payment Receivables in Settlement*

2021		
Uraian	**Nominal**	*Explanation*
Persediaan Alat Tulis dan Lainnya	7.227	*Stationery and Other Supplies*
Piutang Sewa dan Jasa, Net	2.042	*Rent and Service Receivables, Net*
Aset Hak Guna	25.105	*Right of Way Assets*
Pos-Pos Debet dalam Penyelesaian Lainnya	37.420	*Other Debit Items in Settlement*
Jumlah Lain-lain	272.208	*Total Other*
Jumlah	**538.027**	***Total***

Tabel Perbandingan Aset Lain-lain
Comparison Table of Other Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Aset Lain-lain	389.620	538.027	(148.407)	(27,58)	*Other Assets*

Liabilitas

Liabilitas tahun 2022 adalah sebesar Rp28,03 triliun, naik 1,59% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp27,59 triliun. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan dana pihak ketiga sebesar 5,29% dari Rp25,62 triliun menjadi Rp26,97 triliun. Selain itu Pinjaman yang Diterima, Utang Pajak, dan Imbalan Kerja juga turut naik masing-masing sebesar 32,81%, 49,37%, dan 24,51%.

Liabilities

Liabilities in 2022 amounted to Rp28.03 trillion, up 1.59% from the previous year of Rp27.59 trillion. This increase was mainly due to a 5.29% increase in third party funds from Rp25.62 trillion to Rp26.97 trillion. In addition, Loans Receivable, Tax Payable, and Employee Benefits also increased by 32.81%, 49.37%, and 24.51% respectively.

Tabel Liabilitas
Table of Liabilities

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022	2021	*Explanation*
(1)	(2)	(3)	*(1)*
Liabilitas Jangka Pendek			***Short-term Liabilities***
Dana Simpanan *Wadiah*	1.248.831	-	*Wadiah Deposit Fund*
Liabilitas Segera	607.981	667.015	*Immediate Liabilities*
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	17.361		*Unshared Profit Sharing*
Simpanan dari Nasabah *)		25.615.733	*Deposits from Customers *)*
Dana *Syirkah* Temporer	25.724.874		*Temporary Shirkah Fund*
Simpanan dari Bank Lain	93.275	1.040.800	*Deposits from other banks*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	27.692.322	27.323.548	*Total Short-term Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang			***Long-term Liabilities***
Pinjaman yang Diterima	201.131	151.442	*Loans Receivable*
Utang Pajak	47.853	32.036	*Tax Payable*
Imbalan Kerja	32.437	26.051	*Employee Benefits*
Liabilitas Lain-lain	56.681	59.449	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	338.102	268.979	*Total Long-Term Liabilities*
Jumlah Liabilitas	**28.030.424**	**27.592.527**	***Total Liabilities***

*) Bank operasional dengan sistem konvensional | **) Bank operating under conventional system*

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek tahun 2022 sebesar Rp27,69 triliun, naik sebesar Rp368,77 miliar atau 1,35% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp27,32 triliun. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan dana pihak ketiga sebesar 5,29% dari Rp25,62 triliun menjadi Rp26,97 triliun.

Short-term Liabilities

Short-term liabilities in 2022 amounted to Rp27.69 trillion, an increase of Rp368.77 billion or 1.35% from the previous year which amounted to Rp27.32 trillion. This increase was mainly due to an increase in third party funds by 5.29% from Rp25.62 trillion to Rp26.97 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Short-Term Liabilities Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

URAIAN	2022	2021	*DESCRIPTION*
(1)	(2)	(3)	*(1)*
Liabilitas Segera	**607.981**	**667.015**	***Immediate Liabilities***
Dana Simpanan Wadiah			***Wadiah Deposit Fund***
Giro *Wadiah*			*Wadiah demand deposits*
Pihak Berelasi	36.801		*Related Party*
Pihak Ketiga	70.542		*Third Party*
Jumlah Giro	107.343		*Total Current Account*
Tabungan *Wadiah*			*Wadiah Savings*
Pihak Berelasi	11.978		*Related Party*
Pihak Ketiga	1.129.511		*Third Party*
Jumlah Tabungan	1.141.488		*Total Savings*
Jumlah Dana Simpanan Wadiah	**1.248.831**		***Total Funds of Wadiah Deposits***
Giro *Mudharabah*			*Mudharabah Current Account*
Pihak Berelasi	2.390.856		*Related Party*
Pihak Ketiga	1.092.193		*Third Party*
Jumlah Giro	3.483.049		*Total Current Account*
Tabungan *Mudharabah*			*Mudharabah Savings*
Pihak Berelasi	-		*Related Party*
Pihak Ketiga	6.544.823		*Third Party*
Jumlah Tabungan	6.544.823		*Total Savings*
Deposito *Mudharabah*			*Mudharabah Time Deposit*
Pihak Berelasi	10.955.504		*Related Party*
Pihak Ketiga	4.741.498		*Third Party*
Jumlah Deposito	15.697.002		*Total Deposits*
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**25.724.874**		***Total Temporary Shirkah Fund***
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	**17.361**		***Unshared Profit Sharing***
Simpanan dari Bank Lain	**93.275**	**1.040.800**	***Deposits from other banks***
Simpanan dari Nasabah *)			***Deposits from Customers *)***
Giro dan Giro *Wadiah*			*Demand deposits and Wadiah demand deposits*
Pihak Berelasi		4.063.766	*Related Party*
Pihak Ketiga		1.543.614	*Third Party*
Jumlah Giro		5.607.380	*Total Current Account*
Tabungan			*Savings*
Pihak Berelasi		13.146	*Related Party*
Pihak Ketiga		7.436.147	*Third Party*
Jumlah Tabungan		7.449.293	*Total Savings*
Deposito Berjangka			*Time Deposit*
Pihak Berelasi		31.757	*Related Party*
Pihak Ketiga		12.527.303	*Third Party*
Jumlah Deposito Berjangka		12.559.060	*Total Time Deposits*
Jumlah Simpanan dari Nasabah *)		**25.615.733**	***Total Deposits from Customers *)***
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**27.692.322**	**27.323.548**	***Total Short-term Liabilities***
Kenaikan (Penurunan) Rp	**368.774**		***Increase (Decrease) Rp***
Kenaikan (Penurunan) %	**1,35%**		***Increase (Decrease) %***

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tahun 2022 adalah sebesar Rp338,10 miliar, meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp268,98 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang pajak sebesar Rp15,82 miliar dan pinjaman yang diterima sebesar Rp49,69 miliar.

Long-term Liabilities

Long-term liabilities in 2022 amounted to Rp338.10 billion, an increase of 26% compared to 2021 which amounted to Rp268.98 billion. The increase mainly came from an increase in tax payables of Rp15.82 billion and loans received of Rp49.69 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Long-Term Liabilities

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Pinjaman yang Diterima	201.131	151.442	49.689	33	*Loans Receivable*
Utang Pajak	47.853	32.036	15.817	49	*Tax Payable*
Imbalan Kerja	32.437	26.051	6.386	25	*Employee Benefits*
Liabilitas Lain-lain	56.681	59.449	(2.768)	(5)	*Other Liabilities*
Jumlah	**338.102**	**268.979**	**69.123**	**26**	***Total***

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima pada tahun 2022 adalah sebesar Rp201,13 miliar, meningkat 32,81% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp151,44 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan Pinjaman Dana Kelolaan dan Pinjaman KPR Sejahtera PPDPP. Pinjaman yang diterima pada tahun 2022 berasal dari Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau dan Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Bank.

Loans Received

Loans received in 2022 amounted to Rp201.13 billion, an increase of 32.81% compared to 2021 which amounted to Rp151.44 billion. The increase mainly came from an increase in Managed Fund Loans and PPDPP Prosperous Mortgage Loans. Loans received in 2022 came from Loans from the Riau Provincial Government and Operational Cooperation Agreements between the Housing Financing Fund Management Center of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia and Banks.

Tabel Pinjaman yang Diterima
Table of Loans Received

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Pinjaman Dana Kelolaan	1.003	463	540	116,63	*Managed Fund Loans*
Pinjaman FLPP Kemenpera	15.335	70.373	(55.038)	(78,21)	*Kemenpera FLPP Loan*
Pinjaman KPR Sejahtera PPDPP	184.793	80.606	104.187	129,25	*PPDPP Prosperous KPR loan*
Jumlah	**201.131**	**151.442**	**49.689**	**32,81**	***Total***

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2022 adalah sebesar Rp47,86 miliar, meningkat 49,37% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp32,04 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang pajak PPh Pasal 29 sebesar Rp20,17 miliar atau 149%.

Tax Payable

Tax payable in 2022 amounted to Rp47.86 billion, an increase of 49.37% compared to 2021 which amounted to Rp32.04 billion. The increase mainly came from an increase in Income Tax Article 29 payable of Rp20.17 billion or 149%.

Tabel Utang Pajak
Tax Payable Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
PPh Pasal 4 (2)	3.903	5.011	(1.108)	(22,11)	*Income Tax Article 4 (2)*
PPh Pasal 21	9.548	9.964	(416)	(4,18)	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 23	393	325	68	20,92	*Income tax article 23*
PPh Pasal 25	-	2.851	(2.851)	(100,00)	*Income tax article 25*
PPh Pasal 29	33.732	13.566	20.166	148,65	*Income Tax Article 29*
PPN & PPh Lainnya	278	319	(41)	(12,85)	*VAT & Other Income Tax*
Jumlah	**47.853**	**32.036**	**15.817**	**49,37%**	***Total***

Imbalan Kerja

Imbalan kerja tahun 2022 berjumlah Rp32,44 miliar, meningkat 24,51% dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp26,05 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya imbalan cuti besar sejumlah Rp3,75 miliar dan imbalan penghargaan masa bakti sebesar Rp2,64 miliar.

Employee Benefits

Employee benefits in 2022 amounted to Rp32.44 billion, an increase of 24.51% compared to 2021 which amounted to Rp26.05 billion. The increase was due to an increase in the compensation for sabbatical leave amounting to Rp3.75 billion and the reward for years of service amounting to Rp2.64 billion.

Tabel Imbalan Kerja
Employee Benefits Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Imbalan Cuti Besar	17.478	13.731	3.747	27,29	*Great Leave Benefits*
Imbalan Penghargaan Masa Bakti	14.959	12.320	2.639	21,42	*Long Service Award Benefits*
Jumlah	**32.437**	**26.051**	**6.386**	**24,51**	***Total***

Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-Lain tahun 2022 adalah sebesar Rp56,68 miliar, menurun 4,66% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp59,45 miliar. Rincian perhitungan pada liabilitas lain-lain tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 sehingga tidak semua rincian dapat dibandingkan, namun secara total keseluruhan liabilitas lain-lain pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2,77 miliar.

Other Liabilities

Other liabilities in 2022 amounted to Rp56.68 billion, a decrease of 4.66% compared to 2021 which amounted to Rp59.45 billion. The details of the calculation in other liabilities in 2022 are different from those in 2021 so not all details can be compared, but in total, other liabilities in 2022 decreased compared to 2021 by Rp2.77 billion.

Tabel Liabilitas Lain-lain Tahun 2022
Table of Other Liabilities in 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

2022		
URAIAN	Nominal	*DESCRIPTION*
Cadangan THR dan Kepegawaian Lainnya	45.570	*THR Reserve and Other Personnel*
Setoran Jaminan	8.432	*Security Deposit*
Rekening Sementara	2.129	*Temporary Account*
Pendapatan Administrasi Pembiayaan Ditangguhkan	75	*Deferred Financing Administration Income*
Lain-lainnya	476	*Other*
Jumlah	**56.681**	***Total***

Tabel Liabilitas Lain-lain Tahun 2021
Table of Other Liabilities in 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

2021		
URAIAN	**Nominal**	***DESCRIPTION***
Setoran Jaminan Bank Garansi	12.109	*Bank Guarantee Deposit*
Rek. Perantara Sistem dan ATM	8	*Account. System and ATM Intermediary*
Beban Bunga yang akan Dibayar	334	*Interest Expense to be Paid*
Pos Kredit dalam Penyelesaian	27.703	*Post Loans in Settlement*
Kredit Kelolaan Belum Disalurkan	26	*Loans under Management Not yet Disbursed*
Titipan Jaminan Kunci Save Deposit	668	*Key Deposits Save Deposits*
Selisih Pasiva dalam Penyelesaian	3.836	*Difference in liabilities under settlement*
Liabilitas Sewa	5.701	*Lease Liabilities*
Lainnya	9.063	*Others*
Jumlah	**59.449**	***Total***

Tabel Perbandingan Liabilitas Lain-lain
Comparison Table of Other Liabilities

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Liabilitas Lain-lain	56.681	59.449	(2.768)	(4,66)	*Other Liabilities*

Ekuitas

Ekuitas tahun 2022 adalah sebesar Rp3,35 triliun, meningkat 5,17% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp3,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp106,08 miliar dan laba ditahan sebesar Rp129,02 miliar.

Equity

Equity in 2022 amounted to Rp3.35 trillion, an increase of 5.17% compared to 2021 which amounted to Rp3.19 trillion. The increase mainly came from an increase in issued and fully paid capital of Rp106.08 billion and retained earnings of Rp129.02 billion.

Tabel Ekuitas
Equity Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.209.241	1.103.161	106.080	9,62	*Issued and fully paid-up capital*
Tambahan Modal Disetor	2.085	4.085	(2.000)	(48,96)	*Additional paid-in capital*
Keuntungan (Kerugian) Bersih yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Dari Efek-Efek Tersedia untuk Dijual	(66.099)	2.233	(68.332)	(3060,35)	*Net unrealized gain (loss) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Saldo Laba					*Retained Earnings*
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.622.421	(1.622.421)	(100,00)	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	2.206.705	455.259	1.751.446	384,71	*Not yet Appropriated*
Jumlah Saldo Laba	2.206.705	2.077.680	129.025	6,21	*Total Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas	**3.351.932**	**3.187.159**	**164.773**	**5,17**	***Total Equity***

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2022 sebesar Rp1,21 triliun, meningkat 9,62% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp1,10 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan saham seri A sebesar Rp102,08 miliar.

Issued and fully paid-up capital

Issued and fully paid-up capital in 2022 amounted to Rp1.21 trillion, an increase of 9.62% compared to 2021 which amounted to Rp1.10 trillion. The increase mainly came from an increase in series A shares of Rp102.08 billion.

Tabel Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Table of Issued and fully paid-up capital

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					*Issued and Fully Paid-up Capital*
Saham Seri A	1.202.241	1.100.161	102.080	9,28	*Series A Shares*
Saham Seri B	7.000	3.000	4.000	133,33	*Series B Shares*
Jumlah	**1.209.241**	**1.103.161**	**106.080**	**9,62**	***Total***

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tahun 2022 sebesar Rp2,08 miliar, menurun 48,95% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp4,08 miliar. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya tambahan modal disetor dari Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri (Seri B) secara keseluruhan yaitu Rp2,00 miliar.

Additional Paid-up Capital

Additional paid-in capital in 2022 amounted to Rp2.08 billion, a decrease of 48.95% compared to 2021 which amounted to Rp4.08 billion. The decrease came from a reduction in additional paid-in capital from Amanah Riau Kepri Consumer Cooperative (Series B) in its entirety of Rp2.00 billion.

Tabel Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital Table

(Dalam Rupiah Penuh)| *(In Full Rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan Growth		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
1	2	3	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Dana setoran modal	2.084.940.000	2.084.940.000	0	0,00	*Capital deposit fund*
Provinsi Riau	405	405	0	0,00	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	18.217	18.217	0	0,00	*Pekanbaru City*
Kota Tanjung Pinang	35.217	35.217	0	0,00	*Tanjung Pinang City*
Kota Batam	11.793	11.793	0	0,00	*Batam City*
Kabupaten Kampar	18.574	18.574	0	0,00	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	29.804	29.804	0	0,00	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	11.089	0	0,00	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	102.548	0	0,00	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Bintan	22.286	22.286	0	0,00	*Bintan Regency*
Kabupaten Pelalawan	72.657	72.657	0	0,00	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	37.421	0	0,00	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Natuna	0	0	0	0,00	*Natuna Regency*
Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri (Seri B)	0	2.000.000	(2.000.000)	(100,00)	*Amanah Riau Kepri Consumer Cooperative (Series B)*
Jumlah	**2.085.300.525**	**4.085.300.525**	**(2.000.000.000)**	**(48,96)**	***Total***

Saldo Laba

Saldo Laba tahun 2022 sebesar Rp2,21 triliun, meningkat 6,21% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp2,08 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1,75 triliun.

Retained Earnings

Retained Earnings in 2022 amounted to Rp2.21 trillion, an increase of 6.21% compared to 2021 which amounted to Rp2.08 trillion. The increase mainly came from the growth of unappropriated retained earnings of Rp1.75 trillion.

Tabel Saldo Laba
Retained Earnings Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan / Growth		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.622.421	(1.622.421)	(100,00)	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	2.206.705	455.259	1.751.446	384,71	*Not yet appropriated*
Saldo Laba	2.206.705	2.077.680	129.025	6,21	*Retained Earnings*

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Proses konversi yang dilakukan oleh BRK Syariah dari BUK menjadi BUS diikuti dengan perubahan sistem pengelolaan dana dari konvensional dan syariah menjadi syariah seutuhnya. Oleh karena itu BRK Syariah melakukan perubahan pada informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam Laporan Laba Rugi. Untuk menyajikan informasi yang dapat diperbandingkan (komparatif) dari tahun lalu dan tahun ini (yoy) maka dalam ulasan berikut disajikan data laba rugi yang bersumber dari Laporan Laba Rugi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Laporan Laba Rugi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 (bank sebagai BUK), dan Laporan Laba Rugi untuk periode 21 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (bank sebagi BUS).

Kesuksesan BRK Syariah melakukan konversi dari BUK menjadi BUS diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan. Kinerja BRK Syariah periode 01 Januari - 21 Agustus 2022 (sebelum konversi) menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 208,08 miliar, sedangkan setelah menjadi Bank Umum Syariah (konversi) periode 22 Agustus - 31 Desember 2022 Bank berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 295,47 miliar. Terdapat peningkatan kinerja yang tercermin dari laba setelah konversi (rentang waktu ± 4 bulan) lebih tinggi dari laba sebelum konversi (rentang waktu ± 8 bulan) sehingga kinerja sebagai Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan sebagai Bank Umum Konvensional.

Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

The conversion process carried out by BRK Syariah from BUK to BUS was followed by changes in the fund management system from conventional and sharia to full sharia. Therefore, BRK Syariah made changes to the information presented and disclosed in the Income Statement. To present comparable information from last year and this year (yoy), the following review presents profit and loss data sourced from the Income Statement for the period January 1, 2021 to December 31, 2021, the Income Statement for the period January 1, 2022 to August 21, 2022 (bank as BUK), and the Income Statement for the period August 21, 2022 to December 31, 2022 (bank as BUS).

BRK Syariah success in converting from BUK to BUS was followed by an increase in financial performance. BRK Syariah's performance for the period January 01 - August 21, 2022 (before conversion) resulted in a profit before tax of Rp 208.08 billion, while after becoming a Sharia Commercial Bank (conversion) for the period August 22 - December 31, 2022 the Bank managed to book a profit before tax of Rp295.47 billion. There is an increase in performance as reflected in the profit after conversion (± 4 months) higher than the profit before conversion (± 8 months) so that the performance as a Sharia Commercial Bank is better than as a Conventional Commercial Bank.

Tabel Laporan Laba Rugi
Income Statement Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

Uraian	2022			2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
	31 Des Gabungan	22 Agus s.d. 31 Des	1 Jan s.d. 21 Agus		Rp	%	
1	2	3	4	5	(6)= (2)-(5)	(7)= (6)/(5)	*(1)*
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*							*Fund Management Income by the Bank as Mudharib*
Pendapatan Bunga	835.355	-	835.355		835.355	0,00	*Interest Income*
Pendapatan dari Jual Beli	969.260	714.774	254.486		969.260	0,00	*Income from Sale and Purchase*
Pendapatan dari Bagi Hasil	90.079	87.841	2.238		90.079	0,00	*Income from Profit Sharing*
Pendapatan dari *Ijarah* - Neto	28.749	10.354	18.395		28.749	0,00	*Income from Ijarah - Net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	186.525	116.018	70.507		186.525	0,00	*Other Main Business Income*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai *Mudharib*	2.109.968	928.986	1.180.982		2.109.968	0,00	*Total Income from Fund Management by Bank as Mudharib*
Pendapatan Bunga dan Syariah					0	0,00	*Interest and Sharia Income*
Pendapatan Bunga				1.781.784	(1.781.784)	(100,00)	*Interest Income*
Pendapatan Syariah				432.068	(432.068)	(100,00)	*Sharia Income*
Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah				2.213.852	(2.213.852)	(100,00)	*Total Interest and Sharia Income*
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(632.496)	(189.235)	(443.261)		(632.496)	0,00	*Third Party Right to Profit Sharing*
Beban Bunga dan Syariah					0	0,00	*Interest and Sharia Expenses*
Beban Bunga				(768.749)	768.749	(100,00)	*Interest Expense*
Beban Syariah				(153.456)	153.456	(100,00)	*Sharia Expenses*
Provisi dan Komisi				(244)	244	(100,00)	*Fees and Commissions*
Jumlah Beban Bunga dan Syariah				(922.450)	922.450	(100,00)	*Total Interest and Sharia Expenses*
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.477.472	739.751	737.721		1.477.472	0,00	*Bank's Profit Sharing Right*
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah, Neto				1.291.403	(1.291.403)	(100,00)	*Interest Income and Sharia Income, Net*
Pendapatan Usaha Lainnya							*Other Business Income*
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	166.176	45.203	120.973		166.176	0,00	*Banking Services Fee Income*
Pendapatan Lainnya	5.079	5.079	-		5.079	0,00	*Other Income*
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	171.255	50.283	120.973	207.345	(36.090)	(17,41)	*Total Other Operating Income*
Beban Usaha							*Operating Expenses*
Beban Usaha Selain dari Penyaluran Dana (Beban Operasional Lainnya)	(1.093.599)	(531.077)	(562.523)	(912.395)	(181.204)	19,86	*Operating Expenses Other than Fund Disbursement (Other Operating Expenses)*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	(9.093)	40.552	(49.646)	(35.019)	25.926	(74,03)	*Provision for Impairment of Earning Assets Expense*
Laba Usaha	546.034	299.509	246.525	551.335	(5.301)	(0,96)	*Operating Profit*
Pendapatan/(Beban) Non-Usaha - Neto	(42.477)	(4.035)	(38.442)	(36.237)	(6.240)	17,22	*Non-operating Income/(Expense) - Net*
Laba Sebelum Pajak	503.557	295.474	208.084	515.098	(11.541)	(2,24)	*Profit Before Tax*
Beban Pajak - Neto	(152.658)	(64.508)	(88.150)	(134.085)	(18.573)	13,85	*Tax Expense - Net*
Laba Bersih Tahun Berjalan	350.899	230.966	119.933	381.013	(30.114)	(7,90)	*Net Income for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain							*Other Comprehensive Income*
Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	(68.332)	(1.524)	(66.808)	2.920	(71.252)	(2440,14)	Items to be Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Laba Komprehensif	**282.567**	**229.442**	**53.125**	**383.934**	**(101.367)**	**(26,40)**	***Total Comprehensive Income***
Laba Bersih Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	29.052	19.100	9.952	34.581	(5.529)	(15,99)	*Net Income Per Share (In Full Rupiah)*

Pendapatan Pengelolaan Dana

Implementasi konversi dari BUK menjadi BUS, BRK Syariah melakukan perubahan nama akun untuk pendapatan pengelolaan dana, pada tahun 2021 disebut dengan Pendapatan Bunga dan Syariah diubah menjadi Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* pada tahun 2022. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2,11 triliun, mengalami penurunan 4,69% dibandingkan Pendapatan Bunga dan Syariah pada tahun 2021 yang berjumlah Rp2,21 triliun.

Fund Management Income

Implementation of the conversion from BUK to BUS, BRK Syariah changed the account name for fund management income, in 2021 it was called Interest and Sharia Income and changed to Fund Management Income by the Bank as Mudharib in 2022. Fund Management Income by the Bank as Mudharib in 2022 amounted to Rp2.11 trillion, a decrease of 4.69% compared to Interest and Sharia Income in 2021 which amounted to Rp2.21 trillion.

Tabel Pendapatan Pengelolaan Dana
Table of Fund Management Income

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

URAIAN	2022	2021	*DESCRIPTION*
(1)	(2)	(3)	*(1)*
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*			***FUND MANAGEMENT INCOME BY BANK AS MUDHARIB***
Pendapatan Bunga	835.355		*Interest Income*
Pendapatan dari Jual Beli	969.260		*Income from Sale and Purchase*
Pendapatan dari Bagi Hasil	90.079		*Income from Profit Sharing*
Pendapatan dari *Ijarah* - Neto	28.749		*Income from Ijarah - Net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	186.525		*Other Main Business Income*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	**2.109.968**		***Total Income from Fund Management by Bank as Mudharib***
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH			***INTEREST AND SHARIA INCOME***
Pendapatan Bunga			*Interest Income*
Bunga Kredit yang Diberikan		1.585.760	*Interest on Loans*
Bunga Surat Berharga yang Dimiliki		184.783	*Interest on Securities Held*
Jasa Giro Bank Indonesia		6.260	*Current Account Services with Bank Indonesia*
Bunga dan Jasa Giro Penempatan pada Bank Lain		4.981	*Interest and Current Account Services Placements with Other Banks*
Jumlah Pendapatan Bunga		1.781.784	*Total Interest Income*
Pendapatan Syariah			*Syariah Income*
Pendapatan Marjin *Murabahah*		304.940	*Murabaha Margin Income*
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		82.597	*Interest and Profit Sharing Income*
Pendapatan *Rahn, Ijarah* dan Multijasa		24.091	*Rahn, Ijarah and Multijasa Income*
Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*		14.969	*Profit Sharing of Musyarakah Financing*
Jasa Giro Bank Indonesia		1.170	*Bank Indonesia Current Account Services*
Bagi Hasil Sertifikat Investasi *Mudharabah* Bank		3.300	*Bank Mudharabah Investment Certificate Profit Sharing*
Bagi Hasil Penempatan *Mudharabah*		1.001	*Mudharabah Placement Profit Sharing*
Jumlah Pendapatan Syariah		432.068	*Total Sharia Income*
Jumlah Pendapatan Bunga dan Syariah		**2.213.852**	***Total Interest and Sharia Income***
Kenaikan (Penurunan) Rp	**(103.885)**		***Increase (Decrease) Rp***
Kenaikan (Penurunan) %	**(4,69%)**		***Increase (Decrease) %***

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Nilai hak pihak ketiga atas bagi hasil pada tahun 2022 adalah sebesar Rp632,5 miliar, turun 31,43% dibandingkan nilai Beban Bunga dan Syariah pada tahun 2021 yang sebesar Rp922,45 miliar.

Third Party Right to Profit Sharing

Third party entitlement to profit sharing represents the share of profit sharing belonging to third parties based on the principle of mudharabah mutlaqah for the management of their funds by the Bank. The value of third party rights to profit sharing in 2022 amounted to Rp632.5 billion, a decrease of 31.43% compared to the value of Interest and Sharia Expenses in 2021 which amounted to Rp922.45 billion.

Tabel Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil
Table of Third Party Entitlement to Profit Sharing

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

URAIAN	2022	2021	*DESCRIPTION*
(1)	(2)	(3)	*(1)*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	632.496		*THIRD PARTY ENTITLEMENT TO PROFIT SHARING*
BEBAN BUNGA DAN SYARIAH			*INTEREST AND SHARIA EXPENSES*
Beban Bunga		768.749	*Interest Expense*
Beban Syariah		153.456	*Sharia Expenses*
Provisi dan Komisi		244	*Fees and commissions*
Jumlah Beban Bunga dan Syariah		922.450	***Total Interest and Sharia Expenses***
Kenaikan (Penurunan) Rp	**(289.954)**		***Increase (Decrease) Rp***
Kenaikan (Penurunan) %	**(31,43%)**		***Increase (Decrease) %***

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan dan Pendapatan lainnya dengan jumlah Rp171,26 miliar. Adapun pendapatan usaha lainnya tahun 2021 bersumber dari Pendapatan administrasi, Provisi dan komisi selain kredit, Pendapatan restitusi biaya, Pendapatan dari hapus buku, Pendapatan *fee*, dan pendapatan usaha lainnya dengan jumlah Rp207,35 miliar. Pendapatan usaha lainnya tahun 2022 turun sebesar Rp36,09 miliar atau 17,41%.

Other Business Income

Other business income in 2022 comes from Banking Services Fee Income and other income with a total of Rp171.26 billion. Meanwhile, other business income in 2021 comes from administrative income, fees and commissions other than credit, fee restitution income, income from write-offs, fee income, and other business income with a total of Rp207.35 billion. Other operating income in 2022 decreased by Rp36.09 billion or 17.41%.

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari Beban Tenaga Kerja, Beban Umum dan Administrasi, Beban Bonus, Beban lainnya, dan Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Beban usaha tahun 2022 berjumlah Rp1,10 triliun, naik sebesar Rp155,28 miliar atau 16,39% dari tahun 2021 yang berjumlah Rp947,41 miliar. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya Beban Tenaga Kerja, Beban Umum dan Administrasi, dan Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif.

Operating Expenses

Operating expenses consist of labor expenses, general and administrative expenses, bonus expenses, other expenses, and allowance for impairment losses on productive assets. Operating expenses in 2022 amounted to Rp1.10 trillion, an increase of Rp155.28 billion or 16.39% from 2021 which amounted to Rp947.41 billion. This increase was mainly due to the increase in labor expenses, general and administrative expenses, and allowance for impairment losses on productive assets.

Pendapatan dan (Beban) Non Operasional

Pendapatan Non Operasional berasal dari pendapatan Sewa, Keuntungan penjualan aset tetap, dan pendapatan lainnya. Sedangkan Beban Non Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk Iuran keanggotaan, Denda yang dibayar, dan beban lainnya. Pendapatan Non Operasional tahun 2022 berjumlah Rp31,91 miliar, naik sebesar Rp19,48 miliar atau 156,75% dari tahun 2021 yang berjumlah Rp12.43 miliar. Sedangkan Beban Non Operasional tahun

Non-Operating Income and (Expenses)

Non-operating income comes from rental income, gain on sale of fixed assets, and other income. While Non-Operating Expenses are expenses incurred for membership dues, fines paid, and other expenses. Non-Operating Income in 2022 amounted to Rp31.91 billion, an increase of Rp19.48 billion or 156.75% from 2021 which amounted to Rp12.43 billion. Meanwhile, Non-Operating Expenses in 2022 amounted to Rp74.39 billion, an increase of Rp25.72 billion or 52.85%

2022 berjumlah Rp74,39 miliar, naik sebesar Rp25,72 miliar atau 52,85% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp48,67 miliar. Oleh karena itu Pendapatan Dan (Beban) Non Operasional tahun 2022 berjumlah Rp42,48 miliar, naik Rp6,24 miliar atau 17,22% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp36,24 miliar.

from the previous year which amounted to Rp48.67 billion. Therefore, Non-Operating Income and (Expenses) in 2022 amounted to Rp42.48 billion, an increase of Rp6.24 billion or 17.22% from the previous year which amounted to Rp36.24 billion.

Laba Sebelum Pajak

Laba Sebelum Pajak tahun 2022 sebesar Rp503,55 miliar mengalami penurunan 2,24% dari tahun 2021 sebesar Rp515,09 milar, dimana faktor pengurang laba adalah karena adanya perubahan pada peraturan tentang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dan ditetapkan kembali pada Perpu No 2 tahun 2022). Dampak dari perubahan peraturan tersebut, Bank harus membentuk kekurangan beban imbalan pasca kerja tahun 2022 sebesar Rp8,27 miliar.

Profit Before Tax

Profit Before Tax in 2022 amounted to Rp503.55 billion, a decrease of 2.24% from 2021 of Rp515.09 billion, where the profit reducing factor was due to changes in the regulations on Job Creation (Law No. 11 of 2020 which was later revoked and re-established in Perpu No. 2 of 2022). The impact of these regulatory changes, the Bank must form a shortfall in post-employment benefits expense in 2022 amounting to Rp8.27 billion.

Laba Bersih Tahun Berjalan, Penghasilan Komprehensif Lain, dan Laba Komprehensif

Laba bersih tahun 2022 sebesar Rp350,90 miliar, turun 7,90% atau Rp30,11 miliar dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp381,01 miliar. Adapun penghasilan komprehensif lain tahun 2022 berupa pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi yang bersumber dari Kerugian yang belum Direalisasikan atas surat berharga dalam Kelompok Diukur pada Nilai Wajar yang berjumlah Rp68,33 miliar. Oleh karena itu Laba Komprehensif yang berhasil dibubukan oleh Bank adalah sebesar Rp282,56 miliar.

Net Income for the Year, Other Comprehensive Income, and Comprehensive Income

Net income in 2022 amounted to Rp350.90 billion, down 7.90% or Rp30.11 billion from the previous year which amounted to Rp381.01 billion. As for other comprehensive income in 2022 in the form of items that will be reclassified to profit or loss originating from Unrealized Losses on securities in the Fair Value Measured Group which amounted to Rp68.33 billion. Therefore, the Comprehensive Income that was successfully booked by the Bank amounted to Rp282.56 billion.

Laporan Arus Kas

Selama tahun 2022 Bank mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.594 miliar, menurun 52,00% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.319 miliar. Sedangkan dari aktivitas investasi, kas bersih yang digunakan adalah sebesar Rp8,94 miliar, menurun 62,52% dari tahun lalu yang berjumlah Rp23,86 miliar. Adapun kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp17,21 miliar. Kas pada awal tahun 2022 sebesar Rp5.192 miliar, naik 64,87% dari awal tahun 2021 yang berjumlah Rp3.149 miliar. Adapun jumlah kas pada akhir tahun 2022 sebesar Rp6.794 miliar, meningkat 9,84% dari akhir tahun sebelumnya yang berjumlah Rp6.185 miliar.

Cash Flow Statement

During the year, the Bank generated net cash from operating activities amounting to Rp1,594 billion, a 52.00% decrease from the previous year which reached Rp3,319 billion. While from investing activities, net cash used amounted to Rp8.94 billion, a decrease of 62.52% from last year which amounted to Rp23.86 billion. Meanwhile, cash obtained from financing activities amounted to Rp17.21 billion. Cash at the beginning of 2022 amounted to Rp5,192 billion, up 64.87% from the beginning of 2021 which amounted to Rp3,149 billion. The total cash at the end of 2022 amounted to Rp6,794 billion, an increase of 9.84% from the end of the previous year which amounted to Rp6,185 billion.

Tabel Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement Table

(Dalam Jutaan Rupiah)| *(In million rupiah)*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Jual Beli, Bagi Hasil, Ijarah dan Usaha Utama Lainnya	928.986		928.986	0,00	*Sale and Purchase, Profit Sharing, Ijarah and Other Major Businesses Receipts*
Penerimaan Bunga dan Syariah		2.194.214	(2.194.214)	(100,00)	*Interest and Sharia Income*
Pembayaran Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer	(189.235)		(189.235)	0,00	*Payment of Profit Sharing of Temporary Shirkah Fund*
Pembayaran Bunga, Bagi Hasil Syariah		(936.800)	936.800	(100,00)	*Payment of Interest, Sharia Profit Sharing*
Penerimaan dari Pembiayaan dan Piutang Yang Dihapusbukukan	3.657		3.657	0,00	*Receipt of Financing and Written-off Receivables*
Penerimaan Pendapatan Usaha Lainnya	50.760	113.046	(62.286)	(55,10)	*Receipt of Other Business Income*
Pembayaran Tantiem	(5.774)		(5.774)	0,00	*Payment of Tantiem*
Pembayaran Beban Usaha	(508.232)		(508.232)	0,00	*Payment of operating expenses*
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi		(241.612)	241.612	(100,00)	*Payment of General and Administrative Expenses*
Pembayaran Beban Tenaga Kerja		(570.072)	570.072	(100,00)	*Payment of Labor Expenses*
Penerimaan atas Pendapatan Non-Usaha Bersih	39.171	(36.237)	75.408	208,10	*Receipt of net non-operating income*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(105.160)	(144.733)	39.573	(27,34)	*Payment of Income Tax*
Pembayaran Zakat	(0,5)		(0,5)	0,00	*Payment of Zakat*
Penyaluran Dana Kebajikan	(518)		(518)	0,00	*Disbursement of Benevolent Funds*
Arus Kas Sebelum Perubahan Aset Operasi dan Liabilitas Operasi	213.654	377.806	(164.152)	(43,45)	*Cash Flow Before Changes in Operating Assets and Operating Liabilities*
(Kenaikan) Penurunan Aset Operasi			0,00	0,00	*(Increase) Decrease in Operating Assets*
Surat Berharga	(1.171.916)	451.143	(1.623.059)	(359,77)	*Securities*
Kredit yang Diberikan		76.035	(76.035)	(100,00)	*Loans*
Piutang	(31.871)		(31.871)	0,00	*Receivables*
Pinjaman *Qardh*	(4.906)		(4.906)	0,00	*Qardh Loans*
Pembiayaan	(210.406)		(210.406)	0,00	*Financing*
Aset *Ijarah*	8.706		8.706	0,00	*Ijarah Assets*
Penyertaan Saham		100	(100)	(100,00)	*Investment in Shares*
Aset Lain-lain -Bersih	(95.110)	(49.729)	(45.381)	91,26	*Other Assets -Net*
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Operasi					*(Increase) Decrease in Operating Liabilities*
Simpanan *Mudharabah*	2.500.800		2.500.800	0,00	*Mudharabah Deposits*
Simpanan *Wadiah*	93.275		93.275	0,00	*Wadiah Deposits*
Simpanan dari Nasabah		3.473.088	(3.473.088)	(100,00)	*Deposits from Customers*
Simpanan dari Bank Lain		(917.967)	917.967	(100,00)	*Deposits from other banks*
Liabilitas Segera	272.353	(57.531)	329.884	573,40	*Immediate Liabilities*
Utang Pajak	44.739	1.624	43.115	2654,89	*Tax Liabilities*
Liabilitas Lain-lain	(25.785)	(34.904)	9.119	(26,13)	*Other Liabilities*
Jumlah	**1.379.878**	**2.941.859**	**(1.561.981)**	**(53,10)**	***Total***
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	1.593.530	3.319.665	(1.726.135)	(52,00)	*Net Cash Provided by (Used for) Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian Aset Tetap	(8.959)	(23.857)	14.898	(62,45)	*Purchase of Fixed Assets*
Penjualan Aset Tetap	18	1	17	1670,00	*Sale of Fixed Assets*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(8.941)	(23.857)	14.916	(62,52)	*Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pinjaman yang Diterima	22.268	37.533	(15.265)	(40,67)	*Borrowings Received*
Pembayaran Dividen		(278.382)	278.382	(100,00)	*Dividend Payment*
Koreksi Saldo Laba		(1)	1	(100,00)	*Correction of Retained Earnings*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(11.140)	(21.000)	9.860	(46,95)	*Partnership and Community Development Program*
Setoran Modal Saham	4.080	2.700	1.380	(51,11)	*Share Capital Deposit*
Tambahan Modal Disetor	2.000	(700)	2.700	385,71	*Additional Paid-in Capital*

URAIAN	2022	2021	Pertumbuhan *Growth*		*DESCRIPTION*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)	*(1)*
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	17.208	(259.850)	277.058	106,62%	*Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.601.797	3.035.959	(1.434.162)	(47,24)	*Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas Awal Periode	5.192.234	3.149.329	2.042.905	64,87	*Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period*
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	6.794.031	6.185.288	608.743	9,84	*End of Period Cash and Cash Equivalents*
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN					***ADDITIONAL DISCLOSURES***
Kas dan Setara Kas Terdiri dari:					*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	1.461.888	719.393	742.495	103,21	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4.675.743	2.042.746	2.632.997	128,89	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	206.400	88.767	117.633	132,52	*Current Accounts with Other Banks*
Investasi pada Surat Berharga	450.000		450.000	0,00	*Investment in Securities*
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain		3.334.381	(3.334.381)	(100,00)	*Placements with Bank Indonesia and Other Banks*
Jumlah Kas dan Setara Kas	**6.794.031**	**6.185.288**	**608.743**	**9,84**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp1,59 triliun, menurun 52% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3,32 triliun. Hal ini disebabkan terutama oleh penggunaan kas untuk pembelian dan/atau pengalihan surat berharga sebagai bagian dari proses konversi dari BUK menjadi BUS.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash provided by operating activities in 2022 amounted to Rp1.59 trillion, a 52% decrease compared to 2021 of Rp3.32 trillion. This was mainly due to the use of cash for the purchase and/or transfer of securities as part of the conversion process from BUK to BUS.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp8,94 miliar, menurun 62,52% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp23,86 miliar. Hal tersebut disebabkan karena BRK Syariah tidak melakukan investasi barang modal dalam jumlah besar.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash used for investing activities in 2022 amounted to Rp8.94 billion, a decrease of 62.52% compared to 2021 of Rp23.86 billion. This is because BRK Syariah does not invest in large amounts of capital goods.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp17,21 miliar, meningkat 106,62% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp259,85 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi adanya tambahan modal disetor sebesar Rp2,0 miliar dan setoran modal saham sebesar Rp4,08 miliar serta menurunnya penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan.

Cash Flow from Funding Activities

Net cash provided by financing activities in 2022 amounted to Rp17.21 billion, an increase of 106.62% compared to 2021 of Rp259.85 billion. This was mainly due to additional paid-in capital of Rp2.0 billion and share capital of Rp4.08 billion as well as a decrease in the use of cash for financing activities.

AKSELERASI PERTUMBUHAN *FEE BASED INCOME*

Acceleration of Fee Based Income Growth

Fee based income berpotensi menjadi salah satu tulang punggung sumber pendapatan Bank di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi informasi telah mempercepat penyediaan layanan prima dan juga peluang menghasilkan *fee based income*. Bank telah mencanangkan untuk merealisasikan produk/aktivitas baru dalam menunjang peningkatan *fee based income*, yakni sebagai berikut:

1. *Buyer Financing*
   Merupakan pemberian fasilitas kepada *Buyer* (Nasabah) melalui mekanisme penjaminan pembayaran kepada *Supplier*, dimana fasilitas penjaminan diberikan menggunakan Akad *Kafalah bil Ujrah*. Pemberian fasilitas dilakukan dalam rangka memberikan solusi kepada Nasabah untuk mengatasi ketidaksesuaian (*mistmatch*) arus kas *Buyer* (Nasabah) terhadap kewajibannya kepada *Supplier*.
2. *Supplier Financing*
   Merupakan pemberian fasilitas kepada *Supplier* (Nasabah) dengan akad *wakalah bil ujrah* dimana Bank menerima kuasa dari *Supplier* untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen perdagangan dan penagihan piutang kepada *Buyer*. Bank dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) dimana akad tersebut tidak boleh terkait dengan akad *wakalah bil ujrah*.
3. Negosiasi Wesel Ekspor
   Dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, dimana Bank menerima kuasa dari *Supplier* (Nasabah) untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen perdagangan dengan *underlying* L/C, SKBDN (*Documentary Credit*), dan penagihan piutang. Atas penagihan piutang tersebut Bank mendapatkan imbalan berupa *ujrah/fee*. Dalam mempercepat arus kas, *Supplier* (Nasabah) juga dapat mengajukan pemberian pembiayaan/dana talangan (*qardh*) untuk membantu likuiditasnya.

Dari sisi Bank, ketiga fasilitas/produk baru yang terkait dengan aktivitas *Treasury* di atas dapat mengoptimalisasi *Customer Base* khususnya bagi Nasabah yang memiliki potensi transaksi bisnis perdagangan maupun bisnis internasional. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Bank dalam mengakuisisi Nasabah serta akselerasi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*).

4. *QRIS* (*Quick Response Indonesia Standard*)
   Fasilitas layanan yang diberikan kepada Nasabah Bank untuk melakukan transaksi pembayaran *QRIS* melalui aplikasi BRKS *Mobile* (*as issuer*) dan layanan penerimaan transaksi pembayaran *QRIS* bagi *Merchant* BRKS *QRIS* (*as acquirer*). *QR Code* Indonesia *Standard* (*QRIS*) ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi Nasabah Bank dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terhadap jasa perbankan sehingga dapat memberikan *value added* bagi Bank dalam hal layanan digital, peningkatan *brand image*, dan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan Bank dari *fee based income*.

Fee based income has the potential to become one of the backbones of the Bank's sources of income in the future. The development of information technology has accelerated the provision of excellent services as well as opportunities to generate fee-based income. The Bank has planned to realize new products/activities to support increased fee-based income, namely as follows:

1. *Buyer Financing*
   Is the provision of facilities to the Buyer (Customer) through a payment guarantee mechanism to the Supplier, where the guarantee facility is provided using the Kafalah bil Ujrah Agreement. The provision of facilities is carried out in order to provide solutions to the Customer to overcome the mismatch (mismatch) of the Buyer's (Customer's) cash flow with his obligations to the Supplier.
2. *Supplier Financing*
   Is the provision of facilities to Suppliers (Customers) with a wakalah bil ujrah contract where the Bank receives power of attorney from the Supplier to manage trade documents and collect receivables from the Buyer. Banks can provide bailout funds (Qardh) where the contract may not be related to the wakalah bil ujrah contract.
3. *Export Bill Negotiation*
   By using the wakalah bil ujrah contract, where the Bank receives power of attorney from the Supplier (Customer) to manage trade documents with underlying L/C, SKBDN (Documentary Credit), and collection of receivables. For the collection of these receivables, the Bank receives compensation in the form of ujrah/fees. In accelerating cash flow, Suppliers (Customers) can also apply for financing/bailouts (qardh) to help with liquidity.

From the Bank's perspective, the three new facilities/products related to Treasury activities above can optimize the Customer Base, especially for customers who have the potential for trade or international business transactions. This can increase the Bank's competitiveness in acquiring customers as well as accelerating sources of income from fees (ujrah).

4. *QRIS (Quick Response Indonesian Standard)*
   Service facilities provided to Bank Customers to make QRIS payment transactions through the BRKS Mobile application (as issuer) and QRIS payment transaction acceptance services for BRKS QRIS Merchants (as acquirer). The Indonesian Standard QR Code (QRIS) is expected to be an option for Bank Customers and the general public to meet their needs for banking services so as to provide added value to the Bank in terms of digital services, increase brand image, and increase Third Party Funds (DPK) which in turn able to increase the Bank's income from fee-based income.

5. *Debit as Issuer*

Merupakan layanan transaksi Kartu Debit, yaitu layanan transaksi pembayaran debit di *merchant* dimana fungsi dan layanan Kartu Debit Bank melekat pada seluruh Kartu ATM Bank yang selanjutnya disebut sebagai Kartu ATM/Debit Bank.

Dengan adanya penambahan fungsi Kartu ATM Bank sebagai Kartu Debit diharapkan dapat menambah loyalitas Nasabah, meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan Bank sebagai pilihan bertransaksi, serta peningkatanan jumlah rekening (*Number of Account*, *NoA*) Dana Pihak Ketiga yang pada akhirnya bermuara pada akselerasi pertumbuhan pendapatan Bank dalam bentuk *fee based income* berupa pendapatan MDR (*Merchant Discount Rate*).

5. *Debit as Issuer*

It is a Debit Card transaction service, namely a debit payment transaction service at merchants where the functions and services of a Bank Debit Card are attached to all Bank ATM Cards, hereinafter referred to as Bank ATM/Debit Cards.

With the addition of the Bank's ATM Card function as a Debit Card, it is hoped that it can increase customer loyalty, increase public trust and interest in utilizing Bank services as a transaction option, as well as increase the number of accounts (Number of Accounts, NoA) of Third Party Funds which ultimately leads to accelerated growth Bank income in the form of fee-based income in the form of MDR (Merchant Discount Rate) income.

Selama tahun 2022 BRK Syariah berhasil mendapatkan *fee based income* dari berbagai sumber, antara lain pendapatan administrasi CASA, pendapatan administrasi & *fee* pembiayaan, pendapatan layanan *internet banking*, pendapatan transaksi ATM, pendapatan jasa pembayaran, pendapatan komisi asuransi, pendapatan kartu kredit, pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan, pendapatan *fee* partisipasi pembiayaan sindikasi, pendapatan transaksi mata uang asing, pendapatan transaksi *remittance*, serta pendapatan administrasi, *fee*, dan provisi lainnya. Berikut nilai *fee based income* selama tahun 2022:

During 2022 BRK Syariah succeeded in obtaining fee-based income from various sources, including CASA administrative income, administrative income & financing fees, internet banking service income, ATM transaction income, payment service income, insurance commission income, credit card income, administrative income and commissions other than financing, syndicated financing participation fee income, foreign currency transaction income, remittance transaction income, as well as administrative income, fees and other fees. The following is the value of fee-based income for 2022:

Fee Based Income	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	*Fee Based Income*
Pendapatan Administrasi CASA	5.581.479.853	*CASA administrative income*
Pendapatan Administrasi & *Fee* Pembiayaan	803.712.842	*Administrative income & financing fees*
Pendapatan Layanan *Internet Banking*	3.251.849	*Internet banking service revenue*
Pendapatan Transaksi ATM	18.665.247.418	*ATM transaction revenue*
Pendapatan Jasa Pembayaran	607.813.778	*Payment service income*
Pendapatan Komisi Asuransi	11.818.799.316	*Insurance commission income*
Pendapatan Kartu Kredit	329.154.616	*Credit card income*
Pendapatan Administrasi dan Komisi Selain Pembiayaan	7.175.681.551	*Administrative income and commissions other than financing*
Pendapatan *Fee* Partisipasi Pembiayaan Sindikasi	20.815.141	*Syndicated financing participation fee income*
Pendapatan Transaksi Mata Uang Asing - Bersih	37.106.671	*Foreign currency transaction revenue - net*
Pendapatan Transaksi *Remittance*	3.401.825	*Remittance transaction income*
Pendapatan Administrasi, *Fee*, dan Provisi Lainnya	136.151.427	*Administrative income, fees and other fees*
Total	**45.182.616.287**	***Total***

Fee Based Income	Sampai 21 Agust 2022 *Until August 21, 2022*	Sampai 31 Des 2021 *Until 31 Dec 2021*	*Fee Based Income*
Pendapatan Administrasi CASA	44.915.523.205	72.736.487.752	*CASA administrative income*
Pendapatan Administrasi dan Komisi Selain Pembiayaan	33.189.383.831	40.573.378.056	*Administrative income and commissions other than financing*
Pendapatan Restitusi Biaya	6.648.039.831	9.518.723.538	*Cost refund income*
Pendapatan Administrasi, *Fee*, dan Provisi Lainnya	3.846.693.231	3.600.560.335	*Administrative income, fees, and other provisions*
Total	**88.599.640.098**	**126.429.149.681**	***Total***

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari rasio likuiditas dan solvabilitas Bank. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bagi hasil. Selama Tahun 2022 BRK Syariah tidak menerbitkan Obligasi.

Ability to Pay Debt

The ability to pay debts is reflected in the Bank's liquidity and solvency ratios. With regard to bonds issued, the ability to pay debts is reflected in the smooth payment of profit sharing. During 2022 BRK Syariah will not issue bonds.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (FDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para Nasabah yang telah menyimpan dananya dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada para Nasabah sebagai sumber likuiditasnya.

Ability to Pay Short Term Debt (Bank Liquidity)

The liquidity ratio describes the Bank's ability to meet short-term obligations or obligations that are due. The liquidity ratio is measured through a comparison between the amount of financing provided to the amount of customer deposits (FDR) to determine the Bank's ability to repay obligations to Customers who have deposited their funds with financing that has been given to Customers as a source of liquidity.

Uraian | *Description*	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan *The increase/decrease*
Financing to Deposit Ratio (FDR)	72,67	73,72	(1,05)

Pada akhir tahun 2022, FDR Bank tercatat sebesar 72,67%, sedikit menurun jika dibandingkan dengan LDR tahun 2021 yang sebesar 73,72%. Dalam ketentuan batas bawah FDR sebesar 78% dan batas atas FDR sebesar 92%. Walaupun FDR Bank berada pada batas bawah ketentuan rasio FDR, dengan FDR sebesar 72,67% mencerminkan bahwa likuiditas BRK Syariah dalam kondisi sangat baik.

At the end of 2022, the Bank's FDR was recorded at 72.67%, slightly decreased compared to the LDR in 2021 which was 73.72%. In terms of the lower limit of FDR is 78% and the upper limit of FDR is 92%. Even though the Bank's FDR is at the lower limit of the FDR ratio, with an FDR of 72.67% it reflects that BRK Syariah liquidity is in very good condition.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). CAR merupakan salah satu indikator kesehatan dari modal Bank yang menunjukkan seberapa besar modal Bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha Bank.

Ability to Pay Long Term Debt (Bank Solvency)

The Solvency Ratio describes the Bank's ability to meet long-term obligations or capital capability (Capital Adequacy Ratio/CAR). CAR is an indicator of the health of the Bank's capital that shows how much the Bank's capital is sufficient to support its needs and as a basis for assessing the prospects for the continuation of the Bank's business.

Tabel Solvabilitas (dalam persen)
Table of Solvency (in percent)

Uraian | *Description*	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan *increase/decrease*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,00	21,07	0,93

Rasio kecukupan modal Bank naik sebesar 0,93% dari 21,07% di tahun 2021 menjadi sebesar 22,00% di tahun 2022. Berdasarkan rasio kecukupan modal tersebut Bank telah memenuhi kewajiban regulasi untuk menyediakan kecukupan modal minimum 20% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko 2 (hasil penilaian secara *self assessment* periode desember 2022 berada pada peringkat komposit 2 (pk 2)). Kewajiban penyediaan kecukupan modal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tanggal 2 Februari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Rasio Kecukupan Modal yang meningkat di tahun 2022 menunjukkan kemampuan Bank untuk mengatasi risiko khususnya risiko kredit, pasar, dan operasional.

The Bank's capital adequacy ratio increased by 0.93% from 21.07% in 2021 to 22.00% in 2022. Based on this capital adequacy ratio the Bank has fulfilled the regulatory obligation to provide a minimum capital adequacy of 20% of RWA for Banks with risk profile 2 (the results of the self-assessment for the December 2022 period are at a composite rating of 2 (pk 2)). The obligation to provide adequate capital is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016 dated 2 February 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks. An increased Capital Adequacy Ratio in 2022 shows the Bank's ability to overcome risks, especially credit, market and operational risks.

Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menggambarkan tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh Bank. Rasio rentabilitas untuk menggambarkan tingkat profitabilitas yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (RoA), *Return on Equity* (RoE) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan untuk menggambarkan tingkat efisiensi usaha diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Profitability Ratio

The profitability ratio describes the level of profitability and business efficiency achieved by the Bank. The profitability ratio to describe the level of profitability is measured through the ratio of Return on Assets (RoA), Return on Equity (RoE) and Net Interest Margin (NIM), while to describe the level of business efficiency is measured through the ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO).

Tabel Rasio Rentabilitas (dalam persen)
Profitability Ratio Table (in percent)

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan *increase/decrease*	*Description*
Return on Assets (RoA)	2,31	1,93	0,38	*Return on Assets (RoA)*
Return on Equity (RoE)	18,09	12,49	5,6	*Return on Equity (RoE)*
Net Imbalan (NI) / *Net Interest Margin (NIM)*	5,98	4,64	1,34	*Net Return (NI) / Net Interest Margin (NIM)*
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	70,63	77,23	(6,6)	*Operating Expenses to Operating Income (BOPO)*

Rasio RoA menunjukkan peningkatan sebesar 0,38%, dari 1,93% pada tahun 2021 menjadi 2,31% pada tahun 2022. RoE juga turut mengalami kenaikan sebesar 5,6%, dari 12,49% pada tahun 2021 menjadi 18,09% pada tahun 2022. Net Imbalan (NI)/*Net Interest Margin* (NIM) turut mengalami kenaikan sebesar 1,34%, dari 4,64% pada tahun 2021 menjadi 5,98% pada tahun 2022. Namun BOPO mengalami penurunan sebesar 6,6% dari 77,23% pada tahun 2021 menjadi 70,63% pada tahun berikutnya. Berdasarkan data-data tersebut, BRK Syariah telah beroperasi secara efisien dan memiliki profitabilitas yang baik dan terus meningkat.

The RoA ratio shows an increase of 0.38%, from 1.93% in 2021 to 2.31% in 2022. RoE also increased by 5.6%, from 12.49% in 2021 to 18.09 % in 2022. Net Return (NI) / Net Interest Margin (NIM) also increased by 1.34%, from 4.64% in 2021 to 5.98% in 2022. However BOPO decreased by 6.6% from 77.23% in 2021 to 70.63% in the following year. Based on these data, BRK Syariah has operated efficiently and has good profitability and continues to increase

Kolektibiltas Piutang

Salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja Bank adalah kemampuan Bank dalam kolektabilitas piutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur kolektibilitas piutangnya adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF merupakan indikasi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank, yang jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak buruk pada Bank.

Accounts Receivable Collectibility

One of the keys to assessing the quality of a bank's performance is the bank's ability to collect receivables. The ratio used to measure the collectibility of its receivables is the Non Performing Financing (NPF) ratio. The NPF ratio is an indication of a problem in a bank, if it does not get a solution immediately it will have a dangerous impact on the bank.

Uraian *Description*	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan *increase/decrease*
NPF/NPL (*Gross*)	2,57	2,82	(0,25)
NPF/NPL (*Netto*)	0,33	0,88	(0,55)

NPF *Gross* membaik sebesar 0,25% dari 2,82% pada tahun 2021 menjadi 2,57% di tahun 2022, NPF *Netto* juga mengalami perbaikan sebesar 0,55% dari 0,88% pada tahun 2021 menjadi 0,33% pada tahun 2022.

Gross NPF improved by 0.25% from 2.82% in 2021 to 2.57% in 2022, Net NPF also improved by 0.55% from 0.88% in 2021 to 0.33% in 2022.

Analisis Kualitas Aset Produktif

Kualitas aset produktif yang dimiliki Bank terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif dari tahun ke tahun. Besaran rasio ini pada tahun 2019 adalah 2,41%, menurun menjadi 1,96% pada tahun 2020, kembali menurun menjadi 1,77% pada tahun 2021, dan terus menurun menjadi 1,71% pada tahun 2022.

Productive Asset Quality Analysis

The quality of the Bank's earning assets continues to improve. This can be seen from the decreasing ratio of non-performing earning assets to total earning assets from year to year. The amount of this ratio in 2019 was 2.41%, decreased to 1.96% in 2020, decreased again to 1.77% in 2021, and continued to decrease to 1.71% in 2022.

Tabel Analisis Kualitas Aset Produktif | *Productive Asset Quality Analysis Table*

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan *increase/decrease*	*Description*
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,71	1,77	(0,06)	*Non-performing Earning Assets to total earning assets*

TINGKAT KESEHATAN BANK
Bank Health Level

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ SEOJK.03/2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, BRK Syariah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*).
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*Earnings*);
4. Permodalan (*Capital*).

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap indikator yang ditentukan sebagaimana dalam POJK. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank terbagi dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

In accordance the Regulation of the Financial Services Authority Number 4/POJK.03/2016 concerning Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks and Letter of the Financial Services Authority No. 14/ SEOJK.03/2017 concerning Rating of Commercial Bank Soundness Level, BRK Syariah conducts an assessment of Bank Soundness using a Risk Based Bank Rating approach.
Assessment of Bank Soundness Level includes an assessment of the following factors:

1. *Risk Profile;*
2. *Good Corporate Governance (GCG);*
3. *Rentability (Earnings);*
4. *Capital (Capital).*

The Composite Rating of Bank Soundness is determined based on a comprehensive and structured analysis of the rating for each indicator specified in the POJK. Composite Rating of Bank Soundness Level is divided into 5 (five) levels, namely:

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank
Bank Soundness Level Composite Rating

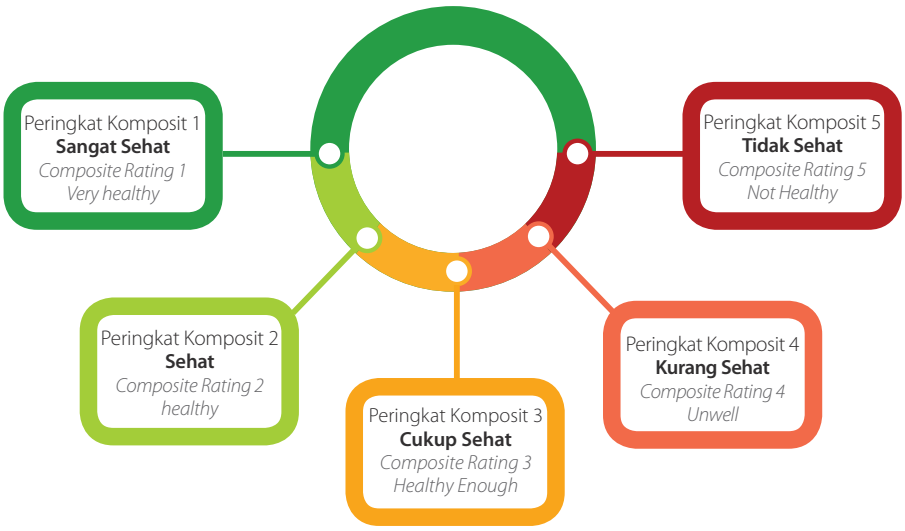

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2022 berdasarkan hasil *self assessment* Bank berada pada Peringkat Komposit 2 (PK2). Hal ini mencerminkan kondisi Kesehatan Bank secara umum adalah "Sehat" sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian. Berikut hasil penilaian Tingkat Kesehatan BRK Syariah Periode Desember 2022 dan Desember 2021.

The results of the Bank's Soundness Level assessment for the December 2022 period based on the results of the Bank's self-assessment are at Composite Rating 2 (PK2). This reflects that the Bank's general health condition is "Healthy" so that it is considered capable of facing significant negative influences from changes in business conditions and other external factors as reflected in the rating of the rating factors. The following are the results of the Sharia BRK Soundness Rating for the December 2022 and December 2021 periods.

No	Faktor	Desember 2022 (Bank)	Desember 2021 (OJK)	*Factor*
1	Profil Risiko	2	3	*Risk Profile*
2	Penerapan Tata Kelola	2	3	*Implementation of Governance*
3	Rentabilitas	2	2	*Profitability*
4	Permodalan	2	2	*Capital*
5	Peringkat Komposit	2	3	*Composite Rating*

PENCAPAIAN TARGET 2022 DAN TARGET 2023
Achievement of 2022 Targets and 2023 Targets

Pencapaian Target 2022

BRK Syariah berhasil membukukan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2022 baik dalam aspek keuangan, pemasaran, dan pengembangan sumber daya insani. Bank mengidentifikasi ketiga faktor tersebut sebagai indikator penting dalam pengukuran kinerja Bank sebagai perbandingan antara kinerja tahun ini dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun sebelumnya.

2022 Target achievement

BRK Syariah managed to record good performance throughout 2022 in terms of finance, marketing and human resource development. The Bank identifies these three factors as important indicators in measuring the Bank's performance as a comparison between this year's performance and the Bank's previously prepared Business Plan.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Bank berhasil membukukan kinerja keuangan yang baik selama tahun 2022 meskipun berada dalam ketidakpastian ekonomi global. Bank berhasil mencapai target keuangan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Comparison of Financial Targets and Realization

Bank managed to record good financial performance in 2022 despite the global economic uncertainty. The Bank succeeded in achieving its financial targets as presented in the table below.

Uraian	Realisasi 2022 *Realization 2022*	Target 2022 *Target 2022*	Pencapaian *Achievement*	*Explanation*
1	2	3	4 = 2/3	1
Posisi Keuangan				***Financial Position***
Total Aset	31.382.356	30.500.000	102,89	*Total Assets*
Dana Pihak Ketiga	26.973.705	26.515.000	101,73	*Third-party funds*
Pembiayaan	19.600.897	19.546.000	100,28	*Financing*
Laba Rugi				***Profit and loss***
Pendapatan Pengelolaan Dana selaku Mudharib	2.109.968	2.094.587	100,73	*Fund Management Income as Mudharib*
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(632.496)	(585.016)	108,12	*Third Party Rights on Profit Sharing*
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.477.472	1.509.571	97,87	*Profit Sharing Rights Owned by the Bank*
Pendapatan Usaha Lainnya	171.255	250.838	68,27	*Other Business Income*
Beban Usaha	(1.102.692)	(1.248.937)	88,29	*Operating expenses*
Laba Usaha	546.034	511.472	106,76	*Operating profit*
Pendapatan/Beban Non Usaha – *Netto*	(42.477)	(56.472)	75,22	*Non-Operating Income/Expenses – Net*
Laba sebelum Pajak	503.557	455.000	110,67	*Profit before tax*
Laba Bersih	350.899	354.900	98,87	*Net profit*

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Bank berhasil merealisasikan hampir semua target pemasaran yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Comparison of Marketing Targets and Realization

The Bank succeeded in realizing almost all of the marketing targets described in the table below.

No.	Produk *Product*	Deskripsi *Description*	Realisasi *Realization*
1	*Buyer Financing*	Merupakan pemberian fasilitas kepada *Buyer* (Nasabah) melalui mekanisme penjaminan pembayaran kepada *supplier*, dimana fasilitas penjaminan diberikan menggunakan Akad *Kafalah bil Ujrah*. Pemberian fasilitas dilakukan dalam rangka memberikan solusi kepada Nasabah untuk mengatasi ketidaksesuaian (*mistmatch*) arus kas *Buyer* (Nasabah) dengan kewajibannya kepada *Supplier*. Dengan adanya percepatan dan/atau ketepatan pembayaran oleh *Buyer* kepada *Supplier*, dapat mengembangkan dan meningkatkan hubungan bisnis sehingga tercipta *value chain* antara *Supplier* dan *Buyer* (Nasabah). *Is the provision of facilities to the Buyer (Customer) through a payment guarantee mechanism to suppliers, where the guarantee facility is provided using the Kafalah bil Ujrah Contract. The provision of facilities is carried out in order to provide solutions to the Customer to overcome the mismatch (mismatch) of the Buyer's (Customer's) cash flow with his obligations to the Supplier. With the acceleration and/or accuracy of payments by the Buyer to the Supplier, it can develop and improve business relationships so as to create a value chain between the Supplier and the Buyer (Customer)..*	Selesai - sesuai SK BPP *Trade Finance* No. 25/SK/2022 tanggal 22 Agustus 2022 *Done - according to SK BPP Trade Finance No. 25/SK/2022 dated 22 August 2022*
2	*Supplier Financing*	Merupakan pemberian fasilitas kepada *Supplier* (Nasabah) dengan akad *wakalah bil ujrah* dimana Bank menerima kuasa dari *Supplier* untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen perdagangan dan penagihan piutang kepada Buyer. Bank dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) dimana akad tersebut tidak boleh terkait dengan *wakalah bil ujrah*. Pemberian fasilitas ini dilakukan guna memberikan solusi dalam mengatasi kebutuhan percepatan arus kas masuk Nasabah khususnya pembayaran dari *Buyer*. Dengan adanya percepatan pembayaran dari Buyer kepada *Supplier*, dapat membantu *Supplier* untuk memenuhi kebutuhan modal/dana untuk perputaran bisnisnya dengan tetap dapat memberikan keleluasaan waktu pembayaran kepada *Buyer*. *Is the provision of facilities to Suppliers (Customers) with a wakalah bil ujrah contract where the Bank receives power of attorney from the Supplier to manage trade documents and collect receivables from the Buyer. Banks can provide bailout funds (Qardh) where the contract may not be related to wakalah bil ujrah. The provision of this facility is carried out in order to provide solutions in overcoming the needs of accelerating customer cash inflows, especially payments from Buyers. By accelerating payments from Buyers to Suppliers, it can help Suppliers to meet capital/funding needs for their business turnover while still being able to provide flexibility in terms of payment to Buyers..*	Selesai - sesuai SK BPP *Trade Finance* No. 25/SK/2022 tanggal 22 Agustus 2022 *Done - according to SK BPP Trade Finance No. 25/SK/2022 dated 22 August 2022*
3	Negosiasi Wesel Ekspor	Dengan menggunakan *Akad Wakalah Bil Ujrah*, dimana Bank menerima kuasa dari *Supplier* (Nasabah) untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen perdagangan dengan underlying L/C, SKBDN (*Documentary Credit*), dan penagihan piutang. Atas penagihan piutang tersebut Bank mendapatkan imbalan berupa ujrah/*fee*. Dalam mempercepat arus kas, Supplier (Nasabah) juga dapat mengajukan pemberian pembiayaan/dana talangan (*qardh*) untuk membantu likuiditasnya. Dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat kaitan (ta'alluq) antara *Akad Wakalah Bil Ujrah* dan *Akad Qardh*, dimana penggunaan *Akad Wakalah Bil Ujrah* dilakukan terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh *Akad Qardh*. Bagi Bank, pemberian fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor merupakan salah satu cara dalam mengoptimalisasi Nasabah eksisting khususnya Nasabah-nasabah yang memiliki potensi transaksi bisnis internasional maupun untuk mengakuisisi Nasabah baru. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Bank dalam mengakuisisi Nasabah serta meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*) dan juga meningkatkan pertumbuhan transaksi bisnis internasional Bank. *By using the Wakalah Bil Ujrah Agreement, where the Bank receives power of attorney from the Supplier (Customer) to manage trade documents with underlying L/C, SKBDN (Documentary Credit), and collection of receivables. For the collection of these receivables, the Bank receives compensation in the form of ujrah/fees. In accelerating cash flow, Supplier (Customer) can also apply for the provision of financing/bailout funds (qardh) to help with liquidity. In its implementation, there should be no connection (ta'alluq) between the Wakalah Bil Ujrah Agreement and the Qardh Agreement, where the use of the Wakalah Bil Ujrah Akad is carried out first, followed by the Qardh Akad. For Banks, providing Export Bills Negotiation facilities is one of the ways to optimize existing customers, especially customers who have the potential for international business transactions as well as to acquire new customers. This can increase the competitiveness of the Bank in acquiring customers and increase the source of income from fees (ujrah) and also increase the growth of the Bank's international business transactions.*	Selesai - sesuai SK BPP *Trade Finance* No. 25/SK/2022 tanggal 22 Agustus 2022 *Done - according to SK BPP Trade Finance No. 25/SK/2022 dated 22 August 2022*

No.	Produk *Product*	Deskripsi *Description*	Realisasi *Realization*
4	*Quick Response Indonesia Standard* (*QRIS*)	Fasilitas layanan yang diberikan kepada Nasabah Bank untuk melakukan transaksi pembayaran *QRIS* melalui aplikasi BRKS mobile (*as issuer*) dan layanan penerimaan transaksi pembayaran *QRIS* bagi *Merchant* BRKS *QRIS* (*as acquirer*). *QR Code Indonesia Standard (QRIS)* ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi Nasabah Bank dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terhadap jasa perbankan sehingga dapat memberikan value added bagi Bank dalam hal layanan digital, peningkatan *brand image*, dan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan Bank dari *fee based income*. *Service facilities provided to Bank Customers to make QRIS payment transactions through the BRKS mobile application (as issuer) and QRIS payment transaction acceptance services for BRKS QRIS Merchants (as acquirer). The Indonesian Standard QR Code (QRIS) is expected to be an option for Bank Customers and the general public to meet their needs for banking services so as to provide added value to the Bank in terms of digital services, increase brand image, and increase Third Party Funds (DPK) which in turn able to increase the Bank's income from fee-based income.*	Telah mendapatkan izin dari BI melalui surat No. 24/474/DKSP/Srt/B tanggal 12 Desember 2022 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan Standar Nasional QR *Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) - *Merchant Presented Mode* (*QRIS* MPM) yang bekerjasama dengan PT Rintis Sejahtera. *Has obtained permission from BI through letter No. 24/474/DKSP/Srt/B dated 12 December 2022 regarding Approval for the Implementation of Payment Transaction Processing Activities Using the National Standard QR Code Payment (Quick Response Code Indonesian Standard) - Merchant Presented Mode (QRIS MPM) in collaboration with PT Rintis Sejahtera.*
	Aktivitas *Activity*		
1	*Debit as Issuer*	Layanan kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank dalam rangka mempermudah Nasabah melakukan transaksi pembayaran melalui mesin EDC BRK Syariah atau mesin EDC Bank lain secara non tunai. *Electronic payment card services issued by the Bank in order to make it easier for customers to make payment transactions through BRK Syariah EDC machines or other Bank EDC machines in a non-cash manner.W∑*	1. Telah mendapatkan rekomendasi dari OJK melalui Surat No. S-361/KO.053/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Layanan Kartu Debit as Issuer. *1. Has received a recommendation from OJK through Letter No. S-361/KO.053/2022 dated 30 August 2022 regarding Request for Recommendation for Debit Card Services as Issuer.* 2. Menunggu hasil analisa perbaikan dan kelengkapan dokumen dari Bank Indonesia. *2. Waiting for results of repair analysis and completeness of documents from Bank Indonesia.*
2	E-FOS (*Electronic Financing Origination System*)	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengotomasi proses bisnis/pembiayaan berbasis sistem digitalisasi agar tercipta percepatan proses serta efisiensi pengajuan pembiayaan hingga pencairan. *It is an application used to automate business/financing processes based on a digitization system in order to create process acceleration and efficiency in applying for financing to disbursement.*	Selesai - telah diimplementasikan di seluruh unit kantor. *Done - has been implemented in all office units.*

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDI

Rencana pemenuhan SDI disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan bisnis Bank. Sesuai dengan rencana pengembangan organisasi untuk mendukung perkembangan bisnis, maka realisasi pengembangan SDI sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Comparison of Targets and Realization of HR Development

HR fulfillment plans are adjusted to the growth and business needs of the Bank. In accordance with the organizational development plan to support business development, the realization of HR development until the end of 2022 is as follows:

Uraian	Realisasi *Realization* 2022	Target 2022	Pencapaian *Achievement*	*Description*
1	2	3	4 = 2-3	
Jumlah peserta pelatihan (dalam orang)	5.748	3.962	145,08%	*Number of trainees (in people)*
Biaya pelatihan (jutaan Rupiah)	9.339.951.182	26.708.381.000	34,97%	*Training costs (millions of Rupiah)*

Target ke Depan

Manajemen BRK Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2022-2024 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2022, baik makro maupun mikro.

Future Targets

BRK Syariah Management has prepared a Bank Business Plan for 2022-2024 taking into account current economic conditions and economic projections in 2022, both macro and micro.

Asumsi	2023	*Assumtion*
ASUMSI MAKRO		***MACRO ASSUMPTION***
Pertumbuhan PDB (%)	5,50%	*Growth (%)*
Inflasi (%)	5,00%	*Inflation (%)*
Kurs IDR/USD	15.000	*Rates IDR/USD*
BI 7 *Days Rate*	5,00%	*BI 7 days rate*
ASUMSI MIKRO		***Micro assumption***
Pertumbuhan pembiayaan (%)	7,14%	*Financing growth(%)*
Pertumbuhan dana pihak ketiga (%)	5,10%	*Growth of third party funds(%)*
Tingkat imbalan simpanan-tabungan (%)	0,77%	*Interest rate on savings(%)*
Tingkat imbalan pembiayaan ritel komersial (%)	5,00%	*Commercial retail financing interest rate(%)*

Berdasarkan asumsi makro dan asumsi mikro di atas serta mempertimbangkan strategi bisnis ke depan, Bank menyusun target keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

Based on the above macro and micro assumptions and considering the future business strategy, the Bank has prepared the following financial targets for 2023:

Tabel Target 2023
2023 Target Table

Uraian	Target 2023	*Description*
1	2	*1*
Posisi Keuangan		***Financial Position***
Total Aset	33.508.718	*Total Assets*
Dana Pihak Ketiga	28.350.000	*Third-party funds*

Uraian	Target 2023	*Description*
1	2	*1*
Pembiayaan	21.000.000	*Financing*
Laba Rugi		***Profit and loss***
Pendapatan Pengelolaan Dana selaku Mudharib	2.381.934	*Fund Management Income as Mudharib*
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(450.566)	*Third Party Rights on Profit Sharing*
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.931.368	*Profit Sharing Rights Owned by the Bank*
Pendapatan Usaha Lainnya	255.654	*Other Business Income*
Beban Usaha	(1.645.887)	*Operating expenses*
Laba Usaha	541.135	*Operating profit*
Pendapatan/Beban Non Usaha – Netto	(20.885)	*Non-Operating Income/Expenses – Net*
Laba Sebelum Pajak	520.250	*Profit before tax*
Laba Bersih	405.795	*Net profit*

Proyeksi Pemasaran Tahun 2023

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru Bank tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

2023 Marketing Projection

The plan for issuing new products and/or implementing the Bank's activities in 2023 is presented as follows.

No.	Produk | *Product*	Deskripsi	*Description*
1	Implementasi SIPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah) *Implementation of SIPA (Certificate of Interbank Fund Management Based on Sharia Principles).*	Merupakan instrumen baru pada Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan menggunakan akad *wakalah bi al istitsmar* sebagai salah satu instrumen pemenuhan rasio *regulatory*, likuiditas, dan optimalisasi.	*It is a new instrument in the Sharia Principle-Based Interbank Money Market (PUAS) using the wakalah bi al istitsmar contract as one of the instruments for fulfilling regulatory, liquidity and optimization ratios.*
2	Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). *Local Government Credit Card (KKPD)*	Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Hal ini dilakukan dalam rangka implementasi Permendagri No. 79 Tahun 2022 tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah guna menjaga penempatan Kas Daerah tetap berada di BRK Syariah sekaligus mempertahankan hubungan baik antara BRK Syariah dengan Pemerintah Daerah.	*Is a credit card that can be used to make payments for expenditures charged to the APBD. This is done in the context of implementing Permendagri No. 79 of 2022 concerning Regional Government Credit Cards in order to maintain the placement of Regional Cash in BRK Syariah while at the same time maintaining good relations between BRK Syariah and the Regional Government.*
3	*Debit Acquirer* *Acquirer Debt*	Pengembangan transaksi debit pada mesin EDC BRK Syariah sehingga *merchant* dapat menerima transaksi Kartu Debit dari seluruh PJP (Penyedia Jasa Pembayaran).	*Development of debit transactions on BRK Syariah EDC machines so that merchants can accept Debit Card transactions from all PJP (Payment Service Providers).*
4	*Virtual Account* *Virtual Accounts*	Merupakan layanan berbasis *web* bagi Nasabah Korporasi yang telah memiliki rekening di BRK Syariah untuk membuat rekening virtual/akun yang bersifat unik. Rekening *virtual* yang telah dibentuk dapat menerima transaksi setor dari seluruh PJP.	*It is a web-based service for Corporate Customers who already have an account at BRK Syariah to create a unique virtual account/account. The virtual account that has been formed can accept deposit transactions from all PJP.*

No.	Produk | *Product*	Deskripsi	*Description*
5	Layanan *QRIS* *QRIS service*	Dalam rangka menjawab kebutuhan Nasabah akan transaksi pembayaran *QRIS* dan mendukung program pemerintah dalam hal transaksi non tunai, BRK Syariah mengembangkan layanan transaksi penerimaan pembayaran *QRIS* bagi *merchant* dan layanan transaksi pembayaran *QRIS* yang merupakan fitur pada aplikasi BRKS *Mobile*. Metode transaksi yang digunakan adalah metode MPM (*Merchant Presented Mode*) dimana Pelanggan *merchant* memindai *QR Code* yang ditampilkan pada aplikasi *Mobile Banking* untuk menyelesaikan transaksi pembayarannya.	*In order to answer the needs of customers for QRIS payment transactions and support government programs in terms of non-cash transactions, BRK Syariah has developed a QRIS payment acceptance transaction service for merchants and a QRIS payment transaction service which is a feature of the BRKS Mobile application. The transaction method used is the MPM (Merchant Presented Mode) method where merchant customers scan the QR Code displayed on the Mobile Banking application to complete the payment transaction.*
6	*Debit Issuer* *Debit Issuer*	Merupakan penambahan fitur pada seluruh Kartu ATM yang dapat berfungsi sebagai Kartu Debit sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai pada beberapa *merchant*.	*This is an additional feature on all ATM Cards that can function as Debit Cards so that they can be used to make non-cash payment transactions at several merchants.*
7	*Layanan Cross Border* ATM *Service Al-Rajhi* *Al-Rajhi ATM Service Cross Border Service*	Merupakan layanan yang diberikan bagi Nasabah pemegang Kartu ATM BRK Syariah yang sedang berada di wilayah Arab Saudi untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai maupun informasi saldo rekening dalam mata uang Riyal (SAR) pada ATM *Al-Rajhi* Bank melalui jaringan ATM Bersama.	*It is a service provided to BRK Syariah ATM Card holder customers who are in Saudi Arabia to make cash withdrawal transactions and account balance information in Riyal currency (SAR) at Al-Rajhi Bank ATMs through the ATM Bersama network.*
8	*Customer on Boarding* *Customer on Boarding*	Merupakan bentuk layanan yang disediakan kepada Nasabah atau calon Nasabah yang dapat diakses melalui Aplikasi *Mobile Banking* BRK Syariah dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, kecepatan, dan kepuasan, serta mempermudah Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan khususnya pembukaan rekening tabungan perorangan.	*Is a form of service provided to customers or prospective customers that can be accessed through the BRK Syariah Mobile Banking Application in order to provide convenience, security, speed and satisfaction, as well as make it easier for customers to carry out banking transactions, especially opening individual savings accounts.*

Proyeksi Pengembangan SDI 2023

BRK Syariah menyadari pentingnya peran SDI yang unggul dan kompeten dalam memberikan layanan yang prima dan memuaskan bagi konsumen dan seluruh stakeholder. Oleh karena itu Bank menyusun rencana pelatihan dan pengembangan SDI sebagai berikut:

HR Development Projection 2023

BRK Syariah realizes the importance of the role of superior and competent HR in providing excellent and satisfying services for consumers and all stakeholders. Therefore the Bank prepares HR training and development plans as follows:

Uraian	Proyeksi 2023	*Description*
1	2	
Jumlah peserta pelatihan (orang)	8.033	*Number of trainees (in person)*
Biaya pelatihan (jutaan Rupiah)	20.000	*Training costs (millions of Rupiah)*

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
Policies, Announcement and Payment of Dividend

Kebijakan Dividen

BRK Syariah menyadari kepentingan setiap *stakeholder*-nya. Dalam hal dividen, Bank menerapkan Kebijakan Pembagian Dividen sebagai berikut:

1. Membayarkan dividen tunai minimum 50% dari laba bersih setiap tahun, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi.
2. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta faktor- faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Dividend Policy

BRK Syariah realizes the interests of each of its stakeholders. In terms of dividends, the Bank implements the Dividend Distribution Policy as follows:

1. *Pay cash dividends of at least 50% of net profit each year, the amount of which will be decided at the GMS based on the recommendation of the Board of Directors.*
2. *The decision to pay dividends depends on profit, financial condition and liquidity, compliance with laws and regulations, as well as other factors deemed relevant by the Bank's Board of Directors after obtaining approval from the GMS.*

Tabel Komposisi Pembagian Laba
Profit Sharing Composition Table

Pembagian Laba	Tahun Buku 2021 *Fiscal Year 2021*	Tahun Buku 2020 *Fiscal Year 2020*	Tahun Buku 2019 *Fiscal Year 2019*	*Profit sharing*
Dividen Tunai	60%	60%	60%	*Cash Dividend*
Dividen Saham	0%	0%	0%	*Stock Dividend*
Cadangan umum	40%	40%	40%	*General reserve*
Jumlah Laba yang dibagikan	100%	100%	100%	*Total profit distributed*

Jumlah dividen yang telah ditetapkan dan telah dibagi selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The distribution of dividends for the last 3 (three) years has been determined as follows:

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Table of Announcement and Dividend Payment

Pembagian Laba	Tahun Buku 2021 *Fiscal Year 2021*	Tahun Buku 2020 *Fiscal Year 2020*	Tahun Buku 2019 *Fiscal Year 2019*	*Profit sharing*
Laba (Rugi) Bersih	381.013.438.046	463.969.639.304	309.023.245.178	*Net Profit (Loss)*
Laba (Rugi) per Lembar Saham	34.581	42.561	28.743	*Profit (Loss) per Share*
Jumlah Dividen Tunai	228.608.062.827	278.381.783.582	185.413.947.107	*Cash Dividend Amount*
Jumlah Dividen Saham	0	0	0	*Share Dividend Amount*
Cadangan Umum	152.405.375.218	185.587.855.722	123.609.298.071	*General Reserve*
Dividend Payout Ratio	60%	60%	60%	*Dividend Payout Ratio*
Tanggal Pembayaran	26 April 2022	05 Juli 2021	17 Juli 2020	*Payment date*
Tanggal Pengumuman	23 April 2022	18 Juni 2021	08 Juli 2020	*Announcement Date*

ASPEK PERPAJAKAN
Taxation Aspect

Publikasi Pembayaran Pajak

Bank dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tax Payment Publication

The Bank in its operational activities has carried out Good Corporate Governance which is carried out in a transparent and accountable manner, especially in managing tax rights and obligations which are carried out in accordance with applicable regulations.

Pembayaran Pajak

Kontribusi Bank selama tahun 2022 kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong/Pemungut pajak. Sebagai Wajib Pajak, kontribusi terbesar BRK Syariah adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Sedangkan sebagai Pemotong pajak, Bank berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak.

Payment of taxes

The Bank's contribution in 2022 to the state is realized through fulfilling the company's obligations as a Taxpayer and as a Tax Withholder/Collector. As a taxpayer, BRK Syariah's biggest contribution is fulfilling corporate income tax obligations. Meanwhile, as a tax deductor, the Bank plays an active role in deducting each taxable object.

Tabel Pembayaran Pajak (dalam jutaan Rupiah)
Tax Payment Table (in millions of Rupiah)

Uraian Pajak	2022	2021	*Tax Description*
Utang pajak penghasilan			*Income tax debt*
Pasal 29	33.732	13.566	*Article 29*
Utang pajak lainnya			*Other tax debts*
Pasal 4 (2)	3.903	5.011	*Article 4 (2)*
Pasal 21	9.548	9.964	*Article 21*
Pasal 22	-	-	*Article 22*
Pasal 23	393	325	*Article 23*
Pasal 25		2.851	*Article 25*
Pasal 26	-	-	*Article 26*
PPN dan PPh Lainnya	277	319	*VAT and Other Income Tax*
Jumlah	**47.853**	**32.036**	***Amount***

STRUKTUR PERMODALAN
Capital Structure

Struktur Permodalan

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

BRK Syariah berupaya meningkatkan nilai Bank di antaranya melalui penetapan struktur modal yang optimal. Hal tersebut juga menjadi bagian dalam pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank Menyusun Rencana Permodalan berdasarkan perhitungan dan telaah atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini.

Rencana Permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank senantiasa menghubungkan antara sasaran keuangan dan kecukupan modal dengan risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula, dengan ekspansi bisnis yang didasarkan pada kecukupan permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Dalam kebijakan permodalan Bank selalu disinkronkan dengan rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi dalam memberikan profit yang optimal.

Bank memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*).

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam memperhitungkan struktur modal, BRK Syariah mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di antaranya sebagai berikut:

- POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK 11/POJK. 03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK. 03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Capital Structure

Management Policy on Capital Structure

BRK Syariah seeks to increase the value of the Bank, including by establishing an optimal capital structure. This is also part of fulfilling the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regarding the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM). Adequate capital adequacy can increase stakeholder trust. The Bank prepares a Capital Plan based on calculations and reviews of the required capital adequacy needs and combines it with a review of the latest economic developments.

The Capital Plan is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and approved by the Board of Commissioners. The Bank always links financial targets and capital adequacy with risks through the capital planning process. Likewise, with business expansion based on capital adequacy and Bank liquidity requirements.

The Bank's capital policy is always synchronized with long-term strategic plans and allocates capital efficiently to business segments that have the potential to provide optimal profit.

The Bank ensures that it has sufficient capital to be able to meet credit risk, market risk and operational risk. The Bank refers to Bank Indonesia regulations in calculating capital adequacy for credit risk, market risk and operational risk. For credit risk, the Bank uses the Basel II Standard approach (Standardized Approach).

Basis for Selection of Management Policy on Capital Structure

In calculating the capital structure, BRK Syariah refers to the provisions of the Financial Services Authority (OJK), including the following:

- *POJK No. 8/POJK.03/2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
- *POJK No. 27 of 2022 dated 28 December 2022 concerning the Second Amendment to POJK 11/POJK. 03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks.*
- *POJK No. 34/POJK.03/2016 dated 22 September 2016 concerning Amendments to POJK Number 11/POJK. 03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks.*

- SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*.
- SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- *SEOJK No. 26/SEOJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirement according to Risk Profile and Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets.*
- *SE OJK Number 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*

Rincian Struktur Modal

Modal Inti

Modal inti terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan umum, dan saldo laba setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan pajak tangguhan. Modal inti BRK Syariah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.168.778 juta, naik sebesar 5,80% dari tahun 2021 yang sebesar Rp2.995.038 juta.

Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari instrumen modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang telah memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal dan tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum Penghapusan Aset Produktif (PPAP) (maksimum 1,25% dari ATMR). Modal pelengkap terdiri dari cadangan umum PPA. Pada tahun 2022, modal pelengkap Bank adalah sebesar Rp153.109 juta sedangkan pada 2021 sebesar Rp152.190 juta.

Capital Structure Details

Core Capital

Core capital consists of paid-in capital, additional paid-in capital, general reserves, and retained earnings after deducting the difference between Allowance for Asset Losses (PPA) and deferred taxes. BRK Syariah's core capital in 2022 is IDR 3,168,778 million, an increase of 5.80% from 2021 which amounted to IDR 2,995,038 million.

Complementary Capital

Supplementary capital consists of capital instruments in the form of shares or other forms that have met the requirements, agio or disagio originating from the issuance of capital instruments and classified as supplementary capital, general reserves for Earning Assets (PPAP) (maximum 1.25% of RWA). Supplementary capital consists of PPA general reserves. In 2022, the Bank's supplementary capital is IDR 153,109 million while in 2021 it is IDR 152,190 million.

Tabel Rincian Struktur Permodalan
Table of Details of Capital Structure

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan *The increase decrease*		*Description*
			Rp	%	
Modal Inti	3.168.778	2.995.038	173.740	5,80	*Capital*
Modal Pelengkap	153.109	152.190	919	0,60	*- Complementary (Tier 2)*
ATMR Kredit	12.248.745	12.175.240	73.505	0,60	*RWA Credit*
ATMR Kredit dan Operasional	15.058.709	14.906.485	152.224	1,02	*RWA Credit and Operations*
ATMR Kredit, Operasional dan Pasar	15.101.432	14.937.265	164.167	1,10	*RWA Credit, Operations and Markets*
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit (%)	27,12%	25,85%			*Capital Adequacy Ratio for Credit Risk (%)*
Rasio Kecukupan Modal Untuk Risiko Kredit dan Operasional (%)	22,06%	21,11%			*Capital Adequacy Ratio for Credit and Operational Risk (%)*
Rasio kecukupan modal untuk Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional (%)	22,00%	21,07%			*Capital adequacy ratio for Credit, Market and Operational Risk (%)*

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks dan kondisi eksternal dengan ketidakpastian sehingga terjadi peningkatan *eksposure* risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank.

Along with increasingly complex bank business developments and external conditions with uncertainty resulting in increased risk exposure, it is necessary to implement effective risk management which aims to enable companies to maximize added value for shareholders through comprehensive capital management, ensuring profitability and sustainable business growth. sustainable and anticipating potential losses from bank operational activities.

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di BRK Syariah dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Bank untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Risiko adalah bagian dari bisnis Bank, sehingga dalam penerapan manajemen risiko, Bank menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional.

The implementation of risk management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, supervise and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been established in BRK Syariah with the aim of providing a consistent risk management framework for existing risks in business processes. Bank to optimize business growth in achieving profits, maintaining Bank capital, supporting decision-making processes, increasing corporate value and protecting the Bank's reputation. Risk is part of the Bank's business, so that in implementing risk management, the Bank uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik. Pengelolaan risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map Basel I, Basel II dan Basel III* serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, BRK Syariah senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Risk management through capital is adjusted to the long-term strategic and business plans, as well as efficient capital allocation policies according to business segments that have an optimal risk-return profile which includes 8 (eight) types of risk, namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk. Strive for risk management to be in line with the Basel I, Basel II and Basel III road maps as well as the provisions of the Financial Services Authority. Until now, BRK Syariah always follows and adjusts to the latest developments and regulations issued by banking authorities, including the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Pengungkapan Kuantitatif Eksposur Risiko

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Disclosure of Quantitative Risk Exposure

In accordance with the complexity of its business, the Bank manages 8 (eight) types of risk, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Bank seperti perkreditan (penyediaan dana), akibat kegagalan *settlement* dan *counterparty credit risk*. Selain kredit, Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrument keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana BRK Syariah tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada BRK Syariah. secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan BRK Syariah untuk mengidentifkasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kreditserta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting.

BRK Syariah saat ini telah memiliki *portofolio guideline* dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* berdasarkan beberapa parameter seperti penyaluran kredit berdasarkan segmen, komposisi portofolio serta pencadangan potensi kerugian portofolio kredit. Adapun terkait dengan limit kewenangan memutus kredit saat ini BRK Syariah telah menerapkan mekanisme keputusan kredit secara berjenjang sesuai dengan tingkat risiko yang tercermin dari *plafond* pengajuan fasilitas kredit. Dalam analisa kredit, BRK Syariah telah menerapkan proses identifikasi atas potensi risiko yang melekat. Proses identifikasi tersebut menjadi lebih optimal dengan dibentuknya Divisi *Financial Review* yang khusus melaksanakan *review* dan analisa lanjutan atas proses pengajuan fasilitas kredit.

Credit Risk

Credit risk is the risk that occurs as a result of the failure of the counterparty to fulfill its obligations. Credit risk can originate from various Bank functional activities such as credit (provision of funds), due to settlement failures and counterparty credit risk. In addition to credit, the Bank faces credit risk from various financial instruments such as securities, acceptances, inter-bank transactions, trade financing transactions, exchange rate transactions and derivatives as well as commitments and contingencies. The main objective of risk management for credit risk is to ensure that BRK Syariah funding activities are not exposed to credit risk which can cause losses to BRK Syariah. In general, credit risk exposure is one of the main risk exposures so that the ability of BRK Syariah to identify, measure, monitor and control credit risk and provide sufficient capital for this risk is very important.

BRK Syariah currently has a guideline portfolio in determining risk appetite and risk tolerance based on several parameters such as segment-based loan distribution, portfolio composition and provision for potential loan portfolio losses. As for the limit of authority to decide on credit, currently BRK Syariah has implemented a credit decision mechanism in stages according to the level of risk that is reflected in the ceiling for applying for credit facilities. In credit analysis, BRK Syariah has implemented an identification process for potential inherent risks. The identification process was made more optimal with the establishment of the Financial Review Division, which specifically carries out reviews and further analysis of the process of applying for credit facilities.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan BRK Syariah.

Bank telah memiliki kebijakan terkait penetapan *limit dealer* yang diajukan oleh Divisi *Treasury* & Internasional untuk dilakukan evaluasi oleh Divisi Manajemen Risiko. Beberapa strategi pengelolaan risiko pasar yang dilakukan BRK Syariah adalah mencakup sistem dan prosedur dengan menggunakan teknik *Value at Risk* (VaR) dan *stress testing*.

Market Risk

Market risk is the risk on balance sheet positions and administrative accounts including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices. The main objective of risk management for market risk is to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on BRK Syariah assets and capital.

The Bank already has a policy regarding dealer limit setting proposed by the Treasury & International Division for evaluation by the Risk Management Division. Several market risk management strategies implemented by BRK Syariah include systems and procedures using Value at Risk (VaR) and stress testing techniques.

BRK Syariah melakukan pemantauan secara berkala melalui penerbitan laporan yang disampaikan kepada Direksi. Bank juga membatasi jenis transaksi atau instrumen tertentu untuk ditransaksikan oleh bisnis unit, serta mengurangi risiko dengan cara memberikan batas maksimum transaksi atau portofolio sesuai dengan *risk appetite* Bank.

BRK Syariah conducts periodic monitoring through the issuance of reports submitted to the Board of Directors. The Bank also limits certain types of transactions or instruments to be transacted by business units, and reduces risk by providing a maximum transaction or portfolio limit according to the Bank's risk appetite.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan BRK Syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Bank telah memiliki kebijakan terkait penerapan manajemen risiko likuiditas sebagai upaya menghadapi permasalahan likuiditas dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam memelihara aktiva likuid maupun menjaga struktur pendanaan agar dapat mempertahankan kemampuan likuiditas Bank dalam berbagai kondisi ekonomi. Bank juga telah memiliki kebijakan *Contingency Funding Plan* yang mengatur tentang langkah-langkah penanganan dampak gangguan dan proses pemulihan likuiditas dalam kondisi kritis. Dalam kebijakan ini mendefinisikan berbagai tingkat krisis tergantung pada ruang lingkup krisis, kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak kepada Bank.

Satuan kerja manajemen risiko juga melakukan *stress testing* likuiditas dan memberikan informasi kondisi kecukupan aset likuid yang dipandang memadai untuk meng-*cover* penarikan dana oleh nasabah secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

BRK Syariah melakukan pemantauan secara berkala melalui penerbitan laporan yang disampaikan kepada Direksi. Melalui laporan Ini Bank mengidentifikasi indikator peringatan dini untuk membantu proses identifikasi krisis likuiditas, pengawasan peningkatan risiko atau kerentanan dalam posisi risiko likuiditas Bank sehingga menjadi *Early Warning Signal* untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk resulting from the inability of BRK Syariah to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be used as collateral without disrupting the Bank's activities and financial condition.

The Bank has policies related to the implementation of liquidity risk management as an effort to deal with liquidity problems in determining risk appetite and risk tolerance in maintaining liquid assets and maintaining the funding structure in order to maintain the Bank's liquidity capacity in various economic conditions. The Bank also has a Contingency Funding Plan policy that regulates steps to deal with the impact of disturbances and the process of recovering liquidity in critical conditions. This policy defines various levels of crisis depending on the scope of the crisis, the probability of its occurrence and the magnitude of the impact on the Bank.

The risk management work unit also conducts liquidity stress testing and provides information on the adequacy of liquid assets that are considered adequate to cover sudden and large withdrawals of funds by customers.

BRK Syariah conducts periodic monitoring through the issuance of reports submitted to the Board of Directors. Through this report the Bank identifies early warning indicators to assist the process of identifying liquidity crises, monitoring increased risks or vulnerabilities in the Bank's liquidity risk position so that they become Early Warning Signals to be followed up immediately.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. BRK Syariah melakukan pengelolaan risiko operasional pada seluruh aktivitas, dimana seluruh pegawai wajib berperan serta dalam mengelola risiko operasional pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank.

Operational Risk

Operational risk is the risk due to inadequate and/or non-functioning internal processes, human errors, system failures, and/or external events that affect the Bank's operations. BRK Syariah carries out operational risk management in all activities, where all employees are required to participate in managing operational risk in their respective work units and pay attention to effective controls in anticipating the possibility of risks that may harm the Bank.

BRK Syariah telah memiliki kebijakan terkait penerapan manajemen risiko operasional sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko operasional pada Bank. Selain itu BRK Syariah memiliki kebijakan terkait limit kewenangan dalam kegiatan operasional, pemisahan tugas dan tanggung jawab pada setiap level jabatan, serta adanya *approval* untuk setiap eskalasi.

Dalam mendukung penerapan majemen risiko operasional untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, BRK Syariah telah mengembangkan alat bantu manajemen risiko yaitu *Operational Risk Self Assessment* (ORSA) yang terdiri dari *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicator* dan *Loss event database*. Dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan risiko operasional melalui penerbitan laporan yang disampaikan kepada Direksi.

BRK Syariah has policies related to the implementation of operational risk management so as to minimize the possibility of operational risk occurring at the Bank. In addition, BRK Syariah has policies related to limits of authority in operational activities, segregation of duties and responsibilities at each position level, as well as approval for each escalation.

In supporting the implementation of operational risk management for the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks, BRK Syariah has developed a risk management tool, namely Operational Risk Self Assessment (ORSA) which consists of Risk Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator and Loss database events. Where the Bank periodically monitors operational risk through the issuance of reports submitted to the Board of Directors.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar Negara. BRK Syariah telah memiliki kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko hukum. Selain itu Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan di bidang hukum untuk memastikan bahwa aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta peraturan lainnya yang berlaku, sehingga BRK Syariah dapat terhindar dari risiko hukum. Bank juga melakukan kajian risiko hukum untuk setiap produk dan aktivitas baru sebagai langkah untuk memitigasi risiko hukum.

Legal Risk

Legal Risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses in the juridical aspect. Weaknesses in the juridical aspect, among others, are caused by lawsuits, absence of supporting laws and regulations, or weaknesses in engagements such as non-compliance with the legal requirements of contracts and imperfect binding of collateral. Legal risks, among others, can originate from operations, agreements with third parties, legal uncertainty and negligence in applying the law, obstacles in the litigation process for settlement of claims, as well as jurisdictional issues between countries. BRK Syariah has policies and guidelines for implementing legal risk management. In addition, the Bank also has policies and procedures in management in the field of law to ensure that the Bank's activities comply with the provisions of laws and other applicable regulations, so that BRK Syariah can avoid legal risks. The Bank also conducts a legal risk study for each new product and activity as a measure to mitigate legal risk.

Divisi Hukum tersebut bertindak sebagai *"legal watch"* yang berfungsi untuk memberikan analisis/ advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, selain itu juga berfungsi dalam memberikan legal opini dalam setiap perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh BRK Syariah.

The Legal Division acts as a "legal watch" which functions to provide legal analysis/advice to all employees at every level of the organization, besides that it also functions to provide legal opinion in every cooperation agreement that will be carried out by BRK Syariah.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya komunikasi bank yang kurang efektif.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust that stems from a negative perception of the bank. This is partly due to negative media coverage and/or rumors about banks, as well as ineffective bank communications.

BRK Syariah telah membentuk unit kerja tersendiri yang mengelola risiko reputasi yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan dimana unit kerja tersebut berfungsi untuk melakukan pengelolaan terhadap reputasi BRK Syariah.

BRK Syariah has established a separate work unit that manages reputation risk, namely the Corporate Secretary Division where the work unit functions to manage the reputation of BRK Syariah.

BRK Syariah telah memiliki kebijakan serta pedoman manajemen risiko reputasi. BRK Syariah juga telah memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan yang harus dilakukan oleh unit kerja operasional, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko reputasi akibat kurang memadainya pelayanan BRK Syariah, terdapat juga kebijakan mengenai penanganan keluhan nasabah. Selain itu BRK Syariah telah memiliki *Call Center* sebagai sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan serta penyampaian permasalahan terkait dengan BRK Syariah. Terkait hubungan dengan pihak investor BRK Syariah telah memiliki unit kerja *investor relationship* yang bertugas melakukan komunikasi dengan pihak investor.

BRK Syariah has policies and guidelines for reputation risk management. BRK Syariah also has a policy regarding service standards that must be carried out by operational work units, this is done to minimize reputational risk due to inadequate BRK Syariah services, there is also a policy regarding handling customer complaints. In addition, BRK Syariah already has a Call Center as a means to serve the public who need banking services and submit problems related to BRK Syariah. Regarding relations with investors, BRK Syariah already has an investor relations work unit that is tasked with communicating with investors.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menerapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang kurang komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik. Selain itu risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan dari regulator.

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises partly because the bank implements a strategy that is not in line with the bank's vision and mission, conducts a less comprehensive strategic environmental analysis and/or there is a strategic plan discrepancy. In addition, strategic risk also arises from failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, dynamics of competition in the market, and changes in policy from regulators.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penetapan serta pengarahan mengenai strategi bisnis BRK Syariah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam menerapkan strategi bisnis tersebut dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang penyusunannya ditetapkan oleh Direksi dengan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners and the Board of Directors determine and direct the BRK Syariah business strategy in accordance with their duties and authorities. In implementing this business strategy, it is stated in the Bank's Business Plan (RBB), the formulation of which is determined by the Board of Directors by seeking approval from the Board of Commissioners.

Dalam melakukan pengelolaan strategi Bank, Direksi dibantu oleh Divisi Perencanaan Strategis dalam memonitor implementasi strategi bank termasuk implementasi Rencana Bisnis Bank. Seluruh unit bisnis/unit pendukung bertanggung jawab dalam membantu Direksi menyusun perencanaan stratejik dan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan secara efektif. Adapun upaya pengendalian yang dilakukan untuk risiko stratejik adalah dengan melakukan analisa atas pencapaian kinerja Bank dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala antara Pemimpin Unit Kantor, Pemimpin Divisi dan Direksi.

In managing the Bank's strategy, the Board of Directors is assisted by the Strategic Planning Division in monitoring the implementation of the bank's strategy including the implementation of the Bank's Business Plan. All business units/support units are responsible for assisting the Board of Directors in formulating strategic plans and implementing the established strategies effectively. The control measures taken for strategic risk are by analyzing the achievement of the Bank's performance by conducting periodic performance evaluations between Office Unit Heads, Division Heads and the Board of Directors.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern yang konsisten.

Dalam melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, BRK Syariah telah membentuk unit kerja kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh unit yang ada di bank telah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. BRK Syariah telah memiliki kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan. Selain itu BRK Syariah juga telah memiliki kebijakan mengenai Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang diantaranya membahas mengenai transaksi transaksi yang mencurigakan serta pengkinian data nasabah serta kebijakan mengenai pengendalian gratifikasi dan terdapat prosedur kepatuhan untuk unit kerja sebagaimana diatur dalam pedoman fungsi kepatuhan BRK Syariah. Selain itu terkait dengan penerbitan produk dan aktivitas baru terlebih dahulu dilakukan uji petik kepatuhan terkait kebijakan yang akan diterbitkan.

Pemantauan risiko kepatuhan Bank juga dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK). Melalui aplikasi ini dapat dipantau parameter yang harus dikendalikan sesuai dengan ketentuan regulator.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk due to the bank not fulfilling and/or not implementing the applicable laws and regulations. Compliance risk management is carried out through the implementation of a consistent internal control system.

In managing compliance risk, BRK Syariah has established a compliance work unit, namely the Compliance Division which is responsible for ensuring that all units in the bank comply with applicable regulations. BRK Syariah already has policies and guidelines for implementing compliance risk management. In addition, BRK Syariah also has policies regarding Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) policies, which among others discuss suspicious transactions and updating customer data as well as policies regarding gratuity control and compliance procedures for work units as regulated in the BRK Syariah compliance function guidelines. In addition, related to the issuance of new products and activities, a compliance test is carried out regarding the policies to be issued.

Bank compliance risk monitoring is also carried out through the Compliance Information System Application (ASIK). Through this application can be monitored the parameters that must be controlled by the provisions of the regulator.

Risiko Kredit

Credit Risk

Tabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
Table 1 : Disclosure of Net Receivables by Region - Bank Only

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*				31 Desember 2021 *December 31, 2021*				*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah *Net Claims by Region*				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah *Net Claims by Region*				
		Wilayah 1 *Region 1*	Wilayah 2 *Region 2*	Wilayah 3 *Region 3*	Total	Wilayah 1 *Region 1*	Wilayah 2 *Region 2*	Wilayah 3 *Region 3*	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(3)	(4)	(5)	(8)	*(2)*
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.296.960	-	-	9.296.960	10.096.600	-	-	10.096.600	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	396.500	-	39.326	435.826	311.273	-	53.575	364.848	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	661.335	21	88	661.444	547.377	-	-	547.377	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	261.193	105.252	-	366.444	219.091	79.516	-	298.607	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	1.652	-	1.652	1.950			1.950	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	10.654.404	3.745.094	13.335	14.412.833	10.626.610	3.552.546	8.392	14.187.548	*Employee/ Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.296.771	300.806	17	2.597.594	1.966.472	290.894		2.257.366	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi	119.960	61.896	1.526.828	1.708.684	246.117	80.865	1.263.641	1.590.623	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	58.852	5.427	-	64.279	156.327	8.301	1.148	165.776	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	2.085.527	234.897	2.188	2.322.611	1.542.431	370.015	7.378	1.919.824	*Other Assets*
	Total	**25.831.500**	**4.455.045**	**1.581.783**	**31.868.328**	**25.714.248**	**4.382.137**	**1.334.134**	**31.430.519**	***Total***

Tabel 2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual
Table 2 : Disclosure of Net Receivables Based on Remaining Term of Contract - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*						31 Desember 2021 *December 31, 2021*						*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak *Net Receivables Based on Contract Term Areas*						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak *Net Receivables Based on Contract Term Areas*						
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	6.248.625	2.081.482	927.339	39.514	-	9.296.960	7.593.528	1.239.223	1.109.183	154.665	-	10.096.600	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	435.826	-	-	-	435.826	60.191	-	250.972	53.685	-	364.848	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	661.444	-	-	-	-	661.444	547.377	-	-	-		547.377	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.529	11.654	18.505	334.756	-	366.444	74.721	91.029	26.888	105.968	-	298.607	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	1.652	-	1.652	1.950	-	-	-	-	1.950	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	138.576	987.010	1.450.309	11.836.938	-	14.412.833	577.194	6.371.137	2.292.663	4.946.554	-	14.187.548	*Employee/ Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	169.624	1.024.272	1.101.185	302.513	-	2.597.594	1.148.222	892.169	179.805	37.170	-	2.257.366	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi	143.709	56.228	13.039	1.495.708	-	1.708.684	127.062	338.157	1.019.924	105.481	-	1.590.623	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	30.121	17.921	8.126	8.111	-	64.279	2.636	9.103	15.249	138.789	-	165.776	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	2.322.611	2.322.611	-	-	-	-	1.919.824	1.919.824	*Other Assets*
	Total	**7.393.628**	**4.614.393**	**3.518.503**	**14.019.192**	**2.322.611**	**31.868.328**	**10.132.881**	**8.940.817**	**4.894.684**	**5.542.313**	**1.919.824**	**31.430.519**	

Tabel 3 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual
Table 3 : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Bank Individualy

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah *Claims to Government*	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entities*	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*	Tagihan Kepada Bank *Bills to Banks*	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Backed Financing*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31 Desember 2022 *December 31, 2022*							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	181.018	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	39.326	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	215.482	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	366.444	
23	Lainnya	9.296.960	-	-	661.444	-	
	Total	**9.296.960**	**435.826**	**-**	**661.444**	**366.444**	

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Backed Financing*	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Employee/ Retirement Funding*	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*	Tagihan Kepada Korporasi *Claims on Corporations*	Tagihan Yang telah Jatuh Tempo *Claims That Have Been Due Date*	Aset Lainnya *Other Assets*	*Economic Sector*
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	*(2)*
-	-	1.909.809	5.331	26.238	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
-	-	326	5.138	9	-	*Mining and excavation*
-	84	24.861	334.695	623	-	*Processing industry*
-	-	740	42	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
-	-	1.231	415	(455)	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
-	-	1.176	923.256	873	-	*Construction*
-	291	483.167	32.456	8.395	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
-	-	6.699	594	75	-	*Transportation and Warehousing*
1.652	205	45.466	303.471	926	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
-	151	1.677	196	66	-	*Information and Communication*
-	-	-	37.129	-	-	*Financial and Insurance Activities*
-	-	4.841	3.503	35	-	*Real Estate*
-	-	1.209	-	14	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
-	-	3.029	4.020	244	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support*
-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security*
-	-	1.592	-	98	-	*Education*
-	-	10.067	68	12	-	*Human Health Activities and Social Activities*
-	-	-	-	0	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
-	-	89.193	4.324	859	-	*Other Service Activities*
-	-	5.625	-	56	-	*Household Activities as Employers*
-	-	-	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
-	14.412.102	6.885	54.044	26.211	-	*Not Business Field*
-	-	-	-	-	2.322.611	*Other*
1.652	**14.412.833**	**2.597.594**	**1.708.684**	**64.279**	**2.322.611**	***Total***

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah *Claims to Government*	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entities*	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*	Tagihan Kepada Bank *Bills to Banks*	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal *Residential Backed Financing*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2021 *December 31, 2021*						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	250.972	-	-	40
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	275
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	53.575	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	1.526
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	479
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	195
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	867
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-		-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-		295.225
23	Lainnya	10.096.600	60.301	-	547.377	
	Total	**10.096.600**	**364.848**	**-**	**547.377**	**298.607**

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

Pembiayaan Beragun Properti Komersial *Commercial Property Backed Financing*	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan *Employee/ Retirement Funding*	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*	Tagihan Kepada Korporasi *Claims on Corporations*	Tagihan Yang telah Jatuh Tempo *Claims That Have Been Due Date*	Aset Lainnya *Other Assets*	*Economic Sector*
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	*(2)*
-	1.213	1.562.325	2.503	61.092	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
-	-	197	-	155	-	*Mining and excavation*
-	-	24.280	123	1.159	-	*Processing industry*
-	-	794	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
-	-	1.138	-	6.211	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
-	-	9.669	1.104.794	14.671	-	*Construction*
1.950	593	482.700	24.571	40.781	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
-	-	7.999	334	1.097	-	*Transportation and Warehousing*
-	-	51.876	316.763	2.036	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
-	-	2.868	33	75	-	*Information and Communication*
-	-	782	38.516	7	-	*Financial and Insurance Activities*
-	-	4.176	-	120	-	*Real Estate*
-	-	606	-	526	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
-	-	9.100	1.720	722	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support*
-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security*
-	-	2.701	-	-	-	*Education*
-	-	3.898	6.630	-	-	*Human Health Activities and Social Activities*
-	258	4.948	130	3	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
-	-	76.183	2.596	3.972	-	*Other Service Activities*
-	97	7.710	-	58	-	*Household Activities as Employers*
-		-	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
-	14.185.387	3.414	91.909	32.992	-	*Not Business Field*
-	-	-	-	99	1.919.824	*Other*
1.950	**14.187.548**	**2.257.366**	**1.590.623**	**165.776**	**1.919.824**	***Total***

Tabel 4 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
Table 4 : Disclosure of Receivables and Allowances by Region - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2022 *December 31, 2022*				Explanation
		Wilayah *Region*				
		Wilayah 1 *Region 1*	Wilayah 2 *Region 2*	Wilayah 3 *Region 3*	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(2)
1	Tagihan	26.311.830	4.517.518	1.762.544	32.591.892	*Bill*
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (stage 2 dan stage 3)					*Claims that experience increased and worsening credit risk (stage 2 and stage 3)*
	a. Belum jatuh tempo	244.501	79.823	-	324.324	*a. Not yet due*
	b. Telah jatuh tempo	439.818	62.754	2.073	504.645	*b. Has expired*
3	CKPN - Individual	5.049	9.424	-	14.473	*CKPN - Individually*
4	CKPN - Kolektif	385.136	51.200	2.426	438.762	*CKPN - Collective*
6	Tagihan yang dihapus buku				-	*Deleted book Claims*

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2021 *December 31, 2021*				Explanation
		Wilayah *Region*				
		Wilayah 1 *Region 1*	Wilayah 2 *Region 2*	Wilayah 3 *Region 3*	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(2)
1	Tagihan	26.106.394	4.497.603	1.468.274	32.072.271	*Bill*
2	Tagiihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (stage 2 dan stage 3)			-		*Claims that experience increased and worsening credit risk (stage 2 and stage 3)*
	a. Belum jatuh tempo	255.378	82.510	-	337.888	*a. Not yet due*
	b. Telah jatuh tempo	462.778	67.138	2.073	531.989	*b. Has expired*
3	CKPN - Stage 1	40.063	11.817	20.168	72.047	*CKPN - Stage 1*
4	CKPN - Stage 2	45.161	14.474	-	59.635	*CKPN - Stage 2*
5	CKPN - Stage 3	306.185	58.722	925	365.832	*CKPN - Stage 3*
6	Tagihan yang dihapus buku				-	*Deleted book Claims*

Tabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

Table 5 : Disclosure of Receivables and Allowances Based on Economic Sector - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Sektor Ekonomi	Tagihan *Bill*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Receivables*		CKPN - Individual *CKPN - Individually*	CKPN - Kolektif *CKPN - Collective*	Tagihan yang Dihapus Buku *Deleted book Claims*	*Economic Sector*
			Belum jatuh Tempo *Not yet due*	Telah jatuh Tempo *Expired*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(2)
	31 Desember 2022 | *December 31, 2022*							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.361.362	30.810	152.255	109	127.420		*Agriculture, Forestry and Fisheries*
2	Pertambangan dan Penggalian	6.453	-	990	-	982		*Mining and excavation*
3	Industri pengolahan	366.623	1.761	6.984	2.954	3.580		*Processing industry*
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	40.122	-	-	-	11		*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	6.501	-	4.855	5.309	13		*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
6	Konstruksi	1.311.315	222	32.580	-	32.650		*Construction*
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	639.577	25.591	116.893	367	112.431		*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
8	Pengangkutan dan Pergudangan	9.568	899	2.156	-	2.102		*Transportation and Warehousing*
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	366.413	2.675	9.433	-	8.887		*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
10	Informasi dan Komunikasi	2.545	-	522	-	456		*Information and Communication*
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	48.660	-	5	-	12		*Financial and Insurance Activities*
12	Real Estat	10.894	527	1.064	-	1.040		*Real Estate*
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	2.697	-	1.488	-	1.474		*Professional, Scientific and Technical Activities*
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	10.564	1.119	3.475	-	3.362		*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support*
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-		*Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security*
16	Pendidikan	2.013	-	422	-	324		*Education*
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10.289	575	154	-	164		*Human Health Activities and Social Activities*
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	364	-	364	-	364		*Arts, Entertainment and Recreation*
19	Aktivitas Jasa Lainnya	107.145	6.729	12.366	-	11.800		*Other Service Activities*
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	5.903	1.614	278	2	265		*Household Activities as Employers*
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-		*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
22	Bukan Lapangan Usaha	15.001.867	251.804	158.363	5.733	131.425		*Not Business Field*
23	Lainnya	12.281.016	-	-	-	-		*Other*
	Total	**32.591.892**	**324.324**	**504.645**	**14.473**	**438.762**	**-**	***Total***

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Sektor Ekonomi	Tagihan *Bill*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Receivables*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 3*	Tagihan yang Dihapus Buku *Deleted book Claims*	*Economic Sector*
			Belum jatuh Tempo *Not yet due*	Telah jatuh Tempo *Expired*					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(2)
				31 Desember 2021 | *December 31, 2021*					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.033.910	41.507	158.585	11.070	8.709	97.493	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
2	Pertambangan dan Penggalian	1.187	-	990	1	-	834	-	*Mining and excavation*
3	Industri pengolahan	31.579	790	6.888	312	55	5.729	-	*Processing industry*
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	54.369	-	-	889	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	7.345	-	6.207	6	-	7.188	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
6	Konstruksi	1.255.808	-	30.202	19.710	-	15.526	-	*Construction*
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	633.051	19.443	114.323	9.741	2.771	73.495	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
8	Pengangkutan dan Pergudangan	10.750	166	2.193	80	1	1.096	-	*Transportation and Warehousing*
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	382.845	3.036	7.588	5.439	704	5.552	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
10	Informasi dan Komunikasi	3.318	-	358	28	-	282	-	*Information and Communication*
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	53.433	-	15	909	-	9	-	*Financial and Insurance Activities*
12	Real Estat	5.194	169	1.014	36	-	895	-	*Real Estate*
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	2.048	-	1.488	5	-	1.269	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	15.413	723	4.495	259	31	3.467	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support*
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense, and Compulsory Social Security*
16	Pendidikan	2.708	385	-	21	-	-	-	*Education*
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10.524	1.236	164	103	-	19	-	*Human Health Activities and Social Activities*
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	423	-	364	-	-	364	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
19	Aktivitas Jasa Lainnya	96.851	4.377	10.997	1.005	283	7.029	-	*Other Service Activities*
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	7.993	52	170	93	16	112	-	*Household Activities as Employers*
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
22	Bukan Lapangan Usaha	14.808.649	266.004	185.948	22.340	47.065	145.473		*Not Business Field*
23	Lainnya	12.654.873	-	-	-	-	-		*Other*
	Total	**32.072.271**	**337.888**	**531.989**	**72.047**	**59.635**	**365.832**	**-**	***Total***

Tabel 6 : Pengungkapan RincianMutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual
Table 6 : Disclosure of Details of Movements in Allowance for Impairment Losses - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Keterangan	31 Desember 2022 *December 31, 2022*		31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Explanation*
		CKPN - Individual *CKPN - Individually*	CKPN - Kolektif *CKPN - Collective*	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)	*(2)*
1	Saldo awal CKPN	121.332	367.969	94.527	93.341	345.094	*CKPN initial balance*
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)		-				*Establishment (recovery) of CKPN in the current period (Net)*
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-	70.793			20.738	*2.a. Establishment of CKPN in the current period*
	2. b. Pemulihan CKPN pada periode pembentukan	106.859	-	22.480	33.706	-	*2. b. Recovery of CKPN during the formation period*
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan						*Allowance for Impairment Losses used to write-off bills in the current period*
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan						*Other establishment (recovery) in the current period*
Saldo akhir CKPN		**14.473**	**438.762**	**72.047**	**59.634**	**365.832**	

Tabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual
Table 7 : Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Rating Scale - Bank Individualy

	Kategori Portofolio							
		Lembaga Pemeringkat *Rating Agencies*	**Peringkat Jangka Panjang** *Long Term Rating*					
		Standard and Poor's	**AAA**	**AA+ s.d AA-**	**A+ s.d A-**	**BBB+ s.d BBB-**	**BB+ s.d BB-**	
		Fitch Rating	**AAA**	**AA+ s.d AA-**	**A+ s.d A-**	**BBB+ s.d BBB-**	**BB+ s.d BB-**	
		Moody's	**Aaa**	**Aa1 s.d Aa3**	**A1 s.d A3**	**Baa1 s.d Baa3**	**Ba1 s.d Ba3**	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	**AAA (idn)**	**AA+(idn) s.d AA-(idn)**	**A+ (idn) s.d A- (idn)**	**BBB+(idn) s.d BBB-(idn)**	**BB+(idn) s.d BB-(idn)**	
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	**idAAA**	**idAA+ s.d idAA-**	**idA+ s.d id A-**	**id BBB+ s.d id BBB-**	**id BB+ s.d id BB-**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal		-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		661.444	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6	Kredit Beragun Properti Komersial							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		**661.444,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

31 Desember 2022 *December 31, 2022*								
Tagihan Bersih *Net Bills*								
		Peringkat Jangka Pendek *Short Term Rating*				Tanpa Peringkat *No Rating*	Total	*Portfolio Category*
B+ s.d B-	Kurang dari B- *Less than B-*	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 *Less than A-3*			
B+ s.d B-	Kurang dari B- *Less than B-*	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3 *Less than F3*			
B1 s.d B3	Kurang dari B3 *Less than B3*	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 *Less than P-3*			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn) *Less than B-(idn)*	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) *Less than F3(idn)*			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB- *Less than idB-*	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4 *Less than idA4*			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	*(2)*
-	-	-	-	-	-	9.296.960	9.296.960	*Claims to Government*
-	-	-	-	-	-	435.826	435.826	*Claims on Public Sector Entities*
-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
-	-	-	-	-	-	-	661.444	*Bills to Banks*
						366.444	366.444	*Residential Backed Loans*
						1.652	1.652	*Commercial Property Backed Loans*
						14.412.833	14.412.833	*Employee/Retirement Loans*
						2.597.594	2.597.594	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
-	-	-	-	-	-	1.708.684	1.708.684	*Claims on Corporations*
						64.279	64.279	*Claims That Have Been Due Date*
						2.322.611	2.322.611	*Other Assets*
-	-	-	-	-	-	**31.206.884**	**31.868.328**	***Total***

	Kategori Portofolio						
		Lembaga Pemeringkat *Rating Agencies*	Peringkat Jangka Panjang *Long Term Rating*				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	60.301	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		506.862	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	Total		**661.444,43**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 8 Risiko Kredit Pihak Lawan Laporan Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*
Table 8 Counterparty Credit Risk Report of Over the Counter Sharia Hedging Transactions

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2022 | *December 31, 2022*							
		Nilai Nosional *Notional Value*			Tagihan Lindung Nilai Syariah *Sharia Hedging Claims*	Kewajiban Lindung Nilai Syariah *Sharia Hedging Obligations*	Tagihan Bersih Sebelum MRK *Net Claims Before MRK*	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK *Net Bills After MRK*
		≤ 1 Tahun *≤ 1 Year*	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun *> 1 Year - ≤ 5 Years*	> 5 Tahun *> 5 Years*					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	*Shariah compliant profit rate swap*								
2	*Shariah compliant foreign currency swap*								
3	Lainnya								
	TOTAL								

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

31 Desember 2021 *December 31, 2021*								Portfolio Category
Tagihan Bersih *Net Bills*								
		Peringkat Jangka Pendek *Short Term Rating*				Tanpa Peringkat *No Rating*	Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B- *Less than B-*	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3 *Less than A-3*			
B+ s.d B-	Kurang dari B- *Less than B-*	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3 *Less than F3*			
B1 s.d B3	Kurang dari B3 *Less than B3*	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3 *Less than P-3*			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn) *Less than B-(idn)*	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn) *Less than F3(idn)*			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB- *Less than idB-*	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4 *Less than idA4*			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(2)
-	-	-	-	-	-	10.096.600	10.096.600	*Claims to Government*
-	-	-	-	-	-	304.547	364.848	*Claims on Public Sector Entities*
-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
-	-	-	-	-	-	40.515	547.377	*Bills to Banks*
						298.607	298.607	*Residential Backed Loans*
						1.950	1.950	*Commercial Property Backed Loans*
						14.187.548	14.187.548	*Employee/Retirement Loans*
						2.257.366	2.257.366	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
-	-	-	-	-	-	1.590.623	1.590.623	*Claims on Corporations*
						165.776	165.776	*Claims That Have Been Due Date*
						1.919.824	1.919.824	*Other Assets*
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.863.355,49**	**31.430.519**	***Total***

31 Desember 2021 | *December 31, 2021*								Underlying Variables
Nilai Nosional *Notional Value*			Tagihan Lindung Nilai Syariah *Sharia Hedging Claims*	Kewajiban Lindung Nilai Syariah *Sharia Hedging Obligations*	Tagihan Bersih Sebelum MRK *Net Claims Before MRK*	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK *Net Bills After MRK*	
≤ 1 Tahun *≤ 1 Year*	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun *> 1 Year - ≤ 5 Years*	> 5 Tahun *> 5 Years*						
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)
								Shariah compliant profit rate swap
								Shariah compliant foreign currency swap
								Other
								TOTAL

Tabel 9. Laporan Transaksi *Repo*
Table 9. Repo Transaction Reports

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan *Report Date Position*				Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya *Previous Report Date Position*				*Portfolio Category*
		Nilai Wajar SSB Repo *SSB Repo Fair Value*	Kewajiban Repo *Repos Obligation*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo *SSB Repo Fair Value*	Kewajiban Repo *Repos Obligation*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah									*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik									*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank									*Bills to Banks*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel									*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
6	Tagihan Kepada Korporasi									*Claims on Corporations*
	TOTAL									***TOTAL***

Tabel 10 Laporan Transaksi *Reverse Repo*
Table 10 Report on Reverse Repo Transactions

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan *Report Date Position*				Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya *Previous Report Date Position*				*Portfolio Category*
		Nilai Wajar SSB Repo *SSB Repo Fair Value*	Kewajiban Repo *Repos Obligation*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo *SSB Repo Fair Value*	Kewajiban Repo *Repos Obligation*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah									*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik									*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank									*Bills to Banks*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel									*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
6	Tagihan Kepada Korporasi									*Claims on Corporations*
	TOTAL									***TOTAL***

Tabel 11 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

Table 11 : Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighting After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 | *December 31, 2022*											ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation*													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
A	**LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN**														***FINANCIAL POSITION EXPOSURE REPORT***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.296.960											-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							352.595					176.297	14.104	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional												-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank		661.444										132.289	10.583	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal				366.444								128.255	10.260	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial									1.652			1.652	132	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan							14.412.833					7.206.416	576.513	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								2.592.910				1.944.682	155.575	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi									1.501.925			1.501.925	120.154	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo									64.279			64.279	5.142	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset lainnya	1.461.888								859.167	1.556		861.501	68.920	*Other assets*
	Total Eksposur Neraca	10.758.848	661.444	-	366.444	-	-	14.765.427	2.592.910	2.427.024	1.556	-	12.017.298	961.384	***Total Balance Sheet Exposures***
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen /Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif**														***Exposure to Commitment/ Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions***
1	Tagihan Kepada Pemerintah												-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							83.231					41.616	3.329	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional												-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank												-	-	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal												-	-	*Residential Backed Loans*

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 | *December 31, 2022*											ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation*													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
6	Kredit Beragun Properti Komersial												-	-	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan												-	-	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							4.684					-	-	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi							188.823					112.347	8.988	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo												-	-	*Claims That Have Been Due Date*
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	276.739	-	-	-	-	153.963	12.317	***Total Administrative Account Transaction Exposure***
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**														***Exposure due to Counterparty Credit Risk***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Banks*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	17.935	-	-	-	-	*Claims on Corporations*
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-	-	-	-	-	17.935	-	-	-	-	***Total Counterparty Credit Risk Exposure***

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 | *December 31, 2021* — Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation*											ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	*Portfolio Category*
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	*(2)*
A	**LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN**														***FINANCIAL POSITION EXPOSURE REPORT***
1	Tagihan Kepada Pemerintah														*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	10.096.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	53.575		-	-	-	-	262.138	-	-	-	-	131.069	10.486	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	547.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.475	8.758	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	298.607	-	-	-	-	-	-	-	104.512	8.361	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950	-	-	1.950	156	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	14.187.548	-	-	-	-	7.093.774	567.502	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	2.251.252	-	-	-	1.688.439	135.075	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-			-	-	-	16.636	-	1.382.416	-	-	1.390.734	111.259	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset lainnya	-	-	-	-	-	-			29.621	136.155		233.854	18.708	*Other assets*
	Total Eksposur Neraca	719.394	-	-	-	-	-	-	-	1.198.874	1.556	-	1.201.208	96.097	***Total Balance Sheet Exposures***
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen /Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif**	10.869.568	547.377	-	298.607	-	-	14.466.323	2.251.252	2.612.861	137.711	-	11.955.015	956.401	***Exposure to Commitment/ Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions***
1	Tagihan Kepada Pemerintah														*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	49.135	-	-	-	-	24.568	1.965	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Residential Backed Loans*

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 | *December 31, 2021*											ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit *Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation*													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	6.115	-	-	-	4.586	367	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	1.000	-	190.571	-	-	191.071	15.286	*Claims That Have Been Due Date*
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Total Administrative Account Transaction Exposure***
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**	-	-	-	-	-	-	50.136	6.115	190.571	-	-	220.225	17.618	***Exposure due to Counterparty Credit Risk***
1	Tagihan Kepada Pemerintah														*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Banks*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Corporations*
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Total Counterparty Credit Risk Exposure***

Tabel 12 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual
Table 12 : Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques - Bank Individualy

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*						31 Desember 2021 *December 31, 2021*						*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	Bagian yang Dijamin Dengan *Parts Guaranteed With*				Bagian yang Tidak Dijamin *Non-Guaranteed Parts*	Tagihan Bersih *Net Bills*	Bagian yang Dijamin Dengan *Parts Guaranteed With*				Bagian yang Tidak Dijamin *Non-Guaranteed Parts*	
			Agunan *collateral*	Garansi *Warranty*	Asuransi Pembiayaan *Financing Insurance*	Lainnya *Other*			Agunan *collateral*	Garansi *Warranty*	Asuransi Pembiayaan *Financing Insurance*	Lainnya *Other*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	*(2)*
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**													***Exposure Statement of Financial Position***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.296.960					9.296.960	10.096.600	-	-	-		10.096.600	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	352.595					352.595	315.713		53.575	-		262.138	*Claims on Public Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-					-	-	-	-	-		-	*Claims on Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	661.444					661.444	547.377	-	-	-		547.377	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	366.444					366.444	298.607					298.607	*Residential Backed Loans*
6	Kredi Beragun Properti Komersial	1.652					1.652	1.950					1.950	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	14.412.833					14.412.833	14.187.548					14.187.548	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	2.592.910					2.592.910	2.251.252					2.251.252	*Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.501.925					1.501.925	1.399.053		-			1.399.053	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	64.279					64.279	165.776					165.776	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	2.322.611					2.322.611	1.919.824					1.919.824	*Other Assets*
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	31.573.653	-	-	-	-	31.573.653	31.183.698	-	53.575	-	-	31.130.124	***Total Exposure Statement of Financial Position***
B	**Eksposur Transaksi Rekening Administratif**													***Administrative Account Transaction Exposure***
1	Tagihan Kepada Pemerintah						-	-	-	-	-		-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	83.231					83.231	49.135	-	-	-		49.135	*Claims on Public Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional						-	-	-	-	-		-	*Claims on Development Banks and International Institutions*

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*						31 Desember 2021 *December 31, 2021*						Portfolio Category
		Tagihan Bersih *Net Bills*	Bagian yang Dijamin Dengan *Parts Guaranteed With*				Bagian yang Tidak Dijamin *Non-Guaranteed Parts*	Tagihan Bersih *Net Bills*	Bagian yang Dijamin Dengan *Parts Guaranteed With*				Bagian yang Tidak Dijamin *Non-Guaranteed Parts*	
			Agunan *collateral*	Garansi *Warranty*	Asuransi Pembiayaan *Financing Insurance*	Lainnya *Other*			Agunan *collateral*	Garansi *Warranty*	Asuransi Pembiayaan *Financing Insurance*	Lainnya *Other*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(2)
4	Tagihan Kepada Bank						-	-	-	-	-		-	*Bills to Banks*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						-	-	-	-	-		-	*Residential Backed Loans*
6	Kredi Beragun Properti Komersial						-	-	-	-	-		-	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan						-	-	-	-	-		-	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	4.684					4.684	6.115	-	-	-		6.115	*Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	206.759		17.935			188.823	191.571	-	-	-		191.571	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						-	-	-	-	-		-	*Claims That Have Been Due Date*
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**294.675**	-	**17.935**	-	-	**276.739**	**246.821**	-	-	-	-	**246.821**	***Total Administrative Account Transaction Exposure***
C	**Eksposur Risiko Kredit Akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**													***Credit Risk Exposure Due to Counterparty Credit Risk***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	*Claims on Public Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	*Claims on Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	*Bills to Banks*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	*Claims on Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-		-		-	-	-	-	-		-	*Claims on Corporations*
	Total Eksposur Risiko Kredit Akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Total Credit Risk Exposure Due to Counterparty Credit Risk***
Total (A)+(B)+(C)		**31.868.328**	-	**17.935**	-	-	**31.850.393**	**31.430.519**	-	**53.575**	-	-	**31.376.945**	***Total (A)+(B)+(C)***

Tabel 13 : Transaksi Sekuritisasi Aset
Table 13 : Asset Securitization Transactions

No.	Eksposur Sekuritisasi	Posisi Tanggal Laporan *Report Date Position*						Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya *Position of Report Date of Previous Year*						*Securitization Exposure*
		Nilai Aset yang Disekuritisasi *Value of Securitized Assets*	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai *Value of Securitized Assets that Have Impaired Value*		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi *Profit/Loss from Securitization Activities*	ATMR	Pengurang Modal *Capital Reduction*	Nilai Aset yang Disekuritisasi *Value of Securitized Assets*	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai *Value of Securitized Assets that Have Impaired Value*		Laba/ Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi *Profit/ Loss from Securitization Activities*	ATMR	Pengurang Modal *Capital Reduction*	
			Telah Jatuh Tempo *Due date*	Belum Jatuh Tempo *Not yet due*					Telah Jatuh Tempo *Due date*	Belum Jatuh Tempo *Not yet due*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*The bank acts as the initial creditor* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung: a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*The bank acts as a supporting credit provider:* *a. First risk bearer facility* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*b. Second risk bearer facility* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*

No.	Eksposur Sekuritisasi	Posisi Tanggal Laporan *Report Date Position*						Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya *Position of Report Date of Previous Year*						*Securitization Exposure*
		Nilai Aset yang Disekuritisasi *Value of Securitized Assets*	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai *Value of Securitized Assets that Have Impaired Value*		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi *Profit/Loss from Securitization Activities*	ATMR	Pengurang Modal *Capital Reduction*	Nilai Aset yang Disekuritisasi *Value of Securitized Assets*	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai *Value of Securitized Assets that Have Impaired Value*		Laba/ Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi *Profit/ Loss from Securitization Activities*	ATMR	Pengurang Modal *Capital Reduction*	
			Telah Jatuh Tempo *Due date*	Belum Jatuh Tempo *Not yet due*					Telah Jatuh Tempo *Due date*	Belum Jatuh Tempo *Not yet due*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*The bank acts as a provider of liquidity facilities* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*The bank acts as a service provider* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*The bank acts as a custodian bank* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*
6	Bank bertindak sebagai pemodal a. Senior *trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*The bank acts as financier* *a. Senior tract* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*
	b. Junior *trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)													*b. Junior trache* *- Type of exposure (example: claims secured by residential houses)*

Tabel 14 : Transaksi Sekuritisasi Aset Dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal
Table 14 : Asset Securitization Transactions in the Case of BUS Acting as Initial Creditor

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	*Underlying Asset*	Posisi Tanggal Laporan *Report Date Position*		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya *Position of Report Date of Previous Year*		*Underlying Asset*
		Nilai Aset yang Disekuritisasi *Value of Securitized Assets*	Keuntungan/ Kerugian Penjualan *Sales Gain/Loss*	Nilai Aset yang Disekuritisasi *Value of Securitized Assets*	Keuntungan/ Kerugian Penjualan *Sales Gain/Loss*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	*(2)*
1	Tagihan Kepada Pemerintah					*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank					*Bills to Banks*
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					*Residential Backed Financing*
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					*Commercial Property Backed Financing*
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					*Employee/Retirement Funding*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi					*Claims on Corporations*
10	Aset Lainnya					*Other Assets*
	Total					***Total***

Tabel 15 : Pengungkapan Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individual
Table 15 : Disclosure of RWA Calculations for Credit Risk Using the Standard Approach - Bank Individualy

1. Eksposur Aset di laporan Posisi Keuangan, Kecuali Eksposur Sekuritisasi
1. Asset Exposure in the Statement of Financial Position, Except for Securitization Exposure

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.296.960	-	-	10.096.600	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	352.595	176.297	156.634	315.713	157.856	131.069	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	109.475	109.475	*Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	661.444	132.290	132.290	547.377	104.512	104.512	*Bills to Banks*
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	366.444	128.255	128.255	298.607	1.950	1.950	*Residential Backed Financing*
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	1.652	1.652	1.652	1.950	7.093.774	7.093.774	*Commercial Property Backed Financing*
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	14.412.833	7.206.416	7.206.416	14.187.548	1.688.439	1.688.439	*Employee/Retirement Funding*

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.592.910	1.944.682	1.944.682	2.251.252	1.390.734	1.390.734	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.501.925	1.501.925	1.501.925	1.399.053	233.854	233.854	*Claims on Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	64.279	64.279	64.279	165.776	-		*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	2.322.611	-	860.723	1.919.823	-	1.201.208	*Other Assets*
TOTAL		**31.573.653**	**11.155.797**	**11.996.857**	**31.183.698**	**10.780.595**	**11.955.015**	***TOTAL***

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi Pada Transaksi Rekening Administratif, Kecuali Eksposur Sekuritisasi

2. Exposure to Commitment/Contingencies Liabilities in Administrative Account Transactions, Except for Securitization Exposures

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah				-	-	-	*Claims to Government*
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia				-	-	-	*a. Bills to the Government of Indonesia*
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain				-	-	-	*b. Claims on Governments of Other Countries*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	83.231	41.616	41.616	49.135	24.568	24.568	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional				-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank				-	-	-	*Bills to Banks*
	a. Tagihan jangka Pendek				-	-	-	*a. Short term bills*
	b. Tagihan Jangka Panjang				-	-	-	*b. Long Term Bills*
5	Kredit beragun Rumah Tinggal				-	-	-	*Residential secured loans*
6	Kredit beragun Properti Komersial				-	-	-	*Commercial Property secured loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan				-	-	-	*Employee/Retirement Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.684	3.513	3.513	6.115	4.586	4.586	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
9	Tagihan kepada Korporasi	206.759	206.759	206.759	191.571	191.071	191.071	*Receivables to Corporations*
10	Tagihan yang telah jatuh tempo				-	-	-	*Claims That Have Been Due Date*

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	*a. Residential Backed Loans*
	b. Selain kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-	*b. Apart from mortgages secured by residential houses*
TOTAL		**294.675**	**251.888**	**251.888**	**246.821**	**220.225**	**220.225**	***TOTAL***

3. Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
3. Exposures Causing Credit Risk Due to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bills*	ATMR Sebelum MRK *RWA before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia							*a. Bills to the Government of Indonesia*
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain							*b. Claims on Governments of Other Countries*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	*Bills to Banks*
	a. Tagihan jangka Pendek							*a. Short term bills*
	b. Tagihan Jangka Panjang							*b. Long Term Bills*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	*Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolio*
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	*Receivables to Corporations*
TOTAL		-	-	-	-	-	-	***TOTAL***

4. Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelment (*Settlement Risk*)
4. Exposures Causing Credit Risk Due to Settlement Risk

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bills*	Faktor Pengurang Modal *Capital Deduction Factor*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bills*	Faktor Pengurang Modal *Capital Deduction Factor*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
1	*Delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-	*Delivery versus payment*
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-	*a. Capital Charge 8% (5-15 days)*
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-	*b. Capital Cost 50% (16-30 days)*
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-	*c. Capital Charge 75% (31-45 days)*
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-	*d. Capital Charge 100% (more than 45 days)*
2	*Non delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-	*Non-delivery versus payment*
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***TOTAL***

5. Eksposur Sekuritisasi
5. Securitization Exposure

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2022 *December 31, 2022*		31 Desember 2021 *December 31, 2021*		*Portfolio Category*
		Faktor Pengurang Modal *Capital Deduction Factor*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Faktor Pengurang Modal *Capital Deduction Factor*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-	*Supporting Financing Facilities that meet the requirements*
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-	*Supporting Financing Facilities that do not meet the requirements*
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-	*Financing facilities that meet the requirements*
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-	*Financing facilities that do not meet the requirements*
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-	*Purchase of Asset Backed Securities that meet the requirements*
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan					*Purchase of Asset Backed Securities that do not meet the requirements*
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-	*Exposure to Securitization that is not covered in the Financial Services Authority Regulation concerning prudential principles in asset securitization activities for commercial banks*
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	***TOTAL***

Tabel Total ATMR Risiko Kredit dan Faktor Pengurang Modal
Table of Total Credit Risk RWA and Capital Deduction Factor

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	*Explanation*
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	12.248.745	12.175.240	*TOTAL RWA CREDIT RISK*
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	*TOTAL CAPITAL REDUCTION FACTOR*

Risiko Pasar

Risiko Pasar

Tabel 1 : Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar
Table 1 : Disclosure of Market Risk Using the Standard Method

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Jenis Risiko	31 Desember 2022 *December 31, 2022*				31 Desember 2021 *December 31, 2022*				*Risk Type*
		Bank *Bank*		Konsolidasi *Consolidation*		Bank *Bank*		Konsolidasi *Consolidation*		
		Beban Modal *Capital Charges*	ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	ATMR	Beban Modal *Capital Charges*	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
1	Risiko Suku Bunga			-	-			-	-	*Interest Rate Risk*
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-	*a. Specific Risks*
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	*b. General Risk*
2	Risiko Nilai Tukar	3.418	42.722	-	-	2.462	30.779	-	-	*Exchange Rate Risk*
3	Risiko Ekuitas *)		-	-	-		-	-	-	*Equity Risk *)*
4	Risiko Komoditas *)		-	-	-		-	-	-	*Commodity Risk *)*
5	Risiko *Option*	-	-	-	-	-	-	-	-	*Options Risk*
	TOTAL	**3.418**	**42.722**	**-**	**-**	**2.462**	**30.779**	**-**	**-**	***TOTAL***

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

LAPORAN PROFIL MATURITAS
MATURITY PROFILE REPORT

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Pos-pos	Sandi *Password*	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022 *Report Date Position December 31, 2022*					*POSS*
			≤ 1 bulan *≤ 1 month*	> 1 bulan s.d. 3 bulan *> 1 month to.d. 3 months*	> 3 bulan s.d. 6 bulan *> 3 month to.d. 6 months*	> 6 bulan s.d. 12 bulan *> 6 month to.d. 12 months*	>12 bulan *> 12 month*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**							***FINANCIAL POSITION REPORT***
	A. Aset							***A. Asset***
	1. Kas	1.446.239	1.446.239					*1. Cash*
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	4.668.660	4.668.660					*2. Placement with Bank Indonesia*
	3. Penempatan pada bank lain	203.003	203.003					*3. Placements with other banks*
	4. Surat berharga yang dimiliki	5.029.940	1.449.255	5.041	527.139	20.451	3.028.054	*4. Owned securities*
	5. Piutang:							*5. Receivables:*
	a. Piutang murabahah (gross)	25.456.714	359.420	28.406	67.547	227.695	24.773.647	*a. Murabahah receivables (gross)*
	b. Piutang salam	-	-	-	-	-	-	*b. Greetings credit*
	c. Piutang *istishna'*	-	-	-	-	-	-	*c. istishna's debt*
	d. Piutang *qardh*	54.598	44.961	9.637	-	-	-	*d. Qardh receivables*
	6. Pembiayaan bagi hasil:		-	-	-	-	-	*6. Profit sharing financing:*
	a. Pembiayaan *mudharabah*	23.720	-	-	-	-	23.720	*a. mudharabah financing*
	b. Pembiayaan *musyarakah*	2.521.950	103.780	22.558	24.025	37.535	2.334.053	*b. musyarakah financing*
	7. Pembiayaan sewa	411.895	148	92	239	2.613	408.802	*7. Lease financing*
	8. Aset lainnya		-	-	-	-	-	*8. Other assets*
			-	-	-	-	-	
	B. Liabilitas		-	-	-	-	-	***B. Liability***
	1. Dana pihak ketiga		-	-	-	-	-	*1. Third-party funds*
	a. Giro *wadiah*	107.343	107.343	-	-	-	-	*a. Wadiah current account*
	b. Deposito *mudharabah*	15.697.002	4.315.421	4.955.496	851.472	5.556.382	18.230	*b. Mudharabah deposits*
	c. Tabungan *wadiah*	1.141.488	1.141.488	-	-	-	-	*c. Wadiah savings*
	d. Tabungan *mudharabah*	6.544.825	6.544.825	-	-	-	-	*d. Mudharabah savings*
	e. Giro *Mudharabah*	3.483.049	3.483.049	-	-	-	-	*e. Mudharabah Current Account*
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-						*2. Liabilities to Bank Indonesia*
	3. Liabilitas kepada bank lain	-						*3. Liabilities to other banks*
	4. Surat berharga yang diterbitkan	-						*4. Securities issued*
	5. Pembiayaan yang diterima	-						*5. Received financing*
	Liabilitas lainnya	-						*other liabilities*
	C. Laporan Komitmen dan Kontinjensi							***C. Commitment and Contingencies Report***
	1. Kewajiban komitmen	553.479	3.478	6.181	11.094	9.221	523.504	*1. Commitment obligation*
	2. Kewajiban kontinjensi							*2. Contingent liability*
	D. Selisih (A-B)	**12.843.011**	**(7.316.661)**	**(4.889.763)**	**(232.522)**	**(5.268.088)**	**30.550.045**	***D. Difference (A-B)***

LAPORAN PROFIL MATURITAS
MATURITY PROFILE REPORT

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Pos-pos	Sandi *Password*	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2022 *Report Date Position December 31, 2022*					POSS
			≤ 1 bulan *≤ 1 month*	> 1 bulan s.d. 3 bulan *> 1 month to.d. 3 months*	> 3 bulan s.d. 6 bulan *> 3 month to.d. 6 months*	> 6 bulan s.d. 12 bulan *> 6 month to.d. 12 months*	>12 bulan *> 12 month*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**							***FINANCIAL POSITION REPORT***
	A. Aset							***A. Asset***
	1. Kas	15.649	15.649					*1. Cash*
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	7.083	7.083					*2. Placement with Bank Indonesia*
	3. Penempatan pada bank lain	3.397	3.397					*3. Placements with other banks*
	4. Surat berharga yang dimiliki							*4. Owned securities*
	5. Piutang:							*5. Receivables:*
	a. Piutang murabahah (gross)							*a. Murabahah receivables (gross)*
	b. Piutang salam							*b. Greetings credit*
	c. Piutang *istishna'*							*c. istishna's debt*
	d. Piutang *qardh*							*d. Qardh receivables*
	6. Pembiayaan bagi hasil:							*6. Profit sharing financing:*
	a. Pembiayaan *mudharabah*							*a. mudharabah financing*
	b. Pembiayaan *musyarakah*							*b. musyarakah financing*
	7. Pembiayaan sewa							*7. Lease financing*
	8. Aset lainnya							*8. Other assets*
	B. Liabilitas							***B. Liability***
	1. Dana pihak ketiga							*1. Third-party funds*
	a. Giro *wadiah*							*a. Wadiah current account*
	b. Deposito *mudharabah*	81.631	80.159	1.310	139	23		*b. Mudharabah deposits*
	c. Tabungan *wadiah*							*c. Wadiah savings*
	d. Tabungan *mudharabah*							*d. Mudharabah savings*
	e. Giro *Mudharabah*	16.639	16.639					*e. Mudharabah Current Account*
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia							*2. Liabilities to Bank Indonesia*
	3. Liabilitas kepada bank lain							*3. Liabilities to other banks*
	4. Surat berharga yang diterbitkan							*4. Securities issued*
	5. Pembiayaan yang diterima							*5. Received financing*
	Liabilitas lainnya							*other liabilities*
	C. Laporan Komitmen dan Kontinjensi							***C. Commitment and Contingencies Report***
	1. Kewajiban komitmen							*1. Commitment obligation*
	2. Kewajiban kontinjensi							*2. Contingent liability*
	D. Selisih (A-B)	**(72.141)**	**(70.669)**	**(1.310)**	**(139)**	**(23)**		***D. Difference (A-B)***

Risiko Operasional

Operational Risk

Tabel 1 : Bank Secara Individual
Table 1 : Bank Individually

(dalam jutaan rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Pendekatan Yang Digunakan *Approach Used*	31 Desember 2022 *December 31, 2022*			31 Desember 2021 *December 31, 2021*		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir *Gross Income (Average of the last 3 years)*	Beban Modal *Capital Charges*	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir *Gross Income (Average of the last 3 years)*	Beban Modal *Capital Charges*	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar *Basic Indicator Approach*	1.372.973	224.797	2.809.965	1.456.664	218.500	2.731.246
	Total	**1.372.973**	**224.797**	**2.809.965**	**1.456.664**	**218.500**	**2.731.246**

Fitur Instrumen Permodalan
Capital Instrument Features

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			*Disclosure of Details of Capital Instrument Features*	
No.	Pertanyaan	Jawaban	*Question*	*Answer*
1.	Penerbit	PT. Bank Riau Kepri Syariah	*Publisher*	*PT. Bank Riau Kepri Syariah*
2.	Nomor identifikasi	- Saham Seri A : I-01 s.d II-19 - Saham Seri B : III-01	*Identification number*	*- Series A shares: I-01 to II-19* *- Series B shares : III-01*
3.	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	*Laws used*	*Indonesian law*
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		*Instrument treatment based on KPMM provisions*	
4.	Pada saat masa transisi	N/A	*During the transition period*	*N/A*
5.	Setelah masa transisi	CET 1	*After the transition period*	*CET 1*
6.	Apakah instrumen eligible untuk Solo/*Group* atau *Group* dan Solo	Solo	*Is the instrument eligible for Solo/ Group or Group and Solo*	*Solo*
7.	Jenis instrumen	Saham Biasa	*Instrument type*	*Common stock*
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	1.209.241	*The amount recognized in the KPMM calculation*	*1,209,241*
9.	Nilai Par dari instrumen	1.209.241	*Par value of the instrument*	*1,209,241*
10.	Klasifikasi akuntansi	Ekuitas	*Accounting classification*	*Equity*
11.	Tanggal penerbitan	31 Desember 2022	*publication date*	*December 31, 2022*
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	*There is no maturity (perpetual) or with maturity*	*Perpetuals*
13.	Tanggal jatuh tempo	Tidak ada tanggal jatuh tempo	*Due date*	*There is no due date*
14.	*Eksekusi call option* atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak	*Execution of the call option with the approval of the Bank Supervisor*	*No*
15.	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (jika ada)		*Call option date, withdrawal amount and other call option terms (if any)*	
16.	*Subsequent call option*		*Subsequent call option*	
	Kupon/dividen		*Coupons/dividends*	

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			*Disclosure of Details of Capital Instrument Features*	
No.	Pertanyaan	Jawaban	*Question*	*Answer*
17.	*Fixed* atau *floating*	Floating	*Fixed or floating*	*floating*
18.	Tingkat dari kupon *rate* atau index lain yang menjadi acuan		*The rate of the coupon rate or other index that becomes the reference*	
19.	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	Tidak	*Whether or not a dividend stopper is present*	*No*
20.	*Fully discretionary*, partial, atau *mandatory*		*Fully discretionary, partial, or mandatory*	
21.	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain	Tidak	*Is there a step up feature or other incentives*	*No*
22.	*Non-cumulative* atau *cumulative*	*Cumulative*	*Non-cumulative or cumulative*	*cumulative*
23.	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversikan	*Convertible or non-convertible*	*Cannot be converted*
24.	Jika dapat dikonversi, sebutkan *trigger point*-nya		*If it can be converted, state the trigger point*	
25.	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian		*If convertible, is it whole or part*	
26.	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya		*If it can be converted, what is the conversion rate*	
27.	Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau opsional		*If it can be converted; whether mandatory or optional*	
28.	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya		*If convertible, state the type of conversion instrument*	
29.	Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*		*If it can be converted, state the issuer of instrument it converts into*	
30.	Fitur *write-down*	Tidak	*Write down feature*	*No*
31.	Jika terjadi *write-down*, sebutkan *trigger*-nya		*If a write-down occurs, state the trigger*	
32.	Jika terjadi *write-down*, apakah penuh atau sebagian		*If there is a write-down, is it full or partial*	
33.	Jika terjadi *write-down*; permanen atau temporer		*If a write-down occurs; permanent or temporary*	
34.	Jika terjadi *write-down temporer*, jelaskan mekanisme *write-up*		*If a temporary write-down occurs, explain the write-up mechanism*	
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Terakhir	*Instrument hierarchy at the time of liquidation*	*Final*
36.	Apakah terdapat fitur yang *non-compliant*	Tidak	*Are there any features that are non-compliant*	*No*
37.	Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant*		*If Yes, describe non-compliant features*	

Pengungkapan Permodalan Berdasarkan Kerangka Basel III
1. Perhitungan Permodalan
Disclosure of Capital Based on the Basel III Framework
1. Calculation of Capital

	Komponen (Bahasa Inggris) *Component (English)*	Komponen (Bahasa Indonesia) *Component (Indonesian)*	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) *Amount (in million Rupiah)*	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi1) *No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position1)*
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	**Modal Inti Utama/*Common Equity Tier* I (CET1): Instrumen dan Tambahan Modal Disetor**		
1	*Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus*	Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	1.209.241	
2	*Retained earnings*	Laba ditahan	431.879	
3	*Accumulated other comprehensive income (and other reserves)*	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1.776.911	
4	*Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)*	Modal yang termasuk *phase out* dari CET1	N/A	
5	*Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)*	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6.	**CET1 capital *before regulatory adjustments***	**CET1 sebelum *regulatory adjustment***	3.418.031	
	CET1 capital: regulatory adjustments	**CET1: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)**		
7	*Prudential valuation adjustments*	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	
8	*Goodwill (net of related tax liability)*	*Goodwill*	-	
9	*Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)*	Aset tidak berwujud lain (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	-	
10	*Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability)*	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*	-	
11	*Cash-flow hedge reserve*	*Cash-flow hedge reserve*	-	
12	*Shortfall of provisions to expected losses*	*Shortfall on provisions to expected losses*	-	
13	*Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)*	Keuntungan dari sekuritisasi	-	
14	*Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities*	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15	*Defined-benefit pension fund net assets*	Aset pensiun imbalan pasti	-	
16	*Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)*	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal pada Laporan Posisi Keuangan)	-	
17	*Reciprocal cross-holdings in common equity*	Kepemilikan silang pada instrumen CET1 pada entitas lain	-	
18	*Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)*	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
19	*Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)*	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan net posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
20	*Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)*	*Mortgage servicing rights*	-	
21	*Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)*	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)	-	
22	*Amount exceeding the 15% threshold*	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	-	
23	*of which: significant investments in the common stock of financials*	investasi signifikan pada saham biasa *financials*	-	
24	*of which: mortgage servicing rights*	*mortgage servicing rights*	-	
25	*of which: deferred tax assets arising from temporary differences*	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	-	

	Komponen (Bahasa Inggris) *Component (English)*	Komponen (Bahasa Indonesia) *Component (Indonesian)*	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) *Amount (in million Rupiah)*	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi1) *No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position1)*
26.	*National specific regulatory adjustments*	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
26a.		Selisih PPA dan CKPN	(89.057)	
26b.		PPA atas aset non produktif	-	
26c.		Aset Pajak Tangguhan	(75.453)	
26d.		Penyertaan	-	
26e.		Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.		Eksposur sekuritisasi	-	
26g.		Lainnya	(84.743)	
27	*Regulatory adjustments applied to CET1 due to insufficient Additional Tier 1 (AT1) and Tier 2 to cover deductions*	Penyesuaian pada CET1 akibat AT1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28.	***Total regulatory adjustments to CET1***	**Jumlah pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap CET1**	**(249.253)**	
29.	***CET1 capital***	**Jumlah CET1 setelah faktor pengurang**	**3.168.778**	
	AT1 capital: instruments	**Modal Inti Tambahan (*Additional* Tier 1)/AT1: Instrumen**		
30	*Directly issued qualifying AT1 instruments plus related stock surplus*	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)	-	
31	*of which: classified as equity under applicable accounting standards*	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	*of which: classified as liabilities under applicable accounting standards*	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from AT1*	Modal yang termasuk *phase out* dari AT1	N/A	
34	*AT1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)*	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	N/A	
36	*AT1 capital before regulatory adjustments*	Jumlah AT1 sebelum *regulatory adjustment*	-	
	AT1 capital: regulatory adjustments	Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)		
37	*Investments in own AT1 instruments*	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	-	
38	*Reciprocal cross-holdings in AT1 instruments*	Kepemilikan silang pada instrumen AT1 pada entitas lain	-	
39	*Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)*	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
40	*Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)*	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan	-	
41	*National specific regulatory adjustments*	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.		Penempatan dana pada instrumen AT1 pada Bank lain	-	
42	*Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions*	Penyesuaian pada AT1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43.	***Total regulatory adjustments to AT1 capital***	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT1**	**-**	
44.	***AT1 capital***	**Jumlah AT1 setelah faktor pengurang**	**-**	
45.	***Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)***	**Jumlah Modal Inti (Tier 1 = CET1 + AT1)**	**3.168.778**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions	**Modal Pelengkap (Tier 2): Instumen dan cadangan**		

	Komponen (Bahasa Inggris) *Component (English)*	Komponen (Bahasa Indonesia) *Component (Indonesian)*	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) *Amount (in million Rupiah)*	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi1) *No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position1)*
46	*Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus*	Instrumen T2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)		
47	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2*	Modal yang termasuk *phase out* dari Tier 2		
48	*Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)*	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi		
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*		
50	*Provisions*	cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit + Cadangan Tujuan	153.109	
51.	*Tier 2 capital before regulatory adjustments*	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	153.109	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	**Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)**		
52	*Investments in own Tier 2 instruments*	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri	N/A	
53	*Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments*	Pemilikan instrumen Tier 2 secara resiprokal		
54	*Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)*	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
55	*Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)*	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan	N/A	
56	*National specific regulatory adjustments*	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a		Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	-	
56b.		*Sinking fund*	-	
57.	*Total regulatory adjustments to Tier 2 capital*	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap	-	
58.	*Tier 2 capital (T2)*	Jumlah T2 setelah *regulatory adjustment*	153.109	
59.	*Total capital (TC = T1 + T2)*	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	3.321.887	
60.	*Total risk weighted assets*	Total ATMR	15.101.432	
	Capital ratios and buffers	**Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)**		
61.	*CET1 (as a percentage of risk weighted assets)*	Rasio Modal Inti Utama (CET1) – persentase terhadap ATMR	20,98%	
62.	*Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)*	Rasio Modal Inti (Tier 1) – persentase terhadap ATMR	20,98%	
63.	*Total capital (as a percentage of risk weighted assets)*	Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR	22,00%	
64.	*Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)*	Tambahan modal (*buffer*) – persentase terhadap ATMR terdiri dari:		
65	*of which: capital conservation buffer requirement*	*Capital Conservation Buffer*	-	
66	*of which: Bank specific countercyclical buffer requirement*	*Countercyclical Buffer*	-	
67	*of which: G-SIB buffer requirement*	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik	-	
68.	*Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)*	Modal Inti Utama (CET1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (*Buffer*) – persentase terhadap ATMR		
	National minima (if different from Basel 3)	**National minima (jika berbeda dari Basel 3)**		

	Komponen (Bahasa Inggris) *Component (English)*	Komponen (Bahasa Indonesia) *Component (Indonesian)*	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) *Amount (in million Rupiah)*	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi1) *No. Ref. from the Consolidated Statement of Financial Position1)*
69	*National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	Rasio minimal CET1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	
70	*National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	Rasio minimal Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	
71	*National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)*	Rasio minimal total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	**Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)**		
72	*Non-significant investments in the capital of other financials*	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	-	
73	*Significant investments in the common stock of financials*	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	-	
74	*Mortgage servicing rights (net of related tax liability)*	*Mortgage servicing rights* (net dari kewajiban pajak)	-	
75	*Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)*	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	-	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	**Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2**		
76	*Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)*	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*)	-	
77	*Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach*	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	-	
78	*Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)*	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan *cap*)	-	
79	*Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach*	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	-	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)	**Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)**		
80	*Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*	Cap pada CET1 yang temasuk phase out	-	
81	*Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	-	
82	*Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	Cap pada AT1 yang temasuk *phase out*	-	
83	*Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)	-	
84	*Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	Cap pada Tier 2 yang temasuk *phase out*	-	
85	*Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya *cap* (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	-	

Keterangan:
1. Diisi oleh BUS berdasarkan rekonsiliasi antara Format Standar Pengungkapan Perhitungan KPMM Basel III dan Laporan Posisi Keuangan Publikasi (hanya ditampilkan jika terdapat rekonsiliasi sebagaimana pada Bagian 2)
2. Sesuai Pedoman Pengisian Perhitungan KPMM Triwulanan

Information:
1. *Filled in by the BUS based on the reconciliation between the Basel III KPMM Calculation Standard Disclosure Format and the Published Financial Position Report (shown only if there is a reconciliation as in Section 2)*
2. *In accordance with the Guidelines for Filling in Quarterly KPMM Calculations*

PT BANK RIAU KEPRI
Rekonsiliasi Permodalan
Per 31 Desember 2022 / As of 31 December 2022
PT BANK RIAU KEPRI
Capital Reconciliation
As of December 31, 2022 / As of December 31, 2022

No	POS-POS	Laporan Publikasi Posisi Keuangan *Financial Position Published Report*	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dengan Cakupan Konsolidasi Berdasarkan Ketentuan Kehati-hatian *Consolidated Statements of Financial Position With Consolidated Scope Based on Prudential Provisions*	No. Referensi *No. Reference*	*POSS*
	ASET				***ASSET***
1	Kas	1.461.888	1.461.888		*Cash*
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4.675.743	4.675.743		*Placement with Bank Indonesia*
3	Penempatan pada Bank Lain	206.400	206.400		*Placements with Other Banks*
4	Tagihan *spot* dan *forward*	-	-		*Spot and forward billing*
5	Surat berharga yang dimiliki	5.029.940	5.029.940		*Owned securities*
6	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	-		*Claims on securities purchased with agreements to resell (reverse repo)*
7	Tagihan akseptasi	-	-		*Acceptance bill*
8	Piutang	16.643.446	16.643.446		*accounts receivable*
	a. Piutang *Murabahah*	16.588.735	16.588.735		*a. Murabaha Receivables*
	b. Piutang *Istishna'*	-	-		*b. Istishna's Receivables*
	c. Piutang multijasa	-	-		*c. Multiservice receivables*
	d. Piutang *qardh*	54.598	54.598		*d. Qardh receivables*
	e. Piutang sewa	113	113		*e. Rent receivables*
9	Pembiayaan bagi hasil	2.545.670	2.545.670		*Result sharing financing*
	a. *Mudharabah*	23.720	23.720		*a. Mudharabah*
	b. *Musyarakah*	2.521.950	2.521.950		*b. Musyarakah*
	c. Lainnya	-	-		*c. Other*
10	Pembiayaan sewa	411.782	411.782		*Lease financing*
11	Penyertaan Modal	1.556	1.556		*Equity capital*
12	Aset keuangan lainnya	197.800	197.800		*Other financial assets*
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	453.236	453.236		*Allowance for impairment losses on financial assets -/-*
14	Salam	-	-		*Regards*
15	Aset *Istishna'* dalam penyelesaian	-	-		*Istishna's assets are under construction*
	Termin *Istishna'* -/-	-	-		*Termin Istishna' -/-*
16	Persediaan	-	-		*Supply*
17	Aset tidak berwujud	-	-		*Intangible assets*
18	Aset tetap dan inventaris	394.095	394.095		*Fixed assets and inventory*
19	Aset nonproduktif	-	-		*Non-productive assets*
	a. Properti terbengkalai	-	-		*a. Abandoned property*
	b. Agunan yang diambil alih	-	-		*b. Foreclosed collateral*
	c. Rekening tunda	-	-		*c. account pending*
	d. Aset antar kantor	-	-		*d. Inter-office assets*
20	Aset lainnya	267.272	267.272		*Other assets*
	TOTAL ASET	**31.382.356**	**31.382.356**		***TOTAL ASSETS***

No	POS-POS	Laporan Publikasi Posisi Keuangan *Financial Position Published Report*	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dengan Cakupan Konsolidasi Berdasarkan Ketentuan Kehati-hatian *Consolidated Statements of Financial Position With Consolidated Scope Based on Prudential Provisions*	No. Referensi *No. Reference*	*POSS*
	LIABILITAS				***LIABILITIES***
1	Dana simpanan *wadiah*	1.248.831	1.248.831		*Wadiah deposit funds*
	a. Giro	107.343	107.343		*a. giro*
	b. Tabungan	1.141.488	1.141.488		*b. Savings*
2	Dana investasi *non profit sharing*	25.724.874	25.724.874		*Non-profit sharing investment funds*
	a. Giro	3.483.049	3.483.049		*a. giro*
	b. Tabungan	6.544.823	6.544.823		*b. Savings*
	c. Deposito	15.697.002	15.697.002		*c. Deposit*
3	Uang elektronik	-	-		*Electronic money*
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-		*Liabilities to Bank Indonesia*
5	Liabilitas kepada bank lain	93.275	93.275		*Liabilities to other banks*
6	Liabilitas *spot* dan *forward*	-	-		*spot and forward liabilities*
7	Surat berharga yang diterbitkan	-	-		*Securities which is issued*
8	Liabilitas akseptasi	-	-		*Acceptance Liability*
9	Pembiayaan yang diterima	-	-		*Funding received*
10	Setoran jaminan	8.432	8.432		*Guarantee deposit*
11	Liabilitas antarkantor	-	-		*Inter-office liabilities*
12	Liabilitas lainnya	955.012	955.012		*Other liabilities*
13	Dana investasi *profit sharing*	-	-		*Funds investment profit sharing*
	TOTAL LIABILITAS	**28.030.424**	**28.030.424**	-	***TOTAL LIABILITIES***
	EKUITAS				***EQUITY***
14	Modal disetor	1.209.241	1.209.241		*Paid-up capital*
	a. Modal dasar	4.000.000	4.000.000		*a. Authorized capital*
	b. Modal yang belum disetor -/-	2.790.759	2.790.759		*b. Capital which has not yet been paid up -/-*
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-	-		*c. Shares bought back (treasury stock) -/-*
15	Tambahan modal disetor	2.085	2.085	c	*Additional paid-up capital*
	a. Agio	-	-		*a. Agio*
	b. Disagio -/-	-	-		*b. Disagio -/-*
	c. Modal sumbangan	2.085	2.085		*c. Capital contribution*
	d. Dana setoran modal	-	-		*d. Capital deposit funds*
	e. Lainnya	-	-		*e. Other*
16	Penghasilan komprehensif lain	(66.099)	(66.099)		*Other comprehensive income*
	a. Keuntungan	-	-		*a. Profit*
	b. Kerugian -/-	66.099	66.099		*b. Loss -/-*
17	Cadangan	1.774.826	1.774.826		*Reserve*
	a. Cadangan umum	1.774.826	1.774.826		*a. general reserve*
	b. Cadangan tujuan	-	-		*b. Reserves destination*
18	Laba/rugi	431.879	431.879		*Profit and loss*
	a. Tahun-tahun lalu	200.913	200.913		*a. Past years*
	b. Tahun berjalan	230.966	230.966		*b. Current year*
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-		*c. Dividends paid -/-*
	TOTAL EKUITAS	3.351.932	3.351.932		*TOTAL EQUITY*
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**31.382.356**	**31.382.356**		***TOTAL OF LIABILITIES AND EQUITIES***

KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Commitments and Contingencies

Pada ahir tahun 2022 Bank memiliki komitmen dan kontinjensi sebesar Rp1.591.964 juta. Ini terdiri dari kewajiban komitmen dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik sebesar Rp553.479 juta, tagihan kontinjensi berupa pendapatan dalam penyelesaian sebesar Rp628.631 juta, dan kewajiban kontinjensi berupa garansi yang diberikan dan kewajiban lainnya sebesar Rp409.854 juta.

At the end of 2022 the Bank has commitments and contingencies of IDR 1,591,964 million. This consisted of commitment obligations from undrawn financing facilities amounting to Rp.553,479 million, contingent receivables in the form of income in progress of Rp.628,631 million, and contingent liabilities in the form of guarantees provided and other liabilities amounting to Rp.409,854 million.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi (dalam Jutaan Rupiah)
Table of Commitments and Contingencies (in Million Rupiah)

No	Uraian	2022	*Description*
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	-	*COMMITMENT BILLING*
1	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	*Unused loan/financing facilities*
2	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi *spot* dan *forward*	-	*Forex positions to be received from spot and forward transactions*
3	Lainnya	-	*Other*
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	**553.479**	*COMMITMENT OBLIGATIONS*
1	Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	553.479	*Unused financing facilities*
	a. *Committed*	553.479	*a. committed*
	b. *Uncommitted*	-	*b. Uncommitted*
2	*Irrevocable* L/C yang masih berjalan	-	*Irrevocable L/C which is still running*
3	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi *spot* dan derivatif/*forward*	-	*Forex positions to be submitted for spot and derivative/forward transactions*
4	Lainnya	-	*Other*
III	**TAGIHAN KONTINJENSI**	**628.631**	*CONTINGENCIES BILLING*
1	Garansi yang diterima	-	*Warranty accepted*
2	Pendapatan dalam penyelesaian	628.631	*Revenue in progress*
	a. *Murabahah*	-	*a. Murabahah*
	b. *Istishna'*	-	*b. Istishna'*
	c. Sewa	-	*c. Rent*
	d. Bagi hasil	-	*d. Profit sharing*
	e. Lainnya	628.631	*e. Other*
3	Lainnya	-	*Other*
IV	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	**409.854**	*CONTINGENT LIABILITIES*
1	Garansi yang diberikan	17.935	*Warranty provided*
2	Lainnya	391.919	*Other*
	Jumlah	1.591.964	*Amount*

IKATAN MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL
Material Commitments Related to Capital Goods Investment

Sepanjang tahun 2022, Bank tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Oleh karena itu tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan BRK Syariah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Throughout 2022, the Bank has no material commitments related to investment in capital goods. Therefore there is no information regarding the name of the party making the commitment, the purpose of the agreement, the source of funds expected to fulfill the commitment, the currency that is denominated, and the steps planned by BRK Syariah to protect risks from positions associated foreign currency.

INVESTASI BARANG MODAL
Capital Goods Investment

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Investment in the form of capital goods (capital expenditure) is an activity of disbursing funds used to purchase a number of fixed assets or add to the value of fixed assets which are expected to provide value in the future.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

BRK Syariah membuka 3 (tiga) kantor baru berupa Cabang Pembantu/Kedai selama tahun 2022. Pembukaan kantor baru ini membutuhkan investasi barang modal. Selain itu Bank juga berinvestasi dalam bentuk barang modal lain. Selama tahun 2022 besarnya investasi barang modal berjumlah Rp48.773 juta dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Types and Investment Value of Capital Goods

BRK Syariah opened 3 (three) new offices in the form of Supporting Branches/Taverns during 2022. The opening of these new offices requires investment in capital goods. In addition, the Bank also invests in other forms of capital goods. During 2022 the amount of investment in capital goods amounted to IDR 48,773 million, with details presented in the following table.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal (dalam Juta Rupiah)
Table of Types and Investment Value of Capital Goods (in Million Rupiah)

Uraian	2022	2021	*Explanation*
Tanah	2.080	-	*Land*
Bangunan	183	-	*Building*
Mesin dan peralatan kantor	30.616	24.303	*Office machines and equipment*
Kendaraan	795	1.671	*Vehicle*
Aset Dalam Penyelesaian	15.099	3.068	*Assets In Progress*
Total	**48.773**	**29.042**	***Total***

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal bertujuan untuk memperluas jaringan kantor yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat setempat serta dapat memberikan nilai tambah bagi Bank dimasa yang akan datang.

Investment Objectives of Capital Goods

Investment in capital goods aims to expand the office network which is expected to reach a wider community and provide greater benefits to the local community and can provide added value to the Bank in the future.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Investasi

Guna meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan, BRK Syariah melakukan investasi pada sejumlah efek dengan memperhatikan faktor risiko dan manajemen risiko yang matang. Berikut disajikan data investasi yang dilakukan oleh Bank pada tahun 2021 dan 2022.

Investment

In order to increase profitability and financial performance, BRK Syariah invests in a number of securities by taking into account risk factors and mature risk management. The following shows investment data made by the Bank in 2021 and 2022.

Tabel Rincian Investasi Efek-Efek
Table of Securities Investment Details

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan		*Description*
			Rp	%	
SBPM obligasi tersedia untuk dijual	3.348.148	2.832.346	515.802	18,21	*SBPM bonds available for sale*
SBPU reksadana dimiliki hingga jatuh tempo	-	1.167.610	(1.167.610)	(100,00)	*SBPU mutual funds are held to maturity*
Sukuk BI diperdagangkan	-	1.207.402	(1.207.402)	(100,00)	*BI Sukuk is traded*
SBPU SUKUK BI DIMILIKI HINGGA JT TEMPO	1.000.000	-	1.000.000	100,00	*SBPU SUKUK BI OWNED UNTIL JT TEMPO.CO*
SBPM SBSN PD/SM dimiliki hingga jatuh tempo	235.041	30.000	205.041	683,47	*SBPM SBSN PD/SM held to maturity*
SBPM SBSN PD/SM HTM - PREMIUM	517	1.026	(509)	(49,61)	*SBPM SBSN PD/SM HTM - PREMIUM*
SBPM SBSN PD/SM HTM-DISKONTO	(3.766)	-	(3.766)	0	*SBPM SBSN PD/SM HTM-DISCOUNT*
SIMA A/B S/D 1 BLN	450.000	-	450.000	100,00	*SIMA A/B S/D 1 MONTH*
Jumlah Efek-efek	5.029.940	5.238.384	(208.444)	(3,98)	*Number of Securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(897)	897	(100,00)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.029.940**	**5.237.487**	**(207.547)**	**(3,96)**	***Total - net***

Ekspansi

Di sepanjang tahun 2022, BRK Syariah membuka 3 (tiga) kantor Cabang Pembantu/Kedai. Ekspansi ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan layanan kepada Nasabah dan masyarakat guna menghadirkan layanan prima yang memenuhi kebutuhan nasabah.

Expansion

Throughout 2022, BRK Syariah opened 3 (three) sub-branch offices/shops. This expansion aims to expand and improve services to customers and the public in order to provide excellent service that meets customer needs.

Tabel Ekspansi
Expansion Table

Jaringan Kantor	2022	2021	Ekspansi	*Office Network*
Cabang	21	21	0	*Branch*
Cabang Pembantu/Kedai	82	79	3	*Supporting Branch/Tavern*
Kantor Kas/*Payment Point*/Butik	71	73	(2)	*Cash Office/Payment Point/Boutique*

Divestasi

BRK Syariah tidak melakukan aktivitas divestasi di sepanjang tahun 2022.

Divestment

BRK Syariah will not carry out divestment activities throughout 2022.

Akuisisi

BRK Syariah tidak melakukan kegiatan akuisisi sepanjang tahun 2022.

Acquisition

BRK Syariah does not carry out acquisition activities throughout 2022.

Restrukturisasi Hutang/Modal

BRK Syariah tidak melakukan transaksi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi modal sepanjang tahun 2022.

Debt/Capital Restructuring

BRK Syariah will not carry out debt restructuring and/or capital restructuring transactions throughout 2022.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Share Ownership Program (Esop/Msop)

BRK Syariah tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek, sehingga Bank tidak memiliki program *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Oleh karena itu, Bank tidak memiliki informasi tentang jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; jangka waktu; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; serta harga *exercise*.

BRK Syariah does not list its shares on the stock exchange, so the Bank does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and Management Stock Ownership Program (MSOP). Therefore, the Bank does not have information about the number of ESOP/MSOP shares and their realization; time period; requirements of eligible employees and/or management; as well as the exercise price.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of The Use of Public Offering Funds

Sampai dengan akhir tahun 2022 BRK Syariah belum melakukan penawaran umum saham maupun obligasi ke publik melalui pasar modal. Oleh karena itu Bank tidak menyajikan informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

Until the end of 2022 BRK Syariah has not made a public offering of shares or bonds to the public through the capital market. Therefore the Bank does not provide information regarding the actual use of proceeds from public offerings, which includes the total proceeds from the public offering; plans for the use of funds; details of use of funds; fund balance; and the date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

- Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan-Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan interim pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

The following are financial accounting standards, amendments, and interpretations of financial accounting standards that are effective from January 1, 2022.

- *Amendments to PSAK No. 22 "Business Combination on Reference to a Conceptual Framework";*
- *Amendments to PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts-Fulfilling the Cost of Contracts";*
- *The annual adjustment of PSAK No. 71: "Financial Instruments"; And*
- *The annual adjustment of PSAK No. 73: "Rent".*

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and did not have a material impact on the interim financial statements in the current or previous periods.

LARANGAN, BATASAN, DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN PENYEDIAAN DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA

Prohibitions, Limitations, and/or Significant Barriers to Provision of Funds Between Banks And Other Entities In A Business Group

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BRK Syariah telah menetapkan kebijakan yang mencakup batasan dalam pemberian dana kepada pihak terkait sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum dan POJK No. 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BRK Syariah memiliki *Standard Operating Procedure* (*SOP*) terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, serta Penyediaan Dana kepada Pihak Lain.

In carrying out its business activities BRK Syariah has established a policy that includes limits on providing funds to related parties in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 32/POJK.03/2018 concerning Legal Lending Limits (BMPK) and Provision of Large Funds for Commercial Banks and POJK No. 38 /POJK.03/2019 concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.03/2018 Concerning LLL and Provision of Large Funds for Commercial Banks. As a form of implementation in carrying out the principles of Good Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority. BRK Syariah has a Standard Operating Procedure (SOP) regarding the Maximum Limit for Lending and Provision of Funds to Related Parties, Provision of Large Funds and Provision of Funds to Other Parties.

Tabel Penyediaan Dana Pihak Terkait Tahun 2022
Table of Provision of Related Party Funds for 2022

No	Penyedia Dana	Jumlah *Total*		*Fund Provider*
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah) *Amount (in millions of Rupiah)*	
1	Kepada Pihak Terkait	3	1.203	*To Related Parties*
2	Kepada 20 Debitur Inti			*To 20 Core Debtors*
	a. Individu	35	1.665.038	*a. Individual*
	b. *Group*	-	-	*b. Group*
	Total Debitur Inti	**35**	**1.665.038**	***Total Core Debtors***

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Sampai dengan akhir tahun 2022 tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan Bank.

Matters with the Potential to Significantly Affect Business Continuity

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition the Bank's management is not aware of any material uncertainties that could cause significant losses to the Bank's ability to continue its business. Until the end of 2022 there are no matters that have a significant effect on the continuity of the Bank.

Asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini hal tersebut ditunjukkan dalam analisis kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank serta dikuatkan oleh hasil auditor independen atas Laporan Keuangan *Audited* tahun buku 2022 yaitu dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Bank melakukan penilaian dan membuat analisis posisi Bank mengenai hal-hal yang berpotensi menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank dalam memitigasi hal tersebut. Penilaian dilakukan melalui penelaahan terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi Bank dengan cara menelaah kondisi eksternal Bank. Berdasarkan catatan Laporan Keuangan *Audited* tahun buku 2022 oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo), Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assesment*

Tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank pada tahun 2022 maupun tahun-tahun selanjutnya. Bank meyakini hal ini berdasarkan:

1. Laporan Keuangan tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) menyatakan bahwa Laporan Keuangan BRK Syariah telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material (opini audit Wajar Tanpa Modifikasian). Hal ini telah menunjukkan bahwa Bank telah menjalankan transparansi dan akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal yang handal.
2. BRK Syariah berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp350.899 juta pada tahun 2022. Bank juga berhasil membukukan laba komprehensif Rp282.567 juta.
3. Rasio keuangan Bank tahun 2022 menunjukkan hasil positif sebagaimana dijelaskan pada subbab Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya.
4. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Bank.

The assumptions underlying management in believing this are shown in the analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats, contained in the Bank's Business Plan and corroborated by the results of independent auditors on the Audited Financial Statements for the 2022 financial year, namely an "Unqualified" opinion.

Management Assessment of Matters That Have a Significant Influence on Business Continuity

The Bank conducts an assessment and makes an analysis of the Bank's position regarding matters that have the potential to have a significant impact on business continuity as well as the strengths and weaknesses of the Bank in mitigating these matters. The assessment is carried out through a review of the company's internal conditions, as well as an analysis of the opportunities and threats faced by the Bank by examining the external conditions of the Bank. Based on the records of the Audited Financial Statements for the 2022 financial year by the independent auditor Public Accountant Office Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo), the Bank's management has assessed the Bank's ability to continue its business continuity and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. future. In addition, management does not see any material uncertainty that could cast significant doubt on the Bank's ability to continue its business.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

There are no matters that have the potential to significantly affect the continuity of the Bank's business in 2022 and the following years. The Bank believes this based on:

1. *The 2022 Financial Report issued by the Public Accountant Office Kreston Indonesia (Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo) states that the BRK Syariah Financial Statements have presented fairly in all material respects (Fair Without Modification audit opinion). This has shown that the Bank has implemented transparency and accountability, as well as a reliable internal control system.*
2. *BRK Syariah managed to record a profit for the year of IDR 350,899 million in 2022. The Bank also managed to record a comprehensive profit of IDR 282,567 million.*
3. *The Bank's financial ratios for 2022 show positive results as explained in the sub-chapter Analysis of Ability to Pay Debt, Collectability of Accounts Receivables, and Other Financial Ratios.*
4. *There were no lawsuits claiming bankruptcy against the Bank.*

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI KE DEPAN
Business Prospects and Strategies for The Future

Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai dengan tingginya tekanan inflasi, agresifnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter, dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diprakirakan akan menurun dari 2022, dengan risiko koreksi yang dapat lebih rendah dan resesi yang tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif.

Slowing global economic growth was accompanied by high inflationary pressure, aggressive increases in monetary policy interest rates, and financial market uncertainty. Global economic growth in 2023 is predicted to decline from 2022, with a lower risk of correction and a high recession in several countries, including the United States (US) and Europe. The global economic slowdown was influenced by continuing geopolitical tensions that triggered economic fragmentation, trade and investment, as well as the impact of aggressive monetary policy tightening.

Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan III 2022 dengan tumbuh 5,72% (yoy), lebih tinggi dari prakiraan dan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy), ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas Lapangan Usaha (LU), terutama Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, Kalimantan, dan Sumatera.

Domestic economic improvement continues. Indonesia's economic performance continued to strengthen in the third quarter of 2022 with growth of 5.72% (yoy), higher than the forecast and achievement in the previous quarter of 5.45% (yoy), supported by continued improvement in domestic demand and continued high export performance. The improvement in the national economy is also reflected in the increase in the growth of the majority of Business Fields (LU), especially the Processing, Transportation and Warehousing Industries, as well as Wholesale and Retail Trade. Spatially, economic improvement was supported by growth occurring in all regions of Indonesia, with the highest growth recorded in the Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) region, followed by Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Java, Kalimantan and Sumatra.

Kondisi likuiditas di perbankan meningkat dan memadai dalam mendukung intermediasi. Transmisi kenaikan suku bunga kebijakan mendorong peningkatan suku bunga di pasar uang, sementara kenaikan suku bunga perbankan terbatas. Intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan dan mendukung pemulihan ekonomi. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Bank Indonesia terus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Liquidity conditions in the banking system improved and were sufficient to support intermediation. The transmission of the increase in policy interest rates stimulated an increase in interest rates on the money market, while increases in bank interest rates were limited. Banking intermediation continues to improve and support economic recovery. The resilience of the financial system, especially banking, is maintained both in terms of capital and liquidity. Bank Indonesia continues to improve payment system efficiency by strengthening policies and accelerating payment system digitalization to support inclusive economic growth.

Atas berbagai pertimbangan asesmen tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Based on these various assessment considerations, the Bank Indonesia Board of Governors' Meeting (RDG) on November 16-17 2022 decided to increase the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) by 50 bps to 5.25%, the Deposit Facility rate by 50 bps to 4.50%, and the Lending Facility rate of 50 bps to 6.00%. The decision to increase interest rates is a front-loaded, pre-emptive and forward-looking step to reduce inflation expectations which are currently still high and ensure that future core inflation returns to the target of 3.0 ± 1% earlier, namely in the first half of 2023. as well as strengthening the rupiah exchange rate stabilization policy so that it is in line with its fundamental value due to the strong US dollar currency and high uncertainty on global financial markets, amid increasing domestic economic demand which remains strong.

Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:

a. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut.
b. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar.
c. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil November 2022 6 SBN bagi masuknya investor portofolio asing.
d. Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang menggunakan ***underlying*** berupa surat berharga pembiayaan inklusif (SukBI inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI).
e. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan.
f. Terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antar negara.
g. Mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan kanal layanan serta terus melanjutkan komunikasi public secara berkala.

Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter November 2022, Bank Indonesia

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki BRK Syariah antara lain sebagai berikut:

a. Stabilitas Industri Perbankan Indonesia
   Indikator stabilitas industri perbankan terjaga dan menurut Bank Indonesia cukup kuat untuk menahan efek perubahan indikator makro ekonomi global. Namun demikan Indonesia akan terus waspada terhadap terjadinya potensi resesi global dan menjalar ke dalam Indonesia.
b. Market *Share* Industri Keuangan Syariah dan Tren Industri Halal Global
   1. *Market share* Aset perbankan syariah. Aset perbankan nasional di Indonesia memperlihatkan tren peningkatan dari 6,1% pada tahun 2019 menjadi 6,8% pada Juni 2022; pada tahun 2019 aset perbankan syariah sebesar 538 triliun tumbuh menjadi 721 triliun pada Juni 2022.
   2. *S&P Global Ratings Islamic Finance Outlook* 2022 memproyeksikan bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 10%-12% pada 2021-2022 setelah melambat di angka 10,6% pada 2020.
   3. Laporan *State of Global Islamic Economy Report* 2020/2021 (*Salaam Gateway*, 2021) menyebutkan bahwa terdapat 1,8 miliar penduduk muslim yang

Bank Indonesia also continues to strengthen the response of the policy mix to maintain stability and momentum for economic recovery as follows:

a. Strengthen monetary operations through an increase in the interest rate structure on the money market in accordance with the increase in the BI7DRR interest rate.
b. Strengthen the stabilization of the Rupiah exchange rate by remaining in the market.
c. Continuing the sale/purchase of SBN in the secondary market to strengthen the transmission of the BI7DRR increase in increasing the attractiveness of the November 2022 6 SBN yield for foreign portfolio investors.

d. Issued Bank Indonesia sukuk instruments (SukBI) that use as underlying in the form of inclusive financing securities (inclusive SukBI) and are recognized as Inclusive Financing Securities (SBPI).
e. Continuing the policy of transparency of prime lending rates by conducting in-depth assessments regarding the response of banking interest rates to policy rates.
f. Continue to encourage the use of QRIS and continue to develop QRIS features and services including expanding QRIS across countries.

g. Encouraging payment system innovation including continuing the acceptance of BI-FAST to the public through expanding membership and service channels as well as continuing regular public communications.

Source: Monetary Policy Review November 2022, Bank Indonesia

Based on these conditions, the Bank has the opportunity to grow. Opportunities owned by BRK Syariah are as follows:

a. Indonesian Banking Industry Stability
   Indicators of banking industry stability are maintained and according to Bank Indonesia are strong enough to withstand the effects of changes in global macroeconomic indicators. However, Indonesia will continue to be vigilant against the potential for a global recession to spread to Indonesia.
b. Market Share of the Islamic Finance Industry and Trends in the Global Halal Industry
   1. Market share of Islamic banking. Assets in Indonesia's national banking assets shows an increasing trend from 6.1% in 2019 to 6.8% in June 2022; in 2019 Islamic banking assets amounted to 538 trillion, growing to 721 trillion in June 2022.
   2. S&P Global Ratings Islamic Finance Outlook 2022 projects that global Islamic finance will grow by 10% -12% in 2021-2022 after slowing down to 10.6% in 2020.
   3. The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021 (Salaam Gateway, 2021) states that there are 1.8 billion Muslim population who are consumers

menjadi konsumen industri halal secara global dengan pengeluaran mencapai USD$2,2 triliun per tahun, di mana 12,7% populasi muslim dunia berada di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai prospek pasar tujuan sekaligus produsen produk halal yang potensial, yang membutuhkan dukungan lembaga keuangan, baik dari sisi pembiayaan, maupun fasilitas dan layanan transaksi keuangan yang handal.

c. Kebijakan Pemerintah yang Mendorong Perbankan Syariah
   1. Pemerintah berkomitmen mendorong terciptanya kesetaraan perlakuan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan industri keuangan syariah.
   2. Melalui *roadmap* pengembangan perbankan Indonesia dan *roadmap* pengembangan perbankan syariah Indonesia, OJK memberikan dukungan untuk menjadikan BPD sebagai Bank yang memiliki daya saing dalam bentuk usaha konvensional atau syariah.

d. Profitabilitas Industri Perbankan
   1. Perkembangan perbankan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif;
   2. Pemanfaatan daerah dan aktivitas pariwisata di Riau dan Kepulauan Riau memungkinkan bagi BRK Syariah untuk mengembangkan transaksi *money changer* dan *remittance*;
   3. Pembiayaan yang diberikan kepada ASN belum digarap secara maksimal sehingga perlu peningkatan volume pembiayaan dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara;
   4. Pembukaan Cabang di luar Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
   5. Potensi bisnis devisa di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
   1. Berdasarkan kontribusi, PDRB Provinsi Riau memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Sumatera;
   2. Perkembangan industri halal. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Bali dan berbagai penghargaan banyak didapat oleh Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, Provinsi Riau juga dicanangkan sebagai *halal destination* dan pusat *halal tourism*. Hal ini dapat memacu berkembangnya peluang industri daerah menjadi industri halal. BRK Syariah dapat memanfaatkan peluang ini, terutama dengan menjadi penyokong utama Pemerintah Darah dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi dengan jenis usaha yang berlabel halal;
   3. Pengembangan potensi pasar di luar ASN seperti pembiayaan di bidang infrastruktur dan juga pembiayaan ekspor impor;

of the halal industry globally with spending reaching USD $ 2.2 trillion per year, of which 12.7% of the population world Muslims are in Indonesia. This makes Indonesia a prospective destination market as well as a potential producer of halal products, which requires the support of financial institutions, both in terms of financing, as well as reliable financial transaction facilities and services.

c. Government Policies Encouraging Sharia Banking
   1. The government is committed to encouraging equality of treatment between Conventional Banks and Islamic Banks by establishing the National Sharia Economic and Finance Committee (KNEKS), one of whose tasks is to develop the Islamic finance industry.
   2. Through the roadmap for the development of Indonesian banking and the roadmap for the development of Indonesian sharia banking, OJK provides support to make BPD a Bank that has competitiveness in the form of conventional or sharia businesses.

d. Banking Industry Profitability
   1. Banking development in Riau Province and Riau Archipelago shows a positive trend;
   2. Regional utilization and tourism activities in Riau and Riau Islands make it possible for BRK Syariah to develop money changer and remittance transactions;
   3. The funding provided to ASN has not been optimally worked out so it is necessary to increase the volume of credit and services to the State Civil Apparatus;
   4. Opening of Branches outside Riau Province and Riau Archipelago Province;
   5. Foreign exchange business potential in Riau Province and Riau Archipelago Province.

e. Regional Economic Growth
   1. Based on contribution, Riau Province's GRDP has the second largest contribution to Sumatra's economy;
   2. Development of the halal industry. The Riau Archipelago Province is the second gateway for foreign tourists after Bali and the Riau Islands Province has received many awards. Besides that, Riau Province is also proclaimed as a halal destination and center for halal tourism. This can spur the development of opportunities for regional industries to become halal industries. BRK Syariah can take advantage of this opportunity, especially by becoming the main supporter of the Blood Government in developing various economic potentials with business types that are labeled halal;
   3. Development of market potential outside ASN such as financing in the infrastructure sector and also export-import financing;

f. Perluasan Pasar Industri pada Industri Unggulan Daerah dengan NPF Wajar
   1. Adanya sektor ekonomi yang stabil seperti pertanian (khususnya industri sawit) yang memiliki NPF wajar;
   2. Provinsi Riau telah menjadi salah satu hub bisnis di Sumatera.
g. Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
   1. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 61,49 berada di bawah Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Provinsi se-Indonesia sebesar 63,70.
   2. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 67,98 berada di atas Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Provinsi se-Indonesia sebesar 63,70.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Bank optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Dengan kata lain Bank memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank, yaitu:

a. Aset BRK Syariah
   Aset BRK Syariah pada Juni 2022 sebesar 31.4 triliun. Aset termasuk besar jika dibandingkan dengan Bank BPD lain. Aset sebesar itu dapat menjadi modal bagi pertumbuhan bisnis Bank selanjutnya.
b. Dukungan Pemerintah Daerah Selaku Pemegang Saham
   1. Dukungan pemegang saham dan pengurus merupakan modal utama dalam pengembangan BRK Syariah. Pemegang saham berkomitmen untuk memastikan BRK Syariah tetap sebagai Bank bagi semua penduduk Riau dan Kepulauan Riau dari latar belakang agama atau etnis apa pun.
   2. Aspek permodalan BRK Syariah menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan permodalan secara kumulatif pada tahun 2018 s.d. 2022 sebesar 3,07% per tahun. Pertumbuhan permodalan menunjukkan keseriusan para pemilik terhadap pertumbuhan BRK Syariah ke depan.
c. Jaringan Layanan
   BRK Syariah memiliki jaringan layanan yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Provinsi DKI Jakarta. Per Desember 2022, jaringan kantor BRK Syariah terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 21 Kantor Cabang, 42 Kantor Cabang Pembantu, 40 Kantor Kedai, 55 Kantor Kas, 2 Kantor BUTIK, dan 14 Kantor *Payment Point*. Sementara jaringan layanan lainnya terdiri dari 373 ATM, 2 CDM, 16 *Otobanking*, dan 600 mesin EDC.

f. Industrial Market Expansion in Regional Leading Industries with Reasonable NPF
   1. The existence of a stable economic sector such as agriculture (especially the palm oil industry) which has a reasonable NPF;
   2. Riau Province has become one of the business hubs in Sumatra.
g. Quality of Local Government Governance
   1. The Riau Province Bureaucratic Reform Index in 2019 was 61.49, below the average Indonesian Province Bureaucratic Reform Index of 63.70.
   2. The Bureaucratic Reform Index for the Riau Archipelago Province in 2019 was 67.98, which was above the average Bureaucratic Reform Index for Provinces throughout Indonesia of 63.70.

Based on the assumptions described above along with various opportunities, the Bank is optimistic that it can continuously improve its performance in the long term. In other words, the Bank has very good business prospects. This is based on the strengths possessed by the Bank, namely:

a. Sharia BRK assets
   Sharia BRK assets in June 2022 amounted to 31.4 trillion. The assets are large when compared to other BPD Banks. Such large assets can become capital for the Bank's further business growth.
b. Local Government Support as Shareholders
   1. The support of shareholders and management is the main capital in the development of Sharia BRK. Shareholders are committed to ensuring that BRK Syariah remains a bank for all residents of Riau and the Riau Islands from any religious or ethnic background.
   2. The aspect of BRK Syariah capital shows a positive trend with a cumulative increase in capital in 2018 s.d. 2022 at 3.07% per year. Capital growth shows the seriousness of the owners for the growth of BRK Syariah in the future.
c. Service Network
   BRK Syariah has a service network spread across Riau Province and Riau Archipelago Province as well as DKI Jakarta Province. As of December 2022, the BRK Syariah office network consisted of 1 (one) Head Office, 21 Branch Offices, 42 Sub-Branch Offices, 40 Shop Offices, 55 Cash Offices, 2 BOUTIQUE Offices, and 14 Payment Point Offices. While other service networks consist of 373 ATMs, 2 CDMs, 16 Otobanking, and 600 EDC machines.

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL
Profit Sharing Distribution Report

Berikut adalah distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh Bank selama tahun 2022:

The following is the profit sharing distribution carried out by the Bank during 2022:

Tabel Distribusi Bagi Hasil (Dalam Jutaan Rupiah)
Profit Sharing Distribution Table (In Million Rupiah)

Net Revenue Sharing							
Jenis Penghimpunan Dana	**Saldo Rata-rata** *Balance Average*	**Pendapatan yang akan Dibagihasilkan** *Income to be Shared*	**Porsi Pemillik Dana** *Fund Owner Portion*				*Types of Funds Collection*
			Nisbah (%) *Ratio (%)*	**Jumlah Bagi Hasil** *Amount Profit sharing*	**Indikasi Rate of Return (%)** *Indication Rate of Return (%)*		
	A	**B**	**C**	**D**	**E**		
1. Liabilitas Kepada Bank Lain	-	-	-	-	-		*Liabilities to Other Banks*
2. Giro *Mudharabah*							*Mudharabah Current Account*
a. Bank	27.342	164	10,00	16	0,69		*a. Bank*
b. Non Bank	5.186.921	31.195	10,00	3.120	0,69		*b. Non-Bank*
3. Tabungan *Mudharabah*							*Mudharabah Savings*
a. Bank	20.166	121	11,00	13	0,76		*a. Bank*
b. Non Bank	6.255.215	37.620	11,00	4.138	0,76		*b. Non-Bank*
4. Deposito *Mudharabah*							*Mudharabah deposits*
a. Bank							*a. Bank*
- 1 Bulan	24.754	149	33,00	49	2,29		*- 1 month*
- 3 Bulan	11.500	69	31,00	21	2,15		*- 3 months*
- 6 Bulan	2.000	12	31,00	4	2,15		*- 6 months*
- 12 Bulan	8.694	52	31,00	16	2,15		*- 12 months*
b. Non Bank							*b. Non-Bank*
- 1 Bulan	4.712.363	28.341	33,00	11.903	2,29		*- 1 month*
- 3 Bulan	3.752.810	22.570	31,00	3.062	2,15		*- 3 months*
- 6 Bulan	792.079	4.764	31,00	1.527	2,15		*- 6 months*
- 12 Bulan	4.289.222	25.796	31,00	8.547	2,15		*- 12 months*
5 Pembiayaan yang Diterima	500	3	10,00	-	0,69		*Received Financing*
Jumlah	**25.083.566**	**150.856**		**32.416**			***Total***

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Report on Sources and Distribution of Zakat and Wakaf Funds

Sumber dana zakat Bank berasal dari internal dan eksternal Bank, yang berasal dari pegawai serta Nasabah dan umum. Dana zakat yang terkumpul akan disalurkan kepada para mustahik zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) agar penyaluran zakat dilakukan dengan tepat sasaran. Selama tahun 2022 BRK Syariah menerima dana zakat sebesar Rp336.086.634 dan telah menyalurkan sebesar Rp335.595.504.

BRK Syariah telah merancang sistem pengelolaan dana wakaf. Sebagaimana dana zakat, sumber dana wakaf yang diterima Bank juga berasal dari internal Bank dan eksternal Bank, yang berasal dari pegawai serta Nasabah dan umum. Dana wakaf yang terkumpul akan dikelola secara profesional oleh Badan Wakaf Indonesia dan Nadzir Lain yang telah bekerja sama dengan Bank untuk penyaluran dan pengelolaan wakaf. Namun selama tahun 2022 Bank belum menerima dana wakaf. Hal ini karena BRK Syariah masih di masa awal transformasi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

The sources of the Bank's zakat funds come from the Bank's internal and external sources, which come from employees as well as customers and the general public. The collected zakat funds will be distributed to mustahik zakat through the Amil Zakat Institution (LAZ) and the Amil Zakat Agency (BAZ) so that zakat distribution is carried out on target. During 2022 BRK Syariah received zakat funds of IDR 336,086,634 and distributed IDR 335,595,504.

BRK Syariah has designed a waqf fund management system. As with zakat funds, the sources of waqf funds received by the Bank also come from the Bank's internal and external Banks, which come from employees as well as customers and the general public. The waqf funds collected will be professionally managed by the Indonesian Waqf Board and Other Nadzirs who have collaborated with the Bank for the distribution and management of waqf. However, during 2022 the Bank has not received waqf funds. This is because BRK Syariah is still in the early stages of its transformation from a Conventional Commercial Bank to an Islamic Commercial Bank.

Tabel Sumber dan Penyaluran Dana Zakat (dalam Rupiah penuh)
Table of Sources and Distribution of Zakat Funds (in full Rupiah)

Uraian	2022	*Description*
Sumber Dana Zakat:		*Sources of Zakat Funds:*
Internal Bank	0	*Internal Bank*
Eksternal Bank		*External Banks*
Pegawai	335.595.504	*Employee*
Nasabah dan Umum	491.130	*Customers and General*
Jumlah Dana Zakat yang Diterima	**336.086.634**	***Amount of Zakat Funds Received***
Penyaluran Dana Zakat:		*Distribution of Zakat Funds:*
Disalurkan ke Lembaga Lain	(335.595.504)	*Forwarded to Other Institutions*
(Penurunan)/Kenaikan Dana Zakat	491.130	*(Decrease)/Increase in Zakat Funds*
Saldo Awal Dana Zakat	0	*Zakat Fund Initial Balance*
Saldo Akhir Dana Zakat	**491.130**	***Final Balance of Zakat Funds***

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Report of The Source and Use of Virtue Funds

Sumber dana kebajikan Bank terdiri dari infak dan sedekah, denda, serta pendapatan non-halal dan lainnya. Selama tahun 2022, Bank menerima dana kebajikan sebesar Rp663.334.475 yang berasal dari denda sebesar Rp520.520.839 dan dari pendapatan non-halal sebesar Rp142.781.573. Dana kebajikan ini disalurkan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp145.000.000.

The source of the Bank's benevolent funds consists of infaq and alms, fines, as well as non-halal and other income. During 2022, the Bank received Rp. 663,334,475 in benevolence funds originating from fines of Rp. 520,520,839 and from non-halal income of Rp. 142,781,573. This benevolence fund is channeled in the form of a donation of IDR 145,000,000.

Tabel Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (dalam jutaan Rupiah)
Table of Sources and Use of Virtue Funds (In Millions of Rupiah)

Uraian	2022	*Description*
Sumber Dana Kebajikan:		*Benevolent Fund Sources:*
Infaq dan *Shadaqah*	32.063	*Infaq and Sadaqah*
Denda	520.520.839	*Fine*
Pendapatan non Halal	142.781.573	*Non-Halal income*
Jumlah Penerimaan Dana Kebajikan	**663.334.475**	***Total Acceptance of Virtue Funds***
Penggunaan Dana Kebajikan:		*Use of Benevolent Funds:*
Sumbangan	(145.000.000)	*Donations*
(Penurunan)/Kenaikan Dana Kebajikan	518.334.475	*(Decrease)/Increase in Virtue Funds*
Saldo Awal Dana Kebajikan	0	*Initial Balance of Virtue Fund*
Saldo Akhir Dana Kebajikan	**518.334.475**	***Virtue Fund Final Balance***

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Information On Material Transactions That Contain Conflict of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties

Defenisi transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan telah ditetapkan dalam POJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan Afiliasi dari perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali. Sedangkan Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

The definitions of affiliate transactions and conflict of interest transactions have been stipulated in POJK Number: 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. Affiliated Transactions are any activities and/or transactions carried out by a company with Affiliates of companies or Affiliates of members of the Board of Directors, members of the board of commissioners, Main Shareholders or Controlling Shareholders, including any activities and/or transactions carried out by companies or controlled companies for interests of Affiliates from the company or Affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, or Controlling Shareholders. Whereas Conflict of Interest Transactions are transactions carried out by companies or controlled companies with each party, both Affiliates and parties other than Affiliates that contain conflicts of interest. Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Main Shareholders or Controlling Shareholders which can be detrimental to the said public company.

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BRK Syariah tidak terlepas dari interaksi antar individu di lingkungan Bank maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bahkan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Bank. Untuk itulah BRK Syariah senantiasa berkomitmen mematuhi POJK Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BRK Syariah telah menetapkan SK Direksi Nomor 169/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan transaksi afiliasi maupun yang mengandung benturan kepentingan. Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan sosialisasi pada jaringan kantor Bank mengenai kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.

Affiliate Transaction and Conflict of Interest Policy

In carrying out its business activities, BRK Syariah cannot be separated from interactions between individuals within the Bank and with other parties, where there is a potential conflict of interest that may be unavoidable between one party and another, so that it can affect the decision-making process and even the performance of the results of the decision. which can be detrimental to the Bank. For this reason, BRK Syariah is always committed to complying with POJK Number: 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest. With the issuance of these provisions, BRK Syariah has issued Board of Directors Decree Number 169/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Conflict of Interest in ensuring the appropriateness of the implementation of affiliated transactions as well as those containing conflicts of interest. During 2022, BRK Syariah has carried out outreach to the Bank's office network regarding this policy carried out by the Compliance Division.

Mekanisme *Review* dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi kondisi benturan kepentingan maka sesuai kebijakan tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Mechanism of Review and Approval of Affiliated Transactions and Conflicts of Interest

In the event of a conflict of interest, according to the policy regarding the Conflict of Interest Guidelines, BRK Syariah employees will do the following:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Bank harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat Benturan Kepentingan. Namun, apabila keputusan masih tetap akan diambil, maka pihak yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
2. Di dalam setiap risalah rapat atau keputusan Bank yang dibuat oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Bank, agar dinyatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan rapat atau keputusan yang dibuat oleh pejabat dan pengurus Bank tersebut telah memuat ada atau tidaknya benturan kepentingan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung benturan kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Bank yang tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Bank memiliki benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Bank lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.
4. Dalam hal insan Bank berada di dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan harus menarik diri dan dilarang ikut dalam pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan tersebut.
5. Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh pegawai/pejabat/pengurus yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

1. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Bank Officers must avoid making decisions in circumstances where there is a conflict of interest. However, if a decision is still to be made, the party experiencing a conflict of interest must continue to prioritize the economic interests of the bank and prevent the bank from losses that may arise/possibility of reducing bank profits and disclose the condition of the conflict of interest in every decision.

2. In every minutes of meetings or decisions made by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Bank officials, it is necessary to state that the decisions made at the meeting or decisions made by the officers and management of the Bank contain whether or not there is a conflict of interest.

3. Any policies and decisions that contain a conflict of interest will be decided by Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors, and Bank Officers who do not have conflicts of interest. In the event that Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Bank Officers have a conflict of interest, decision making is transferred to Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and other Bank Officers who do not have a conflict of interest.
4. In the event that Bank personnel are in a situation of conflict of interest, the person concerned must withdraw and be prohibited from participating in the discussion/proposal and/or decision-making process.
5. If a discussion/proposal/decision is the absolute authority of the person concerned and is still within the limits of authority/transaction limit of his position and the process if transferred will hinder the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the employee/officer/management concerned in a professional manner accompanied by justifiable reasons while taking into account the applicable provisions.

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Name of Transaction Parties and Nature of Relationship

In normal business activities, the Bank conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been carried out under mutually agreed policies and terms.

No.	Pihak – Pihak Berelasi *Related Parties*	Sifat Hubungan Istimewa *Nature of Special Relationship*	Transaksi *Transaction*
1	Provinsi Riau *Riau Province*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*)
2	Kabupaten Bengkalis *Bengkalis Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)

No.	Pihak – Pihak Berelasi *Related Parties*	Sifat Hubungan Istimewa *Nature of Special Relationship*	Transaksi *Transaction*
3	Kabupaten Siak Sri Indrapura *Siak Sri Indrapura Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
4	Kabupaten Pelalawan *Pelalawan Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
5	Kabupaten Indragiri Hulu *Indragiri Hulu Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
6	Kabupaten Indragiri Hilir *Indragiri Hilir Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
7	Kota Pekanbaru *Pekanbaru City*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
8	Kota Dumai *Dumai City*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
9	Kabupaten Bintan *Bintan Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
10	Kabupaten Rokan Hilir *Rokan Hilir District*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*time deposit*).
11	Kabupaten Kuantan Singingi *Kuantan Singingi Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
12	Kota Tanjung Pinang *Tanjung Pinang City*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
13	Kabupaten Kep. Meranti *Meranti Islands Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
14	Provinsi Kepulauan Riau *Riau Islands Province*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
15	Kabupaten Kampar *Kampar Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
16	Kabupaten Lingga *Lingga Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
17	Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
18	Kota Batam *Batam city*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Simpanan Deposito (*time deposit*)
19	Kabupaten Natuna *Natuna Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
20	Kabupaten Rokan Hulu *Rokan Hulu Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
21	Kabupaten Kepulauan Anambas *Anambas Islands Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
22	Karyawan Kunci	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Tabungan (*saving*), deposito (*time deposit*) dan Kredit yang diberikan (*Loans*)
23	PD BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Tabungan (*saving*), Simpanan Giro (*current account*)
24	PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Giro (*current account*), Simpanan Deposito (*Time deposits*)
25	PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Giro (*current account*), Simpanan Tabungan (*saving*) dan Simpanan Deposito (*Time deposits*)
26	Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Giro (*current account*)
27	PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Giro (*current account*) dan Simpanan Deposito (*Time deposits*)
28	PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Tabungan (*saving*)
29	PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Giro (*current account*) dan Pinjaman (*Loan*)
30	PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Tabungan (*saving*), Simpanan Giro (*current account*)
31	BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan Giro (*current account*)

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan perbankan Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Realization of Related Party Transactions

In banking activities, the Bank conducts transactions with related parties as follows:

Uraian	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	21 Agustus 2022 *August 21, 2022*	*Description*
ASET			***ASSET***
Pembiayaan yang diberikan			*Financing provided*
Karyawan kunci	1.202.690.047	1.449.446.115	*Key management*
% terhadap jumlah aset	0,0043%	0,0047%	*% with compare to total asset*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Simpanan *wadiah*			*Deposits wadiah*
Simpanan dari nasabah	48.778.362.086	22.434.057.741	*Deposits from customer liabilities*
% terhadap jumlah liabilitas	0,1740%	0,0893%	*% with compare to total*
Simpanan *mudharabah*			*Deposits mudharabah*
Simpanan dari nasabah dan Bank lain	13.346.359.830.783	4.002.752.728.948	*Deposits from customer and other Bank*
% terhadap jumlah liabilitas	47,6138%	15,9354%	*% with compare total liabilities*

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah, dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama. Simpanan dari Bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Deposits from these customers represent deposits from key management, regional governments, and companies whose shares are owned by the same ultimate shareholder. Deposits from other banks represent deposits from rural banks (BPR) whose shares are owned by the same ultimate shareholder.

PERJANJIAN DAN PERIKATAN
Significan Agreements

Selama tahun 2022 BRK Syariah melakukan beberapa perjanjian dan perikatan dengan pihak lain. Perikatan ini bertujuan untuk memperluas jaringan dan keterhubungan serta meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah dan *stakeholder*, antara lain:

1. Pemanfaatan Fasilitas *Customisation* Kartu Kredit
   Berdasarkan perjanjian No.01/696-PKS/DIR dan No.049/PKS/2021 tanggal 23 September 2021, PT Bank Riau Kepri (Pihak Kedua) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Pertama) melakukan kerjasama Pemanfaatan Fasilitas *Customisation* BSI Hasanah Card, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 23 September 2021 sampai dengan 23 September 2023. Para pihak sepakat dengan jumlah *annual fee*.
2. Perjanjian Penyelenggaraan Anjungan Tunai Mandiri/ ATM Bersama
   Pada tanggal 3 Oktober 2003 Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan perjanjian No.30/DIR/BPDR/X/2003. Perjanjian tersebut berlaku selama 36 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sepanjang tidak ada perubahan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama pada lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

During 2022 BRK Syariah entered into several agreements and engagements with other parties. This engagement aims to expand the network and connectivity as well as improve service quality to customers and stakeholders, including:

1. *Utilization of Credit Card Customisation Facility*
   Based on agreements No.01/696-PKS/DIR and No.049/PKS/2021 dated September 23, 2021, PT Bank Riau Kepri (Second Party) and PT Bank Syariah Indonesia Tbk (First Party). collaborating on the Utilization of BSI Hasanah Card Customisation Facility, valid for a period of two years starting from 23-09-2021 to 23-09-2023. The parties agree on the amount of the annual fee
2. *Joint Automatic Teller Machine/ ATM Agreement*
   On October 3, 2003, the Bank entered into an agreement for the implementation of ATM Bersama with PT Artajasa Pembayaran Elektronis with agreement No.30/DIR/BPDR/X/2003. The agreement is valid for 36 months and will be automatically renewed annually as long as there is no change in the agreement. Under the agreement, the Bank will benefit from the ATM Bersama network at more than 31,000 ATMs throughout Indonesia.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Event After The End of Reporting Period

Pada tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut UU No 11 tentang Cipta Kerja. Perpu No 2 tahun 2022 sebagian telah diubah dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah diundangkan pada 12 Januari 2023.

Atas perubahan peraturan ini Manajemen masih melakukan evaluasi terhadap perubahan ini dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation i n Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation which repealed Law No. 11 concerning Job Creation. Perpu No. 2 of 2022 has been partially amended by Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK) which was promulgated on January 12, 2023.

Regarding the changes to this Regulation, Management is still evaluating these changes and their impact on the financial statements.

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK

Changes in Legislation and its Impact on Bank Performance

BRK Syariah mengedepankan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2022 terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh regulator. Berikut informasi perubahan peraturan yang berpengaruh terhadap Bank beserta dampak perubahan dan informasi penyesuaian yang dilakukan, antara lain:

BRK Syariah prioritizes compliance with applicable laws and regulations. During 2022 there were changes in laws and regulations issued by the regulator. The following is information on regulatory changes that affect the Bank along with the impact of changes and information on adjustments made, among others:

No	Perubahan Peraturan Perundang-undangan *Changes in Laws and Regulations*	Dampak Terhadap Bank *Impact on Banks*
1	UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan Perpu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Law No 11 of 2020 concerning Job Creation which was revoked by Perpu No 2 of 2022 concerning Job Creation.*	Dampak dari perubahan peraturan ini adalah Bank harus membentuk kekurangan beban imbalan pasca kerja tahun 2022 sebesar Rp8,27 miliar. Hal ini mengakibatkan penurunan laba sebelum pajak tahun berjalan. *The impact of this regulation change is that the Bank must form a shortfall in post-employment benefits expense in 2022 amounting to Rp8.27 billion. This resulted in a decrease in profit before tax for the year.*

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT REVIEW

MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Setelah resmi menjadi bank Syariah pada tanggal 22 Agustus 2022, penggunaan istilah pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) diganti menjadi Manajemen Sumber Daya Insani (SDI) mengacu pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) No. 001/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

After officially becoming a Sharia bank on August 22, 2022, the use of the term Human Resources (HR) management was changed to Human Resource Management (SDI) referring to the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) No. 001/KEPDIR/2022 dated August 22 2022 Concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT Regional Development Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kebijakan dan Strategi Manajemen SDI

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Sumber Daya Insani adalah sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyusun strategi Rencana Kerja dan Anggaran Unit (RKAU) Divisi Manajemen Sumber Daya Insani.
2. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan dan mengadministrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAU Divisi Manajemen Sumber Daya Insani sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi :
   a. Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran serta Strategi Bisnis Divisi Manajemen SDI dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI).
   b. Menyusun dan pengkinian peraturan perusahaan yang berkaitan dengan Kepegawaian yang berpedoman kepada Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
   c. Menyusun program Kompensasi dan *Benefit* Pengurus serta Pegawai Bank.
   d. Penyelenggaraan, monitoring dan pengendalian seluruh Program pengembangan Pegawai melalui program magang, pendidikan dan pelatihan baik melalui *inhouse,* publik maupun pembelajaran elektronik.
   e. Memastikan pengelolaan *database* kepegawaian dari Pengurus dan Pegawai Bank, termasuk pengelolaan laporan Pejabat Eksekutif dan Pengurus Bank kepada Otoritas.
   f. Penanggung jawab pengelolaan *Learning Center* dan Perpustakaan Bank.
   g. Memastikan pengelolaan *website e-recruitment* Bank.
   h. Memastikan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal dalam pengelolaan *learning center.*
   i. Bertanggungjawab dalam penyediaan dan pengembangan SDI yang kompeten guna menunjang pencapaian target kinerja unit bisnis.
   j. Bertanggungjawab dalam program pengembangan dan kaderisasi Pegawai dan pengisian personel sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
   k. Menjaga hubungan baik antara Pegawai, Manajemen, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

HR Management Policies and Strategies

The duties and responsibilities of the Human Resources Management Division are as follows:

1. *Organize and develop a strategy for the Work Plan and Budget Unit (RKAU) of the Human Resources Management Division.*
2. *Organizing, monitoring, controlling and administering as well as making reports on the implementation of the Human Resources Management Division's RKAU in connection with its duties and other activities which include:*
   a. *Describes the Work Plan and Budget as well as the Business Strategy of the HR Management Division in the form of Key Performance Indicators (KPI).*
   b. *Compile and update company regulations related to employment that are guided by the applicable regulations and laws.*
   c. *Arrange Compensation and Benefit programs for Management and Bank Employees.*
   d. *Organizing, monitoring and controlling all employee development programs through apprenticeship, education and training programs both through in-house, public and electronic learning.*
   e. *Ensuring the management of the personnel database of the Bank's Management and Employees, including the management of reports of Executive Officers and Bank Management to the Authorities.*
   f. *Responsible for managing the Learning Center and Bank Library.*
   g. *Ensuring the management of the Bank's e-recruitment website.*
   h. *Ensuring the implementation of cooperation and partnership with external parties in managing the learning center.*
   i. *Responsible for the provision and development of competent human resources to support the achievement of business unit performance targets.*
   j. *Responsible for employee development and regeneration programs and personnel filling according to the Organizational Structure and Working Procedures.*
   k. *Maintain good relations between employees, management, government and other parties concerned.*

l. Memastikan proses mediasi terhadap permasalahan yang terjadi antara Pegawai dan Bank.
m. Memberikan *reward* dan *punishment* untuk dan atas nama Direksi kepada pegawai.
n. *Review* Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.
o. Memastikan monitoring dan evaluasi terhadap program pensiun untuk Pengurus dan Pegawai baik yang diselenggarakan oleh Bank maupun oleh pihak lainnya.

3. Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu Instruksi, Ketetapan, Keputusan dan Prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan Pegawai baik di lingkungan Divisi Manajemen SDI maupun Bank secara keseluruhan.
4. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/*workshop*.
5. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
6. Menetapkan satu orang Pegawai yang juga berfungsi sebagai *support assistance* yang bertugas antara lain sebagai administrator, pemantauan SLA dan program kerja Divisi Manajemen SDI.
7. Penetapan uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai di Divisi masing-masing.
8. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI).
9. Dalam hal Pemimpin Divisi berhalangan, baik tetap maupun sementara, maka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Pemimpin Divisi akan dilaksanakan oleh minimal dua orang Pemimpin bagian/pejabat setingkat. Apabila di dalam suatu unit kerja (Divisi) hanya terdapat satu orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat maka akan dilaksanakan oleh Pemimpin Bagian/pejabat setingkat tersebut.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Manajemen SDI.

Adapun struktur organisasi pengelola Manajemen SDI adalah sebagai berikut:

l. Ensuring the mediation process for problems that occur between employees and the Bank.
m. Provide reward and punishment for and on behalf of the Board of Directors to employees.
n. Review of the Organizational Structure and Working Procedures of the Bank in accordance with the development of the Bank's business.
o. Ensuring monitoring and evaluation of pension programs for Management and Employees both organized by the Bank and by other parties.

3. Formulate policies and directives of the Board of Directors in written Instructions, Decrees, Decisions and Procedures as guidelines for staff and employees both within the HR Management Division and the Bank as a whole.
4. Train/guide his subordinates to improve skills, achievement and quality of employees, including proposing training/workshops.
5. Provide feedback on the findings of internal and external inspections and follow up the necessary improvements.
6. Appoint one employee who also functions as support assistance whose duties include administrator, SLA monitoring and the work program of the HR Management Division.
7. Determination of basic job descriptions for all employees in their respective divisions.
8. Determination of work plans for subordinates as outlined in the form of Individual Performance Targets (SKI).
9. In the event that the Division Head is absent, either permanently or temporarily, then the implementation of the duties, responsibilities and functions of the Division Leader will be carried out by a minimum of two division leaders/officials of the same level. If in a work unit (Division) there is only one Section Leader/official at the same level, then the Section Leader/official at that level will be carried out.
10. Carry out other tasks given by the Board of Directors, especially with regard to the implementation of the duties of the HR Management Division.

The organizational structure for managing HR Management is as follows:

Struktur Organisasi Manajemen SDI BRK Syariah
BRK Syariah HR Management Organizational Structure

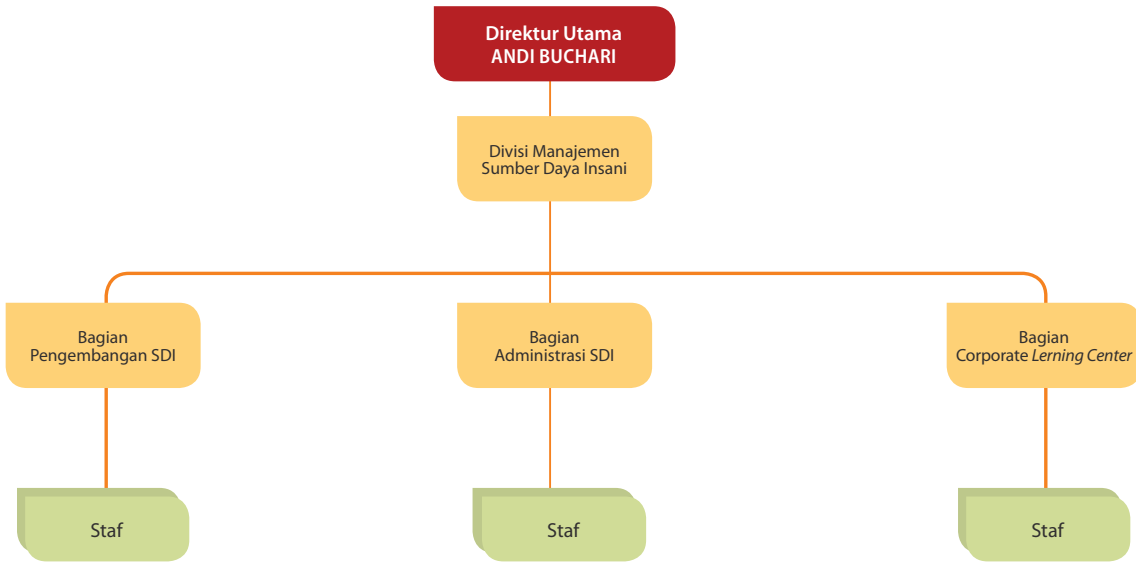

Sedangkan fungsi di bawah Divisi Manajemen SDI mencakup:
1. Pengembangan Sumber Daya Insani
2. Administrasi Sumber Daya Insani
3. *Corporate Learning Center*

Sebagai upaya untuk mendukung perkembangan organisasi dan bisnis menjadi bank syariah, Bank terus bertansformasi memperkuat kapabilitas organisasi dengan memfokuskan diri sesuai dengan Visi dan Misi Bank dengan 3(tiga) fokus utama Bank yaitu Konversi, Kinerja dan Kultur. Strategi 3K yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan SDI Bank yang selanjutnya disebut Insan BRK Syariah (Insan Bank) adalah:

1. Konversi

Sepanjang proses konversi Bank terus meningkatkan pemahaman seluruh SDI tentang dasar-dasar perbankan syariah, pasca konversi kehadiran Bank memberikan warna baru bagi industri perbankan syariah baik lokal maupun nasional, dengan terus mengembangkan program-program pembelajaran bagi insan Bank untuk terus meningkatkan pemahaman perbankan syariah pasca konversi. Terutama dalam meningkatkan kompetensi Insan Bank dengan membangun berbagai tools berbasis teknologi digital untuk menunjang produktifitas Insan Bank melalui e-*Learning* (BRK Syariah *Academy*). Selain itu, pengembangan struktur organisasi terus dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bank, serta mempercepat proses bisnis.

Meanwhile, the functions under the HR Management Division include:
1. *Human Resource Development*
2. *Human Resources Administration*
3. *Corporate Learning Center*

As an effort to support organizational and business development to become an Islamic bank, the Bank continues to transform to strengthen organizational capabilities by focusing on the Bank's Vision and Mission with the Bank's 3 (three) main focuses, namely Conversion, Performance and Culture. The 3K strategies that are directly related to the development of the Bank's HR, hereinafter referred to as Sharia BRK Personnel (Bank Personnel) are:

1. Conversion

Throughout the conversion process the Bank continues to increase the understanding of all HR on the basics of Islamic banking, post-conversion the presence of the Bank provides a new color for the Islamic banking industry both locally and nationally, by continuing to develop learning programs for Bank personnel to continue to increase understanding of Islamic banking post-conversion. Especially in increasing the competence of Bank Personnel by building various tools based on digital technology to support the productivity of Bank Personnel through e-Learning (BRK Syariah Academy). In addition, the development of the organizational structure continues to be carried out to improve and adapt to the Bank's business needs, as well as accelerate business processes.

2. Kinerja

Dalam rangka mendukung kinerja Bank guna melakukan akselerasi bisnis secara berkelanjutan, BRK Syariah melakukan pemenuhan pegawai melalui sumber internal dengan program PCP Syariah (Penerimaan Calon Pimpinan) khusus ditempatkan sebagai *Account Officer* pada unit kantor Bank sebanyak 35 orang. Selain itu, Bank juga telah memfokuskan pengalihan pegawai dari unit *support* kepada unit bisnis dengan jumlah komposisi 57,90% pegawai berada di unit Bisnis dari total jumlah pegawai secara keseluruhan.

2. Performance

In order to support the Bank's performance in order to accelerate business in a sustainable manner, BRK Syariah fulfilled employees through internal sources with the Sharia PCP program (Reception of Prospective Leaders) specifically placed as Account Officers in the Bank's office units of 35 people. In addition, the Bank has also focused on transferring employees from support units to business units with a total composition of 57.90% of employees in the business units of the total number of employees as a whole.

3. Kultur

Perubahan proses bisnis Bank menjadi syariah sekaligus diikuti dengan dimulainya proses transformasi SDI Bank terhadap budaya kerja Perusahaan untuk dijalankan secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen agar tercipta perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi budaya kerja Bank yang selaras dengan nilai-nilai utama (*core value*) yang telah ditetapkan. *Core value i-share* (*Integrity, Synergy, Honesty, Adaptive, Respect* dan *Excellence*). Budaya berbagi, memberi dan memenuhi kewajiban sebelum menerima, meminta dan menuntut hak. Inilah konsep utama dalam pengembangan ekonomi umat. Insan Bank merupakan insan yang memiliki *spirit* berbagi (*sharing*) yang baik sebagai modal utama dalam menampilkan kinerja terbaik yang bernilai kontributif dalam memajukan Bank. BRK Syariah terus melakukan internalisasi budaya Perusahaan dengan melibatkan seluruh jajaran manajemen dan seluruh Insan Bank.

3. Culture

Changes in the Bank's business processes to sharia were also followed by the start of the Bank's HR transformation process towards the Company's work culture to be carried out seriously, consistently and consequently in order to create behavior in daily life and become a Bank work culture that is aligned with the main values (core value) that has been set. Core values i-share (Integrity, Synergy, Honesty, Adaptive, Respect and Excellence). The culture of sharing, giving and fulfilling obligations before receiving, asking for and demanding rights. This is the main concept in the development of the people's economy. Bank personnel are people who have a good sharing spirit as the main capital in showing the best performance that has a contributive value in advancing the Bank. BRK Syariah continues to internalize the corporate culture by involving all levels of management and all Bank personnel.

Roadmap Manajemen SDI

BRK Syariah telah mengembangkan strategi dan kebijakan Manajemen SDI jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis Bank, dinamika sektor bank pembangunan daerah dan maupun tuntutan pasar. Sistem pengembangan Manajemen SDI BRK Syariah dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis Bank guna mencapai Visi untuk: "Mewujudkan Bank Syariah yang Inklusif, *Resilient*, dan Modern sebagai Pilihan Utama Masyarakat yang Berkontribusi Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan".

HR Management Roadmap

BRK Syariah has developed a long-term HR Management strategy and policy to support the Bank's business development plan, the dynamics of the regional development bank sector and market demands. The BRK Syariah HR Management development system is developed in accordance with and in line with the Bank's business strategy in order to achieve the Vision to: "Create an Inclusive, Resilient and Modern Sharia Bank as the Community's First Choice that Contributes Significantly to Sustainable Regional Development".

Kebijakan Rekrutmen

Pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan unsur suku, agama, ras, golongan, *gender*, atau kondisi fisik untuk berkontribusi di BRK Syariah. Kandidat pegawai diseleksi berdasarkan kriteria sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam level jabatan terkait. Selain itu, untuk menjaga independensi, proses penerimaan pegawai dibantu oleh pihak ketiga yang dilakukan secara *online* melalui sistem *e-Recruitment*.

Recruitment Policy

Recruitment is carried out openly by providing equal opportunities to all people regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition to contribute to BRK Syariah. Employee candidates are selected based on criteria in accordance with the qualifications and competencies required at the relevant position level. In addition, to maintain independence, the hiring process is assisted by a third party which is carried out online through the e-Recruitment system.

Tabel Rekrutmen BRK Syariah Tahun 2020-2022
Table of BRK Syariah Recruitment for 2020-2022

Jabatan	2022	2021	2020	*Position*
Pegawai Tetap	0	-	-	*Permanent employee*
AO	32	13	-	*AO*
Funding Officer	10	2	1	*Funding Officer*
Teller	40	46	6	*Tellers*
Customer Service	35	21	9	*Customer Service*
Customer Service ULS	0	2	-	*ULS Customer Service*
Administrasi	19	2	9	*Administration*
Jumlah	**136**	**86**	**25**	***Amount***

Turnover

Selama tahun 2022 terdapat 113 (seratus tiga belas) pegawai BRK Syariah yang *turnover* dengan rincian 7 (tujuh) Pegawai pensiun, 87 (delapan puluh tujuh) *Resign*, 7 (tujuh) PHK dan 4 (empat) meninggal dunia serta 8 (delapan) habis kontrak.

Turnovers

During 2022 there were 113 (one hundred and thirteen) BRK Syariah employees who turned over with details of 7 (seven) retired employees, 87 (eighty seven) resigned, 7 (seven) laid off and 4 (four) died and 8 (eight) expired contract.

Tabel *Turnover* BRK Syariah Tahun 2020-2022
BRK Syariah Turnover Table for 2020-2022

Tahun *Year*	Pensiun *Pension*	Mengundurkan Diri *Resign*	PHK *layoffs*	Meninggal *Die*	Habis Kontrak *Contract ends*	Jumlah *Amount*
2020	17	35	12	2	4	70
2021	10	59	5	5	1	80
2022	7	87	7	4	8	113

Sistem Manajemen Kinerja

BRK Syariah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator* (KPI) untuk menilai kinerja unit kantor setiap triwulan atau tahunan. Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja pegawai setiap setahun sekali. Penilaian SKI akan membimbing para pegawai dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha BRK Syariah serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai berpedoman pada Keputusan Direksi No.10/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Tahapan Sistem Manajemen Kinerja pegawai dilakukan sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai membuat penilaian tahunan dengan menggunakan formulir lembaran penilaian SKI sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan dan mengisi *form job description* yang memuat pekerjaan utama dan tambahan masing-masing pegawai yang ditandatangani dan disetujui oleh atasan tertinggi di masing-masing unit kerja.

Performance Management System

BRK Syariah has an employee performance appraisal system that is related to the respective work unit assessment system, namely in the form of a Key Performance Indicator (KPI) to assess the performance of office units quarterly or annually. Individual Performance Targets (SKI) to measure employee performance once a year. The SKI assessment will guide employees in each work unit in achieving the unit's goals within the framework of achieving the BRK Syariah business goals and provide a more objective assessment of performance and potential.

The implementation of employee performance evaluation is guided by Directors Decree No.10/KEPDIR/2019 dated 27 February 2019 concerning the Company's Employee Manual (BPP) for PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. The stages of the employee Performance Management System are carried out as follows:

1. *All employees make an annual assessment using the SKI assessment sheet form in accordance with the predetermined form and fill out the job description form which contains the main and additional work of each employee signed and approved by the highest supervisor in each work unit.*

2. Proses kegiatan tersebut diselenggarakan pada:
   a. Awal tahun
   b. Akhir tahun
3. Dalam proses penilaian terlibat tiga pihak, yaitu:
   a. Pegawai yang dinilai (Pihak I).
   b. Atasan langsung pegawai yang dinilai (Pihak II), yaitu pejabat yang melakukan penilaian terhadap pegawai yang bersangkutan.
   c. Atasan berikutnya (Pihak III), yaitu atasan langsung Pihak II yang dalam hal ini bertindak sebagai pemutus.

2. The activity process is held on:
   a. The beginning of the year
   b. End of year
3. Three parties are involved in the assessment process, namely:
   a. Appraised employee (Party I).
   b. The immediate supervisor of the employee being assessed (Party II), namely the official who evaluates the employee concerned.
   c. The next superior (Party III), namely the direct supervisor of Party II, who in this case acts as a disconnector.

Program Pengembangan dan Kompetensi Pegawai

Pengembangan kualitas dan kompetensi Pegawai BRK Syariah dilaksanakan sesuai dengan pedoman *blue print* edukasi yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Employee Competency and Development Program

The development of the quality and competency of BRK Syariah Employees is carried out in accordance with the educational blue print guidelines which have been formulated as follows:

Kesetaraan Kesempatan Kerja dan Manajemen Karir Pegawai

Untuk pengembangan kompetensi pegawai, BRK Syariah selalu berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya agar dapat mengembangkan potensi dirinya guna menunjang karir di perusahaan. Bank membuat kebijakan design ketentuan promosi, dimana sistem atau metode yang memformulasikan indikator-indikator dari parameter yang terukur dalam rangka pemilihan kandidat pegawai yang memiliki *high performance* dan *high qualification* untuk dipromosikan.

Sistem pengembangan karir di BRK Syariah dikembangkan dalam 4 (empat) tahapan yaitu: standar kompetensi, *mapping* potensi pegawai, *career planning* dan *development program*.

Equal Employment Opportunity and Employee Career Management

For the development of employee competencies, BRK Syariah is always committed to providing equal opportunities to all employees so that they can develop their potential to support careers in the company. The Bank makes a design policy for promotion provisions, in which a system or method that formulates indicators from measurable parameters in the context of selecting employee candidates who have high performance and high qualifications to be promoted.

The career development system at BRK Syariah is developed in 4 (four) stages, namely: competency standards, mapping of employee potential, career planning and program development.

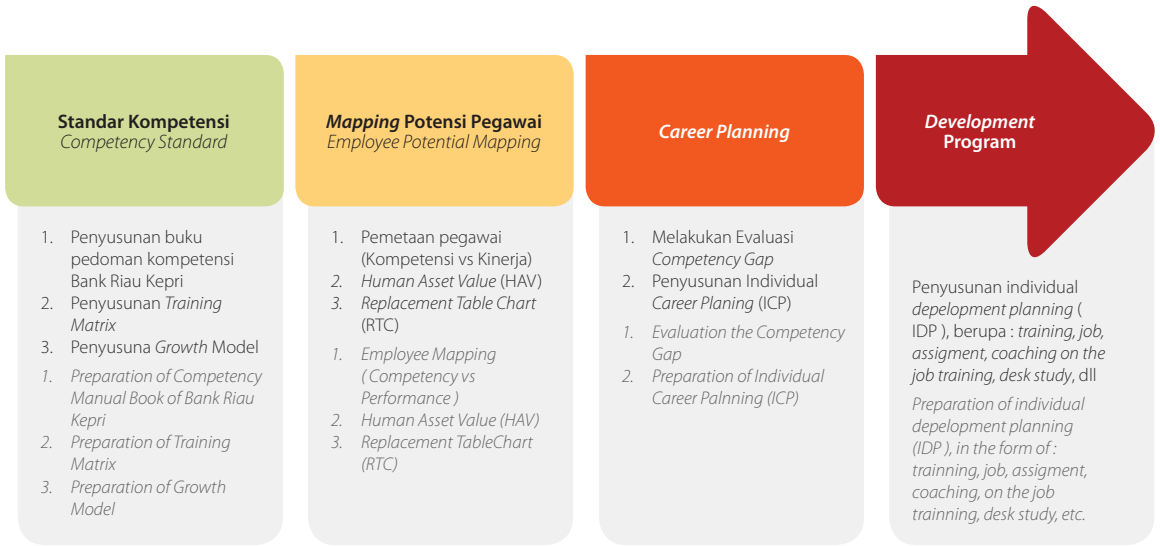

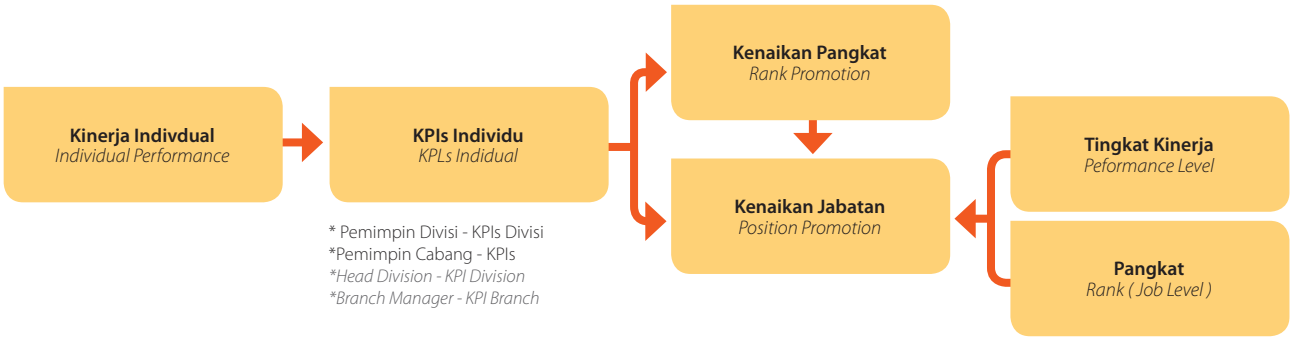

Pengembangan Kompetensi SDI

BRK Syariah memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja Bank. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, *workshop* dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan BRK Syariah.

Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan SDI BRK Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

HR Competency Development

BRK Syariah provides equal opportunities for employees to continue to develop in line with the development of the Bank's performance. The HR development program is carried out through career education, professional training and certification, skills, as well as various courses, training, outreach, seminars, workshops and management and technical training tailored to the needs of BRK Syariah.

Before determining the training program, a needs assessment is carried out through various stages. The training and development method in the management of BRK Syariah Human Resources training and development is carried out through several stages, namely as follows:

1. Analisis kebutuhan
2. Penetapan Tujuan
3. Pengembangan Metode Pelatihan
4. Pengembangan Materi Pelatihan
5. Pelaksanaan Pelatihan
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya. Disamping itu, dalam rangka melakukan fungsi *coaching & counceling* kepada para pegawai yang memiliki kendala dan masalah dalam pekerjaannya sehari-hari atau masalah dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga agar tidak mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan, BRK Syariah telah membentuk Unit Layanan Konseling sejak tahun 2010.

Tujuan Pelatihan

Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir pegawai itu sendiri. Pegawai akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya saat ini maupun mengantisipasi pengembangan tugas ke depan.

Peserta Pelatihan

Selama tahun 2022, pegawai BRK Syariah telah menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 239 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 5.691 orang yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Needs analysis
2. Goal Setting
3. Development of Training Methods
4. Development of Training Materials
5. Implementation of Training
6. Training Evaluation.

Training assignments focus on specific tasks, jobs, or positions that make a person complete the job. Therefore, training topics are determined by their level of importance. In addition, in order to carry out the coaching & counseling function for employees who have problems and problems in their daily work or problems in personal or household life so as not to affect the performance of the employee concerned, BRK Syariah has established a Counseling Service Unit since 2010.

Training Objectives

Every employee has the same opportunity to get education according to the career needs of the employee himself. Employees will participate in training programs both in order to improve skills in carrying out their current duties and in anticipating the development of future tasks.

Training Participants

During 2022, BRK Syariah employees have organized Education and Training programs of 239 types of education and training activities with a total of 5,691 participants grouped as follows:

Tabel Jumlah Pelatihan dan Peserta BRK Syariah Tahun 2022
Table of the Number of BRK Syariah Training and Participants in 2022

No	Jenis Diklat	Jumlah Pelatihan *Total Training*	Peserta *Participant*	*Type of Training*
1	*Inhouse Training*	162	5537	*In-house Training*
2	Pelatihan Eksternal Dalam Negeri	77	154	*Domestic External Training*
3	Pelatihan Eksternal Luar Negeri	0	0	*Overseas External Training*
	Total	239	5691	*Total*

Tabel Daftar Peserta Pelatihan BRK Syariah Tahun 2022
Table of List of BRK Syariah Training Participants in 2022

No	Jenis Diklat	Inhouse Training *In-house Training*	Pelatihan Ekternal Dalam Negeri *Domestic External Training*	Pelatihan Eksternal Luar Negeri *Overseas External Training*	*Type of Training*
1	Pemimpin Divisi	65	9	0	*Division Leader*
2	Pemimpin Cabang Utama/Setingkat	18	0	0	*Head of Main Branch/Equivalent*
3	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	161	25	0	*Head of Head Office*
4	Pemimpin Cabang	121	1	0	*Branch Leader*
5	Staf Khusus Direksi	12	1	0	*Special Staff of the Board of Directors*
6	Pemimpin Cabang Pembantu	139	1	0	*Sub-Branch Leader*
7	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	22	0	0	*Head of the Main Branch / Equivalent Branch*
8	Pemimpin Setingkat Pincapem	45	3	0	*Pincapem Level Leader*
9	Pemimpin Seksi Setingkat	1789	56	0	*Senior Section Leader*
10	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	1	0	0	*MPP Employees (Retirement Preparation Period)*
11	Pelaksana	670	31	0	*executor*
12	Pegawai *Core* (Teller/CS/FO/RO)	1721	20	0	*Core Employees (Teller/CS/FO/RO)*
13	Lain-lain	773	7	0	*Etc*
	Total	**5.537**	**154**	**0**	***Total***

Biaya Pelatihan

Selama tahun 2022, biaya pegawai untuk pelatihan dan pengembangan mengalami kenaikan sebesar 62,46% menjadi sebesar Rp9.339.951.182 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5.748.964.332.

Training Fees

During 2022, employee costs for training and development increased by 62.46% to IDR 9,339,951,182 million compared to 2021 of IDR 5,748,964,332.

Tabel Biaya Pelatihan Pegawai Tahun 2021- 2022
Table of Employee Training Costs for 2021-2022

No	Jenis Diklat	2022 (Rp)	2021 (Rp)	*Type of Training*
1	*Inhouse Training*	6.569.409.668	4.894.636.037	*In-house Training*
2	Pelatihan Eksternal	2.770.541.514	854.328.295	*External Training*
	Total	**9.339.951.182**	**5.748.964.332**	***Total***

Penilaian Kinerja Pegawai

BRK Syariah telah memiliki standarisasi penilaian kinerja pegawai menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing pegawai. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pegawai.

Employee Performance Assessment

BRK Syariah has standardized employee performance evaluation using a dictionary and balanced scorecard for each position which is known as the Key Performance Indicator (KPI). This assessment greatly influences the career path, promotion, and rotation of each employee. However, this assessment is in the process of improvement and change to provide more fair values for all employees.

Reward and Punishment

Sistem *reward and punishment* dirancang untuk memotivasi pegawai agar dapat mencapai Visi, Misi, tujuan maupun target kinerja BRK Syariah tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian untuk memotivasi individu pegawai agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh Bank. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan pegawai untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang dilarang. Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward,* ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Dalam aktivitas dan operasional bank selama tahun 2022, BRK Syariah telah memberikan *reward and punishment* sebagai berikut:

Reward and Punishment

The reward and punishment system is designed to motivate employees to achieve the Vision, Mission, goals and performance targets of BRK Syariah. Reward is one of the control tools to motivate individual employees to behave as expected by the Bank. Whereas punishment is something that is displeasing to employees to produce a deterrent effect so that they will not commit prohibited actions and mistakes. Forms of punishment include losing a job, not receiving a raise, being removed from the list of employees to be promoted, failure to get rewards, threats of dismissal, and so on.

In bank activities and operations during 2022, BRK Syariah has provided rewards and punishments as follows:

Tabel Jumlah *Reward* Pegawai Tahun 2021-2022
Table of Total Employee Rewards for 2021-2022

Jenis *Rewards*	2022	2021	*Rewards Type*
	Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)	
15 tahun masa bakti	16	111	*15 years of service*
20 tahun masa bakti	7	35	*20 years of service*
25 tahun masa bakti	11	5	*25 years of service*
30 tahun masa bakti	5	0	*30 years of service*
Jumlah	**39**	**151**	***Amount***

Tabel Rekapitulasi Sanksi Pegawai Tahun 2022
Table of Recapitulation of Employee Sanctions for 2022

Kategori Sanksi	Keterangan	2022	2021	*Information*
		Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)	
Ringan	Peringatan Pertama	9	6	*First Warning*
	Peringatan Kedua	5	6	*Second Warning*
	Peringatan Ketiga	5	2	*Third Warning*
	Teguran	-	-	*Reprimand*
Sedang	Pernyataan Tidak Puas	14	1	*Statement of Dissatisfaction*
	Demosi Grade	6	-	*Grade Demotion*
Berat	Pemutusan Hubungan Kerja	4	4	*Work termination*
Jumlah		**43**	**19**	***Amount***

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Pegawai BRK Syariah mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan Kepegawaian sebagaimana diatur pada SK No.093/KEPDIR/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 10/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan peraturan perusahaan BRK Syariah yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.141/PHIJSK-PK/PP/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Kebijakan Remunerasi

The Syariah BRK Employee Remuneration Policy refers to the Personnel Company Handbook as stipulated in SK No.093/KEPDIR/2021 dated 21 December 2021 concerning the Fourth Amendment to the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 10/KEPDIR/2019 dated 27 February 2019 concerning Books PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Company Guidelines (BPP) and Sharia BRK company regulations which have been approved by the Directorate General of Development of Industrial Relations and Social Security for Workers, Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP.141/PHIJSK-PK/PP/I/2017 dated 31 January 2017.

BRK Syariah melalui Divisi Manajemen SDI melaksanakan program kesejahteraan bagi pegawai maupun sistem remunerasi serta kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komponen remunerasi pegawai selama tahun 2022 mencakup antara lain:

1. Pembayaran Jasa Produksi;
2. Pembayaran THR;
3. Pembayaran Bantuan Pakaian Dinas;
4. Pembayaran Uang Kehadiran;
5. Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar;
6. Pembayaran Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan;
7. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun;
8. Uang Santunan Kematian.

Sistem Informasi Manajemen SDI

Sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi baru sejak menjadi Bank Umum Syariah, BRK Syariah telah mencanangkan program pengembangan kualitas SDM secara konsisten melalui sistem Manajemen SDI dalam aplikasi *database* kepegawaian yaitu berupa aplikasi HRIS (*Human Resource Information System*). Sistem aplikasi HRIS ditetapkan dalam SK Direksi Nomor 084/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 mengimplementasikan modul-modul aplikasi yaitu sebagai berikut:

1. *Payroll*/Penggajian
   Berfungsi untuk mengelola data gaji pegawai, dimana modul ini membantu petugas bagian penggajian di Divisi Manajemen SDI untuk menghitung dan mengolah data gaji seluruh pegawai setiap bulannya yang dimulai dari merekap posisi pegawai, menginput komponen potongan gaji, memproses data gaji hingga memposting gaji ke rekening masing-masing pegawai.
2. Cuti
   Memiliki fungsi untuk pengajuan cuti pegawai yang akan diteruskan dan di-*approve* oleh pimpinan pegawai di unit kantornya masing-masing pegawai. Modul aplikasi cuti baru dapat diterapkan setelah implementasi ESS ini.
3. Pelatihan
   Memiliki fungsi untuk merekap seluruh kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada bagian pengembangan SDM yang nantinya akan menambah informasi pelatihan di CV masing-masing pegawai.
4. Absensi
   Berfungsi untuk me-*record* dan mengolah data absen pegawai yang terkoneksi dengan mesin-mesin absen.
5. *Track Record*
   Merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola data *track record* pegawai berupa administrasi sanksi pegawai dan penerimaan penghargaan masa bakti pegawai.
   Perawatan Kesehatan (*Medical Record*)

BRK Syariah through the HR Management Division implements a welfare program for employees as well as a remuneration and compensation system in accordance with the applicable laws and regulations. The components of employee remuneration for 2022 include, among others:

1. *Payment for Production Services;*
2. *THR payment;*
3. *Payment of Service Dress Assistance;*
4. *Payment of Attendance Fee;*
5. *Provision of Annual Leave & Great Leave;*
6. *Payment for Health Care, both Company Guarantee and Health BPJS;*
7. *Payment of 15, 25 and 30 Year Service Period Awards;*
8. *Death Compensation Money.*

SDI Management Information System

In line with efforts to realize the new vision and mission since becoming a Sharia Commercial Bank, BRK Syariah has consistently launched a HR quality development program through the HR Management system in the personnel database application, namely in the form of the HRIS (Human Resource Information System) application. The HRIS application system is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 084/KEPDIR/2017 dated 30 October 2017 implementing application modules, namely as follows:

1. *Payroll / Payroll*
   Serves to manage employee salary data, where this module helps payroll officers in the HR Management Division to calculate and process salary data for all employees every month starting from recapitulating employee positions, inputting salary deduction components, processing salary data to posting salaries to their respective accounts each employee.
2. *vacation*
   Has a function for applying for employee leave which will be forwarded and approved by the employee leadership in the office unit of each employee. New leave application module can be applied after implementation of this ESS.
3. *Training*
   Has a function to recap all training activities carried out in the HR development section which will later add training information to each employee's CV.
4. *Absence*
   Serves to record and process employee absence data connected to absent machines.
5. *Track Record*
   Is a module that functions to manage employee track record data in the form of administration of employee sanctions and receipt of long service awards.
   Health Care (Medical Records)

Rencana Tahun 2023

Mengawali tahun 2023 dimana Bank telah melakukan transformasi perubahan usaha dan bentuk bisnis menjadi bisnis dan usaha berdasarkan prinsip syariah (Bank Umum Syariah) maka BRK Syariah perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan khususnya pada bentuk organisasi, struktur, strategi bisnis serta hal-hal yang menunjang percepatan penyesuaian perubahan bisnis syariah di wilayah kerja Bank. Pada tahap ini BRK Syariah melakukan kajian secara komprehensif terhadap struktur organisasi dengan latar belakang pendekatan analisa yang mengacu pada kesamaan latar belakang perusahaan perbankan yang merupakan *peer group* (bank daerah), *best practice*, besaran skala usaha, portofolio yang dikelola dan jumlah tenaga kerja (SDI) yang setara. Hasil kajian tersebut akan digunakan oleh Bank dalam menjalankan strategi bisnis yang berujung pada pencapaian target yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

Bentuk organisasi yang dirancang merupakan struktur organisasi (SOT) yang menitikberatkan fokus perluasan bisnis di unit Kantor Cabang, yaitu dengan adanya penambahan jenis dan jenjang jabatan pada struktur organisasi serta memisahkan fungsi operasional dan bisnis Cabang dengan menempatkan manager operasional/ bagian operasional untuk fokus mengelola operasional kantor dan *general manager/branch manager*/pemimpin unit kantor untuk fokus mengelola bisnis dengan tetap bertanggungjawab atas jalannya unit kerja yang dipimpin. Sementara itu, perubahan bentuk SOT di Kantor Pusat dengan mempertimbangkan efektifitas dan koordinasi antar unit, Bank melakukan penyederhanaan bentuk SOT yang mengacu pada bank yang memiliki aset lebih besar dengan jumlah Divisi yang lebih sedikit. Diharapkan strategi tersebut dapat meningkatkan performa bisnis Bank serta meningkatkan motivasi pegawai untuk berkarir pada Unit Kantor Cabang.

Untuk mewujudkan strategi bisnis Bank, maka SOT yang dibentuk pun akan didukung dengan SDI yang berkualitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan, terutama berfokus pada bisnis syariah, manajemen *people, asset management* dan kompetensi lain yang relevan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka Bank melakukan pemenuhan kebutuhan SDI dengan cara seleksi jabatan dan rekrutmen. Bank akan melakukan seleksi jabatan untuk seluruh pegawai yang telah disaring berdasarkan kinerja, kompetensi dan *track record* yang tersedia dalam *pool talent management*, dimana kandidat/*successor* bersumber dari pegawai internal. Namun, jika tidak terdapat kandidat yang belum/ tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada jabatan struktural, pemenuhan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan rekrutmen pihak eksternal. Proses seleksi jabatan dapat dilakukan dengan cara mengadakan proses lelang jabatan atau *assessment* yang kemudian akan dinilai oleh assesor internal dan eksternal.

Plans for 2023

Beginning in 2023 where the Bank has transformed business changes and business forms into businesses and businesses based on sharia principles (Sharia Commercial Banks), BRK Syariah needs to carry out reforms, especially in organizational forms, structures, business strategies and matters that support the acceleration of adjustments changes in sharia business in the Bank's work area. At this stage BRK Syariah conducts a comprehensive study of the organizational structure with the background of an analytical approach that refers to the similarity of the background of banking companies which are peer groups (regional banks), best practices, size of business scale, managed portfolio and number of employees (HR).) equivalent. The results of this study will be used by the Bank in carrying out business strategies that will lead to the achievement of targets set by the Bank's management.

The organizational form designed is an organizational structure (SOT) that focuses on expanding business in Branch Office units, namely by adding types and levels of positions to the organizational structure and separating the operational and business functions of the Branch by placing an operational manager/operational division to focus on managing office operations and general manager/branch manager/office unit leader to focus on managing the business while still being responsible for the running of the work unit they lead. Meanwhile, changing the form of SOT at the Head Office by taking into account the effectiveness and coordination between units, the Bank simplified the form of SOT which refers to banks that have larger assets with fewer divisions. It is hoped that this strategy can improve the Bank's business performance and increase employee motivation for a career in Branch Office Units.

In order to realize the Bank's business strategy, the SOT formed will also be supported by human resources who are qualified and have competencies according to the required standards, especially focusing on sharia business, people management, asset management and other relevant competencies. In achieving this goal, the Bank fulfills HR needs by selecting positions and recruiting. The Bank will select positions for all employees who have been screened based on performance, competence and available track records in the talent management pool, where candidates/successors come from internal employees. However, if there are no candidates who have not/do not meet the criteria required for structural positions, fulfillment can be done by means of recruiting external parties. The position selection process can be carried out by holding a job auction or assessment process which will then be assessed by internal and external assessors. Simultaneously with the fundamental changes to the organizational structure of the Branch and Head Office

Bersamaan dengan perubahan fundamental pada struktur organisasi Cabang dan Kantor Pusat serta adanya perluasan ruang lingkup dan jenjang jabatan, maka dilakukan *review*/pembaharuan–pembaharuan dan perbaikan kebijakan terkait *job grade* dan remunerasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi kinerja pegawai serta memberikan peluang karir lebih besar dan variatif. Selain itu SOP Administrasi SDI yang tidak lagi relevan pasca konversi juga dilakukan penyesuaian yang diintegrasikan dengan Aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS).

Secara bertahap, BRK Syariah pasca konversi terus melakukan tranformasi dalam melakukan pemenuhan SDI untuk unit kantor baru, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti Insan Bank yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya. Sumber pemenuhan SDI dilakukan melalui beberapa proses sebagai berikut:

1. Seleksi Reguler
   Jalur pemenuhan Insan Bank melalui kandidat yang berasal dari putra daerah untuk pemenuhan petugas *front liner*, AO dan FO yang *resign* (berhenti) dengan kriteria:
   a. Baru lulus kuliah (*fresh graduate*); atau
   b. Memiliki pengalaman kerja untuk menempati jabatan *front liner* (*Customer Service, Teller*), *Account Officer* dan *Funding Officer*
2. Seleksi Penerimaan Calon Pimpinan (PCP) Syariah Internal
   Jalur pemenuhan Insan Bank melalui kandidat internal untuk pemenuhan pemimpin masa depan bagi tenaga administrasi yang *resign* (berhenti) maupun yang telah pensiun dengan kriteria:
   a. Lulus seleksi pegawai umur 56 tahun
   b. Saat seleksi merupakan pegawai *core* umur 36 tahun
3. Seleksi *Officer Development Program* (ODP) Eksternal
   Jalur pemenuhan melalui kandidat ekternal untuk dikembangkan menjadi pemimpin Bank di masa depan dengan kriteria:
   a. Baru lulus kuliah (*fresh graduate*); atau
   b. Memiliki pengalaman kerja untuk menempati jabatan pegawai adminstrasi.

as well as the expansion of the scope and levels of positions, a review/update and improvement of policies related to job grade and remuneration is carried out so that it is expected to increase employee motivation and provide greater and more varied career opportunities . In addition, the HR Administration SOPs that were no longer relevant after the conversion were also made adjustments which were integrated with the Human Resource Information System (HRIS) Application.

Gradually, post-conversion BRK Syariah continues to carry out transformations in fulfilling HR for new office units, filling formations or new types of work, replacing Bank Personnel who have stopped either for retirement or other reasons. Sources of HR fulfillment are carried out through several processes as follows:

1. *Regular Selection*
   The path to fulfilling Bank Personnel through candidates who come from the local area to fulfill front liner officers, AO and FO who resign (stop) with the following criteria:
   a. *Just graduated from college (fresh graduate); or*
   b. *Have work experience to occupy front liner positions (Customer Service, Teller), Account Officer and Funding Officer*
2. *Internal Sharia Leadership Candidate Admission Selection (PCP).*
   The fulfillment path for Bank Personnel through internal candidates to fulfill future leaders for administrative staff who have resigned or have retired with the following criteria:
   a. *Passed employee selection at the age of 56*
   b. *At the time of selection, he was a core employee aged 36 years*
3. *Selection of External Officer Development Program (ODP).*
   Fulfillment path through external candidates to be developed into future leaders of the Bank with the following criteria:
   a. *Just graduated from college (fresh graduate); or*
   b. *Have work experience to occupy the position of administrative staff.*

Dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kompetensi Insan Bank tahun 2023 Divisi MSDI Bagian *Corporate Learning Center* secara komprehensif melaksanakan program kerja pelatihan yang terukur dari sisi efetifitas dan efisien, pelatihan bertujuan untuk menghasilkan insan yang berkompeten sebagai kader-kader pemimpin terbaik Bank di masa depan yang dapat beradaptasi dengan kondisi persaiangan industri yang sangat pesat dan sarat dengan teknologi informasi dan digitalisasi.

In supporting the development and competency improvement of Bank Personnel in 2023 the MSDI Division of the Corporate Learning Center Section comprehensively implements a measurable training work program in terms of effectiveness and efficiency, the training aims to produce competent individuals as the Bank's best future leaders who can adapt with the condition of industrial competition which is very fast and full of information technology and digitalization.

Penyusunan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dan diselaraskan dengan POJK Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.

The preparation of Education and Training is adjusted and aligned with POJK Number 24 of 2022 Concerning Development of the Quality of Human Resources for Commercial Banks.

Optimaliasi pemanfaatan media pembelajaran sejak 22 Agustus 2022 secara resmi seiring dengan Konversi menjadi bank syariah, Direksi menetapkan kebijakan strategis yang adaptif dimana pembelajaran melalui Aplikasi *e-learning* Bank *Academy*, digitaliasi pembelajaran setiap Insan Bank dapat menggunakan aplikasi tanpa batas waktu dan tempat sehingga setiap materi serta tema pembelajaran dapat diakses.

Optimizing the use of learning media since August 22, 2022 officially along with the Conversion to become an Islamic bank, the Board of Directors establishes an adaptive strategic policy whereby learning through the Bank Academy e-learning Application, digitizing learning for every Bank Personnel can use the application without time and place limits so that each material and learning themes are accessible.

Selanjutnya tahun 2023, *Corporate Learning Center* menyusun program Pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, penyusunan program training secara terstruktur yang diadaptasi dengan proses Belajar dan Mengajar dengan sasaran peningkatan teknikal *skill* dan *Soft skill, ouput* diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja Bank. Sertifikasi dan *refreshment* keahlian khusus baik secara mandatori maupun dengan tujuan dukungan terhadap *skill* telah dilaksanakan secara reguler akan dilakukan *refteshment* dan secara simultan terus dilakukan oleh Divisi MSDI. Dalam rangka mengotimalkan sasaran pendidikan dan pelatihan SDI selaras dengan tahun kedua sebagai Bank Umum Syariah, Divisi Manajemen SDI akan melakukan Penyusunan *Training Need Analysis* (TNA) BUS Kompetensi Berbasis *Career Planning. Output* yang diharapkan akan mendapatkan model pengembangan Insan yang kompeten dan memiliki keunggulan yang kompetitif bagi setiap Insan Bank.

Furthermore, in 2023, the Corporate Learning Center will develop a Training and Education program to improve competence, prepare a structured training program that is adapted to the Learning and Teaching process with the aim of improving technical skills and Soft skills, the output is expected to have a positive impact on the Bank's performance. Specific skills certification and refreshment both mandatory and with the aim of supporting skills that have been carried out regularly will be refteshed and simultaneously carried out by the MSDI Division. In order to optimize the HR education and training targets in line with the second year as a Sharia Commercial Bank, the HR Management Division will carry out the Preparation of Competency-Based BUS Career Planning Training Need Analysis (TNA). The expected output will be to obtain a human development model that is competent and has a competitive advantage for every Bank Personnel.

Kebijakan dan Tata Kelola

Kebijakan dan tata Kelola teknologi informasi BRK Syariah merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2022 merupakan tahun peralihan aturan tentang Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang berlaku mulai 7 Oktober 2022. Peraturan OJK tersebut mengatur penerapan tata kelola TI yang baik. Dalam hal ini Bank mempertimbangkan faktor paling sedikit:

a. Strategi dan tujuan bisnis Bank;
b. Ukuran dan kompleksitas bisnis Bank;
c. Peran TI bagi Bank;
d. Metode pengadaan sumber daya TI;
e. Risiko dan permasalahan terkait TI;
f. Praktik atau standar yang berlaku secara nasional maupun internasional; dan
g. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Bank juga diharuskan melakukan berbagai aktivitas untuk dapat menyediakan layanan teknologi informasi yang handal dan aman yang meliputi setidaknya:

a. Evaluasi atas pilihan strategi, pengarahan atas strategi penyelenggaraan TI, dan pemantauan pencapaian strategi;
b. Penyelarasan, perencanaan, dan pengorganisasian seluruh unit, strategi, dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan TI;
c. Pendefinisian, akuisisi, dan implementasi atas solusi TI serta integrasinya dalam proses bisnis Bank;
d. Penyediaan dukungan operasional layanan TI kepada pemangku kepentingan; dan
e. Pemantauan kinerja dan kesesuaian penyelenggaraan TI dengan target kinerja intern, pengendalian intern, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BRK Syariah telah memiliki kebijakan dan tata kelola teknologi informasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2021-2025. Rencana Strategis ini disusun atas kesadaran bahwa keberadaan TI sebagai pendukung proses bisnis mensyaratkan adanya keselarasan antara tujuan objektif TI dengan tujuan strategis Bank. Pengembangan TI yang selaras dengan arahan bisnis akan mendatangkan manfaat bisnis secara riil, sehingga keberadaann TI menunjukkan nilai tambah yang strategis bagi BRK Syariah. Rencana strategis ini telah memuat tata kelola TI yang meliputi:

Policies and Governance

BRK Syariah information technology policies and governance refer to regulations issued by the Financial Services Authority. 2022 is the year of the transition of the rules regarding the Use of Information Technology by Commercial Banks. The Financial Services Authority Regulation Number 38/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks has been revoked and replaced with the applicable Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks. starting October 7, 2022. The OJK regulation regulates the implementation of good IT governance. In this case the Bank considers at least the following factors:

a. Strategy and business objectives of the Bank;
b. The size and complexity of the Bank's business;
c. The role of IT for the Bank;
d. IT resource procurement methods;
e. IT-related risks and issues;
f. Practices or standards that apply nationally or internationally; And
g. The provisions of the legislation.

In addition, the Bank is also required to carry out various activities to be able to provide reliable and secure information technology services which include at least:

a. Evaluating the choice of strategy, directing the IT implementation strategy, and monitoring the achievement of the strategy;
b. Alignment, planning and organization of all units, strategies and activities that support the implementation of IT;
c. Definition, acquisition, and implementation of IT solutions and their integration in the Bank's business processes;
d. Provision of IT service operational support to stakeholders; and
e. Monitoring the performance and suitability of IT implementation with internal performance targets, internal controls, and statutory provisions.

BRK Syariah already has information technology policies and governance as outlined in the 2021-2025 Information Technology Strategic Plan. This Strategic Plan was prepared on the awareness that the existence of IT as a support for business processes requires alignment between IT objectives and the Bank's strategic objectives. IT development in line with business directions will bring real business benefits, so that the existence of IT shows strategic added value for BRK Syariah. This strategic plan contains IT governance which includes:

1. Proses dan tata kelola TI;
2. Struktur organisasi tata kelola TI;
3. Sumber daya insani, keterampilan dan kompetensi tata kelola TI;
4. Kebijakan dan kerangka tata kelola TI;
5. Informasi tata kelola TI;
6. Layanan, infrastruktur dan aplikasi TI; dan
7. Kultur, etik dan kebiasaan.

1. IT processes and governance;
2. IT governance organizational structure;
3. Human resources, IT governance skills and competencies;
4. IT governance policies and frameworks;
5. IT governance information;
6. IT services, infrastructure and applications; and
7. Culture, ethics and habits.

Profil Divisi Teknologi dan Sistem Informasi

Untuk menyediakan layanan teknologi perbankan yang handal dan aman, BRK Syariah memiliki Divisi Teknologi dan Sistem Informasi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

PROFIL DIVISI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

To provide reliable and safe banking technology services, BRK Syariah has a Technology and Information Systems Division with the following organizational structure:

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) pada Divisi Teknologi dan Sistem Informasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembagan teknologi dan bisnis perbankan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Guna mengembangkan dan menyiapkan kemampuan SDI agar dapat menunjang pekerjaan di bidang teknologi informasi, pegawai pada Divisi Teknologi dan Sistem Informasi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan *workshop* sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Development of Human Resources (HR) in the Technology and Information Systems Division is needed to meet the demands of banking technology and business development that have been set by management. In order to develop and prepare HR capabilities so that they can support work in the field of information technology, employees in the Technology and Information Systems Division have attended various trainings, seminars and workshops as follows:

No.	Nama Pelatihan	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Jumlah Peserta *Number of participants*	*Training Name*
1	Digital Transformation *Leader*	Soft Skill *Soft Skills*	1	*Digital Transformation Leader*
2	*IT Quality Assurance & IT Service Management*	Soft Skill *Soft Skills*	1	*IT Quality Assurance & IT Service Management*
3	GRC Professional	Sertifikasi *Certification*	3	*GRC Professional*
4	*Business Analyst*	Soft Skill *Soft Skills*	2	*Business Analyst*
5	Inixindo Certified Data Specialist	Soft Skill *Soft Skills*	2	*Inixindo Certified Data Specialist*
6	Data Scientist	Teknikal Skill *Technical Skills*	2	*Data Scientist*
7	CEH v11 CCNA : Introduction to Networks	Teknikal Skill *Technical Skills*	1	*CEH v11* *CCNA : Introduction to Networks*
8	Certified System Analyst	Teknikal Skill *Technical Skills*	2	*Certified Systems Analyst*
9	Mobile Programming with Flutter	Teknikal Skill *Technical Skills*	2	*Mobile Programming with Flutter*

Tujuan keikutsertaan SDI BRK Syariah dalam kegiatan pelatihan, seminar, *workshop* dan sertifikasi tersebut adalah agar peserta dapat menguasai materi pelatihan dan dapat diterapkan dalam pekerjaan.

The purpose of SDI BRK Syariah's participation in training activities, seminars, workshops and certification is so that participants can master the training material and can apply it in work.

Inovasi Teknologi Informasi

BRK Syariah menyadari pentingnya teknologi informasi untuk dapat memenangkan persaingan dalam industri perbankan dan jasa keuangan. Oleh karena itu BRK Syariah melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi secara berkelanjutan agar dapat menyediakan layanan transaksi dan jasa perbankan yang menjawab kebutuhan masyarakat dan pelanggan, antara lain:

1. Melakukan Konversi dan Migrasi *Corebanking System* menjadi Bank Umum Syariah (BUS);
2. Penguatan Tingkat Keamanan TI Bank dengan mengimplementasikan *Security Operation Center* (SOC);
3. Melakukan Peremajaan Infrastruktur (Jaringan dan *Server*) untuk infrastruktur yang sudah usang;
4. Mengimplementasikan *BI-Fast* pada Batch III sebagai bagian dari mendukung *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (SPI);
5. Mengimplementasikan QRIS *Acquirer* dan *Issuer;*
6. Mengimplementasikan E-FOS (*Elektronik Finance Origination System*) BUS;
7. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas TI Bank; dan
8. Penguatan Tata Kelola TI sebagai bagian terintegrasi dari *GCG* Bank.

Information Technology Innovation

BRK Syariah realizes the importance of information technology in order to win the competition in the banking and financial services industry. Therefore BRK Syariah carries out innovation and development of Technology and Information Systems in a sustainable manner so that it can provide transaction services and banking services that answer the needs of society and customers, including:

1. *Convert and Migrate the Corebanking System to become a Sharia Commercial Bank (BUS);*
2. *Strengthening the Bank's IT Security Level by implementing the Security Operation Center (SOC);*
3. *Perform Infrastructure Rejuvenation (Network and Server) for outdated infrastructure;*
4. *Implementing BI-Fast in Batch III as part of supporting the Indonesian Payment System Blueprint (SPI);*
5. *Implementing QRIS Acquirer and Issuer;*
6. *Implement BUS E-FOS (Electronic Finance Origination System);*
7. *Strengthening Bank IT Capacity and Capability; And*
8. *Strengthening IT Governance as an integrated part of GCG Bank.*

Rencana Strategi Pengembangan ke Depan

Kesuksesan konversi Bank Riau Kepri (BRK) menjadi BRK Syariah telah didukung teknologi informasi yang handal, proses konversi *Core Banking System* menjadi *Core Banking System* Syariah telah berhasil dilakukan. Lebih jauh dari itu, BRK Syariah harus terus meningkatkan layanan, termasuk penyempurnaan implementasi digitalisasi perbankan. Saat ini tidak hanya di kota, di desa pun masyarakat semakin akrab dengan gaya hidup digital. Untuk itu, pembenahan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem TI perlu diprioritaskan. Penambahan fitur-fitur pada *sistem mobile banking* dan ketersediaan *link* dengan *e-commerce,* teknologi finansial, dan sistem pembayaran perlu diperbanyak.

BRK Syariah perlu terus menjajaki dan mengembangkan berbagai program potensial guna memperluas pangsa pasar syariah. Program-program berpotensi besar dan perlu mendapat perhatian serius antara lain layanan penerimaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, layanan sistem manajemen kas bagi institusi pendidikan di daerah, mencakup sekolah umum, sekolah Islam, dan pesantren, serta layanan sistem pembayaran gaji bagi pegawai instansi pemda dan institusi/lembaga lainnya.

Bersamaan dengan hal-hal di atas, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Peraturan OJK ini, dalam Pasal 12 ayat 1, mewajibkan bank memiliki rencana strategis TI yang mendukung rencana korporasi Bank. Oleh karena itu BRK Syariah menyusun dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi 2023 – 2027. Rencana Strategis ini memuat antara lain:

1. Visi, misi, tujuan, kebijakan manajemen, sasaran dan inisiatif strategis, dan manajemen kinerja teknologi informasi;
2. Desain arsitektur teknologi informasi;
3. Tata Kelola teknologi informasi;
4. Transformasi digital; dan
5. *Roadmap* teknologi informasi.

Future Development Strategy Plan

The successful conversion of Bank Riau Kepri (BRK) to BRK Syariah has been supported by reliable information technology, the process of converting the Core Banking System to the Core Banking System Syariah has been successfully carried out. Furthermore, BRK Syariah must continue to improve services, including improving the implementation of banking digitalization. Currently, not only in cities, but also in villages, people are increasingly familiar with the digital lifestyle. For this reason, improving, increasing the capacity and capability of the IT system needs to be prioritized. The addition of features to the mobile banking system and the availability of links with e-commerce, financial technology and payment systems need to be increased.

BRK Syariah needs to continue to explore and develop various potential programs in order to expand the sharia market share. Programs with great potential and which need serious attention include services for receiving deposits for the costs of organizing the pilgrimage, cash management system services for educational institutions in the regions, including public schools, Islamic schools, and Islamic boarding schools, as well as salary payment system services for employees of local government agencies and other institutions/agencies.

Along with the above matters, the Financial Services Authority issued the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks. This OJK regulation, in Article 12 paragraph 1, requires banks to have an IT strategic plan that supports the Bank's corporate plans. Therefore BRK Syariah prepares the 2023 – 2027 Information Technology Strategic Plan document. This Strategic Plan contains, among others:

1. *Vision, mission, goals, management policies, strategic goals and initiatives, and information technology performance management;*
2. *Information technology architecture design;*
3. *Information technology Governance;*
4. *digital transformation; And*
5. *Information technology roadmap.*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

"Dengan semangat optimisme dan penguatan tata kelola Bank yang semakin baik, BRK Syariah siap menebarkan semangat baru mewujudkan keberkahan bagi semua. Implementasi Tata Kelola (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan proses panjang dan berkesinambungan yang diyakini BRK Syariah kelak akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan serta mendorong penciptaan nilai perusahaan. Salah satu pencapaian pentingnya adalah dengan perolehan penghargaan sebagai *1st The Best Indonesia GCG Award* VII 2022 dengan Kategori Aset Rp.15 T – Rp.30 T (*Sharia Regional Development Bank Company*)."

"With the spirit of optimism and strengthening of Bank governance that is getting better, BRK Syariah is ready to spread a new spirit to create blessings for all. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a long and continuous process that BRK Syariah believes will increase the effectiveness and efficiency of managing company resources and encourage the creation of corporate value. One of its important achievements is the award as

1st The Best Indonesia GCG Award VII 2022 in the Asset Category IDR 15 T – IDR 30 T (Sharia Regional Development Bank Company)."

Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan

Dasar Penerapan Tata Kelola

Pedoman implementasi Tata Kelola di BRK Syariah mengacu pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Manajemen Risiko, Laporan Tahunan, dan berbagai Peraturan OJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola;
3. *Road Map* GCG Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
5. Pedoman Umum GCG Indonesia dan GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
7. Kebijakan Tata Kelola BRK Syariah.

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola

Penerapan tata kelola yang baik di BRK Syariah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan Visi, Misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada pemangku kepentingan.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Prinsip-prinsip Tata Kelola

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Commitment to Implementing Sustainable Governance

Basis for Implementation of Governance

Guidelines for implementing Governance at BRK Syariah refer to various applicable laws and regulations, including the following:

1. *Laws of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Companies and Banking;*
2. *Financial Services Authority Regulations (OJK Regulations) and OJK Circular Letters (SEOJK) particularly regarding Governance, Risk Management, Annual Reports, and various OJK and SEOJK Regulations related to the implementation of governance;*
3. *2014 Financial Services Authority GCG Road Map.*
4. *Indonesian Banking GCG Guidelines by the National Committee on Governance Policy (KNKG)*
5. *Indonesian GCG General Guidelines and Indonesian Banking GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*
6. *Company Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); as well as*
7. *Sharia BRK Governance Policy.*

Governance Implementation Objectives and Principles

The implementation of good governance at BRK Syariah aims to:

1. *Improving the Bank's performance by implementing GCG in all Bank activities in line with the established Vision, Mission and business strategic plan.*
2. *Keeping the operational and non-operational activities of the Bank in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations.*
3. *Increasing accountability and providing added value to the Bank's stakeholders.*
4. *Improving the Bank's work culture.*
5. *Manage the Bank's resources more reliably.*
6. *Encouraging and supporting the development of the Bank.*

Governance Principles

To realize sustainable growth, a strong foundation is needed for a company. For this reason, the implementation of good governance as the main framework for company growth must be implemented consistently and continuously based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professional and Fairness.

Skema Prinsip-prinsip GCG
GCG Principles Scheme

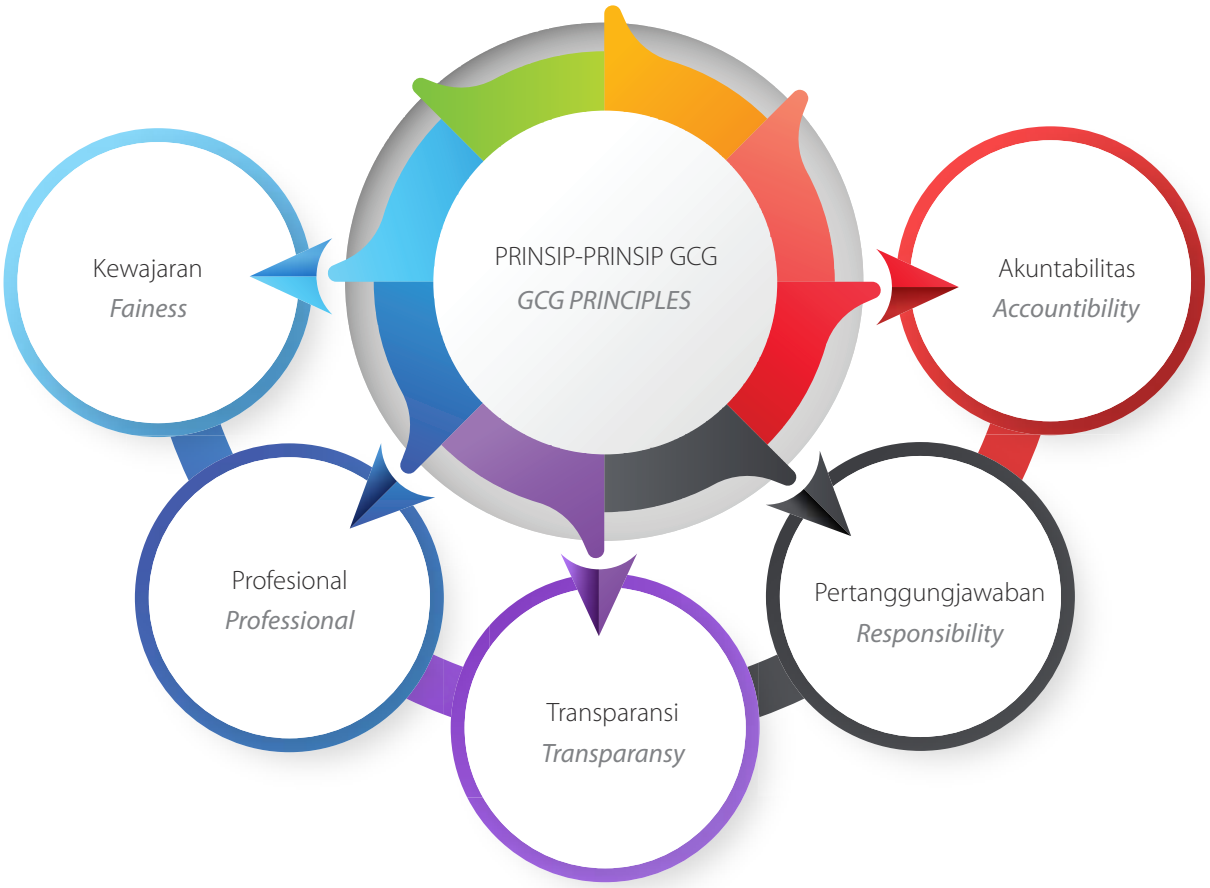

Transparansi

BRK Syariah secara aktif melakukan pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun.

Transparency

BRK Syariah actively discloses material and relevant information both required by laws and regulations as well as other important information that can influence decision making by shareholders, creditors and other stakeholders. This information is conveyed quickly, accurately, and is easily accessible to anyone.

Akuntabilitas

Pengelolaan BRK Syariah harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Accountability

Sharia BRK management must be carried out correctly, measurably, and in accordance with the interests of the Bank while taking into account the interests of shareholders and other stakeholders.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha BRK Syariah harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu, pertanggungjawaban Bank juga dilakukan dengan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh BRK Syariah yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Penting Tata Kelola 2022

1. BRK Syariah meraih penghargaan *1st* – The Best Indonesia GCG Award VII 2022 dengan Kategori *Asset* Rp15 T–Rp30 T (*Sharia Regional Development Bank Company*) pada ajang Indonesia *Good Corporate Governance Award* VII 2022.
2. Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan seluruh Pegawai Bank.
3. Penandatanganan komitmen Anti Gratifikasi oleh Direksi yang berlaku bagi pegawai dan pejabat di lingkungan BRK Syariah.

Roadmap Tata Kelola Bank

Roadmap Tata Kelola BRK Syariah adalah *grand strategy* dan jejak langkah implementasi GCG menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Accountability

Sharia BRK business management must be ensured in accordance with applicable laws and regulations, the principles of sound bank management. In addition, the Bank's responsibility is also carried out with concern for the environment and the surrounding community.

Professional

Professional, namely having competence, being able to act objectively and free from influence/pressure from any party (independent) and having high competence and commitment to developing Islamic banks in accordance with sharia principles and applicable laws and regulations.

Fairness and Equality

The principle of Fairness and Equality (Fairness) is firmly adhered to by BRK Syariah which is embodied in every decision taken, always paying attention to the interests of the majority shareholders and providing protection to minority shareholders and other stakeholders from engineering and transactions that are contrary to the applicable laws and regulations.

Significant Governance Achievements for 2022

1. *BRK Syariah won the 1st – The Best Indonesia GCG Award VII 2022 award in the Rp15 T – Rp30 T Asset Category (Sharia Regional Development Bank Company) at the Indonesia Good Corporate Governance Award VII 2022.*
2. *Signing of Compliance Statement of all Bank Employees.*
3. *Signing of the Anti Gratification commitment by the Board of Directors which applies to employees and officials within the Sharia BRK environment.*

Bank Governance Roadmap

The BRK Syariah Governance Roadmap is a grand strategy and GCG implementation steps towards sustainable corporate governance by integrating aspects of compliance, internal control, risk management and corporate social responsibility. The stages of the BRK Syariah Corporate Governance Roadmap are as follows:

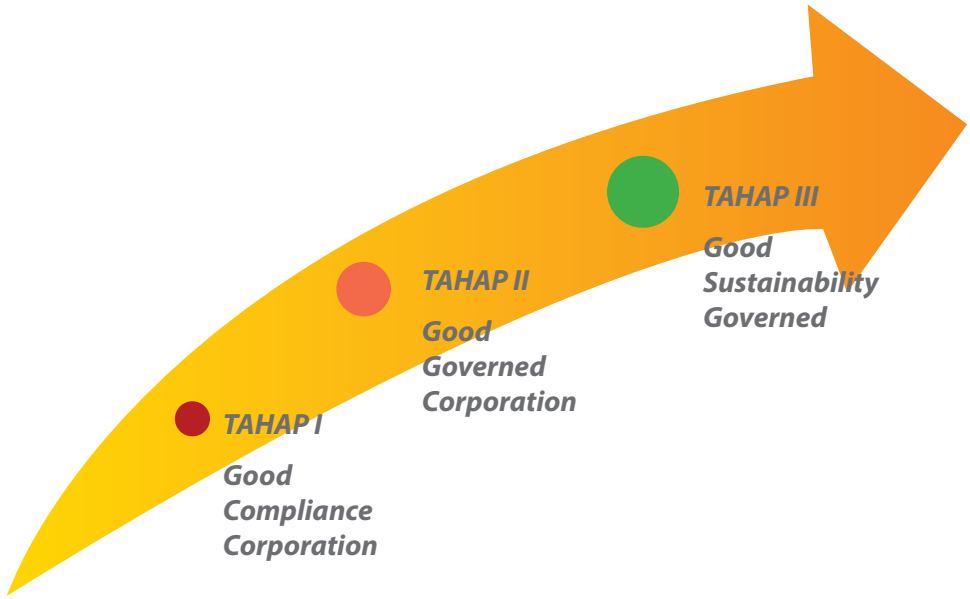

Salah satu indikator kuatnya tatanan institusi organisasi sebagai implementasi Tahap II. *Good Governed Corporation* adalah kuatnya implementasi *Governance Risk Compliance* (GRC). Implementasi GRC yang baik akan mendorong Bank berani melakukan pengambilan keputusan dan tidak salah arah. Bank menjadi lebih bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang dilakukan sejalan dengan peraturan internal dan regulasi eksternal.

One of the indicators of the strong organizational structure as the implementation of Phase II. Good Governed Corporation is the strong implementation of Governance Risk Compliance (GRC). A good GRC implementation will encourage the Bank to have the courage to make decisions and not misdirect. Banks become more responsible for policies and decisions made in line with internal regulations and external regulations.

Implementasi Tata Kelola Bank ke Depan

Rencana Strategis Tata Kelola Bank ke Depan

Strategi implementasi GCG BRK Syariah ke depan dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) sebagai pondasi dalam meningkatkan daya saing Bank;
2. Perlindungan terhadap hak pemegang saham;
3. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
4. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
5. Efektivitas penanganan pengaduan nasabah; dan
6. Peningkatan fungsi kepatuhan.

Implementation of Bank Governance In The Future

Future Strategic Plan for Bank Governance

The BRK Syariah GCG implementation strategy in the future will be carried out with the following initiatives:

1. *Strengthening governance, risk management and compliance (GRC) as a foundation in increasing the competitiveness of the Bank;*
2. *Protection of shareholder rights;*
3. *Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors and Committees;*
4. *Improvement of risk management and internal control functions;*
5. *Effectiveness in handling customer complaints; And*
6. *Improved compliance function.*

Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* Bank

Self-Assessment Good Corporate Governance Bank

Pelaksanaan *self-assessment Good CorporateGovernance* Bank yang dilakukan setiap semester mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, saat ini mengacu pada SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Penilaian

Terdapat 3 (tiga) aspek *Good Corporate Governance*) yang dinilai secara lengkap, meliputi:

1. **Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   Dalam penilaian struktur Tata Kelola, Bank menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
2. **Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
   Tujuan utama penilaian atas Proses Tata Kelola yakni menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang berjalan. Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yang didukung dengan proses tata kelola yang baik diharapkan akan mendukung Bank untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. **Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**
   BRK Syariah juga melakukan penilaian atas Hasil Tata Kelola dengan tujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Penilaian ini dilakukan untuk melihat Struktur dan Proses Tata Kelola telah dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan implementasi tata kelola yang berkualitas.

Kriteria Penilaian

Sebelum konversi menjadi Bank Umum Syariah, terdapat 11 (sebelas) faktor penilaian sendiri (*self-assessment) Good Corporate Governance*, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

Assessment of Good Corporate Governance Bank Implementation

Good Corporate Governance Bank Self-Assessment

The implementation of the Bank's Good Corporate Governance self-assessment which is carried out every semester refers to the provisions of OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 and SEOJK No. 13/POJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. After the conversion to become a Sharia Commercial Bank, it currently refers to SEBI No. 12/13/DPbs concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks & Sharia Business Units and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Assessment Mechanism

There are 3 (three) aspects of Good Corporate Governance) which are assessed in full, including:

1. ***Governance Structure***
   In assessing the Governance structure, the Bank assesses the adequacy of governance structures and infrastructure owned comprehensively, so as to produce results (outcomes) that are in accordance with stakeholder expectations.
2. ***Governance Process***
   The main objective of assessing the Governance Process is to assess the effectiveness of the process of implementing the principles of governance that are running. The adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure supported by good governance processes is expected to support the Bank to show results that are in line with the expectations of stakeholders.
3. ***Governance Outcome***
   BRK Syariah also conducts an assessment of the Governance Results with the aim of assessing the quality of the Bank's outcomes which include both qualitative and quantitative aspects. This assessment is carried out to see that the Governance Structure and Process have been carried out properly so as to produce quality governance implementation.

Assessment criteria

Prior to the conversion to become a Sharia Commercial Bank, there were 11 (eleven) factors for good corporate governance self-assessment, including:

1. *Implementation of the duties and responsibilities of Directors;*
2. *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
3. *Completeness and implementation of the duties of the Committee;*
4. *Handling conflict of interest;*
5. *Implementation of the Bank's compliance function;*
6. *Implementation of the internal audit function;*
7. *Implementation of the external audit function;*
8. *Implementation of risk management including internal control systems;*

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, terdapat 11 (sebelas) faktor penilaian sendiri (*self-assessment) Good Corporate Governance*, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

9. Provision of funds to related parties and large exposures;

10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of governance and internal reporting; And
11. Bank strategic plan.

After the conversion to become a Sharia Commercial Bank, there are 11 (eleven) self-assessment factors for Good Corporate Governance, including:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
2. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
3. Completeness and implementation of the duties of the Committee;
4. Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;
5. Implementation of sharia principles in the activities of raising funds and distributing funds and providing services;
6. Handling conflict of interest;
7. Implementation of the compliance function;
8. Implementation of the internal audit function;
9. Implementation of the external audit function;
10. Maximum Fund Distribution Limit (BMPD); And
11. Transparency of BUS financial and non-financial conditions, reports on the implementation of Good Corporate Governance and internal reporting.

Hasil Penilaian
Self Assessment GCG Bank untuk Semester I dan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rating result
The Bank's GCG Self Assessment for Semester I and II of 2022 is as follows:

Semester I (sebelum konversi menjadi Bank Umum Syariah)

Semester I (before conversion to become a Sharia Commercial Bank)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola *Results of Self-Assessment on Governance Implementation*		
Peringkat *Rating*		Definisi Peringkat *Rating definition*
Individual *Individual*	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. *The Bank's management has generally implemented good governance. This is reflected in the sufficient fulfillment of the Governance principles. In the event that there are weaknesses in the implementation of the Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.*

Analisis *Analysis*
Untuk periode Januari s.d. Juni 2022, Bank telah melakukan ***self assessment*** (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam *Governance Structure, Governance Process* maupun pada *Governance Outcome.* Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome. *For the period January to. June 2022, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of Governance of Bank Riau Kepri which is generally considered quite good, this is reflected in the sufficient fulfillment of the Governance principles contained in the Governance Structure, Governance Process and on Governance Outcomes.* *The self-assessment ranking of the implementation of Governance above is determined by considering the Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.*

Governance Structure

1. Aspek positif
   a. Untuk susunan Direksi Bank periode Januari s/d Juni 2022 telah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank, dimana di dalam Peraturan OJK Tata Kelola diatur bahwa Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan dipimpin Direktur Utama.
   b. Pengangkatan anggota Direksi Bank telah ditatausahakan di dalam administrasi pengawasan OJK, sebagaimana yang termuat di dalam surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor .S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Perihal Laporan Pengangkatan Pengurus PT BPD Riau Kepri.
   c. Sepanjang periode penilaian (Januari s.d Juni 2022), masing-masing Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Seluruh Direksi Bank saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada Bank Riau Kepri saja.
   d. Sepanjang periode laporan, Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah mengikuti 19 (sembilan belas) pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, khususnya peningkatan pengetahuan Perbankan Syariah dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
2. Aspek Negatif
   a. Pada periode laporan, Bank mengalami kejadian *fraud* eksternal (*skimming*).
      Untuk meminimalisir dampak terhadap risiko reputasi, Bank telah mengganti seluruh dana nasabah yang terkena *skimming* dan pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib. Selanjutnya, Bank juga telah melakukan perbaikan terkait penggunaan kartu dan mesin ATM, serta meminta kepada seluruh jaringan kantor pengelola ATM agar melakukan pemeriksaan/pengecekan mesin ATM secara rutin agar terbebas dari alat *skimming* (seperti stiker yang berisi informasi/pengumuman bukan milik Bank dan benda-benda/alat yang dicurigai sebagai alat *skimming*).

      Bank juga telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan pengaduan nasabah, sehingga jika terdapat kejadian *fraud* yang dilakukan pihak eksternal dapat segera diketahui dan ditangani secara cepat sehingga dapat meminimalisir kerugian Bank.

Governance Process

1. Aspek positif
   a. Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur Direksi dan Komisaris Bank serta tidak adanya

Governance Structure

1. positive aspects
   a. The composition of the Board of Directors of the Bank for the period from January to June 2022 has complied with OJK regulations regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks and Organizational Structure and Work Procedures (SOT) for Banks, wherein the OJK Regulation on Governance stipulates that a Bank must have members of the Board of Directors with a maximum number of members. at least 3 (three) people and led by the President Director.
   b. The appointment of members of the Bank's Board of Directors has been administered under the administration of OJK supervision, as contained in the Financial Services Authority letter Number .S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022 regarding the Report on the Appointment of the Management of PT BPD Riau Kepri.
   c. Throughout the assessment period (January to June 2022), each Bank's Directors do not have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other banks, companies and/or institutions. All of the Bank's Directors currently only serve as administrators at Bank Riau Kepri.

   d. Throughout the reporting period, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank have participated in 19 (nineteen) training/seminars and workshops related to their field of work, particularly increasing Islamic Banking knowledge in the context of conversion to an Islamic Commercial Bank (BUS).
2. Negative Aspect
   a. During the reporting period, the Bank experienced incidents of external fraud (skimming).
      To minimize the impact on reputation risk, the Bank has replaced all customer funds affected by skimming and the perpetrators have been arrested by the authorities. Furthermore, the Bank has also made improvements related to the use of cards and ATM machines, and asked the entire network of ATM management offices to carry out routine checks/ checks on ATM machines so that they are free from skimming devices (such as stickers containing information/announcements that do not belong to the Bank and other items) objects/tools suspected of being skimming tools).

      The Bank has also made changes and adjustments to the customer complaint policy, so that if there is an incident of fraud committed by an external party it can be immediately identified and handled quickly so as to minimize the Bank's losses.

Governance Process

1. positive aspects
   a. By fulfilling the completeness of the structure of the Board of Directors and Commissioners of the Bank

rangkap tugas dan jabatan Direksi dan Komisaris, maka Direksi dan Komisaris lebih maksimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Kerja Direksi.

b. Direksi telah menindaklanjuti seluruh komitmen temuan pemeriksaan baik dari OJK maupun dari Bank Indonesia, dan menyampaikannya sebelum tanggal jatuh tempo komitmen.

c. Sampai dengan akhir periode penilaian (Juni 2022), Bank telah menindaklanjuti seluruh komitmen temuan OJK tahun 2021 yang jatuh tempo sampai dengan bulan Juni 2022 dan komitmen pemeriksaan BI terkait Pelaporan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan PIN online 6 (enam) digit untuk kartu ATM dan/atau kartu Debit.

d. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja Kantor Pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis. Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor Bank, baik secara langsung/tatap muka maupun secara online.

e. Dewan Komisaris secara rutin:
   - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
   - memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

2. Aspek Negatif

Sepanjang periode laporan, Bank mengalami 3 (tiga) kali kejadian fraud internal yang disebabkan karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal.

Atas kejadian tersebut Bank telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melakukan perbaikan sistem dan prosedur untuk mencegah kemungkinan fraud internal yang serupa dan berulang.

Selain itu, terhadap pelaku fraud internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahaan integritas. Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya *fraud* internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank.

and the absence of concurrent duties and positions of the Directors and Commissioners, the Directors and Commissioners are more optimal in carrying out their functions, duties and responsibilities as stipulated in the Bank's Articles of Association and the Board of Directors' Work Guidelines.

b. The Board of Directors has followed up on all audit findings commitments from both OJK and Bank Indonesia, and submitted them before the commitment due date.

c. Until the end of the assessment period (June 2022), the Bank has followed up on all OJK findings commitments for 2021 that are due until June 2022 and BI inspection commitments related to Reporting on the Implementation of National Chip Technology Standards and the Use of 6 (six) digit online PINs for ATM cards and/or Debit card.

d. The Board of Directors routinely holds internal meetings as well as joint meetings with work units at the Head Office to discuss and determine strategic policies and decisions. Meetings are also held between the Directors and the Bank's office units, either in person/face to face or online.

e. The Board of Commissioners regularly:
   - *supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as directives by letter.*
   - *monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations on the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.*

2. Negative Aspect

During the reporting period, the Bank experienced 3 (three) incidents of internal fraud caused by weaknesses in the internal control system.

For this incident, the Bank has made various efforts to improve the system and procedures to prevent the possibility of similar and recurring internal fraud.

In addition, for internal fraud perpetrators, the Bank's management has given strict sanctions in the form of Disrespectful Termination of Employment (PHK) and compensation, and the Bank has issued information letters to agencies in Riau and Riau Islands that the person concerned was dismissed due to integrity issues. Employees who are related to the occurrence of internal fraud are given sanctions according to the level of errors/violations of procedures carried out while still referring to the provisions on staffing sanctions that apply internally in the Bank.

Governance Outcome

1. Aspek positif
   a. Sepanjang periode laporan Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan penandatanganan Kode Etik kepatuhan, sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud* serta sosialisasi dan pemantauan kepatuhan di beberapa jaringan kantor.
   b. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi. Tidak terdapat *dissenting opinions* sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
   c. Sepanjang periode laporan tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Aspek Negatif
   a. Masih terdapat fraud yang dilakukan oleh pegawai sepanjang periode laporan. Untuk mencegah agar kejadian fraud tidak terulang lagi, Bank telah melakukan upaya berupa perbaikan sistem dan prosedur, perbaikan sistem pengendalian intern, sosialisasi budaya anti fraud dan budaya peduli risiko, monitoring budaya kepatuhan pegawai, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku fraud dan pegawai yang terkait.
   b. Pada periode pelaporan, masih terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator dan denda tersebut telah diselesaikan oleh Bank.

Governance Outcomes

1. positive aspects
   a. Throughout the reporting period the Bank was committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by signing the compliance Code of Ethics, disseminating a culture of risk care and anti-fraud as well as disseminating and monitoring compliance in several office networks.
   b. Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been set forth in the minutes of the meeting and is well documented by the Secretary of the Board of Directors. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meeting during the reporting period.
   c. Throughout the reporting period, there was no intervention by the owner/related parties/other parties that could cause a conflict of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits.

2. Negative Aspect
   a. There were still frauds committed by employees throughout the reporting period. To prevent fraud from happening again, the Bank has made efforts in the form of:improvement of systems and procedures, improvement of internal control systems, dissemination of anti-fraud culture and risk awareness culture, monitoring of employee compliance culture, and imposition of strict sanctions against perpetrators of fraud and related employees.
   b. During the reporting period, there were still imposition of fines from the regulator and these fines had been settled by the Bank.

Semester II (setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah)

Semester II (after conversion to become a Sharia Commercial Bank)

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*		
Peringkat *Rating*		Definisi Peringkat *Rating definition*
Individual *Individual*	2	Manajemen Bank telah melakukan pelaksanaan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Good Corporate Governance. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. *The Bank's management has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.*

Analisis
Analysis

Untuk periode Juli s.d. Desember 2022, Bank telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Riau Kepri Syariah yang secara umum dinilai Baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang termuat di dalam Governance Structure, Governance Process maupun pada Governance Outcome.
Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) Good Corporate Governance di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome.
For the period July to. December 2022, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance of Bank Riau Kepri Syariah which is generally considered Good, this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process as well as on Governance Outcome.
The ranking of the results of the Good Corporate Governance self-assessment above was generated by considering the Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Governance Structure

1. Aspek positif
   a. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank periode Juli s/d Desember 2022 telah memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.
   b. Untuk susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Direksi No. 680/MR.01.03/KPT/DIR/2022 tanggal 6 Juli 2022.
   c. Sepanjang periode Laporan (Juli s.d Desember 2022):
      - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada BRK Syariah saja
      - Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi Bank saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada BRK Syariah saja.
      - Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah lainnya. Namun, terdapat satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah Bank yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya (Unit Usaha Syariah PT Permodalan Ekonomi Rakyat). Hal ini masih memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
   d. Sepanjang periode laporan, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank telah mengikuti 21 (dua puluh satu) pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya.
   e. Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Berdasarkan SOT Bank yang berlaku saat ini, fungsi tersebut

Governance Structure

1. positive aspects
   a. The composition of the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for the period July to December 2022 has complied with regulatory requirements regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of the Bank.
   b. The composition of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of the Bank has received approval from the Financial Services Authority based on OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated July 4 2022 and has been reported to OJK through Directors letter No. 680/MR.01.03/KPT/DIR/2022 dated 6 July 2022.
   c. Throughout the Reporting Period (July to December 2022):
      - Members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers at other banks/financial institutions. All members of the Bank's Board of Commissioners currently only serve as administrators at BRK Syariah
      - The Bank's Directors do not have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other Banks, companies and/or institutions. All of the Bank's Directors currently only serve as administrators at BRK Syariah.
      - Members of the Sharia Supervisory Board do not have concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at other Sharia Banks. However, there is one member of the Bank's Sharia Supervisory Board who holds concurrent positions as a member of the Sharia Supervisory Board at another Islamic financial institution (PT Permodalan Ekonomi Rakyat's Sharia Business Unit). This still complies with the regulatory requirements regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units which stipulates that members of the Sharia Supervisory Board may have concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board in no more than 4 (four) other Islamic financial institutions.
   d. During the reporting period, the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board attended 21 (twenty one) training/seminars and workshops related to their respective fields of work.
   e. The Bank has at least 1 (one) person in the compliance function who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations. Based on the Bank's current SOT, this function is carried out by the Sharia Compliance Section in the Compliance Division

dilaksanakan oleh Bagian *Sharia Compliance* pada Divisi Kepatuhan yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

2. Aspek Negatif

   Sepanjang periode laporan, berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank, secara umum pedoman operasional & produk dan pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

   Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini dinilai masih wajar, mengingat Bank pada periode laporan masih dalam tahap proses transisi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

   Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, Bank terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara rutin pada unit kerja masing-masing.

Governance Process

1. Aspek positif
   a. Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank lebih optimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   b. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja kantor pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis.
      Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor Bank, baik secara langsung/ tatap muka maupun secara *online*.
   c. Dewan Komisaris secara rutin:
      1). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
      2). memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
   d. Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai

which is under the supervision of the Director of Compliance & Risk Management.

2. *Negative Aspect*

   Throughout the reporting period, based on the Bank's Sharia Supervisory Board Supervision Report, in general operational guidelines & products and implementation of products & services at the Bank's office network were in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.

   However, there are still some weaknesses that must be corrected to comply with Sharia Principles. This is considered reasonable, considering that during the reporting period the Bank was still in the transition process from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks.

   In addition, to increase understanding of human resources in business units (fundraising, distribution of funds, and services and/or services) so that they have adequate knowledge about sharia banking operations and products, the Bank continues to socialize and increase employee understanding which is carried out on a regular basis in each work unit.

Governance Process

1. *positive aspects*
   a. By fulfilling the completeness of the structure of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of the Bank, the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board of the Bank are more optimal in carrying out their functions, duties and responsibilities as stipulated in the Bank's Articles of Association and Work Guidelines for the Board of Commissioners, Directors and Supervisory Board Sharia Bank.
   b. The Board of Directors routinely holds internal meetings as well as joint meetings with work units at the head office to discuss and determine strategic policies and decisions.
      Meetings are also held between the Directors and the Bank's office units, either in person/face to face or online.
   c. The Board of Commissioners regularly:
      1). supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Commissioners and the Board of Directors as well as directives by letter.
      2). monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations on the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.
   d. The Sharia Supervisory Board has routinely provided advice and suggestions to the Board of Directors and oversees the Bank's activities to comply with

dengan prinsip syariah, baik melalui surat kepada Direksi, pemberian opini atas produk dan jasa Bank serta pelaksanaan kunjungan ke jaringan kantor Bank untuk menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pelaksanaan operasional dan produk Bank.

2. Aspek Negatif
   Sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2022), dari 19 (sembilan belas) komitmen tindak lanjut untuk Pemeriksaan Umum Kantor Pusat tahun 2022, terdapat 2 (dua) komitmen yang masih dalam proses tindak lanjut.

Governance Outcome

1. Aspek positif
   a. Sepanjang periode laporan, Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud,* serta kegiatan kunjungan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ke jaringan kantor Bank untuk meningkatkan *awareness* Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan *ex ante/preventif* utuk mencegah terjadinya pelanggaran/*fraud*.

      Pelaksanaan kegiataan di atas cukup efektif dalam membangun budaya kepatuhan dan peduli risiko sebagai upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran/*fraud*. Hal ini terlihat dari tidak adanya kejadian *fraud* sepanjang periode laporan.
   b. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi. Tidak terdapat *dissenting opinions* sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
   c. Sebelum penerbitan suatu produk, dilakukan proses uji petik kepatuhan atas Prinsip Syariah oleh unit kerja *Sharia Compliance* dan beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan pendapat/opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk yang dimiliki oleh Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
   d. Sepanjang periode laporan tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Aspek Negatif
   Pada periode pelaporan, masih terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator dan denda tersebut telah diselesaikan oleh Bank.

sharia principles, both through letters to the Board of Directors, providing opinions on Bank products and services as well as carrying out visits to the Bank's office network to assess and ensure compliance with sharia principles. implementation of Bank operations and products.

2. *Negative Aspect*
   Until the end of the assessment period (December 2022), out of 19 (nineteen) follow-up commitments for the 2022 Head Office General Audit, there are 2 (two) commitments that are still in the follow-up process.

Governance Outcomes

1. *positive aspects*
   a. *Throughout the reporting period, the Bank is committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by disseminating a culture of caring about risk and anti-fraud, as well as visiting the Director of Compliance and Risk Management to the Bank's office network to increase Employee awareness of the Bank's internal regulations that apply as ex ante actions / preventive to prevent the occurrence of violations / fraud.*

      The implementation of the above activities is quite effective in building a culture of compliance and risk awareness as an effort to prevent violations/fraud. This can be seen from the absence of fraud incidents throughout the reporting period.
   b. *Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been set forth in the minutes of the meeting and is well documented by the Secretary of the Board of Directors. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meeting during the reporting period.*
   c. *Prior to the issuance of a product, the Sharia Compliance work unit carries out a compliance test process for Sharia Principles and some of them have been supplemented with opinions/opinions from the Sharia Supervisory Board, so that the products owned by the Bank in general comply with the Fatwa issued by the National Sharia Council. - Indonesian Council of Ulama.*
   d. *Throughout the reporting period, there was no intervention by the owner/related parties/other parties that could cause a conflict of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits.*
2. *Negative A pect*
   During the reporting period, there were still imposition of fines from the regulator and these fines had been settled by the Bank.

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Rekomendasi dan tindak lanjut atas *self-assessment* GCG Bank tahun 2022, di antaranya adalah:

1. Atas Kejadian *Fraud* Eksternal (*skimming*)
   a. Bank telah mengganti seluruh dana nasabah yang terkena skimming dan pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib.
   b. Bank telah melakukan perbaikan terkait penggunaan kartu dan mesin ATM.
   c. Bank meminta kepada seluruh jaringan kantor pengelola ATM agar melakukan pemeriksaan/ pengecekan mesin ATM secara rutin agar terbebas dari alat skimming (seperti stiker yang berisi informasi/pengumuman bukan milik Bank dan benda-benda/alat yang dicurigai sebagai alat skimming).
   d. Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan pengaduan nasabah.
2. Atas Kejadian *Fraud* Internal yang disebabkan karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal
   a. Bank melakukan perbaikan sistem dan prosedur untuk mencegah potensi kejadian *fraud* internal yang serupa dan berulang, seperti: perbaikan SOP ATM, perbaikan kebijakan rekening *dormant*, pembuatan kebijakan penagihan angsuran pembiayaan oleh pegawai Bank, perbaikan kebijakan Laku Pandai, dan perbaikan kebijakan *user Bank Vision* beserta matriks *user*.
   b. Terhadap pelaku *fraud* internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahaan integritas.
   c. Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya *fraud* internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank.
   d. Bank telah melakukan monitoring dan sosialisasi Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang tidak memiliki QACA dan tidak dilakukan pemeriksaan/ Audit Umum oleh Divisi Internal Audit.
   e. Direktur Kepatuhan beserta pegawai Divisi Kepatuhan melakukan kunjungan ke Kantor Cabang dalan rangka implementasi Budaya Kepatuhan di setiap unit kerja kantor Bank, peningkatan pemahaman Pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System* dan untuk meningkatkan *awareness* Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan *ex ante*/preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran/*fraud*.
   f. Di awal Pelaksanaan kegiatan Operasional BRK Syariah, Direksi dalam suratnya telah mengingatkan kepada seluruh jaringan kantor

Recommendations and Follow Up

Recommendations and follow-up on the Bank's GCG self-assessment in 2022, including:

1. *For External Fraud Incidents (skimming)*
   a. *The bank has replaced all customer funds affected by skimming and the perpetrators have been arrested by the authorities.*
   b. *The Bank has made improvements regarding the use of cards and ATM machines.*
   c. *The Bank requests the entire network of ATM management offices to routinely inspect/check ATM machines so that they are free from skimming tools (such as stickers containing information/ announcements that do not belong to the Bank and objects/tools suspected of being skimming tools).*
   d. *The Bank has made changes and adjustments to the customer complaint policy.*
2. *For Internal Fraud Events caused by weaknesses in the internal control system*
   a. *The Bank has made improvements to systems and procedures to prevent the potential for similar and recurring internal fraud, such as: improving ATM SOPs, improving dormant account policies, making policies for collecting financing installments by Bank employees, improving Laku Pandai policies, and improving Bank Vision user policies along with matrices user.*
   b. *Against internal fraud perpetrators, the Bank's management has imposed strict sanctions in the form of Disrespectful Termination of Employment (PHK) and compensation, and the Bank has issued information letters to agencies in Riau and Riau Islands that the person concerned was dismissed due to integrity issues.*
   c. *Employees who are related to the occurrence of internal fraud are given sanctions according to the level of errors/violations of procedures carried out while still referring to the provisions on staffing sanctions that apply internally in the Bank.*
   d. *The Bank has carried out monitoring and dissemination of Compliance in the Bank's office network that does not have a QACA and does not carry out inspection/ General Audit by the Internal Audit Division.*
   e. *The Compliance Director and Compliance Division employees visit Branch Offices in order to implement Compliance Culture in each work unit of the Bank's office, increase Employee understanding of the Whistleblowing System policy and to increase Employee awareness of the Bank's internal provisions that apply as ex ante/preventive measures to prevent the occurrence of breach/fraud.*
   f. *At the beginning of the Implementation of Sharia BRK Operational activities, the Board of Directors in his letter reminded all of the Bank's office network*

Bank agar senantiasa konsisten dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan Bank yang berlaku, menumbuhkan kesadaran anti fraud, melakukan penerapan *Risk Awareness* dan *Risk Culture*, identifikasi risiko, mitigasi risiko dan penerapan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing unit kerja.

to always be consistent in complying with and implementing applicable Bank regulations, fostering anti-fraud awareness, implementing Risk Awareness and Risk Culture, identifying risks, mitigating risks and implementing Internal Control System in each work unit.

Struktur Tata Kelola Bank

Struktur Organ Perusahaan

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka struktur GCG BRK Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu, BRK Syariah juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

Struktur Organ tata kelola BRK Syariah disajikan pada bagan di bawah ini:

Structure of Bank Governance

Company Organ Structure

In line with the provisions of the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 and Bank Regulations Indonesia Number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the BRK Syariah GCG structure consists of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Directors. In addition, BRK Syariah also forms supporting organs consisting of committees under the Board of Commissioners, Directors, Corporate Secretary and Internal Audit.

The governance structure of BRK Syariah is presented in the chart below:

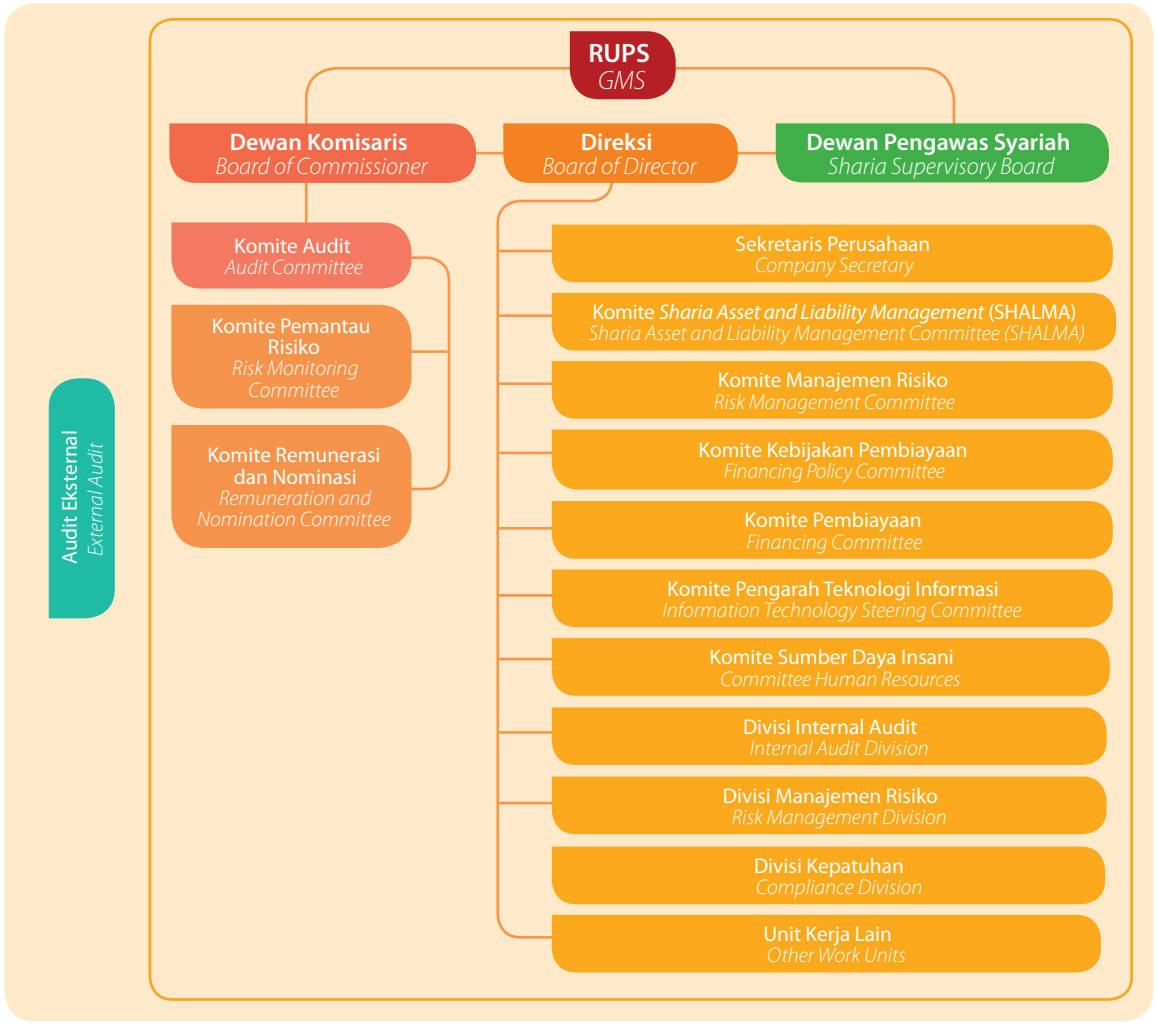

Governance Soft-Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi tata kelola Bank secara berkelanjutan, BRK Syariah telah memiliki kebijakan tata kelola berupa *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam BRK Syariah sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*.

Governance soft structure BRK Syariah merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar BRK Syariah.
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/KEPDKS/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Keputusan Direksi Nomor: 237/KEPDIR/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah.
5. Keputusan Direksi Nomor: 045/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
6. Keputusan Direksi Nomor: 033/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit *Charter*).
7. Keputusan Direksi Nomor: 031/KEPDIR/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Piagam Kepatuhan *(Compliance Charter*).
8. Keputusan Direksi Nomor: 046/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
9. Keputusan Direksi Nomor: 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah.
10. Keputusan Direksi Nomor: 168/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi.
11. Keputusan Direksi Nomor: 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*).
12. Keputusan Direksi Nomor: 037/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
13. Keputusan Direksi Nomor: 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
14. Keputusan Direksi Nomor: 169/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

Governance Soft-Structure

In order to improve the quality of the Bank's governance implementation in a sustainable manner, BRK Syariah has a governance policy in the form of a governance soft structure that regulates the relationship between organs within BRK Syariah so that there are clear duties, responsibilities and authorities in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. , GCG principles, sound business ethics and best practices.

Governance of the Sharia BRK soft structure is a policy arrangement as a basic framework and governance in the preparation of policies and implementation of Bank activities, as follows:

1. *BRK Syariah Articles of Association.*
2. *Decision of the Board of Commissioners Number: 001/KEPDK/2021 dated May 25, 2021 concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners.*
3. *Decision of the Board of Commissioners Number: 001/KEPDKS/III/2011 dated March 28, 2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee.*
4. *Directors Decree Number: 237/KEPDIR/2022 dated December 28, 2022 concerning the Sharia Supervisory Board Company Manual (BPP).*
5. *Board of Directors Decree Number: 045/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of Good Corporate Governance.*
6. *Directors Decree Number: 033/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Internal Audit Charter.*
7. *Decree of the Board of Directors Number: 031/KEPDIR/2023 dated March 6, 2023 concerning the Compliance Charter.*
8. *Board of Directors Decree Number: 046/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function.*
9. *Directors Decree Number: 049/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning Sharia Compliance Company Manual (BPP).*
10. *Directors Decree Number: 168/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning Work Guidelines for Directors.*
11. *Board of Directors Decree Number: 172/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Compliance Code of Conduct.*
12. *Board of Directors Decree Number: 037/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual (BPP) for Implementing Anti-Fraud Strategy.*
13. *Directors Decree Number: 170/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 2020 concerning Guidelines for Gratification Control in the Environment of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
14. *Directors Decree Number: 169/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Conflict of Interest.*

15. Keputusan Direksi Nomor: 171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

15. Directors Decree Number: 171/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for the Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Adalah sistem dan struktur yang digunakan dalam implementasi GCG di BRK Syariah agar setiap organ dalam Bank menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta etika bisnis yang sehat.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan dan penasehatan, yang dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Dewan Komisaris beranggotakan anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak independen serta profesional di bidangnya. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tata kelola, Direksi membentuk fungsi internal audit, manajemen risiko dan kepatuhan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester.

Corporate Governance Mechanism

Is the system and structure used in the implementation of GCG in BRK Syariah so that every organ in the Bank carries out its authority, duties and responsibilities in line with GCG principles, applicable laws and regulations and sound business ethics.

The Board of Commissioners is responsible for the oversight and advisory functions, which are assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners' Committee consists of members of the Board of Commissioners and independent parties as well as professionals in their fields. The Board of Directors is fully responsible for managing the Bank as stipulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations. In carrying out governance, the Board of Directors establishes internal audit, risk management and compliance functions. The Sharia Supervisory Board (DPS) is an organ tasked with providing advice and suggestions to the Board of Directors and supervising the Bank's activities so that they comply with sharia principles. DPS Supervision Results are submitted to OJK every semester.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi di Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. RUPS menjadi forum bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan BRK Syariah.

General Meeting Of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ that holds the highest authority in the Bank and holds all powers that are not delegated to the Board of Directors and Board of Commissioners within the limits specified in the Law on Limited Liability Companies and the Articles of Association. GMS is a forum for Shareholders to make decisions based on the interests of BRK Syariah.

Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BRK Syariah, berikut wewenang, hak dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang Saham Seri A
1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Dapat menukarkan sahamnya dengan Saham Seri B;

Authority, Rights and Responsibilities of Shareholders

Based on the provisions of the BRK Syariah Articles of Association, the following are the powers, rights and responsibilities of Shareholders:

Series A Shareholders
1. *Voting at the General Meeting of Shareholders (GMS);*
2. *Has special rights in submitting nominations for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;*
3. *May exchange its shares for Series B Shares;*

4. Menerima dividen;
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari Pemegang Saham Seri B.

Pemegang Saham Seri B
1. Menerima dividen;
2. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah adalah sebagai berikut:

4. Receive dividends;
5. Receive the remaining assets from the liquidation proceeds from the Series B Shareholders.

Series B Shareholders
Receive dividends;
Receiving the remaining assets resulting from the liquidation.

Information on Major and Controlling Shareholders

The composition of BRK Syariah Shareholders is as follows:

Tabel Pemegang Saham BRK Syariah Tahun 2022
Table of BRK Syariah Shareholders in 2022

Jenis Saham *Type of Stock*	***Shareholders*** *Pemegang Saham*	**Jumlah Lembar** *Number of sheets*	**Presentase (%)** *Percentage (%)*
Seri A *Series A*	Provinsi Riau *Riau Province*	5.191.682	42,93%
	Provinsi Kepri *Riau Islands Province*	120.000	0,99%
	Pemkot/Kab se-Riau & Kepri *Municipal/District Governments throughout Riau & Riau Islands*	6.710.725	55,50%
Seri B *Series B*	Kopkar Bank Riau Kepri *Kopkar Bank Riau Kepri*	70.000	0,58%

Pemegang saham utama dan pengendali BRK Syariah adalah Pemerintah Provinsi Riau, yakni sebesar 42,93%. Tidak terdapat pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

The main and controlling shareholder of BRK Syariah is the Provincial Government of Riau, which is 42.93%. There are no shareholders acting on behalf of other shareholders.

Jenis RUPS

RUPS di BRK Syariah terdiri dari:

1. RUPS Tahunan
   Diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai:
   a. Laporan Tahunan
   b. Usulan penggunaan Laba Bersih
   c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB)
   Dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

GMS type

GMS at BRK Syariah consists of:

1. *Annual GMS*
   Held once a year after the closing of the financial year which has been audited by a Public Accountant, with discussions regarding among others:
   a. Annual report
   b. Proposed use of Net Profit
   c. Other matters that require the approval of the Annual GMS
2. *Extraordinary GMS (EGMS)*
   It can be held at any time based on the need for the benefit of the Company at the request of the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an Extraordinary GMS according to a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

RUPS dilakukan dengan didahului adanya pemanggilan kepada para Pemegang Saham yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BRK Syariah mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

GMS Implementation Stages

The GMS is carried out prior to an invitation to the Shareholders which includes the day, date, time, place and agenda of the meeting accompanied by notification that the material to be discussed at the meeting is available at the BRK Syariah office starting from the day the summons is made until the date the meeting is held.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 dan Realisasinya

Selama tahun 2022, BRK Syariah menyelengarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa, dengan tahapan proses pemanggilan RUPS sebagai berikut:

Implementation of the 2022 GMS and Its Realization

During 2022, BRK Syariah held 1 (one) Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS, with the stages of the GMS calling process as follows:

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Implementation of the 2021 Annual GMS

Pemanggilan RUPS *Summons of GMS*	Pelaksanaan RUPS *Implementation of GMS*	Hasil Keputusan RUPS *Resolutions of the GMS*
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan Surat Nomor: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Penyampaian Undangan RUPSLB Tahun 2022 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. *The summons was made on April 23, 2022 based on Letter Number: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 dated April 11, 2022 regarding Submission of Invitations for the 2022 EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year.*	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 bertempat di Pekanbaru. *The Annual GMS was held on April 23 2022 in Pekanbaru.*	Hasil RUPS disampaikan melalui Surat Kabar Riau Pos dan Batam Pos *The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos Newspapers*

Rekapitulasi kehadiran pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Recapitulation of Attendance at the 2021 Annual GMS

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kehadiran *Presence*		Keterangan *Information*
			Hadir *Present*	Tidak Hadir *Not present*	
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Gubernur Riau *Governor of Riau*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*
2.	H. Firdaus ST, MT	Walikota Pekanbaru *Pekanbaru Mayor*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Jamil (Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Muhammad Jamil (Regional Secretariat of Pekanbaru City) acting for and on behalf of the Government of Pekanbaru City*
3.	Catur Sugeng Susanto, SH	Bupati Kampar *Regent of Kampar*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Representing for and on behalf of the Government of Kampar Regency*
4.	Kasmarni	Bupati Bengkalis *Regent of Bengkalis*	√		Mewakili untuk dan atas nama pemerintah Bengkalis. *Representing for and on behalf of the government of Bengkalis.*
5.	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu *Regent of Indragiri Hulu*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Ir. H. Hendrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indargiri Hulu Based on the Power of Attorney under the hand, represented by Ir. H. Hendrizal (Regional Secretary of Indragiri Hulu Regency) acting for and on behalf of the Government of Indargiri Hulu Regency
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir *Regent of Indragiri Hilir*		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh Afrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Based on an underhand Power of Attorney, represented by Afrizal (Regional Secretary of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency*
7.	Roby Kurniawan	Bupati Bintan *Regent of Bintan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Mohammad Panca Azdigoena (Asisten Administrasi Perekonomian Pembanguna) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Mohammad Panca Azdigoena (Assistant for Development Economic Administration) acting for and on behalf of the Bintan Regency Government*
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si	Bupati Karimun *Regent of Karimun*		x	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan ,diwakili oleh Sularno (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Sularno (Assistant to Government and People's Welfare) Representing for and on behalf of the Karimun Regency Government*
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna *Regent of Natuna*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency*
10.	Husni Merza	Wakil Bupati Siak *Deputy Regent of Siak*	√		Mewakili untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Representing on behalf of the Siak Regency Government*
11.	H. Zukri Misran	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Representing for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency*
12.	Suhardiman Amby	Plt Bupati *Acting Regent*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency*
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu *Regent of Rokan Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency*
14.	H. Sulaiman	Wakil Bupati Rokan Hilir *Deputy Regent of Rokan Hilir*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kehadiran *Presence*		Keterangan *Information*
			Hadir *Present*	Tidak Hadir *Not present*	
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dumai*		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah Tangan, diwakili oleh H. Indra Gunawan (Sekretaris Daerah kota Dumai) Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Based on a Power of Attorney under the Hand, represented by H. Indra Gunawan (Regional Secretary of the city of Dumai) Representing for and on behalf of the City Government of Dumai*
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Based on the Power of Attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP (Batam City Regional Secretary) acting for and on behalf of the Batam City Government*
17.	Endang Abdullah	Wakil Walikota Tanjung Pinang *Deputy Mayor of Tanjung Pinang*		X	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang *Representing for and on behalf of the Municipal Government of Tanjung Pinang*
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Representing for and on behalf of the Government of Lingga Regency*
19.	H. Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti *Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government*
20.	Ansar Ahmad	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of the Riau Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau *Representing for and on behalf of the Riau Archipelago Provincial Government*
21.	Abdul Haris,SH	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Sahtiar (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas *Based on an underhand Power of Attorney, represented by Sahtiar (Secretary of Anambas Islands Regency) acting for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government*
22.	Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama *Present at the Meeting as the Main Director*
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director Of Operations*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Director of Operations*
24.	M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa *Director of Funds & Services*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana & Jasa Perseroan *Present at the Meeting as Director of Funds & Services of the Company*
25.	Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Pembiayaan Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Director of Finance*
26.	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko *Director of Compliance & Risk Management*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan *Present at the Meeting as Director of Compliance & Risk Management of the Company*
25.	Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Utama sekaligus sebagai Ketua Rapat *Present at the Meeting as the Main Commissioner as well as the Chairman of the Meeting*
26.	Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*
27.	Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021
Approval of the Annual Report for the 2021 Fiscal Year

Keputusan
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ***(volledig acquit et de charge)*** kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Decision
Approved the Annual Report for the 2021 Fiscal Year, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Accountability Report of the Board of Directors and the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin & Putranto) by providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2021.

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021
Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2021

Keputusan
Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021:
a. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2021 sesuai dengan yang diusulkan.
b. Menyetujui penggunaan Cadangan Jasa Produksi dan Tantiem Tahun Buku 2021 yang telah menjadi biaya tahun buku 2021 dengan komposisi Jasa Produksi Pegawai 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dan Tantiem Pengurus 2,5% (dua koma lima persen). Besaran ini telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020
c. Menyetujui untuk Tahun Buku 2022, komposisi Cadangan Jasa Produksi Pegawai dan Tantiem Pengurus sama dengan Tahun Buku 2021.

Decision
Determination of the use of net profit for the 2021 fiscal year:
a. Approved the allocation of the use of net profit and distribution of the Company's dividends for the 2021 Fiscal Year as proposed.
b. Approved the use of Production Services Reserves and Tantiem for the 2021 Fiscal Year which has become the cost for the 2021 fiscal year with a composition of 22.5% (twenty two point five percent) Employee Production Services and 2.5% (two point five percent) Management Tantiem. This amount was approved at the General Meeting of Shareholders for the 2020 Fiscal Year
c. Agreed that for the 2022 Fiscal Year, the composition of the Employee Production Service Reserves and Tantiem for Management is the same as for the 2021 Fiscal Year.

Agenda Ketiga
Third Agenda

Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2022
Approval of Provision of Partnership Development Funds for 2022

Keputusan
Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2022 sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) kepada Pemegang Saham Seri A, dengan alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.
Decision
Approved the provision of Partnership Development Funds for 2022 in the amount of IDR 21,000,000,000 (twenty one billion Rupiah) to Series A Shareholders, with an allocation for each shareholder of IDR 250,000,000 (two hundred and fifty million) Rupiah) and the remainder is divided proportionally based on the number of shares and the implementation will be regulated by the Board of Directors.

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Kantor Akuntan Publik atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022
Approval of the Delegation of Authority to the Company's Board of Commissioners to Establish a Public Accountant Office for the Audit of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year

Keputusan
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan s***igning partner*** dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih harus dipelajari.
Decision
Approved delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year taking into account the selection process for selecting a Public Accounting Firm by the Audit Committee, where data and facts related to aspects of independence, professionalism, audit methods and signing partners from each each Public Accounting Firm still needs to be studied.

Agenda Kelima *Fifth Agenda*
Penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2022 dan Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan *Determination of Remuneration for Company Management for Fiscal Year 2022 and Approval of Delegation of Authority to the Company's Board of Commissioners to determine Remuneration for the Company's Sharia Supervisory Board (DPS)* **Keputusan** Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.49.259.459.475,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan. ***Decision*** *Approved the size of the remuneration budget for the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors in 2022 amounting to Rp.49,259,459,475, - (forty nine billion two hundred fifty nine million four hundred fifty nine thousand four hundred seventy five Rupiah) and approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration for the Company's Sharia Supervisory Board (DPS).*

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Implementation of the 2022 Extraordinary GMS and Its Realization

Pemanggilan *Summons*	Pelaksanaan *Pelaksanaan*	Hasil RUPS *GMS Results*
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan surat nomor 001/PP.01.04/PAN-RUPS/DIR/2022 tanggal 11 April 2022 Perihal Penyampaian Undangan RUPSLB Tahun 2022 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 *The summons was held on April 23, 2022 based on letter number 001/PP.01.04/ PAN-RUPS/DIR/2022 dated April 11, 2022 Regarding Submission of Invitations for the 2022 EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year*	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 bertempat di Pekanbaru *The Annual GMS was held on April 23 2022 in Pekanbaru*	Hasil RUPS disampaikan melalui surat Kabar Riau Pos dan Batam Pos *The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos Newspapers*

Rekapitulasi kehadiran pada RUPS Luar Biasa tanggal 23 April 2022

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS on 23 April 2022

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kehadiran *Presence*		Keterangan *Information*
			Hadir *Present*	Tidak Hadir *Not present*	
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Gubernur Riau *Governor of Riau*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*
2.	H. Firdaus ST, MT	Walikota Pekanbaru *Pekanbaru Mayor*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Jamil (Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Muhammad Jamil (Secretariat of the Pekanbaru City Government) acting for and on behalf of the Pekanbaru City Government*
3.	Catur Sugeng Susanto, SH	Bupati Kampar *Regent of Kampar*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Representing for and on behalf of the Government of Kampar Regency*
4.	Kasmarni	Bupati Bengkalis *Regent of Bengkalis*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis *Representing for and on behalf of the Government of Bengkalis Regency*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kehadiran *Presence*		Keterangan *Information*
			Hadir *Present*	Tidak Hadir *Not present*	
5.	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu *Regent of Indragiri Hulu*		X	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan diwakili oleh Ir.H. Hendrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu *Based on the Underhand Power of Attorney represented by Ir.H. Hendrizal (Regional Secretary of Indragiri Hulu Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hulu Regency*
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir Regent of Indragiri Hilir		X	Berdasrkan surat kuasa dibawah tangan diwakili oleh AFRIZAL (Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Based on an underhanded power of attorney represented by AFRIZAL (Regional Secretariat of the Government of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency*
7.	Roby Kurniawan	PLT Bupati Bintan *PLT Regent of Bintan*		X	Berdasrkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh Mohammad Panca Adigoena (Asisten Administrasi Perkonomian Pembangunan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Mohammad Panca Adigoena (Development Economy Administration Assistant) acting for and on behalf of the Bintan Regency Government*
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si	Bupati Karimun *Regent of Karimun*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh DR.Sularno (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by DR.Sularno (Assistant to Governance and People's Welfare) acting for and on behalf of the Karimun Regency Government*
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna *Regent of Natuna*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency*
10.	Husni Merza, BBA., M.M.	Wakil Bupati Siak *Deputy Regent of Siak*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Representing for and on behalf of the Government of Siak Regency*
11.	H. Zukri Misran	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Representing for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency*
12.	Suhardiman Amby	Plt. Bupati Kuantan Singingi *Plt. Regent of Kuantan Singingi*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency*
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu *Regent of Rokan Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency*
14.	Sulaiman	Wakil Bupati Rokan Hilir *Deputy Regent of Rokan Hilir*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency*
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dubai*		√	Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, diwakili oleh H. Indra Gunawan (Sekretaris Daerah kota Dumai) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kehadiran *Presence*		Keterangan *Information*
			Hadir *Present*	Tidak Hadir *Not present*	
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Based on the Power of Attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP (Batam City Regional Secretary) acting for and on behalf of the Batam City Government*
17.	Endang Abdullah	Wakil Walikota Tanjung Pinang *Deputy Mayor of Tanjung Pinang*		X	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang Representing for and on behalf of the Municipal Government of Tanjung Pinang
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Representing for and on behalf of the Government of Lingga Regency*
19.	H.Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti *Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government*
20.	H.Ansar Ahmad	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of the Riau Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau *Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government*
21.	Abdul Haris, SH	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Sahtiar,SH,MM (Wakil Bupati Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas *Based on a Power of Attorney under the hand, represented by Sahtiar,SH,MM (Deputy Regent of Anambas Islands) acting for and on behalf of the Government of Anambas Islands Regency*
22.	Andi Buchari	Direktur Utama *President Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan *Present at the Meeting as the Main Director of the Company*
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Director of Operations*
24.	M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana & Jasa Perseroan *Present at the Meeting as Director of Funds & Services of the Company*
25.	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*	√		Hadir dalam Rapat Selaku Direktur Pembiayaan *Present at the Meeting as the Director of Finance*
26.	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Perseroan *Present at the Meeting as Director of Compliance & Risk Management of the Company*
28.	Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*
29.	Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*
25.	Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Tambahan Modal disetor yang telah disetorkan ke Rekening Perseroan.
Approval for Additional Paid-in Capital that has been deposited into the Company's Account.

Keputusan
Menyetujui Penambahan Modal disetor Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
Decision
Approved the addition of paid-in capital by the Provincial Government of Riau in the amount of Rp. 100,000,000.- (one hundred billion Rupiah).

Agenda Kedua
Second Agenda

Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2022 dan memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal yang akan disetor Pemegang Saham.
Approval of the Plan for Additional Paid-in Capital in 2022 and authorizes the Board of Commissioners to make a Deed of Registration for Additional Capital to be paid up by the Shareholders.

Keputusan
1. Menyetujui rencana tambahan modal yang akan disetor oleh masing-masing pemegang saham pada tahun 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Decision
1. *Approved the plan for additional capital to be deposited by each shareholder in 2022.*
2. *Approved to give power of attorney to the Board of Commissioners to make the Deed of Registration of Additional Shareholders' Capital up to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights.*

Agenda Ketiga
Third Agenda

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah dan beberapa Pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Approval of Amendments to the Company's Articles of Association related to Changes in the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank and several other Articles to comply with applicable regulations.

Keputusan
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi bank Umum Syariah sesuai dengan yang diusulkan
2. Meyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait beberapa Pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai yang diusulkan.

Menyetujui perubahan anggaran dasar tersebut dengan suara bulat dan menetapkan anggaran dasar yang telah disetujui tersebut akan dilaksanakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara sirkuler.
Decision
1. *Approved the Amendment to the Company's Articles of Association regarding the Change of the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial bank as proposed*
2. *Approved the amendments to the Company's Articles of Association regarding several other Articles to comply with the applicable provisions as proposed.*

Approved the amendments to the articles of association unanimously and determined that the approved articles of association would be carried out through a circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah
Determination of BRK Syariah Management and Sharia Supervisory Board

Keputusan
1. Menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin Operaional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan
2. Menyetujui secara bulat untuk penetapan lebih lanjut Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah tersebut akan dilaksanakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara Sirkuler.

Decision
1. *Approved the determination of the Sharia BRK Management and Supervisory Board with terms of office in accordance with their respective previous appointments, the determination is valid from the date of issuance of the approval letter from the Financial Services Authority and the Sharia Commercial Bank Operational Permit from the Financial Services Authority*
2. *Unanimously agreed that further determination of the Sharia BRK Management and Supervisory Board will be carried out at an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) in a Circular manner.*

Agenda Kelima *Fifth Agenda*
Persetujuan Pemberian kewenangan kepada Pengurus Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah *Approval of granting authority to the Company's Management to carry out necessary matters related to the Change of the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank* Keputusan 1. Menyetujui hal-hal yang telah dilakukan oleh Manajemen terkait dengan perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Pengurus Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan terkait perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah, salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah aksi korporasi pelepasan/penjualan surat berharga konvensional pada Bank Riau Kepri dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah, pelepasan/penjualan surat berharga tersebut mengacu kepada kondisi pasar pada suatu periode yang dimungkinkan terjadinya Risiko Bisnis. *Decision* *1. Approve the things that have been done by Management related to changes in the business activities of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank* *2. Approved the granting of authority to the Company's Management to carry out necessary matters related to the change of the Company's business activities to become a Sharia Commercial Bank, one of the consequences of this is the corporate action of releasing/selling conventional securities at Bank Riau Kepri in the context of conversion to a Sharia Commercial Bank, the release/sale of these securities refers to market conditions in a period where Business Risk is possible.*

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler Tahun 2022 dan Realisasinya

Implementation of The 2022 Circular Extraordinary GMS and Its Realization

Pemberitahuan *Announcement*	Pelaksanaan *Pelaksanaan*	Hasil RUPS *GMS results*
Dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 perihal Penandatanganan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BRK Syariah *Held on May 30, 2022 regarding the Signing of the BRK Syariah Shareholders Circular Decision*	RUPS Luar Biasa dilaksanakan secara Sirkuler dengan menyampaikan langsung kepada seluruh pemegang saham (31 Mei s/d 12 Juni 2022) *The Extraordinary General Meeting of Shareholders is held circularly by submitting it directly to all shareholders (31 May to 12 June 2022)*	Hasil RUPS disampaikan melalui surat Kabar Riau Pos dan Batam Pos *The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos Newspapers*

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Secara Sirkuler Tahun 2022

Attendance Recapitulation at The 2022 Extraordinary GMS Circular

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*	Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler *Circular Decision Signing Date*
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Gubernur Riau *Governor of Riau*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*	12 Juni 2022 *June 12, 2022*
2.	Muflihun	PJ.Walikota Pekanbaru *Acting Mayor of Pekanbaru*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Representing for and on behalf of the City Government of Pekanbaru*	02 Juni 2022 *June 02, 2022*
3.	Kamsol	PJ .Bupati Kampar *PJ. Regent of Kampar*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Representing for and on behalf of the Government of Kampar Regency*	31 Mei 2022 *May 31, 2022*
4.	Kasmarni	Bupati Bengkalis *Regent of Bengkalis*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis *Representing for and on behalf of the Government of Bengkalis Regency*	01 Juni 2022 *June 01, 2022*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*	Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler *Circular Decision Signing Date*
5.	Rezita Meylani Yopi	Bupati Indragiri Hulu *Regent of Indragiri Hulu*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indargiri Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Indargiri Hulu Regency*	01 Juni 2022
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir *Regent of Indragiri Hilir*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Representing for and on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency*	01 Juni 2022
7.	Roby Kurniawan	Bupati Bintan *Regent of Bintan*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Representing for and on behalf of the Bintan Regency Government*	02 Juni 2022
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si	Bupati Karimun *Regent of Karimun*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Representing for and on behalf of the Government of Karimun Regency*	03 Juni 2022
9.	Siswandi	Bupati Natuna *Regent of Natuna*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Government of Natuna Regency*	04 Juni 2022
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si	Bupati Siak *Regent of Siak*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Representing for and on behalf of the Government of Siak Regency*	02 Juni 2022
11.	H.Zukri	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Representing for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency*	06 Juni 2022
12.	Suhardiman Amby	Bupati Kuantan Singingi Regent of Kuantan Singingi	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency*	31 Mei 2022
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu *Regent of Rokan Hulu*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency*	02 Juni 2022
14.	Afrizal Sintong	Bupati Rokan Hilir *Regent of Rokan Hilir*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency*	31 Mei 2022
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dumai*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Representing for and on behalf of the City Government of Dumai*	02 Juni 2022
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Representing for and on behalf of the Batam City Government*	11 Juni 2022
17.	Hj. Rahma, S. IP	Walikota Tanjung Pinang *Mayor of Tanjung Pinang*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang *Representing for and on behalf of the Municipal Government of Tanjung Pinang*	05 Juni 2022
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Representing for and on behalf of the Government of Lingga Regency*	07 Juni 2022
19.	Muhammad Adil	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti *Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government*	31 Mei 2022

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Keterangan *Information*	Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler *Circular Decision Signing Date*
20.	H.Ansar Ahmad	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of the Riau Islands*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau *Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government*	31 Mei 2022
21.	Abdul Haris, SH	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas *Representing for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government*	03 Juni 2022
22.	Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan *Present at the Meeting as the Main Director of the Company*	14 Juni 2022
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *director of Operations*	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Present at the Meeting as the Main Director of the Company*	14 Juni 2022
24.	Tengkoe Irawan	Direktur kredit & Syariah *Director of Credit & Sharia*	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Pembiayaan Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Director of Finance*	14 Juni 2022
25.	M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa *Director of Funds & Services*	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana & Jasa Perseroan *Present at the Meeting as Director of Funds & Services of the Company*	14 Juni 2022
23.	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan *Present at the Meeting as the Director of Compliance and Risk Management of the Company*	14 Juni 2022
24.	Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The Main commissioner*	Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan *Present at the Meeting as a Commissioner of the Company*	14 Juni 2022
25.	Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*	14 Juni 2022
26.	Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Present at the Meeting as the Company's Independent Commissioner*	14 Juni 2022

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS LUAR BIASA SECARA SIRKULER TAHUN 2022

DECISIONS AND REALIZATION OF THE EXTRAORDINARY GMS CIRCULARLY IN 2022

Agenda Pertama *First Agenda*
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah dan beberapa Pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. *Approval of Amendments to the Company's Articles of Association related to Changes in the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank and several other Articles to comply with applicable regulations.*
Keputusan Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi Bank Umum Syariah. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait beberapa pasal lainnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. *Decision* *Approved the Amendments to the Company's Articles of Association regarding the Changes in the Company's Business Activities to become a Sharia Commercial Bank.* *Approved changes to the Company's Articles of Association regarding several other articles to comply with applicable regulations.*
Agenda Kedua *Second Agenda*
Persetujuan Penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah
Keputusan Menyetujui penetapan Pengurus dan Dewan Pengawas syariah BRK Syariah dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan masing-masing sebelumnya, penetapan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Izin Operaional Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. *Decision* *Approved the determination of the Management and Sharia Supervisory Board of BRK Syariah with terms of office in accordance with their respective previous appointments, the determination is valid from the date of issuance of the approval letter from the Financial Services Authority and the Sharia Commercial Bank Operational Permit from the Financial Services Authority.*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor: 237/KEPDIR/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I
   Uraian Pendahuluan dan Latar Belakang Penyusunan, Dasar Hukum, serta Pengertian-Pengertian.
2. Bab II
   Uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai Kedudukan DPS, Persyaratan Anggota DPS, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang DPS, Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS, Jumlah dan Perangkapan Keanggotaan DPS, Struktur Organisasi DPS, Rapat DPS, Masa Jabatan DPS, Hak dan Fasilitas Anggota DPS dan ketentuan lainnya.
3. Bab III
   Memuat Pedoman dan Mekanisme Pengawasan dan Tata Cara Pelaporan DPS, berisi tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPS Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank, Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank serta Tata Cara Pelaporan DPS.
4. Bab IV
   Memuat Objek Material Pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah termasuk Produk dan Jasa Bank dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.
5. Bab V
   Memuat Lampiran-Lampiran.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No. Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank

SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board is an independent body tasked with directing, consulting, evaluating and supervising Islamic Bank activities in order to ensure that Islamic Bank business activities comply with sharia principles as determined by fatwas and Islamic sharia. Based on the provisions of Bank Indonesia, all Islamic banking transactions must be carried out in accordance with the fatwa stipulated by the National Sharia Council.

Guidelines and Working Procedures of the Sharia Supervisory Board

The Bank has issued Decree of the Board of Directors Number: 237/KEPDIR/2022 dated 28 December 2022 concerning the Company Manual (BPP) of the BRK Syariah Supervisory Board which consists of 5 (five) Chapters with the following details:

1. *Chapter I*
   Preliminary Description and Background of the Preparation, Legal Basis, and Definitions.
2. *chapter II*
   Description of the DPS institutionally, regarding provisions regarding the Position of the DPS, Requirements for DPS Members, Duties and Responsibilities and Authorities of the DPS, Mechanisms for Determination and Appointment of DPS Members, Number and Doubles of DPS Membership, Organizational Structure of the DPS, DPS Meetings, Term of Office of the DPS, Rights and DPS Member Facilities and other provisions.
3. *chapter III*
   Contains DPS Guidelines and Supervision Mechanisms and Reporting Procedures, containing the DPS Supervision Implementation Mechanism of the Bank's New Product Development Process, Supervision of Bank Activities and DPS Reporting Procedures.
4. *Chapter IV*
   Contains DPS Supervision Material Objects, containing sharia-laden materials including Bank Products and Services guided by DSN-MUI fatwas and sharia principles.
5. *Chapter V*
   Loading Attachments.

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

In accordance with PBI No. Number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of DPS are as follows:

1. *Assessing and ensuring compliance with Sharia principles on operational guidelines and products issued by the Bank.*
2. *Supervise the Bank's new product development process*

agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

to comply with the fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.
3. Request a fatwa from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council for a new Bank product that does not yet have a fatwa.
4. Conduct periodic reviews of compliance with sharia principles regarding the mechanisms for raising funds and channeling funds as well as Bank services.
5. Request data and information related to sharia aspects from the Bank's work units in the context of carrying out their duties.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

The composition and basis for the appointment of the BRK Syariah Sharia Supervisory Board in 2022 are as follows

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective date*	Periode Jabatan *Term of Office*
Zulhendri Rais	Ketua	Surat No.SR-72/KO.053/2020	08 April 2020	08 April 2020 – 07 April 2024
Saifuddin Juliar	Anggota	Surat No.SR-234/KO.053/2021	07 Juni 2021	07 Juni 2021 -06 Juni 2025

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non Bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah:

Concurrent Positions and Conflict of Interest of the Sharia Supervisory Board

DPS members can only hold concurrent positions as DPS members at a maximum of 2 (two) other banks and 2 (two) non-bank sharia financial institutions. A maximum of 2 (two) DPS members may hold concurrent positions as members of the DSN-MUI. DPS members are prohibited from holding concurrent positions as consultants in all Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The following is a table of concurrent positions of the Sharia Supervisory Board:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Nama *Name*	Jabatan di BRK Syariah *Position at BRK Syariah*	Jabatan pada Perusahaan / Instansi Lain *Position in other companies / agencies*
Zulhendri Rais	Ketua *Chairman*	DPS pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) *DPS at PT Capital for the People's Economy (PER)*
Saifuddin Juliar	Anggota *Member*	Tidak Ada *There isn't any*

Setiap anggota DPS dilarang:
1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS;
3. Merangkap jabatan sebagai dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau UUS.

Each DPS member is prohibited from:
1. *Utilizing the Bank for personal, family and/or other party interests that can reduce the assets or reduce the Bank's profits;*
2. *Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and facilities determined by the GMS;*
3. *Concurrent positions as well, both individuals and companies, including owners of companies that provide consulting services in all Islamic Commercial Banks (BUS) and/or UUS.*

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Table of Share Ownership of the Sharia Supervisory Board

Nama *Name*	Jabatan pada DPS BRK Syariah *Position at DPS BRK Syariah*	Kepemilikan Saham | *Shareholding*			
		Bank *Bank*	Bank Lain *Other Banks*	Lembaga Keuangan Non Bank *Non-bank financial institutions*	Perusahaan Lain *Other Companies*
Zulhendri Rais	Ketua *Chairman*	Tidak Ada *There isn't any*	Tidak Ada *There isn't any*	Tidak Ada *There isn't any*	Tidak Ada *There isn't any*
Saifuddin Juliar	Anggota *Member*	Tidak Ada *There isn't any*	Tidak Ada *There isn't any*	Tidak Ada *There isn't any*	Tidak Ada *There isn't any*

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board meeting

The BRK Syariah Sharia Supervisory Board has held and attended several meetings related to discussing product development, issuance of sharia opinions, Bank services, Bank operations and others related to sharia aspects. According to Bank Indonesia regulations, meetings are held at least 1 (one) time a month.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah
Table of Frequency and Level of Attendance in Sharia Supervisory Board Meetings

Nama *Name*	Jabatan Position	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Meetings*	Tingkat Kehadiran *Attendance Rate*
Zulhendri Rais	Ketua *Chairman*	11	11	100%
Saifuddin Juliar	Anggota *Member*	11	10	91%

Tabel Tanggal, Agenda, dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
Table of Dates, Agenda, and Participants of the 2022 Sharia Supervisory Board Meeting

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
1	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Pemaparan pembahasan kredit sindikasi MNC Land menjadi Pembiayaan sindikasi Pembahasan kredit dengan outstanding nol dengan tunggakan bunga Pembahasan ketentuan pedoman pembiayaan rekening koran syariah Pembiayaan usaha mikro dengan subsidi margin Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Penyusunan jadwal pemeriksaan DPS periode Juli-Desember 2021 *Presentation of the discussion of MNC Land syndicated loans to syndicated financing* *Discussion of credit with outstanding zero interest arrears* *Discussion on the provisions of guidelines for sharia checking account financing* *Micro business financing with margin subsidies from the Riau Islands Provincial Government* *Preparation of DPS audit schedule for July-December 2021 period*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Sharia Compliance
2	04 Maret 2022 *March 04, 2022*	Pembahasan perlakuan konversi kredit baki debet Rp.0 yang masih terdapat tunggakan bunga *Discussion of the treatment of the conversion of a debit balance credit of Rp.0 which still has interest arrears*	Zulhendri Rais Fajar Restu Febriansyah Sharia Compliance Project Management Officer (PMO) Konversi
3	18 Mei 2022 *May 18, 2022*	Pembahasan kerjasama e-Money bank Mandiri dalam rangka konversi BRK *Discussion of bank Mandiri e-Money cooperation in the context of BRK conversion*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar M.A. Suharto Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Kepatuhan
4	30 Mei 2022 *May 30, 2022*	Pembahasan akad pada trade finance syariah, ekspor impor syariah, supplier dan buyer financing *Discussion of contracts on sharia trade finance, sharia import and export, supplier and buyer financing*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Sharia Compliance
5	01 Juli 2022 *July 01, 2022*	Pembahasan grand design sharia mindset oleh DPS *Discussion on the grand design sharia mindset by DPS*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Fajar Restu Febriansyah Pemimpin Divisi MSDI Pemimpin Desk Service Quality
6	13 September2022 *September 13, 2022*	Pembahasan skema pengakuan pendapatan murabahah anuitas *Discussion of annuity murabaha income recognition scheme*	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Andi Buchari 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Tengkoe Irawan 6. Said Syamsuri 7. M.A. Suharto 8. Syahrial Abdi 9. Rita Anugerah 10. Roy Prakoso 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi Konsumer 13. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
7	21 Oktober2022 *October 21, 2022*	Pembahasan akad MMQ dalam pembiayaan segmen konsumer *Discussion of the MMQ contract in financing the consumer segment*	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Tengkoe Irawan 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Sharia Compliance
8	24 November 2022 *November 24, 2022*	Pemaparan draft Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendapat persetujuan DPS *Presentation of the Sharia Supervisory Board (DPS) Company Manual (BPP) draft for DPS approval*	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Sharia Compliance

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
9	24 November 2022 *November 24, 2022*	Pemaparan materi terkait SIPA untuk mendapat opini syariah *Presentation of material related to SIPA to get sharia opinions*	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. M.A. Suharto 4. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
10	20 Desember 2022 *December 20, 2022*	Penyusunan jadwal rutin pemeriksaan DPS periode Juli-Desember 2022 *Compilation of a routine DPS inspection schedule for the July-December 2022 period*	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Sharia Compliance
11	20 Desember 2022 *December 20, 2022*	Pembahasan dalam hal pemberian Dana TBDSP *Discussion in terms of granting TBDSP Funds*	1. Zulhendri Rais 2. Saifuddin Yuliar 3. Sharia Compliance

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Salah satu tugas dan tanggung jawab DPS adalah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dalam bentuk: memberikan pendapat syariah atau opini atas produk Bank yang akan dikeluarkan. Pada tahun 2022, DPS telah memberikan opini syariah sebagai berikut:

Report on the Implementation of the Duties of the Sharia Supervisory Board

Directions and Recommendations of the Sharia Supervisory Board for 2022

One of the duties and responsibilities of DPS is to supervise the process of developing new Bank products in the form of: providing sharia opinions or opinions on Bank products to be issued. In 2022, DPS has provided sharia opinions as follows:

No.	Tanggal *Date*	Judul Opini DPS *DPS Opinion Title*	Nomor Register *Registration Number*
1	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Opini Syariah Terhadap Peralihan Kredit Sindikasi Menjadi Pembiayaan Sindikasi Syariah Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah *Sharia Opinion on the Transition of Syndicated Loans to Sharia Syndicated Financing in the Context of Changing Business Activities (Conversion) of Bank Riau Kepri to BRK Syariah*	No. 001/O-DPS/I/2022
2	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Opini Syariah Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Sharia Opinion Regarding Sharia Current Account Financing*	No. 002/O-DPS/I/2022
3	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	Opini Syariah Tentang Pedoman Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Subsidi Margin *Sharia Opinion on Guidelines for Distribution of Micro Business Financing with Margin Subsidies*	No. 003/O-DPS/I/2022
4	21 Maret 2022 *March 21, 2022*	Opini Syariah Terhadap Perlakuan Konversi Kredit Baki Debet Rp.0 Yang Masih Terdapat Tunggakan Bunga *Sharia Opinion on the Treatment of Debt Balance Credit Conversions of IDR 0, which still have interest arrears*	No. 004/O-DPS/III/2022
5	23 Mei 2022 *May 23, 2022*	Opini Syariah Terhadap Pembiayaan Sindikasi PT PPSD *Sharia Opinion on PT PPSD Syndicated Financing*	No. 005/O-DPS/V/2022

No.	Tanggal *Date*	Judul Opini DPS *DPS Opinion Title*	Nomor Register *Registration Number*
6	23 Mei 2022 *May 23, 2022*	Opini Syariah Terkait Kerjasama Co-Branding Uang Elektronik (E-Money) dengan Bank Mandiri *Sharia Opinion Regarding Electronic Money (E-Money) Co-Branding Collaboration with Bank Mandiri*	No. 006/O-DPS/V/2022
7	30 Mei 2022 *May 30, 2022*	Opini Syariah Perihal Layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bank Riau Kepri *Sharia Opinion Regarding Bank Riau Kepri Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Services*	No. 007/O-DPS/V/2022
8	30 Juni 2022 *June 30, 2022*	Opini Syariah Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Treasury *Sharia Opinion of Treasury Company Manual (BPP).*	No. 008/O-DPS/VI/2022
9	30 Juni 2022 *June 30, 2022*	Opini Syariah BPP dan SOP Trade Finance Syariah *BPP Sharia Opinion and Sharia Trade Finance SOP*	No. 009/O-DPS/VI/2022
10	26 Agustus 2022 *August 26, 2022*	Opini Syariah tentang QRIS *Sharia Opinion on QRIS*	No. 010/O-DPS/VI/2022
11	13 September 2022 *September 13, 2022*	Opini Syariah tentang Transaksi Impor Syariah *Sharia Opinion on Sharia Import Transactions*	No. 011/O-DPS/IX/2022
12	13 September 2022 *September 13, 2022*	Opini Syariah tentang Transaksi Ekspor Syariah *Sharia Opinion on Sharia Export Transactions*	No. 012/O-DPS/IX/2022
13	16 September 2022 *September 16, 2022*	Opini Syariah tentang Kartu Debit *Sharia Opinion on Debit Cards*	No. 013/O-DPS/IX/2022
14	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Opini Syariah Buyer Finance *Sharia Opinion of Buyer Finance*	No. 014/O-DPS/X/2022
15	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Opini Syariah Supplier Financing *Opinion of Sharia Supplier Financing*	No. 015/O-DPS/X/2022
16	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Opini Syariah Negosiasi Wesel Ekspor *Sharia Opinion on Export Bills Negotiations*	No. 016/O-DPS/X/2022
17	21 Oktober 2022 *October 21, 2022*	Opini Syariah BRKS MOBILE *BRKS MOBILE Syariah Opinion*	No. 017/O-DPS/X/2022
18	24 Oktober 2022 *October 24, 2022*	Opini Syariah tentang Pembiayaan Aneka Guna Akad MMQ *Sharia Opinion on Multipurpose Funding for MMQ Contracts*	No. 018/O-DPS/X/2022
19	01 November 2022 *November 01, 2022*	Opini Syariah tentang Skema Pengakuan Keuntungan Murabahah Anuitas *Sharia Opinion on the Annuity Murabaha Profit Recognition Scheme*	No. 019/O-DPS/XI/2022
20	29 November 2022 *November 29, 2022*	Opini Syariah tentang SIPA *Sharia Opinion on SIPA*	No. 020/O-DPS/XI/2022

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja DPS BRK Syariah sepanjang tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan manajemen Bank dan semua pihak terkait sehingga DPS dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assesment GCG* yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment GCG* ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa BRK Syariah melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman kerja Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris berikut organ pendukungnya. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri dan praktik-praktik terbaik (***best practices***) tata kelola Bank yang baik yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi dalam BRK Syariah, didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment

The performance of DPS BRK Syariah throughout 2022 is inseparable from the support of the Bank's management and all related parties so that DPS can carry out its various duties and responsibilities both in terms of quantity and quality.

This is demonstrated by the achievement of holding DPS meetings, issuing DPS Opinions and implementing Sharia Supervisory Board (Ptic Test) of DPS. DPS performance evaluation is carried out through GCG Self Assessment which is submitted to the Financial Services Authority based on OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The implementation of the GCG Self Assessment is carried out periodically every semester which is reported to the OJK for approval and fulfillment of the submission of the Sharia Supervisory Board Supervision Report which is submitted semiannually to the OJK Sharia Banking Department and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an organ of the Bank that is collectively responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that BRK Syariah implements GCG at all levels or levels of the organization. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.

Board of Commissioners Work Guidelines

The Board of Commissioners' work guidelines contain a compilation of corporate law principles, applicable laws and regulations, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association that regulate the work procedures of the Board of Commissioners and their supporting organs. The work guidelines and rules of conduct for the Board of Commissioners are the result of the codification of various regulations that apply to Bank Riau Kepri and best practices for good bank governance as outlined in the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDK/2021 dated 25 May 2021 concerning Board of Commissioners Work Guidelines. The purpose of the Board of Commissioners Guidelines is to facilitate the Board of Commissioners in understanding the regulations related to the work procedures of the Board of Commissioners and their supporting organs. For this reason, development is carried out in accordance with the needs and dynamics that occur in BRK Syariah, based on applicable regulations and does not violate the provisions in the Articles of Association.

Adapun isi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, Misi, Tujuan
2. Fungsi
3. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
4. Persyaratan untuk Menjadi Anggota Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
10. Waktu Kerja
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
14. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan, OJK Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BRK Syariah termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan BRK Syariah.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Bank lainnya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, Corporate Plan, Business Plan) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.

the contents of the Board of Commissioners' Work Guidelines, among others, regulate the following matters:

1. *Vision, Mission, Goals*
2. *Function*
3. *Total, Composition and Independence of the Board of Commissioners*
4. *Requirements to Become a Member of the Board of Commissioners*
5. *Term of Office of Members of the Board of Commissioners*
6. *Orientation Program and Capacity Building*
7. *Office Ethics*
8. *Duties and Authorities of the Board of Commissioners*
9. *Duties and Responsibilities of the Main Commissioner*
10. *Working time*
11. *Board of Commissioners meeting*
12. *Performance Evaluation of the Board of Commissioners*
13. *Working Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors*
14. *Organs under the Board of Commissioners*

Duties and Obligations of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as regulated in the Work Guidelines are as follows:

1. *Subject to the provisions of laws and regulations, regulations from the Banking Authority, OJK Articles of Association and resolutions of the GMS.*
2. *Have good faith, be careful and responsible in carrying out tasks for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Bank.*
3. *Carry out supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of Sharia BRK including the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and decisions of the General Meeting of Shareholders and laws and regulations.*
4. *Examining and reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the report.*
5. *Carry out supervision to ensure that the Board of Directors complies with the provisions of the Company's internal regulations.*
6. *Provide advice, opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the management of Sharia BRK.*
7. *Provide opinions and advice to the Board of Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of the Bank (KUD/General Policy of the Board of Directors, Corporate Plan, Business Plan) as stipulated in the Articles of Association.*
8. *Provide opinions and suggestions as well as approval regarding the Bank's Long Term Plan and Business Plan proposed by the Board of Directors.*
9. *Reviewing reports from the Board of Directors and all staff, especially those related to specific tasks that have been decided together.*
10. *Review reports from the Committees under the Board of Commissioners.*

11. Mengikuti perkembangan kegiatan BRK Syariah baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Bank maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan prudential banking practices
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance.

11. Follow the development of Sharia BRK activities both from internal information provided by the Bank and from external information from the media and other sources.

12. Attend work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff.
13. Make efforts to ensure that the Board of Directors and staff have complied with the provisions of the laws and regulations.
14. Prepare the work plan of the Board of Commissioners for the current year period.
15. Ensuring follow-up of the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from statutory provisions, Articles of Association, and prudential banking practices

16. Ensuring that the Board of Directors and staff in every business activity of the Bank apply GCG principles, among others by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

Komposisi dan Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris BRK Syariah adalah sebagai berikut.

Composition and Distribution of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The composition and basis for the appointment of the BRK Syariah Board of Commissioners are as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 Surat OJK No.S-492/ KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021* *OJK Letter No.S-492/KO.053/2021 dated 23 December 2021* *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* *OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*	23 Desember 2021 December 23, 2021	15 November 2021 – 14 November 2025 *November 15, 2021 – November 14, 2025*
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 *Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* *OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022* *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* *OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*	25 Januari 2022 January 25, 2022	15 November 2021 – 14 November 2025 *November 15, 2021 – November 14, 2025*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No. SR-106/KO.053/ 2019 tanggal 5 September 2019 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 *Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* *OJK Letter No. SR-106/KO.053/ 2019 dated 5 September 2019* *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* *OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*	05 September 2019 September 05, 2019	19 Agustus 2019 – 18 Agustus 2023 *19 August 2019 – 18 August 2023*

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah:

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The division of supervisory duties for the Board of Commissioners is:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Table of Division of Duties of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Jabatan *Position*	Bidang Tugas Pengawasan *Field of Supervision Tasks*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. *Coordinating the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Ketua Komite Pemantau Risiko *Head of the Risk Monitoring Committee*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi *Chairman of the Audit Committee and the Remuneration & Nomination Committee*

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS taking into account integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, Bank Indonesia Regulations concerning Commercial Banks, and Bank Indonesia Regulations regarding Fit and Proper Tests. .

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.

Program Orientasi mengenai BRK Syariah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Bank, mencakup materi sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai BRK Syariah berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh BRK Syariah.
3. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Komisaris.

Orientation Program for New Commissioners

With the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders, the existence of an Orientation Program is very important to implement. This is because the members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in a team before. The responsibility for implementing the Orientation Program rests with the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the responsibility for implementing the orientation program lies with the President Director.

The Orientation Program on Sharia BRK is given to members of the Board of Commissioners who are serving at the Bank for the first time, covering the following material:

1. *An overview of BRK Syariah relates to objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and various other strategic issues.*
2. *Implementation of good corporate governance principles by BRK Syariah.*
3. *Legal responsibility of members of the Board of Commissioners.*

4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok, Unit dan Pegawai-pegawai di BRK Syariah serta program lainnya.

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga pada tahun 2022 tidak ada program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:
1. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
2. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Kriteria Penentuan Komisaris Independen
Penentuan Komisaris Independen BRK Syariah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan

4. Explanation relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies as well as duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the Board of Commissioners.

5. Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
6. Team building. This activity includes all members of the Board of Commissioners, both those who have recently served and those who have previously served with the aim of realizing cohesiveness and teamwork as Commissioners.

The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to Division Leaders, Groups, Units and Employees at BRK Syariah and other programs.

In 2022 there will be no change in the composition of the Board of Commissioners, so that in 2022 there will be no orientation program for new members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioner

Independent Commissioners as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, are members of the Board of Commissioners who do not have:
1. financial, management, share ownership and/or family relations with the controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or
2. financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, so as to support its ability to act independently.

The existence of Independent Commissioners is intended to be able to encourage the creation of a climate and work environment that is more objective and places fairness and equality among various interests including the interests of shareholders and other stakeholders. As an Independent Commissioner, he must be free from conflicts of interest.

Criteria for Determining Independent Commissioners
Determination of BRK Syariah Independent Commissioners is carried out by taking into account the following matters:
a. Independent Commissioners must be at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
b. Has no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
c. Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect the person's ability to

Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

act independently must undergo a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner.

d. The provisions referred to in point c do not apply to former members of the Board of Directors who are in charge of the supervisory function or Executive Officers who carry out the supervisory function at the Bank.

e. Any proposal to replace and/or appoint a member of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
f. Passed Fit and Proper Test and received approval from the Financial Services Authority.
g. Non-Independent Commissioners may switch to becoming Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.
h. Non-Independent Commissioners who will switch to becoming Independent Commissioners must undergo a cooling off period of at least 6 (six) months.
i. The transition from Non-Independent Commissioner to Independent Commissioner must obtain approval from the Financial Services Authority.

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang memuat bahwa masing-masing anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independn, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen tersebut dan bersedia untuk diganti.

Independent Commissioner Statement

Each member of the Independent Commissioner has made an Independent Statement stating that each member of the Independent Commissioner has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently as stipulated in the provisions regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

If in the future, it is found that the Independent Commissioner has financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently, then the person concerned willing to relinquish the position of Independent Commissioner and willing to be replaced.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Anugerah

Tempat/tanggal lahir : Bengkal/27 Maret 1961

Alamat domisili (copy KTP terlampir) : Jl. Bahana Komp. BPD No. 03 Pekanbaru

Jabatan : Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

(Rita Anugerah)

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roy Prakosa

Tempat/tanggal lahir : Jakarta/5 Januari 1964

Alamat domisili (copy KTP terlampir) : RP. Sawah RT 003/RW 002 Kec. Jagakarsa Jakarta

Jabatan : Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

(Roy Prakosa)

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

a. lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; dan/atau
b. lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba;

   Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Multiple Positions and Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Double job

In the Financial Services Authority Regulation Number: 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, it is stipulated that the Board of Commissioners is prohibited from holding multiple positions as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Officer in:

a. financial institutions or financial companies, both banks and non-banks; and/or
b. more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, whether domiciled inside or outside the country.

Does not include concurrent positions in terms of:

a. members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;
b. Non-Independent Commissioners carry out the functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
c. members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions;

   The duties in the positions and functions referred to above can be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris:

The following is a table of dual positions of the Board of Commissioners:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Table of Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan di Bank Riau Kepri *Position at Bank Riau Kepri*	Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan *Position in Company / Financial Institution / Non-Financial*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	Tidak Ada
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Tidak Ada
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Tidak Ada

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Commissioners Competency Development Policy

Board of Commissioners Competency Training/ Development Program

During 2022, Members of the Board of Commissioners have participated in several trainings/seminars and workshops related to their fields of work, including the following:

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*
Syahrial Abdi (Komisaris Utama)	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank *Sharia Banking Training for Bank Management*	Tazkia Consulting	17/2/2022
	Pelatihan Publik "Kerugian Negara dalam BUMN & BUMD : Resiko Investasi atau Korupsi?" *Public Training "State Losses in BUMN & BUMD: Risk of Investment or Corruption?"*	Asia Anti Fraud (AAF)	16/6/2022
	Seminar Nasional FKDK BPDSI *BPDSI FKDK National Seminar*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) *Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)*	3/8/2022
	Pelatihan dan Uji Sertifikasi International CIISA (Certified International Information System Auditor) *CIISA International Certification Training and Test (Certified International Information System Auditor)*	PT Hutama Hanriz Indonesia	12/11/2022
	Workshop FKDK BPDSI Wilayah Barat *West Region BPDSI FKDK Workshop*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) *Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)*	24/11/2022

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*
Rita Anugerah (Komisaris Independen)	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank *Sharia Banking Training for Bank Management*	Tazkia Consulting	17/2/2022
	Pelatihan Publik "Kerugian Negara dalam BUMN & BUMD : Resiko Investasi atau Korupsi?" *Public Training "State Losses in BUMN & BUMD: Risk of Investment or Corruption?"*	Asia Anti Fraud (AAF)	16/6/2022
	Seminar Nasional FKDK BPDSI *BPDSI FKDK National Seminar*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)	3/8/2022
	Pelatihan dan Uji Sertifikasi International CIISA (Certified International Information System Auditor) *CIISA International Certification Training and Test (Certified International Information System Auditor)*	PT Hutama Hanriz Indonesia	12/11/2022
	Pelatihan Publik Program Pemelihaaran Sertifikasi "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI" *Public Training for Certification Maintenance Program "Spell the Functions and Active Roles of Commissioners in the BANI Era"*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	19/12/2022
Roy Prakoso (Komisaris Independen)	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank *Sharia Banking Training for Bank Management*	Tazkia Consulting	17/2/2022
	Pelatihan Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD :Resiko Investasi atau Korupsi *State Loss Training in BUMN and BUMD: Risk of Investment or Corruption*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	14/7/2022
	Seminar Nasional FKDK BPDSI *BPDSI FKDK National Seminar*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) *Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)*	3/8/2022
	Pelatihan Risk Appetite Statement "Simulasi Penetapan Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Appetite Statement, dan Rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan" Risk Appetite Statement Training "Simulation of Establishing Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Appetite Statement, and Accountable Recommendations"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	22/9/2022
	Pelatihan dan Uji Sertifikasi International CIISA (Certified International Information System Auditor) *CIISA International Certification Training and Test (Certified International Information System Auditor)*	PT Hutama Hanriz Indonesia	12/11/2022
	Workshop FKDK BPDSI Wilayah Barat *West Region BPDSI FKDK Workshop*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) *Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)*	24/11/2022

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Sertifikasi Manajemen Risiko *Risk Management Certification*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2025 *Level 1 Risk Management Certification, valid until December 15, 2025*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 *Level 2 Risk Management Certification, valid until May 8, 2024*
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 *Level 2 Risk Management Certification, valid until March 5, 2025*

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Fungsi Pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi untuk memastikan Direksi menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus pengawasan Dewan Komisaris antara lain terkait dengan pengawasan stratejik, pengawasan risiko, pengawasan penggunaan modal dan terhadap pelaksanaan tata kelola bank, sebagai berikut:

a. Pengawasan stratejik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik.
b. Pengawasan terhadap pengelolaan risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan stratejik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan perundangan lainnya.
c. Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis di industri perbankan.
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola bank dalam setiap kegiatan usaha BRK Syariah pada seluruh tingkatan organisasi.

Procedures and frequency of giving advice

The supervisory function of the Board of Commissioners is manifested in the supervisory function where the Board of Commissioners provides recommendations and directions to the Directors to ensure that the Directors carry out the management of the Bank in accordance with the applicable laws and regulations. The focus of the Board of Commissioners' supervision is related to strategic supervision, risk supervision, supervision of the use of capital and the implementation of bank governance, as follows:

a. Strategic oversight by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.
b. Oversight of risk management by conducting oversight to ensure that risk appetite and risk tolerance as well as risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Bank Indonesia Regulations and other laws and regulations.
c. Supervision of the use of Bank Capital, namely by ensuring that capital adequacy provisions are implemented by the Board of Directors in accordance with Bank Indonesia Regulations and business practices in the banking industry.
d. Supervision of the implementation of bank governance as an effort to ensure the implementation of bank governance principles in every BRK Syariah business activity at all levels of the organization.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Board of Commissioners meeting

The Board of Commissioners Meeting Policy has been regulated in the Board of Commissioners Work Guidelines for the Board of Commissioners Meeting section, namely:

1. Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time when deemed necessary by one or more members of the commissioners or at the written request of one or more members of the commissioners or at the written request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of 1 (one) person or more joint shareholders -sama represents 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha Bank. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiao anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
13. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas di dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

2. Meetings of the Board of Commissioners must be held periodically at least 4 (four) times a year and must be attended by all members of the Board of Commissioners physically at least 2 (two) times a year
3. Invitations to the Board of Commissioners' meetings are made by the Main Commissioner.
4. Invitations for the Board of Commissioners' meeting are delivered to each member of the Board of Commissioners directly, or by registered letter with proper receipt no later than 1 (one) day before the meeting is held excluding the date of the summons and the date of the meeting.
5. The summons for the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.
6. Meetings of the Board of Commissioners are held at the domicile of the Bank or the place of business of the Bank. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Commissioners' meeting can be held anywhere and has the right to make binding decisions.
7. The meeting of the Board of Commissioners is chaired by the Main Commissioner, in the event that the Main Commissioner is absent or unavailable which does not need to be proven to a third party, then the meeting of the Board of Commissioners is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by and from the members of the Board of Commissioners who are present.
8. A member of the Board of Commissioners can be represented at a meeting of the Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney.
9. The meeting of the Board of Commissioners is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting.
10. Decisions of the Board of Commissioners meetings must be taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the agreed votes of more than ½ (one half) of the votes cast at the meeting.
11. If the votes agreeing and those disagreeing are balanced, the chairman of the meeting will decide.
12. Each member of the Board of Commissioners present has the right to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he represents.
13. In the event of a dissenting opinion that occurs at a meeting of the Board of Commissioners, it must be stated clearly in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
14. All decisions of the Board of Commissioners' meetings are binding for all members of the Board of Commissioners.
15. Voting regarding individuals is carried out by means of a closed letter without a signature, while voting on other matters is carried out verbally unless the chairman of the meeting determines otherwise without any objection from those present.

16. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
17. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan
18. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan di atas, merupakan bukti sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukansecara tertulis dengan menandatangai persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

16. Blank votes and invalid votes are deemed not legally cast and are deemed not to exist and are not counted in determining the number of votes cast.

17. From everything discussed and decided at the meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners must be made which must be signed by the Chairperson of the Meeting and at least by another member of the Board of Commissioners who is present and/or represented at the meeting in question. If the minutes are drawn up by a Notary Public, the signature is not required

18. Minutes of meetings of the Board of Commissioners made in accordance with the provisions above, constitute valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Board of Commissioners Meeting, both for the Board of Commissioners and for third parties

19. The Board of Commissioners may also make valid decisions without convening a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give their approval regarding the proposal submitted in writing by signing the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a meeting of the Board of Commissioners.v

Throughout 2022, the agenda, date and participants of the Board of Commissioners Meetings are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022
Table of the 2022 Board of Commissioners Meetings

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
1	5 Januari 2022 *January 5, 2022*	Pembahasan Akta Pencatatan Tambahan Setoran Modal Pemegang Saham Bank Riau Kepri Oleh Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri Sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Discussion of the Deed of Registration of Additional Capital Deposits of Bank Riau Kepri Shareholders by the Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative of IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah).* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah
2	19 Januari 2022 *January 19, 2022*	Pembahasan Pemaparan Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Presentation Regarding the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Komite Audit Pemimpin Divisi Internal Audit
3	26 Januari 2022 *January 26, 2022*	Penjelasan Terkait Penghentian Aktivitas Debit Issuer Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Explanation Regarding Termination of Bank Riau Kepri Debit Issuer Activities.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Direksi Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Desk Digital Banking

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
4	31 Januari 2022 *January 31, 2022*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Triwulan IV Tahun 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Board of Commissioners' Supervision Report on the Business Plan of Bank Riau Kepri Quarter IV of 2021.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Komite Audit Komite Pemantau Risiko
5	14 Februari 2022 *February 14, 2022*	Pembahasan Berita Media Tentang Dugaan Rekayasa/Engineering Laporan Keuangan Bank Riau Kepri (5 tahun terakhir). Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Discussion of Media News About Alleged Engineering/Engineering of Bank Riau Kepri Financial Statements (last 5 years).* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
6	14 Februari 2022 *February 14, 2022*	Mapping Untuk Kunjungan ke Kantor Cabang Bank Riau Kepri Terkait Non Performing Loan (NPL). Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Mapping For Visits to Bank Riau Kepri Branch Offices Related to Non Performing Loans (NPL).* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
7	15 Februari 2022 *February 15, 2022*	Pembahasan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Semester II Tahun 2021 Kepada OJK. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Supervisory Report for the Bank Riau Kepri Semester II Year 2021 Business Plan to the OJK.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
8	23 Februari 2022 *February 23, 2022*	Pembahasan Pra Hasil Audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri Tahun Buku 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussion of Pre-Financial Report Audit Results of Bank Riau Kepri for Fiscal Year 2021.* *Discuss other matters deemed necessary*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Kantor Akuntan Publik
9	4 Maret 2022 *March 4, 2022*	Pembahasan Perubahan Pertama SOT. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the First Amendment of SOT.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Operasional Pemimpin Divisi MSDI
10	4 Maret 2022 *March 4, 2022*	Pembahasan Persetujuan Kendaraan Operasional dan Usulan Hak & Fasilitas DPS. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Operational Vehicle Approval and Proposed DPS Rights & Facilities.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Operasional Pemimpin Divisi MSDI
11	8 Maret 2022 *March 8, 2022*	Presentasi Alur Kerja, Paparan SOP, dan Progress Terkait Dengan Pencapaian RBB/ Corporate Plan Serta Persiapan ke BUS. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Workflow Presentation, SOP Presentation, and Progress Related to Achievement of RBB/ Corporate Plan and Preparation for BUS.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Pembiayaan Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial
12	8 Maret 2022 *March 8, 2022*	Presentasi Alur Kerja, Paparan SOP, dan Rencana Pengembangan TI Sesuai RBB dan Corporate Plan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Workflow Presentation, SOP Exposure, and IT Development Plan According to RBB and Corporate Plan.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Operasional Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi
13	24 Maret 2022 *March 24, 2022*	Tindak Lanjut Penyelesaian Komitmen dan Aktivitas Bank Riau Kepri Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah Serta Tindak Lanjut Pertemuan Silahturahmi Pengurus Bank Riau Kepri Dengan OJK Tanggal 21 Maret 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Follow-up on the Completion of Bank Riau Kepri Commitments and Activities in the Context of Changing Bank Riau Kepri's Business Activities to Become a Sharia Commercial Bank and Follow-up to the Gathering Meeting of Bank Riau Kepri Management with the OJK on March 21, 2022.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Ketua Project Management Officer (PMO) Konversi

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
14	11 April 2022 *April 11, 2022*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Bank Riau Kepri pada RUPSLB dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri at the EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
15	11 April 2022 *April 11, 2022*	Pembahasan Skenario RUPSLB dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the EGMS and Annual GMS Scenarios for the 2021 Fiscal Year.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso
16	21 April 2022 *April 21, 2022*	Membahas Persetujuan Aksi Korporasi Pelepasan/Penjualan Surat Berharga Konvensional pada Bank Riau Kepri Dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussing the Approval for Corporate Actions to Release/Sale Conventional Securities at Bank Riau Kepri in the Context of Converting to a Sharia Commercial Bank.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Pemimpin Divisi yang terkait
17	21 April 2022 *April 21, 2022*	Membahas Tentang Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni dan Desember 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discusses Bank Soundness Level for June and December 2021.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Pemimpin Divisi yang terkait
18	22 April 2022 *April 22, 2022*	Pembahasan Akhir Persiapan RUPSLB dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal yang dianggap perlu *Final Discussion on Preparation for the EGMS and Annual GMS for the 2021 Fiscal Year of Bank Riau Kepri.* *Discuss matters deemed necessary*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
19	27 April 2022 *April 27, 2022*	Pembahasan Persetujuan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Pengurus Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Approval of Official Travel Guidelines for Bank Riau Kepri Management.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi MSDI
20	28 April 2022 *April 28, 2022*	Pembahasan Perubahan Nomenklatur SOT Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Approval of Official Travel Guidelines for Bank Riau Kepri Management.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi MSDI
21	11 Mei 2022 *May 11, 2022*	Pembahasan Temuan OJK Terkait Tata Kelola. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. Discussion of OJK Findings Regarding Governance. Discuss other matters deemed necessary.	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi Internal Audit
22	17 Mei 2022 *May 17, 2022*	Pembahasan Permasalahan Skimming yang Terjadi di Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Skimming Problems that Happened at Bank Riau Kepri.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi yang Terkait
23	18 Mei 2022 *May 18, 2022*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Triwulan I Tahun 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Board of Commissioners' Supervision Report on the Business Plan of Bank Riau Kepri for the First Quarter of 2022.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
24	25 Mei 2022 *May 25, 2022*	Persetujuan Lanjutan Aksi Korporasi Pelepasan/Penjualan Surat Berharga Konvensional pada Bank Riau Kepri Dalam Rangka Konversi Menjadi Bank Umum Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Approval of Continuation of Corporate Actions for Releasing/Selling Conventional Securities at Bank Riau Kepri in the Context of Converting to a Sharia Commercial Bank.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi yang Terkait

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
25	23 Juni 2022 *June 23, 2022*	Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Fungsi Audit Intern pada Divisi Internal Audit Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion on the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Internal Audit Function at the Internal Audit Division of Bank Riau Kepri.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit
26	29 Juni 2022 *June 29, 2022*	Pembahasan Persetujuan Rancangan SOT Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussion on the Approval of the Sharia SOT Draft.* *Discuss other matters deemed necessary*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi MSDI
27	5 Juli 2022 *July 5, 2022*	Presentasi Penawaran Jasa sebagai Pengendali Mutu Independen Pihak Ekstern pada Divisi Internal Audit BRK Periode 2019 s/d 2021. Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Presentation of Services Offering as an Independent Quality Controller for External Parties to the BRK Internal Audit Division for the 2019 to 2021 period.* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Kantor Akuntan Publik
28	6 Juli 2022 *July 6, 2022*	Pembahasan Langkah-langkah/Kebijakan Strategis High Level BRK Syariah Pasca Izin Konversi. Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Discussion of BRK Syariah High Level Strategic Steps/Policies Post Conversion Permit.* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direksi Dewan Pengawas Syariah
29	12 Juli 2022 *July 12, 2022*	Pembahasan Laporan dan Alur Kerja Desk Anti Fraud. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Anti-Fraud Desk Reports and Workflow.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Pemimpin Desk Anti Fraud
30	26 Juli 2022 *July 26, 2022*	Pembahasan Pembiayaan Pengurus An. Bapak Roy Prakoso. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Management Financing Discussion An. Mr. Roy Prakoso.* *Discuss other matters deemed necessary*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MSDI
31	15 Agustus 2022 *August 15, 2022*	Pembahasan Realisasi RBB Bank Riau Kepri Semester I. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussion on Realization of Bank Riau Kepri RBB Semester I.* *Discuss other matters deemed necessary*	Roy Prakoso Komite Audit Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
32	18 Agustus 2022 *August 18, 2022*	Persiapan Konversi Bank Riau Kepri Konvensional menjadi BUS Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Preparation of Conventional Riau Kepri Bank Conversion to BUS* *Discuss other matters deemed necessary.*	Roy Prakoso Komite Audit Ketua PMO Konversi
33	19 Agustus 2022 *August 19, 2022*	Pembahasan Persetujuan Pedoman Kerja Direksi dan Kode Etik Kepatuhan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion on the Approval of the Board of Directors' Work Guidelines and the Compliance Code of Ethics.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan
34	19 Agustus 2022 *August 19, 2022*	Pembahasan Persetujuan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of BRK Syariah Bank Financing Policy Approval (KPB).* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Pembiayaan Pemimpin Divisi Konsumer
35	19 Agustus 2022 *August 19, 2022*	Pembahasan BPP Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan. Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Discussion of BRK Syariah Bank Financing Policy Approval (KPB).* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Pembiayaan Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan
36	22 Agustus 2022 *August 22, 2022*	Pembahasan Piagam Audit Intern Dalam Rangka Konversi BUS. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Internal Audit Charter in the Context of BUS Conversion.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi Internal Audit
37	22 Agustus 2022 *August 22, 2022*	Pembahasan Perubahan Nomenklatur Kebijakan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Policy Nomenclature Changes.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi MSDI

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
38	29 Agustus 2022 *August 29, 2022*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I pada OJK. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Semester I Board of Commissioners Supervisory Report at OJK.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit
39	31 Agustus 2022 *August 31, 2022*	Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko pada BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion on the Implementation of Risk Management in Sharia BRK.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
40	1 September 2022 *September 1, 2022*	Pemanggilan KAP Dalam Rangka Penawaran Jasa untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Summons of KAP in the Context of Offering Services for Examination of Financial Statements for Fiscal Year 2022.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Kantor Akuntan Publik
41	7 September 2022 *September 7, 2022*	Pembahasan Monitoring ke Cabang Pasca Konversi. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussion on Monitoring to the Post-Conversion Branch.* *Discuss other matters deemed necessary*	Syahrial Abdi Roy Prakoso Komte Audit
42	12 September 2022 *September 12, 2022*	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Kepada PT Sarana Pembangunan Riau. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Financing Approval for PT Sarana Pembangunan Riau.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi Komersial
43	12 September 2022 *September 12, 2022*	Pembahasan Penambahan 2 Risiko dan Pengelolaan Daftar Rekanan BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of Additional 2 Risks and Management of BRK Syariah Partner List.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Pemantau Risiko
44	19 September 2022 *September 19, 2022*	Pembahasan Penunjukan BRK Syariah sebagai Tuan Rumah Seminar FKDK BPDSI di Batam. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Appointment of BRK Syariah as the Host of the BPDSI FKDK Seminar in Batam.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi MSDI
45	10 Oktober 2022 *October 10, 2022*	Pembahasan Realisasi Program Kerja Dekom & Komite. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion on the Realization of the Work Program of the Board of Commissioners & Committees.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
46	12 Oktober 2022 *October 12, 2022*	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI. Pembahasan Penerapan APU PPT Membahas hal-hal yang dianggap perlu. Follow-up on BPK RI Recommendations. *Discussion on the Implementation of APU PPT* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan
47	13 Oktober 2022 October 13, 2022	Pembahasan Persiapan Penyusunan RBB dan Kajian Manajemen Risiko. Membahas hal-hal yang dianggap perlu. *Discussion on Preparation for Preparation of RBB and Risk Management Study.* *Discuss matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko Pemimpin Divisi Perencanaan dan Strategis Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participant*
48	17 Oktober 2022 *October 17, 2022*	Presentasi langkah-langkah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko atas 10 (sepuluh) jenis risiko yang ada pada BRK Syariah. Pemaparan terkait action plan periode 3 (tiga) bulan menjelang tutup buku tahun 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Presentation of steps for the adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk as well as a risk management information system for 10 (ten) types of risks that exist in BRK Syariah.* *Presentation regarding the action plan for the period of 3 (three) months prior to closing the 2022 book.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Financial & Reporting
49	5 Desember 2022 *December 5, 2022*	Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris BRK Syariah Tahun 2023. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the BRK Syariah Board of Commissioners' Work Program for 2023.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
50	14 Desember 2022 *December 14, 2022*	*Entry Meeting* KAP Kreston Indonesia. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *KAP Kreston Indonesia Entry Meeting.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko
51	14 Desember 2022 *December 14, 2022*	Pembahasan Perubahan SOT. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of SOT Changes.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso Pemimpin Divisi MSDI
52	14 Desember 2022 *December 14, 2022*	Pembahasan Akta Pencatatan Tambahan Setoran Modal Pemegang Saham Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Natuna. Perubahan Pasal 4 Tentang Modal dan Pasal 21 tentang Penutup Anggaran Dasar. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussion of the Deed of Registration of Additional Capital Deposits for the Shareholders of the Sharia Consumer Cooperative Amanah Riau Kepri and the Government of Natuna Regency.* *Amendments to Article 4 concerning Capital and Article 21 concerning Closing of the Articles of Association.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Syahrial Abdi Rita Anugerah Roy Prakoso
53	29 Desember 2022 *December 29, 2022*	Permohonan Persetujuan *Risk Appetitte Statement* 2023. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Request for Approval of the 2023 Risk Appetite Statement.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Komite Audit Komite Pemantau Risiko

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Frequency and Attendance of Meetings

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022
Table of Frequency and Attendance of the 2022 Board of Commissioners Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Tingkat Kehadiran *Attendance Rate*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The Main Commissioner*	53	47	90%
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	53	49	94%
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	50	44	88%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

** Appointed as Independent Commissioner at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, but has only served effectively as of January 25 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25 2022*

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2022

Dalam menjalankan program kerja pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2022, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada Direksi antara lain terkait dengan:

1. Rekomendasi atas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* Bank.
2. Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2018.
3. Rekomendasi atas Laporan Implementasi Aplikasi ORSA, Edukasi Budaya Risiko dan BCM serta Pelaksanaan *Threat Assesment*.
4. Rekomendasi atas Laporan Penyelesaian Komitmen dan Aktivitas Bank Riau Kepri dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah
5. Rekomendasi atas Laporan Perubahan Modal Disetor Bank.
6. Rekomendasi atas Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).
7. Rekomendasi atas Pemenuhan Komitmen Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) Untuk Terminal *Automated Teller Machine* (ATM) dan Electronic Data *Capture* (EDC) Bank.
8. Rekomendasi atas Pengkinian Data *Track Record* terhadap Pegawai Bank.
9. Rekomendasi atas Penerapan Program APU PPT & Sanksi Kewajiban Membayar atas Pemeriksaan Umum Tahun 2021.
10. Rekomendasi atas Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organization (NPO).
11. Rekomendasi atas Komitmen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK.
12. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI.
13. Rekomendasi atas Penerapan Prinsip GCG Dalam Seleksi Rekanan Kerja Bank.

Report on the Implementation of Duties of the Board of Commissioners

Recommendation of the Board of Commissioners for 2022

In carrying out the supervisory work program, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee. During 2022, the Board of Commissioners submitted recommendations to the Board of Directors, among others related to:

1. *Recommendations on the Bank's Risk Appetite Statement Monitoring Report.*
2. *Recommendations on the 2018 Tax Audit Results Report.*
3. *Recommendations on ORSA Application Implementation Reports, Risk Culture and BCM Education and Implementation of Threat Assessments.*
4. *Recommendations on Reports on Completion of Commitments and Activities of Bank Riau Kepri in the Context of Changing Business Activities of Bank Riau Kepri to Become a Sharia Commercial Bank*
5. *Recommendations on Reports of Changes in Bank Paid-in Capital.*
6. *Recommendations on Integrity Commercial Bank Reports (LBUT).*
7. *Recommendation on Fulfillment of Commitment to Implementation of National Chip Technology Standards (SNTC) for Bank Automated Teller Machine (ATM) and Electronic Data Capture (EDC) Terminals.*
8. *Recommendations for Updating Track Record Data for Bank Employees.*
9. *Recommendations for the Implementation of the APU PPT Program & Sanctions for Obligation to Pay for Public Examinations in 2021.*
10. *Recommendations on the Implementation of the Risk-Based AML-CFT Program Related to Non-Profit Organization (NPO) Abuse.*
11. *Recommendations on Commitment to Follow Up OJK Examination Results.*
12. *Recommendations for the Follow-Up Examination of BPK RI.*
13. *Recommendations on the Application of GCG Principles in the Selection of Bank Partners.*

14. Rekomendasi atas Usulan Penunjukan Pengendali Mutu Independen Pihak Ekstern Pada Divisi Internal Audit Tahun 2019 s/d 2021.
15. Rekomendasi atas Penerapan APU PPT Berbasis Risiko Terkait Penyalahgunaan *Virtual Asset*.
16. Rekomendasi atas Kinerja Bank.
17. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank.
18. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Permasalahan *Skimming*.
19. Rekomendasi atas Peningkatan Kepedulian dan Awarness sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan *Fraud*.
20. Rekomendasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Sistem Pembayaran Penyedia Jasa Pembayaran.
21. Rekomendasi atas Mitigasi Risiko dan Pencegahan Fraud di jaringan kantor Bank.
22. Rekomendasi atas Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah.
23. Rekomendasi atas Penyelenggaraan Layanan QRIS BRK Syariah.
24. Rekomendasi atas Penatausahaan Target Rasio Pembiayaan Inklusif *Makropudensial* (RPIM) Tahun 2022 BRK Syariah.
25. Rekomendasi atas Audit Seluruh Aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atau keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri.
2. Persetujuan atas Perubahan Struktur Organisai dan Tata Kerja (SOT) Bank.
3. Persetujuan Kendaraan Operasional dan Usulan Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank.
4. Persetujuan atas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bank.
5. Persetujuan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Pengurus Bank.
6. Persetujuan atas Perubahan Nomenklatur SOT Bank.
7. Persetujuan atas Aksi Korporasi Pelepasan/Penjualan Surat Berharga Konvensional SUN FR0065 pada PT. Bank Riau Kepri dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah.
8. Persetujuan atas Kebijakan Remunerasi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai.
9. Persetujuan atas Pembiayaan Pengurus Bank.
10. Persetujuan Pedoman Kerja Direksi dan Kode Etik Kepatuhan Bank.
11. Persetujuan atas Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).
12. Persetujuan atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan.
13. Persetujuan atas Draft Piagam Audit Intern Dalam Rangka Konversi Bank Umum Syariah.

14. Recommendations on the Proposed Appointment of External Party Independent Quality Controllers in the Internal Audit Division from 2019 to 2021.
15. Recommendations on the Implementation of Risk-Based APU PPT Related to Misuse of Virtual Assets.
16. Recommendations on Bank Performance.
17. Recommendations on Follow-up to Improvement of Bank Soundness Level.
18. Recommendations on the Follow Up of Skimming Problems.
19. Recommendations on Increasing Awareness and Awareness as an Effort to Prevent Violations and Fraud.
20. Recommendations on the Obligation to Submit Annual Reports on Payment System Payment Service Providers.
21. Recommendations on Risk Mitigation and Fraud Prevention in the Bank's office network.
22. Recommendation on Addition of 2 (two) Risks to BRK Syariah.
23. Recommendations on the Implementation of QRIS BRK Syariah Services.
24. Recommendations on Administration of the 2022 BRK Syariah Target Macropudential Inclusive Financing Ratio (RPIM).
25. Recommendations on the Audit of All Aspects of Information Technology related to POJK regarding the Application of Risk Management in the Use of Information Technology.

Decision of the Board of Commissioners for 2022

Throughout 2022 the Board of Commissioners gave approval or decisions as follows:

1. Approval of the Extension of Service Period for Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of Bank Riau Kepri.
2. Approval of Changes in the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of the Bank.
3. Approval of Operational Vehicles and Proposed Rights and Facilities of the Bank's Sharia Supervisory Board (DPS).
4. Approval of the Adjustment of the Bank's Annual Work Plan and Budget (RKAT).
5. Approval of the Technical Instructions for Official Travel for Bank Management.
6. Approval of Changes in Bank SOT Nomenclature.
7. Approval of Corporate Actions to Release/Sale Conventional Securities SUN FR0065 at PT. Bank Riau Kepri in the framework of Conversion to become a Sharia Commercial Bank.
8. Approval of Management Remuneration Policy, Sharia Supervisory Board, and Employees.
9. Approval of Bank Management Financing.
10. Approval of the Board of Directors' Work Guidelines and the Bank's Compliance Code of Ethics.
11. Approval of Bank Financing Policy (KPB).
12. Approval of the Company Manual (BPP) of Rescue and Financing Settlement.
13. Approval of the Draft Internal Audit Charter in the Context of Converting Islamic Commercial Banks.

14. Persetujuan atas Perubahan Nomenklatur Kebijakan.
15. Persetujuan Pembiayaan Kepada PT Sarana Pembangunan Riau.
16. Persetujuan Fasilitas *Committed Line* di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
17. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Riau Kepri Periode 1 Januari 2022 s.d. 22 Agustus 2022 dan BRK Syariah Periode 23 Agustus 2022 s.d. 31 Desember 2022.
18. Persetujuan Penyesuaian *Corporate Plan*, RKAT, dan RAKB BRK Syariah Tahun 2023.
19. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* BRK Syariah.
20. Persetujuan *Risk Appetitte Statement* BRK Syariah.
21. Persetujuan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut merupakan hasil pengawasan seluruh anggota Dewan Komisaris secara kolegial terhadap pencapaian Direksi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi target kinerja BRK Syariah setiap tahun. Selain itu, keberhasilan kinerja Dewan Komisaris juga dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank sebagai hasil dari fungsi pengawasan yang tercermin dari aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome.*

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate*

14. Approval of Policy Nomenclature Changes.
15. Financing Approval for PT Sarana Pembangunan Riau.
16. Approval of the Committed Line Facility at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
17. Appointment of a Public Accountant Firm (KAP) to Examine the Annual Financial Statements of PT. Bank Riau Kepri Period 1 January 2022 to 22 August 2022 and BRK Syariah Period 23 August 2022 to 31 December 2022.
18. Approval of Adjustments to the Corporate Plan, RKAT, and RAKB BRK Syariah for 2023.
19. Approval of the Bank Business Plan (RBB) and the Sharia BRK Corporate Plan.
20. Approval of BRK Syariah Risk Appetite Statement.
21. Approval of BRK Syariah Sharia Supervisory Board Remuneration

Board of Commissioners Performance Assessment

Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS). This assessment is the result of collegial supervision of all members of the Board of Commissioners on the achievements of the Board of Directors on the Bank's Business Plan (RBB), which is the performance target of BRK Syariah every year. In addition, the success of the performance of the Board of Commissioners can also be measured through the results of assessing the governance of sharia commercial banks and also the level of soundness of the Bank as a result of the supervisory function which is reflected in the aspects of risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners

Evaluation of the performance of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, with 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Board of Commissioners Performance Assessment Procedures

Assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out through self-assessment reports on the implementation of Good Corporate Governance which are submitted to OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out by using the Working Paper in accordance with SEOJK on Soundness Rating of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. Parameters for assessing the performance of the Board of Commissioners include the principles of Good Corporate

Governance terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui laporan tugas pengawasan atas pengelolaan Bank dalam Laporan Tahunan dan menjadi agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Untuk tahun 2022, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS Tahunan tanggal 23 April 2022 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Tahun buku 2022 yang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

Pihak yang Penilaian Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan *self assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Governance implementation related to all functions in managing Bank Riau Kepri Syariah.

Apart from self-assessment, the performance evaluation of the Board of Commissioners is also carried out through a report on supervisory duties on the management of the Bank in the Annual Report and is on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS). For 2022, the performance evaluation of the Board of Commissioners was carried out at the Annual GMS on April 23 2022 where the shareholders (GMS) approved the Supervisory Task Report for the 2022 financial year which is an integral part of the Annual Report and financial statements for the 2022 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) by providing full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners for the supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year.

Party Who Appraises Performance

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semiannual basis which is carried out by internal BRK Syariah, to be subsequently submitted to the Financial Services Authority.

Results of the Board of Commissioners' Performance Assessment

Tabel Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (*Self Assesment*)
Table of Performance Assessment of the Board of Commissioners (Self Assessment)

Parameter GCG *GCG Parameters*	***Governance Structure*** *Governance Structure*	***Governance Process*** *Governance Process*	***Governance Outcome*** *Governance Outcome*	**Peringkat** *Rating*
				Komposit *Composite*
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi *Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors*	1	2	2	2 (Baik) *2 (Good)*

Peringkat 2 artinya adalah:

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan self *assessment* (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik.

Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris BRK Syariah dibantu oleh 3 (tiga) Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam aspek pengawasan dan penasehatan Bank agar membantu proses pengambilan keputusan berjalan efektif. Ketiga Komite tersebut adalah: (1) Komite Audit, (2) Komite Pemantau Risiko serta (3) Komite Remunerasi dan Nominasi..

Penilaian Kinerja terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self assessment* GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah

Rank 2 means:

The Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally "Good". This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Commissioners.

During 2022, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners based on the governance structure, governance processes and governance outcomes with the results of the assessment being at a composite rating of 2 (two) or Good.

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of supervisory duties, but also to provide confidence to shareholders regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners.

Assessment of the Performance of the Committees under the Board of Commissioners and the Basis for the Assessment

In carrying out its duties, the Board of Commissioners of BRK Syariah is assisted by 3 (three) committees whose duty is to provide advice and recommendations in the aspect of supervision and advisory of the Bank to help the decision-making process run effectively. The three committees are: (1) Audit Committee, (2) Risk Monitoring Committee and (3) Remuneration and Nomination Committee.

The performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations listed in the Committee Charter, the Committee's Work Program and the results of the GCG self-assessment. The results of the performance evaluation of each Committee member are one of the basic considerations for the Board of Commissioners for dismissal and/or reappointment of the Committee member concerned. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee

Evaluation of the performance of Committees under the Board of Commissioners is carried out through self-assessment reports on the implementation of Good Corporate Governance which are submitted to OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No.10/

dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

SEOJK.03/2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Units Sharia Business. Self-assessment

Tabel Penilaian Kinerja Komite *Self Assesment*
Table of Self Assessment Committee Performance Appraisal

Parameter GCG *GCG Parameters*	*Governance Structure* *Governance Structure*	*Governance Process* *Governance Process*	*Governance Outcome* *Governance Outcome*	Peringkat *Rating*
				Komposit *Composite*
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite *Completeness and Implementation of Committee Duties*	2	1	2	2 (Baik) *2 (Good)*

Dengan Peringkat 2 artinya:
Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite di bawah Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berdasarkan *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik.

With Rating 2 means:
Committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have implemented Good Corporate Governance which is generally "Good". This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Committees under the Board of Commissioners.

During 2022, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Completeness and Implementation of Committee Duties based on governance structure, governance process and governance outcome with the results of the assessment being at a composite rating of 2 (two) or Good.

Organ Pendukung Dewan Komsiaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, BRK Syariah belum membentuk Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus di bawah Organisasi Dewan Komisaris, namun demikian pelaksana fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan oleh pegawai yang berada di bawah koordinasi Divisi Sekretariat Perusahaan.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh audit internal maupun eksternal.

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Secretary of the Board of Commissioners

In 2022, BRK Syariah has not yet formed a Secretary to the Board of Commissioners specifically under the Organization of the Board of Commissioners, however, the function of the Secretary to the Board of Commissioners has been carried out by employees who are under the coordination of the Corporate Secretariat Division.

Audit Committee

Basis for Formation of the Audit Committee

The establishment of the Audit Committee refers to Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Audit Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in the implementation of supervisory duties, especially related to financial information, internal control systems, effectiveness of audits by internal and external audits.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
3. Melakukan evaluasi terhadap:
   a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
   b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keunagan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of the Bank's Audit Committee are to assist the Sharia BRK Board of Commissioners to:

1. *Evaluate the implementation of internal audits in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*
2. *Coordinating with the Public Accounting Firm in the framework of the effectiveness of external audit implementation.*
3. *Evaluate:*
   a. *implementation of tasks carried out by the internal audit function;*
   b. *implementation of follow-up by the Board of Directors on audit findings and/or recommendations from the results of supervision by the Financial Services Authority, internal auditors, Sharia Supervisory Board, and/or external auditors, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners*
4. *Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners.*

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
4. Kedudukan
5. Keanggotaan
6. Persyaratan keanggotaan
7. Rapat
8. Etika kerja
9. Waktu kerja
10. Kewenangan
11. Tugas
12. Tanggung Jawab
13. Penutup.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Board's Decree Commissioner No.001/KEPDKS/III/2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee in 2011. The Charter stipulates the following provisions:

1. *Objective*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
4. *position*
5. *Membership*
6. *Membership requirements*
7. *Meeting*
8. *work ethic*
9. *Working time*
10. *Authority*
11. *Task*
12. *Responsibility*
13. *Closing.*

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit BRK Syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 36 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen,

Structure and Composition of Audit Committee Members

The composition of the members of the Sharia BRK Audit Committee has met the requirements stipulated by Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units Article 36 paragraph (1) which stipulates that members of the Audit Committee at least consisting of an Independent Commissioner,

seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan syariah.

an independent party with expertise in financial accounting and an independent party with expertise in sharia banking.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Audit BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, dengan komposisi berikut :

The composition of the membership and composition of the Sharia BRK Audit Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors, with the following composition:

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit
Table of Structure, Membership, and Expertise of the Audit Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	SK Penetapan *Determination Decree*	Keahlian *Skill*	Bidang Tugas *Task field*
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit Independent Commissioner/ *Chairman of the Audit Committee*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik *- Risk management* *- Professional Accountant* *- Taxation* *- Academic tutor*	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi *Chairman of the Audit Committee* *Risk Monitoring Committee Member* *Member of the Remuneration and Nomination Committee*
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Commissioner/ Audit Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik *- Risk management* *- Finance* *- Banking and IT Consultants* *- Academic Teacher*	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit *Head of the Risk Monitoring Committee* *Audit Committee Member*
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Party/ Member of the Audit Committee*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit *- Risk management* *- Accounting & Auditing*	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko *Audit Committee Member* *Risk Monitoring Committee Member*
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Party/ Member of the Audit Committee*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management *- Accounting & Auditing*	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko *Audit Committee Member* *Risk Monitoring Committee Member*

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Members

Rita Anugerah Ketua Komite Audit *Chairman of the Audit Committee*	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan *His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report*	
Periode Jabatan *Term of Office*	19 Agustus 2019 s.d. sekarang *August 19, 2019 to now*
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris *Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 *Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* *OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019* *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* *OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Audit *Basis for Appointment as Chairman of the Audit Committee*	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Roy Prakoso Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan *His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report*	
Periode Jabatan *Term of Office*	15 November 2021 s.d. 14 November 2025 *15 November 2021 to 14 November 2025*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 *Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* *OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022* *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* *OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit *Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee*	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Fahmi Oemar Pihak Independen/Anggota Komite Audit *Independent Party/Member of the Audit Committee*	
Kewarganegaraan Indonesia	*Citizenship* *Indonesia*
Domisili Pekanbaru, Riau	*Domicile* *Pekanbaru, Riau*
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Februari 1962 Usia 60 Tahun	*Place, Date of Birth : Bengkalis, 16 February 1962* *Age 60 Years*
Riwayat Pendidikan - Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008 - Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988	*Educational background* *- Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016* *- Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008* *- Bachelor : Riau University, Accounting Economics, 1988*
Riwayat Jabatan Bergabung di BRK Syariah sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.	*Position History* *Joined BRK Syariah since 2013 as Audit & Risk Monitoring Committee.*
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Basis of Appointment* *Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*
Periode Jabatan 2013 s/d sekarang	*Term of Office* *2013 to now*

Indarti Pihak Independen/Anggota Komite Audit *Independent Party/Member of the Audit Committee*	
Kewarganegaraan Indonesia	*Citizenship* *Indonesia*
Domisili Pekanbaru, Riau	*Domicile* *Pekanbaru, Riau*
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1975 Usia 47 Tahun	*Place, Date of Birth : Pekanbaru, 19 November 1975* *Age 47 Years*
Riwayat Pendidikan - Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011	*Educational background* *- Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014* *- Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011*
Riwayat Jabatan Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.	*Position History* *Joined Bank Riau Kepri since 2013 as the Audit & Risk Monitoring Committee.*
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Basis for Appointment Decree of the Board of Directors Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*
Periode Jabatan 2013 s/d sekarang	*Term of Office* *2013 to now*

Independensi Komite Audit

Komite Audit secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.

Audit Committee Independence

The Audit Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of members of the Audit Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership.

Tabel Independensi Komite Audit
Table of Audit Committee Independence

Aspek Independensi *Independence Aspect*	Rita Anugerah	Roy Prakoso	Fahmi Oemar	Indarti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi *Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors*	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi *Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies*	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan *Has no share ownership relationship in the company*	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit *Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee*	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah *Not serving as administrators of political parties, officials and government*	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee meeting

During 2022, the BRK Syariah Audit Committee has held meetings with the date, agenda and meeting participants with the frequency and level of attendance as follows:

Tabel Rapat Komite Audit Tahun 2022
Table of 2022 Audit Committee Meetings

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *MeetingAgenda*	Peserta *Participant*
1	19 Januari 2022 *January 19, 2022*	Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit *Discussed the 2018 Tax Audit Results.* *Discussing the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
2	26 Januari 2022 *January 26, 2022*	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer Bank Riau Kepri *Discussing the Follow-Up of the Cessation of Bank Riau Kepri Debit Isuuer Activities*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
3	31 Januari 2022 *January 31, 2022*	Membahas tentang Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Desember 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses the December 2021 Bank Riau Kepri Performance Report* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
4	9 Februari 2022 *February 9, 2022*	Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit *Discussed the 2018 Tax Audit Results.* *Discussing the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
5	14 Februari 2022 *February 14, 2022*	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer Bank Riau Kepri. *Discussing the Follow-Up of the Cessation of Bank Riau Kepri Debit Isuuer Activities.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
6	8 Maret 2022 *March 8, 2022*	Membahas tentang Usulan Penunjukan Pengendali mutu Independen dari pihak Ekstern untuk mereview Divisi Internal Audit (DIA) Bank Riau Kepri periode Tahun 2019 sd 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussed the Proposal to Appoint an Independent Quality Controller from an External Party to review the Internal Audit Division (DIA) of Bank Riau Kepri for the period 2019 to 2021.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
7	23 Maret 2022 *March 23, 2022*	Membahas tentang Hasil Kunjungan Pengawasan ke Capem Sorek dan Cabang Tembilahan. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussed the Results of Monitoring Visits to Sub-District Heads of Sorek and Tembilahan Branch.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
8	21 April 2022 *April 21, 2022*	Membahas tentang Aksi Korporasi/ Pelepasan Penjualan Surat Berharga. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses Corporate Actions/ Release of Sales of Securities.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
9	17 Mei 2022 *May 17, 2022*	Membahas Permasalahan Skimming yang terjadi di Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. Discusses Skimming Problems that occur at Bank Riau Kepri. Discuss other matters deemed necessary.	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
10	27 Mei 2022 *May 27, 2022*	Membahas tentang Aksi Korporasi pada Surat Berharga SUN FR0065 Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discusses Corporate Actions on SUN FR0065 Bank Riau Kepri Securities.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
11	8 Juni 2022 *June 8, 2022*	Membahas Hasil Pemeriksaan BI terkait SNTC dan PIN terhadap PJP Bank Riau Kepri. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussing BI Examination Results related to SNTC and PIN against PJP Bank Riau Kepri.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
12	11 Juli 2022 *July 11, 2022*	Membahas tentang Seleksi KAP sebagai Pengendali Mutu Indpenden SKAI Bank Riau Kepri Periode Tahun 2019 s/d 2021. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discusses KAP Selection as Independent SKAI Quality Controller for Bank Riau Kepri for the 2019 to 2021 period.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *MeetingAgenda*	Peserta *Participant*
13	29 Juli 2022 *July 29, 2022*	Membahas tentang Review Divisi Internal Audit Bank Riau Kepri oleh KAP Periode Tahun 2019 s/d 2021. Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discusses the Review of the Internal Audit Division of Bank Riau Kepri by KAP from 2019 to 2021.* *Discusses the Business Plan Oversight Report.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
14	22 Agustus 2022 *August 22, 2022*	Membahas tentang Persetujuan Draft Piagam Audit Intern BRK Syariah. Membahas tentang Penawaran/ Pemanggilan KAP untuk Audit Tahun Buku 2022 BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the Approval of the BRK Syariah Internal Audit Charter Draft.* *Discussed the KAP's offer/invitation for an Audit for the 2022 BRK Syariah Fiscal Year.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
15	26 Agustus 2022 *August 26, 2022*	Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BRK Syariah Semester I Tahun 2022. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses the 2022 BRK Sharia Business Plan Supervision Report.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
16	12 September 2022 *September 12, 2022*	Membahas tentang Pihak-Pihak yang menjadi Rekanan BRK Syariah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses Parties who are Partners of BRK Syariah* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
17	20 September 2022 *September 20, 2022*	Membahas tentang upaya peningkatan pendapatan dalam pencapaian target RBB BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses efforts to increase revenue in achieving the BRK Syariah RBB target.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
18	29 September 2022 *September 29, 2022*	Membahas tentang pemanggilan KAP untuk presentasi penawaran audit umum tahun buku 2022 BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the summons of the KAP to present the public audit offer for the 2022 BRK Syariah financial year.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
19	25 Oktober 2022 *October 25, 2022*	Membahas tentang Penetapan KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan BRK Syariah Tahun Buku 2022. Membahas tentang Transaksi pada Surat Berharga dan Modal Inti BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. *Discussed the Determination of KAP to Examine the BRK Syariah Annual Financial Report for the Fiscal Year 2022.* *Discusses Transactions on BRK Sharia Securities and Core Capital.* *Discuss other matters deemed necessary.*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
20	1 November 2022 *November 1, 2022*	Membahas tentang Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses the Audit of all aspects of Information Technology related to POJK regarding the Application of Risk Management in the Use of Information Technology.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
21	1 Desember 2022 *December 1, 2022*	Membahas tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the Bank Business Plan (RBB) and BRK Syariah Corporate Plan.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti
22	19 Desember 2022 *December 19, 2022*	Membahas tentang Governance, Risk, and Compliance (GRC) terkait Permohonan Persetujuan kepada Dewan Komisaris BRK Syariah. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses Governance, Risk, and Compliance (GRC) regarding the Request for Approval from the Board of Commissioners of BRK Syariah.* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Roy Prakoso Fahmi Oemar Indarti

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2022
Table of the 2022 Audit Committee Meeting Attendance Rate

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Audit *Audit Committee meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Rita Anugerah	Ketua *Chairman*	22	22	100%
Roy Prakoso*	Anggota *Member*	20	20	100%
Fahmi Oemar	Anggota *Member*	22	22	100%
Indarti	Anggota *Member*	22	22	100%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

* Appointed as Independent Commissioner at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, but has only served effectively as of January 25 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25 2022

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2022

Rekomendasi Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018
2. Rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit
3. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer Bank Riau Kepri
4. Rekomendasi atas Laporan Kinerja Bank
5. Rekomendasi atas Usulan Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk mereview Divisi Internal Audit (DIA) BRK Syariah periode Tahun 2019 sd 2021
6. Rekomendasi atas Permasalahan Skimming yang terjadi
7. Rekomendasi atas Draft Piagam Audit Intern BRK Syariah
8. Rekomendasi atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Tahun Buku 2022
9. Rekomendasi atas Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2022

Audit Committee recommendation

Throughout 2022, the Audit Committee made recommendations as follows:

1. *Recommendations on the 2018 Tax Audit Results*
2. *Recommendations on the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division*
3. *Recommendations for the Follow-Up of the Termination of Bank Riau Kepri's Isuuer Debt Activities*
4. *Recommendations on Bank Performance Reports*
5. *Recommendations on the Proposed Appointment of Independent Quality Controllers from External Parties to review the BRK Syariah Internal Audit Division (DIA) for the period 2019 to 2021*
6. *Recommendations on Skimming Problems that occur*
7. *Recommendation on the Draft Sharia BRK Internal Audit Charter*
8. *Recommendation on the Appointment of a Public Accounting Firm to Examine the Bank's Annual Financial Statements for the 2022 Fiscal Year*
9. *Recommendations on Auditing all aspects of Information Technology related to POJK regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology*

Kegiatan Komite Audit Tahun 2022

1. Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil Audit Tematik.
2. Pembahasan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan tahun buku 2022.
4. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Internal Audit tahun 2021.
5. Rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.
6. Review kinerja KAP atas laporan hasil pemeriksaan.
7. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
8. Rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
9. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Audit dalam rangka peyusunan Laporan Tahunan.
10. Melaksanakan pelatihan/seminar/*workshop* daam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Komite Audit.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Kinerja Komite Audit senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Audit sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Pemantau

Activities of the Audit Committee in 2022

1. *Discussion on General Audit Reports, Information Technology Audit Reports and Thematic Audit Reports.*
2. *Discussion of Bank Performance and Soundness Level.*
3. *Discussion on the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 Financial Statement Audit.*
4. *Discussion of the Internal Audit Division's 2021 Annual Work Plan and Budget.*
5. *Audit Committee meeting with Independent Auditor/KAP.*
6. *KAP performance review on audit reports.*
7. *Other assignments given by the Board of Commissioners to the Audit Committee.*
8. *Audit Committee meetings with other divisions and work units.*
9. *Prepare reports related to the Audit Committee in the context of preparing the Annual Report.*
10. *Carry out training/seminar/workshops in order to increase the knowledge and competence of the Audit Committee.*

Audit Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Audit Committee in order to improve the competence of members of the Audit Committee. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Audit Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the

Audit Committee Performance Assessment

The performance of the Audit Committee is constantly evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the implementation of the Bank's Good Corporate Governance on the completeness and implementation of the committee's duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Audit Committee has properly implemented the principles of Good Corporate Governance. The assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the Audit Committee work program and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report.

The results of this assessment will be used as material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

Risk Monitoring Committee

Basis for Formation of the Risk Monitoring Committee

The establishment of the Risk Monitoring Committee refers to Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Risk Monitoring Committee is an organ

Risiko merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik isu manajemen risiko dan sistem pengawasan Internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawan Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut: Dasar Hukum

1. Organisasi
   a. Kedudukan
   b. Keanggotaan
   c. Persyaratan keanggotaan
   d. Rapat
   e. Etika kerja
   f. Waktu kerja
2. Kewenangan
3. Tugas
4. Tanggung Jawab
5. Penutup

under the Board of Commissioners that assists in carrying out supervisory duties, especially related to the implementation of risk management so that it can be carried out effectively, both on issues of risk management and the internal control system as well as anticipatory steps taken by the Board of Directors in managing risk.

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

Based on Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are to assist the Sharia BRK Board of Commissioners to:

1. *Evaluate risk management policies.*
2. *Evaluate the conformity between the risk management policies and the implementation of these policies;*
3. *Evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No.001/KEPDKS/III/2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee. The Charter regulates the following provisions: Legal Basis

1. *Organization*
   a. *position*
   b. *Membership*
   c. *Membership requirements*
   d. *Meeting*
   e. *work ethic*
   f. *Working time*
2. *Authority*
3. *Task*
4. *Responsibility*
5. *Closing*

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan dan komposisi Komite Pemantau Risiko BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjangtahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan

Structure and Composition of Risk Monitoring Committee Members

The composition of the membership and composition of the BRK Syariah Risk Monitoring Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Table of Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	SK Penetapan *Determination Decree*	Keahlian *Field Expertise*	Bidang Tugas *Task*
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Chairman*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik *- Risk management* *- Finance* *- Banking and IT Consultants* *- Academic Teacher*	1. Ketua Komite Pemantau Risiko 2. Anggota Komite Audit *1. Head of the Risk Monitoring Committee* *2. Audit Committee Member*
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite *Independent Commissioner/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik *- Risk management* *- Professional Accountant* *- Taxation* *- Academic tutor*	1. Ketua Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko 3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi *1. Chairman of the Audit Committee* *2. Risk Monitoring Committee Member* *3. Member of the Remuneration and Nomination Committee*
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite *Independent Party/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit *- Risk management* *- Accounting & Auditing*	1. Anggota Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko *1. Audit Committee Member* *2. Risk Monitoring Committee Member*
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite *Independent Party/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing *- Risk management* *- Accounting & Auditing* *- Risk management* *- Accounting & Auditing*	1. Anggota Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko *1. Audit Committee Member* *2. Risk Monitoring Committee Member*

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee Members

Roy Prakoso
Ketua Komite Pemantau Risiko
Head of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
Profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan *Term of Office*	15 November 2021 s.d. 14 November 2025	*15 November 2021 to 14 November 2025*
Riwayat Penunjukan *Appointment History*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	*1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* *2. OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022* *3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* *4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko *Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee*	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Rita Anugerah **Anggota Komite Pemantau Risiko** *Risk Monitoring Committee Member*		
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan *His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report*		
Periode Jabatan *Term of Office*	19 Agustus 2019 s.d. sekarang	*August 19, 2019 to now*
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris *Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	*1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* *2. OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019* *3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* *4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko *Basis for Appointment as a Member of the Risk Monitoring Committee*	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Fahmi Oemar **Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko** *Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee*		
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan *His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report*		
Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Board of Directors Decree Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*
Periode Jabatan *Term of Office*	2013 s.d. sekarang	*2013 to now*

Indarti **Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko** *Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee*		
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan *His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report*		
Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Board of Directors Decree Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*
Periode Jabatan *Term of Office*	2013 s.d. sekarang	*2013 to now*

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Risk Monitoring Committee Independence

The Risk Monitoring Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out their duties. The independence of the members of the Risk Monitoring Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko
Table of Independence of the Risk Monitoring Committee

Aspek Independensi	Roy Prakoso	Rita Anugerah	Fahmi Oemar	Indarti	*Independence Aspect*
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	*Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors*
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	*Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies*
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	*Has no share ownership relationship in the company*
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	*Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee*
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	*Not serving as administrators of political parties, officials and government*

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee meeting

During 2022, the BRK Syariah Risk Monitoring Committee has held meetings with the date, agenda and meeting participants with the frequency and level of attendance as follows:

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022
Table of 2022 Risk Monitoring Committee Meetings

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat	Peserta *Participant*	*Meeting agenda*
1	10 Januari 2022 *January 10, 2022*	1. Membahas tentang Laporan Monitoring Risk Appetite BRK Syariah bulan November 2021. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti	*1. Discusses the BRK Syariah Risk Appetite Monitoring Report for November 2021.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
2	19 Januari 2022 *January 19, 2022*	1. Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018. 2. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Divisi Internal Audit	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti	*1. Discussed the 2018 Tax Audit Results.* *2. Discussing the 2022 Work Plan and Budget of the Internal Audit Division*
3	26 Januari 2022 *January 26, 2022*	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer BRK Syariah	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti	*Discussing the Follow-Up of the Termination of BRK Sharia Debt Isuuer Activities*
4	31 Januari 2022 *January 31, 2022*	1. Membahas tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2018 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the 2018 Tax Audit Results* *2. Discuss other matters deemed necessary*
5	9 Februari 2022 *February 9, 2022*	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer BRK Syariah.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*Discussing the Follow-Up of the Termination of BRK Sharia Debt Isuuer Activities.*
6	14 Februari 2022 *February 14, 2022*	Membahas tentang Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Debit Isuuer BRK Syariah.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*Discussing the Follow-Up of the Termination of BRK Sharia Debt Isuuer Activities.*
7	21 Februari 2022 *February 21, 2022*	1. Membahas tentang Laporan Monitoring Risk Appetite BRK Syariah bulan Nopember 2021. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses the BRK Syariah Risk Appetite Monitoring Report for November 2021.* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
8	2 Maret 2022 *March 2, 2022*	1. Membahas tentang Penempatan Dana pada Surat-Surat Berharga 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses Placement of Funds in Securities* *2. Discuss other matters deemed necessary*
9	8 Maret 2022 *March 8, 2022*	1. Membahas tentang Laporan Kinerja BRK bulan Januari 2022 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses the January 2022 BRK Performance Report* *2. Discuss other matters deemed necessary*

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat	Peserta *Participant*	*Meeting agenda*
10	23 Maret 2022 *March 23, 2022*	1. Membahas tentang Hasil Kunjungan Pengawasan ke Capem Sorek dan Cabang Tembilahan. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the Results of Monitoring Visits to Sub-District Heads of Sorek and Tembilahan Branch.* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
11	21 April 2022 *April 21, 2022*	1. Membahas tentang Aksi Korporasi/Pelepasan Penjualan Surat Berharga. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses Corporate Actions/Disclosure of Sales of Securities.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
12	17 Mei 2022 *May 17, 2022*	1. Membahas Permasalahan Skimming yang terjadi di BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses Skimming Problems that occur in BRK Syariah.* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
13	18 Mei 2022 *May 18, 2022*	1. Membahas tentang Riskk Appetite Statement bulan Maret 2022 BRK Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the March 2022 BRK Syariah Risk Appetite Statement* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
14	8 Juni 2022 *June 8, 2022*	1. Membahas Hasil Pemeriksaan BI terkait SNTC dan PIN terhadap PJP BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed BI Examination Results related to SNTC and PIN against Sharia PJP BRK.* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
15	10 Juni 2022 *June 10, 2022*	1. Membahas tentang Risk Appetite Statement bulan April 2022 BRK Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the April 2022 BRK Syariah Risk Appetite Statement* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
16	11 Juli 2022 *July 11, 2022*	1. Membahas Permintaan Legal Assistance (Pendampingan Hukum) Pelepasan/Penjualan SUN FR0065 2. Membahas tentang Seleksi KAP sebagai Pengendali Mutu Indpenden SKAI BRK Syariah Periode Tahun 2019 s/d 2021 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussing the Request for Legal Assistance for Release/Sell of SUN FR0065* *2. Discusses KAP Selection as Independent Quality Controller of SKAI BRK Syariah for the 2019 to 2021 period* *3. Discuss other matters deemed necessary*
17	29 Juli 2022 *July 29, 2022*	1. Membahas tentang Review Divisi Internal Audit BRK Syariah oleh KAP Periode Tahun 2019 s/d 2021 2. Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BRK Syariah Triwulan II Tahun 2022 dan Semester I tahun 2022 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses the Review of the Syariah BRK Internal Audit Division by KAP for the 2019 to 2021 period* *2. Discusses BRK Syariah Business Plan Supervision Report for Quarter II of 2022 and Semester I of 2022* *3. Discuss other matters deemed necessary*
18	16 Agustus 2022 *August 16, 2022*	1. Membahas tentang Data Laporan Keuangan BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses BRK Sharia Financial Report Data.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
19	22 Agustus 2022 *August 22, 2022*	1. Membahas tentang Persetujuan Draft Piagam Audit Intern BRK Syariah. 2. Membahas tentang Penawaran/Pemanggilan KAP untuk Audit Tahun Buku 2022 BRK Syariah. 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the Approval of the BRK Syariah Internal Audit Charter Draft.* *2. Discussing the KAP's Offer/Call for an Audit for the 2022 BRK Syariah Fiscal Year.* *3. Discuss other matters deemed necessary*
20	26 Agustus 2022 *August 26, 2022*	1. Membahas tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BRK Syariah Semester I Tahun 2022. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses the 2022 BRK Sharia Business Plan Supervision Report.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
21	30 Agustus 2022 *August 30, 2022*	1. Membahas tentang Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussing the Addition of 2 (two) Risks to BRK Syariah.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
22	12 September 2022 *September 12, 2022*	1. Membahas tentang Pihak-Pihak yang menjadi Rekanan BRK Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses Parties who are Partners of BRK Syariah* *2. Discuss other matters deemed necessary*
23	20 September 2022 *September 20, 2022*	Membahas tentang upaya peningkatan pendapatan dalam pencapaian target RBB BRK Syariah.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*Discusses efforts to increase revenue in achieving the BRK Syariah RBB target.*
24	29 September 2022 *September 29, 2022*	Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*Discuss other matters deemed necessary*

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat	Peserta *Participant*	*Meeting agenda*
25	25 Oktober 2022 *October 25, 2022*	1. Membahas tentang Penetapan KAP untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan BRK Syariah Tahun Buku 2022. 2. Membahas tentang Transaksi pada Surat Berharga dan Modal Inti BRK Syariah. 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the Determination of KAP to Examine the BRK Syariah Annual Financial Report for the Fiscal Year 2022.* *2. Discusses Transactions on BRK Sharia Securities and Core Capital.* *3. Discuss other matters deemed necessary.*
26	1 November 2022 *November 1, 2022*	1. Membahas tentang Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses the Audit of all aspects of Information Technology related to POJK regarding the Application of Risk Management in the Use of Information Technology.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
27	1 Desember 2022 *December 1, 2022*	1. Membahas tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Corporate Plan BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the Bank Business Plan (RBB) and BRK Syariah Corporate Plan.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
28	19 Desember 2022 *December 19, 2022*	1. Membahas tentang Governance, Risk, and Compliance (GRC) terkait Permohonan Persetujuan kepada Dewan Komisaris BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discusses Governance, Risk, and Compliance (GRC) regarding the Request for Approval from the Board of Commissioners of BRK Syariah.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
29	29 Desember 2022 *December 29, 2022*	1. Membahas tentang Persetujuan Risk Appetite Statement BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti	*1. Discussed the Approval of BRK Syariah Risk Appetite Statement.* *2. Discuss other matters deemed necessary*

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022
Table of the 2022 Risk Monitoring Committee Meeting Attendance Rate

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Roy Prakoso*	Ketua *Chairman*	26	26	100%
Rita Anugerah	Anggota *Member*	29	29	100%
Fahmi Oemar	Anggota *Member*	29	29	100%
Indarti	Anggota *Member*	29	29	100%

*Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

**Appointed as Independent Commissioner at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, but only effectively served on January 25, 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022*

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Laporan Tingkat Kesehatan Bank
2. Rekomendasi atas Risk Appetite Statement Bank
3. Rekomendasi atas Permasalahan Skimming yang terjadi di PT Bank Riau Kepri
4. Rekomendasi atas Penambahan 2 (dua) Risiko pada BRK Syariah
5. Rekomendasi atas Audit seluruh aspek Teknologi Informasi terkait POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

1. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank
2. Pembahasan Risk Appetite Statement Bank.
3. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
5. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.
6. Melaksanakan pelatihan/seminar/workshop dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Komite Pemantau Risiko.

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjangtahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Brief Report on the Implementation of the 2022 Risk Monitoring Committee Activities

Risk Monitoring Committee Recommendation

Throughout 2022, the Risk Oversight Committee submitted recommendations as follows:

1. *Recommendations on Bank Soundness Level Reports*
2. *Recommendations on the Bank's Risk Appetite Statement*
3. *Recommendations on Skimming Problems that occurred at PT Bank Riau Kepri*
4. *Recommendation on Addition of 2 (two) Risks to BRK Syariah*
5. *Recommendations on Auditing all aspects of Information Technology related to POJK regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology*

Activities of the Risk Monitoring Committee in 2022

1. *Discussion on Bank Soundness Level Reports*
2. *Discussion of the Bank's Risk Appetite Statement.*
3. *Other assignments given by the Board of Commissioners to the Risk Monitoring Committee.*
4. *Risk Monitoring Committee meetings with other divisions and work units.*
5. *Prepare reports related to the Risk Monitoring Committee in the context of preparing the Annual Report.*
6. *Carry out training/seminars/workshops in order to increase the knowledge and competence of the Risk Monitoring Committee.*

Risk Monitoring Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Risk Monitoring Committee in order to improve the competency of the Risk Monitoring Committee members. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Kinerja Komite Pemantau Risiko senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Pemantau Risiko sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan "Baik". Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Risiko serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Pemantau Risiko.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Coorporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan kebijakan remunerasi BRK Syariah dan fungsi nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRK Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup 2 (dua) bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Risk Monitoring Committee Performance Assessment

The performance of the Risk Monitoring Committee is constantly evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the implementation of the Bank's Good Corporate Governance on the completeness and implementation of the committee's duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Risk Monitoring Committee has implemented the principles of Good Corporate Governance with "Good". The assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the Risk Monitoring Committee work program and reported to the Board of Commissioners in the Risk Monitoring Committee report.

The results of this assessment will become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Risk Monitoring Committee for the next term of office.

Remuneration and Nomination Committee

Basis for Establishment of the Remuneration and Nomination Committee

The formation of the Remuneration and Nomination Committee refers to Bank Indonesia Regulation Number 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Remuneration and Nomination Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in carrying out supervisory duties, especially related to the BRK Syariah remuneration policy and the nomination function for prospective members of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee has duties and responsibilities covering 2 (two) areas, namely remuneration and nomination, including:

Terkait dengan Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prestasi kerja individual.
   c. Kewajaran dengan peer group.
   d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait dengan Bidang Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
   a. Kedudukan
   b. Keanggotaan
   c. Persyaratan keanggotaan
   d. Rapat
   e. Etika kerja
   f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Related to Remuneration

1. *Evaluate the remuneration policy.*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
   a. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS.
   b. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors
3. *Ensure that the remuneration policy is at least in accordance with:*
   a. Financial performance and fulfillment of reserves as stipulated in the applicable laws and regulations.
   b. Individual work performance.
   c. Fairness with the peer group.
   d. Balance and long-term strategy of the Bank.

Related to the Field of Nomination

1. *Develop and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Bank's Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding prospective members of the Board of Commissioners and/or Directors of the Bank to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
3. *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Committee to the Board of Commissioners.*

Remuneration and Nomination Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee for 2011. The Charter has regulated several provisions, among others:

1. *Objective*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
   a. position
   b. Membership
   c. Membership requirements
   d. Meeting
   e. work ethic
   f. Working time
4. *Authority*
5. *Task*
6. *Responsibility*
7. *Closing.*

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, sebagai komposisi berikut:

Structure and Composition of Remuneration and Nomination Committee Members

The composition of the membership and composition of the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors, as follows:

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Structure, Membership and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	SK Penetapan *Determination Decree*	Keahlian	*Skill*
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Chairman of the Committee*	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*	– Manajemen Risiko – Akuntan Profesional – Perpajakan – Pengajar akademik	– *Risk management* – *Professional* – *Accountant* – *Taxation* – *Academic tutor*
Syahrial Abdi	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite *Non Independent Commissioner/Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Board of Directors Decree Number 087/ KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*	Bidang Pemerintahan	*Government Sector*
Muhammad Affan	Pemimpin Divisi Manajemen SDI/Anggota Komite *HR Management Division Head / Committee Member*	SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021 *SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated 11 January 2021*	– Manajemen Risiko – HR Certified – Pembiayaan	– *Risk management* – *Certified HR* – *Financing*

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Member Profiles

Rita Anugerah
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Chairman of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan *Term of Office*	19 Agustus 2019 s.d. sekarang	*August 19, 2019 to now*
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris *Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	1. *Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No.09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders* 2. *OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019* 3. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022* 4. *OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi *Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee*	SK Direksi Nomor: 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Directors Decree Number: 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Syahrial Abdi **Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi** *Member of the Remuneration and Nomination Committee*		
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan *His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of the Annual Report*		
Periode Jabatan	15 November 2021 s.d. 14 November 2025	*15 November 2021 to 14 November 2025*
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris *Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	*1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders* *2. OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022* *3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* *4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi *Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee*	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021	*Board of Directors Decree Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Muhammad Affan **Pemimpin Divisi MSDM/ Anggota Komite** *HR Division Head/ Committee Member*	
Kewarganegaraan Indonesia	*Citizenship* *Indonesia*
Domisili Pekanbaru, Riau	*domicile* *Pekanbaru, Riau*
Tempat, Tanggal Lahir Cengar, 11 Juni 1970	*Place and date of birth* *Cengar, 11 Juni 1970*
Usia 52 Tahun	*Age* *52 Years*
Riwayat Pendidikan Menyelesaikan Studi di Bidang Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994	*Educational background* *Completed Studies in the Field of Development Economics and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1994*
Riwayat Jabatan Bergabung di BRK Syariah sejak tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai : - Pemimpin Cabang Pembantu Baserah (2009 s/d 2011) - Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Dalam (2011 s/d 2014) - Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2014 s/d 2017) - Pemimpin Cabang Bangkinang (2017 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2019 s/d 2021) - Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2021 s/d sekarang)	*Position History* *Joined BRK Syariah since 1996. Several positions held include:* *- Head of Baserah Sub-Branch (2009 to 2011)* *- Head of Lubuk Dalam Sub-branch (2011 to 2014)* *- Head of Teluk Kuantan Branch (2014 to 2017)* *- Bangkinang Branch Manager (2017 to 2019)* *- Head of Micro, Small & Medium Division (2019 to 2021)* *- Head of Human Resources Management Division (2021 to present)*
Dasar Pengangkatan SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021	*Basis of Appointment* *SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021*
Periode Jabatan 2021 s.d. sekarang	*Term of Office* *2021 to now*

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out their duties. The independence of the members of the Remuneration and Nomination Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Remuneration and Nomination Committee Independence

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Syahrial Abdi*	Muhammad Affan	*Independence Aspect*
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	*Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors*
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	X	*Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies*
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	*Has no share ownership relationship in the company*
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	*Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Remuneration and Nomination Committee*
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintahan	√	X	√	*Not serving as administrators of political parties, officials and government*

* Merupakan Komisaris Non Independen yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah (Provinsi Riau)
** Is a Non-Independent Commissioner who comes from elements of the Regional Government (Riau Province)*

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee meeting

During 2022, the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee has held meetings with the date, agenda and meeting participants with the frequency and level of attendance as follows:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022
Table of 2022 Remuneration and Nomination Committee Meetings

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat	Peserta *Participant*	*Meeting agenda*
1	23 Maret 2022 *March 23, 2022*	1. Pembahasan Anggaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	*1. Discussion of the 2022 Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Budget.* *2. Discuss other matters deemed necessary*
2	29 Juni 2022 *June 29, 2022*	1. Pembahasan Kebijakan Remunerasi Pengurus, DPS, dan Pegawai BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	*1. Discussion on Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board, and BRK Syariah Employees.* *2. Discuss other matters deemed necessary.*
3	11 November 2022 *November 11, 2022*	1. Pembahasan Tindak Lanjut Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	*1. Discussion on the Follow-Up of BRK Syariah Sharia Supervisory Board Determination Remuneration.* *2. Discuss matters deemed necessary.*
4	21 November 2022 *November 21, 2022*	1. Pembahasan Usulan Rancangan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	*1. Discussion of BRK Syariah Syariah Supervisory Board Remuneration Draft Proposal.* *2. Discuss matters deemed necessary.*
5	14 Desember 2022 *December 14, 2022*	1. Pembahasan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah. 2. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.	Rita Anugerah Syahrial Abdi Muhammad Affan	*1. Discussion of BRK Syariah Sharia Supervisory Board (DPS) Remuneration.* *2. Discuss matters deemed necessary.*

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Attendance Level of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	*Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Persentase *Percentage*
Rita Anugerah	Ketua *Chairman*	5	5	100%
Syahrial Abdi	Anggota *Member*	5	5	100%
Muhammad Affan	Anggota *Member*	5	5	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Anggaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022.
2. Rekomendasi atas Kebijakan Remunerasi Pengurus, DPS, dan Pegawai Bank.
3. Rekomendasi atas Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

1. Pembahasan Anggaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
2. Pembahasan Kebijakan Remunerasi Pengurus, DPS, dan Pegawai PT. Bank Riau Kepri
3. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka peyusunan Laporan Tahunan.
4. Melaksanakan pelatihan/seminar/workshop dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Brief Report on the Implementation of the 2022 Remuneration and Nomination Committee Activities

Remuneration and Nomination Committee recommendation

Throughout 2022, the Remuneration and Nomination Committee made recommendations as follows:

1. *Recommendations on the 2022 Board of Commissioners and Directors Remuneration Budget.*
2. *Recommendations on Remuneration Policies for Management, DPS, and Bank Employees.*
3. *Recommendations on Remuneration for the Sharia Supervisory Board (DPS) of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

Activities of the Remuneration and Nomination Committee in 2022

1. *Discussion of the Board of Commissioners and Directors Remuneration Budget*
2. *Discussion of Management Remuneration Policy, DPS, and Employees of PT. Riau Islands Bank*
3. *Prepare reports related to the Remuneration and Nomination Committee in the context of preparing the Annual Report.*
4. *Carry out training/seminar/workshops in order to increase the knowledge and competence of the Remuneration and Nomination Committee*

Remuneration and Nomination Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the implementation of development programs for the Remuneration and Nomination Committee in order to improve the competence of members of the Remuneration and Nomination Committee. Further explanation regarding the education/training activities that have been attended by the Remuneration and Nomination Committee throughout 2022 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Remunerasi dan Nominasi sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

Remuneration and Nomination Committee Performance Assessment

The performance of the Remuneration and Nomination Committee is constantly evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the implementation of the Bank's Good Corporate Governance on the completeness and implementation of committee duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Remuneration and Nomination Committee has properly implemented the principles of Good Corporate Governance. The assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the work program of the Remuneration and Nomination Committee and is reported to the Board of Commissioners in the report of the Remuneration and Nomination Committee.

The results of this assessment become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Remuneration and Nomination Committee for the next term of office.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ tata kelola yang secara langsung bertanggung jawab penuh secara kolegial atas pengelolaan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Board of Directors is a governance organ that is directly collegially fully responsible for the management of the Bank and represents the Bank both inside and outside the court as stipulated in the Articles of Association. The Board of Directors is responsible to the GMS which is the embodiment of accountability in managing the company in accordance with the principles of good corporate governance.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman kerja yang berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja dan tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi BRK Syariah dan praktik-praktik terbaik (best practices) tata kelola Bank yang baik.

Pedoman Kerja Direksi BRK Syariah tercantum dalam Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Riau Kepri, yang telah disesuaikan dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi No. 168KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Dalam Pedoman Kerja Direksi tersebut mengatur antara lain:

Board of Directors Work Guidelines

The Board of Directors has a work guideline which contains a compilation of corporate law principles, applicable laws and regulations, directives of Shareholders and provisions of the Articles of Association which govern the work procedures for carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors and their supporting organs. The work guidelines and code of conduct for the Board of Directors are the result of the codification of various regulations that apply to BRK Syariah and good bank governance best practices.

The Work Guidelines for the Board of Directors of BRK Syariah are listed in the Decree of the Board of Directors Number 049/KEPDIR/2019 dated 27 August 2019 concerning the Work Guidelines for the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri, which have been adjusted in the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks as stipulated in the Letter Directors Decree No. 168KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Work Guidelines for the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). The Board of Directors' Work Guidelines regulates, among others:

1. Visi dan misi
2. Tujuan
3. Fungsi
4. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
5. Persyaratan untuk Menjadi Direksi
6. Masa Jabatan
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Kerja dan Jabatan
9. Waktu Kerja
10. Tugas dan Tanggung Jawab
11. Hak dan Kewenangan
12. Rapat Direksi
13. Pembagian Tugas antar Direksi
14. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
15. Komite-Komite Direksi
16. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
17. Penggunaan Saran Profesional

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanaan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.

1. Vision and mission
2. Objective
3. Function
4. Number, Composition and Independence of the Board of Directors
5. Requirements to Become a Director
6. Length of service
7. Orientation Program and Capacity Building
8. Work Ethics and Position
9. Working time
10. Duties and responsibilities
11. Rights and Authorities
12. Board of Directors meeting
13. Division of Duties among Directors
14. Delegation of Authority Between Directors
15. Board of Directors Committees
16. Working Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board
17. Use of Professional Advice

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Carry out full management of the Bank.
2. Representing the Bank both inside and outside the court.
3. Manage the Bank in accordance with the authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations.
4. Carry out the implementation of Risk Management and the principles of Good Governance in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.
5. Follow up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, monitoring results from Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or monitoring results from other authorities.
6. To be responsible for carrying out their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.
7. Disclose to employees the Bank's strategic policies in the field of employment.
8. Providing accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners that is needed in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control over the implementation of Bank policies.
9. Organize and keep a Special Register which contains information regarding the share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks and the date the shares were obtained.
10. Personally responsible for negligence that harms the interests of the Bank.

11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi

Seluruh anggota Direksi BRK Syariah telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi BRK Syariah yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi di dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS LB.

11. Carry out the duties and responsibilities that arise based on the articles of association of the Bank, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.
12. For the Director who is in charge of the Compliance function, in addition to the general duties and responsibilities set out above, he also has specific responsibilities as stipulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of the Compliance Function for Commercial Banks.

Composition and Division of Duties of the Board of Directors

All members of the Board of Directors of BRK Syariah have passed the Fit and Proper Test. The basis for the appointment of the Board of Directors is a Letter of Determination of the Fit and Proper Test Results for Candidates for Members of the Board of Directors of the Bank from the OJK. Furthermore, prospective members of the BRK Syariah Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Board of Directors at the Extraordinary GMS (EGMS) for a term of 5 (five) years from the date of appointment at the Extraordinary GMS.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2022
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors in 2022

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif *Effective date*	Periode Jabatan *Term of Office*	*Basis of Appointment*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.SR-120/ KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/ PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 *September 30, 2020*	15 September 2020 – 14 September 2025 *15 September 2020 – 14 September 2025*	*1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders.* *2. OJK Letter No.SR-120/ KO.053/2020 September 30 2020* *3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* *4. OJK Letter No. SR-40/ PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Tangkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.13 tanggal 22 April 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No. SR-585/ KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/ PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	16 Mei 2019 *May 16, 2019*	22 April 2019 – 21 April 2024 *22 April 2019 – 21 April 2024*	*1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 13 dated 22 April 2019 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders.* *2. OJK Letter No. SR-585/ KO.053/2019 dated 16 May 2019* *3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* *4. OJK Letter No. SR-40/ PB.101/2022 dated 4 July 2022*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif *Effective date*	Periode Jabatan *Term of Office*	*Basis of Appointment*
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.SR-120/ KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/ PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 *September 30, 2020*	15 September 2020 – 14 September 2025 *15 September 2020 – 14 September 2025*	1. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders.* 2. *OJK Letter No.SR-120/ KO.053/2020 September 30 2020* 3. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* 4. *OJK Letter No. SR-40/ PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.SR-120/ KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/ PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 *September 30, 2020*	15 September 2020 – 14 September 2025 *15 September 2020 – 14 September 2025*	1. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders.* 2. *OJK Letter No.SR-120/ KO.053/2020 September 30 2020* 3. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* 4. *OJK Letter No. SR-40/ PB.101/2022 dated 4 July 2022*
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK Syariah. 2. Surat OJK No.S-462/ KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/ PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	7 Desember 2021 *December 7, 2021*	15 November 2021 – 14 November 2026 *15 November 2021 – 14 November 2026*	1. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of BRK Syariah Extraordinary General Meeting of Shareholders.* 2. *OJK Letter No.S-462/ KO.053/2021 dated 7 December 2021* 3. *Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022* 4. *OJK Letter No. SR-40/ PB.101/2022 dated 4 July 2022*

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of each Board of Directors are regulated in the Board of Directors' Work Guidelines and Rules, as follows:

Jabatan *Position*	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	*Description of Duties and Responsibilities*
Direktur Utama *President director*	– Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan. – Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham. – Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. – Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya. – Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya, yaitu Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Manajemen Sumber Daya Insani, Divisi Internal Audit, dan Desk Anti Fraud. – Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank. – Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal. – Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh. – Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank. – Menyiapkan Rencana Kerja Bank. – Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup. – Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur. – Berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. – Berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.	– *The President Director acts for and on behalf of the Board of Directors and represents the Bank inside and outside the court.* – *Together with the Main Commissioner signed the share certificate and collective share certificate.* – *Binding the Bank with other parties and other parties with the Bank, and carrying out all actions, both regarding management and ownership.* – *Establishing relationships with external parties, including the Regional Government, Government Agencies, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, banks and other institutions.* – *Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of the duties and work of work units under his supervision, namely the Strategic Planning Division, Human Resources Management Division, Internal Audit Division and Anti-Fraud Desk.* – *Signing letters and other papers that are principal in nature that can influence Bank policy.* – *Obliged to pay attention and immediately take the necessary steps on everything stated in each inspection report made by the Internal Audit.* – *Directing, developing and determining the overall management strategy of the Bank.* – *Control and evaluate all activities of the Bank.* – *Prepare a Bank Work Plan.* – *Submitting the Annual Report to the GMS for approval within 6 (six) months after the Bank's financial year is closed.* – *Coordinate activities and implementation of duties of all Directors.* – *Authority to make decisions in the framework of carrying out its duties, authorities and responsibilities.* – *Authorized to take corrective and/or instructive actions on policies that have been decided by the Director which according to the President Director deviate from Bank policies.*
Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	– Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. – Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Dana & Jasa, Divisi Treasury & Internasional, Desk Service Quality, dan Desk Digital Banking. – Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	– *Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.* – *In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of the work of the work units under his supervision, namely the Funds & Services Division, the Treasury & International Division, the Service Quality Desk, and the Digital Banking Desk.* – *Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.*
Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	– Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. – Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Komersial, Divisi Mikro Kecil & Menengah, Divisi Konsumer, dan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan. – Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	– *Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.* – *Responsible for planning, leading, coordinating and supervising directly the implementation of work units under his supervision, namely the Commercial Division, Micro Small & Medium Division, Consumer Division, and Financing Rescue & Settlement Division.* – *Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.*

Jabatan *Position*	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	*Description of Duties and Responsibilities*
Direktur Operasional *Director of Operations*	– Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. – Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Operasional, Divisi Financial & Reporting, Divisi Teknologi & Sistem Informasi, dan Divisi Umum. – Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	– *Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.* – *In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his supervision, namely the Operations Division, Financial & Reporting Division, Technology & Information Systems Division, and General Affairs Division.* – *Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	– Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. – Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya yaitu Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum, dan Divisi Sekretariat Perusahaan. – Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. – Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah, antara lain yaitu: – Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank. – Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. – Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya. – Memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi. – Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. – Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan.	– *Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.* – *In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work units under his supervision, namely the Compliance Division, Risk Management Division, Legal Division, and Corporate Secretariat Division.* – *Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.* – *In addition to carrying out the matters mentioned above, the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance & Risk Management is guided by the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Sharia BRK Compliance Function, including, namely:* – *Identify, measure and evaluate all compliance risks of the Bank, according to the Risk Management Guidelines that are owned by the Bank.* – *Conduct tests on the draft and changes to work guidelines for other Directors to ensure compliance with laws and regulations.* – *Establish the necessary steps to ensure compliance of all Bank activities with the provisions and commitments with Bank Indonesia and laws and regulations as well as all agreements with other parties.* – *Ensuring that the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) has been carried out in accordance with the provisions at all levels of the organization.* – *Ensuring the application of the precautionary principle throughout the Bank's operational activities is in accordance with Bank Regulations and other applicable laws and regulations.* – *Report to the banking authorities if there is a compliance violation.*

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai BRK Syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai BRK Syariah, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Kebijakan Program Orientasi bagi Direksi Baru di BRK Syariah dilakukan sebagai berikut:

Orientation Program for New Directors

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time are given an orientation/introduction program regarding Sharia BRK. This program aims to provide an understanding of the vision, mission and values of BRK Syariah, the code of ethics and code of conduct, the organizational structure, as well as the guidelines and work procedures for the Board of Directors. The Orientation Program Policy for New Directors at BRK Syariah is carried out as follows:

1. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Direksi lainnya.
2. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi:
   a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum;
   b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh Bank;
   c. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
   d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
3. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan para pejabat dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai kebutuhan.
4. Program peningkatan kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Bank di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
5. Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
   b. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
   c. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan agar menyajikan presentasi mengenai materi seminar atau pelatihan kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

Pada tahun 2022 tidak ada perubahan komposisi Direksi dan sehingga tidak terdapat pelaksanaan program orientasi pengenalan bagi anggota Direksi baru.

Independensi Direksi

Direksi BRK Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank adalah independen.

1. The Main Director is responsible for holding the Orientation program or if the Main Director is absent or unavailable, then the responsibility for implementing the Orientation program lies with the other Directors.

2. The Orientation Program given to the Director includes:

   a. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors based on law;
   b. Implementation of good governance principles by the Bank;
   c. Description of the Bank in terms of vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and other strategic issues;
   d. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and the Audit Committee.

3. The Orientation Program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank officials and employees as well as other programs as needed.

4. The capability improvement program is important so that the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Bank's core business in the banking sector and are always ready to anticipate it for the sustainability and progress of the Bank.

5. Provisions regarding the Capability Improvement Program for the Board of Directors are as follows:
   a. The Capability Improvement Program is implemented in order to increase the effectiveness of the implementation of the duties, powers and responsibilities of the Board of Directors.
   b. The plan to carry out the Capability Improvement Program must be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.
   c. Each Director who participates in Capability Improvement Programs such as seminars and or training is required to present presentations on seminar or training materials to other Directors in order to share information and knowledge.

In 2022 there will be no change in the composition of the Board of Directors and therefore there will be no implementation of an induction orientation program for new members of the Board of Directors.

Board of Directors independence

The Board of Directors of BRK Syariah has no financial relationship, management relationship or share ownership relationship. All members of the Board of Directors also do not have family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders of the Bank. Thus all members of the Bank's Board of Directors are independent.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2022 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani sebagai syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di OJK.

All members of the Board of Directors who have served in 2022 have declared their independence in a statement letter not having a conflict of interest which was signed as a requirement for administrative documents in the Capability and Compliance Assessment process at OJK.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Direksi

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Multiple Positions and Conflict of Interest of the Board of Directors

Double job

All members of the Board of Directors do not have concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at banks, non-bank financial institutions or other companies domiciled at home or abroad.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Table: Concurrent Position of Board of Directors

Direksi *Directors*	Jabatan *Position*	Rangkap Jabatan Pada Bank Lain *Concurrent Positions at Other Banks*	Lembaga Keuangan Non Bank/ Perusahaan Lain *Non-Bank Financial Institutions/Other Companies*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*

Benturan Kepentingan

BRK Syariah memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki potensi benturan kepentingan terhadap Bank selama tahun 2022. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, anggota Direksi yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan/ Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Direksi yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/ usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Conflict of Interest

BRK Syariah ensures that all members of the Board of Directors do not have a potential conflict of interest with the Bank during 2022. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors who experience a Conflict of Interest must continue to prioritize the economic interests of the Bank and prevent the Bank from losses that may arise/ possible reduction in Bank profits and disclose the condition of the Conflict of Interest in every decision/
Every policy and decision that contains a Conflict of Interest will be decided by a Member of the Board of Directors who does not have a Conflict of Interest.

If a discussion/proposal/decision is the absolute authority of the person concerned, and is still within the limits of the authority/transaction limit of his position and the process if transferred will hamper the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the member of the Board of Directors concerned professionally accompanied by reasons that can be accounted for and with due observance of the applicable regulations.

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2022, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun workshop terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Directors Competency Development Policy

During 2022, Members of the Directors have participated in several trainings/seminars and workshops related to their fields of work, including the following:

Nama *Name*	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*	*Training Title*	*Organizer*
Andi Buchari (Direktur Utama) *(President director)*	*Agile Coaching Certified* Program ICP-ACC	*Agile Certified* Hijrah *Coach*	21/01/2022	*Agile Coaching Certified Program ICP-ACC*	*Agile Certified Hijrah Coach*
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	*Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner*	*Human Resource Management Division*
	Sosialisasi POJK Bank Umum Syariah dan Focus Group Discussion Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	29/09/2022	*POJK Socialization of Sharia Commercial Banks and Banking Focus Group Discussion*	*Financial Services Authority*
M.A. Suharto (Direktur Dana dan Jasa) *(Director of Funds and Services)*	*Training Service Excellent*: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	*Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner*	*Human Resource Management Division*
	Pelatihan Publik Program Pemelihaaran Sertifikasi "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	19/12/2022	*Public Training for Certification Maintenance Program "Spell the Functions and Active Roles of Commissioners in the BANI Era"*	*Risk Management Certification Body (BSMR)*
Said Syamsuri (Direktur Operasional) *(Director of Operations)*	Pelatihan *Online* Kebijakan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Lembaga Bina Management Center (BMC)	20/01/2022	*Online Training on General Provisions and Tax Procedures Policy*	*Bina Management Center (BMC) Institute*
	Pelatihan Perbankan Syariah bagi Pengurus Bank	Tazkia Consulting	17/02/2022	*Sharia Banking Training for Bank Management*	*Tazkia Consulting*
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public Speaking & Table Manner	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	*Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner*	*Human Resource Management Division*
	Pelatihan Publik Program Pemelihaaran Sertifikasi "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	19/12/2022	*Public Training for Certification Maintenance Program "Spell the Functions and Active Roles of Commissioners in the BANI Era"*	*Risk Management Certification Body (BSMR)*
Tengkoe Irawan (Direktur Pembiayaan) *(Director of Financing)*	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	14/01/2022	*Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)*	*Risk Management Certification Body (BSMR)*
	Webinar Series Online Musyarakah Mutanaqisah MMQ	Bank Riau Kepri Syariah	02/04/2022	*Musyarakah Mutanaqisah MMQ Online Webinar Series*	*Bank Riau Kepri Syariah*
	Training Service Excellent: Keprotokolan, Public *Speaking & Table Manner*	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	*Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner*	*Human Resource Management Division*
	Pelatihan *Online Leadership Class Advanced*	PT Bisnishack Bahagia Mendunia	16/04/2022	*Online Leadership Class Advanced Training*	*PT Bisnishack Happy Worldwide*
	Seminar *Online* "Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun"	ADPI dan LSPDP	30/05/2022	*Online Seminar "Actualization of Pension Fund Management Professionalism"*	*ADPI and LSPDP*

Nama *Name*	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*	*Training Title*	*Organizer*
Fajar Restu Febriansyah* (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) *(Director of Compliance and Risk Management)*	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)	Tazkia Consulting	17/02/2022	*Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)*	*Tazkia Consulting*
	Training Service Excellent: Keprotokolan, *Public Speaking & Table Manner*	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	04/04/2022	*Excellent Service Training: Protocol, Public Speaking & Table Manner*	*Human Resource Management Division*
	Seminar *Online* "Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun"	ADPI dan LSPDP	30/05/2022	*Online Seminar "Actualization of Pension Fund Management Professionalism"*	*ADPI and LSPDP*
	Pelatihan *Workshop* dan Sertifikasi International GRC Profesional	Solmit Bangun Indonesia	19/12/2022	*Workshop Training and Professional International GRC Certification*	*Solmit Build Indonesia*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Direksi *Directors*	Jabatan *Position*	Sertifikasi Manajemen Risiko	*Risk Management Certification*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024	*Level 5 Risk Management Certification, valid until December 18, 2024*
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024	*Level 5 Risk Management Certification, valid until December 18, 2024*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2024	*Level 5 Risk Management Certification, valid until December 18, 2024*
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2024	*Level 5 Risk Management Certification, valid until January 13, 2024*
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2023	*Level 5 Risk Management Certification, valid until December 15, 2023*

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi telah diatur dalam Pedoman Kerja Direksi bagian Rapat Direksi, yaitu:

1. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi membicarakan mengenai hal-hal strategis, operasional atau rapat yang bersifat wacana.
2. Setiap masalah harus ada keputusan yang diambil setelah melalui suatu pembahasan. Pembahasan dilakukan untuk mengungkap pendapat masing-masing Direksi agar dapat diambil keputusan yang terbaik. Setiap anggota Direksi berhak mengungkapkan pendapatnya dan ditulis dalam notulen rapat.
3. Agenda Rapat dapat diusulkan oleh masing-masing Direksi dengan menyertakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan agendanya.
4. Agenda Rapat dapat ditambah dengan disertai bahan yang cukup atau dikurangi, apabila menurut urgensinya dapat dibahas pada rapat berikutnya.
5. Setiap kali rapat dibuat daftar hadir dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting Policy has been regulated in the Board of Directors Work Guidelines for the Board of Directors Meeting section, namely:

1. *The Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors and each Director who is present and or represented has the right to vote at the meeting. The Board of Directors meeting discusses strategic matters, operational or discursive meetings.*
2. *Every problem must have a decision that is taken after going through a discussion. The discussion was held to reveal the opinion of each member of the Board of Directors so that the best decision could be made. Each member of the Board of Directors has the right to express his opinion and write it down in the minutes of the meeting.*
3. *Meeting agendas can be proposed by each Board of Directors by attaching written materials to prepare invitations and agendas.*
4. *The meeting agenda can be added with sufficient material or reduced, if according to the urgency it can be discussed at the next meeting.*
5. *At each meeting, a list of attendees is made and signed by all those present at the meeting.*

6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) beserta alasan perbedaan pendapat tersebut harus dibacakan sebelum rapat ditutup, khususnya yang berkaitan dengan keputusan/kesepakatan yang diambil.
7. Risalah Rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam Rapat, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi (termasuk yang tidak hadir dalam Rapat) serta kepada pihak-pihak terkait dengan keputusan yang diambil.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Seorang Direktur hanya dapat mewakili seorang Direktur lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Direktur Utama bertindak sebagai pemimpin rapat. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
11. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi (sirkuler) dengan ketentuan semua Direktur memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Hasil keputusan rapat Direksi mengikat seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh anggota Direksi telah diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

6. Dissenting opinion and the reasons for the dissenting opinion must be read out before the meeting is closed, especially with regard to decisions/agreements taken.

7. The minutes of the Meeting which have been signed by all those present at the Meeting, are distributed to all members of the Board of Directors (including those who were not present at the Meeting) as well as to parties related to the decisions taken.
8. The meeting of the Board of Directors is legal and has the right to make binding decisions if more than ½ (one-half) of the members of the Board of Directors are present or represented at the meeting.
9. A Director can only represent another Director based on a power of attorney.
10. The President Director acts as the leader of the meeting. In the event that the President Director is absent or unable to attend the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the Directors present and elected at the Board of Directors Meeting may chair the Board of Directors Meeting.
11. All decisions at the Board of Directors meeting are taken by deliberation to reach a consensus.
12. If deliberations for consensus are not reached, then decisions are taken by voting based on the affirmative votes of at least more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting.
13. The Board of Directors can also make valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting (circular) provided that all Directors give their approval for the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at a Board of Directors meeting.

14. The results of the decisions of the Board of Directors meeting bind all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those who are not present at the meeting, on the basis of the consideration that the Board of Directors is collegial in nature and all members of the Board of Directors have been given the opportunity to find out the results of the meeting.

Throughout 2022, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Meetings are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Table of Board of Directors Meetings

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
1	03 Januari 2022 *January 03, 2022*	Pembahasan Progres Kasus-kasus Hukum Bank Riau Kepri	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengkoe Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. M.A. Suharto 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Unit Kerja Divisi Hukum	*Discussion of the Progress of Legal Cases at Bank Riau Kepri*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
2	04 Januari 2022 *January 04, 2022*	Penetapan Sanksi Pegawai	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengkoe Irawan 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 6. Pemimpin *Desk Anti Fraud*	*Determination of Employee Sanctions*
3	06 Januari 2022 *January 06, 2022*	Pembahasan Langkah-langkah Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Discussion of Steps to Improve Bank Soundness Level*
4	07 Januari 2022 *January 07, 2022*	Pembahasan Langkah-langkah Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 8. Pemimpin Divisi Operasional	*Discussion of Steps to Improve Bank Soundness Level*
5	13 Januari 2022 *January 13, 2022*	Pembahasan *Progress* Konversi Bank Umum Syariah	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengkoe Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. M.A. Suharto 6. Ketua *Project Mnagement Office* (PMO) 7. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 10. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 11. Pemimpin Divisi Operasional	*Discussion of Conversion Progress of Islamic Commercial Banks*
6	14 Januari 2022 *January 14, 2022*	1. Presentasi Vendor Acara *Launching* Bank Riau Kepri Syariah dan Seminar Nasional 2. Presentasi Kegiatan dan Anggaran masing-masing Koordinator Kegiatan	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	1. *Vendor Presentation of Bank Riau Kepri Syariah Launching Event and National Seminar* 2. *Presentation of Activities and Budget of each Activity Coordinator*
7	18 Januari 2022 *January 18, 2022*	Pembahasan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2018	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 6. Pemimpin Divisi Internal Audit	*Discussion on Presentation of 2018 Tax Audit Results*
8	25 Januari 2022 *January 25, 2022*	Presentasi Tabel Penyampaian ***Progress*** Komitmen Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengkoe Irawan 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Internal Audit 6. Tim PMO	*Table Presentation for Submission of Commitment Progress for Converting Bank Riau Kepri to a Sharia Commercial Bank*
9	25 Januari 2022 *January 25, 2022*	Pembahasan Proyeksi Kinerja Januari 2022	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Tengkoe Irawan 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Divisi Konsumer 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	*Discussion of Performance Projections for January 2022*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
10	31 Januari 2022 *January 31, 2022*	Pembahasan Terkait Implementasi Sentralisasi Operasional	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Staf Khusus Direksi Sentralisasi Operasional	*Discussion Regarding the Implementation of Operational Centralization*
11	03 Februari 2022 *February 03, 2022*	Pembahasan KPI tahun 2022	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Discussion of KPIs for 2022*
12	07 Februari 2022 *February 07, 2022*	Pembahasan Reputasi Bank (Pemberitaan Negatif Media) dan Potensi Kasus Hukum Terkait	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Pemimpin Divisi Hukum 9. Divisi Sekretariat Perusahaan	*Discussion of Bank Reputation (Negative Media Coverage) and Potential Related Legal Cases*
13	09 Februari 2022 *February 09, 2022*	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat KPI tanggal 23 Januari 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Discussion of KPI Meeting Follow-up on 23 January 2022*
14	22 Februari 2022 *February 22, 2022*	Pembahasan Kesiapan Peninjauan Final Konversi DPPS OJK/IT	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Ketua Tim PMO 7. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	*Discussion of Readiness for Final Review of DPPS OJK/IT Conversion*
15	22 Februari 2022 *February 22, 2022*	Pembahasan *Progress* Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Internal Audit	*Discussion on the Progress of the Audit Results of the Public Accounting Firm for the 2021 Fiscal Year*
16	23 Februari 2022 *February 23, 2022*	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja CKPN Periode Akhir Bulan Februari 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah 9. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 10. Pemimpin Divisi Konsumer 11. Pemimpin Divisi Syariah	*CKPN Performance Monitoring and Evaluation Meeting for the End of February 2022 Period*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
17	2 Maret 2022 *March 2, 2022*	*Exit Meeting* Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Syahrial Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan 10. Pemimpin Divisi Konsumer 11. Pemimpin Divisi Umum 12. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	*Public Accountant Office Exit Meeting for Fiscal Year 2021*
18	3 Maret 2022 *March 3, 2022*	Pembahasan Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS)	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Discussion of Rights and Facilities of the Sharia Supervisory Board (DPS)*
19	7 Maret 2022 *March 7, 2022*	Pembahasan KPI tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Seluruh Pemimpin Divisi Desk/Tim	*Discussion of KPIs for 2022*
20	9 Maret 2022 *March 9, 2022*	Pembahasan Persiapan Rapat Rencana Bisnis Bank bersama OJK	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Discussion on the preparation of the Bank's Business Plan Meeting with OJK*
21	22 Maret 2022 *March 22, 2022*	1. Presentasi Tindak Lanjut atas LHP OJK Komitmen bulan Maret 2022 2. Presentasi *Time Line* Program serta *Action Plan* TTFSOP 3. Presentasi Kegiatan Promosi Program Tabungan BRK	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	1. *Follow-up Presentation on LHP OJK Commitments for March 2022* 2. *Presentation of the Timeline Program and the TTFSOP Action Plan* 3. *Presentation of BRK Savings Program Promotion Activities*
22	22 Maret 2022 *March 22, 2022*	Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan RUPSLB tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin Divisi Hukum 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Discussion on the preparation for the 2021 Annual GMS and the 2022 EGMS*
23	23 Maret 2022 *March 23, 2022*	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi	*Information Technology Steering Committee meeting*
24	29 Maret 2022 *March 29, 2022*	Rapat Revisi Kebijakan Wewenang Memutus *Credit Review*	1. Tengkoe Irawan 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 5. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyesaian Kredit 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	*Credit Review Authority Policy Revision Meeting*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
25	6 April 2022 *April 6, 2022*	Pembahasan Penentuan Jadwal RUPS Tahunan dan RUPSSLB Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Ketua Tim PMO 6. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Discussion on Determining the Schedule for the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the Conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank*
26	12 April 2022 *April 12, 2022*	Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2022	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Syahrial Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Seluruh Pemimpin Divisi	*Discussion of the Bank's Business Plan for 2022*
27	14 April 2022 *April 14, 2022*	Penetapan Sanksi Pegawai	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin *Desk Anti Fraud* 8. Anggota Tim Investigasi *Fraud*	*Determination of Employee Sanctions*
28	26 April 2022 *April 26, 2022*	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni dan Desember 2021 berdasarkan SREP OJK Triwulan I tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Seluruh Pemimpin Divisi	*Discussion of Bank Soundness Level for June and December 2021 positions based on SREP OJK Quarter I of 2022*
29	26 April 2022 *April 26, 2022*	Pembahasan *Internal Control*	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi Desk 7. Seluruh Pemimpin Cabang Capem/ Kedai	*Internal Control Discussion*
30	11 Mei 2022 *May 11, 2022*	1. Pembahasan Langkah-langkah untuk mengatasi Skimming 2. Pembahasan Tindaklanjut Pertemuan dengan OJK Provinsi Riau terkait Tingkat Kesehatan Bank 3. Pembahasan mengenai Tindaklanjut Konversi Bank Riau Kepri 4. Pembahasan mengenai *Lawyer* Bank Riau Kepri 5. Pembahasan Distribusi QACA dan Audit Area	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	1. *Discussion of Steps to overcome Skimming* 2. *Discussion of Follow-Up Meetings with OJK Riau Province regarding Bank Soundness Level* 3. *Discussion on Follow-Up Conversion of Bank Riau Kepri* 4. *Discussion on Lawyer Bank Riau Kepri* 5. *Discussion of QACA Distribution and Area Audit*
31	12 Mei 2022 *May 12, 2022*	1. Pembahasan Strategi Pengembangan Jaringan Kantor Bank Riau Kepri 2. Evaluasi Personil Divisi Perencanaan Strategis	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	1. *Discussion of Bank Riau Kepri Office Network Development Strategy* 2. *Strategic Planning Division Personnel Evaluation*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
32	12 Mei 2022 *May 12, 2022*	Pembahasan Perhitungan CKPN PSAK71 bersama Tim Multipolar	1. Tengkoe Irawan 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Syariah 9. Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	*Discussion on PSAK 71 Allowance for Impairment Calculations with the Multipolar Team*
33	18 Mei 2022 *May 18, 2022*	Pembahasan Evaluasi Personil Divisi Sekretariat Perusahaan	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Seluruh Pegawai Divisi Sekretariat Perusahaan	*Discussion on Corporate Secretariat Division Personnel Evaluation*
34	19 Mei 2022 *May 19, 2022*	Simulasi Pembayaran Jasa Produksi Pegawai Tahun Buku 2021	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Simulation of Payment for Employee Production Services for the 2021 Fiscal Year*
35	19 Mei 2022 *May 19, 2022*	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Tingkat Kesehatan Bank dengan OJK 2. Tindak Lanjut RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan RUPS LB Tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	1. *Discussion of Follow-Up Meetings on Bank Soundness Level with OJK* 2. *Follow up of the 2021 Annual GMS and the 2022 Extraordinary GMS*
36	20 Mei 2022 *May 20, 2022*	Pembahasan Evaluasi Personil Divisi Internal Audit (DIA)	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 6. Pemimpin Divisi Internal Audit 7. Seluruh Pegawai Divisi Internal Audit	*Discussion of Internal Audit Division Personnel Evaluation (DIA)*
37	20 Mei 2022 *May 20, 2022*	Penetapan Sanksi Pegawai	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin ***Desk Anti Fraud*** 8. Anggota Tim Investigasi *Fraud*	*Determination of Employee Sanctions*
38	20 Mei 2022 *May 20, 2022*	Penyampaian Kebijakan Direksi tentang Kepegawaian	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi *Desk*/Tim	*Submission of the Board of Directors' Policy on Employment*
39	23 Mei 2022 *May 23, 2022*	Pembahasan Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2021 dan Desember 2021	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Syahrial Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 11. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 12. Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Discussion on Improvement of Bank Soundness Level for June 2021 and December 2021*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
40	25 Mei 2022 *May 25, 2022*	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Manajemen Risiko	*Risk Management Committee meeting*
41	25 Mei 2022 *May 25, 2022*	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi	*Information Technology Steering Committee meeting*
42	2 Juni 2022 *June 2, 2022*	Pembahasan terkait Persiapan Rapat Tingkat Kesehatan Bank bersama OJK	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Anggota Tim *Task Force* Tingkat Kesehatan Bank	*Discussion regarding the preparation for the Bank Soundness Level Meeting with the OJK*
43	6 Juni 2022 *June 6, 2022*	Rapat Relokasi Kantor Bank Riau Kepri Syariah Capem Pasir Pangaraian dan Pemaparan Rencana Revisi Pembukaan Jaringan Kantor Tahun Anggaran 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Umum	*Bank Riau Kepri Sharia Office Relocation Meeting of Pasir Pangaraian Headquarters and Presentation of Revised Plans for Opening Office Networks for the 2022 Fiscal Year*
44	8 Juni 2022 *June 8, 2022*	Pembahasan Tindak Lanjut Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2021	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Anggota Tim Task Force Tingkat Kesehatan Bank	*Discussion of Bank Soundness Level Follow-up for the December 2021 period*
45	9 Juni 2022 *June 9, 2022*	1. Pembahasan *Progress* Konversi Bank Riau Kepri 2. Presentasi Tim Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah (TPHKN) 3. Presentasi Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan terkait *Progress* Persiapan *Launching* Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Anggota Tim TPHKN	1. *Discussion of the Conversion Progress of Bank Riau Kepri* 2. *Presentation of the Customer Rights and Obligations Settlement Team (TPHKN)* 3. *Presentation of the Head of the Corporate Secretariat Division regarding the Progress of Preparation for the Launching of Bank Riau Kepri Syariah*
46	10 Juni 2022 *June 10, 2022*	Presentasi *Follow Up* Klaim Asuransi	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Ketua Tim ***Task Force*** Pengelolaan Asuransi	*Insurance Claim Follow Up Presentation*
47	15 Juni 2022 *June 15, 2022*	1. Tindak Lanjut atas LHP OJK Komitmen bulan Juni 2022 2. Tindak Lanjut atas Hasil *On Site Review Report* BI terkait Temuan dan Pencegahan *Skimming*	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 9. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 10. Pemimpin *Desk Digital Banking & Services*	1. *Follow up on LHP OJK Commitments for June 2022* 2. *Follow-up on the results of BI's On Site Review Report regarding Skimming Findings and Prevention*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
48	16 Juni 2022 *June 16, 2022*	Rapat *Progress* Persiapan *Launching* Konversi Syariah dan Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Ketua PMO 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	*Progress Meeting on Preparation for Launching Sharia Conversion and Other Matters Considered Necessary*
49	21 Juni 2022 *June 21, 2022*	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Manajemen Risiko	*Risk Management Committee meeting*
50	22 Juni 2022 *June 22, 2022*	Pembahasan *Progress* Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Ketua PMO 6. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 9. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 10. Pemimpin Divisi Kepatuhan 11. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 12. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	*Discussion of the Progress of Conversion of Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah*
51	23 Juni 2022 *June 23, 2022*	Pembahasan Komitmen Divisi *Financial & Review* terhadap Keterlambatan LBUT KI Kegiatan Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan Bulanan Bank Riau Kepri	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi *Financial & Review* 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Discussion of the Commitment of the Financial & Review Division on Delays in LBUT KI Payment System Activities and Monthly Financial Services of Bank Riau Kepri*
52	23 Juni 2022 *June 23, 2022*	Arahan Direksi terkait Internalisasi BRK Syariah secara *Hybrid* dengan Seluruh Pemimpin Unit Kantor secara *Online* dan Pemimpin Divisi/*Desk* secara Tatap Muka/*Offline*	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	*Directives of the Board of Directors regarding Sharia BRK Internalization in Hybrid with All Office Unit Leaders Online and Division/Desk Leaders Face to Face/Offline*
53	23 Juni 2022 *June 23, 2022*	Pembahasan Pegawai sesuai SOT Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Discussion of Employees in accordance with Bank Riau Kepri Sharia SOT*
54	24 Juni 2022 *June 24, 2022*	Pembahasan Revisi RBB tahun 2022 - 2024	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi	*Discussion on Revised RBB for 2022 - 2024*
55	24 Juni 2022 *June 24, 2022*	Persetujuan Revisi RBB tahun 2022 - 2024	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*RBB Revision Approval for 2022 - 2024*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
56	24 Juni 2022 *June 24, 2022*	Rapat Koordinasi terkait Kasus Pegawai	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin *Desk Anti Fraud*	*Coordination Meeting related to Employee Cases*
57	26 Juni 2022 *June 26, 2022*	Pembahasan Pegawai sesuai SOT Bank Riau Kepri Syariah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Discussion of Employees in accordance with Bank Riau Kepri Sharia SOT*
58	27 Juni 2022 *June 27, 2022*	Rapat *Progress* Persiapan *Launching* Konversi Syariah dan Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Ketua PMO 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Umum	*Progress Meeting on Preparation for Launching Sharia Conversion and Other Matters Considered Necessary*
59	30 Juni 2022 *June 30, 2022*	Rapat Komite Manajemen Risiko	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Anggota Komite Manajemen Risiko	*Risk Management Committee meeting*
60	11 Juli 2022 *July 11, 2022*	Rapat Evaluasi Kinerja Semester I tahun 2022	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Zulhendri Rais 10. Saifuddin Yuliar 11. Seluruh Pemimpin Divisi 12. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/ Kedai	*2022 Semester I Performance Evaluation Meeting*
61	12 Juli 2022 *July 12, 2022*	Tindak Lanjut Asistensi Bank Indonesia	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 8. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting*	*Bank Indonesia Assistance Follow-up*
62	20 Juli 2022 *July 20, 2022*	Tindak Lanjut Temuan atas LHP BPK RI tahun 2005 s.d. 2015	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	*Follow-up on the Findings of BPK RI's 2005 to 2005 LHP. 2015*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
63	21 Juli 2022 *July 21, 2022*	Pembahasan Tindak Lanjut Temuan atas LHP BPK RI tahun 2005 s.d. 2015 bersama Dewan Komisaris	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Discussion of Follow-Up Findings on BPK RI LHP 2005 to.d. 2015 with the Board of Commissioners*
64	28 Juli 2022 *July 28, 2022*	Pembahaasan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Pemimpin Divisi Syariah 6. Pemimpin Divisi MKM 7. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan 9. Pemimpin Divisi Konsumer	*Discussion of the Financing Policy Committee (KKP) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
65	03 Agustus 2022 *August 03, 2022*	Rapat *Progress* Persiapan Peresmian BRK Syariah	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Seluruh Pemimpin Divisi 7. Tim PMO	*Meeting on the Progress of Preparation for the Inauguration of BRK Syariah*
66	04 Agustus 2022 *August 04, 2022*	Pembahaasan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi MKM 7. Pemimpin Divisi Konsumer 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 12. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 13. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 14. Pemimpin Divisi Kepatuhan 15. Pemimpin *Desk Digital Banking*	*Discussion of the Financing Policy Committee (KKP) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
67	08 Agustus 2022 *August 08, 2022*	1. Rapat Pembahasan Agenda *Corporate* BRK Syariah 2. Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDM	1. *BRK Syariah Corporate Agenda Discussion Meeting* 2. *Other Matters Considered Necessary*
68	11 Agustus 2022 *August 11, 2022*	1. Rapat Koordinasi Direksi, Panitia, EO, Ceria TV terkait Persiapan Peresmian BRK Syariah 2. Hal-hal Lainnya yang Dianggap Perlu	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	1. *Coordination Meeting of the Board of Directors, Committee, EO, Ceria TV regarding Preparation for the Inauguration of BRK Syariah* 2. *Other Matters Considered Necessary*
69	22 Agustus 2022 *August 22, 2022*	Pembentukan Staf Khusus Direksi Bidang Penyempurnaan dan Implementasi Ketentuan Internal Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Unit Kerja Terkait	*Formation of Special Staff for the Board of Directors in the Field of Refinement and Implementation of the Bank's Internal Regulations*
70	31 Agustus 2022 *August 31, 2022*	Presentasi Aplikasi *E-Learning* BRK Syariah *Academy* (Kebijakan dan Aplikasi)	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	*BRK Syariah Academy E-Learning Application Presentation (Policies and Applications)*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
71	05 September 2022 *September 05, 2022*	1. *Governance, Risk and Compliance* (GRC) 2. Persiapan *Media Gathering*	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Said Syamsuri 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* 10. Pemimpin Divisi Internal Audit 11. Pemimpin *Desk Anti Fraud*	1. *Governance, Risk and Compliance (GRC)* 2. *Media Gathering Preparation*
72	07 September 2022 *September 07, 2022*	Presentasi Program Kerja Staf Khusus Direksi (SKD) Bidang Penyempurnaan dan Implementasi Ketentuan Internal Bank	1. Andi Buchari 2. Said Syamsuri 3. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 4. Pemimpin Divisi Operasional 5. Staf Khusus Direksi	*Presentasi Program Kerja Staf Khusus Direksi (SKD) Bidang Penyempurnaan dan Implementasi Ketentuan Internal Bank*
73	07 September 2022 *September 07, 2022*	Evaluasi Pasca Konversi	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Operasional 8. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Internal Audit 10. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 11. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 12. Pemimpin *Desk Service Quality* 13. Pemimpin *Desk Digital Banking*	*Evaluasi Pasca Konversi*
74	12 September 2022 *September 12, 2022*	Pembahasan *Progress* Pasca Konversi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 4. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 7. Pemimpin Divisi MKM 8. Pemimpin Divisi Komersial 9. Pemimpin Divisi Konsumer 10. Pemimpin Divisi Internal Audit 11. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 12. Pemimpin *Desk Service Quality* 13. Pemimpin *Desk Digital Banking* 14. Tim PMO	*Pembahasan **Progress** Pasca Konversi*
75	13 September 2022 *September 13, 2022*	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS dan Skema Pengakuan Keuntungan *Murabahah* Anuitas	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Syahrial Abdi 4. Rita Anugerah 5. Roy Prakoso 6. Zulhendri Rais 7. Saifuddin Yuliar 8. Komite Audit 9. Komite Pemantau Risiko 10. Pemimpin Divisi Konsumer 11. Pemimpin Divisi Komersial 12. Pemimpin Divisi MKM 13. Pemimpin Divisi Kepatuhan 14. Pemimpin Divisi Treasury & Internsional 15. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa	*Pembahasan Hasil Pengawasan DPS dan Skema Pengakuan Keuntungan **Murabahah** Anuitas*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
76	14 September 2022 *September 14, 2022*	Presentasi *Progress* Pengalihan Aset dan Akad Perubahan melalui Aplikasi SPAK	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Syahrial Abdi 5. Rita Anugerah 6. Roy Prakoso 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 8. Pemimpin Divisi Konsumer 9. Tim TPHKN 10. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai	*Presentasi Progress Pengalihan Aset dan Akad Perubahan melalui Aplikasi SPAK*
77	20 September 2022 *September 20, 2022*	1. Presentasi *Progress* Pengalihan Aset secara keseluruhan dan masing-masing Unit Kantor 2. Presentasi dan asistensi terhadap Pemimpin Cabang/Capem/Kedai dengan progress terendah	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Internal Audit 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin *Desk Service Quality* 8. Tim TPHKN	1. *Presentation of Asset Transfer Progress as a whole and each Office Unit* 2. *Presentation and assistance to the Head of the Branch/Sub-Branch Office/Tavern with the lowest progress*
78	21 September 2022 *September 21, 2022*	Pembahasan Evaluasi Kinerja Unit Kantor Berlaba Minus s/d Agustus 2022	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. M.A. Suharto 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 6. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin Divisi Komersial 9. Pemimpin Divisi Konsumer 10. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 11. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 12. Pemimpin Cabang/Capem/Kedai terkait	
79	27 September 2022 *September 27, 2022*	1. Presentasi *Progress* Pengalihan Aset 2. Asistensi terhadap Pemimpin Cabang/Capem/Kedai dengan pertumbuhan terendah	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Fajar Restu Febriansyah 4. Said Syamsuri 5. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 6. Pemimpin Divisi Internal Audit 7. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Divisi Hukum 11. Pemimpin Divisi MKM 12. Pemimpin Divisi Konsumer 13. Pemimpin Divisi Komersial 14. Pemimpin *Desk Service Quality* 15. Tim TPHKN 16. Pemimpin Cabang/Capem Kedai terkait	1. *Asset Transfer Progress Presentation* 2. *Assistance to the Head of Branch/ Branch/Kedai with the lowest growth*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
80	07 Oktober 2022 *October 07, 2022*	1. Pembahasan *Action Plan* Pemenuhan Target 2022 2. Pembahasan Persiapan Rapat Pengurus	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 8. Pemimpin Divisi Konsumer 9. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 10. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 11. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 12. Pemimpin Divisi Umum 13. Pemimpin Divisi Operasional 14. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 15. Pemimpin *Desk Digital Banking*	*Discussion of the 2022 Target Fulfillment Action Plan* *Discussion of Board Meeting Preparation*
81	10 Oktober 2022 *October 10, 2022*	Pembahasan Program Efisiensi	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 4. Pemimpin Divisi Umum 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Operasional	*Efficiency Program Discussion*
82	11 Oktober 2022 *October 11, 2022*	*Action Plan* Penagihan dan Penyelesaian Pembiayaan Macet dan Hapus Buku periode Oktober s/d Desember 2022	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. M.A. Suharto 4. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	*Billing Action Plan and Settlement of Bad and Write-Off Financing for the period October to December 2022*
83	11 Oktober 2022 *October 11, 2022*	Pembahasan Efisiensi Biaya Asuransi	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. Pemimpin Divisi Umum 4. Pemimpin Divisi Operasional 5. Tim Pengelola Asuransi	*Discussion of Insurance Cost Efficiency*
84	11 Oktober 2022 *October 11, 2022*	1. Pemaparan terkait CSR 2. Pemaparan Program Hapus Buku s/d Desember 2022 3. Pemaparan Asuransi Operasional dan Pengelolaan Kas/ *Cash Management System* 4. Pemaparan Kebijakan Perjalanan Dinas 5. Pemaparan 10 Profil Risiko	1. Andi Buchari 2. Fajar Restu Febriansyah 3. M.A. Suharto 4. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 6. Pemimpin Divisi Operasional 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Divisi Kepatuhan	1. *Presentation related to CSR* 2. *Presentation of the Write Off Program until December 2022* 3. *Presentation on Operational Insurance and Cash Management System* 4. *Explanation of Official Travel Policy* 5. *Presentation of 10 Risk Profiles*
85	17 Oktober 2022 *October 17, 2022*	Rapat Evaluasi Kinerja Unit Kantor Berlaba Minus	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 7. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Minus Profit Office Unit Performance Evaluation Meeting*
86	17 Oktober 2022 *October 17, 2022*	1. Pembahasan Daftar Vendor & Konsultan dan Pengadaan di Divisi Umum 2. Pembahasan 14 Program Kerja Divisi Dana dan Jasa 3. Pembahasan Program *Money Changer*	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Umum 7. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Tim Pengelola Asuransi	1. *Discussion on the List of Vendors & Consultants and Procurement in the General Division* 2. *Discussion of the 14 Work Programs of the Funds and Services Division* 3. *Discussion of the Money Changer Program*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
87	17 Oktober 2022 *October 17, 2022*	Pembahasan Kinerja Cabang	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 7. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Branch Performance Discussion*
88	18 Oktober 2022 *October 18, 2022*	Rapat Evaluasi Kinerja Cabang Tembilahan, Capem Sorek, Capem Rumbai, Capem Sei Pakning, Capem Kota Baru dan Capem Bagan Batu	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi *Financial & Reporting* 8. Pemimpin Divisi Manajemen SDI 9. Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan 10. Pemimpin Cabang/Capem terkait	*Performance Evaluation Meeting of the Tembilahan Branch, Sorek Sub-Branch Office, Rumbai Sub-Branch Office, Sei Pakning Sub-Branch Office, Kota Baru Sub-Branch Office and Bagan Batu Sub-Branch Office*
89	19 Oktober 2022 *October 19, 2022*	*Action Plan* Divisi Dana dan Jasa dalam Pencapaian Target Dana Pihak Ketiga tahun 2022	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Dana dan Jasa 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	*Action Plan of Funds and Services Division in Achieving Target of Third Party Funds in 2022*
90	19 Oktober 2022 *October 19, 2022*	Pembahasan Realisasi Program Kerja Staf Khusus Direksi	1. Andi Buchari 2. M.A. Suharto 3. Said Syamsuri 4. Staf Khusus Direksi	*Discussion of the Realization of the Work Program of the Special Staff of the Board of Directors*
91	25 Oktober 2022 *October 25, 2022*	Pembahasan Kebijakan SDI	5. Andi Buchari 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	*SDI Policy Discussion*
92	26 Oktober 2022 *October 26, 2022*	Pembahasan Kebijakan SDI	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	*SDI Policy Discussion*
93	27 Oktober 2022 *October 27, 2022*	Pembahasan Kebijakan SDI	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	*SDI Policy Discussion*
94	31 Oktober 2022 *October 31, 2022*	Pembaahasan RBB Penyesuaian BRK Syariah 2022 – 2024 (Pasca Konversi)	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Komite Audit 10. Komite Pemantau Risiko 11. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Discussion of RBB Sharia BRK Adjustments 2022 – 2024 (Post Conversion)*

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS MEETING ACTIVITIES*				
No	**Tanggal** *Date*	**Agenda Rapat**	**Peserta** *Participant*	*Meeting agenda*
95	07 November 2022 *November 07, 2022*	*Workshop* Penyusunan RBB tahun 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Seluruh Pemimpin Divisi/*Desk*/Tim	*Workshop on Preparation of RBB for 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
96	08 November 2022 *November 08, 2022*	*Workshop* Penyusunan RBB tahun 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Seluruh Pemimpin Divisi/***Desk***/Tim	*Workshop on Preparation of RBB for 2023 – 2025 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
97	28 November 2022 *November 28, 2022*	Pembahasan Rencana Korporasi (CorPlan), RBB dan RAKB	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Discussion of Corporate Plan (CorPlan), RBB and RAKB*
98	29 November 2022 *November 29, 2022*	Pembahasan Draft SOT BRK Syariah tahun 2023	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Syahrial Abdi 7. Rita Anugerah 8. Roy Prakoso 9. Komite Audit 10. Komite Pemantau Risiko 11. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	*Discussion of the 2023 Sharia BRK SOT Draft*
99	08 Desember 2022 *December 08, 2022*	Pembahasan Perubahan BPP Kepegawaian Bab VIII tentang Sistem Penilaian Kinerja dan Potensi Pegawai	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 7. Pemimpin Divisi Manajemen SDI	*Discussion on Changes to BPP Personnel Chapter VIII concerning Performance Assessment Systems and Employee Potential*
100	28 Desember 2022 *December 28, 2022*	Pembahasan Persiapan Tutup Buku Akhir Tahun 2022 bersama Pemimpin Cabang BRK Syariah	1. Andi Buchari 2. Tengkoe Irawan 3. Said Syamsuri 4. M.A. Suharto 5. Fajar Restu Febriansyah 6. Seluruh Pemimpin Divisi/*Desk* 7. Seluruh Pemimpin Cabang	*Discussion on Preparation for End of 2022 Book Closing with the Head of BRK Syariah Branch*

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi *Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings*

Nama *Name*	Jabatan	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Total Attendance*	Tingkat Kehadiran *Attendance Rate*	*Position*
Andi Buchari	Direktur Utama	100	98	98%	*President Director*
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	100	87	87%	*Compliance and Risk Management Director*
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa	100	73	73%	*Funds and Services Director*
Said Syamsuri	Direktur Operasional	100	89	89%	*Operations Director*
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan	100	72	72%	*Financial Director*

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022

Selama tahun 2022, Direksi BRK Sariah telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Bank sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2022 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2022.
2. Menetapkan *Corporate Plan* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka Konversi menjadi Bank Umum Syariah.
4. Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
5. Memenuhi target kinerja Perusahaan.
6. Menyelenggarakan rapat internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris maupun dengan unit kerja terkait selama tahun 2022.
7. Menyelenggarakan *Business Meeeting* tahunan dan evaluasi kinerja jaringan kantor Bank secara triwulanan.

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 030/KEPDIR/2021 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus BRK Syariah. Di dalam kebijakan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: (1) Tujuan Pembiayaan kepada Direksi, (2) Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan, (3) Plafond dan Jangka Waktu, (3) Biaya-Biaya, (4) Proses, Wewenang Persetujuan Pembiayaan dan Pencairan, (5) Akad dan Jenis Akad, serta (6) Pembayaran Pokok dan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam pencapaian atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi target kinerja BRK Syariah setiap

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2022

During 2022, the BRK Sariah Directors have carried out their duties, obligations and responsibilities in the context of managing the Bank as mandated in the Articles of Association, applicable laws and regulations, as well as the Bank's Annual Work Plan and Budget that have been stipulated. Implementation of the duties of the Board of Directors in 2022 in general is as follows:

1. *Prepare and determine the Bank's Business Plan for 2022.*
2. *Established the Corporate Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
3. *Establish policies and strategic steps in the framework of Converting to become a Sharia Commercial Bank.*
4. *Established the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
5. *Meet the Company's performance targets.*
6. *Organizing internal meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners and related work units during 2022.*
7. *Organizing annual Business Meetings and evaluating the performance of the Bank's office network on a quarterly basis.*

Loan Policy for Members of the Board of Directors

The Loan Policy for Members of the Board of Directors is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 030/KEPDIR/2021 concerning the Policy for Providing Financing Facilities to Sharia BRK Management. The policy stipulates the following matters: (1) Purpose of Financing for the Board of Directors, (2) Requirements for Submission of Financing, (3) Ceiling and Period, (3) Fees, (4) Process, Authorization for Approval Financing and Disbursement, (5) Contracts and Types of Contracts, and (6) Principal Payments and Repayment Before Maturity.

Board of Directors Performance Assessment

Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS). This assessment is the result of collegial work of all members of the Board of Directors which is reflected in the achievement of the Bank's Business Plan (RBB) which is the performance target of BRK

tahun. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank yang mencakup antara lain aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Syariah every year. In addition, the success of the performance of the Board of Directors can be measured through the results of assessing the governance of sharia commercial banks and also the level of soundness of the Bank which includes among others aspects of the risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome*.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Directors

Evaluation of the performance of the Board of Directors is carried out using the parameters of the implementation of bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, with 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment)* pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri Syariah.

Board of Directors Performance Appraisal Procedure

Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out through self-assessment reports on the implementation of Good Corporate Governance which are submitted to OJK periodically with reference to OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. Self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out by using the Working Paper in accordance with SEOJK on Soundness Rating of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. Parameters for assessing the performance of the Board of Directors include the principles of implementing Good Corporate Governance related to all functions in managing Bank Riau Kepri Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment)*, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban Laporan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Untuk tahun 2022, penilaian kinerja Direksi dilakukan dalam RUPS Tahunan tanggal 23 April 2022 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022 yaitu laporan manajemen tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge)* kepada Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

Apart from self-assessment, the performance evaluation of the Board of Directors is also carried out through accountability for the Annual Report at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS). For 2022, the performance assessment of the Board of Directors is carried out at the Annual GMS on April 23 2022 where shareholders (GMS) approve the 2022 Annual Report, namely the annual management report and financial statements for the 2022 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) by providing full payment and full discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the management actions that have been carried out during the 2022 financial year.

Pihak yang Penilaian Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan self *assesment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Party Who Appraises Performance

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of semi-annual Good Corporate Governance carried out by internal BRK Syariah, to be subsequently submitted to the Financial Services Authority.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi ***Board of Directors Performance Assessment Results***

Tabel Penilaian Kinerja Direksi *(Self Assesment)*
Table of Directors Performance Assessment (Self Assessment)

Parameter GCG *GCG Parameters*	*Governance Structure*	*Governance Process*	*Governance Outcome*	**Peringkat** *Rating*
				Komposit *Composite*
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi *Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors*	1	2	2	2 (Baik)

Peringkat 2 artinya adalah:
Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance,* secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan self *assessment* (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan *governance structure, governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik

Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Direksi ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi , namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Direksi.

Rank 2 means:
The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Directors.

During 2022, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors based on the governance structure, governance process and governance outcomes with the results of the assessment being at a composite rating of 2 (two) or Good

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide confidence to shareholders regarding the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Directors.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

BRK Syariah memandang Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam mendukung terciptanya citra positif Bank. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara BRK Syariah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan publik.

BRK Syariah considers that the Corporate Secretary has an important role in supporting the creation of a positive image for the Bank. The Corporate Secretary facilitates effective communication and ensures the availability of information for various parties and acts as the main liaison between BRK Syariah, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the public.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja setingkat satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Corporate Secretary Organizational Structure

In the organizational structure, the Corporate Secretary is a unit-level work unit that is under and directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management, with the following organizational structure:

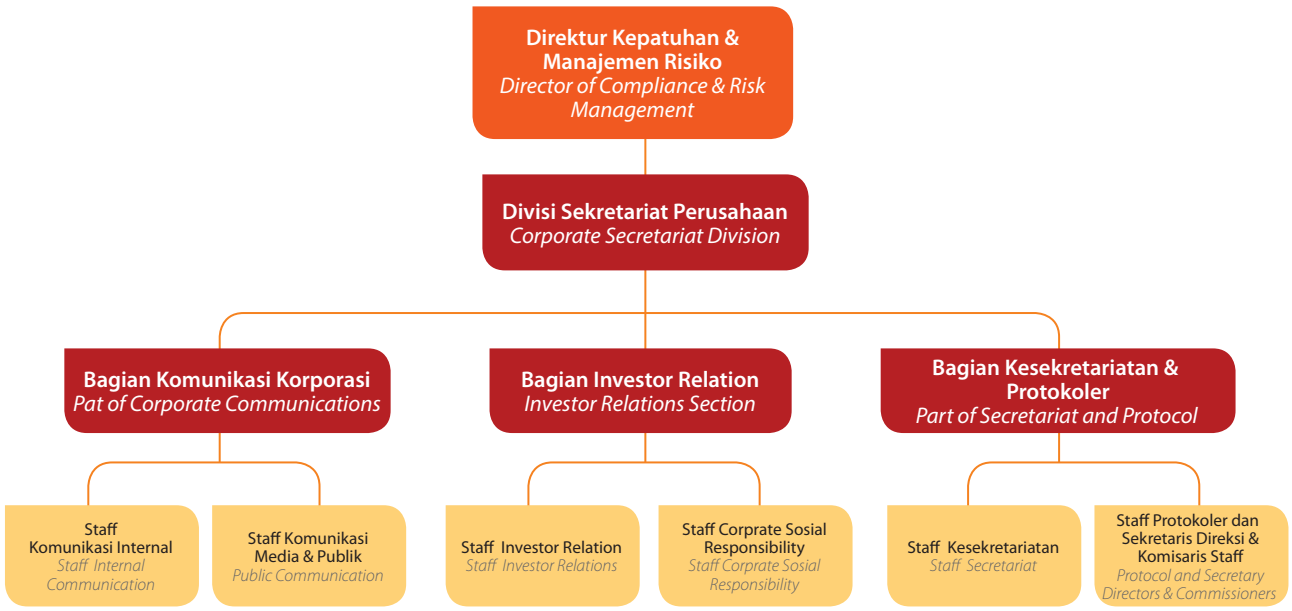

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

EDI WARDANA
Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretariat Division

Profil lengkap, termasuk dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan tercantum pada Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris sepanjang tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

A complete profile, including the legal basis for appointment as Corporate Secretary is listed in the Profile of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Secretary Competency Development throughout 2022 is as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2022
Table of 2022 Corporate Secretary Competency Development

Judul Pelatihan *Training Title*	Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Time and place Implementation*	Penyelenggara *Organizer*
Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) *Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)*	14 Januari 2022 di Pekanbaru *January 14, 2022 in Pekanbaru*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Pelatihan Bagi Assesor Bank Riau Kepri *Training for Bank Riau Kepri Assessors*	17 - 18 Januari 2022 di Pekanbaru *January 17 - 18, 2022 in Pekanbaru*	Muamalat Institute
Training Service Excellent, Keprotokolan, *Public Speaking* dan *Table Manners* *Excellent Service Training, Protocol, Public Speaking and Table Manners*	4 - 5 April 2022 di Pekanbaru *April 4 - 5, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) *Human Resources Management (MSDM) Division*
Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bidang Pelatihan & Pendidikan brsama Lembaga Pendidikan & pelatihan : Perbanas Institute, IBS dan SEBI *Implementation of the Memorandum of Understanding in the Field of Training & Education with Education & Training Institutions: Perbanas Institute, IBS and SEBI*	24 - 25 Oktober 2022 di Jakarta *October 24 - 25, 2022 in Jakarta*	Perbanas Institute Jakarta

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai berikut:
   a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
   b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
   c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
      - Keterbukaaninformasi kepadamasyarakat, termasuk ketersediaan informasi;
      - Penyampaian laporan berkala kepada Regulator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tepat waktu, antara lain Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), dan laporan lainnya;
      - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
      - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya;
      - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   d. Sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, Regulator Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary include the following:

1. *Making reports both internal and external regarding the Corporate Secretariat.*
2. *Provide reports needed by stakeholders in an up to date, correct and accountable manner.*
3. *Carrying out the function as Corporate Secretary with the following tasks:*
   a. *Following the development of the Capital Market, especially the laws and regulations that apply in the Capital Market sector.*
   b. *Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.*
   c. *Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:*
      - *Disclosure of information to the public, including the availability of information;*
      - *Timely submission of periodic reports to Regulators which are the responsibility of the Corporate Secretariat, including Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports;*
      - *Implementation and documentation of General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders;*
      - *Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and compiling and administering the minutes of meetings;*
      - *Implementation of company orientation programs for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.*
   d. *As a liaison between the Bank and Shareholders, Financial Regulators and other stakeholders.*

4. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan seluruh asli dokumen bank, seperti akta RUPS, perjanjian kerjasama/ MoU risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan fungsi Humas sebagai single contact point hubungan antar bank dengan berbagai stakeholders (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya).
6. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
7. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Stakeholders lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
8. Memberikan informasi secara aktual terhadap issue yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada stakeholders termasuk media.
9. Menyiapkan press release dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan.
11. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
12. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
13. Memonitor setoran modal atau saham.
14. Pengelolaan Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (corporate social responsibility (CSR)) serta sponsorship korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders).
15. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Annual Report dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
16. Mengkoordinasikan penyusunan Corporate Identity Bank.
17. Mengkoordinasikan anggaran dan mengelola aktifitas promosi bank yang bersifat corporate event dan berdampak kepada corporate image berkerjasama dengan unit kerja terkait.
18. Pengelolaan termasuk pengkinian dan publikasi secara reguler :
    a. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain.
    b. Media Komunikasi Eksternal, seperti: website, media sosial Bank dan lain-lain.
    c. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Mendesign secara kreatif pengelolaan media komunikasi perusahaan.
20. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (billboard).

4. Managing information and documentation as well as administering all original bank documents, such as GMS deeds, cooperation agreements/MoU of Directors and Commissioners meetings, and internal policies in accordance with applicable laws and regulations.

5. Carrying out the Public Relations function as a single contact point for inter-bank relations with various stakeholders (Shareholders, Regional Government and other related parties).
6. Manage relations with the media so that they can run well so that the consistency of the message and image of the company can continue to be formed.
7. Providing services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information relating to the condition of the company.
8. Providing actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders including the media.
9. Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.
10. Be a spokesperson for the company related to company activities.
11. Coordinating the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders.
12. Monitor the issuance of collective share certificates of the Bank.
13. Monitor the payment of capital or shares.
14. Management of Partnership Funds and/or Social and Environmental Responsibility Funds (TJSL) and monitoring the implementation of Partnership Programs and social care (corporate social responsibility (CSR)) as well as corporate sponsorship as an effort to carry out coaching with stakeholders (stakeholders).

15. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Reports and Sustainability Reports in collaboration with related work units.

16. Coordinate the preparation of Corporate Identity Bank.

17. Coordinate budgets and manage bank promotional activities that are corporate events and have an impact on corporate image in collaboration with related work units.
18. Management including regular updating and publication of:
    a. Internal Communication Media, such as: the Bank's internal magazines and others.
    b. External Communication Media, such as: website, Bank social media and others.
    c. Reports and other information that must be loaded/ published in the Bank's communication media based on the applicable laws and regulations.

19. Creatively designing the management of corporate communication media.
20. Coordinate the process of utilizing communication media to enhance the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).

21. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokoler, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
22. Mengkoordinasikan dan meminta rekomendasi Dewan Komisaris terkait penempatan, mutasi dan promosi Sekretaris Dewan Komisaris.
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, rundown acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
24. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
25. Kebijakan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Bank.
26. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
27. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Media Komunikasi Bank.
4. Menyampaikan laporan berkala kepada regulator antara lain Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), dan laporan lainnya.
5. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
6. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
7. Melaksanakan program orientasi terhadap perusahaan bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru.
8. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan membangun citra positif BRK Syariah.
9. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
10. Memberikan informasi secara aktual terhadap *issue* yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *stakeholders* termasuk media.
11. Menyiapkan *press release* dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas BRK Syariah.
13. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
14. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.

21. Coordinate the duties and functions of the Protocol, Secretary to the Board of Commissioners and Board of Directors.
22. Coordinate and request recommendations from the Board of Commissioners regarding the placement, transfer and promotion of the Secretary to the Board of Commissioners.
23. Coordinate the implementation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and the GMS/LB (location, invitations, event rundown, meeting minutes, dissemination of meeting results, meeting documentation).
24. Accompanying and documenting all activities that involve the presence of the Board of Directors and Board of Commissioners.
25. Bank Document and Archive Management Policy.
26. Administering active bank documents including all incoming and outgoing letters for archiving.
27. Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure that all letters or documents requiring follow-up have been carried out by the relevant units.
28. Carry out other tasks given by the Board of Directors, especially with regard to the implementation of the duties of the Corporate Secretary.

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2022

1. Making reports both internal and external regarding the Corporate Secretariat.
2. Provide reports needed by stakeholders in an up to date, correct and accountable manner.
3. Carry out information disclosure to the public, including the availability of information on the Bank's Communication Media.
4. Deliver periodic reports to regulators, including Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports.
5. Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
6. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and compiling and administering the minutes of meetings.
7. Carry out an orientation program towards the company for new members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
8. Manage relations with the media so that they can run well so that messages are consistent and build a positive image of BRK Syariah.
9. Providing services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information relating to the condition of the company.
10. Providing actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders including the media.
11. Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.
12. Become a spokesperson for the company related to Sharia BRK activities.
13. Coordinating the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders.
14. Monitor the issuance of collective share certificates of the Bank.

15. Memonitor setoran modal atau saham.
16. Mengelola Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (*corporate social responsibility (CSR)*) serta *sponsorship* korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
17. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *Annual Report* dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
18. Mengelola termasuk mengkinikan dan publikasi secara reguler:
    a. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain
    b. Media Komunikasi Eksternal, seperti: *website*, media sosial Bank dan lain-lain.
    c. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Mendisain secara kreatif pengelolaan media komunikasi BRK Syariah.
20. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (billboard).
21. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokoler, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
22. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, rundown acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
23. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
24. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
25. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
26. Mengikuti pelatihan/workshop untuk peningkatan kompetensi terkait bidang tugasnya.

15. Monitor the payment of capital or shares.
16. Manage Partnership Funds and/or Social and Environmental Responsibility Funds (TJSL) and monitor the implementation of Partnership Programs and social care (corporate social responsibility (CSR)) as well as corporate sponsorship as an effort to carry out coaching with stakeholders (stakeholders).
17. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Reports and Sustainability Reports in collaboration with related work units.

18. Manage including updating and publishing regularly:
    a. Internal Communication Media, such as: the Bank's internal magazines and others
    b. External Communication Media, such as: website, Bank social media and others.
    c. Reports and other information that must be loaded/ published in the Bank's communication media based on the applicable laws and regulations.

19. Creatively designing the management of BRK Syariah communication media.
20. Coordinate the process of utilizing communication media to enhance the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).

21. Coordinate the duties and functions of the Protocol, Secretary to the Board of Commissioners and Board of Directors.
22. Coordinate the implementation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and the GMS/ LB (location, invitations, event rundown, meeting minutes, dissemination of meeting results, meeting documentation).
23. Accompanying and documenting all activities that involve the presence of the Board of Directors and Board of Commissioners.
24. Administering active bank documents including all incoming and outgoing letters for archiving.

25. Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure that all letters or documents requiring follow-up have been carried out by the relevant units.
26. Participate in training/workshops to improve competence in their field of work.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI
COMMITTEE UNDER THE DIRECTORS

BRK Syariah telah membentuk komite di bawah Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya terkait proses pengambilan keputusan. Komite di bawah Direksi terdiri dari:

1. Komite *Sharia Asset and Liability Management* (SHALMA)
2. Komite Manajemen Risiko

BRK Syariah has formed a committee under the Board of Directors to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors by making contributions in accordance with their duties related to the decision-making process. Committees under the Board of Directors consist of:
1. Sharia Asset and Liability Management Committee (SHALMA)
2. Risk Management Committee

3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Sumber Daya Insani
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Pembiayaan

3. Financing Policy Committee
4. Human Resources Committee
5. Information Technology Steering Committee
6. Financing Committee

Komite SHALMA (*Sharia Asset and Liability Management*)

Komite SHALMA merupakan komite di bawah Direksi yang bertujuan meningkatkan profitabilitas BRK Syariah secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Struktur dan Keanggotaan Komite SHALMA

Susunan keanggotaan Komite SHALMA BRK Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 030/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Susunan Organisasi Komite SHALMA PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) adalah sebagai berikut:

SHALMA Committee (Sharia Asset and Liability Management)

The SHALMA Committee is a committee under the Board of Directors which aims to optimally increase the profitability of BRK Syariah, as well as ensure that liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk are under control through setting policies and asset and liability management strategies.

SHALMA Committee Structure and Membership

The composition of the Sharia BRK SHALMA Committee membership based on Directors Decree Number 030/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Organizational Structure of the SHALMA Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is as follows:

– Ketua I merangkap anggota tetap *Chairman I concurrently as a permanent member*	:	Direktur Utama	*President director*
– Ketua II merangkap anggota tetap *Chairman II concurrently as a permanent member*	:	Direktur Dana dan Jasa	*Director of Funds and Services*
– Wakil Ketua merangkap anggota tetap *Deputy Chairperson concurrently a permanent member*	:	Direktur Pembiayaan	*Director of Financing*
		Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	*Director of Compliance and Risk Management*
		Direktur Operasional	*director of Operations*
– Sekretaris merangkap anggota tetap *Secretary concurrently a permanent member*	:	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	*Head of Treasury & International Division*
– Anggota tetap *Permanent members*	:	Pemimpin Divisi Komersial	*Head of Commercial Division*
		Pemimpin Divisi Konsumer	*Head of Consumer Division*
		Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	*Head of Micro, Small & Medium Division*
		Pemimpin Divisi Dana & Jasa	*Head of Funds & Services Division*
		Pemimpin Divisi Operasional	*Head of Operational Division*
		Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Head of Compliance Division*
		Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Head of Risk Management Division*
		Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Strategic Planning Division Head*
		Pemimpin Divisi *Financial & Reporting*	*Head of Financial & Reporting Division*
– Anggota Tidak Tetap *Non-Permanent Members*	:	Pemimpin Divisi Umum	*Head of the General Division*
		Pemimpin Divisi Hukum	*Head of the Legal Division*
		Pemimpin Divisi Internal Audit	*Head of Internal Audit Division*
		Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	*Head of Human Resource Management Division*
		Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	*Head of Technology and Information Systems Division*
		Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan	*Head of Rescue and Financing Settlement Division*

Profil anggota Komite SHALMA tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

The profiles of the members of the SHALMA Committee are listed in the Profiles of the Directors and Profiles of Officers One Level Below the Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SHALMA

Komite SHALMA merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas melakukan pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management,* dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi BRK Syariah dengan menghitung *cost of funds,* menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan internal *fund transfer price.*

SHALMA Committee Duties and Responsibilities

The SHALMA Committee is a supporting committee for the Board of Directors with the task of managing Assets and Liabilities Management (ALMA) which includes liquidity management, gap management, forex management, earnings and investment management, by evaluating developments and prospects for economic indicators and their impact on the position of BRK Syariah by calculating cost of funds, determines the base lending rate/prime landing rate and determines the internal fund transfer price.

Pelaksanaan Tugas Komite ALCO/SHALMA

Sepanjang tahun 2022, Komite ALCO/SHALMA telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan rincian agenda sebagai berikut:

Implementation of ALCO/SHALMA Committee Duties

Throughout 2022, the ALCO/SHALMA Committee has held 12 (twelve) meetings, with details on the agenda as follows:

Tabel Rapat Komite ALCO/SHALMA Tahun 2022
Table of 2022 ALCO/SHALMA Committee Meetings

Tanggal Rapat *Meeting date*	Agenda Rapat	*Meeting agenda*
31 Januari 2022 *January 31, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Januari 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Januari 2022	*1. Set the January 2022 Base Lending Rate (BLR).* *2. Setting the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for January 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the January 2022 period*
22 Februari 2022 *February 22, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Februari 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Februari 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Februari 2022	*1. Set the Base Lending Rate (BLR) for February 2022* *2. Setting the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for February 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the February 2022 period*
30 Maret 2022 *March 30, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Maret 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Maret 2022	*1. Set the Base Lending Rate (BLR) for March 2022* *2. Set the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for March 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the March 2022 period*
26 April 2022 *April 26, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) April 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) April 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode April 2022	*1. Set the April 2022 Base Lending Rate (BLR).* *2. Setting the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for April 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the April 2022 period*
31 Mei 2022 *May 31, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Mei 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Mei 2022	*1. Set the Base Lending Rate (BLR) for May 2022* *2. Set the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for May 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the May 2022 period*
16 Juni 2022 *June 16, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Juni 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juni 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Juni 2022	*1. Set the Base Lending Rate (BLR) for June 2022* *2. Setting the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for June 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the June 2022 period*
19 Juli 2022 *July 19, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Juli 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juli 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Juli 2022	*1. Set the July 2022 Base Lending Rate (BLR).* *2. Set the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for July 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the July 2022 period*
16 Agustus 2022 *August 16, 2022*	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Agustus 2022 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Agustus 2022 3. Menetapkan *Fund Transfer Pricing* (FTP) periode Agustus 2022	*1. Set the Base Lending Rate (BLR) for August 2022* *2. Set the Prime Credit Interest Rate (SBDK) for August 2022* *3. Establish Fund Transfer Pricing (FTP) for the August 2022 period*
27 September 2022 *September 27, 2022*	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) September 2022 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing*/Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode September 2022	*1. Set the September 2022 Base Financing Rate (BFR).* *2. Establish Fund Transfer Pricing/Interoffice Fees (FTP/IAK) for the September 2022 period*
27 Oktober 2022 *October 27, 2022*	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) Oktober 2022 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing*/Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode Oktober 2022	*1. Set the October 2022 Base Financing Rate (BFR).* *2. Establish Fund Transfer Pricing/Interoffice Fees (FTP/IAK) for the October 2022 period*
29 November 2022 *November 29, 2022*	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) November 2022 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing*/Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode November 2022	*1. Set the November 2022 Base Financing Rate (BFR).* *2. Establish Fund Transfer Pricing/Interoffice Fees (FTP/IAK) for the November 2022 period*
29 Desember 2022 *December 29, 2022*	1. Menetapkan *Base Financing Rate* (BFR) Desember 2022 2. Menetapkan *Fund Transfer Pricing*/Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) periode Desember 2022	*1. Set December 2022 Base Financing Rate (BFR).* *2. Establish Fund Transfer Pricing/Interoffice Fees (FTP/IAK) for the December 2022 period*

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi terkait dengan evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sekaligus menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha BRK Syariah yang tidak lepas dari risiko.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed to assist the implementation of the Board of Directors' duties related to evaluating the implementation of effective risk management processes and systems as well as being an early warning system for BRK Syariah business activities that are not free from risk.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor No.213/KEPDIR/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Risk Management Committee Structure and Membership

The establishment of the Risk Management Committee is stipulated in Directors Decree No. 213/KEPDIR/2022 dated 24 October 2022 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua I *Chairman I*	:	Direktur Utama	*President Director*
– Wakil Ketua I *Vice Chairman I*	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	*Compliance and Risk Management Director*
– Wakil Ketua II *Deputy Chairman II*	:	Direktur Pembiayaan	*Financing Director*
– Wakil Ketua III *Deputy Chairman III*	:	Direktur Dana dan Jasa	*Funds and Services Director*
– Wakil Ketua IV *Deputy Chairman IV*	:	Direktur Operasional	*Operational Director*
– Sekretaris *Secretary*	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Risk Management Division Head*
– Anggota *Member*	:	Pemimpin Divisi Komersial	*Commercial Division Head*
		Pemimpin Divisi Konsumer	*Consumer Division Head*
		Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	*Micro, Small & Medium Division Head*
		Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan	*Rescue & Financing Division Head*
		Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional	*Treasury & International Division Head*
		Pemimpin Divisi Dana & Jasa	*Funds & Services Division Head*
		Pemimpin Divisi Operasional	*Operational Division Head*
		Pemimpin Divisi Internal Audit	*Internal Audit Division Head*
		Pemimpin Divisi *Financial & Reporting*	*Financial & Reporting Division Head*
		Pemimpin Divisi Kepatuhan	*Compliance Division Head*
		Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Strategic Planning Division Head*
		Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	*Technology & Information Systems Division Head*
		Pemimpin Divisi Umum	*General Division Head*
		Pemimpin Divisi Hukum	*Legal Division Head*
		Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	*Corporate Secretariat Division Head*
		Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	*Human Resource Management Division Head*
		Pemimpin *Desk Digital Banking*	*Digital Banking Desk Head*
		Pemimpin *Desk Service Quality*	*Desk Service Quality Head*
		Pemimpin *Desk Anti Fraud*	*Anti-Fraud Desk Head*

Profil anggota Komite Manajemen Risiko tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Profiles of members of the Risk Management Committee are listed in the Profiles of the Board of Directors and Profiles of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta pembahasan lainnya termasuk *Risk Appetite Statement* dan risiko yang signifikan.
5. Melakukan pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

1. *Develop policies, strategies and guidelines for implementing risk management.*
2. *Authorized and responsible for improving or perfecting the implementation of risk management based on the evaluation results of the implementation of risk management.*
3. *Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.*
4. *Conducting discussions on the Risk Profile and Soundness Level of the Bank as well as other discussions including the Risk Appetite Statement and significant risks.*
5. *Conduct discussion of issues deemed necessary and very urgent.*

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2022 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini:

Implementation of Risk Management Committee Duties

Throughout 2022 the Risk Management Committee has held 4 (four) meetings with agenda discussions as shown in the following table:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2022
Table of 2022 Risk Management Committee Meetings

Tanggal Rapat *Meeting date*	Agenda Rapat	*Meeting agenda*
25 Mei 2022 *May 25, 2022*	Pembahasan Perubahan Susunan Keanggotaan dan Tugas & Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko	*Discussion of Changes in Membership Composition and Duties & Responsibilities of the Risk Management Committee*
21 Juni 2022 *June 21, 2022*	1. Hasil tindaklanjut Rapat Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. *Self Assesment* Profil Risiko posisi Juni 2022 3. Agenda tetap pembahasan pada Rapat Komite Manajemen Risiko	*1. Results of follow-up to the previous Risk Management Committee Meeting* *2. Risk Profile Self Assessment position June 2022* *3. Fixed agenda for discussion at the Risk Management Committee Meeting*
30 Juni 2022 *June 30, 2022*	1. *Self Assesment* Profil Risiko posisi Juni 2022 2. Revisi *Risk Appetite Statement* (RAS) tahun 2022	*1. Risk Profile Self Assessment position June 2022* *2. Revised Risk Appetite Statement (RAS) for 2022*
29 Desember 2022 *December 29, 2022*	Penyusunan *Risk Appetite Statement* (RAS) tahun 2023	*Preparation of the 2023 Risk Appetite Statement (RAS).*

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas merumuskan kebijakan pembiayaan dan saran perbaikan terkait kebijakan pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan
Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 017KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee is a supporting committee for the Board of Directors with the task of formulating financing policies and making suggestions for improvements related to financing policies. Therefore, policies related to this sector require in-depth planning, research and evaluation.

Structure and Membership of the Financing Policy Committee
The establishment of the Financing Policy Committee is stipulated in the Directors Decree No. 017KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua I *Chairman I*	:	Direktur Utama	*President Director*
– Wakil Ketua I *Vice Chairman I*	:	Direktur Pembiayaan	*Financing Director*
– Wakil Ketua II *Deputy Chairman II*	:	Direktur Dana dan Jasa	*Funds and Services Director*
– Wakil Ketua III *Deputy Chairman III*	:	Direktur Operasional	*Operational Director*
– Sekretaris I *Secretary I*	:	Pemimpin Divisi Komersial merangkap anggota	*Commercial Division Head concurrently a member*
– Sekretaris II *Secretary II*	:	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah merangkap anggota	*Micro, Small & Medium Division Head and concurrently a member*
– Sekretaris III *Secretary III*	:	Pemimpin Divisi Konsumer merangkap anggota	*Consumer Division Head and concurrently a member*
– Anggota *Member*	:	Pemimpin Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan	*Rescue and Settlement Financing Head*
		Pemimpin Divisi Internal Audit	*Internal Audit Division Head*
		Pemimpin Divisi Operasional	*Operational Division Head*
		Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Risk Management Division Head*
		Pemimpin Divisi Dana dan Jasa	*Funds and Services Division Head*
		Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	*Treasury & International Division Head*
		Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Strategic Planning Division Head*
		Pemimpin *Desk Digital Banking Services*	*Digital Banking Services Desk Head*

Profil anggota Komite Kebijakan Pembiayaan tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu.
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD.
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
   f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

Sepanjang tahun 2022 Komite Kebijakan Pembiayaan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini:

Profiles of members of the Financing Policy Committee are listed in the Profiles of the Board of Directors and Profiles of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Functions, Duties, and Responsibilities of the Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee has functions, duties and responsibilities, including:

1. *Provide input to the Board of Directors in the framework of preparing the CDE, especially those related to the formulation of prudential principles in financing.*
2. *Supervise so that CDE can be applied and implemented consistently and consistently and formulate solutions if there are obstacles/obstacles in the implementation of CDE.*
3. *Monitor and evaluate:*
   a. The development and quality of the overall financing portfolio.
   b. Correct implementation of the authority to decide on financing.
   c. The truth of the process of granting, development and quality of financing provided to parties related to the Bank and certain large customers.
   d. The correctness of the implementation of the BMPD provisions.
   e. Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of financing.
   f. Settlement of troubled financing in accordance with the KPB.
   g. The Bank's efforts to meet the adequacy of the Allowance for Impairment Losses (CKPN).
4. *Submit periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*
   a. Results of supervision of the implementation and implementation of KPB.
   b. The results of monitoring and evaluation that have been carried out.
5. *Provide suggestions for corrective measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.*
6. *In the event that there are irregularities in the implementation of the CDE related to the fulfillment of sharia principles, the report is also submitted to the Sharia Supervisory Board.*

Implementation of Duties of the Financing Policy Committee

Throughout 2022 the Financing Policy Committee has held meetings with discussion of the agenda as shown in the following table:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2022
Table of 2022 Financing Policy Committee Meetings

Tanggal Rapat *Meeting date*	Agenda Rapat	*Meeting agenda*
28 Juli 2022 *July 28, 2022*	Pembahasan tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	*Discussion on PT Bank Riau Kepri Syariah Financing Policy Committee (Perseroda)*

Komite Sumber Daya Insani (SDI)

Komite Sumber Daya Insanimerupakan komite pendukung Direksi dengan tugas merumuskan kebijakan pengelolaan SDI, mulai dari perencanaan dan penerimaan pegawai, mutasi, manajemen karir serta manajemen kinerja.

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani

Pembentukan Komite SDI ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 10/KEPDIR/2022 tentang Buku Pedomaan Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Riau Kepri sebaagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 21/KEPDIR/2023 tentang Buku Pedomaan Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Human Resources Committee (SDI)

The Human Resources Committee is a supporting committee for the Board of Directors with the task of formulating HR management policies, starting from employee planning and recruitment, transfers, career management and performance management.

Structure and Membership of the Human Resources Committee

The formation of the HR Committee is stipulated in the Directors Decree No. 10/KEPDIR/2022 concerning the Company Guidebook (BPP) for PT Bank Riau Kepri Employees as amended by Decree of the Board of Directors No. 21/KEPDIR/2023 concerning the Company's Employee Guidebook (BPP) for PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following structure:

– Ketua (merangkap Anggota) *Chairman concurrently member)*	:	Direktur Utama	*President Director*
– Anggota *Member*	:	Direktur Operasional	*Operational Director*
		Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	*Compliance and Risk Management Director*
		Direktur Dana dan Jasa	*Funds and Services Director*
		Direktur Pembiayaan	*Financing Director*
		Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	*Human Resource Management Division Head*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya insani

Tugas dan tanggung jawab Komite SDI, meliputi:

1. Perencanaan dan penerimaan Pegawai
   a. Mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan Pegawai
   b. Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
   c. Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDI secara keseluruhan
   d. Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)
2. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.
3. Manajemen jalur karir
   a. Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
   b. Menentukan program jalur karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
   c. Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir

Human Resources Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the SDI Committee include:

1. *Employee planning and acceptance*
   a. Consider and approve employee plans
   b. Approve specific activity plans and implementation time proposed by the Human Resources Management Division
   c. Considers and approves the overall HR budget
   d. Consider the variety and target of employee recruitment (number and qualifications)
2. *Decide on proposals/recommendations regarding the transfer of leadership staff.*
3. *Career path management*
   a. Decide on the system and implementation of career path management
   b. Determine the annual career path program for career path management participants
   c. Determine the addition/reduction of career path management participants

4. Manajemen imbalan
   a. Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*).
   b. Menyetujui pedoman penggajian dan pemberian imbalan lainnya.

4. Rewards management
   a. Approve the employee benefits system/guidelines.
   b. Agree payroll guidelines and other benefits.

Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Insani

Sepanjang tahun 2022 Komite SDM/SDI telah menyelenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat dengan pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

Implementation of Duties of the Human Resources Committee

Throughout 2022 the HR/HR Committee has held 20 (twenty) meetings with discussions with the following agenda:

Tabel Rapat Komite Sumber Daya Insani Tahun 2022
Table of 2022 Human Resources Committee Meetings

Tanggal Rapat *Meeting date*	Agenda Rapat	*Meeting agenda*
07 Februari 2022	Rapat Komite SDM	*HR Committee Meeting*
03 Maret 2022	Hak dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah	*Rights and Facilities of the Sharia Supervisory Board*
19 Mei 2022	Tindaklanjut Rapat Tingkat Kesehatan Bank dengan OJK	*Follow up on Bank Soundness Level Meeting with OJK*
23 Juni 2022	Pembahasan Pegawai sesuai SOT BRK Syariah	*Discussion of Employees in accordance with SOT BRK Syariah*
26 Juni 2022	Pembahasan Pegawai sesuai SOT BRK Syariah	*Discussion of Employees in accordance with SOT BRK Syariah*
01 Juli 2022	*Review* Kinerja Pemimpin Unit Kerja	*Work Unit Leader Performance Review*
04 Juli 2022	*Review* Kinerja Pemimpin Unit Kerja	*Work Unit Leader Performance Review*
05 Juli 2022	Pembahasan Remunerasi Pegawai	*Discussion of Employee Remuneration*
20 September 2022	Tindaklanjut Pembahasan *Review* Kinerja Unit Kantor	*Follow-up on the Discussion of Office Unit Performance Review*
25 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian	*Discussion of Personnel Policy*
26 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian	*Discussion of Personnel Policy*
27 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian dan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan Pegawai	*Discussion of Personnel Policy and Employee Financing Facility Policy*
28 Oktober 2022	Pembahasan Kebijakan Kepegawaian	*Discussion of Personnel Policy*
08 November 2022	Pembahasan SOT Bank dan Kebijakan Sumber Daya Insani	*Discussion of Bank SOT and Human Resources Policy*
17 November 2022	Pembahasan SOT Bank	*Discussion of Bank SOT*
09 Desember 2022	Pembahasan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Insani	*Discussion on Human Resource Management Policy*
13 Desember 2022	Pembahasan Rencana Pendirian Laznas dan Kebijakan Remunerasi Pegawai	*Discussion of Laznas Establishment Plan and Employee Remuneration Policy*
26 Desember 2022	Pembahasan Pengisian Pegawai sesuai SOT Bank	*Discussion on Filling in Employees according to Bank SOT*
29 Desember 2022	Pembahasan Pengisian Pegawai sesuai SOT Bank	*Discussion on Filling in Employees according to Bank SOT*
30 Desember 2022	Pembahasan Pengisian Pegawai sesuai SOT Bank	*Discussion on Filling in Employees according to Bank SOT*

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi BRK Syariah. Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 162/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Pengarah TI ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 162/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Information Technology (IT) Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with providing views and recommendations on the management and development policies of BRK Syariah information technology and systems. The IT Steering Committee was formed based on Directors Decree Number 162/KEPDIR/2022 dated 22 August 2012 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Information Technology Steering Committee Structure and Membership

The formation of the IT Steering Committee was stipulated in Directors Decree Number 162/KEPDIR/2022 dated 22 August 2012 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua *Chairman*	:	Direktur Utama	*President director*
– Wakil Ketua *Vice Chairman*	:	Direktur Operasional	*director of Operations*
– Sekretaris *Secretary*	:	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	*Head of Technology and Information Systems Division*
– Anggota *Member*	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	*Director of Compliance and Risk Management*
		Direktur Dana dan Jasa	*Director of Funds and Services*
		Direktur Pembiayaan	*Director of Financing*
		Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Head of Risk Management Division*
		Pemimpin Divisi Keuangan	*Head of Finance Division*
		Pemimpin Divisi Operasional	*Head of Operational Division*
		Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Strategic Planning Division Head*
		Pemimpin Unit Kerja Pengguna Utama IT	*Head of Main IT User Work Unit*
		Pemimpin Divisi Internal Audit selaku Satuan Kerja Pemantau	*Head of the Internal Audit Division as the Monitoring Work Unit*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah meminimalikan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan memastikan agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Komite dapat bertindak sebagai penengah untuk penyelesaian tersebut.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi
Sepanjang tahun 2022 Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Information Technology Steering Committee Duties and Responsibilities

Provide recommendations to the Board of Directors, including among others:

1. *Information Technology Strategic Plan which is in line with the strategic plan of the Bank's business activities.*
2. *Formulation of main Information Technology policies, standards and procedures.*
3. *Compatibility between approved Information Technology projects and Information Technology Strategic Plans.*
4. *Conformity between the implementation of the Information Technology project and the agreed project plan (project charter).*
5. *Conformity between Information Technology and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities.*
6. *The effectiveness of steps to minimize the risk of the Bank's investment in the Information Technology sector and ensure that these investments contribute to the achievement of the Bank's business objectives.*
7. *Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.*
8. *Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by work units of Information Technology users and administrators. The committee may act as an arbitrator for the settlement.*
9. *Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.*

Implementation of Duties of the Information Technology Steering Committee
Throughout 2022 the IT Steering Committee has held 4 (four) meetings with the following discussion agenda:

Tabel Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2022
Table of 2022 IT Steering Committee Meetings

Tanggal Rapat *Meeting date*	Agenda Rapat	*Meeting agenda*
23 Maret 2022 *March 23, 2022*	1. *Roadmap* IT *Strategic Plan* 2022 dan Penyesuaian Laporan Rencana Pengembangan TI (LRPTI) tahun 2022 2. Peningkatan (*upgrade)* Kinerja Proses *End of Day* dan *End of Month Core Banking System* dengan *upgrade* Perangkat Server (OS dan *Hardware)* IBM AS/400 3. Status Pengadaan *Load Traffic Manager* (LTM)	1. *IT Strategic Plan Roadmap for 2022 and Adjustment of the 2022 IT Development Plan Report (LRPTI)* 2. *End of Day and End of Month Core Banking System Process Performance Improvement (upgrade) with IBM AS/400 Server Equipment (OS and Hardware) upgrade* 3. *Load Traffic Manager (LTM) Procurement Status*
25 Mei 2022 *May 25, 2022*	1. Status Laporan Rencana Pengembangan TI (LRPTI) tahun 2022 dan *Progress Report* BI-FAST 2. Penguatan IT *Security* tahun 2022 3. Sentralisasi Operasional	1. *2022 IT Development Plan Status Report (LRPTI) and BI-FAST Progress Report* 2. *Strengthening IT Security in 2022* 3. *Operational Centralization*
27 Juli 2022 *July 27, 2022*	1. Pengamanan Transaksi (Otorisasi, Mutasi Harian, Audit Trail) Bank Vision 2. Rencana Implementasi *Private Cloud*	1. *Transaction Security (Authorization, Daily Movements, Audit Trail) Bank Vision* 2. *Private Cloud Implementation Plan*
13 Desember 2022 *December 13, 2022*	1. Realisasi *Roadmap* tahun 2022, Realisasi LRPTI tahun 2022 dan LRPTI tahun 2023 2. *Private Cloud* dan *Data Center* PDG	1. *Realization of Roadmap in 2022, Realization of LRPTI in 2022 and LRPTI in 2023* 2. *PDG Private Cloud and Data Center*

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan BRK Syariah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam memberikan masukan dan rekomendasi terkait pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan suatu pembiayaan. Komite Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 019KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Financing Committee

The BRK Syariah Financing Committee was formed to support the implementation of the duties of the Board of Directors in providing input and recommendations regarding making decisions on approval or rejection of a financing. The Financing Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 019KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Handbook (BPP) Financing PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following structure:

Jenjang	Komite Pembiayaan	*Financing Committee*	*level*
A. Pembiayaan dalam wewenang memutus Komite Pembiayaan (KP)	– Direksi diluar Direktur Kepatuhan – Pemimpin Divisi Pembiayaan – Pinbag terkait	– *Directors other than the Compliance Director* – *Head of Financing Division* – *Related pins*	A. *Financing within the authority to decide on the Financing Committee (KP)*
B. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Utama	– Direktur Utama sebagai pemutus – Direktur Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– *Main Director as decision maker* – *The Director of Finance as the decision maker* – *Head of the Financing Division as the breaker* – *The pinbag is linked as a breaker* – *Staff as proposer*	B. *Financing within the authority to decide the President Director*
C. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Pembiayaan	– Direktur Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– *The Director of Finance as the decision maker* – *Head of the Financing Division as the breaker* – *The pinbag is linked as a breaker* – *Staff as proposer*	C. *Financing within the authority to decide on the Director of Financing*
D. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Divisi Pembiayaan	– Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– *Head of the Financing Division as the breaker* – *The pinbag is linked as a breaker* – *Staff as proposer*	D. *Financing within the authority to decide on the Head of the Financing Division*
E. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang	– Pemimpin Cabang sebagai pemutus – Pemimpin Bagian Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Account Officer (AO) sebagai pengusul	– *Branch Leader as breaker* – *Head of the Financing Section as a breaker* – *Head of Financing Section and Account Officer (AO) as proposer*	E. *Financing within the authority of deciding the Branch Manager*
F. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang Pembantu	– Pemimpin Cabang Pembantu sebagai pemutus – Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Account Officer (AO) sebagai pengusul	– *The Sub-Branch Leader as the breaker* – *Head of Financing Section and Account Officer (AO) as proposer*	F. *Financing within the authority of deciding the Sub-Branch Manager*

Jenjang	Komite Pembiayaan	*Financing Committee*	*level*
G. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Kedai	– Pemimpin Kedai sebagai pemutus – *Account Officer* (AO) sebagai pengusul	– *Shop Leader as a breaker* – *Account Officer (AO) as proposer*	G. *Financing within the authority of the Shop Leader*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain:

1. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
3. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan Komite Pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan Komite SHALMA dalam aspek pendanaan pembiayaan.

Duties and Responsibilities of the Financing Committee

For the duties and responsibilities of the Financing Committee, among others:

1. *Discuss requests for customer financing above a certain ceiling proposed by branch offices and requests for syndicated financing, by prioritizing the principle of prudence.*
2. *Provide recommendations for approval or recommendations for refusal of financing as material for consideration of the President Director's decision.*
3. *Recommendations for approval or recommendations for refusal of financing are carried out in a professional manner based on competence, objective and prioritizing integrity.*

If necessary, the Financing Committee can coordinate with the SHALMA Committee in terms of financing funding.

Pelaksanaan Tugas Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2022 Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat untuk membahas agenda sebagai berikut:

Financing Committee Duties Implementation

Throughout 2022 the Financing Committee has held meetings to discuss the following agenda:

Tabel Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2022
Table of 2022 Financing Committee Meetings

Tanggal Rapat *Meeting date*	Agenda Rapat	*Meeting agenda*
23 Mei 2022 *May 23, 2022*	Pembahasan Rencana Penyaluran Pembiayaan Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Dumai	*Discussion of the Dumai City Government Regional Loan Funding Distribution Plan*
09 Juni 2022 *June 09, 2022*	Pembahasan Rencana Penyaluran Pembiayaan Sindikasi PT OKI Pulp & Paper Mills	*Discussion on PT OKI Pulp & Paper Mills Syndicated Financing Distribution Plan*

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM

Affiliated Relationship Between Members of The Board of Commissioners, Directors and Shareholders

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliation of the Board of Commissioners

During 2022, there is no affiliation between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Table of Affiliation of the Board of Commissioners

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris *Financial Relations, Family and Board of Commissioners*															
Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Keluarga Dengan *Family Relations With*						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain *Management Relations with other Companies*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *President Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Board of Commissioners Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Table of Share Ownership of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham *Shareholding*			
		BRK Syariah	Bank Lain *Other Banks*	Lembaga Keuangan Non Bank *Non-bank financial institutions*	Perusahaan Lain *Other Companies*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *President Commissioner*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*	PT Mahesa Prima Solusindo dengan kepemilikan saham sebesar 30% *PT Mahesa Prima Solusindo with 30% share ownership*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*	Nihil *Nothing*

Hubungan Afiliasi Direksi

Selama tahun 2022, tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

Directors Affiliation Relations

During 2022, there is no affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table of Directors Affiliation Relations

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris *Financial Relations, Family and Board of Commissioners*															
Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Hubungan Keuangan Dengan** *Financial Relations With*						**Hubungan Keluarga Dengan** *Family Relations With*						**Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain** *Management Relations with other Companies*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		**Direksi** *Directors*		**Pemegang Saham Pengendali** *Controlling shareholders*		**Dewan Komisaris** *Board of Commissioners*		**Direksi** *Directors*		**Pemegang Saham Pengendali** *Controlling shareholders*			
		Ya *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*		√		√		√		√		√		√		√
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*		√		√		√		√		√		√		√
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*		√		√		√		√		√		√		√
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*		√		√		√		√		√		√		√
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*		√		√		√		√		√		√		√

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Table of Directors Share Ownership

Nama *Name*	**Jabatan** *Position*	**Kepemilikan Saham** *Shareholding*			
		BRK Syariah	**Bank Lain** *Other Banks*	**Lembaga Keuangan Non Bank** *Non-bank financial institutions*	**Perusahaan Lain** *Other Companies*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Frequency and Attendance of Meetings Board of Commissioners and Board of Directors

Salah satu bentuk hubungan kerja formal antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah melalui mekanisme rapat. Penyelenggaraan rapat terutama ditujukan untuk proses pengambilan keputusan guna kelangsungan usaha BRK Syariah.

Untuk Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada sub bab Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris dan sub bab Direksi bagian Rapat Direksi

One form of formal working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is through a meeting mechanism. The holding of meetings is primarily aimed at the decision-making process for the continuity of the BRK Syariah business. The Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and Directors Meetings as well as the mechanism for implementing Board of Commissioners and Directors meetings can be seen in the Board of Commissioners sub-chapter in the Board of Commissioners Meeting section and the Board of Directors sub-chapter in the Board of Directors Meeting section

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Bank, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi BRK Syariah, serta mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi. Setiap keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi adalah keputusan kolegial yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun unit kerja terkait yang dalam pelaksanaannya dipantau oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris maupun oleh Direksi dan/atau Komite di Bawah Direksi. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, maka Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan rapat lanjutan untuk membahas kendala atau hambatan yang dihadaai dan mencarikan solusi penyelesaiannya yang ditetapkan dalam notulen keputusan rapat.

Monitoring and Evaluation of the Follow-Up of the Decisions of the Board of Commissioners and Directors Meetings

In carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors in managing the Bank, the Board of Commissioners together with the Board of Directors discuss the problems faced by BRK Syariah, and find the best mutually agreed upon solution that needs to be followed up by the Board of Directors. Each decision of the Board of Commissioners Meeting and the Board of Directors Meeting is a collegial decision implemented by the Board of Commissioners, the Board of Directors and related work units whose implementation is monitored by the Board of Commissioners and/or Committees under the Board of Commissioners as well as by the Directors and/or Committees under the Board of Directors. If there are obstacles or obstacles in its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors can hold a follow-up meeting to discuss the obstacles or obstacles encountered and find solutions to resolve them as specified in the minutes of meeting decisions.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nomination and Remuneration Policy Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan dan Prosedur Nominasi

Proses nominasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan RUPS, dengan prosedur mengacu pada Anggaran Dasar Bank serta Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi BRK Syariah telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria terkait aspek integritas, kompetensi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai bidang Direktur masing-masing.

Nomination Policy and Procedure

The process of nominating and selecting members of the Board of Directors and Board of Commissioners becomes the authority of the GMS, with procedures referring to the Bank's Articles of Association and the Work Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners. Prospective members of the BRK Syariah Board of Directors have met the requirements and criteria as stipulated in the applicable laws and regulations, both requirements and criteria related to aspects of integrity, competence, domicile, independence, or other special criteria according to their respective Director's fields.

Proses nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Proses Penyerahan Kewenangan oleh RUPS kepada Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel).
2. Proses Tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penetapan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
4. Proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan keputusan lulus atau tidak lulus calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengangkatan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
6. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The process of nomination and selection of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out as follows:

1. *The process of transferring authority by the GMS to the Controlling Shareholders to form a Selection Committee (Pansel).*
2. *Stages of Selection Process for Prospective Members of the Board of Commissioners and Board of Directors.*
3. *Determination of Candidates for members of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by the Extraordinary GMS.*
4. *The fit and proper test process by the Financial Services Authority and the decision to pass or not pass candidates for the Board of Commissioners and Directors from the Financial Services Authority.*
5. *Appointment of Candidates for members of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by the Extraordinary GMS.*
6. *Prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Commissioners and Board of Directors.*

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kemampuan BRK Syariah.

Remuneration Policy

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors is guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The policy on providing remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined in the General Meeting of Shareholders, which is based on consideration of the performance and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the capabilities of BRK Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

RUPS menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana skema berikut:

Remuneration Determination Procedure

The GMS determines the remuneration policy for the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by taking into account the proposals and recommendations of the Board of Commissioners assisted by the Remuneration and Nomination Committee, according to the following scheme:

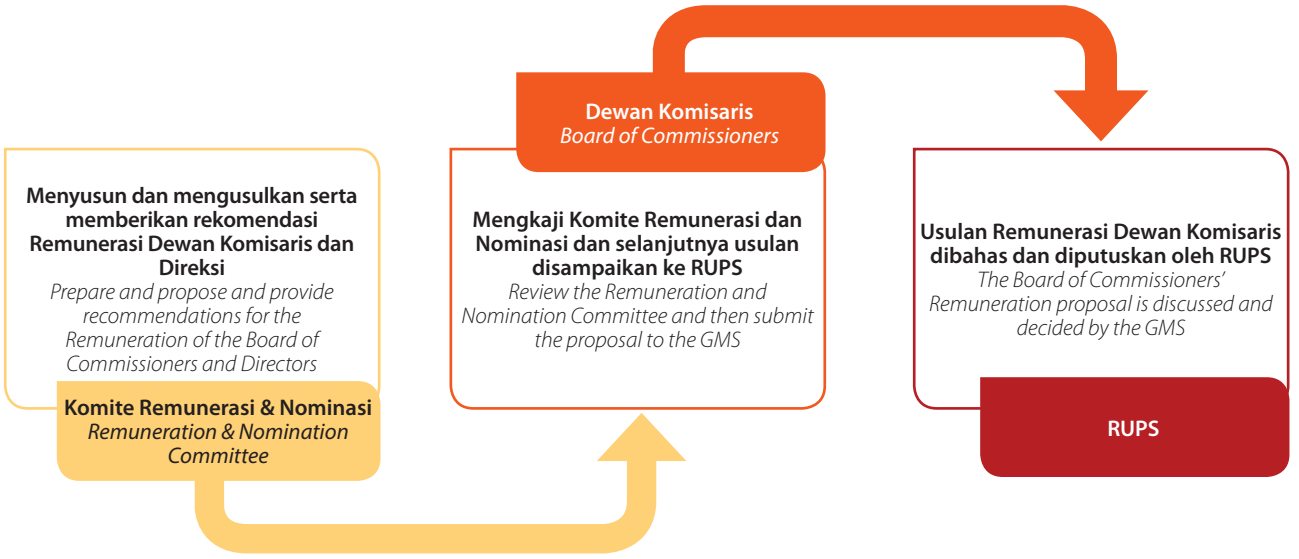

Indikator Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan BRK Syariah. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah antara lain:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Bank;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   b. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
   c. Gaji Komisaris Utama sebesar 65% dari gaji Direktur Utama.
   d. Gaji anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Indikator Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk menjaga mekanisme check and balance antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan BRK Syariah. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah antara lain:

1. *Faktor skala usaha;*
2. *Faktor kompleksitas usaha;*
3. *Tingkat inflasi;*
4. *Kondisi dan kemampuan keuangan Bank;*
5. *Faktor-faktor lain yang relevan, serta*
6. *Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
7. *Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:*
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
   b. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
   c. Gaji Komisaris Utama sebesar 65% dari gaji Direktur Utama.
   d. Gaji anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Nominal Remunerasi

Jenis remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur dan Nominal Remunerasi

Jenis remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration Structure for Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun *Amount Received Within 1 Year*						*Types of Remuneration and Other Facilities*
	Direksi *Directors*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*		
	Orang *Person*	Rp	Orang *Person*	Rp	Orang *Person*	Rp	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	6	27.184.011.874	5	10.136.433.147	2	673.400.733	*Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, other fixed income and other non-natura facilities)*
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan,transportasi, perawatan kesehatan, dsb) yang: a. dapat dimiliki; b.tidak dapat dimiliki	5 5	100.000.000 2.832.913.007	3 3	59.605.000 479.691.903	2 -	71.117.894 -	*Other facilities in kind (housing, transportation, health care, etc.) which:* *a. can be owned;* *b. cannot be owned*
Total		**30.116.924.881**		**10.675.730.050**		**744.518.627**	***Total***

Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam (1) satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in (1) one year grouped in the range of income level is as follows:

Tabel Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Details of Remuneration for Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

Jumlah Remunerasi*	Jumlah Direksi *Number of Directors*		Jumlah Dewan Komisaris *Total Board of Commissioners*		Jumlah Dewan Pengawas Syariah *Number of Sharia Supervisory Board*		*Total Remuneration**
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Di atas Rp2 miliar	5	5	3	2	0	0	*Above IDR 2 billion*
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	0	1	0	0	0	0	*Above IDR 2 billion*
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	1	1	0	1	.0	0	*Above IDR 1 billion - IDR 2 billion*
Rp500 juta ke bawah	0	0	2	1	2	4	*IDR 500 million and below*

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

**) received in financial form (non-natur)*

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariahselama tahun 2022 terlihat dalam tabel berikut:

Details of Remuneration for Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board

Details of the Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for 2022 are shown in the following table:

No	Remunerasi	Direksi *Directors*	Komisaris *Commissioners*	Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*	*Remuneration*
1	Gaji	5.280.000.000	2.184.000.000	228.000.000	*Wages*
2	Tunjangan Perumahan	431.970.000	174.720.000	-	*Housing Allowance*
3	Fasilitas Perumahan	1.557.330.553	78.720.569	-	*Housing Facilities*
4	Kendaraan Dinas	948.785.400	270.486.000	-	*Service vehicle*
5	Cuti	440.000.000	-	-	*Paid leave*
6	Perjalanan Dinas	2.270.848.813	870.489.315	266.297.842	*Official travel*
7	Tunjangan Hari Raya	1.320.000.000	546.000.000	57.000.000	*Holiday allowance*
8	Pakaian Dinas	258.813.000	107.056.000	20.036.000	*Service attire*
9	Fasilitas Komunikasi	214.119.463	118.812.741	-	*Communication Facilities*
10	Tunjangan Hari Tua	757.167.832	406.765.005	-	*Pension*
11	Asuransi Purna Jabatan	3.975.757.907	1.973.200.673	-	*Post-Employment Insurance*
12	Fasilitas Pembiayaan	-	4.549.915	-	*Financing Facility*
13	Kesehatan dan Perawatan	154.027.054	74.325.334	-	*Health and Care*
14	Tantiem	7.753.642.273	1.771.693.678	98.648.956	*Tantiem*
15	Tunjangan Pajak	4.754.462.586	2.094.910.820	74.535.829	*Tax Benefits*
	Total	**30.116.924.881**	**10.675.730.050**	**744.518.627**	*Total*

TATA KELOLA REMUNERASI BANK
BANK REMUNERATION GOVERNANCE

Penetapan tata kelola remunerasi BRK Syariah telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis risiko yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum syariah. Adapun pengungkapan informasi terkait kebijakan remunerasi sesuai Peraturan OJK 59/POJK.03/2017 mencakup hal-hal sebagai berikut:

The determination of BRK Syariah remuneration governance has taken into account the principle of prudence in the provision of risk-based remuneration which is guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 regarding the application of remuneration for Islamic commercial banks. The disclosure of information related to remuneration policies in accordance with OJK Regulation 59/POJK.03/2017 includes the following matters:

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

BRK Syariah telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, dengan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, *fair* dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, dan strategi jangka panjang Bank. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan ini.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko Bank

BRK Syariah memandang risiko Bank menjadi faktor yang sangat mempengaruhi remunerasi yang bersifat variabel. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Remunerasi Berdasarkan Pengukuran Kinerja

Kebijakan BRK Syariah terkait dengan remunerasi berbasis pengukuran kinerja diatur dalam Keputusan Direksi No. 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (*MRT*), dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. Persentase NPF Net > 5% (lima persen) secara *bankwide* setelah dilakukan audit.
2. Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang merugikan Bank.

Penundaan dapat dilakukan apabila terpenuhi salah satu faktor penunda pembayaran remunerasi yang ditahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

Remuneration Policy Formulation Process

BRK Syariah has issued Directors Decree No. 052/KEPDIR/2022 concerning Remuneration Policy for Managers, Sharia Supervisory Board and Employees, by implementing a competitive, fair and risk-based remuneration system and always ensuring that no Employee receives compensation under predetermined conditions.

Remuneration and Nomination Committee

Regarding the remuneration aspect, the Remuneration and Nomination Committee has the duty and responsibility to evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk and long-term strategy. The description regarding the names of members, composition, duties and responsibilities as well as the number of Committee meetings has been presented in the Remuneration and Nomination Committee Sub-Chapter in this Report.

Remuneration Associated with Bank Risk

BRK Syariah views Bank risk as a factor that greatly influences variable remuneration. This is in line with the provisions of OJK Regulation No.65/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Remuneration Based on Performance Measurement

Sharia BRK policies related to performance measurement-based remuneration are regulated in Directors Decree No. 052/KEPDIR/2022 concerning Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees. Banks can postpone payment of deferred variable remuneration (Malus) or withdraw variable remuneration that has been paid (Clawback) to officials who are classified as Material Risk Taker (MRT), taking into account factors including:

1. *The percentage of Net NPF is > 5% (five percent) on a bankwide basis after being audited.*
2. *There was fraud committed by a party who became a Material Risk Taker (MRT) which was detrimental to the Bank.*

Delays can be made if one of the factors for delaying the payment of remuneration that is withheld as referred to in numbers 1 and 2 above is fulfilled.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, per Wilayah, dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi BRK Syariah telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang, Capem dan Kedai dengan memberikan tunjangan untuk daerah-daerah tertentu.

Remuneration Policy Coverage and Its Implementation Per Business Unit, Per Region and in Subsidiaries or Branch Offices Located Overseas

BRK Syariah's remuneration policy has taken into account the geographical area of Branch Offices, Sub-Branch Offices and Kedai by providing allowances for certain areas.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variable, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, seperti Tantiem untuk Pengurus dan Jasa Produksi untuk Pegawai atau remunerasi variabel lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Variable Remuneration

Based on 052/KEPDIR/2022 concerning Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees, the remuneration components for the Board of Commissioners and Directors are variable, namely remuneration linked to performance and risk, such as Tantiem for Management and Production Services for Employees or variable remuneration others are equivalent to it.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Number of Directors, Board of Commissioners and Employees Receiving Variable Remuneration for 1 (One) Year

Number of Directors, Board of Commissioners and Employees who receive variable remuneration for 1 (one) year and the total amount.

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun *Amount Received in 1 (one) Year*						*Variable Remuneration*
	Direksi *Directors*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Pegawai *Employess*		
	Orang *Person*	Rp	Orang *Person*	Rp	Orang *Person*	Rp	
Jasprod/Tantiem	6	7,753,642,273	5	1,771,693,678	2.190	85,629,984,032	*Jasprod/Tantiem*

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direksi
2. Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi
3. Pemimpin Cabang
4. Pemimpin Cabang Pembantu
5. Pemimpin Kedai

Position and Number of Parties who Become the MRT

In determining employees who are identified as MRT, the Bank takes a qualitative and quantitative approach. Positions classified as MRT are as follows:

1. *Directors*
2. *Head of Division/ Head of Work Unit at the same level as Head of Division*
3. *Branch Leader*
4. *Sub-Branch Leader*
5. *Shop Leader*

Tabel Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT tahun 2022
Table of Positions and Number of Parties to Become MRT in 2022

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT *Number of Parties Becoming MRT*	*Position*
1	Direksi	5	*Directors*
2	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	18	*Head of Division/ Head of Work Unit at the same level as Head of Division*
3	Pemimpin Cabang	25	*Branch Leader*
4	Pemimpin Cabang Pembantu	20	*Sub-Branch Leader*
5	Pemimpin Kedai	40	*Shop Leader*

Konsultan Eksternal terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

External Consultant regarding Remuneration Policy

In preparing and establishing remuneration policies, the Bank does not use external consultant services.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Terkait dengan remunerasi, BRK Syariah berupaya agar tidak terjadi ***gap*** yang terlalu tinggi. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Ratio of Highest and Lowest Salary

With regard to remuneration, BRK Syariah seeks to avoid too high a gap. The highest and lowest salary ratios for the last 2 years are as follows:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2021-2022
Table of the Ratio of the Highest and Lowest Salaries for 2021-2022

URAIAN	Tahun 2022 *Year 2022*	Tahun 2021 *Year 2021*	*DESCRIPTION*
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	9,25%	10,57%	*The ratio of the highest and lowest Employee Salaries*
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	85%	85%	*The ratio of the highest and lowest Directors' Salaries*
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	90%	90%	*The ratio of the highest and lowest Commissioners' Salaries*
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	35,95%	35,95%	*The highest salary ratio for the Board of Directors and the highest Employees*

Jumlah Nominal Pesangon Dibayarkan

Nominal Amount of Severance Paid

Tabel Jumlah Nominal Pesangon Dibayarkan Tahun 2021 - 2022
Table of Nominal Amount of Severance Paid for 2021 - 2022

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai *Number of Employees*		*Nominal Amount of Severance Paid per Person in 1 (one) Year*
		2022	2021	
1.	Di atas Rp1 miliar	0	0	*Above IDR 1 billion*
2.	Di atas Rp500 juta s.d 1 milliar	2	6	*Above IDR 500 million up to 1 billion*
3.	Rp500 juta ke bawah	49	37	*IDR 500 million and below*

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY POLICY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan Keberagaman

BRK Syariah memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keberagaman tersebut penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BRK Syariah. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BRK Syariah telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan peraturan terkait penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

BRK Syariah senantiasa berupaya menjaga keberagaman keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang mencakup di antaranya bidang perbankan syariah, ekonomi syariah, bisnis, keuangan, tata kelola, sumber daya manusia, dan manajemen risiko.

Untuk tahun 2022, komposisi anggota Dewan Komisaris BRK Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang telah memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut:

Diversity Policy

BRK Syariah has a diverse composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, both based on age, educational background, expertise and experience needed in carrying out their duties and responsibilities. This diversity is important to support the process of decision-making, division, and implementation of the duties of members of the Board of Commissioners and Directors, as well as support for improving the performance of BRK Syariah. The diversity of the composition of the BRK Syariah Board of Commissioners and Board of Directors has complied with Bank Indonesia regulations, OJK Regulations and other relevant laws and regulations.

BRK Syariah has regulated the diversity of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as stated in the Bank's Articles of Association and the Guidelines and Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors. The diversity of the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors has also complied with the provisions in OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks and regulations related to the implementation of governance for Islamic commercial banks.

Composition diversity of the board of commissioners

BRK Syariah always strives to maintain the diversity of expertise and experience of members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors which includes among others the fields of sharia banking, sharia economics, business, finance, governance, human resources, and risk management.

For 2022, the composition of the members of the BRK Syariah Board of Commissioners consists of 3 (three) people who have complied with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in Composition of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Jenis Kelamin *Gender*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*	Keahlian *Skill*
Syahrial Abdi	Komisaris Utama *The main commissioner*	47 Tahun *47 Years*	Pria *Man*	– Sarjana Jurusan Pemerintahan (STPDN) – Magister Manajemen Pemerintahan Daerah – *Bachelor of Government Department* – *(STPDN)* – *Master of Regional Government Management*	Di bidang pemerintahan *In government*	Bidang Pemerintahan *Government Sector*
Roy Prakoso	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	58 Tahun *58 Years*	Pria *Man*	– Sarjana Ekonomi – Magister Manajemen – Doktor bidang Manajemen – *Bachelor of Economics* – *Master of Management* – *Doctor of Management*	Di bidang perbankan *In banking*	Manajemen Risiko, Financial dan IT *Risk Management, Financial and IT*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	61 Tahun *61 Years*	Wanita *Woman*	– Sarjana bidang Akuntansi – Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) – Doctor Business Administration (DBA) – *Bachelor in Accounting* – *Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS)* – *Doctor of Business Administration (DBA)*	Akademisi *Academics*	Akuntansi, dan Administrasi Bisnis *Accounting, and Business Administration*

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, BRK Syariah telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memiliki beragam latar belakang seperti perbankan, akademisi dan pemerintahan, juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting oleh BRK Syariah untuk memastikan proses pengawasan dan penasehatan Bank yang efektif.

In maintaining a competitive advantage, BRK Syariah already has members of the Board of Commissioners who have various backgrounds such as banking, academia and government, also having various competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by BRK Syariah to ensure an effective monitoring and advisory process for the Bank.

Keberagaman Komposisi Direksi

Untuk tahun 2022, komposisi anggota Direksi BRK Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang telah memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut:

Diversity in the Composition of the Board of Directors

For 2022, the composition of the members of the BRK Syariah Board of Directors consists of 3 (three) people who have complied with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Table of Diversity in the Composition of the Board of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Jenis Kelamin *Gender*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*	Keahlian *Skill*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	56 Tahun *56 Years*	Pria *Man*	– Insinyur Perikanan/ Marine Product – Magister Manajemen – Doktor bidang Strategic Finance – *Fisheries Engineer/Marine Product* – *Master of Management* – *Doctor of Strategic Finance*	Di bidang perbankan syariah, keuangan, audit, dan compliance *In the field of Islamic banking, finance, audit and compliance*	Bidang perbankan syariah, manajemen, keuangan, audit, dan compliance *Sharia banking, management, finance, audit and compliance*
Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan *Director of Financing*	46 Tahun *46 Years*	Pria *Man*	– Sarjana jurusan Akuntansi – Magister Manajemen Keuangan – *Bachelor majoring in Accounting* – *Master of Financial Management*	Di bidang perbankan dan perkreditan/ pembiayaan *In banking and credit/ financing*	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/ pembiayaan *Banking, management and credit/financing sector*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Jenis Kelamin *Gender*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*	Keahlian *Skill*
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	57 Tahun *57 Years*	Pria *Man*	– Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – *Bachelor's degree in Economics and Development Studies*	Di bidang perbankan syariah, Keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan *In the field of Islamic banking, finance, credit/ financing and funding*	Bidang Perbankan, keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan *Banking, finance, credit/ financing and funding sector*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	57 Tahun *57 Years*	Pria *Man*	– Sarjana jurusan Ekonomi/ Akuntansi – Magister Manajemen – *Bachelor's degree in Economics/ Accounting* – *Master of Management*	Di bidang perbankan, operasional dan perkreditan/ pembiayaan *In banking, operations and credit/financing*	Bidang perbankan, manajemen, operasional dan perkreditan/ pembiayaan *The fields of banking, management, operations and credit/financing*
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	53 Tahun *53 Years*	Pria *Man*	– Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – *Bachelor's degree in Economics and Development Studies*	Di bidang perbankan, hukum, operasional dan perkreditan/ pembiayaan *In the banking, legal, operational and credit/ financing sectors*	Bidang perbankan, hukum dan perkreditan/ pembiayaan *The fields of banking, law and credit/financing*

Dari tabel di atas, BRK Syariah telah memiliki anggota Direksi yang memiliki latar belakang yang beragam antara lain perbankan syariah, keuangan, operasional bank, hukum, audit dan *compliance,* juga memiliki kompetensi, latar belakang serta pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

From the table above, BRK Syariah already has members of the Board of Directors who have various backgrounds including sharia banking, finance, bank operations, law, audit and compliance, also having various competencies, backgrounds and experiences. This is seen as important to ensure the decision-making process can run effectively.

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH
SHARIA BUSINESS UNIT GOVERNANCE

Dengan selesainya proses konversi BRK menjadi BRK Syariah maka saat ini Bank beroperasi sepenuhnya menjadi Bank Umum Syariah dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Dengan demikian maka uraian terkait Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah tidak diperlukan lagi.

With the completion of the conversion process from BRK to Sharia BRK, the Bank is currently operating fully as a Sharia Commercial Bank with business activities based on sharia principles with reference to Bank Indonesia Regulation Number: 11/33/PBI/2009 and Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as Financial Services Authority Circular Letter No. 10/ SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
Thus, the description related to the Implementation of Good Corporate Governance of Sharia Business Units is no longer needed.

PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA

IMPLEMENTATION OF SHARIA PRINCIPLES IN FUND RAISING ACTIVITIES AND DISTRIBUTION OF FUNDS AND SERVICES

Berdasarkan Laporan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah, secara umum pedoman operasional & produk serta pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor BRK Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BRK Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.13/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Mengingat BRK Syariah masih dalam tahap transisi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah maka terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan diperbaikan agar sejalan dengan Prinsip Syariah seutuhnya.
Disamping itu, guna meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) BRK Syariah secara bertahap dan berkelanjutan memberikan pengembangan kapasitas dan kapabilitas mengenai operasional dan produk perbankan syariah agar sejalan dengan perkembangan transaksi keuangan syariah.

Based on the BRK Syariah Supervisory Board Report, in general the operational guidelines & products as well as the implementation of products & services in the BRK Syariah office network are in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council. Fulfillment of Sharia Principles in Sharia BRK operational activities refers to Bank Indonesia Regulation Number: 9/19/PBI/2007 concerning Implementation of Sharia Principles in Funds Collection and Distribution of Funds and Sharia Bank Services as amended by Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK. 13/2021 concerning Implementation of Commercial Bank Products. Considering that BRK Syariah is still in the transitional stage from a Conventional Commercial Bank to an Islamic Commercial Bank, there are several weaknesses that need to be corrected so that they are fully in line with the Sharia Principles.
In addition, in order to increase understanding of human resources in business units (fundraising, distribution of funds, and services and/or services), BRK Syariah gradually and continuously provides capacity and capability development regarding sharia banking operations and products so that they are in line with developments in sharia financial transactions. .

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

NON-HALAL INCOME AND ITS USE

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non-halal dan penggunaannya, BRK Syariah mengungkapkan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Based on Bank Indonesia Circular Letter Number: 12/13/DPbs dated 30 April 2010 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Islamic banks are required to disclose non-halal income and its use in the Annual Report on GCG Implementation. As a form of GCG implementation related to non-halal income and its use, BRK Syariah discloses the Report on the Sources and Use of Virtue Funds in the last 2 years as follows:

(dalam juta Rupiah) *(in million Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	*Description*
1. Saldo awal Dana Kebajikan	-	-	*1. The initial balance of the Virtue Fund*
2. Penerimaan Dana Kebajikan			*2. Acceptance of Virtue Funds*
a. Infak dan sedekah	-	-	*a. Infaq and alms*
b. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	*b. Productive benevolence refund*
c. Denda	520	-	*c. Fine*
d. Penerimaan non halal	-	-	*d. Non-halal acceptance*
e. Lainnya	143	-	*e. Other*
Total Penerimaan	**663**	**-**	***Total Admissions***

Uraian	31 Desember 2022 *December 31, 2022*	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	*Description*
3. Penggunaan Dana Kebajikan			*3. Use of Benevolent Funds*
a. Dana kebajikan produktif	-	-	*a. Productive benevolence fund*
b. Sumbangan	145	-	*b. Donations*
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	*c. Other uses for public purposes*
4. Kenaikan/penurunan dana kebajikan	518	-	*4. Increase/decrease in benevolent funds*
5. Saldo akhir dana kebajikan	518	-	*5. Final balance of benevolence fund*

Untuk tahun 2022 tidak terdapat penerimaan/pendapatan non halal di BRK Syariah. Adapun Penerimaan Dana Kebajikan BRK Syariah selama tahun 2022 berasal dari Denda dan Lainnya, masing-masing sebesar Rp520.000.000,- dan Rp143.000.000,- dengan penggunaan Dana Kebajikan sebagai Sumbangan sebesar Rp145.000.000,-.

For 2022 there will be no non-halal receipts/income at BRK Syariah. As for the BRK Syariah Benevolent Fund Receipts during 2022 came from Fines and Others, amounting to IDR 520,000,000 and IDR 143,000,000 respectively with the use of Virtue Funds as Contributions of IDR 145,000,000.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL
FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES

Sejalan dengan prinsip GCG yaitu responsibilitas (responsibility), maka untuk menjaga kelangsungan usahanya BRK Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. BRK Syariah juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

In line with the GCG principle, namely responsibility, to maintain business continuity, BRK Syariah must adhere to prudential banking practices and ensure compliance with the Bank's management with applicable laws and regulations as well as ethical and responsible corporate management practices. . BRK Syariah must also act as a good corporate citizen, including caring for the environment and carrying out social responsibility. Therefore, corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR) is a form of implementation of good corporate governance (GCG).

CSR merupakan suatu konsep bahwa BRK Syariah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah pemegang saham, nasabah, karyawan, rekanan/mitra kerja, masyarakat dan Regulator, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

CSR is a concept that BRK Syariah has various forms of responsibility towards all of its stakeholders, which include shareholders, customers, employees, partners/work partners, communities and Regulators, in all aspects of the company's operations which include economic, social and environment.

Implementasi CSR di BRK Syariah dilakukan melalui Program CSR. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, fokus pelaksanaan bidang dalam Program CSR ada 5 (lima) pilar, yaitu :

1. CSR Bidang Pendidikan
2. CSR Bidang Sosial
3. CSR Bidang Keagamaan
4. CSR Bidang Seni & Budaya
5. CSR Bidang Olah Raga

Implementation of CSR at BRK Syariah is carried out through the CSR Program. In realizing the commitment to continue to build a better quality of life for the community on an ongoing basis, the focus of the field implementation in the CSR Program is 5 (five) pillars, namely:

1. *Education Sector CSR*
2. *Social Sector CSR*
3. *CSR for Religion*
4. *CSR in Arts & Culture*
5. *CSR in the Field of Sports*

Total dana yang telah disalurkan BRK Syariah melalui berbagai kegiatan CSR BRK Syariah selama tahun 2022 sebesar Rp. 32.639.651.711,- dengan rincian sebagai berikut:

The total funds that have been channeled by BRK Syariah through various BRK Syariah CSR activities during 2022 amount to Rp. 32,639,651,711, - with the following details:

Jenis Kegiatan CSR	Realisasi Anggaran (Rp) *Budget Realization (Rp)*	%	*Types of CSR Activities*
Pendidikan	7.204.993.151	22,07%	*Education*
Sosial	11.954.817.728	36,63%	*Social*
Keagamaan	12.960.886.832	39,71%	*Religious*
Seni & Budaya	207.960.000	0,64%	*Art and culture*
Olah Raga	311.000.000	0,95%	*Sport*
Jumlah	**32.639.657.711**	**100,00%**	***Amount***

FUNGSI AUDIT INTERNAL
FUNDING FOR SOCIAL ACTIVITIES

Fungsi Audit Internal BRK Syariah dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit (DIA). Divisi IA dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, serta kualitas kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan Bank.

The Sharia BRK Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division (DIA). The IA Division was established to conduct inspections and assessments of the adequacy and effectiveness of the internal control structure, as well as the quality of management performance in all aspects or activities of the Bank.

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit

Internal Audit Division Organizational Structure

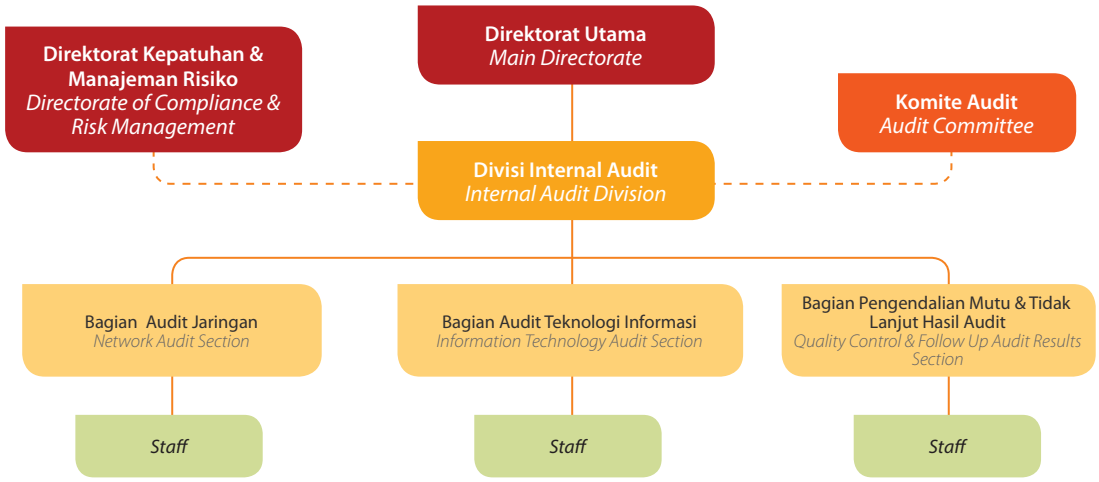

Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) BRK Syariah saat ini, Fungsi Internal Audit dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan Divisi Internal Audit memiliki 3 (tiga) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi dan Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit.

Position of Internal Audit in the Organizational Structure

Based on the current BRK Syariah Organizational Structure and Work Procedure (SOT), the Internal Audit Function is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the Main Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority. The Head of the Internal Audit Division has 3 (three) sections under him, namely the Network Audit Section, the Information Technology Audit Section and the Quality Control & Audit Result Follow-Up Section.

Profil Pemimpin Divisi Internal Audit

Profile of Head of Internal Audit Division

Heru Kurniawan
Pemimpin Divisi Internal Audit
Head of Internal Audit Division

Kewarganegaraan *Citizenship*	:	Indonesia	*Indonesia*
Domisili *Domicile*	:	Pekanbaru, Riau	*Pekanbaru, Riau*
Tempat, Tanggal Lahir *Place and date of birth*	:	Selat Panjang, 2 Juli 1967	*Selat Panjang, July 2, 1967*
Usia *Age*	:	55 Tahun	*55 Years*
Riwayat Pendidikan *Educational background*	:	Sarjana di bidang Akuntansi Universitas Islam Riau tahun 2000, menyelesaikan Program Pasca Sarjana prodi Manajemen di Universitas Riau Tahun 2014.	*Bachelor's degree in Accounting from the Islamic University of Riau in 2000, completed the Post-Graduate Program in Management study program at the University of Riau in 2014.*
Riwayat Jabatan *Position History*	:	Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja, Pemimpin Bagian Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis, Pemimpin Bagian Operasional, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin DIA.	*Started his career at Bank Riau Kepri since 1994. He has held several positions including Head of Lubuk Baja Sub-Branch, Head of Treasury & International Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Operations Section, Head of Risk Management Division and most recently served as Head of DIA.*
Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	:	SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Maret 2021.	*SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 dated 09 March 2021.*

Pengembangan Kompetensi Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Competency Development for Leaders of the Internal Audit Work Unit

Judul Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Time and Place of Execution*	Penyelenggara *Organizer*	*Training Titles*
Sosialisasi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata	5 – 6 Juli 2022 di Pekanbaru *July 5 – 6, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) *Human Resources Management (MSDM) Division*	*Socialization of Formation of Cyber Incident Response Team (TTIS) for Finance, Trade and Tourism Sector*
Sosialisasi Program Sertifikasi CIAE dan Pelatihan Teknis Subtantif Bagi Korporasi	20 September 2022 di Pekanbaru *September 20, 2022 in Pekanbaru*	ASBANDA	*Socialization of the CIAE Certification Program and Substantive Technical Training for Corporations*
Training Audit Trail dan Overview Aplikasi Core Banking Syariah	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru *October 13 – 14, 2022 in Pekanbaru*	PT Multipolar	*Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications*
Webinar 'Kupas Tuntas Akad Murabahah'	24 Mei 2022 di Pekanbaru *May 24, 2022 in Pekanbaru*	Iqtishad Consultan Indonesia	*Webinar 'Full Peel of Murabahah Contract'*

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan Pemimpin Divisi IA berdasarkan SK No.19/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Maret 2021. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi IA tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemimpin Divisi IA bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin Divisi IA setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Pemimpin Divisi IA tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

The party that appoints and dismisses the Head of the Internal Audit Work Unit

The Internal Audit Division (DIA) is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The appointment of the IA Division Head was based on Decree No.19/KEPDIR/MSDM/2021 dated March 9, 2021. The appointment and dismissal of the IA Division Head was reported to the Financial Services Authority. The Head of the IA Division is responsible to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners to inform various matters related to audit results. The President Director can dismiss the Head of the IA Division after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of the IA Division does not meet the requirements as an Internal Audit auditor or fails/is incompetent in carrying out their duties.

Piagam Internal Audit *Charter*

Dalam melakukan tugasnya, Divisi IA berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Internal Audit yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 034/ KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan *Standar Profesional Audit Intern* (SPAI) sebagai pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Bank Riau Kepri ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 33/ KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Audit Intern yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur dan Kedudukan Divisi Internal Audit
2. Visi dan Misi Divisi Internal Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit
4. Wewenang Divisi Internal Audit
5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala Divisi Internal Audit
6. Kode Etik Auditor Internal
7. Independensi dan Obyektifitas Auditor Internal
8. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Divisi Internal Audit
9. Persyaratan dan Pengembangan Auditor Divisi Internal Audit
10. Perlindungan Hukum Auditor Internal
11. Program Pengendalian Mutu Audit
12. Hubungan Divisi Internal Audit dengan Auditor Eksternal
13. *Review*
14. Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

Internal Audit Charter

In carrying out its duties, the IA Division is guided by the Company Manual (BPP) of the Internal Audit Division as contained in the Decree of the Directors Number 034/ KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Internal Audit Function, which in its preparation still refers to in OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks and the Internal Audit Professional Standards (SPAI) as the implementation of professional internal audit as determined by the internal audit professional association, including guidelines for implementing standards. Bank Riau Kepri's Internal Audit Charter was stipulated through Directors Decree Number 33/ KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Internal Audit Charter which contains the following matters:

1. *Structure and Position of the Internal Audit Division*
2. *Vision and Mission of the Internal Audit Division*
3. *Internal Audit Division Duties and Responsibilities*
4. *Authority of the Internal Audit Division*
5. *Responsibilities and Accountability Head of Internal Audit Division*
6. *Internal Auditor Code of Ethics*
7. *Internal Auditor Independence and Objectivity*
8. *Purpose and Scope of Activities of the Internal Audit Division*
9. *Internal Audit Division Auditor Requirements and Development*
10. *Internal Auditor Legal Protection*
11. *Audit Quality Control Program*
12. *Relations between the Internal Audit Division and the External Auditor*
13. *Reviews*
14. *Use of External Party Services*

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit

Berdasarkan Piagam Audit Intern dan BPP Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Divisi Internal Audit BRK Syariah memiliki tugas pokok meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division

Based on the Internal Audit Charter and the BPP for the Implementation of the Internal Audit Function, the BRK Syariah Internal Audit Division has the following main tasks:

1. *Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by elaborating operationally from planning, implementing and monitoring audit results;*
2. *Make analyzes and assessments in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through audits;*
3. *Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds;*
4. *Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;*
5. *Conducting audits according to the annual plan approved by the President Director and the Board of*

Komisaris atas seluruh sumber daya Bank, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (*risk based*). Yang pelaksanaan auditnya bisa dilakukan secara *onsite* (dilakukan audit lapangan di tempat *auditee*) atau dilakukan secara *remote audit* (pelaksanaan audit tidak dilakukan di tempat *auditee*, namun dilakukan di Kantor Pusat dengan pertimbangan tertentu, misalnya hasil *risk assessment auditee* adalah *Low,* pemantauan selama periode audit tidak dijumpai/ditemukan hal-hal yang bersifat kritikal dan berpotensi adanya *fraud*);

6. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana yang dimaksud pada butir di atas atau atas dasar permintaan pihak internal mapun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi Internal Audit yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktur Utama;
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal Bank untuk memberikan nilai tambah sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi Internal Audit;

Adapun tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan mencakup Audit Dan Konsultasi;
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan Konsultasi kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
3. Melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal setiap semester;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank;
5. Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank;
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan;
7. Menyusun Laporan Hasil Audit serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
8. Melakukan aktivitas konsultasi atas pemintaan unit kerja dalam rangka memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko serta pengendalian internal serta tata kelola sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan ojektivitas serta sumber daya yang diperlukan tersedia;
9. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
10. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank;
11. Berpatisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus;

Commissioners on all Bank resources, including other organizations affiliated with the Bank, which are determined by considering the level of risk (risk based). The audit can be carried out onsite (field audit conducted at the auditee's place) or remotely audited (the audit is not carried out at the auditee's place, but carried out at the Head Office with certain considerations, for example the auditee's risk assessment results are Low, monitoring during the audit period not found/found matters that are critical and have the potential for fraud);

6. *Conduct an audit of matters outside the plan referred to in the point above or at the request of an authorized internal or external party or on the basis of the initiative of the Internal Audit Division which has been previously approved by the President Director;*
7. *Providing consulting services to the Bank's internal parties to provide added value as long as competent and adequate resources are available and do not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division;*

The responsibilities of the Internal Audit Division are:

1. *Develop and implement an Annual Work Plan including Audit and Consultation;*
2. *Report the Realization of the Annual Work Plan for audit and Consultation to the President Director and the Board of Commissioners periodically according to the time set;*
3. *Report on the implementation and main results of the internal audit every semester;*
4. *Examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank;*
5. *Ensuring and evaluating the implementation of risk control and internal control in all activities in the Bank;*
6. *Provide recommendations on the results of the inspection;*
7. *Prepare an Audit Report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director;*
8. *Carry out consulting activities at the request of the work unit in order to provide added value and improve the quality of risk management and internal control and governance as long as it does not affect independence and objectivity and the necessary resources are available;*
9. *Monitor the follow-up of audit results and report their realization periodically in accordance with a predetermined time;*
10. *Report immediately to the President Director and the Board of Commissioners on any audit findings that have the potential to disrupt bank business activities;*
11. *Actively participate in case processing improvements;*

12. Memberikan masukan dan *review* terhadap kebijakan atau prosedur baru yang akan diberlakukan oleh manajemen;
13. Menyusun kebijakan dan prosedur Divisi Internal Audit sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor serta melakukan *review* untuk keperluan penyempurnaan;
14. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
15. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
16. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
17. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal telah terdapat transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Divisi Internal Audit, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal tidak memengaruhi independensi dan objektifitas fungsi Divisi Internal Audit;
20. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal telah mematuhi Piagam Audit Internal Bank;
21. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis;
22. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Internal Audit dan pihak eksternal.

Dalam rangka evaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, Divisi Internal Audit memiliki program pengendalian mutu audit yang terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. *Review* Internal, dilakukan terhadap Tim Audit Divisi IA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan. Dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta objektivitas atas pelaksanaan audit, Divisi IA melalui Pemimpin Divisi IA dan/atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap Tim Audit. Selain melaksanakan tugas QA, Divisi IA juga melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.

12. Provide input and review of new policies or procedures that will be implemented by management;

13. Develop policies and procedures for the Internal Audit Division as guidelines for the implementation of Auditor duties and conduct reviews for improvement purposes;
14. Submit an annual budget and report its realization to the President Director periodically according to the time set;

15. Prepare an Implementation Report and Main Audit Results and submit it to the Financial Services Authority after being signed by the President Director and the Board of Commissioners;
16. Report the monitoring results of follow-up improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function;
17. Deliver findings related to the implementation of compliance with Sharia principles to the Sharia Supervisory Board;
18. Ensure that in the event that there is use of the services of external parties for internal audit activities there has been a transfer of knowledge between external parties to members of the Internal Audit Division, considering that the use of external party expert services is temporary;

19. Ensure that in the event that the use of external party services for internal audit activities does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division function;
20. Ensuring that in the event that the use of external party services for internal audit activities has complied with the Bank's Internal Audit Charter;
21. Apply knowledge, skills and competencies that are carried out in a professional and skeptical manner;
22. Develop periodic assignment restriction policies and adequate waiting periods for assignments to members of the Internal Audit Division and external parties.

In order to evaluate the quality of the audit activities it performs, the Internal Audit Division has an audit quality control program consisting of:

1. *Supervision, carried out on the work of the Auditor on an ongoing basis to ensure compliance with auditing standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal review, carried out on the IA Division Audit Team on an ongoing basis on the quality of the audit work produced. In maintaining the quality of audit activities and maintaining independence and objectivity in conducting audits, the IA Division through the Head of the IA Division and/or the Head of Quality Control & Follow Up on Audit Results has carried out Quality Assurance (QA) duties on the Audit Team. In addition to carrying out QA duties, the IA Division also monitors the completion of follow-up on internal audit results.*

3. *Review* Eksternal, dilakukan terhadap Divisi Internal Audit untuk menilai mutu kegiatan Divisi IA BRK Syariah atas pelaksanan audit yang telah dilakukan. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, maka fungsi Divisi IA harus dikaji atau *review* oleh pihak eksternal minimal 3 (tiga) tahun sekali, yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi IA dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

3. External Review, carried out on the Internal Audit Division to assess the quality of the activities of the IA BRK Syariah Division for the implementation of the audit that has been carried out. Referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the Division IA function must be reviewed or reviewed by an external party at least once every 3 (three) years, which contains opinions on the work results of the IA Division and its compliance with the Standards for Implementing the Bank's Internal Audit Function and possible improvements.

Persyaratan Auditor Internal

Berdasarkan SK Direksi No.034/KEPDIR/2022 tentang BPP Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, persyaratan sebagai Auditor Internal Bank harus memenuhi hal berikut:

1. Memiliki tingkat pendidikan minimal S1 atau memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dengan minimal 2 (dua) jabatan berbeda dengan disiplin ilmu yang akan dipertimbangkan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas audit dan memenuhi kelengkapan kompetensi profesional Divisi IA secara kolektif.
2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar audit, sehingga setiap auditor akan dipastikan telah mendapat pelatihan yang cukup baik dari bangku akademik maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi IA sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
3. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar operasional perbankan sehingga akan selalu dipastikan bahwa setiap auditor telah memiliki kompetensi *basic banking and product knowledge* sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
4. Memiliki pengetahuan tentang:
   a. Prinsip dasar dan risiko tentang produk (sumber pendanaan, pembiayaan, jasa layanan, perhitungan dan sebagainya) serta operasional perbankan syariah;
   b. Prinsip dasar dan risiko akuntansi perbankan syariah;
   c. Legal dan manajemen risiko;
   d. Kegiatan usaha lain perbankan syariah;
   e. BPP dan SOP yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

Internal Auditor Requirements

Based on Directors Decree No.034/KEPDIR/2022 concerning BPP for the Implementation of the Internal Audit Function, the requirements as a Bank Internal Auditor must fulfill the following:

1. Have a minimum education level of S1 or have a minimum of 8 (eight) years of work experience with a minimum of 2 (two) different positions with disciplines that will be considered in order to support the implementation of audit tasks and meet the complete professional competence of the IA Division collectively.
2. Have knowledge of the basics of auditing, so that each auditor will be ensured to have received sufficient training both from the academic bench and training organized by the IA Division before the person concerned is given full responsibility as an auditor.
3. Have knowledge of the basics of banking operations so that it will always be ensured that each auditor has basic banking competence and product knowledge before the person concerned is given full responsibility as an auditor.
4. Have knowledge about:
   a. Basic principles and risks regarding products (sources of funding, financing, services, calculations and so on) as well as sharia banking operations;
   b. Basic principles and accounting risks of Islamic banking;
   c. Legal and risk management;
   d. Other business activities of sharia banking;
   e. BPP and SOP related to sharia banking business activities.

Komposisi Personil Auditor Internal

Internal Auditor Personnel Composition

No	Jabatan	Jumlah *Amount*	*Position*
1	Pemimpin Divisi Internal Audit	1	*Head of Internal Audit Division*
2	Pemimpin Bagian Audit Jaringan	1	*Network Audit Section Leader*
3	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi	1	*Head of Information Technology Audit Section*
4	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit (PMTLHA)	1	*Head of Quality Control & Audit Result Follow-Up Section (PMTLHA)*
5	Auditor Bagian Audit TI	3	*IT Audit Department Auditor*
6	Auditor Bagian Audit Jaringan	19	*Network Audit Section Auditor*
7	Auditor Bagian PMTLHA	3	*PMTLHA Section Auditor*
	Jumlah	29	***Amount***

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Personnel Professional Certification

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor *Number of Auditors*	*Certification*
1	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	1	*Integrity Building Expert Certification*
2	Sertifikasi Auditor Level Supervisor	9	*Supervisor Level Auditor Certification*
3	Sertifikasi Auditor Level Auditor	19	*Auditor Level Auditor Certification*
4	Sertifikasi ISO 27001	3	*ISO 27001 Certification*
5	Sertifikasi ITIL	1	*ITIL Certification*
6	Belum sertifikasi	1	*Not yet certified*

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Divisi Internal Audit Tahun 2022

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi IA tahun 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Divisi IA telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit umum terhadap 11 Kantor Cabang, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of Internal Audit Division Activities for 2022

In accordance with the 2022 IA Division Annual Audit Work Plan which has been approved by the President Director and the Board of Commissioners, the IA Division has carried out matters related to the 2022 work plan as follows:

1. *Carry out general audits of 11 Branch Offices, with details of implementation as follows:*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Information*
1	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	23 Februari s.d. 10 Maret 2022 *February 23 thru March 10, 2022*	*General Audit of Tanjung Pinang Sharia Branch*
2	Audit Umum Cabang Dumai	23 Februari s.d. 10 Maret 2022 *February 23 thru March 10, 2022*	*Dumai Branch General Audit*
3	Audit Umum Cabang Bagan Siapi Api dan Capem Bagan Batu	15 s.d. 30 Maret 2022 *15 s.d. March 30, 2022*	*General Audit of the Bagan Siasi Api and Sub-Branch Office of Bagan Batu*
4	Audit Umum Cabang Jakarta	15 s.d. 18 Juni 2022 *15 s.d. June 18, 2022*	*Jakarta Branch General Audit*
5	Audit Umum Cabang Utama dan Kedai Sail	15 s.d. 24 Juni 2022 *15 s.d. June 24, 2022*	*Main Branch and Kedai Sail General Audit*
6	Audit Umum Cabang Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau dan Capem Ahmad Yani.	15 s.d. 30 Juni 2022 *15 s.d. June 30, 2022*	*General Audit Branch Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau and Capem Ahmad Yani.*
7	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Ujung Batu, Capem Kota Tengah, Capem Dalu Dalu, Kedai Rantau Kasai dan Kedai kabun.	15 s.d. 30 September 2022 *15 s.d. September 30, 2022*	*General Audit of Pasir Pengaraian Branch, Head of Ujung Batu Sub-district Head, Central City Head of Office, Dalu Dalu Head of Branch, Rantau Kasai Shop and Kabun Shop.*
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain dan Kedai Air Tiris.	26 September s.d. 05 Oktober 2022 *26 September to.d. October 05, 2022*	*General Audit of the Bangkinang Branch, Branch Office of Fold Cloth and Tiris Air Shop.*
9	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga dan Capem Tarempa.	09 s.d. 26 November 2022 *09 s.d. November 26, 2022*	*General Audit Branch of Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga and Capem Tarempa.*
10	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja, Capem Batu Aji dan Capem Botania.	09 s.d. 20 November 2022 *09 s.d. November 20, 2022*	*General Audit of Batam Branch, Sub-district Head of Lubuk Baja, Head of Batu Aji and Head of Botania.*
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Panam dan Capem Syariah Duri.	14 s.d. 23 Desember 2022 *14 s.d. December 23, 2022*	*General Audit of Pekanbaru Sharia Branch, Head of Panam Sharia Branch and Head of Sharia Duri Branch.*

2. Melaksanakan audit umum terhadap 8 Divisi/Desk Kantor Pusat :

2. Carry out general audits of 8 Head Office Divisions/Desk:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	*Information*
1	Audit Umum Divisi Kepatuhan	21 s.d. 31 Maret 2022 *21 s.d. March 31, 2022*	*General Audit of the Compliance Division*
2	Audit Umum Divisi MSDM	21 s.d. 31 Maret 2022 *21 s.d. March 31, 2022*	*HR Division General Audit*
3	Audit Umum Divisi MKM	11 s.d. 22 April 2022 *11 s.d. April 22, 2022*	*MHM Division General Audit*
4	Audit Umum Divisi Konsumer	11 s.d. 22 April 2022 *11 s.d. April 22, 2022*	*Consumer Division General Audit*
5	Audit Umum Divisi Komersial	18 s.d. 28 April 2022 *18 s.d. April 28, 2022*	*Commercial Division General Audit*
6	Audit Umum Divisi Financial & Reporting	15 s.d. 23 September 2022 *15 s.d. September 23, 2022*	*General Audit of Financial & Reporting Division*
7	Audit Umum Desk Digital Banking	15 s.d. 23 September 2022 *15 s.d. September 23, 2022*	*General Audit Desk Digital Banking*
8	Audit Umum Divisi Umum	14 s.d. 23 Desember 2022 *14 s.d. December 23, 2022*	*General Audit of the General Division*

3. Melaksanakan audit TI terhadap 9 objek :

3. Carry out an IT audit of 9 objects:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	*Information*
1	Audit TI Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	07 s.d. 22 Februari 202 *07 s.d. 22 February 202*	*IT Audit of Bank Indonesia Payment System (SPBI)*
2	Audit TI Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	15 s.d. 25 Maret 2022 *15 s.d. March 25, 2022*	*IT Audit of Card-Based Payment Instruments (APMK)*
3	Audit TI Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	12 s.d. 28 April 2022 *12 s.d. April 28, 2022*	*Financial Information Service System IT Audit (SLIK)*
4	Audit TI Fungsi Pengelolaan TI	06 s.d. 17 Juni 2022 *06 s.d. June 17, 2022*	*IT Audit IT Management Function*
5	Audit Seluruh Aspek TI Terkait POJK MRTI	04 s.d. 29 Juli 2022 *04 s.d. July 29, 2022*	*Audit of All IT Aspects Related to POJK MRTI*
6	Audit TI Aplikasi BRKS Mobile	08 s.d. 19 November 2022 *08 s.d. November 19, 2022*	*BRKS Mobile Application IT Audit*
7	Audit TI Sistem E Dapem PNS	21 s.d. 30 November 2022 *21 s.d. November 30, 2022*	*IT Audit E Dapem PNS System*
8	Audit TI Core Bangking System Modul FNS	14 s.d. 31 Desember 2022 *14 s.d. December 31, 2022*	*IT Audit Core Banking System FNS Module*
9	Audit TI Core Bangking System Modul DDS-TDS	14 s.d. 31 Desember 2022 *14 s.d. December 31, 2022*	*IT Audit Core Banking System Module DDS-TDS*

4. Melakukan audit mendadak terhadap 7 (tujuh) Unit kantor :

4. Conducting unannounced audits of 7 (seven) office units:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Information*
1	Audit Mendadak Capem Duri	15 s.d. 17 Maret 2022 *March 15th to 17th 2022*	*Sudden Audit of Capem Duri*
2	Audit Mendadak Capem Sungai Guntung	22 s.d. 24 Maret 2022 *March 22 to 24, 2022*	*Sudden Audit of Head Office of Sungai Guntung*
3	Audit Mendadak Capem Sungai Pakning	10 s.d. 12 Mei 2022 *May 10 to 12, 2022*	*Sudden Audit of Head Office of Sungai Pakning*
4	Audit Mendadak Capem Belilas	10 s.d. 12 Mei 2022 *May 10 to 12, 2022*	*Head of Belilas Sudden Audit*
5	Audit Mendadak Capem Sorek	15 s.d. 21 September 2022 *September 15 to 21, 2022*	*Capem Sorek Sudden Audit*
6	Audit Mendadak Kedai Bandar Sei Kijang	15 s.d. 21 September 2022 *September 15 to 21, 2022*	*Sudden Audit of Bandar Sei Kijang Shop*
7	Audit Mendadak Capem Tanjung Uban	07 s.d. 09 November 2022 *November 07 to 09, 2022*	*Sudden Audit of Head of Capem Tanjung Uban*

5. Melakukan audit khusus terhadap 1 (satu) isu :

5. Conducting a special audit on 1 (one) issue:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Information*
1	Audit Kebocoran Dokumen	07 s.d. 11 maret 2022 *March 07 to 14, 2022*	*Document Leak Audit*

6. Melakukan audit tematik terhadap 3 (tiga) isu :

6. Conducting thematic audits on 3 (three) issues:

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Information*
1	Audit Tematik *Quality Assurance Core Banking System* (CBS) Syariah	03 s.d. 14 Januari 2022 *January 03 - 14, 2022*	*Sharia Quality Assurance Core Banking System (CBS) Thematic Audit*
2	Audit Tematik Konversi	21 September s.d. 18 Oktober 2022 *September 21 - October 18, 2022*	*Conversion Thematic Audits*
3	Audit Tematik Proses Peralihan Aset & Liabilities Pasca Konversi	31 Oktober 2022 *October 31, 2022*	*Post Conversion Thematic Audit of Assets & Liabilities Transfer Process*

7. Melakukan *Quality Assurance* terhadap 11 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi/Desk, 9 Tim Audit TI, 7 Tim Audit Mendadak dan 1 Tim Audit Tematik proses peralihan aset & liabilitiis pasca konversi.
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit kepada OJK setiap semester.
9. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil Divisi IA, auditor internal diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme "*Sharing Moment*" sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor Divisi IA.

7. Conducted Quality Assurance of 11 Branch General Audit Teams, 8 Divisional/Desk General Audit Teams, 9 IT Audit Teams, 7 Sudden Audit Teams and 1 Thematic Audit Team of post-conversion asset & liability transfer processes.
8. Submit Implementation Reports and Principal Audit Results to OJK every semester.
9. To increase the insight and knowledge of Division IA personnel, internal auditors are enrolled in education, training and seminars related to auditing and its development. The training materials obtained from these activities will later be conveyed to other auditors through the "Sharing Moment" mechanism as input and learning materials to be able to provide added value to all Division IA auditors.

Tabel Pengembangan Kompetensi Auditor Internal Tahun 2022
Table of 2022 Internal Auditor Competency Development

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Training Title*	Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Time and Place of Execution*	Penyelenggara *Organizer*
Syah Ikhwan Mainputra	Pemimpin Bagian Audit Jaringan *Network Audit Section Leader*	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) *Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)*	14 Januari 2022 di Pekanbaru *January 14, 2022 in Pekanbaru*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Inhouse Training Treasury Syariah *Sharia Treasury Inhouse Training*	29 Januari 2022 di Pekanbaru *January 29, 2022 in Pekanbaru*	Muamalat Institute
		Pembekalan Sertifikasi Audit Intern Bank Level 1 / Auditor *Provision of Bank Internal Audit Certification Level 1 / Auditor*	23 – 24 Agustus 2022 di Pekanbaru *August 23 – 24 2022 in Pekanbaru*	PT Asanka Kreasi Mandiri
		Sosialisasi BPP Konversi *Conversion BPP Socialization*	14 – 18 April 2022 di Pekanbaru *April 14-18 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Training Audit Trail dan *Overview* Aplikasi *Core* Banking Syariah *Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications*	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru *October 13 – 14 2022 in Pekanbaru*	PT Multipolar
		Training Strategi Anti *Fraud* Dan Penanganan Fraud yang Efektif *Anti-Fraud Strategy Training and Effective Fraud Handling*	5 – 6 Februari 2022 di Pekanbaru *February 5 – 6, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Webinar 'Kupas Tuntas Akad Murabahah' *Webinar 'Full Peel of Murabahah Contract'*	24 Mei 2022 *May 24, 2022*	Iqtishad Consultan Indonesia
Masnuryadi	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi *Head of Information Technology Audit Section*	Training Online Manajemen Risiko IT *IT Risk Management Online Training*	8 – 10 Maret 2022 di Pekanbaru *March 8 – 10 2022 in Pekanbaru*	Widya Analitic
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) *Risk Management Certification Maintenance Program (SMR)*	8 April 2022 di Pekanbaru *April 8, 2022 in Pekanbaru*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Sosialisasi BPP Konversi *Conversion BPP Socialization*	14 – 18 April 2022 di Pekanbaru *April 14-18, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Pelatihan *Online Certified Penetration Tester* (CPENT) *Socialization of Formation of Cyber Incident Response*	20 – 24 Juni 2022 di Pekanbaru *June 20 – 24, 2022 in Pekanbaru*	PT Multimatics
		Sosialisasi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata *Socialization of Formation of Cyber Incident Response Team (TTIS) for Finance, Trade and Tourism Sector*	5 – 6 Juli 2022 di Pekanbaru *July 5 – 6, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Pembekalan Sertifikasi Audit Intern Bank Level 1 / Auditor *Provision of Bank Internal Audit Certification Level 1 / Auditor*	23 – 24 Agustus 2022 di Pekanbaru *August 23 – 24, 2022 in Pekanbaru*	PT Asanka Kreasi Mandiri
		Sosialisasi Program Sertifikasi CIAE dan Pelatihan Teknis Subtantif Bagi Korporasi *Socialization of the CIAE Certification Program and Substantive Technical Training for Corporations*	20 September 2022 di Pekanbaru *September 20, 2022 in Pekanbaru*	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Training Audit *Trail* dan *Overview* Aplikasi Core Banking Syariah *Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications*	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru *October 13 – 14, 2022 in Pekanbaru*	PT. Multipolar
		Pelatihan *Certified Information System* Auditor (CISA) *Certified Information System Auditor (CISA) Training*	17 – 21 Oktober 2022 di Pekanbaru *October 17 – 21, 2022 in Pekanbaru*	Widya Analitic
		Sosialisasi User Guide Narasumber di *E-Learning* BRK Syariah *Academy* *Dissemination of Resource Person User Guide in BRK Syariah Academy E-Learning*	21 November 2022 di Pekanbaru *November 21, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Ujian Certified Information System Auditor (CISA) *Certified Information System Auditor (CISA) Exam*	29 Desember 2022 di Pekanbaru *December 29, 2022 in Pekanbaru*	Widya Analitic

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Training Title*	Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Time and Place of Execution*	Penyelenggara *Organizer*
Raja Bambang Gunawan	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu dan Tindak Lanjut Hasil Audit *Head of Quality Control and Follow-Up of Audit Results*	Training Strategi Anti Fraud Dan Penanganan Fraud yang Efektif *Anti-Fraud Strategy Training and Effective Fraud Handling*	5 – 6 Februari 2022 di Pekanbaru *February 5 – 6, 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko (SMR) Tema Aspek Hukum dalam Penagihan Pembiayaan Bermasalah *Risk Management Certificate Maintenance Program (SMR) Themed Legal Aspects in Billing Problematic Financing*	18 Februari 2022 di Pekanbaru *February 18, 2022 in Pekanbaru*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Training Quality Assurance *Quality Assurance Training*	8 – 9 Maret 2022 di Pekanbaru *March 8 – 9 2022 in Pekanbaru*	*Banking Finance*
		Sosialisasi BPP Konversi *Conversion BPP Socialization*	14 – 18 April 2022 di Pekanbaru *April 14-18 2022 in Pekanbaru*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Sosialisasi Program Sertifikasi CIAE dan Pelatihan Teknis Subtantif Bagi Korporasi *Socialization of the CIAE Certification Program and Substantive Technical Training for Corporations*	20 September 2022 *September 20, 2022*	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
		Refreshment Sertifikat Audit Intern Bank *Bank Internal Audit Certificate Refreshment*	27 September 2022 di Pekanbaru *September 27, 2022 in Pekanbaru*	TD Consultant Management & Bussiness Development
		Training Audit *Trail* dan *Overview* Aplikasi *Core* Banking Syariah *Audit Trail Training and Overview of Sharia Banking Core Applications*	13 – 14 Oktober 2022 di Pekanbaru *October 13 – 14 2022 in Pekanbaru*	PT. Multipolar
		Pelatihan Taksir Gadai Emas (RAHN) *Batch 3* *Gold Pawn Estimator Training (RAHN) Batch 3*	27 – 28 November 2022 di Pekanbaru *November 27 – 28 2022 in Pekanbaru*	Muamalat Institute

Program Pengendalian Mutu

Divisi IA memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, dengan melakukan:

1. Supervisi, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. *Review* Internal, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, Divisi IA melalui Pemimpin DIA dan/atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap terhadap 11 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi/ Desk, 9 Tim Audit TI, 7 Tim Audit Mendadak dan 1 Tim Audit Tematik proses peralihan aset & liabilitiis pasca konversi. Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, Divisi IA juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.
3. *Quality Assurance* Tim Audit Umum Cabang :

Quality Control Program

The IA Division has a program to evaluate the quality of the audit activities it performs, by conducting:

1. *Supervision, to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal Review, in maintaining the quality of audit activities and maintaining the independence and objectivity of audit implementation, the IA Division through the DIA Leader and/or the Head of the Quality Control & Follow Up Audit Results Section has carried out Quality Assurance (QA) duties on 11 Branch General Audit Teams, 8 General Division/Desk Audit Teams, 9 IT Audit Teams, 7 Sudden Audit Teams and 1 Thematic Audit Team of post-conversion asset & liability transfer process. In addition to implementing QA to maintain audit quality, the IA Division also conducts education in order to accelerate the completion of follow-up on internal audit results.*
3. *Branch General Audit Team Quality Assurance :*

No.	Quality Assurance	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Quality Assurance*
1	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	21 Februari 2022	*General Audit of Tanjung Pinang Sharia Branch*
2	Audit Umum Cabang Dumai	21 Februari 2022	*Dumai Branch General Audit*
3	Audit Umum Cabang Bagan Siapi Api dan Capem Bagan Batu	21 Februari 2022	*General Audit of the Bagan Siasi Api and Sub-Branch Office of Bagan Batu*
4	Audit Umum Cabang Jakarta	14 Juni 2022	*Jakarta Branch General Audit*
5	Audit Umum Cabang Utama dan Kedai Sail	14 Juni 2022	*Main Branch and Kedai Sail General Audit*

No.	Quality Assurance	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Quality Assurance*
6	Audit Umum Cabang Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau dan Capem Ahmad Yani.	14 Juni 2022 *June 14, 2022*	*General Audit Branch Pekanbaru, Capem Tangkerang, Capem Rumbai, Capem Panam, Capem Tambusai, Capem Jl Riau and Capem Ahmad Yani.*
7	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Ujung Batu, Capem Kota Tengah, Capem Dalu Dalu, Kedai Rantau Kasai dan Kedai kabun.	30 September 2022 *September 30, 2022*	*General Audit of Pasir Pengaraian Branch, Head of Ujung Batu Sub-district Head, Central City Head of Office, Dalu Dalu Head of Branch, Rantau Kasai Shop and Kabun Shop.*
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain dan Kedai Air Tiris.	30 September 2022 *September 30, 2022*	*General Audit of the Bangkinang Branch, Branch Office of Fold Cloth and Tiris Air Shop.*
9	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga dan Capem Tarempa.	09 November 2022 *November 09, 2022*	*General Audit Branch of Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep, Capem Daik Lingga and Capem Tarempa.*
10	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja, Capem Batu Aji dan Capem Botania.	20 November 2022 *November 20, 2022*	*General Audit of Batam Branch, Sub-district Head of Lubuk Baja, Head of Batu Aji and Head of Botania.*
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Panam dan Capem Syariah Duri.	23 Desember 2022 *December 23, 2022*	*General Audit of Pekanbaru Sharia Branch, Head of Panam Sharia Branch and Head of Sharia Duri Branch.*

4. *Quality Assurance* Tim Audit Umum Divisi/Desk :

4. *Division/Desk General Audit Team Quality Assurance :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Explanation*
1	Audit Umum Divisi Kepatuhan	10 Maret 2022 *March 10, 2022*	*General Audit of the Compliance Division*
2	Audit Umum Divisi MSDM	10 Maret 2022 *March 10, 2022*	*HR Division General Audit*
3	Audit Umum Divisi MKM	18 April 2022 *April 18, 2022*	*MHM Division General Audit*
4	Audit Umum Divisi Konsumer	14 April 2022 *April 14, 2022*	*Consumer Division General Audit*
5	Audit Umum Divisi Komersial	18 April 2022 *April 18, 2022*	*Commercial Division General Audit*
6	Audit Umum Divisi Financial & Reporting	30 September 2022 *September 30, 2022*	*General Audit of Financial & Reporting Division*
7	Audit Umum Desk Digital Banking	30 September 2022 *September 30, 2022*	*General Audit Desk Digital Banking*
8	Audit Umum Divisi Umum	23 Desember 2022 *December 23, 2022*	*General Audit of the General Division*

5. *Quality Assurance* Tim Audit TI :

5. *IT Audit Team Quality Assurance :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Explanation*
1	Audit TI Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	02 Februari 202 *February 02, 2020*	*IT Audit of Bank Indonesia Payment System (SPBI)*
2	Audit TI Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	10 Maret 2022 *March 10, 2022*	*IT Audit of Card-Based Payment Instruments (APMK)*
3	Audit TI Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	14 April 2022 *April 14, 2022*	*Financial Information Service System IT Audit (SLIK)*
4	Audit TI Fungsi Pengelolaan TI	03 Juni 2022 *June 03, 2022*	*IT Audit IT Management Function*
5	Audit Seluruh Aspek TI Terkait POJK MRTI	01 Juli 2022 *July 01, 2022*	*Audit of All IT Aspects Related to POJK MRTI*
6	Audit TI Aplikasi BRKS Mobile	08 November 2022 *November 08, 2022*	*BRKS Mobile Application IT Audit*
7	Audit TI Sistem E Dapem PNS	21 November 2022 *November 21, 2022*	*IT Audit E Dapem PNS System*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Explanation*
8	Audit TI *Core Bangking System* Modul FNS	14 Desember 2022 *December 14, 2022*	*IT Audit Core Banking System FNS Module*
9	Audit TI *Core Bangking System* Modul DDS-TDS	14 Desember 2022 *December 14, 2022*	*IT Audit Core Banking System Module DDS-TDS*

6. *Quality Assurance* Tim Audit Mendadak :

6. *Sudden Audit Team Quality Assurance :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Explanation*
1	Audit Mendadak Capem Duri	30 Maret 2022 *March 30, 2022*	*Sudden Audit of Capem Duri*
2	Audit Mendadak Capem Sungai Guntung	30 Maret 2022 *March 30, 2022*	*Sudden Audit of Head Office of Sungai Guntung*
3	Audit Mendadak Capem Sungai Pakning	09 Mei 2022 *May 09, 2022*	*Sudden Audit of Head Office of Sungai Pakning*
4	Audit Mendadak Capem Belilas	09 Mei 2022 *May 09, 2022*	*Head of Belilas Sudden Audit*
5	Audit Mendadak Capem Sorek	30 September 2022 *September 30, 2022*	*Capem Sorek Sudden Audit*
6	Audit Mendadak Kedai Bandar Sei Kijang	30 September 2022 *September 30, 2022*	*Sudden Audit of Bandar Sei Kijang Shop*
7	Audit Mendadak Capem Tanjung Uban	09 November 2022 *November 09, 2022*	*Sudden Audit of Head of Capem Tanjung Uban*

7. *Quality Assurance* Tim Audit Tematik :

7. *Quality Assurance Thematic Audit Team :*

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*	*Explanation*
1	Audit Tematik Proses Peralihan Aset & Liabilities Pasca Konversi	30 Desember 2022 *Desember 30, 2022*	*Post Conversion Thematic Audit of Assets & Liabilities Transfer Process*

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Hasil Pemantauan Komitmen Auditee terhadap Tindak Lanjut Hasil Audit Umum sampai dengan Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Audit Tahun 2020

   Dari total temuan sebanyak 1.142 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.141 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjut sebanyak 1 temuan, yaitu sebagai berikut :

Audit Findings and Follow Up Results

The results of monitoring the auditee's commitment to the follow-up of the results of the general audit up to December 2022 are as follows:

1. *2020 Audit Implementation*

   Out of a total of 1,142 findings, 1,141 findings have been completed and 1 finding is still in the follow-up process, as follows:

No	Divisi/Cabang/Capem/Kedai/TI *Division/Branch/Sub-Branch/Store/IT*	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *Currently in Follow Up Process*	Lewat Komitmen *Through Commitment*
1	Audit Umum Cabang Pasir Pangaraian *General Audit of Pasir Pangaraian Branch*	1	0
	Total	**1**	**0**

2. Pelaksanaan Audit Tahun 2021

   Dari total temuan sebanyak 1.244 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.224 temuan dan yang dalam proses tindaklanjut sebanyak 20 temuan, yaitu sebagai berikut :

2. *Audit Implementation in 2021*

   From a total of 1,244 findings, 1,224 findings have been completed and 20 findings are in the process of being followed up, as follows:

No	Divisi/Cabang/Capem/ Kedai/TI	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *Currently in Follow Up Process*	Lewat Komitmen *Through Commitment*	*Division/Branch/Sub-Branch/ Store/IT*
1	Audit Umum Divisi Dana & Jasa	1	0	*General Audit of Funds & Services Division*
2	Audit Umum Cabang Ranai	1	0	*Ranai Branch General Audit*
3	Audit Umum Capem Kota Baru	1	0	*General Audit of Capem Kota Baru*
4	Audit TI Jaringan ATM	4	0	*ATM Network IT Audit*
5	Audit TI CBSS Modul CIS	5	0	*CBSS IT Audit CIS Module*
6	Audit TI Laku Pandai	3	0	*Smart IT Audit*
7	Audit TI Aplikasi Payment	5	0	*Payment Application IT Audit*
	Total	**20**	**0**	***Total***

3. Pelaksanaan Audit Tahun 2022
   Dari total temuan sebanyak 770 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 706 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjut sebanyak 64 temuan, yaitu sebagai berikut :

3. *Audit Implementation in 2022*
   From a total of 770 findings, 706 findings have been completed and 64 findings are still in the follow-up process, as follows:

No	Divisi/Cabang/Capem/Kedai/ TI	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *Currently in Follow Up Process*	Lewat Komitmen *Through Commitment*	*Division/Branch/Sub-Branch/ Store/IT*
1	Audit Umum Divisi F & R	1	0	*F&R Division General Audit*
2	Audit Umum Cabang Dumai	2	0	*Dumai Branch General Audit*
3	Audit Umum Cabang Utama	4	0	*Main Branch General Audit*
4	Audit Umum Capem Tangkerang	1	0	*General Audit of Capem Tangkerang*
5	Audit Umum Capem Rumbai	1	0	*General Audit of Capem Rumbai*
6	Audit Umum Capem Lipat Kain	2	0	*General Audit of the Branch Office for Folding Cloth*
7	Audit Umum Kedai Air Tiris	1	0	*General Audit of Tiris Water Shop*
8	Audit Umum Capem Koto Tengah	1	0	*General Audit of Capem Koto Tengah*
9	Audit Umum Kedai Kabun	3	0	*General Audit of Kedai Kabun*
10	Audit Umum Kedai Rantau Kasai	1	0	*General Audit of Rantau Kasai Stores*
11	Audit Umum Cabang Batam	1	0	*Batam Branch General Audit*
12	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang 1	11	0	*Tanjung Pinang Branch General Audit 1*
13	Audit Umum Capem Dabo Singkep	6	0	*Head of General Audit Dabo Singkep*
14	Audit Umum Capem Tarempa	7	0	*General Audit of Capem Tarempa*
15	Audit Umum Capem Daik Lingga	8	0	*Head of General Audit Daik Lingga*
16	Audit Mendadak Capem Belilas	1	0	*Head of Belilas Sudden Audit*
17	Audit Mendadak Capem Sorek	2	0	*Capem Sorek Sudden Audit*
18	Audit TI SLIK	4	0	*SLIK IT Audit*
19	Audit TI POJK MRTI	7	0	*IT Audit POJK MRTI*
	Total	**64**	**0**	***Total***

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan, yang dapat menjaga dan mengamankan aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Bank telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi *(four eyes principle)* antara Unit Kerja Operasional (*business unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian, agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

The internal control system is a monitoring process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis, which is able to safeguard and secure the Bank's assets, guarantee the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects as well as increasing cost effectiveness and efficiency. The Bank has implemented the principle of separation of functions (four eyes principle) between the Operational Work Units (business units) and the Work Units that carry out the control, so that everyone in their position does not have the opportunity to make and hide mistakes or irregularities in the implementation of their duties at all levels of the organization.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal di BRK Syariah memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Internal Control System Objectives

The implementation of the internal control system at BRK Syariah has the objective of:

1. *Guarantee that all business activities have been carried out in accordance with statutory provisions and regulations, both provisions issued by the government, the Financial Services Authority and internal policies, provisions and procedures stipulated by the Board of Directors.*
2. *Ensuring the availability of complete, accurate, effective, timely and relevant reports needed in order to make the right and accountable decisions.*
3. *Improving the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss.*
4. *Identifying weaknesses and assessing deviations early and reassessing the fairness of existing policies and procedures at the Bank on an ongoing basis.*

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal BRK Syariah mengadopsi ketentuan sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, BRK Syariah menerapkan pendekatan *Three Lines of Defence* sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yakni:

Internal Control System Framework

BRK Syariah's internal control system adopts the provisions of the internal control system from COSO. An effective internal control system can help the Board of Directors and Board of Commissioners maintain bank assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, increase compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, deviations and breaches of prudential aspects.

In order to increase the effectiveness of internal control, BRK Syariah applies the Three Lines of Defense approach as a layered defense mechanism, namely:

1. ***First Line of Defense***
   Risk Owner/Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. *Risk Taking Unit* memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari-hari serta melakukan tindakan perbaikan dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

2. ***Second Line of Defense***
   Risk Control adalah Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan *review* atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional. Sedangkan Divisi Kepatuhan memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan aktivitas Bank yang dilakukan oleh *risk taking unit* mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. ***Third Line of Defense***
   Risk Assurance dijalankan oleh fungsi Internal Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian Internal dalam rangka memberikan *assurance* yang independen dan objektif. Divisi Internal Audit harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi BRK Syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sistem pengendalian internal pada BRK Syariah adalah:

1. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian internal yang ditetapkan.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal Bank.
3. melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam

1. ***First Line of Defence***
   The Risk Owner/Risk Taking Unit acts as the first line of defense and is responsible for identifying, evaluating, controlling and mitigating risks in operational activities. The Risk Taking Unit has primary responsibility for managing risk exposure in daily activities and taking corrective actions to overcome weaknesses in processes and controls.

2. ***Second Line of Defence***
   Risk Control is the Risk Management Division and the Compliance Division acts as a key unit in providing the second level of defense through an independent monitoring function. The Risk Management Division has reviewed the completeness and accuracy of risk identification, measurement, monitoring, control and reporting, as well as the adequacy of the mitigation scenarios proposed by operational work units. Meanwhile, the Compliance Division ensures that in every implementation of the Bank's activities carried out by the risk taking unit, it follows the applicable rules and regulations.

3. ***Third Line of Defense***
   Risk Assurance is carried out by the Internal Audit function to evaluate the adequacy of Risk Management policies, strategies and frameworks as well as the effectiveness of Internal controls in order to provide independent and objective assurance. The Internal Audit Division must be able to evaluate and play an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of Bank operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by the Bank's management.

Oversight By Management and Control Culture

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in the supervision of the BRK Syariah organization. The parties involved in overseeing the internal control system at BRK Syariah are:

1. *The Board of Directors is responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system operates in a safe and sound manner in accordance with the established internal control objectives.*
2. *The Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies that determine the Bank's internal control.*
3. *evaluate and play an active role in improving the*

meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan independensi dan keahlian auditor yang memadai. Divisi Internal Audit mempunyai tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank.

effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by taking into account the independence and adequate expertise of the auditor. The Internal Audit Division is responsible for examining and evaluating the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh Divisi Internal Audit sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Risk Identification and Assessment

Risk assessment is a series of actions carried out by the Board of Directors in order to identify, analyze and assess the risks faced by the Bank in order to achieve the set targets. Risk assessment must also be carried out by the Internal Audit Division so that the audit scope is broader and more comprehensive.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian memberikan keyakinan bahwa pejabat dan pegawai Bank melaksanakan arahan Direksi dan Dewan Komisaris secara efektif.

Control Activities and Separation of Functions

Control activities include establishing control policies and procedures as well as earlier verification processes to ensure that these policies and procedures are consistently complied with, and are activities that are an integral part of every function or daily activity of the Bank. Control activities provide confidence that Bank officials and employees carry out the directives of the Board of Directors and Board of Commissioners effectively.

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi eksternal) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sistem pengendalian intern Bank menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini secara jelas tercermin dalam struktur organisasi BRK Syariah dalam menetapkan fungsi dan tanggung jawab (*job desc*) dan pemisahan fungsi pada *back office*, *front office* dan *middle office*.

Accounting, Information, and Communication Systems

An effective internal control system at least provides adequate and comprehensive internal data/information regarding finance, compliance with applicable rules and regulations, market information (external conditions) and any events and conditions needed in the context of making appropriate and accountable decisions. . The information system must be able to produce reports on business activities, financial conditions, implementation of risk management and fulfillment of provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The Bank's internal control system provides an effective communication channel so that all Bank employees fully understand and comply with the policies and procedures that apply in carrying out their duties and responsibilities. This is clearly reflected in the organizational structure of BRK Syariah in determining functions and responsibilities (job descriptions) and segregation of functions in the back office, front office and middle office.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal agar meningkatkan efektivitas kapasitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dilakukan oleh seluruh unit operasional dan bisnis serta Divisi Internal Audit secara berkala dan terus menerus sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

Monitoring Activities and Correction of Deviations

The Bank monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in relation to changes in internal and external conditions in order to increase the effectiveness of the capacity of the internal control system. Monitoring is carried out by all operational and business units as well as the Internal Audit Division periodically and continuously as part of the Bank's daily activities including periodic evaluations.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BRK Syariah melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Implementation of Internal Control

Based on the internal control framework and components that have been prepared, BRK Syariah carries out internal controls to ensure the adequacy of financial control, operational effectiveness and efficiency, as well as compliance with applicable laws and regulations.

Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan Bank, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.
2. BRK Syariah dalam penetapan strategi bisnis telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BRK Syariah, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BRK Syariah.
3. BRK Syariah telah melaksanakan proses pengendalian keuangan guna memantau pencapaian kinerja secara berkala Bank melalui Divisi Perencanaan Strategis yang disampaikan dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut oleh Direksi.
4. BRK Syariah telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala.

Financial Control

To ensure the successful implementation of strategic plans that support the development of the Bank, BRK Syariah has implemented the following:

1. *The Board of Directors has prepared and obtained approval from the Board of Commissioners on the strategic plan and Annual Work Plan and Budget (RKAT) which are included in the Bank Business Plan (RBB) as a 3 (three) year business strategy blueprint and have been distributed to related parties.*
2. *BRK Syariah in determining its business strategy has taken into account the impact on BRK Syariah's capital, including projected capital and KPMM (Minimum Capital Adequacy Requirement), as well as monitoring internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect BRK Syariah's business strategy.*
3. *BRK Syariah has carried out a financial control process to monitor the achievement of the Bank's performance on a regular basis through the Strategic Planning Division which is conveyed at the Board of Directors meeting when follow-up is required by the Board of Directors.*
4. *BRK Syariah has ensured that all accounting policies and standards are updated regularly.*

Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah telah melengkapi *standar operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BRK Syariah terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.

Operational Control

To be able to support overall operational risk control, BRK Syariah has implemented the following:

1. *BRK Syariah has completed a standard operating procedure/work manual detailing the work procedures for every banking operational transaction carried out at BRK Syariah regarding new products and activities including mitigating related operational risks.*

2. BRK Syariah telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional Bank.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:
   a. BRK Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
   b. BRK Syariah telah memiliki Satuan Kerja/Divisi Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BRK Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
2. BRK Syariah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
3. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
4. BRK Syariah melalui Divisi Kepatuhan mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.

2. BRK Syariah has established a good organizational structure, equipped with a monitoring/control unit so that it can support the operational control of the Bank.
3. Compliance with other laws and regulations, namely:
   a. BRK Syariah has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses, if they occur.
   b. BRK Syariah has a Compliance Work Unit/Division that is independent from operational work units in carrying out the compliance function.

Compliance with Applicable Laws and Regulations

To ensure BRK Syariah's compliance with the applicable laws and regulations, BRK Syariah has implemented the following:

1. BRK Syariah has a commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct these risk weaknesses, if they occur.
2. BRK Syariah establishes compliance systems and procedures that will be used to compile the Bank's internal regulations and guidelines so that they comply with applicable laws and regulations including Sharia Principles.
3. BRK Syariah in implementing the compliance function ensures that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of OJK, Bank Indonesia and applicable laws and regulations including Sharia Principles.
4. BRK Syariah through the Compliance Division coordinates and requests related work units to make improvements to Bank policies and procedures to comply with OJK, Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations, including Sharia Principles.
5. BRK Syariah in implementing the compliance function takes precautionary measures so that the policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from OJK regulations and statutory provisions including Sharia Principles.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas yang berjalan dengan baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berperan dalam melakukan pengawasan jalannya sistem pengendalian internal Bank oleh Direksi.

Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Adapun terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Evaluation of Internal Control Effectiveness

During 2022, BRK Syariah has implemented an internal control system in accordance with the principles of control and evaluation carried out by the Bank as a whole, showing good quality. The Board of Commissioners assisted by the Audit Committee plays a role in supervising the running of the Bank's internal control system by the Board of Directors.

The Internal Control System is designed to properly manage and control risks and not to eliminate those risks. As for issues related to the adequacy of internal control, they have been reported to the Board of Directors and follow-up steps have been taken to minimize risk. Reports are also submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa BRK Syariah telah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi Bank tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) dalam mendukung pencapaian tujuan Bank. Hal tersebut tercermin dari operasional BRK Syariah berjalan secara efektif dan efisien, penyampaian laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan secara tepat waktu, pengamanan aset Bank dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors and Board of Commissioners state that BRK Syariah has an effective and adequate internal control system in managing the risks faced by the Bank while remaining within tolerance limits (risk appetite) in supporting the achievement of the Bank's objectives. This is reflected in the effective and efficient operation of BRK Syariah, submission of accurate and reliable financial reports in a timely manner, safeguarding of Bank assets and compliance with applicable laws and regulations.

FUNGSI KEPATUHAN
Compliance Function

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. BRK Syariah telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. BPP Fungsi Kepatuhan mengatur mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang diharapkan dapat menjadi *forward looking* dan lebih sensitif dalam menghadapi dinamika kegiatan usaha Bank. Dalam rangka perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Selain itu, dalam rangka mendukung terciptanya fungsi kepatuhan Syariah dalam memastikan kegiatan operasional dan bisnis BRK Syariah telah memenuhi prinsip Syariah, BRK Syariah telah menerbitkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah. BPP Kepatuhan Syariah mengatur mengenai Tugas dan Tanggung Jawab serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Syariah, Proses Pengujian Kepatuhan Syariah dan Proses Pengawasan Kepatuhan Syariah.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan BRK Syariah dijalankan Divisi Kepatuhan, yang berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan memiliki 3 (dua) Bagian, yaitu (1) Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan (2) Bagian Anti *Money Laundering* (AML) & (3) *Counter Terrorism Financing* (CTF), dengan skema sebagai berikut:

The Compliance Function is a series of actions or steps that are preventive in nature to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank comply with the provisions of Bank Indonesia and OJK as well as the applicable laws and regulations, including Sharia Principles. . BRK Syariah already has a Company Manual (BPP) regarding the Implementation of the BRK Syariah Compliance Function as stated in the Decree of the Board of Directors No. 046/KEPDIR/2019 dated 21 August 2019 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function. BPP Compliance Function regulates the Role and Function of Compliance and the Compliance Work Unit, which is expected to be forward looking and more sensitive in dealing with the dynamics of the Bank's business activities. In the context of changing business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function has been updated as stated in the Directors' Decree No. 046/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function.

In addition, in order to support the creation of a Sharia compliance function in ensuring that the operational and business activities of BRK Syariah comply with Sharia principles, BRK Syariah has issued a Sharia Compliance Company Manual (BPP) as stated in the Directors Decree No. 049/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Sharia Compliance Company Manual (BPP). The Sharia Compliance BPP regulates the Duties and Responsibilities as well as the Implementation of the Sharia Compliance Function, the Sharia Compliance Testing Process and the Sharia Compliance Supervision Process.

Compliance Function Organizational Structure

The BRK Syariah Compliance function is carried out by the Compliance Division, which is under the Director of Compliance and Risk Management. The organizational structure of the Compliance Division has 3 (two) Sections, namely (1) Compliance, Policy & GCG Section and (2) Anti Money Laundering (AML) & (3) Counter Terrorism Financing (CTF) Section, with the following scheme:

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan
Compliance Division Organizational Structure

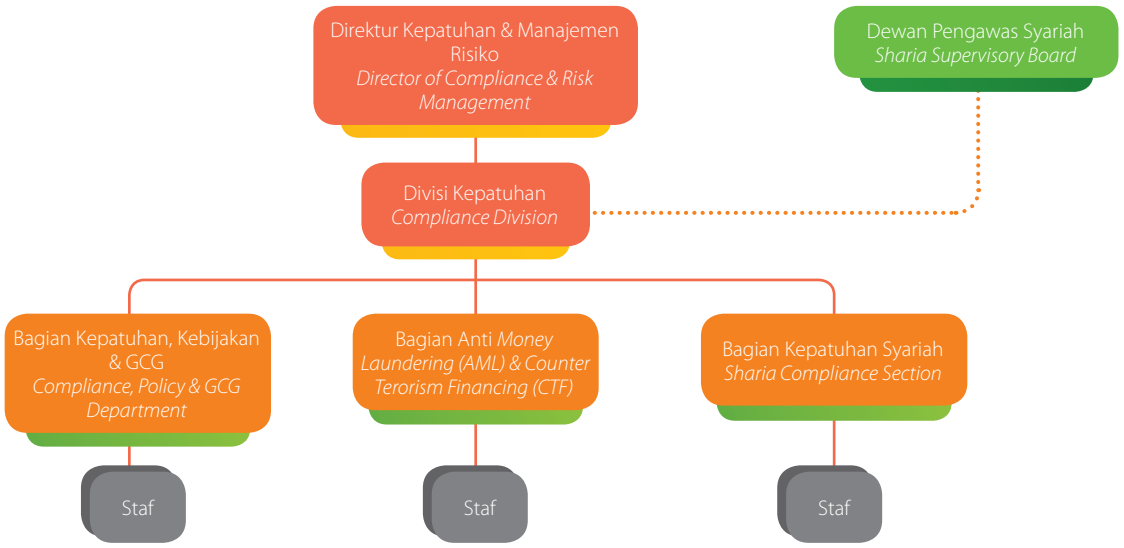

Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan

Uraian lengkap profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2022, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di BRK Syariah adalah Sdr. Fajar Restu Febriansyah yang diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 15 November 2021 sampai dengan 14 November 2026.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah dan dinyatakan lulus oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 99/D.03/2022 tanggal 04 Juli 2022 . Adapun pengangkatan Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah ditetapkan pada RUPS LB Sirkuler berdasarkan Akta RUPS LB Sirkuler No. 17 tanggal 14 Juni 2022, yang efektif berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan OJK.

Uraian lengkap Profil Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Direksi, Bab Profil Perusahaan.

Profile of the Head of the Compliance Division

A complete description of the profile of the Head of the Compliance Division can be seen in the Profile section of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Directors in Charge under of Compliance Function

Throughout 2022, the Director in charge of the Compliance Function at BRK Syariah will be Mr. Fajar Restu Febriansyah who was appointed as Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 15 November 2021 with a term of office starting from 15 November 2021 to 14 November 2026.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Financial Services Authority (OJK) has carried out a Fit and Proper Test for Mr. Fajar Restu Febriansyah as a candidate for Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah and was declared passed by the OJK based on the Decision of Members of the OJK Board of Commissioners Number 99/D.03/2022 dated 04 July 2022. As for the appointment of Mr. Fajar Restu Febriansyah as a candidate for Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah was determined at the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the Deed of Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 17 dated 14 June 2022, which is effective from the issuance date of the OJK approval letter.

A complete description of the Profile of the Director of Compliance and Risk Management can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Directors, Company Profile Chapter.

Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank dilakukan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
   h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan;
   i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

   Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Implementation of the Duties of the Director in charge of the Compliance Function

In the Guidelines for the Implementation of the Sharia BRK Compliance Function, the functions, duties and responsibilities of the Compliance Director are as follows:

1. *The Compliance Director functions to carry out a series of actions or steps to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including the Principles Sharia, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorized supervisory authorities.*

2. *Duties and responsibilities of the Director of Compliance in general, include:*
   a. Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture;
   b. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;
   c. Establish compliance systems and procedures that will be used to compile the Bank's internal regulations and guidelines;
   d. Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are carried out based on sharia principles in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and the applicable laws and regulations;
   e. Minimizing Bank Compliance Risk;
   f. Take preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from Sharia principles and provisions of laws and regulations;
   g. Monitor and maintain the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorized supervisory authorities;
   h. Coordinate with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function against Sharia Principles which is carried out jointly with the Compliance Division;
   i. Perform other tasks related to the Compliance Function.

   The duties and responsibilities mentioned above do not eliminate the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, if certain actions require decisions from all members of the Bank's Board of Directors.

3. Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi:
   a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya;
   b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab;
   c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank;
   d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan;
   e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan peraturan dan perundang-undangan;
   f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas;
   g. Menyampaikan laporan semesteran kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
   h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi;
   i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan;
   k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan;
   l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan;
   n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
   o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
   p. Melaporkan kepada OJK setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Prinsip Syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Duties and responsibilities in implementing the Bank's Compliance Function, include:
   a. Leading and coordinating the implementation of the activities of the Compliance Division, and other Divisions under its organizational structure;
   b. Carry out coordination with other members of the Board of Directors in order to ensure the smooth running of duties and responsibilities;
   c. Monitor and evaluate the Bank's compliance risk;
   d. Develop policies and procedures in the Compliance Division;
   e. Conduct testing on drafts and policy changes to ensure compliance with Sharia principles and laws and regulations;
   f. Determine the steps needed to fulfill the Bank's compliance with the provisions and commitments of the Bank with the supervisory authority;
   g. Submit semi-annual reports to the OJK regarding the implementation of the Compliance Director's duties with a copy to the Board of Commissioners;
   h. Monitor the implementation of the principles of good governance in accordance with the provisions at all levels of the organization;
   i. Ensuring that the precautionary principle in each of the Board of Directors' policies complies with sharia principles, the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and the applicable laws and regulations;
   j. Establish a work plan and evaluate the implementation of compliance risk management;
   k. Evaluate and submit reports that are the responsibility of the Director of Compliance;
   l. Coordinate and request related work units to make improvements to Bank policies and procedures according to sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;
   m. Coordinate with other Directors to optimize the Bank's activities in line with the Compliance Culture;
   n. Report on the implementation of duties and responsibilities on a quarterly basis to the Main Director with a copy to the Board of Commissioners;
   o. Coordinate with other Directors on steps to be taken regarding compliance violations;
   p. Report to OJK any policies and/or decisions of the Board of Directors which, according to the Compliance Director, have deviated from Sharia Principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;

q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.

4. Tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) meliputi:
   a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan OJK dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
   b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
   c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*;
   d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif;
   e. Memastikan bahwa nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan keluar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan BRK Syariah berada di Kantor Pusat yaitu Divisi Kepatuhan.
Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan pengelolaan terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

q. Carry out his responsibilities as a member of the Board of Directors.

4. Duties and responsibilities in implementing the Anti-Money Laundering (APU) and Combating the Financing of Terrorism (PPT) programs include:
   a. Establish the necessary steps to ensure that the Bank has complied with OJK and PPATK regulations concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs through preparing Guidelines for Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs;
   b. Submit reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and Foreign Fund Transfers and Integrated Service User Information Systems (SIPESAT) that have been prepared by the Compliance Division to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK);
   c. Planning and monitoring the Risk Based Approach Program for Updating Customer Data;
   d. Ensuring that the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Programs has been implemented effectively;
   e. Ensure that customers considered to have high risk, including state officials, and/or suspicious financial transactions, cash financial transactions and domestic and foreign fund transfer transactions have been handled and reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with BPP APU and PPT .

Compliance Work Unit

The BRK Syariah Compliance Work Unit is located at the Head Office, namely the Compliance Division.
Duties and Responsibilities of the Compliance Division include the following:

1. Make steps in order to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization;
2. Perform management of Compliance Risk with reference to Regulatory regulations regarding the implementation of risk management for Commercial Banks;
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the applicable laws and regulations;
4. Reviewing and/or recommending updating and perfecting policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank so that they comply with sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
7. Melakukan monitoring Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang dilakukan secara berkesinambungan;
8. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif calon pengurus Bank;
9. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) kesiapan operasional pembukaan, perubahan status dan relokasi jaringan kantor Bank sesuai ketentuan;
10. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan regulator yang menyangkut penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
11. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
12. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
13. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
14. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
15. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif dan memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
17. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank;
18. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;

5. Make efforts to ensure that policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities comply with Sharia Principles, Regulatory provisions and applicable laws and regulations;

6. Ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Regulators and/or other authorized supervisory authorities;
7. Monitor the Compliance Culture in the Bank's office network on an ongoing basis;
8. Prepare a compliance checklist for administrative requirements documents for prospective Bank management;
9. Prepare a compliance checklist for operational readiness for opening, changing status and relocating the Bank's office network according to regulations;

10. Assisting the Compliance Director in determining the necessary steps to ensure that the Bank has complied with regulatory regulations concerning the implementation of anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs through the preparation of Guidelines for Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs;

11. Analyze on a regular basis the risk assessment of money laundering and/or terrorism financing crimes related to its customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or distribution networks (delivery channels);
12. Develop, update, and propose policies and procedures for implementing the APU and PPT programs;

13. Monitor customer accounts and implementation of customer transactions and evaluate the results of monitoring and analysis of customer transactions to ensure whether or not there is a Suspicious Financial Transaction, Cash Financial Transaction and/or financial transaction of fund transfers to and from abroad;

14. Ensuring updating of customer data and profiles as well as customer transaction data and profiles;
15. Ensuring that high-risk business activities for Money Laundering and/or Terrorism Financing are effectively identified and ensuring identification of high-risk areas related to the implementation of the APU and PPT programs;

16. Receiving, analyzing, and compiling reports on Suspicious Financial Transactions and/or cash transactions submitted by work units;

17. Obtain access to the required information in all organizational units of the Bank;
18. Coordinating and monitoring the implementation of the APU and PPT programs by the relevant work units;

19. Menyusun laporan GCG Bank, termasuk melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai ketentuan regulator;
20. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
21. Memantau penyampaian laporan kepada regulator dan pihak eksternal lainnya oleh satuan kerja terkait;
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
23. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

A. Rencana Evaluasi Pedoman Internal

1. Melakukan *review* dan menyusun kembali Pedoman/Kebijakan di lingkungan Unit kerja Kepatuhan sebagai Pedoman/Kebijakan untuk BRK Syariah, meliputi:
   - BPP Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG);
   - BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan;
   - BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
   - Pedoman Kerja Direksi;
   - BPP Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*);
   - BPP Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
   - BPP Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
   - Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
2. Menyusun Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan Syariah
3. Penyempurnaan kebijakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada peraturan regulator lainnya.

B. Rencana Kegiatan untuk Mendorong dan/atau Memelihara Budaya Kepatuhan, Termasuk Rencana Sosialisasi Ketentuan

1. Melakukan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal Bank.
2. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank.
3. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kode Etik Kepatuhan dan ketentuan internal Bank lainnya serta pengukuran budaya kepatuhan melalui kegiatan *monitoring* dan pengujian kepatuhan pada jaringan kantor Bank (yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Internal Audit), serta memberikan pelatihan/sosialisasi

19. Prepare the Bank's GCG report, including conducting a self-assessment of the implementation of GCG according to regulatory provisions;
20. Monitor the development of systems and procedures related to processes that are under the scope of their authority;
21. Monitoring the submission of reports to regulators and other external parties by the relevant work units;
22. Prepare a report on the implementation of the duties of the Director of Compliance;
23. Perform other tasks related to the Compliance Function in accordance with applicable regulatory provisions.

Compliance Function Work Program for 2022

A. Internal Guideline Evaluation Plan

1. *Reviewing and rearranging the Guidelines/Policies within the Compliance Work Unit as Guidelines/ Policies for Sharia BRK, including:*
   - *BPP Implementation of Good Corporate Governance (GCG);*
   - *BPP for the Implementation of the Compliance Function;*
   - *BPP Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU PPT);*
   - *Board of Directors Work Guidelines;*
   - *BPP Compliance Code of Conduct;*
   - *BPP Conflict of Interest;*
   - *BPP Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System); And*
   - *Gratification Control Guidelines.*
2. *Develop Sharia Compliance Guidelines and Policies*
3. *Refinement of policies for the implementation of the APU and PPT programs with reference to other regulatory regulations.*

B. Plan of Activities to Encourage and/or Maintain a Compliance Culture, Including Plans to Disseminate Provisions

1. *Reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations for further adjustments to the Bank's internal policies.*
2. *Conduct studies and tests on the planned policies/ regulations to be issued by the Bank.*
3. *Increasing employee understanding of the Whistleblowing System policy, Gratification Control Guidelines, Compliance Code of Ethics and other Bank internal provisions as well as measuring compliance culture through monitoring and compliance testing activities at the Bank's office network (which do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and do not carry out inspections/Audits General by the Internal Audit Division), as well as providing training/socialization*

terkait kebijakan tersebut pada setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi internal Bank.
4. Melakukan sosialisasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam aspek Akad dan Operasional Bank (Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai).
5. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPS ke jaringan kantor Bank.
6. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen exit meeting.
7. Mengelola laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai petugas harian WBS.
8. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
9. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran BRK Syariah.

Strategi Kepatuhan Bank

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
   - Menyusun *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan)
   - Menyusun *Compliance Code of Conduct* (Kode Etik Kepatuhan)
   - Menyusun *Compliance Policy* (Kebijakan Kepatuhan)
   - Menyusun Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   - Menyusun Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
   - Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi
   - Menyusun Pedoman Pengujian Kepatuhan pada Unit Kantor Bank
2. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System* dan Pengendalian Gratifikasi pada kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diadakan oleh internal Bank.
3. Melakukan kunjungan dan monitoring di unit kantor Bank (Cabang, Capem dan Kedai yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Internal Audit) guna mengetahui dan menilai tingkat pemahaman serta kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman serta aplikasi APU & PPT.
5. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank agar sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindak lanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK.

related to this policy in each of the Bank's internal training/socialization activities.
4. Conducting dissemination of compliance with Sharia Principles in the aspects of Akad and Bank Operations (Head Office, Branches, Supporting Branches and Shops).
5. Providing assistance to the Sharia Supervisory Board (DPS) in carrying out the supervisory function of the DPS to the Bank's office network.
6. Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions provided by the supervisor or external examiner in the exit meeting documents.
7. Managing Whistle Blowing System (WBS) reports managed by the Head of the Compliance Division as the daily WBS officer.
8. Monitor and manage compliance risk.
9. Make a statement of compliance commitment from all levels of BRK Syariah.

Bank Compliance Strategy

In connection with the compliance function regulated above, the Director of Compliance and Risk Management of BRK Syariah has determined the necessary steps according to his duties and functions, including:

1. Establish a Compliance Culture strategy, including:
   - *Compile a Compliance Charter*
   - *Compile Compliance Code of Conduct (Compliance Code of Ethics)*
   - *Compile Compliance Policy (Compliance Policy)*
   - *Compile Guidelines for Conflict of Interest*
   - *Develop a Reporting System for Alleged Violations (Whistle Blowing System)*
   - *Develop Gratification Control Guidelines*
   - *Develop Compliance Testing Guidelines at Bank Office Units*
2. Dissemination of the Compliance Code of Ethics, Whistle Blowing System and Gratification Control in training/socialization activities held internally by the Bank.
3. Conducting visits and monitoring at Bank office units (Branch, Sub-Branch Office and Shops that do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and are not subject to inspection/General Audit by the Internal Audit Division) to find out and assess the level of understanding and compliance of employees with applicable regulations.
4. Conduct outreach and training related to APU & PPT guidelines and applications.
5. Reviewing the Bank's internal policies and procedures to comply with changes in external regulations.
6. Monitor the follow-up of the fulfillment of the Bank's commitment to Bank Indonesia/OJK.

7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRK Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

1. Menerbitkan Pedoman/Kebijakan di lingkungan Unit kerja Kepatuhan sebagai Pedoman/Kebijakan untuk BRK Syariah, meliputi:
   - BPP Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG);
   - BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan;
   - BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
   - Pedoman Kerja Direksi;
   - BPP Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*);
   - BPP Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
   - BPP Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
   - Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
2. Menerbitkan Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan Syariah.
3. Menerbitkan penyempurnaan kebijakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada Peraturan Regulator lainnya.
4. Melakukan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal Bank.
5. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank.
6. Melakukan peningkatan pemahaman pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kode Etik Kepatuhan dan ketentuan internal Bank lainnya serta pengukuran budaya kepatuhan melalui kegiatan *monitoring* dan pengujian kepatuhan pada jaringan kantor Bank (yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Internal Audit), serta memberikan pelatihan/sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi internal Bank.
7. Melakukan sosialisasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam aspek Akad dan Operasional Bank (Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai).
8. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPS ke jaringan kantor Bank.
9. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang

7. Compile and report the results of the assessment and implementation of the implementation of Good Corporate Governance.
8. Conduct tests on policies and/or decisions taken by the Board of Directors of Sharia BRK so that they do not deviate from the provisions of Bank Indonesia, OJK and applicable laws and regulations.
9. Submit a report on the Implementation of the Compliance Director's Duties to the OJK.

Implementation of the 2022 Compliance Function Work Program

1. Issuing Guidelines/Policies within the Compliance Work Unit as Guidelines/Policies for Sharia BRK, including:
   - *BPP Implementation of Good Corporate Governance (GCG);*
   - *Implementation of the BPP Compliance Function;;*
   - *BPP Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU PPT);*
   - *Board of Directors Work Guidelines;*
   - *BPP Compliance Code of Conduct;*
   - *BPP Conflict of Interest;*
   - *BPP Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System); and*
   - *Gratification Control Guidelines.*
2. Issue Sharia Compliance Guidelines and Policies.
3. Issued improvements to the policies for implementing the APU and PPT programs with reference to other Regulatory Regulations.
4. Reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations for further adjustments to the Bank's internal policies.
5. Conduct studies and tests on the planned policies/ regulations to be issued by the Bank.
6. Increase employee understanding of the Whistleblowing System policy, Gratification Control Guidelines, Compliance Code of Ethics and other Bank internal provisions as well as measurement of compliance culture through monitoring and compliance testing activities at the Bank's office network (which do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and do not carry out inspections/ General Audit by the Internal Audit Division), as well as providing training/socialization related to this policy in each of the Bank's internal training/socialization activities.
7. Conducting dissemination of compliance with Sharia Principles in the aspects of Akad and Bank Operations (Head Office, Branches, Supporting Branches and Shops).
8. Providing assistance to the Sharia Supervisory Board (DPS) in carrying out the supervisory function of the DPS to the Bank's office network.
9. Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions provided by the supervisor or

diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.

10. Mengelola laporan *Whistleblowing System* (*WBS*) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai petugas harian *WBS*.
11. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
12. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran BRK Syariah.
13. Mengadakan pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Terhadap Undang-undang

1. Pengujian Kebijakan
   Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya.
2. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan
   Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya, serta prinsip Syariah.

   Melakukan pemantauan dan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.

B. Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Berwenang

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko terus memantau dan mengingatkan unit kerja terkait atas temuan dan tindak lanjut komitmen Bank yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut komitmen Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang memonitoring terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tersebut.

Untuk memastikan bahwa Bank menyelesaikan tindak lanjut komitmen tersebut Divisi Kepatuhan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

external examiner in the exit meeting documents.

10. *Managing Whistle Blowing System (WBS) reports managed by the Head of the Compliance Division as the daily WBS officer.*
11. *Monitor and manage compliance risk.*
12. *Make a statement of compliance commitment from all levels of BRK Syariah.*
13. *Hold training given periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to preparing reports to PPATK and other authorities.*

Implementation of the Compliance Function

A. Against the Act

1. *Policy Testing*
   Is to ensure that every regulation, policy and standard operating procedures of the Bank are in accordance with applicable regulations both Laws, Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, OJK Circular Letters and other external regulations.
2. *Testing of Credit/Financing Plans*
   Is to ensure that any plans for granting credit/financing that become the authority of the Board of Directors are in accordance with and do not violate applicable provisions, both Laws, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Circulars, OJK Circulars and other external provisions, as well as principles Sharia.

   Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to conform with the Bank's internal policies.

B. Fulfillment of Commitments to Authorities

The Director of Compliance & Risk Management continues to monitor and remind related work units on the findings and follow-up on the Bank's commitments that have been agreed upon with the Financial Services Authority and other regulators. For the technical implementation of monitoring of follow-up commitments the Director of Compliance & Risk Management is assisted by the Compliance Division as a work unit that monitors the findings of the Financial Services Authority and other regulators.

To ensure that the Bank completes the follow-up to this commitment, the Compliance Division has taken the following steps:

1. Mengingatkan unit kerja pemilik temuan.
2. Memonitor tindaklanjut komitmen yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo yang diselesaikan oleh unit kerja terkait melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
3. Untuk temuan yang telah jatuh tempo, namun belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait Divisi Kepatuhan meminta unit kerja pemilik temuan untuk membuat/menyampaikan penyebab belum selesai ditindaklanjuti dan *timeline* atas rencana pemenuhan komitmen tersebut dan jika diperlukan menyampaikan kepada Direksi untuk diagendakan dan dibahas pada Rapat Direksi.

1. Remind the work unit of the owner of the findings.
2. Monitor the follow-up of commitments that are due or past due completed by the relevant work units through the Compliance Information System Application (ASIK).
3. For findings that are due, but have not yet been fully followed up by the related work unit, the Compliance Division requests the work unit that owns the findings to make/submit the causes of the unfinished follow-up and a timeline for the plan for fulfilling these commitments and if necessary submit them to the Board of Directors to be scheduled for and discussed at the Board of Directors meeting .

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BRK Syariah

Implementasi manajemen risiko di BRK Syariah dilakukan secara aktif sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis dan komprehensif, yang dijadikan sebagai dasar dalam proses manajemen risiko Bank dalam memastikan tercapainya target dan realisasi bisnis Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mendorong pertumbuhan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko agar dapat memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi, melalui langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Kebijakan manajemen risiko BRK Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 050/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) mengacu pada POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Overview of BRK Syariah Risk Management System

The implementation of risk management at BRK Syariah is carried out actively in accordance with the Risk Management framework which is prepared in writing and comprehensively, which is used as the basis for the Bank's risk management process in ensuring the achievement of targets and the realization of the Bank's business while taking into account the principle of prudence, encouraging performance growth and compliance with applicable regulations and maximizing shareholder value.

Risk management is a process to identify, measure, monitor and control risks in order to estimate potential losses that may occur, through the necessary mitigation measures. The BRK Syariah risk management policy is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 050/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual (BPP) Risk Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) referring to POJK No.65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris BRK Syariah, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko

Active Supervision of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

The Board of Commissioners has clear guidelines for their duties and responsibilities as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/X/2014 dated October 3, 2014 concerning Work Guidelines for the BRK Syariah Board of Commissioners, including conducting regular assessments, evaluating risk management policies and provide recommendations on risks and the

serta penerapan manajemen risiko di BRK Syariah serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

Direksi memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 168/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Kerja Direksi. Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Kebijakan Bisnis dan Komite Kredit/Pembiayaan.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Fungsi pengelola manajemen risiko BRK Syariah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 001/KEPDIR/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

implementation of risk management in BRK Syariah and evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies. The Board of Commissioners in carrying out its risk oversight function is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee.

The Board of Directors has clear guidelines for their duties and responsibilities according to the Directors' Decree Number 168/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Work Guidelines for the Directors. Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by preparing, approving, implementing and evaluating the Bank's risk management policies and procedures. In carrying out its function of implementing effective risk management, the Board of Directors is supported by the Human Resources Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, ALCO Committee, Business Policy Committee and Credit/Financing Committee.

Organizational Structure of Risk Management

The function of managing BRK Syariah risk management is carried out by the Risk Management Division which is under the Director of Compliance & Risk Management referring to the Decree of the Board of Directors Number 001/KEPDIR/2022 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Organizational Structure of the Risk Management Division

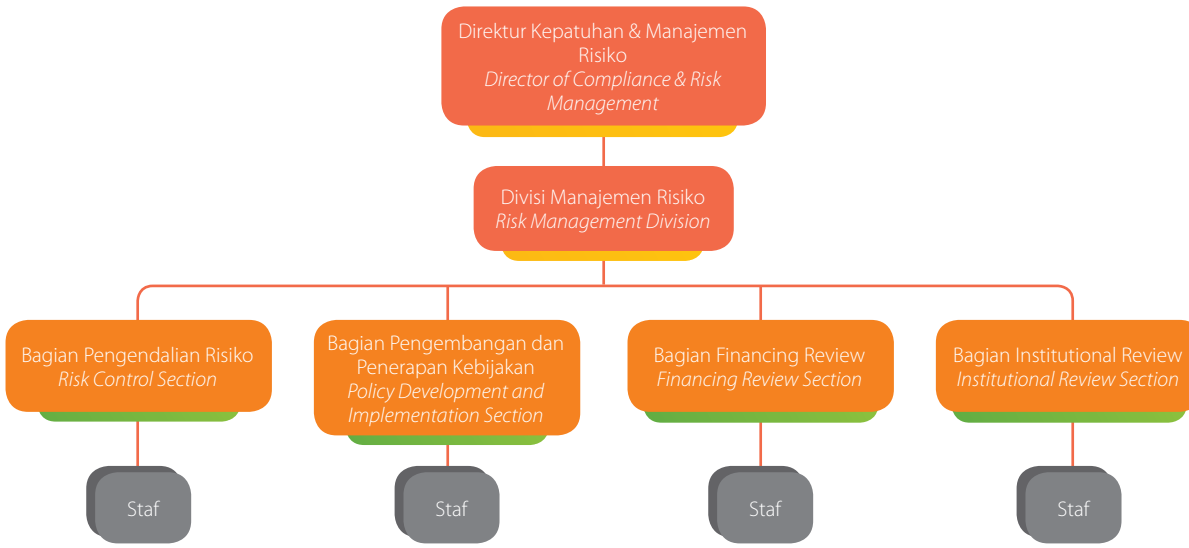

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Setiap unit organisasi wajib melaporkan kondisi risiko dan wajib memahami setiap perubahan risiko yang ada di unit kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Divisi Manajemen Risiko bila terdapat perubahan-perubahan dan hal-hal spesifik. Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengelolaan strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko serta memantau pelaksanaannya;
2. Identifikasi risiko dan mengumpulkan data/informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan Risiko;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank;
4. Membuat laporan Tingkat Kesehatan bank, Profil Risiko Bank dan laporan lainnya yang terkait risiko untuk kepentingan internal dan eksternal;
5. Menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
6. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi Risiko kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO);
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko;
8. Meningkatkan penerapan budaya risiko.

Adapun Satuan Kerja Operasional (SKO) adalah seluruh unit kerja terutama Satuan kerja operasional (*risk taking unit*) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama yang terkait langsung dengan risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan seluruh kegiatan di setiap unit kerja dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.
2. Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing-masing.
3. Menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.
4. Melakukan usulan terhadap hal-hal tertentu khususnya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana stratejik serta

The Risk Management Division is directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management. Each organizational unit is required to report risk conditions and must understand any changes in risks that exist in its work unit, and report periodically to the Risk Management Division when there are changes and specific matters. The Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. *Managing the risk management strategy recommended by the Risk Management Committee and monitoring its implementation;*
2. *Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring;*
3. *Monitoring and controlling Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, and Other Risks in every functional activity of the Bank;*
4. *Prepare reports on bank soundness levels, bank risk profiles and other reports related to risks for internal and external purposes;*
5. *Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM);*
6. *Recommend tactical and strategic steps for risk mitigation to operational work units (risk taking units) and/or to the Risk Management Committee (RMCO);*
7. *Improving employee competence in the context of Risk Management Certification;*
8. *Improving the implementation of risk culture.*

The Operational Work Units (SKO) are all work units, especially the operational work units (risk taking units) at the Head Office and Branch Offices, especially those directly related to risk, have the duties and responsibilities to:

1. *Carry out all activities in each work unit by referring to the implementation of existing work as well as policies, guidelines and strategies for implementing risk management.*
2. *Controlling risk exposure in each work unit.*
3. *Deliver reports or information regarding risk exposure managed by the work unit concerned to the Risk Management Division periodically.*
4. *Make suggestions on certain matters, especially to improve the implementation of risk management.*

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

The Risk Management Policy is a written directive in implementing risk management and must be in line with the vision, mission and strategic plans and focus more on risks

lebih berfokus pada risiko yang yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis BRK Syariah, serta disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) serta penetapan limit risiko.

that are relevant to BRK Syariah business/business activities, and are prepared by taking into account the level of risk that is willing to be taken (risk appetite). , risk tolerance and setting risk limits.

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko BRK Syariah telah memiliki Kebijakan maupun Prosedur Manajemen Risiko Bank yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

As a reference in risk management, BRK Syariah already has a Bank Risk Management Policy and Procedure which is used as the main guideline in carrying out risk management. For more specific business areas, the Bank has more specific policies and procedures, for example in the areas of credit, treasury and operations. These policies and procedures, among other things, stipulate the setting of limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BRK Syariah juga telah memiliki pedoman terkait limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko BRK Syariah ditetapkan dalam kebijakan tentang *Risk Appetite Statement* yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi. Dalam *Risk Appetite Statement* diatur tentang lim*it* risiko yang terkait dengan Penyelarasan Strategi, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Stratejik.

As one of the risk control methods, BRK Syariah also has guidelines regarding risk limits. Risk limit is a threshold for determining the level of intensity of risk mitigation that will be implemented by management. Determination of BRK Syariah risk limits is stipulated in the policy regarding Risk Appetite Statement which is strategic in nature and requires approval from the Board of Directors. The Risk Appetite Statement regulates risk limits related to Strategy Alignment, Capital Adequacy, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk and Strategic Risk.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas BRK Syariah. Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio. Bank terus melakukan pengembangan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian risiko yang komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin.

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes, and Risk Management Information Systems

The purpose of a good risk management process is to manage the risks inherent in the Bank's activities with the aim of providing maximum sustainable added value to all BRK Syariah activities. The risk management process includes the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk on an ongoing basis for all material risk factors supported by a Risk Management Information System. The Risk Management process is carried out on all risk factors that have a significant impact on the Bank's financial condition at all levels of the Bank up to the operational level, both at the transactional level and at the portfolio level. The Bank continues to develop and improve the framework of a comprehensive risk management system and risk control structure, so that it can provide information on potential risks earlier and can then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum.

Skema Proses Manajemen Risiko BRK Syariah
BRK Syariah Risk Management Process Scheme

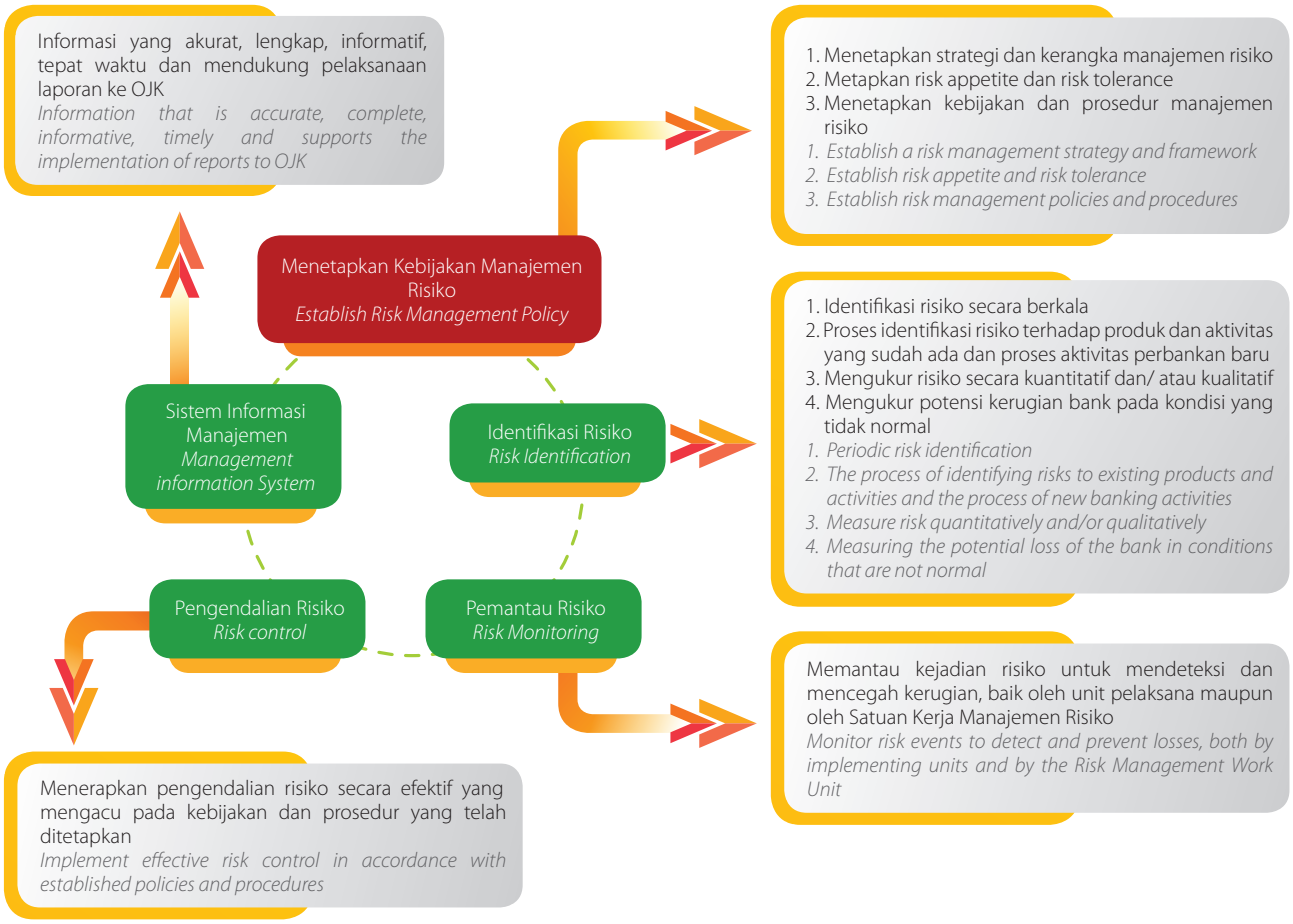

a. Identifikasi Risiko

Dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi dilakukan secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, di mana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko utama dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian risiko, advis dan *review* terhadap setiap produk dan/atau aktivitas Bank yang akan diterbitkan/ diimplementasikan oleh unit bisnis/unit fungsional atau risk owner guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari beserta mitigasinya sebelum diperkenalkan atau dijalankan sesuai dengan permintaan unit bisnis/unit fungsional atau *risk owner*.

a. Risk Identification

Performed proactively on all business activities in order to analyze the source, level of possibility of risk and its impact. The identification process is carried out periodically for all types and characteristics of risks present in each of the Bank's business activities.

The risk identification process is carried out by analyzing all existing risk sources, which at least is carried out on the main risks of the Bank's products and business activities. In addition, the Bank conducts risk identification by conducting risk studies, advice and reviews of each product and/or Bank activity that will be issued/ implemented by the business unit/functional unit or risk owner to provide an overview regarding risks that may occur in the future. along with its mitigation before being introduced or implemented according to the request of the business unit/functional unit or the risk owner.

b. Pengukuran Risiko

Bertujuan untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan/atau aktivitas yang dimiliki Bank dibandingkan dengan *risk appetite* sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pendekatan pengukuran risiko dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya untuk meng-cover risiko residual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan prosedur operasional dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko terhadap produk dan aktivitas Bank dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material. Pemantauan dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) maupun oleh *Risk Control Unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan Bank. Faktor yang mendukung terlaksananya pengendalian risiko yang handal pada Bank yaitu:

b. Risk Measurement

Aims to estimate the amount of overall risk exposure as well as per type of risk in each product and/or activity owned by the Bank compared to the risk appetite as a reference for carrying out risk control. The risk measurement approach can be quantitative, qualitative or a combination of the two to cover residual risk that is adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business.

c. Risk Monitoring

The Bank has risk monitoring procedures which include risk monitoring on the level of compliance with internal limits and the consistency of implementing operational procedures with established policies. The monitoring process is carried out to ensure that risks are properly managed by evaluating the risk exposure to the Bank's products and activities and improving the reporting process in the event that there are changes in the Bank's business activities, products, transactions, risk factors, information technology and risk management information systems. material. Monitoring is carried out both by the Operational Work Unit (Risk Taking Unit) as the risk owner (Risk Owner) and by the Risk Control Unit. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to management in order to mitigate risks and necessary actions.

d. Risk control

The Bank has an adequate risk control system with reference to established policies and procedures and aims to manage all risk exposures. The risk control process is applied to 8 (eight) types of risk according to the Bank's risk appetite and risk tolerance. Factors that support the implementation of reliable risk control at the Bank are:

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan adanya sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu sehingga Bank dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sistem informasi manajemen risiko BRK Syariah menggunakan aplikasi antara lain aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi *Operational Risk Self Assessment* (ORSA).

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

e. Risk Management Information System

The purpose of having a risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely so that the Bank can take adequate steps to minimize the impact of risk. The BRK Syariah risk management information system uses applications including the Contingecy Funding Plan (CFP) application, the Bank Soundness Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self Assessment (ORSA) application.

This risk management information system aims, among others, to:

1. *Support the implementation of risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
2. *Detect any unfavorable developments at an early stage, so that it is also possible to take corrective actions to minimize the Bank's losses.*

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko merupakan bagian dari bisnis Bank sehingga dalam penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional. Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Pengelolaan risiko diupayakan sejalan dengan Road Map Basel I, Basel II dan Basel III serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Risk Profile and Its Management

Risk is part of the Bank's business so that in implementing risk management, BRK Syariah uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities. Efforts in risk management include assessing the inherent risk profile and assessing the quality of risk management implementation that reflects a risk control system that aims to avoid potential relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

Risk management through capital is adjusted to long-term strategic and business plans, as well as an efficient capital allocation policy in accordance with business segments that have optimal risk-return profiles referring to POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which includes 10 (ten) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Rate of Return Risk and Equity Investment Risk. Risk management is pursued in line with the Basel I, Basel II and Basel III Road Map as well as the provisions of the Financial Services Authority.

Profil Risiko Utama

RISIKO KREDIT

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty*

Main Risk Profile

CREDIT RISK

Is the risk due to the failure of the customer or other party to fulfill obligations to the Bank in accordance with the agreed agreement, including Credit Risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement

credit risk, dan *settlement risk*. Risiko Kredit timbul karena ketidakpastian pelunasan pembiayaan oleh debitur/pihak ketiga baik sebagian ataupun seluruhnya. Risiko ini disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau berpotensi risiko yang mengakibatkan pengurangan aktiva modal. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain Pembiayaan, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Untuk mitigasi Risiko Kredit, BRK Syariah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap target dan realisasi penyaluran pembiayaan.
2. Melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara berkala, yaitu secara harian, mingguan dan bulanan serta meminta *action plan* perbaikan NPF dari masing-masing unit kantor sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Kredit dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.
4. Membentuk Tim *Task Force* pengelolaan asuransi untuk melakukan evaluasi, *monitoring* dan sinkronisasi data dengan perusahaan pialang dan perusahaan asuransi lainnya yang bekerjasama dengan BRK Syariah per triwulan serta melakukan *review* terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan perusahaan pialang dan asuransi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan unit bisnis setiap 6 (enam) bulan.
5. Dalam pemantauan dan pengendalian risiko kredit dari sisi kolektibilitas, Divisi Pembiayaan telah melakukan langkah-langkah yang ditempuh yaitu:
   - Monitoring terhadap portofolio pembiayaan baik dari sisi *outstanding* maupun dari sisi kualitas pembiayaan pada seluruh jaringan kantor termasuk penetapan wilayah kerja PIC *monitoring* NPF;
   - Monitoring dan evaluasi melalui surat maupun *WA Group* serta menghubungi unit kantor untuk target pembiayaan yang masih belum tercapai dan memonitoring secara rutin terhadap pembiayaan Kolektibiliti 2 agar pembiayaan tersebut tidak turun menjadi Kolektibiliti 3;
   - Memastikan terhadap penutupan pertanggungan asuransi pembiayaan;
   - Memastikan pengajuan klaim asuransi sesuai ruang lingkup pertanggungan dan memperhatikan/menaati masa kadaluarsa pengajuan;
   - Melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang terkena dampak pandemi *Covid-19* sesuai kewenangan KPP+1 (Kelompok Pemutus Pembiayaan);
   - Melakukan *review* kebijakan pembiayaan secara berkala;

risk. Credit risk arises due to the uncertainty of repayment of financing by the debtor/third party, either in part or in whole. This risk is caused by investments that do not provide income or potential risks that result in a reduction in capital assets. Credit Risk can originate from various Bank business activities. In addition to Financing, the Bank faces Credit Risk from various financial instruments such as securities, acceptances, inter-bank transactions, trade financing transactions, exchange rate and derivative transactions, as well as commitments and contingencies.

To mitigate Credit Risk, BRK Syariah has taken the following steps:

1. *Carry out regular and periodic monitoring of targets and realization of financing disbursement.*
2. *Make efforts to resolve problematic financing on a regular basis, namely on a daily, weekly and monthly basis and request action plans for NPF improvement from each office unit as an effort to resolve problematic financing.*
3. *Establish a Risk Appetite Metric for Credit Risk with predetermined Risk Appetite and Risk Tolerance limits.*
4. *Establish an insurance management Task Force Team to evaluate, monitor and synchronize data with brokerage companies and other insurance companies that work with BRK Syariah on a quarterly basis and review Cooperation Agreements (PKS) with brokerage and insurance companies which will be adjusted to the needs of each business unit 6 (six) months.*
5. *In monitoring and controlling credit risk from a collectibility perspective, the Financing Division has taken the following steps:*
   - *Monitoring of the financing portfolio both in terms of outstanding and in terms of quality of financing in all office networks including the determination of the PIC monitoring NPF work area;*
   - *Monitoring and evaluation by letter or WA Group as well as contacting office units for financing targets that have not yet been achieved and routine monitoring of Collectibility 2 financing so that the financing does not decrease to Collectibility 3;*
   - *Ensuring the closing of financing insurance coverage;*
   - *Ensuring the filing of insurance claims is in accordance with the scope of coverage and pays attention to/obeys the expiration date of the submission;*
   - *Restructuring financing affected by the Covid-19 pandemic according to the authority of KPP+1 (Financing Breaking Group);*
   - *Conduct periodic reviews of financing policies;*

- Monitoring terhadap pencapaian target yang telah di *breakdown* ke unit kantor;
- Melakukan *coaching* terhadap petugas *Account Officer* secara berkala;
- Penetapan target penyaluran pada masing-masing petugas *Account Officer*;
- Melakukan *on the spot* ke debitur baik sebelum maupun sesudah pencairan pembiayaan secara berkala;
- Melakukan pembinaan kepada debitur;
- Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk segmen pembiayaan yang berisiko tinggi;
- Konsentrasi pada sektor ekonomi yang memiliki NPF rendah;
- Sentralisasi pembiayaan komersial sindikasi pada 6 (enam) unit kantor;
- Kebijakan sentralisasi dan *refferal* bagi unit kantor yang tidak menyalurkan pembiayaan;
- Promo penyesuaian *pricing*, pemberian *direct gift* serta promosi lainnya secara berkala;
- Penggunaan Aplikasi *E-Fos* untuk percepatan dan tertib administrasi;
- Ekspansi pembukaan 2 (dua) unit kantor baru untuk pelaksanaan kegiatan Rahn Emas.

6. Bank melalui Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan telah melakukan langkah-langkah/ *action plan* dalam penanganan pembiayaan NPF dan penagihan pembiayaan hapus buku dengan cara:
   - Lelang, Jual bawah tangan, Jual sukarela, Penagihan, *Cessie*, Restrukturisasi, Gugatan Sederhana (GS), Eksekusi pengadilan, Penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Hapus buku;
   - Melakukan *mapping* NPF dan mapping hapus buku yang meliputi mapping verifikasi debitur, kriteria debitur, jenis agunan, jenis pengikatan sampai dengan action plan penyelesaiannya;
   - Pemberian Hapus Tagih Non Pokok (Diskon Margin/Ujrah/Bagi Hasil) dalam pelunasan pembiayaan macet;
   - Melakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan yang masih berpotensi dan prospek;
   - Melakukan monitoring pertumbuhan NPF seluruh unit kantor (*offsite* dan *onsite*) serta melakukan koordinasi dan evaluasi dengan unit kantor terhadap pertumbuhan NPF secara berkala;
   - Memaksimalkan penyelesaian pembiayaan dengan selalu memonitor agar unit kantor menggesa untuk pelaksanaan lelang agunan;
   - Optimalisasi kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya penagihan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah.
7. Melakukan langkah-langkah perbaikan atas kendala pengasuransian debitur maupun penagihan dengan cara :

- *Monitoring the achievement of targets that have been broken down to office units;*
- *Conduct periodic coaching of Account Officers;*
- *Determination of distribution targets for each Account Officer;*
- *Perform on the spot to the debtor both before and after disbursement of financing on a regular basis;*
- *Conduct coaching to debtors;*
- *Carry out continuous assessment of high-risk financing segments;*
- *Concentration on economic sectors that have low NPF;*
- *Centralization of syndicated commercial financing in 6 (six) office units;*
- *Centralization and referral policies for office units that do not channel financing;*
- *Pricing adjustment promos, direct gifts and other promotions on a regular basis;*
- *Use of the E-Fos Application for acceleration and orderly administration;*
- *Expansion opening of 2 (two) new office units for the implementation of Rahn Emas activities.*

6. *The Bank through the Financing Rescue and Settlement Division has taken steps/action plans in handling NPF financing and collecting write-off financing by:*
   - *Auction, Underhand selling, Voluntary selling, Billing, Cessie, Restructuring, Simple lawsuit (GS), Court execution, Billing through State Attorney Attorney (JPN) and Write-off;*
   - *Conducting NPF mapping and write-off mapping which includes mapping debtor verification, debtor criteria, types of collateral, types of binding up to the action plan for settlement;*
   - *Granting of Non-Principal Claims (Margin/Ujrah/ Profit Sharing Discounts) in the settlement of bad debts;*
   - *Carry out rescue efforts through financing restructuring of potential and prospective financing;*
   - *Monitor the growth of NPF in all office units (offsite and onsite) as well as coordinate and evaluate with office units the growth of NPF on a regular basis;*
   - *Maximizing the settlement of financing by always monitoring so that the office unit rushes to carry out the collateral auction;*
   - *Optimizing cooperation with the State Attorney General (JPN) in efforts to collect/settle problem financing.*
7. *Take corrective steps for debtor insurance and billing problems by:*

- Melakukan *Host To Host* antara Bank dengan perusahaan Asuransi/Penjaminan dimulai dari pengajuan pertanggungan, pengajuan restitusi serta pengajuan klaim;
- Melakukan rekonsiliasi berkala dengan perusahaan Asuransi/Penjaminan;
- Melakukan komunikasi secara intensif kepada perusahaan Asuransi untuk dapat segera melakukan pembayaran klaim terhadap pengajuan klaim yang sudah disetujui dan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan asuransi/penjaminan (untuk perusahaan asuransi/penjaminan konvensional);
- Melakukan sosialisasi kepada unit kantor terkait produk Kontra Bank Garansi, Mikro, Konstruksi dan Umum PT Jamkrindo Syariah.

8. Melakukan langkah-langkah monitoring terkait penyaluran pembiayaan restrukturisasi *Covid-19* sebagai berikut:
   - Membuat laporan perkembangan restrukturisasi *Covid-19* secara mingguan;
   - Menyurati unit kantor untuk melakukan penilaian terhadap debitur yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *Covid-19* dengan kriteria usaha debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan terhadap dampak pandemi *Covid-19*;
   - Melakukan *assessment*/penilaian terhadap debitur yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *Covid-19* dengan kriteria usaha debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan terhadap dampak pandemi *Covid-19* dan melaporkannya ke Divisi Manajemen Risiko;
   - Menyurati unit kantor untuk melakukan *assessment*/penilaian terhadap debitur yang telah diberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan *Covid-19* dengan kriteria usaha debitur yang mampu bertahan dan yang tidak mampu bertahan terhadap dampak pandemi *Covid-19* yang akan dilaporkan ke Divisi Manajemen Risiko setelah hasil rekapan dari unit kantor terpenuhi pada kesempatan pertama.
9. Bank melakukan peningkatan *Capacity Building* bagi petugas *Account Officer* (AO) di bidang pembiayaan, termasuk pemenuhan kebutuhan jumlah petugas *Account Officer* (AO).
10. Bank juga melakukan *coaching* dan *counseling* serta evaluasi secara harian oleh pemimpin unit kantor kepada petugas *Account Officer* (AO).
11. Bank melakukan pemberian pembiayaan kepada captive market dan mendukung proyek Pemda, BUMD, BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik.

- *Conducting Host To Host between Banks and Insurance/Guarantee companies starting from submitting coverage, submitting restitution and submitting claims;*
- *Carry out periodic reconciliation with Insurance/Guarantee companies;*
- *Communicating intensively with insurance companies to be able to immediately pay claims against approved claims submissions and make direct visits to insurance/guarantee companies (for conventional insurance/guarantee companies);*
- *Conduct outreach to office units related to PT Jamkrindo Syariah Counter Bank Guarantee, Micro, Construction and General products.*

8. *Carry out monitoring steps related to the distribution of Covid-19 restructuring financing as follows:*
   - *Prepare a weekly report on the progress of the Covid-19 restructuring;*
   - *Writing letters to office units to conduct assessments of debtors who have been given Covid-19 financing restructuring facilities with the criteria of debtor businesses that are able to survive and those that are unable to withstand the impact of the Covid-19 pandemic;*
   - *Conduct an assessment/assessment of debtors who have been given Covid-19 financing restructuring facilities with the criteria of debtor businesses that are able to survive and those that are not able to withstand the impact of the Covid-19 pandemic and report this to the Risk Management Division;*
   - *Writing letters to office units to conduct assessments of debtors who have been given Covid-19 financing restructuring facilities with the criteria for debtor businesses that are able to survive and those that are not able to survive the impact of the Covid-19 pandemic which will be reported to the Risk Management Division after the results of the recap from the office unit fulfilled at the first opportunity.*
9. *The Bank has increased Capacity Building for Account Officers (AO) in the field of financing, including meeting the needs for the number of Account Officers (AO).*
10. *The Bank also conducts coaching and counseling as well as daily evaluation by office unit leaders to Account Officer (AO) officers.*
11. *The Bank provides financing to captive markets and supports local government projects, BUMD, BUMN and companies that have a good reputation.*

RISIKO PASAR

Adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi Bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung Risiko Pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan Risiko Pasar, portofolio Bank dikelompokkan menjadi portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*. Pengelolaan Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap Aset permodalan Bank.

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

1. Sosialisasi budaya manajemen risiko pasar kepada hampir seluruh level organisasi.
2. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Pasar, dimana Bank dalam melakukan investasi surat-surat berharga tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kondisi makro dan keseimbangan portofolio.
3. Melakukan kerja sama yang tertuang pada Nota Kesepahaman antara Bank Syariah Indonesia dengan BRK Syariah tentang Kerjasama Bisnis dan *Transfer Knowledge*. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 Oktober 2021 s.d. 15 Oktober 2022. Ruang lingkup kerja sama ini di bidang layanan jasa dan produk perbankan berupa *treasury*, *international*, *commercial/trade finance*, *remittance*, *custodian*, *joint financing*/sindikasi, dana pensiun, *bank note*, *hasanah card*, pembukaan rekening nostro/vostro dan lain-lain.
4. Sistem informasi manajemen Risiko Pasar termasuk pelaporan risiko pasar kepada Dewan Komisaris dan Direksi telah berjalan melalui laporan bulanan risiko pasar dan laporan *middle office* yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
5. Saat ini Bank sudah tidak menyajikan data transaksi pada aplikasi *Treasury* (*Quantum*), Bank akan melakukan pengadaan aplikasi terbaru yang direncanakan dilakukan pada triwulan III tahun 2023 dan diselaraskan dengan kegiatan BRK Syariah dalam rangka pemantauan kegiatan *treasury*.
6. Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat Komite SHALMA (Syariah *Asset Liability Management*) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada Risiko Pasar.
7. Proses pelepasan Surat Utang Negara seri FR065 sebagai rencana aksi korporasi Bank menjadi Bank Umum Syariah.
8. Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko yang independen dengan tugas dan tanggung jawab yang

MARKET RISK

Is the risk on the balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including risks in the form of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market Risk includes, among others, the Bank's functional activities such as treasury activities and investments in securities. Every Bank position that has the potential to generate profit or loss due to changes in market factors will contain Market Risk. In relation to Market Risk management, the Bank's portfolio is grouped into Trading Book and Banking Book portfolios. Market Risk Management aims to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the Bank's capital assets.

The risk mitigation measures that have been taken by the Bank include:

1. *Dissemination of market risk management culture to almost all levels of the organization.*
2. *Identifying, measuring, monitoring and controlling Market Risk, in which the Bank in investing in securities always refers to the precautionary principle by taking into account macro conditions and portfolio balance.*
3. *Conducting cooperation as stated in the Memorandum of Understanding between Bank Syariah Indonesia and BRK Syariah regarding Business Cooperation and Transfer of Knowledge. This memorandum of understanding is valid for a period of 1 (one) year from 15 October 2021 to.d. October 15, 2022. The scope of this cooperation is in the field of banking services and products in the form of treasury, international, commercial/trade finance, remittances, custodians, joint financing/syndication, pension funds, bank notes, hasanah cards, opening nostro/vostro accounts and etc.*
4. *The Market Risk management information system including market risk reporting to the Board of Commissioners and Directors has been implemented through monthly market risk reports and middle office reports submitted by the Risk Management Division.*
5. *Currently the Bank is no longer presenting transaction data on the Treasury (Quantum) application, the Bank will procure a new application which is planned to be carried out in the third quarter of 2023 and aligned with BRK Syariah activities in the context of monitoring treasury activities.*
6. *The Bank periodically at least once a month holds a SHALMA (Syariah Asset Liability Management) Committee meeting in taking the necessary steps to mitigate Market Risk.*
7. *The process of releasing the series FR065 Government Bonds as a corporate action plan for the Bank to become an Islamic Commercial Bank.*
8. *In carrying out an independent risk management function with clear duties and responsibilities, especially*

jelas terutama dalam pemisahan tugas (*segregation of duty*) untuk memitigasi risiko, BRK Syariah telah melakukan pemisahan tugas antara *front office* (*dealing room*), *middle office* (petugas *middle office* Divisi Manajemen Risiko) dan *back office (treasury operation)*.

9. Melakukan *Inhouse Training Treasury* Syariah dalam peningkatan *capacity building* untuk pegawai Divisi *Treasury* & Internasional, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional dan Divisi Internal Audit.
10. Melakukan pemantauan terhadap *counterparty limit* yang berlaku, pemantauan Risiko Pasar dan likuiditas, kewajaran harga pasar serta pemantauan atas terjadinya *deal amendmend* dan *deal cancelation* pada kegiatan transaksi yang dilakukan Divisi Treasury & Internasional.
11. Dalam menyikapi kondisi *market* yang kurang stabil, pembelian surat berharga yang dilakukan oleh Divisi Treasury & Internasional lebih mengutamakan pembelian dalam bentuk *Available For Sale* (AFS), obligasi pemerintah dan *corporate* BUMN maupun swasta dengan rating AAA dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kondisi makro dan keseimbangan portofolio.
12. Divisi Manajemen Risiko melalui Catatan Laporan Pemantauan Risiko Pasar setiap bulan juga telah memberikan rekomendasi kepada *Treasury* dalam pengelolaan surat berharga.
13. Bank telah melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar, risiko likuiditas dan profil risiko (*risk profile*) untuk risiko pasar yang di dalamnya mencakup risiko imbal hasil dalam *banking book* (*interest rate risk in the banking book)*.
14. Melakukan *stress test* atas Posisi Devisa Neto dengan mengasumsikan nilai tukar Rupiah melemah.

in the segregation of duties to mitigate risk, BRK Syariah has segregated duties between the front office (dealing room), middle office (middle office officer of the Risk Management Division) and back office (treasury operations).

9. *Conducting Sharia Treasury Inhouse Training in increasing capacity building for employees of the Treasury & International Division, Risk Management Division, Operational Division and Internal Audit Division.*
10. *Monitor the applicable counterparty limit, monitor market risk and liquidity, fairness of market prices and monitor the occurrence of deal amendments and deal cancellations in transaction activities carried out by the Treasury & International Division.*
11. *In responding to the unstable market conditions, purchases of securities made by the Treasury & International Division prioritized purchases in the form of Available For Sale (AFS), state-owned and private government and corporate bonds with an AAA rating while still referring to the principle of prudence and paying attention to macro conditions and portfolio balance.*
12. *The Risk Management Division through the Notes of Market Risk Monitoring Report every month has also provided recommendations to the Treasury in the management of securities.*
13. *The Bank has implemented risk management for market risk, liquidity risk and risk profile for market risk which includes interest rate risk in the banking book.*
14. *Conduct stress tests on the Net Open Position by assuming the Rupiah exchange rate weakens.*

RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas adalah kemampuan suatu Bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing yang diukur dengan besarnya persentase Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Dana Pihak Ketiga (DPK).

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

1. Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Likuiditas dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan. Bank selalu berusaha memenuhi kebutuhan pengambilan dana nasabah seketika dan kebutuhan pencairan pembiayaan sesuai dengan strategi bank yang mampu menjaga reputasi yang baik.
2. Optimalisasi pelaksanaan SHALMA dalam pengelolaan likuiditas yang optimal dan aman melalui pengelolaan *Primary Reserves* (Kas dan GWM), *Secondary Reserves*

LIQUIDITY RISK

Liquidity is the ability of a Bank to meet short-term financial obligations both in Rupiah and in foreign currencies as measured by the percentage of Statutory Reserves (GWM) at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency Third Party Funds (DPK).

The risk mitigation measures that have been taken by the Bank include:

1. *The Bank has established a Risk Appetite Metric for Liquidity Risk with predetermined Risk Appetite and Risk Tolerance limits. The bank always tries to meet the needs of withdrawing customer funds immediately and the need for disbursement of financing in accordance with the bank's strategy that is able to maintain a good reputation.*
2. *Optimizing the implementation of SHALMA in optimal and safe liquidity management through the management of Primary Reserves (Cash and GWM),*

dan *Tertiary Reserves* dengan memperhatikan limit-limit yang telah ditetapkan.

3. Telah ditetapkan *limit* internal atas Risiko Likuiditas seperti rasio GWM, AL/NCD, CIR dan CASA sebagai *early warning*.
4. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada struktur manajemen Risiko Likuiditas dalam pemisahan fungsi *risk taking unit* dan *risk management unit*, melalui satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, *treasury*, sistem informasi dan akunting. Bank juga telah membentuk bagian *Middle Office* pada Divisi Manajemen Risiko dan *Treasury Operation* pada Divisi Operasional & Akuntansi.
5. Bank memiliki Aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai suatu sarana untuk mendukung pengelolaan risiko likuiditas Bank sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo Bank yang bersumber dari pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi agar tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
6. Dalam menjaga likuiditas serta mendukung rencana konversi, Bank aktif melakukan penempatan dana dalam bentuk SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN dan pembelian *Sukuk Mudharabah* pada *Bank Counterparty*.
7. Penempatan dana yang terus dilakukan dalam menjaga likuiditas Bank telah sesuai dengan batas *counterparty limit* yang ditetapkan dan secara umum likuiditas Bank telah memenuhi *threshold* yang ditetapkan.
8. Untuk menjaga dan memenuhi *threshold* rasio likuiditas, Bank telah mengubah dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru.
9. Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat komite SHALMA (*Syariah Asset Liability Management*) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada Risiko Likuiditas.
10. Dalam rangka konversi menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan proses *settlement* secara integrasi dengan RTGS Gen 2.
11. Proses manajemen risiko likuiditas dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas telah dilakukan sesuai dengan parameter yang terdapat dalam pedoman *Contingency Funding Plan* dan kondisi likuiditas dalam 1 (satu) bulan terakhir.
12. Peningkatan *capacity building* juga telah dilaksanakan Bank di bidang likuiditas dengan melakukan Pelatihan Publik Syariah *Digital Marketing* dan Sosialisasi/*Inhouse* Perhitungan Spesial Nisbah dan Bagi Hasil Deposito.
13. Meningkatkan likuiditas dengan mengutamakan penghimpunan dana-dana murah.
14. Dengan melihat kondisi makro ekonomi yang akan memasuki resesi, maka penyaluran kredit dilakukan dengan lebih berhati-hati dan dengan mempertimbangkan *maturity gap*.

Secondary Reserves and Tertiary Reserves by taking into account predetermined limits.

3. *Internal limits have been set for Liquidity Risk such as GWM, LA/NCD, CIR and CASA ratios as an early warning.*
4. *Distribution of authority and responsibility in the Liquidity Risk management structure in the separation of the risk taking unit and risk management unit functions, through the main operational work unit that takes and implements decisions on risk which includes but is not limited to credit, treasury, information systems and accounting activities . The Bank has also formed a Middle Office section in the Risk Management Division and Treasury Operations in the Operations & Accounting Division.*
5. *The Bank has a Contingency Funding Plan (CFP) Application as a means to support the management of the Bank's liquidity risk as information to fulfill the Bank's maturity obligations originating from cash flow funding and/or high-quality liquid assets so as not to disrupt the Bank's activities and financial condition.*
6. *In maintaining liquidity and supporting the conversion plan, the Bank actively places funds in the form of SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN and purchases of Sukuk Mudharabah with counterparty banks.*
7. *Placements of funds that are continuously made in order to maintain the Bank's liquidity are in accordance with the established counterparty limits and in general the Bank's liquidity has met the specified thresholds.*
8. *To maintain and meet the liquidity ratio threshold, the Bank has changed and issued new policies.*
9. *The Bank periodically at least once a month holds a SHALMA (Syariah Asset Liability Management) committee meeting in taking the necessary steps to mitigate Liquidity Risk.*
10. *In the context of converting into a Sharia Commercial Bank, the Bank has carried out an integrated settlement process with RTGS Gen 2.*
11. *The process of liquidity risk management in identifying, measuring, monitoring and controlling liquidity risk has been carried out in accordance with the parameters contained in the Contingency Funding Plan guidelines and liquidity conditions in the last 1 (one) month.*
12. *Increased capacity building has also been carried out by the Bank in the field of liquidity by conducting Digital Marketing Sharia Public Training and Socialization/Inhouse Special Calculation of Ratios and Profit Sharing on Deposits.*
13. *Increase liquidity by prioritizing the accumulation of low-cost funds.*
14. *By looking at macroeconomic conditions that are about to enter a recession, credit distribution is carried out with greater caution and taking into account the maturity gap.*

15. Telah dilakukan *stress test* terkait dampak pandemi *Covid-19* terhadap likuiditas akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi yang bisa mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah.
16. Budaya manajemen risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada hampir seluruh level organisasi dilihat dari kesesuaian realisasi indikator likuiditas dengan RAS.
17. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas cukup memadai termasuk pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi, namun monitoring likuiditas dan kepatuhan GWM akan tetap menjadi perhatian dan bersifat rutin.
18. Sistem pengendalian internal cukup efektif mendukung manajemen Risiko Likuiditas.
19. Sumber daya manusia dari sisi kuantitas dan kompetensi cukup memadai dalam menangani Risiko Likuiditas, dimana seluruh pegawai pada Divisi *Treasury* & Internasional telah lulus dalam sertifikasi *treasury* sesuai dengan level jabatan yang berlaku.

15. A stress test has been carried out regarding the impact of the Covid-19 pandemic on liquidity due to slowing economic growth which could lead to an increase in problem financing.
16. The culture of liquidity risk management has been disseminated to almost all levels of the organization seen from the conformity of the realization of liquidity indicators with the RAS.
17. The liquidity risk management information system is adequate, including reporting Liquidity Risk to the Board of Commissioners and Board of Directors, but monitoring liquidity and GWM compliance will remain a concern and be routine.
18. The internal control system is quite effective in supporting Liquidity Risk management.
19. Human resources in terms of quantity and competence are adequate in handling Liquidity Risk, whereby all employees in the Treasury & International Division have passed treasury certification according to the applicable position level.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional merupakan Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan Pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.

Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Pengelolaan Risiko Operasional secara efektif dan konsisten dapat meminimalisir timbulnya risiko-risiko lain. Risiko Operasional melekat pada seluruh aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan bisnis. Bank menerapkan Manajemen Risiko Operasional secara efektif untuk menurunkan frekuensi dan/atau dampak kerugian operasional. Secara umum penerapan Manajemen Risiko Operasional diharapkan memberikan dampak positif pada *stakeholder* Bank.

Penerapan pengelolaan Risiko Operasional melibatkan semua unsur dalam Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab

OPERATIONAL RISK

Operational Risk is Risk due to insufficiency and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external events that affect the Bank's operations which may originate among others from Human Resources, internal processes, systems and infrastructure as well as incidents external.

Operational risk can result in direct or indirect financial losses and potential losses for lost profit opportunities. Operational risk can be attached to every functional activity of the Bank such as financing activities (provision of funds), treasury and investment, operations and services, trade financing, funding and debt instruments, information system technology and management information and management of human resources.

Operational Risk can trigger other risks such as Reputation Risk, Strategic Risk, Legal Risk, Market Risk, Credit Risk, Compliance Risk and Liquidity Risk. Effective and consistent Operational Risk Management can minimize the emergence of other risks. Operational risk is inherent in all operational activities/processes of the Bank in conducting business. The Bank implements Operational Risk Management effectively to reduce the frequency and/or impact of operational losses. In general, the implementation of Operational Risk Management is expected to have a positive impact on the Bank's stakeholders.

The implementation of Operational Risk management involves all elements within the Bank including the active supervision of the Board of Commissioners and the Board of

dan memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan Risiko Operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Untuk mitigasi Risiko Operasional, BRK Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus terutama terkait produk penghimpunan DPK melalui upaya peningkatan kualitas layanan, peningkatan kompetensi tenaga *frontliner*, Layanan BRK Syariah Prioritas, *Cash Management System, Call Center, New M-Banking, SKPD Online,* penambahan Calon Agen Laku Pandai dan pengembangan produk DPK Syariah.
2. Terkait penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia telah dilakukan beberapa langkah maupun upaya perbaikan, diantaranya:
   - Pemenuhan tenaga *account officer (AO);*
   - Pemenuhan Sertifikasi *Treasury* Syariah bagi pegawai di Divisi *Treasury* & Internasional;
   - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM termasuk kebijakan dan rencana pengembangan serta pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis bank terkait kompetensi teknis dan manajerial secara *inhouse* maupun publik;
   - Meningkatkan penerapan prinsip dalam pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*Know Your Employee*).
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Bank telah menerapkan aplikasi ORSA di seluruh jaringan Kantor dan Divisi.
4. Penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk meminimalisir dampak wabah Covid-19, melalui Surat Edaran Direksi yang memuat protokol yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai dalam menjaga kelangsungan usaha dan bisnis Bank.
5. Bank memiliki berbagai aplikasi pendukung yang terkoneksi dengan *core banking system* dengan pemilihan platform aplikasi yang memudahkan *development,* pemeliharaan dan integrasi, antara lain *Branch delivery system,* ATM/CDM, SMS Banking, *Mobile Banking,* EDC, Laku Pandai dan *E Channels.*
6. Melakukan pembenahan infrastruktur IT terkait *security* sehingga tidak rentan terhadap ancaman dan serangan dari eksternal.
7. Pada proses tata kelola Divisi Teknologi dan Sistem Informasi telah dilakukan *self-assessment* terhadap IT *Maturity* pada proses pengelolaan Teknologi Informasi.

Directors, who are responsible for and ensure that the Bank has appropriate policies, mechanisms and practices to avoid or minimize failure or loss and ensure the implementation of new business opportunities appropriately under risk management controls. Operational Risk Mapping is carried out on various banking operational activities such as products and services, office networks and their development, as well as developments in information technology.

To mitigate Operational Risk, BRK Syariah takes the following steps:

1. *Carry out continuous development and improvement, especially related to DPK collection products through efforts to improve service quality, increase the competence of frontliners, Priority Sharia BRK Services, Cash Management System, Call Center, New M-Banking, SKPD Online, addition of Prospective Laku Pandai Agents and Sharia DPK product development.*
2. *Regarding the implementation of Human Resource Management, several steps and improvement efforts have been taken, including:*
   - *Fulfillment of account officer (AO) personnel;*
   - *Fulfillment of Sharia Treasury Certification for employees in the Treasury & International Division;*
   - *Increasing the quantity and quality of human resources including policies and development plans as well as employee training in accordance with the needs and development of the bank's business related to technical and managerial competence in-house and publicly;*
   - *Improving the application of principles in identifying and monitoring employee profiles (Know Your Employee).*
3. *In order to improve the quality of risk management implementation the Bank has implemented the ORSA application in all Office and Division networks.*
4. *Implementation of the Business Continuity Plan (BCP) to minimize the impact of the Covid-19 outbreak, through a Directors Circular which contains protocols that must be implemented by all employees in maintaining the continuity of the Bank's business and business.*
5. *The Bank has various supporting applications that are connected to the core banking system with a selection of application platforms that facilitate development, maintenance and integration, including Branch delivery systems, ATM/CDM, SMS Banking, Mobile Banking, EDC, Laku Pandai and E Channels.*
6. *Make improvements to IT infrastructure related to security so that it is not vulnerable to external threats and attacks.*
7. *In the process of governance of the Technology and Information Systems Division, a self-assessment of IT Maturity has been carried out in the Information Technology management process.*

8. Melakukan pembenahan terhadap sistem TI, mempersiapkan infrastruktur pendukung yang handal dalam memonitoring aktif/tidaknya unit kantor sehingga kegagalan sistem dapat cepat dideteksi dan dilakukan perbaikan.
9. Melakukan Pengendalian Mutu Audit (*Quality Assurance*) yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan audit internal terhadap standar internal audit (SPFAIB/IPPF), *audit charter*, kode etik, ketentuan internal dan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi aktivitas audit internal serta pemberian saran perbaikan.
10. Membentuk Bagian *Quality Assurance* dan *Collateral Admin* di bawah Divisi Operasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Quality Assurance* (penyusunan, *review* dan perbaikan kebijakan QA, laporan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan QA) serta kebijakan dan prosedur administrasi jaminan (*collateral admin*).

8. Performing improvements to IT systems, preparing reliable supporting infrastructure in monitoring whether office units are active or not so that system failures can be quickly detected and repaired.

9. Conducting Quality Assurance Audits which aim to evaluate internal audit compliance with internal audit standards (SPFAIB/IPPF), charter audits, codes of conduct, internal provisions and assessment of the effectiveness and efficiency of internal audit activities as well as providing suggestions for improvement.

10. Established a Quality Assurance and Collateral Admin Section under the Operations Division which is responsible for implementing Quality Assurance (comparing, reviewing and improving QA policies, reporting and monitoring the implementation of QA policies) as well as policies and procedures for assurance administration (collateral admin).

RISIKO HUKUM

Menurut Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko Hukum didefinisikan sebagai risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Definisi di atas dikaitkan dengan aktivitas fungsional Bank yang begitu banyak mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menuntut Bank untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan hubungan hukum tersebut. Dalam Surat Edaran OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Disamping keharusan melakukan kaji ulang, Bank juga diharuskan memiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru, harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai *"legal watch"* yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, harus menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

LEGAL RISK

According to OJK Regulations Concerning Standard Guidelines for Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Legal Risk is defined as the risk resulting from lawsuits and/or weaknesses in the juridical aspect. The definition above is related to the functional activities of the Bank which has a lot of legal relations with other parties as previously stated, requiring the Bank to be more careful and careful in carrying out these legal relations. In the OJK Circular Letter concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks it is stated that Banks must conduct regular reviews of contracts and agreements between Banks and other parties, among others by reassessing the effectiveness of the enforceability process to check the validity of the rights in the contracts and agreements. . In addition to having to conduct a review, the Bank is also required to have and carry out procedures for analyzing legal aspects of new products and/or activities, must have a work unit or function that acts as a "legal watch" that provides analysis or legal advice to all employees at every level of the organization. , must assess the impact of changes to certain provisions or regulations on Legal Risk exposure.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian risiko dilakukan cukup efektif dengan saling berkoordinasi antara Divisi Hukum dengan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan manajemen risiko hukum pada saat penyusunan atau *review* BPP/SOP/Perjanjian Kerjasama/Ketentuan

In carrying out the risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk policies/mitigation as follows:

1. The risk control system is carried out quite effectively by coordinating with each other between the Legal Division and other work units in implementing legal risk management when preparing or reviewing BPP/SOP/Cooperation Agreements/other provisions by

lainnya dengan memberikan masukan/pendapat sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.

- Untuk menunjang pemahaman pegawai terkait Risiko Hukum pada pelaksanaan eksekusi agunan kredit hapus buku, Bank telah melakukan *workshop* dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan pembicara Asdatun (Asisten Perdata & Tata Usaha Negara) yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu se-Kepulauan Riau.
- Bank juga telah melakukan sosialisasi dan *workshop* dalam rangka peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap dampak Risiko Hukum untuk eksekusi agunan hapus buku. Bank melalui Kejaksaan Tinggi juga meminta legal opini untuk pengamanan eksekusi agunan hapus buku.

2. Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pengelolaan Risiko Hukum oleh Divisi Hukum adalah sebagai berikut:
   - Bagian Litigasi:
     a. Melakukan kerjasama dengan kantor hukum/pengacara untuk menangani setiap permasalahan hukum yang dihadapi Bank;
     b. Pemberian advis hukum atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja yang tidak diatur dalam ketentuan internal Bank;
     c. Melakukan *briefing* dan pendampingan terhadap pegawai Bank yang dimintai keterangannya oleh Aparat Penegak Hukum;
     d. Melakukan gugatan terhadap Debitur yang melakukan wan prestasi pada Bank;
     e. Meminta bantuan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank;
     f. Implementasi pelaksanaan MoU yang telah ditandatangani antara BRK Syariah (Perseroda) dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-wilayah Provinsi Riau dan Kepri dalam rangka penagihan dan/atau penyelesaian terhadap nasabah bermasalah melalui JPN di wilayah Provinsi Riau dan Kepri;
     g. Meminta bantuan *legal opinion* (pendapat hukum) dan meminta bantuan *legal assistance* (pendampingan hukum) atas permasalahan/ kegiatan yang memerlukan pendapat atau pendampingan hukum di luar pendapat/ pendampingan hukum yang telah diberikan oleh Divisi Hukum.
   - Bagian Non Litigasi:
     a. Dalam setiap perjanjian antara Bank dengan pihak eksternal, akan dilakukan uji petik terhadap *draft* perjanjian;
     b. Melakukan harmonisasi terhadap *draft* perjanjian yang telah dilakukan uji petik sebelumnya;

providing input/opinions according to the function of each section.

- *To support employee understanding regarding Legal Risk in the execution of write-off credit collateral, the Bank has conducted a workshop with the Riau Archipelago High Prosecutor's Office with speakers Asdatun (Assistant Civil & State Administration) attended by all Branch Managers and Supporting Branch Leaders throughout the Riau Archipelago.*
- *The Bank has also conducted outreach and workshops in order to increase human resources' understanding of the impact of Legal Risk for execution of write-off collateral. The bank through the High Prosecutor's Office also asked for a legal opinion on securing the execution of the write-off collateral.*

2. *The steps taken in the Legal Risk management strategy by the Legal Division are as follows:*
   - *Litigation Section:*
     a. Collaborating with law offices/lawyers to handle any legal issues faced by the Bank;
     b. Providing legal advice on any problems faced by work units that are not regulated in the Bank's internal regulations;
     c. Conduct briefings and assistance to Bank employees whose statements are questioned by Law Enforcement Officials;
     d. Carrying out lawsuits against debtors who are in default at the Bank;
     e. Request assistance from the State Attorney General (JPN) to resolve problematic financing experienced by the Bank;
     f. Implementation of the implementation of the MoU that has been signed between BRK Syariah (Perseroda) and the High Court and District Attorneys throughout the Riau and Riau Islands Provinces in the context of billing and/or settlement of problem customers through JPN in the Riau and Riau Islands Provinces;
     g. Ask for legal opinion and ask for legal assistance on issues/activities that require legal opinion or assistance other than the legal opinion/assistance that has been provided by the Legal Division.
   - *Non Litigation Section:*
     a. In each agreement between the Bank and external parties, a sample test will be carried out on the draft agreement;
     b. Carry out harmonization of the draft agreement that has been carried out in the previous sampling;

c. Pemberian advis hukum atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja yang tidak diatur pada ketentuan internal Bank.
3. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh unit kerja terkait telah dilakukan harmonisasi oleh Divisi Hukum.

c. Providing legal advice on any problems faced by work units that are not regulated in the Bank's internal regulations.
3. All policies issued by related work units have been harmonized by the Legal Division.

RISIKO REPUTASI

Berdasarkan Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko reputasi didefinisikan sebagai risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Secara umum definisi Risiko Reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut dapat berupa ketidak mampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan Bank mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank. Reputasi adalah penilaian yang diberikan oleh pihak internal dan eksternal terhadap kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, reputasi terbentuk dari bagaimana sebuah Bank mempresentasikan keberadaannya melalui layanan atau produk, aktivitas usaha, kontribusi terhadap komunitas, dan juga komunikasi yang dilakukan baik terhadap pihak internal maupun eksternal melalui simbol-simbol yang pada akhirnya akan membentuk pandangan atau gambaran mengenai Bank secara menyeluruh. Lebih spesifik pengertian reputasi bagi Bank adalah pandangan umum stakeholders (pihak yang berkepentingan) terhadap kinerja Bank yang bisa dilihat dari bagaimana kinerja keuangan, produk atau layanan, manajemen usaha dan kontribusinya bagi masyarakat yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan maupun perolehan informasi yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Reputasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:
1. BRK Syariah memiliki saluran resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah yaitu Telp.1500470 , whatsapp LAILA 08117575470, email call center@brksyariah.co.id,website, Kantor Cabang dan media sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut petugas *call center* dan *customer service* serta admin *website* dan media sosial berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
2. Pemantauan dan pengendalian Risiko Reputasi yang dilakukan Bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan

REPUTATION RISK

Based on the OJK Regulation concerning Standard Guidelines for Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, reputational risk is defined as the risk resulting from a decrease in the level of trust of stakeholders (stakeholders) originating from a negative perception of the Bank.

In general, the definition of Reputation Risk is the potential loss or destruction of a company's reputation due to low acceptance by the external environment, and even rejection. The cause of the refusal can be in the form of the company's inability to take action on external issues related to the company and the Bank's inability to manage communication with interested parties which can lead to negative perceptions of the Bank. Reputation is an assessment given by internal and external parties on the company's performance within a certain period of time. Reputation is formed from how a bank presents its existence through services or products, business activities, contributions to the community, and also communications made to both internal and external parties through symbols that will eventually form a view or picture of the Bank as a whole. More specifically, the definition of reputation for the Bank is the general view of stakeholders (interested parties) on the performance of the Bank which can be seen from how the financial performance, products or services, business management and contribution to society are obtained through experience, observation and information obtained either directly or indirectly within a certain period of time.

In carrying out the Reputation Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk policies/ mitigation as follows:
1. BRK Syariah has an official channel to receive complaints and questions from customers, namely Tel. 1500470, WhatsApp LAILA 08117575470, email call center@ brksyariah.co.id, website, branch offices and social media. In carrying out these tasks call center and customer service officers as well as website and social media admins coordinate with related work units.

2. Monitoring and controlling Reputation Risk carried out by the Bank through the Corporate Secretary Division is responsible for implementing policies related to handling and resolving negative news, comments, customer

menyelesaikan pemberitaan negatif, komentar, keluhan nasabah yang berkembang di media cetak ataupun media sosial serta menjalankan *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibility/CSR).*

3. Bank secara rutin melakukan penatausahaan terhadap setiap pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah dan pemberitaan negatif di media masa.
4. BRK Syariah secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
5. Telah dilakukan *rating* terhadap media yang bekerja sama saat ini dan ke depan akan terus dilakukan *review* terhadap media cetak maupun *online* dengan persyaratan yang lebih ketat.
6. Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pengelolaan risiko reputasi terutama yang menjadi *concern* Bank adalah:
   - Melakukan pertemuan dan komunikasi dengan insan pers dan perusahaan media;
   - Memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan insan pers terkait kasus *fraud* yang terjadi di BRK Syariah secara lisan dan tulisan;
   - Menggelar konferensi pers dengan insan pers terkait kinerja BRK Syariah serta penjelasan atas kasus yang terjadi di BRK Syariah.

complaints that develop in print media or social media as well as running public services in order to carry out corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR).

3. *The Bank routinely administers every customer complaint in the Customer Complaint Report and negative news in the mass media.*
4. *BRK Syariah continuously improves the Bank's internal policies related to customer complaints and customer service in order to minimize the potential for a decline in the Bank's reputation.*
5. *A rating has been carried out for the media that cooperates at this time and in the future, print and online media will continue to be reviewed with more stringent requirements.*
6. *The steps taken in the reputation risk management strategy, especially those that are a concern for the Bank are:*
   - *Conduct meetings and communications with members of the press and media companies;*
   - *Provide answers to confirmations submitted by members of the press regarding fraud cases that occurred at BRK Syariah verbally and in writing;*
   - *Holding a press conference with members of the press regarding the performance of BRK Syariah and an explanation of the cases that occurred at BRK Syariah.*

RISIKO STRATEGIK

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. BRK Syariah mengelola Risiko Stratejik melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD) melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Stratejik dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Bank secara rutin telah melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja setiap triwulanan yang dihadiri oleh Manajemen, Divisi dan Kantor Cabang, Capem dan Kedai dengan menekankan permasalahan bisnis, capaian kinerja dan operasional di Kantor Layanan.
2. Dalam rangka pengamanan *aset* dan *liabilities* Bank telah melaksanakan sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada nasabah dan masyarakat melalui program kegiatan dan *social event* (Pemda, Korporasi dan Ritel).
3. Langkah - langkah strategi yang dilakukan oleh Bank dalam penyaluran pembiayaan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STRATEGIC RISK

Is the risk caused by the establishment and implementation of the bank's strategy that is not appropriate, making business decisions that are not appropriate or the Bank's lack of responsiveness to external changes. BRK Syariah manages Strategic Risk through a business plan prepared by the Strategic Planning Division as an elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD) through strategic information gathering, market monitoring, regional economy and through a thorough consideration and decision-making process.

In carrying out the Strategic Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk policies/ mitigation as follows:

1. *The Bank regularly conducts quarterly Performance Evaluation Meetings which are attended by Management, Divisions and Branch Offices, Sub-Branch Offices and Shops by emphasizing business issues, performance and operational achievements in Service Offices.*
2. *In order to safeguard assets and liabilities the Bank has carried out outreach, education and publication to customers and the public through activity programs and social events (Regional Government, Corporate and Retail).*
3. *The strategic steps taken by the Bank in disbursing financing in 2022 are as follows:*

- Sinergi dengan industri halal salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan kementrian dalam penyaluran pembiayaan syariah program pemerintah bersubsidi seperti pembiayaan usaha rakyat dan PPR FLPP;
- Sinergi dengan pihak Pemda dalam rangka penyaluran dan pembinaan MKM;
- Sinergi dengan pihak-pihak lainnya dalam wadah ekosistem ekonomi syariah;
- Melakukan penetrasi pada segmen pasar syariah yang menjadi andalan seperti pembiayaan konsumtif aneka guna dan pembiayaan MKM pada segmen petani sawit;
- Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan komersial syariah melalui prioritas pada pembiayaan pinjaman sindikasi yang dikoordinir oleh Bank BUMN terkait program infrastruktur di Indonesia serta program pembangunan lainnya, optimalisasi pembiayaan konstruksi APBD dan Non APBD serta meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan asosiasi;
- Meningkatkan hubungan dengan perbankan syariah dalam rangka pengalihan pembiayaan sindikasi;
- Mengembangkan pasar baru pada sektor ekonomi yang tumbuh dengan NPF rendah;
- Melakukan digitalisasi untuk meningkatkan akses masyarakat ke BRK Syariah;
- Meningkatkan pertumbuhan pembiayaan konsumer kepada ASN dan Non ASN melalui penerapan strategi komunikasi yang efektif dan insentif serta pelayanan yang optimal;
- Meningkatkan penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Non Subsidi;
- Optimalisasi fungsi *Account Officer* (AO) dalam rangka pemasaran produk-produk pembiayaan dengan menggunakan metode *pipeline*;
- Promosi secara *below the line* dan *above the line* antara lain *customer gathering*, *exhibition* produk dan pembinaan MKM;
- Melakukan *review* kebijakan pembiayaan terkait *margin* dan lain-lain dalam rangka antisipasi persaingan.

4. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh BRK Syariah dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:
   - Melakukan edukasi baik sendiri maupun secara bersama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah;
   - Melakukan sinergi dengan industri halal;
   - Melakukan sinergi dengan lembaga keuangan syariah;
   - Melakukan sinergi dengan lembaga keuangan sosial islam (zakat, infaq, sadaqah dan waqaf);
   - Melakukan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga (Pengelolaan Dana Haji BPKH dan sebagainya);

- *One of the synergies with the halal industry is by collaborating with the ministry in channeling subsidized government program sharia financing such as financing for people's businesses and PPR FLPP;*
- *Synergy with the Regional Government in the context of channeling and fostering MHM;*
- *Synergy with other parties in the sharia economic ecosystem;*
- *Penetrating the sharia market segment which is a mainstay, such as multi-purpose consumptive financing and MSM financing in the oil palm smallholder segment;*
- *Increase the growth of sharia commercial financing through prioritizing syndicated loan financing coordinated by state-owned banks related to infrastructure programs in Indonesia and other development programs, optimizing APBD and Non-APBD construction financing and enhancing cooperative relations with related agencies and associations;*
- *Improving relations with sharia banking in the context of syndicated financing transfers;*
- *Developing new markets in growing economic sectors with low NPFs;*
- *Digitalization to increase public access to BRK Syariah;*
- *Increase the growth of consumer financing for ASN and Non-ASN through the implementation of effective communication strategies and optimal incentives and services;*
- *Increasing the distribution of Non-Subsidized Housing Financing (PPR);*
- *Optimizing the Account Officer (AO) function in the context of marketing financing products using the pipeline method;*
- *Below the line and above the line promotions include customer gatherings, product exhibitions and MHM coaching;*
- *Review financing policies related to margins and others in anticipation of competition.*

4. *The strategic steps taken by BRK Syariah in collecting third party funds (DPK) in 2022 are as follows:*
   - *Conduct education both individually and collectively in the sharia economic and financial system;*
   - *Synergize with the halal industry;*
   - *Synergize with Islamic financial institutions;*
   - *Synergize with Islamic social financial institutions (zakat, infaq, sadaqah and waqf);*
   - *Synergize with Ministries and Institutions (BPKH Hajj Fund Management and so on);*

- Digitalisasi produk dan layanan syariah sesuai kebutuhan segmen melalui implementasi *digital solution* bagi pemda dan masyarakat (implementasi QRIS);
- Optimalisasi strategi pemasaran dan penjualan produk dana layanan melalui peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga melalui *digital marketing* dan konvensional;
- Peningkatan *engagement* dan *customer loyalty* melalui layanan *priority banking;*
- Optimalisasi *fee based income* melalui penambahan *biller* pembayaran pada *electronic channel*;
- *Rebranding* produk konvensional menjadi produk syariah;
- Peningkatan edukasi literasi keuangan melalui produk tabungan SIMPEL, pemanfaatan *Otobanking* dan memperluas layanan melalui Layanan Keuangan Tanpa Kantor dan Tabungan Sinar Laku Pandai;
- Penguatan program promosi melalui program hadiah dan undian, *merchant discount, event, customer gathering* dan expo;
- Peningkatan kompetensi *frontliner* dan *funding officer* melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan *learning center;*
- Optimalisasi pengelolaan dana daerah dan dana yang bersumber dari BUMN serta Swasta Nasional.

5. Dalam menghadapi persaingan bisnis, BRK Syariah juga menetapkan strategi antara lain:
   - Melakukan perubahan struktur organisasi, proses kerja dan cara monitoring;
   - Me-*review* kekuatan internal;
   - *Mapping* target (Pembiayaan, DPK dan Layanan);
   - Meningkatkan disiplin pegawai dalam memahami seluruh kebijakan.

- Digitalization of sharia products and services according to segment needs through the implementation of digital solutions for regional governments and the community (QRIS implementation);
- Optimizing the marketing strategy and sales of products and services through increasing collaboration with business actors and private companies/third parties through digital and conventional marketing;
- Increasing engagement and customer loyalty through priority banking services;
- Optimizing fee-based income through adding payment billers to electronic channels;
- Rebranding conventional products into sharia products;
- Improving financial literacy education through SIMPEL savings products, utilizing Otobanking and expanding services through Officeless Financial Services and Sinar Laku Pandai Savings;
- Strengthening promotional programs through prize and sweepstakes programs, merchant discounts, events, customer gatherings and expos;
- Increasing the competence of frontliners and funding officers through integrated education and training with learning centers;
- Optimizing the management of regional funds and funds originating from SOEs and the National Private.

5. In facing business competition, BRK Syariah also determines strategies including:
   - Making changes to the organizational structure, work processes and methods of monitoring;
   - Reviewing internal strengths;
   - Target mapping (Financing, DPK and Services);
   - Increase employee discipline in understanding all policies.

RISIKO KEPATUHAN

Merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan Bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU & PPT. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait prinsip prudential banking seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), GWM, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

COMPLIANCE RISK

Is a risk caused by the Bank not complying with or not implementing laws and regulations and other applicable provisions. The Compliance Division regularly assists and reviews the Bank's compliance aspects, especially suspicious or unusual transactions. The Bank fully complies with the Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the APU & PPT Policy. Other provisions that must be complied with, especially those related to prudential banking principles such as the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), GWM, Earning Asset Quality, Maximum Funding Limit (BMPD) and Net Open Position (NOP).

In carrying out the Compliance Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

1. Bank telah melakukan *review* atas beberapa Kebijakan terkait fungsi kepatuhan seperti:
   - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
   - Pedoman Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)
   - Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BRK Syariah
   - Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang
2. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
   - Membuat rencana aksi untuk merancang perhitungan *risk appetite statement* dan *risk tolerance* untuk memantau risiko kepatuhan Bank.
   - Melakukan pemantauan terhadap setiap laporan yang wajib dilaporkan ke pihak Otoritas, sebagai bagian kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
   - Bank telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan sebagai media/sarana dalam memonitor risiko kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal maupun ketentuan regulator, memonitoring tindak lanjut temuan eksternal, memonitoring rasio prinsip kehati-hatian serta dalam rangka pengukuran budaya kepatuhan untuk meminimalisir dampak dari adanya pelanggaran terhadap risiko kepatuhan yang timbul dikemudian hari.
   - Dalam mendukung pelaksanaan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk nasabah *high risk* khususnya PEP, Bank telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan formulir *Enhanced Due Diligence* (EDD) kepada unit kantor.
   - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan APU PPT kepada 110 (seratus sepuluh) orang pegawai yaitu Pemimpin Seksi, Petugas *Customer Service*, Petugas *Teller* dan Petugas *Account Officer* yang dilaksanakan secara tatap muka.
   - Menyampaikan *review/resume* terhadap ketentuan eksternal (OJK/BI) yang baru diterbitkan kepada unit kerja yang terkait untuk disesuaikan dengan kebijakan internal.

1. The Bank has reviewed several policies related to the compliance function, such as:
   - *Guidelines for Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System)*
   - *Guidelines for Conflict of Interest*
   - *Guidelines for Gratification Control in the Sharia BRK Environment*
   - *Guidelines for Implementing the Anti-Money Laundering Program*
2. In managing compliance risk the Bank has done the following:
   - *Create an action plan to design a risk appetite statement and risk tolerance calculation to monitor the Bank's compliance risk.*
   - *Monitor every report that must be reported to the Authority, as part of the corporate governance improvement framework.*
   - *The Bank already has a Compliance Information System Application as a medium/means for monitoring the Bank's compliance risk with internal regulations and regulatory provisions, monitoring follow-up external findings, monitoring the ratio of prudential principles and in the context of measuring compliance culture to minimize the impact of a violation on compliance risk that will arise in the future.*
   - *In supporting the implementation of Enhanced Due Diligence (EDD) for high risk customers, especially PEP, the Bank has conducted socialization regarding the use of the Enhanced Due Diligence (EDD) form to office units.*
   - *Carry out APU PPT socialization and training to 110 (one hundred and ten) employees, namely Section Leaders, Customer Service Officers, Teller Officers and Account Officers which are carried out face to face.*
   - *Delivering a review/resume of newly issued external regulations (OJK/BI) to the relevant work units to comply with internal policies.*

RISIKO IMBAL HASIL

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Imbal Hasil dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Dalam rangka menghindari gejolak nasabah akibat dari perubahan aktifitas usaha konvensional menjadi

RETURN RISK

Is the risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, due to changes in the rate of return received by the Bank from channeling funds, which may affect the behavior of the Bank's third party fund customers.

In carrying out the function of controlling Return Risk and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

1. In order to avoid customer turmoil due to changes in conventional business activities to sharia and anticipate

syariah dan mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah akibat imbal hasil yang diterima belum memenuhi ekspektasi *return* nasabah ***(displaced commercial risk),*** maka Bank mengambil kebijakan khusus yang diberlakukan selama rentang waktu penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yaitu 365 hari sejak Bank melakukan perubahan aktifitas dari Bank Konvensional ke Syariah dengan memberlakukan kebijakan *income smoothing*.

2. Opini yang dikeluarkan DPS terkait produk Dana, Jasa dan Pembiayaan selama periode Juli s.d. September 2022 adalah Opini No.019/O-DPS/XI/2022 tanggal 01 November 2022 Perihal Skema Pengakuan Keuntungan Murabahah Anuitas.
3. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dan telah tersedia.
4. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
5. Penetapan Tingkat Imbal Hasil Deposito dibahas dalam Rapat SHALMA melalui Divisi *Treasury* & Internasional dan unit kerja lainnya.
6. Proses manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil, terutama terkait hubungan baik dengan para deposan sehingga risiko deposan mencairkan dana secara tiba-tiba dapat dimitigasi dengan baik.

withdrawals of funds by customers due to the returns received not meeting customer return expectations (displaced commercial risk), the Bank adopts special policies that are enforced during the time span for settling customer rights and obligations. namely 365 days since the Bank changed its activities from Conventional Bank to Sharia by imposing an income smoothing policy.

2. *Opinions issued by DPS regarding Funds, Services and Financing products during the period July to. September 2022 is Opinion No.019/O-DPS/XI/2022 dated 01 November 2022 regarding the Murabahah Annuity Profit Recognition Scheme.*
3. *Yield risk management policies and procedures are adequate and in place.*
4. *Adequacy of organizational tools to support the implementation of effective risk management, including clarity of authority and responsibility.*
5. *Determination of the Return on Deposits was discussed at the SHALMA Meeting through the Treasury & International Division and other work units.*
6. *The process of yield risk management is quite adequate in identifying, measuring, monitoring and controlling the risk of return, especially related to good relations with depositors so that the risk of depositors withdrawing funds suddenly can be properly mitigated.*

RISIKO INVESTASI

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit* and *loss sharing*.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Investasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Bank telah membuat kebijakan khusus terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atas debitur yang terdampak *Covid-19* dengan memperhatikan prinsip *four eyes principle* dan kehati-hatian.
2. Bank telah membentuk Bagian *Financial Review* yang berada di bawah Divisi Manajemen Risiko, yang berfungsi meningkatkan proses penyaluran pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna memitigasi terjadinya potensi pembiayaan bermasalah.

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola Bank. Trend hasil *self assessment* Laporan Profil Risiko BRK Syariah sepanjang tahun 2022 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory*, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah **Peringkat 2 *Low to Moderate*.**

INVESTMENT RISK

Is the risk due to the Bank taking part in the loss of the customer's business that is financed in profit-sharing-based financing using both the net revenue sharing method and those using the profit and loss sharing method.

In carrying out the Investment Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

1. *The Bank has made a special policy regarding the implementation of financing restructuring for debtors affected by Covid-19 by taking into account the four eyes principle and prudence.*
2. *The Bank has established a Financial Review Section which is under the Risk Management Division, which functions to improve the financing disbursement process so that it can run properly in accordance with the precautionary principle in order to mitigate potential problematic financing.*

*The risk profile assessment is an assessment of the Inherent Risk and the Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for the 10 (ten) types of risks managed by the Bank. The trend of self-assessment results of the BRK Syariah Risk Profile Report throughout 2022 was relatively stable with an Inherent Risk rating of Low to Moderate and a Satisfactory Risk Management Implementation Quality Rating, resulting in an overall composite risk rating of **2 Low to Moderate Rating**.*

No	Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren *Inherent Risk Rating*	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Rating of Quality of Implementation of Risk Management*	Peringkat Tingkat Risiko *Risk Level Rating*	*Risk Profile*
1	Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Credit Risk*
2	Risiko Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Market Risk*
3	Risiko Likuiditas	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Liquidity Risk*
4	Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	3	*Operational Risk*
5	Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Legal Risk*
6	Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Reputation Risk*
7	Risiko Stratejik	*Moderate*	*Fair*	3	*Strategic Risk*
8	Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Compliance Risk*
9	Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Return Risk*
10	Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Investment Risk*
	Peringkat Komposit	***Low to Moderate***	***Satisfactory***	**2**	***Composite Rating***

Langkah-langkah pengendalian BRK Syariah berdasarkan Profil Risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.
3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi *Operational Risk Self-Assessment* (ORSA) untuk mendukung kemudahan dan efektivitas penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di BRK Syariah.
4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, Bank melakukan *monitoring* secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti *Fraud*.
5. Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. Me*review* kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti Peraturan OJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal Bank.

BRK Syariah control measures based on the Risk Profile are as follows:

1. *The Bank has established a centralized and independent risk management organizational structure that has the function of identifying, measuring, monitoring and managing basic risks and establishing risk policies and procedures.*
2. *The Bank manages risk by ensuring that all activities and relationships between the Bank's business activities and third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank and ensure conformity between the Bank's business activities and other activities so that the Bank's reputation is maintained.*
3. *In managing risk, especially operational risk, all employees have the duty and responsibility to manage risk in their respective work units and pay attention to effective controls to anticipate possible risks that could harm the Bank. In this regard, the Bank has created an Operational Risk Self-Assessment (ORSA) application to support the ease and effectiveness of risk management implementation, especially in the process of identifying, measuring, monitoring and controlling operational risk at BRK Syariah.*
4. *One of the Bank's efforts to prevent and detect fraud, the Bank regularly monitors the Bank's financial data and transactions through the Anti-Fraud Application.*
5. *The Bank conducts stress testing periodically to measure the level of resilience of the Bank in facing the worst possible scenario.*
6. *Reviewing Bank policies and procedures adapted to external regulations such as OJK Regulations, SEOJK, PBI, SEBI and other external regulations as well as Bank internal regulations.*

Sosialisasi Manajemen Risiko

BRK Syariah secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara *in class* (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai BRK Syariah dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau *monitoring* ke seluruh jaringan kantor BRK Syariah.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan *briefing* pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet BRK Syariah.

Selain itu, pada tahun 2022 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi *Operational Risk Self assessment* (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang BRK Syariah.

Socialization of Risk Management

BRK Syariah routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management outreach activities is carried out in class (face to face). These face-to-face activities begin when employees are accepted as BRK Syariah employees and will be held periodically at least 1 (one) time a year. Apart from face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. *Conduct outreach and/or monitoring to the entire BRK Syariah office network.*
2. *Issuing provisions related to the implementation of risk management.*
3. *Briefing activities on work units before carrying out activities.*
4. *Delivering directions related to the implementation of risk management orally, in writing or through the BRK Syariah intranet.*

In addition, in 2022 the Risk Management Division has socialized monitoring of the Operational Risk Self Assessment (ORSA) Application at all BRK Syariah Branch Offices.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2022 BRK Syariah telah mengikutsertakan seluruh pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko dengan persentase kelulusan sebesar 99,9%, dimana terdapat 57 (lima puluh tujuh) orang pegawai belum mengikuti sertifikasi dan 2 (dua) orang pegawai belum lulus sertifikasi.

Risk Management Competency Development

Risk Management Certification

In 2022 BRK Syariah has included all Bank employees in Risk Management Certification with a passing percentage of 99.9%, of which 57 (fifty seven) employees have not taken certification and 2 (two) employees have not passed certification.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko Bank. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Review of the Effectiveness of the Risk Management System

BRK Syariah periodically evaluates the effectiveness of the risk management system. Evaluation results are used to adjust and strengthen the management of the Bank's risk management system. Evaluation includes adjustments to strategies, risk management policies, quality of risk management implementation which includes risk governance, risk management framework, adequacy of risk management processes, adequacy of risk management information systems, and adequacy of risk control systems.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko.

Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Insani (SDI)
   a. Meningkatkan kompetensi SDI untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun eksternal training;
   b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning* manajemen risiko;
   c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
   Memperkuat dan mengembangkan tools, model, serta metodologi pengelolaan seluruh risiko yang lebih baik melalui pengembangan *model rating, scoring, stress test,* dan model risiko lainnya serta pengembangan metodologi *control testing.*
3. *System*
   Meningkatkan pengamanan *IT system* operasional.

Adapun uraian terkait dengan Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan BRK Syariah per posisi 31 Desember 2022 dan 2021 telah diuraikan pada Bab Analisa Pembahasan Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners or the Risk Monitoring Committee on the Adequacy of the Risk Management System

BRK Syariah always strives to manage risk dynamically in line with developments in internal and external conditions. The Board of Commissioners is of the view that the implementation of risk management has been going well. The Board of Directors and Board of Commissioners constantly evaluate the effectiveness of risk management implementation.

Evaluation results are used to make efforts to strengthen risk management, including:

1. *Human Resources (HR)*
   a. *Improving HR competencies to support Bank activities through internal and external training;*
   b. *Increasing employee risk awareness, among others through risk management e-learning;*
   c. *Increasing legal awareness for all levels of the Bank.*
2. *Tools and Methodology*
   Strengthen and develop better tools, models and methodologies for all risk management through the development of rating models, scoring, stress tests and other risk models as well as development of control testing methodologies.
3. *System*
   Improving the security of IT operational systems.

The description regarding the Published Report on Risk Exposure and Sharia BRK Capital as of December 31, 2022 and 2021 has been described in the Discussion Analysis Chapter on Company Performance in this Annual Report.

AUDITOR EKSTERNAL
External Auditors

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan posisi bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, guna memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka BRK Syariah menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk mengaudit laporan keuangan tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP.

Audit ini untuk memastikan bahwa informasi keuangan BRK Syariah disusun dan disajikan secara berkualitas, sesuai Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan mendapat opini atas kewajaran Laporan Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Proses penunjukan KAP dilakukan dengan tahapan berikut:

1. RUPS memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk KAP sebagai auditor eksternal yang independen untuk memeriksa laporan keuangan BRK Syariah tahun buku 2022.
2. BRK Syariah telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2022 kepada KAP yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. KAP yang ditunjuk adalah KAP yang terdaftar di OJK.
3. Proses pemilihan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan BRK Syariah.

Pada RUPS Tahunan tanggal 23 April 2022 telah disetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan BRK Syariah tahun buku 2022 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit. Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No.003/KA-DK/2022 tanggal 24 Oktober 2022, menunjuk KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan BRK Syariah (Perseroda) tahun

Implementation of the External Audit Function

In accordance with POJK Number 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports that Financial Reports prepared based on financial accounting standards for the position of December must be audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority. In addition, in order to fulfill the implementation of the external audit function in accordance with POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, BRK Syariah uses the services of a Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) to audit annual financial reports based on a work agreement with HOOD.

This audit is to ensure that BRK Syariah financial information is prepared and presented in a quality manner, according to the Professional Standards of Public Accountants and the scope of the audit that has been determined and to obtain an opinion on the fairness of the Financial Statements.

Appointment of Public Accountant

The KAP appointment process is carried out in the following stages:

1. *The GMS gave approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint KAP as an independent external auditor to examine BRK Syariah's financial statements for the 2022 financial year.*
2. *BRK Syariah has assigned an audit assignment of the Annual Financial Statements for the period January to December 2022 to the KAP which has been approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee. The appointed KAP is a KAP that is registered with the OJK.*
3. *The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with BRK Syariah.*

At the Annual General Meeting of Shareholders on April 23 2022 it was agreed that the delegation of authority to the Board of Commissioners would appoint a Public Accounting Firm to audit the BRK Syariah Financial Statements for the 2022 financial year by taking into account the selection process for selecting a Public Accounting Firm by the Audit Committee. The Board of Commissioners, in accordance with the recommendation of the Audit Committee through the Audit Committee letter No.003/KA-DK/2022 dated October 24, 2022, appointed KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo to carry out an Audit of the 2022 BRK Syariah Financial

2022 dengan rincian Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri periode 1 Januari 2022 s/d 21 Agustus 2022 dan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) periode 22 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022. Selain itu, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk KAP tersebut untuk melaksanakan Audit Kinerja & Kepatuhan dan *Review* terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank tahun 2022.

Statements (Perseroda) with details of the Examination Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the period January 1 2022 to August 21 2022 and Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the period August 22 2022 to December 31 2022. In addition, the Board of Commissioners based on the recommendations of the Audit Committee also has appointed the KAP to carry out a Performance & Compliance Audit and Review of the Bank's Information System Technology in 2022.

Periode Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, dan *Audit Fee*

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Penggunaan jasa audit dari akuntan Publik (AP) yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut mengacu pada POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Laporan Hasil Audit dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada BRK Syariah sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar dan tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut daftar Akuntan Publik yang melakukan jasa audit di BRK Syariah.

Period of Public Accounting Firm, Public Accountant and Audit Fee

To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor or Public Accounting Firm (KAP) may not have a conflict of interest with the Company. The use of audit services from the same Public Accountant (AP) is limited and the longest for an audit period of 3 (three) consecutive financial years refers to POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Audit Reports and Management Letters have been submitted in a timely manner to BRK Syariah so that Publication Reports are in newspapers and are never too late to be submitted to Bank Indonesia, OJK and the Supreme Audit Agency. In carrying out its duties, the appointed KAP has carried out an audit independently based on the Professional Standards for Public Accountants prepared by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The following is a list of Public Accountants who perform audit services at BRK Syariah.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Audit *Fee* Periode 5 (lima) Tahun Terakhir
Table of Public Accounting Firm, Name of Accountant, Audit Fee for the Last 5 (five) Year Period

Tahun *Year*	Kantor Akuntan Publik *Public accounting firm*	Periode KAP *KAP period*	Nama Akuntan (*Partner* Penanggung Jawab) *Name of Accountant (Partner in Charge)*	Periode AP *AP period*	Audit *Fee* (Rp) *Audit Fee (Rp)*
2022	Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo	Periode ke 1	Zulbadri, CPA	Periode ke 1	666.000.000
2021	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 3	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 3	600.000.000
2020	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 2	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 2	632.500.000
2019	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 1	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 1	600.000.000
2018	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 3	Defa Aulia Farhan, SE., Ak.,CA., CPA	Periode ke 2	645.370.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo selain untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2022 dengan rincian Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri periode 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 dan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) periode 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, juga melaksanakan Audit Kinerja & Kepatuhan dan *Review* terhadap Teknologi Sistem Informasi BRK Syariah tahun 2022.

Other Services Provided by Accountants

Public Accountant Office Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo in addition to carrying out an Audit on the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2022 with details of Auditing the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the period January 1 2022 to August 21 2022 and Examination of PT Financial Statements Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the period August 22 2022 to December 31 2022, also carried out Performance & Compliance Audits and Reviews of BRK Syariah Information System Technology in 2022.

Pengawasan dan Komunikasi Bank dan Akuntan Publik

Dalam pelaksanaan audit, BRK Syariah senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress audit* dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supervision and Communication of Banks and Public Accountants

In carrying out audits, BRK Syariah always communicates with external auditors regarding audit implementation plans, audit progress and other important issues to support the smooth running of the audit process. The audit results report is submitted to the OJK in accordance with the applicable laws and regulations.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BRK Syariah dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 24 Oktober 2022.

Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee evaluates the implementation of the provision of audit services on annual financial information by the AP and/or KAP which at least includes:

1. *Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards;*
2. *Adequacy of field work time;*
3. *Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling; And*
4. *Recommendations for improvements provided by the AP and/or KAP.*

The Audit Committee evaluation results report was submitted by the Board of Directors of BRK Syariah using the form contained in the attachment to SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and signed by the Audit Committee on the 24th October 2022.

KODE ETIK (*CODE OF CONDUCT*)
Code of Conduct

BRK Syariah menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan Bank yang amanah, transparan dan akuntabel.

BRK Syariah realizes the importance of implementing good corporate governance (GCG) as a tool to increase value and long-term business growth in a sustainable manner, not only for Shareholders but also for all stakeholders, by business management that not only pursues profits but also manages a bank that is trustworthy, transparent and accountable..

BRK Syariah telah memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Bank, standar etika dan Kode Etik yang menjadi acuan di setiap level organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan seluruh Pegawai Bank. Yaitu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 071A/KEPDIR/2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct)* PT Bank Riau Kepri.

BRK Syariah owns and implements the values and culture of the Bank, ethical standards and a Code of Ethics which serve as a reference at every level of the organization starting from the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board (DPS) and all Bank employees. Namely stated in the Directors Decree Number: 071A/KEPDIR/2019 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct)* sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct)* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Kode Etik BRK Syariah menjadi dasar sikap dan tindakan pegawai agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta peraturan internal maupun regulasi eksternal yang berlaku.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Compliance Code of Conduct has been updated as stated in the Decree of the Board of Directors No. 172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). The BRK Syariah Code of Ethics forms the basis for employee attitudes and actions so that they work professionally and ethically by using basic principles that refer to the vision, mission and main values of the Bank as well as applicable internal and external regulations.

Pokok-pokok Kode Etik

Nilai-nilai Dasar Kode Etik Kepatuhan

1. ***Integrity***
   Insan BRK Syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai dan kode etik perusahaan dengan menunjukkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ajaran dan prinsip agama, moral, etika dan budaya.

2. ***Synergy***
   Insan BRK Syariah mengutamakan kerjasama tim yang saling menghargai dan mendukung dengan mengedepankan cara berpikir positif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

3. ***Honesty***
   Insan BRK Syariah mengedepankan kejujuran dalam setiap ucapan dan perbuatan yang bersumber dari ketulusan dan keikhlasan hati.

Principles of the Code of Ethics

Basic Values of the Compliance Code of Ethics

1. ***integrity***
   BRK Syariah personnel have a high commitment to the company's values and code of ethics by demonstrating responsible behavior in accordance with the teachings and principles of religion, morals, ethics and culture.

2. ***Synergy***
   BRK Syariah personnel prioritize teamwork that respects and supports each other by prioritizing positive thinking in an effort to achieve company goals.

3. ***Honesty***
   BRK Syariah personnel prioritize honesty in every word and deed that comes from sincerity and sincerity.

4. ***Adaptive***
   Insan BRK Syariah bersikap kreatif dan inovatif terhadap perubahan dan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat memberikan solusi yang memiliki nilai tambah.

5. ***Respect***
   Insan BRK Syariah senantiasa memberikan pelayanan prima dengan menunjukkan kepedulian yang tinggi, proaktif, dan cepat tanggap guna memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan pelanggan.

6. ***Excellence***
   Insan BRK Syariah menunjukkan pribadi unggul dengan memiliki kompetensi yang tinggi dan terimplementasi dari cara kerja yang cerdas, efektif dan efisien, serta bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi organisasi.

Prinsip Etika Bisnis Bank

1. **Kami Sajikan Mutu**
   Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap Insan BRK Syariah senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan para Stakeholders.

2. **Kami Bekerja Profesional**
   Dalam setiap aktivitas operasional Bank, setiap Insan BRK Syariah dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap Insan Bank wajib melayani setiap nasabah secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencarikan alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

   Ketepatan dan efisiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.

3. **Kami Bertekad Mewujudkan Tata Kelola Bank yang Baik**
   Good Corporate Governance merupakan tata kelola Bank yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para *Stakeholders*. Di dalamnya terkandung 5 (lima) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (T-A-R-I-F). Setiap Insan BRK Syariah dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses *check and balance*.

4. ***Adaptive***
   BRK Syariah personnel are creative and innovative towards the changes and problems they face, so they can provide solutions that have added value.

5. ***Respect***
   BRK Syariah personnel always provide excellent service by showing high concern, being proactive and responsive in order to provide the best solutions to customer needs.

6. ***Excellence***
   BRK Syariah personnel show superior personality by having high competence and implementing smart, effective and efficient work methods, and are passionate about providing the best results for the organization.

Principles of Bank Business Ethics

1. ***We Serve Quality***
   Bank Operational Activities are required to carry out daily activities that must always focus on quality, in other words, every BRK Syariah Personnel always meets the needs and expectations of Stakeholders.

2. ***We Work Professional***
   In every operational activity of the Bank, every BRK Syariah employee is required to understand their rights, obligations, authorities and responsibilities. Every Bank Personnel is required to serve every customer in a professional manner with a polite, friendly and reasonable attitude. Must be responsive and try to understand the needs and find alternative solutions to customer problems as well as possible and with due regard to the interests of the Bank.

   Accuracy and efficiency of service time are factors that support quality service.

3. ***We Are Determined To Realize Good Bank Governance***
   Good Corporate Governance is good Bank governance in order to provide the best value for Stakeholders. It contains 5 (five) principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (T-A-R-I-F). Every BRK Syariah employee in carrying out their daily activities always puts forward the basic principles of Good Corporate Governance. By implementing these principles, it is hoped that there will be a process of checks and balances.

4. **Kami Menjaga Semangat Kebersamaan**
   Setiap Insan BRK Syariah harus menjaga rasa kebersamaan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar pegawai dan pengurus Bank tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.

5. **Kami Menghargai Peranan dan Prestasi Pegawai**
   Keberhasilan pencapaian kinerja BRK Syariah harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada Bank.

Prinsip Etika Kerja

Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi Insan BRK Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi Bank.

Etika Kerja di Bank terdiri dari:

1. **Patuh dan Taat pada Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku dan Prinsip Syariah**
   Setiap Insan BRK Syariah dituntut untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun internal (BPP, SOP, SK, SE dan Instruksi Direksi, dll) sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan/ kebijakan maupun dalam menjalankan kegiatan operasional Bank, serta prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

2. **Melakukan Pencatatan yang Benar Mengenai Segala Transaksi yang Bertalian dengan Kegiatan Bank**
   Segenap Insan BRK Syariah harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat.

3. **Menggunakan dan Melindungi Harta Bank dengan Baik**
   Seluruh Insan BRK Syariah bertanggung jawab atas penggunaan harta benda milik Bank yaitu dapat berupa harta fisik dan non fisik, termasuk semua sarana, prasarana dan perangkat lunak (informasi). Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan

4. ***We Maintain the Spirit of Togetherness***
   Every BRK Syariah employee must maintain a sense of togetherness, not be influenced by threats, acts of violence and various forms of discrimination and harassment based on differences in ethnicity, religion, skin color, gender, age, or personal disability either through comments, jokes and or actions, Likewise, the relationship between employees and management of the Bank should not be influenced by the interests of each.

5. ***We Appreciate the Role and Achievements of Employees***
   The successful achievement of BRK Syariah performance must be seen as the result of the collective work of all employees and work units. Awards must be given to outstanding employees in accordance with their contribution to the Bank.

Principles of Work Ethics

Work ethics are ethical requirements for BRK Syariah personnel in carrying out their functions and duties in order to achieve and realize the Bank's vision and mission.

Work Ethics at the Bank consists of:

1. ***Obey and Obey the Applicable Legislative Provisions and Sharia Principles***
   Every BRK Syariah employee is required to always comply with applicable laws and regulations, both external and internal provisions (BPP, SOP, SK, SE and Directors' Instructions, etc.) as a basis for taking action and making decisions/policies as well as in carrying out activities Bank operations, as well as Sharia principles in carrying out Bank business activities.

2. ***Perform Correct Recording of All Transactions Relating to Bank Activities***

   All BRK Syariah personnel must record data and prepare work reports related to their functions and responsibilities in an honest, correct, correct and accurate manner.

3. ***Using and Protecting Bank Assets Properly***

   All BRK Syariah personnel are responsible for the use of the Bank's property, which can be in the form of physical and non-physical assets, including all facilities, infrastructure and software (information). Use for purposes other than for work purposes must be accountable and with prior written permission from the Head of the Work Unit, and

dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemimpin Unit Kerja, dan Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan bertanggungjawab atas izin yang diberikan.

the Head of the Work Unit concerned is responsible for the permit granted.

4. Menghindarkan Diri dari Persaingan yang Tidak Sehat

Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila:

- Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik BRK Syariah, pengurus dan pegawai.
- Mempromosikan jasa-jasa bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pernyataan-pernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Avoiding Unfair Competition

A competition is considered unhealthy if:

- *In carrying out its business, deliberately or through negligence, do something that can harm the good name of BRK Syariah, management and employees.*
- *Promoting bank services in ways that can directly or indirectly deceive potential customers or customers or with statements that contain things that are untrue or disrepute other banks, either directly or indirectly.*

5. Tidak Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi

Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan Bank, baik secara *financial* maupun kinerja Bank, maka segenap Insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti *fraud, insider trading* dan sejenisnya.
- Mengutamakan objektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda Bank, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

5. Not Abusing Authority for Personal Interests

To avoid the practice of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) which can be detrimental to the Bank, both financially and in terms of the Bank's performance, all BRK Syariah personnel do the following:

- *Not taking advantage of his position and authority to carry out actions that are believed to be classified as Corruption, Collusion and Nepotism or other similar actions that are classified as or lead to detrimental corporate actions such as fraud, insider trading and the like.*
- *Prioritizing objectivity, honesty and openness in every appraisal policy, such as evaluating the quality and price of procurement of goods, selection and appointment of consultants, selection and appointment of partners, maintenance of Bank assets, construction of facilities and infrastructure and other business activities in the broadest sense.*

6. Menghindarkan Diri dari Keterlibatan Pengambilan Keputusan dalam Hal Terdapat Pertentangan Kepentingan

Setiap Insan BRK Syariah menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- Tidak memanfaatkan posisi/jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Tidak melibatkan diri pada proses pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan dimana calon nasabah/rekanan memiliki

6. Avoid Being Involved in Decision Making in the Event of a Conflict of Interest

Every BRK Syariah employee stays away from and avoids any conflicts between personal interests and the interests of the Bank, including but not limited to:

- *Does not take advantage of position/position and authority for personal gain.*
- *Do not involve yourself in the discussion/proposal process and/or decision-making process where the prospective customer/partner has a relationship/*

hubungan/keterkaitan seperti: hubungan bisnis, hubungan hutang-piutang dan hubungan kekerabatan.
- Dilarang menikmati/menerima sebagian maupun seluruh dana dari pembiayaan yang sedang diproses dan/atau telah disetujui/diberikan kepada nasabah.
- Dilarang menggunakan atau menerima fasilitas milik nasabah dan/atau relasi/rekanan.
- Tidak diperkenankan memperoleh atau meminta pinjaman dari nasabah dan/atau relasi/rekanan yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dilarang memberikan talangan atau membayar sebagian/seluruh pinjaman/pembiayaan nasabah dengan menggunakan dana pribadi Insan Bank.

7. Menjaga Kerahasiaan Nasabah dan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data-data perbankan, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia BRK Syariah dari pihak-pihak (internal maupun eksternal Bank) yang tidak berkepentingan, setiap Insan Bank tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan.
- Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia Bank, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Bank.
- Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Bank untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang.

8. Memperhitungkan Dampak Merugikan dari Setiap Kebijakan yang Ditetapkan Bank terhadap Keadaan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan.

9. Tidak Menerima Hadiah atau Imbalan

Dalam menjalin hubungan dengan para nasabah, rekanan dan mitra Bank, segenap Insan BRK Syariah selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan *fairness*, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Tidak menerima imbalan, hadiah atau cindera

relationship such as: business relationship, debt-receivable relationship and kinship relationship.

- *Prohibited from enjoying/receiving part or all of funds from financing that is being processed and/or has been approved/provided to customers.*

- *It is prohibited to use or receive facilities belonging to customers and/or relations/partners.*
- *It is not permitted to obtain or ask for loans from customers and/or relations/partners that are used for personal gain which may cause a conflict of interest.*

- *It is prohibited to provide bailouts or pay part/all of customer loans/financing using Bank Personnel's personal funds.*

7. Maintaining Customer and Bank Confidentiality

In order to maintain the confidentiality of banking data, personnel data and other data belonging to the BRK Syariah confidential data category from parties (internal and external to the Bank) who have no interest, every Bank Personnel does not do the following:

- *Providing customer data and information to any party in accordance with Bank secrecy rules and job secrets.*
- *Providing data and information belonging to the Bank's confidential category, whether it relates to financial business strategies, policies, products, services, technology, personnel and other data that are believed and considered to be detrimental to the Bank.*
- *Leaking or using data and information classified as confidential by the Bank for certain political interests, and or unauthorized third parties.*

8. Taking into account the Adverse Impact of Each Policy Established by the Bank on Economic, Social, and Environmental Conditions

In establishing a decision or policy, it is obligatory to take into account the adverse impacts that may occur as a result of the policies stipulated, both those that cause economic, social unrest and environmental damage.

9. Not Accepting Gifts or Rewards

In establishing relationships with customers, partners and Bank partners, all BRK Syariah personnel always pay attention to aspects of honesty, fairness and fairness, by not doing the following things:

- *Do not receive rewards, gifts or souvenirs and/or the*

mata dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun dengan batasan sebagaimana yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BRK Syariah.
- Dalam rangka menjaga nama baik Bank, setiap Insan BRK Syariah menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan (*risywah*).

10. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela yang Dapat Merugikan Citra Profesinya

Sebagai Insan BRK Syariah tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya.

11. Menjaga Hubungan Baik antar Sesama Insan Bank

Insan BRK Syariah dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan masukan yang bersifat positif guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

12. Menjaga Keamanan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Seluruh Insan BRK Syariah, harus:
- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama/syariat Islam, etika, dan kesusilaan.
- Menjaga data informasi (*password*, *user* dan lain-lain) yang menjadi wewenangnya.

Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Setiap Level Organisasi

Kepatuhan terhadap Kode Etik menjadi salah satu komitmen setiap insan BRK Syariah dalam menerapkan tata kelola yang baik di setiap level organisasi Bank yang meliputi seluruh pegawai, termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai bentuk implementasinya, Direksi, Dewan Komisaris dan DPS) BRK Syariah telah melakukan penandatanganan Pernyataan Tahunan Kepatuhan terhadap Kode Etik, kemudian ditindaklanjuti ke seluruh tingkatan organisasi. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Kepatuhan.

like in any form with the limitations as stipulated in the Gratification Control Guidelines in the Sharia BRK Environment.

- *In order to maintain the good name of the Bank, every BRK Syariah employee avoids all forms of bribery (risywah).*

10. Do not commit despicable acts that can harm the image of the profession

As a member of BRK Syariah, he does not commit disgraceful acts, such as gambling, drunkenness, immoral acts, using psychotropic substances, taking debt beyond his ability to pay.

11. Maintain Good Relations Between Bank Personnel

BRK Syariah personnel in their work must communicate and interact with each other and provide positive input to each other in order to create a harmonious relationship in each task and work.

12. Maintain Work Safety and Clean Work Environment

All BRK Syariah personnel must:
- *Securing the work environment including company assets, data and transactions.*
- *Do not violate the law.*
- *Do not divulge company secrets.*
- *Do not carry out activities that violate the norms of religion/Islamic law, ethics, and decency.*
- *Maintain data information (passwords, users and others) that are under their authority.*

Statement of the Code of Ethics Applies to Every Level of the Organization

Compliance with the Code of Ethics is one of the commitments of every BRK Syariah employee in implementing good governance at every level of the Bank's organization which includes all employees, including the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (DPS). As a form of implementation, the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS) of BRK Syariah have signed the Annual Statement of Compliance with the Code of Ethics, then followed up on all levels of the organization. If the published information is incomplete, employees can ask their direct superiors or the work unit responsible for GCG implementation, namely the Compliance Division at any time.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran dan juga pemahaman dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai utama BRK Syariah. Dari kesadaran itu dapat ditumbuhkan sikap yang dikehendaki oleh Bank terhadap Insan BRK Syariah dalam hubungan antar pegawai, mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan Bank serta menjaga harta dan reputasi Bank. Sosialisasi Kode Etik merupakan tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan, selama tahun 2022 dilaksanakan dengan program:

1. Sosialisasi kepada karyawan baru agar dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik Kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank.
2. *Reminder* kepada seluruh Insan Bank antara lain dalam bentuk penandatanganan surat pernyataan kepatuhan setiap tahun.
3. Menyampaikan masukan dan saran untuk perubahan dan perbaikan.
4. Forum diskusi (*problem solving*) baik *on line* atau *off line*.
5. Apabila ada perubahan, Kode Etik Kepatuhan akan diinformasikan kepada Insan Bank.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi Kode Etik BRK Syariah dilakukan dengan secara terus-menerus, baik dalam deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan Kode Etik, adanya kebijakan Bank yang selaras dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, sikap perbuatan, dan lain sebagainya. BRK Syariah melakukan pemantauan penerapan Kode Etik secara berkesinambungan dan jika terjadi pelanggaran oleh Insan BRK Syariah maka akan diberikan sanksi yang tegas, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran Kode Etik BRK Syariah termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan Pedoman *Whistleblowing System*. Ketentuan mengenai sanksi Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct)* BRK Syariah (Perseroda).

Dissemination and Dissemination of the Code of Ethics

Dissemination or dissemination of the Code of Ethics is carried out periodically to raise awareness and also understanding in implementing behavior that is in accordance with the main values of BRK Syariah. From this awareness, the attitude desired by the Bank towards BRK Syariah personnel can be grown in relations between employees, making decisions by prioritizing the interests of the Bank and safeguarding the assets and reputation of the Bank. Socialization of the Code of Ethics is the responsibility of the Compliance Division, during 2022 it will be carried out with the following programs:

1. *Socialization to new employees so they can know, understand and implement the Compliance Code of Ethics in the Bank's operational activities.*
2. *Reminder to all Bank personnel, among others in the form of signing a statement of compliance every year.*
3. *Submit input and suggestions for changes and improvements.*
4. *Discussion forums (problem solving) both on line and off line.*
5. *If there are changes, the Compliance Code of Ethics will be informed to the Bank's Personnel.*

Efforts to Implement and Enforce the Code of Ethics

The implementation of the Sharia BRK Code of Ethics is carried out continuously, both in the declaration of understanding and compliance with the Code of Ethics, the existence of Bank policies that are aligned with corporate values and culture, attitudes, and so on. BRK Syariah monitors the implementation of the Code of Ethics on an ongoing basis and if there is a violation by BRK Syariah personnel, strict sanctions will be given, according to the level of the violation committed.

Violations of the BRK Syariah Code of Ethics are included in actions that can be reported through whistleblowing facilities based on the policy of implementing the Whistleblowing System Guidelines. Provisions regarding sanctions for the Code of Ethics are regulated in the Decree of the Board of Directors No.172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the BRK Syariah Compliance Code of Conduct (Perseroda).

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanksi pelanggaran Kode Etik antara lain meliputi:

1. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I;
2. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan II;
3. Teguran tertulis berupa Surat Peringatan III;
4. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
5. Demosi *grade* setingkat lebih rendah sampai dengan 4 (empat) tingkat lebih rendah dari peringkat sebelumnya.

Types of Sanctions for Violation of the Code of Ethics

Types of sanctions for violating the Code of Ethics include:

1. *Written warning in the form of Warning Letter I;*
2. *Written warning in the form of Warning Letter II;*
3. *Written warning in the form of Warning Letter III;*
4. *Statement of dissatisfaction in writing;*
5. *Demotion grade is one level lower up to 4 (four) levels lower than the previous rank.*

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan Pada Tahun 2022

Selama tahun 2022, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BRK Syariah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai, dengan rekapitulasinya sebagai berikut:

Number of Violations of the Code of Ethics and Sanctions Given in 2022

During 2022, there were 43 (forty three) employees who violated the BRK Syariah Code of Ethics, with the summary as follows:

Tabel Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2022
Table of the Number of Cases of Violation of the Code of Ethics in 2022

Kategori Sanksi *Sanction Category*	Jenis Sanksi *Types of Sanctions*	Jumlah *Amount*	Status Penyelesaian *Completion Status*
Ringan *Light*	Peringatan I *Reminder I*	9	selesai *finished*
	Peringatan II *Reminder II*	5	selesai *finished*
	Peringatan III *Reminder III*	5	selesai *finished*
Sedang *Currently*	Pernyataan tidak puas *Dissatisfied statement*	14	selesai *finished*
	Demosi Grade *Grade Demotion*	6	selesai *finished*
Berat *Heavy*	Pemutusan hubungan kerja. *Work termination.*	4	selesai *finished*

PERKARA PENTING
Important Materials

Sepanjang tahun 2022, BRK Syariah menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Throughout 2022, BRK Syariah faces important cases, whether in the form of civil, criminal or industrial relations. Some of them are in the process of being resolved and the rest have been declared to have permanent legal force (inkracht). The recapitulation of important cases encountered is described in the table below:

Tabel Perkara Penting Tahun 2022
Table of Important Matters in 2022

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah *Amount*			*Legal Issues*
		Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*	Hubungan Industrial *Industrial relations*	
1.	Jumlah Kasus yang Dihadapi	1	8	0	*Number of Cases Faced*
2.	Kasus yang telah Selesai (berkekuatan hukum tetap)	0	2	0	*Cases that have been Completed (permanent legal force)*
3.	Kasus Dalam Proses Penyelesaian	1	6	0	*Cases in the Process of Completion*

Dari total 9 (sembilan) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 2 (dua) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sedangkan 7 (tujuh) perkara masih dalam proses penyelesaian. Dari 2 (dua) perkara yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, terdapat 1 (satu) perkara dimana Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

Out of a total of 9 (nine) legal issues faced by the Bank, 2 (two) cases have been resolved (have permanent legal force), while 7 (seven) cases are still in the process of settlement. Of the 2 (two) cases that have received a decision from the local District Court, there is 1 (one) case where the Defendant in the legal dispute appealed to a higher level.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2022, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah yang sedang menjabat.

Legal Issues Being Faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

During 2022, there were no legal issues currently being faced by the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Entitas Anak

Mengingat BRK Syariah tidak memiliki Entitas Anak maka tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang yang dihadapi oleh Entitas Anak.

Legal Issues Faced by Subsidiaries

Considering that BRK Syariah does not have Subsidiaries, there is no information on legal issues faced by Subsidiaries.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Whistleblowing System

WHISTLEBLOWING SYSTEM

brksyariah
berkah untuk semua

Pedoman *Whistleblowing System*

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BRK Syariah. Kebijakan WBS BRK Syariah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 109/KEPDIR/2018 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang mengacu POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Pedoman *Whistleblowing System* sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Untuk informasi mengenai WBS BRK Syariah telah disampaikan dalam *website*: *http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing.*

Whistleblowing System Guidelines

The Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System/WBS) is a disclosure of acts of violation or disclosure of acts that are against the law, unethical/immoral acts or other actions that can harm BRK Syariah. BRK Syariah WBS Policy has been regulated in
Board of Directors Decree Number 109/KEPDIR/2018 concerning Guidelines for an Alleged Whistleblowing System which refers to POJK No.39/POJK.03/2019 concerning Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Whistleblowing System Guidelines have been updated as stated in the Board of Directors Decree No.171/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Alleged Whistleblowing System) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Information regarding BRK Syariah WBS has been submitted on the website: http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing.

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BRK Syariah, yaitu *http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing,* dimana pelapor (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengungkapan dugaan pelanggaran atau *fraud* dengan cara:

1. Pelapor menyampaikan laporan *WBS* melalui Aplikasi **BRK Syariah *WBS*** pada *website* BRK Syariah pada kolom/tab *whistleblowing*.
2. Pelapor mengisi data isian pada formulir pengaduan secara lengkap dan benar, memuat informasi berupa
   a. Jenis pelanggaran;
   b. Uraian pengaduan;
   c. Informasi pelaku/terlapor;
   d. Bukti pendukung/dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran;
   e. Data pelapor (*non mandatory*).

Media for Submission of Violation Reports

The channel that can be used by reporters to submit their reports can be accessed through the BRK Syariah website, namely http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing, where the reporter (whistleblower) can submit disclosures of alleged violations or fraud by:

1. *The reporter submits the WBS report through the B**RK Syariah WBS** Application on the BRK Syariah website in the whistleblowing column/tab.*
2. *The complainant fills in the filling data on the complaint form completely and correctly, including information in the form of*
   a. Type of violation;
   b. Complaint description;
   c. Information on the perpetrator/reported person;
   d. Supporting evidence/documents showing an alleged violation;
   e. Reporting data (non mandatory).

Apabila terdapat hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut terkait pelaporan WBS dapat menghubungi unit kerja pengelola WBS dengan nomor telepon (0761) 47070 Ext. 1220 dan 1221.

Jenis Pelanggaran *WBS*

1. Perbuatan *fraud*.
2. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
   a. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
   b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Bank.
   c. Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan Bank.
   d. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian Bank.
   e. Penyelewengan uang/kas Bank.
   f. Penggelapan aset dan/atau inventaris Bank.
   g. Pemerasan.
   h. Perbuatan Asusila.

Pengelola Laporan *WBS*

Setiap pengaduan yang sampai kepada Pengelola *WBS*, akan ditindaklanjuti ke Direktur Utama selaku Penanggung Jawab *WBS* melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selanjutnya Direktur Utama memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut atas Laporan WBS tersebut. Jika Penanggung Jawab *WBS* setuju untuk ditindaklanjuti, maka Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam. Untuk selanjutnya Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi, untuk dilanjutkan dengan keputusan sanksi.

Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Pada prinsipnya hak dari pelapor *WBS* adalah mendapatkan perlindungan atas laporan yang disampaikan untuk memberikan rasa aman terkait kemungkinan ancaman atas laporan *WBS* yang disampaikannya. Untuk itulah BRK Syariah memberikan perlindungan bagi pelapor yang meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas dan melindungi pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan dari petugas, pengelola dan penanggung jawab *WBS*.
2. Perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas, pelapor dan isi laporan serta jaminan perlindungan dari perlakuan insan Bank yang merugikan, seperti intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, kecuali berdasarkan

If there are things you would like to know more about regarding WBS reporting, you can contact the WBS management work unit by telephone number (0761) 47070 Ext. 1220 and 1221.

Types of WBS Violations

1. *Fraudulent acts.*
2. *Violations of the code of ethics include:*
   a. *Misuse and falsification of data and/or documents.*
   b. *Abuse of office for personal/group interests or other interests outside the Bank.*
   c. *Informing/disclosing customer and bank secrets.*
   d. *Receiving and/or giving gratuities that may affect decision-making and/or result in losses for the Bank.*
   e. *Bank money/cash fraud.*
   f. *Embezzlement of Bank assets and/or inventory.*
   g. *Extortion.*
   h. *Immoral act.*

WBS Report Manager

Every complaint that reaches the WBS Manager will be followed up to the Main Director as the WBS Person in Charge through the Director of Compliance and Risk Management. Furthermore, the Main Director makes a decision to approve or reject the follow-up on the WBS Report. If the WBS Person in Charge agrees to follow up, the Internal Audit Division or the Fraud Investigation Team will carry out a more in-depth examination and investigation process. Henceforth, the Internal Audit Division or the Fraud Investigation Team will submit the results of the inspection to the Board of Directors, to be followed up with a decision on sanctions.

Protection for Reporters (Whistleblower)

In principle, the right of the WBS reporter is to get protection for the report submitted to provide a sense of security regarding possible threats to the WBS report submitted. For this reason, BRK Syariah provides protection for reporters which includes:

1. *Guarantee of confidentiality of identity and protect the reporter, including guarantee of confidentiality from officers, managers and persons in charge of WBS.*
2. *Protection for the reporter includes guarantees of confidentiality of identity, reporter and contents of the report as well as guarantees of protection from adverse treatment of Bank personnel, such as intimidation, harassment or discrimination in all forms, unless based*

hasil pemeriksaan ternyata Pelapor adalah juga sebagai Terlapor atau pihak yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran/*Fraud* yang disampaikan

on the results of an examination it turns out that the Reporter is also the Reported Party or a party involved in the alleged violation /Fraud submitted

Penanganan Pengaduan *WBS*

WBS Complaint Handling

PELAPOR | *INFORMER*

Menyampaikan Laporan melalui *website* Bank
Submit Reports through the Bank's website

1

PETUGAS *WBS* | *WBS OFFICER*

- Verifikasi dan Analisa Laporan.
- Klarifikasi dan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi keterangan dan bukti.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengelola disertai update status laporan di aplikasi *WBS*.
- *Report Verification and Analysis.*
- *Clarification and confirmation to the reporter to complete the information and evidence.*
- *Create and submit reports to Managers along with report status updates in the WBS application.*

2

PENGELOLA *WBS* (PINDIV, KEPATUHAN)
WBS MANAGER (PINDIV, COMPLIANCE)

- Menerima laporan dari Petugas *WBS*
- Membuat usulan tindak lanjut laporan kepada penanggung jawab *WBS* melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- *Receive reports from WBS Officers*
- *Propose follow-up reports to the person in charge of the WBS through the Director of Compliance and Risk Management*

3

PENANGGUNG JAWAB *WBS* (DIRUT)
PERSON IN CHARGE WBS (PRESIDENT)

- Memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan.
- Laporan disetujui untuk ditindaklanjuti.
- *Provide approval or rejection of follow-up reports.*
- *Report approved for follow-up.*

4

DIVISI INTERNAL AUDIT/TIM INVESTIGASI FRAUD | *INTERNAL AUDIT DIVISION/FRAUD INVESTIGATION TEAM*

- Melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi.
- *Carry out a more in-depth examination and investigation process*
- *Delivering inspection results to the Board of Directors.*

5

DIREKSI | *DIRECTOR*

- Keputusan Sanksi
- Pelaksanaan keputusan Sanksi
- *Sanction Decision*
- *Implementation of Sanction decisions*

Sosialisasi *WBS*

Tujuan *WBS* adalah menyediakan saluran pelaporan untuk pegawai internal dan pihak luar/nasabah/pihak rekanan untuk menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran di BRK Syariah. Untuk itu BRK Syariah secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pelaporan pelanggaran melalui *WhistleBlowing System*. Untuk ke pihak internal, sosialisasi dilakukan melalui Forum internal pegawai, aplikasi Strategi Anti *Fraud* BRK Syariah dan aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan BRK Syariah, serta pemasangan *banner* maupun *sticker* WBS BRK Syariah pada setia jaringan kantpr Bank. Sedangkan ke pihak eksternal seperti nasabah, mitra bisnis, rekanan

WBS outreach

The purpose of the WBS is to provide a reporting channel for internal employees and external parties/customers/ partners to submit reports if they find any alleged violations at BRK Syariah. For this reason, BRK Syariah continuously disseminates reporting of violations through the Whistleblowing System. For internal parties, socialization is carried out through internal employee forums, the BRK Syariah Anti-Fraud Strategy application and the BRK Syariah Compliance Information System application, as well as the installation of BRK Syariah WBS banners and stickers in each of the Bank's office networks. Whereas to external parties such as customers, business partners, socialization partners

sosialisasi dilakukan melalui *Website* BRK Syariah dan termasuk mencantumkan klausul himbauan anti gratifikasi dalam Perjanjian Kerjasama.

are carried out through the BRK Syariah Website and include an anti-gratification appeal clause in the Cooperation Agreement.

Pengungkapan Laporan *WBS* dan Tindak Lanjutnya

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat beberapa pengaduan yang masuk ke laporan *WBS*, namun hanya 1 (satu) pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan memenuhi unsur 4W-1H (*What, Where, When, Who* dan *How*) untuk ditindaklanjuti, dengan status sebagai berikut:

Disclosure of WBS Report and its Follow Up

Number of Complaints and Process of Complaints

As of December 31, 2022 there were several complaints that were included in the WBS report, but only 1 (one) complaint could be followed up and fulfilled the elements of 4W-1H (What, Where, When, Who and How) to be followed up, with the following status:

No.	Jumlah Laporan WBS *Number of WBS Reports*	Status (Open/Closed) *Status (Open/Closed)*	Keterangan	*Explanation*
1.	1 (satu)	*Closed*	Telah selesai ditindaklanjuti dengan dilakukannya investigasi oleh Tim Investigasi *Fraud*, dan pelaku pelanggaran telah mendapat sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku di BRK Syariah	*Followed up by carrying out an investigation by the Fraud Investigation Team, and the perpetrators of violations have received sanctions in accordance with the applicable employment provisions at BRK Syariah*

Tindak Lanjut Hasil Laporan *WBS*

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Follow-up on WBS Report Results

If based on the results of the investigation it is proven that the reported party committed fraud or a violation, the decision-making official will impose sanctions in accordance with the applicable provisions.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Gratification Control

BRK Syariah telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No.032/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Divisi Kepatuhan. Pedoman tersebut digunakan setiap Insan BRK Syariah dalam berinteraksi dengan nasabah, mitra bisnis, rekanan dan sesama pegawai Bank serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, maka telah dilakukan pengkinian Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BRK Syariah (Perseroda).

Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Divisi (Pimdiv) Kepatuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, maka ditunjuklah pegawai sebagai fungsi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan lingkup tugas pokok dan fungsi UPG sebagai berikut:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait gratifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Insan BRK Syariah;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direksi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal di lingkungan Bank;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

1. Sosialisasi bagi pegawai baru terkait adanya kebijakan gratifikasi di BRK Syariah.
2. Pelatihan melalui kegiatan *In House Training,* kunjungan ke jaringan kantor BRK Syariah maupun pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRK Syariah.

Laporan Gratifikasi Tahun 2022

Selama tahun 2022 terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG BRK Syariah dan telah disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Gratifikasi *Online*.

BRK Syariah has stipulated Directors Decree No.032/KEPDIR/2020 concerning Gratification Control Guidelines, with the existence of a Gratification Control Unit (UPG) located in the Compliance Division. These guidelines are used by every BRK Syariah employee in interacting with customers, business partners, partners and fellow Bank employees as well as other stakeholders.

In the context of changing the Bank's business activities from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, the Guidelines for Gratification Control have been updated as contained in the Decree of the Board of Directors No. 170/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Gratification Control in the Sharia BRK Environment (Perseroda).

Gratification Control Unit

To assist the implementation of the duties of the Compliance Division Leader (Pimdiv) in carrying out the gratification control function, an employee is appointed as the Gratification Control Unit (UPG) function with the following main tasks and UPG functions:

1. *Compile and/or evaluate provisions related to gratification by taking into account the applicable provisions and other similar requirements to support the implementation of gratification control;*
2. *Receive, analyze and administer reports of acceptance and rejection of gratuities from BRK Syariah personnel;*
3. *Forward the report on receiving gratuities to the KPK;*
4. *Periodically reporting the recapitulation of gratuity reports to the KPK;*
5. *Delivering the results of the management of gratification reports and proposed gratification control policies to the Board of Directors;*
6. *Dissemination of gratification rules to internal parties within the Bank;*
7. *Carry out the management of gratuity items which are the authority of the Bank; And*
8. *Monitor and evaluate the implementation of gratuity control with the KPK.*

Socialization of Gratification Policy

1. *Socialization for new employees regarding the existence of a gratification policy at BRK Syariah.*
2. *Training through In House Training activities, visits to the BRK Syariah office network as well as learning or e-learning through the BRK Syariah internal portal.*

Gratification Report 2022

During 2022 there was 1 (one) gratification report received by UPG BRK Syariah and submitted to the KPK through the Online Gratification Application.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of State Organizers' Asset Reports (LHKPN)

Dasar Hukum

Sebagai Bank BUMD, BRK Syariah mendukung upaya pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat struktural lainnya di BRK Syariah termasuk ke dalam kategori "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" dan menjadi wajib laporan LHKPN.

Kewajiban pelaporan LHKPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Legal basis

As a BUMD Bank, BRK Syariah supports the efforts of the government and the Corruption Eradication Commission (KPK) in efforts to prevent corruption through the management of State Officials Wealth Reports (LHKPN). In line with Law Number 28 of 1999 concerning State Organizers who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, which stipulates that every administrator is required to report and announce his assets before and after taking office and is willing to have his assets examined before and after taking office. The Board of Commissioners, Directors and other structural officials at BRK Syariah are included in the category of "other officials who have strategic functions" and are required to report LHKPN.

The obligation to report LHKPN is further regulated in KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Assets. Every State Organizer is required to report his wealth through the LHKPN form that has been provided by the KPK to be filled in honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate and assess the total amount, type and value of reported Assets, correctly, quickly, accurately , accurate and responsible.

Pedoman LHKPN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.092B/KEPDIR/2021 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No.104/KEPDIR/2020 tentang Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan LHKPN menetapkan pejabat dan pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris;
3. Pemimpin Divisi/setingkat;
4. Pemimpin Bagian Kantor Pusat/setingkat;
5. Pemimpin Cabang/setingkat;
6. Pemimpin Cabang Pembantu/setingkat; dan
7. Pemimpin Kedai/Pemimpin Seksi/Staf.

LHKPN Guidelines

In accordance with Directors' Decree No.092B/KEPDIR/2021 concerning the First Amendment to Directors' Decree No.104/KEPDIR/2020 concerning Obligations in Submitting State Officials' Wealth Reports (LHKPN) and LHKPN Management stipulates that officials and employees who are required to submit LHKPN include:

1. *Directors;*
2. *Board of Commissioners;*
3. *Head of Division/level;*
4. *Head of Head Office Section/equivalent;*
5. *Head of Branch/level;*
6. *Head of Sub-Branch/equivalent; And*
7. *Store Leader/Section Leader/Staff.*

Fungsi Kepatuhan LHKPN

Pejabat yang bertanggung jawab atas kepatuhan LHKPN di BRK Syariah adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam pelaporan LHKPN.

LHKPN Compliance Function

The official responsible for LHKPN compliance at BRK Syariah is the Compliance Division Head, who has the duties and responsibilities to:

1. *Monitoring Compulsory Compulsory Compliance in LHKPN reporting.*

2. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab untuk menerbitkan surat/himbauan dan media lainnya terkait tingkat kepatuhan Wajib Lapor dalam memenuhi kewajiban LHKPN di BRK Syariah serta mengingatkan secara tertulis Wajib Lapor LHKPN yang belum melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan Bank.
3. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab untuk kemudian diajukan kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan agar terhadap pegawai Wajib Lapor yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi.

Pelaporan LHKPN

Selama tahun 2022, BRK Syariah telah mematuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode pelaporan tahun 2021 untuk posisi harta kekayaan 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan BRK Syariah telah menyampaikan laporan dimaksud melalui e-LHKPN dengan tenggat waktu penyampaian laporan pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan BRK Syariah, sampai dengan tenggat waktu penyampaian LHKPN diperoleh persentase tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 100% (dari 634 Wajib Lapor, seluruhnya telah menyampaikan LHKPN).

2. Coordinate with the person in charge to issue letters/ appeals and other media related to the compliance level of Reporter Compulsory in fulfilling LHKPN obligations at BRK Syariah and remind in writing LHKPN Compulsory Reporters who have not reported according to the deadline determined by the Bank.

3. Provide recommendations to the Person in Charge to then submit to the Director in charge of the compliance sector so that Compulsory Reporting employees who do not comply in submitting LHKPN are subject to sanctions.

LHKPN Reporting

During 2022, BRK Syariah has complied with the following LHKPN reporting requirements:

1. In order to fulfill the obligation to submit a State Officials Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2021 reporting period for the position of assets from 1 January 2021 to 31 December 2021, the Mandatory Reporter for LHKPN in the Sharia BRK Environment has submitted the report through e-LHKPN with a report submission deadline of March 31, 2022.

2. Based on the recapitulation of LHKPN submissions by LHKPN Compulsory Reporters in the Sharia BRK Environment, up to the deadline for LHKPN submissions, the percentage of compliance rate for LHKPN submissions was obtained at 100% (out of 634 Compulsory Reporters, all of them had submitted LHKPN).

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Anti Money Laundering (APU) and Preventing The Financing of Terrorism (PPT) Programs

Dalam implementasi APU & PPT ini, BRK Syariah mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Transaksi pencucian uang merupakan aktivitas yang terkait dengan menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang, termasuk di dalamnya hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

In implementing this APU & PPT, BRK Syariah refers to Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law no. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. Money laundering transactions are activities related to receiving placements, deposits, withdrawals, transfers, transfers, payments in the form of sums of money, including grants, donations, safekeeping and/or exchanging sums of money or other actions and/or activities related with money. Meanwhile, financing of terrorism is all acts in the context of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly. The purpose of these activities is to be used and/or known to be used for terrorist activities, terrorist organizations or terrorists.

BRK Syariah berkomitmen untuk melaksanakan Program APU dan PPT sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 dan POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU & PPT di BRK Syariah telah dijalankan dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

BRK Syariah is committed to implementing the APU and PPT Program in accordance with POJK No. 12/POJK.01/2017 and POJK No.23/POJK.01/2019 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs in the Financial Services Sector and SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs and Prevention of Terrorism Funding in the Banking Sector. Until now, policies related to APU & PPT at BRK Syariah have been implemented and will continue to be evaluated periodically to adapt to developments, especially those that occur in the financial and banking industry.

Kebijakan dan Prosedur

Sehubungan dengan konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah (Perseroda), Divisi Kepatuhan BRK Syariah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan APU & PPT, telah melakukan perubahan terhadap kebijakan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 048/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BRK Syariah (Perseroda).
2. Surat Keputusan Direksi Nomor Nomor 055/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Standar Operasional Perusahaan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 241/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL).
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 242/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Formulir *Enhanced*

Policies and Procedures

In connection with the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah (Perseroda), the BRK Syariah Compliance Division which is responsible for the implementation of the AML & CFT policy, has made changes to the following policies:

1. *Board of Directors Decree Number 048/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Manual for the Implementation of the BRK Syariah Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program (Perseroda).*
2. *Board of Directors Decree Number Number 055/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Know Your Customer Principles of Company Operational Standards.*
3. *Board of Directors Decree Number 241/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Electronic Data Exchange Applications (PEDAL).*
4. *Board of Directors Decree Number 242/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Enhanched Due*

Due Diligence (EDD) Dalam Rangka Prinsip Mengenal Nasabah.

5. Surat Keputusan Direksi Nomor 243/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pembukaan *Customer Identification File* (CIF).
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 244/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi *go* AML Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 245/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pemantauan Transaksi Keuangan Pegawai.
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 246/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 247/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pemantauan dan Pengkinian Nasabah Berisiko Tinggi Kategori *Politically Exposed Person*.
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 248/KEPDIR/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Aplikasi Pengkinian Data Nasabah dengan Pendekatan Berdasarkan Risiko.
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 254/KEPDIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Formulir Pengkinian Data Nasabah Perorangan dan Nasabah Non Perorangan Dalam Rangka Prinsip Mengenal Nasabah.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan serta prosedur terkait penerapan program APU dan PPT, sejalan dengan perkembangan produk dan jasa, maupun teknologi serta dikaitkan dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang terjadi saat ini.
2. Direksi melaksanakan program APU dan PPT antara lain melalui penyampaian kewajiban pelaporan kepada PPATK, OJK dan instansi lainnya yang berwenang serta melalui koordinasi dengan bagian UKPN Divisi Kepatuhan (penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di Bank), atas pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di jaringan kantor Bank serta menyelenggarakan pelatihan khusus penerapan program APU dan PPT.
3. DIreksi telah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT yaitu Bagian AML & CTF (Bagian Anti *Money Laundering & Counter Terrorism Financing*) yang berada di Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Uraian detil terkait struktur organisasi pengelola dan profil ringkas Kepala Divisi Kepatuhan diuraikan pada bagian Fungsi Kepatuhan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Diligence (EDD) Forms in the Context of Know Your Customer Principles.

5. *Board of Directors Decree Number 243/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Opening Customer Identification File (CIF).*
6. *Board of Directors Decree Number 244/KEPDIR/2022 dated December 29, 2022 concerning the Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) go AML Application.*
7. *Board of Directors Decree Number 245/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Monitoring Employee Financial Transactions.*
8. *Board of Directors Decree Number 246/KEPDIR/2022 dated December 29, 2022 concerning Application for Reporting on the Suspected Terrorism Funding Information System (SIPENDAR).*
9. *Board of Directors Decree Number 247/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Monitoring and Updating High Risk Customers for the Politically Exposed Person Category.*
10. *Board of Directors Decree Number 248/KEPDIR/2022 dated 29 December 2022 concerning Application for Updating Customer Data using a Risk Based Approach.*
11. *Board of Directors Decree Number 254/KEPDIR/2022 dated 30 December 2022 concerning Forms for Updating Individual Customer and Non-Individual Customer Data in the Context of Know Your Customer Principles.*

Active Supervision of the Board of Commissioners and Directors

1. *The Board of Directors formulates and establishes policies and procedures related to the implementation of the APU and PPT programs, in line with developments in products and services, as well as technology and associated with the current developments in the mode of money laundering and/or terrorism financing.*
2. *The Board of Directors implements the AML and CFT program, among others, by submitting reporting obligations to PPATK, OJK and other authorized agencies and through coordination with the UKPN Compliance Division (responsible for implementing the APU and PPT program at the Bank), for the implementation of the APU and PPT program implementation on the network Bank offices as well as organizing special training on the implementation of the APU and PPT programs.*
3. *The Board of Directors has established a special work unit responsible for the implementation of the APU and PPT programs, namely the AML & CTF Section (Anti Money Loundering & Counter Terrorism Financing) which is in the Compliance Division under the Directorate of Compliance and Risk Management. A detailed description of the managing organizational structure and a brief profile of the Head of the Compliance Division is described in the Compliance Function section of the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.*

4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas implementasi program APU dan PPT yang dijalankan oleh Direksi, dengan membahas agenda program APU dan PPT dalam rapat maupun melalui pelaporan terkait APU dan PPT yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program APU dan PPT Tahun 2022

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU PPT, BRK Syariah telah menerapkan program sebagai berikut, sebagai berikut:

A. Implementasi 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*)

B. BRK Syariah telah menyampaikan laporan yang diwajibkan kepada PPATK periode Januari sampai dengan Desember 2022:

1). Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 1.721
2). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 12
3). Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri : 25
4). Laporan SIPESAT, dengan jumlah CIF Baru yang disampaikan sebagai berikut:
   a. Pelaporan TW 1 sebanyak : 33.740 CIF
   b. Pelaporan TW II sebanyak : 30.316 CIF
   c. Pelaporan TW III sebanyak: 38.218 CIF
   d. Pelaporan TW IV sebanyak: 42.037 CIF

5). Jumlah Laporan SIPENDAR, terdiri:

4. *The Board of Commissioners actively supervises the implementation of the APU and PPT programs carried out by the Board of Directors, by discussing the APU and PPT program agenda in meetings as well as through reports regarding APU and PPT submitted to the Board of Commissioners.*

Implementation of the APU and PPT Programs in 2022

In order to fulfill the implementation of the APU PPT Program, BRK Syariah has implemented the following programs, as follows:

A. Implementation of 3 (three) lines of defense (three lines of defense)

B. BRK Syariah has submitted the required reports to PPATK for the period January to December 2022:

1). Cash Financial Transaction Reports: 1,721
2). Suspicious Financial Transaction Reports : 12
3). Report on Transfer of Funds from and to Overseas : 25
4). SIPESAT Report, with the number of New CIF submitted as follows:
   a. Reporting Q1 1: 33,740 CIF
   b. Q2 II reporting: 30,316 CIF
   c. TW III reporting: 38,218 CIF
   d. TW IV reporting of: 42,037 CIF

5). Number of SIPENDAR Reports, consisting of:

No.	Jenis Laporan	Watchlist Januari 2022 *January 2022 Watchlist*	Watchlist April 2022 *April 2022 Watchlist*	Watchlist Juli 2022 *July 2022 Watchlist*	Watchlist Oktober 2022 *October 2022 Watchlist*	Permintaan *Request*	*Report Type*
1.	Proaktif *Watchlist*	1	1	0	0	1	*Proactive Watchlist*
2.	Pengayaan	3	3	0	0	0	*enrichment*

6). Identifikasi dan Verifikasi *Walk In Customer* (WIC)
7). Total Jumlah WIC s.d 31 Desember 2022 sebanyak 33.246
8). Jumlah Transaksi WIC yang memenuhi parameter sebagai Transaksi Keuangan Tunai yang dilaporkan kepada PPATK sebanyak 64 laporan, yang terdiri dari:
   a. 47 Laporan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Identifikasi rekening Nasabah dari transaksi WIC
   b. 17 Laporan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Identifikasi pelaku transaksi WIC.

C. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

1). Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihak Terkait PEP sebanyak 3.695 Nasabah dengan rincian sebagai berikut:

6). Identification and Verification of Walk In Customer (WIC)
7). The total number of WIC up to December 31 2022 is 33,246
8). The number of WIC Transactions that met the parameters as Cash Financial Transactions reported to PPATK were 64 reports, consisting of:
   a. 47 Cash Financial Transaction Reports based on Customer account identification from WIC transactions
   b. 17 Cash Financial Transaction Reports based on the Identification of WIC transaction actors.

C. Implementation of the Risk-Based AML and CFT Program (Risk Based Approach)

1). The list of high-risk customers in the category of Politically Exposed Person (PEP) is well managed by the Bank, including PEP and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers as well as PEP and PEP Related Parties totaling 3,695 Customers with details as follows:

a. Nasabah PEP : 3.356
b. Pihak terkait PEP : 339

2). Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya :
a. Nasabah berisiko rendah : 54.198 Nasabah
b. Nasabah berisiko sedang : 1.096.215 Nasabah
c. Nasabah berisiko tinggi : 4.334 Nasabah

D. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Ratting on Money and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) yang diselenggarakan oleh PPATK dan memperoleh penilaian Baik dengan penilaian sebagai berikut:

a. PEP Customers : 3,356
b. PEP related parties : 339

2). Classification of Customers based on their level of risk:

a. Low risk customers: 54,198 customers
b. Medium risk customers: 1,096,215 customers
c. High risk customers: 4,334 customers

D. The Bank has participated in the Financial Integrity Ratting on Money and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) assessment conducted by PPATK and received a Good rating with the following ratings:

Kategori Penilaian	Nilai FIR Nasional *National FIR Value*	Nilai FIR PJK Bank *Bank FIR FJR Value*	Nilai FIR KBMI 1 *FIR value of KBMI 1*	Nillai FIR PT. BRKS *DER Value of PT. BRKS*	*Rating Category*
Dimensi 1	6,47	7,15	7,65	8,21	*Dimension 1*
Dimensi 2	7,16	8,08	8,95	9,60	*Dimension 2*
Dimensi 3	5,98	6,71	6,91	7,05	*Dimension 3*
Skor (Kategori)	6,28 (Baik) | *(Good)*	7,03 (Baik) | *(Good)*	7,40 (Baik) | *(Good)*	7,72 (Baik) | *(Good)*	*Score (Category)*

E. Pengkinian dan pemantauan:

1. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2022 per 31 Desember 2022 secara konsolidasi mencapai 95,63% atau sebanyak 52.064 dari 54.443 CIF yang menjadi target pengkinian Tahun 2022.

   Sebagai informasi bahwa konversi Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah (Perseroda) mengakibatkan terjadinya penggabungan/*merging* CIF Konvensional dan CIF UUS sehingga terdapat sebanyak 222 CIF yang teridentifikasi ganda dan telah dilakukan *merging* secara otomatis pada saat konversi data tersebut sehingga semula data 54.443 CIF menjadi 54.221 CIF.

2. Pemantauan CIF yang terindikasi ganda.
   Pasca Konversi menjadi BRK Syariah (Perseroda) jumlah CIF sebanyak 1.148.638 CIF dengan rincian sebagai berikut:
   a. CIF Individu sebanyak 1.047.951
   b. CIF Bisnis sebanyak 100.687

   Dari total CIF setelah konversi tersebut telah dilakukan penggabungan CIF sebagai tindaklanjut implementasi *single* CIF dengan rincian sebagai berikut:
   a. CIF Perorangan
      i. Tahap pertama tanggal 20 Agustus 2022 menjadi sebanyak 30.429 CIF
         Penggabungan CIF pada saat konversi dengan mengidentifikasi kesamaan Nama, Nomor Identitas Nasabah, Ibu Kandung dan Pelaporan SLIK

E. Update and monitoring:

1. Updating customer data is carried out on an ongoing basis by the Bank Office. Realization of the 2022 Customer Data Update Plan as of December 31, 2022 on a consolidated basis reached 95.63% or 52,064 of the 54,443 CIF which is the 2022 update target.

   For information, the conversion of Bank Riau Kepri to BRK Syariah (Perseroda) resulted in a merger/merging of Conventional CIF and CIF UUS so that there were 222 CIFs that were identified as double and had been merged automatically during the conversion of the data so that originally 54,443 CIF data became 54,221 CIF .

2. Dual indicated CIF monitoring.
   After conversion to BRK Syariah (Perseroda), the total CIF is 1,148,638 CIF with the following details:

   a. Individual CIF of 1,047,951
   b. CIF Business of 100,687

   Of the total CIF after the conversion, a merger of CIFs has been carried out as a follow-up to the implementation of a single CIF with the following details:
   a. Individual CIF
      i. The first stage on August 20 2022 will be 30,429 CIF
         CIF Merger at the time of conversion by identifying the similarity of Name, Customer Identity Number, Birth Mother and SLIK Reporting

ii. Tahap kedua tanggal 5 Oktober 2022 menjadi sebanyak 4.790 CIF
Penggabungan CIF yang terindikasi ganda setelah konversi yang terkait *Mbanking* sebanyak 4.978 CIF dan dilakukan *merging* sebanyak 4.790 CIF dan 188 CIF tidak terdapat kesesuain pada data SLIK setelah konversi sehingga tidak teridentifikasi ganda.

iii. Tahap ketiga tanggal 28 Oktober 2022 menjadi sebanyak 29.853 CIF
CIF ganda sebanyak 60.486 CIF dan telah dilakukan *merging* sebanyak 59.530 CIF dan 956 CIF tidak terdapat kesesuain karena telah dilakukan pengkinian setelah konversi sehingga tidak teridentifikasi ganda. Penggabungan CIF atas permintaan Nasabah sebanyak 3 CIF dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022.

iv. Penggabungan CIF atas permintaan Nasabah sebanyak 3 CIF dilakukan pada tanggal 26 Desember 2022

b. CIF Non Perorangan
CIF Bisnis yang terindikasi ganda telah dilakukan penggabungan sebanyak 1.047.

3. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT dari pihak otoritas yang berwenang. DTTOT yang dikelola Bank berdasarkan Surat Nomor DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1/2022 dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dikelola Bank berdasarkan Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 256 Tahun 2018.

Berdasarkan daftar/data dimaksud, Bank telah menyampaikan Laporan Nihil melalui Sistem Informasi Program APU dan PPT OJK (SIGAP OJK).

4. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi/data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022, sebagai berikut:
   a. Jumlah Surat Permintaan Informasi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak sebanyak 390 Surat
   b. Jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diminta sebanyak 1.379 Wajib Pajak

ii. The second stage on October 5, 2022 will be 4,790 CIF
The combination of CIFs that indicated double after conversion related to Mbanking was 4,978 CIF and merging was carried out of 4,790 CIF and 188 CIF there was no agreement in the SLIK data after conversion so that it was not identified as double.

iii. The third phase on October 28 2022 will be 29,853 CIF
Double CIF was 60,486 CIF and 59,530 CIF had been merged and 956 CIF had no conformity because it had been updated after conversion so that doubles were not identified. CIF Merger at the request of the Customer in the amount of 3 CIFs will be carried out on December 26, 2022.

iv. CIF Merger at the request of the Customer in the amount of 3 CIFs will be carried out on December 26, 2022

b. CIF Non-Individual
CIF Businesses with double indications have been merged as many as 1,047.

3. Monitoring of Prospective Customers and Customers whose data is similar to data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, is carried out before the Bank enters into business relations with Prospective Customers and upon receipt of DTTOT from the competent authorities. DTTOT managed by the Bank based on Letter Number DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1/2022 and List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction managed by the Bank based on Decree of the Head of PPATK Number 256 of 2018.

Based on the list/data referred to, the Bank has submitted a Zero Report through the OJK APU and PPT Program Information System (SIGAP OJK).

4. Monitoring of taxpayers and/or tax bearers is carried out by providing customer information/data as requested data from the Directorate General of Taxes-Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the period January 1 to December 31, 2022, as follows:
   a. The number of Letters Requesting Information on Taxpayers and/or Tax Underwriters is 390 Letters
   b. The number of Taxpayers/Tax Underwriters requested is 1,379 Taxpayers

5. Pemantauan terhadap Nasabah yang diduga Korupsi dari permintaan KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK, terdapat 3 (tiga) Surat Permintaan yang didalamnya mencakup 12 Nama permintaan informasi nasabah.

   Setelah dilakukan pengecekan ke database *core banking system bank* dengan kesesuaian Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat, namun hanya terdapat 1 (satu) Nama yang sesuai dan telah disampaikan ke KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK sesuai ketentuan berlaku.

5. Monitoring of Customers suspected of Corruption from KPK requests through the KPK PEDAL Application, there are 3 (three) Request Letters which include 12 Names of requests for customer information.

After checking the bank's core banking system database with the suitability of the Name, NIK, Place, Date of Birth and Address, however, there was only 1 (one) name that matched and was submitted to the KPK via the KPK PEDAL Application in accordance with applicable regulations.

F. Analisa Transaksi *Know Your Customer* dan *Know Your Employee*.
Realisasi penyelesaian analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait transaksi KYC dan KYE posisi 31 Desember 2022 , sebagaimana tabel di bawah ini:
1). Analisa KYC

F. Transaction Analysis of Know Your Customer and Know Your Employee.
Realization of completion of analysis of Suspicious Financial Transactions related to KYC and KYE transactions for the position of December 31, 2022, as shown in the table below:
1). KYC analysis

Tahun *Year*	Total Data yang Harus di Analisa KYC *Total Data that Must be Analyzed in KYC*	Total Data yang telah di Analisa KYC *Total Data That Has Been Analyzed by KYC*		Target Penyelesaian	*Completion Target*
		Jumlah *Total*	%		
2019	42.213	42.213	100 %	30 Juni 2023	*June 30, 2023*
2020	27.955	27.955	100 %	31 Desember 2022	*December 31, 2022*
2021	36.372	36.372	100 %	30 Juni 2022	*June 30, 2022*
2022	56.913	55.002	96.64%	31 Januari 2023	*January 31, 2023*
Total	**163.453**	**167.205**	**98.83%**		

Analisa transaksi keuangan nasabah (KYC) telah selesai sesuai target yang disepakati dan secara keseluruhan tidak terindikasi transaksi mencurigakan yang memenuhi unsur-unsur TKM TPPU dan TPPT serta telah diminta penetapan dengan status wajar, namun dari transaksi nasabah yang dianalisa tersebut hanya terdapat 2 (dua) nasabah yang memenuhi unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan dan telah dilaporkan ke PPATK melalui Aplikasi go AML PPATK terdiri dari:
a. 1 (satu) Nasabah dilaporkan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)
b. 1 (satu) Nasabah dilaporkan LAM (Laporan Aktivitas Mencurigakan)

Analysis of customer financial transactions (KYC) has been completed according to the agreed target and as a whole there is no indication of suspicious transactions that meet the elements of TKM TPPU and TF and have been asked to determine with reasonable status, but from the customer transactions analyzed there were only 2 (two) customers who meet the elements of a Suspicious Financial Transaction and have been reported to PPATK through the PPATK go AML Application consist of:
a. 1 (one) Customer reported LTKM (Suspicious Financial Transaction Report)
b. 1 (one) Customer reported LAM (Suspicious Activity Report)

3). Analisa KYE

2). KYE analysis

Tahun *Year*	Total Data yang Harus di Analisa KYE *Total Data that Must be Analyzed in KYE*	Total Data yang telah di Analisa KYE *Total Data That Has Been Analyzed by KYE*		Target Penyelesaian	*Completion Target*
		Jumlah	%		
2019	19.633	19.633	48.03 %	30 Juni 2023	*June 30, 2023*
2020	23.666	23.666	100 %	31 Desember 2022	*December 31, 2022*
2021	26.768	26,768	100 %	30 Juni 2022	*June 30, 2022*
2022	30.463	18,963	62.25 %	31 Januari 2023	*January 31, 2023*
Total	**100.530**	**167.205**	**78.41%**		

Analisa transaksi keuangan pegawai (KYE) yang telah dianalisa 100% tidak terindikasi transaksi mencurigakan sebagaimana unsur-unsur TKM TPPU dan TPPT serta telah diminta penetapan status wajar.

G. Pelatihan dan Sertifikasi APU dan PPT

Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan PPT dilakukan antara lain melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK & pihak otoritas lainnya. Pada periode Juli s.d Desember 2022 kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi pegawai terkait penerapan APU PPT, sebagai berikut:

1. Pelatihan kepada seluruh Pegawai PCP *Account Officer* Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2022 secara tatap muka dengan jumlah peserta 35 orang dengan tema pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) BRK Syariah (Perseroda).
2. Sosialisasi formulir EDD yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 melalui *online meeting* dengan jumlah peserta 297 orang yang terdiri dari seluruh Penanggung Jawab Penerapan APU PPT Unit Kantor dan seluruh *Customer Service* pada seluruh Jaringan Kantor Bank, mengambil tema pelatihan: Sosialisasi *Enhanced Due Diligence* (EDD).
3. Pelaksanaan *monitoring* penerapan APU PPT secara *on site* ke 51 Unit Kantor tanggal 19 April sampai dengan 24 Juni 2022 dengan agenda sebagai berikut :
   a). Briefing dan sharing tentang penerapan APU PPT.
   b). Monitoring kesesuaian aktifitas petugas dengan ketentuan internal bank yang tertuang pada kertas kerja hasil monitoring meliputi :
      i. Kertas Kerja *Teller*, meliputi :
         √ Penentuan/Pemilihan Kategori Nasabah *Walk In Customer* dan *Conductor*.
         √ Transaksi Multi Kodtran.
         √ Tujuan dan Sumber Penggunaan Data.
      ii. Kertas Kerja *Customer Service*, meliputi :
         √ Pengkinian Data.
         √ Laporan Pembukaan CIF Baru (SIPESAT).
         √ Pengelompokan Nasabah *High Risk* dan PEP.
4. Sosialisasi kepada seluruh Penanggung Jawab APU PPT Unit Kantor dan *Frontliner* yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2022 secara *daring* melalui media *zoom meeting* dengan

Analysis of employee financial transactions (KYE) which has been analyzed 100% does not indicate suspicious transactions as elements of TKM TPPU and TF and have been asked to determine reasonable status.

G. APU and PPT Training and Certification

Increasing human resources in the implementation of the APU and PPT programs is carried out, among others, through training that is given periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program implementation and employees related to the preparation of reports to PPATK & other authorities. In the period July to December 2022 the activities carried out in the context of developing knowledge for employees regarding the implementation of APU PPT, are as follows:

1. *Training for all Sharia PCP Account Officer Employees which was held on March 4 2022 face to face with a total of 35 participants with the training theme Implementation of the BRK Syariah Anti-Money Laundering and Financing Program (APU PPT) Syariah (Perseroda).*
2. *Socialization of the EDD form which was carried out on March 29 2022 through an online meeting with a total of 297 participants consisting of all Persons Responsible for Implementation of APU PPT Office Units and all Customer Service throughout the Bank Office Network, taking the training theme: Socialization of Enhanced Due Diligence (EDD) .*
3. *Implementation of monitoring the implementation of AML CFT on site to 51 Office Units from 19 April to 24 June 2022 with the following agenda:*
   a). Briefing and sharing on the implementation of APU PPT.
   b). Monitoring the suitability of the officer's activities with the bank's internal provisions contained in the monitoring results worksheet includes:
      i. Teller worksheets, including:
         √ Determination/Selection of Walk In Customer and Conductor Nasbaah Categories.
         √ Multi Code Transactions.
         √ Purpose and Source of Data Use.
      ii. Customer Service Work Sheets, including:
         √ Data Update.
         √ New CIF Opening Report (SIPESAT).
         √ Grouping of High Risk and PEP Customers.
4. *Dissemination to all Persons in Charge of APU PPT Office Units and Frontliners which was held online on August 26 2022 through a media zoom meeting with a total of 676 participants with a discussion*

jumlah peserta sebanyak 676 orang dengan agenda pembahasan sesuai hasil temuan KAP atas temuan QACA terkait penerapan APU PPT khususnya pengisian informasi Sumber Dana dan Tujuan Penggunaan Dana atas transaksi nasabah yang tidak sesuai dengan profil.

5. *Workshop* Leadership Supervisi kepada seluruh Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Pemimpin Seksi Operasional Unit Kantor yang diselenggarakan pada tanggal 7 dan 9 September 2022 secara luring dengan jumlah peserta sebanyak 27 pada *Batch* 1 dan sebanyak 29 orang pada *Batch* 2 dengan materi *Overview* Penerapan APU PPT BRK Syariah (Perseroda).
6. Pelatihan APU PPT Tahun 2022 untuk Penanggung Jawab APU PPT di seluruh unit kantor yang diselenggarakan dengan 2 (dua) *batch* dan diikuti sebanyak 110 orang pegawai BRK Syariah, sebagai berikut:

agenda according to KAP findings on QACA findings regarding the implementation of APU PPT especially filling in information on Sources of Funds and Purpose of Use of Funds for customer transactions that do not match the profile.

5. *Leadership Supervision Workshop for all Financing Section Leaders and Office Unit Operational Section Leaders held offline on September 7 and 9 2022 with a total of 27 participants in Batch 1 and 29 people in Batch 2 with the material Overview of the Implementation of APU PPT BRK Syariah (Perseroda).*
6. *The 2022 APU PPT Training for Persons in Charge of APU PPT in all office units will be held in 2 (two) batches and will be attended by 110 BRK Syariah employees, as follows:*

Keterangan		Batch 1	Batch 2		Information
a)	Tanggal	Sabtu, 29 Oktober 2022 *Saturday, October 29, 2022*	Jum'at, 04 November 2022 *Friday, 04 November 2022*		*Date*
b)	Peserta :	tatap muka *face to face*	tatap muka *face to face*	*zoom*	*Participant :*
	Pinkedai	31 orang *31 people*	4 orang *4 people*	3 orang *3 people*	*Pinkedai*
	Pinsi Layanan	13 orang *13 people*	6 orang *6 people*	2 orang *2 people*	*Service pin*
	Pinsi Operasional	29 orang *29 people*	11 orang *11 people*	1 orang *1 people*	*Operations Department*
	Customer Service	-	10 orang *10 people*	-	*Customer Service*
	Teller	-	-	-	*Tellers*
	Total	**73 orang** ***73 people***	**31 orang** ***31 people***	**6 orang** ***6 people***	***Total***

Materi Kegiatan Pelatihan APU PPT Tahun 2022 yang terdiri dari:

a). Penilaian Risiko Nasional TPPU/TPPT;
b). Penilaian Risiko Sektor Perbankan TPPU/TPPT;
c). Penerapan CDD/EDD dan Perhitungan Risiko Nasabah;
d). Tipologi TPPU & TPPT Terkait Kejahatan Siber;
e). Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

7. Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Perbankan yang diselenggarakan oleh PPATK pada tanggal 1 sampai dengan 3 November 2022 di Pusdiklat PPATK dengan mengikutsertakan 2 (dua) pegawai Bagian AML & CTF dengan materi pelatihan sebagai berikut:

Materials for the 2022 APU PPT Training Activities which consist of:

a). TPPU/TPPT National Risk Assessment;
b). TPPU/TPPT Banking Sector Risk Assessment;
c). CDD/EDD Implementation and Calculation of Customer Risk;
d). Typology of ML & TF Related to Cyber Crime;
e). Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

7. *Suspicious Financial Transaction Identification Training for Banking held by PPATK from 1 to 3 November 2022 at the PPATK Training Center by involving 2 (two) employees of the AML & CTF Section with the following training material:*

a). Tahapan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b). Kelengkapan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
c). Teknik profiling & penyusunan kertas kerja analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan;
d). Analisis dan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
e). Tipologi TPPU TPPT dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan.

a). Stages of Identification of Suspicious Financial Transactions;
b). Completeness of Suspicious Financial Transaction Identification;
c). Profiling techniques & preparation of work papers for analysis of Suspicious Financial Transactions;
d). Analysis and identification of Suspicious Financial Transactions;
e). TF Typology TF and Suspicious Financial Transaction Indicators.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
Anti-Corruption Policy

Prosedur dan Program

BRK Syariah berkomitmen mengedepankan praktek tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung sepenuhnya penegakan kebijakan anti korupsi. Untuk itulah, BRK Syariah tegas melarang adanya praktek korupsi maupun gratifikasi di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank. Komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pela*nggaran (Whistleblowing System)* tahun 2018, Pedoman Kode Etik Kepatuhan *(Compliance Code of Conduct),* Pedoman Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest), K*ebijakan Bank terkait Penerapan *Anti-Fraud* maupun Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan.

BRK Syariah memastikan setiap kegiatan bisnis dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menjadi aspek pengawasan Dewan Komisaris. Disamping itu, BRK Syariah berkomitmen menghindari adanya *conflict of interest*, penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran prinsip integritas yang akan merugikan kepentingan Bank. Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti nasabah, rekanan, regulator dan mitra bisnis dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan gratifikasi maupun korupsi. Setiap adanya pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai kebijakan Bank dan hukum yang berlaku.

Sebagai implementasi penerapan anti korupsi pada seluruh jenjang organisasi, pada tahun 2022 seluruh pejabat dan pegawai BRK Syariah telah melaksanakan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dan Pernyataan Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan secara serentak pada unit kerja masing-masing.

Procedures and Programs

BRK Syariah is committed to prioritizing corporate governance practices that are in line with sharia principles and fully supporting the enforcement of anti-corruption policies. For this reason, BRK Syariah strictly prohibits corruption and gratuity practices at all levels and levels of the Bank's organization. This commitment is outlined in various policies such as Gratification Control Guidelines, Guidelines for the 2018 Alleged Whistleblowing System, Guidelines for the Compliance Code of Conduct, Guidelines for Conflict of Interest, Bank Policies regarding the Implementation of Anti-Fraud as well as the Code of Ethics and Corporate Cultural Values.

BRK Syariah ensures that every business activity is carried out in compliance with the applicable laws and regulations, including being an aspect of the supervision of the Board of Commissioners. Besides that, BRK Syariah is committed to avoiding conflicts of interest, abuse of position and violations of the principle of integrity which will harm the interests of the Bank. Maintain good cooperative relations with stakeholders such as customers, partners, regulators and business partners by paying attention to ethics and avoiding things that lead to acts of gratification or corruption. Any violations will be reported to related parties according to Bank policies and applicable law.

As an implementation of anti-corruption at all levels of the organization, in 2022 all officials and employees of BRK Syariah have signed a Compliance Statement and a Statement of Handling Conflicts of Interest which were carried out simultaneously in their respective work units.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penegakan integritas khususnya dalam penegakan budaya anti korupsi, BRK Syariah juga telah mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawainya dalam pelaksanaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK RI.

In addition, as a form of commitment to upholding integrity, especially in upholding an anti-corruption culture, BRK Syariah has also involved 2 (two) of its employees in carrying out the Integrity Building Expert Certification (API) organized by the KPK RI Anti-Corruption Education Center.

Pelatihan dan Sosialisasi Anti Korupsi

Untuk meningkatkan *awareness* segenap Insan BRK Syariah dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah, maka Bank secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh Pegawai Bank dengan melakukan sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Kode Etik Kepatuhan kepada pegawai baru maupun pegawai *existing* baik melalui kunjungan ke jaringan kantor Bank maupun, *in house training*, maupun melalui media komunikasi *online*.

Anti-Corruption Training and Outreach

To increase the awareness of all BRK Syariah personnel in supporting the corruption prevention and eradication program launched by the government, the Bank periodically conducts outreach and training for all Bank employees by socializing Gratification Control Guidelines and Compliance Code of Ethics to new employees and existing employees both through visits to network of Bank offices as well as, in-house training, as well as through online communication media.

RENCANA STRATEGIS BANK
Bank's Strategic Plan

Dengan status sebagai Bank Umum Syariah, penyusunan rencana strategis BRK Syariah berdasarkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) BRK Syariah disusun dalam rencana jangka panjang yang menjadi perencanaan bisnis dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, sedangkan Rencana Bisnis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jangka waktu 3 tahun. Pelaksanaan Rencana Korporasi dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

With the status of an Islamic Commercial Bank, the preparation of a Sharia BRK strategic plan is based on SEOJK Number 14/SEOJK.03/2021 dated 30 April 2021 concerning Business Plans for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. BRK Syariah's Corporate Plan is organized into a long-term plan that becomes a business plan with a period of up to 5 years, while a Business Plan is prepared in the form of a Bank Business Plan (RBB) with a period of 3 years. Implementation of Corporate Plan and RBB on an annual basis is carried out through the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian Rencana Bisnis yang telah disusun, BRK Syariah telah melakukan antara lain:

- Melakukan monitoring *progress* dan pencapaian target inisiatif strategis.
- Melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja terkait pencapaian kinerja.
- Evaluasi kinerja Bank secara bulanan maupun triwulanan pada seluruh unit kerja.
- Penyusunan Laporan Realisasi RBB, antara lain memuat keterangan sebagai berikut:
  1. Penjelasan mengenai pencapaian rencana bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian serta perbandingan antara rencana dan realisasinya di antaranya realisasi rasio-rasio keuangan utama

To find out the progress of achieving the Business Plan that has been prepared, BRK Syariah has carried out, among others:

- *Monitor progress and achieve targets for strategic initiatives.*
- *Conduct coaching to all work units related to performance achievement.*
- *Evaluation of the Bank's performance on a monthly and quarterly basis in all work units.*
- *The preparation of the RBB Realization Report, among other things, contains the following information:*
  1. *An explanation of the achievement of the business plan includes the focus and priority of achievement as well as a comparison between the plan and its realization including the realization of the main financial ratios*

(DPK, pembiayaan, laba, NPF); realisasi rasio pembiayaan kepada sektor UMKM; realisasi dana pendidikan dan pelatihan; realiasi pengembangan sistem informasi dan manajemen; realisasi pengembangan produk dan aktivitas baru; dan realisasi pengembangan jaringan kantor.
2. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
3. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis.

(DPK, financing, profits, NPF); realization of the ratio of financing to the MSME sector; realization of education and training funds; realization of information and management system development; realization of product development and new activities; and realization of office network development.
2. *Explanation regarding the deviation from the realization of the business plan, including the causes and obstacles encountered.*
3. *Follow-up or efforts to be made to improve the achievement of business plan realization.*

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Company Information and Data

Pentingnya transparansi informasi dengan memberikan kemudahan akses informasi menjadi fokus BRK Syariah saat ini. Untuk itulah, BRK Syariah menyediakan berbagai saluran komunikasi dalam rangka membina hubungan yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pegawai BRK Syariah, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Sarana komunikasi BRK Syariah antara lain adalah:

The importance of information transparency by providing easy access to information is the current focus of BRK Syariah. For this reason, BRK Syariah provides various communication channels in order to foster good relations with regulators, shareholders, customers, BRK Syariah employees, work partners, and the general public as a form of implementation of the principles of transparency and accountability to stakeholders. BRK Syariah communication facilities include:

Website BRK Syariah

Berbagai informasi terkait produk dan layanan bank, serta berbagai informasi BRK Syariah mudah diakses dan dapat diunggah dalam *website* BRK Syariah *https://www.brksyariah.co.id/*. Uraian lebih detil terkait konten *website* telah diungkapkan pada bagian Informasi *Website* Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

BRK Syariah website

Various information related to bank products and services, as well as various BRK Syariah information are easily accessible and can be uploaded on the BRK Syariah website https://www.brksyariah.co.id/. A more detailed description of the website content has been disclosed in the Company Website Information section in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Media Sosial BRK Syariah

Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, BRK Syariah juga hadir untuk menyampaikan informasi terkait pemutakhiran produk dan jasa Bank, edukasi maupun promo dalam berbagai *platform* media sosial yang meliputi:

- 08117575470
- BRK Syariah
- brksyariahid
- brksyariah_
- BRK Syariah

BRK Syariah Social Media

Social media has become an inseparable part of everyday life. Therefore, BRK Syariah is also present to convey information related to updating Bank products and services, education and promos on various social media platforms which include:

- *08117575470*
- *BRK Syariah*
- *brksyariahid*
- *brksyariah_*
- *BRK Syariah*

Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Interaksi dengan segenap pemangku kepentingan seperti regulator, media, mitra bisnis, komunitas masyarakat maupun pemegang saham dilakukan dengan proses formal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pemangku kepentingan yang terlibat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Means of Communication Stakeholders (Stakeholders)

Interaction with all stakeholders such as regulators, media, business partners, communities and shareholders is carried out in a formal process and in accordance with the needs and objectives of the stakeholders involved, which can be described as follows:

No.	Pemangku Kepentingan *Stakeholders*	Kepentingan *Interest*	Sarana Komunikasi *Communication*
1.	Nasabah *Customer*	Informasi mengenai produk dan Layanan Bank *Information about products and Banking Services*	*Email, Whatshap*
2.	Regulator *Regulators*	Aspek kepatuhan, prinsip kehati-hatian dan tata kelola *Aspects of compliance, prudential principles and governance*	*Email, Whatshap,* Telepon Kantor
3.	Pemegang Saham *Shareholders*	Kinerja keuangan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian *Financial performance and implementation of prudential principles*	*Email, Whatshap*
4.	Mitra Bisnis/Pemasok/ Vendor *Business Partners/Suppliers/ Vendors*	Informasi pengadaan barang dan/jasa Masukan dan saran *Information on procurement of goods and/services* *Feedback and suggestions*	*Email, Whatshap,* Telepon Kantor
5.	Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum *Media, Group Interests and General public*	Informasi mengenai produk dan Layanan Bank Kinerja keuangan *Information about Bank products and services* *Financial performance*	*Email, Whatshap,* Telepon Kantor

Komunikasi Internal

Komunikasi internal di BRK Syariah dilakukan melalui berbagai saluran dan media, antara lain email, kontak person dan aplikasi *whatsapp*. Pegawai BRK Syariah dapat mengakses informasi melalui komputer kerja setiap Pegawai, laptop dan perangkat elektronik lainnya yang merupakan fasilitas Bank.

Internal Communications

Internal communication at BRK Syariah is carried out through various channels and media, including e-mail, contact persons and the WhatsApp application. BRK Syariah employees can access information through each employee's work computer, laptop and other electronic devices which are Bank facilities.

Siaran Pers

Dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan media massa, BRK Syariah menjalankan beragam aktivitas, termasuk menerbitkan siaran pers. Di sepanjang tahun 2022, BRK Syariah telah mengeluarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) siaran pers kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, media massa berperan penting dalam penyebarluasan informasi mengenai perjalanan, perkembangan, maupun pencapaian BRK Syariah.

Press conference

In order to establish effective communication with the mass media, BRK Syariah carries out various activities, including issuing press releases. Throughout 2022, BRK Syariah has issued 223 (two hundred and twenty three) press releases to the general public. Through this activity, the mass media plays an important role in disseminating information regarding the journey, developments and achievements of BRK Syariah.

No.	Tema Siaran Pers	Jumlah Siaran Pers *Number of Press Releases*	*Press Release Theme*
1.	Perusahaan	125	*Company*
2.	Produk dan Layanan Bank	85	*Bank Products and Services*
3.	*Branding* dan *sponsorship*	52	*Branding and sponsorships*
4.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	48	*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Judul dan konten lengkap siaran pers BRK Syariah dapat diakses di *https://www.brksyariah.co.id/*.

The title and full content of the BRK Syariah press release can be accessed at https://www.brksyariah.co.id/.

INVESTOR RELATION
Investor Relations

BRK Syariah menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara Bank dengan segenap pemangku kepentingan, termasuk juga para pemegang saham. Walaupun saat ini, BRK Syariah belum menjadi komunitas pasar modal, namun aspek komunikasi menjadi poin penting dalam membangun reputasi Bank. Untuk itulah, BRK Syariah telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 020A/KEPDIR/2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik. Kebijakan tersebut mengatur terkait dengan keterbukaan informasi serta alur penyampaian informasi BRK Syariah senantiasa memberikan kemudahan bagi pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan serta masyarakat luas untuk mengakses informasi dan data BRK Syariah maupun melakukan komunikasi dengan Bank.

BRK Syariah realizes the importance of a communication policy that regulates communication between the Bank and all stakeholders, including shareholders. Even though currently, BRK Syariah is not yet a capital market community, the communication aspect is an important point in building the Bank's reputation. For this reason, BRK Syariah has a Communication and Information Disclosure Policy as outlined in the Directors' Decree Number: 020A/KEPDIR/2021 concerning Guidelines for Public Information Services. This policy regulates information disclosure and the flow of BRK Syariah information delivery to always make it easy for shareholders and all stakeholders as well as the general public to access BRK Syariah information and data and communicate with the Bank.

INFORMASI PENTING LAINNYA
Other Important Information

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan/atau Obligasi

Buyback saham dan/atau obligasi menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2011 BRK Syariah menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Selama tahun 2022, BRK Syariah tidak melakukan transaksi pembelian kembali (*buyback*) atas saham dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

Buyback of Shares and/or Bonds

Buyback of shares and/or bonds according to Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) Number: 12/13/DPbs dated 30 April 2010 concerning GCG Implementation for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units is an effort to reduce the number of issued shares or bonds by buying back shares or bonds, the payment procedure of which is carried out in accordance with the applicable regulations.

In 2011 BRK Syariah issued Bonds I with a value of IDR 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah). This bond was issued scriplessly and has a term of 5 (five) years from the date of issuance until the maturity date on July 8, 2016. This bond is not guaranteed by special collateral, but is guaranteed by all of the Bank's assets, both movable and immovable property. movable assets, which have existed or will exist in the future, serve as collateral for the Bondholders.

During 2022, BRK Syariah will not carry out buyback transactions on shares and/or bonds issued by the Bank.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai lembaga intermediasi, BRK Syariah melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, termasuk juga kepada pihak yang terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada nasabah inti.

BRK Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio pembiayaan melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BRK Syariah dengan memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD). Adapun terkait dengan penyediaan dana besar, BRK Syariah melakukan analisa kelayakan minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dari penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana besar adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan yang berlaku di BRK Syariah sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan yang termuat di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 019/KEPDIR/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan.

Selama tahun 2022, BRK Syariah tidak mencatat adanya pelanggaran atau pelampauan BMPD dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang diuraikan lebih rinci pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds

As an intermediary institution, BRK Syariah carries out financing distribution activities to the community, including related parties and large exposure to core customers.

BRK Syariah applies the principle of prudence in providing funds to related parties, by implementing dissemination or diversification of the financing portfolio through a review process and a mechanism that is in accordance with BRK Syariah policies by complying with OJK regulations and applicable laws and regulations regarding the Maximum Funding Limit (BMPD).). As for the provision of large funds, BRK Syariah conducts a minimum feasibility analysis that is the same or more prudent than providing funds to general debtors. The terms and conditions for providing large funds are in accordance with the financing provisions and procedures that apply to BRK Syariah as stipulated in the Financing Company Manual (BPP) contained in the Board of Directors Decree Number 019/KEPDIR/2022 concerning Financing Company Manual (BPP) .

During 2022, BRK Syariah did not record any violations or exceedances of BMPD in providing funds to related parties and providing large funds which are described in more detail in the Management Discussion and Analysis Chapter on Company Performance in this Annual Report.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Yang dimaksud dengan *internal fraud* Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai tetap maupun tidak tetap, baik honorer dan *outsourcing* dengan nilai penyimpangan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Sepanjang tahun 2022 terdapat 2 (dua) penyimpangan internal dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

Number of Internal Fraud and Settlement Efforts

What is meant by Bank internal fraud in accordance with applicable regulations is deviation or fraud committed by members of the Board of Directors and Board of Commissioners, permanent and non-permanent employees, both honorary and outsourced with a deviation value of more than Rp. 100,000,000 (one hundred million Rupiah). Throughout 2022 there were 2 (two) internal irregularities which have been reported to the Financial Services Authority, as follows:

Tabel Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2021-2022
Table of Total Internal Deviations for 2021-2022

Internal Fraud Tahun 2021-2022	Jumlah Kasus yang Dilakukan *Number of Cases Done*						*Internal Fraud Years 2021-2022*
	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*		Pegawai Tetap *Permanent employee*		Pegawai Tidak Tetap *Temporary employees*		
	Tahun 2021 *Year 2021*	Tahun 2022 *Year 2022*	Tahun 2021 *Year 2021*	Tahun 2022 *Year 2022*	Tahun 2021 *Year 2021*	Tahun 2022 *Year 2022*	
Total Fraud	-	-	3	1	-	1	*Total Fraud*
Telah Diselesaikan	-	-	3	1	-	1	*Resolved*
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-	*In the Settlement Process in the Bank's Internal*
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	*Not Resolved Yet*
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	*Has Been Followed Up Through Legal Process*

Upaya Penyelesaian

Sebagai wujud penerapan *zero fraud*, pada tahun 2022 BRK Syariah memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan *fraud* dan pegawai lainnya yang melakukan pelanggaran setelah melalui tahapan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi.

Selain itu, terhadap pelaku *fraud* internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahan integritas.

Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya *fraud* internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/ pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank

Settlement Efforts

As a form of implementing zero fraud, in 2022 BRK Syariah will take firm action in the form of sanctions for employees who are proven to have committed fraud and other employees who have committed violations after going through the stages of the process of examination and imposition of sanctions.

In addition, for internal fraud perpetrators, the Bank's management has given strict sanctions in the form of Disrespectful Termination of Employment (PHK) and compensation, and the Bank has issued information letters to agencies in Riau and Riau Islands that the person concerned was dismissed due to integrity issues.

Employees who are related to the occurrence of internal fraud are given sanctions according to the level of errors/violations of procedures carried out while still referring to the provisions on staffing sanctions that apply internally to the Bank.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan terkait dengan pencegahan transaksi orang dalam (*insider trading*) tercantum dalam Kode Etik *Dealer* pada Divisi *Treasury* dan Internasional. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas treasuri di pasar keuangan syariah dilarang mempergunakan Bank menjadi fasilitator untuk bertransaksi dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi atau spekulasi bagi rekening pribadi pada semua instrumen pasar keuangan syariah yang dimaksud dalam Kode etik treasuri *(Islamic Code of Conduct)* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Prevention of Insider Trading (Insider Trading)

Provisions related to the prevention of insider trading are listed in the Dealer Code of Conduct in the Treasury and International Division. The policy stipulates that Directors and employees who carry out treasury activities in the Islamic financial market are prohibited from using the Bank as a facilitator for transactions with the aim of taking personal gain or speculation for personal accounts in all Islamic financial market instruments referred to in the treasury code of ethics (Islamic Code of Conduct).) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRK Syariah tidak terlepas dari interaksi antar individu di lingkungan Bank maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bahkan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Bank. Untuk itulah, BRK Syariah senantiasa berkomitmen mematuhi POJK Nomor: 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BRK Syariah telah menetapkan SK Direksi Nomor 169/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan transaksi afiliasi maupun yang mengandung benturan kepentingan. Selama tahun 2022, BRK Syariah telah melakukan sosialisasi pada jaringan kantor Bank mengenai kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.

Mekanisme *Review* dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi kondisi benturan kepentingan maka sesuai kebijakan tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest)*, insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Bank harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat Benturan Kepentingan. Namun, apabila keputusan masih tetap akan diambil, maka pihak yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
2. Di dalam setiap risalah rapat atau keputusan Bank yang dibuat oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Bank, agar dinyatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan rapat atau keputusan yang dibuat oleh pejabat dan pengurus Bank tersebut telah memuat ada atau tidaknya Benturan Kepentingan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest

Affiliate Transaction and Conflict of Interest Policy

In carrying out its business activities, BRK Syariah is inseparable from interactions between individuals within the Bank and with other parties, where there is a potential conflict of interest that may be unavoidable between one party and another, so that it can affect the decision-making process and even the performance of results. such decision may be detrimental to the Bank. For this reason, BRK Syariah is always committed to complying with POJK Number: 42/POJK.04/2020 Concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest. With the issuance of these provisions, BRK Syariah has issued Board of Directors Decree Number 169/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for Conflict of Interest in ensuring the appropriateness of the implementation of affiliated transactions as well as those containing conflicts of interest. During 2022, BRK Syariah has carried out outreach to the Bank's office network regarding this policy carried out by the Compliance Division.

Mechanism of Review and Approval of Affiliated Transactions and Conflicts of Interest

In the event of a conflict of interest, according to the policy regarding the Conflict of Interest Guidelines, BRK Syariah employees will do the following:

1. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Bank Officers must avoid making decisions in circumstances where there is a conflict of interest. However, if a decision is still to be made, the party experiencing a conflict of interest must continue to prioritize the economic interests of the bank and prevent the bank from losses that may arise/possibility of reducing bank profits and disclose the condition of the conflict of interest in every decision.*
2. *In every minutes of meetings or decisions made by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Bank officials, it is necessary to state that the decisions made at the meeting or decisions made by the officials and management of the Bank contain whether or not there is a conflict of interest.*
3. *Any policies and decisions containing a conflict of interest will be decided by members of the Board of Commissioners, members of the board of directors and bank officials who do not have conflicts of interest.*

Dalam hal Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank memiliki Benturan Kepentingan maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank lainnya yang tidak memiliki Benturan Kepentingan

4. Dalam hal insan Bank berada di dalam situasi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan harus menarik diri dan dilarang ikut dalam pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan tersebut.
5. Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh pegawai/pejabat/pengurus yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi dan laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan dan/atau mengurangi keuntungan BRK Syariah.

In the event that Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Bank Officers have a Conflict of Interest, decision making is transferred to Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and other Bank Officers who do not have a Conflict of Interest

4. *In the event that a Bank employee is in a Conflict of Interest situation, the person concerned must withdraw and be prohibited from participating in the discussion/proposal and/or decision-making process.*
5. *If a discussion/proposal/decision is the absolute authority of the person concerned, and is still within the limits of the authority/transaction limit of his position and the process if transferred will hinder the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the employee/officer/ the management concerned in a professional manner accompanied by reasons that can be accounted for and with due observance of the applicable provisions.*

During 2022, there were no transactions and reports regarding transactions containing conflicts of interest that could potentially harm and/or reduce BRK Syariah's profits.

Transaksi yang Mengandung Transaksi Benturan Kepentingan *Transactions Containing Conflict of Interest Transactions*				
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan *Name and Position with Conflict of Interest*	**Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan** *Name and Position of Decision Maker*	**Jenis Transaksi** *Transaction Type*	**Nilai Transaksi** *Transaction Value*	**Keterangan** *Information*
Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

BRK Syariah telah mengungkapkan informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Penyampaian dan publikasi informasi tersebut dilakukan baik melalui media cetak maupun situs web *https://www.brksyariah.co.id*.

Secara berkala, BRK Syariah telah mempublikasikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang diunggah dalam di *website* BRK Syariah. Selain itu, BRK Syariah juga telah mengumumkan Laporan Keuangan, Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional serta melaporkannya juga ke lembaga terkait agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan BRK Syariah.

Dalam memenuhi aspek transparansi non keuangan, BRK Syariah telah mengungkapkan berbagai informasi sebagai berikut:

1. *Website* BRK Syariah telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank;
2. Menyampaikan informasi produk dan layanan bank di *website* mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya;
3. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/Kantor Kas BRK Syariah;
4. Menginformasikan tingkat suku bunga dan kurs pada papan informasi elektronik;
5. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
6. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

BRK Syariah has disclosed information on the financial and non-financial conditions of the Bank to stakeholders in accordance with applicable regulations, by preparing and presenting reports according to the procedures, types and scope as stipulated in Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations, including Annual Reports, Published Financial Reports Quarterly, Monthly Published Financial Reports and Governance Implementation Reports. Submission and publication of this information is carried out both through print media and the website https://www.brksyariah.co.id.

Periodically, BRK Syariah publishes Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports and Consolidated Financial Reports which are uploaded on the BRK Syariah website. In addition, BRK Syariah has also announced Financial Reports, Quarterly Publications in local and national daily newspapers and also reported them to related institutions so that the public obtains clear and accurate information about the financial condition of BRK Syariah.

In fulfilling the non-financial transparency aspect, BRK Syariah has disclosed various information as follows:

1. *The BRK Syariah website has presented the Bank's Annual Report, Quarterly Published Financial Reports, GCG Implementation Reports, information on Branch Offices, Sub-Branch Offices, Cash Offices, and Bank ATM locations;*
2. *Delivering information on bank products and services on the website including product types, interest rates, third party bill payment services and so on;*
3. *Providing product brochures at each Branch Office/Sub-Branch/Cash Office of BRK Syariah;*
4. *Informing interest rates and exchange rates on electronic information boards;*
5. *Informing procedures for handling and resolving customer complaints;*
6. *Establish a customer complaint unit and/or function at the Head Office and at each Branch Office.*

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

BRK Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan etika bisnis yang sehat. BRK Syariah selama tahun 2022 tidak memberikan bantuan atau donasi terkait kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BRK Syariah dilaksanakan dalam berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dan sebagainya.

Uraian lebih lanjut terkait dana kegiatan sosial dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini.

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

BRK Syariah is a Regional Owned Enterprise that is established and operates based on the principles of a limited liability company and sound business ethics. BRK Syariah during 2022 will not provide assistance or donations related to political activities. Providing funds for social activities by BRK Syariah is carried out in various Corporate Social Responsibility (CSR) programs to improve community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, and so on.

Further description regarding social activity funds is explained in the Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Pada periode laporan, tidak terdapat sanksi administratif material yang dikenakan kepada BRK Syariah, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal maupun Otoritas lainnya. Sanksi yang dikenakan hanya sebatas denda atas kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan dan jumlahnya tidak signifikan merugikan Bank.

Namun, selama tahun 2022, terdapat sanksi denda yang dikenakan kepada BRK Syariah dengan jumlah yang tidak materia, yaitu:

1. Denda atas tidak terbentuknya CKPN Unit Usaha Syariah di sistem untuk periode data Agustus dan Oktober 2021.
2. Denda keterlambatan koreksi LBUT BI Antasena untuk periode data April 2022.
3. Denda atas koreksi LBUT BI Antasena untuk periode data Juni 2022.

Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authorities and Other Authorities

During the reporting period, there were no material administrative sanctions imposed on BRK Syariah, members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authority or other Authorities. The sanctions imposed are only limited to fines for errors and delays in submitting reports and the amount is not significant to the Bank's loss.

However, during 2022, there are immaterial sanctions imposed on BRK Syariah, namely:

1. *Penalties for not forming CKPN for Sharia Business Units in the system for the August and October 2021 data periods.*
2. *Penalty for late correction of Antasena's BI LBUT for the April 2022 data period.*
3. *Fines for corrections to Antasena's BI LBUT for the June 2022 data period.*

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

Notice of Bad Corporate Governance Practices

BRK Syariah menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun selama ini. Sepanjang tahun 2022, BRK Syariah berkomitmen untuk **tidak melakukan segala tindakan** yang bertentangan dengan GCG dengan menghindari praktik sebagai berikut:

*BRK Syariah realizes that bad corporate governance practices will disrupt the good governance system (GCG) that has been built so far. Throughout 2022, BRK Syariah is committed **not to take any actions** that are contrary to GCG by avoiding the following practices:*

No.	Uraian	Praktik *Practice*	Explanation
1.	Adanya laporan sebagai Bank yang mencemari lingkungan.	Nihil *Nothing*	*There is a report as a bank that pollutes the environment.*
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam LaporanTahunan.	Nihil *Nothing*	*Important matters currently being faced by the Bank, its subsidiaries, members of the Board of Directors and/or currently serving members of the Board of Commissioners are not disclosed in the Annual Report.*
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil *Nothing*	*Non-compliance in fulfilling tax obligations.*
4.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil *Nothing*	*Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK.*
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil *Nothing*	*Cases related to labor and employees.*
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan.	Nihil *Nothing*	*There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements.*
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan versi *hardcopy* dengan Laporan Tahunan versi *softcopy*.	Nihil *Nothing*	*There is a discrepancy between the hardcopy version of the Annual Report Book and the softcopy version of the Annual Report.*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

brisyariah
BANTUAN
MOBIL AMBULAN
brisyariah
MASJID
RAYA AN-NUR
PEKANBARU

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Corporate Social Responsibility

Selama Tahun 2022, BRK Syariah menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp33.616.502.711,- melalui 5 program yang mendukung tujuan kinerja positif dan kunci kerberhasilan di masa depan.

Informasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) diungkapkan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik dan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitan, dan Perusahaan Publik. Adapun informasi program CSR yang dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini hanya melingkupi konsep dasar program CSR, lingkup, program, pendanaan yang diselenggarakan oleh BRK Syariah selama tahun 2022.

During 2022, BRK Syariah distributed Corporate Social Responsibility (CSR) funds of Rp33,616,502,711, - through 5 programs that support positive performance goals and the key to success in the future.

Information regarding Corporate Social Responsibility (CSR) is comprehensively disclosed in the Sustainability Report as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers and Public Companies and in the framework of implementing sustainable finance as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. The CSR program information presented in this Annual Report only covers the basic concepts of the CSR program, scope, program, funding organized by BRK Syariah during 2022.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

BRK Syariah menyadari bahwa kinerja positif Bank tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Pengembangan masyarakat, penanganan isu-isu konsumen, praktik bisnis yang sehat, pelestarian lingkungan, praktik ketenagakerjaan yang sehat, hak asasi manusia dan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci kerberhasilan Bank. Hal tersebut adalah bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang secara konsisten dilakukan oleh Bank. Program CSR Perusahaan dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perlindungan dan pelayanan prima kepada konsumen, serta penegakan hak asasi manusia.

Commitment and Policy On Social and Environmental Responsibility

BRK Syariah realizes that the positive performance of the Bank is not only measured by business growth and performance alone. Community development, handling consumer issues, sound business practices, environmental preservation, healthy employment practices, human rights and good corporate governance are part of the positive performance and key to the success of the Bank. This is part of the Corporate Social Responsibility (CSR) which is consistently carried out by the Bank. The Company's CSR program is carried out in various initiatives that focus on sustainable environmental management, community social and economic development, improving the quality of employment management, Occupational Health and Safety (K3), protection and excellent service to consumers, and upholding human rights.

Dasar Penerapan CSR

Visi dan Misi CSR

Basis of CSR Implementation

CSR Vision and Mission

VISI / *VISION*

Menjadi bank daerah yang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya, pendidikan, kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga serta ekonomi dengan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat yang berkelanjutan.

To become a regional bank that encourages regional economic growth, so as to be able to improve the quality of life and people's welfare in the fields of environment, health, social and culture, education, religious activities, youth and sports as well as the economy by building sustainable harmonious relationships between the Government, Companies and Communities .

MISI / *MISSION*

- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan penyediaan saluran distribusi dan fasilitas untuk usaha-usaha kecil yang dibiayai Bank.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) masyarakat dengan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
- Berperan aktif dalam peningkatan kehidupan masyarakat dengan peduli dan tanggap terhadap lingkungan hidup, ketenagakerjaan/keselamatan kerja, kesehatan, sosial dan budaya, kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, perlindungan nasabah, sosial kemasyarakatan, pendidikan, adat/budaya/seni, bencana alam, dan atau dukungan operasional kegiatan pemerintahan.
- *Encouraging regional economic growth by providing distribution channels and facilities for small businesses financed by the Bank.*
- *Improving the quality of human resources (SDI) in society by participating in improving the quality of education in the regions.*
- *Playing an active role in improving people's lives by caring for and being responsive to the environment, employment/work safety, health, social and culture, religious activities, youth and sports, customer protection, social affairs, education, custom/culture/arts, natural disasters, and or operational support for government activities.*

TUJUAN / *OBJECTIVE*

Program CSR BRK Syariah bertujuan untuk mendorong budaya kerja Bank yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas bisnis, sehingga dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan Bank.

The BRK Syariah CSR program aims to encourage a more responsible work culture of the Bank in carrying out business activities, so that the business world will be able to survive in a sustainable manner to achieve the Bank's goals.

Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan program CSR BRK Syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Selain itu, BRK Syariah secara khusus menetapkan peraturan tentang CSR dalam regulasi internal yaitu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 004/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Prinsip

BRK Syariah menyusun kebijakan dan program CSR baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan perusahaan terkait program CSR. Di samping itu, BRK Syariah telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) CSR yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program program CSR agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkan untuk menegakkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan program CSR.

Policy Basis For Implementing CSR

The implementation of the BRK Syariah CSR program refers to the laws and regulations in Indonesia, both those that regulate CSR in general and specifically, including:

1. *Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking*
3. *Republic of Indonesia Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies*
4. *Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Social and Environmental Responsibility of Business Entities.*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks.*
6. *Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.*
7. *Regional Regulation of Riau Province Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province.*

In addition, BRK Syariah specifically stipulates regulations regarding CSR in internal regulations, namely the Company Manual (BPP) which is stipulated through Directors Decree No. 004/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual for the Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Principle

BRK Syariah prepares CSR policies and programs both in concept and in written implementation targets. The company already has a written policy from the company leadership regarding CSR programs. In addition, BRK Syariah already has a CSR Standard Operating Procedure (SOP) that regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs so that they can run effectively and have an optimal impact on stakeholders. SOPs are also intended to uphold the principles of good governance in the implementation of CSR programs.

Ruang Lingkup dan Fokus

Ruang lingkup program CSR BRK Syariah merujuk pada Standar ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial yang meliputi:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Asasi Manusia
3. Operasi Yang Adil
4. Lingkungan Hidup
5. Ketenagakerjaan
6. Pemenuhan Kepentingan Nasabah
7. Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaannya, Program CSR dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar operasional Bank dan masyarakat luas secara selektif. Fokus pelaksanaan Program CSR meliputi 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Sosial
3. Bidang Keagamaan
4. Bidang Seni & Budaya
5. Bidang Olah Raga

Scope and Focus

The scope of the BRK Syariah CSR program refers to the ISO 26000 Standard on Social Responsibility which includes:

1. *Governance of Social Responsibility*
2. *Human rights*
3. *Fair Operation*
4. *Environment*
5. *employment*
6. *Fulfillment of Customer Interests*
7. *societal*

In its implementation, the CSR Program is carried out selectively to all stakeholders, including the community around the Bank's operations and the wider community. The focus of implementing the CSR Program includes 5 (five) pillars, namely:

1. *Field of education*
2. *Social Field*
3. *Religious Field*
4. *Arts & Culture*
5. *Sports field*

Metoda dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan Bank, maka BRK Syariah telah memiliki berbagai kebijakan, mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan. Metode dan lingkup due diligent disajikan sebagai berikut:

Due Diligent Methods and Scope on Social, Economic, and Environmental Impacts of Corporate Activities

In order to prevent negative impacts from the Bank's decisions and activities, BRK Syariah has various policies, monitoring mechanisms and complaint handling mechanisms in place. The method and scope of due diligence are presented as follows:

Core Subject	Lingkup *Scope*	Kebijakan *Policy*	Mekanisme Pemantauan *Mechanism Monitoring*	Mekanisme Penangangan Keluhan *Mechanism Complaint Handling*
Hak Asasi Manusia *Human rights*	Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada seluruh pekerja *Application of human rights principles to all workers*	- Perjanjian Kerja Bersama - *Code of Conduct*/CoC - *Collective labor agreement* - *Code of Conduct/CoC*	Survei kepuasan karyawan *Employee satisfaction survey*	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung *Complaints can be submitted directly to the Leader*
Operasi yang Wajar *Reasonable Operation*	Pencegahan benturan kepentingan, implementasi *Whistleblowing System* dan *Code of Conduct*, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain *Prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insider behavior and relations with other organizations*	- Kebijakan pengendalian internal - *Whistleblowing System* (*WBS*) - *Code of Conduct* - Kebijakan gratifikasi - *Internal control policies* - *Whistleblowing System (WBS)* - *Code of conduct* - *Gratuity policy*	*Assessment* GCG sebagai penilaian dalam pelaksanaan operasi yang adil *GCG Assessment as an assessment in the implementation of fair operations*	Pengaduan dilaporkan kepada Tim Pengelola Laporan Pelanggaran melalui *Whistle Blowing System* *GCG Assessment as an assessment in the implementation of fair operations*

Core Subject	**Lingkup** *Scope*	**Kebijakan** *Policy*	**Mekanisme Pemantauan** *Mechanism Monitoring*	**Mekanisme Penangangan Keluhan** *Mechanism Complaint Handling*
Lingkungan Hidup *Reasonable Operation*	Efisiensi di lingkungan internal Bank, pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup serta penerapan keuangan berkelanjutan *Efficiency in the Bank's internal environment, maintenance environmental sustainability and the implementation of sustainable finance*	Kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal. *Policies related to environmental aspects, both internally and externally.*	Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) *Policies related to environmental aspects, both internally and externally.*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat. *Complaints can be submitted directly to the nearest Head Office or Branch Office.*
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja *Complaints can be submitted directly to the nearest Head Office or Branch Office.*	Berbagai program ketenagakerjaan seperti kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan kebebasan berserikat dan lainnya. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Bank memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan *Various employment programs such as gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs on freedom of association and others. In addition, within the scope of occupational health and safety activities, the Bank has a program to provide health facilities and guarantee work safety to all employees*	Peraturan Standar K3 BRK Syariah *Sharia BRK K3 Standard Regulations*	Survei Kepuasan Karyawan *Employee Satisfaction Survey*	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung *Complaints can be submitted directly to the Leader*

Core Subject	**Lingkup** *Scope*	**Kebijakan** *Policy*	**Mekanisme Pemantauan** *Mechanism Monitoring*	**Mekanisme Penangangan Keluhan** *Mechanism Complaint Handling*
Tanggung Jawab Konsumen *Consumer Responsibility*	- Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perbankan serta layanan pengaduan nasabah - Peningkatan kualitas layanan. - Program literasi dan inklusi perbankan. *- Ease of access to information and banking service networks as well as customer complaint services* *- Service quality improvement.* *- Banking literacy and inclusion programs.*	- SK Direksi Nomor 182/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Layanan *Call Center* BRK Syariah - SE Nomor 082/SE/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Layanan *Call Center* BRK Syariah - SK Direksi Nomor 084/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan dan Permintaan Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). - SE Nomor 107/SE/2022 Tanggal 28 November 2022 tentang SLA (Service Level Agreement) Perlindungan dan Penanganan Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). - SK Nomor 202/KEPDIR/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perlindungan dan Penanganan Nasabah dan/atau Konsumen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). *- Board of Directors Decree Number 182/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning BRK Syariah Call Center Services* *- SE Number 082/SE/2022 dated 22 August 2022 concerning Guidelines for BRK Syariah Call Center Services* *- Board of Directors Decree Number 084/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning Standard Operational Procedures for Handling Complaints and Customer Requests of PT. Riau Kepri Sharia Regional Development Bank (Perseroda).* *- SE Number 107/SE/2022 dated 28 November 2022 concerning SLA (Service Level Agreement) Protection and Handling of Customer and/or Consumer Complaints of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).* *- SK Number 202/KEPDIR/2022 dated October 4, 2022 concerning the Company Manual for the Protection and Handling of Customers and/or Consumers of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*	Aplikasi Pengaduan Nasabah dan Aplikasi Layanan *Call Center* *Customer Complaint Application and Call Center Service Application*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat, melalui Layanan *Call Center* BRK Syariah atau Kantor Cabang terdekat *Complaints can be submitted directly to the Head Office, through the BRK Syariah Call Center Service or the nearest Branch Office*

Core Subject	**Lingkup** *Scope*	**Kebijakan** *Policy*	**Mekanisme Pemantauan** *Mechanism Monitoring*	**Mekanisme Penangangan Keluhan** *Mechanism Complaint Handling*
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan *Community Social Development*	Kontribusi kepada masyarakat *Contribution to society*	Kebijakan internal terkait pelaksanaan kegiatan CSR BRK Syariah *Internal policies related to the implementation of BRK Syariah CSR activities*	Laporan Pelaksanaan CSR *CSR Implementation Report*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest Branch Office*

Struktur Pengelola CSR

Program CSR telah menjadi prioritas BRK Syariah sehingga Bank menugaskan Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai pelaksana program. Divisi Sekretariat Perusahaan berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Berikut struktur pengelola CSR pada BRK Syariah.

CSR Management Structure

The CSR program has become a priority for BRK Syariah so that the Bank assigned the Corporate Secretariat Division to implement the program. The Corporate Secretariat Division coordinates and reports directly to the Director of Compliance and Risk Management. The following is the CSR management structure at BRK Syariah.

Diagram Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan
Diagram of the Organizational Structure of the Company Secretariat Division

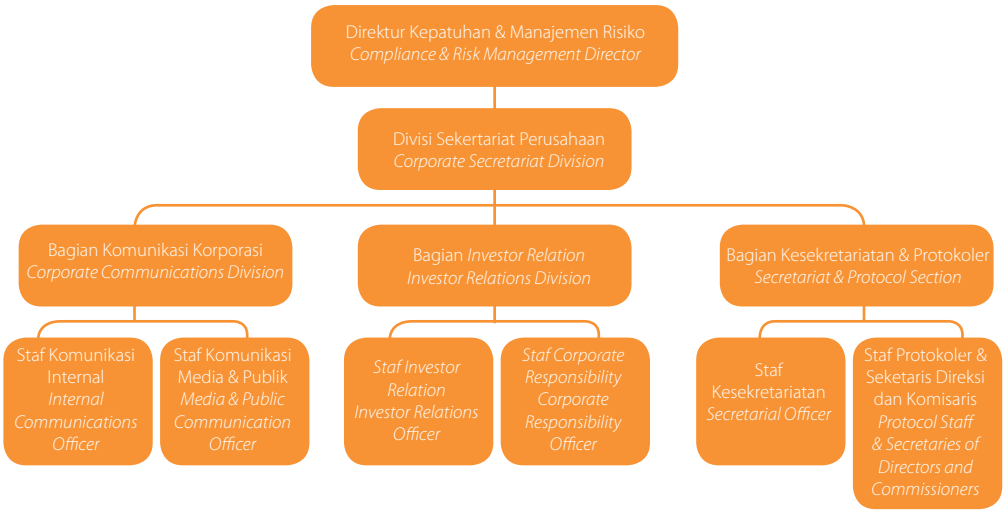

Tugas dan Tanggung Jawab

Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab program CSR memiliki kewenangan dan bertindak sebagai koordinator pelaksanaan serta melakukan evaluasi CSR. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai Unit Kerja Pengelola CSR adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan mereview Kebijakan pengelolaan CSR.
2. Menyusun anggaran CSR untuk dimintakan persetujuan Pemegang Saham dan pada anggaran Bank.
3. Memastikan pengelolaan dan memantau pelaksanaan CSR sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan CSR Program Kemitraan kepada Pemegang Saham.
5. Menyusun, penerbitan dan pendistribusian Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) dengan bekerjasama dengan unit kerja terkait.

Duties and Responsibilities

The Corporate Secretariat Division as the person in charge of the CSR program has the authority and acts as the implementation coordinator and conducts CSR evaluations. The duties and responsibilities of the Corporate Secretariat Division as a CSR Management Work Unit are as follows:

1. *Compile and review CSR management policies.*
2. *Prepare a CSR budget to seek approval from Shareholders and on the Bank's budget.*
3. *Ensuring the management and monitoring of the implementation of CSR as an effort to provide guidance to stakeholders*
4. *Submit a report on the implementation of CSR Partnership Program to Shareholders.*
5. *Prepare, publish and distribute Sustainability Reports in collaboration with related work units.*

Sumber Dana, Anggaran, dan Realisasi Anggaran CSR

Sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) CSR yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 004/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), program-program CSR didanai dari sumber berikut:

1. Dana Program Kemitraan:
   Sumber dana program kemitraan berasal dari dana BRK Syariah yang menggunakan beban biaya dana kemitraan Bank yang besarannya ditentukan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Sedangkan untuk perubahan besaran anggaran dapat dilaksanakan pada RUPS luar biasa. Besaran plafon dana Program Kemitraan yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) disampaikan dalam Surat Edaran Direksi.

2. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan:
   Sumber dana program bantuan kemasyarakatan berasal dari dana BRK Syariah yang menggunakan biaya dana bantuan kemasyarakatan yang besarnya ditentukan dalam penyusunan anggaran (RKAT) Bank.

BRK Syariah menyadari pentingnya program CSR untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kinerja positif serta kunci kerberhasilan Bank di masa depan. Oleh karena itu BRK Syariah menyediakan anggaran yang khusus dialokasikan untuk kegiatan CSR. Total dana yang telah disalurkan BRK Syariah melalui berbagai kegiatan CSR selama tahun 2022 sebesar Rp33.616.502.711,- dengan rincian sebagai berikut:

Sources of Funding, Budget, and Realization of CSR Budget

In accordance with the CSR Company Manual (BPP) stipulated through the Directors Decree No. 004/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Company Manual for the Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), CSR programs are funded from the following sources:

1. *Partnership Program Funds:*
   The source of funding for the partnership program comes from BRK Syariah funds which use the cost of the Bank's partnership funds, the amount of which is determined by the resolution of the annual General Meeting of Shareholders (GMS). Meanwhile, changes to the amount of the budget can be implemented at an extraordinary GMS. The ceiling amount of Partnership Program funds received by each Regional Government (Provincial, Regency and City) is stated in a Board of Directors Circular Letter.

2. *Community Assistance Program Funds:*
   The source of funds for the community assistance program comes from Sharia BRK funds which use the cost of community assistance funds, the amount of which is determined in the preparation of the Bank's budget (RKAT).

BRK Syariah realizes the importance of CSR programs to support sustainable growth and positive performance as well as the key to the success of the Bank in the future. Therefore BRK Syariah provides a special budget allocated for CSR activities. The total funds that have been channeled by BRK Syariah through various CSR activities during 2022 amount to IDR 33,616,502,711, - with the following details:

Kegiatan	Realisasi	Persentase Realisasi	*Activity*
Program Kemitraan:			*Partnership Program:*
Pendidikan	7.204.993.151	22,07%	*Education*
Sosial	11.954.817.728	36,63%	*Social*
Keagamaan	12.960.886.832	39,71%	*Religious*
Seni dan Budaya	207.960.000	0,64%	*Art and culture*
Olah Raga	311.000.000	0,95%	*Sport*
Jumlah	**32.639.657.711**		***Total***
Program Dana Bantuan Kemasyarakatan:			*Community Assistance Fund Program:*
Pendidikan	68.379.150	7,00%	*Education*
Sosial	517.727.850	53,00%	*Social*
Keagamaan	185.600.550	19,00%	*Religious*
Seni dan Budaya	126.989.850	13,00%	*Art and culture*
Olah Raga	78.147.600	8,00%	*Sport*
Jumlah	**976.845.000**		***Total***

Pelaksanaan Program

BRK Syariah telah melaksanakan berbagai kegiatan CSR, antara lain:

Program Implementation

BRK Syariah has carried out various CSR activities, including:

Keterangan	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Dokumentasi
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Keagamaan *Category : Religious* Tanggal : 15 April 2022 *Date : April 15, 2022*	Provinsi Riau *Riau Province*	Bank Riau Kepri bersama Gubernur Riau Bapak Drs. H. Syamsuar, M.Si., berikan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Masjid Al Firdaus untuk pembangunan sarana dan prasarana Masjid. *Bank Riau Kepri with the Governor of Riau Mr. Drs. H. Syamsuar, M.Sc., provided Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the Al Firdaus Mosque for the construction of mosque facilities and infrastructure.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Kesehatan *Category : Health* Tanggal : 19 Oktober 2022 *Date : October 19, 2022*	Kabupaten Bengkalis *Bengkalis Regency*	BRK Syariah berikan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 50 Ibu Hamil dan 100 Anak Balita yang diterima oleh Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni, S.Sos., MMP. *BRK Syariah provided Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the Bengkalis Regency Government in the form of Provision of Supplementary Food (PMT) to 50 Pregnant Women and 100 Toddlers received by the Regent of Bengkalis, Ibu Kasmarni, S.Sos., MMP.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pendidikan *Category : Education* Tanggal : 25 April 2022 *Date : April 25, 2022*	Kabupaten Kampar *Kampar Regency*	Bank Riau Kepri menyalurkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemrintah Kabupaten Kampar berupa Rehabilitasi Gedung MI Al Muhajirin *Bank Riau Kepri distributes Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the Kampar Regency Government in the form of Rehabilitation of the MI Al Muhajirin Building*	

Keterangan	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Dokumentasi
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pendidikan *Category : Education* Tanggal : 31 Maret 2023 *Date : March 31, 2023*	Kabupaten Indragiri Hilir *Indragiri Hilir Regency*	BRK Syariah bersama Bupati Inhil Bapak Drs. H. Muhammad Wardan, MP., melakukan penandatanganan prasasti pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Baiturrahman An-Nizom. *BRK Syariah with the Regent of Inhil Mr. Drs. H. Muhammad Wardan, MP., signed the inscription for the construction of the Baiturrahman An-Nizom Islamic Boarding School (Ponpes).*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pembinaan UMKM *Category : MSME Development* Tanggal : 22 Februari 2022 *Date :February 22, 2022*	Kabupaten Kepulauan Meranti *Kepulauan Meranti Regency*	Bank Riau Kepri menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa Pengadaan 15 (lima belas) unit Gerobak Jualan untuk Koperasi Wirausaha POKJA Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau *Bank Riau Kepri handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance in the form of procurement of 15 (fifteen) units of Carts for Sales for POKJA Entrepreneurial Cooperatives, Teluk Belitung Village, Merbau District*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Keagamaan *Category : Religious* Tanggal : 27 Juni 2022 *Date : June 27, 2022*	Kota Batam *Batam city*	Bank Riau Kepri menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa baju seragam kepada Pemerintah Kota Batam yang diterima oleh Kabag Kesra Pemerintah Kota Batam. *Bank Riau Kepri handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance in the form of uniforms to the Government of Batam City which was received by the Head of the Batam City Government Welfare Unit.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Sosial Kemasyarakatan *Category : Social Society* Tanggal : 05 Oktober 2022 *Date : October 05, 2022*	Kabupaten Bintan *Bintan Regency*	BRK Syariah berikan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Bintan berupa seragam Maulud Berjanzi "Nurul Janah" yang diterima Bupati Bintan Bapak Roby Kurniawan, S.P.W.K. *BRK Syariah provided Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the Bintan Regency Government in the form of the Maulud Berjanzi "Nurul Janah" uniform which was received by the Regent of Bintan Mr. Roby Kurniawan, S.P.W.K.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pembinaan UMKM *Category : MSME Development* Tanggal : 22 Desember 2022 *Date : December 22, 2022*	Kabupaten Rokan Hilir *Rokan Hilir Regency*	Penyerahan simbolis bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) BRK Syariah Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diterima Kelompok Perikanan Tuah Ikan *Symbolic handover of assistance from the BRK Syariah Corporate Social Responsibility (CSR) Program to the Rokan Hilir Regency Government received by the Tuah Ikan Fisheries Group*	

Keterangan	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Dokumentasi
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Sosial Kemasyarakatan *Category : Social Society* Tanggal : 13 Oktober 2022 *Date : October 13, 2022*	Kabupaten Kepulauan Natuna *Kepulauan Natuna Regency*	BRK Syariah menyerahkan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simbolis kepada Pemerintah Kabupaten Natuna Berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terima oleh Bupati Natuna Bapak Wan Siswandi, S. Sos., M. Si. *BRK Syariah handed over the Corporate Social Responsibility (CSR) Program symbolically to the Government of Natuna Regency in the form of Public Road Lighting (PJU) which was received by the Regent of Natuna Mr. Wan Siswandi, S. Sos., M. Si.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pendidikan *Category : Education* Tanggal : 08 Januari 2023 *Date : January 08, 2023*	Kabupaten Siak *Siak Regency*	Bupati Siak Bapak Drs. H. Alfedri, M.Si. melakukan Peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Baiturrahman An-Nizom yang merupakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) BRK Syariah *Siak Regent Drs. H. Alfedri, M.Sc. laying the first stone for the construction of the Baiturrahman An-Nizom Islamic Boarding School (Ponpes) which is a BRK Syariah Corporate Social Responsibility (CSR) Program*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Keagamaan *Category : Religious* Tanggal : 06 Januari 2023 *Date : January 06, 2023*	Kabupaten Pelalawan *Pelalawan Regency*	Bupati Pelalawan Bapak H. Zukri Misran didampingi Wakil Bupati Pelalawan H. Nasarudin, S.H., M.H menerima bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) BRK Syariah secara simbolis berupa bahan bangunan Masjid Al Mukhlisin. *Pelalawan Regent Mr. H. Zukri Misran accompanied by Deputy Regent of Pelalawan H. Nasarudin, S.H., M.H received assistance from the BRK Syariah Corporate Social Responsibility (CSR) Program symbolically in the form of building materials for the Al Mukhlisin Mosque.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Sosial Kemasyarakatan *Category : Social Society* Tanggal : 27 September 2022 *Date : September 27, 2022*	Kabupaten Kuantan Singingi *Kuantan Singingi Regency*	BRK Syariah menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk 3 unit kendaraan roda dua kepada Kepala Pelaksana BPBD. *BRK Syariah handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to Kuantan Singingi Regency in the form of 3 units of two-wheeled vehicles to the Chief Executive of BPBD.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pendidikan *Category : Education* Tanggal : 25 Oktober 2022 *Date : October 25, 2022*	Kota Pekanbaru *Pekanbaru City*	BRK Syariah menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berupa Beasiswa Pendidikan *BRK Syariah handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the Pekanbaru City Government in the form of Educational Scholarships*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pembinaan UMKM *Category : MSME Development* Tanggal : 09 April 2022 *Date : April 09, 2022*	Provinsi Kepulauan Riau *Kepulauan Riau Province*	Bank Riau Kepri menyerahkan simbolis bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa QRIS untuk UMKM di Pulau Penyengat yang ditandai dengan penandatanagan prasasti oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak H. Ansar Ahmad, SE., M.M., *Bank Riau Kepri symbolically handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance in the form of QRIS for MSMEs on Penyengat Island which was marked by the signing of an inscription by the Governor of the Riau Islands Mr. H. Ansar Ahmad, SE., M.M.,*	

Keterangan	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Dokumentasi
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pembinaan UMKM *Category : MSME Development* Tanggal : 26 September 2022 *Date : September 26, 2022*	Kota Tanjung Pinang *Tanjung Pinang City*	BRK Syariah menyerahkan bantuan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diperuntukkan bagi 431 pelaku UMKM yang diterima Walikota Tanjung Pinang Ibu Hj. Rahma, S.I.P. *BRK Syariah handed over assistance from the Corporate Social Responsibility (CSR) program to the Tanjungpinang City Government which was intended for 431 MSME actors who were received by the Mayor of Tanjung Pinang, Mrs. Hj. Rahma, S.I.P.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pendidikan *Category : Education* Tanggal : 02 Maret 2023 *Date : March 02, 2023*	Kabupaten Rokan Hulu *Rokan Hulu Regency*	BRK Syariah menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa Pembangunan RAKB SMPN 1 Rambah kepada Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hulu didampingi Kepala Sekolah SMPN 1 Rambah *BRK Syariah handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance in the form of RAKB Development of SMPN 1 Rambah to the Head of the Rokan Hulu Education Office accompanied by the Principal of SMPN 1 Rambah*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Sosial Kemasyarakatan *Category : Social Society* Tanggal : 03 Februari 2022 *Date : February 03, 2022*	Kabupaten Kepulauan Anambas *Kepulauan Anambas Regency*	Bank Riau Kepri menyerahkan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa satu unit Mobil Jenazah, satu unit Mobil Ambulance, empat unit Kendaraan Roda Tiga dan seratus buah Pallet kepada Kabupaten Kepulauan Anambas yang diterima oleh Wakil Bupati Anambas Bapak Wan Zuhendra. *Bank Riau Kepri handed over the CSR program in the form of one corpse car, one ambulance, four three-wheeled vehicles and one hundred pallets to Anambas Islands Regency which was received by Anambas Deputy Regent Mr. Wan Zuhendra.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Lingkungan Hidup *Category : Living environment* Tanggal : 12 Desember 2022 *Date : December 12, 2022*	Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	BRK Syariah menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa Mobil Supplai Air Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit kepada Pemerintah Kabupaten Karimun yang diterima oleh Wakil Bupati Karimun Bapak H. Anwar Hasyim, S.Ag., M.Si. *BRK Syariah handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance in the form of 1 unit of Fire Water Supply Car to the Karimun Regency Government which was received by the Deputy Regent of Karimun Mr. H. Anwar Hasyim, S.Ag., M.Sc.*	
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Pendidikan *Category : Education* Tanggal : 12 Desember 2022 *Date : December 12, 2022*	Kabupaten Indragiri Hulu *Indragiri Hulu Regency*	BRK Syariah menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterima oleh Wakil Bupati Bapak Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si., berupa Pembangunan RKB Ponpes Markaz An-nur Belilas. *BRK Syariah handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the Government of Indragiri Hulu Regency which was received by Deputy Regent Mr. Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Sc., in the form of RKB for the Markaz An-nur Belilas Islamic Boarding School.*	

Keterangan	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Dokumentasi
Program : Kemitraan *Program : Partnership* Kategori : Lingkungan Hidup *Category : Living environment* Tanggal : 10 Oktober 2022 *Date : October 10, 2022*	Kota Dumai *Dumai City*	BRK Syariah menyerahkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Pemerintah Kota Dumai berupa 5 Unit Motor HTM Pengangkut Sampah dan 2 BIN Sampah, yang diterima oleh Walikota Dumai Bapak H. Paisal, SKM., MARS., di Kantor Camat Dumai Timur *BRK Syariah handed over Corporate Social Responsibility (CSR) Program assistance to the City Government of Dumai in the form of 5 HTM Motorcycle Units for Garbage Transport and 2 Garbage Bins, which were received by the Mayor of Dumai Mr. H. Paisal, SKM., MARS., at the East Dumai Sub-District Office*	

Rincian Masing-masing Kegiatan Pembinaan Kemitraan Tahun 2022
Details of Each Partnership Development Activity in 2022

No	Daerah Kemitraan	Kegiatan	*Activities*
1	Provinsi Riau *Riau Province*	• Bantuan kepada 113 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk di Provinsi Riau. • Bantuan Pendidikan kepada 114 Mahasiswa Provinsi Riau (Str.ata1 : 44, Strata2 : 48, Strata3 : 22) • Bantuan kepada 1 Organisasi Masyarakat. • Bantuan kepada 27 Pondok Pesantren/Madrasah/ Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi Untuk Pengadaan/ Pembangunan/Penyediaan Sarana/Prasarana Pendidikan.	• *Assistance to 113 Mosques/Mushalla/Surau/Suluk in Riau Province.* • *Educational Assistance to 114 Students of Riau Province (Str.ata1: 44, Strata2: 48, Strata3: 22)* • *Assistance to 1 Community Organization.* • *Assistance to 27 Islamic Boarding Schools/Madrassas/ Higher Schools/Colleges for Procurement/Building/ Provision of Educational Facilities/Infrastructure.*
2	Kota Pekanbaru *Pekanbaru City*	• Bantuan Pengadaan Seragam Organisasi Seminar Literasi Guru Pekansikawan Laskar Melayu Riau. • Bantuan Pendidikan Kepada 32 Mahasiswa Kota Pekanbaru (Strata1).	• *Assistance in Procuring Uniforms for the Teacher Literacy Seminar Organization of Pekansikawan Laskar Melayu Riau.* • *Education Assistance to 32 Pekanbaru City Students (Strata1).*
3	Kabupaten Kampar *Kampar Regency*	• Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada 169 Mahasiswa Kampar (S3 : 5, S2 : 1 , S1 : 163) . • Bantuan kepada 25 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan Pembangunan Sarana/Prasarana Kepada 2 Sekolah/Pesantren/Madrasah. • Bantuan Pengadaan Mobil Ambulan APV Kepada 4 Desa/Organisasi/Pesantren. • Bantuan Pengadaan Kain Sarung (1400 Pcs) dan Baju Koko (100 Pcs) Untuk Perayaan Idul Fitri 1443 H.	• *Educational Scholarship Assistance to 169 Kampar Students (S3: 5, S2: 1, S1: 163).* • *Assistance to 25 Mosques/Mushalla/Surau/Suluk.* • *Facilities / Infrastructure Development Assistance to 2 Schools / Boarding Schools / Madrassas.* • *APV Ambulance Procurement Assistance to 4 Villages/ Organizations/Resantren.* • *Procurement of Sarong (1400 Pcs) and Koko (100 Pcs) for the celebration of Eid al-Fitr 1443 H.*
4	Kabupaten Bengkalis *Bengkalis Regency*	• Bantuan Kepada 2 Pondok Pesantren/Yayasan Pendidikan/Sekolah • Bantuan kepada 2 Gereja. • Bantuan kepada 34 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan kepada 2 Yayasan Sosial. • Bantuan Pendidikan kepada 1 Mahasiswa.	• *Assistance to 2 Islamic Boarding Schools / Education Foundations / Schools* • *Assistance to 2 Churches.* • *Assistance to 34 mosques/mushalla/surau/suluk.* • *Assistance to 2 social foundations.* • *Education Assistance to 1 Student.*
5	Kabupaten Indragiri Hulu *Indragiri Hulu Regency*	• Bantuan kepada Panti Asuhan Bhakti Pertiwi Rengat. • Bantuan Pendidikan kepada 200 Mahasiswa Indragiri Hulu (Strata1). • Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Pondok Pesantren Markaz Annur Siberida.	• *Assistance to Bhakti Pertiwi Orphanage Rengat.* • *Education Assistance to 200 Indragiri Hulu Students (Strata1).* • *Assistance for the Construction of a New Classroom (RKB) for Markaz Annur Siberida Islamic Boarding School.*
6	Kabupaten Indragiri Hilir *Indragiri Hilir Regency*	• Bantuan kepada 3 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan Pembuatan Pagar MAKODIM 0314 Inhil. • Bantuan Pendidikan kepada 1 Mahasiswa (Strata3).	• *Assistance to 3 mosques/mushalla/surau/suluk.* • *Assistance in making MAKODIM 0314 Inhil fence.* • *Education Assistance to 1 Student (Strata3).*
7	Kabupaten Siak *Siak Regency*	• Bantuan kepada 3 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan kepada 2 Pondok Pesantren/Yayasan Pendidikan/Sekolah • Bantuan Pembanguan Kremasi Pembakaran Jenazah. • Bantuan Pengadaan Rebana *Qasidah* dan *Hadroh*. • Bantuan Pengadaan Sembako Untuk Gerakan PKK Siak. • Bantuan Baju Seragam Pengusulan Pahlawan Nasional Tengku Buwang Asmara.	• *Assistance to 3 mosques/mushalla/surau/suluk.* • *Assistance to 2 Islamic Boarding Schools / Education Foundations / Schools* • *Assistance in the construction of cremation for burning bodies.* • *Assistance in Procuring Qasidah and Hadroh Tambourines.* • *Assistance in Procuring Groceries for the Siak PKK Movement.* • *Assistance for Uniform Clothing for the Proposed National Hero Tengku Buwang Asmara.*

No	Daerah Kemitraan	Kegiatan	*Activities*
8	Kabupaten Pelalawan *Pelalawan Regency*	• Bantuan Kepada 19 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan Pembangunan Sarana/Prasarana Kepada 7 Sekolah/Pesantren/Madrasah. • Bantuan Pengadaan Mesin Jahit & Mesin Bordir Kelompok Usaha Menjahit Karya Muda Madani Pelalawan. • Bantuan Rehab Ruang Rapat dan Perlengkapan Kantor Desa Makmur Kabupaten Pelalawan. • Bantuan Sarana/Prasarana Kantor LAN (Lembaga Anti Narkotika) Kabupaten Pelalawan. • Bantuan Seragam Kegiatan Pawai Taruf MTQ Tingkat Provinsi Riau. • Bantuan Pendidikan kepada 5 Mahasiswa Pelalawan.	• *Assistance to 19 mosques/mushalla/surau/suluk.* • *Facilities / Infrastructure Development Assistance to 7 Schools / Boarding Schools / Madrassas.* • *Assistance in Procuring Sewing Machines & Embroidery Machines for the Karya Muda Madani Pelalawan Sewing Business Group.* • *Assistance in the Rehab of Meeting Room and Office Equipment of Makmur Village, Pelalawan Regency.* • *Assistance for Facilities / Infrastructure of the LAN (Anti-Narcotics Institute) Office, Pelalawan Regency.* • *Uniform Assistance for the Taruf MTQ Parade Activities at the Riau Province Level.* • *Educational Assistance to 5 Pelalawan Students.*
9	Kabupaten Kuantan Singingi *Kuantan Singingi Regency*	• Bantuan Pengadaan/Pemasangan Lampu 8 Lokasi Jalan. • Bantuan kepada 4 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan Seragam Kas Daerah Untuk Festival Pacu Jalur. • Bantuan Pembangunan Sarana & Prasarana Olah Raga (Lapangan Tenis & Basket di Lapangan Limuno). • Bantuan Pengadaan 3 Sepeda Motor dan 6 Sepeda Gunung untuk BPBD Kuansing. • Bantuan kepada 1 Pondok Pesantren/Yayasan Pendidikan/Sekolah. • Bantuan Hadiah Juara Turnamen Sepakbola Suhardiman CUP I.	• *Assistance in the Procurement / Installation of Lights for 8 Road Locations.* • *Assistance to 4 mosques/mushalla/surau/suluk.* • *Regional Cash Uniform Assistance for the Pacu Jalur Festival.* • *Assistance in the Construction of Sports Facilities & Infrastructure (Tennis & Basketball Courts at Limuno Field).* • *Assistance in Procuring 3 Motorbikes and 6 Mountain Bikes for BPBD Kuansing.* • *Assistance to 1 Islamic Boarding School / Education Foundation / School.* • *Suhardiman CUP I Football Tournament Champion Prize Assistance.*
10	Kabupaten Rokan Hulu *Rokan Hulu Regency*	• Bantuan kepada 1 Pondok Pesantren/Yayasan Pendidikan/Sekolah. • Bantuan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan 1 Pondok Pesantren/Yayasan Pendidikan/Sekolah.	• *Assistance to 1 Islamic Boarding School/Education Foundation/School.* • *Assistance for Development Planning Consultation Services for 1 Islamic Boarding School/Education Foundation/School.*
11	Kabupaten Rokan Hilir *Rokan Hilir Regency*	• Bantuan Pendidikan kepada 11 Mahasiswa (Strata1). • Bantuan Pengadaan Alat Percetakan Untuk Kelompok Usaha Bersama. • Bantuan Rehab Sampan Kelompok Nelayan Tuah Bagan.	• *Education Assistance to 11 Students (Strata1).* • *Printing Equipment Procurement Assistance for Joint Business Groups.* • *Tuah Bagan Fishermen Group Sampan Rehab Assistance.*
12	Kota Dumai *Dumai City*	• Bantuan Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Sebanyak 5 Unit Untuk Pengelolaan Sampah. • Bantuan Pengadaan Kontainer Sampah Sebanyak 2 Unit untuk Pengelolaan Sampah.	• *Procurement of 5 units of three-wheeled vehicles for waste management.* • *Assistance in Procuring 2 Waste Containers for Waste Management.*
13	Kabupaten Kepulauan Meranti *Kepulauan Meranti Regency*	• Bantuan Dana Usaha Industri Rumah Tangga Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi. • Bantuan Baju Seragam PS. BOTS (Persatuan Becak Ojek Terminal Selatpanjang). • Bantuan Pengadaan *Sound System* Dewan Masjid Indonesia. • Bantuan Rehab Pelabuhan Umum Desa Lukit Kecamatan Merbau. • Bantuan Pengadaan Baju dan Kelengkapan Parkir Anggota LSM Kabupaten Meranti. • Bantuan Pengadaan Sarana/Prasarana Serikat Kematian Perjuangan Alah Air. • Bantuan Perlengkapan Dekorasi Komunitas Kicau Mania Merdeka Meranti.	• *Funding for Home Industry Business in Alahair Village, Tebing Tinggi Subdistrict.* • *PS uniform assistance. BOTS (Persatuan Becak Ojek Terminal Selatpanjang).* • *Sound System Procurement Assistance for the Indonesian Mosque Council.* • *Assistance in the rehabilitation of the Lukit Village Public Harbor, Merbau Subdistrict.* • *Assistance in the Procurement of Clothes and Parking Equipment for NGO Members of Meranti Regency.* • *Assistance in Procuring Facilities / Infrastructure for the Alah Air Struggle Death Union.* • *Assistance in decorating equipment for the Meranti Merdeka Kicau Mania Community.*
14	Provinsi Kepulauan Riau *Kepulauan Riau Province*	• Bantuan Penataan Pelabuhan Kampung Jambat Pulau Penyengat. • Bantuan kepada 4 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk. • Bantuan Pengadaan Alat Tenun Kaum Perempuan Pulau Penyengat. • Bantuan Program Digitalisasi UMKM Pulau Penyengat.	• *Assistance for the Arrangement of Kampung Jambat Harbor in Penyengat Island.* • *Assistance to 4 mosques/mushalla/surau/suluk.* • *Assistance for the Procurement of Weaving Tools for the Women of Penyengat Island.* • *Assistance for UMKM Digitalization Program in Penyengat Island.*
15	Kabupaten Bintan *Bintan Regency*	• Bantuan Baju Seragam Maulud Berjanji Nurul Jamaah Keluarga Tambelan Berkabar.	• *Maulud uniform assistance promised Nurul Jamaah Keluarga Tambelan Berkabar.*
16	Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	• Bantuan Pendidikan kepada 31 Mahasiswa Karimun. • Bantuan Pengadaan 1 Unit Mobil *Pick Up* untuk Dinas Kebersihan. • Bantuan Pengadaan 5 Unit Kontainer untuk Dinas Kebersihan. • Bantuan Pengadaan 1 Unit Mobil Tangki Suplai Air.	• *Educational Assistance to 31 Karimun Students.* • *Assistance in Procuring 1 Unit of Pick Up Car for the Cleanliness Service.* • *Procurement Assistance for 5 Container Units for the Cleanliness Service.* • *Procurement assistance for 1 unit of water supply tank car.*
17	Kabupaten Natuna *Natuna Regency*	• Bantuan Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Di 4 Lokasi Jalan.	• *Assistance for Procurement / Installation of Public Street Lighting (PJU) in 4 Road Locations.*

No	Daerah Kemitraan	Kegiatan	*Activities*
18	Kota Batam *Batam City*	• Bantuan Pengadaan Baju Seragam Putih Merah kepada 5.500 Siswa SDN. • Bantuan Pengadaan Baju Seragam Batik IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid) Kota Batam kepada 1.100 Imam. • Bantuan Pengadaan Baju Seragam Batik BMGQ (Badan Musyawarah Guru Al Quran) kepada 4.200 Anggota. • Bantuan Pengadaan Baju Seragam Batik PMB (Persatuan Mubalighh) Kota Batam kepada 580 Anggota. • Bantuan Pengadaan Baju Seragam Batik IPMB (Ikatan Pendeta Menetap Batam) kepada 580 Anggota. • Bantuan Pengadaan Baju Kurung Melayu DMDI (Dunia Melayu Dunia Islam) Provinsi Kepri kepada 100 Anggota. • Bantuan Pengadaan Baju Seragam ISI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Provinsi Kepulauan Riau kepada 1.138 Anggota. • Bantuan Pengadaan Baju Seragam Pramuka Kwartir Cabang Batam Kepada 175 Anggota.	• *Assistance in the Procurement of White and Red Uniforms to 5,500 Primary School Students.* • *Assistance in the Procurement of Batik Uniforms of IPIM (Association of Mosque Imam Brotherhood) Batam City to 1,100 Imams.* • *Assistance in the Procurement of BMGQ (Badan Musyawarah Guru Al Quran) Batik Uniforms to 4,200 Members.* • *Assistance in the Procurement of Batik Uniforms PMB (Mubalighh Association) Batam City to 580 Members.* • *Assistance in Procuring Batik Uniforms of IPMB (Association of Pastors Settling Batam) to 580 Members.* • *Assistance in the Procurement of Malay Kurung Clothes DMDI (Dunia Melayu Dunia Islam) Riau Islands Province to 100 Members.* • *Provision of ISI (Indonesian Bicycle Sport Association) uniforms to 1,138 members.* • *Assistance in the procurement of uniforms for Batam Branch Scouts to 175 members.*
19	Kota Tanjungpinang *Tanjungpinang City*	• Bantuan UMKM Kota Tanjung Pinang kepada 770 Pelaku UMKM. • Bantuan pengadaan Saran/Prasarana Sistem Energi Listrik Unit SPAM SWRO di Pulau Penyengat.	• *UMKM assistance in Tanjung Pinang City to 770 UMKM actors.* • *Assistance in the procurement of Electrical Energy System Suggestions / Infrastructure for the SWRO SPAM Unit on Penyengat Island.*
20	Kabupaten Lingga *Lingga Regency*	• Bantuan kepada 3 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk.	• *Assistance to 3 mosques/mushalla/surau/suluk.*
21	Kabupaten Kepulauan Anambas *Kepulauan Anambas Regency*	• Bantuan kepada 1 Masjid/Mushalla/Surau/Suluk.	• *Assistance to 1 Mosque/Mushalla/Surau/Suluk.*

Pencapaian dan Penghargaan

Komitmen dan keseriusan BRK Syariah dalam melaksanakan CSR selama tahun 2022 telah mendapatkan perhatian dan penghargaan, diantaranya :

Achievements and Awards

The commitment and seriousness of BRK Syariah in implementing CSR during 2022 has received attention and awards, including:

No.	Tanggal *Date*	Nama Penghargaan *Award Name*	Kategori *Category*	Pemberi Penghargaan *Award Giver*
1	30 Maret 2022 *March 30, 2022*	*Top CSR Awards 2022*	*Top Leader on CSR Commitment 2022*	*Top Business*
2	30 Maret 2022 *March 30, 2022*	*Top CSR Awards 2022*	*Top CSR Awards 2022 # Star 4*	*Top Business*

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* 2022

AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT 2022

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH (22 AGUSTUS 2022 S.D. 31 DESEMBER 2022)

AUDITED FINANCIAL REPORT OF PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH (AUGUST 22, 2022 TO DECEMBER 31, 2022)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)
(d/h/*previously* PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI)

Laporan Keuangan Untuk Periode Sejak
22 Agustus 2022 Sampai Dengan 31 Desember 2022
Beserta Laporan Auditor Independen/
Financial Statements For the Period from
August 22, 2022 to December 31, 2022
With Independent Auditor's Report

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Daftar Isi	**Halaman/ *Page***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Posisi Keuangan	1 – 3	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 – 5	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 – 8	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	*Statement of Source and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	12	*Notes to the Financial Statements*

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah
Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru, Riau, 28116
Telp. (0761) 47070, Fax (0761) 42389
www.brksyariah.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE SEJAK 22 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD SINCE AUGUST 22 UNTIL DECEMBER 31, 2022

PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Andi Buchari	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Jendral Sudirman No. 462 Pekanbaru	:	*Office Address*
Alamat Rumah	:	Jl. Sumatera No.30 Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	0761-47070	:	*Telephone Number*
Jabatan	:	Direktur Utama/ *President Director*		*Position*
Nama	:	Said Syamsuri	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Jendral Sudirman No. 462 Pekanbaru	:	*Office Address*
Alamat Rumah	:	Jl. Muslimin RT 005 RW 013 Kel. Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	0761-47070	:	*Telephone Number*
Jabatan	:	Direktur Operasional/ *Operational Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) ("Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed;*
   b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
4. *We are responsible for Bank's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement has been made truthfully.

Pekanbaru, 30 Maret / *March 30, 2023*

Direktur Utama/ *President Director*

Direktur Operasional/ *Operational Director*

METERAI TEMPEL

Dr. Ir. H. Andi Buchari, MM.

H. Said Syamsuri, SE., MM., AK., CA.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No. : 00105/2.1127/AU.1/07/1505-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan Perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

To the Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) ("the Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources zakat and distribution of zakat funds, and statement of sources and use of qardhul hasan funds for the period August 22, 2022 to December 31, 2022, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2022, and statement of profit or loss and other comprehensive income and statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources zakat and distribution of zakat funds, and statement of sources and use of qardhul hasan funds for the period August 22, 2022 to December 31, 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Responsibilities of Management And Those Charged With Governance for The Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

00105

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Zulbadri, CPA
No. Ijin AP. 1505 / *License No. AP. 1505*

30 Maret 2023 / *March 30, 2023*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022 and August 21, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
ASET				***ASSETS***
Kas	4	1.461.887.971.525	569.767.585.406	*Cash*
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	5	4.675.743.093.189	4.409.541.339.832	*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain	6	206.400.249.107	212.933.575.670	*Current Account and Placement With Other Banks*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--	(8.416.733)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Giro dan Penempatan pada bank lain - bersih		206.400.249.107	212.925.158.937	*Total Current Account and Placement With Other Banks - net*
Investasi Pada Surat Berharga	7	5.029.940.233.385	3.410.430.266.704	*Investment in Marketable Securities*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--	(882.344.226)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Investasi Pada Surat Berharga - bersih		5.029.940.233.385	3.409.547.922.478	*Total Investment In Marketable Securities - net*
Piutang				*Receivables*
Murabahah	8	16.588.735.043.264	16.606.647.606.026	*Murabahah*
Ijarah	8	113.219.993	1.906.452.168	*Ijarah*
Jumlah Piutang		16.588.848.263.257	16.608.554.058.194	*Total Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(373.997.229.516)	(425.575.243.533)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang - bersih		16.214.851.033.741	16.182.978.814.661	*Total Receivables - net*
Pinjaman *Qardh*				*Funds of Qardh*
Pihak Berelasi	9	--	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga	9	54.597.564.800	49.701.582.200	*Third Parties*
Jumlah Pinjaman *Qardh*		54.597.564.800	49.701.582.200	*Total Funds of Qardh*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(22.761.480)	(32.755.524)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Pinjaman Qardh - bersih		54.574.803.320	49.668.826.676	*Total Funds of Qardh - net*
Pembiayaan *Mudharabah*				*Financing Mudharabah*
Pihak Berelasi	10	--	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga	10	23.719.749.532	26.949.987.656	*Third Parties*
Jumlah *Mudharabah*		23.719.749.532	26.949.987.656	*Total Mudharabah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(6.274.116)	(2.582.887)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah *Mudharabah* - bersih		23.713.475.416	26.947.404.769	*Total Mudharabah - net*
Musyarakah				*Musyarakah*
Pihak Berelasi	11	--	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga	11	2.521.949.887.239	2.303.289.546.852	*Third Parties*
Jumlah *Musyarakah*		2.521.949.887.239	2.303.289.546.852	*Total Musyarakah*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(79.209.220.497)	(74.189.039.840)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah *Musyarakah* - bersih		2.442.740.666.742	2.229.100.507.012	*Total Musyarakah - net*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2022 and August 21, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
ASET				***ASSETS***
Jumlah Pembiayaan		19.189.115.464.828	18.988.495.174.902	*Total Financing*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(453.235.485.609)	(499.799.621.784)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Pembiayaan - bersih		18.735.879.979.219	18.488.695.553.118	*Total Financing - net*
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - bersih	12	411.781.502.370	420.487.305.221	*Asset Acquired For Ijarah - net*
Penyertaan Saham	13	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investment in Shares*
Aset Tetap - Bersih	14	394.094.595.250	390.564.796.203	*Fixed Assets - Net*
Aset Pajak Tangguhan	21c	75.452.904.084	34.800.995.298	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-lain - Bersih	15	389.619.883.629	294.509.807.926	*Other Assets - Net*
JUMLAH ASET		**31.382.356.195.093**	**28.232.396.247.754**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	16	607.980.967.442	335.628.461.338	*Liabilities due immediately*
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	17	17.360.797.913	28.741.613	*Undistributed Revenue Sharing*
Simpanan *Wadiah*				*Wadiah Deposits*
Giro *Wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak Berelasi	18	36.800.773.950	9.510.086.313	*Related Parties*
Pihak Ketiga	18	70.542.083.675	67.244.793.749	*Third Parties*
		107.342.857.625	76.754.880.062	
Tabungan *Wadiah*				*Wadiah Savings Deposits*
Pihak Berelasi	19	11.977.588.136	12.923.971.428	*Related Parties*
Pihak Ketiga	19	1.129.510.746.556	991.915.078.421	*Third Parties*
		1.141.488.334.692	1.004.839.049.849	
Jumlah Simpanan *Wadiah*		1.248.831.192.317	1.081.593.929.911	*Total Wadiah Deposits*
Pinjaman yang diterima	20	201.130.946.871	178.862.654.463	*Borrowings*
Utang pajak	21a	47.853.283.652	3.113.879.345	*Taxes payable*
Liabilitas Imbalan kerja	22	32.437.365.376	28.302.963.443	*Post - Employment Benefit Liabilities*
Liabilitas Lain-lain	23	56.681.035.854	82.466.201.967	*Other Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**2.212.275.589.425**	**1.709.996.832.080**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2022 and August 21, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *Mudharabah*				*Mudharabah Demand Deposits*
Pihak Berelasi	24	2.390.855.947.988	3.945.397.985.198	*Related Parties*
Pihak Ketiga	24	1.125.256.571.209	516.929.678.440	*Third Parties*
		3.516.112.519.197	4.462.327.663.638	
Tabungan *Mudharabah*				*Mudharabah Saving Deposits*
Pihak Ketiga	25	6.560.909.148.679	6.100.004.041.554	*Third Parties*
Deposito *Mudharabah*				*Mudharabah Time Deposits*
Pihak Berelasi	26	10.955.503.882.795	57.354.743.750	*Related Parties*
Pihak Ketiga	26	4.785.623.180.996	12.788.956.881.700	*Third Parties*
		15.741.127.063.791	12.846.311.625.450	
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER		**25.818.148.731.667**	**23.408.643.330.642**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUND***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham - Nilai Nominal Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham				*Share Capital - Nominal Value Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Nominal value of Rp 100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.092.407 saham pada 31 Desember 2022 dan 12.051.607 saham pada 21 Agustus 2022	27	1.209.240.700.000	1.205.160.700.000	*Issued and fully paid capital of 12.092.407 shares as of December 31, 2022 and 12.051.607 shares as of August 21, 2022*
Tambahan modal disetor	28	2.085.300.525	4.165.300.525	*Additional paid-in capital*
Kerugian bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga tersedia untuk dijual	7	(66.099.193.466)	(64.575.263.288)	*Unrealized loss net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	29	--	1.774.825.929.991	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	29	2.206.705.066.942	194.179.417.804	*Unappropriated*
Jumlah saldo laba		2.206.705.066.942	1.969.005.347.795	*Total retained earnings*
Jumlah Ekuitas		**3.351.931.874.001**	**3.113.756.085.032**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		**31.382.356.195.093**	**28.232.396.247.754**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk periode sejak 22 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the period from August 22, 2022 to December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31 2022*	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARIB*			***REVENUES FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari Jual Beli	30	714.773.525.876	*Income From Sales And Purchases*
Pendapatan dari Bagi Hasil	31	87.840.637.351	*Income From Profit Sharing*
Pendapatan dari *Ijarah* - bersih	32	10.354.069.713	*Income From Ijarah - net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	33	116.017.567.157	*Other Main Operating Income*
		928.985.800.097	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	34	(189.235.022.319)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		739.750.777.778	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	35	45.203.351.131	*Fee Based Income From Banking*
Pendapatan lainnya	35	5.079.192.490	*Other Income*
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		50.282.543.621	*Total Other Operating Income*
BEBAN USAHA			***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan Tunjangan	36	(288.978.054.605)	*Salaries and Benefits*
Umum dan Administrasi	37	(159.585.846.345)	*General And Administrative*
Beban Bonus	38	(75.007.002.652)	*Bonus Expenses*
Lain-lain	39	(7.505.818.186)	*Others*
		(531.076.721.788)	
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan non-produktif - bersih	40	40.552.453.554	*Recovery for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA		**299.509.053.165**	***OPERATING INCOME***
BEBAN NON-USAHA - BERSIH	41	**(4.035.467.230)**	***NON-OPERATING EXPENSE - NET***
LABA SEBELUM PAJAK		**295.473.585.935**	***PROFIT BEFORE TAX***
PAJAK PENGHASILAN	21b,c	(64.507.639.915)	***INCOME TAX***
LABA SETELAH PAJAK		**230.965.946.020**	***PROFIT AFTER TAX***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)
Untuk periode sejak 22 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
For the period from August 22, 2022 to December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31 2022*	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba-rugi:			*Items That Will Be Reclassified To Profit or Loss*
Kerugian Yang Belum Direalisasikan atas surat berharga Dalam Kelompok Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	7	(1.953.756.639)	*Unrealized Loss On Securities Measured At Fair Value Through Other Comprehensive Income*
Pajak penghasilan terkait	21c	429.826.461	*Related income tax*
Jumlah Rugi Komprehensif Lain - bersih setelah pajak		(1.523.930.178)	*Total Other Comprehensive Loss - net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		**229.442.015.842**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR	42	**19.100**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements include herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode yang berakhir 21 Agustus 2022 dan periode sejak 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the period August 21, 2022 and the period from August 22, 2022 to December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-up Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Kerugian Yang Belum Direalisasi Atas Surat berharga Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak/ *Unrealized Losses On Marketable Securities At Fair Value Through Other Comprehensive Income - Net Of Tax*	Saldo Laba (Rugi)/ *Retained Earnings (Loss)*			Jumlah modal/ *Total Equity*	
					Telah Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Sebelum perubahan usaha/ *Before business changes*		
Saldo per 31 Desember 2021		**1.103.160.700.000**	**4.085.300.525**	**2.232.813.053**	**1.622.420.554.772**	**455.259.363.459**	**--**	**3.187.158.731.809**	***Balance as of December 31, 2021***
Tambahan modal disetor	28	--	102.080.000.000	--	--	--	--	102.080.000.000	*Additional paid - in capital*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	28	102.000.000.000	(102.000.000.000)	--	--	--	--	--	*Reclassification from Additional paid - in capital*
Pembayaran deviden	29	--	--	--	--	(228.608.062.828)	--	(228.608.062.828)	*Payments of dividend*
Pembentukan cadangan	29	--	--	--	152.405.375.219	(152.405.375.219)	--	--	*Appropriation of general reserves*
Laba periode berjalan		--	--	--	--	119.933.492.392	--	119.933.492.392	*Profit for the current period*
Rugi komprehensif lain		--	--	(66.808.076.341)	--		--	(66.808.076.341)	*Other comprehensive loss*
Saldo per 21 Agustus 2022		**1.205.160.700.000**	**4.165.300.525**	**(64.575.263.288)**	**1.774.825.929.991**	**194.179.417.804**	**--**	**3.113.756.085.032**	***Balance as of August 21, 2022***
Laba sebelum perubahan usaha	29				(1.774.825.929.991)	(194.179.417.804)	1.969.005.347.795	--	*Beginning balance*
Dampak perubahan PSAK 71 ke ISAK 102	29	--	--	--	--	6.733.773.127	--	6.733.773.127	*Impact of the change from SFAS 71 to IFAS 102*
Tambahan modal disetor	28	--	2.000.000.000	--	--	--	--	2.000.000.000	*Additional paid - in capital*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	28	4.080.000.000	(4.080.000.000)	--	--	--	--	--	*Reclassification from Additional paid - in capital*
Laba periode berjalan		--	--	--	--	230.965.946.020	--	230.965.946.020	*Profit for the current period*
Rugi komprehensif lain		--	--	(1.523.930.178)	--	--	--	(1.523.930.178)	*Other comprehensive loss*
Saldo per 31 Desember 2022		**1.209.240.700.000**	**2.085.300.525**	**(66.099.193.466)**	**--**	**237.699.719.147**	**1.969.005.347.795**	**3.351.931.874.001**	***Balance as of December 31, 2022***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statemens form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS
Untuk periode sejak 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan periode sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOW
For the period from August 22, 2022 to December 31, 2022 and for the period from January 1, 2022 to August 21, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *Ijarah* dan usaha utama lainnya		928.985.800.097	1.180.981.986.146	*Proceeds of margin, profit sharing ijarah and other main operating activities*
Pembayaran bagi hasil dana *Syirkah* temporer		(189.235.022.319)	(410.296.623.635)	*Payment of profit sharing of temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan		3.657.209.713	4.484.958.334	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		50.759.735.841	118.014.503.477	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem		(5.774.148.651)	(2.989.767.297)	*Payment of tantiem*
Pembayaran beban usaha		(508.232.142.221)	(640.565.776.264)	*Payments of operating expenses*
Penerimaan atas pendapatan non-usaha bersih		39.170.759.451	18.006.091.839	*Receipts from non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan		(105.159.548.701)	(84.569.040.094)	*Payments of income taxes*
Pembayaran zakat		(491.130)	(430.596)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan		(518.334.475)	(818.726.056)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi		213.653.817.605	182.247.175.854	*Cash flow before changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan) Penurunan aset operasi				*(Increase) Decrease in operating assets*
Surat berharga	7	(1.171.916.241.085)	1.761.130.836.745	*Marketable securities*
Piutang	8	(31.872.219.080)	(518.972.267.365)	*Receivables*
Pinjaman *Qardh*	9	(4.905.976.644)	--	*Funds of qardh*
Pembiayaan	10	(210.406.230.377)	--	*Financing*
Aset *Ijarah*	11	8.705.802.851	--	*Ijarah assets*
Penyertaan saham	13	--	--	*Investments in shares*
Aset lain-lain - bersih	15	(95.110.075.703)	258.542.875.159	*Other Assets - net*
Kenaikan (Penurunan) liabilitas operasi				*Increase (Decrease) in operating liabilities*
Simpanan *mudharabah*	24	2.500.800.031.530	(1.264.002.644.383)	*Deposit mudharabah*
Simpanan *wadiah*	18	93.274.688.201	(902.293.134.885)	*Deposit wadiah*
Liabilitas segera	16	272.352.506.104	(354.305.215.670)	*Liabilities due immediately*
Utang pajak	21	44.739.404.307	(28.922.258.249)	*Tax payable*
Liabilitas lain-lain	23	(25.785.166.113)	23.017.494.623	*Others liabilities*
Jumlah		1.379.876.523.991	(1.025.804.314.025)	*Total*
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		**1.593.530.341.596**	**(843.557.138.171)**	***NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	14	(8.959.103.045)	(26.828.952.713)	*Purchase of fixed assets*
Penjualan aset tetap	14	17.700.000	26.440.000	*Sale of fixed assets*
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		**(8.941.403.045)**	**(26.802.512.713)**	***NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS
(Lanjutan)
Untuk periode sejak 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan periode sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOW
(Continued)
For the period from August 22, 2022 to December 31, 2022 and for the period from January 1, 2022 to August 21, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pinjaman yang diterima	20	22.268.292.408	27.420.154.726	*Borrowings*
Pembayaran dividen	35	--	(228.608.062.828)	*Dividends paid*
Program kemitraan dan bina lingkungan	23	(11.140.001.313)	(21.499.650.398)	*Partnership and environment program*
Setoran modal saham	28	4.080.000.000	100.000.000.000	*Paid-up capital*
Tambahan modal disetor	28	2.000.000.000	--	*Additional paid-in capital*
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		**17.208.291.095**	**(122.687.558.500)**	***NET CASH PROVIDED BY (USED) IN FINANCING ACTIVITIES***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**1.601.797.229.646**	**(993.047.209.384)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		**5.192.234.084.175**	**6.185.281.293.559**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		**6.794.031.313.821**	**5.192.234.084.175**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIODE***
Kas dan Setara Kas terdiri dari :				***Cash and Cash Equivalent***
Kas	4	1.461.887.971.525	569.767.585.406	*Cash*
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	5	4.675.743.093.189	4.409.541.339.832	*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain	6	206.400.249.107	212.925.158.937	*Current Account and Placement With Other Banks*
Investasi pada surat berharga	7	450.000.000.000	--	*Investment In marketable securities*
Jumlah		**6.794.031.313.821**	**5.192.234.084.175**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
For the period ended at December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31 2022*	
Pendapatan pengelola dana sebagai *Mudharib*	30, 31, 32, 33	928.985.800.097	*Revenue from fund management as Mudharib*
Pengurangan			*Deduction*
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			*Current year income in which its cash and cash equivalents have not been received:*
Pendapatan dari jual beli	15	(5.190.685.601)	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil	15	(3.564.206.978)	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	15	(42.002.791.850)	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	15	(67.822.278)	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	15	(146.974.823.315)	*Other main operating income*
		(197.800.330.022)	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	30, 31, 32, 33	731.185.470.075	*Available income for profit sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		541.950.447.756	*Bank's share from profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		189.235.022.319	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:			*Details to:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	34	171.874.224.406	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	34	17.360.797.913	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah		**189.235.022.319**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
For the period ended at December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31 2022*	
Sumber dana zakat			***Sources of zakat funds***
Internal bank		--	*Internal bank*
Eksternal bank			*External bank*
Pegawai		335.595.504	*Employees*
Nasabah dan umum	16	491.130	*Customers and public*
		336.086.634	
Penyaluran dana zakat			***Distribution of zakat funds***
Disalurkan ke lembaga lain		(335.595.504)	*Distributed to other institutions*
(Penurunan)/kenaikan dana zakat		491.130	*(Decrease)/increase in zakat funds*
Saldo awal dana zakat		--	***Beginning balance of zakat funds***
Saldo akhir dana zakat		**491.130**	***Ending balance of zakat funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the period ended at December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31 2022*	
Sumber dana kebajikan			***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*	16	32.063	*Infaq and shadaqah*
Denda	16	520.520.839	*Penalty*
Pendapatan non-halal	16	142.781.573	*Non-halal income*
Sumbangan/hibah			*Donation/grant*
		663.334.475	
Penggunaan dana kebajikan			***Uses of qardhul hasan funds***
Sumbangan		(145.000.000)	*Donation*
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan		518.334.475	*(Decrease)/increase qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan		--	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan		**518.334.475**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Status pendirian Bank disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No.18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1962. Status pendirian Bank diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Persetujuan perubahan status Bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta No.33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 No.50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru No.36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No.C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003.

1. GENERAL

a. Bank Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("the Bank") is established in accordance with Act No.13 of 1962 on Regional Development Banks. Commencing on April 1, 1966 officially Bank Pembangunan Daerah Riau activities began with its status as a government owned Bank of Riau.

The status of the establishment of the Bank adjusted with Provincial Regulation Level Region Riau No.10 of 1975, which is then set back to the level I Riau Regional Regulation No. 18 of 1986 by Law No.13 Year 1962. Status of establishment of the Bank arranged and adapted to the Regional Regulation No.14 of 1992 about Regional Development Bank Riau pursuant to Act No.7 of 1992 on Banking. Finally the Provincial Regulation Level Region Riau No.5 of 1998 on First Amendment Regulations Provincial Level Region Riau No.14 of 1992 about Regional Development Bank Riau.

Status changing approval of the Bank from the Regional Company (PD) into a Limited Liability Company (PT) according to the results Decisions Annual General Meeting on June 26, 2002 made by notary Ferry Bakti, SH by Deed No.33, which is then determined by the Regional Regulation No.10 of 2002 dated August 26, 2002 and has been enacted in the Riau Provincial Gazette 2002 No.50. Conversion of the law has been made with Deed number 36 dated January 18, 2003 by Muhammad Dahad Umar, SH, Notary in Pekanbaru which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with Decree No.C-09851.HT.01.01.TH.2003 May 5, 2003.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No.209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH Notaris di Batam, dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Perubahan nama Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No.AHU- 36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No. AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No.6/7/DPbs/Pbr tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia Menyetujui Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Riau dengan memperhatikan ketentuan PBI No.4/1/PBI/2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/5/KEP.DpG/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai Bank Umum Devisa ditetapkan bahwa Bank harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.

1. GENERAL *(Continued)*

a. Bank Establishment and General Information *(Continued)*

Changes in the legal entity has been approved in the Annual General Meeting on June 13, 2003 are set forth in the Deed No.209 dated June 13, 2003 Notary Yondri Darto, SH, Notary in Batam, and has also received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 dated July 22, 2003.

Name Changing of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Riau became PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri accordance to the EGM decision on April 26, 2010, after the approval of the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No.AHU-36484.AH.01.02 Year 2010 dated July 22, 2010 and the letter of the General Director of Legal Administration Director of Civil No.AHU.2-AH.01.01-6849 on August 25, 2010, as well as the approval of Bank Indonesia in Bank Indonesia Governor Decree No.12/59/KEP.GBI/2010 dated September 23, 2010.

Based on the Letter from Bank Indonesia No.6/7/DPbs/Pbr dated on February 27, 2004 stated that Bank Indonesia Approved the Principal of Opening the Branch Office of Sharia Bank Riau by considering the provisions of PBI No.4/1/PBI/2002.

Based on the Decree Letter by the Deputy Governor of Bank Indonesia No.9/5/KEP.DpG/2007 dated March 15, 2007 on the appointment of Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Riau as Foreign Exchange Public Bank resolving that the Bank must perform its banking business activities in foreign exchange with its customers and or performing banking transactions with parties overseas.

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Bank juga wajib menyampaikan laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi devisa dan kegiatan valuta asing yang telah dan sedang dilakukan kepada Bank Indonesia setempat.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 pada tanggal 26 April 2010 Notaris Fery Bakti, SH yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-36484.AH.01. 02. Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010 bahwa Bank mengganti nama Perseroan dari semula "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" atau disingkat "PT Bank Riau" berubah menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" atau disingkat "PT Bank Riau Kepri".

Selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Yondri Darto, SH dengan Akta No.125 pada tanggal 19 Agustus 2010 dijelaskan bahwa tujuan dari dirubahnya nama Perseroan menjadi PT Bank Riau Kepri adalah guna meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana masyarakat yang berada di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Pupung Mulyantini, S.H., M.H. tanggal 14 Juni 2022 Nomor 17, Bank memutuskan untuk menyetujui mengubah nama Bank dari “PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri” disingkat “PT. Bank Riau Kepri” menjadi “PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah” disingkat “PT Bank Riau Kepri Syariah”. Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum Syariah mulai tanggal 22 Agustus 2022. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

***1. GENERAL** (Continued)*

***a. Bank Establishment and General Information** (Continued)*

The bank also is obligated to deliver written reports related to the performance of foreign exchange transaction and foreign exchange activities already and being performed to the local Bank Indonesia.

Based on Decision meeting was notarial deed No. 41 dated April 26, 2010 by Notary Fery Bakti, SH was had been aproved by Human Rights and Law Minister No.AHU-36484.AH.01.02. year 2010 dated on July 22nd, 2010 is Bank was replacement the company name which before are "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" or "PT Bank Riau" became "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" or "PT Bank Riau Kepri".

Then based on General Meeting of Shareholders was notarial deed by Notary Yondri Darto, SH with No.125 on August 19, 2010 representitive are purposed from changed the name of company to become PT Bank Riau Kepri is use to provide company ability in finding people fund in Riau Province and Kepulauan Riau Province.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders notarized by Pupung Mulyantini, S.H., M.H. June 14, 2022 Number 17, decided to agree to change the name of the Bank from "PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" abbreviated as "PT. Bank Riau Kepri" to "PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah" abbreviated "PT Bank Riau Kepri Syariah". The Bank started its operational activity as a Shariah Commercial Bank starting on August 22, 2022. The amendment deed has been approved by the Otoritas Jasa Keuangan.

1. UMUM (Lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan pendirian Bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana dan melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang daerah serta kegiatan perbankan pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Bank mempunyai Visi "Sebagai perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat".

c. Struktur Organisasi dan Manajemen

Pada tanggal 15 November 2021 telah dilakukan RUPSLB, untuk pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komisaris Independen, dan Komisaris Utama PT Bank Riau Kepri berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH, No. 35 tanggal 15 November 2021.

Pengangkatan Fajar Restu Febriansyah, S.E sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko efektif sejak 7 Desember 2021 berdasarkan Surat OJK No.S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021. Pengangkatan Bapak Syahrial Abdi, A.P, M.Si sebagai Komisaris Utama efektif pada 23 Desember 2021 sesuai Surat OJK No.S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

***1. GENERAL** (Continued)*

b. Purpose and Objectives

The purpose of establishing the Bank is to assist and encourage economic growth and regional development in all fields, as well as as a source of regional income in order to improve the living standards of the people by providing development financing, raising funds and carrying out regional money storage work and banking activities in general, as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.

The Bank has a vision of "As a bank that is able to develop and be leading in the regions, have professional management and encourage regional economic growth so that it can empower the people's economy".

c. Structure and Management

On November 15, 2021, an RUPSLB was held, for the appointment of the Director of Compliance and Risk Management, Independent Commissioner, and President Commissioner of PT Bank Riau Kepri based on the Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH, No. 35 dated November 15, 2021.

The appointment of Fajar Restu Febriansyah, S.E as Director of Compliance and Risk Management is effective since December 7, 2021 based on OJK Letter No.S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021. The appointment of Mr. Syahrial Abdi, A.P, M.Si as President Commissioner is effective on December 23, 2021 in accordance with OJK Letter No.S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Manajemen (Lanjutan)

Persetujuan Penetapan Pengurus Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri, Akta No. 35 tanggal 15 November 2021, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH.

Akta perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah didata dalam sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0477876 tanggal 25 November 2021.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri.

Pengangkatan H. Zulhendri Rais, Lc., M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.100/KEPDIR/MSDM/202 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 25 Agustus 2021.

Pengangkatan Saifudin Yuliar sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 58/KEPDIR/MSDM/2021 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 14 Juni 2021.

***1. GENERAL** (Continued)*

***c. Structure and Management** (Continued)*

Approval of the Determination of the Management of the Company of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) in 2021 based on the Deed of Meeting Resolution Statement of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 35 dated November 15, 2021, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH.

The deed of change of the Board of Directors and Commissioners has been recorded in the Legal Entity Administration system by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU- AH.01.03-0477876 dated November 25, 2021.

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No.087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021 concerning the Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri.

The appointment of H. Zulhendri Rais, Lc., M.A as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri based on the Decree of the Directors of PT Bank Riau Kepri No.100/KEPDIR/MSDM/2021 concerning the Appointment of the Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri dated August 25, 2021.

The appointment of Saifudin Yuliar as a Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri based on the Decree of the Directors of PT Bank Riau Kepri Number 58/KEPDIR/MSDM/2021 concerning the Appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri dated June 14, 2021.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Manajemen (Lanjutan)

Pengangkatan Dewan Komisaris efektif pada 23 Desember 2021 sesuai Surat "OJK" No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan "OJK" No. S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2022, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
Komisaris Utama	: Syahrial Abdi, A.P, M.Si	Syahrial Abdi, A.P, M.Si	: *President Commissioner*
Komisaris Independen	: Roy Prakoso, S.E, M.M	Roy Prakoso, S.E, M.M	: *Independent Commissioner*
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	: *Independent Commissioner*

b. Dewan Direksi

	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
Direktur Utama	: Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	: *President Director*
Direktur Dana dan Jasa	: H. M.A. Suharto, S.E	H. M.A. Suharto, S.E	: *Services Director and Funding*
Direktur Kredit dan Syariah	: H. Tengkoe Irawan, S.E., M.M., Ak.	H. Tengkoe Irawan, S.E., M.M., Ak.	: *Credits and Sharia Director*
Direktur Operasional	: H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	: *Operational Director*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Fajar Restu Febriansyah, S.E	Fajar Restu Febriansyah, S.E	: *Director of Compliance and Risk Management*

c. Komite Audit Bank

	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
Ketua Merangkap Anggota	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	: *Chairman*
Anggota	: Roy Prakoso, S.E, M.M	Roy Prakoso, S.E, M.M	: *Member*
Anggota	: Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	: *Member*
Anggota	: Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	: *Member*

d. Komite Audit Pemantauan Risiko

	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	
Ketua merangkap Anggota	: Roy Prakoso, S.E, M.M	Roy Prakoso, S.E, M.M	: *Chairman*
Anggota	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	: *Member*
Anggota	: Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	: *Member*
Anggota	: Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	: *Member*

***1. GENERAL** (Continued)*

***c. Structure and Management** (Continued)*

Appointment of Board Commissioner is effective on January 25, 2022 according to "OJK" Letter No. S-43/KO.053/2022 and December 23, 2021 according to "OJK" Letter No. S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.

As of December 31, 2022, the members of Bank's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, Board of Sharia Supervisors are as follows:

a. Board of Commissioner

b. Board of Director

c. Bank Auditor Committee

d. Risk Monitoring Committee

1. UMUM (Lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Manajemen (Lanjutan)

e. Komite Remunerasi dan Nominasi

		31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*		
Ketua merangkap Anggota	:	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	:	*Chairman*
Anggota	:	Syahrial Abdi, A.P, M.Si	Syahrial Abdi, A.P, M.Si	:	*Member*
Anggota	:	Pemimpin Divisi Manajemen SDM (ex officio)	Pemimpin Divisi Manajemen SDM (ex officio)	:	*Member*

f. Dewan Pengawas Syariah

		31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*		
Ketua	:	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	:	*Chairman*
Anggota	:	Saifudin Yuliar, Lc, M.Ag	Saifudin Yuliar, Lc, M.Ag	:	*Member*

g. Satuan Kerja Auditor Internal

		31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*		
Ketua	:	Heru Kurniawan	Heru Kurniawan	:	*Chairman*

h. Sekretaris Perusahaan

		31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *August 21, 2022*		
Ketua	:	Edi Wardana	Edi Wardana	:	*Chairman*

Jumlah karyawan Bank pada akhir 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 masing-masing sebanyak 2.836 orang dan 2.836 orang (tidak diaudit).

d. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank untuk pelayanan konvensional dan syariah berlokasi di Menara Dang Merdu Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru - Riau.

Posisi jaringan distribusi Bank yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***c. Structure and Management** (Continued)*

e. Remuneration and Nomination Committee

f. Board of Sharia Supervisory

g. Internal Auditor Task Force

h. Corporate Secretary

The number of Bank employees at the end of December 31, 2021 and August 21, 2022 was 2,836 people (unaudited).

d. Office Network

The Bank's head office for conventional and sharia services is located at Dang Merdu Tower, Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru - Riau.

The position of the Bank's distribution network spread across Riau Province and Riau Islands Province as of December 31, 2021 and August 21, 2022 is as follows:

1. UMUM (Lanjutan)

d. Jaringan Kantor (Lanjutan)

1. GENERAL *(Continued)*

d. Office Network *(Continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2022*	21 Agustus/ *21 August 2022*	***Office network***
Jaringan Kantor :			
Pusat	1	1	*Head office*
Kantor cabang utama	1	1	*Main branch office*
Kantor cabang	20	20	*Branch office*
Kantor cabang pembantu	42	41	*Sub-branch office*
Unit usaha syariah	--	1	*Sharia office*
Kedai	40	39	*First class office*
Kantor kas	55	55	*Cash office*
Payment point	14	14	*Payment point office*
Butik	2	3	*Boutique office*
Anjungan Tunai Mandiri	335	335	*Automatic Teller Machine*
Cash Recycling Machine	36	36	*Cash Recycling Machine*
ATM Non Tunai	2	2	*ATM Non Cash*
Unit kas mobil	16	16	*Oto banking mobile*
Cash Deposit Machine	2	2	*Cash Deposit Machine*
Electronic Data Capture	600	664	*Electronic Data Capture*
Unit layanan syariah	--	87	*Sharia services units*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013)

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Group in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013)

Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (Lanjutan)

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(Continued)*

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in shareholders' equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (Lanjutan)

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(Continued)*

The statement of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

The statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance in a particular date. Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (“Rp”) which also the Bank’s functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

- Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuain tahunan PSAK No. 73: "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan interim di periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting January 1, 2022.

- *Amendment to SFAS No. 22: "Business Combination for Reference to Conceptual Framework";*
- *Amendment to SFAS No. 57: "Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contract";*
- *Annual improvement to SFAS No. 71: "Financial Instrument"; and*
- *Annual improvement to SFAS No. 73: "Lease".*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the interim financial statements for current or prior financial periods.

c. Transactions with Related Parties

The Bank enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Revised 15) regarding "Related Party Disclosures" and Regulation of Bapepam and LK No. KEP347/BL/2012, dated June 25, 2012 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

A party is considered as a related party of the Bank if:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
2) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5);
7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Transactions with Related Parties *(Continued)*

1) Directly or indirectly through one or more intermediaries, is party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;
2) It is a member of the same group as the Bank;
3) It is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
4) It is a member of the key management personnel of the Bank;
5) It is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);
6) It is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5);
7) It is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 44 of the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (“SBIS”) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (“FASBIS”), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*”.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (“SBIS”) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (“FASBIS”), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

In accordance with SFAS 102 “Accounting for Murabahah” and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS 102 “Impairment of Murabahah Receivables”.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (Lanjutan)

1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;
3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;
6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;
7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
8) national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (lanjutan)

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1) Piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet;
2) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi.

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan
3. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(continued)*

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1) Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful, and loss;
2) Murabahah receivables that are restructured or have been restructured.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
2. Murabahah receivables which individually have insignificant value; and
3. Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (Lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (“PD”) dan *Loss of Given Default* (“LGD”).

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukuka pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(Continued)*

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default (“PD”) and Loss of Given Default (“LGD”).

Impairment losses on financial assets recorded at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than margin income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (Lanjutan)

Aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2) Cadangan khusus, sekurang kurangnya sebesar:

   a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
   b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
   c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(Continued)*

Earning assets such as istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as of February 7, 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows:

1) General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

2) Special reserves, shall be at least:

   a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
   b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
   c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset non-Produktif (Lanjutan)

d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *loss of given default* ditetapkan sebagai berikut:

1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Allowance for Impairment Losses on Earning and non-Earning Assets *(Continued)*

d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Regulation of the Financial Services Authority ("POJK").

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectable.

Inter-branches account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and loss of given default are determined as:

1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (“FASBIS”) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (“SBIS”).

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

f. Giro dan Penempatan pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana non-halal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

e. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (“FASBIS”) and Bank Indonesia Sharia Certificates (“SBIS”).

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of wadiah and jualah, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

f. Current Accounts and Placements with Other Banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia Bank are categorized as Non-Halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

g. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (Lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut (lanjutan):

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

g. Investments in marketable securities *(Continued)*

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Sukuk classifications are as follows (continued):

a. Measured at amortized cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (Lanjutan)

- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi komprehensif;
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan piutang *ijarah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

g. Investments in marketable securities *(Continued)*

- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognised in comprehensive income;*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, the accumulated gain or loss which was been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost;*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

h. Receivables

Receivables consist of murabahahn receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Piutang (Lanjutan)

Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. *Margin istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Piutang *ijarah* adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *ijarah*.

i. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

h. Receivables *(Continued)*

Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply almashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on Ijarah receivables is presented as a contra account of Ijarah receivables.

i. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Pinjaman *qardh* (Lanjutan)

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

i. Funds of qardh *(Continued)*

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain a fee (ujrah) from this transaction, which is recognised as income when received.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (benefits) in return which are recognised on an accrual basis.

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue when these are incurred. On the statement of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

j. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Pembiayaan (Lanjutan)

Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

k. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Financing *(Continued)*

The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (pre-determined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

k. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* (Lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

l. Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Assets Acquired for Ijarah *(Continued)*

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) A grant;
(ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
(iv) installment sales at a specific price as agreed in the contract.

l. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset.

Valuation is performed regularly to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. Land is not depreciated.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

Perlengkapan Harta Berwujud	Tahun/ *Years*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	Group *Assets*	Classification of Tangible Assets
Perabot / perlengkapan kantor	4 tahun/ years	25%	Group I	*Furniture / fixtures office*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	4 tahun/ years	25%	Group I	*Furniture / fixture house*
Perabot / perlengkapan mess	4 tahun/ years	25%	Group I	*Furniture / fixture mess*
Mesin kantor	4 tahun/ years	25%	Group I	*Office machine*
Komputer	4 tahun/ years	25%	Group I	*Computer*
Kendaraan	4 tahun/ years	25%	Group I	*Vehicle*
Perabot / perlengkapan kantor	8 tahun/ years	12,5%	Group II	*Office equipments / supplies*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	8 tahun/ years	12,5%	Group II	*Home office equipments / supplies*
Kendaraan	8 tahun/ years	12,5%	Group II	*Vehicle*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

I. Aset tetap (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

I. Fixed assets *(Continued)*

Perlengkapan Harta Berwujud	Tahun/ *Years*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	Group *Assets*	Classification of Tangible Assets
Bangunan kantor	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Office building*
Bangunan rumah dinas	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Home office building*
Bangunan mess	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Boarding house building*
Bangunan gudang	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Warehouse building*
Bangunan lainnya	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Other building*

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the profit or loss.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada “pendapatan dan beban non-usaha” dalam laporan laba rugi. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in “non-operating income and expenses” in the income statement. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

m. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Dalam kontrak perjanjian sewa, manajemen menggunakan basis akad syariah PSAK 107 Akuntansi Ijarah sehingga berpendapat atas sewa bukan merupakan ruang lingkup PSAK 73 Sewa.

Sewa dibayar dimuka diamortisasi selama masa sewa dengan menggunakan garis lurus (*straight-line method*)

n. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

o. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

m. Other Assets

Other assets consist of prepaid expenses,.

Prepaid expenses are amortized over the useful life using the straight-line method.

In the lease agreement contract, management uses the sharia contract basis of SFAS 107 Accounting for Ijara so that it is of the opinion that lease is not within the scope of SFAS 73 Lease.

Upfront rent is amortized over the life of the lease using the straight-line method

n. Obligations due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

o. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain (Lanjutan)

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

p. Dana *Syirkah* Temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah*, *muthlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarokah* dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

o. Deposits from Customers and Other Banks *(Continued)*

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

p. Temporary Syirkah Funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing.

An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytaroka and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

p. Dana *syirkah* temporer (Lanjutan)

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

q. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

p. Temporary syirkah funds *(Continued)*

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realize gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

q. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib

Revenue from fund management by the Bank as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* (Lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (*margin* efektif). *Margin* efektif adalah *margin* yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

q. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib *(Continued)*

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future.

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

Income from Ijarah is recognised proportionately over the contract period.

Musyarakah revenue which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah revenue which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Revenue from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* (Lanjutan)

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari SBIS, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

r. Hak Pihak Ketiga atas bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank.

Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

q. Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib *(Continued)*

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, SBIS, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

r. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under mudharabah mutlaqah principles.

The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Hak Pihak Ketiga atas bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer (Lanjutan)

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

s. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Pensiun Iuran Pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program cadangan iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

r. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds *(Continued)*

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

s. Fee based Income from Banking Services

Fee based income from banking services are generally recognised when cash is received.

t. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined Contribution Plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

t. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

i. Keuntungan dan kerugian aktuarial.
ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti – bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

t. Employee Benefits *(Continued)*

The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law (UU) No. 11 of 2020 dated November 2, 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognised as other comprehensive income consist of:

i. Actuarial gain and losses.
ii. Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
iii. The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) – net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets), and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

u. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position dates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Perpajakan (Lanjutan)

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

v. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

u. Taxation *(Continued)*

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

v. Transaction and Balance in Foreign Currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	Desember/ *December* 31, 2022	**Agustus/ *August* 21, 2022**	
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	Rp 15.567,50	Rp 14.837,50	*1 United States Dollar (USD)*
1 Euro (EUR)	Rp 16.581,72	Rp 14.971,04	*1 Euro (EUR)*
1 Dollar Singapura (SGD)	Rp 11.592,88	Rp 10.689,07	*1 Singapore Dollar (SGG)*
1 Riyal Arab Saudi (SAR)	Rp 4.139,00	Rp 3.969,57	*1 Saudi Arabia Riyal (SAR)*
1 Ringgit Malaysia (MYR)	Rp 3.533,66	Rp 3.312,93	*1 Malaysian Ringgit (MYR)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi.

x. Laba per Saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

y. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

z. Sumber Dana Kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

w. Subordinated Sukuk Mudharabah

Subordinated Sukuk Mudharabah I is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortized cost using straight line method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction cost.

x. Earning per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

y. Provision

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

z. Source of Qardhul Hasan Funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi Syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya)
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

aa. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

1. *The transaction that is not accordance with sharia principle and can not be avoided include interest revenue (riba).*
2. *The sharia transaction does not fulfill the term and condition (principle and/or requirement.*
3. *Penalty funds (punishment) because of not fulfilling the obligation on initial contract.*
4. *Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.*

aa. Operating Segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the Chief Operating Decision Maker (CODM).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan, dan aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, financing, and assets acquired for ijarah - net

The Bank examines the quality of assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan, dan aset yang diperoleh untuk ijarah – bersih (Lanjutan)

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang *murabahah* dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang *murabahah* dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2d,8,9,10,11).

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, financing, and assets acquired for ijarah – net *(Continued)*

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses of murabahah receivables is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of murabahah receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (Note 2d,8,9,10,11).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Kewajiban Imbalan Kerja Karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan. Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

b. Employee Benefit Liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations.

In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability. Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

4. KAS / *4. CASH*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			***Rupiah***
Kas	1.347.511.880.115	421.962.997.300	*Cash*
ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	98.726.900.000	132.260.350.000	*ATM (Automated Teller Machine)*
Jumlah	**1.446.238.780.115**	**554.223.347.300**	***Total***
Mata Uang Asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	13.103.086.914	12.954.547.064	*United States Dollar*
Dolar Singapura	2.307.409.737	2.416.026.978	*Singapore Dollar*
Euro	164.159.028	173.664.064	*Euro*
Riyal Arab Saudi	41.390.000	--	*Saudi Arabia Riyal*
Ringgit Malaysia	33.145.731	--	*Malaysian Ringgit*
Jumlah	**15.649.191.410**	**15.544.238.106**	***Total***
Jumlah Kas	**1.461.887.971.525**	**569.767.585.406**	***Total Cash***

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By Currencies*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah	4.668.659.880.689	4.409.541.339.832	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	7.083.212.500	--	*United States Dollar*
Jumlah	**4.675.743.093.189**	**4.409.541.339.832**	***Total***

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			*Rupiah*
Giro Pada Bank Indonesia	3.473.659.880.689	4.409.541.339.832	*Current Account With Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.195.000.000.000	--	*Bank Indonesia Sharia Certificated Facilities (FASBIS)*
	4.668.659.880.689	4.409.541.339.832	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Giro Pada Bank Indonesia	7.083.212.500	--	*Current Account With Bank Indonesia*
Jumlah	**4.675.743.093.189**	**4.409.541.339.832**	***Total***

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (Continued)

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 Bulan	4.668.659.880.689	4.409.541.339.832	*≤ 1 Month*
> 1 - ≤ 3 Bulan	--	--	*> 1 - ≤ 3 Months*
> 3 - ≤ 12 Bulan	--	--	*> 3 - ≤ 12 Months*
Sub jumlah	**4.668.659.880.689**	**4.409.541.339.832**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 Bulan	7.083.212.500	--	*≤ 1 Month*
> 1 - ≤ 3 Bulan	--	--	*> 1 - ≤ 3 Months*
Sub jumlah	**7.083.212.500**	**--**	***Sub total***
Jumlah	**4.675.743.093.189**	**4.409.541.339.832**	***Total***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 Bulan	4.668.659.880.689	4.409.541.339.832	*≤ 1 Month*
> 1 - ≤ 3 Bulan	--	--	*> 1 - ≤ 3 Months*
> 3 - ≤ 12 Bulan	--	--	*> 3 - ≤ 12 Months*
Sub jumlah	**4.668.659.880.689**	**4.409.541.339.832**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 Bulan	--	--	*≤ 1 Month*
> 1 - ≤ 3 Bulan	7.083.212.500	--	*> 1 - ≤ 3 Months*
Sub jumlah	**7.083.212.500**	**--**	***Sub total***
Jumlah	**4.675.743.093.189**	**4.409.541.339.832**	***Total***

e. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

e. By collectability

As of December 31, 2022 and August 21, 2022, all current accounts and placements with Bank Indonesia is classified as "Current".

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

f. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM)

Rasio GWM pada tanggal 21 Agustus 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 4% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 0,5%.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(Continued)*

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM)

The GWM ratio as of August 21, 2022 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/3/PADG/2022 dated March 1, 2022 concerning "Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" came into force on March 1, 2022, and regulates that each Bank is required to maintain a Statutory Reserves ("GWM") in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 4% and 1% of third party funds ("DPK") in Rupiah and foreign exchange.

The GWM ratio as of December 31, 2022 are calculated based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020 concerning "Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" came into force on May 1, 2020, and regulates that each Bank is required to maintain a Statutory Reserves ("GWM") in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 3.5% and 1% of third party funds ("DPK") in Rupiah and foreign exchange.

Based on regulation of Members of the Board of Governors No. 22/4/PADG/2020 Regarding the Implementation of Bank Indonesia Regulation No. 22/4/PBI/2020 Regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain Economic Activities to Support the Handling of the Economic Impacts of the Corona Virus Outbreak, the amount of allowance incentives for the fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah which must be fulfilled daily is set at 0.5%.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

f. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) (Lanjutan)

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM").

Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum ("GWM") pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 August 2022.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(Continued)*

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) *(Continued)*

In addition, based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 23/07/PADG/2021 which is effective from May 1, 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from November 28, 2019, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios ("FDR") to the Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM").

Banks must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserve Requirements ("GWM") of Bank Indonesia.

The Bank has complied with Bank Indonesia's Minimum Statutory Reserve ("GWM") regulations on December 31, 2022 and August 21, 2022.

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Rasio GWM			*GWM Ratio*
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban Pemenuhan GWM	7,5%	7,5%	*Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan GWM	13,06%	24,90%	*Realisation Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan PLM (d/h GWM Sekunder)	16,76%	19,46%	*Realisation Fulfillment of PLM (Previously GWM Secondary)*
Valas			*Valas*
Kewajiban Pemenuhan GWM	4,00%	4,00%	*Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan GWM	29,62%	16,87%	*Realisation Fulfillment of Statutory Reserves*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah	89.249.821.167	174.946.556.687	*Rupiah*
Mata Uang Asing			*Foreign Currencies*
Dolar Amerika Serikat	111.290.349.901	32.691.633.639	*United States Dollar*
Eropa	3.397.363.776	3.067.687.062	*Euro*
Riyal Arab Saudi	2.413.046.263	--	*Saudi Arab Riyal*
Dolar Singapore	49.668.000	2.227.698.282	*Singapore Dollar*
	206.400.249.107	212.933.575.670	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(8.416.733)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**206.400.249.107**	**212.925.158.937**	***Total***

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			*Rupiah*
Giro *Mudharabah*	86.968.410.952	172.666.929.779	*Current Account Mudharabah*
Tabungan *Mudharabah*	2.281.410.215	2.279.626.908	*Saving Account Mudharabah*
Jumlah Rupiah	**89.249.821.167**	**174.946.556.687**	***Total Rupiah***
Mata Uang Asing			*Foreign Currencies*
Giro *Mudharabah* Dolar Amerika Serikat	111.290.349.901	32.691.633.639	*Current Account United States Dollar*
Giro *Mudharabah* Euro	3.397.363.776	3.067.687.062	*Current Account Euro*
Giro *Mudharabah* Dolar Singapore	2.413.046.263	2.227.698.282	*Current Account Singapore Dollar*
Giro *Mudharabah* Riyal Arab Saudi	49.668.000	--	*Current Account Saudi Arabia Riyal*
Jumlah Mata Uang Asing	**117.150.427.940**	**37.987.018.983**	***Total Foreign Currencies***
	206.400.249.107	**212.933.575.670**	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(8.416.733)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**206.400.249.107**	**212.925.158.937**	***Total***

c. Berdasarkan kolektibilitas / *c. By collectibility*

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 diklasifikasikan lancar.

All current accounts with other banks as of and December 31, 2022 and August 21, 2022 are classified as current.

d. Berdasarkan jatuh tempo / *d. By maturity*

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (Continued)

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Saldo Awal	(8.416.733)	(6.445.146)	*Beginning Balance*
Pembalikan Penyisihan Selama Periode Berjalan	8.416.733	(1.971.587)	*Reversal (Addition) During the Period*
Saldo Akhir	**--**	**(8.416.733)**	***Ending Balance***

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh giro dan penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 diklasifikasikan "Lancar". Manajemen yakin seluruh giro dan penempatan pada bank lain akan tertagih, sehingga CKPN tidak perlu dibentuk.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

Based on management's review and evaluation, all current accounts and placements with other banks as at December 31, 2022 and August 21, 2022 were classified as "Current". Management believes that all current accounts and placements in other banks will be collected, so CKPN does not need to be formed.

As of December 31, 2022 and August 21, 2022, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES

a. Klasifikasi jenis dan tujuan investasi

a. Classification based on type and invesment

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.348.147.583.990	3.374.518.320.350	*Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income*
Sukuk BI yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.000.000.000.000	--	*BI Sukuk at fair value through other comprehensive income*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA") diukur pada biaya perolehan diamortisasi	450.000.000.000	--	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA") measured at amortized cost*
Sukuk Negara yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	230.000.000.000	30.000.000.000	*Government Sukuk measured at amortized cost*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

a. Klasifikasi jenis dan tujuan investasi / *a. Classification based on type and invesment*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.041.260.163	5.102.804.503	*Corporate Sukuk measured at amortized cost*
Premium Sukuk Negara yang belum diamortisasi	517.214.929	809.141.851	*Unamortized Premium on Government Sukuk*
Diskonto Sukuk Negara yang belum diamortisasi	(3.765.825.697)	--	*Unamortized Discount on Government Sukuk*
Jumlah Investasi Surat Berharga	5.029.940.233.385	3.410.430.266.704	*Total Investment marketable securities*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(882.344.226)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.029.940.233.385**	**3.409.547.922.478**	***Total - net***

b. Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo / *b. Classification to maturity*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
• Sampai dengan 1 bulan	--	--	*Less than 1 month •*
• Lebih dari 1 s/d 12 bulan	5.029.940.233.385	3.410.430.266.704	*More than 1 to 12 month •*
Jumlah	**5.029.940.233.385**	**3.410.430.266.704**	***Total***

c. Rincian Surat Berharga / *c. Detail of marketable secuties*

1). Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2022 / *Carrying Value December 31, 2022*	Nilai Tercatat 21 Agsutus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*
Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain)/ *Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)*						
PBS027	01/10/2020	15/05/2023	6,50%	23.136.000.000	23.305.586.880	23.556.381.120
PBS027	11/02/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	11/02/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	09/03/2021	15/05/2023	6,50%	20.000.000.000	20.146.600.000	20.363.400.000
PBS027	10/03/2021	15/05/2023	6,50%	25.000.000.000	25.183.250.000	25.454.250.000
PBS027	12/03/2021	15/05/2023	6,50%	20.000.000.000	20.146.600.000	20.363.400.000
PBS027	16/03/2021	15/05/2023	6,50%	5.000.000.000	5.036.650.000	5.090.850.000
PBS027	22/03/2021	15/05/2023	6,50%	25.000.000.000	25.183.250.000	25.454.250.000
PBS027	06/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	16/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	16/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	16/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	25/04/2022	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	26/04/2022	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.293.200.000	40.726.800.000
PBS027	26/04/2022	15/05/2023	6,50%	45.000.000.000	45.329.850.000	45.817.650.000
PBS027	27/04/2022	15/05/2023	6,50%	30.000.000.000	30.219.900.000	30.545.100.000
SR014	06/07/2021	10/03/2024	5,47%	25.000.000.000	24.802.500.000	25.096.000.000
SR014	05/10/2021	10/03/2024	5,47%	45.000.000.000	44.644.500.000	45.172.800.000
SR014	11/10/2021	10/03/2024	5,47%	20.000.000.000	19.842.000.000	20.076.800.000
SR014	11/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	39.684.000.000	40.153.600.000
SR014	12/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	39.684.000.000	40.153.600.000
SR014	12/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	39.684.000.000	40.153.600.000
SR014	12/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	39.684.000.000	40.153.600.000

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

c. Rincian Surat Berharga (Lanjutan)

c. Detail of marketable secuties (Continued)

1). Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Lanjutan)/
Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income *(Continued)*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2022 / *Carrying Value December 31, 2022*	Nilai Tercatat 21 Agsutus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*
Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain)/ ***Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)***						
SR014	19/10/2021	10/03/2024	5,47%	47.000.000.000	46.628.700.000	47.180.480.000
SR014	19/10/2021	10/03/2024	5,47%	25.000.000.000	24.802.500.000	25.096.000.000
SR014	10/11/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	39.684.000.000	40.153.600.000
SR014	12/09/2022	10/03/2024	5,47%	45.000.000.000	44.644.500.000	--
PBS031	02/08/2021	15/07/2024	4,00%	45.000.000.000	43.470.000.000	43.814.250.000
PBS031	03/08/2021	15/07/2024	4,00%	40.000.000.000	38.640.000.000	38.946.000.000
PBS031	03/08/2021	15/07/2024	4,00%	45.000.000.000	43.470.000.000	43.814.250.000
PBS031	21/04/2022	15/07/2024	4,00%	45.000.000.000	43.470.000.000	43.814.250.000
PBS031	21/04/2022	15/07/2024	4,00%	40.000.000.000	38.640.000.000	38.946.000.000
SR015	15/12/2021	10/09/2024	5,10%	45.000.000.000	44.163.450.000	44.717.850.000
SR015	16/12/2021	10/09/2024	5,10%	40.000.000.000	39.256.400.000	39.749.200.000
SR015	17/01/2022	10/09/2024	5,10%	45.000.000.000	44.163.450.000	44.717.850.000
SR015	25/01/2022	10/09/2024	5,10%	40.000.000.000	39.256.400.000	39.749.200.000
SR015	08/04/2022	10/09/2024	5,10%	45.000.000.000	44.163.450.000	44.717.850.000
PBS026	01/10/2020	15/10/2024	6,63%	23.936.000.000	24.069.084.160	24.464.267.520
PBS026	01/10/2020	15/10/2024	6,63%	25.000.000.000	25.139.000.000	25.551.750.000
PBS026	11/12/2020	15/10/2024	6,63%	40.000.000.000	40.222.400.000	40.882.800.000
PBS026	16/03/2021	15/10/2024	6,63%	20.000.000.000	20.111.200.000	20.441.400.000
PBS026	04/10/2021	15/10/2024	6,63%	45.000.000.000	45.250.200.000	45.993.150.000
PBS026	06/10/2021	15/10/2024	6,63%	45.000.000.000	45.250.200.000	45.993.150.000
PBS026	11/10/2021	15/10/2024	6,63%	45.000.000.000	45.250.200.000	45.993.150.000
PBS017	26/11/2020	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	26/11/2020	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	26/11/2020	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	14/01/2021	15/10/2025	6,13%	23.306.000.000	23.406.448.860	23.466.112.220
PBS017	14/01/2021	15/10/2025	6,13%	25.000.000.000	25.107.750.000	25.171.750.000
PBS017	11/02/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	11/02/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	07/05/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	01/11/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	25/11/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	02/12/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	02/12/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	06/12/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	06/12/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	07/12/2021	15/10/2025	6,13%	30.000.000.000	30.129.300.000	30.206.100.000
PBS017	19/01/2022	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	08/02/2022	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS017	08/02/2022	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	17/02/2022	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.193.950.000	45.309.150.000
PBS017	18/02/2022	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.172.400.000	40.274.800.000
PBS032	02/08/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	03/08/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	26/08/2021	15/07/2026	4,88%	25.000.000.000	23.920.250.000	23.635.250.000
PBS032	26/08/2021	15/07/2026	4,88%	1.889.000.000	1.807.414.090	1.785.879.490
PBS032	27/08/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	30/08/2021	15/07/2026	4,88%	30.000.000.000	28.704.300.000	28.362.300.000
PBS032	03/09/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	03/09/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	08/09/2021	15/07/2026	4,88%	25.000.000.000	23.920.250.000	23.635.250.000
PBS032	29/11/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	29/11/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	01/12/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	07/12/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	07/12/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	26/01/2022	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	27/01/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	27/01/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	11/03/2022	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	14/03/2022	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	43.056.450.000	42.543.450.000
PBS032	13/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	14/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	14/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS032	14/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	38.272.400.000	37.816.400.000
PBS003	05/11/2021	15/01/2027	6,00%	45.000.000.000	44.180.100.000	44.155.350.000
PBS003	05/11/2021	15/01/2027	6,00%	40.000.000.000	39.271.200.000	39.249.200.000
PBS030	05/07/2021	15/07/2028	5,88%	20.000.000.000	19.270.000.000	19.279.000.000
PBS030	26/08/2021	15/07/2028	5,88%	21.000.000.000	20.233.500.000	20.242.950.000
Jumlah Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain) ***Total Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)***				**3.395.267.000.000**	**3.348.147.583.990**	**3.313.585.320.350**

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

c. Rincian Surat Berharga (Lanjutan) / *c. Detail of marketable secuties (Continued)*

1). Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Lanjutan)/
Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income *(Continued)*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 31 Desember 2022 / *Carrying Value December 31, 2022*	Nilai Tercatat 21 Agsutus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*
Obligasi Korporasi Non-Bank (Diukur pada nilai wajar pada komprehensif lain)/ *Corporation Bonds Non-Bank (Measured at fair value through other comprehensive)*						
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	27/10/2017	28/09/2022	8,75%	8.000.000.000	--	8.124.400.000
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	27/10/2017	28/09/2022	8,75%	10.000.000.000	--	10.155.500.000
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	10/01/2018	28/09/2022	8,75%	14.000.000.000	--	14.217.700.000
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	02/02/2018	28/09/2022	8,75%	15.000.000.000	--	15.233.250.000
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	02/02/2018	28/09/2022	8,75%	13.000.000.000	--	13.202.150.000
Jumlah Obligasi Korporasi Non-Bank (Diukur pada nilai wajar pada komprehensif lain)/ Total Corporation Bonds Non-Bank (Measured at fair value through other *comprehensive income)*				**60.000.000.000**	**--**	**60.933.000.000**
Jumlah Sukuk/ Obligasi/ *Total Sukuk/ Bond*				**3.455.267.000.000**	**3.348.147.583.990**	**3.374.518.320.350**

2). Sukuk BI yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *BI Sukuk at fair value through other comprehensive income*

Desember / *December* 31, 2022				
Surat Berharga / *Marketable Security*	**Penempatan / *Placement***	**Jatuh Tempo / *Due Date***	**Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate***	**Nilai Tercatat / *Carring Value***
SUKUK01 - 001	30/12/2022	06/01/2023	5,50%	250.000.000.000
SUKUK01 - 002	30/12/2022	06/01/2023	5,50%	250.000.000.000
SUKUK01 - 003	30/12/2022	06/01/2023	5,50%	250.000.000.000
SUKUK01 - 004	30/12/2022	06/01/2023	5,50%	250.000.000.000
Jumlah Sukuk BI yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Total BI Sukuk at fair value through other comprehensive income*				**1.000.000.000.000**

3). Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA") diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA") measured at amortized cost*

Desember / *December* 31, 2022				
Surat Berharga / *Marketable Security*	**Penempatan / *Placement***	**Jatuh Tempo / *Due Date***	**Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate***	**Nilai Tercatat / *Carring Value***
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah	30/12/2022	02/01/2023	5,10%	150.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia	30/12/2022	02/01/2023	5,10%	300.000.000.000
Jumlah SIMA yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Total SIMA measured at amortized cost*				**450.000.000.000**

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

c. Rincian Surat Berharga (Lanjutan)

c. Detail of marketable secuties (Continued)

4). Sukuk Negara yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Government Sukuk measured at amortized cost*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Tercatat 31 Desember 2022 / *Carrying Value December 31, 2022*	Nilai Tercatat 21 Agsutus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*
PBS026 - SBSN PBS026	25/08/2020	15/10/2024	6,63%	10.000.000.000	10.000.000.000
PBS026 - SBSN PBS026	29/09/2020	15/10/2024	6,63%	10.000.000.000	10.000.000.000
PBS027 - SBSN PBS027	29/09/2020	15/05/2023	6,50%	10.000.000.000	10.000.000.000
PBS036	08/12/2022	15/08/2025	5,38%	50.000.000.000	--
PBS036	09/12/2022	15/08/2025	5,38%	50.000.000.000	--
PBS036	21/12/2022	15/08/2025	5,38%	50.000.000.000	--
PBS036	22/12/2022	15/08/2025	5,38%	50.000.000.000	--
Jumlah Sukuk Negara yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Total Government Sukuk measured at amortized cost*				**230.000.000.000**	**30.000.000.000**

5). Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Corporate Sukuk measured at amortized cost*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Tercatat 31 Desember 2022 / *Carrying Value December 31, 2022*	Nilai Tercatat 21 Agsutus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III	16/03/2022	27/03/2023	7,00%	5.041.260.163	5.102.804.503
Jumlah Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Total Corporate Sukuk measured at amortized cost*				**5.041.260.163**	**5.102.804.503**

6). Premium Sukuk Negara yang belum diamortisasi/ *Unamortized Premium on Government Sukuk*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat bagi hasil per tahun / *Annual revenue sharing rate*	Nilai Tercatat 31 Desember 2022 / *Carrying Value December 31, 2022*	Nilai Tercatat 21 Agsutus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*
PBS026 - SBSN PBS026	25/08/2020	15/10/2024	6,63%	260.276.945	305.443.548
PBS026 - SBSN PBS026	29/09/2020	15/10/2024	6,63%	78.678.659	320.273.727
PBS027 - SBSN PBS027	29/09/2020	15/05/2023	6,50%	178.259.325	183.424.576
Jumlah Premium Sukuk Negara yang belum diamortisasi/ *Total Unamortized Premium on Government Sukuk*				**517.214.929**	**809.141.851**

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(Continued)*

c. Rincian Surat Berharga (Lanjutan)

c. Detail of marketable secuties *(Continued)*

7). Diskonto Sukuk Negara yang belum diamortisasi/ *Unamortized Discount on Government Sukuk*

Desember / *December* 31, 2022				
Surat Berharga / ***Marketable Security***	**Penempatan /** ***Placement***	**Jatuh Tempo /** ***Due Date***	**Tingkat bagi hasil per tahun /** ***Annual revenue sharing rate***	**Nilai Tercatat /** ***Carring Value***
PBS036	07/12/2022	15/08/2025	5,38%	(879.070.528)
PBS036	08/12/2022	15/08/2025	5,38%	(929.347.826)
PBS036	20/12/2022	15/08/2025	5,38%	(965.801.887)
PBS036	20/12/2022	15/08/2025	5,38%	(991.605.456)
Jumlah Diskonto Sukuk Negara yang belum diamortisasi/ *Total Unamortized Discount on Government Sukuk*				**(3.765.825.697)**

d. Kolektibilitas Surat Berharga sebagai berikut:

d. Collectibility of marketable securities is as follow:

	2022		
	31 Desember/ ***December 31***	**21 Agustus/** ***August 21***	
Lancar	5.029.940.233.385	3.410.430.266.704	*Current*
Macet	--	--	*Loss*
Jumlah	**5.029.940.233.385**	**3.410.430.266.704**	*Total*
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	--	(882.344.226)	Allowance for impairment *losses Marketable Securities*
Jumlah - bersih	**5.029.940.233.385**	**3.409.547.922.478**	***Total - net***

Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas Surat Berharga dan obligasi yang nilai wajarnya diukur melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan dirinci sebagai berikut:

Unrealized gains/ losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and Government Bonds net of deferred tax detail is as follows:

	2022		
	31 Desember/ ***December 31***	**21 Agustus/** ***August 21***	
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari Surat Berharga tersedia untuk dijual	(84.742.555.726)	(82.788.799.087)	*Unrealized gains (loss) net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Pajak tangguhan	18.643.362.260	18.643.362.260	*Deferred tax*
Jumlah	**(66.099.193.466)**	**(64.145.436.827)**	***Total***

e. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan “Lancar”.

e. By collectibility

As of December 31, 2022 and August 21, 2022, all investments in marketable securitie are classified as “Current”.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

f. Berdasarkan peringkat / *f. Based on rating*

	Desember / December 31, 2022			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through through other comprehensive income***
Sukuk Pemerintah	--	--	3.348.147.583.990	*Government Sukuk*
Sub jumlah			**3.348.147.583.990**	*Sub total*
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Sukuk Bank Indonesia	--	--	1.000.000.000.000	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	--	--	450.000.000.000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sukuk Pemerintah	--	--	230.000.000.000	*Government Sukuk*
Premium (Diskonto) yang belum diamortisasi	--	--	(3.248.610.768)	*Unamortized Premium (Discount)*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	AAA	5.041.260.163	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub jumlah			**1.681.792.649.395**	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			--	*Allowance for imparment losses*
Jumlah			**5.029.940.233.385**	***Total***

	Agustus/ *August* 21, 2022			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through through other comprehensive income***
Sukuk Pemerintah	--	--	3.313.585.320.350	*Government Sukuk*
PT Timah (Persero), Tbk	Pefindo	A	60.933.000.000	*PT Timah Tbk*
Sub jumlah			**3.374.518.320.350**	*Sub total*
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Sukuk Pemerintah	--	--	30.000.000.000	*Government Sukuk*
Premium (Diskonto) yang belum diamortisasi	--	--	809.141.851	*Unamortized Premium (Discount)*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	AAA	5.102.804.503	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub jumlah			**35.911.946.354**	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			(882.344.226)	*Allowance for imparment losses*
Jumlah			**3.409.547.922.478**	***Total***

8. PIUTANG / *8. RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas / *a. By type and collectability*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Piutang *Murabahah*			***Murabahah Receivables***
Lancar	15.841.091.864.901	14.219.706.466.645	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	318.297.405.240	1.896.310.491.850	*Special Mention*
Kurang Lancar	22.000.502.596	41.218.993.014	*Substandard*
Diragukan	20.078.820.198	24.759.921.109	*Doubtful*
Macet	387.266.450.329	424.651.733.408	*Loss*
Jumlah	**16.588.735.043.264**	**16.606.647.606.026**	***Total***

8. PIUTANG (Lanjutan) / *8. RECEIVABLES (Continued)*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (Lanjutan) / *a. By type and collectability (Continued)*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Piutang *Ijarah*			***Ijarah Receivables***
Lancar	--	605.975.207	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	33.154.596	1.174.899.321	*Special Mention*
Kurang Lancar	11.999.995	36.738.092	*Substandard*
Diragukan	--	19.047.616	*Doubtful*
Macet	68.065.402	69.791.932	*Loss*
Jumlah	**113.219.993**	**1.906.452.168**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(373.997.229.516)	(425.575.243.533)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**16.214.851.033.741**	**16.182.978.814.661**	***Total - Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

	31 Desember/ *December 31*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Industri	22.306.059.750	1.760.556.273	33.275.096	87.108.346	1.595.169.092	25.782.168.557	*Manufacturing*
Jasa Usaha	5.086.968.050	1.118.574.876	--	--	1.453.806.293	7.659.349.219	*Bussines Service*
Konstruksi	7.699.534.133	749.622.242	49.915.042	--	5.472.517.546	13.971.588.963	*Construction*
Konsumer dan Rumah Tangga	13.628.612.137.908	248.728.482.616	14.521.923.859	7.395.720.745	135.782.441.270	14.035.040.706.398	*Consumer and Household*
Listrik Gas dan Air	1.870.546.093	--	--	--	3.460.113.169	5.330.659.262	*Electricity Gas And Water*
Pengangkutan	8.221.839.261	898.884.319	--	283.012.402	2.071.049.496	11.474.785.478	*Transportation*
Perdagangan, Restoran dan Hotel	456.005.476.045	27.067.814.840	4.217.167.374	7.469.581.181	84.685.007.403	579.445.046.843	*Trading, Restaurants and Hotels*
Pertambangan	324.513.196	--	--	--	--	324.513.196	*Mining*
Pertanian	1.618.228.318.005	30.702.427.806	2.071.573.381	4.491.975.412	143.965.863.324	1.799.460.157.928	*Agricultur*
Sosial/Masyarakat	9.613.537.967	575.221.820	346.615.748	74.969.934	507.269.356	11.117.614.825	*Social/Public*
Lainnya	83.122.934.493	6.728.975.045	772.032.083	276.452.178	8.341.278.789	99.241.672.588	*Others*
Jumlah Piutang	**15.841.091.864.901**	**318.330.559.837**	**22.012.502.583**	**20.078.820.198**	**387.334.515.738**	**16.588.848.263.257**	***Total Receivables***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.264.574.460)	(6.297.017.638)	(17.547.774.440)	(18.192.105.230)	(330.695.757.748)	(373.997.229.516)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**15.839.827.290.441**	**312.033.542.199**	**4.464.728.143**	**1.886.714.968**	**56.638.757.990**	**16.214.851.033.741**	***Total- Net***

	21 Agustus/ *August* 21, 2022						
	Lancar / Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet / Loss	Jumlah/ Total	
Industri	19.095.047.350	3.051.520.446	330.284.565	348.618.856	1.643.773.223	24.469.244.440	*Manufacturing*
Jasa Usaha	5.792.410.728	1.189.484.858	--	--	1.491.498.128	8.473.393.714	*Bussines Service*
Konstruksi	5.177.111.133	3.696.603.598	18.362.914	--	5.696.071.409	14.588.149.054	*Construction*
Konsumer dan Rumah Tangga	12.505.560.960.782	1.487.598.053.386	22.563.718.192	18.324.963.911	160.822.690.690	14.194.870.386.961	*Consumer and Household*
Listrik Gas dan Air	1.633.944.921	289.330.860	--	--	3.742.138.169	5.665.413.950	*Electricity Gas And Water*
Pengangkutan	6.382.020.686	1.555.809.732	73.379.312	69.403.338	2.076.151.562	10.156.764.630	*Transportation*
Perdagangan, Restoran dan Hotel	364.722.627.979	90.821.113.332	10.073.402.445	3.692.148.442	89.194.206.423	558.503.498.621	*Trading, Restaurants and Hotels*
Pertambangan	400.889.418	--	--	--	--	400.889.418	*Mining*
Pertanian	1.234.608.875.811	288.296.781.779	7.278.136.547	2.175.921.116	150.898.348.051	1.683.258.063.304	*Agricultur*
Sosial/Masyarakat	9.424.664.444	1.614.402.644	77.312.744	--	144.879.571	11.261.259.403	*Social/Public*
Lainnya	67.513.888.600	19.372.290.536	841.134.387	167.913.062	9.011.768.114	96.906.994.699	*Others*
Jumlah Piutang	**14.220.312.441.852**	**1.897.485.391.171**	**41.255.731.106**	**24.778.968.725**	**424.721.525.340**	**16.608.554.058.194**	***Total Receivables***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(35.710.300.162)	(51.538.752.424)	(23.464.634.097)	(21.307.052.843)	(293.554.504.007)	(425.575.243.533)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**14.184.602.141.690**	**1.845.946.638.747**	**17.791.097.009**	**3.471.915.882**	**131.167.021.333**	**16.182.978.814.661**	***Total- Net***

8. PIUTANG (Lanjutan) / *8. RECEIVABLES (Continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By contractual term*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	23.799.284.201	16.366.679.782	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	145.541.545.217	148.155.318.040	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	3.291.737.805.209	3.155.083.579.510	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	13.127.769.628.630	13.288.948.480.862	*> 5 Years*
Jumlah	**16.588.848.263.257**	**16.608.554.058.194**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(373.997.229.516)	(425.575.243.533)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.214.851.033.741**	**16.182.978.814.661**	***Total - net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	1.305.336.831.472	1.332.765.716.207	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	1.215.792.793.626	1.158.386.495.871	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	3.445.434.791.323	3.347.553.107.180	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	10.622.283.846.836	10.769.848.738.936	*> 5 Years*
Jumlah	**16.588.848.263.257**	**16.608.554.058.194**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(373.997.229.516)	(425.575.243.533)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.214.851.033.741**	**16.182.978.814.661**	***Total - net***

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pihak berelasi	1.202.690.047	1.449.446.115	*Related parties*
Pihak ketiga	16.587.645.573.210	16.607.104.612.079	*Third parties*
Jumlah	**16.588.848.263.257**	**16.608.554.058.194**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(373.997.229.516)	(425.575.243.533)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.214.851.033.741**	**16.182.978.814.661**	***Total - net***

8. PIUTANG (Lanjutan) / *8. RECEIVABLES (Continued)*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	2022				
	31 Desember/ *December 31*		21 Agustus/ *August 21*		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	15.841.091.864.901	1.264.574.460	14.220.312.441.852	35.710.300.162	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	318.330.559.837	6.297.017.638	1.897.485.391.171	51.538.752.424	*Special Mention*
Kurang Lancar/	22.012.502.583	17.547.774.440	41.255.731.106	23.464.634.097	*Substandard*
Diragukan	20.078.820.198	18.192.105.230	24.778.968.725	21.307.052.843	*Doubtful*
Macet	387.334.515.738	330.695.757.748	424.721.525.340	293.554.504.007	*Loss*
Jumlah	**16.588.848.263.257**	**373.997.229.516**	**16.608.554.058.194**	**425.575.243.533**	***Total***

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2022	
	31 Desember/ *December 31*	
Saldo Awal	425.575.243.533	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	85.982.477	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(45.575.161.264)	*Recoveries During The Period*
Dampak perubahan PSAK 71 ke ISAK 102	(6.733.773.127)	*Impact of the change from SFAS 71 to IFAS 102*
Penerimaan kembali hapus buku	644.937.897	*Recoveries of Write-Off*
Penghapusbukuan Selama Tahun Berjalan	--	*Write-Off During The Year*
Jumlah	**373.997.229.516**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is adequate to cover impairment losses from uncollectible receivables.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Receivables are collateralized by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

8. PIUTANG (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (Lanjutan)

Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebesar Rp156.724.665.845 dan Rp181.157.779.005, termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp141.659.010.681 dan Rp164.722.772.558. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.

Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

8. RECEIVABLES (Continued)

g. Other significant information (Continued)

Total restructured receivables as at December 31, 2022 and August 21, 2022 amounted to Rp156.724.665.845 and Rp181.157.779.005, which included restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp141.659.010.681 and Rp164.722.772.558. Receivables were being restructured by extending the period, rescheduling and additional receivable facility for debtors.

The ratio of total Non performing Financing ("NPF") gross and net on receivables are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Jumlah Piutang			*Total Receivables*
NPF - Bruto	429.425.838.519	490.756.225.171	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	2,59%	2,95%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto	62.990.201.101	152.430.034.224	*NPF - Net*
Persentase NPF - Neto	0,39%	0,94%	*Percentage of NPF - Net*

9. PINJAMAN *QARDH*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

9. FUNDS OF QARDH

a. By type and currency

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Rupiah			***Rupiah***
Rahn	54.597.564.800	49.701.582.200	*Rahn*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.761.480)	(32.755.524)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**54.574.803.320**	**49.668.826.676**	***Total - net***

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (Continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

	31 Desember/ *December 31*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	--	--	--	--	--	--	*Manufacturing*
Jasa Usaha	--	--	--	--	--	--	*Bussiness Service*
Konstruksi	--	--	--	--	--	--	*Construction*
Konsumer	54.306.514.800	256.650.000	--	--	34.400.000	54.597.564.800	*Consumer*
Pengangkutan	--	--	--	--	--	--	*Transportation*
Perdagangan	--	--	--	--	--	--	*Trading*
Pertanian	--	--	--	--	--	--	*Agriculture*
Sosial/ Masyarakat	--	--	--	--	--	--	*Social/ Public*
Lainnya	--	--	--	--	--	--	*Others*
Jumlah Pembiayaan	**54.306.514.800**	**256.650.000**	**--**	**--**	**34.400.000**	**54.597.564.800**	***Total Financing***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19.259.850)	(3.492.531)	--	--	(9.099)	(22.761.480)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**54.287.254.950**	**253.157.469**	**--**	**--**	**34.390.901**	**54.574.803.320**	***Total - net***

	21 Agustus/ *August 21*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	--	--	--	--	--	--	*Manufacturing*
Jasa Usaha	--	--	--	--	--	--	*Bussiness Service*
Konstruksi	--	--	--	--	--	--	*Construction*
Konsumer	45.252.562.200	4.449.020.000	--	--	--	49.701.582.200	*Consumer*
Pengangkutan	--	--	--	--	--	--	*Transportation*
Perdagangan	--	--	--	--	--	--	*Trading*
Pertanian	--	--	--	--	--	--	*Agriculture*
Sosial/ Masyarakat	--	--	--	--	--	--	*Social/ Public*
Lainnya	--	--	--	--	--	--	*Others*
Jumlah Pembiayaan	**45.252.562.200**	**4.449.020.000**	**--**	**--**	**--**	**49.701.582.200**	***Total Financing***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(25.015.628)	(7.739.896)	--	--	--	(32.755.524)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**45.227.546.572**	**4.441.280.104**	**--**	**--**	**--**	**49.668.826.676**	***Total - net***

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	54.597.564.800	48.859.682.200	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	--	729.300.000	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun		112.600.000	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	--	--	*> 5 Years*
Jumlah	**54.597.564.800**	**49.701.582.200**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.761.480)	(32.755.524)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - Bersih	**54.574.803.320**	**49.668.826.676**	***Total - net***

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan) / *9. FUNDS OF QARDH (Continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	54.597.564.800	49.701.582.200	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	--	--	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	--	--	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	--	--	*> 5 Years*
Jumlah	**54.597.564.800**	**49.701.582.200**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.761.480)	(32.755.524)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**54.574.803.320**	**49.668.826.676**	***Total - net***

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pihak berelasi	--	--	*Related parties*
Pihak ketiga	54.597.564.800	49.701.582.200	*Third parties*
Jumlah	**54.597.564.800**	**49.701.582.200**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.761.480)	(32.755.524)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**54.574.803.320**	**49.668.826.676**	***Total - net***

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectability*

	2022				
	31 Desember/ *December 31*		22 Agustus/ *August 22*		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	54.306.514.800	19.259.850	45.252.562.200	25.015.628	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	256.650.000	3.492.531	4.449.020.000	7.739.896	*Special Mention*
Kurang Lancar	--	--	--	--	*Substandard*
Diragukan	--	--	--	--	*Doubtful*
Macet	34.400.000	9.099	--	--	*Loss*
Jumlah	**54.597.564.800**	**22.761.480**	**49.701.582.200**	**32.755.524**	***Total***

9. PINJAMAN *QARDH* (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

9. FUNDS OF QARDH *(Continued)*

g. Other significant information

The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	2022 31 Desember/ *December 31*	
Saldo Awal	32.755.524	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	13.582.289	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(23.576.333)	*Recoveries During The Period*
Penerimaan kembali hapus buku	--	*Recoveries of Write-Off*
Penghapusbukuan Selama Tahun Berjalan	--	*Write-Off During The Year*
Jumlah	**22.761.480**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate to cover impairment losses from uncollectible funds of qardh.

Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Funds of qardh are collateralized by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

The ratio of total non-Performing financing ("NPF") gross and net on funds of qardh are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jumlah Pinjaman *Qardh*			*Total Fund of Qardh*
NPF - Bruto	34.400.000	--	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	0,06%	0,00%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF-Neto	34.390.901	--	*NPF - Net*
Persentase NPF - Neto	0,06%	0,00%	*Percentage of NPF - Net*

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / *10. MUDHARABAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			***Rupiah***
Modal Kerja	23.719.749.532	26.949.987.656	*Working Capital*
Dikurangi:			*Deduction :*
Cadangan kerugian Penurunan Nilai	(6.274.116)	(2.582.887)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**23.713.475.416**	**26.947.404.769**	***Total - Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

	31 Desember/ *December 31*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	--	--	--	--	--	--	*Manufacturing*
Jasa Usaha	--	--	--	--	--	--	*Bussiness Service*
Konstruksi	--	--	--	--	--	--	*Construction*
Konsumer	--	--	--	--	--	--	*Consumer*
Pengangkutan	--	--	--	--	--	--	*Transportation*
Perdagangan	--	--	--	--	--	--	*Trading*
Pertanian	--	--	--	--	--	--	*Agriculture*
Sosial/ Masyarakat	--	--	--	--	--	--	*Social/ Public*
Lainnya	23.719.749.532	--	--	--	--	23.719.749.532	*Others*
Jumlah Pembiayaan	**23.719.749.532**	**--**	**--**	**--**	**--**	**23.719.749.532**	***Total Financing***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6.274.116)	--	--	--	--	(6.274.116)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**23.713.475.416**	**--**	**--**	**--**	**--**	**23.713.475.416**	***Total - net***

	21 Agustus/ *August 21*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	--	--	--	--	--	--	*Manufacturing*
Jasa Usaha	--	--	--	--	--	--	*Bussiness Service*
Konstruksi	--	--	--	--	--	--	*Construction*
Konsumer	--	--	--	--	--	--	*Consumer*
Transportation	--	--	--	--	--	--	*Transpotration*
Perdagangan	--	--	--	--	--	--	*Trading*
Pertanian	--	--	--	--	--	--	*Agriculture*
Sosial/ Masyarakat	--	--	--	--	--	--	*Social/ Public*
Lainnya	26.949.987.656	--	--	--	--	26.949.987.656	*Others*
Jumlah Pembiayaan	**26.949.987.656**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26.949.987.656**	***Total Financing***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.582.887)	--	--	--	--	(2.582.887)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**26.947.404.769**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26.947.404.769**	***Total - net***

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	--	--	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	--	--	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	23.719.749.532	26.949.987.656	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	--	--	*> 5 Years*
Jumlah	**23.719.749.532**	**26.949.987.656**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.274.116)	(2.582.887)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**23.713.475.416**	**26.947.404.769**	***Total - net***

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Lanjutan) / *10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	23.719.749.532	--	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	--	26.949.987.656	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	--	--	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	--	--	*> 5 Years*
Jumlah	**23.719.749.532**	**26.949.987.656**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.274.116)	(2.582.887)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**23.713.475.416**	**26.947.404.769**	***Total - net***

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pihak berelasi	--	--	*Related parties*
Pihak ketiga	23.719.749.532	26.949.987.656	*Third parties*
Jumlah	**23.719.749.532**	**26.949.987.656**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.274.116)	(2.582.887)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**23.713.475.416**	**26.947.404.769**	***Total - net***

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectability*

	2022				
	31 Desember/ *December 31*		21 Agustus/ *August 21*		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	23.719.749.532	6.274.116	26.949.987.656	2.582.887	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	--	--	--	--	*Special Mention*
Kurang Lancar	--	--	--	--	*Substandard*
Diragukan	--	--	--	--	*Doubtful*
Macet	--	--	--	--	*Loss*
Jumlah	**23.719.749.532**	**6.274.116**	**26.949.987.656**	**2.582.887**	***Total***

10. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (Lanjutan)

10. MUDHARABAH FINANCING (Continued)

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

	2022 31 Desember/ *December 31*	
Saldo Awal	2.582.887	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	743.192.990	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(739.501.761)	*Recoveries During The Period*
Penerimaan kembali hapus buku	--	*Recoveries of Write-Off*
Penghapusbukuan Selama Tahun Berjalan	--	*Write-Off During The Year*
Jumlah	**6.274.116**	***Total***

Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Mudharabah financing are collateralized by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on mudharabah financing are as follows:

Rasio Non-Performing Financing (NPF)

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah*			*Total Mudharabah Financing*
NPF - Bruto	--	--	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	0,00%	0,00%	*Percentage of NPF - Gross*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.

Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible mudharabah financing.

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *11. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			***Rupiah***
Modal Kerja	348.520.044.304	231.678.557.388	*Working Capital*
Investasi	1.729.728.020.142	1.915.684.093.275	*Investment*
Konsumsi	443.701.822.793	155.926.896.189	*Consumption*
Jumlah	**2.521.949.887.239**	**2.303.289.546.852**	***Total***
Dikurangi:			*Less :*
Cadangan kerugian Penurunan Nilai	(79.209.220.497)	(74.189.039.840)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**2.442.740.666.742**	**2.229.100.507.012**	***Total - Net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas / *b. By economic sector and collectibility*

	31 Desember/ *December 31*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	334.587.482.928	--	1.548.094.226	--	3.720.018.310	339.855.595.464	*Manufacturing*
Jasa Usaha	3.467.454.928	--	--	--	3.509.039.005	6.976.493.933	*Bussines Service*
Konstruksi	815.414.385.059	--	--	--	28.121.924.140	843.536.309.199	*Construction*
Konsumer dan Rumah Tangga	441.926.941.090	1.423.460.068	--	--	368.563.035	443.718.964.193	*Consumer and Household*
Listrik Gas dan Air	39.838.214.286	--	--	--	1.394.387.025	41.232.601.311	*Electricity Gas And Water*
Pengangkutan	20.000.000	--	--	--	323.884.349	343.884.349	*Transportation*
Perdagangan, Restoran dan Hotel	360.376.600.541	1.197.532.694	--	--	29.954.472.097	391.528.605.332	*Trading, Restaurants and Hotels*
Pertambangan	5.117.100.346	--	--	--	989.875.252	6.106.975.598	*Mining*
Pertanian	439.022.154.778	107.107.999	--	10.532.846	1.714.772.501	440.854.568.124	*Agricultur*
Sosial/ Masyarakat	1.470.169.165	--	--	10.334.545	--	1.480.503.710	*Social/Public*
Lainnya	2.828.007.129	--	--	--	3.487.378.897	6.315.386.026	*Others*
Jumlah Pembiayaan	**2.444.068.510.250**	**2.728.100.761**	**1.548.094.226**	**20.867.391**	**73.584.314.611**	**2.521.949.887.239**	***Total Financing***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.120.985.113)	(157.427.808)	(1.135.279.238)	(17.490.838)	(72.778.037.500)	(79.209.220.497)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**2.438.947.525.137**	**2.570.672.953**	**412.814.988**	**3.376.553**	**806.277.111**	**2.442.740.666.742**	***Total - net***

	21 Agustus/ *August 21*, 2022						
	Lancar / *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet / *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	351.943.323.314	--	--	--	3.775.018.310	355.718.341.624	*Manufacturing*
Jasa Usaha	4.968.494.337	--	--	--	3.656.044.605	8.624.538.942	*Bussines Service*
Konstruksi	959.946.734.482	--	--	--	29.771.531.099	989.718.265.581	*Construction*
Konsumer dan Rumah Tangga	145.588.403.134	9.805.389.482	64.781.725	496.126.135	--	155.954.700.476	*Consumer and Household*
Listrik Gas dan Air	48.855.571.429	--	--	--	1.673.887.025	50.529.458.454	*Electricity Gas And Water*
Pengangkutan	113.200.000	--	--	--	196.778.749	309.978.749	*Transportation*
Perdagangan, Restoran dan Hotel	348.170.467.016	4.318.537.098	30.265.403	45.253.844	30.131.297.522	382.695.820.883	*Trading, Restaurants and Hotels*
Pertambangan	--	--	--	--	989.875.252	989.875.252	*Mining*
Pertanian	346.011.884.909	1.630.171.823	--	11.632.846	1.419.872.498	349.073.562.076	*Agricultur*
Sosial/ Masyarakat	616.663.800	1.024.135.814	--	10.334.545	--	1.651.134.159	*Social/Public*
Lainnya	4.317.021.813	176.469.946	--	--	3.530.378.897	8.023.870.656	*Others*
Jumlah Pembiayaan	**2.210.531.764.234**	**16.954.704.163**	**95.047.128**	**563.347.370**	**75.144.683.957**	**2.303.289.546.852**	***Total Financing***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(35.118.709.571)	(463.676.368)	(1.356.552)	(20.657.309)	(38.584.640.040)	(74.189.039.840)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - bersih	**2.175.413.054.663**	**16.491.027.795**	**93.690.576**	**542.690.061**	**36.560.043.917**	**2.229.100.507.012**	***Total - net***

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	170.652.930.952	208.151.560.923	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	147.589.919.125	18.855.739.916	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	59.210.742.507	256.946.321.981	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	2.144.496.294.655	1.819.335.924.032	*> 5 Years*
Jumlah	**2.521.949.887.239**	**2.303.289.546.852**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.209.220.497)	(74.189.039.840)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.442.740.666.742**	**2.229.100.507.012**	***Total - net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Jangka waktu			*Term*
≤ 1 Tahun	253.394.846.828	181.186.722.032	*≤ 1 Years*
> 1 - ≤ 2 Tahun	127.481.387.904	26.181.969.983	*> 1 - ≤ 2 Years*
> 2 - ≤ 5 Tahun	531.101.060.808	30.969.065.885	*> 2 - ≤ 5 Years*
> 5 Tahun	1.609.972.591.699	2.064.951.788.952	*> 5 Years*
Jumlah	**2.521.949.887.239**	**2.303.289.546.852**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.209.220.497)	(74.189.039.840)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.442.740.666.742**	**2.229.100.507.012**	***Total - net***

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pihak berelasi	--	--	*Related parties*
Pihak ketiga	2.521.949.887.239	2.303.289.546.852	*Third parties*
Jumlah	**2.521.949.887.239**	**2.303.289.546.852**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.209.220.497)	(74.189.039.840)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.442.740.666.742**	**2.229.100.507.012**	***Total - net***

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectability*

	2022				
	31 Desember/ *December 31*		21 Agustus/ *August 21*		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	
Lancar	2.444.068.510.250	5.120.985.113	2.210.531.764.234	35.118.709.571	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	2.728.100.761	157.427.808	16.954.704.163	463.676.368	*Special Mention*
Kurang Lancar	1.548.094.226	1.135.279.238	95.047.128	1.356.552	*Substandard*
Diragukan	20.867.391	17.490.838	563.347.370	20.657.309	*Doubtful*
Macet	73.584.314.611	72.778.037.500	75.144.683.957	38.584.640.040	*Loss*
Jumlah	**2.521.949.887.239**	**79.209.220.497**	**2.303.289.546.852**	**74.189.039.840**	***Total***

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing as follows:

	2022	
	31 Desember/ *December 31*	
Saldo Awal	74.189.039.840	*Beginning Balance*
Pembentukan Penyisihan Selama Periode Berjalan	11.711.861.760	*Provision During The Period*
Pemulihan Penyisihan Selama Periode Berjalan	(6.768.833.712)	*Recoveries During The Period*
Penerimaan kembali hapus buku	77.152.609	*Recoveries of Write-Off*
Penghapusbukuan Selama Tahun Berjalan	--	*Write-Off During The Year*
Jumlah	**79.209.220.497**	***Total***

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	536.064.129.775	684.327.366.973	*Provision for Asset Quality Assessment (PPKA)*
Kurang CKPN atas PPKA	82.828.644.166	184.527.745.189	*Disadvantages CKPN on PPKA*
Rasio CKPN atas PPKA	85%	73%	*CKPN to PPKA Ratio*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible musyarakah financing.

Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

11. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (Lanjutan)

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebesar Rp923.618.071.746 dan Rp936.643.808.750, termasuk restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* terkait COVID-19 sebesar \Rp164.916.704.681 dan Rp167.635.540.613. Restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan *musyarakah* bagi debitur.

Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

11. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

g. Other significant information (Continued)

Total restructured musyarakah financing as at December 31, 2022 and August 21, 2022 amounted to Rp923,618,071,746 and Rp936,643,808,750, including restructured musyarakah financing related to COVID-19 amounting to Rp164,916,704,681 and Rp167,635,540,613. Musyarakah financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional musyarakah financing facility for debtors.

The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on mudharabah financing as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Jumlah Pembiayaan *Musyarakah*			*Total Musyarakah Financing*
NPF - Bruto	75.153.276.228	75.803.078.455	*NPF - Gross*
Persentase NPF - Bruto	2,98%	3,29%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF-Neto	1.222.468.652	37.196.424.554	*NPF - Net*
Persentase NPF - Neto	0,05%	1,67%	*Percentage of NPF - Net*

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH*

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah*, *ijarah* multijasa, dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT") dengan rincian sebagai berikut:

12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

This account represents lease object transactions from ijarah, ijarah multi-services and Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT") with details are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Multijasa	45.334.000.000	--	*Multi-services*
Lainnya	437.632.500.000	481.475.700.000	*Others*
Jumlah	**482.966.500.000**	**481.475.700.000**	***Total***
Akumulasi Penyusutan, Amortisasi Pemeliharaan dan Penurunan Nilai	(71.184.997.630)	(60.988.394.779)	*Accumulated Depreciation Amortisation, Maintenance and Impairment*
Jumlah - bersih	**411.781.502.370**	**420.487.305.221**	***Total - net***

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* (Lanjutan)

Penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp71.184.997.630 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 (Catatan 37).

Jumlah aset *ijarah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebesar Rp280.499.347 dan Rp329.280.209, termasuk restrukturisasi aset *ijarah* terkait COVID-19 sebesar Rp280.499.347 dan Rp329.280.209. Restrukturisasi aset *ijarah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas aset *ijarah* bagi debitur.

12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH (Continued)

Depreciation, amortisation, maintenance and impairment charged to the statements of profit or loss amounted to Rp71,184,997,630 and Rp60,988,394,779, respectively, for the years ended December 31, 2022 and August 21, 2022 (Note 37).

Total restructured asset ijarah as at December 31, 2022 and August 21, 2022 amounted to Rp280,499,347 and Rp329,280,209, including restructured asset ijarah related to COVID-19 amounted to Rp280,499,347 and Rp329,280,209. Asset ijarah were being restructured by extending the period, rescheduling and additional asset ijarah facility for debtors.

13. PENYERTAAN SAHAM

Akun ini merupakan penyertaan saham yang ditempatkan pada 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan daerah (Ventura). Penyertaan pada BPR dalam kondisi laba, sedangkan pada Perusahaan Ventura dalam kondisi rugi. Pada tahun 31 Desember 2022 Penyertaan kepada BPR Tanjung Balai Karimun diterima kembali. Persentase kepemilikan dan jumlah nominal penyertaan sebagai berikut:

13. INVESTMENT IN SHARES

This account represents investment in shares placed in 3 (three) Rural Banks (BPR) and regional companies (Ventura). Investments in BPR are in a profit condition, while in Venture Companies are in a loss condition. In December 31, 2022 the participation in Tanjung Balai Karimun BPR was accepted again. The percentage of ownership and the nominal amount of participation are as follows:

Keterangan/ *Description*	**Bagian penyertaan / *Share of investment***	**Tanggal Penyertaan / *Date of investment***	**Nominal Penyertaan 31 Desember 2022 / *Participation Amount December 31, 2022***	**Nominal Penyertaan 21 Agustus 2022 / *Participation Amount August 21, 2022***
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang/ Kateman	1,38%	21/11/07	200.000.000	200.000.000
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir	0,91%	02/10/07	200.333.335	200.333.335
PT Sarana Riau Ventura	7,76%	30/05/07	1.155.450.000	1.155.450.000
Jumlah / *Total*			**1.555.783.335**	**1.555.783.335**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*			-	-
Jumlah bersih/ *Total net*			**1.555.783.335**	**1.555.783.335**

14. ASET TETAP / *14. FIXED ASSETS*

	31 Desember/ *December 31*, 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Cost:***
Tanah	90.465.416.600	--	--	--	90.465.416.600	*Land*
Bangunan	317.180.037.653	--	312.700.000	--	316.867.337.653	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	298.387.994.403	8.748.554.102	42.752.534	--	307.093.795.971	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	27.769.484.975	210.548.943	--	--	27.980.033.918	*Vehicles*
Sub Jumlah	**733.802.933.631**	**8.959.103.045**	**355.452.534**	**--**	**742.406.584.142**	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Construction in Progress***
Tanah	--	--	--	--	--	*Land*
Bangunan	5.149.482.552	7.641.167.798	--	--	12.790.650.350	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	9.450.829.798	3.264.021.097	--	--	12.714.850.895	*Machineries Office Equipments*
Sub Jumlah	**14.600.312.350**	**10.905.188.895**	**--**	**--**	**25.505.501.245**	*Sub Total*
Jumlah	**748.403.245.981**	**19.864.291.940**	**355.452.534**	**--**	**767.912.085.387**	***Total***
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan	112.416.726.949	5.533.114.797	312.700.000	--	117.637.141.746	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	226.365.259.835	9.909.578.505	42.752.534	--	236.232.085.806	*Machineries Office Equipments*
Kendaraan	19.056.462.994	891.799.591	--	--	19.948.262.585	*Vehicles*
Jumlah	**357.838.449.778**	**16.334.492.893**	**355.452.534**	**--**	**373.817.490.137**	***Total***
Nilai Buku	**390.564.796.203**				**394.094.595.250**	***Net Book Value***

	21 Agustus/ *August 21*, 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Cost:***
Tanah	88.385.416.600	2.080.000.000	--	--	90.465.416.600	*Land*
Bangunan	316.996.973.764	183.063.889	--	--	317.180.037.653	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	276.854.953.496	21.867.900.284	1.555.341.365	1.220.481.988	298.387.994.403	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	27.185.473.387	584.011.588	--	--	27.769.484.975	*Vehicles*
Sub Jumlah	**709.422.817.247**	**24.714.975.761**	**1.555.341.365**	**1.220.481.988**	**733.802.933.631**	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Construction in Progress***
Tanah	--	--	--	--	--	*Land*
Bangunan	955.505.600	4.193.976.952	--	--	5.149.482.552	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	10.671.311.786	--	--	(1.220.481.988)	9.450.829.798	*Machineries and Office Equipments*
Sub Jumlah	**11.626.817.386**	**4.193.976.952**	**--**	**(1.220.481.988)**	**14.600.312.350**	*Sub Total*
Jumlah	**721.049.634.633**	**28.908.952.713**	**1.555.341.365**	**--**	**748.403.245.981**	***Total***
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan	102.187.975.788	10.228.751.161	--	--	112.416.726.949	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	204.842.042.812	23.078.558.388	1.555.341.365	--	226.365.259.835	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	17.087.833.383	1.968.629.611	--	--	19.056.462.994	*Vehicles*
Jumlah	**324.117.851.983**	**35.275.939.160**	**1.555.341.365**	**--**	**357.838.449.778**	***Total***
Nilai Buku	**396.931.782.650**				**390.564.796.203**	***Net Book Value***

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp16.334.492.894 dan Rp35.275.939.160 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 (Catatan 37).

Depreciation expenses of fixed assets charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income amounted to Rp16,334,492,894 and Rp35,275,939,160 for the period ended December 31, 2022 and August 21, 2022, respectively (Note 37).

Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain.

Fixed assets in the form of buildings, vehicles and certain other inventories are insured against possible risks of fire, accident and other risks.

14. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap tersebut diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.960.509.427.405 kepada PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda, PT Asuransi Askrida Syariah dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

14. FIXED ASSETS (Continued)

The fixed assets are insured with a sum insured of Rp3,960,509,427,405 to PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda, PT Asuransi Askrida Syariah and PT Asuransi Jasa Indonesia. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and earthquake.

15. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari:

15. OTHER ASSETS

Other assets consist of:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Pendapatan Pembiayaan Yang Akan Diterima	152.233.331.194	16.123.048.889	*Income Receivables From Financing*
Asuransi Dibayar Dimuka	84.390.054.165	103.245.763.884	*Prepaid Insurance*
Piutang Pendapatan Surat Berharga	45.566.998.828	40.951.990.328	*Income Receivables From Securities*
Sewa Dibayar Dimuka	35.250.307.542	30.049.604.765	*Prepaid Expense*
Tagihan ATM	25.877.689.357	24.950.851.905	*ATM Receivables*
Persediaan Alat Tulis Kantor dan Materai	6.953.155.871	7.217.610.794	*Office Supplies and Stamps*
Setoran Jaminan	2.095.768.852	2.090.284.128	*Guarantee Deposit*
Lain-lain	37.252.577.820	69.880.653.233	*Others*
Jumlah	**389.619.883.629**	**294.509.807.926**	***Total***

Manajemen yakin seluruh aset lain-lain akan tertagih, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak perlu dibentuk.

Management believes that all other assets will be collected, so there is no need to establish an impairment credit loss.

16. LIABILITAS SEGERA

16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Lliabilitas Pihak Ketiga	88.901.706.141	25.830.527.494	*Third Party Liabilities*
Cadangan Bonus dan Tantiem	87.724.859.604	29.983.373.098	*Provision of bonus and tantiem*
Liabilitas atas tagihan ATM	75.959.140.573	32.474.430.636	*Liabilities to bill ATM*
Titipan kiriman uang dan inkaso	65.811.984.090	54.470.000	*Clearing and RTGS*
Titipan Tagihan Pembayaran	60.487.233.915	96.678.358.390	*Bill Payment Deposit*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	53.499.417.331	70.738.313.273	*Accrued expenses*
Liabilitas terkait pembiayaan	36.328.432.293	16.664.695.681	*Liabilities related to financing*
Liabilitas BI-*Fast*	18.805.145.280	5.401.762.665	*Liabilities to BI Fast*
Setoran Jaminan Jatuh Tempo	18.596.237.682	17.759.275.756	*Maturity Security Deposit*

16. LIABILITAS SEGERA (Lanjutan) / *16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY (Continued)*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Titipan Dana Nasabah	17.921.219.785	23.353.424.136	*Customer Fund Deposit*
Warkat pinjaman Kliring	3.745.821.730	2.242.124.405	*Clearing loan instruments*
Liabilitas Principle Telkomsel	1.176.598.297	860.621.143	*Liabilities to Telkomsel Principle*
Liabilitas QRIS	646.949.418	65.223.989	*Liabilities to QRIS*
Dana Kebajikan	518.334.475	--	*Qardhul Hasan Fund*
Rekening yang ditutup	388.499.096	--	*Closed Account*
Zakat Pegawai, Nasabah dan Umum	42.066.130	819.156.652	*Zakat for Employees, Customers and General*
Titipan Lainnya	77.427.321.602	12.702.704.020	*Other Entrustments*
Jumlah	**607.980.967.442**	**335.628.461.338**	*Total*

Liabilitas ATM Prima dan ATM Bersama merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* (“ATM”) Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Liabilities to ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank’s network of Automated Teller Machine (“ATM”) by customers of using ATM Prima and ATM Bersama

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Bank, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo, dan lain-lain.

Other remittances are direct remittances to Bank’s partners, remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat pegawai, nasabah dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui *platform* E-Channel Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's E-Channel platform and will be distributed to zakat management institutions.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED PROFIT SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

The Bank’s undistributed profit sharing as of December 31, 2022 and August 21, 2022, are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Rupiah			*Rupiah*
Deposito	17.335.351.008	28.741.613	*Time Deposits*
Sub Jumlah	**17.335.351.008**	**28.741.613**	***Sub Total***
Mata Uang Asing			*Foreign currency*
Deposito	25.446.905	--	*Time Deposits*
Sub Jumlah	**25.446.905**	**--**	***Sub Total***
Jumlah	**17.360.797.913**	**28.741.613**	***Total***

18. GIRO *WADIAH*

Giro *wadiah* terdiri dari:

18. WADIAH DEMAND DEPOSITS

Wadiah demand deposits consist of:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	70.542.083.675	67.244.793.749	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	--	--	*United States Dollar*
	70.542.083.675	**67.244.793.749**	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	36.800.773.950	9.510.086.313	*Rupiah*
Jumlah	**107.342.857.625**	**76.754.880.062**	***Total***

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-hamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad- dhamanah in which the third-party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Rupiah	0.05 - 3.00 %	0.05 - 3.00 %	*Rupiah*
Valuta asing	0%	0%	*Foreign currencies*

19. TABUNGAN *WADIAH*

Tabungan *wadiah* terdiri dari:

19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS

Wadiah savings deposits consist of:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah	1.129.510.746.556	991.915.078.421	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	--	--	*United States Dollar*
	1.129.510.746.556	**991.915.078.421**	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	11.977.588.136	12.923.971.428	*Rupiah*
Jumlah	**1.141.488.334.692**	**1.004.839.049.849**	***Total***

19. TABUNGAN *WADIAH* (Lanjutan)

19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS (Continued)

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah	0%	0%	*Rupiah*
Valuta asing	0%	0%	*Foreign currencies*

20. PINJAMAN YANG DITERIMA

20. BORROWINGS

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pinjaman Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera	200.128.238.300	177.859.945.892	*Home Ownership Credit Loans*
Pinjaman Dana Kelolaan	1.002.708.571	1.002.708.571	*Chanelling*
Jumlah	**201.130.946.871**	**178.862.654.463**	***Total***

a. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau

Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari MoU No.68/MoU/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dan No.69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002.

a. Loans from Government of Riau Province

Loans from the Government of Riau Province consists of MoU No.68/MOU/2002 dated October 2nd, 2002 and 69/MOU/2002 dated October 3, 2002.

b. Pinjaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah, berdasarkan perjanjian nomor: 92/PKS/Sg/2019 dan nomor: 065/PKO/2019 tanggal 19 Desember 2019, Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera/ Rumah Sejahtera Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Loans from the Ministry of Public Works and Public Housing

Agreement between the Center for Housing Financing Fund Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia and PT. Bank Pembangunan Bank Kepri Sharia Business Unit, based on agreement number: 92/PKS/Sg/2019 and number: 065/PKO/2019 dated December 19, 2019, concerning the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) Funds through Credit / Financing of Prosperous Home Ownership / Sharia Prosperous Houses for Low-Income Communities.

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payables*
Pasal 29	33.731.963.840	--	*Article 29*
Utang pajak lainnya			*Other tax payables*
Pasal 4 (2)	3.903.127.266	2.396.444.919	*Article 4 (2)*
Pasal 21	9.547.539.355	218.277.430	*Article 21*
Pasal 22	--	95.063.456	*Article 22*
Pasal 23	392.801.409	--	*Article 23*
PPN dan PPh Lainnya	277.851.782	404.093.540	*Value added tax and others*
Sub Jumlah	**14.121.319.812**	**3.113.879.345**	***Sub Total***
Jumlah	**47.853.283.652**	**3.113.879.345**	***Total***

b. Beban pajak / *b. Tax expense*

Dasar penghitungan PPh Badan atas laba Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah tahun pajak 2022 adalah total laba PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

The basis for calculating the corporate income tax for PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah's profit of fiscal year 2022 is PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) total profit from January 1, 2022 to August 21, 2022 and August 22, 2022 to December 31, 2022.

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Beban pajak kini	104.729.722.240	48.021.771.600	*Current tax expenses*
Beban pajak tahun lalu	--	24.616.876.155	*Last year's tax expenses*
Pajak tangguhan	(40.222.082.325)	(2.701.790.506)	*Deferred tax*
Sub Jumlah	**64.507.639.915**	**69.936.857.249**	***Sub Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

21. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *21. TAXATION (Continued)*

b. Beban pajak (Lanjutan) / *b. Tax expense (Continued)*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Laba sebelum pajak	295.473.585.935	208.083.885.440	*Profit before tax*
Koreksi Fiskal			*Fiscal corrections*
Beda temporer			*Temporary differences*
Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan CKPN atas aset produktif	101.699.101.022	(32.062.660.649)	*The difference is insufficient between the Provision for Asset Quality Assessment (PPKA) and CKPN on productive assets*
Penerimaan kredit hapus buku	(2.869.639.158)	15.047.779.373	*Receipt of write-off credit*
Jasa produksi - bersih	52.167.744.503	(58.742.987.773)	*Production services - net*
Tantiem pengurus	2.798.078.747	2.998.302.837	*Manajemen Tantiem*
Imbalan kerja - bersih	4.134.401.953	2.251.598.587	*Employee benefits - net*
Jumlah beda temporer	**157.929.687.067**	**(70.507.967.624)**	***Total temporary difference***
Beda tetap			*Permanent differences*
Tenaga kerja, umum dan administrasi.	17.111.793.974	44.488.469.341	*Employee, general and administration*
Beban operasional lainnya	207.541.000	22.240.320.203	*Others operating expenses*
Pendapatan non - operasional	(1.084.898.383)	434.962.583	*Non - operating income*
Beban non - operasional	6.406.482.546	13.541.075.648	*Non - operating expenses*
Jumlah beda tetap	**22.640.919.137**	**80.704.827.775**	***Total permanent difference***
Jumlah koreksi fiskal	**180.570.606.203**	**10.196.860.150**	***Total fiscal correction***
Penghasilan kena Pajak	**476.044.192.138**	**218.280.745.590**	***Taxable income***
Pembulatan	**476.044.192.000**	**218.280.745.000**	***Rounding***
• Pajak kini tahun 31 Desember 2022 - 22%	104.729.722.240	--	*• Current tax in December 31, 2022*
• Pajak kini tahun 21 Agustus 2022 - 22%	--	48.021.763.900	*• Current tax in August 21, 2021*
Jumlah Pajak Kini	**104.729.722.240**	**48.021.763.900**	***Total Current Tax***
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
PPh Pasal 25	82.724.625.100	48.021.763.900	*Income taxes article 25*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**82.724.625.100**	**48.021.763.900**	***Total prepaid tax***
Pajak kurang (lebih) bayar	**22.005.097.140**	**--**	***Tax under (over) paid***

c. Aset pajak tangguhan – bersih / *c. Deferred tax assets – net*

	Desember / *December* 31, 2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss***	**Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Kewajiban jasa produksi	5.936.707.874	11.432.882.584	--	17.369.590.458	*Liabilities production services*
Kewajiban tantiem	659.634.208	610.686.079	--	1.270.320.287	*Liabilities tantiem*
Kewajiban imbalan pasca kerja	6.226.651.958	909.568.425	--	7.136.220.383	*Post-employment benefits obligation*
Perbedaan CKPN pinjaman atas PPKA pinjaman	(40.618.103.942)	27.939.345.281	--	(12.678.758.661)	*Different of loans ECL over PPKA loans*
Saldo pinjaman hapus buku	44.382.569.401	(670.400.044)	--	43.712.169.357	*Write-off loans balance*
Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan comprehensive lain	18.213.535.799	-	429.826.461	18.643.362.260	*Marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**34.800.995.298**	**40.222.082.325**	**429.826.461**	**75.452.904.084**	***Total***

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan – bersih (Lanjutan)

21. TAXATION *(Continued)*

c. Deferred tax assets – net *(Continued)*

	Agustus / *August* 21, 2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss***	**Dikreditkan Ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Kewajiban jasa produksi	18.860.165.184	(12.923.457.310)	--	5.936.707.874	*Liabilities production services*
Kewajiban tantiem	--	659.634.208	--	659.634.208	*Liabilities tantiem*
Kewajiban imbalan pasca kerja	5.731.300.268	495.351.690	--	6.226.651.958	*Post-employment benefits obligation*
Perbedaan CKPN pinjaman atas PPKA pinjaman	(33.564.318.599)	(7.053.785.343)	--	(40.618.103.942)	*Different of loans ECL over PPKA loans*
Saldo pinjaman hapus buku	41.072.057.939	3.310.511.462	--	44.382.569.401	*Write-off loans balance*
Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan comprehensive lain	-	-	18.213.535.799	18.213.535.799	*Marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah	**32.099.204.792**	**(15.511.745.293)**	**18.213.535.799**	**34.800.995.298**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary difference which creates deferred tax assets.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang- Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, and stipulates Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Reduction of Income Tax Rates for Domestic Corporate Taxpayers in the Form of a Public Company and effective as of June 19, 2020. The regulation stipulates a reduction in the income tax rate of domestic corporate taxpayers from 25% to 22% for the fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards.

Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya menetapkan tarif PPh Badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22%, dimana pemerintah membatalkan peraturan sebelumnya yaitu UU No. 2 tahun 2020 yang menyebutkan tarif PPh Badan sebesar 20%.

On October 29, 2021, the Government has ratified Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates that the corporate income tax rate for 2022 is 22%, wherein the government canceled the previous regulation, Law No. 2 of 2020 which stated that the corporate income tax rate was 20%.

22. IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawan yang memenuhi syarat terdiri dari program, Cuti Besar, Penghargaan Masa Bhakti (PMB), Tunjangan Hari Tua (THT), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Program Pensiun Iuran Pasti, pensiun manfaat pasti.

Valuasi aktuaria atas imbalan kerja PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) per 31 Desember 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Indra Catarya Situmeang dan Rekan, berdasarkan Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja Nomor: 037/LA-IK/KKAICS/II-2023 Tanggal 6 Februari 2023. Jumlah liabiities (aset) neto yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 adalah Rp32.437.365.356.

Kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 tidak termasuk Program Imbalan Kerja selain PPMP dan THT (Program Pensiun Manfaat Pasti) sebesar Rp32.437.365.376 dan Rp28.302.963.423 karena Bank sudah bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perjanjian Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005. Kemudian Addendum I Tanggal 8 September 2006.

Diluar program pensiun tersebut diatas PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menempatkan program iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BNI dengan saldo 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 sebesar Rp155.905.000.191 dan Rp146.675.873.786 dan program tunjangan hari tua yang dikelola PT Asuransi Jiwasraya dengan saldo per 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 sebesar Rp73.289.232.989 dan Rp73.289.232.989.

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all qualified employees which consist of Annual Leave, Service Pay Benefit (PMB), (THT), Pension Preparation Period (MPP), defined dues pension, defined benefit pension (Dapen).

Actuarial valuation of employee benefits of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) as of December 31, 2022 was conducted by Actuarial Consulting Firm Indra Catraya Situmeang and Partners, based on Actuarial Report on Employee Benefits Valuation Number: 037/LA-IK/KKAICS/II-2023 dated February 6, 2023. The total net liabilities (assets) recognized in the Statement of Financial Position as of December 31, 2022 is Rp32,437,365,376.

Post-employment benefits liabilities presented in the financial statements as of December 31, 2022 and August 21, 2022 do not include Employee Benefits Program other than PPMP and THT (Defined Benefit Pension Program) amounted to Rp32,437,365,376 and Rp28,302,963,423 because the Bank has collaborated with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Agreement on the Management of Group Old Age Benefits Program No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18, 2005. Then Addendum I dated September 8, 2006.

Apart from the pension program mentioned above, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has a defined contribution program managed by DPLK BNI with a balance as of December 31, 2022 and August 21, 2022 amounted to Rp155,905,000,191 and Rp146,675,873,786 and an old-age benefit program managed by PT Asuransi Jiwasraya with a balance as of December 31, 2022 and August 21, 2022 amounted to Rp73,289,232,989 and Rp73,289,232,989.

22. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Disajikan dalam neraca			*Presented on the balance sheet*
Imbalan cuti besar	17.478.179.447	15.008.490.372	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	14.959.185.929	13.294.473.051	*Future Award Program*
Jumlah	**32.437.365.376**	**28.302.963.423**	***Total***

Disajikan pada Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja:

Employee Benefits Valuation Actuarial Report:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Imbalan cuti besar	17.478.179.447	15.008.490.372	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	14.959.185.929	13.294.473.051	*Future Award Program*
Jumlah	**32.437.365.376**	**28.302.963.423**	***Total***

Imbalan cuti besar

Long services leave allowance

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Amount recognized in the statement of profit or loss in respect of the post-employement benefit are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Beban jasa kini	7.099.540.396	6.728.468.845	*Current cost*
Beban bunga	904.865.301	904.865.301	*Interest cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	(4.257.110.941)	(6.355.728.465)	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**3.747.294.756**	**1.277.605.681**	***Total***

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	17.478.179.447	15.008.490.372	*Present value of unfunded*

22. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movements in the presents value of financial position arising from post-employement benefit are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Saldo awal	15.008.490.372	13.730.884.691	*Beginning Balance*
Beban jasa kini	3.747.294.756	1.277.605.681	*Currents services cost*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(1.277.605.681)	-	*Actuarial gain (loss)*
Saldo Akhir	**17.478.179.447**	**15.008.490.372**	***Ending Balance***

Program penghargaan masa bakti

Future Award Program

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Beban jasa kini	-	-	*Current cost*
Biaya jasa lalu vested	8.839.997.424	10.490.903.119	*Past service costs vested*
Beban bunga	759.230.237	759.230.237	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	(6.090.096.101)	(9.198.184.926)	*Remeasurement other employee benefit*
Jumah	**3.509.131.560**	**2.051.948.430**	***Total***

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	14.959.185.929	13.294.473.051	*Present value of unfunded*
Mutasi nilai posisi keuangan saat ini yang timbul dari manfaat pasca kerja adalah sebagai berikut:			*Movements in the presents value of financial position arising from post-employement benefit are as follows:*
Saldo awal	13.294.473.070	12.320.480.164	*Beginning Balance*
Beban jasa kini	8.976.487.597	10.957.256.592	*Currents services cost*
Biaya jasa lalu vested	(381.837.394)	54.762.503	*Past service costs vested*
Beban bunga	759.230.237	759.230.237	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(1.599.071.500)	(1.599.071.500)	*Benefit payment*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(6.090.096.101)	(9.198.184.926)	*Actuarial gain (loss)*
Saldo akhir	**14.959.185.909**	**13.294.473.070**	***Ending balance***

22. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Program Tunjangan Hari Tua

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

Program Masa Persiapan Pensiun

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program Pensiun Iuran Pasti

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No.022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 (diaudit) dan 21 Agustus 2022 (tidak diaudit) diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor LAI No.00004/2.1055/AU.1/08/0842-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES *(Continued)*

Mutual aid pension plan

The cooperation agreement between the Bank and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18, 2005.

Program Preparation Pension

Program preparation pension is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Defined Contribution Pension Plan

In accordance cooperation agreement document No.022/DLK/1/2013 dated June 24th, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Pension Plan

Pension Plan managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

The Financial Statements of Pension Fund of for Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah for the years ended Desember 31, 2022 (audited) and August 21, 2022 (unaudited) have been audited by another independent auditor with dated January 31, 2022 with LAI number No.00004/2.1055/AU.1/08/0842-2/1/I/2022 dated January 31, 2022.

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Laporan nilai kini aktuarial			*Actuarial present value statement*
• Jumlah aset neto	446.397.870.076	440.276.255.933	*Total net assets •*
• Selisih kewajiban aktuaria	(35.695.736.076)	(29.962.978.933)	*difference actuarial liability •*
Kewajiban aktuaria akhir tahun	**410.702.134.000**	**410.313.277.000**	***Actuary liability at the year end***

22. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Iuran normal bulanan			*Monthly normal contribution*
• Iuran Normal Peserta	877.222.800	1.501.767.325	*Attendance* •
• Iuran Normal Pemberi kerja	3.284.491.644	5.097.313.368	*Job provider* •
Jumlah	**4.161.714.444**	**6.599.080.693**	***Total***

Status aset program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

The employee benefits assets status as of December 31, 2022 and August 21, 2021 are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Jumlah aset neto			*Total net assets*
• Aset neto awal tahun	440.276.255.933	425.711.779.757	*Net assets beginning of year* •
• Penyesuaian	(44.401.664)	-	*Adjustment* •
• Kenaikan (penurunan) aset bersih	6.166.015.807	14.564.476.176	*Increase (decrease) in net assets* •
Aset neto akhir tahun	**446.397.870.076**	**440.276.255.933**	***Net assets end of year***

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Jumlah imbalan pasca kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:			*Total of the Company post-employment benefits is as follows:*
Imbalan pasca kerja	41.881.653.376	41.007.594.379	*Post-employment benefits*

Aset Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah terutama terdiri dari obligasi, Surat Berharga dan deposito berjangka.

Pension Fund assets of Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah consist mainly of bonds, marketable securities and time deposits.

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit assets (liabilities) during the year:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Kenaikan (penurunan) aset bersih			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha bersih	18.079.720.530	32.250.822.611	*Operation Income* •
• Peningkatan (penurunan) nilai investasi	(5.141.186.652)	(4.894.815.146)	*Increase(decrease) of investment value* •
• Kontribusi pemberi kerja	4.161.714.444	6.599.080.693	*Contribution of the companyn* •
• Imbalan yang dibayarkan	(19.108.890.763)	(19.390.611.982)	*Paid reward* •
Jumlah	**(2.008.642.441)**	**14.564.476.176**	***Total***

22. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Pendapatan imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Employee benefits income for the periods ended December 31, 2022 and August 21, 2022 are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Hasil Usaha			*Business Results*
• Hasil usaha investasi	23.560.033.166	39.832.650.654	*Investment Income* •
• Beban investasi	(237.065.432)	(353.997.463)	*Investment Expense* •
• Beban operasional	(5.281.205.154)	(7.379.269.004)	*Operating expenses* •
• Pendapatan dan beban lain-lain	37.957.950	151.438.424	*Income and other Expense* •
• Pajak penghasilan	-	-	*Income Tax* •
Jumlah	**18.079.720.530**	**32.250.822.611**	***Total***

Penyusunan Laporan Aktuaris Dana Pensiun Bank Pembanganunan Daerah Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2022 berdasarkan laporan aktuaria PT Dian Artha Tama Aktuaria dengan laporannya No.011/LA/DAT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Preparation of the Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Pension Fund Actuary Report as of August 22, 2022 based on the actuarial report of PT Dian Artha Tama Aktuaria with its report No.011/LA/DAT/I/2021 dated January 19, 2021.

Jumlah kewajiban yang berkaitan dengan program pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah secara keseluruhan sebagai berikut:

Total liabilitiy related to Pension Fund of Bnak Pembangunan Daerah riau Kepri Syariah overall are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
• Kekayaan untuk pendanaan	446.397.870.076	440.276.255.933	*Wealth for funding* •
• Liabilitas Solvabilitas	410.702.134.000	410.313.277.000	*Solvency Liability* •
• Nilai Kini Aktuaria	410.702.134.000	410.313.277.000	*Current Value of Actuarial* •
• Surplus (Defisit)	(35.695.736.076)	(29.962.978.933)	*Surplus (Deficit)* •
• Rasio/ kualitas pendanaan	109%	107%	*Funding ratio / quality* •

Iuran Normal 23,02% per 31 Desember 2022 dan 20,46% tahun 21 Agustus 2022 terhadap Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Normal Contribution 23.02% as of December 31, 2022 and 20.46% in August 21, 2022 towards Basic Pension Income (PhDP).

22. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

22. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja di atas adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation for all types of employee benefits are:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
• Tingkat Diskonto	7,01% per tahun	7,01% per tahun	*Discount rate* •
• Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	8% per tahun	8% per tahun	*Salary Inncrease Rate* • *Basic Pension Per Year*
• Tingkat Mortalitas	1=TMI 2019	1=TMI 2019	*Mortality rate* •
• Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian	10% dari tingkat kematian	*Disability rate* •
• Tingkat Pengunduran Diri			*Resignation rate* •
< 36 tahun	0,00%	0,00%	*age < 36*
< 56 tahun	0,00%	0,00%	*age < 56*

23. LIABILITAS LAIN-LAIN

23. OTHER LIABILITIES

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Cadangan THR dan Kepegawaian Lainnya	45.569.691.363	31.552.515.909	*Provision of THR and other employee expenses*
Setoran Jaminan	8.431.565.746	3.296.599.867	*Guarantee deposits*
Rekening Sementara	2.128.572.345	1.000.100.000	*Temporary accounts*
Pendapatan Administrasi Pembiayaan Ditangguhkan	75.468.714	23.309.355.072	*Deferred financing administration income*
Lain-lainnya	475.737.686	23.307.631.119	*Others*
Jumlah	**56.681.035.854**	**82.466.201.967**	***Total***

Rekening sementara terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, rekening pendamping, dan rekening titipan pembayaran asuransi karyawan.

Temporary account represents account for financing installment, companion accounts, and deposit accounts for employee's insurance payments.

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk sewa gedung dan jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on building and network leases, ATM maintenance fees and Financial Services Authority's fee.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari ujrah diterima dimuka atas *supply chain financing* dan *buyer chain financing*.

Deferred Income consists of deferred ujrah income of supply chain financing and buyer chain financing.

Lain-lain terdiri dari rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of administrative accounts, clearance intermediaries and others.

23. LIABILITAS LAIN-LAIN (Lanjutan)

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

23. OTHER LIABILITIES (Continued)

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from E-Channel. Infaq and sadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

24. GIRO *MUDHARABAH*

24. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Pihak ketiga - bukan bank			***Third parties - non-bank***
Rupiah	1.075.553.625.174	463.702.161.973	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	12.733.813.359	14.204.893.992	*United States Dollar*
Dolar Singapura	3.751.556.478	3.744.994.240	*Singapore Dollar*
Euro Europa	153.946.346	53.413.527	*Europe Euro*
Sub jumlah	**1.092.192.941.357**	**481.705.463.732**	***Sub total***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	2.390.855.947.988	3.945.397.985.198	*Rupiah*
Sub jumlah	**2.390.855.947.988**	**3.945.397.985.198**	***Sub total***
Pihak ketiga - bank			***Third parties - bank***
Rupiah	33.063.629.852	35.224.214.708	*Rupiah*
Sub jumlah	**33.063.629.852**	**35.224.214.708**	***Sub total***
Jumlah	**3.516.112.519.197**	**4.462.327.663.638**	***Total***

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

Mudharabah demand deposits is a current account product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee, or other payment instruction method according to the agreement.

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Rupiah	0,72%	0,72%	*Rupiah*
Valuta asing	0,22%	0,22%	*Foreign currencies*

25. TABUNGAN *MUDHARABAH*

25. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	6.544.823.090.330	6.085.896.036.929	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	--	--	*United States Dollar*
Dolar Singapura	--	--	*Singapore Dollar*
Euro Europa	--	--	*Europe Euro*
Sub jumlah	**6.544.823.090.330**	**6.085.896.036.929**	***Sub total***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	--	--	*Rupiah*
Sub jumlah	**--**	**--**	***Sub total***
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	16.086.058.349	14.108.004.625	*Rupiah*
Sub jumlah	**16.086.058.349**	**14.108.004.625**	***Sub total***
Jumlah	**6.560.909.148.679**	**6.100.004.041.554**	***Total***

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Rupiah	0,14% - 2,24%	0,14% - 2,24%	*Rupiah*
Valuta asing	0,00%	0,00%	*Foreign currencies*

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* / *26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang: / *a. By currency:*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	4.659.867.049.392	12.695.753.316.919	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	80.095.005.446	4.028.564.781	*United States Dollar*
Dolar Singapura	1.536.126.158	--	*Singapore Dollar*
Euro Europa	--	--	*Euro Europe*
Sub jumlah	**4.741.498.180.996**	**12.699.781.881.700**	***Sub total***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah	10.955.503.882.795	57.354.743.750	*Rupiah*
Sub jumlah	**10.955.503.882.795**	**57.354.743.750**	***Sub total***
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	44.125.000.000	89.175.000.000	*Rupiah*
Sub jumlah	**44.125.000.000**	**89.175.000.000**	***Sub total***
Jumlah	**15.741.127.063.791**	**12.846.311.625.450**	***Total***

b. Berdasarkan jangka waktu: / *b. By period:*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	4.256.457.791.098	6.573.740.373.380	*1 month*
3 bulan	4.966.814.320.000	1.570.305.370.000	*3 months*
6 bulan	853.256.207.618	810.992.557.618	*6 months*
12 bulan	5.564.737.451.014	3.864.873.097.215	*12 months*
12 bulan lebih	18.230.162.457	22.371.662.457	*more than 12 months*
Sub jumlah	**15.659.495.932.187**	**12.842.283.060.670**	***Sub total***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	79.835.106.033	1.846.066.913	*1 month*
3 bulan	182.061.913	173.524.562	*3 months*
6 bulan	77.837.500	74.187.500	*6 months*
12 bulan	--	--	*12 months*
Sub jumlah	**80.095.005.446**	**2.093.778.975**	***Sub total***
Dolar Singapura			***Singapore Dollar***
1 bulan	1.253.526.522	1.139.764.845	*1 month*
3 bulan	--	534.453.500	*3 months*
6 bulan	138.268.280	127.488.538	*6 months*
12 bulan	144.331.356	133.078.922	*12 months*
Sub jumlah	**1.536.126.158**	**1.934.785.805**	***Sub total***
Jumlah	**15.741.127.063.791**	**12.846.311.625.450**	***Total***

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan)

c. Beberapa Deposito *mudharabah* dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank. (Catatan 8, 10 dan 11).

d. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)

c. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the receivable and financing Bank's (Note 8, 10 and 11).

d. Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.

e. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Rupiah	2,24% - 7,75%	2,24% - 7,75%	*Rupiah*
Valuta asing	0,36% - 3,90%	0,36% - 3,90%	*Foreign currencies*

27. MODAL SAHAM

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri sebesar Rp2.000.000.000,- yang berasal Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri telah ditata usahakan berdasarkan Surat PT Bank Riau Kepri No.106/TS.01/DIR/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan telah di telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No.S-195/KO.053/2022 tanggal 28 April 2022 sehingga modal disetor posisi menjadi Rp1.105.160.700.000

Penambahan modal disetor PT.Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 21 Agustus tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000,- yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau, telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, berdasarkan surat PT. Bank Riau Kepri (Perseroda) No.501/TS.01/DIR/2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK melalui surat OJK nomor S- 249/KO.053/2022 tanggal 15 Juni 2022 sehingga modal disetor Bank posisi 21 Agustus 2022 menjadi Rp1.205.160.700.000,-.

27. SHARE CAPITAL

The additional of paid in capital of PT Bank Riau Kepri amounting to Rp2,000,000,000,- originating from the Sharia Consumer Cooperative Amanah Riau Kepri has been administered based on the letter of PT Bank Riau Kepri No.106/TS.01/DIR/2022 dated January 31, 2022 and has been administered in the OJK supervision administration based on OJK Letter No.S-195/KO.053/2022 dated April 28, 2022 so that the paid-up capital position becomes Rp1,105,160,700,000

The additional paid in capital of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) on August 21, 2022 amounting to Rp100,000,000,000,- originating from the Riau Provincial Government, has been administered in the administration of OJK supervision, based on a letter from PT. Bank Riau Kepri (Perseroda) No.501/TS.01/DIR/2022 dated May 19, 2022 with and has been administered in the OJK supervision administration through OJK letter number S-249/KO.053/2022 dated June 15, 2022 so that the Bank's paid-up capital on August 21, 2022 becomes Rp1,205,160,700,000,-.

27. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp.2.000.000.000,- yang berasal dari Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri, dan dari Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp.2.080.000.000,- telah disampaikan kepada OJK melalui Surat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) No.757/TS.01/DUIR/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan belum mendapat balasan dari pihak OJK, apabila setoran modal dari Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri dan dari setoran modal Pemerintah Kabupaten Natuna telah tercatat pada Administarsi Pengawasan OJK, maka total modal disetor Bank posisi Rp1.209.240.700.000,-.

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

27. SHARE CAPITAL (Continued)

The additional paid in capital of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) on December 31, 2022 of Rp2,000,000,000,- from the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative, and from the Natuna Regency Government of Rp2,080,000,000,- has been submitted to OJK through a letter from PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) No.757/TS.01/DUIR/2022 dated December 23, 2022 and has not received a reply from the OJK, if the capital deposit from the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative and from the capital deposit of the Natuna Regency Government has been recorded in the OJK Supervision Administration, then the total paid-up capital of the Bank is Rp1,209,240,700,000,-

Composition of Authorized capital December 31, 2022 is as follow:

Perkiraan/ *Akun*	Lembar saham/ *Per share*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *Total*	**40.000.000**		**4.000.000.000.000**
Modal Ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	12.022.407	100.000	1.202.240.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	70.000	100.000	7.000.000.000
Jumlah / *Total*	**12.092.407**		**1.209.240.700.000**

31 Desember/ *December 31,* 2022

Pemegang Saham/ *Shareholder*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Lembar saham ditempatkan dan disetor penuh / *Amount of issued and fully-paid share capital*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *Par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
Provinsi Riau	42,93%	5.191.682	100.000	519.168.200.000
Provinsi Kepulauan Riau	0,99%	120.000	100.000	12.000.000.000
Kota Pekanbaru	1,24%	150.000	100.000	15.000.000.000
Kabupaten Kampar	8,70%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
Kabupaten Bengkalis	10,88%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
Kabupaten Indragiri Hulu	0,53%	64.007	100.000	6.400.700.000
Kabupaten Indragiri Hilir	5,61%	678.772	100.000	67.877.200.000
Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,71%	327.110	100.000	32.711.000.000
Kota Dumai	0,43%	52.030	100.000	5.203.000.000
Kabupaten Pelalawan	2,64%	319.668	100.000	31.966.800.000
Kabupaten Rokan Hulu	0,68%	82.807	100.000	8.280.700.000
Kabupaten Rokan Hilir	3,07%	371.351	100.000	37.135.100.000
Kabupaten Kuantan Singingi	1,26%	152.086	100.000	15.208.600.000
Kabupaten Bintan	3,15%	380.789	100.000	38.078.900.000
Kota Batam	4,13%	500.000	100.000	50.000.000.000
Kabupaten Karimun	0,59%	71.900	100.000	7.190.000.000
Kabupaten Natuna	2,98%	360.181	100.000	36.018.100.000
Kota Tanjung Pinang	0,69%	83.913	100.000	8.391.300.000
Kabupaten Kep. Meranti	4,96%	600.000	100.000	60.000.000.000
Kabupaten Lingga	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,65%	78.237	100.000	7.823.700.000
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
	100%	**12.092.407**		**1.209.240.700.000**

27. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Komposisi kepemilikan modal disetor per 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

27. SHARE CAPITAL (Continued)

Composition of Authorized capital August 21, 2022 is as follow:

Perkiraan/ *Akun*	Lembar saham/ *Per share*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	**40.000.000**		**4.000.000.000.000**
Modal Ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	12.001.607	100.000	1.200.160.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	50.000	100.000	5.000.000.000
Jumlah / *total*	**12.051.607**		**1.205.160.700.000**

21 Agustus/ *August 21*, 2022

Pemegang Saham/ *Shareholder*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Lembar saham ditempatkan dan disetor penuh / *Amount of issued and fully-paid share capital*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *Par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
Provinsi Riau	43,08%	5.191.682	100.000	519.168.200.000
Provinsi Kepulauan Riau	1,00%	120.000	100.000	12.000.000.000
Kota Pekanbaru	1,24%	150.000	100.000	15.000.000.000
Kabupaten Kampar	8,73%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
Kabupaten Bengkalis	10,92%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
Kabupaten Indragiri Hulu	0,53%	64.007	100.000	6.400.700.000
Kabupaten Indragiri Hilir	5,63%	678.772	100.000	67.877.200.000
Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,71%	327.110	100.000	32.711.000.000
Kota Dumai	0,43%	52.030	100.000	5.203.000.000
Kabupaten Pelalawan	2,65%	319.668	100.000	31.966.800.000
Kabupaten Rokan Hulu	0,69%	82.807	100.000	8.280.700.000
Kabupaten Rokan Hilir	3,08%	371.351	100.000	37.135.100.000
Kabupaten Kuantan Singingi	1,26%	152.086	100.000	15.208.600.000
Kabupaten Bintan	3,16%	380.789	100.000	38.078.900.000
Kota Batam	4,15%	500.000	100.000	50.000.000.000
Kabupaten Karimun	0,60%	71.900	100.000	7.190.000.000
Kabupaten Natuna	2,82%	339.381	100.000	33.938.100.000
Kota Tanjung Pinang	0,70%	83.913	100.000	8.391.300.000
Kabupaten Kep. Meranti	4,98%	600.000	100.000	60.000.000.000
Kabupaten Lingga	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,65%	78.237	100.000	7.823.700.000
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,41%	50.000	100.000	5.000.000.000
	100%	**12.051.607**		**1.205.160.700.000**

28. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Dana setoran modal	2.084.940.000	2.084.940.000	*Paid Capital*
Provinsi Riau	405	405	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	18.217	18.217	*Pekanbaru City*
Kota Tanjung Pinang	35.731	35.731	*Tanung Pinang City*
Kota Batam	11.793	11.793	*Batam City*
Kabupaten Kampar	18.574	18.574	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	29.804	29.804	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	11.089	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	102.548	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Bintan	22.286	22.286	*Bintan Regency*
Kabupaten Pelalawan	72.657	72.657	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	37.421	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Natuna	--	2.080.000.000	*Natuna Regency*
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	--	--	*Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)*
Jumlah	**2.085.300.525**	**4.165.300.525**	***Sub Total***

Tambahan modal disetor Pemegang Saham seri A Bupati Kabupaten Natuna sebesar Rp2.080.000.000,- telah dilakukan berdasarkan surat pernyataan Bupati Natuna, dengan surat pernyataan No. 032/339/BPKAD-Set/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Additional paid-up capital of series A shareholders of the Regent of Natuna Regency amounting to Rp2,080,000,000,- has been carried out based on the statement letter of the Regent of Natuna, with statement letter No. 032/339/BPKAD-Set/XII/2021 dated December 8, 2021.

Tambahan modal disetor per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Additional paid-in capital as of December 31, 2022 is as follows:

Pemegang Saham / Shareholders	Desember / *December* 31, 2022			
	Saldo awal tahun/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additional***	**Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital***	**Saldo Akhir/ Ending balance**
Dana setoran modal	2.084.940.000	--	--	2.084.940.000
Provinsi Riau	405	--	--	405
Kota Pekanbaru	18.217	--	--	18.217
Kota Tanjung Pinang	35.731	--	--	35.731
Kota Batam	11.793	--	--	11.793
Kabupaten Kampar	18.574	--	--	18.574
Kabupaten Bengkalis	29.804	--	--	29.804
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	--	--	11.089
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	--	--	102.548
Kabupaten Bintan	22.286	--	--	22.286
Kabupaten Pelalawan	72.657	--	--	72.657
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	--	--	37.421
Kabupaten Natuna	2.080.000.000	--	(2.080.000.000)	--
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	-	2.000.000.000	(2.000.000.000)	--
Jumlah / *Total*	**4.165.300.525**	**2.000.000.000**	**(4.080.000.000)**	**2.085.300.525**

28. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (Continued)

Tambahan modal disetor per 21 Agustus 2022:

Additional paid-in capital as of August 21, 2022:

Pemegang Saham / Shareholders	Agustus / *August* 21, 2022			
	Saldo awal tahun/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir/ Ending balance
Dana setoran modal	2.084.940.000	--	--	2.084.940.000
Provinsi Riau	405	100.000.000.000	(100.000.000.000)	405
Kota Pekanbaru	18.217	--	--	18.217
Kota Tanjung Pinang	35.731	--	--	35.731
Kota Batam	11.793	--	--	11.793
Kabupaten Kampar	18.574	--	--	18.574
Kabupaten Bengkalis	29.804	--	--	29.804
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	--	--	11.089
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	--	--	102.548
Kabupaten Bintan	22.286	--	--	22.286
Kabupaten Pelalawan	72.657	--	--	72.657
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	--	--	37.421
Kabupaten Natuna	--	2.080.000.000	--	2.080.000.000
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	2.000.000.000	--	(2.000.000.000)	--
Jumlah / *Total*	**4.085.300.525**	**102.080.000.000**	**(102.000.000.000)**	**4.165.300.525**

29. SALDO LABA

29. RETAINED EARNINGS

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Telah ditentukan penggunaannya	--	1.774.825.929.991	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	237.699.719.147	194.179.417.804	*Unappropriated*
Saldo sebelum perubahan usaha	1.969.005.347.794	--	*Balance before business changes*
Jumlah	**2.206.705.066.941**	**1.969.005.347.795**	***Sub Total***

Saldo sebelum perubahan usaha

Balance before business changes

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
- Saldo awal	--	--	*Beginning balance -*
- Cadangan umum	1.774.825.929.991	1.774.825.929.991	*General reserves -*
- Belum ditentukan penggunaannya	194.179.417.803	--	*Purpose reserves -*
Jumlah	**1.969.005.347.794**	**1.774.825.929.991**	***Sub Total***

Cadangan Umum

Penggunaan cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada perundang-undangan serta digunakan untuk menutup kerugian Bank.

General reserves

The use of general reserves is determined by the General Meeting of Shareholders by reference to the laws and used to cover the Bank's losses.

29. SALDO LABA (Lanjutan)

Saldo sebelum perubahan usaha (Lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2021 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH tanggal 14 Juni 2022 Nomor 17. RUPS memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021;
- Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan tahun buku 2021;

  a. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi pegawai 22,5% dan tantiem pengurus 2,5%;

  b. Menyetujui untuk tahun buku 2022 komposisi cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus sama dengan tahun buku 2021;

- Menyetujui Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2022 sebesar Rp21.000.000.000 (duapuluh satu miliar rupiah) kepada pemegang saham seri A;

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2022;

- Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2022 adalah sebesar Rp49.259.459.475,-

29. RETAINED EARNINGS *(Continued)*

Balance before business changes *(Continued)*

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2021 based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH dated June 14, 2022 Number 17. The GMS decided:

- *Approved the 2021 Fiscal Year Annual Report;*
- *Approved the allocation of the use of the company's net profit and distribution of dividends for the 2021 financial year;*

  a. Approved the use of reserves for employee production services of 22.5% and management bonuses of 2.5%;

  b. Approved for the 2022 financial year the composition of the reserves for production services for employees and management bonuses is the same as for the 2021 financial year;

- *Approved the Provision of Partnership Development Funds for 2022 in the amount of Rp21,000,000,000 (twenty one billion rupiahs) to series A shareholders;*

- *Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to establish a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2022 financial year;*

- *Approved that the remuneration budget for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in 2022 is Rp49,259,459,475,-.*

29. SALDO LABA (Lanjutan)

29. RETAINED EARNINGS (Continued)

Saldo laba telah ditentukan penggunanya (Lanjutan)

Appropriated retained earnings *(Continued)*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Saldo awal	194.179.417.803	455.259.363.458	*Beginning balance*
Dampak perubahan usaha	(194.179.417.803)	--	*Change in business activities*
Dampak perubahan PSAK 71 ke ISAK 102	6.733.773.127	--	*Impact of the change from SFAS 71 to IFAS 102*
Laba periode berjalan	230.965.946.020	119.933.492.392	*Profit for the period*
Pembentukan cadangan umum	--	(152.405.375.219)	*Appropriation of general reserve*
Pembagian Deviden	--	(228.608.062.828)	*Payment of dividend*
Saldo akhir	**237.699.719.147**	**194.179.417.803**	***Ending balance***

Penihilan saldo laba

Seperti dijelaskan dalam catatan 1a atas laporan keuangan Bank, dimana Bank telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No.KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Bank siap beroperasi secara penuh dan efektif memulai aktivitas perbankan syariah pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai Bank Umum Syariah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.64/POJK.03/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Bank harus menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Dan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.03/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, Bank harus menyajikan Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Retained earnings balance

As describe in Note 1a to the Bank's financial statements, where the Bank has obtained permission to change business activities that have been issued by the Financial Services Authority (OJK) as stated in Decree No.KEP-93/D.03/2022 dated July 4, 2022 concerning changes in the business activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The Bank is ready to operate fully and effectively start sharia banking activities on August 22, 2022 as a Sharia Commercial Bank.

Therefore, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No.64/POJK.03/2016 dated December 27, 2016 concerning Changes in Conventional Bank Business Activities to Sharia Banks, Banks must present initial financial statements as a Sharia Bank.

And in accordance with OJK Circular No.2/SEOJK.03/2017 dated January 3, 2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, Banks must present the initial financial statements as a Sharia Commercial Banks that show current year's profit and loss and profit and loss last year have a balance of Rp0,00 (zero rupiah) or nil.

29. SALDO LABA (Lanjutan)

Penihilan saldo laba (Lanjutan)

Dampak dari penerapan peraturan tersebut di atas, maka cadangan dan laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan 21 Agustus 2022 dicatat dalam saldo laba sebagai laba atas perubahan kegiatan usaha. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

29. RETAINED EARNINGS (Continued)

***Retained earnings balance** (Continued)*

The impact of the adoption of the regulations, the reserves and unappropriated retained earnings of up to August 21, 2022 are recorded in retained earnings as retained earnings on changes in business activity. The details are as follows:

	Saldo laba dampak perubahan kegiatan usaha/ *Retained earnings impact of changes in bussiness activities*	
Saldo cadangan	1.774.825.929.991	*Reserved balance*
Saldo laba tahun-tahun sebelumnya	74.245.925.412	*Retained earnings of the previous years*
Laba periode berjalan	119.933.492.392	*Profit for the period*
Jumlah	**1.969.005.347.795**	***Total***

30. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

30. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

	31 Desember/ ***December 31,* 2022**	
Murabahah	714.773.525.876	*Murabahah*
Jumlah	**714.773.525.876**	***Total***

31. PENDAPATAN BAGI HASIL

31. INCOME FROM PROFIT SHARING

	31 Desember/ ***December 31,* 2022**	
Musyarakah	87.202.080.795	*Musyarakah*
Mudharabah	638.556.556	*Mudharabah*
Jumlah	**87.840.637.351**	***Total***

32. PENDAPATAN DARI *IJARAH* – BERSIH

32. INCOME FROM IJARAH – NET

	31 Desember/ ***December 31,* 2022**	
Ijarah dan *ijarah* multijasa	64.868.872.564	*Ijarah and Ijarah multi-services*
	64.868.872.564	
Beban penyusutan, amortisasi, pemeliharaan dan penurunan nilai aset *ijarah*	(54.514.802.851)	*Depreciation, amortisation maintenance expense and impairment of ijarah assets*
	(54.514.802.851)	
Jumlah - bersih	**10.354.069.713**	***Total - net***

33. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *33. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	92.744.247.703	*Income from investments in marketable securities*
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	14.692.416.667	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Bagi hasil penempatan pada bank lain	1.872.208.835	*Profit sharing from placements with other bank*
Pendapatan kas bagi hasil fee *Ujroh* anjak piutang	1.654.869.235	*Cash income for fee revenue Ujroh factoring in receivables*
Lain-lain	5.053.824.717	*Others*
Jumlah	**116.017.567.157**	***Total***

34. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *34. THIRD PARTIES' SHARE ON PROFIT*

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Deposito *mudharabah*	152.433.204.793	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	18.559.864.214	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	17.947.323.247	*Mudharabah savings deposits*
Lain-lain	294.630.065	*Others*
Jumlah	**189.235.022.319**	***Total***

35. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *35. OTHER OPERATING INCOME*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari:

Other operating income consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan imbalan jasa perbankan		*Fee based income from banking services*
Pendapatan transaksi ATM	18.665.247.418	*Income from ATM transactions*
Pendapatan komisi asuransi	11.818.799.316	*Income from insurance commission*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	7.175.681.551	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	5.581.479.853	*Income from saving and demand deposits administration*
Pendapatan jasa pembayaran	607.813.778	*Income from payment services*
Pendapatan *rahn*	508.816.615	*Income from rahn*
Pendapatan kartu kredit	329.154.616	*Income from loan card*
Pendapatan administrasi pembiayaan	294.896.227	*Income from financing administration*

35. PENDAPATAN USAHA LAINNYA (Lanjutan) / *35. OTHER OPERATING INCOME (Continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	37.106.671	*Income from foreign exchange transaction - net*
Pendapatan pembiayaan sindikasi	20.815.141	*Syndicated financing fee*
Pendapatan deviden	20.734.844	*Dividend Income*
Pendapatan transaksi *remittance*	3.401.825	*Income from remittance transactions*
Pendapatan layanan *internet banking*	3.251.849	*Income from internet banking services*
Lainnya	136.151.427	*Others*
Jumlah	**45.203.351.131**	***Total***
Pendapatan lainnya		*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	5.079.192.490	*Recoveries of receivables and financing written-off*
Jumlah - bersih	**50.282.543.621**	***Total - net***

36. BEBAN TENAGA KERJA / *36. PERSONNEL EXPENSES*

Beban tenaga kerja terdiri dari: / *Personnel expenses consist of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Gaji dan upah	76.911.783.638	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	64.808.326.611	*Employee allowances*
Tantiem - Jasa produksi	57.741.486.506	*Tantiem - Productivity bank*
Pendidikan dan pelatihan	24.229.167.297	*Education and training*
Outsourcing	21.349.800.514	*Outsourcing*
Lainnya	43.937.490.039	*Others*
Jumlah	**288.978.054.605**	***Total***

37. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

37. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

General and administrative expenses consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Beban sewa	28.467.259.917	*Rent expenses*
Beban penjaminan	22.581.540.273	*Underwriting expenses*
Beban asuransi	18.514.253.671	*Insurance expenses*
Penyusutan aset tetap	16.334.492.894	*Depreciation of fixed assets*
Beban promosi	14.279.502.006	*Promotion expenses*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	11.686.999.948	*Service and maintenance expenses*
Beban transportasi	10.676.320.880	*Transportation expenses*
Beban barang cetak	8.261.903.240	*Printing expenses*
Beban listrik, air dan gas	5.766.318.700	*Electricity, water and gas expenses*
Beban komunikasi	5.058.445.391	*Communication expenses*
Beban barang dan jasa lain	3.599.179.744	*Other goods & services*
Beban kantor	2.966.227.721	*Office expenses*
Beban lisensi software	1.120.463.031	*Software license expenses*
Lain-lain	10.272.938.929	*Others*
Jumlah	**159.585.846.345**	***Total***

38. BEBAN BONUS

38. BONUS EXPENSES

Beban bonus terdiri dari:

Binus expenses consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Deposito *Mudharabah*	49.039.117.777	*Mudharabah Deposits*
Giro *Mudharabah*	18.465.324.951	*Current Account Mudharabah*
Tabungan *Mudharabah*	7.378.678.771	*Mudharabah Savings*
Giro *wadiah*	72.391.494	*Current Account Wadiah*
Tabungan *wadiah*	51.489.659	*Wadiah Savings*
Jumlah	**75.007.002.652**	***Total***

39. BEBAN LAIN-LAIN

39. OTHER EXPENSES

Beban lain-lain terdiri dari:

Other expenses consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Beban administrasi	3.319.144.640	*Administration expenses*
Beban rapat	1.438.336.409	*Meeting expenses*
Lain-lain	2.748.337.137	*Others*
Jumlah	**7.505.818.186**	***Total***

40. BEBAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF – BERSIH

40. EXPENSES (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS – NET

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih terdiri dari:

Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Piutang (Catatan 8)	85.982.477	*Receivables (Note 8)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 9)	13.582.289	*Funds of qardh (Note 9)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 10)	743.192.990	*Mudharabah financing (Note 10)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 11)	11.711.861.760	*Musyarakah financing (Note 11)*
Jumlah	**12.554.619.516**	***Total***
Pemulihan piutang (Catatan 8)	(45.575.161.264)	*Recovery of Receivables (Note 8)*
Pemulihan pinjaman *qardh* (Catatan 9)	(23.576.333)	*Recovery of Funds of qardh (Note 9)*
Pemulihan pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	(739.501.761)	*Recovery of Mudharabah financing (Note 10)*
Pemulihan Pembiayaan musyarakah (Catatan 11)	(6.768.833.712)	*Recovery of Musyarakah financing (Note 11)*
Jumlah	**(53.107.073.070)**	***Total***
Jumlah - bersih	**(40.552.453.554)**	***Total - net***

41. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

41. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)

Pendapatan (Beban) operasional lainnya terdiri dari:

Other operational income (expenses) consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Selisih Kurs	1.792.031.641	*Foreigne exchange*
Keuntungan penjualan aset tetap	17.700.000	*Gains on sale of fixed assets*
Sewa	2.017.083	*Rent*
Lain-lain	12.091.343.611	*Others income*
Jumlah	**13.903.092.335**	***Total***
Iuran keanggotaan	7.244.254.198	*Member fee*
Kegiatan sosial	3.721.456.407	*Social activities*
Lain-lain	6.972.848.960	*Others expenses*
Jumlah	**17.938.559.565**	***Total***
Jumlah - bersih	**(4.035.467.230)**	***Total - net***

42. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

42. BASIC EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share for the period ended December 31, 2022, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2022	
Laba tahun berjalan	230.965.946.020	*Profit for the year*
Jumlah lembar saham modal disetor (nilai penuh)	12.092.407	*Number of shares capital outstanding (full amount)*
Laba bersih per saham (Nilai penuh)	19.100	*Basic earnings per share (full Rupiah)*

43. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Rincian laporan transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Detail of transaction commitment and contingencies in bank activities are as follow:

a. Komitmen

a. Commitments

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Liabilitas komitmen			*Commitment liabilities*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	553.478.555.382	653.926.854.549	*Uncollection credit facilities from clients*

b. Kontinjensi

b. Contingencies

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Tagihan kontinjensi			*Contingencies claim*
Tagihan bunga dan marjin			*Interest receivable and margin*
Piutang dalam penyelesaian	628.630.501.824	367.838.476.025	*Interest loans*
Liabilitas kontinjensi			*Contingencies liabilities*
Garansi yang diterbitkan	17.935.396.324	14.446.724.801	*Guarantee issued*
Lainnya	391.918.693.454	--	*Others*
Jumlah	**409.854.089.778**	**14.446.724.801**	***Total***

43. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

c. Lainnya

c. Others

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Penerusan kredit	223.626.581.228	211.404.277.060	*Distribution chanelling credit*
Aset produktif yang dihapus buku			*Write-off productive asset*
Aset produktif:			*Productive Asset:*
Kredit yang diberikan	282.500.131.510	285.369.770.668	*Loans*
Lainnya	1.713.115.105	1.453.840.105	*Others*
Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih:			*Write-off productive asset has recovered or successfully billed:*
Kredit yang diberikan	180.995.893.389	174.248.252.409	*Loans*
Jumlah	**688.835.721.232**	**672.476.140.242**	***Total***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Pihak-pihak berelasi terdiri dari entitas induk, Pemerintah Daerah Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Related parties consist of parent company, Local Government of the Republic of Indonesia, Regional Owned Enterprises, Board of Commissioners, Board of Directors and key employees of the Bank and other parties as defined in SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Parties Disclosure"

a. Jenis hubungan

a. Type of relationships

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Related parties from the entity level and/or management are:

No.	*Pihak-pihak berelasi/ Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ Nature of relationship	Transaksi/ Transaction
1	Provinsi Riau / Riau Province	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Deposito (Time deposit).
2	Provinsi Kepulauan Riau	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
3	Kabupaten Bengkalis / Bengkalis Regional Goverment	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
4	Kabupaten Siak Sri Indrapura	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
5	Kabupaten Pelalawan	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Deposito (Time deposit).
6	Kabupaten Indragiri Hulu	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Deposito (Time deposit).
7	Kabupaten Indragiri Hilir	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Deposito (Time deposit).
8	Kota Pekanbaru	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
9	Kota Dumai	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Deposito (Time deposit).
10	Kabupaten Bintan	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
11	Kabupaten Rokan Hilir	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Deposito (time deposit).
12	Kabupaten Kuantan Singingi	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
13	Kota Tanjung Pinang	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
14	Kabupaten Kep. Meranti	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
15	Kabupaten Kampar	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan

a. Type of relationships

No.	*Pihak-pihak berelasi/ Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ Nature of relationship	Transaksi/ Transaction
16	Kabupaten Lingga	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
17	Kabupaten Karimun	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
18	Kota Batam	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account) dan Simpanan Deposito (time deposit)
19	Kabupaten Natuna	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
20	Kabupaten Rokan Hulu	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
21	Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro (current account)
22	Karyawan kunci / Key Employees	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut / Directors, Commissioners, Heads of Branches, Heads of Divisions and close members of the families of such individuals	Tabungan (saving), deposito (time deposit) dan Kredit yang diberikan (Loans)
23	PD. BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Tabungan (saving), Simpanan Giro (current account)
24	PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Giro (current account), Simpanan Deposito (Time deposits)
25	PT Penjaminan Kredit Daerah Prop. Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Giro (current account), Simpanan Tabungan (saving) dan Simpanan Deposito (Time deposits)
26	PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Giro (current account) dan Simpanan Deposito (Time deposits)
27	Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Giro (current account)
28	PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Tabungan (saving)
29	PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Giro (current account) dan Pinjaman (Loan)
30	PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Tabungan (saving), Simpanan Giro (current account)
31	BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / Owned by the ultimate shareholders.	Simpanan Giro (current account)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

b. Transaction with related parties

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
ASET			***ASSET***
Pembiayaan yang diberikan			*Financing provided*
Karyawan kunci	1.202.690.047	1.449.446.115	*Key management*
% terhadap jumlah aset	0,0043%	0,0047%	*% with compare to total asset*
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Simpanan *wadiah*			*Deposits* wadiah
Simpanan dari nasabah (catatan 18, 19)	48.778.362.086	22.434.057.741	*Deposits from customer liabilities (Note 18, 19)*
% terhadap jumlah liabilitas	0,1740%	0,0893%	*% with compare to total*
Simpanan *Mudharabah*			*Deposits mudharabah*
Simpanan dari nasabah dan bank lain (catatan 24, 25, 26)	13.346.359.830.783	4.002.752.728.948	*Deposits from customer and other Bank (Note 24, 25, 26)*
% terhadap jumlah liabilitas	47,6138%	15,9354%	*% with compare total liabilities*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama. Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

c. Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022. Kompensasi terhadap personil manajemen kunci Bank (diluar dari Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaction with related parties *(Continued)*

Deposit from customer represent deposits from key management, province and regional goverment and The company which owned share by the ultimate shareholders. Deposit from other Bank represent deposits from Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which owned share by the ultimate shareholders.

c. Commitment and contingencies

There were no commitments and contingencies to related parties for the year ended and December 31, 2022 and August 21, 2022. Compensation of key management personnel of the Bank (excluded from Commisioners and Director) are follows:

	2022		
	31 Desember/ ***December 31***	**21 Agustus/** ***August 21***	
Gaji	12.300.377.000	8.196.800.485	*Salary*
Tunjangan	6.201.817.000	4.132.804.758	*Allowance*
Jasa produksi	7.093.453.464	4.726.978.920	*Production bonuses*
Imbalan jangka panjang	2.138.061.471	1.424.774.485	*Long-term benefit*
Jumlah	**27.733.708.935**	**18.481.358.648**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

45. RISK MANAGEMENT

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Bank memiliki pengungkapan terhadap risiko di bawah ini yang berasal dari aktivitas bisnis dan instrumen keuangan:

a. Risiko Kredit
b. Risiko Pasar
c. Risiko Likuiditas
d. Risiko Operasional
e. Risiko Hukum
f. Risiko Reputasi
g. Risiko Stratejik
h. Risiko Kepatuhan
i. Risiko Imbal Hasil
j. Risiko Investasi

Catatan di bawah ini menyajikan informasi mengenai eksposur Bank terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Bank dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pemantau risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Komite Pemantau Risiko tersebut mengadakan pertemuan secara rutin untuk menilai kinerja dari setiap portofolio pembiayaan dan mendiskusikan masalah-masalah risiko. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk implementasi strategi manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank. Komite Manajemen Risiko tersebut terdiri dari semua anggota Direksi dan senior manajer eksekutif. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi Bank, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

***45. RISK MANAGEMENT** (Continued)*

The Bank has exposures to the following risks from financial instruments:

a. Credit Risk
b. Market Risk
c. Liquidity Risk
d. Operating Risk
e. Legal Risk
f. Reputation Risk
g. Strategic Risk
h. Compliance Risk
i. Return Risk
j. Investment Risk

The following notes present information about the Bank's exposure to each of the above risks, the Bank's objectives and policies for measuring and managing risk.

Risk management framework

Organization of the Bank's risk management involves oversight from the Commissioners, Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Commissioners' level. They approves and monitors the implementation of risk management policies and framework of the Bank. The Risk Monitoring Committee meets every month to assess the performance of the respective credit portofolios and discuss risk issues. Commissioners delegate authority to Board of Directors to implement the risk management strategy.

The Risk Management Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank. The Risk Management Committee comprises of all members of the Board of Directors and senior management executives. It is chaired by President Director.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, Bank mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, tujuan dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system dalam upaya menjaga dampak negatif yang diakibatkan oleh kredit bermasalah.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank.

The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit. Internal Audit undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

a. Credit Risk

Credit risk is managed through established policies and processes covering credit acceptance criteria, credit origination and approval, pricing, monitoring, problem loan management and portfolio management. The Bank also closely monitors the development of its loan portfolios, to enable the Bank initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in credit quality.

Bank continued to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures and systems development in an effort to keep the negative impact caused by non-performing loans (NPL).

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Bank telah mengimplementasikan upaya disetiap tahap yang berhubungan dengan aktifitas penagih hutang untuk meningkatkan proses penagihan dan memperkuat pemantauan kegiatan penagihan.

Beberapa upaya telah dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut seperti pengaturan tentang pembagian tugas dan fungsi karyawan untuk penagihan. Bank juga telah meminta setiap unit kantor menyusun rencana tindakan atau action untuk melakukan lelang, restrukturisasi kredit dan langkah-langkah konkrit lainnya dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Namun upaya yang dilakukan Bank belumlah maksimal. Bank masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengupayakan hal tersebut, terutama Bank yang berada di daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Bank belum melakukan perjanjian dengan agen penagihan (pihak ketiga) untuk membantu upaya Bank dalam melakukan penagihan, begitu juga dengan karyawan Bank yang masih perlu diberikan pelatihan dalam melakukan pekerjaan penagihan baik mengenai tata cara penagihan dan kode etik dalam melakukan penagihan. Divisi yang membidangi kredit bekerjasama dengan divisi terkait telah membentuk tim investigasi dan penyelesaian kredit bermasalah, serta secara rutin melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau meminimalisasi kerugian kredit.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

The Bank has implemented efforts at each stage relating to debt collection activities to improve the collection process and strengthen monitoring of collection activities.

Several attempts have been made by the Bank to anticipate such matters such as arrangements on the distribution of duties and functions of employees for billing. The Bank has also asked each office unit to prepare an action plan or action to conduct auctions, credit restructuring and other concrete steps in the settlement of non-performing loans.

However, the Bank's efforts have not been maximized. Banks still need a lot of human resources to work on it, especially Banks located in regencies, districts and sub-districts.

The Bank has not entered into an agreement with a collection agency (third party) to assist the Bank's efforts in collecting billing, as well as any Bank employees who still need to be trained in conducting both billing work and billing codes. The division in charge of credit in cooperation with related divisions has established a team of investigation and settlement of problem loans, and routinely collect and coach to the debtor.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati (committed) kepada nasabah.

Berikut ini menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit Bank atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

i. Maximum exposure to credit risk

For financial assets recognized on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the un-drawn committed credit facilities granted to customers.

The following presents the Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and off balance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or other credit enhancement.

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Laporan posisi keuangan:			*Statement of financial position:*
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	4.675.743.093.189	4.409.541.339.832	*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain	206.400.249.107	212.933.575.670	*Current Account and Placement With Other Banks*
Investasi Pada Surat Berharga	5.029.940.233.385	3.410.430.266.704	*Investment In Marketable Securities*
Pembiayaan yang diberikan - bersih	19.147.661.481.589	18.908.460.304.891	*Financing - net*
Penyertaan - bersih	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investment - net*
Aset lain-lain - bersih	389.619.883.629	294.509.807.926	*Other assets - net*
Jumlah	**29.450.920.724.234**	**27.237.431.078.358**	***Total***
Komitmen dan kontinjensi - diluar laporan posisi keuangan:			*Commitment and contingencies off balanced sheet*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	553.478.555.382	653.926.854.549	*Credit facilities to debtors that have not been used*
Bank garansi yang diterbitkan	17.935.396.324	14.446.724.801	*Bank guaranteed issued*
Jumlah	**571.413.951.706**	**668.373.579.350**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Berdasarkan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko.

Pengelompokkan wilayah/

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

Based on No.37 / POJK.03 / 2019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and SE OJK Number 10/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Reports submitted to the Financial Services Authority explain disclosure of risk exposures and application of risk management.

Grouping Area

Wilayah / *Area*	Desember / *December* 31, 2022				
	Wilayah / *Area*				
	Wilayah/*area* 1	Wilayah/*area* 2	Wilayah/*area* 3	Wilayah/*area* 4	Wilayah/*area* 5
Pekanbaru	✓	-	-	-	-
Kampar	✓	-	-	-	-
Bengkalis	✓	-	-	-	-
Indragiri Hulu	✓	-	-	-	-
Indragiri Hilir	✓	-	-	-	-
Siak Sri Indrapura	✓	-	-	-	-
Dumai	✓	-	-	-	-
Pelalawan	✓	-	-	-	-
Rokan Hulu	✓	-	-	-	-
Rokan Hilir	✓	-	-	-	-
Kuantan Singingi	✓	-	-	-	-
Batam	-	✓	-	-	-
Karimun	-	✓	-	-	-
Natuna, Bintan dan Anambas	-	✓	-	-	-
Tanjung Pinang	-	✓	-	-	-
Kepulauan Meranti	✓	-	-	-	-
Lingga	-	✓	-	-	-
Diluar Riau dan Kepulauan Riau	-	-	✓	-	-

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Bank melakukan pengungkapan kuantitatif atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN dengan melalui pendekatan yang akan digunakan berdasarkan sektor ekonomi (dalam jutaan rupiah):

ii. Maximum exposure to credit risk

The Bank has been quantitive disclosure of allowance for impairment losses (AFIL) as individual and colective, with statistic method was using in that calculating of allowance for impairment losses based on Economic Sector (In Millions of Rupiah):

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Wilayah / *Area*	Desember / *December* 31, 2022				
	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif
		Belum jatuh Tempo / *Not Yet Due*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	2.361.362	30.810	152.255	109	127.420
Pertambangan dan penggalian/ *Mining and excavating*	6.453	--	990	--	982
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	366.623	1.761	6.984	2.954	3.580
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	2.697	--	1.488	--	1.474
Penyewaan, tenagakerja, dan Usaha Lainnya/ *Rental, employment, and Other Businesses*	10.564	1.119	3.475	--	3.362
Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	46.623	--	4.855	5.309	23
Konstruksi/ *Construction*	1.311.315	222	32.580	--	32.650
Perdagangan besar dan eceran/ *Commerce and retail*	639.577	25.591	116.893	367	112.431
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ *Acomodation and food supply*	366.413	2.675	9.433	--	8.887
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transport, Warehousing and Communication*	12.113	899	2.678	--	2.558
Perantara keuangan/ *Financial Intermediaries*	48.660	--	5	--	12
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ *Real estate, rental and company service*	10.894	527	1.064	--	1.040
Jasa Lainnya/ *Other Services*	107.145	6.729	12.366	--	11.800
Jasa pendidikan / *Education service*	2.013	--	422	--	324
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ *Healthy service and sociality activation*	10.289	575	154	--	164
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	5.302.742	70.907	345.641	8.739	306.708

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Wilayah / *Area*	Desember / *December* 31, 2022				
	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif
		Belum jatuh Tempo / *Not Yet Due*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*		
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	5.302.742	70.907	345.641	8.739	306.708
Jasa ke masyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ *Social service, social culture, entertainment and individual*	364	--	364	--	364
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ *Individual service to serve housekeeping*	5.903	1.614	278	2	265
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	15.001.867	251.804	158.363	5.733	131.425
Lainnya/ *Others*	12.281.016	--	--	--	--
Jumlah/ Total	**32.591.892**	**324.324**	**504.645**	**14.473**	**438.762**

Wilayah / *Area*	Agustus / *August* 21, 2022					
	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Not Yet Due*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	2.155.260	284.559	161.082	41.176	4.585	65.801
Pertambangan dan penggalian/ *Mining and excavating*	1.392	--	990	3	--	834
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	383.461	2.867	6.098	6.118	38	5.241
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	2.790	--	1.488	7	--	1.268
Penyewaan, tenagakerja, dan Usaha Lainnya/ *Rental, employment, and Other Businesses*	12.165	1.189	3.497	1.257	88	1.870
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	2.555.067	288.615	173.155	48.561	4.711	75.015

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Wilayah / *Area*	Agustus / *August* 21, 2022					
	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Not Yet Due*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*			
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	2.555.067	288.615	173.155	48.561	4.711	75.015
Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	56.568	289	5.416	1.003	--	1.676
Konstruksi/ *Construction*	1.416.299	2.651	34.453	19.610	464	15.536
Perdagangan besar dan eceran/ *Commerce and retail*	616.154	83.611	127.018	16.593	3.420	70.044
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ *Acomodation and food supply*	380.047	9.622	9.321	6.367	607	5.510
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transport, Warehousing and Communication*	10.924	1.702	2.416	97	129	1.235
Perantara keuangan/ *Financial Intermediaries*	54.165	--	15	573	--	9
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ *Real estate, rental and company service*	10.463	1.045	1.033	1.281	--	7
Jasa Lainnya/ *Other Services*	106.180	19.318	12.674	1.480	1.627	8.166
Jasa pendidikan / *Education service*	2.240	824	77	19	--	1
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ *Healthy service and sociality activation*	10.768	1.474	155	95	10	111
Jasa ke masyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ *Social service, social culture, entertainment and individual*	364	--	364	364	--	--
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ *Individual service to serve housekeeping*	6.514	1.912	458	175	14	20
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	14.880.710	1.612.729	199.015	37.819	28.352	148.881
Lainnya/ *Others*	9.326.011	31	513	0	--	218
Jumlah/ Total	**29.432.474**	**2.023.824**	**566.084**	**134.037**	**39.335**	**326.427**

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah industri, dan produk kredit sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko kredit.

Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Bank secara individual (dalam jutaan rupiah):

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The Bank encourages the diversification of its credit portfolio among a variety of industries, and credit product in order to minimize the credit risk.

Described the disclosure of risk exposure and risk management which includes the disclosure of net charges based on the remaining term of the contract Bank individually (in millions of rupiah):

Kategori Portofolio/ *Portfolio Category*	Desember / *December* 31, 2022				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/ *Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < *1 year*	> 1 s.d 3 tahun/ > *1 to 3 years*	> 3 s.d 5 tahun/ > *3 to 5 years*	> 5 tahun/ > *5 years*	Non-Kontraktual/ *Non-Contractual*
Tagihan Kepada Pemerintah/ *Goverment billed*	6.248.625	2.081.482	927.339	39.514	--
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/ *Bill to Public entity sector*	--	435.826	--	--	--
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	--	--	--	--	--
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	661.444	--	--	--	--
Kredit Beragun Rumah Tinggal/ *Loans with house guarantee*	1.529	11.654	18.505	334.756	--
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	6.911.599	2.528.962	945.845	374.270	--

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Kategori Portofolio/ *Portfolio Category*	Desember / *December* 31, 2022 — Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/ *Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < *1 year*	> 1 s.d 3 tahun/ > *1 to 3 years*	> 3 s.d 5 tahun/ > *3 to 5 years*	> 5 tahun/ > *5 years*	Non-Kontraktual/ *Non-Contractual*
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	6.911.599	2.528.962	945.845	374.270	--
Kredit Beragun Properti Komersial/ *Loans with commercial property guarantee*	--	--	--	1.652	--
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	138.576	987.010	1.450.309	11.836.938	--
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	169.624	1.024.272	1.101.185	302.513	--
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	143.709	56.228	13.039	1.495.708	--
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/ *With due dated*	30.121	17.921	8.126	8.111	--
Aset Lainnya/ *Other assets*	--	--	--	--	2.322.611
Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ *Exposure in Sharia Business Unit (if it exist)*	--	--	--	--	--
Jumlah/ *Total*	**7.393.628**	**4.614.393**	**3.518.503**	**14.019.192**	**2.322.611**

Kategori Portofolio/ *Portfolio Category*	Agustus / *August* 21, 2022 — Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/ *Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < *1 year*	> 1 s.d 3 tahun/ > *1 to 3 years*	> 3 s.d 5 tahun/ > *3 to 5 years*	> 5 tahun/ > *5 years*	Non-Kontraktual/ *Non-Contractual*
Tagihan Kepada Pemerintah/ *Goverment billed*	7.753.936	--	--	--	--
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/ *Bill to Public entity sector*	60.933	54.175	291.357	--	--
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	7.814.869	54.175	291.357	--	--

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Kategori Portofolio/ *Portfolio Category*	Agustus / *August* 21, 2022				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/ *Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < *1 year*	> 1 s.d 3 tahun/ > *1 to 3 years*	> 3 s.d 5 tahun/ > *3 to 5 years*	> 5 tahun/ > *5 years*	Non-Kontraktual/ *Non-Contractual*
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	7.814.869	54.175	291.357	--	--
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	--	--	--	--	--
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	218.090	--	--	--	--
Kredit Beragun Rumah Tinggal/ *Loans with house guarantee*	1.503	12.131	14.306	278.060	--
Kredit Beragun Properti Komersial/ *Loans with commercial property guarantee*	10.231	2.939	--	--	--
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	112.520	1.034.838	1.442.033	11.531.793	--
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	179.722	1.021.593	921.040	357.090	--
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	127.077	60.265	11.254	1.745.665	--
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/ *With due dated*	136.052	36.509	8.067	13.347	--
Aset Lainnya/ *Other assets*	--	--	--	--	1.293.105
Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ *Exposure in Sharia Business Unit (if it exist)*	--	--	--	--	--
Jumlah/ *Total*	**8.600.065**	**2.222.449**	**2.688.057**	**13.925.956**	**1.293.105**

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Penambahan diversifikasi ini berdasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan. Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jatuh tempo, jangka waktu perjanjian kredit, Pihak berelasi dan kolektibilitas diungkapkan pada tabel diatas.

Dalam hal pengendalian risiko kredit, Bank telah melaksanakan beberapa tahapan berikut:

- Menyediakan modal yang cukup untuk menutup risiko Bank dapat menyediakan modal baik dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal maupun dalam meng-cover risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah menghitung ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar dalam laporan KPMM.
- Memelihara kualitas aset produktif.
- Pengawasan aktif Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Meningkatkan efisiensi proses manajemen kredit.
- Meningkatkan budaya kredit yang sehat.
- Mempersiapkan bisnis yang cepat tanggap.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank *(adverse movement)*. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut misalnya perubahan harga opsi.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections. Concentration of credit risk of loans receivable by type, economic sector, maturity, term of credit agreement, related party and collectibility is disclosed in table above.

In the frame of controlling credit risk, Bank was doing for several step is as follow:

- *Providing sufficient capital to cover the risk Bank can provide the capital both in the framework of meeting the capital adequacy ratio as well as to cover the risk as a whole. In this case PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) have contacted the Credit Risk ATMR with standard approach in the KPMM report.*
- *Maintaining productive asset quality.*
- *Supervising the active Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.*
- *Improving the credit management efficiency.*
- *Improving healthy credit culture.*
- *Providing quicker business response.*

b. Market Risk

Market risk is the risk arising from adverse movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates and exchange rates, including derivatives of these two types of market risk, i.e., change in option prices.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko pasar ada di aktivitas fungsional Bank dan kegiatan *treasury.* Aktivitas ini mencakup penempatan dalam bentuk Surat Berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis lainnya) dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan melakukan kontrol atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* oleh Bank. Limit dari risiko pasar ditetapkan pada tingkat bank-wide dan dilaporkan serta dipantau oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap hari. *Management Action Triggers* (MAT) membantu manajemen pada saat tingkat risiko mencapai batasan-batasan tertentu.

ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk mengambil keputusan atas kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Divisi Pasar dan Risiko Likuiditas bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar di Bank berdasarkan kerangka yang disetujui oleh ALCO.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

Market risk exists in both bankwide and treasury activities. These activities include placement in securities and money market, equity participation in other financial institutions, provisions of funds (loans and other similar forms), funding and issuance of debt instruments, and trade financing activities.

The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank. Market risk limits are set at bankwide level and are reported and monitored by Compliance and Risk Management on a daily basis. Management Action Triggers (MAT) helps to sensitize the management in case the risk level is reaches certain thresholds.

ALCO acts as the apex senior management forum charged to take all decisions on policy regarding market and liquidity risk management. Market Risk is responsible for identifying, measuring, monitoring and controlling market risk in the Bank based on framework approved by ALCO.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

i. Risiko nilai tukar

Merupakan penjumlahan dari nilai absolute dari selisih bersih aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan PBI No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Bank harus menetapkan limit internal *Net Open Position* (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan dan telah digunakan.

Posisi Devisa Netto Bank dapat disajikan sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

On overall, market risk is divided into two following risks:

i. Value exchange risk

It is the total amount of the absolute value from the net difference of assets and liabilities in the balance sheet for every foreign exchange plus the net difference of receivables and payables both as commitments as well as contingencies in administrative account for every foreign exchange all of which are stated in rupiah.

The bank is compulsory to manage and maintain PDN at the highest 20% of the capital in the middle of the working day and at the end of the working day all day in accordance with PBI No.17/5/PBI/2015, dated may 29th, 2015 concerning the Fourth Change on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 Concerning Public Bank Net Foreign Exchange Position.

The bank must decide on the limit internal Net Open Position (NOP) consistently in the framework of preventing the occurrence of exceeding the limit decided upon by the prevailing regulations, especially in the case of all internal limits decided and already used.

The Bank Net Foreign Exchange Position can be presented as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Aset Valuta Asing			*Foreign exchange asset*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Kas	164.159.028	174.043.848	*Cash*
Giro pada Bank lain	3.397.363.776	3.074.395.753	*Current account with other bank*
Jumlah	**3.561.522.804**	**3.248.439.601**	***Total***
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Kas	13.103.086.914	12.893.430.413	*Cash*
Giro Bank Indonesia	7.083.212.500	6.719.212.500	*Current account with BI*
Giro pada Bank lain	111.290.349.901	25.818.189.338	*Current account with other bank*
Jumlah	**131.476.649.315**	**45.430.832.250**	***Total***

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *45. RISK MANAGEMENT (Continued)*

b. Risiko Pasar (Lanjutan) / *b. Market Risk (Continued)*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Currency*
Kas	2.307.409.737	2.444.938.769	*Cash*
Giro pada Bank lain	2.413.046.263	2.231.901.892	*Current account with other bank*
Jumlah	**4.720.456.000**	**4.676.840.661**	***Total***
Mata uang Ringgit Malaysia			*Singapore Currency*
Kas	33.145.731	--	*Cash*
Jumlah	**33.145.731**	**--**	***Total***
Mata uang Riyal Arab Saudi			*Singapore Currency*
Kas	41.390.000	--	*Cash*
Giro pada Bank lain	49.668.000	--	*Current account with other bank*
Jumlah	**91.058.000**	**--**	***Total***
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Giro	153.946.346	53.530.336	*Current account*
Jumlah	**153.946.346**	**53.530.336**	*Total*
Mata USD			*United State Dollar Currency*
Giro	--	14.137.392.040	*Current account*
Deposito	92.854.030.839	2.084.646.015	*Deposit*
Jumlah	**92.854.030.839**	**16.222.038.055**	***Total***
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang SGD			*Singapore Currency*
Perusahaan	3.751.556.478	3.776.279.251	*Individual current account*
Deposito perorangan	1.536.361.029	1.938.947.740	*Individual deposit*
Jumlah	**5.287.917.507**	**5.715.226.991**	***Total***
Posisi Devisa Netto (PDN)			*Netto of Devisa Position*
Mata uang Euro	3.407.576.458	3.194.909.264	*Euro Currency*
Mata uang Dolar Amerika	38.622.618.476	29.208.794.195	*United State Dollar Currency*
Mata uang Dolar Singapura	567.461.507	1.038.386.330	*Singapore Currency*
Mata uang Ringgit Malaysia	33.145.731		*Ringgit Malaysian Currency*
Mata uang Riyal Arab Saudi	91.058.000		*Saudi Arabia Riyal Currency*
Jumlah	**42.721.860.172**	**33.442.089.789**	***Total***
Jumlah PDN (dalam jutaan Rupiah)	42.722	33.442	*Total PDN (in millions Rupiah)*
Jumlah Modal (dalam jutaan Rupiah)	3.321.887	3.017.419	*Total Capital (in millions Rupiah)*
Rasio % PDN	1,29%	1,11%	*PDN ratio (%)*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Perhitungan Rasio PDN menyesuaikan dengan perhitungan data terbaru.

ii. Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.

Bank belum mengelola risiko suku bunga, sehingga Bank belum melakukan perhitungan atas risiko tingkat suku bunga Bank.

Tabel di bawah ini menyajikan portofolio Bank (tidak termasuk portofolio yang diperdagangkan) pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal re-pricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual (disajikan dalam jutaan rupiah):

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Market Risk (Continued)

The calculation of PDN ratio, adjusts to the latest data calculation.

ii. Interest rate risk

Interest rate risk is the potential loss incurred from adverse movement in market interest rates with respect to a Bank position or transaction carrying interest rate risk.

The Bank was not to carry out interest rate risk, with the result that Bank have not did calculated to Bank interest rate risk.

The table below summarizes the Bank's nontrading portfolios at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates (expressed in million rupiah):

Akun / *Account*	Desember / *December* 31, 2022				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate* (dalam jutaan rupiah / *in million rupiah*)			
		≤ 3 bulan/ ≤ *3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More than 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	4.675.743	4.675.743			
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	206.400	206.400			
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	--	--			
Surat Berharga/ *Marketable securities*	5.029.940	--		5.103	3.405.327
Kredit yang diberikan/ *Loans*	19.600.897		246.412	174.885	18.985.779
Penyertaan/ Investment	1.556				1.556
Aset lain-lain/ *Other Assets*	389.620		389.620		
Jumlah/ *Total*	**29.904.156**	**4.882.143**	**636.032**	**179.988**	**22.392.662**
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	1.248.831	19.631.174	4.698.185	22.372	
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others Banks*	93.275	107.507			
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*					
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	201.131				
Jumlah/ *Total*	**1.543.237**	**19.738.681**	**4.698.185**	**22.372**	**--**
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derrivatives held for risk management*	--	--	--	--	--
Selisih/ *Difference*	**28.360.919**	**(14.856.537)**	**(4.062.152)**	**157.616**	**22.392.662**

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

b. Market Risk (Continued)

Akun / *Account*	Agustus / *August* 21, 2022				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate* (dalam jutaan rupiah / *in million rupiah*)			
		≤ 3 bulan/ ≤ *3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More than 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	4.409.541	4.409.541			
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	210.654	210.654			
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	2.280	2.280			
Surat-Berharga/ *Marketable securities*	3.410.430	2.375.012			2.863.372
Kredit yang diberikan/ *Loans*	19.407.076	--	226.697	163.439	18.494.778
Penyertaan/ Investment	1.556				
Aset lain-lain/ *Other Assets*	301.550		301.550		
Jumlah/ *Total*	**27.743.087**	**6.997.487**	**528.248**	**163.439**	**21.358.150**
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	24.351.730	19.706.287	5.887.249	22.197	
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others Banks*	138.507	1.012.300	28.500		
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*		--	--	--	--
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	178.863	178.863			
Jumlah/ *Total*	**24.669.100**	**20.897.450**	**5.915.749**	**22.197**	**--**
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derrivatives held for risk management*	--	--	--	--	--
Selisih/ *Difference*	**3.073.987**	**(13.899.963)**	**(5.387.502)**	**141.242**	**21.358.150**

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko pasar, bank telah menyelesaikan beberapa tahap sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi suku bunga secara tepat pada setiap penggunaan dana bank baik aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan.
- Melakukan *mark to market.*
- Setiap penempatan terhadap bank counterparty dilakukan kajian risiko oleh Divisi Manajemen Risiko terhadap fasilitas credit line yang akan diberikan.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi serta setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan rekomendasi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

In terms of implementing and controlling market risk, Bank has done several step is as follows:

- *Performing the interest rate identification accurately in every use of bank finance both for certain functional activities as well as bank activities as a whole.*
- *Performing mark to market.*
- *Every allocation on bank counterparty is done by risk evaluation by the Risk Management Division to the credit line facilities given.*
- *Active supervision on the active Board of Commissioners and Directors and every transaction is done in accordance with the instructions and recommendations by the Asset and Liability Committee (ALCO).*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Bank. ALCO bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Bank sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku.

ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Bank. ALCO juga menyetujui asumsi likuiditas dan skenario *stress testing* yang akan diterapkan.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Kerangka kerja digunakan untuk mengelola situasi likuiditas Bank pada kondisi normal (*business-as-usual*) dan kejadian kondisi stress. Rencana pendanaan darurat likuiditas (*liquidity contingency plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas

Analisis kesenjangan likuiditas untuk memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk terkait dengan arus kas keluar di setiap saat.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its obligation associated with financial liabilities at due date. Liquidity risk is the most important risk to a commercial bank and as such needs to be managed on an on-going basis.

The Asset and Liability Committee (ALCO), which acts as the apex body entrusted to monitor liquidity situation of the Bank. ALCO is in charge of determining the policy and strategy of the Bank's asset and liabilities in line with the principles of prudent risk management and applicable regulatory requirements.

ALCO approves the limit framework, deliberates on the long term structural statement of financial position positioning of the Bank. In addition, ALCO approves all liquidity assumption and stress testing scenarios.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. The framework manages the liquidity situation of the Bank under both a business-as-usual and stress event. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

Exposure to Liquidity risk

Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows vis-à-vis outflows on any given day.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke *interbank*, nasabah besar (institusional) dan profesional market yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian kredit.

Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid bersih terhadap liabilitas 1 bulan. Untuk tujuan ini, aset yang bersifat likuid termasuk kas dan setara kas dan Surat Berharga berperingkat investasi, yang diperdagangkan secara aktif dan likuid di pasar dikurangi dengan simpanan dari bank dan komitmen yang jatuh tempo dalam satu bulan mendatang.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity Risk *(Continued)*

This is centrally managed within Treasury which has direct and authorized access to interbank, wholesale, and other professional markets, to supplement core banking activities of lending and deposit taking.

One of liquidity ratios is net liquid assets to 1 month liabilities. For this purpose, net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents and investment grade debt securities for which there is an active and liquid market less any deposits from banks and commitments maturing within next month.

As at December 31, 2022 and August 21, 2022, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Kas dan setara kas	1.461.887.971.525	569.767.585.406	*Cash and cash equivalent*
Surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.348.147.583.990	3.374.518.320.350	*Marketable securities measured fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang diukur dengan biaya diamortisasi	1.231.792.649.395	35.911.946.354	*Marketable securities measured at amortize cost*
Simpanan dari Bank lain	(93.274.688.201)	(138.507.219.334)	*Deposit from other Banks*
Jumlah	**5.948.553.516.709**	**3.841.690.632.776**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2021 and August 21, 2022, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Simpanan dari nasabah	26.973.705.235.783	24.351.730.041.220	*Deposit from customer*
Rasio aset likuid bersih terhadap simpanan dari nasabah	22%	16%	*Ratio of net liquid assets to deposit from customers*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk kewajiban penarikan nasabah atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Bagian Asset and Liabilities Management di Divisi Tresuri. Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang menganggur dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Nilai nominal arus masuk/arus keluar yang disajikan pada tabel di bawah ini merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan pokok dan bunga atas liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga arus masuk dan keluar bruto untuk derivatif yang diselesaikan secara bersamaan (misalnya, kontrak berjangka valuta asing).

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan kewajiban Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (*best case*), terburuk (*worst case*) dan paling mungkin terjadi (*most probable case*).

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Menganalisa perilaku portofolio aset dan portofolio liabilitas.
- Memenuhi ketentuan otoritas moneter seperti pemeliharaan GWM Primer maupun GWM Sekunder baik dalam rupiah maupun valuta asing.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity Risk *(Continued)*

Bank's liquidity policy is purposed to ensure that funding requirements can be met, either to pay customer withdrawals or unused loan facilities.

Managing and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility for Asset and Liabilities Management Group in Division of Treasury. Sources of funds and maturity of time deposits maturing managed to prevent idle funds and determine the appropriate amount of liquid assets instrument to ensure a controlled level of liquidity continuously.

The nominal inflow/outflow disclosed in the following table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability or commitment. The disclosure for derivatives shows a net amount for derivatives that are net settled, but a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement (e.g. currency forward).

The Bank has developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank's assets and liabilities portfolio, and to provide additional security guarantees based on best case, worst case and most probable case scenarios.

In terms of implementing and controlling liquidity risk, the Bank has implemented the following steps:

- *To analyzed behaviour of asset and liabilities portfolio.*
- *Comply with monetary authority regulations such as maintenance of Primary Minimum Statutory Giro and Secondary Minimum Statutory Giro both in rupiah and foreign currency.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

- Pengawasan aktif dari Komisaris dan Direksi.
- Memiliki rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).
- Monitoring Likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap bulannya dari laporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi risiko likuiditas.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai cabang kecil di seluruh Indonesia. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian financial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Komponen utama Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan berkesinambungan yaitu:

1. Akuntabilitas yang jelas

   Semua pihak di Bank menjalankan penugasan terkait dengan perannya masing-masing dalam pengelolaan risiko operasional.

   Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan Risiko operasional secara menyeluruh serta pelaksanaannya.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity Risk *(Continued)*

- *Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.*
- *By having contingencies funding plan.*
- *Liquidity Monitoring carried out by the Risk Management Division every month from the financial statements, so that liquidity risk mitigation measures can be taken.*

d. Operational Risk

Operational risk is defined as the risk of losses resulting from inadequate or failure of internal control processes, people and systems or from external events.

This type of risk is inherent in every business processes, operational activities, systems and products of Bank, from Head Office Units to micro branches located in remote areas of Indonesia. Failure to manage operational risks correctly could lead to financial losses, employee safety and reputation of the Bank.

Major components of Operational Risk Management Framework which are being consistently practiced are:

1. The right accountability

   All parties in the Bank are designated for their respective roles in the management of operational risk.

   The Board of Director's as well as the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (Lanjutan)

Unit bisnis dan fungsi support sebagai pemilik dari proses pengelolaan risiko dan fungsi Pengendalian Internal yang ada pada setiap *Risk Taking Unit* (RTU) berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengelola, memitigasi dan melaporkan Risiko Operasional.

Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan dan Hukum berperan sebagai pertahanan lapis kedua.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi dalam perancangan, pendefinisian, pengembangan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional secara keseluruhan, memantau penerapan kerangka kerja oleh RTU, memastikan kecukupan kontrol atas kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional yang efektif.

Sedangkan Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan sebagai pertahanan lapis ketiga.

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, Bank mengacu kepada kerangka *Basel Accord* II, Ketentuan Bank Indonesia serta *International Best Practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

d. Operational Risk *(Continued)*

Business unit and supporting unit as the owner of risk management process and Internal Control functions in each Risk Taking Units act as the first line of defence in day-today execution / implementation of operational risk management. They are responsible to identify, manage, mitigate and reports on Operational Risk.

Risk Management Division together with Compliance and Legal Division act as the second line of defence.

Risk Management Division function to design, defining, develop and maintaining the overall operational risk management framework, monitor the RTU's adherence to the framework, ensuring the control adequacy of policies and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities to ensure its effectiveness.

Meanwhile, the Work of Internal Auditors Unit (SKAI) are independently doing the role as the third line of defence.

Operational Risk Management Cycle

In order to implement operational risk management, Bank made reference to Basel Accord II, Bank Indonesia Regulations and International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (Lanjutan)

Disamping melakukan proses manajemen risiko terhadap risiko yang melekat dalam aktivitas *existing*, Bank juga melakukan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan jenis risiko yang telah ditetapkan dalam POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti yang salah satunya mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank.

Bank telah mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan SE OJK No.13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) Bagi Bank Umum Syariah.

Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap perhitungan penyisihan modal dengan metode *Standardlized Approach* serta pengumpulan data risiko yang digunakan dalam perhitungan beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks *(Advanced Measurement Approach).*

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, Bank telah menerapkan langkah berikut:

- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

d. Operational Risk *(Continued)*

In addition take risk management process against the risks inherent in the existing activity. Bank also take a risk management implementation comprehensively of new products and activities issuing plan in accordance with the type of risk that has been established in POJK No.65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 concerning Commercial Bank Business Activities Based on Core Capital one of which regulates the Bank's products and activities.

The Bank has allocated operational risk capital requirements based on the Basel Committee on Banking Supervision and SE OJK No.13/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk using Basic Indicator Approach (PID) for Sharia Commercial Banks.

Bank using Basic Indicator approach and methodology, is currently doing a development of the capital allowance calculation by method of Standardize Approach and the collection of risk data collection risk capital charges using a more complex approach (Advanced Measurement Approach).

In the frame of applied and controlling operational risk, Bank was doing several steps is as follows:

- *Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (Lanjutan)

- Memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk mengendalikan atau memitigasi risiko operasional sesuai dengan kompleksitas operasional bank.
- Adanya tindak lanjut atas hasil temuan Audit Intern dan Ekstern.

e. Risiko Hukum

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank telah membentuk Divisi Hukum dan Corporate Secretary sebagai salah satu strategi pengendalian internal Bank terhadap potensi risiko hukum.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

d. Operational Risk *(Continued)*

- *By having the policies, procedures and process to control or mitigate the operational risks in accordance with the complexity of the bank operation.*
- *The existence of follow-ups on the results of Intern and Extern Audit findings.*

e. Legal Risk

The Bank manages the legal risks by making sure that all activities and relations of the Bank business activities with third party shall be based on the regulations and requirements that is able to protect the interests of the Bank from legal aspects.

The legal risk is the risk resulted from the existence of weaknesses in the judicial aspect in business, among them resulted from the existence of lawsuit, the absence of supportive rules of laws the weaknesses in the bond such as not meeting the requirements for the validity of contract and the bond of collateral is not perfect. The Bank has formed Legal Division and Corporate Secretary as one of the strategies of the Bank's internal control against legal risk potential.

f. Reputation Risk

Risk reputation is the risk, among others, resulted from the existence of negative publication related to the Bank's business activities or negative perception toward the Bank. The Bank manages the reputation risk by making sure that the appropriateness between the Bank's business activities and other activities resulting in the Bank's reputation is still being maintained.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

g. Risiko Stratejik

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perudang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

***45. RISK MANAGEMENT** (Continued)*

g. Strategic Risk

The strategic risk is the risk among them resulted from the existence of determining and implementing inaccurate Bank's strategies, inaccurate business decision taking or the lack of responsiveness of the Bank towards external changes. The Bank manages the strategic risks through the process of consideration and decision taking for every strategic policy collectively and comprehensively by Board of Directors ad Committees already formed.

h. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising resulted from the Bank not complying and/or not implementing the prevailing rules of laws and provisions, including the Sharia (Islamic Rules) Principal for Public Bank and Sharia Business Unit.

The Bank implements the Compliance Function, the Bank Compliance Function includes the acts to:

- *Manifest the performance of Compliant Culture in all organizational levels and business activities of the Bank;*
- *Perform in managing Compliance Risk shall be done by referring to the provisions of Bank Indonesia concerning Risk Management for Public Bank;*
- *Make sure that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities performed by the Bank has been in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the prevailing rules of laws, including Sharia Principal for Sharia Public Bank and Sharia Business Units; and*
- *Make sure the compliance of the Bank to the commitment made by the Bank to Bank Indonesia and/or other supervising authorities in charge.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

i. Risiko Imbal Hasil

Bank melakukan identifikasi dan analis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah Identikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank dengan kompetitor maupun acuan, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah di saat terjadinya perubahan imbal hasil.

Bank melakukan pengendalian terhadap risiko imbal hasil syariah demi menjaga stabilitas likuiditas dana kelola berbasis syariah. Hal ini dilakukan dengan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah serta memberikan tingkat imbal hasiloptimal kepada nasabah dengan tetap memperhatikan risiko dan kondisi Bank.

Bank juga menetapkan unit kerja yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menganalis indicator risiko imbal hasil syariah serta menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

i. Return Risk

The Bank identifies and analyzes factors that can increase risk exposure to sharia returns and quantitatively affect the condition of capital and funding of sharia-based banks The identification of sharia yield risk is carried out through observation of the comparison of the level of returns provided by the Bank with competitors and references, the history of sharia fund customer behavior if there is a change in yields, and the liquidity condition of Islamic funds when there is a change in yield.

The Bank controls the risk of sharia returns in order to maintain liquidity stability of sharia-based managed funds. This is done by always maintaining good relations with customers and providing optimal returns to customers while still paying attention to the risks and conditions of the Bank.

The Bank also establishes a work unit that is given the authority and responsibility to analyze sharia yield risk indicators and submit them to the Board of Directors and Board of Commissioners periodically.

j. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit* and *loss* sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah.

j. Investment Risk

Investment Risk is the risk caused by the Bank to bear the customer's business losses financed in profit-sharing based financing, both using the net revenue sharing method and using the profit and loss sharing method. In this case, the calculation of profit sharing is not only based on the amount of revenue or sales obtained by customers but is calculated from the business profits generated by customers.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

j. Risiko Investasi (Lanjutan)

Proses manajemen risiko investasi:

- Melakukan identifikasi atas risiko aktivitas investasi dengan akad berbasis bagi hasil terhadap portofolio yang sudah ada atau potensi risiko yang mungkin timbul, guna memudahkan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang jelas dan hati hati, sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif.
- Mengimplementasikan proses persetujuan investasi dengan akad berbasis bagi hasil yang efektif antara lain dengan rnenetapkan batas kewenangan (*limit*) dan mekanisme pengambilan keputusan investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- Monitoring terhadap konsentrasi penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil sehingga sesuai dengan selera risk *appetite* Bank.
- Secara efektif mengawasi dan mengendalikan sifat, karakteristik dan kualitas dari investasi dengan akad berbasis bagi hasil.
- Pedoman dan prosedur dikomunikasikan, diimplementasikan, dimonitor dan dikaji utang secara periodik dengan mempertimbangkan perubahan kondisi internal dan eksternal.
- Memiliki dan mengembangkan kebijakan/prosedur penyaluran dana dengan akad berbasis bagi hasil dan pedoman manajemen risiko investasi yang memadai untuk mengelola secara hati-hati tingkat risiko pada sejumlah kriteria, seperti kualitas, konsentrasi, jatuh tempo, pengamanan jaminan, dan bentuk fasilitas pembiayaan.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

j. Investment Risk *(Continued)*

Investment risk management process:

- *Identify the risks of investment activities with profit-sharing based contracts against existing portfolios or potential risks that may arise, in order to facilitate the preparation and implementation of investment policies with clear and careful profit-sharing-based contracts, so that these risks can be managed and controlled effectively.*
- *Implement an investment approval process with an effective profit-sharing based contract, among others, by setting limits and investment decision-making mechanisms with profit-sharing based contracts.*
- *Monitoring of the concentration of fund distribution with profit-sharing based contracts so that it is in accordance with the Bank's risk appetite.*
- *Effectively supervise and control the nature, characteristics and quality of investments with profit-sharing based contracts.*
- *Guidelines and procedures are communicated, implemented, monitored and reviewed periodically by considering changes in internal and external conditions.*
- *Have and develop policies/procedures for disbursing funds with profit-sharing based contracts and adequate investment risk management guidelines to carefully manage the level of risk on a number of criteria, such as quality, concentration, maturity, security of guarantees, and forms of financing facilities.*

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pengendallian Penyelewengan

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko penyelewengan, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Pengelolaan operasional Bank tidak tergantung pada kebijakan seseorang.
- Pengelola Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, maupun keluarganya.
- Manajemen Bank memahami dan senantiasa mewaspadai jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha Bank yang dipimpinnya.
- Pemilik Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
- Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan Bank kepada manajemen profesional.
- Senantiasa diupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga bisa berkonsentrasi dalam bekerja.
- Senantiasa dilaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk pembinaan moral dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

45. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Deviation Control

In the framework of applied and controlling deviation risk, Bank was doing several steps is as follows:

- *Managing operational of Bank is not depending on ones decision.*
- *Bank management in operate activities in the circumstance carrying out things for personal, family or group benefit.*
- *The managemen of Bank realize and always aware of any kind of risk stick in bank activity managed by them.*
- *The owner of Bank have a strong comitment to develop their bank.*
- *The majority owner have submitted to carry out Bank to the professional management.*
- *Continously make an effort to increase official prosperity to make an effect of contrentration in doing work .*
- *Always carrying out education and training including building moral and religious in the framework on increasing ability, beliveness and obey the Only God.*

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Sebagian besar instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan disajikan menggunakan nilai wajar. Berikut ini adalah perbandingan antara nilai tercatat seperti yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan nilai wajar laporan keuangan.

Instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2 menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian atas nilai wajar

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

A significant number of financial instruments are carried at fair value in the statements of financial position. Below is the comparison of the carrying amounts, as reported on the financial position, and the fair value of financial statements.

Financial instruments have been allocated based on their classification. The significant accounting policies in Note 2 describe how the categories of the financial assets and financial liabilities are measured and how income and expenses, including fair value gains and losses.

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan diukur melalui laba rugi; aset keuangan diukur melalui penghasilan komprehensif lain; biaya amortisasi; pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian dengan setiap liabilitas keuangan juga telah diklasifikasikan menjadi yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi.

Nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan informasi yang tersedia dan belum diperbaharui untuk merefleksikan perubahan keadaan pasar setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 21 Agustus 2022 (dalam jutaan rupiah).

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)

The grouping of financial assets has been classified into financial assets measured through profit and loss; financial assets are measured through other comprehensive income; amortization costs; loans provided and receivables. Similarly, each financial liability has also been classified into one that is measured through other comprehensive income and amortized cost of acquisition.

The fair value are based on relevant information available as at the statements of financial position date and have not been updated to reflect changes in market condition after the statements of financial position date.

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank financial assets and liabilities as at December 31, 2022 and August 21, 2022 (in millions rupiah).

Perkiraan/ *Account*	Desember/ *December* 31, 2022						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/*Cash*	-	1.461.888	-	-	-	1.461.888	1.461.888
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia/*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*	-	-	4.675.743	-	-	4.675.743	4.675.743
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain/*Current Account and Placement With Other Banks*	-	-	206.400	-	-	206.400	206.400
Investasi Pada Surat Berharga/*Investment In Marketable Securities*	-	4.348.148	-	231.793	-	4.579.940	4.579.940
Pembiayaan yang diberikan/ *Financing receivables*	-	-	19.147.661	-	-	19.147.661	19.147.661
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain / *Other assets*	-	-	389.620	-	-	389.620	389.620
Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	**-**	**5.810.036**	**24.420.980**	**231.793**	**-**	**30.462.809**	**30.462.809**

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)

Perkiraan/ *Account*	Desember/ *December* 31, 2022 — Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	607.981	607.981	607.981
Simpanan wadiah/ *Wadiah deposits*	-	-	-	-	1.248.831	1.248.831	1.248.831
Simpanan mudharabah/ *Deposits mudharabah*	-	-	-	-	25.818.149	25.818.149	25.818.149
Obligasi yang diterbitkan / *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowings*	-	-	-	-	201.131	201.131	201.131
Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*	-	-	-	-	56.681	56.681	56.681
Jumlah Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Liabilities*	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.932.773**	**27.932.773**	**27.932.773**

Perkiraan/ *Account*	Agustus/ *August* 21, 2022 — Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/*Cash*	-	569.768	-	-	-	569.768	569.768
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia/*Current Accounts And Placements With Bank Indonesia*	-	-	4.409.541	-	-	4.409.541	4.409.541
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain/*Current Account and Placement With Other Banks*	-	-	212.934	-	-	212.934	212.934
Investasi Pada Surat Berharga/*Investment In Marketable Securities*	-	3.374.518	-	35.912	-	3.410.430	3.410.430
Pembiayaan yang diberikan/ *Financing receivables*	-	-	18.909.183	-	-	18.909.183	18.909.183
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain/ *Other assets*	-	-	294.510	-	-	294.510	294.510
Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	**-**	**3.944.286**	**23.827.723**	**35.912**	**-**	**27.807.921**	**27.807.921**
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	335.628	335.628	335.628
Simpanan wadiah/ *Wadiah deposits*	-	-	-	-	1.081.594	1.081.594	1.081.594
Simpanan mudharabah/ *Deposits mudharabah*	-	-	-	-	23.408.643	23.408.643	23.408.643
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	-	-	-	-	178.863	178.863	178.863
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	-	-	-	-	82.466	82.466	82.466
Jumlah Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Liabilities*	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.087.195**	**25.087.195**	**25.087.195**

46. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali Surat Berharga dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Nilai wajar Surat Berharga dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal laporan.

Nilai wajar pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, dan pinjaman yang diterima dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal laporan.

Nilai wajar investasi dalam saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

46. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(Continued)*

The fair value of financial assets and liabilities, except for held to maturity marketable securities, loans with fair value risk, consumer financing receivables, bonds issued, and borrowings, approximated to the carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments and/or repricing frequently.

The fair value of held to maturity marketable securities and bonds issued was determined on the basis of quoted market price as of reporting date.

The fair value of loans with fair value risk, consumer financing receivables, and borrowing are determined by discounting cash flows using market interest rate as at reporting date.

The fair value of investments in shares is carried at cost due to its fair value cannot be reliably measured.

47. RASIO KEUANGAN

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai POJK Nomor 21/POJK.03.2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah.

47. FINANCIAL RATIOS

Minimum Capital Provision Obligation (KPMM) in accordance with POJK Number 21/POJK.03.2014 dated November 18, 2014 concerning Minimum Capital Provision Obligation of Sharia Commercial Banks.

Finally, Financial Services Authority Circular Letter Number 34/SEOJK.03/2015 dated December 21, 2015 concerning Amendments to SEOJK Number 42/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016, concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using a Standard Approach for Sharia Commercial Banks.

47. RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Penilaian tingkat kesehatan bank umum terakhir berdasarkan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

47. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The latest assessment of the health level of commercial banks is based on POJK Number 8 / POJK.03 / 2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and SE OJK Number 10 / SEOJK.03 / 2020 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
a. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			***a. Risk Weighted Assets***
1). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	12.248.745	12.213.261	*After Credit Risk*
2). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	15.058.709	15.023.226	*After Credit Risk and Operational Risk*
3). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	15.101.432	15.056.669	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*
Komponen Modal			*Capital Component*
Modal Inti	3.168.778	2.864.753	*Principle Capital*
Modal Pelengkap	153.109	152.666	*Capital Completion*
Total Modal	**3.321.887**	**3.017.419**	*Total Capital*
b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)			***b. Capital Adequacy Ratio***
1). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	27,12%	24,71%	*After Credit Risk*
2). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	22,06%	20,09%	*After Credit Risk and Operational Risk*
3). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	22,00%	20,04%	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*
c. Rasio keuangan lain			***c. Other financial ratios***
1). Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,71%	2,02%	*Productive assets with problems against total productive assets*
2). Laba sebelum pajak dibanding dengan rata-rata total aset (ROA)	2,31%	1,04%	*Income before taxes compared with average total assets (ROA)*
3). Laba bersih setelah pajak dibanding dengan rata-rata ekuitas (ROE)	18,09%	6,29%	*Income after taxes compared with average total equity (ROE)*

47. RASIO KEUANGAN (Lanjutan) / *47. FINANCIAL RATIOS (Continued)*

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	21 Agustus/ *August 21*	
4). Beban operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO)	70,63%	81,06%	*Operating expenses compared with operating income (BOPO)*
5). Beban terhadap pendapatan (CIR)	65,63%	67,67%	*Cost To Income (CIR)*
6). Pendapatan bagi hasil dikurangi beban imbalan dibanding dengan rata-rata aset produktif (Net Margin)	5,98%	3,83%	*Net margin compared with average (Net \Margin)*
7). Pembiayaan yang diberikan dibanding dengan dana pihak ketiga (FDR)	72,67%	79,69%	*Financing compared with related parties fund (FDR)*
8). Pembiayaan bermasalah dibanding dengan total pembiayaan (NPF-Kotor)	2,57%	2,92%	*Non performance loan compared with total financing (NPF-Gross)*
9). Pembiayaan bermasalah - CKPN Pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (NPF-Bersih)	0,33%	1,00%	*Non performing loans - CKPN Non performing loans compare with total financing (NPF-Net)*
10). CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif	1,54%	1,82%	*CKPN of financial assets to total productive assets*
d. Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPD			*Percentage of BMPK violations*
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*i. Related Parties*
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*ii. Unrelated Parties*
Persentase pelampauan BMPD			*Percentage of exceeding BMPK*
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*i. Related Parties*
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*ii. Unrelated Parties*
Giro Wajib Minimum (GWM)			*Statutory Reserves (GWM)*
i. Bank Umum Konvensional			*i. Conventional Commercial Banks*
GWM Rupiah	0,00%	15,11%	*GWM main rupiah*
GWM Valas	0,00%	12,87%	*GWM foreign exchange*
ii. Bank Umum Syariah dan UUS			*ii. Sharia Commercial Bank and UUS*
GWM Rupiah	13,06%	20,35%	*GWM main rupiah*
GWM Valas	29,62%	0,00%	
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,29%	1,11%	*Overall Net Foreign Exchange Position*

48. INFORMASI SEGMEN

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

48. SEGMENT INFORMATION

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment.

Information concerning the primary segment information of the Bank is set out in the table below:

	2022		
	31 Desember/ *December 31*	**21 Agustus/ *August 21***	
Aset konvensional	--	18.942.423.909.477	*Conventional assets*
Aset syariah	31.505.153.101.343	9.359.305.509.840	*Sharia assets*
Jumlah	**31.505.153.101.343**	**28.301.729.419.317**	***Total***
Eliminasi/ penyesuaian	(122.796.906.250)	(157.716.154.992)	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**31.382.356.195.093**	**28.144.013.264.325**	***Total***
Pendapatan Operasional *)			*Operating income *)*
Aset konvensional	--	1.358.277.463.132	*Conventional assets*
Aset syariah	931.356.015.446	310.496.417.359	*Sharia assets*
Jumlah	**931.356.015.446**	**1.668.773.880.491**	***Total***
Eliminasi/ penyesuaian	47.912.328.272	(454.385.263.966)	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**979.268.343.718**	**1.214.388.616.525**	***Total***
Pendapatan operasional bersih **)			*Operating income - nett **)*
Aset konvensional	--	1.015.520.655.859	*Conventional assets*
Aset syariah	742.120.993.131	301.708.301.773	*Sharia assets*
Jumlah	**742.120.993.131**	**1.317.228.957.632**	***Total***
Eliminasi/ penyesuaian	47.912.328.268	(544.411.669.360)	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**790.033.321.399**	**772.817.288.272**	***Total***

*) Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya.

**) Pendapatan operasional bersih terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya dikurangi beban bunga dan syariah.

*) *Operating Income consist of interest and sharia income and other operating income.*

**) *Net operating income consists of interest income and sharia, and other operating income minus interest expense and sharia.*

48. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

48. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha sekunder dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of the Bank is set out in the table below:

a. Segmen Geografis	Desember/ *December* 31, 2022 Dalam Rupiah/ *In Rupiah*				*a. Geographic Segments*
	Riau	Kepulauan Riau	Lainnya	Jumlah / *Total*	
Pendapatan dari Jual Beli	542.697.510.765	171.695.408.881	380.606.230	714.773.525.876	*Income From Sales And Purchases*
Pendapatan dari Bagi Hasil	84.287.559.120	3.266.566.242	286.511.989	87.840.637.351	*Income From Profit Sharing*
Pendapatan dari Ijarah - neto	7.747.612.488	2.606.457.225	--	10.354.069.713	*Income From Ijarah - Net*
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	115.371.773.860	645.793.297	--	116.017.567.157	*Other Main Operating Income*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(101.178.599.657)	(29.214.531.734)	(58.841.890.928)	(189.235.022.319)	*Third parties share on return*
Pendapatan - Bersih	**648.925.856.576**	**148.999.693.911**	**(58.174.772.709)**	**739.750.777.778**	***Income - Net***
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	35.796.554.473	9.337.216.165	69.580.493	45.203.351.131	*Fee Based Income From Banking*
Pendapatan lainnya	4.604.048.703	467.464.754	7.679.033	5.079.192.490	*Other Income*
Gaji dan Tunjangan	(258.819.316.982)	(28.619.097.333)	(1.539.640.290)	(288.978.054.605)	*Salaries and Benefits*
Umum dan Administrasi	(135.703.685.523)	(22.457.048.695)	(1.425.112.127)	(159.585.846.345)	*General And Administrative*
Bonus Wadiah	(47.135.398.732)	(6.395.555.237)	(21.476.048.683)	(75.007.002.652)	*Wadiah Bonus*
Lain-lain	14.845.541.203	(22.314.187.207)	(37.172.182)	(7.505.818.186)	*Others*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	28.330.870.272	12.215.482.466	6.100.816	40.552.453.554	*Allowance for Impairment Losses for Financial*
Pendapatan/(beban) Non usaha - neto	(137.501.664.231)	14.892.432.760	118.573.764.241	(4.035.467.230)	*Non operating Income/(expense) - net*
Laba Operasional	**153.342.805.759**	**106.126.401.584**	**36.004.378.592**	**295.473.585.935**	***Operating Income***
Laba Bersih	**88.835.165.844**	**106.126.401.584**	**36.004.378.592**	**230.965.946.020**	***Net Profit***
Jumlah Aset	**18.657.793.177.898**	**3.852.796.032.373**	**8.871.766.984.822**	**31.382.356.195.093**	***Total Assets***
Jumlah Liabilitas	**(15.447.992.444.593)**	**(3.746.669.630.790)**	**(8.835.762.245.709)**	**(28.030.424.321.092)**	***Total Liability***
Jumlah Ekuitas	**(3.209.801.093.825)**	**(106.126.401.584)**	**(36.004.378.592)**	**(3.351.931.874.001)**	***Total Equity***

a. Segmen Geografis	Agustus/ *August* 21, 2022 Dalam Rupiah/ *In Rupiah*				*a. Geographic Segments*
	Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Jumlah / *Total*	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	954.468.878.696	225.922.411.187	590.696.263	1.180.981.986.146	*Interest and Margin Income*
Beban Bunga dan Bagi Hasil	(281.508.846.565)	(54.953.598.114)	(106.798.488.958)	(443.260.933.637)	*Interest and Margin Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	**672.960.032.131**	**170.968.813.073**	**(106.207.792.695)**	**737.721.052.509**	***Interest Income - Net***
Pendapatan Operasional Lainnya	(92.845.472.919)	51.459.688.075	162.358.316.877	120.972.532.033	*Other Operating Income*
Gaji danTunjangan Karyawan	(287.617.119.617)	(47.265.715.623)	(2.366.378.545)	(337.249.213.785)	*Salaries and Employees Benefits*
Umum dan Administrasi	(142.032.456.493)	(23.132.008.642)	(1.944.551.416)	(167.109.016.551)	*General and Administrative*
Beban Lainnya	(34.442.436.603)	(23.668.850.039)	(53.154.262)	(58.164.440.904)	*Other Expenses*
Pendapatan Non-Operasional	13.370.658.837	4.621.691.179	13.741.823	18.006.091.839	*Non-Operating Income*
Beban Non-Operasional	(49.122.432.289)	(7.146.444.200)	(178.733.717)	(56.447.610.206)	*Non-Operating Expenses*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(37.754.502.424)	(11.789.469.114)	(101.537.957)	(49.645.509.495)	*Allowance for Impairment Losses for Financial*
Laba Operasional	**42.516.270.623**	**114.047.704.709**	**51.519.910.108**	**208.083.885.440**	***Operating Income***
Laba Bersih	**(45.634.122.425)**	**114.047.704.709**	**51.519.910.108**	**119.933.492.392**	***Net Profit***
Jumlah Aset	**23.843.832.502.032**	**4.388.563.745.722**	**16.844.197.458**	**28.232.396.247.754**	***Total Assets***
Jumlah Liabilitas	**(20.844.124.121.704)**	**(4.274.516.041.018)**	**(6.649.196.039.862)**	**(25.118.640.162.722)**	***Total Liability***
Jumlah Ekuitas	**(2.999.708.380.323)**	**(114.047.704.709)**	**(172.307.146.644)**	**(3.113.756.085.032)**	***Total Equity***

49. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN

1. Pemanfaatan Fasilitas *Customisation* Kartu Kredit

Berdasarkan perjanjian No.01/696-PKS/DIR dan No.049/PKS/2021 tanggal 23 September 2021, PT Bank Riau Kepri (Pihak Kedua) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Pertama). melakukan kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Customisation BSI Hasanah Card, berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak 23-09-2021 sampai dengan 23-09-2023. Para pihak sepakat dengan jumlah *annual fee*

2. Perjanjian penyelenggaraan Ajungan Tunai Mndiri/ ATM Bersama

Pada tanggal 3 Oktober 2003, Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan perjanjian No.30/DIR/BPDR/X/2003. Perjanijan tersebut berlaku selama 36 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sepanjang tidak ada perubahan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama di lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS

1. Utilization of Credit Card Customisation Facility

Based on agreements No.01/696-PKS/DIR and No.049/PKS/2021 dated September 23, 2021, PT Bank Riau Kepri (Second Party) and PT Bank Syariah Indonesia Tbk (First Party). collaborating on the Utilization of BSI Hasanah Card Customisation Facility, valid for a period of two years starting from September 23, 2021 to September 23, 2023. The parties agree on the amount of the annual fee

2. Joint Automatic Teller Machine/ ATM Agreement

On October 3, 2003, the Bank entered into an agreement for the implementation of ATM Bersama with PT Artajasa Pembayaran Elektronis with agreement No.30/DIR/BPDR/X/2003. The agreement is valid for 36 months and will be automatically renewed annually as long as there is no change in the agreement. Under the agreement, the Bank will benefit from the ATM Bersama network at more than 31,000 ATMs throughout Indonesia.

50. KASUS HUKUM

Terkait kasus hukum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif. Sebagai bank yang dimiliki oleh PEMDA Tingkat I/II di Provinsi Riau dan Kepri, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) memiliki kredibilitas yang kuat di mata nasabah. Dan kasus hukum tersebut tidak berpengaruh terhadap reputasi dan kelangsungan usaha Bank, namun tetap menjadi perhatian dari manajemen.

Perkara Perdata

Pada akhir periode 31 Desember 2022, terdapat 1 (satu) kasus perdata masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

50. LEGAL CASES

Regarding legal cases, there is no negative reputational influence. As a bank owned by the Level I/II local government in Riau and Kepri Provinces, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has strong credibility in the eyes of customers. And the legal case has no effect on the Bank's reputation and business continuity, but remains a concern of management.

Civil Cases

At the end of the period of December 31, 2022, there is 1 (one) civil case that is still in the process of being tried in the District Court.

50. KASUS HUKUM (Lanjutan)

Perkara Pidana

Pada akhir periode 31 Desember 2022, terdapat 12 (dua belas) kasus perkara pidana yang masih dalam proses penyidikan.

***50. LEGAL CASES** (Continued)*

Criminal Cases

At the end of the period on December 31, 2022, there were 12 (twelve) criminal cases that were still under investigation.

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut UU No 11 tentang Cipta Kerja. Perpu No 2 tahun 2022 sebagian telah diub dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah diundangkan pada 12 Januari 2023.

Atas perubahan Peraturan ini, Manajemen masih melakukan evaluasi terhadap perubahan ini dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

51. EVENT AFTER THE END OF REPORTING PERIOD

On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation which repealed Law No. 11 concerning Job Creation. Perpu No. 2 of 2022 has been partially amended by Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK) which was promulgated on January 12, 2023.

Regarding the changes to this Regulation, Management is still evaluating these changes and their impact on the financial statements.

52. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.005/DPS-BRK/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk periode pada tanggal 22 Agustus 2022 dan 31 Desember 2022, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”), serta opini syariah dari DPS.

52. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. No.005/DPS-BRK/II/2023 dated February 24, 2022, the Sharia Supervisory Board (“DPS”) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the period 22 August 2022 and 31 December 2022, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (“DSN-MUI”), and sharia opinion of DPS.

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

53. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (Lanjutan)

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS No. 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

***53. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE** (Continued)*

- *Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;*
- *Amendment to SFAS No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;*
- *Amendment to SFAS No. 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;*
- *Amendment to SFAS No. 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.*

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- *SFAS No. 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS No. 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on January 1, 2025

As at the authorization date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

54. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Maret 2023.

54. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is responsible for the presentation and preparation of financial statements that were completed on March 30, 2023.

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* 2022

AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT 2022

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* PT BPD RIAU KEPRI (1 JANUARI S.D. 21 AGUSTUS 2022)

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF PT BPD RIAU KEPRI (JANUARY 1, TO AUGUST 21, 2022)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

Laporan Keuangan Per 21 Agustus 2022
dan Untuk Periode Sejak 1 Januari Sampai Dengan 21 Agustus 2022
beserta laporan auditor independen/
Financial Statements as of August 21, 2022
and For the Period from January 1 to August 21, 2022
with an Independent Auditor's Report

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

Daftar Isi	**Halaman/ *Page***	***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Posisi Keuangan	1 – 3	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4 – 5	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 – 8	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	9	*Notes to the Financial Statements*

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah
Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru, Riau, 28116
Telp. (0761) 47070, Fax (0761) 42389
www.brksyariah.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE SEJAK 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 21 AGUSTUS 2022

DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD SINCE JANUARY 1 UNTIL AUGUST 21, 2022

PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Andi Buchari	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Jendral Sudirman No. 462 Pekanbaru	:	*Office Address*
Alamat Rumah	:	Jl. Sumatera No.30 Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	0761-47070	:	*Telephone Number*
Jabatan	:	Direktur Utama/ *President Director*		*Position*
Nama	:	Said Syamsuri	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. Jendral Sudirman No. 462 Pekanbaru	:	*Office Address*
Alamat Rumah	:	Jl. Muslimin RT 005 RW 013 Kel. Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	:	*Domicile Address*
Nomor Telepon	:	0761-47070	:	*Telephone Number*
Jabatan	:	Direktur Operasional/ *Operational Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Perseroda) ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Perseroda) ("Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed;*
   b. The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
4. *We are responsible for Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement has been made truthfully.

Pekanbaru, 30 Maret / *March 30, 2023*

Direktur Utama/ *President Director*

Dr. Ir. H. Andi Buchari, MM.

Direktur Operasional/ *Operational Director*

H. Said Syamsuri, SE., MM., AK., CA.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No. : 00104/2.1127/AU.1/07/1505-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Perseroda) ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 21 Agustus 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 21 Agustus 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

To the Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Perseroda) ("the Bank"), which comprise the statement of financial position as of August 21, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the period January 1, 2022 to August 21, 2022, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of August 21, 2022, and its financial performance and its cash flows for the period January 1, 2022 to August 21, 2022 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Lain

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2021 dan untuk yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut tanggal 15 Februari 2022.

Other Matter

The financial statements of the Bank as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on such financial statements on February 15, 2022.

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Responsibilities of Management And Those Charged With Governance for The Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.*

Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

00104

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Zulbadri, CPA
No. Ijin AP. 1505 / *License No. AP. 1505*

30 Maret 2023 / *March 30, 2023*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of August 21, 2022 and December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
ASET				***ASSETS***
Kas	4	569.767.585.406	719.393.532.041	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	4.409.541.339.832	2.042.746.021.054	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	210.653.948.762	88.766.906.063	*Current account with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(8.416.733)	(6.445.146)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Neto		210.645.532.029	88.760.460.917	*Current account with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	2.279.626.908	3.334.381.279.547	*Placements with Banks Indonesia and other banks - net*
Surat Berharga	8	3.410.430.266.704	5.238.383.991.729	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(882.344.226)	(897.156.165)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Neto		3.409.547.922.478	5.237.486.835.564	*Marketable securities - net*
Pinjaman yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah	9			*Loans, Sharia Receivables and Financing*
- Pihak berelasi		1.449.446.115	902.461.762	*Related parties -*
- Pihak ketiga		19.405.626.581.844	18.884.011.539.367	*Third parties -*
Jumlah		19.407.076.027.959	18.884.914.001.129	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah Neto		18.907.276.406.175	18.388.304.138.810	*Loans, Sharia Receivables and Financing - net*
Penyertaan saham	10	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investments in shares*
Aset tetap	11			*Fixed assets*
Harga perolehan		748.403.245.981	721.049.634.633	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan		(357.838.449.778)	(324.117.851.983)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku, neto		390.564.796.203	396.931.782.650	*Net book value*
Aset pajak tangguhan	18	34.800.995.298	32.099.204.792	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	12	296.416.260.090	538.026.741.803	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**28.232.396.247.754**	**30.779.685.780.513**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of August 21, 2022 and December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	13	335.657.202.951	667.015.299.353	*Liabilities due immediately*
Simpanan dari nasabah dan Dana Syirkah Temporer	14			*Deposits from customers and Temporary Syirkah Funds*
Giro dan giro wadiah				*Currents account and Wadiah*
- Pihak berelasi		3.945.390.040.793	4.513.319.615.625	*Related parties -*
- Pihak ketiga		558.468.288.197	1.094.060.284.581	*Third parties -*
Jumlah		4.503.858.328.990	5.607.379.900.206	*Total*
Tabungan	14			*Savings*
- Pihak berelasi		12.923.971.428	13.145.694.446	*Related parties -*
- Pihak ketiga		7.077.811.115.350	7.436.147.134.830	*Third parties -*
Jumlah		7.090.735.086.778	7.449.292.829.276	*Total*
Deposito Berjangka	14			*Time Deposit*
- Pihak berelasi		57.354.743.750	31.757.320.814	*Related parties -*
- Pihak ketiga		12.699.781.881.702	12.527.302.635.307	*Third parties -*
Jumlah		12.757.136.625.452	12.559.059.956.121	*Total*
Jumlah Simpanan		24.351.730.041.220	25.615.732.685.603	*Total Tme Deposit*
Simpanan dari bank lain	15			*Deposit from other banks*
- pihak ketiga		138.507.219.334	1.040.800.354.219	*third parties -*
Jumlah		138.507.219.334	1.040.800.354.219	*Total*
Pinjaman yang diterima	16	178.862.654.463	151.442.499.737	*Borrowings*
Utang pajak	18	3.113.879.344	32.036.137.593	*Taxes payable*
Liabilitas Imbalan kerja	19	28.302.963.443	26.051.364.855	*Post-employment benefit liabilities*
Liabilitas lain-lain	20	82.466.201.967	59.448.707.344	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**25.118.640.162.722**	**27.592.527.048.704**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of August 21, 2022 and December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham - Nilai Nominal Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham				*Share Capital - Nominal Value Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Nominal value of Rp 100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.051.607 saham pada 21 Agustus 2022 dan 11.031.607 saham pada 31 Desember 2021.	21	1.205.160.700.000	1.103.160.700.000	*Issued and fully paid capital of 12.051.607 shares as of August 21, 2022 and 11.031.607 shares as of December 31, 2021*
Tambahan modal disetor	22	4.165.300.525	4.085.300.525	*Additional paid in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	8	(64.575.263.288)	2.232.813.053	*Unrealized gains (loss) net on marketable securities at fair value through other comprehensive income, net of tax*
Saldo laba	23			*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	23	1.774.825.929.991	1.622.420.554.773	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	23	194.179.417.804	455.259.363.458	*Unappropriated*
Jumlah saldo laba		1.969.005.347.795	2.077.679.918.231	*Total retained earnings*
Jumlah Ekuitas		**3.113.756.085.032**	**3.187.158.731.809**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**28.232.396.247.754**	**30.779.685.780.513**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode sejak 1 Januari sampai dengan 21 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Period from January 1 to August 21, 2022 and For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
PENDAPATAN				***REVENUES***
Pendapatan bunga dan syariah				*Interest and sharia income*
Pendapatan bunga	24	835.355.070.377	1.781.784.319.588	*Interest income*
Pendapatan syariah	24	345.626.915.769	432.068.126.903	*Sharia Income*
Jumlah pendapatan bunga dan syariah - bruto		**1.180.981.986.146**	**2.213.852.446.491**	*Total interst and sharia income - gross*
BEBAN				***EXPENSES***
Beban bunga dan syariah				*Interest and sharia expenses*
Beban bunga	25	(335.536.682.612)	(768.749.403.220)	*Interest expenses*
Beban syariah	25	(108.376.948.142)	(153.456.488.663)	*Sharia expenses*
Provisi dan komisi	25	(105.562.263)	(243.677.558)	*Fees and commission*
Jumlah beban bunga dan syariah		**(444.019.193.017)**	**(922.449.569.441)**	*Total interest and sharia expenses*
Pendapatan bunga dan syariah - neto		**736.962.793.129**	**1.291.402.877.050**	*Net interest and sharia income*
Pendapatan dan (beban) operasional lainnya				***Other operating income and (expenses)***
Pendapatan operasional lainnya	26	120.972.532.033	207.345.358.112	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	27	(49.645.509.495)	(35.018.680.750)	*Allowance for impairment losses of productive assets*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Beban Umum dan administrasi	28	(166.350.757.171)	(289.257.879.253)	*General and administrative*
Beban Tenaga kerja	28	(337.249.213.785)	(575.384.161.486)	*Employee expenses*
Lainnya	28	(58.164.440.904)	(47.752.556.833)	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya		**(561.764.411.860)**	**(912.394.597.572)**	*Total other operating expenses*
Laba operasional		**246.525.403.807**	**551.334.956.840**	*Operating income*
Pendapatan dan (beban) non operasional				***Non-operating income and (expenses)***
Pendapatan non-operasional	29	18.006.091.839	12.428.426.821	*Non-operating income*
Beban non-operasional	29	(56.447.610.206)	(48.665.030.749)	*Non-operating expenses*
Beban Non-Operasional		**(38.441.518.367)**	**(36.236.603.928)**	*Non-operating expenses*
Laba sebelum pajak		**208.083.885.440**	**515.098.352.912**	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan				***Income tax expenses***
Pajak kini	18	(48.021.771.600)	(126.372.383.280)	*Current tax expenses*
Pajak tangguhan	18	(15.511.745.293)	(485.609.050)	*Deferred tax*
Beban pajak tahun lalu	18	(24.616.876.155)	(7.226.922.537)	*Prior year tax expenses*
Beban pajak - neto		**(88.150.393.048)**	**(134.084.914.867)**	*Tax expenses - net*
Laba bersih periode berjalan		**119.933.492.392**	**381.013.438.045**	***Net profit for the period***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(Lanjutan)
Untuk Periode sejak 1 Januari sampai dengan 21 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
For the Period from January 1 to August 21, 2022 and For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Penghasilan komprehensif lain				***Others comprehensive income***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan/ (kerugian) atas perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8	(85.021.612.140)	3.743.852.620	*Gain / (loss) on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	8	18.213.535.799	(823.647.576)	*Related income tax*
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan - bersih setelah pajak		(66.808.076.341)	2.920.205.044	*Total other comprehensive income (loss) for the year - net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		**53.125.416.051**	**383.933.643.089**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***
Laba Per Saham Dasar	32	**9.952**	**34.581**	***Basic Earnings Per Share***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements include herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode sejak 1 Januari sampai dengan 21 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES EQUITY
For the Period from January 1 to August 21, 2022 and For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak/ *Unrealized gains (loss) on marketable securities at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Saldo Laba (Rugi)/ *Retained Earnings (Loss)*		Jumlah modal/ *Total Equity*	
					Telah Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unapproproriated*		
Saldo per 1 Januari 2021		**1.100.460.700.000**	**4.785.300.525**	**(687.391.991)**	**1.436.832.699.052**	**538.216.586.168**	**3.079.607.893.754**	***Balance as of January 1, 2021***
Tambahan modal disetor		--	2.000.000.000	--	--	--	2.000.000.000	*Additional paid - up capital*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	21	2.700.000.000	(2.700.000.000)	--	--	--	--	*Reclasification from Additional paid-up capital*
Dividen	23	--	--	--	--	(278.381.783.582)	(278.381.783.582)	*Dividend*
Cadangan umum		--	--	--	185.587.855.721	(185.587.855.721)	--	*General reserved*
Koreksi saldo laba		--	--	--	--	(1.021.452)	(1.021.452)	*Retained earnings correction*
Laba periode berjalan		--	--	--	--	381.013.438.045	381.013.438.045	*Profit for the period*
Laba komprehensif lain	8	--	--	2.920.205.044	--	--	2.920.205.044	*Other comprehensive income*
Saldo per 31 Desember 2021		**1.103.160.700.000**	**4.085.300.525**	**2.232.813.053**	**1.622.420.554.773**	**455.259.363.458**	**3.187.158.731.809**	***Balance as of December 31, 2021***
Tambahan modal disetor		--	102.080.000.000	--	--	--	102.080.000.000	*Additional paid - up capital*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	21	102.000.000.000	(102.000.000.000)	--	--	--	--	*Reclasification from Additional paid-up capital*
Dividen	23	--	--	--	--	(228.608.062.828)	(228.608.062.828)	*Dividend*
Cadangan umum		--	--	--	152.405.375.218	(152.405.375.218)	--	*General reserved*
Laba periode berjalan		--	--	--	--	119.933.492.392	119.933.492.392	*Profit for the period*
Rugi komprehensif lain	8	--	--	(66.808.076.341)	--	--	(66.808.076.341)	*Other comprehensive loss*
Saldo per 21 Agustus 2022		**1.205.160.700.000**	**4.165.300.525**	**(64.575.263.288)**	**1.774.825.929.991**	**194.179.417.804**	**3.113.756.085.032**	***Balance as of August 21, 2022***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statemens form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode sejak 1 Januari sampai dengan 21 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Period from January 1 to August 21, 2022 and For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga dan syariah		1.180.981.986.146	2.194.214.083.829	*Receipts of interest and sharia*
Pembayaran bunga dan syariah		(410.298.595.222)	(936.799.662.988)	*Payments of Interest and sharia*
Penerimaan operasional lainnya		122.501.433.398	113.044.753.915	*Receipts of others operating*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(164.099.158.583)	(241.611.754.644)	*Payments of general and administration*
Pembayaran beban tenaga kerja		(337.249.213.785)	(570.071.846.946)	*Payments of employee expenses*
Pembayaran beban non operasional bersih		(124.751.818.368)	(36.243.749.074)	*Payments of non operating expenses net*
Pembayaran pajak penghasilan		(90.852.183.554)	(144.733.252.417)	*Payments of income taxes*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi		176.232.450.032	377.798.571.676	*Cash flow before changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan) Penurunan aset operasi				*(Increase) Decrease in operating assets*
Surat berharga	8	1.761.130.836.745	451.142.646.856	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	9	(518.972.267.365)	76.035.056.256	*Loans*
Penyertaan saham	10	--	100.000.000	*Investments in shares*
Aset lain-lain - bersih	12	241.610.481.713	(49.728.809.151)	*Others asset - net*
Kenaikan (Penurunan) liabilitas operasi				*Increase (Decrease) in operating liabilities*
Simpanan dari nasabah	14	(1.264.002.644.383)	3.473.088.282.279	*Deposit from costumers*
Simpanan dari bank lain	15	(902.293.134.885)	(917.967.343.380)	*Deposit from other banks*
Liabilitas segera	13	(331.358.096.402)	(57.530.672.547)	*Liabilities due immediately*
Utang pajak	18	(28.922.258.249)	1.623.570.088	*Tax payable*
Liabilitas lain-lain	20	23.017.494.623	(34.903.792.216)	*Others liabilities*
Jumlah		(1.019.789.588.203)	2.941.858.938.186	*Total*
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		**(843.557.138.171)**	**3.319.657.509.862**	***NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	11	(26.828.952.713)	(23.857.477.082)	*Acquisition of fixed assets*
Penjualan aset tetap - bersih	11	26.440.000	700.000	*Proceeds from sale of fixed assets*
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		**(26.802.512.713)**	**(23.856.777.082)**	***NET CASH PROVIDED BY USED IN INVESTING ACTIVITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS
(Lanjutan)
Untuk Periode sejak 1 Januari sampai dengan 21 Agustus 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Continued)
For the Period from January 1 to August 21, 2022 and For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pinjaman yang diterima	16	27.420.154.726	37.533.395.568	*Borrowings*
Pembayaran dividen	23	(228.608.062.828)	(278.381.783.582)	*Dividend paid*
Program kemitraan dan bina lingkungan	20	(21.499.650.398)	(21.000.000.000)	*Partnership and environment program*
Setoran modal saham	22	100.000.000.000	2.700.000.000	*Paid-up capital*
Tambahan modal disetor	22	--	(700.000.000)	*Additional paid-up capital*
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		**(122.687.558.500)**	**(259.848.388.014)**	***NET CASH PROVIDED BY USED IN FINANCING ACTIVITIES***
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(993.047.209.384)**	**3.035.952.344.765**	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		**6.185.281.293.559**	**3.149.328.948.794**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		**5.192.234.084.175**	**6.185.281.293.559**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF THE PERIODE***
Kas dan Setara Kas terdiri dari :				***Cash and Cash Equivalents***
Kas	4	569.767.585.406	719.393.532.041	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	4.409.541.339.832	2.042.746.021.054	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	210.645.532.029	88.760.460.917	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	2.279.626.908	3.334.381.279.547	*Placements with Bank Indonesia and other bank*
Jumlah		**5.192.234.084.175**	**6.185.281.293.559**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") didirikan sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta notaris Pupung Mulyantini, S.H, M.H. no.17 tanggal 14 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri (Perseroda), antara lain:

- Perubahan nama Bank menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank dari bidang usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Perubahan anggaran dasar Bank diatas mendapat persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan No.AHU-0040576.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022.

Seiring dengan hal tersebut, Bank merubah aktivitas perbankan dari Konvensional menjadi Syariah yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank terakhir diatas. Bank telah memperoleh izin Usaha Bank Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") was established in accordance with Law No.13 of 1962 concerning Regional Development Banks. As of April 1, 1966, the activities of the Riau Regional Development Bank officially began with the status as a Bank Owned by the Riau Regional Government.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, most recently amended by Notarial Deed of Pupung Mulyantini, S.H, M.H. no.17 dated June 14, 2022 concerning the Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri (Perseroda), including:

- *Bank name change to PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
- *Changes in the purposes and objectives and business activities of the Bank from the conventional banking business sector to banking business activities based on sharia principles.*

The amendment to the Bank's articles of association above was approved by the Ministry of Law and Human Rights as stated in decree No.AHU-0040576.AH.01.02 of 2022 dated June 15, 2022.

Along with this, the Bank changed its banking activities from Conventional to Sharia as stated in the last Bank's Articles of Association above. The Bank has obtained a Sharia Bank Business license from the Financial Services Authority (OJK) in accordance with a copy of the OJK Board of Commissioners Decree No.KEP-93/D.03/2022 dated July 4, 2022 concerning the Granting of Permits for Changing the Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Bank efektif melalui aktivitas perbankan syariah pada tanggal 22 Agustus 2022. Hal ini sesuai kesiapan Bank Umum beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah.

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan pendirian Bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana dan melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang daerah serta kegiatan perbankan pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Bank mempunyai Visi "Sebagai perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat".

c. Manajemen Eksekutif

Pada tanggal 15 November 2021 telah dilakukan RUPSLB, untuk pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komisaris Independen, dan Komisaris Utama PT Bank Riau Kepri berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH, No. 35 tanggal 15 November 2021.

***1. GENERAL** (Continued)*

***a. Establishment and General Information** (Continued)*

The Bank commence Islamic banking activities on August 22, 2022. This is in accordance with the readiness of commercial banks to fully operate as Sharia Commercial Banks.

b. Purpose and Objectives

The purpose of establishing the Bank is to assist and encourage economic growth and regional development in all fields, as well as as a source of regional income in order to improve the living standards of the people by providing development financing, raising funds and carrying out regional money storage work and banking activities in general, as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.

The Bank has a vision of "As a bank that is able to develop and be leading in the regions, have professional management and encourage regional economic growth so that it can empower the people's economy".

c. Executive Boards

On November 15, 2021, an RUPSLB was held, for the appointment of the Director of Compliance and Risk Management, Independent Commissioner, and President Commissioner of PT Bank Riau Kepri based on the Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH, No. 35 dated November 15, 2021.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (Lanjutan)

Pengangkatan Fajar Restu Febriansyah, S.E sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko efektif sejak 7 Desember 2021 berdasarkan Surat OJK No.S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021. Pengangkatan Bapak Syahrial Abdi, A.P, M.Si sebagai Komisaris Utama efektif pada 23 Desember 2021 sesuai Surat OJK No.S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***c. Executive Boards** (Continued)*

The appointment of Fajar Restu Febriansyah, S.E as Director of Compliance and Risk Management is effective since December 7, 2021 based on OJK Letter No.S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021. The appointment of Mr. Syahrial Abdi, A.P, M.Si as President Commissioner is effective on December 23, 2021 in accordance with OJK Letter No.S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.

On August 21, 2022 and December 31, 2021, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, Sharia Supervisory Board of the Bank is as follows:

a. Dewan Komisaris / *a. Board of Commissioners*

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Komisaris Utama	: Syahrial Abdi, A.P, M.Si	Syahrial Abdi, A.P, M.Si	: *President Commissioner*
Komisaris Independen	: Roy Prakoso, S.E, M.M	Roy Prakoso, S.E, M.M	: *Independent Commissioner*
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	: *Independent Commissioner*

b. Dewan Direksi / *b. Board of Directors*

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Direktur Utama	: Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	: *President Director*
Direktur Dana dan Jasa	: H. M.A. Suharto, S.E	H. M.A. Suharto, S.E	: *Services Director and Funding*
Direktur Kredit dan Syariah	: H. Tengkoe Irawan, S.E., M.M., Ak.	H. Tengkoe Irawan, S.E., M.M., Ak.	: *Credits and Sharia Director*
Direktur Operasional	: H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	: *Operational Director*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Fajar Restu Febriansyah, S.E	Fajar Restu Febriansyah, S.E	: *Director of Compliance and Risk Management*

c. Komite Audit Bank / *c. Bank Auditor Committee*

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Ketua	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	: *Chairman*
Anggota	: Roy Prakoso, S.E, M.M	Roy Prakoso, S.E, M.M	: *Member*
Anggota	: Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	: *Member*
Anggota	: Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	: *Member*

1. UMUM (Lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (Lanjutan)

d. Komite Audit Pemantauan Risiko

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Ketua	: Roy Prakoso, S.E, M.M	Roy Prakoso, S.E, M.M :	*Chairman*
Anggota	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA :	*Member*
Anggota	: Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA :	*Member*
Anggota	: Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA :	*Member*

e. Komite Remunerasi dan Nominasi

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Ketua	: Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA :	*Chairman*
Anggota	: Syahrial Abdi, A.P, M.Si	Syahrial Abdi, A.P, M.Si :	*Member*
Anggota	: Pemimpin Divisi Manajemen SDM (ex officio)	Pemimpin Divisi Manajemen SDM (ex officio) :	*Member*

f. Dewan Pengawas Syariah

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Ketua	: H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A :	*Chairman*
Anggota	: Saifudin Yuliar, Lc, M.Ag	Saifudin Yuliar, Lc, M.Ag :	*Member*

g. Satuan Kerja Auditor Internal

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Ketua	: Heru Kurniawan	Heru Kurniawan :	*Chairman*

h. Sekretaris Perusahaan

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Ketua	: Edi Wardana	Wahyudi Gustiawan :	*Chairman*

Persetujuan Penetapan Pengurus Perseroan PT Bank Riau Kepri tahun 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri, Akta No. 35 tanggal 15 November 2021, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH. Akta perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah didata dalam sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.03-0477876 tanggal 25 November 2021.

***1. GENERAL** (Continued)*

***c. Executive Boards** (Continued)*

d. Risk Monitoring Committee

e. Remuneration and Nomination Committee

f. Board of Sharia Supervisory

g. Internal Auditor Task Force

h. Corporate Secretary

Approval for the Determination of the Management of the Company of PT Bank Riau Kepri in 2021 based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 35 dated November 15, 2021, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH. The deed of amendment of the Board of Directors and Commissioners has been recorded in the Legal Entity Administration system by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU- AH.01.03-0477876 dated November 25, 2021.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (Lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No. 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri.

Pengangkatan H. Zulhendri Rais, Lc., M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 100/KEPDIR/MSDM/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 25 Agustus 2021.

Pengangkatan Saifudin Yuliar sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 58/KEPDIR/MSDM/2021 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 14 Juni 2021.

Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum telah diatur oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Jumlah karyawan Bank pada akhir 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebanyak 2.836 orang dan 2.657 orang (tidak diaudit).

***1. GENERAL** (Continued)*

***c. Executive Bords** (Continued)*

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee is based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No. 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021 concerning the Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri.

Appointment of H. Zulhendri Rais, Lc., M.A as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Number 100 / KEPDIR / MSDM / 2021 concerning the Appointment of the Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri dated August 25, 2021.

Appointment of Saifudin Yuliar as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Number 58/KEPDIR/MSDM/2021 concerning the Appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri dated June 14, 2021.

The implementation of governance in providing remuneration for commercial banks has been regulated by the OJK in the Financial Services Authority (POJK) Regulation No.45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

The number of Bank employees at the end of August 21, 2022 and December 31, 2021 was 2,836 people and 2,657 people (unaudited), respectively.

1. UMUM (Lanjutan)

d. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank untuk pelayanan konvensional dan syariah berlokasi di Menara Dang Merdu Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru - Riau.

Posisi jaringan distribusi Bank yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

d. Office Network

The Bank's head office for conventional and sharia services is located at Dang Merdu Tower, Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru - Riau.

The position of the Bank's distribution network spread across Riau Province and Riau Islands Province as of August 21, 2022 and December 31, 2021 is as follows:

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	**31 Desember/ *December 31, 2021***	
Jaringan Kantor :			***Office network***
Pusat	1	1	*Head office*
Cabang utama konven	1	1	*Main branch office*
Cabang konven	18	18	*Branch office*
Cabang pembantu konven	34	34	*Sub-branch office*
Unit usaha syariah	1	1	*Sharia office*
Cabang syariah	2	2	*Branch sharia office*
Cabang pembantu syariah	7	7	*Sub-branch sharia office*
Kedai	39	38	*First class office*
Kantor kas	55	56	*Cash office*
Payment point	14	14	*Payment point office*
Butik	3	3	*Boutique office*
Anjungan Tunai Mandiri	335	298	*Automatic Teller Machine*
Cash Recycling Machine	36	35	*Cash Recycling Machine*
ATM Non Tunai	2	2	*ATM Non Cash*
Unit kas mobil	16	16	*Oto banking mobile*
Cash Deposit Machine	2	2	*Cash Deposit Machine*
Electronic Data Capture	664	664	*Electronic Data Capture*
Unit layanan syariah	87	87	*Sharia services units*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti yang dijabarkan dibawah ini:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The main accounting policies stipulated in the preparation of the Bank's financial statements are as described below:

a. Basis for Preparation of the Financial Statements
Statement of Compliance

The financial statements for the year ended August 21, 2022 and December 31, 2021 are prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menggunakan prinsip akuntansi syariah.

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain, disajikan dalam Rupiah penuh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

a. Based on Prepared Financial Statement *(Continued)*

The financial statements of Sharia Business Units operating in the banking sector with sharia principles present financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards which uses sharia accounting principles.

The financial statements are prepared in accordance with SFAS 1, "Presentation of Financial Statement". The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, as long as they are not pledged as a collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are presented in full Rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan standar baru dan Amendemen yang relevan dengan operasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71: "Instrumen keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73: "Sewa".

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

Amendemen PSAK 57 - Provisi, Liabilitas kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

PSAK 57 mendefinisikan kontrak yang memberatkan sebagai kontrak dimana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban Perusahaan melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima berdasarkan kontrak tersebut. Biaya yang tidak dapat dihindari adalah yang lebih rendah dari biaya bersih untuk keluar dari kontrak dan biaya untuk memenuhi kontrak. Amendemen tersebut mengklarifikasi arti 'biaya untuk memenuhi kontrak'.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Changes to The Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards

Effective January 1, 2022, the Company adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Company's operations are as follows:

- *Amendment to SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts – Cost of fulfilling the contract";*
- *Amendment to SFAS 71: "Financial instrument"; and*
- *Annual improvement of SFAS 73: "Lease".*

Impact of adoption to these new accounting standards are follows:

Amendment to SFAS 57 - Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets.

SFAS 57 defines an onerous contract as one in which the unavoidable costs of meeting the Company's obligations exceed the economic benefits to be received under that contract. Unavoidable costs are the lower of the net cost of exiting the contract and the costs to fulfil the contract. The amendment clarifies the meaning of 'costs to fulfil a contract'.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Amendemen PSAK 57 - Provisi, Liabilitas kontinjensi dan Aset Kontinjensi. (Lanjutan)

Amendemen ini menjelaskan bahwa biaya langsung untuk memenuhi kontrak terdiri dari:

- biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut (misalnya tenaga kerja langsung dan material); dan
- alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (misalnya alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bahwa, sebelum provisi terpisah untuk kontrak yangmemberatkan ditetapkan, entitasmengakui kerugian penurunan nilai yangterjadi atas aset yang digunakan dalam memenuhi kontrak, bukan atas aset yang didedikasikan untuk kontrak tersebut.

Penyesuaian PSAK 71 – Instrumen Keuangan

Amendemen PSAK 71 mengatur biaya mana yang harus dimasukkan dalam pengujian 10% untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Biaya atau fee dapat dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman. Berdasarkan amendemen tersebut, biaya atau biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga tidak akan dimasukkan dalam tes 10%.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Changes to The Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards *(Continued)*

Amendment to SFAS 57 - Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets. (Continued)

The amendment explains that the direct cost of fulfilling a contract comprises:

- *the incremental costs of fulfilling that contract (for example, direct labor and materials); andCost of fulfilling the contract";*
- *an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (for example, an allocation of the depreciation charge for an item of PPE used to fulfil the contract).*

The amendment also clarifies that, before a separate provision for an onerous contract is established, an entity recognizes any impairment loss that has occurred on assets used in fulfilling the contract, rather than on assets dedicated to that contract.

Annual Improvement to SFAS 71 – Financial Instruments

The amendment to SFAS 71 addresses which fees should be included in the 10% test for derecognition of financial liabilities. Costs or fees could be paid to either third parties or the lender. Under the amendment, costs or fees paid to third parties will not be included in the 10% test.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

Penyesuaian PSAK 71 – Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Selain itu, amendemen ini juga mengklarifikasi perlakuan akuntansi untuk imbalan tersebut dalam kondisi modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan dan tidak memenuhi penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Jika modifikasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan, imbalan tersebut harus dimasukkan dalam perhitungan suku bunga. Jika modifikasi mengakibatkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal, maka imbalan tersebut dibebankan langsung ke laba rugi.

Penyesuaian PSAK 73 - Sewa

DSAK-IAI telah menghilangkan ilustrasi pembayaran dari lessor terkait dengan prasarana. Alasan Amendemen tersebut adalah untuk menghilangkan potensi kebingungan tentang perlakuan insentif leasing.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

b. Changes to The Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards *(Continued)*

Annual Improvement to SFAS 71 – Financial Instruments (Continued)

In addition, this amendment also clarifies the accounting treatment for those fees in the condition for the modification resulting in derecognition and does not meet derecognition of financial liabilities. If the modification does not result in derecognition of financial liabilities, those fees should be included in the effective interest rate calculation. If the modification results in derecognition of initial financial liabilities, those fees are charged directly to profit or loss.

Annual Improvement to SFAS 73- Leases

DSAK- IAI has removed the illustration of payments from the lessor relating to leasehold improvements. The reason for the amendment is to remove any potential confusion about the treatment of lease incentives.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2022 and have not been early adopted by the Company

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

i) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai *FVTPL*:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (*SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities

i) Classification

The bank classifies its financial assets in the following categories of measurements:

- *Financial assets measured at fair value through profit and loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated at FVTPL:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Suatu instrumen utang diukur pada *FVOCI*, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai *FVTPL*:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*) ;
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau *FVOCI* sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan *FVTPL*.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai *FVOCI* ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

i) Classification (Continued)

A debt instruments is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell);*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI are deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Pada pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika penentuan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan inkonsistensi (kadang-kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah *SPPI*, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

i) Classification (Continued)

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the 'Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a 'contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverege*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu subklasifikasi yang ditetapkan pada saat pengakuan awal dan subklasifikasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan;
- Kewajiban keuangan lainnya. Liabilitas keuangan lainnya berkaitan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan liabilitas.

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

i) Classification (Continued)

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extention terms;*
- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

i) Classification (Continued)

Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Derivatif juga dikategorikan dalam klasifikasi ini kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di *FVTPL* adalah pilihan yang tepat/*conscious*. Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrument keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

i) Classification (Continued)

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss. Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The Targeting Operating Model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice. Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Bank can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

The Bank classifies financial instruments into certain classifications that reflect the nature of the information and consider the characteristics of the financial instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

i) Classification (Continued)

The classification of financial instruments can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 71)/ *Category as defined by SFAS 71*		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/ *Class (as determined by the Bank)***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss*	Surat berharga / *Marketable securities*
		Obligasi Pemerintah / *Government Bonds*
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Kas / *Cash*
		Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ *Placements with other bank and Bank Indonesia*
		Tagihan lainnya/ *Other receivables*
		Pinjaman yang diberikan/ *Loans*
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ *Accrued interest receivable*
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	Surat berharga/ *Marketable Securities*
		Obligasi Pemerintah/ *Government bonds*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/ *Derivative payables-non hedging related*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas segera/ *Obligation due immediately*
		Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*
		Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*
		Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali/ *Securities sold under agreements to repurchase*
		Beban yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*
		Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii) Pengakuan awal

Bank pada awalnya mengakui Pinjaman yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*reguler*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajarnya ditambahkan/dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Bank pada saat pengakuan awal, dapat menetapkan aset dan liabilitas keuangan tertentu, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar hanya diterapkan jika kondisi berikut terpenuhi:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ii) Initial recognition

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a. Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.
b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii) Pengakuan awal

a. penerapan opsi nilai wajar mengurangi atau menghilangkan ketidaksesuaian akuntansi yang mungkin timbul; atau
b. aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan, yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen utama berdasarkan nilai wajar; atau
c. aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

iii) Pengukuran biaya perolehan amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ii) Initial recognition

a. the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
b. the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
c. the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

iii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment losses on financial assets is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iii) Pengukuran biaya perolehan amortisasi

dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

iv) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

iii) Amortised cost measurement

classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

An effective interest rate is an interest rate that appropriately discounts the estimated future cash flow during the estimated lifespan of a financial asset or financial liability (or if more appropriately, a shorter period) to obtain a net carrying value at the time of initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows taking into account all contractual requirements in the financial instrument, but does not consider future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all rewards/provisions and other forms paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

iv) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur Pinjaman yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

iv) Derecognition (Continued)

Any rights or liabilities to transferred financial assets arising out of or still owned by the Bank are recognized as assets or liabilities separately.

In a transaction where the Bank substantially does not own or does not transfer all the risks and benefits of ownership of financial assets, the Bank terminates the recognition of such assets if the Bank no longer has control over such assets. The rights and liabilities still held in such transfers are recognized separately as assets or liabilities. In transfers where control over assets is still owned, the Bank still recognizes the transferred assets as much as continuous involvement, where the Bank's level of sustainability in the transferred assets is as large as the change in the value of the transferred assets.

The Bank writes off its financial assets and associated impairment loss reserves, at a time when the Bank determines that such financial assets are not fully collectable. This decision is taken after considering information such as there has been a significant change in the financial position of the debtor/issuer of financial assets so that the debtor/issuer of financial assets will no longer be able to pay off its liabilities, or the proceeds from the sale of collateral will not be enough to pay off the entire exposure of the Loan provided.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nilai tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan penurunan nilai. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto suatu aset (bila aset tersebut bukan merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi suatu liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

iv) Derecognition (Continued)

Where an existing financial liability isreplaced by another from the samelender on substantially different terms, orthe terms of an existing liability aresubstantially modified, such an exchangeor modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amountsis recognised in the statement of profit and lossand other comprehensive income.

v) Income and expense recognition

a. Income and interest expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded on amortized cost of acquisition are recognized in the income statement using the effective interest rate method. The gross carrying value of a financial asset is the cost of acquiring an amortized financial asset before it is adjusted for impairment allowance. In calculating income and interest expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (if the asset is not a financial asset that has decreased in value) or to the amortized cost of acquisition of a liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

v) Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (sebagai bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya, kecuali keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar untuk instrumen utang. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset keuangan berubah. Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya. Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

v) Income and expense recognition (Continued)

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value financial assets through other comprehensive income are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until such financial assets are discontinued or downgraded, except for gains or losses arising from changes in the exchange rate for debt instruments. When a financial asset is discontinued or devalued by value, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity is recognized in the profit and loss.

vi) Reclassification of financial assets

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes. Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss. Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values. Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

vi) Reklasifikasi aset keuangan (Lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dikeluarkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajarnya. Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajar. Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar.

vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

vi) Reclassification of financial assets (Continued)

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value. Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value. Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankcruptcy or the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan di terima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

viii) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimisze the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

viii) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau di terima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi long berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi short berdasarkan harga permintaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

viii) Fair value measurement (Continued)

The best evidence of the fair value of a financial instrument at the time of initial recognition is the transaction price, i.e. the fair value of the payment given or received. If the Bank determines that the fair value at the initial recognition is different from the transaction price and the fair value cannot be proved by the quoted price in the active market for identical assets or liabilities or based on valuation techniques that use only data from the observable market, then the fair value of the financial instrument at the time of initial recognition is adjusted to suspend the difference between the fair value at the time of initial recognition and the transaction price. Upon initial recognition, the discrepancy is recognized in the profit and loss based on the age of the instrument but not later than when such valuation is fully supported by observable market data or when the transaction is closed.

If an asset or liability measured at fair value has a bid price and a ask price, then the Bank measures assets and long positions based on the bid price and measures liabilities and short positions based on the ask price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

viii) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan dalam tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat berikut:

Level 1: Harga yang dikutip (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik.

Level 2: Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (sebagai turunan dari harga).

Level 3: Input untuk aset atau liabilitas berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

viii) Fair value measurement (Continued)

The group of financial assets and financial liabilities measured at fair value, exposed to market risk and credit risk managed by the Bank based on its net exposure to both market risk and credit risk, is measured by the price to be accepted to sell a net long position (or paid to divert a net short position) for a particular risk exposure. Adjustments at the group level are allocated to individual assets and liabilities based on the relative risk adjustment of each individual instrument within the group.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

Level 1: Quoted (unadjusted) prices in the active market for identical assets or liabilities.

Level 2: Inputs other than the quoted price included in Level 1 that can be observed for assets or liabilities, either directly (as a price) or indirectly (as a derivative of the price).

Level 3: Input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-*month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL* 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (*ECL*) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas *Solely Payments of Principal and Interest* (*SPPI*). Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai *Fair Value through Other Comprehensive Income* (*FVOCI*).

Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default* (*PD*), *Loss Given Default* (*LGD*) dan *Exposure at Default* (*EAD*), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional

SFAS 71 requires that loss reserves be recognized as 12-month ECL or expectation credit losses throughout the life of financial assets (lifetime ECL). ECL lifetime is an expectation credit loss derived from all possible default events throughout the expected life of a financial instrument, while a 12-month ECL is a portion of an expectation credit loss derived from a possible default event within 12 months after the reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI). Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI).

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional (Lanjutan)

- *Probability of Default* (*PD*)
  Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage* 1) atau sepanjang umur (*Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. *PD* diestimasikan pada point in time dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

- *Loss Given Default* (*LGD*)
  Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasikan *LGD* berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan..

- *Exposure at Default* (*EAD*)
  Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional (Continued)

- *Probability of Default (PD)*
  The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

- *Loss Given Default (LGD)*
  The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- *Exposure at Default (EAD)*
  The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional (Lanjutan)

Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang committed pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. *ECL* terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka *ECL* dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage 2*)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (*SICR*) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional (Continued)

This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a twelve month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional (Lanjutan)

Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam *ECL*. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Khusus untuk debitur yang terkena dampak *COVID-19* dan dalam program restrukturisasi *COVID-19*, maka untuk perhitungan *ECL* tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage 3*)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional (Continued)

Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Specifically for debtors impacted by COVID-19 and under COVID-19 restructuring program, in term of the ECL calculation, it may not automatically trigger a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional (Lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. *ECL* akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio *revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori *FVOCI*, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional (Continued)

Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the statement of financial position amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the statement of financial position amount reflects the instrument's fair value, with the expected held as a separate reserve within other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional (Lanjutan)

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar input , asumsi dan teknik estimasi diungkapkan dalam Catatan 3.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage* 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage* 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana workout untuk masing-masing debitur individu.

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (*forward looking*). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional (Continued)

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the statement of financial position date using the effective interest rate as the discount rate.The basis of inputs, assumptions and estimation technique are disclosed in Note 3.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum 3 scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan Konvensional (Lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen Pinjaman yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Pemulihan aset keuangan yang dihapuskan

Ketika pinjaman tidak tertagih, pinjaman tersebut dihapuskan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terkait. Pinjaman tersebut dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Pemulihan aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dari tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

ix) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets Conventional (Continued)

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Syariah

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan aset yang diperoleh untuk *ijarah*,

Sesuai dengan PSAK No. 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

x) Allowance for Impairment Losses on Earning Sharia

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, and assets acquired for ijarah

In accordance with SFAS No. 102 "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Syariah (Lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
- memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas asedalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

x) Allowance for Impairment Losses on Earning Sharia (Continued)

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- *significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- *a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;*
- *the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;*
- *it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;*
- *the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;*
- *observable data indicating that there is ameasurable decrease in the estimatedfuture cash flows from a portfolio offinancial assets since the initial recognitionof those assets, although the decreasecannot yet be identified individually in theportfolio;*
- *adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and*
- *national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Syariah (Lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
- Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan
- Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

x) Allowance for Impairment Losses on Earning Sharia (Continued)

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

- *Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;*
- *Murabahah receivables which individually have insignificant value; and*
- *Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Syariah (Lanjutan)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (“PD”) dan *Loss Given Default* (“LGD”).

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatanoperasional selain pendapatan margin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

x) Allowance for Impairment Losses on Earning Sharia (Continued)

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default (“PD”) and Loss Given Default (“LGD”).

Impairment losses on financial assets recorded at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Syariah (Lanjutan)

Aset produktif atas pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") adalah sebagai berikut:

- Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
  - 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
  - 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelahdikurangi nilai agunan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

x) Allowance for Impairment Losses on Earning Sharia (Continued)

Earning assets such as funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No 02/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at 7 February 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows:

- *General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.*
- *Special reserves, shall be at least:*
  - *5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;*
  - *15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif Syariah (Lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar: (Lanjutan)
  - 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
  - 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidakdapat ditagih.

d. Penjabaran transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan , aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan .

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(Continued)*

x) Allowance for Impairment Losses on Earning Sharia (Continued)

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows: (Continued)

- *Special reserves, shall be at least: (Continued)*
  - *50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and*
  - *100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.*

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Regulation of the Financial Services Authority ("POJK").

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectible.

d. Translation of foreign currency transaction

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Penjabaran transaksi dalam mata uang asing (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan *Reuters* (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. Translation of foreign currency transaction *(Continued)*

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

Below are the major exchange rates used for translation into rupiah as of August 21, 2022 and December 31, 2021 using the middle rates based on Reuters (at 04:00 PM Western Indonesian Time) (in full amount).

	21 Agustus/ *August* 21, 2022	31 Desember/ *December* 31, 2021	
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	Rp 14.837,50	Rp 14.252,50	*1 United States Dollar (USD)*
1 Euro (EUR)	Rp 14.971,04	Rp 16.112,46	*1 Euro (EUR)*
1 Dollar Singapura (SGD)	Rp 10.689,07	Rp 10.554,67	*1 Singapore Dollar (SGG)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", antara lain:

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut;
   - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
   - Suatu entita adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

e. Transaction with related parties disclosure

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in SFAS 7 concerning "Disclosure of Related Parties", including:

a) A person or close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   - *Has control or joint control over the reporting entity;*
   - *Has significant influence over the reporting entity; or*
   - *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   - *The entity, and the reporting entity, are members of the same group (which means that each parent, subsidiary is related to the others).*
   - *One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group of which the other entity is a member).*
   - *Both entities are joint ventures of the same third party.*
   - *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third party.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", antara lain: (Lanjutan)

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dan entitas).
- Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajamen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dan entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

e. Transaction with related parties disclosure *(Continued)*

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in PSAK 7 concerning "Disclosure of Related Parties", including: (Continued)

b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (Continued)
- *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employees are also related to the reporting entity.*
- *The entity is controlled or jointy controlled by a person identified in (a).*
- *A person identified in (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*
- *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity*

Significant transactions with related parties, wheither or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed In the financial statements

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari Kas, Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain serta fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Surat berharga pemerintah, *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan terse, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Investasi pada surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari obligasi, sertifikat bank indonesia (SBI), sertifikat deposito bank indonesia (SDBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

g. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current account with Bank Indonesia and Other Bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

h. Placement with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit, marketable securities, call money and time deposit.

Placements at Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus transaction costs attributable directly and are additional costs for acquiring these financial assets, and after initial recognition are measured on amortized costs using the effective interest rate method minus impairment loss.

i. Investment in marketable securities

The securities owned consist of bonds, bank indonesia certificates (SBI), bank indonesia deposit certificates (SDBI) traded on the stock exchange.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga (Lanjutan)

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, Surat berharga untuk tujuan investasi diukur sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (*FVOCI*).

- Diukur pada biaya perolehan diamortisasi
  Setelah pengakuan awal, investasi diukur pada biasa perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Diukur pada *FVOCI*
  Setelah pengakuan awal, diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Perubahan pada kerugian kredit ekspektasian diakui laba rugi dan diakumulasi pada ekuitas. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar bersih, setelah akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai, ditransfer ke laba rugi.

Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

i. Investment in marketable securities *(Continued)*

Marketable securities are initially measured at fair value plus transaction costs and subsequently accounted for in accordance with their classification as held to maturity.

Subsequently accounted for, depending on their respective classifications, as either measured at amortised cost or measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

- *Measured at amortised cost*
  Subsequently, investment measured at amortised cost using effective interest rate method.

- *Measured at FVOCI*
  Subsequently, investment carried at fair value with all unrealized gains and losses arising from changes in fair value recognised in other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognised in profit or loss and are accumulated in equity. On derecognition, the cumulative fair value gains or losses, net of cumulative allowance for impairment losses, are transferred to the profit or loss.

Refer to note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Setelah pengakuan awal, Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai *FVTPL*, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

Bank mencatat restrukturisasi pinjaman bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

The Bank accounts for troubled loans restructuring in accordance with the type of restructuring.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

Dalam restrukturisasi pinjaman bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitur), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat pinjaman yang diberikan di atas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Hanya dalam restrukturisasi pinjaman yang bermasalah melibatkan modifikasi persyaratan pinjaman, akun bank untuk efek restrukturisasi prospektif dan tidak mengubah nilai buku pinjaman pada saat restrukturisasi, kecuali jumlahnya melebihi nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam kebijakan baru.

Jika nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih rendah dari nilai tercatat pinjaman sebelum restrukturisasi, Bank mengurangi saldo pinjaman dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Loans *(Continued)*

In troubled loans restructuring which involves a repossesion of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

In troubled loans restructuring which only involves modification of the loans terms, the Bank accounts for the restructuring effect prospectively and does not change the carrying amount of the loans at the time of restructuring, unless the amount exceeds the present value of the total future cash receipts specified in the new terms.

If the present value of the total future cash receipts specified in the new terms is lower than the carrying amount of the loans prior to restructuring, the Bank reduces the loans balance to the amount equal to the present value of the total future cash receipts. The amount of the reduction is recognised as allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

k. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan musyarakah, *ijarah*, *istishna* dan *qardh*.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang *murabahah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi pendapatan murabahah ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

j. Loans *(Continued)*

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset and shall recognise a modification gain or loss in profit or loss. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

k. Sharia Financing

Sharia financing consists of murabahah receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah, istishna and qardh.

Mudharabah and musyarakah financing are stated in the statement of financial position at fair value and if the fair value is higher than the book value, the margin is recorded as deferred income and amortized over the period of financing or recorded as a loss and charged to the current period if the fair value is less than the book value.

Murabahah receivables are stated in the statement of financial position at net realizable value, which is the receivable balance less deferred murabahah income and allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Pembiayaan Syariah (Lanjutan)

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Piutang *istishna* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Piutang *qardh* diakui sebesar jumlah dana dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan ”marjin yang ditangguhkan” yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan manajer pendanaan *(mudharib)* berdasarkan rasio pendapatan dan pendanaan *(mudharib)* serta ratio kerugian yang ditentukan sebelumnya.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Sharia Financing *(Continued)*

Ijarah income is presented net of related expenses such as depreciation, maintenance expense and repairs, and so forth.

Istishna receivables are presented in the statements of financial position at the istishna billing to the buyer less an allowance for losses.

A qardh receivable is recognized in the amount of financing granted at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh receivable is recognized as revenue upon receipt.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a commercial cooperation contract between the owner of funds (shahibul maal) and a funds manager (mudharib) based on a predetermined ratio of revenue or profit and loss sharing.

Musyarakah is a partnership contract among fund owners (partners musyarakah) to contribute funds and conduct business on a joint basis through partnership with profit sharing or loss is based on an agreement or capital contribution proportion.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING Llanjutan)

k. Pembiayaan Syariah (Lanjutan)

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan al-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

L. Penyertaan

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang. Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Investasi saham ini diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain dengan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan jika tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas apabila Bank memiliki pengaruh signifikan terhadap investees dan nilai wajar apabila Bank tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investees. Kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat penurunan permanen atas penyertaan sementara dengan menggunakan metode individual assessment.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

k. Sharia Financing *(Continued)*

Istishna is a purchase agreement between an al-mustashni (buyer) and an al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to make or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at an agreed price.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

l. Investment

Investments in shares represent investments in non publicly listed companies engaged in the financial services industry held for long term purposes. Investment with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at fair value reduced by an allowance for impairment losses. These investment in shares are classified as Fair Value through Other Comprehensive Income by irrevocable election if they are not trade in the stock exchange.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/ equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares are recognized using equity method if Bank has significant influence over the investees or at fair value if Bank does not have significant influence over the investees. Loss from permanent decline in investment values of temporary investment are recognized using the individual assessment method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

l. Penyertaan (Lanjutan)

Penyertaan sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang berlaku sejak 1 Januari 2020.

m. Beban dibayar dimuka dan uang muka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang muka adalah bagian dari kontrak karena dibayar atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

n. Aset tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) dari harga perolehan, yang didasarkan atas masa manfaat dari Aset tetap yang bersangkutan. Persentase tarif penyusutan Aset tetap dan inventaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.51/KEPDIR/2007 tanggal 1 Mei 2007, yang mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No.520/KMK.04/2000, tanggal 14 Desember 2000.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

l. Investment *(Continued)*

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 years in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was effective on January 1, 2020.

m. Prepaid expenses and advances

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

Advances is part of contractually due that is paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the statement of financial position.

n. Fixed assets

Fixed assets are recorded based on the acquisition price. Depreciation is calculated using the Straight Line Method of the acquisition price, which is based on the useful life of the fixed asset in question. The percentage of depreciation rates on fixed assets and inventory is determined based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No.51/KEPDIR/2007 dated May 1, 2007, which refers to Law No.17 of 2000, concerning the Third Amendment to Law No.7 of 1983 concerning Income Tax, and Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.138/KMK.03/2002 dated April 8, 2002, concerning Amendments to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.520/KMK.04/2000, dated December 14, 2000.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Aset tetap (Lanjutan)

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, diakui dalam jumlah tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Bank dan biaya tersebut dapat diukur secara handal. Sisa jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban-beban tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang tahun yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Beban ditangguhkan ini disajikan dalam akun "Aset Lain-Lain" pada neraca.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

o. Fixed assets *(Continued)*

The costs after the initial acquisition such as replacement of components and significant inspections, are recognized in the carrying amount of fixed assets if it is likely that future economic benefits will flow to the Bank and such costs can be reliably measured. The remaining amount recorded cost of reimbursed components or previous inspection costs is discontinued. The cost of daily maintenance of fixed assets recognized as a cost at the time of occurrence.

Land is recognized as the cost of acquisition and is not depreciated. Certain expenses with respect to the acquisition or extension of land rights are suspended and amortized using the shorter year-round straight-line method between land rights or the economic life of the land. This deferred expense is presented in the account "Other Assets" on the balance sheet.

Estimated useful lives of the assets as follows:

Perlengkapan Harta Berwujud	Tahun/ *Years*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	Group *Assets*	Classification of Tangible Assets
Perabot / perlengkapan kantor	4 tahun/ years	25%	Group I	*Furniture / fixtures office*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	4 tahun/ years	25%	Group I	*Furniture / fixture house*
Perabot / perlengkapan mess	4 tahun/ years	25%	Group I	*Furniture / fixture mess*
Mesin kantor	4 tahun/ years	25%	Group I	*Office machine*
Komputer	4 tahun/ years	25%	Group I	*Computer*
Kendaraan	4 tahun/ years	25%	Group I	*Vehicle*
Perabot / perlengkapan kantor	8 tahun/ years	12,5%	Group II	*Office equipments / supplies*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	8 tahun/ years	12,5%	Group II	*Home office equipments / supplies*
Kendaraan	8 tahun/ years	12,5%	Group II	*Vehicle*
Bangunan kantor	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Office building*
Bangunan rumah dinas	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Home office building*
Bangunan mess	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Boarding house building*
Bangunan gudang	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Warehouse building*
Bangunan lainnya	20 tahun/ years	5%	Fixed	*Other building*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Aset tetap (Lanjutan)

Dengan berlakunya PSAK 73 Sewa, ISAK 25 Hak atas tanah telah ditarik dan dicabut.

Klasifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) tergantung pada substansi transaksi, dan bukan pada bentuk hukumnya. Akibatnya, jika suatu kontrak memberikan sesuatu yang secara substansi merupakan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap.

Oleh karena itu, pengalihan pengendalian atas aset yang mendasarinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap berdasarkan PSAK 16, atau transaksi sewa sesuai PSAK 73.

Bank menyimpulkan bahwa hak guna bangunan yang dimilikinya diklasifikasikan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16 karena Bank memperoleh kendali atas hak guna tanah setelah memperoleh hak guna bangunan (HGB) sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 72 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Pada 21 Agustus 2022 dalam rangka persiapan menjadi BUS "Bank Umum Syariah" Perusahaan mengakui seluruh kontrak sewa sesuai dengan Akad syariah.

o. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang diperoleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

o. Fixed assets *(Continued)*

Upon effectivity of SFAS 73 Leases, ISFAS 25 Landrights has been withdrawn and revoked.

Classifying land use rights (HGB) depends on the substance of the transaction, and not on its legal form. Consequently, if a contract provides something that in substance represents the purchase of fixed assets, then the rights meet the definition of fixed assets and are recorded in accordance with SFAS 16 Property, Plant and Equipment.

Accordingly, the transfer of control over underlying assets becomes the main consideration in determining whether the transaction is a purchase of fixed assets under SFAS 16, or a lease transaction under SFAS 73.

The Bank has concluded that the land use rights it holds are classified as fixed assets under SFAS 16 as it obtains control of the land use rights (HGB) as defined under SFAS 72 Revenue from contracts with customers.

On August 21, 2022 in term of preparation for becoming BUS "Sharia Commercial Bank" the Company recognize all lease contract are under sharia agreement.

o. Intangible Asset

Intangible assets consist of software acquired by the Bank and recorded in the amount of the cost of acquisition minus accumulated amortization and accumulated impairment losses of assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Aset tidak berwujud (Lanjutan)

Pengeluaran selanjutnya yang jumlahnya signifikan akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa mendatang. Pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi diakui pada laporan laba rugi berdasarkan masa manfaat ekonomis yang berkisar antara 4 sampai dengan 8 tahun dengan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimana aset siap untuk digunakan. Aset tidak berwujud disajikan dalam akun “Aset lain-lain”.

p. Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap sesuai klasifikasinya.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

q. Beban tangguhan

Beban tangguhan merupakan nilai tercatat atas pengadaan IT yang proses pengerjaannya melalui tender. Bank akan melakukan pembayaran pada saat penyerahan Berita Acara Pekerjaan telah selesai dilakukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

o. Intangible Asset *(Continued)*

Subsequent expenditures of significant amounts will be capitalized only if they add to the economic benefits of the asset in question in the future. Other expenses are charged at the time of occurrence.

Amortization is recognized on the income statement based on an economic useful life that ranges from 4 to 8 years using a straight-line method from the date on which the asset is ready for use. Intangible assets are presented in the account “Other assets”.

p. Construction in progress

Fixed assets in settlements are expressed at the expense of acquisition and are presented as part of fixed assets. When the assets in the settlement have been completed and are ready for use, the accumulated cost of acquisition is reclassified to the fixed asset account according to its classification.

The accumulated construction costs of fixed assets are capitalized as assets in settlement. The costs are reclassified to the fixed asset account at the time the construction process is completed and the fixed assets are ready for use. Depreciation begins to be charged on the same date.

q. Deferred expenses

Deferred expenses are the recorded value of IT procurement whose process is carried out through tenders. The Bank will make payment when the submission of the Minutes of Work has been completed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Pajak dibayar dimuka

Uang muka pajak merupakan jumlah uang muka pajak badan dibayar sendiri dan pajak penghasilan yang telah dibayarkan yang dapat diperhitungkan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

S. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

r. Prepaid tax

Prepaid tax is the amount of corporate tax advance paid by yourself and income tax that has been paid which can be taken into account in the current year as well as the following year.

s. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting year the Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount detemined for an individual asset is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU) less costs to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Bank of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to the present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refer to SFAS 68: "Fair Value Measurements" (Note 2c).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

s. Penurunan nilai aset non-keuangan (Lanjutan)

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

T. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterimanya perintah pemindahbukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Simpanan nasabah, simpanan nasabah syariah dan dana syirkah temporer

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

s. Impairment of non-financial assets *(Continued)*

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

t. Liabilities due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Obligations due immediately are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Deposits from customers, sharia deposits from customers and temporary syirkah fund

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, that can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, or transfers between accounts using cheque and other orders of payment or transfer. These current accounts are stated at the amount due to the current account holder.

Savings accounts represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors under agreed conditions. Savings account are stated at the amount due to the account holders.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Simpanan nasabah, simpanan nasabah syariah dan dana syirkah temporer (Lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan penyimpan. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Giro dan tabungan wadiah merupakan giro dan tabungan wadiah adh-dhamanah yakni titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana bisa mendapatkan pendapatan bonus. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro.

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana syirkah temporer dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang dana syirkah temporer bank.

Hubungan antara Bank dan pemilik dana syirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

u. Deposits from customers, sharia deposits from customers and temporary syirkah fund *(Continued)*

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities according to the deposit agreements. Time deposits are stated at the nominal amount provided in the certificates of deposits or at the amount stated in the agreement.

Wadiah current and saving account is a wadiah adh-dhamanah funds deposits in the form of current and saving account on which the customer may receive bonus income. Wadiah current accounts are stated at the amount due to the account holder of the deposit.

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the right to manage and invest funds in accordance with either the Bank policy or restriction policy by the depositors with the agreed profit sharing. Temporary syirkah funds are stated at the nominal amount as agreed by the temporary syirkah funds holder.

Relationship between the Bank and the owner of temporary syirkah funds are partnership based on mudharabah agreement.

Temporary syirkah funds can not be classified as liability because Bank has no obligation to return the fund to the owner when Bank has loss, unless there is negligence or default by the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Simpanan nasabah, simpanan nasabah syariah dan dana syirkah temporer (Lanjutan)

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan , hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

V. Simpanan dari bank lain

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money*, *deposit on call* dan deposito berjangka.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

u. Deposits from customers, sharia deposits from customers and temporary syirkah fund *(Continued)*

Temporary syirkah funds can not be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds do not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right of the profit derived from current assets and non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statements of financial position accounts which is in accordance with sharia principle that provide right to the Bank to manage fund, including to mixing of one funds with the other funds.

The owner of temporary syirkah funds receive profit sharing in accordance with the agreement and receive loss sharing based on proportion to the total funds. The profit sharing of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

v. Deposit from other banks

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method, except for sharia deposits and temporary syirkah fund which are stated at the Bank liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of current accounts, savings, interbank call money, deposit on call and time deposits.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Simpanan dari bank lain (Lanjutan)

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari total simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

v. Deposit from other banks *(Continued)*

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah current accounts.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank liability amount to the customer.

Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Borrowings

Borrowings are funds received from another party liability repayment in accordance with the requirements of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

x. Perpajakan

Bank menerapkan PSAK 46 (Revisi 2021), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan .

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

x. Taxation

The Bank adopted SFAS 46 (Revised 2021), "Income Taxes".

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized, using balance sheet method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate all or part of the benefit of the deferred tax assets.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to applied to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the statement financial position date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

x. Perpajakan (Lanjutan)

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/ (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing- masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

x. Taxation *(Continued)*

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit (Expense), Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

For each of the entity, the tax effects on temporary differences and tax loss carry forward, which can individually be either asset or liability, are shown at the applicable net amounts.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Sewa

Pada tanggal permulaan, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa (yaitu, liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya selama masa sewa (yaitu, aset hak pakai atau *ROU*). *Lessee* mengakui secara terpisah beban bunga liabilitas sewa dan beban penyusutan aset *ROU*. Setelah terjadinya peristiwa tertentu (misalnya, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa masa depan yang disebabkan oleh perubahan indeks atau tarif yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut), *lessee* diharuskan untuk mengukur kembali liabilitas sewa dan mengakui pengukuran kembali sebagai penyesuaian pada aset ROU. Akuntansi *lessor* berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dibandingkan dengan akuntansi berdasarkan PSAK 30 dan interpretasi terkait.

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu Kontrak sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap 2 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki perpanjangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Lease

At the commencement date, a lessee will recognize a liability to make lease payments (i.e., lease liability) and an asset representing the right to use the underlying asset during the lease term (i.e., right-of-use or ROU asset). Lessees are required to separately recognize the interest expense on the lease liability and the depreciation expense on the ROU asset. Upon occurrence of certain events (e.g., a change in the lease term, a change in the future lease payments resulting from a change in an index or rate used to determine those payments), lessees are required to remeasure the lease liability and recognize the remeasurement as an adjustment to the ROU asset. Lessor accounting under SFAS 73 is substantially unchanged in comparison to the accounting under SFAS 30 and related interpretations.

The Company as a lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The Company leases certain fixed asset. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 3 years but may have extension.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Akan tetapi, untuk sewa *real estate* di mana Perusahaan merupakan penyewa, ia telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

Persyaratan sewa dinegosiasikan pada basis individu dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara kewajiban dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode. Aset hak pakai disusutkan selama masa manfaat aset yang lebih pendek dan masa sewa atas dasar garis lurus.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan pembelian opsi, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak pakai juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi di bagian Penurunan Nilai aset non-keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Lease *(Continued)*

The Company as a lessee (Continued)

Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices. However, for leases of real estate for which the Company is a lessee, it has elected not to separate lease and non-lease components and instead accounts for these as a single lease component.

Lease terms are negotiated on an individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than the security for borrowing purposes.

Leases are recognized as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Company. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The right-of use asset is depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the leaseterm or the cost reflects the exercise of apurchase option, depreciation is calculated using the estimated useful lifeof the asset. The right-of use assets arealso subject to impairment. Refer to theaccounting policies in Impairment ofnon-financial assets section.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa sertakan nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insenti sewa.
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, awalnya diukur menggunakan indeks atau tarif pada tanggal dimulainya.
- jumlah yang diharapkan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa.
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk melaksanakannya opsi, dan
- pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, yang umumnya terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman tambahan *lessee* digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh *lessee* untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama ke aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa dengan syarat, keamanan, dan ketentuan yang serupa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Lease *(Continued)*

The Company as a lessee (Continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

- Jika memungkinkan, gunakan pembiayaan pihak ketiga terbaru yang diterima oleh penyewa individu sebagai permulaan poin, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini, dan
- Membuat penyesuaian khusus untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam kewajiban sewa sampai diberlakukan. Saat penyesuaian untuk sewa pembayaran berdasarkan indeks atau nilai berlaku, kewajiban sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak pakai.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan kepada laba atau rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Lease *(Continued)*

The Company as a lessee (Continued)

To determine the incremental borrowing rate, the Company:

- *Where possible, uses recent thirdparty financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received.*
- *Uses a build-up approach that starts with a risk free interest rate adjusted for credit risk for Leases held by the Subsidiary, which does not have recent third-party financing, and*
- *Makes adjustments specific to the lease, eg term, country, currency and security.*

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (Lanjutan)

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal kewajiban sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal, dan
- biaya restorasi

Aset hak guna umumnya disusutkan selama masa manfaat aset yang lebih pendek dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Pembayaran yang terkait dengan sewa guna usaha jangka pendek dan sewa guna aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari Peralatan dan perabot kantor kecil.

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Perusahaan. Istilahistilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh lessor yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Lease *(Continued)*

The Company as a lessee (Continued)

Right-of-use assets are measured at costcomprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
  any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
  any initial direct costs, and
  Restoration costs

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a term of 12 months or less. Low-value assets comprise Itequipment and small items of office furniture.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases of the Company. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Company and not by the respective lessor.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

y. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai *Lessor*

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengannya kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan di laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

z. Pendapatan bunga, beban bunga dan bagi hasil syariah

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrument keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

y. Lease *(Continued)*

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income is accounted on straightline basis over the lease term and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which theyare earned.

z. Interest income, interest expense and sharia profit sharing

Conventional

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets or liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instruments except future credit losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

z. Pendapatan bunga, beban bunga dan bagi hasil syariah (Lanjutan)

Konvensional (Lanjutan)

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi syariah utama terdiri dari pendapatan dari transaksi *murabahah* dan *istishna*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan dari transaksi *ijarah murabahah* dan *istishna* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

z. Interest income, interest expense and sharia profit sharing *(Continued)*

Conventional *(Continued)*

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms received by the parties in the contract that are inseparable from the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

If a financial asset or group of similar financial assets has been impaired as a result of an impairment loss, the subsequent interest income is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating the impairment loss.

Sharia

The main sharia operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from revenue sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and other income.

Income from ijarah murabahah and istishna revenue sharing is recognized using the accrual method. Income from mudharabah and musyarakah financing are recognized in the period in which the revenue sharing rights occur. Expenses based on Sharia principles consist of mudharabah profit sharing expense and wadiah bonus expense.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

z. Pendapatan bunga, beban bunga dan bagi hasil syariah (Lanjutan)

Syariah (Lanjutan)

Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian pinjaman atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

z. Interest income, interest expense and sharia profit sharing *(Continued)*

Sharia *(Continued)*

Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future.

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

aa. Fee and commission income

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the lending activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja"

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang- Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19: *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Intepretation Committee* ("IFRIC") Agenda *Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan

The Bank applies SFAS 24 (Revised 2015), "Employee Benefits".

The Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

In April 2022, FASB-IAI (Institute of Indonesia Chartere Accountants' Accounting Standard Board) issued anexplanatory material through a pressrelease regarding attribution of benefits toperiods of service in accordance withSFAS 24: Employee Benefits which was adopted from IAS 19 Employee Benefits.The explanatory material conveyed theinformation that the fact pattern of thepension program based on the LaborLaw currently enacted in Indonesia issimilar to those responded and concluded in the IFRS IntepretationCommittee ("IFRIC") Agenda DecisionAttributing Benefit to Periods of Service(IAS 19).

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (Lanjutan)

Imbalan kerja jangka pendek (Lanjutan)

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Program Pensiun Manfaat pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No.64/KEPDIR/2012 tanggal 12 Desember 2012. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ini mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner OJK No.KEP-527/NB.1/2013 tanggal 27 September 2013.

Program Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Bank dengan iuran terdiri iuran normal dan iuran tambahan. Untuk iuran normal dengan kontribusi pegawai adalah sebesar 5,00% dan kontribusi bank sebesar 8,05% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP), sedangkan iuran tambahan merupakan sisa dana yang diperlukan untuk mendanai program tersebut yang disesuaikan dengan hasil perhitungan aktuaria.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan *(Continued)*

Short-term employee benefits *(Continued)*

Short-term employee benefits are recognized when payable to the employees based on accrual basis.

Defined Benefit Pension Plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Riau Kepri as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No.64/KEPDIR/2012 dated December 12, 2012 , the Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with contributions of 5% of employees' basic pension salaries being paid by the employees and the remaining required contributions being paid by the Bank.

Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri was approved by OJK in decree No.KEP-527/NB.1/2013 dated September 27, 2013.

Defined benefit pension plan is managed by Bank with contribution which consist of normal contribution and additional contribution. For normal contribution with employer's contribution is 5,00% and Bank Contribution is 8,05% from pensionable earnings (PhDP), while additional contributions is the remainder of the necessary funds to finance the program that is tailored to the results of actuarial calculations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (Lanjutan)

Program Pensiun Iuran Pasti (Lanjutan)

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No.022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020, mana yang lebih tinggi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini liabilitas manfaat pasti *(defined benefit obligation)* atau 10% dari nilai wajar aset program *(fair value of plan assets).*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan *(Continued)*

Defined Contribution Pension Plan *(Continued)*

In accordance cooperation agreement document No.022/DLK/1/2013 dated June 24, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

The post-employment benefits are accured and recognized as expense when service have been rendered by qualified Bank employees. The benefits are determined based on the Bank regulations and the minimum requirements of Omnibus Law No. 11/2020 whichever is higher.

Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation or 10% of fair value of plan assets at that date (defined benefit obligation) or 10% from fair value of plan asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (Lanjutan)

Program Pensiun Iuran Pasti (Lanjutan)

Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada umur, masa kerja dan kompensasi. Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Beban Liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan *(Continued)*

Defined Contribution Pension Plan *(Continued)*

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which usually depends on one or more factors, such as age, years of service and total compensation. The total employee contribution in this pension program is 5% of the basic salary of the corresponding employee and the remaining required to fund the plan is borne by the Bank.

Past service costs are recognized immediately in the statement of income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in Ih the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (Lanjutan)

Program Pensiun Iuran Pasti (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial untuk setiap program pada setiap akhir periode pelaporan sebelumnya yang jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Pemupukan dana pensiun berasal dari iuran pemberi kerja dan pegawai aktif sebesar 15% dan 5% dari gaji pokok setelah dikurangi setoran iuran program pensiun manfaat pasti.

Program Tunjangan Hari tua

Program Tunjangan Hari Tua dikelola oleh Bank. Kontribusi pegawai adalah sebesar 2,00% dari penghasilan karyawan dan sisa dana yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank.

Imbalan Tunjangan Hari Tua berupa pembayaran jumlah lump-sum yang diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.04/KEPDIR/2004 tanggal 5 Januari 2004 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.98-A/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penghargaan Pensiun PT Bank Riau Kepri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan *(Continued)*

Defined Contribution Pension Plan *(Continued)*

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions for each plan at the end of the previous reporting period that exceed whichever is higher of 10% of the present value of defined benefit obligation or 10% of the fair value of plan assets at that date are charged or credited to the statement of income over the average remaining service life of the covered employees.

Fertilization of pension fund comes from the contributions of employers and active employees of 15% and 5% of the basic salary after deducting the contribution fee of the defined benefit plan.

Mutual Aid Pension Plan

The Old Day Benefit Program is managed by the Bank. Employee contribution is 2.00% of the employee's income and the remaining funds required to fund the program are contributed by the Bank.

Remuneration of Old-Age Benefit in the form of payment of lump-sum amounts granted to employees entering retirement age or stopping working for other reasons, as stipulated in Directors Decree No.04/KEPDIR/2004 dated January 5th, 2004 which was last amended by Decision Letter of Directors No. .98-A / KEPDIR / 2010 dated October 29, 2010 regarding Pension Award PT Bank Riau Kepri.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (Lanjutan)

Program Tunjangan Hari tua (Lanjutan)

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

Program Penghargaan Masa Bakti

Program Penghargaan Masa Bakti dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.010/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian. Imbalan PMB berupa piagam dan uang tunai yang besarnya telah diputuskan dalam SK Direksi tersebut kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Program Masa Persiapan Pensiun

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program Cuti Besar

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun dan kelipatannya untuk penggantian hak cuti besar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan *(Continued)*

Mutual Aid pension Plan *(Continued)*

The cooperation agreement between the Bank and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18, 2005.

Future Award Program

The Service Period Award Program is managed solely by the Bank and regulated in the latest PMB program regulations stipulated by Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No. 010/KEPDIR/2019 dated February 27, 2019 concerning the Employee Company Manual (BPP). PMB rewards in the form of a charter and cash the amount of which has been decided in the Decree of the Board of Directors to employees who have fulfilled the requirements for tenure of 15 years, 20 years, 25 years and 30 years.

Pension Preparation Period Program

Program preparation pension is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Long Service Leave Allowance

A Long Service Leave Allowance is self-managed by the Bank for employee who have a service life of over 5 years and multiples for replacement of annual leave rights.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (Lanjutan)

Tantiem

Bank membuat penyisihan atas tantiem berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

Bonus/ Jasa produksi

Bank membuat penyisihan atas jasa produksi berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Jasa produksi akan dibayarkan kepada pegawai setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disyahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana jasa produksi tersebut disahkan oleh RUPS.

ac. Pembagian Dividen/ Laba Bersih

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

Ad. Laba Bersih Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ab. Employee benefit plan *(Continued)*

Management Tantiem

The Bank sets aside for dividends based on the estimation of management and to be put into account of profits losses of the current year. The dividends shall be paid to the Board of Directors and Commissioners after obtaining the approval in the Annual General Meeting (AGM). The difference between the amount estimated by the management and the amount legalized by shareholders shall be borne or credited in the period wherein the dividends legalized by AGM.

Bonus/ Production service

The Bank sets aside for production service based on the estimation of management and to be put into account of profits losses of the current year. The production service shall be paid to the Board of Directors and Commissioners after obtaining the approval in the Annual General Meeting (AGM). The difference between the amount estimated by the management and the amount legalized by shareholders shall be borne or credited in the period wherein the production service legalized by AGM.

ac. Dividends

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend distribution is approved by the shareholders.

ad. Earnings Per Share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing income for the year attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ae. Informasi Segmen Usaha

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari kelompok usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

Bank telah mengidentifikasikan dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas konvensional dan syariah, juga berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ae. Business Segment Information

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank present business segments based on a internal report which is presented to the chief operating decision maker, namely the Board of Directors.

The Bank have identified and disclosed financial information based on their main business activities (business segments) which are divided into conventional and sharia, also based on geographical segments.

A geographical segment is engaged in providing products or services within a particular economic environment with risks and different returns compared to other operating segments in other economic environments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

af. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Ag. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

af. Provision

Provisions are recognized when I has a present obligation (legaor constructive) as a result of a pastevent, it is probable that the Companywill be required to settle the obligation,and a reliable estimate can be made I amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

ag. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

ah. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

Ai. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

ah. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ai. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provideadditional information about the Company at the reporting date (adjustingevents) are reflected in the financialstatements when material. Post year-end events that are not adjusting events aredisclosed in the notes to the financialstatements when material.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan :

Usaha yang berkelanjutan
Manajamen telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Selain itu, aset dan liabilitas tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
Manajemen menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dan ISAK 102 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern
The management has made an assessment of the Bank abilities to continue as a going concern and is satisfied that the Bank have the resources to continue its business for the foreseeable future.

Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank abilities to continue as a going concern. Therefore, the financial statement continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and liabilities
The Management define the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71 and IFAS 102. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2c.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Nilai wajar atas dan liabilitas keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar
Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi
Ketika Bank sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Manajemen Bank tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut (Catatan 34).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date;*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 for the assets and liabilities, which is directly or indirectly observable;*
- *Level 3: unobservable inputs for the assets and liabilities*

Financial assets not quoted in an active market
The Bank classify financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies
When the Bank are currently involved in legal proceedings, the estimate of the probable cost for the resolution of claims determined in consultation with the aid of the legal counsel of the Bank based upon an analysis of potential results.

Management of the Bank does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings (Note 34).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Bank dan menelaah portofolio pinjaman dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui provisi yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Estimates and assumptions

The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses of financial assets
In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating provisions made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif , Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Penurunan nilai untuk surat berharga
Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penentuan Jangka Waktu Sewa
Perusahaan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup dipastikan untuk tidak dilakukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income, the Bank make judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well are the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances

Impairment of marketable securities
The Bank determine that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Determination of Lease Term
The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Umur ekonomis dari aset tetap
Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pad a penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

Penurunan nilai aset non-keuangan
Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b. perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c. industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Useful lives of fixed asset
The Bank estimate the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

Impairment of non-financial assets
The Bank assess impairment on assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

The factors that which could trigger an impairment review include the following:

a. significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
b. significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c. significant negative industry or economic trends.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Realisasi dari aset pajak tangguhan
Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilaiaset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya. Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Perusahaan dimasa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Nilai kini atas kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya.
Biaya atas kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

The Bank recognize an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use.

Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash generating unit to which the asset belongs.

Realization of deferred tax assets
The Company conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allows to use all or part of the deferred tax assets. The Company's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period. The estimation is based on the achievement of the Company in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Company can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

Present value of post employment and other long term employment benefits
The cost of post employment and other long term employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long• term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

4. KAS / *4. CASH*

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah			*Rupiah*
Kas	421.962.997.300	605.487.340.900	*Cash*
Kas ATM	132.260.350.000	99.517.250.000	*Cash in ATM*
Sub Jumlah	554.223.347.300	705.004.590.900	*Sub Total*
Mata Uang Asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	12.954.547.064	12.488.539.338	*United States Dollar*
Dolar Singapura	2.416.026.978	1.714.625.140	*Singapore Dollar*
Euro	173.664.064	185.776.663	*Euro*
Sub Jumlah	15.544.238.106	14.388.941.141	*Sub Total*
Jumlah	**569.767.585.406**	**719.393.532.041**	***Total***

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah	4.409.541.339.832	2.037.686.383.554	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	--	5.059.637.500	*United States Dollar*
Jumlah	**4.409.541.339.832**	**2.042.746.021.054**	***Total***

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The Minimum Statutory Reserve Ratios as of August 21, 2022 and December 31, 2021 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
GWM BI			*GWM BI*
GWM Rupiah - Konvensional	7,5%	3,5%	*Rupiah GWM - Conventional*
GWM Valas	2,0%	4,0%	*Forex GWM*
GWM Rupiah - UUS	6,0%	3,5%	*GWM Rupiah - UUS*

Pada 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.24/8/PADG/2022 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Serta PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia.

In August 21, 2022 and December 31, 2021, the Bank's Minimum Statutory Reserves (GWM) complied with The Board of Governors' Regulation (PADG) No.24/8/PADG/2022 concerning minimum statutory reserves in rupiah and foreign exchange for conventional commercial Banks, sharia commercial Banks, and sharia business units. And PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021 regarding the third amendment to the regulation Bank Indonesia.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (Lanjutan)

Sebagaimana telah mengubah dan menggantikan PADG No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 2 Desember 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 1 Mei 2020, serta PBI No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah, dan Unit usaha syariah.

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank umum konvensional atau Bank umum syariah dan unit usaha syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

Rasio GWM Bank pada tanggal-tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA *(Continued)*

As amended and replaced PADG No.20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 concerning minimum statutory reserves in rupiah and foreign exchanges for conventional commercial Banks, sharia commercial banks, and sharia business units.

The Bank's Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) complies with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated April 3, 2018 concerning macroprudential intermediation ratios and macroprudential liquidity buffers for conventional commercial Banks, sharia commercial Banks, and sharia business units. As amended several times by PBI No. 21/12/PBI/2019 dated December 2, 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated May 1, 2020, and PBI No. 23/17/PBI/2021 dated December 17, 2021 regarding the Third Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/ 2018 concerning macroprudential intermediation ratios and macroprudential liquidity buffers for conventional commercial Banks, sharia commercial Banks, and sharia business units.

Minimum Statutory Reserves, hereinafter abbreviated as GWM, is the minimum amount of funds that must be maintained by conventional commercial Banks or sharia commercial Banks, and sharia business units, the amount of which is determined by Bank Indonesia in the amount of a certain percentage of DPK BUK or DPK BUS and UUS.

The Statutory Reserves Ratios as of August 21, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	**31 Desember/ *December 31, 2021***	
GWM BI			*GWM BI*
GWM Rupiah - Konvensional	15,11%	8,93%	*Rupiah GWM - Conventional*
GWM Valas	12,87%	5,96%	*Forex GWM*
GWM Rupiah - UUS	20,35%	4,07%	*GWM Rupiah - UUS*

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada Pihak berelasi.

No related party in current accounts with other banks.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah	172.666.929.778	63.417.284.193	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	32.691.633.639	19.029.216.538	*United Stated Dollar*
Dolar Singapura	2.227.698.283	3.165.345.427	*Singapore Dollar*
Euro	3.067.687.062	3.155.059.905	*Euro*
Jumlah	210.653.948.762	88.766.906.063	*Total*
Dikurangi :			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.416.733)	(6.445.146)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**210.645.532.029**	**88.760.460.917**	***Total - net***

b. Berdasarkan bank

b. By bank

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	99.059.824.627	807.614.841	*PT Bank Syariah Indonesia, Tbk*
PT Bank Central Asia, Tbk	64.845.135.946	52.707.916.806	*PT Bank Central Asia, Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	5.615.073.939	3.156.594.758	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	1.974.504.126	3.437.048.906	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	903.415.708	2.403.642.708	*PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	172.717.006	885.187.007	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Mega, Tbk	96.258.426	19.279.167	*PT Bank Mega, Tbk*
Sub Jumlah	**172.666.929.778**	**63.417.284.193**	*Sub Total*
Dollar Amerika Serikat			*United State Dollars*
Standard Chartered Bank AG	22.578.475.394	17.360.044.593	*Standard Chartered Bank AG*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	9.061.788.278	3.832.759.353	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Central Asia, Tbk	1.051.369.968	1.001.757.913	*PT Bank Central Asia, Tbk*
Euro			*Euro*
Standard Chartered Bank AG	3.067.687.062	3.155.059.905	*Standard Chartered Bank AG*
Dollar Singapura			*Singapore Dollars*
Standard Chartered Bank (Singapore)	2.227.698.176	--	*Standard Chartered Bank (Singapore)*
United Overseas Bank Singapura	106	106	*United Overseas Bank Singapore*
Sub Jumlah	**37.987.018.984**	**25.349.621.870**	*Sub Total*
Jumlah	**210.653.948.762**	**88.766.906.063**	*Total*
Dikurangi :			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.416.733)	(6.445.146)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**210.645.532.029**	**88.760.460.917**	***Total - net***

6. GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (Continued)

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

c. Average interest rate per annum

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah	0,00% - 2,00%	0,00% - 3,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0% - 0,75%	0% - 0,75%	*Foreign currencies*

Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang di blokir atau yang digunakan sebagai agunan.

There is no balance of clearing in other bank blocked or used as collateral.

d. Kolektibilitas

d. Collectibility

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas giro pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Based on the review and evaluation of bank management, the collectibility of current accounts with other banks is entirely current. The Bank's management believes that the allowance for impairment losses established is adequate to cover possible losses from uncollectible current accounts with other banks.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Penempatan pada Bank Lain	2.279.626.908	458.610.393.708	*Placement with Others Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia	--	2.875.770.885.839	*Placement with Bank Indonesia*
Jumlah	2.279.626.908	3.334.381.279.547	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.279.626.908**	**3.334.381.279.547**	***Total - net***

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat dibedakan berdasarkan jenis dan nama bank, mata uang dan jatuh tempo yang dapat dirinci sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia and other banks can be differentiated based on the type and name of the bank, currency and maturity which can be specified as follows:

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (Lanjutan)

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (Continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank

a. By type, currency and bank

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah			*Rupiah*
Tabungan			*Savings Account*
PT Bank Syariah Indonesia,Tbk	2.279.626.908	2.347.893.708	*PT Bank Syariah Indonesia,Tbk*
Intervensi Bank Indonesia			*Bank Indonesia Intervention*
FASBI/FASBIS - BI	--	2.875.770.885.839	*FASBI/FASBIS - BI*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)			*Mudharabah Investment Certificate Inter Bank (SIMA)*
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	--	150.000.000.000	*- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk*
- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara	--	75.000.000.000	*- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara*
- PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah	--	20.000.000.000	*- PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah*
Interbank call money			*Interbank call money*
- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	--	100.000.000.000	*- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung*
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	--	40.000.000.000	*- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah*
Dollar Amerika Serikat			*United Stated Dollar*
Deposito berjangka			*Time deposit*
- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara	--	71.262.500.000	*- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara*
Jumlah	**2.279.626.908**	**3.334.381.279.547**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - net	**2.279.626.908**	**3.334.381.279.547**	***Total - net***

b. Berdasarkan saat jatuh tempo

b. By remaining period to maturity date

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
< 1 bulan	2.279.626.908	3.123.118.779.547	*< 1 month*
1-3 bulan	--	211.262.500.000	*1-3 month*
9-12 bulan	--	--	*9-12 month*
Jumlah	**2.279.626.908**	**3.334.381.279.547**	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**2.279.626.908**	**3.334.381.279.547**	***Total - net***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

c. Average interest rate per annum

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Rupiah	0% - 4,00%	0% - 4,00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0% - 0,75%	0% - 0,75%	*United State Dollar*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (Lanjutan)

Bank tidak memiliki transaksi dengan Pihak berelasi semua transaksi hanya dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas penempatan pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa seluruh penempatan dapat ditagih, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak perlu dibentuk

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (Continued)

Bank has no transaction with privileged relation party for all transactions are only with third party.

Based on the review and evaluation of bank management, the collectability of placements with other banks is entirely current. The Bank's management believes that all placements are fully collectible, so there is no need to provide allowance for impairment losses

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Klasifikasi jenis dan tujuan investasi / *a. Classification based on type and invesment*

	21 Agustus/ *August 21, 2022*	31 Desember/ *December 31, 2021*	
Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.374.518.320.350	2.832.345.764.349	*Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income*
Sukuk Negara yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	30.000.000.000	30.000.000.000	*Government Sukuk measured at amortized cost*
Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.102.804.503	--	*Corporate Sukuk measured at amortized cost*
Premium Sukuk Negara yang belum diamortisasi	809.141.851	1.025.997.595	*Unamortized Premium on Government Sukuk*
Sukuk BI yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	--	1.207.402.000.000	*BI Sukuk at fair value through other comprehensive income*
Reksadana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	--	1.167.610.229.785	*Mutual funds measured at amortized cost*
Jumlah - Surat berharga	3.410.430.266.704	5.238.383.991.729	*Total marketable securities*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(882.344.226)	(897.156.165)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.409.547.922.478**	**5.237.486.835.564**	***Total - net***

b. Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo / *b. Classification to maturity*

• Sampai dengan 1 bulan	--	--	*Less than 1 month •*
• Lebih dari 1 s/d 12 bulan	3.410.430.266.704	5.238.383.991.729	*More than 1 s/d 12 month •*
Jumlah	**3.410.430.266.704**	**5.238.383.991.729**	***Total***

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

c. Rincian surat berharga

c. Detail of marketable secuties

1). Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun / *Annual Revenue Sharing Rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 21 Agustus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*	Nilai Tercatat 31 Desember 2021 / *Carrying Value December 31, 2021*
Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain)/ *Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)*						
PBS027	01/10/2020	15/05/2023	6,50%	23.136.000.000	23.556.381.120	23.457.657.454
PBS027	11/02/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	40.805.735.619
PBS027	11/02/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	40.809.104.765
PBS027	09/03/2021	15/05/2023	6,50%	20.000.000.000	20.363.400.000	20.441.703.014
PBS027	10/03/2021	15/05/2023	6,50%	25.000.000.000	25.454.250.000	25.548.255.767
PBS027	12/03/2021	15/05/2023	6,50%	20.000.000.000	20.363.400.000	20.454.298.579
PBS027	16/03/2021	15/05/2023	6,50%	5.000.000.000	5.090.850.000	5.110.506.351
PBS027	22/03/2021	15/05/2023	6,50%	25.000.000.000	25.454.250.000	25.579.114.520
PBS027	06/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	40.979.862.167
PBS027	16/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	40.982.016.872
PBS027	16/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	40.969.024.012
PBS027	16/07/2021	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	40.991.704.285
PBS027	25/04/2022	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	--
PBS027	26/04/2022	15/05/2023	6,50%	40.000.000.000	40.726.800.000	--
PBS027	26/04/2022	15/05/2023	6,50%	45.000.000.000	45.817.650.000	--
PBS027	27/04/2022	15/05/2023	6,50%	30.000.000.000	30.545.100.000	--
SR014	06/07/2021	10/03/2024	5,47%	25.000.000.000	25.096.000.000	25.496.598.015
SR014	05/10/2021	10/03/2024	5,47%	45.000.000.000	45.172.800.000	45.960.706.722
SR014	11/10/2021	10/03/2024	5,47%	20.000.000.000	20.076.800.000	20.429.195.738
SR014	11/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	40.153.600.000	40.858.391.476
SR014	12/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	40.153.600.000	40.860.500.742
SR014	12/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	40.153.600.000	40.861.207.123
SR014	12/10/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	40.153.600.000	40.860.500.742
SR014	19/10/2021	10/03/2024	5,47%	47.000.000.000	47.180.480.000	48.016.618.201
SR014	19/10/2021	10/03/2024	5,47%	25.000.000.000	25.096.000.000	25.541.365.466
SR014	10/11/2021	10/03/2024	5,47%	40.000.000.000	40.153.600.000	40.888.300.687
PBS031	02/08/2021	15/07/2024	4,00%	45.000.000.000	43.814.250.000	44.919.493.917
PBS031	03/08/2021	15/07/2024	4,00%	40.000.000.000	38.946.000.000	39.946.706.789
PBS031	03/08/2021	15/07/2024	4,00%	45.000.000.000	43.814.250.000	44.942.999.985
PBS031	21/04/2022	15/07/2024	4,00%	45.000.000.000	43.814.250.000	--
PBS031	21/04/2022	15/07/2024	4,00%	40.000.000.000	38.946.000.000	--
SR015	15/12/2021	10/09/2024	5,10%	45.000.000.000	44.717.850.000	45.615.848.913
SR015	16/12/2021	10/09/2024	5,10%	40.000.000.000	39.749.200.000	40.549.653.014
SR015	17/01/2022	10/09/2024	5,10%	45.000.000.000	44.717.850.000	--
SR015	25/01/2022	10/09/2024	5,10%	40.000.000.000	39.749.200.000	--
SR015	08/04/2022	10/09/2024	5,10%	45.000.000.000	44.717.850.000	--
PBS026	01/10/2020	15/10/2024	6,63%	23.936.000.000	24.464.267.520	25.028.990.342
PBS026	01/10/2020	15/10/2024	6,63%	25.000.000.000	25.551.750.000	26.133.098.638
PBS026	11/12/2020	15/10/2024	6,63%	40.000.000.000	40.882.800.000	41.783.123.300
PBS026	16/03/2021	15/10/2024	6,63%	20.000.000.000	20.441.400.000	20.998.943.789
PBS026	04/10/2021	15/10/2024	6,63%	45.000.000.000	45.993.150.000	47.451.053.584
PBS026	06/10/2021	15/10/2024	6,63%	45.000.000.000	45.993.150.000	47.458.519.167
PBS026	11/10/2021	15/10/2024	6,63%	45.000.000.000	45.993.150.000	47.466.143.253
PBS017	26/11/2020	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.432.764.243
PBS017	26/11/2020	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.477.419.338
PBS017	26/11/2020	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.488.505.451
PBS017	14/01/2021	15/10/2025	6,13%	23.306.000.000	23.466.112.220	24.186.229.732
PBS017	14/01/2021	15/10/2025	6,13%	25.000.000.000	25.171.750.000	25.932.453.140
PBS017	11/02/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.517.597.519
PBS017	11/02/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.520.486.970
PBS017	07/05/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.593.142.551
PBS017	01/11/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	46.824.230.258
PBS017	25/11/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	46.848.489.532
PBS017	02/12/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.650.943.238
PBS017	02/12/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	46.857.582.799
PBS017	06/12/2021	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	41.655.726.774
PBS017	06/12/2021	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	46.863.086.282
PBS017	07/12/2021	15/10/2025	6,13%	30.000.000.000	30.206.100.000	31.243.451.095

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan) / *8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

c. Rincian surat berharga (Lanjutan) / *c. Detail of marketable secuties (Continued)*

1). Sukuk Negara yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Lanjutan)/
Government Sukuk measured at fair value through other comprehensive income *(Continued)*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun / *Annual Revenue Sharing Rate*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 21 Agustus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*	Nilai Tercatat 31 Desember 2021 / *Carrying Value December 31, 2021*
Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain)/ ***Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)***						
PBS017	19/01/2022	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	--
PBS017	08/02/2022	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	--
PBS017	08/02/2022	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	--
PBS017	17/02/2022	15/10/2025	6,13%	45.000.000.000	45.309.150.000	--
PBS017	18/02/2022	15/10/2025	6,13%	40.000.000.000	40.274.800.000	--
PBS032	02/08/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	40.105.045.732
PBS032	03/08/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	40.113.818.351
PBS032	26/08/2021	15/07/2026	4,88%	25.000.000.000	23.635.250.000	25.067.447.510
PBS032	26/08/2021	15/07/2026	4,88%	1.889.000.000	1.785.879.490	1.894.299.882
PBS032	27/08/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	45.113.041.514
PBS032	30/08/2021	15/07/2026	4,88%	30.000.000.000	28.362.300.000	30.076.120.430
PBS032	03/09/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	40.098.755.011
PBS032	03/09/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	45.113.794.770
PBS032	08/09/2021	15/07/2026	4,88%	25.000.000.000	23.635.250.000	25.063.516.041
PBS032	29/11/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	45.092.768.346
PBS032	29/11/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	40.082.460.752
PBS032	01/12/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	45.092.947.823
PBS032	07/12/2021	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	45.093.894.249
PBS032	07/12/2021	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	40.083.354.092
PBS032	26/01/2022	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	--
PBS032	27/01/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	--
PBS032	27/01/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	--
PBS032	11/03/2022	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	--
PBS032	14/03/2022	15/07/2026	4,88%	45.000.000.000	42.543.450.000	--
PBS032	13/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	--
PBS032	14/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	--
PBS032	14/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	--
PBS032	14/04/2022	15/07/2026	4,88%	40.000.000.000	37.816.400.000	--
PBS003	05/11/2021	15/01/2027	6,00%	45.000.000.000	44.155.350.000	46.148.198.301
PBS003	05/11/2021	15/01/2027	6,00%	40.000.000.000	39.249.200.000	41.020.300.994
PBS030	05/07/2021	15/07/2028	5,88%	20.000.000.000	19.279.000.000	20.096.485.013
PBS030	26/08/2021	15/07/2028	5,88%	21.000.000.000	20.242.950.000	21.097.058.318
FR0065	28/02/2013	15/05/2033	6,63%	20.000.000.000	--	20.124.940.995
FR0065	28/02/2013	15/05/2033	6,63%	6.137.000.000	--	6.177.177.770
SPNS14012022	16/07/2021	14/01/2022	3,15%	100.000.000.000	--	100.000.000.000
SPNS12022022	28/09/2021	12/02/2022	2,88%	100.000.000.000	--	100.000.000.000
SPNS12022022	28/09/2021	12/02/2022	2,88%	100.000.000.000	--	100.000.000.000
Jumlah Sukuk Pemerintah (Diukur pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain) ***Total Government Sukuk (Measured at fair value through other comprehensive income)***				**3.676.404.000.000**	**3.313.585.320.350**	**2.772.044.477.826**

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan) / *8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

c. Rincian surat berharga (Lanjutan) / *c. Detail of marketable secuties (Continued)*

1). Obligasi Korporasi Non-Bank yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Lanjutan)/ *Non-Bank Corporate Bonds measured at fair value through other comprehensive income (Continued)*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat 21 Agustus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*	Nilai Tercatat 31 Desember 2021 / *Carrying Value December 31, 2021*
Obligasi Korporasi (Diukur pada nilai wajar pada komprehensif lain)/ ***Corporation Bonds (Measured at fair value through other comprehensive)***						
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	27/10/2017	28/09/2022	8,75%	8.000.000.000	8.124.400.000	8.050.797.194
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	27/10/2017	28/09/2022	8,75%	10.000.000.000	10.155.500.000	10.063.496.493
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	10/01/2018	28/09/2022	8,75%	14.000.000.000	14.217.700.000	14.073.672.695
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	02/02/2018	28/09/2022	8,75%	15.000.000.000	15.233.250.000	15.060.707.216
Obligasi PT Timah Tbk Seri B	02/02/2018	28/09/2022	8,75%	13.000.000.000	13.202.150.000	13.052.612.925
Jumlah Obligasi Korporasi (Diukur pada nilai wajar pada komprehensif lain)/ ***Total Corporation Bond (Measured at fair value through other comprehensive income)***				**60.000.000.000**	**60.933.000.000**	**60.301.286.523**
Jumlah Sukuk/ Obligasi/ ***Total Sukuk/ Bond***				**3.736.404.000.000**	**3.374.518.320.350**	**2.832.345.764.349**

2). Sukuk Negara yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Government Sukuk measured at amortized cost*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun / *Annual Revenue Sharing Rate*	Nilai Tercatat 21 Agustus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*	Nilai Tercatat 31 Desember 2021 / *Carrying Value December 31, 2021*
PBS026 - SBSN PBS026	25/08/2020	15/10/2024	6,63%	10.000.000.000	10.000.000.000
PBS026 - SBSN PBS026	29/09/2020	15/10/2024	6,63%	10.000.000.000	10.000.000.000
PBS 027 - SBSN PBS027	29/09/2020	15/05/2023	6,50%	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah Sukuk Negara yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ ***Total Government Sukuk measured at amortized cost***				**30.000.000.000**	**30.000.000.000**

3). Premium Sukuk Negara yang belum diamortisasi/ *Unamortized Premium on Government Sukuk*

Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun / *Annual Revenue Sharing Rate*	Nilai Tercatat 21 Agustus 2022 / *Carrying Value August 21, 2022*	Nilai Tercatat 31 Desember 2021 / *Carrying Value December 31, 2021*
PBS026 - SBSN PBS026	25/08/2020	15/10/2024	6,63%	305.443.548	366.532.258
PBS026 - SBSN PBS026	29/09/2020	15/10/2024	6,63%	320.273.727	384.328.473
PBS027 - SBSN PBS027	29/09/2020	15/05/2023	6,50%	183.424.576	275.136.864
Jumlah Premium Sukuk Negara yang belum diamortisasi/ ***Total Unamortized Premium on Government Sukuk***				**809.141.851**	**1.025.997.595**

4). Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Corporate Sukuk measured at amortized cost*

21 Agustus / *August* 21, 2022				
Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun / *Annual Revenue Sharing Rate*	Nilai Tercatat / *Carrying Value*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III	16/03/2022	27/03/2023	7,00%	5.102.804.503
Jumlah Sukuk Korporasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ ***Total Corporate Sukuk measured at amortized cost***				**5.102.804.503**

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan) / *8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

c. Rincian surat berharga (Lanjutan) / *c. Detail of marketable secuties (Continued)*

5). Sukuk BI yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *BI Sukuk at fair value through other comprehensive income*

31 Desember / *December* 31, 2021				
Surat Berharga / ***Marketable Security***	**Penempatan /** ***Placement***	**Jatuh Tempo /** ***Due Date***	**Tingkat Bagi Hasil Per Tahun /** ***Annual Revenue Sharing Rate***	**Nilai Tercatat /** ***Carrying Value***
SUKUK01-000378	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000379	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000380	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000381	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000382	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000383	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000384	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000385	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	91.062.000.000
SUKUK01-000386	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000387	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000388	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000389	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000390	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000391	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	65.330.000.000
Jumlah Sukuk BI yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ ***Total BI Sukuk at fair value through other comprehensive income***				**1.207.402.000.000**

6). Reksadana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Mutual funds measured at amortized cost*

31 Desember / *December* 31, 2021				
Surat Berharga / **Marketable Security**	**Penempatan /** ***Placement***	**Jatuh Tempo /** ***Due Date***	**Bunga /** ***Interest***	**Nilai Tercatat /** ***Carring Value***
RR SBN 7 HR / VR0047	27/12/2021	03/01/2022	3,50%	84.981.321.846
RR SBN 7 HR / VR0051	27/12/2021	03/01/2022	3,50%	84.851.337.772
RR SBN 7 HR / VR0062	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0062	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0062	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0062	29/12/2021	05/01/2022	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0058	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	119.065.446.390
RR SBN 7 HR / VR0058	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	119.065.446.390
RR SBN 7 HR / VR0039	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	118.996.393.228
RR SBN 7 HR / VR0039	31/12/2021	07/01/2022	3,50%	118.996.393.228
Jumlah Reksadana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ ***Total Mutual funds measured at amortized cost***				**1.167.610.229.785**

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

d. Kolektibilitas surat berharga sebagai berikut:

d. Collectibility of marketable securities is as follow:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Lancar	3.410.430.266.704	5.238.383.991.729	*Current*
Macet	--	--	*Loss*
Jumlah	**3.410.430.266.704**	**5.238.383.991.729**	*Total*
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	(882.344.226)	(897.156.165)	Allowance for impairment *losses Marketable Sekurities*
Jumlah - bersih	**3.409.547.922.478**	**5.237.486.835.564**	***Total - nett***

Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainsetelah pajak tangguhan dirinci sebagai berikut:

Unrealized gains/ losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and Government Bonds net of deferred tax detail is as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga tersedia untuk dijual	(82.788.799.087)	2.862.580.837	*Unrealized gains (loss) net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Pajak tangguhan	18.213.535.799	(629.767.784)	*Deferred tax*
Jumlah	**(64.575.263.288)**	**2.232.813.053**	***Total***

e. Berdasarkan peringkat

e. Based on rating

	21 Agustus/ *August* 21, 2022			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through through other comprehensive income***
Sukuk Pemerintah	--	--	3.313.585.320.350	*Government Sukuk*
PT Timah (Persero), Tbk	Pefindo	A	60.933.000.000	*PT Timah Tbk*
Sub jumlah			**3.374.518.320.350**	*Sub total*
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Sukuk Pemerintah	--	--	30.000.000.000	*Government Sukuk*
Premium (Diskonto) yang belum diamortisasi	--	--	809.141.851	*Unamortized Premium (Discount)*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	AAA	5.102.804.503	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Sub jumlah			**35.911.946.354**	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			(882.344.226)	*Allowance for imparment losses*
Jumlah			**3.409.547.922.478**	***Total***

8. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (Lanjutan)

8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITIES (Continued)

e. Berdasarkan peringkat (Lanjutan)

e. Based on rating (Continued)

	31 Desember/ *December* 31, 2021			
	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through through other comprehensive income***
Sukuk Pemerintah	--	--	2.772.044.477.826	*Government Sukuk*
PT Timah (Persero), Tbk	Pefindo	A	60.301.286.523	*PT Timah Tbk*
Sertifikat Bank Indonesia	--	--	1.207.402.000.000	*Bank indonesia certificate*
Sub jumlah			**4.039.747.764.349**	*Sub total*
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Sukuk Pemerintah	--	--	30.000.000.000	*Government Sukuk*
Premium yang belum diamortisasi	--	--	1.025.997.595	*Unamortized Premium*
Reksadana	--	--	1.167.610.229.785	*Mutual Fund*
Sub jumlah			**1.198.636.227.380**	*Sub total*
Cadangan kerugian penurunan nilai			(897.156.165)	*Allowance for imparment losses*
Jumlah			**5.237.486.835.564**	***Total***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING

Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah seluruhnya diberikan dalam mata uang Rupiah sebagai berikut:

All loans and sharia financing were granted in Rupiah and details are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Konsumtif	14.813.327.394.115	14.755.885.284.282	*Consumer*
Investasi	2.788.339.642.265	2.400.323.925.834	*Investment*
Modal kerja	1.805.408.991.579	1.728.704.791.013	*Working capital*
Jumlah	**19.407.076.027.959**	**18.884.914.001.129**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.907.276.406.175**	**18.388.304.138.810**	***Total - net***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

a. Berdasarkan jenis

a. By type

Konvensional dan unit syariah

Conventional and sharia unit

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Konsumtif			*Consumer*
Pihak berelasi	1.449.446.115	902.461.762	*Related parties*
Pihak ketiga	14.811.877.948.000	14.754.982.822.520	*Third parties*
Investasi			*Investment*
Pihak berelasi	--	--	*Related parties*
Pihak ketiga	2.788.339.642.265	2.400.323.925.834	*Third parties*
Modal kerja			*Working capital*
Pihak berelasi	--	--	*Related parties*
Pihak ketiga	1.805.408.991.579	1.728.704.791.013	*Third parties*
Jumlah	19.407.076.027.959	18.884.914.001.129	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.907.276.406.175**	**18.388.304.138.810**	***Total - net***

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

Konvensional

Conventional

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian	1.889.376.576.031	1.823.459.454.613	*Agriculture, labor and and agricultural means*
Pertambangan	1.324.098.002	1.186.057.633	*Mining*
Industri pengolahan	26.387.265.679	35.026.502.625	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	56.109.594.630	54.546.598.215	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	910.635.141.986	888.956.220.549	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	519.825.663.599	908.878.998.243	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	9.925.289.703	15.348.277.705	*Transportation, warehousing and communication*
Jasa dunia usaha	458.492.630.982	4.680.406.105	*Bussiness service*
Jasa sosial dan masyarakat	6.088.287.851	103.837.979.682	*Social service and public*
Lain-lain	7.843.488.667.863	10.030.437.708.824	*Other*
Jumlah	**11.721.653.216.326**	**13.866.358.204.194**	*Total*

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (Lanjutan)

b. By economic sector (Continued)

Unit syariah

Sharia unit

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian	143.352.696.488	102.909.150.986	*Agriculture, labor and agriculture medium*
Pertambangan	66.666.668	--	*Mining*
Industri pengolahan	353.800.936.756	2.931.614.818	*Manufacturing*
Listrik, gas dan air	85.277.774	187.499.998	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	87.239.221.893	76.161.429.054	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	69.711.800.636	57.688.902.305	*Trading, restaurants and hotels*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	702.481.484	1.134.815.263	*Transportation, warehousing and communication*
Jasa dunia usaha	61.037.013.515	26.801.494.491	*Bussiness service*
Jasa sosial dan masyarakat	397.939.650	11.997.435.441	*Social service and public*
Lain-lain	6.969.028.776.769	4.738.743.454.579	*Other*
Jumlah	**7.685.422.811.633**	**5.018.555.796.935**	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.907.276.406.175**	**18.388.304.138.810**	***Total - net***

c. Berdasarkan jatuh tempo

c. Based on maturity

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	1.589.702.065.264	1.417.615.566.786	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	1.202.434.590.645	1.353.206.880.585	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.621.107.050.413	3.642.837.133.346	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	12.993.832.321.637	12.471.254.420.412	*More than 5 years*
Jumlah	**19.407.076.027.959**	**18.884.914.001.129**	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.907.276.406.175**	**18.388.304.138.810**	***Total - net***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

d. Berdasarkan jangka waktu perjanjian pinjaman

d. Based on term of loans agreements

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	246.412.429.668	226.697.486.479	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	174.884.808.456	163.438.629.424	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.213.900.562.599	3.129.058.825.495	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	15.771.878.227.236	15.365.719.059.731	*More than 5 years*
Jumlah	**19.407.076.027.959**	**18.884.914.001.129**	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.907.276.406.175**	**18.388.304.138.810**	***Total - net***

e. Berdasarkan pihak

e. Based on parties

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak berelasi	1.449.446.115	902.461.762	*Related parties*
Pihak ketiga	19.405.626.581.844	18.884.011.539.367	*Third parties*
Jumlah	**19.407.076.027.959**	**18.884.914.001.129**	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(499.799.621.784)	(496.609.862.319)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.907.276.406.175**	**18.388.304.138.810**	***Total - net***

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

Bank telah melakukan restrukturisasi pinjaman untuk debitur yang terdampak pandemic Covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2021 (POJK 17/2021) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/202 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampa Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (berlaku hingga 31 Maret 2023).

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019

The Bank has restructured loans for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.03/2021 (POJK17/2021) concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (valid until March 31, 2023).

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lanjutan)

Sampai dengan 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 realisasi restrukturisasi pinjaman terkait covid 19 sebanyak 2.696 debitur dan 2.444 debitur dengan plafond / baki debet Rp1.227.075.851.980 dan Rp1.138.025.055.806. Total penundaan sampai dengan 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp251.861.458.319 dan Rp238.826.147.238 dengan skeme perpanjangan jangka waktu, penundaan pokok, penundaan bunga, serta penundaan pokok dan bunga.

Adapun mengenai rincian realisasi pinjaman direstrukturisasi per 21 Agustus 2022 terkait Covid-19, sebagai berikut:

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING *(Continued)*

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 *(Continued)*

*Until August 21, 2022 and December 31, 2021, the realization of loans restructuring related to covid 19 was 2,696 debtors and 2,444 debtors with a debit limit/ balance of Rp1,*227,075,851,980 *and Rp1,138,025,055,806. The total delays until August 21, 2022 and December 31, 2021 are Rp251,861,458,319 and Rp238,826,147,238 with the scheme of extension of time period, deferment of principal, deferral of interest, as well as deferral of principal and interest.*

The details of the restructured loans realization as of August 21, 2022 related to Covid-19 is as follows:

1). Total Debitur Terdampak Covid-19 / *Total Debtors Affected by Covid-19*

21 Agustus / *August* 21, 2022					
Segmen/ *Segment*	**Jumlah Debitur/ *Total Debtors***	**Baki Debet (Rp)/ *Debit Balance (Rp)***	**Penundaan Pokok (Rp)/ *Principal Delay (Rp)***	**Penundaan Bunga (Rp)/ *Interest Delay (Rp)***	**Jumlah Penundaan & Bunga (Rp)/ *Total Delay & Interest (Rp)***
Korporasi / *Corporation*	8	1.227.172.283.353	17.500.000.000	26.258.877.968	43.758.877.968
Menengah / *intermedian*	344	190.061.393.173	9.129.129.999	2.247.455.853	11.376.585.851
Kecil / *Small*	7.835	524.352.172.148	233.879.921.539	58.487.421.993	292.367.343.532
Konsumer / *Consumer*	1.498	181.913.433.145	6.980.026.970	1.742.990.021	8.723.016.991
Jumlah/ *Total*	**9.685**	**2.123.499.281.819**	**267.489.078.508**	**88.736.745.835**	**356.225.824.342**

2). Realisasi Restrukturisasi Covid - 19 / *Realization of Covid-19 Restructuring*

21 Agustus / *August* 21, 2022					
Segmen/ *Segment*	**Jumlah Debitur/ *Total Debtors***	**Baki Debet (Rp)/ *Debit Balance (Rp)***	**Penundaan Pokok (Rp)/ *Principal Delay (Rp)***	**Penundaan Bunga (Rp)/ *Interest Delay (Rp)***	**Jumlah Penundaan & Bunga (Rp)/ *Total Delay & Interest (Rp)***
Korporasi / *Corporation*	9	791.992.428.720	72.896.351.251	8.166.211.269	81.062.562.520
Menengah / *intermedian*	116	89.126.482.785	6.052.779.723	1.963.057.024	8.015.836.747
Kecil / *Small*	1.884	258.485.432.010	104.193.065.968	31.836.803.020	136.029.868.988
Konsumer / *Consumer*	687	87.471.508.465	17.816.761.582	8.936.428.481	26.753.190.064
Jumlah/ *Total*	**2.696**	**1.227.075.851.980**	**200.958.958.525**	**50.902.499.794**	**251.861.458.319**

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lanjutan)

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Continued)

3). Rincian Realisasi Restrukturisasi covid-19 / *Details of the Realization of the Covid-19 Restructuring*

No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet/ *Debit Balance*	Total Penundaan / *Total Delays*
		21 Agustus / *August* 21, 2022		
1. *Grace Period* :				
a.	penundaan pokok / *principal delay*	962	238.403.212.441	100.791.931.789
b.	penundaan bunga / *interest delay*	54	136.794.898.637	8.639.754.742
c.	penundaan pokok dan bunga / *principal and interest delay*	952	655.843.790.490	142.429.771.787
2.	Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*	6	11.528.707.251	--
3.	Perpanjangan jangka waktu / *Extension of time period*	722	184.505.243.161	--
4.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears	--	--	--
5.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears	--	--	--
6.	Penambahan fasilitas pinjaman / *Additional loan facilities*	--	--	--
7.	Konversi pinjaman/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal *Conversion of loan/financing into Temporary Equity Participation*	--	--	--
	Jumlah/ *Total*	**2.696**	**1.227.075.851.980**	**251.861.458.319**

4). Saldo Realisasi Debitur Terdampak Covid-19 / *Actual Balance of Debtors Affected by Covid-19*

Segmen/ *Segment*	Jumlah Debitur/ *Total Debtors*	Baki Debet (Rp)/ *Debit Balance (Rp)*	Penundaan Pokok (Rp)/ *Principal Delay (Rp)*	Penundaan Bunga (Rp)/ *Interest Delay (Rp)*	Jumlah Penundaan & Bunga (Rp)/ *Total Delay & Interest (Rp)*
			21 Agustus / *August* 21, 2022		
Korporasi / *Corporation*	4	163.367.783.411	--	8.148.461.529	8.148.461.529
Menengah / *Intermediate*	58	34.165.510.930	3.111.971.124	465.871.183	3.577.842.307
Kecil / *Small*	972	106.653.832.113	82.208.543.843	23.020.148.263	105.228.692.106
Konsumer / *Consumer*	295	33.884.590.398	9.437.032.173	3.495.689.805	12.932.721.978
Jumlah/ *Total*	**1.329**	**338.071.716.852**	**94.757.547.139**	**35.130.170.780**	**129.887.717.920**

5). Rincian Saldo Realisasi Debitur Terdampak Covid-19 / *Details of the Realized Balance of Debtors Affected by Covid-19*

No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet/ *Debit Balance*	Total Penundaan / *Total Delays*
		21 Agustus / *August* 21, 2022		
1. *Grace Period* :				
a.	penundaan pokok / *principal delay*	608	72.259.440.400	17.274.830.343
b.	penundaan bunga / *interest delay*	35	133.350.056.809	8.323.511.970
c.	penundaan pokok dan bunga / *principal and interest delay*	468	64.196.217.759	104.289.375.607
2.	Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*	4	5.130.569.241	--
3.	Perpanjangan jangka waktu / *Extension of time period*	214	63.135.432.643	--
4.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears	--	--	--
5.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears	--	--	--
6.	Penambahan fasilitas pinjaman / *Additional loan facilities*	--	--	--
7.	Konversi pinjaman/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal	--	--	--
	Conversion of loan/financing into Temporary Equity Participation	--	--	--
	Jumlah/ Total	**1.329**	**338.071.716.852**	**129.887.717.920**

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lanjutan)

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Continued)

6). Rincian Kumulatif Realisasi Debitur Restrukturisasi Terdampak Covid-19 berdasarkan wilayah */ Details of Cumulative Realization of Covid-19 Affected Restructuring Debtors by region*

21 Agustus / *August* 21, 2022						
Jenis / *Type*	Wilayah Riau / *Riau Region*		Wilayah Kepri / *Kepri region*		*Total*	
	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Balance (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / Debit Balance (in Rupiah)	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / Debit Balance (in Rupiah)
Korporasi / *Corporation*	4	163.367.783.411	--	--	4	163.367.783.411
Menengah / *Intermedian*	32	17.352.782.748	26	16.812.728.182	58	34.165.510.930
Kecil / *Small*	648	66.248.467.650	324	40.405.364.462	972	106.653.832.112
Konsumer / *Consumer*	127	12.570.185.159	168	21.314.405.239	295	33.884.590.398
Jumlah/ *Total*	**811**	**259.539.218.968**	**518**	**78.532.497.883**	**1.329**	**338.071.716.851**

1). Total Debitur Terdampak Covid-19 / *Total Debtors Affected by Covid-19*

31 Desember / *December* 31, 2021					
Segmen/ *Segment*	Jumlah Debitur/ *Total Debtors*	Baki Debet (Rp)/ *Debit Balance (Rp)*	Penundaan Pokok (Rp)/ *Principal Delay (Rp)*	Penundaan Bunga (Rp)/ *Interest Delay (Rp)*	Jumlah Penundaan & Bunga (Rp)/ *Total Delay & Interest (Rp)*
Korporasi / *Corporation*	5	1.227.172.283.353	17.500.000.000	26.258.877.968	43.758.877.968
Menengah / *Intermedian*	38	190.061.393.173	9.129.129.999	2.247.455.853	11.376.585.851
Kecil / *Small*	746	524.352.172.148	233.879.921.539	58.487.421.993	292.367.343.532
Konsumer / *Consumer*	139	181.913.433.145	6.980.026.970	1.742.990.021	8.723.016.991
Jumlah/ *Total*	**928**	**2.123.499.281.820**	**267.489.078.508**	**88.736.745.835**	**356.225.824.343**

2). Realisasi Restruk Covid - 19 / *Realization of Covid-19 Restrictions*

31 Desember / *December* 31, 2021					
Segmen/ *Segment*	Jumlah Debitur/ *Total Debtors*	Baki Debet (Rp)/ *Debit Balance (Rp)*	Penundaan Pokok (Rp)/ *Principal Delay (Rp)*	Penundaan Bunga (Rp)/ *Interest Delay (Rp)*	Jumlah Penundaan & Bunga (Rp)/ *Total Delay & Interest (Rp)*
Korporasi / *Corporation*	7	745.392.510.925	72.896.351.251	8.166.211.269	81.062.562.520
Menengah / *Intermedian*	105	82.240.535.119	5.049.790.838	960.068.138	6.009.858.976
Kecil / *Small*	1.750	236.151.721.331	101.100.626.533	29.949.175.917	131.049.802.450
Konsumer / *Consumer*	582	74.240.288.431	13.886.045.657	6.817.877.634	20.703.923.292
Jumlah/ *Total*	**2.444**	**1.138.025.055.806**	**192.932.814.279**	**45.893.332.958**	**238.826.147.238**

3). Rincian Realisasi Restruk covid-19 / *Details of the Realization of the Covid-19 Restruct*

31 Desember / *December* 31, 2021				
No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet/ *Debit Balance*	Total Penundaan / *Total Delays*
1. *Grace Period*:				
a.	penundaan pokok / *principal delay*	956	237.829.000.954	100.127.220.303
b.	penundaan bunga / *interest delay*	54	136.794.898.637	8.639.754.742
c.	penundaan pokok dan bunga / *principal and interest delay*	781	627.378.521.344	130.059.172.193
2.	Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*	4	9.740.000.000	--
3.	Perpanjangan jangka waktu / *Extension of time period*	649	126.282.634.870	--
4.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears	--	--	--
5.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears	--	--	--
6.	Penambahan fasilitas pinjaman / *Additional loan facilities*	--	--	--
7.	Konversi pinjaman/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal *Conversion of loan/financing into Temporary Equity Participation*	--	--	--
	Jumlah/ Total	**2.444**	**1.138.025.055.805**	**238.826.147.238**

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lanjutan)

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Continued)

4). Saldo Realisasi Debitur Terdampak Covid-19 / *Actual Balance of Debtors Affected by Covid-19*

31 Desember / *December* 31, 2021					
Segmen/ *Segment*	Jumlah Debitur/ *Total Debtors*	Baki Debet (Rp)/ *Debit Balance (Rp)*	Penundaan Pokok (Rp)/ *Principal Delay (Rp)*	Penundaan Bunga (Rp)/ *Interest Delay (Rp)*	Jumlah Penundaan & Bunga (Rp)/ *Total Delay & Interest (Rp)*
Korporasi / *Corporation*	5	509.731.146.042	72.324.167.445	8.149.519.449	80.473.686.894
Menengah / *Intermedian*	65	44.017.119.582	4.520.839.710	655.455.668	5.176.295.378
Kecil / *Small*	1.101	126.505.584.027	86.404.668.387	23.931.948.209	110.336.616.596
Konsumer / *Consumer*	321	37.107.101.955	10.890.257.381	3.866.979.525	14.757.236.906
Jumlah/ *Total*	**1.492**	**717.360.951.606**	**174.139.932.923**	**36.603.902.851**	**210.743.835.774**

5). Rincian Saldo Realisasi Debitur Terdampak Covid-19 / *Details of the Realized Balance of Debtors Affected by Covid-19*

31 Desember / *December* 31, 2021			
No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet/ *Debit Balance*	Total Penundaan / *Total Delays*
1. *Grace Period*:			
a. penundaan pokok / *principal delay*		708	191.028.728.704	93.418.502.155
b. penundaan bunga / *interest delay*		39	134.562.290.842	8.341.433.580
c. penundaan pokok dan bunga / *principal and interest delay*		547	343.866.096.507	108.983.900.039
2. Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*		3	3.968.856.777	--
3. Perpanjangan jangka waktu / *Extension of time period*		195	43.934.978.777	--
4. Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears		--	--	--
5. Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest* arrears		--	--	--
6. Penambahan fasilitas pinjaman / *Additional loan facilities*		--	--	--
7. Konversi pinjaman/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal *Conversion of loan/financing into Temporary Equity Participation*		--	--	--
Jumlah/ Total		**1.492**	**717.360.951.607**	**210.743.835.774**

6). Rincian Kumulatif Realisasi Debitur Restrukturisasi Terdampak Covid-19 berdasarkan wilayah / *Details of Cumulative Realization of Covid-19 Affected Restructuring Debtors by region*

31 Desember / *December* 31, 2021						
	Wilayah Riau / *Riau Region*		Wilayah Kepri / *Kepri region*		*Total*	
Jenis / *Type*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Balance (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Balance (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Total Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / Debit Balance (in Rupiah)
Korporasi / *Corporation*	5	509.731.146.042	--	--	5	509.731.146.042
Menengah / *Intermedian*	38	25.129.964.647	27	18.887.154.935	65	44.017.119.582
Kecil / *Small*	746	82.228.167.340	355	44.277.416.687	1.101	126.505.584.027
Konsumer / *Consumer*	139	13.930.604.046	182	23.176.497.909	321	37.107.101.955
Jumlah/ *Total*	**928**	**631.019.882.075**	**564**	**86.341.069.531**	**1.492**	**717.360.951.606**

g. Berdasarkan kolektibilitas

Klasifikasi risiko berdasarkan kolektibilitas pinjaman terakhir mengacu kepada kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Nomor 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kualitas Pinjaman ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu:

g. Based on collectibility

The Risk classification based on loans collectibility refers to the criteria of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. Loans quality is determined based on assessment factors, namely:

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

g. Berdasarkan kolektibilitas (Lanjutan)

a. prospek usaha;
b. kinerja (performace) debitur dan
c. kemampuan membayar.

Komponen dalam faktor penilaian tersebut mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) mengenai kualitas aset Bank.

Klasifikasi risiko dapat dirinci sebagai berikut:

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING *(Continued)*

g. Based on collectibility *(Continued)*

a. business prospect;
b. debtor performance and
c. ability to pay.

The component in the valuation factor refers to financial services authority regulations regarding the quality of the Bank's assets.

Risks classification detailed as follows:

21 Agustus / *August* 21, 2022

Klasifikasi risiko / *Risk Clasification*	Persentase / *Percentage*	Baki Debet / *Debit Balance*	CKPN / *Allowance for Impairment losses*	Jumlah-Bersih / *Total-Net*
Lancar/ *Current*	88,54%	16.817.168.262.832	(76.957.543.336)	16.740.210.719.496
Perhatian Khusus/ *Special Mention*	10,43%	2.023.823.706.162	(51.007.471.605)	1.972.816.234.557
Kurang Lancar/ *Substandar*	0,10%	41.809.930.634	(22.942.926.411)	18.867.004.223
Diragukan *Doubtfull*	0,02%	25.430.411.351	(20.844.202.573)	4.586.208.778
Macet/ *Loss*	0,90%	498.843.716.980	(328.047.477.859)	170.796.239.121
Jumlah/ *Total*	**100,00%**	**19.407.076.027.959**	**(499.799.621.784)**	**18.907.276.406.175**

31 Desember / *December* 31, 2021

Klasifikasi risiko / *Risk Clasification*	Persentase / *Percentage*	Baki Debet / *Debit Balance*	CKPN / *Allowance for Impairment losses*	Jumlah-Bersih / *Total-Net*
Lancar/ *Current*	97,61%	18.015.137.137.637	(67.092.819.626)	17.948.044.318.011
Perhatian Khusus/ *Special Mention*	1,49%	337.889.125.002	(63.592.521.966)	274.296.603.036
Kurang Lancar/ *Substandar*	0,01%	10.444.708.823	(8.282.129.790)	2.162.579.033
Diragukan *Doubtfull*	0,01%	13.430.244.374	(11.200.419.309)	2.229.825.065
Macet/ *Loss*	0,88%	508.012.785.293	(346.441.971.628)	161.570.813.665
Jumlah/ *Total*	**100,00%**	**18.884.914.001.129**	**(496.609.862.319)**	**18.388.304.138.810**

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

h. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

Average interest rate per annum

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pinjaman komersil	9,5% - 15%	11% - 15%	*Commercial loan*
Pinjaman mikro	2% - 20%	5,5% - 20%	*Micro loan*
Pinjaman konsumer	10,5% - 14%	10,5% - 16,43%	*Consumer loan*
Pinjaman sindikasi	5% - 11,25%	5,80% - 11,25%	*Syndicated loan*

i. Pinjaman bermasalah berdasarkan jenis

i. Non performing loans by type

Kolektibilitas 3, 4 dan 5

Collectibility 3, 4 and 5

	21 Agustus / *August* 21, 2022		31 Desember / *December* 31, 2021		
	Pinjaman bermasalah/ *Non performing loans*	CKPN/ *Allowance for impairment losses*	Pinjaman bermasalah/ *Non performing loans*	CKPN/ *Allowance for impairment losses*	
Pinjaman komersil	198.210.143.867	(118.666.613.521)	183.026.606.572	(112.955.046.303)	*Commercial loans*
Pinjaman mikro	166.033.335.967	(98.311.646.817)	163.013.531.595	(107.400.855.706)	*Micro loans*
Pinjaman konsumer	201.840.579.131	(154.856.346.505)	185.847.600.323	(145.568.618.717)	*Consumer loans*
Jumlah	**566.084.058.965**	**(371.834.606.843)**	**531.887.738.490**	**(365.924.520.726)**	***Total***

Rasio pinjaman bermasalah kotor terhadap total pinjaman dan rasio pinjaman bermasalah bersih terhadap total pinjaman sebagai berikut:

The ratio of gross non-performing loans to total loans and the ratio of net non-performing loans to total loans is as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pinjaman bermasalah kotor	2,92%	2,82%	*Non performing loans gross*
Pinjaman bermasalah bersih	1,00%	0,88%	*Non performing loans netto*

Bank melakukan langkah-langkah untuk menekan jumlah pinjaman bermasalah dengan cara melakukan monitoring terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap debitur yang bermasalah dan mempertahankan kualitas pinjaman yang tidak bermasalah agar tidak menjadi bermasalah dengan melakukan selektif dengan tingkat kehati-hatian dalam pemberian pinjaman baru.

The Bank takes steps to reduce the number of non-performing loans by monitoring the settlement of non-performing loans, taking a persuasive approach to non-performing debtors and maintaining the quality of non-performing loans so that they do not become problematic by selectively with a degree of prudence in providing new loans.

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

j. Pinjaman yang direstrukturisasi

Restrukturisasi pinjaman merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam rangka penyelamatan pinjaman bermasalah, terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pinjaman, kapitalisasi tunggakan kedalam pokok, penurunan suku bunga dan kapitalisasi bunga.

Saldo pinjaman yang direstrukturisasi sebelum CKPN pada tanggal-tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.118.130.867.984 dan Rp1.152.747.129.741 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

j. The restructured loans

Loans restructuring is an improvement effort made by the Bank in order to save non-performing loans, for debtors who have difficulty fulfilling their obligations, in the form of extending the loans period, capitalizing arrears into principal, reducing interest rates and interest capitalization.

The restructured loans balances before CKPN as of August 21, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp1,118.130.867.984 and Rp1,152,747,129,741 with the following details:

By type and collectibility

	21 Agustus / *August* 21, 2022					
Jenis / *Type*	**Lancar / *Current***	**DPK / *Special Mention***	**KL / *Substandart***	**Diragukan / *Doubtful***	**Macet / *Loss***	**Total / *Amount to***
Modal kerja/ *Working capital*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	--	--	--	--	--	--
Pihak ketiga/ *Third parties*	51.981.748.203	25.850.052.344	7.080.280.072	2.102.106.021	6.848.877.927	93.863.064.567
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(3.050.400.124)	(2.984.339.194)	(3.181.889.909)	(1.408.966.129)	(5.144.633.175)	(15.770.228.531)
Sub.Jumlah/ *Sub.Total*	48.931.348.079	22.865.713.150	3.898.390.163	693.139.892	1.704.244.752	78.092.836.036
Investasi/ *Invesment*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	--	--	--	--	--	--
Pihak ketiga/ *Third parties*	956.929.618.363	19.017.602.000	3.792.164.263	1.330.283.310	6.973.756.203	988.043.424.139
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(14.302.535.481)	(1.728.262.495)	(1.236.509.442)	(1.295.623.662)	(5.024.886.314)	(23.587.817.394)
Sub.Jumlah/ *Sub.Total*	942.627.082.882	17.289.339.505	2.555.654.821	34.659.648	1.948.869.889	964.455.606.745
Konsumtif/ *Consumer*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	--	--	--	--	--	--
Pihak ketiga/ *Third parties*	20.566.668.094	10.348.690.794	2.502.917.617	586.814.480	2.219.288.273	36.224.379.258
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	216.616.376	1.128.940.351	2.095.370.866	451.316.826	1.199.156.838	5.091.401.257
Sub.Jumlah/ *Sub.Total*	20.783.284.470	11.477.631.145	4.598.288.483	1.038.131.306	3.418.445.111	41.315.780.515
Total Baki debet	1.029.478.034.660	55.216.345.138	13.375.361.952	4.019.203.811	16.041.922.403	1.118.130.867.964
Total CKPN	(17.136.319.229)	(3.583.661.338)	(2.323.028.485)	(2.253.272.965)	(8.970.362.651)	(34.266.644.668)
Jumlah/ *Total-net*	**1.012.341.715.431**	**51.632.683.800**	**11.052.333.467**	**1.765.930.846**	**7.071.559.752**	**1.083.864.223.296**

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING (Continued)

j. Pinjaman yang direstrukturisasi (Lanjutan)

j. The restructured loans (Continued)

Jenis / *Type*	31 Desember / *December* 31, 2021					
	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Modal kerja/ *Working capital*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	--	--	--	--	--	--
Pihak ketiga/ *Third parties*	95.250.769.596	9.780.022.274	181.481.862	627.633.418	6.509.770.970	112.349.678.120
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(2.874.952.562)	(1.140.949.561)	(152.334.898)	(265.595.505)	(4.941.255.693)	(9.375.088.219)
Sub.Jumlah/ *Sub.Total*	92.375.817.034	8.639.072.713	29.146.964	362.037.913	1.568.515.277	102.974.589.901
Investasi/ *Invesment*						
Pihak berelasi/ *Related parties*						
Pihak ketiga/ *Third parties*	985.547.311.232	9.075.476.377	143.745.168	124.819.893	5.579.649.431	1.000.471.002.101
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(15.783.875.500)	(501.409.236)	(77.113.806)	(5.260.622)	(4.045.107.667)	(20.412.766.831)
Sub.Jumlah/ *Sub.Total*	969.763.435.732	8.574.067.141	66.631.362	119.559.271	1.534.541.764	980.058.235.270
Konsumtif/ *Consumer*						
Pihak berelasi/ *Related parties*						
Pihak ketiga/ *Third parties*	33.258.205.640	4.657.072.301	16.545.329	232.148.222	1.762.478.028	39.926.449.520
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(281.350.275)	(440.907.537)	(5.090.822)	(124.370.849)	(1.206.193.786)	(2.057.913.269)
Sub.Jumlah/ *Sub.Total*	32.976.855.365	4.216.164.764	11.454.507	107.777.373	556.284.242	37.868.536.251
Total Baki debet	1.114.056.286.468	23.512.570.952	341.772.359	984.601.533	13.851.898.429	1.152.747.129.741
Total CKPN	(18.940.178.337)	(2.083.266.334)	(234.539.526)	(395.226.976)	(10.192.557.146)	(31.845.768.319)
Jumlah/ *Total-net*	**1.095.116.108.131**	**21.429.304.618**	**107.232.833**	**589.374.557**	**3.659.341.283**	**1.120.901.361.422**

k. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

k. Allowance for impairment losses

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Saldo awal CKPN	496.609.862.319	527.308.458.214	*Beginning balance*
Beban CKPN	49.060.030.533	34.627.281.173	*Expected Credit Losses*
Pemulihan CKPN	(27.757.116.385)	(65.259.113.179)	*Recovery of Impairment Losses*
Hapus buku pinjaman	(18.113.154.683)	(66.763.889)	*Loans write-off*
Saldo akhir CKPN	**499.799.621.784**	**496.609.862.319**	*Ending balance*
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	684.427.366.973	649.174.946.859	*Provision for Asset Quality Assessment (PPKA)*
Kurang CKPN atas PPKA	184.627.745.189	152.565.084.540	*Disadvantages CKPN on PPKA*
Rasio CKPN atas PPKA	73%	76%	*CKPN to PPKA Ratio*

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

k. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai (Lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan.

l. Pinjaman hapus buku

Pada tahun 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 terdapat pinjaman yang dihapus bukukan, saldo pinjaman hapus buku disajikan dalam laporan rekening administratif.

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING *(Continued)*

k. Allowance for impairment losses *(Continued)*

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible loans.

l. Write off loans

On August 21, 2022 and December 31, 2021 there were write-off loans. The balance of write-off loans is presented in the administrative account statements.

	21 Agustus / *August* 21, 2022	**31 Desember / *December* 31, 2021**	
Saldo pinjaman hapus buku	285.369.770.668	270.321.991.295	*Write-off loans balance*
Hapus buku selama periode berjalan	(19.532.737.707)	--	*Write-off during the period*
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus buku	4.484.958.334	7.999.423.210	*Recovery of receivables previously write-off*
Jumlah	**270.321.991.295**	**278.321.414.505**	***Total***

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

- Agunan pinjaman

  Pinjaman yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh perbankan.

- Pinjaman modal kerja dan investasi

  Pinjaman modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya.

m. Other significant information relating to loans

- *Loan collateral*

  Loans using time deposit as collateral, bound collateral by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell and by other guarantees generally acceptable to the bank.

- *Working capital and investment loans*

  Working capital and investment loans given to debtor for working capital and capital assets required.

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

- Pinjaman kepada "Karyawan Bank Riau Kepri"

  Pinjaman yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan pinjaman untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga, jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan mempertimbangkan sisa masa kerja dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

- Pinjaman konsumsi

  Pinjaman konsumsi terdiri atas pinjaman kepemilikan rumah, pinjaman kendaraan bermotor dan pinjaman perorangan lainnya.

- Pinjaman program pemerintah dan pinjaman *chanelling*

  Pinjaman program Pemerintah yang disalurkan dengan sistem *chanelling*.

- Pinjaman Sindikasi

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING *(Continued)*

m. Other significant information relating to loans *(Continued)*

- *Employee Bank Riau Kepri loans*

  Loans granted to Bank employees constitute loans to purchase vehicles, houses and other necessities bearing interest, for a period of 1 (one) to 15 (fifteen) years taking into account the remaining working period and repaid through salary deductions every month.

- *Consumer loans*

  Consumer loans consists of house property loans, motor vehicles loans and other individual loans.

- *Government program loans and channelling loans*

- *Government program loans has been channelled using chanelling system.*

- *Syndicated Loans*

Per 21 Agustus 2022:	**Plafon / *Plafond***	**Baki Debet / *Debit Balance***	*As of August 21, 2022:*
PT PLN (Persero) Tbk.	100.000.000.000	46.428.571.429	*PT PLN (Persero) Tbk.*
PT Perkebunan Nusantara V	300.000.000.000	187.650.794.041	*PT Perkebunan Nusantara V*
PT Jasamarga Manado Bitung	200.000.000.000	151.749.703.830	*PT Jasamarga Manado Bitung*
PT MNC Land Tbk	300.000.000.000	287.679.500.120	*PT MNC Land Tbk*
PT Pemalang Batang Tol Road	225.000.000.000	221.398.671.374	*PT Pemalang Batang Tol Road*
PT Waskita Bumi Wira	150.000.000.000	146.637.886.645	*PT Waskita Bumi Wira*
PT Marga Trans Nusantara	300.000.000.000	281.547.347.114	*PT Marga Trans Nusantara*
PT JTD Jaya Pratama	197.636.071.468	16.729.896.766	*PT JTD Jaya Pratama*
Jumlah	**1.772.636.071.468**	**1.339.822.371.319**	***Total***

Per 31 Desember 2021:	**Plafon / *Plafond***	**Baki Debet / *Debit Balance***	*As of Desember 31, 2021:*
PT PLN (Persero) Tbk.	100.000.000.000	53.571.428.571	*PT PLN (Persero) Tbk.*
PT Perkebunan Nusantara V	300.000.000.000	201.729.524.033	*PT Perkebunan Nusantara V*
PT Jasamarga Manado Bitung	200.000.000.000	146.981.839.916	*PT Jasamarga Manado Bitung*
PT MNC Land Tbk	300.000.000.000	290.499.500.120	*PT MNC Land Tbk*
PT Pemalang Batang Tol Road	225.000.000.000	221.456.250.000	*PT Pemalang Batang Tol Road*
PT Waskita Bumi Wira	150.000.000.000	146.932.636.165	*PT Waskita Bumi Wira*
PT Marga Trans Nusantara	300.000.000.000	281.959.654.947	*PT Marga Trans Nusantara*
PT JTD Jaya Pratama	197.636.071.468	18.375.248.050	*PT JTD Jaya Pratama*
Jumlah	**1.772.636.071.468**	**1.361.506.081.802**	***Total***

9. PINJAMAN YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (Lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

- Batas Masksimum Pemberian Kredit

Menurut laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tangal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 yang disampaikan kepada Bank Indonesia tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan, baik pihak berelasi maupun pihak ketiga.

9. LOANS, SHARIA RECEIVABLE AND FINANCING *(Continued)*

m. Other significant information relating to loans *(Continued)*

- *Legal Linding Limit (BMPK) for Bank*

In Maximum Lending Limit Report (BMPK) on August 21, 2022 and December 31, 2021 to Bank Indonesia there is no violation or collision of the allowed maximum lending limit, both to related party nor third party.

10. PENYERTAAN SAHAM

Akun ini merupakan penyertaan saham yang ditempatkan pada 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan daerah (Ventura). Penyertaan pada BPR dalam kondisi laba, sedangkan pada Perusahaan Ventura dalam kondisi rugi. Pada tahun 21 Agustus 2022 Penyertaan kepada BPR Tanjung Balai Karimun diterima kembali. Persentase kepemilikan dan jumlah nominal penyertaan sebagai berikut:

10. INVESTMENT IN SHARES

This account represents investment in shares placed in 3 (three) Rural Banks (BPR) and regional companies (Ventura). Investments in BPR are in a profit condition, while in Venture Companies are in a loss condition. In August 21, 2022 the participation in Tanjung Balai Karimun BPR was accepted again. The percentage of ownership and the nominal amount of participation are as follows:

Keterangan/ *Description*	**Bagian penyertaan / *Share of investment***	**Tanggal Penyertaan / *Date of investment***	**Nominal Penyertaan 21 Agustus 2022 / *Participation Amount August 21, 2022***	**Nominal Penyertaan 31 Desember 2022 / *Participation Amount December 31, 2022***
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang/ Kateman	1,38%	21/11/2007	200.000.000	200.000.000
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir	0,91%	02/10/2007	200.333.335	200.333.335
PT Sarana Riau Ventura	7,76%	30/05/2007	1.155.450.000	1.155.450.000
Jumlah / *Total*			**1.555.783.335**	**1.555.783.335**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*			-	-
Jumlah bersih/ *Total net*			**1.555.783.335**	**1.555.783.335**

11. ASET TETAP

Berikut ini aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank:

11. FIXED ASSETS

The following is the direct ownership of fixed assets by the Bank:

	21 Agustus / *August* 21, 2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Cost:***
Tanah	88.385.416.600	2.080.000.000	--	--	90.465.416.600	*Land*
Bangunan	316.996.973.764	183.063.889	--	--	317.180.037.653	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	276.854.953.496	21.867.900.284	1.555.341.365	1.220.481.988	298.387.994.403	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	27.185.473.387	584.011.588	--	--	27.769.484.975	*Vehicles*
Sub Jumlah	**709.422.817.247**	**24.714.975.761**	**1.555.341.365**	**1.220.481.988**	**733.802.933.631**	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Construction in Progress***
Bangunan	955.505.600	4.193.976.952	--	--	5.149.482.552	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	10.671.311.786	--	--	(1.220.481.988)	9.450.829.798	*Machineries and Office Equipments*
Sub Jumlah	**11.626.817.386**	**4.193.976.952**	**--**	**(1.220.481.988)**	**14.600.312.350**	*Sub Total*
Jumlah	**721.049.634.633**	**28.908.952.713**	**1.555.341.365**	**--**	**748.403.245.981**	***Total***
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan	102.187.975.788	10.228.751.161	--	--	112.416.726.949	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	204.842.042.812	23.078.558.388	1.555.341.365	--	226.365.259.835	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	17.087.833.383	1.968.629.611	--	--	19.056.462.994	*Vehicles*
Jumlah	**324.117.851.983**	**35.275.939.160**	**1.555.341.365**	**--**	**357.838.449.778**	***Total***
Nilai Buku	**396.931.782.650**				**390.564.796.203**	***Book Value***

	31 Desember / *December* 31, 2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya Perolehan:						***Acquisition Cost:***
Tanah	88.385.416.600	--	--	--	88.385.416.600	*Land*
Bangunan	316.996.973.764	--	--	--	316.996.973.764	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	253.839.737.902	24.303.197.294	1.287.981.700	--	276.854.953.496	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	26.118.097.387	1.671.126.000	603.750.000	--	27.185.473.387	*Vehicles*
Sub Jumlah	**685.340.225.653**	**25.974.323.294**	**1.891.731.700**	**--**	**709.422.817.247**	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Construction in Progress***
Bangunan	955.505.600	--	--	--	955.505.600	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	10.896.426.298	3.068.328.978	3.293.443.490	--	10.671.311.786	*Machineries and Office Equipments*
Sub Jumlah	**11.851.931.898**	**3.068.328.978**	**3.293.443.490**	**--**	**11.626.817.386**	*Sub Total*
Jumlah	**697.192.157.551**	**29.042.652.272**	**5.185.175.190**	**--**	**721.049.634.633**	***Total***
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan	86.445.756.385	15.742.219.403	--	--	102.187.975.788	*Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	171.613.348.080	33.554.522.542	325.827.810	--	204.842.042.812	*Machineries and Office Equipments*
Kendaraan	13.967.990.379	3.123.378.163	3.535.159	--	17.087.833.383	*Vehicles*
Jumlah	**272.027.094.844**	**52.420.120.108**	**329.362.969**	**--**	**324.117.851.983**	***Total***
Nilai Buku	**425.165.062.707**				**396.931.782.650**	***Book Value***

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Aset tetap tersebut diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.960.509.427.405 kepada PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda, PT Asuransi Askrida Syariah dan PT Asuransi Jasa Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

Beban penyusutan aset tetap dan inventaris per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp35.275.939.160 dan Rp50.808.421.775 (Catatan 28).

11. FIXED ASSETS (Continued)

Fixed assets in the form of buildings, vehicles and certain other inventories are insured against possible risks of fire, accident and other risks. The fixed assets are insured with a sum insured of Rp3,960,509,427,405 to PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda, PT Asuransi Askrida Syariah and PT Asuransi Jasa Indonesia. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and earthquake.

Depreciation as August 21, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp35,275,939,160 and Rp50,808,421,775 respectively (Note 28).

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *13. OTHER ASSETS – NET*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pendapatan bunga dan bagi hasil yang akan diterima:			*Interest income and profit sharing to be received:*
Piutang pendapatan surat berharga	40.951.990.328	36.656.854.052	*Income receivable from securities*
Margin dan bagi hasil yang akan diterima	16.111.907.888	15.217.734.945	*Margin and profit sharing to be received*
Penempatan pada bank lain	11.140.997	154.283.085	*Marketable securities interest*
Bunga pinjaman yang diberikan	--	109.159.209.954	*Loans interest rendered*
Pendapatan provisi dan fee	--	315.613.825	*Provision and fee*
Sub Jumlah	**57.075.039.213**	**161.503.695.861**	*Sub Total*
Uang muka dan beban dibayar dimuka:			*Advances and expenses prepaid:*
Premi asuransi dibayar dimuka	103.245.763.884	83.840.222.613	*Prepaid Insurance*
Biaya dibayar dimuka	16.746.431.949	4.538.613.474	*Prepaid expenses*
Beban yang ditangguhkan	11.320.158.746	11.688.407.228	*Deferred expenses*
Persekot biaya	2.669.251.911	227.718.660	*Prepaid to calcul. with expenses*
Uang jaminan yang dibayar	2.090.284.128	2.105.648.300	*Guarantee Deposits*
Sewa dibayar dimuka	--	1.906.963.338	*Prepaid rent*
Sub Jumlah	**136.071.890.618**	**104.307.573.613**	*Sub Total*
Piutang Ijarah:			*Ijarah Receivables:*
Piutang sewa dan jasa	1.906.452.168	2.042.122.825	*Rent receivables, service*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(722.553.448)	--	*Allowance for impairment losses*
Sub Jumlah	**1.183.898.720**	**2.042.122.825**	*Sub Total*

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (Lanjutan) / *13. OTHER ASSETS – NET (Continued)*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Aset hak guna			*Right of Use Assets*
Harga Perolehan	78.464.747.130	55.038.390.436	*Acquisition*
Akumulasi Penyusutan	(41.194.179.806)	(29.933.152.247)	*Accumulated Depreciation*
Sub Jumlah	**37.270.567.324**	**25.105.238.189**	*Sub Total*
Tagihan principle acquirer	18.373.841.640	197.182.278.029	*Billing of principle acquirer*
Persediaan alat tulis dan lainnya	7.217.610.794	7.227.050.667	*Inventory of stationery and others*
Kerugian dan kecurangan dalam penyelesaian	6.818.502.622	1.570.310.866	*Loss and fraud on the process*
Nota debet dalam penyelesaian	1.377.234.316	286.284.890	*Debet note in progress*
Pembayaran lainnya dalam penyelesaian	221.319.010	1.374.957.624	*Others payment in progress*
Pos-pos debet dalam penyelesaian lainnya	30.806.355.833	37.427.229.239	*Others debet account in progress*
Sub Jumlah	**64.814.864.215**	**245.068.111.315**	*Sub Total*
Jumlah	**296.416.260.090**	**538.026.741.803**	***Total***

13. LIABILITAS SEGERA / *13. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Setoran-setoran lain	144.275.259.142	86.433.390.369	*Others prepaid deposits*
Beban masih harus dibayar	70.738.313.273	81.369.241.509	*Accrued expenses*
Kewajiban *principle aqcuirer*	32.474.430.636	224.370.491.109	*Liability of priciple aqcurier*
Liabilitas segera lainnya	31.878.888.720	49.911.278.714	*Others current liabilities*
Jasa produksi karyawan	26.985.035.788	85.728.023.561	*Bonuses for employee*
Setoran jaminan jatuh tempo	17.759.275.756	23.614.132.407	*Cash collateral in due dated*
BI-*Fast*	5.401.762.665	--	*BI-Fast*
Tantiem pengurus	2.998.337.310	9.525.335.951	*Management Tantiem*
Warkat pinjaman kliring	2.242.124.405	10.861.111.215	*Lofty loans clearing*
Kewajiban transaksi Telkomsel	859.033.643	923.400.470	*Payable transaction Telkomsel*
Bagi hasil	28.741.613	4.717.939.987	*Profit sharing*
Setoran pinjaman kelolaan	16.000.000	18.492.690	*Payment loans process*
Kiriman uang dan inkaso	--	76.250.328.668	*Clearing and RTGS*
Bunga deposito	--	12.815.622.546	*Deposit interest*
Rekening yang ditutup	--	448.519.157	*Account has been closed*
Setoran tagihan kartu pinjaman	--	27.991.000	*Deposit from loans card Affinity*
Jumlah	**335.657.202.951**	**667.015.299.353**	***Total***

Liabilitas kepada pemerintah merupakan liabilitas Bank sebagai bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak dan bukan pajak dari wajib pajak/ wajib setor, yang secara periodik dilimpahkan ke rekening kas negara di Bank Indonesia.

Liability to the government is the liability of the Bank as the perception bank in the framework of tax and non-tax revenues by the taxpayer/ deposit obligation periodically shall be transferred to the state cash account in Bank Indonesia.

13. LIABILITAS SEGERA (Lanjutan)

Liabilitas lainnya merupakan titipan kiriman uang yang akan diteruskan dari bank lain, titipan nasabah, titipan gaji dan pensiun yang akan dibayar.

13. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY (Continued)

Other liability is deposited money delivery to be forwarded from other banks, customer deposits, and salary and pension deposits to be paid.

14. SIMPANAN DARI NASABAH

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Akun ini terdiri dari:			*This account consist of:*
Pihak berelasi	4.015.668.755.971	4.108.669.004.307	*Related parties*
Pihak ketiga	20.336.061.285.249	21.507.063.681.296	*Third parties*
Jumlah	**24.351.730.041.220**	**25.615.732.685.603**	***Total***
Simpanan terdiri dari:			*This savings consist of:*
Giro	4.503.858.328.990	5.607.379.900.206	*Current account*
Tabungan	7.090.735.086.778	7.449.292.829.276	*Savings*
Deposito berjangka	12.757.136.625.452	12.559.059.956.120	*Time deposit*
Jumlah	**24.351.730.041.220**	**25.615.732.685.603**	***Total***

a. Giro

Konvensional

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Ketentuan program penjaminan yang terakhir adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008. Pembayaran premi LPS oleh Bank tahun berjalan lihat catatan No.29 atas laporan keuangan.

a. Current account

Conventional

Based on the Laws No. 24 dated September 22, 2004 effective as of September 22, 2005, Deposit Guarantor Institution (LPS) shall be established to guarantee certain liabilities of public banks based on the prevailing guaranteeing program. The latest provision of the guaranteeing program is based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.66 year 2008 dated October 13, 2008. Payment of LPS premiums by the Bank for the current year see note No.29 to the financial statements.

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

a. Giro (Lanjutan) / *a. Current account (Continued)*

Konvensional / *Conventional*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro non bank - sektor pemerintahan	3.945.325.880.227	4.063.689.166.162	*Current account with non bank- government sector*
Giro non bank- sektor bukan pemerintah	64.160.566	76.822.886	*Current account with non bank- non government sector*
Sub Jumlah	**3.945.390.040.793**	**4.063.765.989.048**	***Sub Total***
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro non bank-sektor perorangan dan lembaga pemerintah	438.813.193.099	1.455.819.165.173	*Current account with non bank-personal and government sector*
Giro dari kredit yang diberikan	--	50.112	*Current account from loans*
Sub Jumlah	**438.813.193.099**	**1.455.819.215.284**	***Sub Total***
Jumlah Giro Konvensional	**4.384.203.233.892**	**5.519.585.204.332**	***Total Current Conventional***

Syariah / *Sharia*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro wadiah non bank- sektor bukan pemerintah	--	--	*Current account with Wadiah non bank-government sector*
Sub Jumlah	**--**	**--**	***Sub Total***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro wadiah non bank- sektor swasta/ perorangan dan pemerintah	76.754.880.062	61.659.309.216	*Current account with Wadiah non bank-private/personal, government.*
Giro mudharabah	42.900.215.036	26.135.386.658	*Mudharabah Giro*
Sub Jumlah	**119.655.095.098**	**87.794.695.874**	***Sub Total***
Jumlah Giro Syariiah	**119.655.095.098**	**87.794.695.874**	***Total Current Sharia***
Jumlah Giro	**4.503.858.328.990**	**5.607.379.900.206**	***Total Current Account***

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)

a. Giro (Lanjutan)

Perincian Giro Sektor Pemda Tingkat I dan II:

Konvensional

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

a. Current account (Continued)

Current account of government sector level I and II:

Conventional

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Kabupaten Bengkalis	793.735.648.591	1.168.575.762.066	*Bengkalis regency*
Kota Pekanbaru	428.424.634.827	275.417.907	*Pekanbaru city*
Kabupaten Indragiri Hulu	294.629.453.548	288.748.818.551	*Indragiri Hulu regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	200.414.663.081	164.527.446.864	*Indragiri Hilir regency*
Kota Dumai	197.080.386.642	142.993.736.590	*Dumai city*
Kabupaten Rokan Hilir	185.354.969.534	201.478.730.347	*Rokan Hilir regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	133.413.165.460	106.308.038.460	*Kuantan Singingi regency*
Kabupaten Rokan Hulu	105.300.399.525	71.789.128.920	*Rokan Hulu regency*
Kota Batam	92.160.996.339	44.897.693.135	*Batam city*
Kabupaten Pelalawan	76.567.426.307	119.920.353.642	*Pelalawan regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	27.710.905.205	441.084.877.687	*Siak Sri Indrapura regency*
Kota Tanjung Pinang	25.562.207.041	48.767.932.067	*Tanjung Pinang city*
Kabupaten Karimun	17.490.249.885	51.835.267.507	*Karimun regency*
Kabupaten Bintan	15.234.155.762	121.893.481.632	*Bintan regency*
Kabupaten Kep. Meranti	6.991.374.627	13.325.006.198	*Meranti Island regency*
Kabupaten Kampar	5.885.731.946	48.962.553.223	*Kampar regency*
Kabupaten Natuna	1.388.236.362	38.867.896.389	*Natuna regency*
Provinsi Riau	--	846.200.968.953	*Riau province*
Kabupaten Anambas	--	45.853.575.583	*Anambas regency*
Kabupaten Lingga	--	92.787.113.052	*Lingga regency*
Provinsi Kepulauan Riau	--	4.595.367.389	*Kepulauan Riau province*
Sub jumlah	**2.607.344.604.680**	**4.063.689.166.162**	***Sub total***
Sektor non Bank, swasta/ perorangan	1.776.858.629.212	1.455.896.038.170	*Sector non Bank, private/ personal*
Jumlah Giro Konvensional	**4.384.203.233.892**	**5.519.585.204.332**	***Total Current Conventional***

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

a. Giro (Lanjutan) / *a. Current account (Continued)*

Syariah / ***Sharia***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Perusahaan	83.671.380.966	59.929.261.846	*The corporate*
Yayasan, Badan sosial dan Ormas	25.948.930.934	22.292.378.137	*Foundation, social institution and ormas*
Lembaga Pemerintah	9.518.030.720	4.360.589.163	*Government institution*
Koperasi	247.152.826	178.864.452	*Cooperative*
Perorangan	103.537.023	869.390.641	*Individual*
Sektor swasta lainnya	166.062.629	164.211.636	*Other private sector*
Jumlah Giro Syariah	**119.655.095.098**	**87.794.695.874**	***Total Current Sharia***
Jumlah Giro	**4.503.858.328.990**	**5.607.379.900.206**	***Total Current Account***

Rincian giro berdasarkan mata uang / *Current account based on foreign currency:*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Mata uang			*Currency*
IDR	4.485.855.027.231	5.594.230.775.584	*IDR*
USD	14.204.893.992	10.283.845.482	*USD*
SGD	3.744.994.240	2.799.000.537	*SGD*
EUR	53.413.527	66.278.604	*EUR*
Jumlah	**4.503.858.328.990**	**5.607.379.900.206**	*Total*

b. Tabungan / *b. Saving*

Konvensional / ***Conventional***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak berelasi			*Related parties*
Tabungan Sinar	4.203.417.759	3.623.449.795	*Sinar saving*
Tabungan Simpeda	1.194.912	23.702.555	*Simpeda saving*
Sub Jumlah	**4.204.612.671**	**3.647.152.350**	***Sub Total***
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Sinar	4.335.551.683.320	4.745.635.049.201	*Sinar saving*
Tabungan Simpeda	682.692.419.150	766.530.674.552	*Simpeda saving*
Tabunganku	38.503.865.180	36.016.225.062	*My saving*
Tabungan Haji Dhuha	3.573.375.204	3.513.568.494	*Dhuha Hajj Saving*
Sub Jumlah	**5.060.321.342.854**	**5.551.695.517.308**	***Sub Total***
Jumlah Tabungan Konvensional	**5.064.525.955.525**	**5.555.342.669.658**	***Total Conventional Savings***

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

b. Tabungan (Lanjutan) / *b. Saving (Continued)*

Syariah / *Sharia*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak berelasi			*Related parties*
Tabungan Sinar Syariah	8.647.578.267	9.461.615.541	*Sinar Sharia Saving*
Tabungan Ib Dhuha	71.780.490	36.926.554	*Ib Dhuha Saving*
Sub Jumlah	**8.719.358.757**	**9.498.542.095**	***Sub Total***
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Sinar Syariah	1.028.830.571.468	1.804.912.823.572	*Sinar Sharia Savings*
Tabungan Ib Dhuha	988.659.201.028	79.538.793.951	*Ib Dhuha Saving*
Sub Jumlah	**2.017.489.772.496**	**1.884.451.617.523**	***Sub Total***
Jumlah Tabungan Syariah	**2.026.209.131.253**	**1.893.950.159.618**	***Total Sharia Savings***
Jumlah Tabungan	**7.090.735.086.778**	**7.449.292.829.276**	***Total Savings***

c. Deposito berjangka / *c. Time deposit*

Berdasarkan Mata Uang dan Hubungan / *Based On Currency and Relationship*

Konvensional / *Conventional*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi	52.127.743.750	27.373.320.814	*Related parties*
Pihak ketiga	6.066.803.401.512	8.901.267.864.403	*Third parties*
Sub Jumlah	**6.118.931.145.262**	**8.928.641.185.217**	***Sub Total***
Mata uang asing			*Foreign Currency*
Pihak berelasi	--	--	*Related parties*
Pihak ketiga	4.028.564.782	72.116.294.211	*Third parties*
Sub Jumlah	**4.028.564.782**	**72.116.294.211**	***Sub Total***

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)

c. Deposito berjangka (Lanjutan)

Syariah

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			*Related parties*
Deposito *Mudharabah* swasta/ perorangan	5.227.000.000	4.384.000.000	*Time deposits Mudharabah for non private/ individual*
Pihak ketiga			*Third parties*
Deposito *Mudharabah* swasta/perorangan	3.379.160.093.102	2.452.692.847.853	*Time deposits Mudharabah for non private/ individual*
Deposito *Mudharabah* lembaga pemerintah	3.249.789.822.306	1.101.225.628.840	*Time deposits Mudharabah for goverment institution sector*
Sub jumlah	**6.634.176.915.408**	**3.558.302.476.693**	***Sub total***
Jumlah deposito berjangka	**12.757.136.625.452**	**12.559.059.956.121**	***Total time deposits***

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No.64A/SE/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Bunga Tabungan, Giro dan Deposito Berjangka PT Bank Riau Kepri. Kisaran tingkat suku bunga antara 0,00% s/d 3,25% untuk Konvensional. Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 066/SE/2021 tanggal 2 November 2021 Tentang *Nisbah* Giro, Tabungan, Deposito *Mudharabah* dan Bonus Giro *Wadiah* PT Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah. Kisaran tingkat suku nisbah dan bonus antara 0,00% s/d 33% untuk Syariah.

Upaya dan kebijakan manajemen untuk menjaga agar deposan tetap menempatkan dananya pada Bank yaitu dengan cara memberikan suku bunga yang bersaing dengan bank lain, dengan memberikan insentif kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dengan program undian sinar tebar milyar yang diundi secara periodik dan menambah fasilitas layanan sehingga nasabah mendapat kemudahan bertransaksi.

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)

c. Time deposit (Continued)

Sharia

Based on the Directors Circular No.64A/SE/2021 dated October 29, 2021 concerning Interest in Savings, Current Accounts and Time Deposits of PT Bank Riau Kepri. Interest rates range between 0.00% to 3.25% for Conventional. Based on the Circular Letter of the Board of Directors No. 066/SE/2021 dated November 2, 2021 concerning Current Account Ratio, Savings, Mudharabah Deposit and Wadiah Current Account Bonus of PT Bank Riau Kepri Sharia Business Unit. The range of the ratio and bonus rates is between 0.00% to 33% for Sharia.

Management's efforts and policies to keep depositors placing their funds in the Bank are by providing interest rates that are competitive with other banks, by providing incentives to customers who place their funds in the form of savings with the billion scatter lottery program that is drawn periodically and adding service facilities so that customers get easy transactions.

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

c. Deposito berjangka (Lanjutan) / *c. Time deposit (Continued)*

Berdasarkan Jangka Waktu / ***Based On Time Period***

Konvensional / ***Conventional***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
1 bulan	1.548.952.009.730	2.073.967.173.830	*1 month*
3 bulan	255.167.178.064	1.412.859.366.488	*3 months*
6 bulan	687.644.683.656	1.141.679.274.667	*6 months*
12 bulan	3.608.824.176.137	4.350.055.001.986	*12 months*
12 bulan lebih	22.371.662.457	22.196.662.457	*more than 12 months*
Jumlah	**6.122.959.710.044**	**9.000.757.479.428**	***Total***

Syariah / ***Sharia***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
1 bulan	4.913.822.595.408	2.375.848.131.146	*1 month*
3 bulan	1.318.638.370.000	786.939.420.000	*3 months*
6 bulan	124.083.450.000	92.451.500.000	*6 months*
12 bulan	277.632.500.000	303.063.425.547	*12 months*
Jumlah	**6.634.176.915.408**	**3.558.302.476.693**	***Total***
Jumlah deposito berjangka	**12.757.136.625.452**	**12.559.059.956.121**	***Total time deposits***

Perincian Deposito Sektor Pemda Tingkat I dan II: / *Deposits of government sector level I and II:*

Konvensional / ***Conventional***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Kabupaten Bintan	27.000.000.000	--	*Bintan regency*
Kabupaten Kep. Meranti	25.000.000.000	15.000.000.000	*Meranti Islands Regency*
Kabupaten Karimun	127.743.750	807.743.750	*Karimun regency*
Provinsi Riau	--	3.906.653.064	*Riau Province*
Kabupaten Lingga	--	3.438.815.000	*Lingga regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	--	3.235.109.000	*Indragiri Hilir regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	--	25.000.000	*Indragiri Hulu regency*
Sub Jumlah	**52.127.743.750**	**26.413.320.814**	***Sub Total***
Sektor non Bank, swasta/ perorangan	6.070.831.966.294	8.974.344.158.614	*Sector non-Bank, private/ personal*
Jumlah Konvensional	**6.122.959.710.044**	**9.000.757.479.428**	***Total Conventional***

14. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan) / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)*

c. Deposito berjangka (Lanjutan) / *c. Time deposit (Continued)*

Syariah / ***Sharia***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Sektor pemerintah	3.249.789.822.306	1.101.225.628.840	*Goverment institution sector*
Sektor swasta lainnya	3.384.387.093.102	2.457.076.847.853	*Other private sector*
Jumlah Syariah	**6.634.176.915.408**	**3.558.302.476.693**	***Total Sharia***
Jumlah Deposito Berjangka	**12.757.136.625.452**	**12.559.059.956.121**	***Total Time Deposits***

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *15. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan hubungan pihak / *a. Based on related parties*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pihak ketiga	138.507.219.334	1.040.800.354.219	*Third parties*
Jumlah	**138.507.219.334**	**1.040.800.354.219**	***Total***

b. Berdasarkan jenis dan hubungan / *b. Based on type and relationship*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Giro			***Current Account***
Konvensional			*Conventional*
Pihak ketiga	35.224.214.709	21.147.972.921	*Third parties with bank*
Sub Jumlah	**35.224.214.709**	**21.147.972.921**	***Sub Total***
Tabungan			***Savings***
Konvensional			*Conventional*
Pihak ketiga	14.108.004.625	14.977.381.298	*Third parties with bank*
Sub Jumlah	**14.108.004.625**	**14.977.381.298**	***Sub Total***

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN (Lanjutan)

15. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (Continued)

b. Berdasarkan jenis dan hubungan (Lanjutan)

b. Based on type and relationship (Continued)

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Deposito			***Deposits***
Konvensional			*Conventional*
Pihak ketiga			*Third parties with bank*
1 bulan	29.925.000.000	32.025.000.000	*1 month*
3 bulan	11.000.000.000	17.000.000.000	*3 months*
6 bulan	8.500.000.000	6.500.000.000	*6 months*
12 bulan	22.000.000.000	22.000.000.000	*12 months*
> 12 bulan	--	--	*> 12 months*
Syariah			*Sharia*
Pihak ketiga			*Third parties with bank*
1 bulan	16.250.000.000	11.150.000.000	*1 month*
3 bulan	--	--	*3 months*
6 bulan	--	--	*6 months*
12 bulan	--	--	*12 months*
> 12 bulan	--	--	*> 12 months*
Sub Jumlah	**87.675.000.000**	**88.675.000.000**	***Sub Total***
Deposit on call bank lain	1.500.000.000	1.000.000.000	*Other deposit on call*
Interbank call money (ICM)	--	915.000.000.000	*Interbank call money (ICM)*
Sub Jumlah	**1.500.000.000**	**916.000.000.000**	***Sub Total***
Jumlah	**138.507.219.334**	**1.040.800.354.219**	***Total***

16. PINJAMAN YANG DITERIMA

16. BORROWINGS

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Piutang Murabahah Perorangan			*Personal Murabahah Receivables*
Anuitas KPR FLPP	84.407.559.548	52.932.431.837	*KPR FLPP Annuity*
Dana KPR Sejahtera PPDPP	77.432.883.479	80.605.806.167	*KPR Sejahtera PPDPP Fund*
Pinjaman Dana FLPP			*FLPP Fund Loans*
Kementrian PUPR	16.019.502.865	17.441.180.070	*Minister for PUPR*
Pinjaman Dana Kelolaan	1.002.708.571	463.081.663	*Chanelling*
Jumlah	**178.862.654.463**	**151.442.499.737**	***Total***

a. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau

Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari MoU No.68/MoU/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dan No.69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002.

a. Loans from Government of Riau Province

Loans from the Government of Riau Province consists of MoU No.68/MOU/2002 dated October 2, 2002 and 69/MOU/2002 dated October 3, 2002.

16. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. Pinjaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah, berdasarkan perjanjian nomor: 92/PKS/Sg/2019 dan nomor: 065/PKO/2019 tanggal 19 Desember 2019, Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera/ Rumah Sejahtera Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

c. Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Bank No.HK.02.03.-SG/15 dan No.111/PKO/2016 tanggal 30 September 2016 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

16. BORROWING *(Continued)*

b. Loans from the Ministry of Public Works and Public Housing

Agreement between the Center for Housing Financing Fund Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia and PT. Bank Pembangunan Bank Kepri Sharia Business Unit, based on agreement number: 92/PKS/Sg/2019 and number: 065/PKO/2019 dated December 19, 2019, concerning the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) Funds through Credit / Financing of Prosperous Home Ownership / Sharia Prosperous Houses for Low-Income Communities.

c. Center of Finance for Housing Ministry of Housing of the Republic of Indonesia.

Agreement between the Center for Housing Finance Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia with Bank No.HK.02.03.-SG/15 and No.111/PKO/2016 dated September 30, 2016 on the distribution of funds liquidity facility in order to finance housing in the context of the acquisition of homes by Housing Loan welfare for low-income people.

17. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Rincian laporan transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

17. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Detail of transaction commitment and contingencies in bank activities are as follow:

A. Komitmen / ***A. Commitments***

	21 Agustus / ***August*** **21, 2022**	**31 Desember /** ***December*** **31, 2021**	
Tagihan komitmen			*Commitment claim*
Lainnya	199.682.056.171	112.871.463.883	*Others*
Sub Jumlah	**199.682.056.171**	**112.871.463.883**	***Sub Total***
Liabilitas komitmen			*Commitment liabilities*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	192.184.046.267	98.270.475.967	*Uncollection credit facilities from clients*
Lainnya	368.020.579.214	335.096.416.601	*Others*
Sub Jumlah	**560.204.625.481**	**433.366.892.568**	***Sub Total***

17. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Lanjutan) / *17. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)*

B. Kontinjensi / *B. Contingencies*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Tagihan kontinjensi			*Contingencies claim*
Tagihan bunga dan marjin			*Interest receivable and margin*
Piutang dalam penyelesaian	367.838.476.025	522.666.649.929	*Interest loans*
Sub Jumlah	**367.838.476.025**	**522.666.649.929**	***Sub Total***
Liabilitas kontinjensi			*Contingencies liabilities*
Garansi yang diterbitkan	14.446.724.801	30.137.587.834	*Guarantee issued*
Sub Jumlah	**14.446.724.801**	**30.137.587.834**	***Sub Total***

C. Lainnya / *C. Others*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Penerusan kredit	211.404.277.060	223.777.300.201	*Distribution chanelling credit*
Aset produktif yang dihapus buku			*Write-off productive asset*
Aset produktif:			*Productive Asset:*
Kredit yang diberikan	285.369.770.668	270.321.991.295	*Loans*
Lainnya	1.453.840.105	259.275.000	*Others*
Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih:			*Write-off productive asset has recovered or successfully billed:*
Kredit yang diberikan	174.248.252.409	66.451.044.631	*Loans*
Sub Jumlah	**672.476.140.242**	**560.809.611.127**	***Sub Total***

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Taxes Payable*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
PPh Pasal 4(2)	2.396.444.919	5.011.401.147	*Income Tax Art 4 (2)*
PPh Pasal 21	218.277.430	9.964.247.317	*Income Tax Art 21*
PPh Pasal 23	95.063.455	325.212.066	*Income Tax Art 23*
PPh Pasal 25	--	2.851.069.000	*Income Tax Art 25*
PPh Pasal 29	--	13.565.633.280	*Income Tax Art 29*
PPN Keluaran	389.024.013	168.802.349	*VAT Out*
Lainnya	15.069.527	149.772.434	*Others*
Sub Jumlah	**3.113.879.344**	**32.036.137.593**	***Sub Total***

18. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *18. TAXATION (Continued)*

b. Beban Pajak / *b. Tax Expenses*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Beban pajak kini	48.021.771.600	126.372.383.280	*Tax expenses*
Pajak tangguhan	(2.701.790.506)	485.609.050	*Deferred tax*
Beban pajak tahun lalu	24.616.876.155	7.226.922.537	*Prior year tax expenses*
Sub Jumlah	**69.936.857.249**	**134.084.914.867**	***Sub Total***

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi Bank dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation of profit before income tax according to the Bank's profit or loss with the estimated taxable income is as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Laba sebelum pajak	208.083.885.440	515.098.352.912	*Profit before tax*
Koreksi Fiskal			*Fiscal corrections*
Beda temporer			*Temporary differences*
Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan CKPN atas aset produktif	(32.062.660.649)	25.551.620.463	*The difference is insufficient between the Provision for Asset Quality Assessment (PPKA) and CKPN on productive assets*
Penerimaan kredit hapus buku	15.047.779.373	(7.999.423.210)	*Receipt of write-off credit*
Jasa produksi - bersih	(58.742.987.773)	(18.665.145.283)	*Production services - net*
Tantiem pengurus	2.998.337.310	-	*Management tantiem*
Imbalan kerja - bersih	2.251.598.588	(3.956.946.673)	*Employee benefits - net*
Jumlah beda Temporer	**(70.507.933.150)**	**(5.069.894.703)**	***Total Temporary difference***
Beda permanen			*Permanent differences*
Tenaga kerja, umum dan administrasi.	44.488.469.341	28.401.891.082	*Employee, general and administration*
Tantiem pengurus	-	9.525.335.951	*Management Tantiem*
Beban operasional lainnya	22.240.320.203	12.491.817.450	*Others operating expenses*
Pendapatan non operasional	434.962.583	(253.613.836)	*Non operating income*
Beban non operasional	13.541.075.648	14.226.035.346	*Non operating expenses*
Jumlah beda Permanen	**80.704.827.775**	**64.391.465.993**	***Total Permanent difference***
Jumlah Koreksi Fiskal	**10.196.894.624**	**59.321.571.290**	***Total Fiscal Correction***
Penghasilan kena Pajak	**218.280.780.064**	**574.419.924.202**	***Taxable income***
Pembulatan	**218.280.780.000**	**574.419.924.000**	***Rounding***

18. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *18. TAXATION (Continued)*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
• Pajak kini tahun 2022 - 22%	48.021.771.600	-	*Current tax in 2022* •
• Pajak kini tahun 2021 - 22%	-	126.372.383.280	*Current tax in 2021* •
Jumlah Pajak Kini	**48.021.771.600**	**126.372.383.280**	***Total Current Tax***
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
PPh Pasal 25	48.021.771.600	112.806.750.000	*Income taxes article 25*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**48.021.771.600**	**112.806.750.000**	***Total prepaid tax***
Pajak kurang (lebih) bayar	**-**	**13.565.633.280**	***Tax under (over) paid***

Bank telah membayar kekurangan pajak tahun pajak 2018, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp24.616.876.155,-

The Bank has paid the tax deficiency for the 2018 tax year, based on the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) dated December 22, 2021 in the amount of IDR 24,616,876,155.

Bank juga telah membayar kekurangan pajak tahun pajak 2018 atas pembetulan kesatu, berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp1.534.784.407,- dan dibayar 50% dari STP sebesar Rp767.392.204,- ditambah sanksi sebesar Rp37.107.676,- sehingga total pajak kurang bayar berjumlah Rp25.421.376.035,-

The Bank has also paid the tax deficiency for the 2018 tax year for the first correction, based on the Tax Collection Letter (STP) dated July 21, 2021 in the amount of Rp1,534,784,407,- and paid 50% of the STP of Rp767,392,204,- plus sanctions of Rp37,107,676,- so that the total tax underpayment amounted to Rp25,421,376,035.

c. Aset Pajak Tangguhan / *c. Deferred Tax Assets*

	21 Agustus / *August* 21, 2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss*	Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Kewajiban jasa produksi	18.860.165.184	(12.923.457.310)	--	5.936.707.874	*Liabilities production services*
Kewajiban tantiem	--	659.634.208	--	659.634.208	*Liabilities tantiem*
Kewajiban imbalan pasca kerja	5.731.300.268	495.351.689	--	6.226.651.958	*Post-employment benefits obligation*
Perbedaan CKPN pinjaman atas PPKA pinjaman	(33.564.318.599)	(7.053.785.343)	--	(40.618.103.942)	*Different of loans ECL over PPKA loans*
Saldo pinjaman hapus buku	41.072.057.939	3.310.511.462	--	44.382.569.401	*Write-off loans balance*
Surat berharga diukur melalui FVOCI	--	-	18.213.535.799	18.213.535.799	*Marketable securities measured at FVOCI*
Jumlah	**32.099.204.792**	**(15.511.745.294)**	**18.213.535.799**	**34.800.995.298**	***Total***

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

c. Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

c. Deferred Tax Assets (Continued)

	31 Desember / *December* 31, 2021				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss*	Dikreditkan Ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Kewajiban jasa produksi	22.966.497.146	(4.106.331.962)	--	18.860.165.184	*Liabilities production services*
Kewajiban imbalan pasca kerja	6.601.828.536	(870.528.268)	--	5.731.300.268	*Post-employment benefits obligation*
Perbedaan CKPN pinjaman atas PPKA pinjaman	(39.185.675.101)	5.621.356.502	--	(33.564.318.599)	*Lack of loans CKPN over PPKA loans*
Saldo pinjaman hapus buku	42.831.931.045	(1.759.873.106)	--	41.072.057.939	*Write-off loans balance*
Jumlah	**33.214.581.626**	**(1.115.376.834)**	**-**	**32.099.204.792**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawan yang memenuhi syarat terdiri dari program, Cuti Besar, Penghargaan Masa Bhakti (PMB), Tunjangan Hari Tua (THT), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Program Pensiun Iuran Pasti, pensiun manfaat pasti.

Valuasi aktuaria atas imbalan kerja PT Bank Riau Kepri (Perseroda) per 21 Agustus 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Indra Catarya Situmeang dan Rekan, berdasarkan Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja Nomor: 037/LA-IK/KKAICS/II-2023 Tanggal 6 Februari 2023. Jumlah liabiities (aset) neto yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan per 21 Agustus 2022 adalah Rp68.789.441.826.

Kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam laporan keuangan per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 tidak termasuk Program Imbalan Kerja selain PPMP dan THT (Program Pensiun Manfaat Pasti) sebesar Rp28.302.963.443 dan Rp26.051.364.855 karena Bank sudah bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perjanjian Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005. Kemudian Addendum I Tanggal 8 September 2006.

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all qualified employees which consist of Annual Leave, Service Pay Benefit (PMB), Pension (THT), Pension Preparation Period (MPP), defined dues pension, and defined benefit pension (Dapen).

Actuarial valuation of employee benefits of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) as of August 21, 2022 was conducted by Actuarial Consulting Firm Indra Catraya Situmeang and Partners, based on Actuarial Report on Employee Benefits Valuation Number: Nomor: 037/LA-IK/KKAICS/II-2023 Dated February 6, 2023. The total net liabilities (assets) recognized in the Statement of Financial Position as of August 21, 2022 is Rp68,789,441,826.

Post-employment benefits liabilities presented in the financial statements as of August 21, 2022 and December 31, 2021 do not include Employee Benefits Program other than PPMP and THT (Defined Benefit Pension Program) amounting to Rp28,302,963,443 and Rp26,051,364,855 because the Bank has collaborated with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Agreement on the Management of Group Old Age Benefits Program No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18, 2005. Then Addendum I dated September 8, 2006.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Diluar program pensiun tersebut diatas PT Bank Riau Kepri (Perseroda) menempatkan program iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BNI dengan saldo 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp146.675.873.786 dan Rp138.390.304.539 dan program tunjangan hari tua yang dikelola PT Asuransi Jiwasraya dengan saldo per 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.289.232.989 dan Rp81.074.883.775.

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Apart from the pension program mentioned above, PT Bank Riau Kepri (Perseroda) has a defined contribution program managed by DPLK BNI with a balance as of August 21, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp146,675,873,786 and Rp138,390,304,539 and an old-age benefit program managed by PT Asuransi Jiwasraya with a balance as of August 21, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp73,289,232,989 and Rp81,074,883,775.

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Disajikan dalam neraca			*Presented on the balance sheet*
Imbalan cuti besar	15.008.490.392	13.730.884.691	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	13.294.473.051	12.320.480.164	*Future Award Program*
Sub Jumlah	**28.302.963.443**	**26.051.364.855**	***Sub Total***

Disajikan pada Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja:

Employee Benefits Valuation Actuarial Report:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Imbalan cuti besar	15.008.490.392	13.730.884.691	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	13.294.473.051	12.320.480.164	*Future Award Program*
Sub Jumlah	**28.302.963.443**	**26.051.364.855**	***Sub Total***

Imbalan cuti besar

Long services leave allowance

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Amount recognized in the statement of profit or loss in respect of the post-employement benefit are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Beban jasa kini	6.728.468.845	5.849.315.751	*Current cost*
Beban bunga	904.865.301	951.277.370	*Interest cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	(6.355.728.465)	(4.838.920.509)	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**1.277.605.681**	**1.961.672.612**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Imbalan cuti besar (Lanjutan)

Long services leave allowance (Continued)

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	15.008.490.392	13.730.884.691	*Present value of unfunded*

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movements in the presents value of finacial position arising from post-employement benefit are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Saldo awal	13.730.884.691	16.627.127.329	*Begining Balance*
Beban jasa kini	1.277.605.681	1.961.672.612	*Currents services cost*
Pembayaran manfaat	-	(4.857.915.250)	*Benefit payment*
Saldo Akhir	**15.008.490.372**	**13.730.884.691**	***Ending Balance***

Program penghargaan masa bakti

Future Award Program

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Beban jasa kini			*Current cost*
Biaya jasa lalu vested	10.490.903.119	10.232.768.206	*Past service costs vested*
Pengukuran kembali imbalan	759.230.237	746.814.542	*Remeasurement*
jangka panjang lain	(9.198.184.926)	(7.570.889.783)	*other employee benefit*
Jumah	**2.051.948.430**	**3.408.692.965**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Program penghargaan masa bakti (Lanjutan)

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Future Award Program (Continued)

The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	13.294.473.051	12.320.480.164	*Present value of unfunded*
Saldo awal	12.320.480.164	13.381.184.199	*Begining Balance*
Beban jasa kini	10.490.903.119	10.232.768.206	*Currents services cost*
Beban bunga	759.230.237	746.814.542	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(1.599.071.500)	(4.469.397.000)	*Benefit payment*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(9.198.184.926)	(7.570.889.783)	*Actuarial gain (loss)*
Saldo akhir	**12.773.357.094**	**12.320.480.164**	***Ending balance***

Program Tunjangan Hari Tua

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

Mutual aid pension plan

The cooperation agreement between the Bank and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18, 2005.

Program Masa Persiapan Pensiun

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program Preparation Pension

Program preparation pension is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Program Pensiun Iuran Pasti

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No.022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

Defined Contribution Pension Plan

In accordance cooperation agreement document No.022/DLK/1/2013 dated June 24, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program pensiun manfaat pasti dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri untuk tahun yang berakhir 21 Agustus 2022 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan format POJK No.LAI-01/KAP-AJ/I/22 tanggal 31 Januari 2022 serta format PSAK No.00004/2.1055/AU.1/08/0842-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Pension Plan

Pension Plan managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

The Financial Statements of Pension Fund of Riau Kepri Regional Development Bank for the years ended August 21, 2022 (unaudited) and December 31, 2021 have been audited by another independent auditor with POJK format report No.LAI-01/KAP-AJ/I/22 dated January 31, 2022 and PSAK format No.00004/2.1055/AU.1/08/0842-2/1/I/2022 dated January 31, 2022.

	21 Agustus / *August* 21, 2022	**31 Desember / *December* 31, 2021**	
Laporan nilai kini aktuarial			*Actuarial present value statement*
• Jumlah aset neto	446.397.870.076	440.276.255.933	*Total net assets •*
• Selisih kewajiban aktuaria	(35.695.736.076)	(29.962.978.933)	*difference actuarial liability •*
Kewajiban aktuaria akhir tahun	**410.702.134.000**	**410.313.277.000**	***Actuary liability at the year end***
Iuran normal bulanan			*Monthly normal contribution*
• Iuran Normal Peserta	877.222.800	1.501.767.325	*Attendance •*
• Iuran Normal Pemberi kerja	3.284.491.644	5.097.313.368	*Job provider •*
Jumlah	**4.161.714.444**	**6.599.080.693**	***Total***

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The employee benefits assets (liabilities) status as of August 21, 2022 December 31, 2021 are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	**31 Desember / *December* 31, 2021**	
Jumlah aset neto			*Total net assets*
• Aset neto awal tahun	440.276.255.933	425.711.779.757	*Net assets beginning of year •*
• Penyesuaian	(44.401.664)	-	*Adjustment •*
• Kenaikan (penurunan) aset bersih	6.166.015.807	14.564.476.176	*Increase (decrease) in net assets •*
Aset neto akhir tahun	**446.397.870.076**	**440.276.255.933**	***Net assets end of year***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	**31 Desember / *December* 31, 2021**	
Jumlah imbalan pasca kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:			*Total of The Company post-employment benefits is as follows:*
Imbalan pasca kerja	41.007.594.379	40.424.968.899	*Post-employment benefits*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Aset Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau terutama terdiri dari obligasi, Surat berharga dan deposito berjangka.

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Pension Fund assets of Bank Pembangunan Daerah Riau consist mainly of bonds, marketable securities and time deposits.

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit assets (liabilities) during the year:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Kenaikan (penurunan) aset bersih			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha bersih	18.079.720.530	32.250.822.611	*Operation Income* •
• Peningkatan (penurunan) nilai investasi	(5.141.186.652)	(4.894.815.146)	*Increase(decrease) of investment value* •
• Kontribusi pemberi kerja	4.161.714.444	6.599.080.693	*Contribution of the companyn* •
• Imbalan yang dibayarkan	(19.108.890.763)	(19.390.611.982)	*Paid reward* •
Jumlah	**(2.008.642.441)**	**14.564.476.176**	***Total***

Pendapatan (biaya) imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Employee benefits income (expenses) for the periods ended August 21, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Hasil Usaha			*Business Results*
• Hasil usaha investasi	23.560.033.166	39.832.650.654	*Investment Income* •
• Beban investasi	(237.065.432)	(353.997.463)	*Investment Expense* •
• Beban operasional	(5.281.205.154)	(7.379.269.004)	*Operating expenses* •
• Pendapatan dan beban lain-lain	37.957.950	151.438.424	*Income and other Expense* •
Jumlah	**18.079.720.530**	**32.250.822.611**	***Total***

Penyusunan Laporan Aktuaris Dana Pensiun Bank Riau Kepri per 21 Agustus 2022 berdasarkan laporan aktuaria PT Dian Artha Tama Aktuaria dengan laporannya No.011/LA/DAT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Preparation of the Bank Riau Kepri Pension Fund Actuary Report as of August 22, 2022 based on the actuarial report of PT Dian Artha Tama Aktuaria with its report No.011/LA/DAT/I/2021 dated January 19, 2021.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Jumlah kewajiban yang berkaitan dengan program pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau secara keseluruhan sebagai berikut:

19. POST EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (Continued)

Total liabilitiy related to Pension Fund of Development Bank of Riau Regional overall are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
• Kekayaan untuk pendanaan	446.397.870.076	440.276.255.933	*Wealth for funding* •
• Liabilitas Solvabilitas	410.702.134.000	410.313.277.000	*Solvency Liability* •
• Nilai Kini Aktuaria	410.702.134.000	410.313.277.000	*Current Value of Actuarial* •
• Surplus (Defisit)	(35.695.736.076)	(29.962.978.933)	*Surplus (Deficit)* •
• Rasio/ kualitas pendanaan	109%	107%	*Funding ratio / quality* •

Iuran Normal 21,80% per 21 Agustus 2022 dan 21,80% tahun 2021 terhadap Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Normal Contribution 21.80% as of August 21, 2022 and 21.80% in 2021 towards Basic Pension Income (PhDP).

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja di atas adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation for all types of employee benefits are:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
• Tingkat Diskonto	7,01% per tahun	8% per tahun	*Discount rate* •
• Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	8% per tahun	5% tiap dua tahun	*Salary Inncrease Rate* • *Basic Pension Per Year*
• Tingkat Mortalitas	1=TMI 2019	1=TMI 2019	*Mortality rate* •
• Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian	10% dari tingkat kematian	*Disability rate* •
• Tingkat Pengunduran Diri			*Resignation rate* •
< 36 tahun	0,00%	0,00%	*age < 36*
< 56 tahun	0,00%	0,00%	*age < 56*

20. LIABILITAS LAIN-LAIN / *20. OTHERS LIABILITIES*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pos kredit dalam penyelesaian	39.530.506.807	27.703.106.835	*Account credit in progress*
Liabilitas sewa	14.983.775.502	5.701.184.748	*Lease liabilities*
Setoran jaminan bank garansi	2.557.099.867	12.108.652.961	*Bank guarantee collateral deposit*
Rek. perantara sistem dan ATM	1.000.100.000	8.252.175	*Attemt & ATM system account*
Titipan jaminan kunci save deposit	739.500.000	668.250.000	*Save deposit guarantee*
Selisih pasiva dalam penyelesaian	319.624.487	3.836.480.150	*Difference In liabilities in progress*
Kredit kelolaan belum disalurkan	24.560.232	25.746.532	*Undirected loans*
Beban bunga yang akan dibayar	--	333.611.054	*Accrued interest*
Lainnya	23.311.035.072	9.063.422.889	*Other*
Jumlah	**82.466.201.967**	**59.448.707.344**	***Total***

Setoran jaminan bank garansi (BG) adalah setoran penerbitan bank garansi yang belum jatuh tempo terdiri dari Setoran jaminan BG Penawaran, BG Pelaksanaan, BG Uang muka dan BG Pemeliharaan.

Deposit for bank guarantee (BG) collateral is the deposit for bank guarantee issuance not yet on due date consisting of the Deposit of Offering BG collateral, Application BG, Down payment BG and Maintenance BG.

Provisi bank garansi merupakan biaya perolehan yang diatribusi kepada nilai kredit (nilai wajar).

Provision is the cost of revenues attributed to the credit value (fair value).

21. MODAL SAHAM / *21. SHARE CAPITAL*

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri tahun 2021 sebesar Rp2.700.000.000,- yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan surat OJK nomor S-330/KO.053/2021 tanggal 20 Agustus 2021 sehingga modal disetor Bank posisi 31 Desember 2021 menjadi Rp1.103.160.700.000,- telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK.

The additional paid-in capital of PT Bank Riau Kepri in 2021 amounting to IDR 2,700,000,000 originating from the Indragiri Hilir Regency Government, with OJK letter number S-330/KO. 053/2021 dated August 20, 2021 so that the paid-up capital of the Bank as of December 31, 2021 will be Rp1,103,160,700,000,- has been administered in the administration of OJK supervision.

Perubahan nama Pemegang Saham seri B yang semula atas nama Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri menjadi Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri, telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, dengan surat OJK nomor S-330/KO.053/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

The change in the name of the Series B Shareholder which was originally in the name of the Bank Riau Kepri Employee Cooperative to the Riau Kepri Amanah Sharia Consumer Cooperative, has been administered in the OJK supervision administration, with OJK letter number S-330/KO.053/2021 dated 20 August 2021.

21. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri (Perseroda) 21 Agustus tahun 2022 sebesar Rp102.000.000.000,- yang berasal dari Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri dan Provinsi Riau, telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, dengan surat OJK nomor 106/TS.01/DIR/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan surat OJK nomor S-249/KO.053/2022 tanggal 15 Juni 2022 sehingga modal disetor Bank posisi 21 Agustus 2022 menjadi Rp1.205.160.700.000,-.

Komposisi kepemilikan modal disetor per 21 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL (Continued)

The addition of paid-up capital of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) on August 21, 2022 amounting to Rp102,000,000,000,- originating from the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative and Riau Province, has been administered in the OJK supervisory administration, with OJK letter number 106/TS.01 /DIR/2022 dated January 31, 2022 and OJK letter number S-249/KO.053/2022 dated June 15, 2022 so that the Bank's paid-up capital as of August 21, 2022 became Rp1,205,160,700,000,-.

Composition of Authorized capital as of August 21, 2022 are as follow:

Perkiraan/ *Akun*	Lembar saham/ *Per share*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	**40.000.000**		**4.000.000.000.000**
Modal Ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	12.001.607	100.000	1.200.160.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	50.000	100.000	5.000.000.000
Jumlah / *total*	**12.051.607**		**1.205.160.700.000**

No.	Pemegang Saham/ *Shareholders*	% Kepemilikan/ *% ownership*	Lembar saham/ *Per share*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *Par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
1	Provinsi Riau	43,08%	5.191.682	100.000	519.168.200.000
2	Provinsi Kepulauan Riau	1,00%	120.000	100.000	12.000.000.000
3	Kota Pekanbaru	1,24%	150.000	100.000	15.000.000.000
4	Kabupaten Kampar	8,73%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
5	Kabupaten Bengkalis	10,92%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
6	Kabupaten Indragiri Hulu	0,53%	64.007	100.000	6.400.700.000
7	Kabupaten Indragiri Hilir	5,63%	678.772	100.000	67.877.200.000
8	Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,71%	327.110	100.000	32.711.000.000
9	Kota Dumai	0,43%	52.030	100.000	5.203.000.000
10	Kabupaten Pelalawan	2,65%	319.668	100.000	31.966.800.000
11	Kabupaten Rokan Hulu	0,69%	82.807	100.000	8.280.700.000
12	Kabupaten Rokan Hilir	3,08%	371.351	100.000	37.135.100.000
13	Kabupaten Kuantan Singingi	1,26%	152.086	100.000	15.208.600.000
14	Kabupaten Bintan	3,16%	380.789	100.000	38.078.900.000
15	Kota Batam	4,15%	500.000	100.000	50.000.000.000
16	Kabupaten Karimun	0,60%	71.900	100.000	7.190.000.000
17	Kabupaten Natuna	2,82%	339.381	100.000	33.938.100.000
18	Kota Tanjung Pinang	0,70%	83.913	100.000	8.391.300.000
19	Kabupaten Kep. Meranti	4,98%	600.000	100.000	60.000.000.000
20	Kabupaten Lingga	0,58%	70.000	100.000	7.000.000.000
21	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,65%	78.237	100.000	7.823.700.000
22	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,41%	50.000	100.000	5.000.000.000
	Jumlah / Total	**100,00%**	**12.051.607**		**1.205.160.700.000**

21. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL (Continued)

Composition of Authorized capital as of December 31, 2021 are as follow:

Perkiraan/ *Akun*	Lembar saham/ *Per share*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *par value (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	**40.000.000**		**4.000.000.000.000**
Modal Ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	11.001.607	100.000	1.100.160.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	30.000	100.000	3.000.000.000
Jumlah / *total*	**11.031.607**		**1.103.160.700.000**

No.	Pemegang Saham/ *Shareholders*	% Kepemilikan/ *% ownership*	Lembar saham/ *Per share*	Nilai Per lembar saham (Rp)/ *Par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
1	Provinsi Riau	38,00%	4.191.682	100.000	419.168.200.000
2	Provinsi Kepulauan Riau	1,09%	120.000	100.000	12.000.000.000
3	Kota Pekanbaru	1,36%	150.000	100.000	15.000.000.000
4	Kabupaten Kampar	9,53%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
5	Kabupaten Bengkalis	11,93%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
6	Kabupaten Indragiri Hulu	0,58%	64.007	100.000	6.400.700.000
7	Kabupaten Indragiri Hilir	6,15%	678.772	100.000	67.877.200.000
8	Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,97%	327.110	100.000	32.711.000.000
9	Kota Dumai	0,47%	52.030	100.000	5.203.000.000
10	Kabupaten Pelalawan	2,90%	319.668	100.000	31.966.800.000
11	Kabupaten Rokan Hulu	0,75%	82.807	100.000	8.280.700.000
12	Kabupaten Rokan Hilir	3,37%	371.351	100.000	37.135.100.000
13	Kabupaten Kuantan Singingi	1,38%	152.086	100.000	15.208.600.000
14	Kabupaten Bintan	3,45%	380.789	100.000	38.078.900.000
15	Kota Batam	4,53%	500.000	100.000	50.000.000.000
16	Kabupaten Karimun	0,65%	71.900	100.000	7.190.000.000
17	Kabupaten Natuna	3,08%	339.381	100.000	33.938.100.000
18	Kota Tanjung Pinang	0,76%	83.913	100.000	8.391.300.000
19	Kabupaten Kep. Meranti	5,44%	600.000	100.000	60.000.000.000
20	Kabupaten Lingga	0,63%	70.000	100.000	7.000.000.000
21	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,71%	78.237	100.000	7.823.700.000
22	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,27%	30.000	100.000	3.000.000.000
	Jumlah / Total	**100%**	**11.031.607**		**1.103.160.700.000**

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Dana setoran modal	2.084.940.000	2.084.940.000	*Paid Capital*
Provinsi Riau	405	405	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	18.217	18.217	*Pekanbaru City*
Kota Tanjung Pinang	35.731	35.731	*Tanung Pinang City*
Kota Batam	11.793	11.793	*Batam City*
Kabupaten Kampar	18.574	18.574	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	29.804	29.804	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	11.089	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	102.548	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Bintan	22.286	22.286	*Bintan Regency*
Kabupaten Pelalawan	72.657	72.657	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	37.421	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Natuna	2.080.000.000	--	*Natuna Regency*
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	--	2.000.000.000	*Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)*
Jumlah	**4.165.300.525**	**4.085.300.525**	***Total***

Tambahan modal disetor Pemegang Saham seri A Bupati Kabupaten Natuna sebesar Rp2.080.000.000,- telah dilakukan berdasarkan surat pernyataan Bupati Natuna, dengan surat pernyataan nomor 032/339/BPKAD-Set/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.

Additional paid-up capital of series A shareholders of the Regent of Natuna Regency amounting to Rp2,080,000,000,- has been carried out based on the statement letter of the Regent of Natuna, with statement letter number 032/339/BPKAD-Set/XII/2021 dated December 8, 2021.

Rincian mutasi tambahan modal disetor pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The details of additional paid-in capital mutations as of August 21, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

Tambahan modal disetor per 21 Agustus 2022:

Additional paid-in capital as of August 21, 2022 is as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	21 Agustus / *August 21*, 2022			
	Saldo awal tahun/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir/ Ending balance
Dana setoran modal	2.084.940.000	-	--	2.084.940.000
Provinsi Riau	405	100.000.000.000	(100.000.000.000)	405
Kota Pekanbaru	18.217	-	--	18.217
Kota Tanjung Pinang	35.731	-	--	35.731
Kota Batam	11.793	-	--	11.793
Kabupaten Kampar	18.574	-	--	18.574
Kabupaten Bengkalis	29.804	-	--	29.804
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	-	--	11.089
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	-	--	102.548
Kabupaten Bintan	22.286	-	--	22.286
Kabupaten Pelalawan	72.657	-	--	72.657
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	-	--	37.421
Kabupaten Natuna	-	2.080.000.000	--	2.080.000.000
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	--
Jumlah / *Total*	**4.085.300.525**	**102.080.000.000**	**(102.000.000.000)**	**4.165.300.525**

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

tambahan modal disetor per 31 Desember 2021:

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (Continued)

Additional paid-in capital as of December 31, 2021:

Pemegang Saham / Shareholders	31 Desember / *December 31*, 2021			
	Saldo awal tahun/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir/ Ending balance
Dana setoran modal	2.084.940.000	-	--	2.084.940.000
Provinsi Riau	405	-	--	405
Kota Pekanbaru	18.217	-	--	18.217
Kota Tanjung Pinang	35.731	-	--	35.731
Kota Batam	11.793	-	--	11.793
Kabupaten Kampar	18.574	-	--	18.574
Kabupaten Bengkalis	29.804	-	--	29.804
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	-	--	11.089
Kabupaten Indragiri Hilir	2.700.102.548	-	(2.700.000.000)	102.548
Kabupaten Bintan	22.286	-	--	22.286
Kabupaten Pelalawan	72.657	-	--	72.657
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	-	--	37.421
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	-	2.000.000.000	--	2.000.000.000
Jumlah / *Total*	**4.785.300.525**	**2.000.000.000**	**(2.700.000.000)**	**4.085.300.525**

23. SALDO LABA

23. RETAINED EARNINGS

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Telah ditentukan penggunaannya	1.774.825.929.991	1.622.420.554.773	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	194.179.417.804	455.259.363.458	*Unappropriated*
Jumlah	**1.969.005.347.795**	**2.077.679.918.231**	***Total***

Saldo laba telah ditentukan penggunanya

Appropriated retained earnings

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
- Cadangan umum	1.774.825.929.991	1.622.420.554.773	*General reserves* -
- Cadangan tujuan	--	--	*Purpose reserves* -
Jumlah	**1.774.825.929.991**	**1.622.420.554.773**	***Total***

Cadangan Umum

Penggunaan cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada perundang-undangan serta digunakan untuk menutup kerugian Bank.

General reserves

The general reserves certainly by General Meeting Of Stockholders with refer to regulation by the Law and used for covered Bank losses.

23. SALDO LABA (Lanjutan)

Saldo laba telah ditentukan penggunanya (Lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2021 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri (Perseroda) yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH tanggal 14 Juni 2022 Nomor 17. RUPS memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021;
- Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan tahun buku 2021;
- Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi pegawai 22,5% dan tantiem pengurus 2,5%;
- Menyetujui untuk tahun buku 2022 komposisi cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus sama dengan tahun buku 2021;
- Menyetujui Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2022 sebesar Rp21.000.000.000 (duapuluh satu miliar rupiah) kepada pemegang saham seri A;
- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri (Perseroda) tahun buku 2022;
- Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri (Perseroda) Tahun 2022 adalah sebesar Rp49.259.459.475,-

23. RETAINED EARNINGS *(Continued)*

Appropriated retained earnings *(Continued)*

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2021 based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH dated June 14, 2022 Number 17. The GMS, decided the following:

- *Approved the 2021 Fiscal Year Annual Report;*
- *Approved the allocation of the use of the company's net profit and distribution of dividends for the 2021 financial year;*
- *Approved the use of reserves for employee production services of 22.5% and management bonuses of 2.5%;*
- *Approved for the 2022 financial year the composition of the reserves for production services for employees and management bonuses is the same as for the 2021 financial year;*
- *Approved the Provision of Partnership Development Funds for 2022 in the amount of Rp21,000,000,000 (twenty one billion rupiahs) to series A shareholders;*
- *Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to establish a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) for the 2022 financial year;*
- *Approved that the remuneration budget for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) in 2022 is Rp49,259,459,475,-.*

23. SALDO LABA (Lanjutan) / *23. RETAINED EARNINGS (Continued)*

Cadangan Umum / *General reserves*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Saldo awal	1.622.420.554.773	1.436.832.699.052	*Beginning Balance*
Penambahan	152.405.375.218	185.587.855.721	*Addition*
Saldo akhir	**1.774.825.929.991**	**1.622.420.554.773**	***Ending balance***

Saldo laba belum ditentukan penggunanya / *Unappropriated retained earnings*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Saldo awal	455.259.363.458	538.216.586.168	*Beginning Balance*
Pembagian laba	(381.013.438.046)	(463.969.639.303)	*Profit sharing*
Koreksi saldo laba	--	(1.021.452)	*Correction of retained earnings*
Laba tahun berjalan	119.933.492.392	381.013.438.045	*Current year income*
Saldo akhir	**194.179.417.804**	**455.259.363.458**	***Ending balance***

24. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH / *24. INTEREST AND SHARIA INCOME*

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah adalah sebagai berikut:

Interest income and sharia income are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Bunga kredit yang diberikan	709.455.852.050	1.585.759.821.556	*Interest loans*
Bunga surat berharga yang dimiliki	115.509.041.836	184.782.990.797	*Interest securities owned*
Jasa giro Bank Indonesia	7.045.914.271	6.260.540.924	*Current accounts of Bank Indonesia*
Bunga dan jasa giro penempatan pada bank lain	3.344.262.220	4.980.966.311	*Interest and demand deposits for placements with other banks*
Jumlah Pendapatan Bunga	**835.355.070.377**	**1.781.784.319.588**	***Total interest income***
Pendapatan marjin *murabahah*	254.486.206.420	304.940.475.001	*Margin income of murabahah*
Pendapatan bunga dan bagi hasil	58.478.176.867	82.597.421.557	*Income from interest and profit sharing*
Pendapatan *rahn, Ijarah* dan Multijasa	18.395.338.102	24.091.040.873	*Income rahn, ijarah and multijasa*
Bagi hasil pembiayaan musyarakah	12.028.792.333	14.968.681.745	*Musyarakah profit sharing loan*
Jasa giro Bank Indonesia	--	1.169.789.006	*Current accounts of Bank Indonesia*
Bagi hasil sertifikat investasi *mudharabah* bank	1.197.036.112	3.300.051.690	*Revenue share of investment certificates mudharabah bank*
Bagi hasil penempatan mudharabah	1.041.365.935	1.000.667.031	*Mudharabah profit sharing*
Jumlah pendapatan syariah	**345.626.915.769**	**432.068.126.903**	***Total sharia income***
Jumlah	**1.180.981.986.146**	**2.213.852.446.491**	***Total***

25. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH / *25. INTEREST AND SHARIA EXPENSES*

Beban bunga dan syariah adalah sebagai berikut:

Interest expenses and sharia expenses are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Bunga deposito berjangka	193.933.779.920	583.599.732.758	*Time deposit*
Bunga giro	63.196.103.634	82.805.234.135	*Current account expenses*
Bunga tabungan	29.350.895.831	48.663.868.190	*Savings expenses*
Premi asuransi			*Insurance premium*
- Dana nasabah	23.757.346.903	42.394.857.196	*Customer funds -*
- Kredit	22.613.172.775	6.346.995.822	*Loan -*
Bunga simpanan bank	2.357.514.653	4.165.724.444	*Interest expenses to Bank*
Bunga pinjaman yang diterima	327.868.896	772.990.675	*Interest expenses to Bank Ind*
Jumlah beban bunga	**335.536.682.612**	**768.749.403.220**	***Total interest expenses***
Bagi hasil deposito *mudharabah*	94.503.820.631	131.917.968.627	*Nisbah share income for deposit*
Premi asuransi	8.096.124.928	8.581.328.004	*Insurance Premium*
Bagi hasil tabungan *mudharabah*	4.868.920.356	9.741.127.746	*Nisbah share income for savings*
Bonus *wadiah* non bank	575.226.833	1.022.087.810	*Non bank wadiah bonus*
Bonus simpanan lainnya *wadiah*	183.032.547	328.440.963	*Other savings bonuses are wadiah*
Bunga pinjaman yang diterima	109.471.021	208.344.105	*Interest expenses to Bank Ind*
Bonus deposito *mudharabah* bank lain	40.351.826	1.405.483.075	*Other bank mudharabah deposit bonus*
Beban bagi hasil sertifikat IMA	--	251.708.333	*IMA certificate profit sharing expenses*
Jumlah beban syariah	**108.376.948.142**	**153.456.488.663**	***Total sharia expenses***
Provisi dan komisi	105.562.263	243.677.558	***Fee and commision***
Jumlah	**444.019.193.017**	**922.449.569.441**	***Total***

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *26. OTHER OPERATING INCOME*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pendapatan administrasi	44.974.698.271	72.736.487.752	*Saving administration*
Provisi dan komisi selain kredit	33.189.383.831	40.573.378.056	*Non credit fee and commission*
Pemulihan CKPN kredit	27.757.116.385	70.128.198.522	*CKPN recovery credit*
Pendapatan restitusi biaya	6.648.039.831	9.518.723.538	*Cost restitution of income*
Pendapatan dari hapus buku	4.484.958.334	7.999.423.210	*Income from credit writte-off*
Pendapatan *fee*	3.841.193.231	3.595.560.335	*Profit of obligation sales*
Selisih kurs	71.642.150	48.044.562	*Exchange rate gaps*
Provisi dan komisi bank lain	5.500.000	5.000.000	*Credit fees and commissions*
Keuntungan penjualan surat berharga	--	2.729.874.656	*Net profit of obligation sales*
Dividen dari penyertaan	--	10.667.481	*Dividends investments*
Jumlah	**120.972.532.033**	**207.345.358.112**	***Total***

27. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF / *27. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES OF VALUE PRODUCTIVE ASSETS*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Kredit yang diberikan	49.060.030.533	34.627.281.173	*Loans*
Kelonggaran tarik	581.231.146	388.002.114	*Pull clearance*
Giro pada bank lain	4.247.816	3.397.463	*Current account with other banks*
Jumlah	**49.645.509.495**	**35.018.680.750**	***Total***

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA / *28. OTHERS OPERATING EXPENSES*

a. Beban Umum dan Administrasi / *b. General and Administrative Expenses*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Promosi usaha	17.918.702.011	37.728.992.800	*Promotion expenses*
Beban sewa	16.227.370.654	31.632.842.696	*Rent expensess*
Listrik, air, telepon	16.054.044.211	27.847.126.252	*Electricity, water, telephone*
Pengkajian dan pengembangan usaha	12.566.393.515	29.970.138.353	*Research and development*
Keperluan kantor	11.875.086.466	24.400.140.191	*Office supplies*
Penyusutan aset hak guna	11.261.027.559	16.063.623.152	*Depreciation of use rights assets*
Perjalanan dinas	7.149.501.385	7.974.357.986	*Travelling expenses*
Beban premi asuransi	6.769.367.735	12.037.436.948	*Insurance premium*
Amortisasi beban tangguhan	3.539.815.623	5.445.488.676	*Deferred expenses amortization*
Pajak-pajak selain PPh Badan	2.221.774.421	1.661.409.493	*Tax exp. except income taxes*
Pemeliharaan aset tetap:			*Fixed assets maintenance:*
- Bangunan	7.749.740.178	15.404.277.235	*Building -*
- Inventaris	4.904.983.471	9.993.100.918	*Equipments -*
- Kendaraan	3.452.838.223	4.809.186.581	*Vehicle -*
Penyusutan: (Catatan 11)			*Depreciation: (Notes 11)*
- Inventaris golongan I	20.322.225.909	28.469.724.073	*Equipment group I -*
- Bangunan	10.358.553.536	15.633.908.758	*Building -*
- Inventaris golongan II	4.595.159.715	6.704.788.944	*Equipment group II -*
Bunga liabilitas sewa	262.006.041	590.817.831	*Lease liability interest*
Beban umum dan administrasi lain	9.122.166.518	12.890.518.366	*Others general and administration*
Jumlah	**166.350.757.171**	**289.257.879.253**	***Total***

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (Lanjutan) / *28. OTHERS OPERATING EXPENSES (Continued)*

b. Beban Tenaga Kerja / *b. Personnel Expenses*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Beban gaji dan tunjangan Pegawai	97.190.676.832	151.857.284.408	*Salary expenses & allowance*
Tunjangan hari raya	42.698.317.050	38.562.703.050	*Hari raya allowance*
Tenaga kerja outsourcing	32.571.001.611	45.088.094.334	*Outsourcing employee*
Jasa produksi	26.985.035.788	85.728.023.560	*Employee bonuses*
Uang makan pegawai	26.493.701.000	46.849.432.000	*Employee meal expenses*
Iuran pensiun, astek, THT	23.305.099.241	47.212.119.243	*Pension, labour insurance, THT*
Tunjangan PPh pasal 21	19.299.085.840	35.187.060.814	*Allowance of income tax 21*
Pakaian dinas	13.731.960.000	42.526.234.300	*Uniform*
Perawatan kesehatan	12.913.831.932	19.235.401.291	*Health care benefits*
Beban imbalan pascakerja	11.943.629.012	10.194.037.685	*Employee benefit expenses*
Beban cuti	6.998.228.750	13.145.892.212	*Leave benefits*
Pendidikan dan pelatihan	4.510.616.220	5.748.964.332	*Education & training benefits*
Beban lembur	3.660.423.572	5.715.551.632	*Over time payment*
Imbalan kerja dan tunjangan Direksi	3.080.000.000	4.968.728.000	*Director's salaries & allowance*
Tantiem pengurus	2.998.337.310	9.525.335.951	*Management Tantiem*
Penghargaan dan jasa masa bakti	2.051.948.410	3.408.692.965	*The inauguration of the Bank official*
Honor Dewan Komisaris	1.547.000.000	1.619.000.000	*Board of comisioners fee*
Olah raga	1.317.207.242	2.237.000.055	*Sports*
Uji penilaian	75.734.694	97.013.671	*Assestment test*
Seleksi calon pegawai	65.850.850	517.096.978	*Employee recruitment selection*
Tenaga kerja lainnya	3.811.528.431	5.960.495.005	*Other employee expenses*
Jumlah	**337.249.213.785**	**575.384.161.486**	***Total***

c. Lainnya / *c. Others*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Penghapusan Provisi	22.313.175.152	--	*Write off Provision*
Pembinaan kemitraan	21.000.000.000	21.000.000.000	*Pathnership*
Pengamanan dan Penertiban	2.904.235.742	4.678.584.527	*Security and safety expenses*
Rapat kerja	2.267.487.183	3.584.532.381	*Business meeting expenses*
Rugi bersih penjualan efek	2.235.439.880	--	*Net loss of marketable securities*
Jasa penagihan kredit	1.868.615.406	3.583.034.084	*Collector and loans service*
Hidangan ringan pegawai	1.722.252.316	2.602.516.371	*Snack employee*
Penyelesaian kredit dan perkara	967.780.494	1.620.528.603	*Credit clearance and court matters*
Beban profesional	377.904.137	1.763.090.122	*Profesional fee*
Santunan kematian/ cacat pegawai dan keluarga	277.550.000	796.226.485	*Donation of employee*
Peresmian kantor	115.285.200	79.285.849	*Office grand opening*
Imbalan penghimpunan dana	84.000.000	132.500.000	*Fund-raising rewards*
Honorarium pihak ekstern	6.093.100	161.274.986	*Exsternal parties honorarium*
Operasional lainnya	2.024.622.294	7.750.983.425	*Other operating*
Jumlah	**58.164.440.904**	**47.752.556.833**	***Total***

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (Lanjutan)

c. Lainnya (Lanjutan)

Bank membentuk penyisihan cadangan estimasi atas beban tantiem pengurus dan jasa produksi pada tahun 2022 dan 2021. Estimasi tersebut telah dicatat dan dibebankan pada periode tersebut. Pembayaran akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Persetujuan penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2022 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2021 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Riau Kepri (Perseroda) dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH tanggal 14 Juni 2022 Nomor 17.

Persetujuan penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2021 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2020 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Riau Kepri (Perseroda) dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH tanggal 18 Juni 2021 Nomor 21.

Saldo kewajiban pembinaan kemitraan, yang disajikan pada kewajiban segera, per 21 Agustus 2022 sebesar Rp37.998.333.518,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.497.983.916,-.

28. OTHERS OPERATING EXPENSES *(Continued)*

c. Others *(Continued)*

The Bank establishes the setting aside of estimation reserve on the management dividend liability and the production service in 2022 and 2021. The estimation has been recorded and charged to that period. The payment shall be performed after obtaining the approval from the General Meeting of Shareholders.

Approval for the provision of the 2022 Partnership Development Fund based on the General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2021 based on the Decision Statement of the Annual Meeting for the Financial Year 2021 of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) made by Notary Pupung Mulyantini, SH. MH dated June 14, 2022 Number 17.

Approval for the provision of the 2021 Partnership Development Fund based on the General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2020 based on the Decision Statement of the Annual Meeting for the Financial Year 2020 of PT Bank Riau Kepri (Perseroda) made by Notary Pupung Mulyantini, SH. MH dated June 18, 2021 Number 21.

The balance of partnership development obligations, which is presented in immediate liabilities, as of August 21, 2022, is Rp37,998,333,518,- and as of December 31, 2021, is Rp38,497,983,916,-.

29. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

29. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)

Pendapatan non operasional

Non-operating income

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Sewa	284.326.332	458.479.092	*Rent*
Keuntungan penjualan aset tetap	26.440.000	700.000	*Gains of fixed assets sales*
Lain-lain	17.695.325.507	11.969.247.729	*Others income*
Jumlah	**18.006.091.839**	**12.428.426.821**	***Total***

Beban non operasional

Non-operating expenses

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Iuran keanggotaan	9.029.532.847	15.675.848.022	*Member fee*
Denda yang dibayar	28.100.000	24.452.355	*Fine has been paid*
Lain-lain	47.389.977.359	32.964.730.372	*Others expenses*
Jumlah	**56.447.610.206**	**48.665.030.749**	***Total***
Jumlah - bersih	**(38.441.518.367)**	**(36.236.603.928)**	***Total - net***

Pos denda merupakan beban bank atas pembayaran denda yang dibayarkan kepada Bank Indonesia, denda keterlambatan atas setoran pajak dan beban keterlambatan kartu kredit serta denda lainnya.

Penalty post is the liability of the bank for penalty payment payable to Bank Indonesia, penalty for delay on tax deposit and liability of credit card delay and for other penalty.

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS

No.	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
1	Provinsi Riau / *Riau Province*	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
2	Provinsi Kepulauan Riau	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
3	Kabupaten Bengkalis / *Bengkalis Regional Goverment*	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
4	Kabupaten Siak Sri Indrapura	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
5	Kabupaten Pelalawan	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
6	Kabupaten Indragiri Hulu	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
7	Kabupaten Indragiri Hilir	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
8	Kota Pekanbaru	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
9	Kota Dumai	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
10	Kabupaten Bintan	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
11	Kabupaten Rokan Hilir	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
12	Kabupaten Kuantan Singingi	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
13	Kota Tanjung Pinang	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
14	Kabupaten Kep. Meranti	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
15	Kabupaten Kampar	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

No.	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
16	Kabupaten Lingga	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
17	Kabupaten Karimun	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
18	Kota Batam	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*Time deposit*).
19	Kabupaten Natuna	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
20	Kabupaten Rokan Hulu	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
21	Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*)
22	Karyawan kunci / *Key Employees*	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut / *Directors, Commissioners, Heads of Branches, Heads of Divisions and close members of the families of such individuals*	Tabungan (*saving*), deposito (*time deposit*) dan Kredit yang diberikan (*Loans*)
23	PD. BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (*saving*), Simpanan Giro (*current account*)
24	PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro (*current account*), Simpanan Deposito (*Time deposits*)
25	PT Penjaminan Kredit Daerah Prop. Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro (*current account*), Simpanan Tabungan (*saving*) dan Simpanan Deposito (*Time deposits*)
26	PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro (*current account*) dan Simpanan Deposito (*Time deposits*)
27	Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro (*current account*)
28	PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (*saving*)
29	PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro (*current account*) dan Pinjaman (*Loan*)
30	PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (*saving*), Simpanan Giro (*current account*)
31	BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro (*current account*)

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
ASET			**ASSET**
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah			*Loans and Sharia funds*
Karyawan kunci	1.449.446.115	902.461.762	*Key management*
% terhadap jumlah aset	0,0051%	0,0029%	*% with compare to total asset*
LIABILITAS			**LIABILITIES**
Simpanan nasabah			*Deposits from customer*
Simpanan dari nasabah (Catatan 14)	4.015.668.755.971	4.558.222.630.885	*Deposits from customer liabilities (Note 14)*
% terhadap jumlah liabilitas	15,9868%	16,5198%	*% with compare to total*
Simpanan bank lain			*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain (Catatan 15)	--	--	*Deposits from other Bank (Note 15)*
% terhadap jumlah liabilitas	--	--	*% with compare total liabilities*

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama. Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021.

Kompensasi terhadap personil manajemen kunci Bank (diluar dari Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

Deposits from customer represent deposits from key management, province and regional goverment and The company which owned share by the ultimate shareholders. Deposit from other Bank represent deposits from Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which owned share by the ultimate shareholders.

Commitment and contingencies

There were no commitments and contingencies to related parties for the year ended August 21, 2022 and December 31, 2021.

Compensation of key management personnel of the Bank (excluded from Commisioners and Director) are as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Gaji	7.562.740.000	11.344.110.000	*Salary*
Tunjangan	3.753.490.667	5.630.236.000	*Allowance*
Jasa produksi	5.855.934.697	8.783.902.046	*Production bonuses*
Imbalan jangka panjang	1.309.193.284	1.963.789.926	*Long-term benefit*
Jumlah	**18.481.358.648**	**27.722.037.972**	***Total***

31. INFORMASI SEGMEN

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

31. SEGMENT INFORMATION

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment.

Information concerning the primary segment information of the Bank is set out in the table below:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Aset konvensional	18.942.423.909.477	23.049.148.405.194	*Conventional assets*
Aset syariah	9.359.305.509.840	8.113.375.794.231	*Sharia assets*
Jumlah	**28.301.729.419.317**	**31.162.524.199.425**	***Total***
Eliminasi/ penyesuaian	(69.333.171.563)	(382.838.418.910)	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**28.232.396.247.754**	**30.779.685.780.515**	***Total***

31. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) / *31. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Pendapatan Operasional *)			*Operating income *)*
Aset konvensional	1.358.277.463.132	1.969.238.584.391	*Conventional assets*
Aset syariah	310.496.417.359	450.607.627.481	*Sharia assets*
Jumlah	**1.668.773.880.491**	**2.419.846.211.872**	***Total***
Eliminasi/ penyesuaian	(454.385.263.966)	1.351.592.731	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**1.214.388.616.525**	**2.421.197.804.603**	***Total***
Pendapatan operasional bersih **)			*Operating income - nett **)*
Aset konvensional	1.015.520.655.859	1.433.513.060.228	*Conventional assets*
Aset syariah	301.708.301.773	306.682.227.164	*Sharia assets*
Jumlah	**1.317.228.957.632**	**1.740.195.287.392**	***Total***
Eliminasi/ penyesuaian	(544.411.669.360)	(241.447.052.229)	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**772.817.288.272**	**1.498.748.235.163**	***Total***

*) Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya.

**) Pendapatan operasional bersih terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya dikurangi beban bunga dan syariah.

*) *Operating Income consist of interest and sharia income and other operating income.*

**) *Net operating income consists of interest income and sharia, and other operating income minus interest expense and sharia.*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha sekunder dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of the Bank is set out in the table below:

a. Segmen Geografis	**21 Agustus/ *August* 21, 2022**				***a. Geographic Segments***
	Dalam Rupiah/ *In Rupiah*				
	Riau	**Kepulauan Riau**	**Lainnya**	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	954.468.878.696	225.922.411.187	590.696.263	1.180.981.986.146	*Interest and Margin Income*
Beban Bunga dan Bagi Hasil	(282.267.105.945)	(54.953.598.114)	(106.798.488.958)	(444.019.193.017)	*Interest and Margin Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	**672.201.772.751**	**170.968.813.073**	**(106.207.792.695)**	**736.962.793.129**	***Interest Income - Net***
Pendapatan Operasional Lainnya	(92.845.472.919)	51.459.688.075	162.358.316.877	120.972.532.033	*Other Operating Income*
Gaji danTunjangan Karyawan	(287.617.119.617)	(47.265.715.623)	(2.366.378.545)	(337.249.213.785)	*Salaries and Employees Benefits*
Umum dan Administrasi	(141.012.191.072)	(23.132.008.642)	(1.944.551.416)	(166.088.751.130)	*General and Administrative*
Beban Lainnya	(34.442.436.603)	(23.668.850.039)	(53.154.262)	(58.164.440.904)	*Other Expenses*
Pendapatan Non-Operasional	13.370.658.837	4.621.691.179	13.741.823	18.006.091.839	*Non-Operating Income*
Beban Non-Operasional	(49.122.432.289)	(7.146.444.200)	(178.733.717)	(56.447.610.206)	*Non-Operating Expenses*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(37.754.502.424)	(11.789.469.114)	(101.537.957)	(49.645.509.495)	*Allowance for Impairment Losses for Financial*
Laba Operasional	**42.778.276.664**	**114.047.704.709**	**51.519.910.108**	**208.345.891.481**	***Operating Income***
Laba Bersih	**(45.634.122.425)**	**114.047.704.709**	**51.519.910.108**	**119.933.492.392**	***Net Profit***
Jumlah Aset	**23.843.832.502.031**	**4.388.563.745.722**	**16.844.197.458**	**28.232.396.247.753**	***Total Assets***
Jumlah Liabilitas	**(20.855.723.462.198)**	**(4.274.516.041.018)**	**(6.649.196.039.862)**	**(25.130.239.503.216)**	***Total Liability***
Jumlah Ekuitas	**(2.988.109.039.828)**	**(114.047.704.709)**	**(172.307.146.644)**	**(3.102.156.744.537)**	***Total Equity***

31. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) / *31. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

a. Segmen Geografis / *a. Geographic Segments*	31 Desember/ *December* 31, 2021 Dalam Rupiah/ *In Rupiah*				
	Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Jumlah / *Total*	
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	1.798.423.375.776	414.908.498.000	520.572.715	2.213.852.446.491	*Interest and Margin Income*
Beban Bunga dan Bagi Hasil	(548.512.148.433)	(54.409.528.650)	(319.527.892.358)	(922.449.569.441)	*Interest and Margin Expenses*
Pendapatan Bunga - Bersih	**1.249.911.227.343**	**360.498.969.350**	**(319.007.319.643)**	**1.291.402.877.050**	***Interest Income - Net***
Pendapatan Operasional Lainnya	(272.721.253.929)	67.465.113.921	412.601.498.120	207.345.358.112	*Other Operating Income*
Gaji danTunjangan Karyawan	(500.014.150.801)	(71.408.866.216)	(3.961.144.469)	(575.384.161.486)	*Salaries and Employees Benefits*
Umum dan Administrasi	(245.261.166.112)	(40.404.190.232)	(3.592.522.909)	(289.257.879.253)	*General and Administrative*
Beban Lainnya	33.802.327.259	(81.393.647.713)	(161.236.379)	(47.752.556.833)	*Other Expenses*
Pendapatan Non-Operasional	11.597.718.916	824.192.556	6.515.349	12.428.426.821	*Non-Operating Income*
Beban Non-Operasional	(44.030.112.266)	(4.316.424.950)	(318.493.533)	(48.665.030.749)	*Non-Operating Expenses*
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(26.508.292.194)	(8.500.736.777)	(9.651.779)	(35.018.680.750)	*Allowance for Impairment Losses for Financial*
Laba Operasional	**206.776.298.216**	**222.764.409.939**	**85.557.644.757**	**515.098.352.912**	***Operating Income***
Laba Bersih	**72.691.383.349**	**222.764.409.939**	**85.557.644.757**	**381.013.438.045**	***Net Profit***
Jumlah Aset	**26.514.696.245.443**	**4.264.989.535.070**	**18.109.806.629**	**30.779.685.780.513**	***Total Assets***
Jumlah Liabilitas	**(23.561.347.141.942)**	**(4.031.179.906.762)**	**(5.366.204.991.179)**	**(27.592.527.048.704)**	***Total Liability***
Jumlah Ekuitas	**(2.987.464.278.420)**	**(199.694.453.389)**	**(85.557.644.757)**	**(3.187.158.731.809)**	***Total Equity***

32. LABA PER SAHAM / *32. EARNINGS PER SHARE*

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Earnings per share is calculated by dividing net income attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Laba bersih setelah pajak	119.933.492.392	381.013.438.045	*Income after tax*
Rata-rata tertimbang total saham	12.051.607	11.018.107	*Weighted average number of shares*
Laba bersih per saham	9.952	34.581	*Earnings per share*

33. MANAJEMEN RISIKO / *33. RISK MANAGEMENT*

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan Penilaian tingkat kesehatan bank umum terakhir berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.03.2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Bank harus mengelola serta melakukan mitigasi risiko sesuai ruang lingkup aktivitas bisnisnya.

The Bank has implemented risk management procedures in accordance with the latest commercial bank soundness assessment based on POJK Number 37/POJK.03.2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and SE OJK Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports . Banks must manage and mitigate risks according to the scope of their business activities.

Bank memiliki pengungkapan terhadap risiko di bawah ini yang berasal dari aktivitas bisnis dan instrumen keuangan:

The Bank has exposures to the following risks from financial instruments:

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

a. Risiko Kredit
b. Risiko Pasar
c. Risiko Likuiditas
d. Risiko Operasional
e. Risiko Hukum
f. Risiko Reputasi
g. Risiko Stratejik
h. Risiko Kepatuhan

Catatan di bawah ini menyajikan informasi mengenai eksposur Bank terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Bank dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pemantau risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Komite Pemantau Risiko tersebut mengadakan pertemuan secara rutin untuk menilai kinerja dari setiap portofolio kredit dan mendiskusikan masalah-masalah risiko. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk implementasi strategi manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank. Komite Manajemen Risiko tersebut terdiri dari semua anggota Direksi dan senior manajer eksekutif. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi Bank, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

a. Credit Risk
b. Market Risk
c. Liquidity Risk
d. Operating Risk
e. Law Risk
f. Reputation Risk
g. Strategic Risk
h. Compliance Risk

The following notes present information about the Bank's exposure to each of the above risks, the Bank's objectives and policies for measuring and managing risk.

Risk management framework

Organization of the Bank's risk management involves oversight from the Commissioners, Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Commissioners' level. They approves and monitors the implementation of risk management policies and framework of the Bank. The Risk Monitoring Committee meets every month to assess the performance of the respective credit portofolios and discuss risk issues. Commissioners delegate authority to Board of Directors to implement the risk management strategy.

The Risk Management Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank. The Risk Management Committee comprises of all members of the Board of Directors and senior management executives. It is chaired by President Director.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, Bank mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, tujuan dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system dalam upaya menjaga dampak negatif yang diakibatkan oleh kredit bermasalah.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit. Internal Audit undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

a. Credit Risk

Credit risk is managed through established policies and processes covering credit acceptance criteria, credit origination and approval, pricing, monitoring, problem loan management and portfolio management. The Bank also closely monitors the development of its loan portfolios, to enable the Bank initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in credit quality.

Bank continued to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures and systems development in an effort to keep the negative impact caused by non-performing loans (NPL).

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Bank telah mengimplementasikan upaya disetiap tahap yang berhubungan dengan aktifitas penagih hutang untuk meningkatkan proses penagihan dan memperkuat pemantauan kegiatan penagihan.

Beberapa upaya telah dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut seperti pengaturan tentang pembagian tugas dan fungsi karyawan untuk penagihan. Bank juga telah meminta setiap unit kantor menyusun rencana tindakan atau action untuk melakukan lelang, restrukturisasi kredit dan langkah-langkah konkrit lainnya dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun upaya yang dilakukan Bank belumlah maksimal. Bank masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengupayakan hal tersebut, terutama Bank yang berada di daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Bank belum melakukan perjanjian dengan agen penagihan (pihak ketiga) untuk membantu upaya Bank dalam melakukan penagihan, begitu juga dengan karyawan Bank yang masih perlu diberikan pelatihan dalam melakukan pekerjaan penagihan baik mengenai tata cara penagihan dan kode etik dalam melakukan penagihan. Divisi yang membidangi kredit bekerjasama dengan divisi terkait telah membentuk tim investigasi dan penyelesaian kredit bermasalah, serta secara rutin melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

The Bank has implemented efforts at each stage relating to debt collection activities to improve the collection process and strengthen monitoring of collection activities.

Several attempts have been made by the Bank to anticipate such matters such as arrangements on the distribution of duties and functions of employees for billing. The Bank has also asked each office unit to prepare an action plan or action to conduct auctions, credit restructuring and other concrete steps in the settlement of non-performing loans. However, the Bank's efforts have not been maximized. Banks still need a lot of human resources to work on it, especially Banks located in regencies, districts and sub-districts.

The Bank has not entered into an agreement with a collection agency (third party) to assist the Bank's efforts in collecting billing, as well as any Bank employees who still need to be trained in conducting both billing work and billing codes. The division in charge of credit in cooperation with related divisions has established a team of investigation and settlement of problem loans, and routinely collect and coach to the debtor.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati (*committed*) kepada nasabah.

Berikut ini menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit Bank atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

i. Maximum exposure to credit risk

For financial assets recognized on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the un-drawn committed credit facilities granted to customers.

The following presents the Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and off balance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or other credit enhancement.

	21 Agustus / *August* 21, 2022	**31 Desember / *December* 31, 2021**	
Laporan posisi keuangan:			*Statement of financial position:*
Giro pada Bank Indonesia	4.409.541.339.832	2.042.746.021.054	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	210.645.532.029	88.760.460.917	*Current account with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2.279.626.908	3.334.381.279.547	*Placement with Bank Indonesia and other Bank*
Surat berharga	3.410.430.266.704	5.238.383.991.729	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan - bersih	18.907.276.406.175	18.388.304.138.810	*Loans - net*
Penyertaan - bersih	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investment - net*
Aset lain-lain - bersih	296.416.260.090	538.026.741.803	*Other assets - net*
Jumlah	**27.238.145.215.073**	**29.632.158.417.195**	***Total***

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Komitmen dan kontinjensi - diluar laporan posisi keuangan:			*Commitment and contingencies off balanced sheet*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	560.204.625.481	433.366.892.568	*Credit facilities to debtors that have not been used*
Bank garansi yang diterbitkan	14.446.724.801	30.137.587.834	*Bank guaranteed issued*
Jumlah	**574.651.350.282**	**463.504.480.402**	***Total***

Berdasarkan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Laporan Bank Umum Konvensional disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko.

Based on No.37 / POJK.03 / 2019 dated December 19, 2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports. SE OJK Number 9 / SEOJK.03 / 2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports. Conventional Commercial Bank reports submitted to the Financial Services Authority explain disclosure of risk exposures and application of risk management.

Pengelompokkan wilayah/

Grouping Area

Wilayah / *Area*	21 Agustus / *August* 21, 2022				
	Wilayah / *Area*				
	Wilayah/*area* 1	Wilayah/*area* 2	Wilayah/*area* 3	Wilayah/*area* 4	Wilayah/*area* 5
Pekanbaru	✓	-	-	-	-
Kampar	✓	-	-	-	-
Bengkalis	✓	-	-	-	-
Indragiri Hulu	✓	-	-	-	-
Indragiri Hilir	✓	-	-	-	-
Siak Sri Indrapura	✓	-	-	-	-
Dumai	✓	-	-	-	-
Pelalawan	✓	-	-	-	-
Rokan Hulu	✓	-	-	-	-
Rokan Hilir	✓	-	-	-	-
Kuantan Singingi	✓	-	-	-	-
Batam	-	✓	-	-	-
Karimun	-	✓	-	-	-

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework *(Continued)*

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk *(Continued)*

Wilayah / *Area*	21 Agustus / *August* 21, 2022				
	Wilayah / *Area*				
	Wilayah/*area* 1	Wilayah/*area* 2	Wilayah/*area* 3	Wilayah/*area* 4	Wilayah/*area* 5
Natuna, Bintan dan Anambas	-	✓	-	-	-
Tanjung Pinang	-	✓	-	-	-
Kepulauan Meranti	✓	-	-	-	-
Lingga	-	✓	-	-	-
Diluar Riau dan Kepulauan Riau	-	-	✓	-	-

ii. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Bank melakukan pengungkapan kuantitatif atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN dengan melalui pendekatan yang akan digunakan berdasarkan sektor ekonomi (dalam jutaan rupiah):

ii. Maximum exposure to credit risk

The Bank has been quantitive disclosure of allowance for impairment losses (AFIL) as individual and colective, with statistic method was using in that calculating of allowance for impairment losses based on Economic Sector (In Millions of Rupiah):

Wilayah / *Area*	21 Agustus / *August* 21, 2022					
	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	2.155.260	284.559	161.082	12.360	7.580	65.801
Pertambangan dan penggalian/ *Mining and excavating*	1.392	--	990	3	--	834
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	383.461	2.867	6.098	373	399	5.241
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	2.790	--	1.488	7	--	1.268
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	2.542.902	287.426	169.658	12.743	7.979	73.145

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

	21 Agustus / *August* 21, 2022					
Wilayah / *Area*	**Tagihan / *Receivable***	**Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable***		**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1**	**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2**	**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3**
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	**Telah jatuh Tempo / *After Due Date***			
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	2.542.902	287.426	169.658	12.743	7.979	73.145
Penyewaan, tenagakerja, dan Usaha Lainnya/ *Rental, employment, and Other Businesses*	12.165	1.189	3.497	277	7	1.870
Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	56.568	289	5.416	1.084	--	1.676
Konstruksi/ *Construction*	1.416.299	2.651	34.453	18.052	45	15.536
Perdagangan besar dan eceran/ *Commerce and retail*	616.154	83.611	127.018	17.548	4.643	70.044
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ *Acomodation and food supply*	380.047	9.622	9.321	5.591	1.177	5.510
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transport, Warehousing and Communication*	10.924	1.702	2.416	108	70	1.235
Perantara keuangan/ *Financial Intermediaries*	54.165	--	15	493	--	9
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ *Real estate, rental and company service*	10.463	1.045	1.033	425	--	7
Jasa Lainnya/ *Other Services*	106.180	19.318	12.674	1.612	442	8.166
Jasa pendidikan / *Education service*	2.240	824	77	20	--	1
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ *Healthy service and sociality activation*	10.768	1.474	155	100	--	111
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	5.218.875	409.152	365.734	58.053	14.363	177.309

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	21 Agustus / *August* 21, 2022				
		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*			
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	5.218.875	409.152	365.734	58.053	14.363	177.309
Jasa ke masyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ *Social service, social culture, entertainment and individual*	364	--	364	--	--	--
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ *Individual service to serve housekeeping*	6.514	1.912	458	78	10	20
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	14.880.710	1.612.729	199.015	28.104	45.134	148.881
Lainnya/ *Others*	9.326.011	31	513	895	--	218
Jumlah/ Total	**29.432.474**	**2.023.824**	**566.084**	**87.130**	**59.507**	**326.427**

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	31 Desember / *December* 31, 2021				
		Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	2.033.910	41.507	158.585	11.070	8.709	97.493
Pertambangan dan penggalian/ *Mining and excavating*	1.187	--	990	1	--	834
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	31.579	790	6.888	312	55	5.729
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	2.048	--	1.488	5	--	1.269
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	2.068.724	42.296	167.950	11.388	8.764	105.325

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

	31 Desember / *December* 31, 2021					
Wilayah / *Area*	**Tagihan / *Receivable***	**Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable***		**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1**	**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2**	**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3**
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	**Telah jatuh Tempo / *After Due Date***			
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	2.068.724	42.296	167.950	11.388	8.764	105.325
Penyewaan, tenagakerja, dan Usaha Lainnya/ *Rental, employment, and Other Businesses*	15.413	723	4.495	259	31	3.467
Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	61.714	--	6.207	894	--	7.188
Konstruksi/ *Construction*	1.255.808	--	30.202	19.710	--	15.526
Perdagangan besar dan eceran/ *Commerce and retail*	633.051	19.443	114.323	9.741	2.771	73.495
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/ *Acomodation and food supply*	382.845	3.036	7.588	5.439	704	5.552
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transport, Warehousing and Communication*	14.067	166	2.550	109	1	1.378
Perantara keuangan/ *Financial Intermediaries*	53.433	--	15	909	--	9
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/ *Real estate, rental and company service*	5.194	169	1.014	36	0	895
Jasa Lainnya/ *Other Services*	96.851	4.377	10.997	1.005	283	7.029
Jasa pendidikan / *Education service*	2.708	385	--	21	--	--
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ *Healthy service and sociality activation*	10.524	1.236	164	103	--	19
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	4.600.331	71.833	345.506	49.615	12.554	219.881

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Wilayah / *Area*	31 Desember / *December* 31, 2021					
	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / *After Due Date*			
Pindahan/ *balance carry forward from previous page*	4.600.331	71.833	345.506	49.615	12.554	219.881
Jasa ke masyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ *Social service, social culture, entertainment and individual*	423	--	364	0	--	364
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ *Individual service to serve housekeeping*	7.993	52	--	93	16	112
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	14.808.649	266.004	185.948	22.339	47.065	145.474
Lainnya/ *Others*	12.654.875	--	--	--	--	--
Jumlah/ Total	**32.072.271**	**337.889**	**531.818**	**72.047**	**59.634**	**365.832**

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah industri, dan produk kredit sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko kredit.

The Bank encourages the diversification of its credit portfolio among a variety of industries, and credit product in order to minimize the credit risk.

Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Bank secara individual (dalam jutaan rupiah):

Described the disclosure of risk exposure and risk management which includes the disclosure of net charges based on the remaining term of the contract Bank individually (in millions of rupiah):

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Kategori Portofolio/ *Portfolio Category*	21 Agustus / *August* 21, 2022				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/ *Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ *< 1 year*	> 1 s.d 3 tahun/ *> 1 to 3 years*	> 3 s.d 5 tahun/ *> 3 to 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*	Non-Kontraktual/ *Non-Contractual*
Tagihan Kepada Pemerintah/ *Goverment billed*	7.753.936	--	--	--	--
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/ *Bill to Public entity sector*	60.933	54.175	291.357	--	--
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	--	--	--	--	--
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	218.090	--	--	--	--
Kredit Beragun Rumah Tinggal/ *Loans with house guarantee*	1.503	12.131	14.306	278.060	--
Kredit Beragun Properti Komersial/ *Loans with commercial property guarantee*	10.231	2.939	--	--	--
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	112.520	1.034.838	1.442.033	11.531.793	--
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	179.722	1.021.593	921.040	357.090	--
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	127.077	60.265	11.254	1.745.665	--
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/ *With due dated*	136.052	36.509	8.067	13.347	--
Aset Lainnya/ *Other assets*	--	--	--	--	1.293.105
Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ *Exposure in Sharia Business Unit (if it exist)*	--	--	--	--	--
Jumlah/ *Total*	**8.600.065**	**2.222.449**	**2.688.057**	**13.925.956**	**1.293.105**

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

Risk management framework (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Kategori Portofolio/ *Portfolio Category*	31 Desember / *December* 31, 2021				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/ *Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ *< 1 year*	> 1 s.d 3 tahun/ *> 1 to 3 years*	> 3 s.d 5 tahun/ *> 3 to 5 years*	> 5 tahun/ *> 5 years*	Non-Kontraktual/ *Non-Contractual*
Tagihan Kepada Pemerintah/ *Goverment billed*	7.593.528	1.239.223	1.109.183	154.665	--
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/ *Bill to Public entity sector*	60.191	--	250.972	53.685	--
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional/ *Claims to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	--	--	--	--	--
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	547.377	--	--	--	--
Kredit Beragun Rumah Tinggal/ *Loans with house guarantee*	74.721	91.029	26.888	105.968	--
Kredit Beragun Properti Komersial/ *Loans with commercial property guarantee*	1.950	--	--	--	--
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	577.194	6.371.137	2.292.663	4.946.554	--
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	1.148.222	892.169	179.805	37.170	--
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	127.062	338.157	1.019.924	105.481	--
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/ *With due dated*	2.636	9.103	15.249	138.789	--
Aset Lainnya/ *Other assets*	--	--	--	--	1.919.824
Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ *Exposure in Sharia Business Unit (if it exist)*	--	--	--	--	--
Jumlah/ *Total*	**10.132.881**	**8.940.817**	**4.894.684**	**5.542.313**	**1.919.824**

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Penambahan diversifikasi ini berdasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan. Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jatuh tempo, jangka waktu perjanjian kredit, Pihak berelasi dan kolektibilitas diungkapkan pada tabel diatas.

Dalam hal pengendalian risiko kredit, Bank telah melaksanakan beberapa tahapan berikut:

- Menyediakan modal yang cukup untuk menutup risiko Bank dapat menyediakan modal baik dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal maupun dalam meng-cover risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini Bank Riau Kepri telah menghitung ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar dalam laporan KPMM.
- Memelihara kualitas aset produktif.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Meningkatkan efisiensi proses manajemen kredit.
- Meningkatkan budaya kredit yang sehat.
- Mempersiapkan bisnis yang cepat tanggap.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

a. Credit Risk *(Continued)*

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections. Concentration of credit risk of loans receivable by type, economic sector, maturity, term of credit agreement, related party and collectibility is disclosed in table above.

In the frame of controlling credit risk, Bank was doing for several step is as follow:

- *Providing sufficient capital to cover the risk Bank can provide the capital both in the framework of meeting the capital adequacy ratio as well as to cover the risk as a whole. In this case Bank Riau Kepri have contacted the Credit Risk ATMR with standard approach in the KPMM report.*
- *Maintaining productive asset quality.*
- *Supervising the active Board of Commissioners and Directors.*
- *Improving the credit management efficiency.*
- *Improving healthy credit culture.*
- *Providing quicker business response.*

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (Lanjutan)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank *(adverse movement)*. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut misalnya perubahan harga opsi.

Risiko pasar ada di aktivitas fungsional Bank dan kegiatan *treasury.* Aktivitas ini mencakup penempatan dalam bentuk Surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis lainnya) dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan melakukan kontrol atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* oleh Bank. Limit dari risiko pasar ditetapkan pada tingkat bank-wide dan dilaporkan serta dipantau oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap hari. *Management Action Triggers (MAT)* membantu manajemen pada saat tingkat risiko mencapai batasan-batasan tertentu.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Risk management framework *(Continued)*

b. Market Risk

Market risk is the risk arising from adverse movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates and exchange rates, including derivatives of these two types of market risk, i.e., change in option prices.

Market risk exists in both bankwide and treasury activities. These activities include placement in securities and money market, equity participation in other financial institutions, provisions of funds (loans and other similar forms), funding and issuance of debt instruments, and trade financing activities.

The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank. Market risk limits are set at bankwide level and are reported and monitored by Compliance and Risk Management on a daily basis. Management Action Triggers (MAT) helps to sensitize the management in case the risk level is reaches certain thresholds.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk mengambil keputusan atas kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Divisi Pasar dan Risiko Likuiditas bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar di Bank berdasarkan kerangka yang disetujui oleh ALCO.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

i. Risiko nilai tukar

Merupakan penjumlahan dari nilai absolute dari selisih bersih aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan PBI No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Bank harus menetapkan limit internal *Net Open Position* (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan dan telah digunakan.

***33. RISK MANAGEMENT** (Continued)*

***b. Market Risk** (Continued)*

ALCO acts as the apex senior management forum charged to take all decisions on policy regarding market and liquidity risk management. Market Risk is responsible for identifying, measuring, monitoring and controlling market risk in the Bank based on framework approved by ALCO.

On overall, market risk is divided into two following risks:

i. Value exchange risk

It is the total amount of the absolute value from the net difference of assets and liabilities in the balance sheet for every foreign exchange plus the net difference of receivables and payables both as commitments as well as contingencies in administrative account for every foreign exchange all of which are stated in rupiah.

The bank is compulsory to manage and maintain PDN at the highest 20% of the capital in the middle of the working day and at the end of the working day all day in accordance with PBI No.17/5/PBI/2015, dated May 29, 2015 concerning the Fourth Change on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 Concerning Public Bank Net Foreign Exchange Position.

The bank must decide on the limit internal Net Open Position (NOP) consistently in the framework of preventing the occurrence of exceeding the limit decided upon by the prevailing regulations, especially in the case of all internal limits decided and already used.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *33. RISK MANAGEMENT (Continued)*

b. Risiko Pasar (Lanjutan) / *b. Market Risk (Continued)*

Perhitungan rasio Posisi Devisa Netto Bank dapat disajikan sebagai berikut:

Calculated for Position Nett Deivizen Ratio at the Bank prepared as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Aset Valuta Asing			*Foreign exchange asset*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Kas	174.043.848	185.776.664	*Cash*
Giro pada Bank lain	3.074.395.753	3.155.059.905	*Current account with other bank*
Jumlah	**3.248.439.601**	**3.340.836.569**	***Total***
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Kas	12.893.430.413	12.488.539.338	*Cash*
Giro Bank Indonesia	6.719.212.500	5.059.637.500	*Current account with BI*
Giro pada Bank lain	25.818.189.338	19.029.216.538	*Current account with other bank*
Penempatan bank lain Deposito	--	71.262.500.000	*Placement to other Bank Deposit*
Pendapatan bunga yang akan diterima pada bank lain	--	2.850.500	*Interest income accrual with other Bank*
Tagihan Akseptasi	--	--	*Acceptances Receivable*
Jumlah	**45.430.832.250**	**107.842.743.876**	***Total***
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Currency*
Kas	2.444.938.769	1.714.625.140	*Cash*
Giro pada Bank lain	2.231.901.892	3.165.345.427	*Current account with other bank*
Penempatan bank lain Deposito	--	--	*Placement to other Bank Deposit*
Jumlah	**4.676.840.661**	**4.879.970.567**	***Total***
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Giro	53.530.336	66.278.604	*Current account*
Jumlah	**53.530.336**	**66.278.604**	*Total*
Mata USD			*United State Dollar Currency*
Giro	14.137.392.040	10.283.845.482	*Current account*
Deposito	2.083.900.995	70.205.835.613	*Deposit*
Surat berharga lainnya	--	--	*SBL-Interbank Call Money*
KU Yakim TT	--	--	*KU Yakim TT*
Bunga deposito masih harus dibayar	745.020	19.125.572	*Accrued deposit interest*
Beban bunga pinjaman bank	--	--	*Bank loan interest expense*
Kewajiban akseptasi	--	--	*acceptances Liabilities*
Jumlah	**16.222.038.055**	**80.508.806.667**	***Total***

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *33. RISK MANAGEMENT (Continued)*

b. Risiko Pasar (Lanjutan) / *b. Market Risk (Continued)*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang SGD			*Singapore Currency*
Perusahaan	3.776.279.251	2.799.000.537	*Individual current account*
Deposito perorangan	1.938.436.695	1.910.458.598	*Individual deposit*
Liabilitas (Bunga Dep YMH)	511.045	412.793	*Liabilities (Accrued Deposit Interest)*
Jumlah	**5.715.226.991**	**4.709.871.928**	***Total***
Posisi Devisa Netto (PDN)			*Netto of Devisa Position*
Mata uang Euro	3.194.909.264	3.274.557.964	*Euro Currency*
Mata uang Dolar Amerika	29.208.794.195	27.333.937.209	*United State Dollar Currency*
Mata uang Dolar Singapura	1.038.386.330	170.098.640	*Singapore Currency*
Jumlah	**33.442.089.789**	**30.778.593.813**	***Total***
Jumlah PDN (dalam jutaan Rupiah)	33.442	30.779	*Total PDN (in millions Rupiah)*
Jumlah Modal (dalam jutaan Rupiah)	3.017.419	3.147.222	*Total Capital (in millions Rupiah)*
Rasio % PDN	1,11%	0,98%	*PDN ratio (%)*

Perhitungan Rasio PDN menyesuaikan dengan perhitungan data terbaru.

The calculation of PDN ratio, adjusts to the latest data calculation.

ii. Risiko tingkat suku bunga

ii. Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.

Interest rate risk is the potential loss incurred from adverse movement in market interest rates with respect to a Bank position or transaction carrying interest rate risk.

Bank belum mengelola risiko suku bunga, sehingga Bank belum melakukan perhitungan atas risiko tingkat suku bunga Bank.

The Bank was not to carry out interest rate risk, with the result that Bank have not did calculated to Bank interest rate risk.

Tabel di bawah ini menyajikan portofolio Bank (tidak termasuk portofolio yang diperdagangkan) pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal re-pricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual (disajikan dalam jutaan rupiah):

The table below summarizes the Bank's nontrading portfolios at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates (expressed in million rupiah):

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) / *33. RISK MANAGEMENT (Continued)*

b. Risiko Pasar (Lanjutan) / *b. Market Risk (Continued)*

Akun / *Account*	21 Agustus / *August* 21, 2022				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate* (dalam jutaan rupiah / *in million rupiah*)			
		≤ 3 bulan/ ≤ *3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	4.409.541	4.409.541			
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	210.654	210.654			
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	2.280	2.280			
Surat-Surat berharga/ Marketable *securities*	3.410.430	--		5.103	3.405.327
Kredit yang diberikan/ *Loans*	19.407.076		246.412	174.885	18.985.779
Penyertaan/ Investment	1.556				1.556
Aset lain-lain/ *Other Assets*	296.416		296.416		
Jumlah/ *Total*	**27.737.953**	**4.622.475**	**542.828**	**179.988**	**22.392.662**
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	24.351.730	19.631.174	4.698.185	22.372	
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others Banks*	138.507	107.507			
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*					
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	178.863				
Jumlah/ *Total*	**24.669.100**	**19.738.681**	**4.698.185**	**22.372**	**--**
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derivatives held for risk management*	--	--	--	--	--
Selisih/ *Difference*	**3.068.853**	**(15.116.206)**	**(4.155.357)**	**157.616**	**22.392.662**

Akun / *Account*	31 Desember / *December* 31, 2021				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate* (dalam jutaan rupiah / *in million rupiah*)			
		≤ 3 bulan/ ≤ *3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	2.042.746	2.042.746			
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	88.767	88.767			
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	458.610	458.610			
Surat-Surat berharga/ Marketable *securities*	5.238.384	2.375.012			2.863.372
Kredit yang diberikan/ *Loans*	18.884.914	--	226.697	163.439	18.494.778
Penyertaan/ Investment	1.556				
Aset lain-lain/ *Other Assets*	538.027		538.027		
Jumlah/ *Total*	**27.253.004**	**4.965.136**	**764.724**	**163.439**	**21.358.150**
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	25.615.733	19.706.287	5.887.249	22.197	
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others Banks*	1.040.800	1.012.300	28.500		
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	--	--	--	--	--
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	151.442	151.442			
Jumlah/ *Total*	**26.807.976**	**20.870.030**	**5.915.749**	**22.197**	**--**
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derivatives held for risk management*	--	--	--	--	--
Selisih/ *Difference*	**445.028**	**(15.904.894)**	**(5.151.025)**	**141.242**	**21.358.150**

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko pasar, bank telah menyelesaikan beberapa tahap sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi suku bunga secara tepat pada setiap penggunaan dana bank baik aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan.
- Melakukan *mark to market.*
- Setiap penempatan terhadap bank counterparty dilakukan kajian risiko oleh Divisi Manajemen Risiko terhadap fasilitas credit line yang akan diberikan.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi serta setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan rekomendasi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Bank. ALCO bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Bank sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

In term of implementing and controlling market risk, the Bank has done several step is as follows:

- *Performing the interest rate identification accurately in every use of bank finance both for certain functional activities as well as bank activities as a whole.*
- *Performing mark to market.*
- *Every allocation on bank counterparty is done by risk evaluation by the Risk Management Division to the credit line facilities given.*
- *Active supervision on the active Board of Commissioners and Directors and every transaction is done in accordance with the instructions and recommendations by the Asset and Liability Committee (ALCO).*

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its obligation associated with financial liabilities at due date. Liquidity risk is the most important risk to a commercial bank and as such needs to be managed on an on-going basis.

The Asset and Liability Committee (ALCO), which acts as the apex body entrusted to monitor liquidity situation of the Bank. ALCO is in charge of determining the policy and strategy of the Bank's asset and liabilities in line with the principles of prudent risk management and applicable regulatory requirements.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Bank. ALCO juga menyetujui asumsi likuiditas dan skenario *stress testing* yang akan diterapkan.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Kerangka kerja digunakan untuk mengelola situasi likuiditas Bank pada kondisi normal (*business-as-usual*) dan kejadian kondisi stress. Rencana pendanaan darurat likuiditas (*liquidity contingency plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas

Analisis kesenjangan likuiditas untuk memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk terkait dengan arus kas keluar di setiap saat. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke interbank, nasabah besar (institusional) dan profesional market yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian kredit.

Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid bersih terhadap liabilitas 1 bulan. Untuk tujuan ini, aset yang bersifat likuid termasuk kas dan setara kas dan Surat berharga berperingkat investasi, yang diperdagangkan secara aktif dan likuid di pasar dikurangi dengan simpanan dari bank dan komitmen yang jatuh tempo dalam satu bulan mendatang.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity Risk *(Continued)*

ALCO approves the limit framework, deliberates on the long term structural statement of financial position positioning of the Bank. In addition, ALCO approves all liquidity assumption and stress testing scenarios.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. The framework manages the liquidity situation of the Bank under both a business-as-usual and stress event. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

Exposure to Liquidity risk

Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows vis-à-vis outflows on any given day. This is centrally managed within Treasury which has direct and authorized access to interbank, wholesale, and other professional markets, to supplement core banking activities of lending and deposit taking.

One of liquidity ratios is net liquid assets to 1 month liabilities. For this purpose, net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents and investment grade debt securities for which there is an active and liquid market less any deposits from banks and commitments maturing within next month.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

33. RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity Risk (Continued)

As at August 21, 2022 and December 31, 2021, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Kas dan setara kas	5.192.234.084.175	6.185.281.293.559	*Cash and cash equivalent*
Surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.374.518.320.350	2.832.345.764.349	*Marketable securities measured fair value through other comprehensive income*
Surat berharga yang diukur dengan biaya diamortisasi	35.911.946.354	1.198.636.227.380	*Marketable securities measured at amortize cost*
Simpanan dari Bank lain	(138.507.219.334)	(1.040.800.354.219)	*Deposit from other Banks*
Jumlah	**8.464.157.131.545**	**9.175.462.931.069**	***Total***

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Simpanan dari nasabah	24.351.730.041.220	25.615.732.685.603	*Deposit from customer*
Rasio aset likuid bersih terhadap simpanan dari nasabah	35%	36%	*Ratio of net liquid assets to deposit from customers*

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk kewajiban penarikan nasabah atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

The Bank's liquidity policy is purposed to ensure that funding requirements can be met, either to pay customer withdrawals or unused loan facilities.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Bagian *Asset and Liabilities Management* di Divisi Tresuri. Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang menganggur dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Managing and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility for Asset and Liabilities Management Group in Division of Treasury. Sources of funds and maturity of time deposits maturing managed to prevent idle funds and determine the appropriate amount of liquid assets instrument to ensure a controlled level of liquidity continuously.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Nilai nominal arus masuk/arus keluar yang disajikan pada tabel di bawah ini merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan pokok dan bunga atas liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga arus masuk dan keluar bruto untuk derivatif yang diselesaikan secara bersamaan (misalnya, kontrak berjangka valuta asing).

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan kewajiban Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (*best case*), terburuk (*worst case*) dan paling mungkin terjadi (*most probable case*).

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Menganalisa perilaku portofolio aset dan portofolio liabilitas.
- Memenuhi ketentuan otoritas moneter seperti pemeliharaan GWM Primer maupun GWM Sekunder baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- Pengawasan aktif dari Komisaris dan Direksi.
- Memiliki rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).
- Monitoring Likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap bulannya dari laporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi risiko likuiditas.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

c. Liquidity Risk *(Continued)*

The nominal inflow/outflow disclosed in the following table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability or commitment. The disclosure for derivatives shows a net amount for derivatives that are net settled, but a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement (e.g. currency forward).

The Bank has developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank's assets and liabilities portfolio, and to provide additional security guarantees based on best case, worst case and most probable case scenarios.

In terms of implementing and controlling liquidity risk, the Bank has implemented the following steps:

- *To analyzed behaviour of asset and liabilities portfolio.*
- *To considerate regulation of monetery otority likes Primery and secondary of statutory reserve maintenance in Rupiah or foreign exchange.*
- *Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.*
- *By having contingencies funding plan.*
- *Liquidity monitoring by Risk Mangement Division for monthly from financial report, and then can take procedure of mitigate the liquidity risk.*

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai cabang kecil di seluruh Indonesia. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian financial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Komponen utama Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan berkesinambungan yaitu:

1. Akuntabilitas yang jelas

   Semua pihak di Bank menjalankan penugasan terkait dengan perannya masing-masing dalam pengelolaan risiko operasional.

   Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan Risiko operasional secara menyeluruh serta pelaksanaannya.

   Unit bisnis dan fungsi support sebagai pemilik dari proses pengelolaan risiko dan fungsi Pengendalian Internal yang ada pada setiap *Risk Taking Unit* (RTU) berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengelola, memitigasi dan melaporkan Risiko Operasional.

***33. RISK MANAGEMENT** (Continued)*

d. Operational Risk

Operational risk is defined as the risk of losses resulting from inadequate or failure of internal control processes, people and systems or from external events.

This type of risk is inherent in every business processes, operational activities, systems and products of Bank, from Head Office Units to micro branches located in remote areas of Indonesia. Failure to manage operational risks correctly could lead to financial losses, employee safety and reputation of the Bank.

Major components of Operational Risk Management Framework which are being consistently practiced are:

1. The right accountability

   All parties in the Bank are designated for their respective roles in the management of operational risk.

   The Board of Director's as well as the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

   Business unit and supporting unit as the owner of risk management process and Internal Control functions in each Risk Taking Units act as the first line of defence in day-today execution / implementation of operational risk management. They are responsible to identify, manage, mitigate and reports on Operational Risk.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (Lanjutan)

Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan dan Hukum berperan sebagai pertahanan lapis kedua.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi dalam perancangan, pendefinisian, pengembangan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional secara keseluruhan, memantau penerapan kerangka kerja oleh RTU, memastikan kecukupan kontrol atas kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional yang efektif.

Sedangkan Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan sebagai pertahanan lapis ketiga.

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, Bank mengacu kepada kerangka *Basel Accord* II, Ketentuan Bank Indonesia serta *International Best Practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

Disamping melakukan proses manajemen risiko terhadap risiko yang melekat dalam aktivitas *existing*, Bank juga melakukan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan jenis

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

d. Operational Risk *(C0ntinued)*

Risk Management Division together with Compliance and Legal Division act as the second line of defence.

Risk Management Division function to design, defining, develop and maintaining the overall operational risk management framework, monitor the RTU's adherence to the framework, ensuring the control adequacy of policies and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities to ensure its effectiveness.

Meanwhile, the Work of Internal Auditors Unit (SKAI) are independently doing the role as the third line of defence.

Operational Risk Management Cycle

In order to implement operational risk management, Bank made reference to Basel Accord II, Bank Indonesia Regulations and International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes.

In addition take risk management process against the risks inherent in the existing activity. Bank also take a risk management implementation comprehensively of new products and activities issuing plan in accordance with the type of

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (Lanjutan)

risiko yang telah ditetapkan dalam POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti yang salah satunya mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank.

Bank telah mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap perhitungan penyisihan modal dengan metode *Standardlized Approach* serta pengumpulan data risiko yang digunakan dalam perhitungan beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks *(Advanced Measurement Approach).*

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, Bank telah menerapkan langkah berikut:

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

d. Operational Risk *(C0ntinued)*

risk that has been established in POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks and SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks and SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 on Business Activities of Commercial Banks Based on core capital, one of which regulates the Bank's products and activities.

The Bank has allocated operational risk capital requirements based on the Basel Committee on Banking Supervision and SEOJK No.24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 concerning Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk using the Basic Indicator Approach (PID).

Bank using Basic Indicator approach and methodology, is currently doing a development of the capital allowance calculation by method of Standardize Approach and the collection of risk data collection risk capital charges using a more complex approach (Advanced Measurement Approach).

In terms of implementing and controlling liquidity risk, the Bank has implemented the following steps:

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

d. Risiko Operasional (Lanjutan)

- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk mengendalikan atau memitigasi risiko operasional sesuai dengan kompleksitas operasional bank.
- Adanya tindak lanjut atas hasil temuan Audit Intern dan Ekstern.

e. Risiko Hukum

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank telah membentuk Divisi Hukum dan Corporate Secretary sebagai salah satu strategi pengendalian internal Bank terhadap potensi risiko hukum.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

d. Operational Risk *(Continued)*

- *Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.*
- *By having the policies, procedures and process to control or mitigate the operational risks in accordance with the complexity of the bank operation.*
- *The existence of follow-ups on the results of Intern and Extern Audit findings.*

e. Law Risk

The Bank manages the legal risks by making sure that all activities and relations of the Bank business activities with third party shall be based on the regulations and requirements that is able to protect the interests of the Bank from legal aspects. The legal risk is the risk resulted from the existence of weaknesses in the judicial aspect in business, among them resulted from the existence of lawsuit, the absence of supportive rules of laws the weaknesses in the bond such as not meeting the requirements for the validity of contract and the bond of collateral is not perfect. The Bank has formed Legal Division and Corporate Secretary as one of the strategies of the Bank's internal control against legal risk potential.

f. Reputation Risk

Risk reputation is the risk, among others, resulted from the existence of negative publication related to the Bank's business activities or negative perception toward the Bank. The Bank manages the reputation risk by making sure that the appropriateness between the Bank's business activities and other activities resulting in the Bank's reputation is still being maintained.

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

g. Risiko Stratejik

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perudang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

g. Strategic Risk

The strategic risk is the risk among them resulted from the existence of determining and implementing inaccurate Bank's strategies, inaccurate business decision taking or the lack of responsiveness of the Bank towards external changes. The Bank manages the strategic risks through the process of consideration and decision taking for every strategic policy collectively and comprehensively by Board of Directors ad Committees already formed.

h. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising resulted from the Bank not complying and/or not implementing the prevailing rules of laws and provisions, including the Sharia (Islamic Rules) Principal for Public Bank and Sharia Business Unit. The Bank implements the Compliance Function, the Bank Compliance Function includes the acts to:

- *Manifest the performance of Compliant Culture in all organizational levels and business activities of the Bank;*
- *Perform in managing Compliance Risk shall be done by referring to the provisions of Bank Indonesia concerning Risk Management for Public Bank;*
- *Make sure that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities performed by the Bank has been in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the prevailing rules of laws, including Sharia Principal for Sharia Public Bank and Sharia Business Units; and*
- *Make sure the compliance of the Bank to the commitment made by the Bank to Bank Indonesia and/or other supervising authorities in charge.*

33. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pengendallian Penyelewengan

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko penyelewengan, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Pengelolaan operasional Bank tidak tergantung pada kebijakan seseorang.
- Pengelola Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, maupun keluarganya.
- Manajemen Bank memahami dan senantiasa mewaspadai jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha Bank yang dipimpinnya.
- Pemilik Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
- Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan Bank kepada manajemen profesional.
- Senantiasa diupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga bisa berkonsentrasi dalam bekerja.
- Senantiasa dilaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk pembinaan moral dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

33. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Deviation Control

In the framework of applied and controlling deviation risk, Bank was doing several steps is as follows:

- *Managing operational of Bank is not depending on ones decision.*
- *Bank management in operate activities in the circumstance carrying out things for personal, family or group benefit.*
- *The managemen of Bank realize and always aware of any kind of risk stick in bank activity managed by them.*
- *The owner of Bank have a strong comitment to develop their bank.*
- *The majority owner have submitted to carry out Bank to the professional management.*
- *Continously make an effort to increase official prosperity to make an effect of contrentration in doing work .*
- *Always carrying out education and training including building moral and religious in the framework on increasing ability, beliveness and obey the Only God.*

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Sebagian besar instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan disajikan menggunakan nilai wajar. Berikut ini adalah perbandingan antara nilai tercatat seperti yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan nilai wajar laporan keuangan.

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2 menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian atas nilai wajar

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

A significant number of financial instruments are carried at fair value in the statements of financial position. Below is the comparison of the carrying amounts, as reported on the financial position, and the fair value of financial statements.

In the following table, financial instruments have been allocated based on their classification. The significant accounting policies in Note 2 describe how the categories of the financial assets and financial liabilities are measured and how income and expenses, including fair value gains and losses.

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan diukur melalui laba rugi; aset keuangan diukur melalui penghasilan komprehensif lain; biaya amortisasi; pinjaman yang diberikan dan piutang. Demikian dengan setiap liabilitas keuangan juga telah diklasifikasikan menjadi yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi.

Nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan informasi yang tersedia dan belum diperbaharui untuk merefleksikan perubahan keadaan pasar setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 21 Agustus 2022 dan 31 Desember 2021 (dalam jutaan rupiah).

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)

The grouping of financial assets has been classified into financial assets measured through profit and loss; financial assets are measured through other comprehensive income; amortization costs; loans provided and receivables. Similarly, each financial liability has also been classified into one that is measured through other comprehensive income and amortized cost of acquisition.

The fair value are based on relevant information available as at the statements of financial position date and have not been updated to reflect changes in market condition after the statements of financial position date.

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank financial assets and liabilities as at August 21, 2022 and December 31, 2021 (in millions rupiah).

Perkiraan/ *Account*	21 Agustus/ *August* 21, 2022						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/*Cash*	-	569.768	-	-	-	569.768	569.768
Giro pada Bank Indonesia/*Current account with Bank Indonesia*	-	-	4.409.541	-	-	4.409.541	4.409.541
Giro pada bank lain/*Current account with others Bank*	-	-	210.646	-	-	210.646	210.646
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/*Placement with Bank Indonesia and other Banks*	-	-	2.280	-	-	2.280	2.280
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	30.809	-	3.374.518	-	3.405.327	3.405.327
Kredit yang diberikan/ *Loan receivables*	-	-	18.907.276	-	-	18.907.276	18.907.276
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain / *Other assets*	-	-	296.416	-	-	296.416	296.416
Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	**-**	**600.577**	**23.827.715**	**3.374.518**	**-**	**27.802.810**	**27.802.810**

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)

Perkiraan/ *Account*	21 Agustus/ *August* 21, 2022						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	335.657	335.657	335.657
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	-	-	-	-	24.351.730	24.351.730	24.351.730
Simpanan dari Bank lain /*Deposits from other Banks*	-	-	-	-	138.507	138.507	138.507
Obligasi yang diterbitkan / *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	-	-	-	-	178.863	178.863	178.863
Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*	-	-	-	-	82.466	82.466	82.466
Jumlah Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Liabilities*	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.087.223**	**25.087.223**	**25.087.223**

Perkiraan/ *Account*	31 Desember/ *December* 31, 2021						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/*Cash*	-	719.394	-	-	-	719.394	719.394
Giro pada Bank Indonesia/*Current account with Bank Indonesia*	-	-	2.042.746	-	-	2.042.746	2.042.746
Giro pada bank lain/*Current account with others Bank*	-	-	88.760	-	-	88.760	88.760
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/*Placement with Bank Indonesia and other Banks*	-	-	3.334.381	-	-	3.334.381	3.334.381
Surat berharga/ *Marketable securities*	1.207.402	1.198.636	-	2.832.346	-	5.238.384	5.238.384
Kredit yang diberikan/ *Loan receivables*	-	-	18.388.304	-	-	18.388.304	18.388.304
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain/ *Other assets*	-	-	538.027	-	-	538.027	538.027
Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	**1.207.402**	**1.918.030**	**24.393.774**	**2.832.346**	**-**	**30.351.552**	**30.351.552**

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (Continued)

Perkiraan/ *Account*	31 Desember/ *December* 31, 2021						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	Nilai pasar melalui laba rugi / *FVTPL*	Nilai pasar melalui penghasilan komprehensif/ *FVTOCI*	Pinjaman diberikan/ *Loans*	Biaya diamortisasi/ *Amortized cost*	Amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	667.015	667.015	667.015
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	-	-	-	-	25.615.733	25.615.733	25.615.733
Simpanan dari Bank lain /*Deposits from other Banks*	-	-	-	-	1.040.800	1.040.800	1.040.800
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowing*	-	-	-	-	151.442	151.442	151.442
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	-	-	-	-	59.449	59.449	59.449
Jumlah Liabilitas Keuangan/ *Total Financial Liabilities*	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.534.440**	**27.534.440**	**27.534.440**

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali Surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

The fair value of financial assets and liabilities, except for held to maturity marketable securities, loans with fair value risk, consumer financing receivables, bonds issued, and borrowings, approximated to the carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments and/or repricing frequently.

Nilai wajar Surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal laporan.

The fair value of held to maturity marketable securities and bonds issued was determined on the basis of quoted market price as of reporting date.

Nilai wajar pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, dan pinjaman yang diterima dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal laporan.

The fair value of loans with fair value risk, consumer financing receivables, and borrowing are determined by discounting cash flows using market interest rate as at reporting date.

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar investasi dalam saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(Continued)*

The fair value of investments in shares is carried at cost due to its fair value cannot be reliably measured.

35. RASIO KEUANGAN

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, terakhir berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.03.2016 tanggal 22 September 2016 Tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03.2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Penilaian tingkat kesehatan bank umum terakhir berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

35. FINANCIAL RATIO

Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) for Commercial Banks, based on POJK Number 34 / POJK.03.2016 dated September 22, 2016 concerning Amendments to OJK Regulation Number 11 / POJK / 03.2016 dated January 29, 2016 Concerning Minimum Capital Requirements for Commercial Banks.

Finally, Financial Services Authority Circular Letter Number 11 / SEOJK.03 / 2018 dated August 15, 2018 concerning Amendments to SEOJK Number 42 / SEOJK.03 / 2016 dated September 28, 2016, Concerning Guidelines for Calculating Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk Using Standard Approach.

The latest assessment of the soundness of commercial banks is based on POJK Number 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and SE OJK Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

		21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
a.	**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**			***a. Risk Weighted Assets***
1).	Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	12.213.261	12.175.240	*After Credit Risk*
2).	Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	15.023.226	14.906.485	*After Credit Risk and Operational Risk*
3).	Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	15.056.669	14.937.265	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*

35. RASIO KEUANGAN (Lanjutan) / *35. FINANCIAL RATIO (Continued)*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
Komponen Modal			*Capital Componen*
Modal Inti	2.864.753	2.995.031	*Principle Capital*
Modal Pelengkap	152.666	152.190	*Capital Completion*
Total Modal	**3.017.419**	**3.147.222**	*Total Capital*
b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)			***b. Capital Adequacy Ratio***
1). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	24,71%	25,85%	*After Credit Risk*
2). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	20,09%	21,11%	*After Credit Risk and Operational Risk*
3). Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	20,04%	21,07%	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*
c. Rasio keuangan lain			***c. Other financial ratios***
1). Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,02%	1,77%	*Productive assets with problems against total productive assets*
2). Laba sebelum pajak dibanding dengan rata-rata total aset (ROA)	1,04%	1,93%	*Income before taxes compared with average total assets (ROA)*
3). Laba bersih setelah pajak dibanding dengan rata-rata ekuitas (ROE)	6,29%	12,49%	*Income after taxes compared with average total equity (ROE)*
4). Beban operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO)	81,06%	77,23%	*Operating expenses compared with operating income (BOPO)*
5). Beban terhadap pendapatan (CIR)	67,67%	63,87%	*Cost To Income (CIR)*
6). Pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibanding dengan rata-rata aset produktif (Net Interest Margin)	3,83%	4,64%	*Net interest Income compared with average (Net Interest Margin)*
7). Kredit yang diberikan dibanding dengan dana pihak ketiga (LDR)	79,69%	73,72%	*Loan compared with related parties fund (LDR)*

35. RASIO KEUANGAN (Lanjutan) / *35. FINANCIAL RATIO (Continued)*

	21 Agustus / *August* 21, 2022	31 Desember / *December* 31, 2021	
8). Kredit bermasalah dibanding dengan total kredit (NPL-Kotor)	2,92%	2,82%	*Non performance loan compared with total loans (NPL-Gross)*
9). Kredit bermasalah - CKPN kredit bermasalah terhadap total kredit (NPL-Bersih)	1,00%	0,88%	*Non performing loans - CKPN Non performing loans compare with total loans (NPL-Net)*
10). CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif	1,82%	1,68%	*CKPN of financial assets to total productive assets*
d. Kepatuhan			
Persentase pelanggaran BMPK			*Percentage of BMPK violations*
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*i. Related Parties*
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*ii. Unrelated Parties*
Persentase pelampauan BMPK			*Percentage of exceeding BMPK*
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*i. Related Parties*
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*ii. Unrelated Parties*
Giro Wajib Minimum (GWM)			*Statutory Reserves (GWM)*
i. Bank Umum Konvensional			*i. Conventional Commercial Banks*
GWM Rupiah	15,11%	8,93%	*GWM main rupiah*
GWM Valas	12,87%	5,96%	*GWM foreign exchange*
ii. Bank Umum Syariah dan UUS			*ii. Sharia Commercial Bank and UUS*
GWM Rupiah	20,35%	4,07%	*GWM main rupiah*
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	1,11%	0,98%	*Overall Net Foreign Exchange Position*

36. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN / *36. SIGNIFICANT AGREEMENT*

1. Pemanfaatan Fasilitas Customisation Kartu Kredit

Berdasarkan perjanjian No.01/696-PKS/DIR dan No.049/PKS/2021 tanggal 23 September 2021, PT Bank Riau Kepri (Pihak Kedua) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Pihak Pertama). melakukan kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Customisation BSI Hasanah Card, berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak 23-09-2021 sampai dengan 23-09-2023. Para pihak sepakat dengan jumlah *annual fee.*

1. Utilization of Credit Card Customization Facility

Based on agreements No.01/696-PKS/DIR and No.049/PKS/2021 dated September 23, 2021, PT Bank Riau Kepri (Second Party) and PT Bank Syariah Indonesia Tbk (First Party). collaborating on the Utilization of BSI Hasanah Card Customisation Facility, valid for a period of two years starting from 23-09-2021 to 23-09-2023. The parties agree on the amount of the annual fee.

36. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

2. Perjanjian penyelenggaraan Ajungan Tunai Mndiri/ ATM Bersama

Pada tanggal 3 Oktober 2003, Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan perjanjian No.30/DIR/BPDR/X/2003. Perjanijan tersebut berlaku selama 36 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sepanjang tidak ada perubahan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama di lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

36. SIGNIFICAN AGREEMENT *(Continued)*

2. Joint Automatic Teller Machine/ ATM Agreement

On October 3, 2003, the Bank entered into an agreement for the implementation of ATM Bersama with PT Artajasa Pembayaran Elektronis with agreement No.30/DIR/BPDR/X/2003. The agreement is valid for 36 months and will be automatically renewed annually as long as there is no change in the agreement. Under the agreement, the Bank will benefit from the ATM Bersama network at more than 31,000 ATMs throughout Indonesia.

37. KASUS HUKUM

Terkait kasus hukum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif. Sebagai bank yang dimiliki oleh PEMDA Tingkat I/II di Provinsi Riau dan Kepri, Bank Riau Kepri memiliki kredibilitas yang kuat di mata nasabah. Dan kasus hukum tersebut tidak berpengaruh terhadap reputasi dan kelangsungan usaha Bank, namun tetap menjadi perhatian dari manajemen.

Perkara Perdata
Pada akhir periode 21 Agustus 2022, terdapat 1 (satu) kasus perdata yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Perkara Pidana
Pada akhir periode 21 Agustus 2022, terdapat 12 (dua belas) kasus perkara pidana yang masih dalam proses penyidikan.

37. CASES

Regarding legal cases, there is no negative reputational influence. As a bank owned by the Level I/II local government in Riau and Kepri Provinces, Bank Riau Kepri has strong credibility in the eyes of customers. And the legal case has no effect on the Bank's reputation and business continuity, but remains a concern of management.

Civil Cases
At the end of the period of August 21, 2022, there is 1 (one) civil case that is still in the process of being tried in the District Court.

Criminal Cases
At the end of the period on August 21, 2022, there were 12 (twelve) criminal cases that were still under investigation.

38. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan; dan
- Amendemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS No. 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

38. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:

- *Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;*
- *Amendment of SFAS No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;*
- *Amendment of SFAS No. 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use; and*
- *Amendment of SFAS No. 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- *SFAS No. 74: "Insurance Contract"; and Amendment of SFAS No. 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on 1 January 2025

38. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (Lanjutan)

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

38. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS *(Continued)*

As at the authorization date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut UU No 11 tentang Cipta Kerja. Perpu No 2 tahun 2022 sebagian telah diub dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang telah diundangkan pada 12 Januari 2023.

Atas perubahan Peraturan ini, Manajemen masih melakukan evaluasi terhadap perubahan ini dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation which repealed Law No. 11 concerning Job Creation. Perpu No. 2 of 2022 has been partially amended by Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK) which was promulgated on January 12, 2023.

Regarding the changes to this Regulation, Management is still evaluating these changes and their impact on the financial statements.

40. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Maret 2023.

40. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is responsible for the presentation and preparation of financial statements that were completed on March 30, 2023.

INDEKS OJK

OJK INDEKS

INDEKS OJK (SESUAI SEOJK NOMOR 10/SEOJK.03/2020)

OJK Index (According to SEOJK Number 10/SEOJK.03/2020)

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
1	**Informasi Umum**		***General Information***
1.A.	Ikhtisar Data Keuangan Penting		*Summary of Key Financial Data*
1.A.1	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil, Imbalan, dan Bonus	14	*Income After Profit Sharing, Fees and Bonus Distribution*
1.A.2	Laba/Rugi Operasional	14	*Operating Profit/Loss*
1.A.3	Laba/Rugi Sebelum Pajak	14	*Profit/Loss Before Tax*
1.A.4	Laba/Rugi Bersih	14	*Net Profit/Loss*
1.A.5	Total Laba/Rugi Komprehensif	14	*Total Comprehensive Profit/Loss*
1.A.6	Laba Bersih Per Saham	14	*Net Income Per Share*
1.A.7	Jumlah Aset	12	*Total Assets*
1.A.8	Jumlah Liabilitas	13	*Total Liabilities*
1.A.9	Jumlah Ekuitas	13	*Total Equity*
1.A.10	Aset Produktif	12, 15	*Earning Assets*
1.A.11	Dana Pihak Ketiga	10, 12, 13	*Third Party Funds*
1.A.12	Pembiayaan yang Diterima	tidak relevan	*Financing Received*
1.A.13	Rasio Keuangan	15-16	*Financial Ratio*
1.A.14	Informasi Lain yang Relevan	10, 16	*Other Relevant Information*
1.B.	**Profil BUS**		***BUS Profile***
1.B.1	Nama BUS Termasuk apabila Terdapat Perubahan Nama, Alasan Perubahan, dan Tanggal Efektif Perubahan Nama pada Tahun Buku	165, 168	*BUS Name Including If There is a Change of Name, Reason for Change, and Effective Date of Change of Name in the Financial Year*
1.B.2	Informasi Mengenai Kantor Pusat BUS yang Memungkinkan Masyarakat dapat Memperoleh Informasi Mengenai BUS	164	*Information Regarding BUS Headquarters that Allows the Public to Obtain Information About BUS*
1.B.2.a	Alamat	164	*Address*
1.B.2.b	Nomor Telepon	164	*Phone Number*
1.B.2.c	Nomor Faksimile	164	*Facsimile Number*
1.B.2.d	Alamat Surat Elektronik	164	*Electronic Mail Address*
1.B.2.e	Alamat Situs Web	164	*Website Address*
1.B.3	Riwayat Singkat BUS	166-168	
1.B.4	Visi dan Misi BUS	194-195	*BUS Vision and Mission*
1.B.5	Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir, Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun Buku, serta Jenis Produk dan Aktivitas	170-171, 172-193	*Business Activities According to the Last Articles of Association, Business Activities Conducted in the Financial Year, and Types of Products and Activities*
1.B.6	Struktur Organisasi BUS, Paling Sedikit Sampai dengan 1 (Satu) Tingkat di Bawah Direksi yang Disertai dengan Nama dan Jabatan	198-199	*Organizational Structure of BUS, At Least Up to 1 (One) Level Under the Board of Directors Accompanied by Name and Position*
1.B.7	Susunan dan Komposisi Pemegang Saham, yaitu Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Saham	165, 228	*Composition of Shareholders, namely Name of Shareholders and Percentage of Share Ownership*
1.B.7.a	Pemegang Saham yang Memiliki Paling Sedikit 5% (Lima Persen) Saham BUS	229	*Shareholders who own at least 5% (Five Percent) of BUS Shares*
1.B.7.b	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham BUS;	229	*Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners who own BUS Shares;*
1.B.7.c	Kelompok Pemegang Saham Masyarakat, yaitu Kelompok Pemegang Saham yang Masing-masing Memiliki Kurang dari 5% (Lima Persen) Saham BUS (jika ada)	228-229	*Group of Public Shareholders, namely the Group of Shareholders Each of Which Has Less than 5% (Five Percent) of BUS Shares (if any)*
1.B.7.d	Informasi Mengenai Pemegang Saham Pengendali BUS Sampai kepada Pemilik Individu, yang Disajikan dalam Bentuk Skema atau Bagan	228-229	*Information Regarding Controlling Shareholders of BUS Up to Individual Owners, Presented in the Form of Schemes or Charts*
1.B.8	Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS		*Profile of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS*
1.B.8.a	Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta Jabatan dan Ringkasan Riwayat Hidup	206-212, 201-203 dan 204-205	*Composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and DPS, as well as Position and Summary of Curriculum Vitae*
1.B.8.b	Foto Terbaru	206-212, 201-203 dan 204-205	*Latest Photo*
1.B.8.c	Usia	206-212, 201-203 dan 204-205	*Age*
1.B.8.d	Kewarganegaraan	206-212, 201-203 dan 204-205	*Citizenship*

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
1.B.8.e	Riwayat Pendidikan	206-212, 201-203 dan 204-205	*Education History*
1.B.8.f	Riwayat Jabatan	206-212, 201-203 dan 204-205	*Position History*
1.B.8.f.i	Nomor dan Tanggal Akta Pengesahan, Persetujuan, dan/atau Pencatatan dari Instansi yang Berwenang atas Penunjukan sebagai Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS	206-212, 201-203 dan 204-205	*Number and Date of Deed of Ratification, Approval, and / or Recording from the Authorized Agency for Appointment as a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, and Member of DPS*
1.B.8.f.ii	Rangkap Jabatan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS (jika ada)	206-212, 201-203 dan 204-205	*Dual Position of Member of Board of Directors, Member of Board of Commissioners, and Member of DPS (if any)*
1.B.8.f.iii	Pengalaman dan Periode Kerja, Baik di Dalam Maupun di Luar BUS	206-212, 201-203 dan 204-205	*Experience and Period of Work, Both Inside and Outside BUS*
1.B.8.g	Pendidikan dan/atau Pelatihan yang telah Diikuti Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS Selama Tahun Buku (jika ada)	206-212, 201-203 dan 204-205	*Education and / or training that has been attended by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of the DPS during the financial year (if any)*
1.B.8.h	Hubungan Keuangan, Kepengurusan, Kepemilikan Saham, dan/atau Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali (Jika Ada) dan Nama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Tersebut	206-212, 201-203 dan 204-205	*Financial, Management, Share Ownership, and / or Family Relationships with Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and / or Controlling Shareholders (If Any) and the Name of the Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, and / or Controlling Shareholders*
1.B.9	Profil Singkat Pejabat Eksekutif, yang Meliputi Susunan, Jabatan, dan Ringkasan Riwayat Hidup	213-222	*Brief Profile of Executive Officers, Including Composition, Position, and Summary of Curriculum Vitae*
1.B.10	Jumlah Pegawai dan Deskripsi Sebaran Tingkat Pendidikan dan Usia Pegawai dalam Tahun Buku	223-227	*Number of Employees and Description of the Distribution of Education Level and Age of Employees in the Financial Year*
1.B.11	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	232	*Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions*
1.B.12	Penghargaan dan/atau Sertifikasi Yang Diterima BUS, Baik yang Berskala Nasional maupun Internasional dalam Tahun Buku Terakhir (jika ada)		*Awards and/or Certifications Received by BUS, Both National and International in the Last Financial Year (if any)*
1.B.12.a	Nama Penghargaan dan/atau Sertifikasi	17-21	*Name of Award and/or Certification*
1.B.12.b	Badan atau Lembaga yang Memberikan Penghargaan dan/atau Sertifikasi	17-21	*Agency or Institution that Provides Awards and / or Certifications*
1.B.12.c	Masa Berlaku Penghargaan dan/atau Sertifikasi (jika ada)	17-21	*Validity Period of Award and / or Certification (if any)*
1.C	**Laporan Direksi**		***Directors' Report***
1.C.1	Strategi dan Kebijakan yang Ditetapkan	64	*Strategy and Policy*
1.C.2	Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan	66, 65-66	*Comparison between Achieved and Targeted Results*
1.C.3	Kendala yang Dihadapi BUS	67-68	*Obstacles Faced by BUS*
1.C.4	Gambaran tentang Prospek Usaha	68	*Overview of Business Prospects*
1.C.5	Penerapan Tata Kelola BUS	70-71	*Implementation of BUS Governance*
1.C.6	Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya (jika ada)	64	*Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and Reasons for Changes (if any)*
1.C.7	Aktivitas Utama	64	*Main Activities*
1.C.8	Teknologi Informasi	69	*Information Technology*
1.C.9	Penyaluran Pembiayaan kepada Nasabah UMKM	66-67	*Financing Distribution to MSME Customers*
1.C.10	Persentase Imbalan Penghimpunan dan Penyaluran Dana	65-66	*Percentage of Fund Raising and Disbursement Fees*
1.C.11	Perkembangan Perekonomian dan Target Pasar	67-68	*Economic Development and Target Market*
1.C.12	Jaringan Kerja dan Mitra Usaha di dalam dan/atau di Luar Negeri	69-70	*Network and Business Partners at Home and/or Abroad*
1.C.13	Jumlah, Jenis, dan Lokasi Jaringan Kantor BUS	69-70	*Number, Type, and Location of BUS Office Network*
1.C.14	Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BUS	72	*Ownership of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders in BUS Business Group*
1.C.15	Perubahan Penting yang Terjadi pada BUS dan Kelompok Usaha BUS dalam Tahun yang Bersangkutan	61-63	*Important Changes that Occurred in BUS and BUS Business Group in the Relevant Year*
1.C.16	Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang	69	*Important Things that are Expected to Happen in the Future*
1.C.17	Sumber Daya Manusia, Meliputi Jumlah, Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72-73	*Human Resources, Including Number, Education Level, Training, and Human Resources Development*
1.D	**Laporan Dewan Komisaris**		***Board of Commissioners Report***
1.D.1	Penilaian terhadap Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan BUS	40-42	*Assessment of the Performance of the Board of Directors Regarding the Management of BUS*

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
1.D.2	Hasil Pengawasan terhadap Implementasi Strategi BUS	42-44	*Results of Supervision of BUS Strategy Implementation*
1.D.3	Tanggapan atas Prospek Usaha BUS yang Disusun oleh Direksi	44-45	*Response to BUS Business Prospects Prepared by the Board of Directors*
1.D.4	Tanggapan atas Penerapan Tata Kelola BUS	45-48	*Response to BUS Governance Implementation*
1.D.5	Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya (jika ada)	49	*Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Reasons for Changes (if any)*
1.D.6	Frekuensi dan Mekanisme Pemberian Nasihat kepada Anggota Direksi	44	*Frequency and Mechanism of Providing Advice to Members of the Board of Directors*
2	**Informasi Kinerja Keuangan**		***Financial Performance Information***
2.A	Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha antara lain Segmen Konsumer, Segmen Ritel, atau Segmen Korporasi Paling Sedikit Mengenai	265-267	*Review of Performance Per Business Segment, Among Others Consumer Segment, Retail Segment, or Corporate Segment At Least Regarding*
2.A.1	Pendapatan	266-267	*Revenue*
2.A.1	Profitabilitas	266-267	*Profitability*
2.B.	Tinjauan Kinerja Keuangan yang Mencakup Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya, Penjelasan mengenai Penyebab Adanya Perubahan dan Dampak Perubahan Tersebut	267-290	*Review of Financial Performance Including Comparison of Financial Performance of the Current Year with the Previous Year, Explanation of the Causes of Changes and the Impact of Such Changes*
2.B.1	Penyaluran Dana (Investasi dan Pembiayaan) dan Total Aset	267-269, 270-281	*Fund Disbursement (Investment and Financing) and Total Assets*
2.B.2	Dana Pihak Ketiga dan Sumber Pendanaan Lain	267, 278-280	*Third Party Funds and Other Funding Sources*
2.B.3	Ekuitas	267, 282-284	*Equity*
2.B.4	Pendapatan, Beban, Laba/Rugi, Penghasilan Komprehensif Lain, dan Total Laba/Rugi Komprehensif	285-288	*Revenue, Expenses, Profit/Loss, Other Comprehensive Income, and Total Comprehensive Profit/Loss*
2.B.5	Arus Kas	288-290	*Cash Flow*
2.C	Analisis Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan	294	*Productive Asset Quality and Financial Ratio Analysis*
2.D	Struktur Permodalan	304-305	*Capital Structure*
2.E	Informasi atau Fakta Material yang terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik (jika ada)	367	*Material Information or Facts that Occurred After the Date of the Public Accountant's Report (if any)*
2.F	Aspek Pemasaran Produk dan Aktivitas BUS, Paling Sedikit mengenai Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar;	"262-264 264-265"	*Marketing Aspects of BUS Products and Activities, at least regarding Marketing Strategy and Market Share;*
2.G	Uraian mengenai Dividen selama 2 (Dua) Tahun Buku Terakhir (jika ada)	302	*Description of Dividends for the Last 2 (two) Financial Years (if any)*
2.G.1	Kebijakan Dividen	302	*Dividend Policy*
2.G.2	Tanggal Pembayaran Dividen Kas dan/atau Tanggal Distribusi Dividen Nonkas	302	*Cash Dividend Payment Date and/or Non-cash Dividend Distribution Date*
2.G.3	Jumlah Dividen per Saham, baik Berupa Kas maupun Nonkas	302	*Amount of Dividend Per Share, Both Cash and Non-cash*
2.G.4	Jumlah Pembayaran Dividen per Tahun	302	*Total Dividend Payment Per Year*
2.H	Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap BUS dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan (jika ada);	367	*Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant impact on BUS and their impact on financial statements (if any);*
2.I	Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan, dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan (jika ada)	353	*Changes in Accounting Policies, Reasons and Impacts on Financial Statements (if any)*
2.J	Laporan Distribusi Bagi Hasil	460	*Profit Sharing Distribution Report*
2.K	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf	361	*Report on Sources and Distributions of Zakat and Waqf Funds*
2.L	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	362	*Report on Sources and Uses of Benevolent Funds*
3	**Eksposur Risiko dan Permodalan**	**306-349**	***Risk Exposure and Capital***
4	**Tata Kelola**		***Governance***
4.A	Informasi Tata Kelola	388-625	*Governance Information*
4.B	Laporan Keberlanjutan		*Sustainability Report*
4.B.1	Laporan Keberlanjutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dapat Berupa Laporan Tersendiri yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Ini.	√	*Sustainability Report in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. May be in the form of a stand-alone report that is inseparable from this report.*
4. B.2	Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUS desuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat Berupa Laporan Tersendiri yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Ini.		*BUS Social and Environmental Responsibility Report in accordance with the Provisions of Laws and Regulations. Can be in the form of a separate report that is inseparable from this report.*

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
5.	**Laporan Keuangan yang Telah Diaudit**		***Audited Financial Statements***
5.A	Laporan Posisi Keuangan	653-654	*Statement of Financial Position*
5.B	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	655-657	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
5.C	Laporan Perubahan Ekuitas	658	*Statement of Changes in Equity*
5.D	Laporan Arus Kas	659-660	*Cash Flow Statement*
5.E	Catatan atas Laporan Keuangan, Termasuk Informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi	"664-803 761-762"	*Notes to Financial Statements, Including Information on Commitments and Contingencies*
6	**Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS (jika relevan)**		***Information Related to BUS Business Group (if relevant)***
6.A	Struktur Kelompok Usaha BUS	tidak relevan	*BUS Group Structure*
6.A.1	Struktur Kelompok Usaha BUS, yang antara lain Terdiri dari BUS, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk, Sampai Dengan *Ultimate Shareholder*	tidak relevan	*BUS Business Group Structure, which Among Others Consists of BUS, Subsidiaries, Related Companies, Parent Entities Up to Ultimate Shareholder*
6.A.2	Struktur Keterkaitan Kepengurusan dalam Kelompok Usaha BUS	tidak relevan	*Management Linkage Structure in BUS Business Group*
6.A.3	Pemegang Saham yang Bertindak atas Nama Pemegang Saham Lain (*Shareholders Acting in Concert*)	tidak relevan	*Shareholders Acting on behalf of Other Shareholders (Shareholders Acting in Concert)*
6.B	Transaksi antara BUS dengan Pihak Berelasi dalam Kelompok Usaha BUS	tidak relevan	*Transactions between BUS and Related Parties in BUS Business Group*
6.B.1	Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi, baik yang Dilakukan BUS maupun yang Dilakukan oleh setiap Entitas di dalam Kelompok Usaha BUS di Bidang Keuangan	tidak relevan	*Information on Transactions with Related Parties, Both Conducted by BUS and Conducted by Each Entity in the BUS Business Group in the Financial Field*
6.B.2	Pihak Berelasi adalah Pihak-pihak sebagaimana Diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan	tidak relevan	*Related Parties Are Parties as Regulated in Financial Accounting Standards*
6.B.3	Jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi	tidak relevan	*Types of Transactions with Related Parties*
6.B.3.a	Kepemilikan Silang (*Cross Shareholding*)	tidak relevan	*Cross Shareholding*
6.B.3.b	Transaksi dari Suatu Kelompok Usaha yang Bertindak untuk Kepentingan Kelompok Usaha yang Lain	tidak relevan	*Transactions of a Business Group Acting in the Interest of Another Business Group*
6.B.3.c	Pengelolaan Likuiditas Jangka Pendek dalam Kelompok Usaha	tidak relevan	*Management of Short-Term Liquidity in the Business Group*
6.B.3.d	Penyediaan Dana yang Diberikan atau Diterima oleh Entitas Lain dalam Satu Kelompok Usaha	tidak relevan	*Provision of Funds Given or Received by Other Entities in the Group*
6.B.3.e	Eksposur kepada Pemegang Saham Mayoritas antara lain dalam Bentuk Pinjaman, Komitmen, dan Kontinjensi	tidak relevan	*Exposure to Majority Shareholders Among Others in the Form of Loans, Commitments, and Contingencies*
6.B.3.f	Pembelian, Penjualan, dan/atau Penyewaan Aset dengan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha, termasuk yang Dilakukan dengan *Repurchase Agreement* (Repo)	tidak relevan	*Purchase, Sale, and/or Lease of Assets with Other Entities in a Business Group, Including those Conducted by Repurchase Agreement (Repo)*
6.C	Transaksi dengan Pihak Berelasi yang Dilakukan oleh setiap Entitas dalam Kelompok Usaha BUS di Bidang Keuangan	tidak relevan	*Transactions with Related Parties Performed by Each Entity in the BUS Business Group in the Financial Sector*
6.D	Penyediaan Dana, Komitmen, atau Fasilitas Lain yang dapat Dipersamakan dengan itu dari setiap Entitas yang Berada dalam Satu Kelompok Usaha dengan BUS kepada Nasabah dan/atau Pihak yang Telah Memperoleh Penyaluran Dana dari BUS	tidak relevan	*Provision of Funds, Commitments, or Other Facilities that Can be Equated with tu from Each Entity in a Business Group with BUS to Customers and / or Parties who have Received Fund Disbursement from BUS*
6.E	Adanya Larangan, Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan Lain untuk Melakukan Transfer Dana atau untuk Pemenuhan Modal yang Dipersyaratkan oleh Otoritas (*Regulatory Capital*) antara BUS dengan Entitas Lain dalam Satu Kelompok Usaha	tidak relevan	*Prohibitions, Restrictions, and / or Other Significant Obstacles to Transfer Funds or to Fulfill the Capital Required by the Authority (Regulatory Capital) between BUS and Other Entities in One Business Group*
6.F	Nama dan Alamat Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama dimana BUS Memiliki Pengendalian Bersama Entitas, Beserta Persentase Kepemilikan Saham, Bidang Usaha, Total Aset, dan Status Operasi BUS tersebut (jika ada)	tidak relevan	*Name and Address of Subsidiaries, Associated Companies, Joint Venture Companies where BUS has Joint Control of Entities, Along with Percentage of Share Ownership, Line of Business, Total Assets, and Operating Status of the BUS (if any)*

INDEKS OJK (SESUAI SEOJK NOMOR 16/SEOJK.4/2021)

OJK Index (According to SEOJK Number 16/SEOJK.4/2021)

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
A	**Ikhtisar Data Keuangan Penting**		***Key Financial Data Overview***
A.1	Pendapatan/Penjualan	13	*Sales revenue*
A.2	Laba Bruto	14	*Gross profit*
A.3	Laba (Rugi)	14	*Profit and loss)*
A.4	Jumlah Laba (Rugi) yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non-Pengendali	NA	*Total Profit (Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests*
A.5	Total Laba (Rugi) Komprehensif	14	*Total Comprehensive Profit (Loss)*
A.6	Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non-Pengendali	NA	*Total Comprehensive Profit (Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity and Non-Controlling Interests*
A.7	Laba (Rugi) per Saham	14	*Earnings (Loss) Per Share*
A.8	Jumlah Aset	12	*Total assets*
A.9	Jumlah Liabilitas	13	*Total Liabilities*
A.10	Jumlah Ekuitas	13	*Total Equity*
A.11	Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	15	*Ratio of Profit (Loss) to Total Assets*
A.12	Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	15	*Profit (Loss) Ratio to Equity*
A.13	Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan/Penjualan	15	*Ratio of Profit (Loss) to Revenue/Sales*
A.14	Rasio Lancar	15	*Current Ratio*
A.15	Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	15	*Liability To Equity Ratio*
A.16	Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Asset	15	*Ratio of Liabilities to Total Assets*
A.17	Informasi dan Rasio Keuangan lainnya yang Relevan dengan Perusahaan dan Jenis Industrinya	15-16	*Information And Other Financial Ratios Relevant To The Company And The Type Of Industry*
B	**Informasi Saham**		***Stock Information***
B.1	Saham yang telah diterbitkan	16	*Issued shares*
B.1.a	Jumlah Saham yang Beredar	16	*Number of Outstanding Shares*
B.1.b	Kapitalisasi Pasar Berdasarkan Harga pada Bursa Efek Tempat Saham Dicatatkan	16	*Market Capitalization Based on Prices on the Stock Exchange where the Shares are Listed*
B.1.c	Harga Saham Tertinggi, Terendah, dan Penutupan Berdasarkan Harga pada Bursa Efek Tempat Saham Dicatatkan	16	*The highest, lowest and closing share prices are based on prices on the stock exchange where the shares are listed*
B.1.d	Volume Perdagangan pada Bursa Efek Tempat Saham Dicatatkan	16	*Trading Volume on the Stock Exchange Where the Shares are Listed*
B.2	Aksi Korporasi yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan pada Saham	16	*Corporate Actions That Cause Changes in Shares*
B.2.a	Tanggal Pelaksanaan Aksi Korporasi	16	*Corporate Action Implementation Date*
B.2.b	Rasio Pemecahan Saham (*Stock Split*), Penggabungan Saham (*Reverse Stock*), Dividen Saham, Saham Bonus, Jumlah Efek Konversi yang Diterbitkan, dan Perubahan Nilai Nominal Saham	16	*Stock Split Ratio, Share Merger (Reverse Stock), Stock Dividends, Bonus Shares, Amount of Convertible Securities Issued, And Changes in Shares Nominal Value*
B.2.c	Jumlah Saham Beredar Sebelum dan Sesudah Aksi Korporasi	16	*Number of Outstanding Shares Before and After Corporate Actions*
B.2.d	Jumlah Efek Konversi yang Dilaksanakan	16	*The Number of Effects of Executed Conversions*
B.2.e	Harga Saham Sebelum dan Sesudah Aksi Korporasi	16	*Stock Prices Before And After Corporate Actions*
B.3	Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Pembatalan Pencatatan Saham (*Delisting*) Dalam Tahun Buku	16	*Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Cancellation of Share Listing (Delisting) in the Fiscal Year*
B.4	Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) sebagaimana Dimaksud pada Angka 3 dan/atau Proses Pembatalan Pencatatan Saham (*Delisting*) masih Berlangsung hingga Akhir Periode Laporan Tahunan	16	*Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) As Referred to in Number 3 And/or Share Registration Cancellation Process (Delisting) Still Ongoing Until the End of the Annual Report Period*
C	**Laporan Direksi**		***Directors Report***
C.1	Kinerja Perusahaan	65-66	*Company performance*
C.1.a	Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan	64	*Company Strategy And Strategic Policy*
C.1.b	Peranan Direksi Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan	64	*The Role of the Board of Directors in Formulating the Company's Strategy and Strategic Policy*
C.1.c	Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi Perusahaan	64	*The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of corporate strategy*
C.1.d	Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan Perusahaan	66	*Comparison Between Results Achieved With Targeted Companies*
C.1.e	Kendala yang Dihadapi Perusahaan	67-68	*Obstacles Faced by Companies*

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
C.2	Gambaran yang Dihadapi Perusahaan	67-68	*Description of the Company*
C.3	Penerapan Tata Kelola Perusahaan	70-71	*Implementation of Corporate Governance*
D	**Laporan Dewan Komisaris**		***Report of the Board of Commissioners***
D.1	Penilaian terhadap Kinerja Direksi mengenai Pengelolaan Perusahaan, termasuk Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perusahaan yang Dilakukan oleh Direksi	40-44	*Assessment of the Board of Directors' Performance Regarding Company Management, Including the Board of Commissioners' Supervision in the Formulation and Implementation of Corporate Strategy Carried out by the Board of Directors*
D.2	Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan yang Disusun oleh Direksi	44-45	*Views on the Company's Business Prospects Prepared by the Board of Directors*
D.3	Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan	45-49	*Views on the Implementation of Corporate Governance*
E	**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan**	**71**	***Statement of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the Annual Report***
F	**Profil Perusahaan**		*Company profile*
F.1	Nama Perusahaan	165	*Company name*
F.2	Akses Terhadap Perusahaan	165, 240	*Access to the Company*
F.3	Riwayat Singkat Perusahaan	166-168	*Brief Company History*
F.4	Visi dan Misi Perusahaan serta Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) atau Nilai-nilai Perusahaan	194-197	*Company Vision And Mission And Corporate Culture (Corporate Culture) Or Company Values*
F.5	Kegiatan Usaha menurut Anggaran Dasar Terakhir, Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun Buku, serta Jenis Barang dan/atau Jasa yang Dihasilkan	170-171	*Business Activities According to the Latest Articles of Association, Business Activities Carried Out in the Fiscal Year, As well as Types of Goods and/or Services Produced*
F.6	Wilayah Operasional Perusahaan	233-238, 239	*Company Operational Area*
F.7	Struktur Organisasi Perusahaan	198-199	*Organizational structure of the company*
F.8	Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri	241	*List of Industry Association Memberships*
F.9	Profil Direksi	206-212	*Board of Directors Profile*
F.10	Profil Dewan Komisaris	201-203	*Profile of the Board of Commissioners*
F.11	Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi setelah Tahun Buku Berakhir	201-203, 206-212	*Changes in Composition of Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners that Occur after the Financial Year Ends*
F.12	Jumlah Karyawan menurut Jenis Kelamin, Jabatan, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Status Ketenagakerjaan (Tetap/Kontrak) dalam Tahun Buku	223-224	*Number of Employees by Gender, Position, Age, Education Level, and Employment Status (Permanent/Contract) in the Fiscal Year*
F.13	Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan pada Awal dan Akhir Tahun Buku	228	*Name of Shareholders and Percentage of Ownership at the Beginning and End of the Fiscal Year*
F.14	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung atas Saham Perusahaan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Awal dan Akhir Tahun Buku	229	*Percentage of Indirect Ownership of Company Shares Members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the Beginning and End of the Fiscal Year*
F.15	Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan per Akhir Tahun Buku	165, 228	*Number of Shareholders and Percentage of Ownership at the End of the Fiscal Year*
F.16	Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perusahaan	229, 409	*Information Regarding the Major Shareholders and Control of the Company*
F.17	Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama dimana Perusahaan Memiliki Pengendalian Bersama Entitas	230	*Name of Subsidiaries, Associated Companies, Joint Venture Companies Where the Company Has Joint Control of the Entity*
F.18	Kronologis Pencatatan Saham	230-231	*Share Listing Chronology*
F.19	Informasi Pencatatan Efek Lainnya	231	*Other Securities Listing Information*
F.20	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	232, 587-589	*Information on the Use of Public Accountant Services (AP) and Public Accounting Firms (KAP)*
F.21	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal	232	*Names and Addresses of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions*
G	**Analisis Dan Pembahasan Manajemen**		***Management Discussion and Analysis***
G.1	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha sesuai dengan Jenis Industri Perusahaan	265-267	*Operational Review Per Business Segment According to the Company's Industry Type*
G.1.a	Produksi yang Meliputi Proses, Kapasitas, dan Perkembangannya	265-266	*Production, Which Includes Process, Capacity, And Development*
G.1.b	Pendapatan/Penjualan	266-267	*Sales revenue*
G.1.c	Profitabilitas	266-267	*Profitability*
G.2	Kinerja Keuangan Komprehensif	267-290	*Comprehensive Financial Performance*

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
G.2.a	Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Total Aset	267-269, 270-281	*Current Assets, Non-Current Assets, And Total Assets*
G.2.b	Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang, dan Total Liabilitas	278-282	*Short Term Liabilities, Long Term Liabilities, And Total Liabilities*
G.2.c	Ekuitas	282-284	*Equity*
G.2.d	Pendapatan/Penjualan, Beban, Laba (Rugi), Penghasilan Komprehensif Lain, dan Total Laba (Rugi) Komprehensif	285-288	*Income/Sales, Expenses, Profit (Loss), Other Comprehensive Income, And Total Comprehensive Profit (Loss)*
G.2.e	Arus Kas	288-290	*Cash flow*
G.3	Kemampuan Membayar Utang atau Kewajiban Dengan Menyajikan Perhitungan Rasio yang Relevan	293	*Ability to Pay Debt Or Obligations By Presenting Relevant Ratio Calculations*
G.4	Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan Dengan Menyajikan Perhitungan Rasio yang Relevan	294	*Receivables Collectibility Level of Companies Presenting Relevant Ratio Calculations*
G.5	Struktur Modal (*Capital Structure*) dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal	304-305	*Capital Structure and Management Policy on Capital Structure*
G.6	Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal	351	*Material Commitments for Capital Goods Investment*
G.6.a	Tujuan dari Ikatan	351	*The Purpose of the Bond*
G.6.b	Sumber Dana yang Diharapkan untuk Memenuhi Ikatan	351	*Expected Source of Funds To Fulfill the Commitment*
G.6.c	Mata Uang yang Menjadi Denominasi	351	*Currency Becomes Denominated*
G.6.d	Langkah yang Direncanakan Perusahaan untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing yang Terkait	351	*Steps Planned by The Company To Protect Risks From Related Foreign Currency Positions*
G.7	Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Dalam Tahun Buku Terakhir	351	*Capital Goods Investment Realized in the Last Fiscal Year*
G.7.a	Jenis Investasi Barang Modal	351	*Types of Capital Goods Investment*
G.7.b	Tujuan Investasi Barang Modal	351	*Investment Objectives of Capital Goods*
G.7.c	Nilai Investas Barang Modal yang Dikeluarkan	351	*Investment Value of Issued Capital Goods*
G.8	Informasi Dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	367	*Material Information and Facts That Happened After the Date of the Accountant's Report*
G.9	Prospek Usaha dari Perusahaan Dikaitkan dengan Kondisi Industri, Ekonomi Secara Umum dan Pasar Internasioal	356-369	*The Business Prospects Of The Company Are Associated With Industrial Conditions, General Economy And International Markets*
G.10	Perbandingan Antara Target/Proyeksi pada Awal Tahun Buku dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi)	296-299	*Comparison between Targets/Projections at the Beginning of the Fiscal Year with Results Achieved (Realization)*
G.10.a	Pendapatan/Penjualan	296	*Sales revenue*
G.10.b	Laba (Rugi)	296	*Profit and loss)*
G.10.c	Struktur Modal	296	*Capital Structure*
G.11	Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Perusahaan untuk 1 (Satu) Tahun Mendatang	299-301	*Targets/Projections to be Achieved by the Company for the Next 1 (One) Year*
G.11.a	Pendapatan/Penjualan	299-300	*Revenue/Sales*
G.11.b	Laba (Rugi)	299-300	*Profit and loss)*
G.11.c	Struktur Modal	299-300	*Capital Structure*
G.11.d	Kebijakan Dividen	302	*Dividend Policy*
G.12	Aspek Pemasaran Atas Barang dan/atau Jasa Perusahaan	262-265	*Marketing Aspects of the Company's Goods and/or Services*
G.13	Dividen	302	*Dividend*
G.14	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	353	*Realization of Use of Proceeds from Public Offering*
G.15	Informasi Material	363-366	*Material Information*
G.16	Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan	367	*Changes in Provisions of Laws and Regulations That Have a Significant Influence on the Company and Their Impact on the Financial Statements*
G.17	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan	353	*Changes in Accounting Policies and Their Impact on Financial Statements*
H	**Tata Kelola Perusahaan**		***Corporate Governance***
H.1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	408-410	*General Meeting of Shareholders (GMS)*
H.1.a	Keputusan RUPS	413-414, 417-418, dan 421	*GMS decision*
H.1.b	Pihak Independent dalam Pelaksanaan RUPS	411-412, 414-416, dan 418	*Independent Party in the Implementation of the GMS*
H.2	Direksi		*Directors*
H.2.a	Tugas dan Tanggungjawab	475-476	*Duties and responsibilities*
H.2.b	Pedoman atau Piagam (*Charter*) Direksi	474-475	*Guidelines or Charter (Charter) of the Board of Directors*
H.2.c	Rapat Direksi	483-499	*Board of Directors meeting*

Indeks	Keterangan	Halaman	*Description*
H.2.d	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi	482-483	*Training and/or Competence Improvement for Members of the Board of Directors*
H.2.e	Penilaian Direksi terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Direksi	499-501	*The Board of Directors' Assessment of the Performance of Committees Supporting the Implementation of the Board of Directors' Duties*
H.3	Dewan Komisaris		*board of Commissioners*
H.3.a	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	429-430	*Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*
H.3.b	Pedoman Atau Piagam (*Charter*) Dewan Komisaris	428-429	*Guidelines or Charter (Charter) of the Board of Commissioners*
H.3.c	Rapat Dewan Komisaris	438-446	*Board of Commissioners meeting*
H.3.d	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	436-438	*Training and/or Competence Improvement for Members of the Board of Commissioners*
H.3.e	Penilaian Kinerja Direksi Dan Dewan Komisaris	448-450	*Assessment of the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners*
H.3.f	Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Komisais	450-451	*The Board of Commissioners' Assessment of the Performance of the Committees Supporting the Implementation of the Duties of the Board of Commissioners*
H.4	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris		*Nomination and Remuneration for Directors and Board of Commissioners*
H.4.a	Prosedur Nominasi	519	*Nomination Procedure*
H.4.b	Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	520-522	*Procedures and Implementation of Remuneration for Directors and Board of Commissioners*
H.5	Dewan Pengawas Syariah	422-428	*Sharia Supervisory Board*
H.6	Komite Audit	451-460	*Audit Committee*
H.7	Komite Remunerasi dan Nominasi	468-474	*Remuneration and Nomination Committee*
H.8	Komite Lain yang Dimiliki Perusahaan dalam Rangka Mendukung Fungsi dan Tugas Direksi dan/atau Komite yang Mendukung Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris	460-468	*Other Committees Owned by the Company In Order to Support the Functions and Duties of the Board of Directors and/or Committees That Support the Functions and Duties of the Board of Commissioners*
H.9	Sekretaris Perusahaan	501-506	*company secretary*
H.10	Unit Audit Internal	531-544	*Internal Audit Unit*
H.11	Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*)	545-550	*Internal Control System (Internal Control)*
H.12	Sistem Manajemen Risiko	561-586	*Risk Management System*
H.13	Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anngota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	598	*Legal Cases With Material Impacts Faced By The Company, Subsidiaries, Members Of The Board Of Directors And Members Of The Board Of Commissioners*
H.14	Sanksi yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya Pada Tahun Buku	624	*Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other Authorities in the Financial Year*
H.15	Kode Etik Perusahaan	590-597	*Company Code of Ethics*
H.16	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan yang Dimiliki oleh Perusahaan		*Policy of Provision of Performance-Based Long-Term Compensation to Management and/or Employees Owned by the Company*
H.17	Kebijakan Pengungkapan Informasi	616	*Information Disclosure Policy*
H.18	Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Perusahaan		*Whistleblowing System in the Company*
H.18.a	Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran	599-600	*How to Submit a Violation Report*
H.18.b	Perlindungan bagi Pelapor	600	*Protection for Reporters*
H.18.c	Penanganan Pengaduan	601	*The handling of complaints*
H.18.d	Pihak yang Mengelola Pengaduan	600	*Party Managing Complaints*
H.18.e	Hasil dari Penanganan Pengaduan	602	*Results of Complaint Handling*
H.19	Kebijakan Anti Korupsi		*Anti-Corruption Policy*
H.19.a	Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi	614-615	*Programs and Procedures Performed in Addressing Corruption Practices, Kickbacks, Fraud, Bribes and/or Gratuities*
H.19.b	Pelatihan/Sosialisai Anti Korupsi kepada Karyawan Perusahaan	615	*Anti-Corruption Training/Socialization to Company Employees*
H.20	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan	-	*Implementation of Corporate Governance Guidelines*
I	**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**	**626-643**	***Corporate Social and Environmental Responsibility***
J	**Laporan Keuangan Tahunan Auditan**	**644**	***Audited Annual Financial Report***

brksyariah
berkah untuk semua

PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu BRK Syariah,
Jl. Jenderal Sudirman No. 462
Pekanbaru 28116

Telp. : 0761-47070
Fax. : 0761-42389

brksyariah.co.id

BRK Syariah

Call Center
1500470